SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa yang disebabkan oleh Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penyesuaian terhadap postur dan rincian anggaran pendapatan belanja negara Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020;

e. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4/DPD RI/I/2021-2022 tanggal 2 September 2021; dan

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Pasal 2

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
   a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020;
   c. Neraca per 31 Desember 2020;
   d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020;
   e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2020;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2020; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

(3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri mengenai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

(4) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. realisasi . . .

a. realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.647.783.342.188.986,00 (satu kuadriliun enam ratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang berarti 96,93% (sembilan puluh enam koma sembilan tiga persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.699.948.459.678.000,00 (satu kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

b. realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075,00 (dua kuadriliun lima ratus sembilan puluh lima triliun empat ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) yang berarti 94,75% (sembilan puluh empat koma tujuh lima persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.739.165.851.403.000,00 (dua kuadriliun tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);

c. berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp947.697.754.987.089,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang berarti 91,19% (sembilan puluh satu koma satu sembilan persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.039.217.391.725.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh sembilan triliun dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

d. Pembiayaan . . .

d. Pembiayaan untuk menutup realisasi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebesar Rp1.193.293.831.252.057,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh tiga triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) yang berarti 114,83% (seratus empat belas koma delapan tiga persen) dari anggaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.039.217.391.725.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh sembilan triliun dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

e. berdasarkan realisasi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp245.596.076.264.968,00 (dua ratus empat puluh lima triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

f. realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam serta pendapatan Badan Layanan Umum dari Kerja Sama Operasi yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp212.698.374.791.778,00 (dua ratus dua belas triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp70.640.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun enam ratus empat puluh miliar rupiah);

c. Sisa . . .

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp245.596.076.264.968,00 (dua ratus empat puluh lima triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

d. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebesar Rp387.654.451.056.746,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

e. penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp464.630.274.380,00 (empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

f. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp388.119.081.331.126,00 (tiga ratus delapan puluh delapan triliun seratus sembilan belas miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah Aset sebesar Rp11.098.674.484.349.478,00 (sebelas kuadriliun sembilan puluh delapan triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

b. jumlah . . .

b. jumlah Kewajiban sebesar Rp6.625.475.985.590.998,00 (enam kuadriliun enam ratus dua puluh lima triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

c. jumlah Ekuitas sebesar Rp4.473.198.498.758.480,00 (empat kuadriliun empat ratus tujuh puluh tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.783.192.349.751.058,00 (satu kuadriliun tujuh ratus delapan puluh tiga triliun seratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah);

b. Beban Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.601.114.046.104.357,00 (dua kuadriliun enam ratus satu triliun seratus empat belas miliar empat puluh enam juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

c. berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp817.921.696.353.299,00 (delapan ratus tujuh belas triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

d. Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sebesar Rp54.696.567.885.936,00 (lima puluh empat triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

e. tidak terdapat Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa;

f. berdasarkan . . .

f. berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp872.618.264.239.235,00 (delapan ratus tujuh puluh dua triliun enam ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp757.060.086.481.976,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh triliun enam puluh miliar delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp298.626.891.678.470,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun enam ratus dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.301.283.054.425.414,00 (satu kuadriliun tiga ratus satu triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);

d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp25.057.121.769.181,00 (dua puluh lima triliun lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.127.312.881.160.402,00 (lima kuadriliun seratus dua puluh tujuh triliun tiga ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu empat ratus dua rupiah);

b. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar Rp872.618.264.239.235,00 (delapan ratus tujuh puluh dua triliun enam ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

c. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp218.927.520.219.445,00 (dua ratus delapan belas triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

d. Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp423.638.382.132,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

e. berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan Transaksi Antar Entitas sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.473.198.498.758.480,00 (empat kuadriliun empat ratus tujuh puluh tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas; dan
6. Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 11

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pasal 12

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 233

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya . . .

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di masa Pandemi COVID-19, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rincian anggaran yang digunakan sebagai pembanding realisasi merupakan rincian yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2020. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan . . .

Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2020. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2020, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2020. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-234/MK.05/2021 tanggal 26 Maret 2021. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dengan status belum diperiksa (*Unaudited*) oleh Menteri Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan adalah sesuai dengan surat Presiden kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor R-08/Pres/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Pemerintah.

Selanjutnya . . .

Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 86/S/I/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 87/S/I/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, dan kepada Presiden melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 88/S/I/05/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, di dalam Undang-Undang ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 termasuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara terkait penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi bersih dari Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.
Yang dimaksud dengan "badan lainnya" adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendukung Kementerian/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas neto atas realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam" adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, *under lifting*, pajak daerah, dan *fee* kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Yang dimaksud dengan "asas neto atas pendapatan Badan Layanan Umum dari Kerja Sama Operasi" adalah pendapatan Badan Layanan Umum diakui sebagai pendapatan negara dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra Kerja Sama Operasi.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "saldo anggaran lebih" adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aset" adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendapatan operasional" adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "beban operasional" adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "defisit dari kegiatan non operasional" adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi-transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "surplus/defisit dari pos luar biasa" adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aktivitas operasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "aktivitas investasi" adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aktivitas pendanaan" adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aktivitas transitoris" adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transaksi antar entitas" adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, antar Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, maupun antara Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan Bendahara Umum Negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Opini Wajar Tanpa Pengecualian disertai dengan beberapa temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

1. Pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal Rp21,57 triliun dan USD8,26 juta serta kewajiban negara minimal Rp16,59 Triliun sesuai basis akuntansi akrual, serta saldo piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak Pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
3. Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 minimal Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan.
4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 43 (empat puluh tiga) Kementerian/Lembaga minimal Rp8,03 triliun, serta pengelolaan piutang pada 21 (dua puluh satu) Kementerian/Lembaga sebesar Rp660,8 miliar belum sesuai ketentuan.
5. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar Program PC-PEN pada 80 (delapan puluh) Kementerian/Lembaga minimal Rp15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
6. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja Program PC-PEN sebesar Rp9,00 triliun pada sepuluh Kementerian/Lembaga tidak memadai.
7. Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun.
8. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan belum didukung dengan pengendalian yang memadai.
9. Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan sebesar Rp1,04 triliun tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan program/kegiatan dan ketersediaan dana penerima manfaat akhir secara memadai.
10. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.

11. Realisasi . . .

11. Realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) berupa Dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi sebesar Rp8,99 triliun dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan karena pengaturan terkait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan.
12. Saldo Kas terlambat/belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp536,51 miliar, Kas tidak didukung dengan keberadaan fisik Kas sebesar Rp81,46 miliar, pengelolaan Kas dan rekening tidak tertib sebesar Rp24,63 miliar pada 31 (tiga puluh satu) Kementerian/Lembaga.
13. Penatausahaan piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai.
14. Penatausahaan *underlying* Jaminan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai.
15. Pengelolaan persediaan sebesar Rp4,59 triliun pada 39 (tiga puluh sembilan) Kementerian/Lembaga tidak memadai.
16. Skema pemenuhan kewajiban pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan dampak yang diharapkan terhadap perbaikan kondisi keuangan PT AJS belum dikelola secara memadai.
17. Hak pemerintah dari kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara Tahun Anggaran 2009 s.d. Tahun Anggaran 2011 kepada PT TPPI sebesar Rp1,81 triliun diakui di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berdasarkan wanprestasi atas perjanjian dan putusan *inkracht* pengadilan Tipikor serta belum jelas penyelesaiannya.
18. Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 sebagai sisa dana Surat Berharga Negara (SBN) PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang dilanjutkan di Tahun 2021.
19. Penatausahaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berupa tanah dan harta barang modal belum memadai.
20. Pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap belum memadai yang berdampak terhadap kevalidan dan keakuratan data.
21. Pengendalian atas pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada 56 (lima puluh enam) Kementerian/Lembaga belum memadai.

22. Direktorat . . .

22. Direktorat Jenderal Pajak belum memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebesar Rp2,78 triliun dan proses penerbitan SKPKPP belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang diantaranya merupakan pembayaran ganda kepada Wajib Pajak sebesar Rp11,22 miliar.
23. Terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional oleh badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
24. Penyelesaian utang piutang kompensasi dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja, dan kebijakan pengakuan klasifikasi utang kompensasi dan subsidi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum jelas.
25. Kebijakan penyajian hak dan kewajiban pemerintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan data putusan hukum belum ditatausahakan secara memadai.
26. Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2020 yang telah diaudit dan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus untuk Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tersebut, 84 (delapan puluh empat) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian", Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian", dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian".

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya merupakan bagian dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Rincian . . .

Rincian opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WTP	WTP
5.	Kejaksaan Agung	WTP	WTP
6.	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP
8.	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
11.	Kementerian Keuangan	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WTP	WTP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP
17.	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP
18.	Kementerian Agama	WTP	WTP

19. Kementerian . . .

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020
19.	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP
20.	Kementerian Sosial	WTP	WDP
21.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WDP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif[1)]	WTP	WTP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset, Teknologi/BRIN[1)]	WTP	WTP
30.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP
31.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP
32.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP

33. Badan . . .

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020
33.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
34.	Badan Siber dan Sandi Negara	WDP	WTP
35.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
36.	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP
37.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
38.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP
39.	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP
40.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP
41.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP	WTP
42.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP	WTP
43.	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP
44.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
45.	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP
46.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	WTP	WTP
47.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP

48. Komisi . . .

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020
48.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
49.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	WTP	WTP
50.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP
51.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
52.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP
53.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP
54.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP
55.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP
56.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP
57.	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP
58.	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP
59.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
60.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
61.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP
62.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP
63.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP
64.	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP
65.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	WTP	WTP

66. Komisi . . .

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020
66.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
67.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
68.	Komisi Yudisial	WTP	WTP
69.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP
70.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP
71.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP
72.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP
73.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP
74.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP
75.	Ombudsman RI	WTP	WTP
76.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP
77.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP
78.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP
79.	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP
80.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP
81.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP

82. Lembaga . . .

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020
82.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP
83.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP
84.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi[1)]	WTP	WTP
85.	Badan Keamanan Laut	TMP	WTP
86.	Badan Ekonomi Kreatif	WTP	[2)]
87.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	WTP	WTP
88.	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP

Keterangan:

1) Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019

2) Kementerian/Lembaga dilikuidasi mulai Tahun 2020

Pasal 12

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Laporan Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal, dan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain:

a. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, khususnya yang belum mendapat opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian";

b. meningkatkan . . .

b. meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga;

c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

d. menyebarluaskan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

e. memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya;

f. meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran;

g. mendorong dan melakukan pembinaan secara intensif dan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terutama kepada Kementerian/Lembaga yang belum mendapat opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian" sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

h. meningkatkan pengendalian subsidi dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai/tepat sasaran;

i. meningkatkan kualitas belanja Pemerintah yang berorientasi pada output, outcome, dan result dengan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diwujudkan sekurang-kurangnya pada kemudahan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos, rumah layak huni, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, dan pekerja sektor pangan lainnya;

j. Pemerintah dalam menangani kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, atau badan lainnya agar meningkatkan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan daya saing, serta menguasai pasar dalam negeri;

k. Pemerintah . . .

k. Pemerintah dalam menangani kekayaan negara yang dipisahkan; dan dikelola oleh BUMN, atau badan lainnya, agar menjaga aset yang bersumber dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta aset bumi, air, dan kekayaan di dalamnya, tetap dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

l. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak mengakibatkan SiLPA yang terlalu besar dan penggunaannya agar optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6727



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (*Audited*)

SK No 098358 A

RINGKASAN

SK No 117019 A

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.647,78 triliun atau 96,93 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.595,48 triliun atau 94,75 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,95 triliun atau 92,80 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 762,53 triliun atau 99,82 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp947,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.193,29 triliun atau 114,83 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

(Rp Triliun)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2020 (*Audited*)			Realisasi TA 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	**1.699,94**	**1.647,78**	**96,93**	**1.960,63**
Belanja Negara:	**2.739,16**	**2.595,48**	**94,75**	**2.309,28**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.832,95	92,80	1.496,31
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,92	762,53	99,82	812,97
Surplus (Defisit) Anggaran	**(1.039,21)**	**(947,70)**	**91,19**	**(348,65)**
Pembiayaan Neto	**1.039,21**	**1.193,29**	**114,83**	**402,05**
SiLPA (SiKPA)		**245,59**		**53,40**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp212,69 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp245,59 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun,

dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp464,63 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)
A	**SAL awal**	**212,69**	**175,24**
B	**Penggunaan SAL**	**(70,64)**	**(15,00)**
C	**SiLPA/SiKPA**	**245,59**	**53,39**
D	**Penyesuaian SAL**	**0,46**	**(0,94)**
E	**SAL akhir (A + B + C + D)**	**388,11**	**212,69**

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.098,67 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp665,16 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.173,07 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.976,01 triliun, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp59,32 triliun, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.225,10 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.625,47 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp701,60 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp5.923,87 triliun. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.473,20 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Aset		
Aset Lancar	665,16	491,86
Investasi Jangka Panjang	3.173,07	3.001,20
Aset Tetap	5.976,01	5.949,59
Piutang Jangka Panjang	59,32	56,88
Aset Lainnya	1.225,10	967,98
Total Aset	**11.098,67**	**10.467,53**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	701,60	704,68
Kewajiban Jangka Panjang	5.923,87	4.635,53
Total Kewajiban	**6.625,47**	**5.340,22**
Ekuitas	**4.473,20**	**5.127,31**
Total Kewajiban dan Ekuitas	**11.098,67**	**10.467,53**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.783,19 triliun, Beban sebesar Rp2.601,11 triliun, sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54,69 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp872,61 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1	Pendapatan-LO	1.783,19	2.168,93
2	Beban	(2.601,11)	(2.422,81)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(817,92)	(253,88)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(54,69)	4,65
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	**Surplus/(Defisit) LO**	**(872,61)**	**(249,22)**

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp235,47 triliun. Selama TA 2020 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp757,06 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp298,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.301,28 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp25,05 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp50,14 miliar. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi Rp385,32 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp731,06 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp124,23 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.819,74 miliar, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp14,24 triliun, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp118,83 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp257,05 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp triliun)

Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Saldo Awal Kas	**235,47**	**240,15**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(757,06)	(171,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(298,62)	(225,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.301,28	450,48
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(25,05)	(41,42)
Pengunaan SAL	(70,64)	(15,00)
Penyesuaian Pembukuan	(0,50)	(1,64)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	**149,84**	**(4,67)**
Saldo Akhir Kas	**385,32**	**235,47**
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,73	0,23
Kas di Bendahara Penerimaan	0,12	0,16
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan	3,81	3,95
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(14,24)	(10,81)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,00	0,00
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(118,83)	(20,05)
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**256,92**	**208,96**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp5.127,31 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp872,61 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp218,92 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp423,63 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp4.473,20 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(Rp triliun)

No.	Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1	**Ekuitas Awal**	**5.127,31**	**1.407,80**
2	Surplus/Defisit LO	(872,61)	(249,22)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	218,92	3.968,33
4	Transaksi Antar Entitas	(0,42)	0,4
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	-
6	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**(654,11)**	**3.719,50**
7	**Ekuitas Akhir**	**4.473,20**	**5.127,31**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

OPINI BPK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26c/LHP/XV/05/2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

RINGKASAN ii
OPINI BPK vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GRAFIK xiv
I. LAPORAN REALISASI APBN 1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 7
III. NERACA 9
IV. LAPORAN OPERASIONAL 13
V. LAPORAN ARUS KAS 18
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 22
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 24
A. PENJELASAN UMUM 25
A.1. DASAR HUKUM 25
A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN 26
A.2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA 26
A.2.2 LANGKAH PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN 53
A.2.3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020 64
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 89
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 95
A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC PEN 120
A.4.2. PENETAPAN PSAP 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN DAN PSAP 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020) 123
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 125
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 125
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 126
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 168
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 203
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 211
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 211
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA 212
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA 323
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 383
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL 383
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 383
E.3 CATATAN PENTING LAINNYA 426
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 429
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 429

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 432
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... 455
H. PENUTUP..... 470
INDEKS CALK..... 471
INDEKS SINGKATAN 478

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019 - 2020	38
2	Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem KeuanganTahun 2020	46
3	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi MakroTahun 2020 dan 2019	52
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi MakroTahun 2020 dan 2019	53
5	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020 dan 2019	53
6	Ringkasan Perubahan Postur APBN Tahun 2020	67
7	Ringkasan APBN Tahun 2020 dan APBN Tahun 2019	68
8	Realisasi Pendapatan Negara dan HibahTahun Anggaran 2020 dan 2019	71
9	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan 2019	76
10	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Menurut Fungsi	79
11	Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2019	80
12	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun 2020 Terhadap PDB Tahun 2020	84
13	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2020	87
14	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 2019	207
15	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2020 dan 2019	323

DAFTAR GRAFIK

1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2020	27
2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2019-Triwulan IV 2020	31
3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaTahun 2010-2020	31
4	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	32
5	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	33
6	PerkembanganTingkat Inflasi Nasional Tahun 2020	34
7	Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015-2020	35
8	Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2019–Desember 2020	36
9	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Januari –Desember 2020	39
10	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2020	40
11	Perkembangan Cadangan Devisa Januari –Desember 2020	41
12	Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI *7day-RR Rate* Januari –Desember 2020	42
13	Tren Laju IHSG *(End of Period)* Januari –Desember 2020	45
14	Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari -Desember 2020	48
15	Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 -2020	49
16	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016–2020	50
17	Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2016–2020	51
18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IndonesiaTahun 2010–2020	52
19	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 per Jenis Belanja	77
20	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA2016-2020	125
21	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA2016-2020	126
22	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020	127
23	Komposisi K/L 5 Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020	138

24 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2020 139

25 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2020 140

26 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 149

27 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2016-2020 211

28 Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2015-2020 383

29 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020 384

30 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2020 385

31 Komposisi Beban Operasional Tahun 2020 398

32 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 412

33 Komposisi Arus Bersih per Aktivitas Tahun 2020 429

SK No 117053 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SK No 117030 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**1.404.507.505.772.000**	**1.285.136.317.135.799**	**91,50%**	**1.546.141.893.392.193**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.371.020.559.002.000	1.248.415.111.170.305	91,06%	1.505.088.202.287.697
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	33.486.946.770.000	36.721.205.965.494	109,66%	41.053.691.104.496
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**294.140.953.906.000**	**343.814.209.832.563**	**116,89%**	**408.994.346.200.875**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	79.086.884.879.000	97.225.067.272.619	122,93%	154.895.286.766.287
2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	65.000.000.000.000	66.080.543.541.337	101,66%	80.726.119.206.790
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	100.053.788.845.000	111.200.271.136.408	111,14%	124.503.627.232.432
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	50.000.280.182.000	69.308.327.882.199	138,62%	48.869.312.995.366
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**1.300.000.000.000**	**18.832.815.220.624**	**1448,68%**	**5.497.343.992.921**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**1.699.948.459.678.000**	**1.647.783.342.188.986**	**96,93%**	**1.960.633.583.585.989**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**1.975.240.206.353.000**	**1.832.950.921.019.896**	**92,80%**	**1.496.313.886.364.770**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	403.722.736.304.000	380.532.228.590.618	94,26%	376.074.259.852.619
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	273.162.110.060.000	422.338.225.598.487	154,61%	334.418.207.630.784
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	137.383.862.054.000	190.919.832.381.884	138,97%	177.841.479.636.714
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	338.784.308.000.000	314.088.112.296.556	92,71%	275.521.165.410.219
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	192.023.203.430.000	196.231.455.278.876	102,19%	201.802.566.846.111
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	5.072.136.588.000	6.275.907.926.228	123,73%	6.476.205.662.045
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	174.517.691.694.000	202.529.969.428.206	116,05%	112.480.254.777.629
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	450.574.158.223.000	120.035.189.519.041	26,64%	11.699.746.548.649
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**B.2.2.2**	**763.925.645.050.000**	**762.530.176.156.179**	**99,82%**	**812.973.423.142.613**
Transfer ke Daerah	**B.2.2.2.1**	**692.735.645.050.000**	**691.429.657.572.323**	**99,81%**	**743.159.274.663.614**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1.1**	**653.358.917.354.000**	**652.097.644.670.323**	**99,81%**	**711.284.883.866.614**
Dana Transfer Umum	**B.2.2.2.1.1.1**	**470.800.222.354.000**	**475.518.812.742.551**	**101,00%**	**524.890.210.970.419**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	86.418.698.127.000	93.906.361.247.000	108,66%	103.979.972.414.419
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	384.381.524.227.000	381.612.451.495.551	99,28%	420.910.238.556.000
Dana Transfer Khusus	**B.2.2.2.1.1.2**	**182.558.695.000.000**	**176.578.831.927.772**	**96,72%**	**186.394.672.896.195**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	53.787.350.000.000	50.175.976.373.103	93,29%	64.165.654.543.270
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	128.771.345.000.000	126.402.855.554.669	98,16%	122.229.018.352.925
2. Dana Insentif Daerah	**B.2.2.2.1.2**	**18.500.000.000.000**	**18.455.285.206.000**	**99,76%**	**9.694.447.489.000**
3. Dana Keistimewaan DIY	**B.2.2.2.1.3**	**1.320.000.000.000**	**1.320.000.000.000**	**100,00%**	**1.200.000.000.000**
4. Dana Otonomi Khusus	**B.2.2.2.1.4**	**19.556.727.696.000**	**19.556.727.696.000**	**100,00%**	**20.979.943.308.000**
Dana Desa	**B.2.2.2.2**	**71.190.000.000.000**	**71.100.518.583.856**	**99,87%**	**69.814.148.478.999**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		**2.739.165.851.403.000**	**2.595.481.097.176.075**	**94,75%**	**2.309.287.309.507.383**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(1.039.217.391.725.000)**	**(947.697.754.987.089)**	**91,19%**	**(348.653.725.921.394)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**998.485.822.932.000**	**1.146.812.705.085.320**	**114,86%**	**419.550.747.504.799**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000	100,00%	15.000.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	10.506.050.881.000	4.646.479.738.112	44,23%	4.438.174.482.674
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	-	299.524.709.410		179.982.155.162
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	1.173.738.188.593.000	1.177.152.327.902.793	100,29%	446.288.601.121.614
Penerimaan Surat Berharga Negara			1.541.252.304.258.674		921.482.794.531.714
Pengeluaran Surat Berharga Negara			364.099.976.355.881		475.194.193.410.100
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.296.006.236.000	2.363.120.617.772	182,34%	3.032.970.134.099
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.974.130.000.000	3.767.381.621.350	126,67%	4.242.231.101.525
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.678.123.764.000	1.404.261.003.578	83,68%	1.209.260.967.426
6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(239.103.839.778.000)	(94.698.164.882.767)	39,61%	(44.388.980.388.750)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(590.583.000.000)	(3.590.583.000.000)	607,97%	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(18.000.000.000.000)	(10.000.000.000.000)	55,56%	(5.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**40.731.568.793.000**	**46.481.126.166.737**	**114,12%**	**(17.499.237.319.548)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	144.985.176.587.000	141.112.305.195.604	97,33%	74.210.001.746.454
a. Penarikan Pinjaman Program/Tunai	B.2.4.2.1.1	115.441.236.750.000	102.259.679.376.875	88,58%	36.717.630.284.048
b. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	B.2.4.2.1.2	29.543.939.837.000	38.852.625.818.729	131,51%	37.492.371.462.406
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(4.695.837.625.000)	(3.631.888.376.473)	77,34%	(5.716.481.102.380)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(99.557.770.169.000)	(90.999.290.652.394)	91,40%	(85.992.757.963.622)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**1.039.217.391.725.000**	**1.193.293.831.252.057**	**114,83%**	**402.051.510.185.251**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D-C)	**B.2.5**		**245.596.076.264.968**		**53.397.784.263.857**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	**(70.640.000.000.000)**	**(15.000.000.000.000)**
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	**245.596.076.264.968**	**53.397.784.263.857**
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		**387.654.451.056.746**	**213.639.499.948.503**
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(25.425.421.216)	(1.666.230.746.416)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	490.055.695.596	725.105.589.691
Total Penyesuaian SAL		**464.630.274.380**	**(941.125.156.725)**
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	**388.119.081.331.126**	**212.698.374.791.778**

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
ASET	**D.2.1**		
Aset Lancar	**D.2.1.1**		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	-	52.495.330
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	7.682.561.400.884	5.591.063.945.100
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	43.440.621.140.757	45.736.358.514.505
Jumlah Kas dan Setara Kas		256.923.467.961.654	208.962.960.718.114
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	11.763.117.361	5.455.736.715
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	80.997.797.371.759	10.817.836.834.384
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	34.421.569.421.725	34.972.003.392.136
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	5.591.639.511.588	3.028.979.606.205
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	101.481.619.150.090	94.699.061.189.535
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	189.891.302.692.258	166.256.763.245.523
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	7.952.121.446	9.717.488.844
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.6.4	194.035.354.942	135.727.647.729
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	22.427.918.639.595	23.110.067.194.249
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.586.899.675.108	6.197.466.897.279
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	5.729.150.674.002	7.496.739.323.375
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	605.426.556	912.908.715
Jumlah Piutang (Bruto)		326.319.483.733.997	297.906.455.895.249
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(199.619.416.639.983)	(187.276.271.979.301)
Jumlah Piutang (Bersih)		126.700.067.094.014	110.630.183.915.948
Persediaan	D.2.1.1.7	160.514.808.289.624	123.450.089.924.835
Jumlah Aset Lancar		**665.161.112.767.725**	**491.867.510.128.337**
Investasi Jangka Panjang	**D.2.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	58.150.909.777.379	47.117.342.143.810
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(5.263.474.230.423)	(1.120.492.707.453)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		52.887.435.546.956	45.996.849.436.357
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	89.459.149.834.715	51.422.761.195.268
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(298.094.636.894)	(256.632.185.268)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		89.161.055.197.821	51.166.129.010.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		142.048.490.744.777	97.162.978.446.357
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	2.403.279.903.397.823	2.397.253.380.483.284

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.913.486.508	8.913.486.508
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	627.739.496.594.177	506.775.859.457.526
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.031.028.313.478.508	2.904.038.153.427.318
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**3.173.076.804.223.285**	**3.001.201.131.873.675**
Aset Tetap	**D.2.1.3**		
Tanah	D.2.1.3.1	4.539.889.164.724.754	4.565.754.448.540.161
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	706.966.249.385.561	643.684.366.617.610
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	395.808.354.433.284	365.443.028.479.378
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	940.895.010.856.918	852.163.469.354.018
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	55.493.664.420.893	50.631.130.262.102
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	161.812.756.359.901	137.288.502.462.037
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		**6.800.865.200.181.311**	**6.614.964.945.715.306**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(824.850.679.122.605)	(665.369.543.223.892)
Jumlah Aset Tetap		**5.976.014.521.058.706**	**5.949.595.402.491.414**
Piutang Jangka Panjang	**D.2.1.4**		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	107.120.739.065	85.835.295.500
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	297.191.420.066	179.183.980.687
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.4.3	59.898.131.927.338	57.465.257.010.430
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.4	2.856.864.567.564	2.837.258.148.580
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		**63.159.308.654.033**	**60.567.534.435.197**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.5	(3.837.488.574.312)	(3.678.558.906.969)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**59.321.820.079.721**	**56.888.975.528.228**
Aset Lainnya	**D.2.1.5**		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039
Aset Tak Berwujud	D.2.1.5.2	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	365.366.108.391.343	192.908.799.354.854
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	34.019.184.774.266	53.731.897.004.834
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	17.297.142.477.109	11.808.679.526.194
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		**1.562.484.974.599.425**	**1.264.178.048.235.928**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.8	(318.753.044.535.507)	(281.071.678.085.183)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(18.631.703.843.877)	(15.124.922.825.166)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**1.225.100.226.220.041**	**967.981.447.325.579**
JUMLAH ASET		**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**
KEWAJIBAN	**D.2.2**		
Kewajiban Jangka Pendek	**D.2.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	49.519.940.549.323	130.742.404.048.899
Utang Bunga	D.2.2.1.3	78.397.479.060.871	67.847.210.447.268
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	20.411.311.149.154	11.234.735.172.695

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Utang Transfer	D.2.2.1.5	43.869.090.853.813	48.735.153.480.379
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	416.341.570.576.012	316.317.377.496.950
Unamortized Discount		(222.819.437.000)	(127.084.431.000)
Unamortized Premium		226.991.689.000	215.059.457.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000
Unamortized Discount		(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)
Unamortized Premium		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	26.431.751.511.477	28.578.908.772.939
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	6.799.741.953.913	16.963.437.058.895
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	179.632.783.759	197.917.075.973
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	335.376.236.376	291.951.872.644
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**701.606.358.286.875**	**704.682.072.672.981**
Kewajiban Jangka Panjang	**D.2.2.2**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	10.781.832.927.370	8.663.939.872.341
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	4.832.289.530.565.900	3.714.851.256.058.415
Unamortized Discount		(46.614.743.504.000)	(37.092.489.249.000)
Unamortized Premium		44.178.329.970.000	38.946.454.751.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	11.299.218.500.000	-
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	-	669.808.470.045
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	289.381.766.612.800	224.737.743.429.342
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	18.422.169.463.379	16.988.193.854.354
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		**5.159.738.104.535.449**	**3.967.764.907.186.497**
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	764.106.403.002.755	667.750.107.263.114
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	25.119.765.919	24.499.064.239
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		**764.131.522.768.674**	**667.774.606.327.353**
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**5.923.869.627.304.123**	**4.635.539.513.513.850**
JUMLAH KEWAJIBAN		**6.625.475.985.590.998**	**5.340.221.586.186.831**
EKUITAS	**D.2.3**	**4.473.198.498.758.480**	**5.127.312.881.160.402**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**

LAPORAN OPERASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014	(202.029.361.616.619)	(25,56%)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774	(81.344.276.836.686)	(15,21%)
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437	245.819.172.929	1,14%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271	4.886.750.676.906	2,70%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661	1.896.208.854.997	22,05%
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126	(5.109.121.639.475)	(13,60%)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269	620.632.810.919	18,08%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(19.303.388.856)	22.422.050.495	(41.725.439.351)	(186,09%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.296.658.808.569.667**	**1.577.533.882.586.047**	**(280.875.074.016.380)**	**(17,80%)**
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	107.208.373.405.304	172.627.170.700.849	(65.418.797.295.545)	(37,90%)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	170.294.841.425.980	237.410.883.862.102	(67.116.042.436.122)	(28,27%)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	114.412.629.710.689	116.779.973.933.458	(2.367.344.222.769)	(2,03%)
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	65.640.298.429.287	50.274.215.346.364	15.366.083.082.923	30,56%
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		**457.556.142.971.260**	**577.092.243.842.773**	**(119.536.100.871.513)**	**(20,71%)**
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		28.977.398.210.131	14.304.684.937.017	14.672.713.273.114	102,57%
Jumlah Pendapatan Hibah		**28.977.398.210.131**	**14.304.684.937.017**	**14.672.713.273.114**	**102,57%**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.783.192.349.751.058**	**2.168.930.811.365.837**	**(385.738.461.614.779)**	**(17,78%)**
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470	4.230.548.074.929	1,11%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784	(2.949.569.418.737)	(8,82%)
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638	49.125.367.385.666	28,66%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258	1.447.195.695.200	4,97%
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330	(21.654.528.704.806)	(47,04%)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704	45.986.004.302.640	80,10%
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610	40.658.870.729.541	14,67%

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202	(5.707.922.162.404)	(3,01%)
Beban Hibah	E.2.1.2.9	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209	(677.546.464.387)	(10,46%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422	96.961.109.927.583	89,93%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535	(60.183.508.136.290)	(7,40%)
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116	26.965.179.316.548	45,51%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197	(14.254.475.206.910)	(5,95%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843	18.351.522.025.466	168,75%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**2.601.114.046.104.357**	**2.422.815.798.740.318**	**178.298.247.364.039**	**7,36%**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(817.921.696.353.299)**	**(253.884.987.374.481)**	**(564.036.708.978.818)**	**222,16%**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	310.006.160.448	480.763.876.297	(170.757.715.849)	(35,52%)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948	9.553.419.998.662	149,82%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(15.620.045.735.162)**	**(5.895.868.020.651)**	**(9.724.177.714.511)**	**164,93%**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	-	5.807.000.000	(5.807.000.000)	(100,00%)
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	-	383.890.000.000	(383.890.000.000)	(100,00%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	**(378.083.000.000)**	**378.083.000.000**	**(100,00%)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	54.620.720.966.608	125.751.731.865.679	(71.131.010.899.071)	(56,56%)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	93.697.243.117.382	114.819.433.041.760	(21.122.189.924.378)	(18,40%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(39.076.522.150.774)**	**10.932.298.823.919**	**(50.008.820.974.693)**	**(457,44%)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(54.696.567.885.936)**	**4.658.347.803.268**	**(59.354.915.689.204)**	**(1274,16%)**
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(872.618.264.239.235)**	**(249.226.639.571.213)**	**(623.391.624.668.022)**	**250,13%**

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.2.1**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.1.1**		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	-	-
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496
Total Penerimaan Perpajakan		1.285.136.317.135.799	1.546.141.893.392.193
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366
Total PNBP		343.532.045.955.792	408.648.315.368.093
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	18.832.815.220.624	5.497.343.992.921
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.647.501.178.312.215**	**1.960.287.552.753.207**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.1.2**		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	380.532.228.590.618	376.074.259.852.619
2. Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	422.338.225.598.487	334.418.207.630.784
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	314.088.112.296.556	275.521.165.410.219
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	196.231.455.278.876	201.802.566.846.111
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	6.275.907.926.228	6.476.205.662.045
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	202.529.969.428.206	112.480.254.777.629
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	120.035.189.519.041	11.699.746.548.649
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	44.283.738.827.545	39.158.751.141.991
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	46.498.603.739.756	61.684.868.346.770
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	3.124.018.679.699	3.136.352.925.658
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	381.612.451.495.551	420.910.238.556.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	50.175.976.373.103	64.165.654.543.270
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	39.332.012.902.000	31.874.390.797.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	126.402.855.554.669	122.229.018.352.925
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	71.100.518.583.856	69.814.148.478.999
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**2.404.561.264.794.191**	**2.131.445.829.870.669**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2.2**		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	282.163.876.771	346.030.832.782
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	299.524.709.410	179.982.155.162
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	2.014.582.699.001	1.376.096.205.074
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	19.955.174.825.564	775.311.999.999
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**22.551.446.110.746**	**2.677.421.193.017**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.2.2**		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	190.919.832.381.884	177.841.479.636.714
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	10.000.000.000.000	5.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	13.306.582.699.000	8.200.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	64.288.017.000.000	23.565.076.593.824
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	42.663.905.708.332	14.000.000.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**321.178.337.789.216**	**228.606.556.230.538**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		**(298.626.891.678.470)**	**(225.929.135.037.521)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**F.2.3**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.3.1**		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	1.615.659.685.880.024	940.725.025.633.239
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	141.112.305.195.604	74.210.001.746.454
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	4.646.479.738.112	3.662.862.482.675
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**1.761.418.470.813.740**	**1.018.597.889.862.368**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.3.2**		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	365.504.237.359.459	476.403.454.377.526
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	90.999.290.652.394	85.992.757.963.622
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*	F.2.3.2.3	3.631.888.376.473	5.716.481.102.380
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**460.135.416.388.326**	**568.112.693.443.528**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		**1.301.283.054.425.414**	**450.485.196.418.840**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**F.2.4**		
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	52.495.332	(52.495.332)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(25.057.121.769.181)**	**(41.425.640.178.382)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		**220.538.954.495.787**	**11.972.144.085.475**
Penggunaan SAL		(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan		(50.149.808.575)	(1.647.087.428.577)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	**149.848.804.687.212**	**(4.674.943.343.102)**
SALDO AWAL KAS	F.1.1	235.477.658.828.423	240.152.602.171.525
SALDO AKHIR KAS		**385.326.463.515.635**	**235.477.658.828.423**
Kas di Bendahara Pengeluaran		731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan		124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		**3.819.744.936.794**	**3.956.502.008.861**
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(14.247.797.371.759)	(10.817.836.834.384)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		-	**(3.932.640)**
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(118.830.237.152.177)	(20.053.770.625.020)
Kas Transito (Kiriman Uang)		-	**52.495.330**
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	**256.923.467.961.654**	**208.962.960.718.114**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
EKUITAS AWAL	G.1	**5.127.312.881.160.402**	**1.407.808.224.645.741**
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	**(872.618.264.239.235)**	**(249.226.639.571.213)**
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	-	-
Penyesuaian SiLPA	G.3.2	454.270.651.534	(1.304.223.887.208)
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.3	2.873.247.690.030	4.175.849.408.082
Revaluasi Aset Tetap	G.3.4	104.773.275.462.472	4.113.213.336.254.225
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.5	71.297.154.112.414	(82.075.076.826.694)
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.6	7.542.957.446.049	(7.901.610.374.191)
Koreksi Lainnya	G.3.7	31.986.614.856.946	(57.777.054.738.064)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		**218.927.520.219.445**	**3.968.331.219.836.150**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	**(423.638.382.132)**	**400.076.249.724**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	**(654.114.382.401.922)**	**3.719.504.656.514.661**
EKUITAS AKHIR	G.6	**4.473.198.498.758.480**	**5.127.312.881.160.402**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak yang besar tidak hanya terhadap perkembangan ekonomi yang melemah cukup dalam pada kisaran minus 3,50 persen, tetapi juga terhadap sistem kesehatan dan keuangan global.

Setelah perekonomian global tahun 2019 mengalami pasang surut sebagai dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, awal tahun 2020 diharapkan prospek perekonomian global akan menuju arah perbaikan dengan menurunnya tensi perang dagang. Hal tersebut terindikasi dari kesediaan AS dan Tiongkok untuk sama-sama kembali duduk di meja perundingan dagang, sehingga masyarakat global optimis akan adanya babak baru yang lebih positif dari hasil perundingan dagang kedua negara besar tersebut. Namun demikian, harapan dan optimisme masyarakat dunia terhadap pemulihan kondisi perekonomian global harus menghadapi kenyataan pahit ketika terjadi wabah baru yang terindikasi muncul pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020 perekonomian global kembali terguncang ketika hampir seluruh sektor perekonomian dunia lumpuh akibat wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tidak hanya di wilayah Tiongkok, tetapi meluas hingga seluruh dunia.

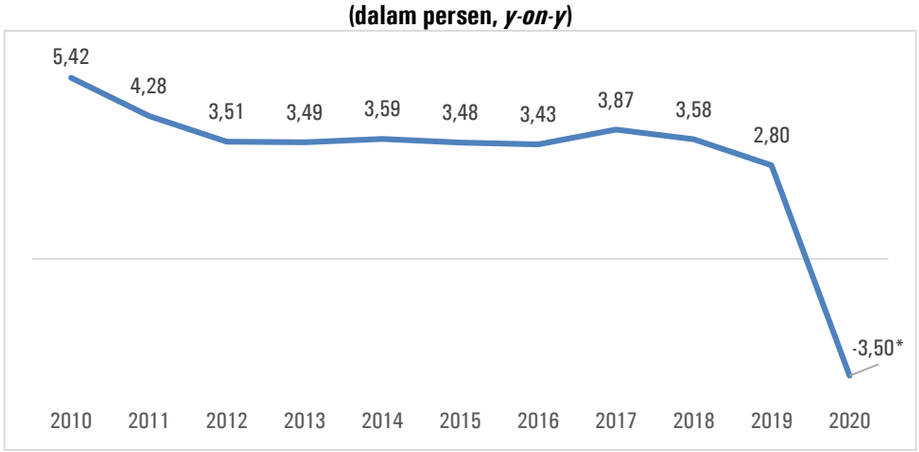
Optimisme prospek ekonomi global terlihat ketika *International Monetary Fund* melalui publikasinya, *World Economic Outlook (WEO) Update* Januari 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berada pada kisaran 3,30 persen, atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berada pada kisaran 2,80 persen. Namun, ketika wabah Covid-19 melanda secara cepat dan meluas ke berbagai belahan dunia, perekonomian global mengalami dampak langsung. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global bergerak ke teritori negatif seiring terhentinya berbagai aktivitas perekonomian setelah sejumlah negara mengumumkan kebijakan karantina/penutupan wilayah (*lockdown*) dan/atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah perluasan penyebaran wabah. Arah perekonomian global mengalami perubahan secara ekstrem seiring meningkatnya ketidakpastian sebagai akibat merebaknya wabah tersebut.

WEO April 2020 menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian global tahun 2020 jatuh melebihi pelemahan yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008-2009. Atas kondisi tersebut, WEO April 2020 telah mengaktualkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi minus 3,00 persen. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan intensitas pandemi yang semakin meluas di sejumlah negara yang menyebabkan ancaman disrupsi aktivitas ekonomi menjadi semakin besar, pada WEO *Update* Juni 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi kembali terkoreksi menjadi minus 4,90 persen. Dalam perkembangannya, meskipun perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi, namun tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak secara bertahap. Pada WEO *Update* Oktober 2020, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar minus 4,40 persen, mengalami sedikit perbaikan seiring dengan perkembangan dan pemulihan beberapa indikator ekonomi. Perbaikan antara lain didukung oleh pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari besarnya stimulus fiskal dan berkurangnya penyebaran Covid-19, yang meningkatkan investasi di sektor manufaktur, di tengah terbatasnya perbaikan ekonomi di negara dan kawasan lainnya.

Pada WEO *Update* Januari 2021, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif sebesar 3,50 persen, lebih tinggi 0,9 persen dari yang diproyeksikan pada WEO *Update* Oktober 2020. Hal tersebut mencerminkan momentum pemulihan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan pada semester II tahun 2020. Pemulihan ekonomi dunia diproyeksikan bervariasi secara signifikan di seluruh negara, bergantung pada akses intervensi medis, efektivitas dukungan kebijakan, dan karakter struktural negara ketika menghadapi krisis. Optimisme efektivitas vaksin telah meningkatkan harapan menghadapi pandemi Covid-19, di tengah kekhawatiran adanya gelombang dan varian baru virus yang merebak di berbagai wilayah. Pengembangan vaksin yang memberikan harapan positif terhadap kondisi global, meningkatkan sentimen positif terhadap percepatan pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu, volatilitas pasar keuangan global menurun, harga komoditas mulai menunjukkan peningkatan, dan aktivitas manufaktur global menunjukkan tren penguatan seiring perbaikan aktivitas ekonomi.

Pemulihan perekonomian global didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara akibat adanya ketersediaan vaksin, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kenaikan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok, keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di AS, Tiongkok, dan kawasan Eropa, serta tingkat pengangguran menurun di banyak negara.

Grafik 1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2020
(dalam persen, *y-on-y*)



**) Angka estimasi*
Sumber: International Monetary Fund

Terjadinya pelemahan ekonomi global secara umum tidak terlepas dari perkembangan ekonomi beberapa kawasan/negara besar yang menjadi barometer ekonomi, di mana AS menjadi salah satunya. WEO *Update* Januari 2020 sempat mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada angka moderat di kisaran 2,00 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan menurunnya tensi perang dagang dengan Tiongkok sehingga mendorong penguatan perekonomian domestik AS. Namun, di sisi lain, peningkatan tensi geopolitik dengan Iran menjadi sebuah ancaman baru yang dapat mendorong sentimen negatif pasar. Hingga pada akhirnya, perekonomian AS juga mengalami guncangan hebat sebagai dampak pandemi Covid-19 secara global. Sepanjang bulan Maret 2020, jumlah pengangguran di AS bertambah secara signifikan akibat penurunan secara

drastis aktivitas perekonomian baik domestik maupun global. Sebagai dampak pandemi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS berdasarkan WEO April 2020 juga mengalami penurunan yang sangat dalam hingga berada pada kisaran minus 5,90 persen. Selanjutnya, berdasarkan WEO *Update* Juni 2020, pasar global diprediksi mengalami tekanan yang makin dalam karena masih berada dalam kondisi ketidakpastian, serta penanganan pandemi yang dinilai belum berhasil mengendalikan tingginya tingkat penyebaran, pertambahan jumlah penderita positif Covid-19 (*positivity rate*) dan jumlah kematian (*fatality ratio*), termasuk di wilayah AS. Oleh karena itu, WEO *Update* Juni 2020 melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan AS tahun 2020 menjadi minus 8,00 persen, jauh menurun di bawah proyeksi pada WEO Januari 2020 yaitu sebesar 2,00 persen. Dalam perkembangannya sampai dengan September 2020, pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik yang dipengaruhi besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju, terutama AS. Pada WEO *update* Oktober 2020, pertumbuhan AS tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 4,3 persen dan perkiraan tahun 2020, pertumbuhan AS sebesar minus 3,4 persen sebagaimana WEO update Januari 2021. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan vaksi lebih awal pada negara AS dan Jepang dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* dan negara berkembang lainnya. Perbaikan ekonomi AS berlanjut di tengah kasus gelombang ketiga Covid-19. Peningkatan permintaan mendorong kegiatan manufaktur dan jasa serta meningkatkan produksi yang pada akhirnya meningkatkan daya serap tenaga kerja ke perekonomian.

Selanjutnya, kawasan Eropa sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perekonomian yang maju juga mengalami pelemahan ekonomi yang sangat dalam pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 di wilayah Eropa telah dimulai sejak awal tahun 2020, yang terindikasi pertama kali di wilayah Italia, hingga akhirnya meluas ke berbagai negara di Eropa. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa tahun 2020 pada awalnya mengindikasikan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang didukung dengan proyeksi peningkatan permintaan eksternal terhadap sejumlah komoditas, serta tren pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa. WEO *Update* Januari 2020 memberikan proyeksi pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Namun, dalam perkembangannya, setelah wabah Covid-19 menjangkiti wilayah Eropa, tren pertumbuhan ekonomi langsung berbalik arah dan WEO April 2020 mencatatkan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa menjadi minus 7,50 persen, dan pada WEO *Update* Juni 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa mengalami koreksi yang semakin dalam hingga berada pada minus 10,20 persen. Empat negara utama perekonomian Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol turut menyumbang pelemahan ekonomi karena kasus Covid-19 yang meluas di negara-negara tersebut menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian secara signifikan. Pada WEO Oktober 2020, pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 8,3 persen seiring dengan perbaikan perekonomian global yang mendorong peningkatan beberapa indikator seperti keyakinan konsumen di kawasan Eropa. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar minus 7,2 persen. Perbaikan ekonomi mulai terjadi pada akhir tahun 2020. Pemulihan ekonomi Eropa ditopang oleh stimulus serta penanganan Covid-19 yang terkendali di tengah risiko dari ketidakpastian Brexit. Prospek pertumbuhan perekonomian wilayah Eropa didorong oleh proses vaksinasi yang mulai pada awal Desember 2020.

Selanjutnya, di kawasan Asia, sebagai titik awal munculnya Covid-19 yaitu di Tiongkok, juga tidak berbeda jauh kondisi pertumbuhan ekonominya dengan kawasan lainnya. Perekonomian Tiongkok yang pada awal Januari diproyeksikan tumbuh sebesar 6,00 persen, mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 awal tahun 2020. Namun, Tiongkok mulai mengalami pemulihan jelang akhir Triwulan I setelah dianggap berhasil menurunkan jumlah kasus positif dan dianggap telah melewati fase puncak pandemi, sehingga walaupun mengalami pelemahan, koreksi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih berada pada proyeksi pertumbuhan yang positif sebesar 1,20 persen setelah pada Triwulan I diproyeksikan sebesar minus 6,8 persen. Namun demikian, munculnya kasus positif baru di Tiongkok yang menyebabkan wilayah Beijing melakukan *lockdown* pada akhir Triwulan II memberikan sentimen negatif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sehingga terkoreksi menjadi 1,00 persen. Perkembangan positif di Tiongkok pada Triwulan III yang sejalan dengan melandainya penyebaran Covid-19 mendorong peningkatan mobilitas masyarakat global ke level ekuilibrium normal baru dan dampak stimulus moneter dan fiskal yang cukup besar. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdasarkan WEO Oktober 2020 diproyeksikan sebesar 1,9 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Tiongkok tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar 2,3 persen. Tiongkok mengalami perkiraan pertumbuhan positif pada tahun 2020.

India sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia, juga harus mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan akibat turunnya jumlah permintaan global karena pandemi Covid-19. Pada awal Januari 2020, pertumbuhan ekonomi India diprediksikan akan mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 5,80 persen, setelah pemerintahan terpilih hasil pemilihan umum akan menggulirkan kebijakan untuk menstimulus perekonomian. Di samping itu, penurunan harga minyak dunia juga memberikan dampak positif bagi iklim usaha di wilayah India. Namun, akibat gelombang pandemi Covid-19 yang juga masuk ke wilayah India, aktivitas perekonomian menjadi terhambat, sehingga WEO April 2020 mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 turun menjadi 1,90 persen. Pemulihan dampak Covid-19 yang dianggap lambat, serta periode *lockdown* di wilayah India yang lebih lama dari perkiraan telah mendorong kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,50 persen dan kembali terkoreksi pada WEO Oktober 2020 sebesar minus 10,3 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar minus 8,0 persen, lebih tinggi 2,3 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Secara umum, pandemi Covid-19 telah menyebabkan *great shock* dan berdampak terhadap kontraksi ekonomi yang dalam di tahun 2020. Proses pemulihan dampak pandemi yang cukup panjang, serta tingkat kekhawatiran akan terjadinya gelombang kedua pandemi menambah ketidakpastian terhadap perbaikan perekonomian global. Namun demikian, melalui kebijakan stimulus perekonomian di berbagai negara, serta dimulainya era kebijakan *new normal*/adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan relaksasi aktivitas masyarakat secara bertahap telah memberikan harapan positif terhadap perbaikan aktivitas perekonomian. Hasil perbaikan tersebut diprediksi akan mulai terlihat di tahun 2021 sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan semakin membaik.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (c-to-c) di tengah pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global.

Kontraksi perekonomian global akibat pandemi Covid-19 turut mendorong terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. Indikasi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 telah mulai terlihat sejak Triwulan I ketika pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,97 persen (*y-on-y*). Walaupun masih mengalami pertumbuhan positif, apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 5,06 persen (*y-on-y*), pertumbuhannya mengalami perlambatan. Selanjutnya, dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia dan dunia, pemerintah akhirnya mengumumkan keadaan darurat kesehatan dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Sejak saat itu, risiko pelemahan ekonomi Indonesia pada periode selanjutnya menjadi tidak dapat terelakkan karena aktivitas perekonomian benar-benar menurun akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 semakin meluas. Eskalasi kasus Covid-19 dan kebijakan PSBB memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 yang terkontraksi sebesar 5,32 persen *(y-on-y).* Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 dibandingkan Triwulan II 2019 yang sebesar 5,05 persen *(y-on-y),* menunjukkan kontraksi yang cukup dalam.

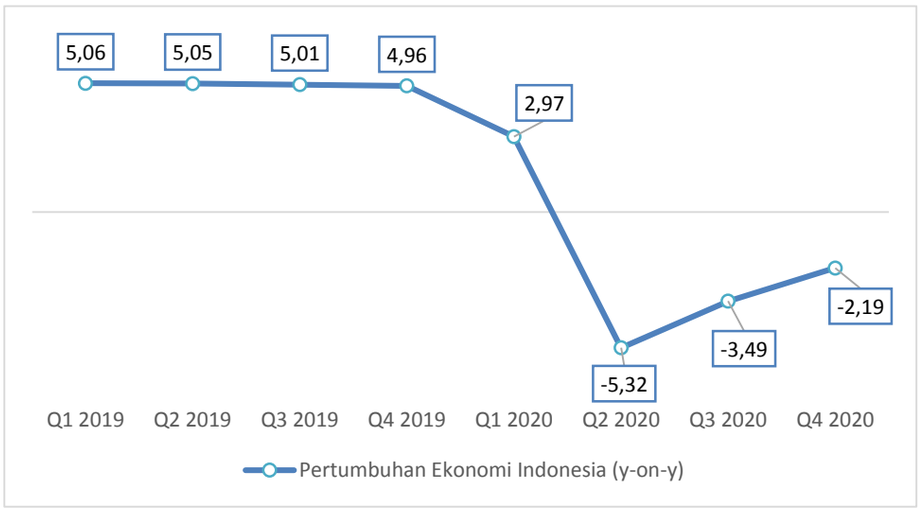
Perekonomian Indonesia pada Triwulan III 2020 menunjukkan proses pemulihan di mana pertumbuhan ekonomi mencatat kontraksi sebesar 3,49 persen *(y-on-y)* dan semakin membaik pada Triwulan IV 2020 dengan kontraksi sebesar 2,19 persen *(y-on-y).* Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen *(c-to-c).* Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam, seperti AS sebesar 3,5 persen; Jerman sebesar 5,0 persen; Rusia sebesar 3,1 persen; Singapura sebesar 5,8 persen; Filipina sebesar 9,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Korea yang mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen. Sementara itu, perekonomian Tiongkok dan Vietnam mengalami pertumbuhan dalam teritori positif, masing-masing sebesar 2,3 persen dan 2,9 persen .

Perkembangan kondisi global yang positif mendorong pergerakan *capital flow* ke *emerging market*, termasuk Indonesia. Stabilitas ekonomi nasional tetap terus terjaga dan perbaikan sisi permintaan hingga akhir tahun 2020 memberikan pondasi bagi pemulihan ekonomi nasional ke depan. Aktivitas sektor manufaktur nasional juga mengalami perbaikan. Upaya pemerintah melaksanakan program pemulihan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN dan belanja daerah tahun 2020 yang telah dilaksanakan mampu mendukung penanganan pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha. Selain itu, komitmen Pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga menunjukkan harapan akan perbaikan ekonomi.

Proses pemulihan dan pembalikan arah *(turning point)* aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif pada akhir tahun 2020 terutama didorong oleh peran stimulus fiskal dalam menangani pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai sinyal positif seperti menurunnya tendensi risiko geopolitik pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat dan

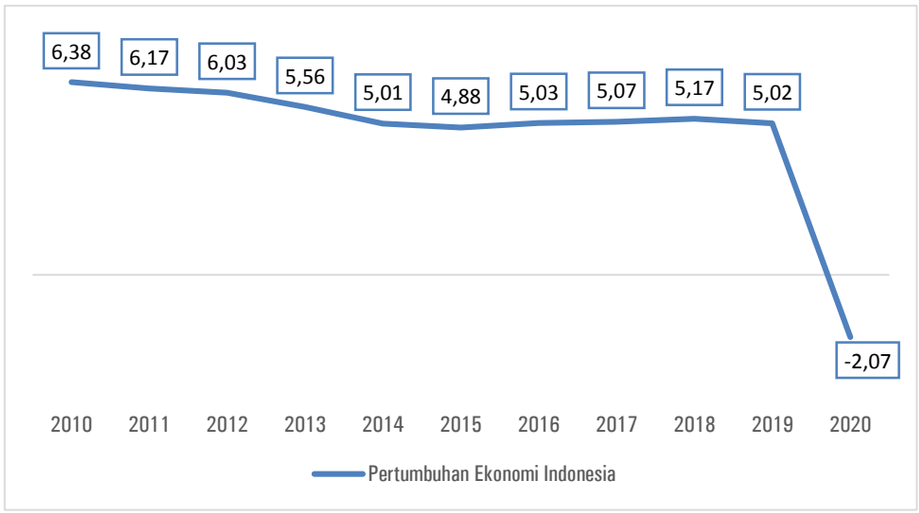
perkembangan vaksin Covid-19, pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia, dan pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law)* yang mendorong perbaikan iklim usaha turut menjadi pendorong optimisme perbaikan ekonomi ke depannya.

Grafik 2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Triwulan I 2019- Triwulan IV 2020
(dalam persen, *y-on-y*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2010- 2020
(dalam persen, *c-to-c*)



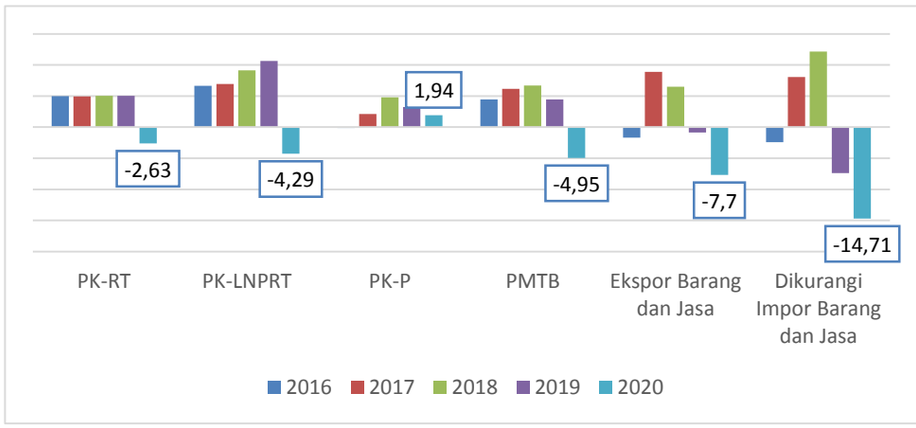
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi, kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 1,94 persen *(c-to-c)*. Pelaksanaan APBN yang ekspansif dengan defisit sebesar 6,1 persen PDB dan pertumbuhan belanja negara mencapai 12,2 persen mendukung pertumbuhan komponen PK-P. Selain itu, akselerasi pelaksanaan Program PEN berkontribusi tidak hanya pada Konsumsi Pemerintah, tetapi juga memberi dukungan langsung kepada Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi.

Kontraksi terdalam komponen pertumbuhan dari sisi pengeluaran tahun 2020 terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,70 persen *(c-to-c)*, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,95 persen *(c-to-c)*, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,29 persen *(c-to-c)*, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,63 persen *(c-to-c)*. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71 persen *(c-to-c)*.

Akselerasi bantuan sosial pemerintah melalui program PEN secara konsisten mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang rentan terdampak pandemi Covid-19 yang mendorong perbaikan pada komponen PK-RT. Peningkatan berbagai indikator investasi, seperti penjualan semen dan impor barang modal mendukung perbaikan pada komponen PMTB. Kinerja ekspor produk-produk unggulan, seperti CPO dan batubara yang meningkat juga mendukung perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa. Permintaan atas komoditas tersebut meningkat seiring adanya pemulihan ekonomi dari negara mitra dagang utama. Sejalan dengan perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa, komponen Impor Barang dan Jasa juga mengalami perbaikan sejalan dengan indikator *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia sampai dengan Desember 2020 yang berada pada zona ekspansi.

Grafik 4.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Pengeluaran
Tahun 2016 - 2020
(dalam persen, *c-to-c*)

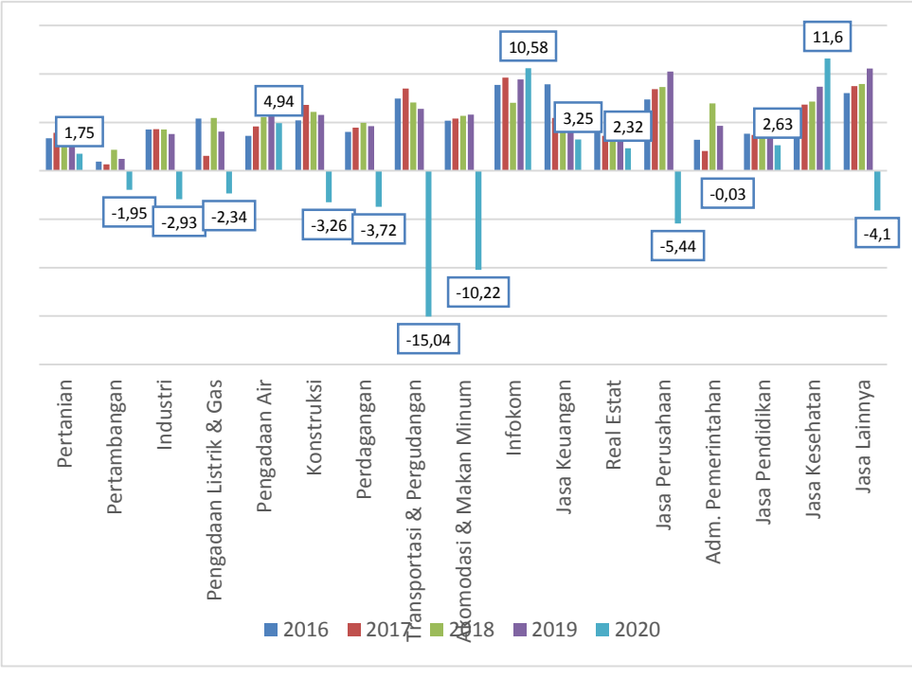


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi pertumbuhan tahun 2020 terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen *(c-to-c)*; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen *(c-to-c)*; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen *(c-to-c)*; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen *(c-to-c)*; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen *(c-to-c)*. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen *(c-to-c)*; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen *(c-to-c)*; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen *(c-to-c)*; Real Estate sebesar 2,32 persen *(c-to-c)*; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen *(c-to-c)*.

Pertumbuhan positif beberapa komponen pada Lapangan Usaha tersebut didukung oleh tingginya permintaan di tengah pandemi dengan masih berlakunya kebijakan beraktivitas dan beribadah dari rumah (*Work From Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH)) guna penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Lapangan Usaha Pertanian mengalami pertumbuhan positif didukung oleh kenaikan produksi palawija dan hortikultura, sedangkan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh positif didukung oleh pencairan pembayaran insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan Covid-19.

Grafik 5.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2020
(dalam persen, *c-to-c*)

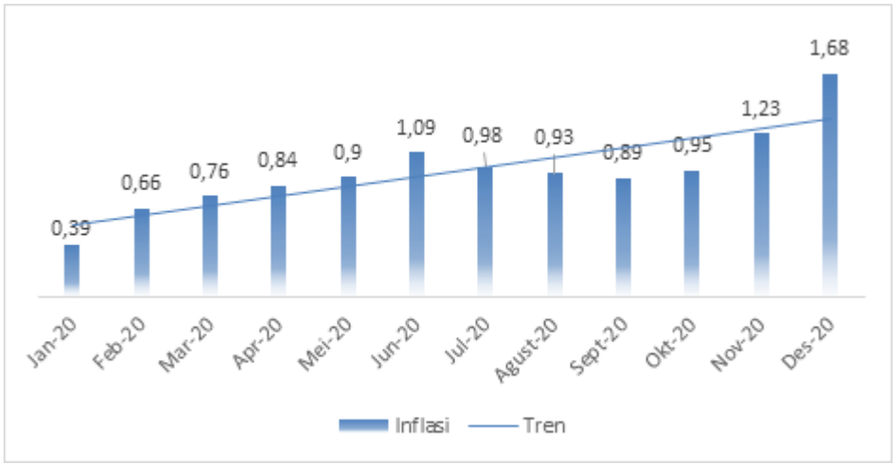


Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Inflasi tahun 2020 tercatat sebesar 1,68 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 2,72 persen.

Kebijakan pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan berdampak terhadap penurunan daya beli dan tingkat permintaan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tingkat inflasi tahun 2020 bergerak stabil pada kisaran di bawah 2 persen. Tingkat inflasi nasional tahun 2020 relatif dapat dikendalikan dengan baik dan berada pada nilai 1,68 persen dengan tren meningkat sepanjang tahun 2020. Namun demikian, inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen. Tingkat inflasi rendah yang terkendali tersebut sejalan dengan konsumsi masyarakat yang mulai mengalami perbaikan pada Triwulan III meskipun dengan tingkat yang rendah di tengah pasokan bahan pangan yang melimpah. Secara umum, terkendalinya tingkat inflasi nasional dipengaruhi oleh terjaganya seluruh komponen inflasi yaitu inflasi komponen inti (*inflation core)* sebesar 1,60 persen; inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sebesar 0,25 persen; dan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 3,62 persen.

Grafik 6.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2020
(dalam persen, *ytd*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

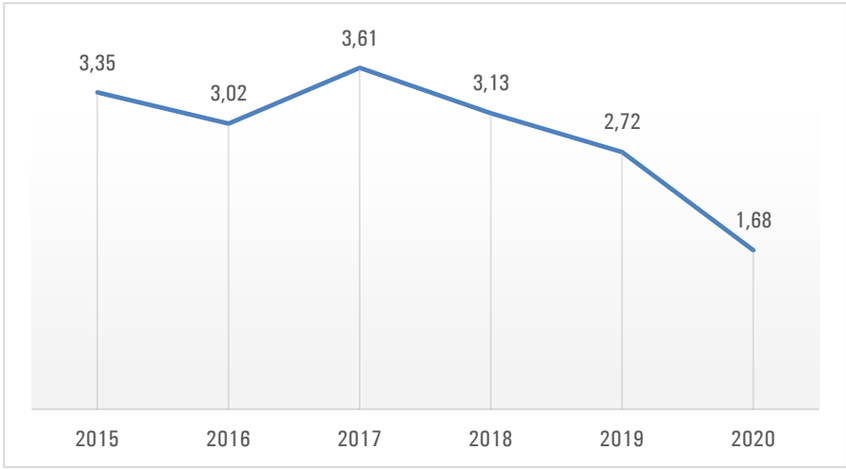
inflasi dari komponen inti yang tercatat sebesar 1,60 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 3,02 persen dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang menurun sebagai dampak pandemi Covid-19 dan relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah. Permintaan masyarakat yang masih rendah tersebut antara lain sebagai dampak lanjutan atas kondisi pelemahan daya beli masyarakat secara umum karena menurunnya aktivitas perekonomian di sejumlah sektor. Selain itu, juga dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas perhiasan sejalan dengan perlambatan harga emas dunia.

Inflasi dari komponen harga diatur pemerintah tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 0,51 persen, sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas serta kebijakan Pemerintah di sektor energi, diantaranya melalui pemberian subsidi listrik dan menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu untuk sepeda motor dan angkutan umum guna mendorong daya beli masyarakat. Inflasi dari komponen ini didorong oleh deflasi

komoditas tarif listrik sebagai dampak penyesuaian tarif listrik pada beberapa golongan. Selain itu, inflasi terjadi pada beberapa komoditas rokok sejalan dengan kenaikan cukai rokok dan mulai meningkatnya permintaan transportasi udara pada akhir tahun 2020 sejalan dengan meningkatnya pergerakan masyarakat antardaerah dalam rangka merayakan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan tahun baru yang berkontribusi pada inflasi dari komponen harga diatur pemerintah.

Sejalan dengan dua komponen lainnya, inflasi komponen bergejolak masih terkendali dan tercatat sebesar 3,62 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 4,30 persen. Hal itu didukung oleh penurunan permintaan masyarakat di tengah pasokan bahan pangan yang melimpah, meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. HBKN Lebaran pada Juni 2020 relatif tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan inflasi. Hal tersebut antara lain karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran relatif menurun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak bulan Maret hingga bulan Juni. Dengan demikian, inflasi pada komponen bergejolak dapat dimitigasi secara memadai, yang juga didukung dengan sejumlah kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Grafik 7.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015- 2020
(dalam persen)



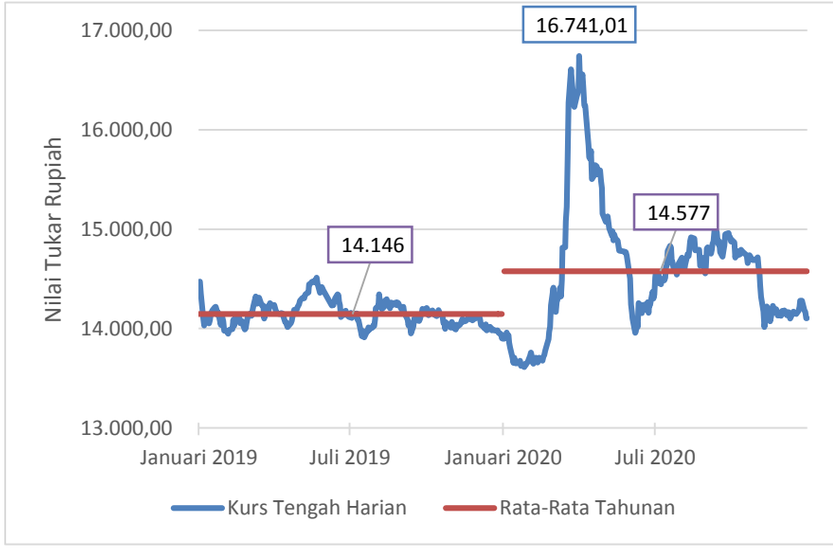
Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2020 adalah Rp14.577 per dolar AS yang mengalami pergerakan cukup dinamis sejalan

Selama Januari - Desember 2020, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang dinamis mengikuti sentimen keuangan global. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awalnya memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Pada pembukaan awal tahun 2020, rupiah berada pada posisi Rp13.895 per dolar AS relatif stabil hingga bulan Februari 2020. Ketika penyebaran pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah sempat mengalami depresiasi pada titik terendah pada tanggal 2 April 2020 sebesar Rp16.741 per dolar AS.

dengan gejolak perekonomian global akibat dampak pandemi Covid-19.

Grafik 8.
Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS
Januari 2019–Desember 2020
(rupiah per dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut merupakan titik terendah rupiah sejak krisis keuangan dalam negeri pada tahun 1998 karena dampak pandemi Covid-19 yang sangat signifikan dalam mengubah arah perekonomian global, sehingga berdampak terhadap kondisi domestik. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi pada akhir Triwulan I dan awal Triwulan II 2020 disebabkan oleh sentimen pasar, terutama dipicu oleh kekahwatiran investor sehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Untuk mengatasi tekanan yang berasal dari sentimen pasar tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal menyusun kebijakan untuk mengatasai dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, sinergi dari otoritas moneter, BI melalui kebijakan *triple invention* dapat membalikkan *investor appetite* untuk kembali ke Indonesia, dengan melihat kesungguhan otoritas dalam menangani situasi tersebut. Di samping itu, aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dan peningkatan cadangan devisa juga memberikan dampak positif terhadap likuiditas dalam negeri. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal tersebut secara bertahap telah mendorong apresiasi nilai tukar rupiah menuju kondisi yang lebih baik. Penguatan nilai tukar rupiah mulai terlihat pada Triwulan II 2020 dan bergerak dinamis. Hingga penutupan akhir Desember 2020, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat sebesar Rp14.105 per dolar AS. Dengan demikian, sepanjang periode Januari-Desember 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada nilai sebesar Rp14.577 per dolar AS.

Pada tahun 2020, tren volatilitas nilai tukar Rupiah mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 15,9 persen. Volatilitas rupiah pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,0 persen. Volatilitas pasar keuangan yang stabil mendorong pulihnya aliran modal ke

pasar keuangan domestik, peningkatan PMI manufaktur yang menandai terjadinya pemulihan ekonomi, perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan vaksin di dalam negeri turut menjadi sentimen positif pasar keuangan domestik yang menopang nilai tukar Rupiah.

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2020 mencatat surplus sebesar 2,60 miliar dolar AS dan tetap terjaga menopang stabilitas dari sektor eksternal.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus 2,60 miliar dolar AS sampai dengan akhir tahun 2020. Sejalan dengan perkembangan surplus NPI, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 135,90 miliar dolar AS. Surplus NPI merupakan kontribusi dari neraca transaksi modal dan finansial yang mengalami surplus serta penurunan defisit pada neraca transaksi berjalan.

Neraca transaksi berjalan pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar 4,74 miliar dolar AS (0,4 persen terhadap PDB), membaik dari tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar 30,28 miliar dolar AS (2,7 persen terhadap PDB). Penurunan defisit neraca transaksi berjalan didorong oleh terbatasnya kinerja ekspor sebagai dampak melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19, sedangkan kinerja impor juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Kinerja impor yang terkontraksi dalam terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembatasan mobilitas dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah pencegahan semakin meluasnya Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menurun secara signifikan.

Defisit neraca transaksi berjalan tahun 2020 mengalami perbaikan dari tahun 2019 yang didorong oleh surplus neraca perdagangan barang sebesar 28,20 miliar dolar AS, meningkat signifikan dari tahun 2019 yang sebesar 3,51 miliar dolar AS. Surplus nerca perdagangan barang yang meningkat tajam didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang tinggi akibat kinerja impor nonmigas yang terkontraksi dalam dan penurunan defisit neraca perdagangan migas. Selain itu, penurunan defisit neraca transaksi berjalan juga dipengaruhi oleh penurunan defisit necara pendapatan primer yang mengalami defisit sebesar 29,03 miliar dolar AS, menurun dari tahun 2019 yang sebesar 33,78 miliar dolar AS. Penurunan defisit tersebut didorong oleh penurunan signifikan pembayaran atas hasil investasi investor nonresiden baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya dibandingkan penurunan penerimaan hasil investasi residen di luar negeri. Kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga berdampak pada penurunan kinerja korporasi serta penurunan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya.

Namun demikian, neraca perdagangan jasa mengalami peningkatan defisit dari tahun 2019 sebesar 28,8 persen atau menjadi 9,84 miliar dolar AS dari yang sebelumnya sebesar 7,64 miliar dolar AS. Peningkatan defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya surplus jasa perjalanan akibat penurunan jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional sebagai dampak pandemi Covid-19. Surplus neraca pendapatan sekunder masih stabil dibandingkan tahun 2019, mengalami surplus sebesar 5,93 miliar dolar AS.

Neraca transaksi modal dan finansial tahun 2020 mencatat surplus sebesar 7,87 miliar dolar AS yang menurun dari tahun 2019 sebesar 36,60 miliar dolar AS. Penurunan surplus tersebut terjadi karena aliran keluar investasi portofolio pada awal tahun sebagai akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap dampak pandemi Covid-19. Surplus investasi langsung berupa aliran masuk modal

berjangka panjang berkontribusi terhadap capaian surplus neraca transaksi modal dan finansial yang sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan perekonomian domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester II 2020. Investasi langsung pada sisi kewajiban terutama disebabkan oleh arus masuk neto dalam bentuk modal ekuitas terkait transaksi akuisisi perbankan domestik oleh perusahaan Thailand dan dalam bentuk instrumen utang terkait penerbitan obligasi global oleh perusahaan di bidang pertambangan melalui afiliasinya di luar negeri.

Selanjutnya, ketidakpastian pasar keuangan karena faktor global maupun domestik yang masih tinggi menyebabkan surplus investasi portofolio neto mengalami penurunan siginifikan dari tahun 2019 menjadi sebesar 3,93 miliar dolar AS yang sebelumnya sebesar 21,99 miliar dolar AS. Peningkatan defisit investasi lainnya tahun 2020 yang dibandingkan dengan tahun 2019 dikontribusikan oleh adanya penempatan dana di perbankan luar negeri, lebih rendahnya penarikan pinjaman, serta terjadinya neto pembayaran utang dagang yang terjadi pada sektor swasta. Defisit investasi lainnya tahun 2020 sebesar 10,24 miliar dolar AS.

Tabel 1.
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia
Tahun 2019 - 2020
(dalam miliar dolar AS)

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
Transaksi Berjalan (*Current Account*)	(30,28)	(4,74)
Transaksi Modal dan Finansial (*Capital &Financial Account*)	36,60	7,87
Selisih Perhitungan Bersih (*Net Errors & Omission*)	(1,65)	(0,53)
Neraca Keseluruhan (*Overall Balance*)	4,68	2,60

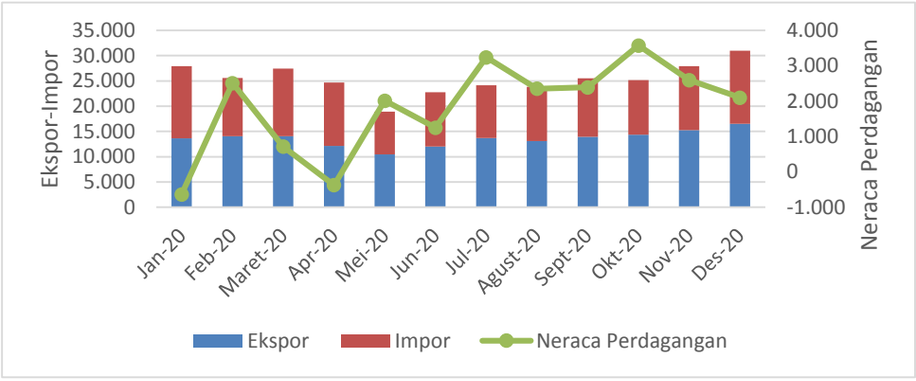
Sumber: Bank Indonesia

Akumulasi nilai ekspor dan impor tahun 2020 masing-masing sebesar 163,31 miliar dolar AS dan 141,57 miliar dolar AS.

Sepanjang tahun 2020, nilai ekspor dan impor Indonesia terdampak akibat terhambatnya aktivitas perekonomian karena penyebaran Covid-19 secara luas, khususnya yang terjadi di negara-negara yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia seperti Tiongkok, AS, dan Jepang. Pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2020 sempat mengalami kontraksi pada pertengahan tahun dan mulai kembali meningkat pada akhir tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, kinerja ekspor dan impor secara kumulatif mengalami penurunan. Namun demikian, kontraksi pada ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada impor.

Nilai ekspor dan impor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2020 masing-masing mencapai 163,31 miliar dolar AS dan 141,57 miliar dolar AS. Apabila dilihat perkembangan secara bulanan, nilai ekspor dan impor pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi indikasi adanya pemulihan aktivitas perekonomian setelah mengalami kontraksi sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia.

Grafik 9.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Januari – Desember 2020
(dalam juta dolar AS)



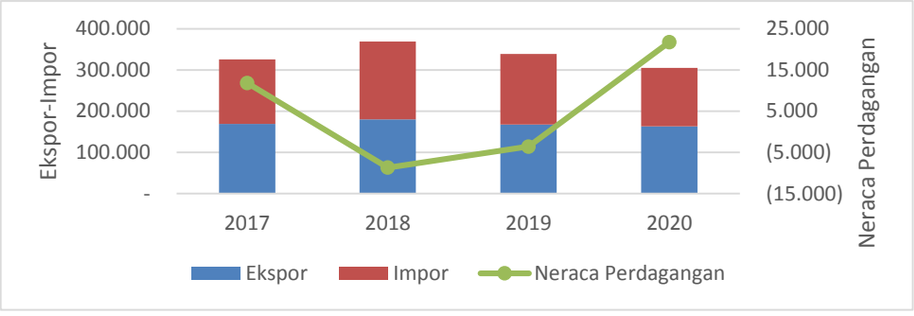
Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,61 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat sebesar 167,68 miliar dolar AS. Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 dikontribusikan dari nilai kumulatif ekspor migas sebesar 8,31 miliar dolar AS atau sebesar 5,09 persen, serta dari ekspor nonmigas sebesar 155,00 miliar dolar AS atau 94,91 persen. Selama tahun 2020, nilai ekspor nonmigas turun sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun 2019. Begitu pula dengan nilai ekspor migas turun sebesar 29,52 persen dibandingkan tahun 2019. Secara bulanan, nilai ekspor migas maupun nonmigas pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor nonmigas tersebut terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor kelompok manufaktur dan pertambangan. Sedangkan kenaikan kinerja ekspor nonmigas tersebut sejalan dengan perbaikan permintaan eksternal terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dari sisi kewilayahan, perbaikan kinerja ekspor didukung oleh kinerja positif di sebagian besar wilayah, termasuk wilayah Jawa. Perbaikan ekspor Sumatera dan Kalimantan terutama ditopang oleh kinerja ekspor CPO seiring permintaan dari India, Pakistan, dan Tiongkok yang meningkat serta perbaikan harga ekspor. Ekspor wilayah Jawa tercatat mulai tumbuh positif pada November 2020 didukung kinerja ekspor manufaktur antara lain ekspor alas kaki ke Amerika Serikat dan ekspor kendaraan ke ASEAN. Sementara itu, ekspor besi baja dan konsentrat tembaga menopang kinerja ekspor wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

Selanjutnya, sejalan dengan kondisi ekspor, nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 17,34 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 dikontribusikan dari impor migas sebesar 14,26 miliar dolar AS atau sebesar 10,07 persen, dan dari impor non migas sebesar 127,31 miliar dolar AS atau sebesar 89,93 persen. Sejalan dengan kinerja ekspor secara bulanan, impor nonmigas tercatat membaik pada akhir tahun 2020 yang didukung oleh impor kelompok barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal.

Grafik 10.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Tahun 2017- 2020
(dalam juta dolar AS)



Akumulasi neraca perdagangan tahun 2020 mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dolar AS lebih tinggi dari tahun 2019 yang defisit sebesar 3,59 miliar dolar AS, didorong surplus nonmigas terutama ekspor hasil kelapa sawit dan logam dasar mulia, serta rendahnya defisit migas terutama impor BBM dampak penurunan konsumsi BBM selama pandemi. Secara kumulatif kegiatan ekspor-impor masih berada di zona negatif. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga meluasnya dampak pandemi Covid-19.

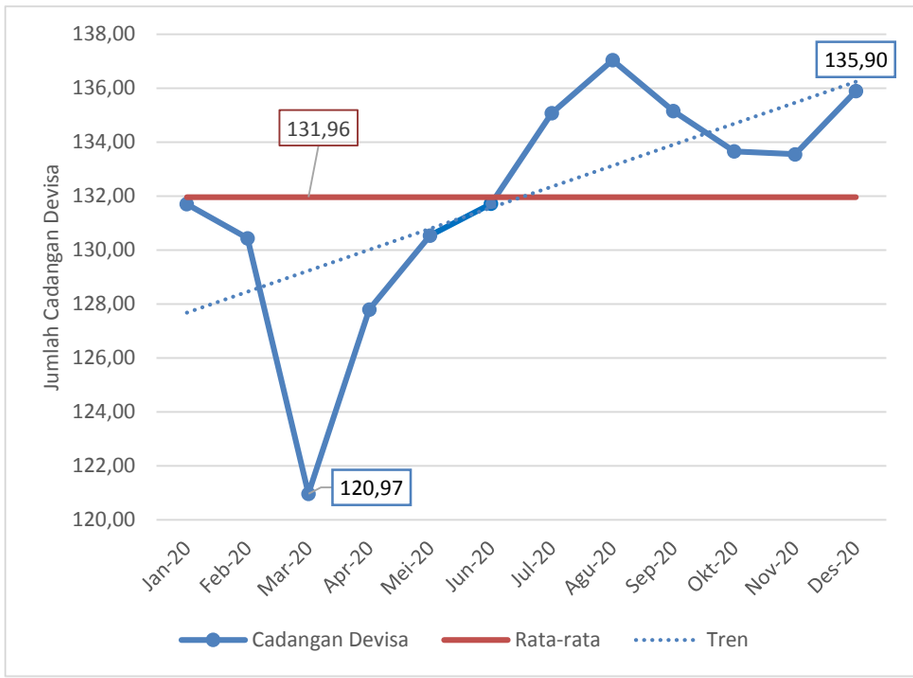
Cadangan Devisa pada Desember 2020 berada di atas standar kecukupan internasional dan stabil untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sebesar 135,90 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa pada Desember 2020 tetap tinggi yaitu sebesar 135,90 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor, serta dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Nilai cadangan devisa tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 129,18 miliar dolar AS atau naik sebesar 5,20 persen.

Posisi cadangan devisa sepanjang 2020 berada pada posisi terendah pada bulan Maret 2020 sebesar 121,0 miliar dolar AS setara 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi bulan Maret dipengaruhi oleh tingginya permintaan valuta asing, diantaranya untuk pembayaran utang luar negeri .

Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Maret 2020, cadangan devisa mengalami peningkatan hingga Desember 2020 yang dipengaruhi surplus pada transaksi berjalan Neraca Pembayaran Indonesia karena ekspor beberapa komoditas yang membaik antara lain: CPO, logam, dan besi baja, serta impor yang masih tertahan sejalan dengan banyaknya persediaan dan masih lemahnya permintaan domestik. Selain itu, peningkatan cadangan devisa juga dipengaruhi oleh surplus transaksi finansial berupa penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerbitan surat utang yang dibeli oleh non residen. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Grafik 11.
Perkembangan Cadangan Devisa Januari – Desember 2020
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

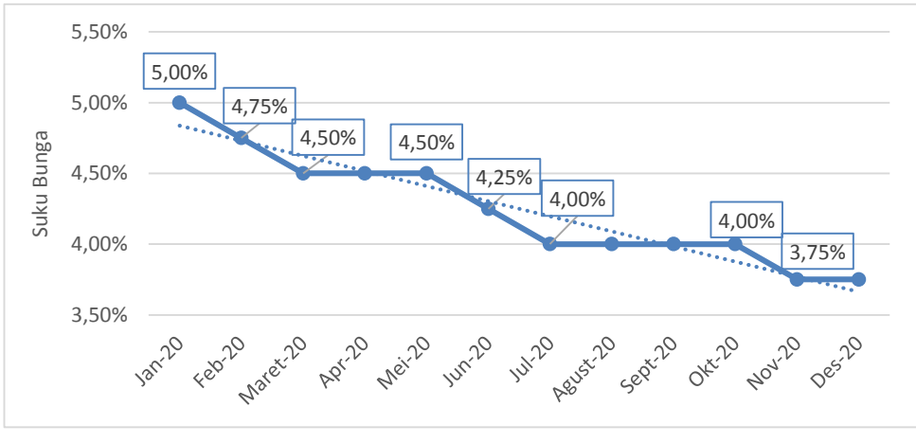
BI 7-day Reverse Repo Rate pada akhir tahun 2020 berada pada nilai 3,75 persen.

Wabah Covid-19 yang meluas telah mendorong sejumlah negara, termasuk Indonesia untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Imbasnya, gerak roda perekonomian menjadi terhambat dan mengarah kepada pelemahan ekonomi yang cukup dalam pada Triwulan I tahun 2020. Hal tersebut juga berdampak terhadap aktivitas di pasar keuangan. Untuk mengantisipasi penurunan ekonomi yang lebih dalam, Bank Indonesia (BI) merespon dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan moneternya. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan, atau BI 7-*day Reverse Repo Rate.*

Selama Januari-Desember 2020, BI melakukan kebijakan pelonggaran pasar keuangan dengan menurunkan suku bunga acuan agar dapat merangsang aktivitas keuangan. Pada akhir tahun 2019 hingga Januari 2020, BI masih tetap mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,00 persen. Ketika pandemi Covid-19 mulai meluas pada bulan Februari sehingga menyebabkan kekhawatiran dan kondisi ketidakpastian global, maka BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuannya menjadi sebesar 4,75 persen dengan tetap memantau perkembangan kondisi perekonomian. Selanjutnya, melalui hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI untuk memperkuat bauran kebijakan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko perkembangan Covid-19, atas suku bunga acuan kembali dilakukan penyesuaian menjadi 4,50 persen pada bulan Maret 2020. Besaran suku bunga acuan tersebut kemudian dipertahankan hingga pertengahan Mei 2020. Selanjutnya, pada pertengahan Juni 2020, dengan memperhatikan potensi risiko pandemi Covid-19 masih terus berlanjut hingga Desember 2020, BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuannya menjadi 4,25 persen

dan kembali diturunkan menjadi 4,00 persen pada Juli 2020 hingga Oktober 2020. Penurunan terus dilakukan pada bulan November menjadi sebesar 3,75 persen dan dipertahankan sampai dengan Desember 2020. Hal tersebut sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Grafik 12.
Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI 7day-RR *Rate*
Januari – Desember 2020
(dalam persen)



Sumber: Bank Indonesia

Langkah ini merupakan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas. Langkah untuk melakukan penurunan suku bunga acuan tersebut ditempuh dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dalam menghadapi kondisi ketidakpastian pasar keuangan global.

Selain kebijakan penurunan BI 7-*day Reverse Repo Rate,* BI juga menurunkan suku bunga *Deposit Facility* menjadi 3,00 persen dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 4,50 persen. BI melakukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk merumuskan dan menerapkan bauran kebijakan yang dibutuhkan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2020 adalah 3,19 persen.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga dari sebagian seri SBN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Kondisi ketidakpastian global sepanjang tahun 2020 telah mendorong sentimen negatif pasar. Pasar keuangan domestik sempat mengalami guncangan yang cukup dalam pada bulan April-Mei 2020. Kondisi tersebut berangsur membaik meskipun minat investor terhadap SPN 3 bulan cenderung rendah pada periode Juni-Juli 2020. Jumlah penawaran yang masuk *(incoming bids)* di lelang SPN 3 bulan mulai membaik pada bulan Agustus 2020.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang cenderung rendah juga dipengaruhi oleh melimpahnya likuiditas karena sejumlah negara, termasuk Indonesia, memberikan berbagai stimulus terhadap perekonomian. Sepanjang Januari – Desember 2020 rata-rata realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan tercatat sebesar 3,19 persen, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,62 persen.

Selain peningkatan likuiditas pasar, faktor lain yang menjadi penyebab penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan antara lain kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan *BI 7-day Reverse Repo Rate* secara bertahap dan kebijakan penurunan target penerbitan SPN 3 bulan sesuai dengan kebutuhan kas dan kebutuhan pengembangan pasar.

Mengingat sebagian besar SBN seri VR yang menggunakan suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan telah jatuh tempo pada tahun 2020 dan tidak diterbitkan lagi, maka mulai tahun anggaran 2021, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menggunakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebagai suku bunga acuan pengganti.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada level 5,89 persen.

Sepanjang tahun 2020, khususnya Triwulan I 2020 merupakan kondisi luar biasa yang menyebabkan hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami penyesuaian, salah satunya adalah imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang berfluktuasi searah dengan perkembangan pasar global. Volatilitas yang sangat tinggi pada bulan Maret – Mei 2020 mengakibatkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat signifikan hingga menyentuh 8,38 persen pada 24 Maret 2020, atau naik sebesar 135 bps dibandingkan imbal hasil 3 Januari 2020 yang sebesar 7,03 persen.

Kondisi pasar keuangan pada triwulan selanjutnya berangsur pulih tercermin dari penurunan imbal hasil pada lelang bulan Juni 2020. Tren imbal hasil SBN 10 tahun terus menurun pada akhir September 2020 dan berlanjut hingga akhir Desember 2020 sebesar 5,89 persen. Penurunan imbal hasil SBN 10 tahun juga diikuti dengan tenor yang lainnya terutama pada tenor pendek dan diharapkan dapat terus menurun searah dengan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menurunkan imbal hasil SBN.

Tren penurunan imbal hasil SBN 10 tahun juga didorong oleh persepsi pelaku pasar atas upaya pemerintah dalam menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi indikasi positif akan pemulihan terhadap aktivitas perekonomian yang mendorong penguatan harga obligasi sejalan dengan semakin bertambahnya permintaan dari investor.

Di sisi lain, investor asing yang pada kuartal I dan II keluar dari *emerging market*, telah berangsur masuk kembali pada triwulan III termasuk ke pasar Indonesia. Kondisi tersebut juga mendorong penurunan imbal hasil SBN termasuk tenor 10 tahun.

Dengan melihat kondisi likuiditas pasar keuangan global dan domestik yang sangat tinggi, serta penanganan dampak Covid-19 di berbagai negara yang semakin baik, didukung pula oleh optimisme program vaksinasi, imbal hasil SBN 10 tahun tetap rendah hingga akhir tahun 2020.

Terjaganya peringkat *investment grade* Indonesia di tengah pelemahan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi, juga turut mendukung terjaganya tingkat kepercayaan investor terhadap instrumen SBN dan turut mendorong penurunan imbal hasil SBN.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai dengan akhir Desember 2020 ditutup melemah pada posisi 5.979,07 poin.

Kondisi ketidakpastian yang terjadi sejak merebaknya pandemi Covid-19 ke berbagai negara, termasuk Indonesia telah menyebabkan kekhawatiran para pelaku pasar saham. Hampir seluruh indeks saham dunia mengalami kondisi penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada pasar saham dalam negeri sejak pandemi Covid-19.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Januari - Desember 2020 mencatat tren pergerakan yang naik meskipun pada Triwulan I 2020 mengalami penurunan. Setelah sempat mencatatkan posisi tertinggi pada level 6.325,41 poin di 14 Januari 2020, IHSG mengalami tren pelemahan hingga mencapai level terendahnya pada 24 Maret 2020 di level 3.937,63 poin. IHSG pada 31 Maret 2020 atau akhir Triwulan I 2020 ditutup pada level 4.538,83 poin. Penurunan sepanjang Triwulan I 2020 terjadi ketika pandemi Covid-19 berada pada fase penyebaran yang terus meningkat sehingga mendorong sentimen negatif pasar dan cenderung untuk mengalihkan investasinya ke dalam instrumen aset yang memiliki lindung nilai seperti emas (*safe haven asset*). Namun demikian, pada periode selanjutnya IHSG mengalami *rebound* dan kembali mengalami tren penguatan hingga akhir Desember 2020 yang ditutup pada level 5.979,07 poin, lebih tinggi dibandingkan penutupan pada akhir Januari 2020. Perkembangan positif yang terjadi sejalan dengan kinerja bursa saham di sebagian besar negara sebagai akibat perbaikan ekonomi global.

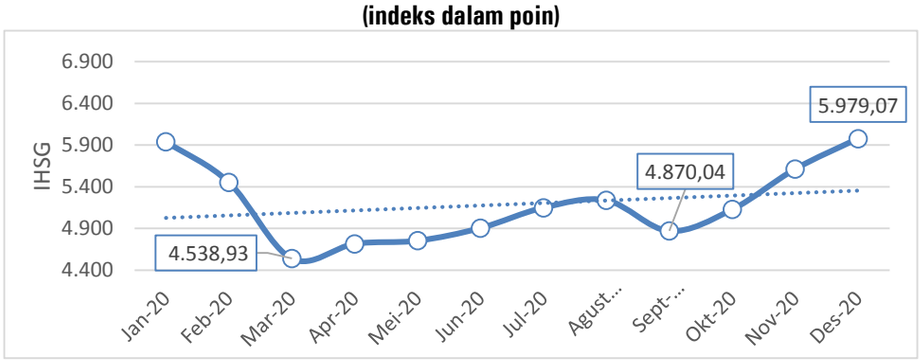
Perkembangan positif pasar keuangan juga berpengaruh pada menguatnya IHSG meski masih terbatas sebesar 0,8 persen (mtm) mulai bulan Mei 2020. Penguatan IHSG pada bulan Mei 2020 mencapai posisi 4.753,61 poin melanjutkan penguatan IHSG yang pertama kali terjadi pada bulan April 2020. Kinerja IHSG bulan Mei tergolong lebih baik dibandingkan kinerja bursa saham beberapa negara di Asia seiring dengan membaiknya minat investor pada pasar saham yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas perdagangan di bursa saham. Pada bulan Mei bursa saham pertama kali mencatat *net inflows* sejak awal tahun 2020 karena investor asing mulai masuk kembali ke pasar saham domestik.

Selanjutnya penguatan IHSG pada bulan Juni 2020 terakselerasi sebesar 3,2 persen (mtm) yang sejalan dengan kinerja bursa saham di beberapa negara Asia yang juga membaik. IHSG pada akhir Juni 2020 ditutup menguat mencapai posisi 4.905,39 poin. Bursa saham pada triwulan II mengalami tren penguatan dengan *magnitude* yang lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh peningkatan volume saham yang diperdagangkan pada bulan Juni 2020 sejumlah 198.152 juta saham atau senilai Rp189.655 juta.

Pada September 2020 IHSG mengalami pelemahan kembali pada penutupan yang berada pada level 4.870,04 poin. Tertekannya bursa saham dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian terkait peningkatan kasus Covid-19 yang masih tinggi dan tertahannya peningkatan mobilitas

masyarakat. Selanjutnya, IHSG menunjukkan penguatan bulan Oktober hingga akhir Desember 2020 dengan peningkatan 6,5 poin (mtm) dan 22,8 poin (qtq). Penguatan tersebut terjadi karena terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Tren penutupan IHSG (*end of period*) ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 13.
Tren Laju IHSG (*End of Period*) Januari –Desember 2020
(indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan

Fungsi Intermediasi Perbankan dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat dari berlanjutnya pandemi Covid-19.

Sampai dengan bulan Desember 2020, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik disertai dengan ketersediaan likuiditas yang mencukupi serta risiko kredit yang membaik. Hal tersebut didukung dengan beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada bulan Desember 2020 yang terus meningkat sejak Maret 2020. CAR perbankan Desember 2020 berada pada *level* tinggi yaitu 23,81 persen jauh di atas standar minimum yaitu di atas 8,00 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) yang tetap terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,00 persen yaitu pada 3,06 persen (*gross*) atau 0,98 persen (*net*).

Selanjutnya, dari sisi likuiditas, indikator stabilitas sistem keuangan tercermin pada pertumbuhan kredit per Desember 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen dan mengalami tren penurunan sejak Maret 2020. Pelemahan pertumbuhan kredit sejalan dengan permintaan dari dunia usaha yang lemah dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Indikator pendukung lainnya tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berada pada 11,11 persen yang didorong oleh ekspansi keuangan Pemerintah. Pelaksanaan program penjaminan pemerintah untuk kredit UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perkembangan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 serta perbaikan kinerja korporasi dapat mendorong pemulihan kinerja intermediasi perbankan. Perkembangan CAR, NPL, pertumbuhan kredit, dan DPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan
Tahun 2020
(dalam persen)

Desk.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
CAR	22,74	22,27	21,63	22,03	22,14	22,5	22,96	23,39	23,41	23,70	24,13	23,81
NPL (Gross)	2,77	2,79	2,77	2,89	3,00	3,11	3,22	3,22	3,15	3,15	3,18	3,06
Pert Kredit	6,1	5,93	7,95	5,73	3,09	1,49	1,53	1,04	0,12	0,47	1,39	-2,41
DPK	6,8	7,77	9,54	8,08	8,89	7,95	8,53	11,64	12,88	12,12	11,55	11,11

Sumber: Bank Indonesia

Rata-rata lifting minyak dan gas bumi sepanjang tahun 2020 masing-masing sebesar 707 mbpd dan 983 mboepd.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi *Indonesia Crude Price* (ICP), *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Pada APBN 2020, target *lifting* migas sebesar 1.946 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), terdiri dari rata-rata *lifting* minyak bumi diasumsikan sebesar 755 ribu barel per hari (mbpd) dan rata-rata *lifting* gas bumi diasumsikan sebesar 1.191 mboepd.

Sampai dengan Desember 2020, realisasi lifting migas mencapai 1.690 mboepd. Realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi tahun 2020 sebesar 707 mbopd. Sementara realisasi rata-rata *lifting* gas bumi sebesar 983 mboepd. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi mengalami penurunan. Hal tersebut antara lain didorong oleh tren penurunan harga minyak mentah global yang telah terlihat sejak tahun 2019 yang mendorong potensi penurunan jumlah permintaan minyak mentah.

Selanjutnya, capaian realisasi *lifting* minyak dan gas bumi disebabkan oleh kendala teknis seperti laju penurunan alamiah produksi, *unplanned shutdown* dan permasalahan keandalan fasilitas produksi seperti *shutdown* kompresor dan *power outage*. Selain itu, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi juga dipengaruhi dari masih berlanjutnya pandemi Covid-19 pada kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang (*workover*), pemeliharaan sumur (*well services*), adanya *low demand* gas dari pembeli, serta kegiatan operasional lainnya yang terganggu yang di antaranya hambatan pergerakan barang/material dari/ke lapangan.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia Januari – Desember tahun 2020 tercatat sebesar 40,39 dolar AS per barel lebih

Salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan asumsi ekonomi makro dalam rangka penyusunan APBN adalah harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP). Penetapan asumsi ICP terhadap sisi penerimaan negara memengaruhi asumsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya penerimaan dari minyak bumi, serta Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas). Sedangkan, dari sisi belanja negara, penetapan asumsi ICP akan memengaruhi asumsi belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.

rendah dibandingkan tahun 2019.

Harga minyak mentah dunia bergerak meningkat di Desember 2019 dan awal tahun 2020 karena adanya sentimen positif terjadinya kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Peningkatan harga di awal tahun 2020 terus bergerak menunjukkan tren meningkat sampai dengan pertengahan Januari 2020. Mulai merebaknya wabah Covid-19 di Wuhan, Tiongkok menurunkan aktivitas perekonomian dan menurunkan permintaan minyak mentah global. Hal tersebut menyebabkan harga minyak mentah terus menurun hingga awal April 2020 sejalan dengan eskalasi wabah Covid-19 ke berbagai negara di dunia yang kemudian ditetapkan menjadi pandemi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan aktivitas perekonomian global yang signifikan.

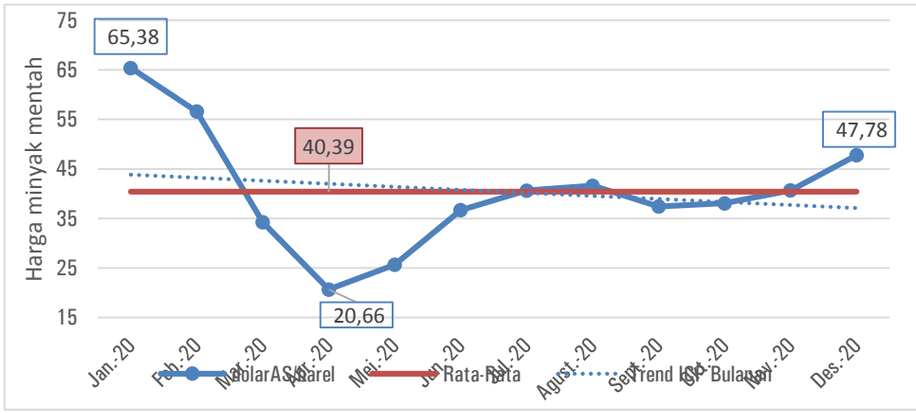
Untuk menjaga harga minyak tetap stabil, OPEC+ merespon dengan kebijakan menambah volume pemotongan produksi minyak mentah sebesar 500 ribu barel/hari. Respon resisten terhadap kebijakan OPEC+ tersebut dilakukan oleh Rusia dan Arab Saudi dengan melakukan tindakan *supply war.* Intervensi Amerika Serikat untuk mengatasi volatilitas harga yang terjadi berhasil mendorong kenaikan harga minyak mentah dengan tercapainya kesepakatan kembali memotong produksi pada kisaran 10 juta barel/hari pada Mei dan Juni 2020. Selain itu, mulai kembalinya aktivitas perekonomian seiring dengan penurunan kasus positif Covid-19 di beberapa negara pada awal Mei, mendorong peningkatan harga minyak mentah.

Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah global, harga ICP pada awal tahun 2020 juga bergerak menurun hingga Mei 2020. Pada Januari 2020, ICP berada pada level 65,38 dolar AS per barel, masih lebih tinggi dibandingkan ICP Januari 2019 yang tercatat pada level 56,55 dolar AS per barel. Namun demikian, ICP tercatat mengalami penurunan hingga mencapai harga terendahnya pada April 2020 mencapai 20,66 dolar AS per barel, sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang sempat mengalami harga negatif di bulan April 2020.

Pengaruh kesepakatan negara OPEC+ mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia dan ICP, khususnya sejak bulan April sampai dengan Agustus 2020. Pada bulan Agustus ICP mencapai harga 41,63 dolar AS per barel, namun pada bulan September 2020 kembali turun menjadi 37,43 dolar AS per barel yang disebabkan menurunnya *demand*, sentimen negatif pasar terhadap gelombang kedua pandemi Covid-19 di beberapa negara Eropa dan sentimen terhadap komitmen negara OPEC+ menjaga produksi yang disepakati.

Pada bulan Oktober hingga Desember 2020, ICP kembali mengalami tren kenaikan. Namun demikian, sepanjang Januari-Desember 2020, ICP mengalami tren penurunan dan rata-rata mencapai 40,39 dolar AS per barel. Rata-rata tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP tahun 2019 yang rata-rata mencapai 62,37 dolar AS per barel. Pandemi Covid-19 yang belum usai masih memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kinerja produksi sektor hulu migas sepanjang Januari sampai dengan Desember 2020 meskipun telah terjadi pemulihan ekonomi dan perdagangan negara-negara mitra dagang Indonesia, serta sentimen positif ketersediaan vaksin dan kebijakan OPEC yang mengatur produksi.

Grafik 14.
Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia
Januari - Desember 2020
(dolar AS per barel)



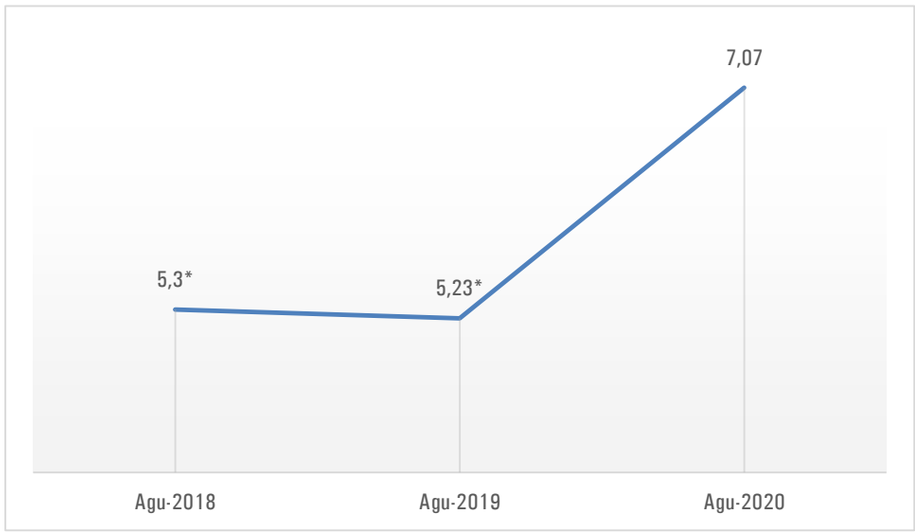
Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen pada Agustus 2020.

Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 7,07 persen. TPT Agustus 2020 tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus 2019 yang berada pada 5,23 persen. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 138,22 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,36 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen poin. Kenaikan TPAK tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

Dalam kurun waktu Agustus 2019 hingga Agustus 2020, jumlah penduduk bekerja berkurang sebanyak 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang dan jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Dengan peningkatan jumlah pengangguran tersebut, TPT nasional menunjukkan kenaikan untuk pertama kali sejak 2011. Peningkatan TPT sepanjang tahun 2020 merupakan dampak langsung pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi serta beberapa sektor usaha mengalami kebangkrutan dan tutup usaha. Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2020 mencatatkan jumlah penduduk usia kerja terdampak Covid-19 sebanyak 29,12 juta orang, terdiri dari 2,56 juta orang pengangguran karena Covid-19, 0,76 juta orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 24,03 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Sebagai upaya memitigasi risiko pandemi Covid-19 di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang salah satunya ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

Grafik 15.
Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 -2020
(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik
*Keterangan: *Pembaruan berdasarkan penimbang dari proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015*

Pada bulan September 2020, tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen atau sebesar 27,55 juta orang dan rasio gini sebesar 0,385.

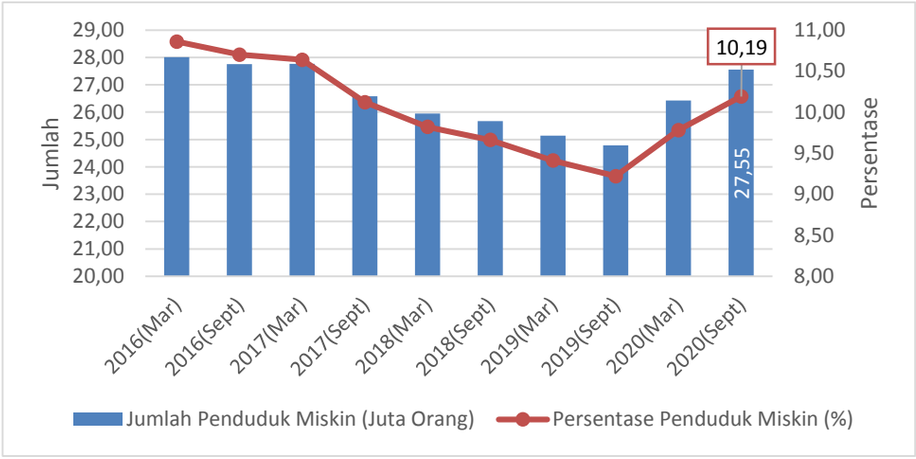
Pada bulan September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,19 persen atau terdapat 27,55 juta orang miskin. Angka tersebut mengalami peningkatan dari September tahun 2019 yang sebesar 9,22 persen atau sebanyak 24,79 juta orang. Jumlah peningkatan penduduk miskin tersebut tercatat sebesar 2,76 juta orang miskin atau sebesar 0,97 persen poin yang mengindikasikan ada peningkatan penduduk miskin baru.

Berdasarkan kewilayahan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 12,04 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 2,18 juta orang atau sebesar 1,32 persen poin dari September 2019. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan adalah sebesar 15,51 juta orang naik sebanyak 0,58 juta orang atau sebesar 0,60 persen poin. Berdasarkan target kemiskinan tahun 2020, realisasi September 2020 tersebut berada di atas batas atas sebesar 9,0 persen.

Kenaikan tingkat kemiskinan dan bertambahnya penduduk miskin baru pada tahun 2020 diantaranya merupakan dampak langsung pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi, penghasilan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kondisi tersebut terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terus mengalami pertumbuhan melambat sejak Triwulan II 2020 yang dipengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan dan besarnya penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai bantalan fiskal untuk pelaksanaan program perlindungan sosial. Pemerintah menambahkan beberapa program perlindungan sosial sehingga masyarakat miskin yang terdampak pandemi tetap

dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak dan memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan.

Grafik 16.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2016–2020

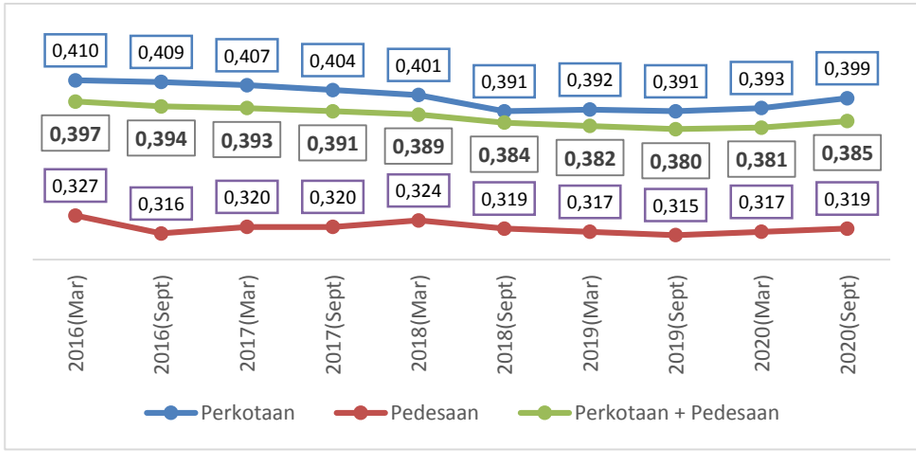


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, pada September 2020, angka Rasio Gini adalah sebesar 0,385. Apabila dibandingkan dengan September tahun 2019, Rasio Gini pada September 2020 naik sebesar 0,005 poin. Berdasarkan kewilayahan, Rasio Gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,399 naik sebesar 0,008 poin dari September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan, Rasio Gini di wilayah perdesaan tercatat sebesar 0,319 mengalami kenaikan 0,004 poin dari September 2019 yang sebesar 0,315. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk nasional pada September 2020 tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Rasio gini di wilayah perkotaan dan perdesaan masuk kategori ketimpangan rendah.

Sejak Maret 2016 hingga September 2019, ketimpangan terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia secara berkelanjutan. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan nilai Rasio Gini mengalami kenaikan setelah empat tahun sebelumnya dengan tren menurun.

Grafik 17.
Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2016–2020
(dalam indeks)



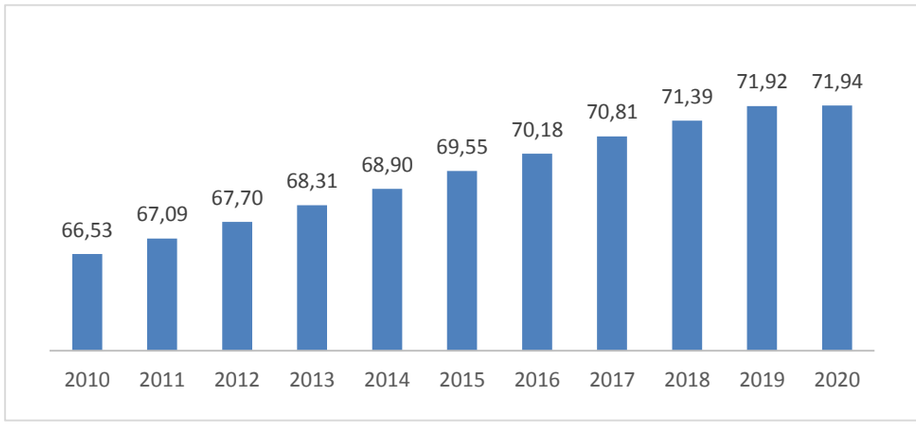
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2020 meningkat 0,03 persen dari tahun 2019 sebesar 71,92 menjadi 71,94 dengan kategori tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2019, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2010 IPM Indonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 71,94.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin atau 0,03 persen dari nilai sebesar 71,92. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori tinggi. Status pembangunan pada kategori tinggi tersebut pertama kali diraih tahun 2016, di mana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori sedang.

Grafik 18.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2010–2020
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai data realisasi atas asumsi dasar ekonomi makro, realisasi atas indikator ekonomi makro, serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, pada tabel di bawah ini disajikan data ikhtisar realisasi tahun 2020. Sebagai data pembanding, pada tabel tersebut juga disajikan realisasi tahun 2019.

Tabel 3.
Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Asumsi APBN 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%, *c-to-c)*	5,3	(2,07)	5,02
Inflasi (%, *y-on-y*)	3,1	1,68	2,72
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	3,19	5,62
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	14.577	14.146
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	63	40,39	62,37
Rata-Rata *Lifting* Minyak (mbpd)	755	707	746
Rata-Rata *Lifting* Gas (mboepd)	1.191	983	1.057

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM

Tabel 4.
Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Ekspor (juta dolar AS)	163.307	167.683
Impor (juta dolar AS)	141.569	171.276
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	135,90	129,18
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) – Surplus/(Defisit)	2,60	4,68
Bank Indonesia 7-day RR Rate (%)	3,75	5,00
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	5,89	7,06
IHSG (*end of period*)	5.979,07	6.299,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 5.
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2019
TPT (%) – Agustus	7,07	5,23
Persentase Penduduk Miskin (%) – September	10,19	9,22
Rasio Gini – September	0,385	0,380
Indeks Pembangunan Manusia (data tahunan)*	71,94	71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik

A.2.2. LANGKAH PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN

Dampak Covid-19 direspon dengan extraordinary policy karena mengancam keselamatan jiwa, mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan guncangan sosial serta stabilitas sistem keuangan

Pandemi Covid-19 atau *Corona Virus Disease* 2019 menjadi isu sentral di tahun 2020 mengingat dampaknya luar biasa yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan guncangan sosial serta menggoncang stabilitas sistem keuangan. Kondisi tersebut pada gilirannya mengubah wajah dan arah perekonomian dunia dalam waktu yang sangat cepat. Penyebaran Covid-19 ke seluruh dunia dalam waktu singkat telah menyebabkan hampir seluruh negara mengalami pelemahan ekonomi yang dalam. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga turut berdampak pada perubahan *outlook* perekonomian Indonesia, sehingga mendorong Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah strategis demi menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Sejak Januari 2020, kasus terkonfirmasi positif terus mengalami kenaikan di berbagai negara, hingga penyebaran Covid-19 menjadi sangat luas dan sulit untuk dikendalikan. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi ketika jumlah kasus Covid-19 telah mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara. Peningkatan

jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia tersebut mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pencegahan antara lain melalui pembatasan perjalanan *(travel ban/restriction),* penutupan perbatasan (*lockdown*), serta pengetatan mobilitas penduduk antar wilayah/negara. Pada skala domestik, beberapa negara memberlakukan *lockdown* yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Italia, Malaysia, dan India. *Physical distancing* serta karantina mandiri, termasuk dengan memindahkan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di berbagai negara. Pada akhir tahun 2020, total jumlah kasus global terkonfirmasi positif mencapai lebih dari 83,8 juta orang dengan total kematian 1,8 juta jiwa.

Negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat adanya konfirmasi kasus positif Covid-19 adalah Thailand. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Asia Tenggara juga terus menunjukkan peningkatan dan hingga akhir Tahun 2020 jumlahnya telah melebihi 11,9 juta kasus.

Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19. Pada akhir tahun 2020, total jumlah kasus terkonfirmasi positif Indonesia mencapai lebih dari 743,2 ribu orang dengan total kematian 22,1 ribu jiwa.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global. Perekonomian negara-negara berkembang di Asia mengalami tekanan berat karena pandemi, mengingat derajat integrasi yang dalam antara kawasan dengan ekonomi global melalui pariwisata, perdagangan, dan *remittance*. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian karena mengganggu kepercayaan investor, pasar keuangan, sektor pariwisata/*travel*, dan *supply chain*. Kebijakan pembatasan berskala besar yang diambil oleh berbagai negara mengakibatkan turunnya aktivitas perekonomian hingga berada pada level yang rendah. Selama masa pembatasan tersebut, seluruh aktivitas masyarakat, khususnya terkait aktivitas perekonomian menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi global yang mengarah kepada potensi resesi ekonomi, termasuk Indonesia.

Secara umum dampak Covid-19 sangat luar biasa, mengancam keselamatan jiwa, mengancam aktivitas perekonomian serta stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu direspon dengan kebijakan yang luar biasa juga (*extraordinary policy*). Untuk itu, fleksibilitas diperlukan agar APBN 2020 mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk penguatan *countercyclical* dalam rangka memitigasi dampak Covid-19, dengan harapan proses penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara cepat dan efektif serta pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menempuh kebijakan *extraordinary* antara lain adanya kecenderungan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus

bertambah, melemahnya kinerja perekonomian yang ditandai dengan pelemahan kinerja ekspor-impor, terdepresiasinya nilai tukar rupiah, penurunan ekspektasi pasar, dan peningkatan *yield* akibat ketatnya likuiditas pasar keuangan. Penurunan aktivitas perekonomian tersebut selanjutnya berdampak pada terganggunya sektor riil sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian/seluruh pekerja yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan. Terganggunya sektor riil juga berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal agar mempunyai ruang fiskal yang memadai untuk mendukung penguatan kebijakan *countercyclical* dalam rangka penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Walaupun demikian, fleksibilitas fiskal tersebut juga diimbangi dengan pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal tetap dapat dijaga.

Untuk mendorong penanganan Covid-19, Pemerintah memberikan stimulus fiskal dan berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Pemerintah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk melakukan sinergi dan harmonisasi kebijakan dalam penanganan Covid-19.

Paket Stimulus I diluncurkan pada bulan Februari 2020. Stimulus I berfokus pada area dan sektor yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 seperti sektor pariwisata. Stimulus juga mencakup upaya percepatan belanja untuk memperkuat perekonomian domestik, kebijakan untuk mendorong padat karya, dan perluasan kartu sembako melalui penambahan penerima manfaat. Setelah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada bulan Maret 2020, Pemerintah merespon cepat dengan menggulirkan Paket Stimulus II pada 13 Maret 2020. Paket Stimulus II tersebut diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta mendukung dunia usaha serta industri yang terdampak melalui pelonggaran kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan di sektor keuangan dalam bentuk relaksasi kredit UMKM, stimulus moneter, serta insentif perpajakan merupakan bagian dari Paket Stimulus II.

Dalam perkembangannya, transmisi Covid-19 semakin meluas sehingga meningkatkan ancaman kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan kebijakan di bidang kesehatan yang didukung dengan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang terus mengalami penambahan secara cepat membuat Pemerintah menilai bahwa langkah penanganan yang telah dijalankan perlu dioptimalkan. Eskalasi pandemi Covid-19 terus meningkatkan risiko tidak hanya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan kondisi perekonomian nasional, termasuk stabilitas sektor keuangan. Kondisi tersebut telah mendorong Pemerintah untuk menggulirkan langkah luar biasa (*extraordinary actions*) guna mengantisipasi dan meminimalkan risiko perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Paket Stimulus III serta

penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan bagi Pemerintah, termasuk otoritas keuangan dan perbankan untuk melakukan langkah-langkah preventif yang bersifat luar biasa secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam rangka penanganan Covid-19 mengingat dampaknya terhadap sejumlah aspek, seperti aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang akan memengaruhi fundamental perekonomian nasional. PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.

Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Dari sisi kebijakan stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan antara lain melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penetapan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement* (*Repo*) SBN milik LPS, serta perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS.

Untuk memitigasi meluasnya dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah bergerak cepat memberikan stimulus di bidang kesehatan, program perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L dan pemda), dukungan untuk dunia usaha dan UMKM. Berbagai stimulus fiskal tersebut bertujuan untuk mendorong agar dampak pandemi Covid-19 dapat segera diatasi, melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terhindar dari kemunduran sosial, serta menjaga agar dunia usaha dan UMKM mampu bertahan, sehingga terhindar dari pelemahan yang semakin dalam. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian postur APBN 2020 dari 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) dan disesuaikan kembali menjadi 6,34 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020, diundangkan 25 Juni 2020) yang antara lain untuk menampung berbagai tambahan belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Walaupun demikian, defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable* dengan melakukan

langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, insentif fiskal melalui Program PEN dilakukan melalui pengintegrasian berbagai langkah untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, termasuk para pelaku ekonominya. Implementasi program PEN diwujudkan melalui beberapa modalitas yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi Pemerintah, kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan Belanja APBN. Pelaksanaan program PEN tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (diundangkan tanggal 11 Mei 2020), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Pembiayaan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program PEN juga mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020 tanggal 11 Desember 2020) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) II (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan SKB I, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian SBN tenor jangka panjang di pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan (*Green Shoe Option*/GSO), dan penawaran langsung atau *Private Placement*/PP). Melalui skema ini, Bank Indonesia berperan sebagai *last resort* atau *back stop* pembiayaan utang.

Selanjutnya dalam SKB II, Bank Indonesia menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program PEN. Penerbitan SBN dimaksud dibedakan menjadi kelompok *public goods* dan *non-public goods* (UMKM, Korporasi dan lainnya). Mekanisme kerja sama antara lain dilakukan melalui:

1. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah menerbitkan SBN berbunga mengambang (*variable rate*) dengan acuan suku bunga sebesar *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 bulan. Seluruh SBN ini dibeli Bank Indonesia dengan mekanisme *private placement* dan beban bunganya seluruhnya ditanggung Bank Indonesia.
2. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* UMKM dan Korporasi, Bank Indonesia berkontribusi sebesar selisih antara imbal hasil *(yield)* SUN dan/atau SBSN dengan

beban yang ditanggung oleh Pemerintah, atau sebesar selisih antara imbal hasil *(yield)* SUN dan/atau SBSN dengan BI *reverse repo* Bank Indonesia tenor 3 bulan ditambah 1 persen.

3. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* lainnya, beban bunga seluruhnya ditanggung Pemerintah sebesar imbal hasil (yield) penerbitan SUN dan/atau SBSN.

Dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan Program PEN, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Program PEN tersebut diklasterisasi ke dalam enam sektor, yaitu: 1) kesehatan; 2) perlindungan sosial; 3) dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 4) insentif usaha; 5) dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan 6) pembiayaan korporasi. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat realisasi program PEN adalah melakukan reklasterisasi agar alokasi untuk program yang kemungkinan tidak terserap dapat dimanfaatkan untuk program lainnya. Hal ini juga ditujukan agar program PEN dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Selain itu, Program PEN juga memberikan stimulus bagi dunia usaha dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha di masa pandemi Covid-19, serta mendorong akselerasi pemulihan dunia usaha.

Klaster pertama, kesehatan. Stimulus untuk penanganan di sektor kesehatan dialokasikan semula sebesar Rp87,55 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp99,5 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain: penyediaan belanja penanganan pandemi Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian tenaga medis, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi Gugus Tugas Covid-19/Satuan Tugas Covid-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Pemerintah memberikan stimulus berupa insentif bagi tenaga kesehatan yang berperan besar dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk pemberian santunan bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melaksanakan tugas penanganan Covid-19. Stimulus pada sektor kesehatan direncanakan juga diberikan kepada masyarakat dari kelompok ekonomi rentan berupa bantuan premi asuransi BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Di sisi Perpajakan, Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPN DTP serta Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN sektor kesehatan, Pemerintah melakukan percepatan verifikasi insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian serta percepatan proses pengadaan alat kesehatan untuk menaikkan tingkat kesembuhan dan menurunkan tingkat kematian. Sampai dengan Desember tahun 2020, telah direalisasikan anggaran klaster kesehatan sebesar Rp62,67 triliun antara lain untuk 1,07 juta orang penerima insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah (akumulasi pembayaran), santunan kematian bagi 194 tenaga kesehatan, penyaluran bantuan iuran JKN bagi 41,59 juta peserta, pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, pengadaan awal vaksin Covid-19, serta pemberian insentif perpajakan di bidang Kesehatan sebesar Rp4,05 triliun.

Klaster kedua, perlindungan sosial. Alokasi Program PEN untuk sektor perlindungan sosial semula sebesar Rp203,90 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp230,20 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan antara lain: perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Paket Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon listrik, Bantuan Subsidi Gaji/Upah, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pemberian stimulus pada sektor ini merupakan respon atas potensi ancaman yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat menurunkan konsumsi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat melemahkan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan perluasan dan penguatan program perlindungan sosial, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan rentan serta masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, petani, dan pedagang kecil.

Target penerima manfaat dari sektor perlindungan sosial antara lain penerima program PKH sebesar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu Sembako sebesar 19,2 juta KPM, diskon listrik sebesar 31,40 juta rumah tangga, bantuan tunai non-Jabodetabek sebesar 9,2 juta KPM, bantuan paket sembako Jabodetabek sebesar 1,9 juta KPM, BLT Dana Desa sebesar 8 juta orang, penerima Kartu Prakerja sebesar 5,6 juta peserta, dan 12,4 juta orang penerima bantuan subsidi gaji/upah. Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN sektor perlindungan sosial, Pemerintah melakukan beberapa langkah antara lain: melakukan akselerasi penyelesaian data KPM pada *Database* Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); perbaikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja; penguatan peran pendampingan desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa; serta percepatan inisiatif baru pada sektor perlindungan sosial, seperti subsidi gaji/upah serta subsidi kuota dalam mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp216,59 triliun antara lain untuk 10 juta KPM penerima manfaat PKH, 19,41 juta KPM kartu sembako, 2,2 juta KPM Paket Sembako Jabodetabek, 9,18 juta KPM BST non-Jabodetabek, 5,5 juta peserta Kartu Prakerja, 32,1 juta rumah tangga penerima diskon tarif listrik, 8 juta KPM BLT Dana Desa, dan 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji/upah.

Klaster Ketiga, program sektoral K/L dan pemda. Alokasi Program PEN untuk sektoral K/L dan pemda semula sebesar Rp106,11 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp67,86 triliun pada 16 Desember 2020. Program sektoral K/L dan pemda dilakukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman PEN daerah. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain: Program padat karya K/L, insentif perumahan, pariwisata berupa hibah ke daerah dan diskon tiket oleh K/L, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan fasilitas pinjaman daerah.

Selanjutnya, untuk dukungan penanganan Program PEN bagi pemerintah daerah, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun, serta penyediaan fasilitas Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20 triliun. Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif tinggi sehingga mampu membiayai penyediaan infrastruktur prioritas daerah. Pemberian Pinjaman PEN Daerah tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung *countercyclical* dan stabilisasi nasional dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan *existing* di daerah.

Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan sebesar Rp65,22 triliun antara lain untuk pinjaman daerah kepada 21 pemda, untuk 2,40 juta pekerja program padat karya pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; DID Pemulihan Ekonomi sebesar Rp4,96 triliun; DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun; Stimulus Pariwisata sebesar Rp2,90 triliun; Insentif Perumahan sebesar Rp0,48 triliun; serta Bantuan Pesantren sebesar Rp2,61 triliun. ntar

Klaster keempat, insentif usaha. Alokasi Program PEN untuk insentif usaha adalah sebesar Rp120,61 triliun. Pemberian insentif usaha tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha dalam rangka membantu dunia usaha meminimalkan terjadinya kerugian, meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, mempertahankan daya beli para pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Dukungan Pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk insentif perpajakan antara lain berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP), Pembebasan Bea Masuk dan Tidak dipungut PDRI atas Impor barang dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta insentif lainnya berupa pembebasan ketentuan rekening minimum dan abonemen listrik bagi pelanggan golongan sosial, bisnis, dan industri. Guna mendukung realisasi program PEN sektor ini, Pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* dan realokasi anggaran PPh Pasal 21 DTP dan BM DTP yang diperkirakan tidak akan terserap ke pos belanja. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster sektoral insentif usaha telah direalisasikan sebesar Rp58,38 triliun.

Pemberian insentif fiskal dan prosedural juga diberikan bagi percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PDRI atas impor alat kesehatan dengan total nilai barang impor sebesar Rp 12,25 triliun, terdiri dari masker, *Rapid Test*, PCR *Test*, APD, VTM, ventilator, obat-obatan, dan lain-lain. Pemberian fasilitas fiskal ini diberikan kepada 1.814 entitas terdiri dari Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan dan Swasta. Dengan adanya insentif ini, negara mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan dalam negeri secara cepat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk fasilitas impor atas vaksin Covid-19, juga diberikan insentif fiskal dan prosedural dengan nilai fasilitas selama 2020 sebesar Rp50,95 miliar, atas impor vaksin sebanyak 1,2 juta dosis.

Pemerintah juga memberikan insentif BM DTP kepada industri sektor tertentu yang terdampak Covid-19 dalam rangka membantu dunia usaha bangkit kembali. Selama kurun waktu Oktober-Desember 2020 telah diberikan fasilitas BMDTP kepada 11 sektor industri terdampak, dengan nilai realisasi fasilitas sebesar Rp91,07 miliar dengan total nilai BMDTP yang diberikan sebesar Rp107,24 miliar.

Insentif usaha tambahan juga diberikan kepada perusahaan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) termasuk didalamnya KITE-IKM, berupa relaksasi aturan pemasukan bahan baku lokal dan penyerahan bahan jadi, serta mendorong kebijakan KB Mandiri sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19. Mengingat permintaan ekspor yang sedang turun, insentif ini dapat meminimalkan perusahaan dari kebangkrutan, meminimalkan PHK, mempertahankan daya beli pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Insentif bagi KB dan KITE ini dianggap penting karena di tahun 2020 Perusahaan KB KITE memberikan kontribusi ekspor sebesar 40,97 persen dibandingkan ekspor nasional, sehingga pemulihan ekspor perusahaan KB dan KITE nantinya diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekspor nasional.

Klaster kelima, dukungan UMKM. Alokasi Program PEN untuk dukungan UMKM semula sebesar Rp123,46 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp116,30 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya antara lain: subsidi bunga/margin bagi UMKM, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, penjaminan *loss limit* kredit UMKM, pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah (DTP), pembiayaan investasi kepada koperasi melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional karena UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemberian insentif oleh Pemerintah terhadap UMKM diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif perpajakan atas PPh Final UMKM serta pemberian relaksasi terhadap pembayaran angsuran dan bunga kredit UMKM melalui program Subsidi Bunga UMKM. Program subsidi tersebut diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengurangi beban biaya bunga yang harus ditanggung selama masa Pandemi agar dapat dialihkan untuk upaya-upaya lain dalam mempertahankan usahanya. Penyaluran Subsidi Bunga ini diberikan kepada UMKM, Koperasi dan debitur lainnya yang memiliki pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar yang disalurkan melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, BUMN dan BLU penyalur program kredit Pemerintah, serta Koperasi. Proses bisnis terkait penyaluran program Subsidi Bunga ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 dengan periode pemberian subsidi bunga selama maksimal enam bulan. Melalui PMK tersebut, diatur juga pemberian Subsidi Bunga bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan juga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) termasuk untuk usaha informal seperti ojek dan ojek *online*. Untuk besaran pinjaman sampai dengan Rp10 juta yang disalurkan melalui lembaga yang menyalurkan program kredit Pemerintah (BUMN dan BLU), maka besaran bunga diberikan sampai dengan 25 persen untuk periode enam bulan. Sementara pada penyalur perbankan dan perusahaan pembiayaan, untuk besaran pinjaman sampai dengan Rp500 juta, diberikan maksimal untuk dua akun pinjaman dengan besaran subdisi 6 persen untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan selanjutnya. Pada kategori pinjaman lebih dari Rp500 juta

sampai dengan Rp10 miliar mendapatkan maksimal untuk satu akun pinjaman dengan besaran bunga sebesar 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan selanjutnya.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Subsidi Bunga telah terealisasikan sebesar Rp12,81 triliun dan berhasil menjangkau 19,6 juta pelaku UMKM. Program Subsidi Bunga bagi UMKM tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan usaha di tengah pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Pemerintah melakukan penempatan dana di bank dalam rangka pelaksanaan program PEN untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur sehingga dapat mendukung dan mengembangkan ekosistem UMKM dan Koperasi serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk kepentingan tersebut, bank harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut: 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; 2) mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia; 3) memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 4) melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan bisnis perbankan tersebut berupa ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dan/atau pemberian dukungan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM dan/atau Korporasi dalam rangka PEN.

Upaya lain untuk mendukung UMKM di masa pandemi, Pemerintah memberikan fasilitas penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dengan pertimbangan bahwa perbankan cenderung untuk menahan dalam pemberian kredit yang dikarenakan peningkatan risiko kredit macet/*non-performing loan* (NPL) di pelaku usaha/debitur. Secara umum, Penjaminan Pemerintah diberikan dalam bentuk jaminan atas nama Pemerintah oleh Menteri Keuangan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas pemenuhan kewajiban finansial pelaku UMKM yang meliputi tunggakan pokok pinjaman dan bunga/imbalan atas kredit modal kerja baru ataupun tambahan kredit modal kerja dalam rangka restrukturisasi dengan plafon pinjaman yang dijamin maksimal Rp10 miliar dan *coverage* penjaminan sampai dengan 80 persen.

Atas pemberian jaminan tersebut, Pemerintah telah memberikan dukungan subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha penjaminan yang ditunjuk, serta dukungan *loss limit* dengan *threshold* sebesar 90 persen dari akumulasi IJP yang telah diterima sebagai mitigasi atas risiko NPL.

Selain itu, beberapa stimulus juga digulirkan oleh Pemerintah dalam bentuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui BLU LPDB KUMKM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam perkembangannya, pemerintah juga memberikan Bantuan Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), yaitu bantuan sebesar Rp2,4 juta per usaha yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas usaha mikro selama masa pandemi. Program BPUM telah berhasil terealisasi kepada 12 juta penerima dengan dana sebesar Rp28,65 triliun. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster dukungan UMKM telah direalisasikan sebesar Rp112,26 triliun.

Klaster keenam, pembiayaan korporasi. Alokasi Program PEN untuk sektor pembiayaan korporasi adalah semula sebesar Rp53,57 triliun kemudian direklasterisasi menjadi sebesar Rp60,73 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya antara lain: Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman kepada BUMN, kegiatan penjaminan kredit korporasi dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF).

Dukungan Pemerintah terhadap korporasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha korporasi di tengah pandemi. Dukungan tersebut diberikan khususnya kepada korporasi padat karya melalui pemberian fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemberian insentif pada sektor pembiayaan korporasi dilakukan kepada BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Beberapa BUMN mengalami dampak langsung atas terjadinya pandemi antara lain adalah PT PLN (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT KAI (Persero). BUMN tersebut memerlukan perhatian khusus dan penanganan segera guna mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya sehingga direncanakan menjadi pihak penerima pembiayaan korporasi ini. Pembiayaan korporasi ini dilakukan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) dan pinjaman investasi untuk modal kerja.

Program penjaminan kredit untuk korporasi padat karya antara lain dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan yang dapat meningkatkan jumlah kredit modal kerja bagi para pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara optimal selama masa pandemi. Besaran penjaminan kredit modal kerja korporasi diberikan sebesar 60 persen dari kredit. Sementara itu, untuk sektor prioritas yang meliputi sektor pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, dan sektor usaha lain yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat dan/atau memiliki efek *multiplier* yang tinggi diberikan penjaminan sebesar 80 persen dari kredit. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster pembiayaan korporasi telah direalisasikan 100 persen dari pagu dengan rincian berupa PMN BUMN dan Lembaga dalam rangka PEN sebesar Rp24,07 triliun; Pinjaman kepada BUMN dalam rangka PEN sebesar Rp19,65 triliun; Pembiayaan SWF sebesar Rp15 triliun; IJP korporasi sebesar Rp9,11 miliar, Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* sebesar Rp0,76 miliar; dan *stop loss* penjaminan sebesar Rp2 triliun.

Selanjutnya, dalam melaksanakan percepatan realisasi belanja negara secara keseluruhan sepanjang tahun 2020, Pemerintah telah merumuskan Strategi Percepatan Penyerapan ke dalam tiga pilar, yaitu 1) akselerasi eksekusi Program PEN; 2) memperkuat tingkat konsumsi pemerintah; dan 3) memperkuat tingkat konsumsi masyarakat. Pilar Pertama dilakukan melalui percepatan penyerapan dan perbaikan penyaluran secara tepat sasaran untuk program *existing* dan yang telah memiliki alokasi DIPA, percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA untuk inisiatif baru pada enam sektor Program PEN sehingga dapat segera dilakukan realisasi, serta pengalihan atas program usulan baru yang tidak didukung dengan data yang valid dan/atau memerlukan perubahan regulasi yang rumit sehingga dapat memperkuat program *existing* yang implementatif. Pilar Kedua dilakukan melalui upaya Pemerintah mendorong penguatan belanja pegawai sebagai salah satu instrumen pendorong pertumbuhan, mempercepat realisasi belanja

barang (terutama untuk mendukung pola kerja baru di masa adaptasi kebiasaan baru), melakukan realokasi belanja barang dan belanja modal yang sulit untuk dilakukan eksekusi sehingga dapat mendukung peningkatan infrastruktur digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik, serta melakukan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Dan Pilar Ketiga dilakukan melalui akselerasi belanja bantuan sosial berupa modifikasi belanja perlindungan sosial dalam bentuk kenaikan besaran bantuan, perluasan penerima bantuan, peningkatan frekuensi penyaluran bantuan, serta perpanjangan periode penyaluran bantuan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal lain yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan pihak perbankan dan asosiasi pelaku usaha di sektor riil guna memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. Untuk melengkapi kebijakan relaksasi, restrukturisasi, dan penilaian kualitas kredit/pembiayaan bagi perbankan dan/atau pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan, berbagai stimulus lanjutan juga diterbitkan. Stimulus lanjutan tersebut antara lain berupa penundaan penerapan Basel III terkait pelonggaran pemenuhan indikator likuiditas dan indikator permodalan untuk memberikan ruang bagi industri keuangan. Selain itu, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) guna memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan.

Dari program PEN yang telah digulirkan, Pemerintah terus berupaya secara optimal menangani dampak pandemi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sampai dengan Desember tahun 2020, realisasi anggaran program penanganan Covid-19 melalui program PEN telah menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar Rp575,85 triliun atau 82,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi atas program PEN tahun 2020 tertinggi pada klaster perlindungan sosial sebesar Rp216,59 triliun, kemudian diikuti dukungan UMKM sebesar Rp112,26 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,22 triliun, kesehatan sebesar Rp62,67 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,73 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,38 triliun.

Selama tahun 2020, APBN sudah berperan optimal sebagai instrumen *countercyclical.* Tanpa intervensi APBN dan Program PEN, kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. Program bantuan sosial pemerintah berperan penting menjaga stabilitas daya beli masyarakat sehingga Konsumsi Rumah tangga dalam PDB membaik. Selain itu, kontraksi ekonomi dan pelebaran defisit fiskal dan utang Indonesia relatif moderat dibanding banyak negara lain. Hal tersebut dapat tercapai melalui pengelolaan APBN yang optimal didukung oleh sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa.

A.2.3. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 mengacu kepada Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020 sebagai tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan, tema kebijakan fiskal tahun 2020 tetap diselaraskan dengan *progress*

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2020 menghadapi tantangan pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan responsif untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya, dengan mengusung tema yaitu "APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia". Tema tersebut juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas yang dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional yaitu: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Selanjutnya, untuk menerjemahkan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 ke dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 yang menjadi instrumen Pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal tahun 2020. Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020, anggaran untuk pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.233,19 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 3,14 persen dari APBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.165,11 triliun. Sedangkan, untuk belanja negara, telah direncanakan sebesar Rp2.540,42 triliun atau meningkat 3,22 persen dari APBN tahun 2019 yang sebesar Rp2.461,11 triliun. Untuk menyelaraskan antara besaran rencana pendapatan negara dengan rencana belanja negara tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan kebijakan defisit anggaran melalui rencana pembiayaan anggaran sebesar Rp307,23 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB.

Memasuki awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia harus menghadapi tantangan baru setelah era perdagangan antara AS dan Tiongkok yang mulai memasuki fase relaksasi. Tantangan baru tersebut berupa pandemi COVID-19 yang meluas hingga hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan luas menyebabkan sebagian besar negara harus melakukan pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian berdampak terhadap roda perekonomian. Transmisi COVID-19 ke Indonesia mulai terpublikasi pada awal Maret 2020 hingga Pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 meluas di tanah air. Oleh karena itu, sejak tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dampak pandemi COVID-19 tidak saja membahayakan kesehatan namun juga berpotensi membahayakan kondisi sosial masyarakat, perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Peningkatan kasus COVID-19 yang terus menerus dan sangat signifikan, menimbulkan ketidakpastian akan berakhirnya pandemi. Terjadinya pelemahan di berbagai sektor perekonomian karena adanya pembatasan aktivitas sosial berskala besar serta karena pengaruh ketidakpastian

perekonomian global, selanjutnya akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadikan hal ini sebagai kondisi yang *extraordinary* sehingga memerlukan penanganan dan langkah kebijakan yang *extraordinary* namun tetap akuntabel.

Sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, Pemerintah menetapkan kebijakan yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020 oleh DPR RI. Kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan pembiayaan anggaran. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut diatur bahwa batasan defisit APBN dapat melampaui 3 persen dari PDB selama masa penanganan pandemi COVID-19 dan/atau saat menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan kebijakan penyesuaian besaran defisit APBN secara bertahap agar kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen terhadap PDB, pada tahun anggaran 2023. Implementasi atas kebijakan keuangan negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung implementasi kebijakan keuangan negara, termasuk stabilitas sistem keuangan untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur APBN tahun anggaran 2020. Penyesuaian postur APBN tahun anggaran 2020 dilakukan 2 (dua) kali dalam semester I tahun 2020. Perubahan pertama melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Pokok perubahan terhadap postur APBN tahun 2020 tersebut yaitu:

Tabel 6. Ringkasan Perubahan Postur APBN Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	UU 20/2019	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020
	Oktober 2019	April 2020	Juni 2020
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**2.233,20**	**1.760,88**	**1.699,95**
I. Pendapatan Negara	2.232,70	1.760,39	1.698,65
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,70	1.462,63	1.404,51
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,00	297,76	294,14
II. Penerimaan Hibah	0,50	0,50	1,30
B. Belanja Negara	**2.540,42**	**2.613,82**	**2.739,17**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683,48	1.851,10	1.975,24
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,95	762,72	763,93
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	**(12,01)**	**(517,78)**	**(700,43)**
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	**(307,23)**	**(852,94)**	**(1.039,22)**
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(1,76)	(5,07)	(6,34)
E. Pembiayaan Anggaran	**307,23**	**852,94**	**1.039,22**
I. Pembiayaan Utang	351,85	1.006,40	1.220,46
II. Pembiayaan Investasi	(74,23)	(229,32)	(257,10)
III. Pemberian Pinjaman	5,19	5,81	5,81
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,59)	(0,59)	(0,59)
V. Pembiayaan Lainnya	25	70,64	70,64

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, penyesuaian postur APBN tahun anggaran 2020 perlu dilakukan mengingat adanya dampak pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pelemahan aktivitas perekonomian global dan domestik, serta sebagai respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kombinasi hal tersebut pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan tekanan pada pendapatan negara. Penurunan target penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar 24,72 persen dari target awal yaitu dari Rp1.865,70 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp1.404,51 triliun (Perpres 72/2020). Target PNBP juga mengalami penurunan sebesar 19,85 persen yaitu dari Rp367,0 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp294,14 triliun (Perpres 72/2020).

Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter cyclical*, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,82 persen yaitu dari Rp2.540,42 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp2.739,17 triliun (Perpres 72/2020) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi

anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, berbagai program stimulus Pemerintah telah terealisasi dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan dinamika kebijakan tersebut, maka target pendapatan negara dan hibah dalam postur APBN tahun anggaran 2020 (Perpres 72/2020) lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 2019 sedangkan alokasi belanja negara lebih tinggi. Target Pendapatan Negara dan Hibah yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya target Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai konsekuensi menurunnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit yang makin melebar dan pembiayaan yang meningkat. Perbandingan postur APBN tahun anggaran 2020 sesuai Perpres 72/2020 dengan postur APBN tahun anggaran 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Ringkasan APBN Tahun 2020 dan APBN Tahun 2019
(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	APBN 2020 (Perpres 72/2020)	APBN 2019	% Kenaikan (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**1.699,95**	**2.165,11**	**(21,48)**
I. Pendapatan Negara	1.698,65	2.164,68	(21,53)
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	1.786,38	(21,38)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,14	378,30	(22,25)
II. Penerimaan Hibah	1,30	0,44	195,45
B. Belanja Negara	**2.739,17**	**2.481,11**	**11,30**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.634,34	20,86
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,93	826,77	(7,60)
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	**(700,43)**	**(20,11)**	
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	**(1.039,22)**	**(296,00)**	**251,09**
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(6,34)	(1,84)	244,57
E. Pembiayaan Anggaran	**1.039,22**	**296,00**	**251,09**
I. Pembiayaan Utang	1.220,46	359,25	239,72
II. Pembiayaan Investasi	(257,10)	(75,90)	238,74
III. Pemberian Pinjaman	5,81	(2,35)	347,23
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,59)	0,00	-
V. Pembiayaan Lainnya	70,64	15,00	370,93

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 tumbuh negatif di tengah-tengah kontraksi ekonomi dunia.

Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai dampak penurunan aktivitas perekonomian baik global maupun domestik serta pemberian insentif bagi dunia usaha termasuk UMKM dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dialami oleh banyak negara secara global dan berdampak sangat masif di seluruh belahan dunia terutama pada penurunan aktivitas ekonomi global secara signifikan akibat respon kebijakan *physical distancing*. Kondisi *extraordinary* ini secara langsung memengaruhi produksi, permintaan dan *supply chain* hingga menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi di dunia. Pada publikasi *Global Economic Prospects* (Januari 2021), Bank Dunia mengestimasi perekonomian global pada Tahun 2020 mengalami kontraksi bahkan melebihi angka kontraksi perekonomian dunia akibat krisis finansial global pada tahun 2009. Estimasi tersebut mengalami perbaikan pada akhir tahun 2020 seiring dengan pemulihan ekonomi negara-negara maju yang lebih cepat dibandingkan perkiraan. Hal ini ditandai oleh perkembangan aktivitas ekonomi global, tercermin dari perbaikan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur global yang berlanjut ke level ekspansi.

Dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global relatif semakin stabil hingga menuju penghujung tahun 2020, sehingga berdampak positif terhadap *capital flow* pada *emerging market*. Tingkat inflasi yang selalu terjaga pada level rendah, disertai nilai tukar Rupiah yang tetap terkendali di tengah-tengah tren penguatan dolar Amerika Serikat dan guncangan pasar keuangan, menjadi faktor pendukung terwujudnya komitmen Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Berbagai guncangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri disertai kondisi ketidakpastian harga komoditas dunia yang terjadi sejak awal tahun hingga Triwulan IV 2020, pada akhirnya telah memberikan tekanan yang kuat pada kinerja realisasi pendapatan negara secara kumulatif Tahun 2020.

Dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah mengoptimalkan kebijakan pada penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut dilaksanakan antara lain melalui pemberian insentif berupa fasilitas pajak, insentif kepabeanan atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, serta insentif perpajakan untuk dunia usaha (termasuk UMKM). Bentuk insentif perpajakan berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan Angsuran PPh 25, pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan dan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, perluasan pembebasan cukai *Ethyl* Alkohol, serta fasilitas prosedural seperti pengecualian larangan ekspor alat kesehatan, relaksasi penjualan lokal Kawasan Berikat, hingga relaksasi pelunasan cukai. Selain itu, bentuk relaksasi PNBP yang diberikan meliputi relaksasi penyerahan Surat Keterangan Asal, pengenaan tarif sampai dengan Rp0, pemberian keringanan, dan pengaturan batas waktu jatuh tempo.

Kontraksi dialami oleh hampir seluruh komponen Penerimaan Pajak pada tahun 2020 kecuali pada komponen Penerimaan Cukai dan Bea Keluar seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih melambat dibanding periode yang sama tahun lalu (*y-on-y*). Namun demikian, optimisme peningkatan aktivitas ekonomi sudah mulai dapat diprediksi dari kondisi *bounce back* aktivitas ekonomi yang tercermin

dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto periode Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2020 (*q-to-q*) yang menunjukkan angka positif. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, memasuki triwulan III hingga penghujung Tahun 2020, penerimaan pajak baik triwulanan (*q-to-q*) maupun bulanan (*m-to-m*) relatif telah menunjukkan tren positif.

Di sisi lain, program reformasi administrasi perpajakan dan reformasi pelayanan masih terus berlanjut, seperti penerapan PPN Produk Digital Luar Negeri dan penerapan Aplikasi e-Bupot 23/26 yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Selain reformasi yang diterapkan pada sisi administrasi, reformasi perpajakan juga dilaksanakan untuk meningkatkan pendanaan investasi melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurun secara bertahap dan penerapan tarif pajak lebih rendah terhadap Wajib Pajak *Go Public*.

Kinerja besaran total PNBP mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 secara umum disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, kecuali pendapatan BLU yang mengalami pertumbuhan positif. Pendapatan SDA Migas terkontraksi paling dalam pada PNBP terutama disebabkan menurunnya realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan *Lifiting* Migas. Sedangkan PNBP SDA Non migas mengalami kontraksi disebabkan turunnya realisasi Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan produksi batu bara nasional. Sepanjang tahun 2020 dilakukan perbaikan pada tata kelola PNBP secara terus-menerus terutama melalui penyempurnaan regulasi berupa penyelesaian dan penetapan beberapa peraturan pemerintah turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk penyusunan peraturan menteri keuangan maupun menteri teknis.

Selanjutnya, kinerja pendapatan kekayaan negara dipisahkan mengalami kontraksi cukup dalam terutama berasal dari dividen BUMN akibat merespon dampak pandemi yang berpengaruh pada menurunnya aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat. PNBP Lainnya terutama PNBP yang berasal dari Layanan Kementerian/Lembaga mengalami kontraksi dibandingkan 2019 disebabkan dampak pandemi yang memengaruhi menurunnya volume layanan di Kementerian/Lembaga. Selain itu pendapatan dari minyak mentah (DMO) dan penjualan hasil tambang juga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Berbanding terbalik dengan komponen-komponen sebelumnya, pendapatan BLU tumbuh positif terutama disebabkan peningkatan pendapatan dari dana perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu Penerimaan Hibah mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan penerimaan hibah dalam negeri langsung terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 mencapai Rp1.647,78 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2020 mencapai Rp1.647,78 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 15,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan persentase realisasi sebesar 96,93 persen terhadap target Perpres 72 Tahun 2020. Kontraksi dialami oleh seluruh komponen Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2020 kecuali pada Penerimaan Hibah dan Pendapatan BLU yang tumbuh positif di tengah melambatnya kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penerimaan Pajak sebagai sumber terbesar Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi paling dalam pada Tahun 2020. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak bruto mulai berangsur-angsur pulih dan membentuk tren positif. Kontraksi yang dialami oleh penerimaan bruto hingga bulan Juli 2020 sebagai dampak pemberlakuan PSBB, mulai

mengalami perbaikan pada bulan Agustus 2020 dengan laju pertumbuhan positif, kemudian melanjutkan tren positif hingga akhir tahun 2020.

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Penerimaan Perpajakan	**1.285,14**	**1.546,14**	**(16,88%)**
1. Pajak Dalam Negeri	1.248,42	1.505,09	(17,05%)
2. Pajak Perdagangan Internasional	36,72	41,05	(10,55%)
II. PNBP	**343,81**	**408,99**	**(15,94%)**
1. Penerimaan SDA	97,23	154,90	(37,23%)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66,08	80,73	(18,14%)
3. PNBP lainnya	111,20	124,50	(10,69%)
4. Pendapatan BLU	69,31	48,87	41,82%
III. Penerimaan Hibah	**18,83**	**5,50**	**242,58%**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**1.647,78**	**1.960,63**	**(15,96%)**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 sebesar Rp1.285,14 triliun.

Penerimaan perpajakan Tahun 2020 mencapai Rp1.285,14 triliun atau mengalami pertumbuhan negatif 16,88 persen, mencapai realisasi 91,50 persen terhadap target. Tekanan penerimaan pajak semakin dalam seiring dengan menurunnya kondisi perekonomian yang merupakan basis pemajakan (*tax base*), antara lain diakibatkan oleh (i) dampak pandemi COVID-19, (ii) antisipasi penyebaran COVID-19 seperti bentuk PSBB dan instruksi bekerja/bersekolah dari rumah (WFH/SFH), serta (iii) dampak peran penerimaan pajak dalam mendukung kebijakan fiskal *countercyclical* melalui pemberian insentif perpajakan yang digulirkan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada hampir seluruh bagian, baik pada pendapatan pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Tekanan perpajakan paling dalam terutama dirasakan pada bulan Mei 2020, meskipun kemudian terdapat perbaikan pada bulan Juni 2020. Selanjutnya, penerimaan perpajakan sempat mengalami tren melandai pada bulan Juli 2020 akibat pengetatan kembali pembatasan sosial dan mengalami peningkatan moderat pada bulan Agustus, September dan Oktober 2020. Hal ini terjadi seiring mulai dilonggarkannya PSBB dan dimulainya fase Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*), disertai mulai membaiknya ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Adanya perbaikan kondisi ekonomi eksternal dan internal, tercermin juga dari peningkatan penerimaan perpajakan secara gradual pada bulan November dan Desember 2020.

Penurunan Pendapatan Perpajakan dengan nominal terbesar antara lain terjadi pada pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, PPh Migas dan PPh Final. Kontraksi pada PPh Pasal 25/29 Badan dipicu oleh (1) menurunnya profitabilitas tahun 2019 yang menjadi dasar perhitungan angsuran masa tahun 2020, (2) pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan angsuran masa PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, serta (3) penurunan

tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Jenis pajak atas impor pada seluruh komponen menunjukkan kontraksi seiring dengan perlambatan aktivitas ekspor-impor Indonesia. Tekanan terhadap pajak atas impor bersumber dari penurunan kegiatan impor atas barang konsumsi, bahan baku dan penolong serta barang modal. Kebijakan Pemerintah berupa pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor juga menjadi salah satu sumber kontraksi paling dalam. Demikian juga PPN Impor mengalami kontraksi antara lain karena didorong oleh pemanfaatan fasilitas insentif pembebasan PPN Impor yang hanya diberikan untuk impor alat kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19.

Faktor yang memengaruhi kontraksi PPh Final berasal dari penurunan setoran atas bunga deposito sebagai akibat rendahnya tingkat suku bunga berdasarkan penetapan BI *7-Day Reverse Repo Rate* pada level 3,75 persen, penurunan Jasa Konstruksi serta persewaan dan pengalihan tanah/bangunan seiring dengan penurunan suku bunga. Penurunan PPh Final juga bersumber dari penurunan aktivitas konstruksi, perlambatan permintaan properti (PP23/2018) yang juga mengalami penurunan akibat perlambatan aktivitas ekonomi serta pemberian fasilitas insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk UMKM. Di sisi lain, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi merupakan salah satu pajak yang masih tumbuh positif, hal ini menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh Pasal 21 mengalami kontraksi terhadap periode yang sama tahun lalu disebabkan oleh belum pulihnya serapan tenaga kerja dan aktivitas produksi utamanya terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 serta pemanfaatan insentif fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Tekanan pada PPh 21 sempat terjadi pada bulan Mei 2020, namun mengalami perbaikan pada bulan Juni 2020 terutama karena dipengaruhi adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020. Perbaikan tren pertumbuhan PPh 21 yang terus berlanjut hingga bulan September 2020 disebabkan oleh kenaikan pembayaran masa PPh 21 atas pemberian *tantiem* kepada pegawai di bulan September 2020.

PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi terhadap periode yang sama tahun lalu seiring masih melambatnya transaksi jual-beli Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak serta meningkatnya restitusi akibat pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengembalian pendahuluan PPN. Meski demikian, penerimaan bruto PPN Dalam Negeri bulanan menunjukkan perbaikan secara gradual sejak bulan Juni 2020 sejalan dengan perbaikan indikator ritel, meskipun pada September 2020 kembali mengalami tekanan seiring dengan pemberlakuan kembali PSBB di sejumlah wilayah. Peningkatan restitusi PPN Dalam Negeri yang tinggi memiliki andil yang sangat besar menjadi penyebab terkontraksinya PPN Dalam Negeri.

Hampir seluruh penerimaan berdasarkan sektor utama pada Tahun 2020 mengalami kontraksi namun cenderung membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi, ditandai oleh membaiknya penerimaan yang bersumber dari sebagian besar sektor dominan penerima pajak pada triwulan IV. Kontraksi Penerimaan Pajak pada triwulan I utamanya dipengaruhi oleh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor-impor dan perdagangan internasional seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pertambangan. Pada triwulan kedua, terutama pada bulan April dan Mei, perluasan pembatasan sosial menyebabkan tekanan lanjutan pada sektor transportasi dan pergudangan. Pelemahan konsumsi juga terlihat dari adanya tekanan pada sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar sehingga memberikan tekanan atas penerimaan PPN Dalam Negeri. Pada triwulan IV, perbaikan aktivitas ekonomi terus

membaik setelah mengalami pembalikan arah (*turning point*) pada triwulan III. Hal ini ditandai oleh peningkatan indikator PMI hingga berada di atas batas *threshold* yang menggambarkan kondisi produksi, permintaan dan penjualan mengalami peningkatan. Sementara itu, sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 adalah kinerja sektor pariwisata secara nasional yang juga dialami oleh berbagai negara lain.

Pendapatan cukai masih mampu mengalami pertumbuhan positif di tengah Pandemi COVID-19. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai *Ethyl Alkohol* (EA) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Cukai Hasil Tembakau sebagai sumber penerimaan cukai terbesar sekaligus menyumbangkan porsi kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Negara yang mencapai 10,33 persen, mengalami pertumbuhan signifikan di sepanjang periode tahun 2020 di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain. Kinerja positif tersebut didorong oleh efektivitas pengawasan atas peredaran hasil tembakau ilegal dan kebijakan penyesuaian tarif cukai. Penerimaan cukai EA juga mengalami peningkatan signifikan karena meningkatnya permintaan EA sebagai bahan baku keperluan medis maupun sanitasi. Sebaliknya, penerimaan cukai MMEA mengalami tekanan atau penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena adanya penurunan produksi yang terjadi sejak bulan April 2020 serta terdampak kebijakan pembatasan sosial (PSBB) yang menekan konsumsi MMEA dalam negeri.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal, penurunannya dipengaruhi oleh komponen penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Secara kumulatif BM mengalami tekanan atau tumbuh negatif, sedangkan BK mampu tumbuh positif. Kenaikan aktivitas ekspor-impor yang terjadi sejak bulan Juni hingga Desember 2020, berdasarkan catatan angka pada Neraca Perdagangan Indonesia, belum dapat mendongkrak kinerja ekspor-impor nasional secara kumulatif yang masih berada pada zona negatif disebabkan belum pulihnya faktor eksternal. Penerimaan BM juga masih mengalami tekanan sejak awal tahun merupakan dampak dari aktivitas impor nasional yang masih mengalami tekanan. Meskipun pada bulan Juli terdapat kenaikan aktivitas ekspor, namun kembali melambat pada bulan Agustus sehingga secara kumulatif kinerja ekspor impor nasional pada tahun 2020 masih berada pada zona negatif. Dari sisi internal, kebijakan pembatasan ekspor pada komoditas tertentu seperti pada nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019, cukup memberikan tekanan pada penerimaan BK. Namun demikian, membaiknya harga komoditas dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama di triwulan terakhir tahun 2020, terutama produk kelapa sawit (CPO) dan tembaga, memberi pengaruh positif pada penerimaan. BK mampu tumbuh terutama pada Sektor Pertambangan didorong peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit, serta penerimaan *extra effort* tembaga. Selain itu kinerja BK di Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertanian dan Perkebunan juga tumbuh, didorong ekpor CPO dan biji kakao yang meningkat.

Realisasi PNBP Tahun 2020 sebesar Rp343,81 triliun.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2020 mencapai Rp343,81 triliun atau turun 15,94 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Namun demikian, dari sisi capaian kinerja, realisasi PNBP tahun 2020 tersebut mencapai 116,89 persen dari target APBN-Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi PNBP yang melebihi target terutama berasal dari realisasi harga komoditas yang lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan, adanya penerimaan yang tidak diperkirakan dan kenaikan PNBP dari hasil pungutan ekspor pada BLU Sawit. Sedangkan penurunan PNBP Tahun 2020

terhadap periode sebelumnya bersumber dari menurunnya Penerimaan SDA sebesar Rp57,67 triliun atau 37,23 persen, menurunnya Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp14,65 triliun atau 18,14 persen dan menurunnya PNBP Lainnya sebesar Rp13,30 triliun atau 10,69 persen. Secara nominal, penurunan nominal SDA terbesar dikontribusikan oleh berkurangnya pendapatan minyak bumi yang mencapai Rp38,75 triliun. Dari SDA Non Migas khususnya Minerba, koreksi pendapatan juga terjadi pada Iuran Produksi Mineral dan Batu Bara, sedangkan hal sebaliknya terjadi pada komoditas emas, perak, nikel dan komoditas lainnya di mana iuran atas kegiatan pertambangan justru mengalami peningkatan.

Penurunan realisasi penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) penurunan rata-rata ICP secara signifikan, dan (2) penurunan rata-rata *lifting* minyak bumi dan gas bumi. Sementara itu, lebih rendahnya penerimaan PNBP SDA Non Migas juga dipicu oleh beberapa faktor. Penurunan PNBP pertambangan minerba disebabkan oleh melemahnya rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan berkurangnya volume produksi batu bara. Turunnya PNBP sektor kehutanan lebih didorong oleh berkurangnya volume produksi kayu dari hutan alam. Di sisi lain, PNBP sektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 15,08 persen karena adanya percepatan proses pengajuan perizinan perikanan tangkap dari semula 14 hari menjadi 1 jam sehingga menambah jumlah kapal yang mengajukan perizinan.

Penerimaan negara dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp66,08 triliun atau turun sebesar 18,14 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN karena kondisi pandemi COVID-19 dan penurunan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020. Turunnya setoran dividen BUMN disebabkan antara lain karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 serta adanya kebijakan *holding* bidang asuransi pada BUMN nonbank. Sedangkan, setoran sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp21,48 triliun mengalami penurunan 28,61 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13,30 triliun atau 10,69 persen terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar secara nominal bersumber dari penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batu Bara, penurunan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, dan penurunan hampir di seluruh komponen PNBP layanan pada Kementerian/Lembaga.

Di sisi lain, Penerimaan dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada Tahun 2020 mengalami pertumbuhan signifikan yaitu meningkat sebesar Rp20,44 triliun atau 41,82 persen terhadap periode yang sama tahun lalu. Kinerja pertumbuhan realisasi pendapatan BLU yang positif tersebut utamanya disumbang oleh peningkatan pendapatan dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp20,26 triliun, dan peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp1,11 triliun.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2020 Rp18,83 triliun.

Sepanjang Tahun 2020 realisasi pendapatan hibah mencapai Rp18,83 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 242,58 persen atau Rp13,34 triliun lebih tinggi apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan hibah tahun 2020 tersebut terutama dipengaruhi oleh

pendapatan hibah dalam negeri langsung dari Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

BELANJA NEGARA

Belanja Negara Tahun 2020 tumbuh positif sebesar 12,39 persen di tengah ketidakpastian perekonomian karena pandemi COVID-19.

Realisasi belanja negara tahun 2020 tumbuh 12,39 persen (*y-on-y*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja realisasi belanja negara yang tumbuh positif tersebut sejalan dengan kebijakan ekpansif dan *counter cyclical* yang ditempuh pemerintah dalam menahan laju perlambatan perekonomian akibat pandemi COVID-19, antara lain melalui peningkatan alokasi belanja untuk penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga menempuh kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja negara yang diarahkan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan pendanaan besar. Selain itu, kebijakan belanja negara tahun 2020 secara umum juga masih diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain meningkatkan kualitas SDM (khususnya di bidang kesehatan), penyediaan infrastruktur yang mendukung penanganan COVID-19, peningkatan perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah dampak pandemi COVID-19, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas jaringan distribusi logistik dengan tetap menjaga efisiensi untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 sebesar Rp2.595,48 triliun.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 mencapai Rp2.595,48 triliun atau sebesar 94,75 persen dari pagu APBN-Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.832,95 triliun dan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp762,53 triliun. Dalam pelaksanaan APBN 2020, kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan terhadap belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID-19, baik pada belanja pemerintah pusat maupun pada transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, hasil realokasi dan *refocusing* tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, antara lain di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemerintah Daerah serta dukungan UMKM.

Tabel 9. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Belanja Pemerintah Pusat	**1.832,95**	**1.496,31**	**22,50%**
1. Belanja Pegawai	380,53	376,07	1,19%
2. Belanja Barang Jasa	422,34	334,42	26,29%
3. Belanja Modal	190,92	177,84	7,35%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	314,09	275,52	14,00%
5. Subsidi	196,23	201,80	(2,76%)
6. Belanja Hibah	6,28	6,48	(3,09%)
7. Bantuan Sosial	202,53	112,48	80,06%
8. Belanja Lain-lain	120,04	11,70	925,96%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**762,53**	**812,97**	**(6,20%)**
1. Transfer ke Daerah	691,43	743,16	(6,96%)
a. Dana Perimbangan	652,10	711,28	(8,32%)
b. Dana Insentif Daerah	18,46	9,69	90,37%
c. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,20	10,00%
d. Dana Otsus	19,56	20,98	(6,78%)
2. Dana Desa	71,10	69,81	1,84%
Jumlah Belanja Negara	**2.595,48**	**2.309,29**	**12,39%**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar Rp1.832,95 triliun

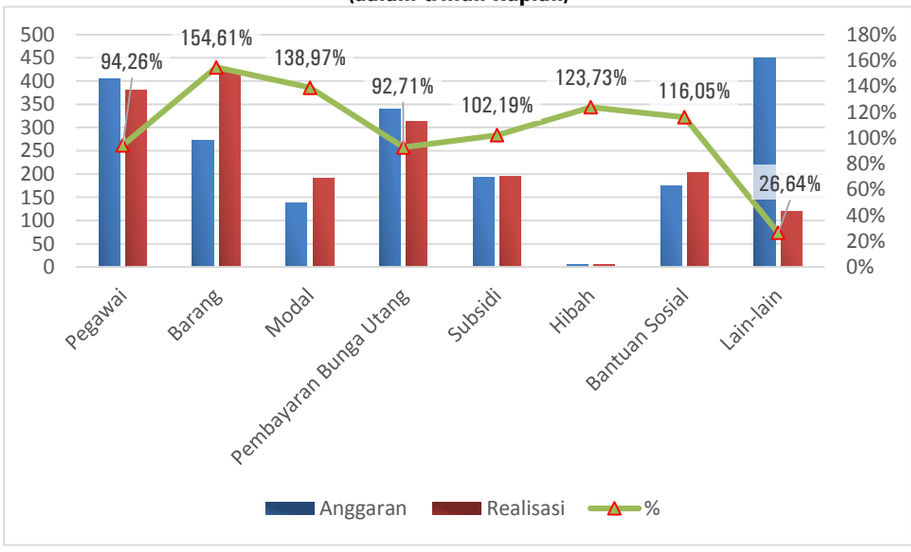
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 mencapai 92,80 persen dari pagu anggaran APBN-Perpres 72 Tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 22,50 persen (*y-on-y*) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, kinerja Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2020 tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja lain-lain dan realisasi bantuan sosial yang nominalnya meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar peran APBN dapat berjalan secara optimal dalam mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta menjaga daya beli dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Akselerasi penyerapan belanja Pemerintah Pusat tidak terlepas dari perubahan kebijakan fiskal yang sangat signifikan yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020 untuk merespon dampak pandemi COVID-19 hingga akhirnya sangat berpengaruh pada fundamental perekonomian Indonesia.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.059,62 triliun dan realisasi belanja non K/L sebesar Rp773,33 triliun. Pada belanja K/L kinerja belanja pemerintah dipengaruhi antara lain oleh realokasi dan *refocusing* belanja K/L sebagai upaya untuk mendukung program penanganan dampak COVID-19, serta perubahan kebijakan terkait dengan pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya. Terdapat juga tambahan pagu belanja K/L yang bersumber dari realokasi cadangan yang utamanya dalam rangka penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L, dan juga bantuan pelaku UMKM. Sementara pada kinerja belanja Non K/L antara lain dipengaruhi

oleh pelaksanaan program stimulus di bidang subsidi, seperti pembebasan/diskon listrik, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR, serta insentif perumahan.

Pada komponen per jenis belanja Pemerintah Pusat, nilai realisasi terbesar tercatat pada belanja barang dan jasa sebesar Rp422,34 triliun atau 154,61 persen dari pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, diikuti belanja pegawai yang mencapai Rp380,53 triliun atau 94,26 persen dan pembayaran bunga utang sebesar Rp314,09 triliun atau 92,71 persen masing-masing terhadap pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020. Terdapat komponen jenis belanja yang realisasinya melebihi pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, utamanya dipengaruhi peningkatan kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *countercyclical* dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terjadinya pandemi COVID-19 perlu direspon secara cepat dan luar biasa (*extraordinary*) sehingga diperlukan fleksibilitas fiskal, dan di sisi lain Pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati (*prudent)* dan keberlanjutan fiskal yang sehat (*sustainable).*

Grafik 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 per Jenis Belanja (dalam triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Secara nominal, realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan 1,19 persen (*y-on-y*), namun pertumbuhan ini lebih rendah dari pertumbuhan periode tahun sebelumnya sebesar 8,41 persen. Penurunan pertumbuhan belanja pegawai sejalan dengan upaya pengendalian belanja pegawai untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga daya beli aparatur pemerintah. Kebijakan yang diambil adalah pemberian THR dan Gaji ke-13 yang tidak termasuk komponen tunjangan kinerja.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 26,29 persen (*y-on-y*) terhadap realisasi tahun 2019. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seperti pembayaran bantuan UMKM, pembayaran bantuan upah/gaji, dan di

sektor kesehatan (antara lain pembayaran insentif dan pembayaran santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/sarana prasarana kesehatan). Selain itu, terdapat faktor lain yang memengaruhi peningkatan kinerja realisasi belanja barang di tahun 2020, yaitu realisasi yang cukup signifikan pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit. Di sisi lain, ditempuhnya kebijakan Pemerintah untuk melakukan realokasi dan *refocusing* belanja yang bersifat nonproritas dan nonproduktif juga telah berhasil meningkatkan efisiensi pada komponen belanja barang yang tidak terkait penanganan pandemi COVID-19, seperti belanja jasa dan belanja perjalanan dinas. Kebijakan *refocusing*/realokasi belanja K/L untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, juga telah membawa belanja yang lebih efisien dengan memanfaatkan IT menuju adaptasi kebiasaan baru.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar Rp190,92 triliun atau mengalami kenaikan 7,35 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi belanja modal tersebut antara lain dipengaruhi adanya oleh kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung penanganan COVID-19 serta adanya pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional oleh LMAN. Beberapa capaian *output* strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jaringan irigasi 308 km, pembangunan jalan baru sepanjang 282 km, jembatan sepanjang 10.028 m, rel kereta api sepanjang 721 km'sp, pemasangan jargas sebanyak 127.864 SR (Sambungan Rumah) di 23 Kab/Kota, dan 45 bendungan.

Selanjutnya, realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 telah mencapai Rp202,53 triliun atau 116,05 persen terhadap pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, mengalami peningkatan 80,06 persen (*y-on-y*) dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan Pemerintah terutama kepada masyarakat miskin dan rentan dalam merespon dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut didorong oleh adanya perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Program-program bantuan sosial yang telah disalurkan seperti PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Paket Sembako Jabodetabek, bantuan beras untuk peserta PKH, serta bantuan sosial untuk penanganan bencana alam dan non alam.

Realisasi pembayaran bunga utang tahun 2020 mencapai Rp314,09 triliun atau sebesar 92,71 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Secara persentase, realisasi pembayaran bunga utang tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,00 persen (*y-on-y*). Hal ini sejalan dengan tambahan penerbitan utang untuk menutupi pelebaran defisit anggaran dan peningkatan pengeluaran pembiayaan sebagai upaya Pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi belanja subsidi tahun 2020 mencapai Rp196,23 triliun atau 102,19 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kinerja belanja subsidi tahun 2020 tergolong tinggi disebabkan oleh kebijakan penanganan COVID-19 dengan memberikan diskon listrik kepada masyarakat miskin dan meningkatnya konsumsi LPG rumah tangga, namun demikian penerapan PSBB mengakibatkan menurunnya konsumsi BBM. Berikut ini beberapa tambahan anggaran belanja subsidi dalam rangka stimulus fiskal yang telah dicanangkan pada tahun 2020, antara lain: (1) pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 900 VA subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan; (2) pemberian

stimulus perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan (3) pemberian subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak COVID-19 dan stimulus KUR; (4) Pembebasan tarif listrik bagi UMKM; dan (5) realisasi subsidi pajak (Pajak DTP). Persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target. Hal ini dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi ICP (rata-rata US$40,39/barel) dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Perpres 72/2020 (US$33/barel).

Realisasi belanja hibah tahun 2020 mencapai Rp6,28 triliun atau 123,73 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan hibah pada Tahun 2020 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Selain itu, juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian hibah pariwisata dalam rangka membantu Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan PAD serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial akibat pandemi COVID-19.

Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 terbesar pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 29,34 persen dan Fungsi Ekonomi 21,82 persen terhadap Total Belanja Pemerintah Pusat

Sebagai salah satu gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan Pemerintah dalam prioritas pembangunan, anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan menurut 11 kategori klasifikasi fungsi.

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Menurut Fungsi (dalam triliun Rupiah)

No	Fungsi	Angggaran Perpres 72/2020	Realisasi 2020			Realisasi 2019
			Rp	% Realisasi	% Proporsi	
1	Pelayanan Umum	485,00	537,82	110,89%	29,34%	400,09
2	Pertahanan	117,96	136,91	116,07%	7,47%	115,42
3	Ketertiban dan Keamanan	406,99	154,11	37,87%	8,41%	147,96
4	Ekonomi	416,49	399,93	96,02%	21,82%	358,43
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	13,91	13,04	93,76%	0,71%	16,09
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	20,65	22,78	110,34%	1,24%	26,62
7	Kesehatan	81,62	105,09	128,75%	5,73%	71,01
8	Pariwisata dan Budaya	3,06	3,15	102,91%	0,17%	4,23
9	Agama	9,95	9,49	95,37%	0,52%	11,22
10	Pendidikan	148,91	155,11	104,17%	8,46%	155,16
11	Perlindungan Sosial	270,70	295,52	109,17%	16,12%	190,08
	TOTAL*	**1.975,24**	**1.832,95**	**92,80%**	**100,00%**	**1.496,31**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Secara proporsi (realisasi terhadap total belanja), porsi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 29,34 persen disusul Fungsi Ekonomi sebesar 21,82 persen. Sementara, sisanya sebesar 48,84 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Besarnya alokasi fungsi pelayanan umum guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah secara umum dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, melayani, dan bebas korupsi. Demikian juga dengan alokasi fungsi ekonomi yang berada pada urutan terbesar kedua merupakan pelaksanaan komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19 seperti diadakannya kegiatan padat karya oleh beberapa K/L, subsidi bunga UMKM, serta pelaksanaan program kartu prakerja. Sedangkan secara persentase (realisasi terhadap pagu), realisasi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pelayanan Kesehatan sebesar 128,75 persen dan Fungsi Pertahanan sebesar 116,07 persen terhadap masing-masing pagu. Pada Fungsi Kesehatan yang melampaui pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020 antara lain dipengaruhi peningkatan bantuan iuran peserta PBI JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah, serta adanya alokasi tambahan anggaran fungsi kesehatan melalui Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain untuk pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penggantian penanganan pasien pandemi di RS yang sudah menjadi rujukan penanganan COVID-19 serta pengadaan vaksin. Pada Fungsi Pertahanan realisasi dipengaruhi oleh pemeliharaan dan perawatan alutsista di TNI AD dan TNI AL.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 mencapai Rp762,53 triliun.

Implementasi kebijakan penanganan COVID-19 juga berdampak terhadap kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Melalui Perpres 72 Tahun 2020, anggaran belanja TKDD mengalami penyesuaian menjadi Rp763,93 triliun, atau mengalami penurunan dari alokasi anggaran sebelumnya dengan memperhatikan adanya potensi penurunan pendapatan negara karena dampak pandemi.

Tabel 11. Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)*
Transfer Ke Daerah	**691,43**	**743,16**	**(6,96%)**
I. Dana Perimbangan	**652,10**	**711,28**	**(8,32%)**
A. Dana Transfer Umum	**475,52**	**524,89**	**(9,41%)**
1. Dana Bagi Hasil	93,91	103,98	(9,69%)
2. Dana Alokasi Umum	381,61	420,91	(9,34%)
B. Dana Transfer Khusus	**176,58**	**186,39**	**(5,27%)**
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,18	64,17	(21,80%)
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	126,40	122,23	3,41%
II. Dana Insentif Daerah	**18,46**	**9,69**	**90,37%**
III. Dana Otsus & Keistimewaan DIY	**20,88**	**22,18**	**(5,88%)**
A. Dana Otsus	**19,56**	**20,98**	**(6,78%)**
1. Dana Otsus Prov. Papua & Papua Barat	12,00	12,62	(4,92%)
2. Dana Otsus Prov. Aceh	7,56	8,36	(9,60%)
B. Dana Keistimewaan DIY	**1,32**	**1,20**	**10,00%**
Dana Desa	**71,10**	**69,81**	**1,84%**
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**762,53**	**812,97**	**(6,20%)**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi TKDD pada tahun 2020 mencapai Rp762,53 triliun atau 99,82 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp763,93 triliun. Realisasi ini menurun secara nominal sebesar Rp50,44 triliun atau lebih rendah 6,20 persen (*y-on-y*) terhadap realisasi tahun 2019 yang bernilai Rp812,97 triliun. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh kebijakan *refocusing* dan realokasi TKDD yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Meskipun secara nominal terjadi penurunan, namun secara persentase realisasinya meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 98,33 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, peningkatan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa. Selain itu, sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah dilakukan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Kebijakan tersebut antara lain penggunaan anggaran infrastruktur yang diatur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) direlaksasi yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, relaksasi persyaratan dan tahapan penyaluran DAK Fisik dari semula bertahap menjadi disalurkan secara sekaligus sebesar nilai kontrak kegiatan, relaksasi persyaratan penyaluran DAU Formula bulan Februari sampai dengan Desember, serta penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa.

Realisasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp691,43 triliun atau 99,81 persen terhadap pagu dan Dana Desa sebesar Rp71,10 triliun atau 99,87 persen terhadap pagu. Transfer ke Daerah terdiri dari komponen: (1) Dana Perimbangan dengan realisasi Rp652,10 triliun atau menurun 8,32 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, (2) Dana Insentif Daerah dengan realisasi Rp18,46 triliun atau meningkat 90,37 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan (3) Dana Keistimewaan DIY dengan realisasi Rp1,32 triliun atau meningkat 10,00 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan (4) Dana Otonomi Khusus dengan realisasi Rp19,56 triliun atau menurun 6,78 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah, kebijakan *refocusing* dan realokasi TKDD dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Adanya realokasi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan masing-masing sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen terhadap pagu dan Rp381,61 triliun atau 99,28 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan terkait DBH dan DAU dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah i) Alokasi DAU bersifat tidak final; ii) percepatan penyelesaian kurang bayar DBH s.d. TA 2019; dan iii) relaksasi penggunaan anggaran sebagian atau seluruh belanja infrastruktur minimal 25% dari DTU yang dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Dana Transfer Khusus, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik, selama tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp176,58 triliun atau 96,72 persen terhadap pagu. Realisasi

DAK Fisik sebesar Rp50,18 triliun atau 93,29 persen terhadap pagu dan DAK Non Fisik sebesar Rp126,40 triliun atau 98,16 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) tahun 2020 untuk penanganan COVID-19, antara lain berupa relaksasi perubahan Rencana Kegiatan bidang kesehatan untuk menambah menu Penanganan COVID-19, penghentian proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) selain bidang pendidikan dan kesehatan, penggunaan Cadangan DAK Fisik pada 10 bidang dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan relaksasi persyaratan dan tahapan/besaran penyaluran DAK Fisik. Sedangkan kebijakan untuk DAK Non Fisik berupa penambahan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dalam rangka pemberian insentif tenaga medis daerah.

Dana Insentif Daerah telah terealisasi sebesar Rp18,46 triliun atau sebesar 99,76 persen terhadap pagu Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi tersebut lebih tinggi 90,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp9,69 triliun. Realisasi ini antara lain disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan yang disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19, dan juga adanya relaksasi penyaluran tahap II dengan tidak memperhatikan minimal penyerapan 70% dari penyaluran tahap I sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, dari realisasi DID TA 2020 terdapat DID Tambahan sebesar Rp5 triliun yang dialokasikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam rangka dampak COVID-19. DID tambahan tersebut dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam 3 periode yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah. Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah termasuk mendukung industri kecil, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Selain melalui Transfer ke Daerah, Pemerintah juga melakukan kebijakan penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui Dana Desa dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui relaksasi penyaluran Dana Desa serta mengalihkan penggunaan sebagian Dana Desa untuk jaring pengaman sosial berupa BLT Desa yang ditujukan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, bansos tunai, dan kartu pra kerja, dan bantuan sosial lainnya. BLT Desa bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Realisasi Dana Desa pada tahun 2020 sebesar Rp71,10 triliun atau meningkat 1,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi penyaluran dalam rangka percepatan penggunaan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat desa.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Defisit Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun dan Realisasi Pembiayaan Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp1.193,29 triliun

Defisit anggaran tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun mencapai 6,14 persen terhadap PDB tahun 2020. Defisit ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 disertai kinerja belanja negara yang tetap tumbuh positif dalam rangka mendukung kebijakan *countercyclical* Pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19. Namun demikian, realisasi defisit anggaran terhadap PDB tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target Perpres 72 Tahun 2020 yakni sebesar 6,34 persen. Kebijakan *extraordinary* berupa relaksasi defisit APBN di atas 3 persen (ditetapkan melalui Perppu 1 Tahun 2020 dan diperkuat dengan UU 2 Tahun 2020) merupakan konsekuensi kebijakan untuk mengatasi efek domino pada perekonomian yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 kebutuhan prioritas belanja negara mengalami peningkatan signifikan untuk mendukung langkah *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan COVID-19, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional saat kondisi kapasitas fiskal terbatas sehingga relaksasi defisit harus difasilitasi oleh pembiayaan anggaran tambahan pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan pengelolaan secara *prudent* dan risiko tetap terkendali.

Relaksasi defisit pada tahun 2020 sebagai resultan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 sekaligus bertujuan melindungi masyarakat dan dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih, berfokus pada: (1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan COVID-19 seperti penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, biaya perawatan dan insentif/santunan untuk tenaga kesehatan, serta (2) pemberian dukungan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemerintah Daerah, insentif pada bidang usaha, dukungan dan insentif pada UMKM termasuk pembiayaan korporasi.

Penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN sangat memerlukan kerja keras dan kerja sama dari seluruh pihak agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran. Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS telah dan akan terus melakukan koordinasi yang intensif dalam merumuskan dan mengimplementasikan bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dalam rangka penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN. Kebijakan fiskal yang bermuara pada pelebaran defisit juga diiringi dengan peningkatan pengeluaran pembiayaan yang diperhitungkan dengan penuh kehati-hatian dan ditangani secara sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pertama (SKB I) dengan Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2020, menyepakati bahwa BI dapat membeli SBN berjangka panjang pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). Penerbitan SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020.

Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai *backstop* pembiayaan utang, di mana Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Pemerintah dan BI melanjutkan sinerginya melalui SKB II pada bulan Juli 2020 untuk melaksanakan skema berbagi beban (*burden sharing*) dalam melaksanakan penanganan COVID-19 dan PEN. Dengan Skema *burden sharing,* disepakati bahwa BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods* dalam rangka pembiayaan untuk belanja Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, serta (b) belanja/pembiayaan *Non-Public Goods* dalam mendukung UMKM dan korporasi. Skema *burden sharing* dilaksanakan dalam rangka menyediakan *fiscal space* dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan COVID-19 dan PEN. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun. Selain itu, Pemerintah telah merealisasikan Pembiayaan *Non-Public Goods* berupa pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp29,62 triliun untuk BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya.

Tabel 12. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun 2020 Terhadap PDB Tahun 2020 (dalam triliun Rupiah)

Indikator	Perpres 72/2020	Realisasi Tahun 2020 (*Audited*)
Surplus/ (Defisit) Anggaran	**(1.039,22)**	**(947,70)**
PDB Nominal Tahunan	16.391*	15.434
Defisit thd PDB	**(6,34%)**	**(6,14%)**

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik
**) Asumsi APBN 2020 berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020*

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara *prudent* dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 114,83 persen dari target pada Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi pembiayaan terdiri dari: (i) realisasi penerimaan pembiayaan utang sebesar Rp1.229,63 triliun, (ii) realisasi pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp104,70 triliun, (iii) realisasi penerimaan dari pemberian pinjaman Rp1,01 triliun, (iv) realisasi pengeluaran kewajiban penjaminan sebesar Rp3,59 triliun, dan (v) realisasi penerimaan pembiayaan lainnya sebesar Rp70,94 triliun.

Pemerintah menjalankan strategi oportunistik dan fleksibel dengan memanfaatkan setiap peluang dan momentum untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan di tahun 2020. Strategi tersebut dilakukan baik dari sisi waktu dan jumlah pengadaan utang sesuai kondisi pasar keuangan untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien. Salah satu implementasi strategi pemerintah tersebut memanfaatkan fleksibilitas pinjaman tunai yang dijadikan sebagai salah satu program untuk mengurangi tekanan di pasar keuangan. Pinjaman program tahun 2020 meningkat dari usulan

semula di APBN 2020, bersumber dari mitra pembangunan, antara lain *World Bank*, ADB, KfW (Jerman), AFD (Perancis), JICA (Jepang), AIIB, dan Pemerintah Australia.

Pemenuhan kebutuhan utang tahun 2020 menghadapi berbagai tantangan gejolak volatilitas pasar keuangan terutama pada kuartal II 2020. Rata-rata penawaran SBN domestik pada lelang reguler di kuartal II sempat menurun dibandingkan kuartal I dan memengaruhi *yield* penerbitan SBN. Namun demikian, pada semester II kondisi pasar SBN domestik semakin membaik, dan *yield* SBN terus menurun. Secara keseluruhan penerbitan SBN domestik dapat terpenuhi dengan baik. Pembiayaan utang tahun 2020 dilakukan secara *prudent* dengan beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: (i) mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri, sedangkan yang bersumber dari luar negeri sebagai pelengkap melalui mekanisme pasar, (ii) optimalisasi fleksibilitas pembiayaan utang seperti mengoptimalkan pinjaman program yang memiliki biaya relatif lebih rendah, dan (iii) koordinasi dengan BI dalam memenuhi pembiayaan APBN.

Konsistensi Pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini terlihat dari realisasi pembiayaan dalam negeri yang mendominasi pembiayaan yaitu sejumlah Rp1.229,16 triliun dibandingkan realisasi pembiayaan luar negeri yang relatif sangat kecil yaitu sejumlah Rp46,48 triliun. Sedangkan dari sisi mata uang, utang Pemerintah pusat semakin didominasi oleh mata uang Rupiah terhadap total komposisi utang pada akhir Desember 2020, seiring dengan kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik disertai penggunaan valas sebagai pelengkap dalam rangka pengelolaan risiko utang valas. Meski di tengah-tengah kondisi *extraordinary*, pada penghujung tahun *2020 Japan Credit Rating* (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia mencapai peringkat BBB+ dengan *outlook* stabil, mencerminkan keyakinan *stakeholders* internasional terhadap Indonesia masih terjaga selama berada di dalam tekanan pandemi.

Realisasi penerimaan pembiayaan utang didominasi oleh penerimaan dari penerbitan SBN sebesar Rp1.541,25 triliun dan pengeluaran untuk pembayaran SBN sebesar Rp364,10 triliun. Nilai ini bersumber dari penerbitan SBN melalui lelang yang tercapai 100 persen termasuk total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) dan pembiayaan *Public Goods* (sesuai SKB II). Dukungan BI sesuai skema SKB I dan SKB II ini akan dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin yang telah diadakan pada tahun 2020 dan yang akan diadakan pada tahun 2021. Pemerintah telah mengeluarkan pembiayaan investasi yang diberikan kepada BLU, serta lembaga dan badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hingga November 2020, Pemerintah telah menandatangani 6 (enam) perjanjian dalam kerangka program COVID-19 *Active Response and Expenditure Support* (CARES), antara lain: (1) Pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) senilai EUR1,39 miliar atau setara USD1,5 miliar pada April 2020, (2) Pinjaman dari *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) senilai USD750 juta pada Juni 2020, (3) Pinjaman dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) senilai JPY50 miliar atau setara USD474,2 juta pada Agustus 2020, (4) Pinjaman dari Pemerintah Jerman (KfW) tahap I senilai EUR250 juta atau setara USD295,65 juta pada Oktober 2020, (5) Pinjaman dari Pemerintah Australia senilai AUD15 miliar atau setara Rp15,4 triliun pada November 2020, dan (6) Pinjaman dari Pemerintah Jerman (KfW) tahap II senilai EUR300 juta pada November 2020. Selain itu *CARES*, Pemerintah telah menandatangani perjanjian pinjaman multilateral berupa *Indonesia Disaster Resilience Improvement Project* (IDRIP) senilai USD160 juta dari *World Bank* pada Oktober 2020.

Pada November 2020, Pemerintah telah menandatangani satu perjanjian pinjaman program yang bersumber dari *Agence Francaise Development* (AFD) untuk *Financial Sector Reform Development Policy Program* (FSRDPL) senilai EUR100 juta atau USD83,52 juta.

Selama bulan Desember 2020, Pemerintah telah menandatangani dua pinjaman bilateral, lima perjanjian pinjaman multilateral, dan empat belas perjanjian pinjaman KSA/LPKE, terdiri dari: (a) Perjanjian pinjaman bilateral dari Unicredit dari Bank Austria sebanyak 2 perjanjian untuk perbaikan RSAU Mohammad Sutomo Pontianak dan RSAL dr. Ramelan Surabaya (bertindak sebagai *Executing Agency* Kementerian Pertahanan), (b) Perjanjian pinjaman multilateral yang terdiri dari: Pinjaman *Promoting Innovative Financial Inclusion* Program-Subprogram 1 (PIFIP) dari ADB, pinjaman *Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) *Project under The Multiphase Programmatic Approach-Phase* dari *Green Climate Fund (Fund)*, dan pinjaman Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units Project sejumlah 3 perjanjian dari IsDB (bertindak sebagai *Executing Agency* Kementerian Kesehatan).

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan *sustainable* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan instrumen *Diaspora Bonds* yang ditujukan khusus untuk masyarakat Indonesia Eks WNI, anak Eks WNI, WNA yang orangtuanya WNI. Seluruh sumber-sumber pembiayaan diarahkan terutama untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi COVID-19 beserta dengan kegiatan yang mendukung program PEN (diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020) antara lain melalui penyertaan modal Negara kepada BUMN, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan kemajuan UMKM serta mendukung ekspor nasional. Bahkan lebih spesifik, pembiayaan investasi pemerintah ditujukan untuk meningkatkan *leverage* BUMN sebagai agen pembangunan. Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah juga memberikan dukungan pinjaman modal kerja kepada Pemerintah Daerah, penempatan dana di perbankan serta dukungan penjaminan kredit modal kerja.

Tahun 2020 ditutup dengan optimis seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang masih memerlukan penanganan serius. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 13. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Perpres 72/2020	Realisasi 2020 *(Audited)*	% Thd Anggaran [1]
Pembiayaan Utang	1.220,46	1.229,63	100,75
Pembiayaan Investasi	(257,10)	(104,70)	40,72
Pemberian/Penerusan Pinjaman	5,81	1,01	17,46
Kewajiban Penjaminan	(0,59)	(3,59)	607,97
Pembiayaan Lainnya	70,64	70,94 [2]	100,42
Total Pembiayaan	**1.039,22**	**1.193,29**	**114,83**

Sumber: Kementerian Keuangan

1) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

2) Realisasi melebihi pagu karena terdapat hasil pengelolaan aset (penerimaan penjualan lelang aset program restrukturisasi) yang tidak ada pagunya di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Boks 2.
Komposisi Utang Pemerintah Tetap Terjaga di tengah Pandemi COVID-19

Posisi utang Pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp6.079,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,39 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Komposisi utang Pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No.17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

Sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, Pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan, ditunjukkan dengan komposisi utang Pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,89 persen dari total komposisi utang. Hal tersebut menggambarkan upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan. Sepanjang tahun 2020 Pemerintah telah melakukan *upsizing* penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi, termasuk penerbitan SBN Ritel yang disambut baik oleh masyarakat terutama generasi milenial, hal ini sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan utang untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik.

SBN ritel terakhir yang diterbitkan Pemerintah selama tahun 2020 adalah Sukuk Tabungan seri ST007. Sukuk ST007 yang merupakan *green instrument* ini telah ditawarkan selama bulan November dan berhasil mencatat rekor baru dengan total pembelian dan investor

terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan, yaitu total pembelian sebanyak Rp5,42 triliun dengan total investor sebanyak 16.992 orang. Artinya, dengan berinvestasi pada ST007, masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus membantu mengatasi dampak perubahan iklim karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN seperti *sustainable transportation* dan sektor yang *resilience* terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang Pemerintah Pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik (utang valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas). Dalam rangka pengelolaan portofolio utang Pemerintah secara hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang. Serangkaian pengelolaan portofolio utang Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan melalui konversi pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dari mata uang USD dengan tingkat bunga mengambang berbasis LIBOR menjadi mata uang EUR dan JPY dengan tingkat bunga tetap. Sejak September 2019 sampai dengan Oktober 2020, telah dilaksanakan lima (5) kali konversi terhadap pinjaman-pinjaman program dan proyek dari ADB yang telah *fully disbursed* dengan total pinjaman yang dikonversi sebanyak dua puluh satu (21) pinjaman senilai total USD6,2 miliar sehingga menghasilkan tingkat bunga tetap sebesar 0 persen atau mendekati 0 persen. Konversi pinjaman tersebut menunjukkan upaya Pemerintah untuk mengelola portofolio utang dengan hati-hati melalui strategi diversifikasi mata uang dengan memanfaatkan situasi pasar keuangan yang *favorable*. Pemerintah diharapkan dapat mengunci biaya pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah di tengah tren penurunan bunga global sehingga berpotensi menghasilkan efisiensi biaya bunga utang senilai hingga Rp500 miliar pada tahun 2021 atau Rp4 triliun sampai dengan pinjaman jatuh tempo pada tahun 2038.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

Daftar entitas pelaporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2020	2019
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	3
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	41	42
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.827	1.827
5	BA 006	Kejaksaan Republik Indonesia	542	535
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	528	77
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	145
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	526	514
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.160	1.138
11	BA 015	Kementerian Keuangan	903	900
12	BA 018	Kementerian Pertanian	775	636
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	100	100
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	43	44
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	585	581
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	483	319
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.173	419
18	BA 025	Kementerian Agama	5.650	5.565
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	219	300
20	BA 027	Kementerian Sosial	316	318
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	242	331
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	445	411
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	755	1.272
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	1
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	3

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2020	2019
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	49
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	11	290
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	91	129
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	41
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
34	BA 051	Badan Siber dan Sandi Negara	1	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	517	517
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	35	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	512	504
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	37	37
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	59	60
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.413	1.380
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	43	43
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	223
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	284	205
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	41
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	195	194
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	2
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	12	39
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	18	18
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	21	22
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	37
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	40
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	450	444
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	42	42
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia	28	28
71	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
72	BA 107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	45	40
73	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
74	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
75	BA 110	Ombudsman RI	1	1
76	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	26	38

77	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
78	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	2
79	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
80	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
81	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	70
82	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	30
83	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	2
84	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	1
85	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
86	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	-	1
No.	**Bagian Anggaran**	**Kementerian Negara/Lembaga**	**Jumlah Entitas Akuntansi**	
			2020	**2019**
87	BA 122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	1
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	183	182
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	4	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	19	12
	BA 999.04	Pengelolaan Pemberian Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	180	177
	BA 999.07	Belanja Subsidi	18	16
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	18	11
	BA 999.99	Transaksi Khusus	1	28
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	30	77
Jumlah Entitas Akuntansi			**21.975**	**23.326**

Catatan:

- Jumlah entitas akuntansi berdasarkan jumlah satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan, termasuk satuan kerja konsolidasi (satkons) dan satuan kerja inaktif bersaldo.
- Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2014, Badan Ekonomi Kreatif bergabung dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Terdapat perubahan nomenklatur pada:
  BA 042: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  BA 120: Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan

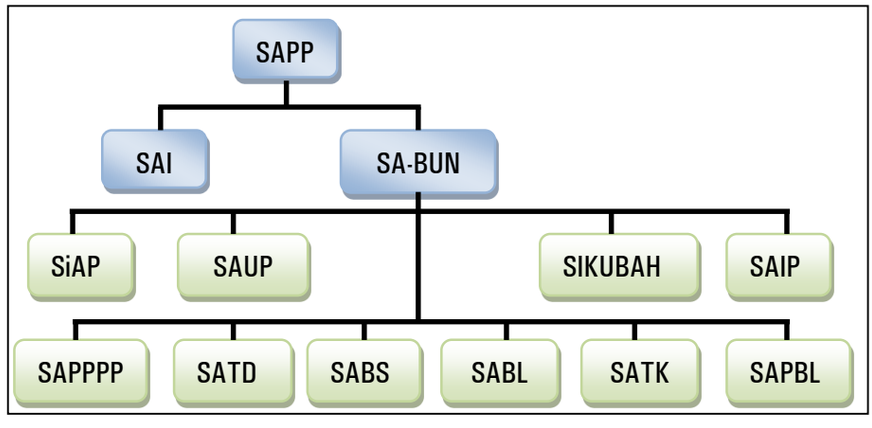
dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
   - Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA

yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

   Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment,* serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu

pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

- Pendapatan

  Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

  a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting*

Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

- Beban, Belanja, dan Transfer

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah(SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

- Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

- Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, dan persediaan

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk

menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.

d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemeritah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- Investasi

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN

disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif

tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
   1. peralatan dan mesin; atau
   2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
   1. gedung dan bangunan; atau
   2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan

biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
   a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
   b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.

2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

- Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penmberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya. Termasuk dalam Kemitraan Pihak Ketiga adalah Aset Konsesi Jasa.

Sejak tahun 2019, perlakuan akuntansi mengenai Konsesi Jasa telah diatur di dalam PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang telah diubah dengan PMK No.234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam PMK No.234/PMK.05/2020, aset dan kewajiban konsesi jasa tidak disajikan dalam Face Laporan Keuangan, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dan kewajiban konsesi jasa akan memperhatikan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

- Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

  Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban

pada Pihak Lain..

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, DMO *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi Negara/Surat Utang Negara (SUN) Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam

Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds, variable rate bonds, zero coupon bonds, international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.
Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2020 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- *Fixed Rate (FR) Bonds* adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- *Saving Bond Ritel* (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal (*floating with floor*) dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan (*floating with floor*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- Variable Rate (VR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang yang tingkat kuponnya ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Referensi tingkat bunga yang digunakan untuk seri VR ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) penerbitan masing-masing seri. Saat ini terdapat beberapa referensi yang digunakan antara lain Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate dan tingkat Suku Bunga Reverse

Repo Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

- *Zero Coupon (ZC) Bond* adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0.1 persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- *International Bonds* adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Berkaitan dengan kewajiban jangka panjang terkait program pensiun dapat dijelaskan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, program pensiun yang berlaku adalah program manfaat pasti dengan mekanisme pendanaan *pay as you go*, yaitu pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai memasuki usia pensiun. Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait program pensiun, kecuali kewajiban jangka pendek, yaitu apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Berdasarkan PMK No. 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, untuk kebutuhan transparansi dalam pelaporan keuangan, pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun didasarkan pada perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan

Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai outstanding pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuian Lainnya) dan mengurangi nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca. UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. identitas pinjaman (*loan* ID) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi

penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontijensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

- Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

- Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.105,01	13.901,01
Dolar Australia [AUD]	1	10.771,29	9.739,06
Dolar Canada [CAD]	1	11.019,11	10.654,16
Franc Swiss [CHF]	1	15.982,11	14.365,75
Yuan China [CNY]	1	2.161,49	1.990,84
Kroner Denmark [DKK]	1	2.329,52	2.086,27
Euro [EUR]	1	17.330,13	15.588,60
Poundsterling Inggris [GBP]	1	19.085,50	18.249,94
Yen Jepang [JPY]	100	13.647,15	12.796,66
Korean Won [KRW]	1	12,96	12,01

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
   Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
   a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;

b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Oustanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

- Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

- Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Eliminasi Akun Timbal Balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang

transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
c. Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Enititas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Dalam proses konsolidasi juga diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan pada SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari

pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kesesuaian SAP dengan IPSAS

- Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)

Pada tahun 2010 *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

a. PSAP berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP barbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis Akrual dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis Akrual pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC-PEN

Panduan Penerapan SAP pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD). Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan panduan penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memberikan penjelasan, sebagai berikut:

a. KSAP memandang bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal dikeluarkannya panduan ini

b. Penyusun laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa PSAP dan Buletin Teknis (Bultek) yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain:

   1) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

      Untuk menangani Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi Covid-19. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah kemungkinan menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Hal ini akan menyebabkan perubahan siginifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

   2) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas

      Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan APBN/APBD tahun 2020 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

3) PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain:

a) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid19.

b) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.

c) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan kuangan yang terdampak signifikan.

d) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

4) PSAP 06 Akuntansi Investasi

Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal negara pada BUMN/korporasi/swasta, baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat adanya BUMN yang merugi.

5) PSAP 09 Kewajiban

Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban. Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

6) Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan

pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

c. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi dalam Situasi Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk keperluan penyajian kebijakan keuangan negara dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Bendahara Umum Negara melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan paling sesikit pada:

a. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan akuntansi
b. Penjelasan per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh
c. Catatan Penting Lainnya sesuai dengan kebutuhan pengungkapan.

A.4.2. PENETAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN DAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

Pada tahun 2020, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan dua PSAP, yaitu:

Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan

1. PSAP Nomor 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

   PSAP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Berdasarkan Paragraf 23 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

2. PSAP Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)

   PSAP ini ditetapkan melalui PMK nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan

Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)

Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020). Berdasarkan Paragraf 55 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

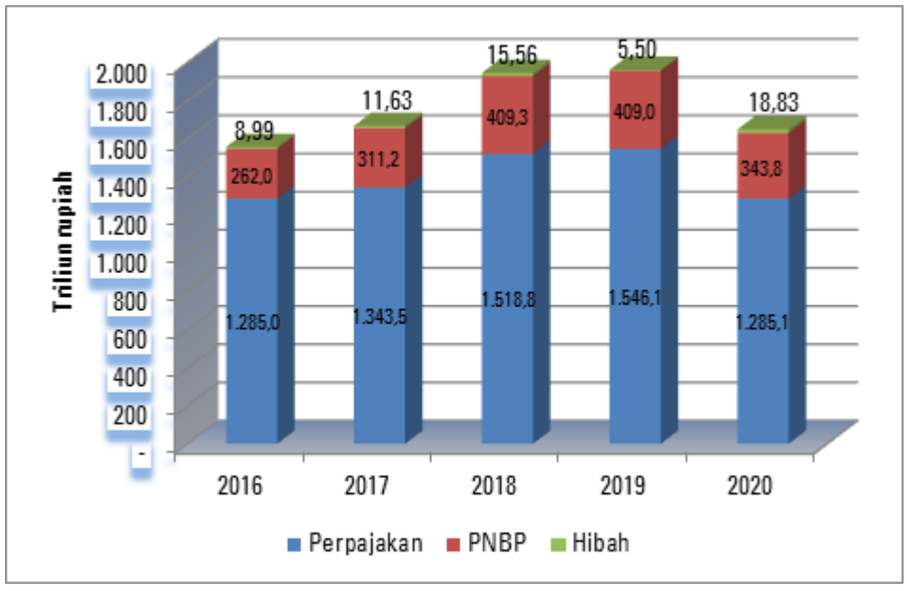
Kedua PSAP dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021. Penerapan lebih dini atas PSAP Nomor 15 dan PSAP 10 (revisi 2020) disarankan berdasarkan kesiapan entitas. Pemerintah telah mempertimbangkan PSAP Nomor 15 dan PSAP 10 (revisi 2020) dalam menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp1.647.783.342.188.986 atau mencapai 96,93 persen dari target APBN TA 2020 sebesar Rp1.699.948.459.678.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285.136.317.135.799, PNBP sebesar Rp343.814.209.832.563, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp18.832.815.220.624. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp17.092.509.187.614. Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami penurunan Rp312.850.241.397.003 atau lebih rendah 15,96 persen jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp1.960.633.583.585.989.

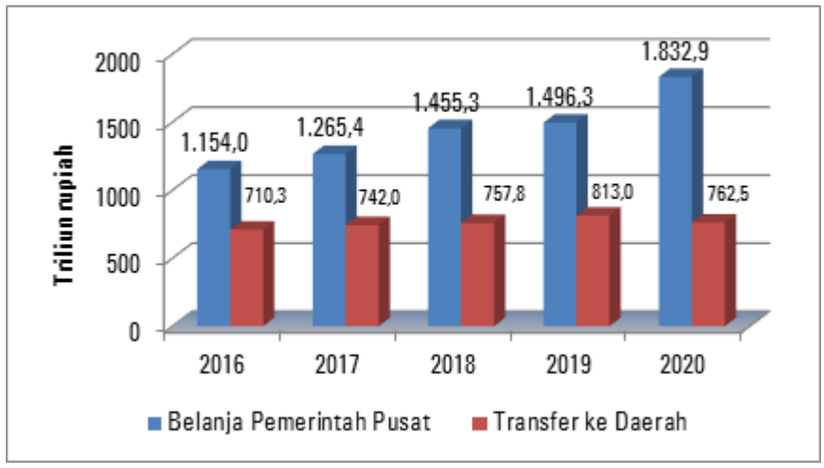
Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2016 s.d. TA 2020 dapat dilihat pada Grafik20.



Grafik 20. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 2016 - 2020

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075 atau 94,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2020 sebesar Rp2.739.165.851.403.000. Realisasi Belanja Negara TA 2020 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832.950.921.019.896, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762.530.176.156.179.

Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2016 s.d. TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2016 - 2020

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.647.783.342.188.986 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.595.481.097.176.075, Defisit Anggaran pada TA 2020 sebesar Rp947.697.754.987.089.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2020 sebesar Rp1.193.293.831.252.057 yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp1.146.812.705.085.320 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp46.481.126.166.737.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp245.596.076.264.968.

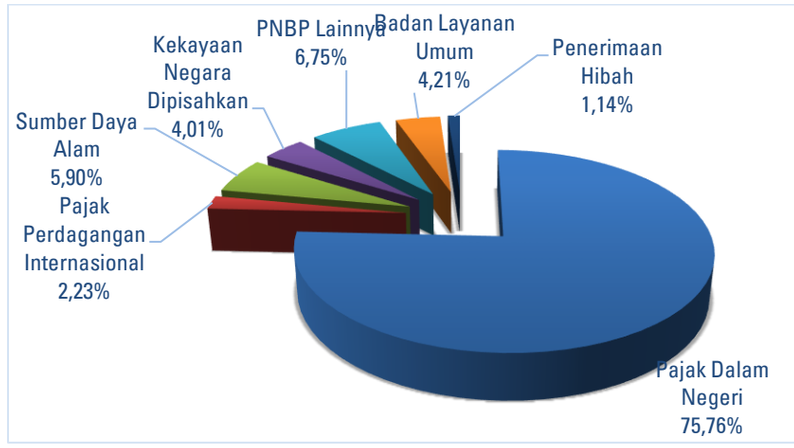
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.647,78 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 sebesar Rp1.647.783.342.188.986 berarti mencapai 96,93 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.699.948.459.678.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 22.



Grafik 22. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada **Lampiran 1A.**

Perbedaan pencatatan total Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp8.768.716.466. Perbedaan pencatatan ini terjadi karena adanya:

1. Perbedaan penerimaan perpajakan sebesar Rp8.768.712.662 yang disebabkan karena selisih kurs valas dan selisih pembulatan atas transaksi penerimaan dalam bentuk valas.
2. Perbedaan penerimaan PNBP di K/L sebesar Rp3.804 karena pembulatan selisih kurs.

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan Rp1.285,13 triliun

Gambaran umum Penerimaan Perpajakan TA 2020

Realisasi penerimaan pajak TA 2020 mencapai Rp1.285.136.317.135.799. Realisasi tersebut mengalami perlambatan sebesar 16,88 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.546.141.893.392.193. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp17.092.509.187.614.

Pemerintah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam APBN sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 sebanyak dua kali. Terakhir melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 target penerimaan pajak disesuaikan menjadi Rp1.404.507.505.772.000. Namun, hingga akhir tahun realisasi penerimaan hanya mencapai 91,50% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian dampak pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan sampai dengan akhir tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1% penurunan penerimaan pajak.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor mengalami perlambatan sebesar 13,29%, sementara PPh Badan mengalami penurunan sebesar 38,50%. Kinerja

impor juga mengalami penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif sebesar 3,24%.

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Penerimaan pajak dalam negeri Rp1.248,41 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp1.248.415. 111.170.305 atau mencapai 91,06 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.371.020.559.002.000. Realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp256.673.091.117.392 atau 17,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.505.088.202.287.697.

Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
PPh Migas	33.026.736.126.169	59.150.314.819.928
PPh Nonmigas	545.850.307.089.643	701.961.892.831.112
PPh ditanggung Pemerintah	15.156.290.554.678	11.153.510.635.628
PPN	439.836.453.302.524	515.971.636.867.181
PPnBM	8.555.391.322.228	15.605.656.987.850
PPN ditanggung Pemerintah	1.936.218.632.936	
PBB	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
Pajak Lainnya	5.580.584.954.473	6.212.194.737.201
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.210.205.384.312	1.465.155.097.749
Jumlah	**1.248.415. 111.170.305**	**1.505.088.202.287.697**

Penurunan penerimaan PPh Pasal 21 diakibatkan oleh menurunnya jumlah tenaga kerja dan pemanfaatan insentif fiskal, PPh 22 Impor dan PPN Impor tertekan oleh menurunnya aktivitas impor dan masih berlanjutnya perang dagang antarnegara ekonomi besar serta insentif pembebasan PPh 22 Impor, PPh Badan terdampak oleh perlambatan ekonomi akibat menurunnya profitabilitas badan usaha pada tahun 2019, yang merupakan dasar perhitungan pajak tahun 2020, insentif pengurangan Angsuran PPh 25, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, PPh Final tertekan akibat terbatasnya aktivitas konstruksi di masa pandemi serta penurunan suku bunga, PPN DN tertekan akibat menurunnya konsumsi rumah tangga, peningkatan restitusi akibat pemanfaatan kebijakan insentif restitusi dipercepat, serta penerapan PSBB.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor terbesar tumbuh -13,29% sementara PPh Badan turun lebih dalam sebesar -38,50%. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif.

Penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terlihat dari setoran masa yang turun dengan pertumbuhan -6,78%. Peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar 12,53% juga mengindikasikan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, mulai dimanfaatkannya insentif pajak yang diberikan Pemerintah berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sejak bulan Mei semakin menambah tekanan pada penerimaan PPh Pasal 21. Tekanan terbesar penerimaan PPh Pasal 21 terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Administrasi dan Pemerintahan.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp16,85 triliun, dengan pertumbuhan -20,93% dibandingkan tahun 2019. Realisasi ini mencapai 88,60% dari target tahun 2020 sebesar Rp19,02 triliun. Penurunan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa dengan pertumbuhan -9,65% dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara yang tumbuh -15,60%. Penurunan terutama terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Pertambangan berturut-turut sebesar -53,05% dan -16,74%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp27,12 triliun, dengan pertumbuhan -49,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi ini hanya mencapai 71,60% dari target sebesar Rp37,87 triliun. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan tren penurunan impor yang secara kumulatif terkontraksi 17,34% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor semakin menyebabkan penurunan yang lebih dalam pada penerimaan. Secara sektoral, penurunan terbesar terjadi pada Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -58,32%, diikuti sektor Perdagangan dengan pertumbuhan -41,95%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mengalami penurunan terutama pada setoran utama yaitu Jasa (tumbuh -6,47%), Masa (tumbuh -12,18%), Bunga (tumbuh -13,37%) dan Dividen (tumbuh -18,33%). Penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -7,91% diikuti sektor Pertambangan dengan pertumbuhan 1,95%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari resiliensi usaha dan tetap terjaganya tingkat kepatuhan sukarela WP OP. Secara sektoral, 78% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 4,84%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp155,09 triliun dengan pertumbuhan -38,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Badan mencapai 71,81% dari target sebesar Rp215,96 triliun. Pencapaian realisasi PPh Badan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019 dan melemahnya harga komoditas utama, serta meningkatnya restitusi. Tekanan semakin berlanjut seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% yang kemudian dinaikkan menjadi 50%. Tiga sektor utamanya yaitu Jasa Keuangan, Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami penurunan berturut-turut sebesar -31,11%, -36,56% dan -61,43%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2019, namun melebihi target dengan capaian sebesar 100,24%. Penurunan PPh Pasal 26 terutama terjadi pada setoran Dividen dan setoran Masa yang masing-masing tumbuh sebesar -10,21%, dan -38,63%. Adapun penurunan terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor utamanya yaitu Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -9,90%.

Realisasi penerimaan PPh Final mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh penurunan suku bunga deposito, penurunan aktivitas konstruksi, penurunan setoran dividen, serta perlambatan permintaan properti. Selain itu, implementasi insentif DTP PPh Final untuk WP PP 23 turut mendorong penurunan PPh Final. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dengan pertumbuhan sebesar -21,55%.

Realisasi penerimaan PPN DN menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi dan masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai PMI yang sebagian besar ada pada zona kontraksi. Secara sektoral, penurunan terbesar terutama terjadi pada sektor Perdagangan dan Konstruksi yang

tumbuh masing-masing sebesar -9,82% dan -29,14%.

Realisasi penerimaan PPN Impor menurun disebabkan oleh penurunan pada aktivitas impor. Secara sektoral, dua kontributor terbesar yaitu sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami penurunan terdalam dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -19,02% dan -18,82%.

Realisasi penerimaan PPnBM DN menurun dibandingkan realisasi tahun 2019, secara umum disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor, dimana di dalamnya termasuk penjualan kendaraan yang terutang PPnBM. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 97,15%), dengan pertumbuhan -50,40%.

Realisasi penerimaan PPnBM Impor menurun dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPnBM Impor mencapai 87,14% dari target secara sektoral, realisasi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil (kontribusi 72,92%) dengan pertumbuhan -39,66%. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan impor mobil (CBU) yang pada tahun 2020 tumbuh -53,50% dibandingkan tahun 2019.

Realisasi penerimaan PBB bertumbuh 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2019 dan dengan pencapaian sebesar 155,88% dari target, terutama ditopang oleh PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya harga minyak dunia.

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mengalami penurunan terutama Bunga Penagihan PPN dan Penjualan Benda Meterai.

Adapun kenaikan penerimaan cukai signifikan diperoleh dari penerimaan cukai etil alkohol 97,33% (yoy) karena meningkatnya produksi alkohol untuk bahan baku pembuatan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan adanya pelimpahan penerimaan tahun sebelumnya dengan diberlakukannya PMK No. 57/PMK.04/2017. Sementara penerimaan riil cukai tembakau tanpa efek PMK No. 57/PMK.04/2017 hanya tumbuh tipis sebesar 1,0%.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1.**

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp36,72 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 sebesar Rp36.721.205.965.494 atau mencapai 109,66 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp33.486.946.770.000. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.332.485.139.002 atau 10,55 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp41.053.691.104.496. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah	**36.721.205.965.494**	**41.053.691.104.496**

Pendapatan Bea Masuk mencapai 101,92% dari target, namun mengalami penurunan 13,55% dibanding tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya insentif penanganan Covid-19 dan aktivitas impor nasional yang melambat, Pelemahan perdagangan internasional maupun aktivitas ekonomi nasional khususnya akibat pandemi Covid-19. Melemahnya aktivitas impor ditandai dengan penurunan devisa bayar sebesar 19,72% dan penguatan kurs Rupiah terhadap USD yang merupakan dampak dari tekanan aktivitas impor selama tahun 2020, yang mana

importasi dari negara-negara utama seperti China, Jepang, Singapura, USA, Thailand, dan Korea Selatan mengalami penurunan.

Pendapatan Bea Keluar mencapai 258,76% dari target, dan menunjukan pertumbuhan 21,30 persen dibandingkan dengan tahun 2019 karena adanya peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit, penerimaan *extra effort* tembaga, dan meningkatnya ekspor CPO dan biji kakao. Penerimaan dari CPO meningkat disebabkan harga CPO yang melebihi USD750 /MT sehingga dikenai Bea Keluar. Pada tahun 2020 terdapat kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak awal tahun, sehingga tidak ada penerimaan dari ekspor bijih nikel.
Untuk Bea Masuk, secara umum, faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan Bea Masuk TA 2020 antara lain:

a. Melemahnya perdagangan internasional maupun aktifitas ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19;
b. Adanya penurunan devisa bayar sebesar 19,72% dan penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar. Hal tersebut disebabkan karena penurunan importasi dari negara-negara utama seperti China, Jepang, Singapura, USA,Thailand, dan Korea Selatan;
c. Adanya penurunan impor dari sektor utama migas yakni bensin (*share*: 43,15 persen) turun 16,96 persen dan minyak bumi (share: 19,87 persen) turun 57,80 persen.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Bea Keluar TA 2020 antara lain:

a. Penerimaan dari tembaga mencapai Rp2,17 triliun atau tumbuh 166,05%, didukung peningkatan volume ekspor dan *extra effort*;
b. Penerimaan dari *Crude Palm Oil* (CPO) di bulan Februari, Maret, Oktober, November, dan Desember sebesar Rp464,34 miliar disebabkan harga CPO yang melebihi USD750 /*Metric Ton* sehingga dikenai Bea Keluar.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp343,81 triliun

Realisasi PNBP TA 2020 sebesar Rp343.814.209.832.563 atau mencapai 116,89 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp294.140.953.906.000. Realisasi PNBP TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp65.180.136.368.312 atau 15,94 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp408.994.346.200.875. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam, (ii) Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

Realisasi penerimaan PNBP melampaui target yang ditetapkan terutama disebabkan oleh membaiknya harga komoditas (minyak bumi, batubara dan CPO) di penghujung tahun 2020.

B.2.1.2.1.Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp97,22 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2020 sebesar Rp97.225.067.272.619 atau mencapai 122,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp79.086.884.879.000. Penerimaan SDA TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp57.670.219.493.668 atau 37,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp154.895.286.766.287. Rincian realisasi Penerimaan SDA sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Minyak Bumi	44.868.847.085.493	83.622.340.876.020
Pendapatan Gas Bumi	24.211.325.322.339	37.467.520.404.392
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	21.178.987.879.156	26.343.691.801.600
Pendapatan Kehutanan	4.403.263.272.502	5.007.257.006.149
Pendapatan Perikanan	600.662.766.688	521.936.215.435
Pendapatan Panas Bumi	1.961.980.946.441	1.932.540.462.691
Jumlah	**97.225.067.272.619**	**154.895.286.766.287**

Penurunan realisasi PNBP dibandingkan dengan realisasi tahun lalu terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata *Indonesian Crude Price* (ICP) yang signifikan, penurunan *lifting* minyak dan gas bumi, penurunan HBA (Harga Batubara Acuan), dan belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik, baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

Realisasi PNBP melampaui target yang ditetapkan terutama disebabkan oleh realisasi rata-rata ICP lebih tinggi dibandingkan yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dan adanya pengendalian *cost recovery*. Rata-rata ICP periode Januari sampai Desember 2020 sebesar USD40.39/barel, sedangkan asumsi ICP yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar USD33.00/barel. Adapun pengendalian *cost recovery* sebesar USD8.1 miliar (asumsi Perpres 72/2020 sebesar USD8.8 miliar) turut menyumbang kenaikan realisasi Penerimaan SDA Migas. Selain hal tersebut, kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Desember 2020 dan meningkatnya permintaan pasar global antara lain dari Jepang, Korea Selatan, dan India, penandatanganan kesepakatan peningkatan ekspor batubara Indonesia ke China, serta meningkatnya realisasi volume produksi batubara menjadi sebesar 557,54 juta ton (target 424 juta ton) juga mendorong peningkatan penerimaan sektor Pertambangan Minerba. Kenaikan penerimaan dari beberapa mineral juga memberikan sumbangan positif terhadap realisasi penerimaan pertambangan minerba, antara lain dipengaruhi oleh tingginya harga emas dan perak, kebijakan kenaikan tarif PNBP nikel yang diberlakukan pada PP Nomor 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terobosan pemerintah berupa penggalian potensi PNBP melalui *joint program* minerba turut berperan meningkatkan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba ini. Pada tahun 2020 juga terdapat pembayaran pokok dan denda PNBP Penggunaan Kawasan Hutan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp350 miliar.

Terkait PNBP Panas Bumi, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi Covid-19 menyebabkan penundaan kegiatan operasi panas bumi utamanya kegiatan *drilling* ke tahun berikutnya. Penundaan kegiatan tersebut menyebabkan berkurangnya pembebanan biaya pada tahun berjalan sehingga menambah setoran bagian Pemerintah.

Dampak positif penerimaan sektor perikanan utamanya dipengaruhi oleh kemudahan dan percepatan proses pengajuan perizinan perikanan tangkap yang dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dari semula 14 hari menjadi 1 jam dan penambahan jumlah verifikator perikanan mendorong pelaku usaha sektor perikanan tangkap mengajukan perizinan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1.**

B.2.1.2.2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp66,08 triliun

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) TA 2020 sebesar Rp66.080.543.541.337 atau mencapai 101,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp65.000.000.000.000. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.645.575.665.453 atau 18,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp80.726.119.206.790. Faktor utama turunnya realisasi penerimaan KND disebabkan oleh turunnya setoran sisa surplus BI dan Pendapatan Bagian Laba BUMN menurun disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN antara lain karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	43.888.106.053.599	49.773.695.752.482
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	710.827.000.000	860.515.629.605
Pendapatan dari Surplus Lembaga (Bank Indonesia)	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Jumlah	**66.080.543.541.337**	**80.726.119.206.790**

Rincian Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan yang berasal dari BUMN sebagai berikut (dalam rupiah).

	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.774.153.468.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.893.567.936.000
3	PT Pertamina (Persero)	8.500.000.000.000
4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.950.281.728.753
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.307.671.406.731
6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	973.500.000.000
7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	708.218.661.061
8	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	524.815.825.889
9	PT Sarana Multi Infrastruktur	500.000.000.000
10	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	297.314.781.801
11	BUMN Lainnya	1.169.409.245.364
Jumlah		**44.598.933.053.599**

B.2.1.2.3.Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Rp111,20 triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2020 sebesar Rp111.200.271.136.408 atau 111,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp100.053.788.845.000. Realisasi PNBP Lainnya TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.303.356.096.024 atau 10,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp124.503.627.232.432.

Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	13.539.707.459.461	19.006.470.818.652
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	281.310.250.571	341.531.328.482
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	513.738.203.370	522.960.362.436
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	412.885.184.853	626.866.552.049
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	34.883.315.174	81.725.622.928
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	1.413.819.541.242	10.530.277.359.314

Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	968.963.627.379	1.319.299.142.276
Sub Total	**17.165.307.582.050**	**32.429.131.186.137**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.880.668.923.673	4.303.327.782.245
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	398.679.943.717	737.756.064.394
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	570.140.874.539	738.384.144.329
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	540.405.823.287	1.150.028.180.079
Pendapatan Perizinan	1.264.212.053.067	1.705.887.057.430
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	6.597.417.235.000	8.165.177.999.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	854.384.965.215	959.273.623.322
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	540.614.592.355	606.540.203.948
Sub Total	**13.646.524.410.853**	**18.366.375.054.747**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.297.548.113.551	3.007.631.953.650
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	195.367.640.022	196.358.994.030
Pendapatan Jasa Karantina	351.362.411.935	361.295.658.526
Pendapatan Jasa Agraria	1.790.813.098.252	2.255.101.568.584
Pendapatan Jasa Keagamaan	761.896.449.203	907.998.471.631
Sub Total	**5.396.987.712.963**	**6.728.386.646.421**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.205.010.467.015	4.234.651.512.314
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.597.786.527	471.750.913.878
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	393.225.995.891	515.980.531.081
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	4.929.103.725	6.646.684.597
Sub Total	**4.788.763.353.158**	**5.229.029.641.870**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.053.993.240.597	6.965.694.762.838
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	21.894.424.385.636	18.767.984.812.439
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	237.168.423.012	169.538.431.335
Sub Total	**28.185.586.049.245**	**25.903.218.006.612**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89.463.033.718	200.710.655.162
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	40.438.401.258	30.821.873.691
Pendapatan Jasa Lainnya	174.231.801.183	198.369.688.037
Sub Total	**304.133.236.159**	**429.902.216.890**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.738.056.334.505	1.825.320.700.269
Pendapatan *Gain On Bond Redemption*		5.807.000.000
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	10.819.795.295.000	8.713.038.583.942
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan *Fee* Lainnya Atas Transaksi SBN	200.631.019.737	118.681.119.410
Pendapatan dari Selisih Kurs	1.843.194.491.548	12.607.030.733
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	425.899.686.878	232.120.267.593
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	7.357.805.092.258	7.736.672.109.435
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	565.743.212.949	660.546.658.421
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	29.777.093.478	29.088.869.541
Sub Total	**22.980.902.226.353**	**19.333.882.339.344**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	459.876.608.867	417.029.576.247
Pendapatan Denda II	41.609.380.736	189.899.072.757

Pendapatan Denda III	2.304.174.509	7.461.242.171
Sub Total	**503.790.164.112**	**614.389.891.175**
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	9.563.345.512.882	14.879.041.347.105
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	237.882.685.505	308.842.085.674
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	18.082.294.056	24.230.256.247
Pendapatan Lain-Lain I	7.948.511.344.000	476.204.460
Pendapatan Lain-Lain II	460.454.565.072	256.722.355.750
Sub Total	**18.228.276.401.515**	**15.469.312.249.236**
Jumlah PNBP Lainnya	**111.200.271.136.408**	**124.503.627.232.432**

PNBP Lainnya menurun 10,69 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terutama disebabkan oleh turunnya Pendapatan Minyak Mentah (DMO), pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas, dan pendapatan penjualan hasil tambang batubara. Penurunan realisasi PNBP Lainnya antara lain juga disebabkan oleh turunnya penerimaan PNBP pelayanan sebagai dampak pandemi Covid-19 antara lain PNBP dari layanan imigrasi, SIM/STNK, sektor perhubungan, pendidikan, jasa agraria, jasa keagamaan, dan jasa kesehatan.

Kinerja PNBP lainnya yang melampaui target APBN dipengaruhi kenaikan pada Pendapatan lain-lain diakibatkan oleh Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun, premium obligasi, dan pendapatan dari jasa komunikasi dan informatika (termasuk penggunaan spektrum radio), serta pendapatan selisih kurs.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Rp69,30 triliun

Realisasi Pendapatan BLU TA 2020 sebesar Rp69.308.327.882.199 atau 138,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp50.000.280.182.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp20.439.014.886.833 atau 41,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp48.869.312.995.366. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	33.948.496.986.500	33.307.807.529.959
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.462.658.598.988	1.615.780.715.595
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	25.443.176.971.730	5.003.672.214.239
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	606.625.257.225	770.883.894.730
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.460.957.814.443	40.698.144.354.523
Pendapatan Hibah BLU	123.568.742.424	154.843.013.918
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	587.981.383.580	855.074.995.219
Pendapatan dari Alokasi APBN	1.370.313.178.626	328.485.663.104
Pendapatan BLU Lainnya	5.765.506.763.126	6.832.764.968.602
Jumlah	**69.308.327.882.199**	**48.869.312.995.366**

Peningkatan PNBP BLU terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) yang mempengaruhi kinerja BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS), serta makin membaiknya kinerja BLU yang meningkatkan pendapatan BLU, semisal BLU di rumpun layanan kesehatan yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.102.411.559.419 dibanding TA 2019. Kenaikan signifikan terbesar berasal dari BLU BPDPKS sebesar Rp20.262.827.078.266, disebabkan karena terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 telah diberlakukan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, kenaikan harga CPO, dan produk turunannya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp18,83 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2020 sebesar Rp18.832.815.220.624 atau 1448,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.300.000.000.000. Penerimaan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.335.471.227.703 atau 242,58 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp5.497.343.992.921. Realisasi Penerimaan Hibah terdiri dari (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	533.880.884.575	591.671.964.284
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	1.300.917.711.407	1.232.593.695.958
Jumlah	**18.832.815.220.624**	**5.497.343.992.921**

Kenaikan realisasi penerimaan hibah terutama dipengaruhi oleh hibah terkait dengan Pilkada, hibah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsung kepada BUN. Terkait dengan pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak awal tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Sampai dengan periode Tahun 2020 (Audited), terdapat 213 hibah yang telah diregistrasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang dalam rangka pelaksanaan PC-PEN untuk mendukung Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dari Rupiah Murni (RM) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 terkait pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak yang dilaksanakan di Tahun 2020 berdasarkan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebesar Rp10.283.128.647.564.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.2. Belanja Negara

Belanja Negara Rp2.595,48 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075 atau 94,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2.739.165.851.403.000. Belanja Negara TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp286.193.787.668.692 atau 12,39 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.309.287.309.507.383. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.832,95 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp1.832.950.921.019.896 atau 92,80 persen dari APBN sebesar Rp1.975.240.206.353.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp336.637.034.655.126 atau 22,57 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.496.313.886.364.770.

Pada pelaksanaan APBN TA 2020 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2020 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN Tahun Anggaran 2020 yaitu dalam Pasal 19, Pasal 27, dan Pasal 40. Ketentuan lebih lanjut mengenai Revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2020 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a. pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP kecuali belanja yang bersumber dari PNBP pada Satker Badan Layanan Umum;

c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam dan lanjutan Rupiah Murni Pendamping;

d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah, termasuk hibah yang diterushibahkan;

e. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;

f. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP atas klaim asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga tertentu;

g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/ proyek Kementerian/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2019;

h. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya, dan/atau akibat perubahan kebijakan keuangan negara dan/atau stabilitas sistem keuangan;

i. perubahan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagai akibat dari penyesuaian kurs;

j. perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang;

k. perubahan anggaran keluaran (*output*) Prioritas Nasional;

l. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga;

m. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) bagian anggaran dan/ atau antarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga sebagai akibat perubahan kabinet;

n. pergeseran anggaran antarprogram dan/atau antarbagian anggaran untuk pembentukan dan/atau pengubahan Kementerian Negara/Lembaga berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

o. perubahan anggaran yang mengakibatkan terjadinya penurunan volume keluaran *(output)* teknis non prioritas nasional, termasuk penurunan volume komponen gedung/bangunan dan kendaraan bermotor pada keluaran (*output*) layanan sarana dan prasarana internal;

p. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri baru untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran, (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

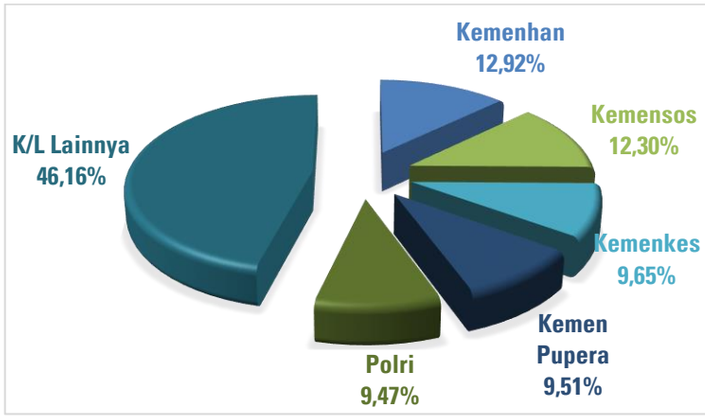
Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp773.333.585.931.730 atau 42,19 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 pada K/L (selain BA BUN) sebesar Rp1.059.617.335.088.170. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp136.871.429.771.736 atau 12,92 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Adapun perbedaan pencatatan total realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp6.371, hal ini disebabkan oleh adanya pembulatan karena selisih kurs.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 23.



Grafik 23. Komposisi Kementerian Negara/Lembaga Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Lampiran 2.**

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

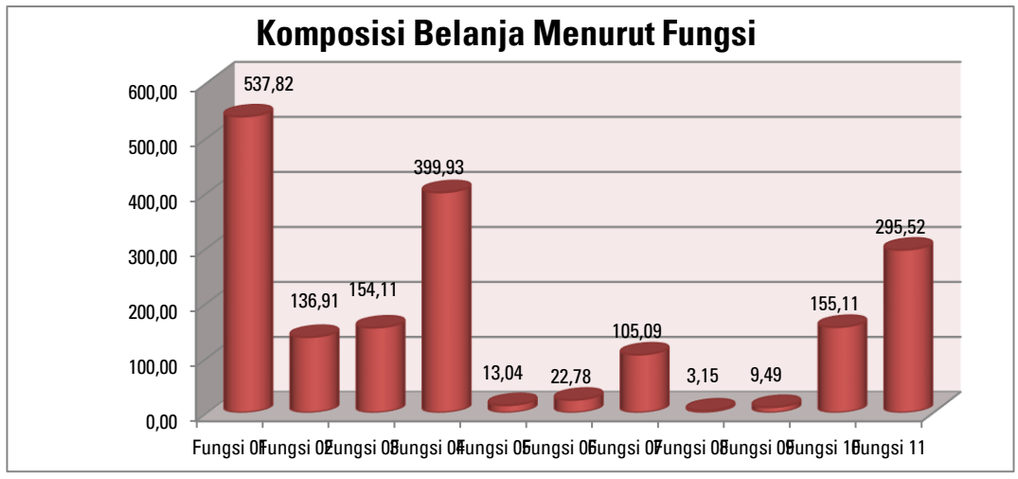
Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi

pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi TA 2020 sebagai berikut.

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2020
01	Pelayanan Umum	485.001.503.987.000	537.819.962.588.642
02	Pertahanan	117.957.524.683.000	136.908.191.938.700
03	Ketertiban dan Keamanan	406.988.927.797.000	154.107.557.701.779
04	Ekonomi	416.491.563.418.000	399.930.041.167.603
05	Lingkungan Hidup	13.910.544.071.000	13.041.839.102.312
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	20.648.417.043.000	22.784.116.591.807
07	Kesehatan	81.621.103.093.000	105.088.539.465.934
08	Pariwisata dan Budaya	3.062.804.280.000	3.151.797.244.833
09	Agama	9.948.800.197.000	9.488.004.219.828
10	Pendidikan	148.909.121.180.000	155.113.072.967.127
11	Perlindungan Sosial	270.699.896.604.000	295.517.798.037.702
	Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI		(6.371)
	Total	**1.975.240.206.353.000**	**1.832.950.921.019.896**

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2020 (dalam triliun rupiah) terlihat pada Grafik 24.

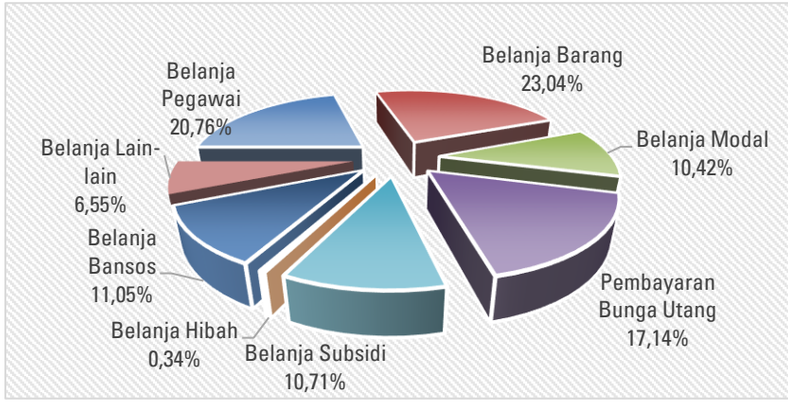


Grafik 24. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2020

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang; (v) Belanja Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Belanja Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 25.



Grafik 25. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2020

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp380,53 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp380.532.228.590.618 yang berarti 94,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp403.722.736.304.000. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.457.968.737.999 atau 1,19 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp376.074.259.852.619.

Kenaikan tersebut terjadi karena terdapat kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun sebanyak 134.307 orang; adanya kenaikan untuk belanja iuran kesehatan yaitu terkait perubahan tarif yang semula 2 persen dibayar peserta dan 3 persen dibayar pemerintah menjadi 1 persen dibayar peserta dan 4 persen dibayar pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019; serta perubahan dasar perhitungan iuran kesehatan dibayar pemerintah yang sebelumnya hanya dari Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga menjadi Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2020 juga dipengaruhi kebijakan terkait Gaji 13 dan THR yang salah satunya dengan tidak memperhitungkan komponen tunjangan kinerja, maupun kebijakan untuk pejabat negara dan pejabat pada tingkat tertentu.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.671.631.843.197	85.321.261.837.421
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	62.034.543.645.829	61.403.644.288.750
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	932.231.171.338	1.011.570.524.956
Belanja Gaji Dokter PTT	2.160.810.114	66.695.423.253
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	18.014.581.489.535	15.785.948.877.732
Belanja Honorarium	1.672.163.315.177	1.876.741.556.492
Belanja Lembur	738.864.388.804	723.295.487.788
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	75.902.029.595.284	83.006.574.110.826
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	125.525.829.327.121	119.482.270.828.040
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	10.038.193.006.370	7.396.256.917.455
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(2.151)	(94)
Jumlah	**380.532.228.590.618**	**376.074.259.852.619**

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp422,33 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2020 sebesar Rp422.338.225.598.487 yang berarti 154,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp273.162.110.060.000. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp87.920.017.967.703 atau 26,29 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp334.418.207.630.784.

Realisasi Belanja Barang melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran, dan penambahan pagu terkait Belanja Barang BLU.

Kenaikan Realisasi Belanja Barang terutama disebabkan adanya realisasi pada beberapa program pemerintah dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk merespon dampak pandemi Covid-19 seperti pembayaran bantuan UMKM, bantuan upah gaji, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

Faktor lain yang mendukung percepatan realisasi belanja barang yaitu realisasi yang cukup signifikan pada pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit. Namun di sisi lain, kebijakan *refocusing*/realokasi anggaran belanja K/L dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta penerapan mekanisme kerja melalui *working from home*/*flexible working space* berdampak menurunnya pada realisasi belanja operasional/non-operasional dan belanja perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Barang Operasional	45.268.143.378.784	44.385.250.069.807
Belanja Barang Non Operasional	84.920.141.872.140	70.563.122.087.864
Belanja Kontribusi	3.483.795.201.131	509.322.406.367
Belanja Barang Persediaan	21.038.941.104.669	16.515.125.427.740
Belanja Jasa	31.720.021.878.005	32.584.351.712.027
Belanja Pemeliharaan	38.090.179.431.728	36.134.522.333.162
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.086.350.421.690	41.163.798.485.961
Belanja Perjalanan Luar Negeri	748.120.535.904	3.541.453.858.830
Belanja Barang BLU	63.616.794.783.911	41.238.015.097.725
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	14.943.180.135.632	22.265.717.321.271
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana DK/TP untuk Diserahkan kepada Pemda	330.404.459.911	1.048.499.740.731
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	95.092.152.399.203	24.469.030.412.202
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(4.221)	(1.322.903)
Jumlah	**422.338.225.598.487**	**334.418.207.630.784**

Untuk realisasi Belanja Barang BLU sebesar Rp63.616.794.783.911 terdiri dari:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Gaji dan Tunjangan	11.352.732.852.602	11.280.353.515.143
Belanja Barang	2.973.255.173.677	3.840.627.618.718
Belanja Jasa	6.005.297.131.355	5.740.856.493.387
Belanja Pemeliharaan	1.324.654.935.129	1.245.446.491.071
Belanja Perjalanan	510.793.637.918	1.313.100.429.261
Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*	1.956.441.774.570	1.920.222.868.140
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	28.178.427.538.769	5.734.385.403.341
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	1.945.078.557.968	959.702.444.183

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.042.591.503.488	3.560.788.364.084
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	3.288.097.091.653	3.695.211.120.606
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	58.275.998.738	26.556.821.615
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges – BLU	1.090.722.789	1.220.197.032
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU	221.753.540.058	277.345.205.157
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi – BLU	24.301.261.045	25.488.518.505
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi – BLU	1.364.314.500	1.172.925.140
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.782.765.783.482	1.593.336.053.074
Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU	102.562.600	111.224.200
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1.015.057.385	983.995.000
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain		440.000.000
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	4.703.022.900	20.623.130.068
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	8.400.000	42.280.000
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	415.080.645.263	
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	294.984.226.430	
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	156.984.904.583	
Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	44.369.428.216	
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	32.624.718.793	
Jumlah	**63.616.794.783.911**	**41.238.015.097.725**

Belanja Barang BLU yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Belanja Barang BLU untuk Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit diantaranya karena peningkatan penyaluran pembiayaan selisih Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dengan Harga Indeks Pasar minyak jenis solar. Peningkatan realisasi Belanja Barang BPDPKS juga disebabkan karena perubahan nilai dukungan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang semula Rp25juta/ha menjadi Rp30juta/ha.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp190,91 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp190.919.832.381.884 yang berarti 138,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp137.383.862.054.000. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.078.352.745.170 atau 7,35 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp177.841.479.636.714.

Realisasi Belanja Modal melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN, pengesahan Belanja Modal dalam rangka untuk Proyek Strategis Nasional, dan penambahan pagu anggaran terkait luncuran Pinjaman Hibah Luar Negeri dan percepatan SBSN.

Belanja modal tanah dan belanja peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya terutama dikarenakan adanya pengesahan Belanja Modal pengadaan tanah dalam rangka untuk Proyek Strategis Nasional oleh Kementerian/Lembaga antara lain dalam rangka pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pengadaan alutsista/almatsus, serta alat kesehatan rumah sakit pemerintah (TNI/Polri/Kemenkes). Sedangkan, Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurun dibanding tahun anggaran sebelumnya terutama dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 serta *refocusing*/realokasi/restrukturisasi/penundaan kegiatan.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Modal Tanah	23.537.354.331.766	4.195.231.872.492
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.102.627.430.616	60.175.542.160.621
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.349.710.208.625	27.559.278.695.437
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.450.183.388.085	74.559.542.865.906
Belanja Modal Lainnya	6.054.072.120.731	6.497.408.341.901
Belanja Modal BLU	4.425.884.902.060	4.854.474.425.357
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	1	1.275.000
Jumlah	**190.919.832.381.884**	**177.841.479.636.714**

Belanja Modal BLU sebesar Rp4.425.884.902.060 terdiri dari:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Modal Tanah	43.259.644.278	432.977.524.899
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.027.098.690.375	2.292.000.300.380
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.678.255.487.694	1.907.204.449.651
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.084.094.501	105.249.666.519
Belanja Modal Lainnya	136.554.471.630	117.042.483.908
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	283.306.269.066	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	72.371.456.539	
Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	7.954.787.977	
Jumlah	**4.425.884.902.060**	**4.854.474.425.357**

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang Rp314,08 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 sebesar Rp314.088.112.296.556 yang berarti 92,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp338.784.308.000.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp38.566.946.886.337 atau 14,00 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp275.521.165.410.219.

Hal ini terutama karena bertambahnya pembiayaan dari SBN dan meningkatnya *outstanding* SBN. Kenaikan belanja bunga utang terutama untuk SBSN Jangka Panjang Rupiah, Obligasi Negara Rupiah dan Valas, SBSN Jangka Panjang Valas, serta untuk pembayaran *discount* obligasi Negara dan *discount* SBSN Jangka Panjang, serta pembayaran *discount* SPN dan SPNS.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	229.220.668.201.277	201.478.372.125.514
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	50.592.442.385.279	40.902.078.447.238
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	16.933.374.767.759	21.445.197.411.367
Belanja Pembayaran *Discount* SUN DN	9.413.603.000.868	7.923.133.935.500
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN		383.890.000.000
Belanja Pembayaran *Discount* SBSN	7.928.023.941.373	3.388.493.490.600
Jumlah	**314.088.112.296.556**	**275.521.165.410.219**

Realisasi Belanja Bunga Utang tersebut di atas terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16.933.374.767.759 pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp296.564.017.745.293 dan pembayaran bunga pinjaman dalam negeri senilai Rp590.719.783.504.

Realisasi Pembayaran Bunga SBN TA 2020 sebesar Rp296.564.017.745.293 termasuk didalamnya telah memperhitungkan pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara – Rupiah (akun 541211) TA 2020 sebesar Rp2.696.798.459.183. Pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara merupakan pengembalian belanja yang berasal dari kontribusi Bank Indonesia atas SBN untuk *Public Goods* sebesar Rp1.753.214.980.000, dan kontribusi BI atas *Non Public Goods* sebesar Rp941.773.886.995,00, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran bunga atas SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1.809.592.188,00. Rincian selengkapnya terkait kontribusi BI sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LRA.

Terdapat pengembalian belanja subsidi bunga PEN (Non KUR) Perbankan dan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp27.895.068.769.

Realisasi belanja Non KUR yang belum disalurkan kepada debitur per 31 Desember 2020 melalui Kementerian BUMN sebesar Rp1.228.894.335.500 dan melalui Bendahara Umum Negara sebesar Rp2.545.523.579.930. Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terdapat realisasi tambahan subsidi bunga KUR dalam rangka pelaksanaan Program PEN tidak berhasil dipindahbukukan ke rekening pinjaman debitur sebesar Rp188.385.194.139 sehingga dana tersebut masih tersimpan dalam rekening penampungan dana subsidi di bank penyalur.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Rp196,23 triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 sebesar Rp196.231.455.278.876 yang berarti 102,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp192.023.203.430.000. Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.571.111.567.235 atau 2,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp201.802.566.846.111.

Berdasarkan UU APBN 2020 anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp192 T. Namun dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sesuai Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2020, anggaran Belanja Subsidi disesuaikan menjadi Rp187 T. Dalam Perpres No 72 Tahun 2020, pemerintah kemudian menyesuaikan kembali anggaran Belanja Subsidi menjadi Rp192.023.203.430.000. Berdasarkan dipa terakhir, pemerintah menetapkan anggaran Belanja Subsidi tahun 2020 menjadi sebesar Rp241.026.561.739.000.

DIPA belanja subsidi listrik sebesar Rp62,66 triliun terdiri dari anggaran subsidi listrik reguler sebesar Rp51,04 triliun dan anggaran diskon listrik sebesar Rp11,62 triliun. Anggaran diskon listrik seluruhnya bersumber dari pergeseran anggaran BA 999.08 Belanja Lain-lain. Dari anggaran diskon listrik sebesar Rp11,62 triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres no. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp3,46 triliun.

DIPA belanja subsidi pupuk sebesar Rp35,48 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp24,53 triliun untuk penambahan volume penyaluran pupuk dan pembayaran pembayaran kekurangan bayar subsidi pupuk tahun 2017, 2018, dan 2019.

DIPA belanja subsidi elpiji sebesar Rp32,81 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp23,46 triliun karena perubahan harga minyak mentah/ICP dan nilai tukar.

DIPA belanja subsidi pajak DTP sebesar Rp12,77 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp11,54 triliun.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Subsidi Minyak Solar	13.621.677.403.000	27.287.776.810.886
Belanja Subsidi Minyak Tanah	1.304.445.320.933	2.770.731.238.258
Belanja Subsidi Elpiji	32.810.891.192.000	54.150.841.096.873
Belanja Subsidi Listrik	49.655.080.902.612	52.666.457.809.744
Belanja Subsidi Pupuk	31.099.691.311.154	34.308.308.749.200
Belanja Subsidi PPh-DTP	12.762.355.715.792	11.153.533.500.306
Belanja Subsidi BM – DTP	142.402.113.700	354.326.302.000
Belanja Subsidi PT KAI	2.548.745.105.810	2.169.074.920.170
Belanja Subsidi PT PELNI	2.046.299.999.387	1.817.907.763.920
Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	151.853.103.000	156.132.228.800
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	159.458.000.000	748.720.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.751.757.280.884	3.529.392.366.828
Belanja Subsidi *Risk Sharing* KKP dan Energi	12.650.384.255	6.047.109.076
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	25.519.545.572	13.481.673.580
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	13.570.736.962.454	10.613.838.563.082
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	156.480.235.150	47.813.614.505
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	12.293.309.095	
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	1.530.671.052	7.726.239.785
Belanja Subsidi Resi Gudang	703.395.225	456.859.098
Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19	11.448.439.134.297	
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan -Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	
Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	4.984.218.342.076	
Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	2.393.934.838.886	
Belanja Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	91.076.746.670	
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	7.822.284.347.056	
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	
Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	1.936.218.632.936	
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.861	
Jumlah	**196.231.455.278.876**	**201.802.566.846.111**

Penurunan Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 dibanding tahun sebelumnya disebabkan adanya Pengendalian Subsidi BBM karena dampak harga minyak dan penurunan kegiatan masyarakat.

Pada tahun 2020 terdapat belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp11.448.439.134.297 untuk keperluan pembayaran Diskon Tarif Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif Bisnis dan Industri daya 450 VA kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka program PEN.

Subsidi Pajak DTP Tahun Anggaran 2020 secara total sebesar Rp17.092.509.187.614 merupakan belanja subsidi untuk Pajak DTP yang reguler, berupa PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan PPh DTP Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN serta belanja subsidi untuk Pajak DTP terkait PEN, berupa: PPN DTP atas Alat Kesehatan, PPh Pasal 21 DTP, dan PPh Final DTP bagi UMKM, serta PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi P3-TGAI.

Realisasi belanja subsidi solar dan LPG Tabung 3 Kg mengalami penurunan terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan tetap subsidi solar dari Rp2.000/liter pada Tahun 2019 menjadi Rp1.000/liter pada Tahun 2020, realisasi volume konsumsi yang lebih rendah, harga produk LPG yang lebih rendah, dan pembayaran kekurangan subsidi tahun lalu pada Tahun 2020 yang lebih rendah. Secara keseluruhan, realisasi belanja tersebut tumbuh positif sebesar 53,25 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp11.153.533.500.306, karena terdapat pembayaran utang jangka pendek atas kurang bayar 2018 serta belanja subsidi Pajak-DTP terkait PEN.

Dari realisasi Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian KUKM sebesar Rp4.984.218.342.076 dan Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN - Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebesar Rp7.790.014.948.872, di antaranya sebesar Rp3.962.803.109.569, per 31 Desember 2020 masih tersimpan di rekening penampungan bank/lembaga penyalur.

Secara keseluruhan, realisasi belanja tersebut tumbuh positif sebesar 53,25 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp11.153.533.500.306, karena terdapat pembayaran utang jangka pendek atas kurang bayar 2018 serta belanja subsidi Pajak-DTP terkait PEN.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp6,27 triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2020 sebesar Rp6.275.907.926.228 yang berarti 123,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp5.072.136.588.000. Realisasi Belanja Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp200.297.735.817 atau 3,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp6.476.205.662.045.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	6.246.365.438.842	6.241.521.667.087
Belanja Hibah Lainnya	130.909.594	409.607.672
Jumlah	**6.275.907.926.228**	**6.476.205.662.045**

Penurunan realisasi belanja hibah terutama disebabkan oleh Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (Hibah Air Minum) merupakan jenis hibah yang bersifat *multiyears* yang dimulai di tahun 2012 dan sebagian besar daerah telah selesai melaksanakan program hibah sebelum tahun 2019. Sedangkan tidak adanya realisasi Hibah Air Minum pada Tahun 2020 disebabkan karena terdapat perubahan skema hibah dari berbasis *output* menjadi

berbasis kinerja dengan sasaran daerah penerima baru. Tahun 2020 difokuskan pada perencanaan, kegiatan, dan *reimbursement* yang akan dimulai pada Tahun 2021.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp2.264.647.247.182 digunakan untuk hibah pariwisata yang disalurkan kepada 97 pemerintah daerah.

Salah satu jenis Belanja Hibah yang terealisasi pada tahun 2020 diantaranya adalah hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP). Hibah IPDMIP terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber pendanaan, yaitu ADB, AIF, dan IFAD. Terkait Belanja Hibah IPDMIP-ADB Tahun 2020 terdapat kesalahan penyaluran, dimana terdapat Belanja Hibah sebesar Rp1.829.478.735 yang seharusnya disalurkan ke Provinsi Sulawesi Selatan namun disalurkan ke Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh *human error* tanpa ada unsur kesengajaan. Atas hal tersebut, sedang diupayakan penyelesaian dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengembalian belanja pada akun 425916 Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL;
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahan setoran dimaksud ke rekening khusus Hibah IPDMIP;
c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui Belanja Hibah IPDMIP.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Rupiah Murni pada tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya adalah hibah pariwisata. Hibah Pariwisata dialokasikan sebagai pre-kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur Covid-19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak. Sasaran Hibah Pariwisata yaitu pemerintah daerah yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta pemulihan penurunan PAD bagi pemerintah daerah akibat Pandemi Covid-19 dan industri hotel dan restoran yang memenuhi kriteria penerima hibah. Rrealisasi Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182 atau sebesar 68,63 persen dari pagu anggarannya. Rendahnya realisasi Hibah Pariwisata antara lain disebabkan oleh:

a. Waktu Pelaksanaan program relatif sangat singkat sekitar Oktober – Desember 2020;
b. Pembatasan sosial di daerah sebagai bagian dari penangan pandemi di daerah berpengaruh pada kecepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan; dan
c. Pemahaman daerah atas pengelolaan hibah relatif belum baik.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp202,52 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp202.529.969.428.206 yang berarti 116,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp174.517.691.694.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp90.049.714.650.577 atau 80,06 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp112.480.254.777.629. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosisal sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	231.593.203.136	397.798.295.384
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	64.530.742.396.461	47.129.306.212.971
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	4.903.114.838.186	2.827.675.472.473
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	38.810.923.377.200	34.703.408.078.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	75.631.317.802.066	19.789.409.255.595
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	18.422.277.811.157	7.632.657.463.206
Jumlah	**202.529.969.428.206**	**112.480.254.777.629**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial melampaui pagu APBN dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran.

Realisasi belanja bantuan sosial dalam rangka PEN antara lain adanya perluasan penyaluran bantuan sosial, penambahan target dan besaran manfaat (PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai), peningkatan bantuan premi iuran JKN kepada masyarakat (PBI), program bantuan KIP Kuliah, dan program bantuan KIP Kuliah untuk sekolah agama. Total realisasi belanja bantuan sosial untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19 sebesar Rp132.665.399.241.599.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp120,03 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2020 sebesar Rp120.035.189.519.041 yang berarti 26,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp450.574.158.223.000. Realisasi Belanja Lain-lain TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp108.335.442.970.392 atau 925,96 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp11.699.746.548.649. Rincian Belanja lain-lain sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.083.584.096.722	8.028.004.141.391
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	53.116.712.664	567.760.624.610
Belanja Lain-lain BUN	91.732.086.624.853	749.878.030.942
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	24.058.522.796.424	
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D	66	
Belanja Lain-lain Lainnya	2.107.879.288.312	2.354.103.751.706
Jumlah	**120.035.189.519.041**	**11.699.746.548.649**

Tingginya peningkatan realisasi belanja lain-lain utamanya dipengaruhi oleh realisasi kompensasi Pemerintah atas selisih Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Harga Jual Eceran (HJE) BBM sebesar Rp91.079.999.999.900.

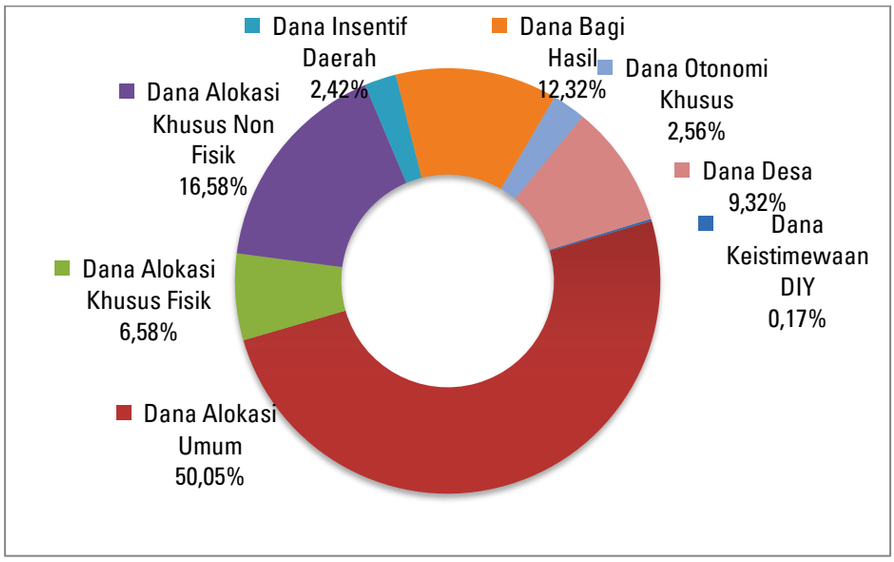
Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang direalisasikan melalui Belanja Lain-lain terdiri dari: (i) Bantuan Iuran JKN bagi peserta PBPU/BP kelas III sebesar Rp4.118.240.745.500; (ii) Program Kartu Prakerja sebesar Rp18.252.242.050.924; dan (iii) Bantuan Selisih Pemakaian Riil dengan Rekening Minimum dan Bantuan Pembebasan Biaya Beban atau Abonemen Tagihan Listrik sebesar Rp1.688.040.000.000. Adapun penyerapan belanja lain-lain terhadap pagunya relatif rendah, yaitu 26,58 persen dari Pagu, dikarenakan sebagian besar pagu belanja lain-lain awalnya dialokasikan untuk mengakomodasi ketidakpastian (cadangan) dan dalam tahun berjalan direalokasi pemanfaatannya ke belanja K/L maupun belanja BA BUN yang lain.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp762,53 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 sebesar Rp762.530.176.156.179 yang berarti 99,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp763.925.645.050.000. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 disajikan pada Grafik 26.



Grafik 26. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp691,42 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 sebesar Rp691.429.657.572.323, yang berarti 99,81 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp692.735.645.050.000. Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp51.729.617.091.291 atau 6,96 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp743.159.274.663.614.

Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Rp652,09 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp652.097.644.670.323 yang berarti 99,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp653.358.917.354.000. Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp59.187.239.196.291 atau 8,32 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp711.284.883.866.614. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum Rp475,51 triliun

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2020 sebesar Rp475.518.812.742.551, yang berarti 101,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp470.800.222.354.000. Realisasi Dana Transfer Umum TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49.371.398.227.868 atau 9,41 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp524.890.210.970.419.

Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil dan (ii) Dana Alokasi Umum.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Rp93,90 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2020 sebesar Rp93.906.361.247.000 atau 108,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp86.418.698.127.000. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp10.073.611.167.419 atau 9,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp103.979.972.414.419.

Penurunan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) disebabkan terutama oleh penurunan pagu DBH karena penyesuaian proyeksi Pendapatan Negara.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	31.159.010.681.964	22.073.087.555.530
Dana Bagi Hasil PBB	13.124.728.145.581	17.085.663.586.461
Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	10.034.450.778.887	15.219.315.833.056
Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi	10.637.937.161.265	16.739.397.376.741
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	22.795.930.108.197	25.884.279.134.431
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi	1.333.181.001.349	1.372.588.054.173
Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan	1.296.813.708.379	2.119.085.885.757
Dana Bagi Hasil Perikanan	400.290.981.679	350.202.062.612
Dana Bagi Hasil Cukai	3.124.018.679.699	3.136.352.925.658
Jumlah	**93.906.361.247.000**	**103.979.972.414.419**

Pada tahun 2020 terdapat realisasi penyaluran DBH Cukai regular sebesar Rp3.031.589.578.400 dan DBH Cukai kurang bayar sebesar Rp92.429.101.299,sedangkan realisasi penyaluran DBH Dana Reboisasi regular sebesar Rp403.442.596.500 dan kurang bayar sebesar Rp77.608.867.188

Hal tersebut dapat dilakukan terkait adanya kebijakan pada UU APBN Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran karena penggunaan untuk kedua jenis DBH tersebut bersifat *earmarked*. Dikarenakan sifatnya yang *earmarked*, maka daerah telah menyusun rencana penggunaan sejak awal tahun dan ditargetkan penyerapan seoptimal mungkin, sehingga atas alokasi Triwulan IV Tahun 2019 untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3B, 3C, dan 3D.

B.2.2.2.1.1.1.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Rp381,61 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 sebesar Rp381.612.451.495.551 atau 99,28 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp384.381.524.227.000. Realisasi DAU TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp420.910.238.556.000.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pagu DAU karena penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto dalam APBN TA 2020 dan belum terserapnya DAU Tambahan dengan maksimal karena Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sesuai PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020.

Capaian realisasi DAU sebesar 99,28 persen terhadap pagu anggaran dipengaruhi oleh antara lain:

1. Relaksasi penyaluran DAU bulan Februari sampai dengan Agustus 2020 terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran serta DAU bulan September dan Oktober 2020 terhadap seluruh daerah;
2. Terdapat 11 daerah tidak disalurkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan 29 daerah tidak disalurkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II karena daerah dimaksud tidak menyampaikan syarat penyaluran hingga batas waktu yang ditetapkan terlampaui dan daerah yang tidak memenuhi ketentuan syarat penyaluran; dan
3. Tidak dilakukan penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Penggajian PPPK karena regulasi yang mengatur penetapan besaran gaji dan tunjangan PPPK ditetapkan pada akhir September 2020.

Realisasi DAU hingga 31 Desember 2020 merupakan realisasi DAU neto setelah dikurangi dengan pemotongan atas lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I TA 2020 sebesar Rp23.934.000. Pemotongan atas lebih salur tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2020 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Bulan November Tahun 2020 atas Lebih Salur Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kota Depok.

Realisasi DAU hingga 31 Desember 2020 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah keseluruhan potongan sebesar Rp30.661.793.793 untuk 7 (tujuh) pemerintah daerah. Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut merupakan:

1. Penyelesaian kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari Daerah Induk (Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Waropen) kepada Daerah Otonom Baru (Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Mamberamo Raya) sebesar Rp25.000.000.000; dan
2. Potongan atas lebih salur DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan TA 2019 untuk sebesar Rp5.661.793.793.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Labuhanbatu dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Labuhanbatu kepada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan pada penyaluran DAU Januari sampai dengan DAU Agustus sebesar Rp16.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Waropen berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2019 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Waropen dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Waropen kepada Kabupaten Mamberamo Raya Tahap II;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2020 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Waropen dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Waropen kepada Kabupaten Mamberamo Raya Tahap III.

Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Waropen telah dilakukan pada penyaluran DAU Januari, DAU September, DAU Oktober, DAU November, dan DAU Desember dengan total sebesar Rp9.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per 31 Desember 2020 dilakukan terhadap 5 (lima) pemerintah daerah berikut ini.

1. Kabupaten Wakatobi sebesar Rp185.069.000;
2. Kabupaten Biak Numfor tahap I TA 2020 sebesar Rp1.464.000.000; dan tahap II TA 2020 sebesar Rp756.828.000.
3. Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp370.138.000;
4. Kabupaten Lahat sebesar Rp370.138.000;
5. Kabupaten Timor Tengah Utara tahap I TA 2020 sebesar Rp2.013.000.000 tahap II TA 2020 sebesar Rp502.620.793.

Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tersebut merupakan pemotongan yang dilakukan karena terdapat lebih salur dalam perhitungan jumlah kelurahan. Pemotongan atas penyaluran dana tersebut telah dilakukan pada penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk periode yang berakhir hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp5.661.793.793

Pagu DAU pada TA 2020 sebesar Rp384.381.524.227.000 terdiri atas DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp377.763.917.428.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp2.495.476.864.000, dan DAU Tambahan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.122.129.935.000
Realisasi DAU hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 atau 99,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp384.381.524.227.000. Besaran realisasi DAU tersebut merupakan penjumlahan realisasi DAU berdasarkan formula sebesar Rp377.763.893.494.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.773.037.924.551 dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) sebesar Rp1.075.520.077.000.
Rincian pagu dan realisasi DAU TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Pagu Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020 *(Audited)*
Dana Alokasi Umum Formula	377.763.917.428.000	377.763.893.494.000
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000.000	2.773.037.924.551
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	2.495.476.864.000	-
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap	1.122.129.935.000	1.075.520.077.000
Jumlah	**384.381.524.227.000**	**381.612.451.495.551**

Rincian realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada Lampiran 3E.

B.2.2.2.1.1.1.2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus Rp176,57 triliun

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2020 sebesar Rp176.578.831.927.772, yang berarti 96,72 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp182.558.695.000.000. Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.815.840.968.423 atau 5,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp186.394.672.896.195.

Dana Transfer Khusus terdiri dari (i) Dana Alokasi Khusus Fisik dan (ii) Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Rincian realisasi Dana Transfer Khusus disajikan pada Lampiran 3E

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik Rp50,17 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 sebesar Rp50.175.976.373.103 atau 93,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp53.787.350.000.000. Realisasi DAK Fisik TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270.

Penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 terjadi karena adanya penurunan pagu DAK Fisik dalam APBN 2020 (Perpres Nomor 72 Tahun 2020).

Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
DAK Fisik Reguler	31.997.876.086.436	40.696.801.540.539
DAK Fisik Penugasan	12.827.647.955.056	17.214.456.675.966
DAK Fisik Affirmasi	5.358.927.071.130	6.272.670.983.837
Jumlah DAK Fisik Bruto	50.184.451.112.622	64.183.929.200.342
Pengembalian DAK Fisik	8.474.739.519	18.274.657.072
Jumlah DAK Fisik	**50.175.976.373.103**	**64.165.654.543.270**

Untuk mendukung Program PEN, Cadangan DAK Fisik termasuk dalam program PEN yang meliputi DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi yang tersebar dalam Bidang Air Minum, Industri Kecil dan Menengah, Irigasi, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perumahan dan Pemukiman, Sanitasi, dan Transportasi Perdesaan. Realisasi Cadangan DAK Fisik untuk program PEN adalalah sebesar Rp7.285.623.090.246 atau 83,59 persen dari alokasi sebesar Rp8.715.745.783.00, yang terdiri dari Reguler sebesar Rp2.529.490.258.283, Afirmasi sebesar Rp3.415.465.207.181 dan Penugasan sebesar Rp1.340.667.624.782.

Pemerintah juga mengambil kebijakan relaksasi percepatan penyaluran dan penggunaan DAK Fisik sebagai berikut: (1) Penyaluran yang semula dilakukan bertahap, menjadi dilakukan secara sekaligus sesuai/sebesar *batch* nilai daftar kontrak kegiatan yang disampaikan Pemerintah Daerah; (2) Batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran selain cadangan DAK Fisik kepada KPPN semula 21 Juli 2020 diperpanjang menjadi 31 Agustus 2020, (3) Batas akhir penyampaian kontrak Cadangan DAK Fisik semula 31 Agustus 2020 diperpanjang menjadi 30 September 2020; dan (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output tidak menjadi syarat penyaluran pada tahun berjalan, namun tetap diminta untuk menyampaikan paling lambat 15 Desember 2020 dan laporan tersebut dapat diperbaharui sebagai syarat penyaluran DAK Fisik TA berikutnya.

Total nilai penyaluran Transfer DAK Fisik Cadangan sebesar Rp42.890.353.282.857 atau 95,16% dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik non Cadangan adalah DAK Fisik Reguler Bidang

Pendidikan sebesar 31,21% dari total pagu 27 Bidang, namun persentase realisasi terbesar per bidang yaitu pada DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Laut sebesar 100%.

Adapun total nilai penyaluran transfer DAK Fisik non Cadangan sebesar Rp7.285.623.090.246,- atau 85,16% dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik non Cadangan adalah DAK Fisik Reguler Bidang Jalan sebesar 17,43% dari total pagu 16 Bidang, namun untuk persentase realisasi terbesar sampai dengan TA 2020 pada DAK Fisik Afirmasi Bidang Perumahan dan Pemukiman sebesar 97,79%.

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik Rp126,40 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2020 sebesar Rp126.402.855.554.669 atau 98,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp128.771.345.000.000. Realisasi DAK Non Fisik TA 2020 mengalami kenaikan Rp4.173.837.201.744 atau 3,41 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp122.229.018.352.925.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.859.259.952.000	52.001.837.749.380
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.318.819.302.000	1.977.231.267.885
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.164.000	463.968.756.915
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293	49.200.273.626.885
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	13.823.392.139.376	10.129.087.154.156
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.881.382.284.000	1.923.557.400.000
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	191.909.875.000	199.819.750.000
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	961.258.000.000	907.500.000.000
Dana Pelayanan Kepariwisataan	141.098.945.000	210.693.561.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.998.367.300.000	3.825.313.850.204
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.174.932.300.000	1.262.258.736.500
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	135.432.000.000	127.476.500.000
Jumlah	**126.402.855.554.669**	**122.229.018.352.925**

Kenaikan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik terutama disebabkan karena kepatuhan Pemda dalam penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran melalui aplikasi pelaporan DAK NonFisik, serta adanya relaksasi persyaratan penyaluran yang tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana periode sebelumnya; dan tidak memperhitungkan sisa DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2019 pada RKUD.

Realisasi DAK NonFisik yang mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2020 yaitu Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Pelayanan Adminduk, Bantuan Operasional Pendidikan PAUD, BOP Museum dan Taman Budaya serta Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Untuk mendukung Program PEN dialokasikan Dana BOK Tambahan sebesar Rp4.173.330.000.000, dan direalisasikan sebesar Rp4.173.318.578.376 atau 99,99 persen dari pagu yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan daerah.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah Rp18,45 triliun

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 sebesar Rp18.455.285.206.000 atau 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp18.500.000.000.000. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.760.837.717.000 atau 90,37 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp9.694.447.489.000.

Peningkatan realisasi DID antara lain disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19. Selain itu, DID TA 2020 untuk kategori lainnya juga dilakukan relaksasi syarat salur dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada realisasi DID Tahun 2020 terdapat alokasi DID Tambahan sebesar Rp5.000.000.000.000 dalam rangka mendukung Program PEN yang diperuntukan untuk 315 Pemerintah Daerah, dan terealisasi sebesar Rp4.955.285.206.000 kepada 312 Pemerintah Daerah atau sebesar 99,11 persen karena terdapat 5 (lima) Pemerintah Daerah yang tidak dapat merealisasikan DID Tambahan Periode Ketiga.

Rincian realisasi Dana Insentif Daerah disajikan pada Lampiran 3F.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan DIY Rp1,32 triliun

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2020 sebesar Rp1.320.000.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.320.000.000.000. Sesuai dengan PMK Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, penyaluran dilakukan dalam tiga tahap sebesar 25%, 55%, dan 20% dari pagu alokasi.
Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000.000 atau 10 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.200.000.000.000.
Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp19,55 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 sebesar Rp19.556.727.696.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp19.556.727.696.000. Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.423.215.612.000 atau 6,78 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000.
Penurunan Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 terutama disebabkan oleh penurunan pagu dana otonomi khusus dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.288.694.844.000	5.850.230.158.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.711.275.076.000	2.824.446.537.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.583.504.000	2.507.241.496.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.734.895.924.000	1.440.553.463.000
Jumlah	**19.556.727.696.000**	**20.979.943.308.000**

B.2.2.2.2. Dana Desa

Dana Desa Rp71,10 triliun

Realisasi Dana Desa TA 2020 sebesar Rp71.100.518.583.856 yang berarti 99,87 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp71.190.000.000.000. Realisasi Dana Desa TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.286.370.104.857 atau 1,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp69.814.148.478.999. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kenaikan realisasi Dana Desa TA 2020 disebabkan karena kebijakan penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa, yaitu dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD pada waktu bersamaan, sehingga Dana Desa lebih cepat diterima desa dan realisasi lebih tinggi.

Penyaluran Dana Desa tahun 2020 juga di dalamnya termasuk untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagai bagian dari Program PEN dengan realisasi sebesar Rp23.737.018.473.021 untuk 8 juta KPM dengan proporsi 88 persen petani dan buruh tani, 5 persen pedagang dan UMKM, 4 persen nelayan dan buruh nelayan, 2 persen buruh, dan 1 persen guru.

Pada Tahun 2020 Dana Desa tidak disalurkan kepada 56 desa di Konawe dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan tidak melakukan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2020 untuk 56 Desa di Kabupaten Konawe yang status pembentukannya bermasalah, sampai dengan adanya kejelasan status baik secara substansi maupun hukum.
2. Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran secara sistem pada aplikasi OMSPAN sehingga 56 desa tersebut tidak dapat diusulkan penyalurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keterlanjuran penyaluran sampai dengan adanya kejelasan status baik secara substansi maupun hukum.
3. Dalam perkembangannya 56 Desa tersebut berubah menjadi 52 Desa dikarenakan adanya satu desa yang dihapuskan dan penggabungan tiga desa ke desa lainnya. Pada akhir tahun 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan Kepmendagri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020. Kepmendagri dimaksud pada prinsipnya memuat penegasan status hukum seluruh desa di Indonesia termasuk didalamnya desa-desa di Kabupaten Konawe. Meskipun Kepmendagri dimaksud ditetapkan pada bulan Desember 2020, namun Dana Desa TA 2020 kepada 52 desa tersebut tidak disalurkan karena adanya keterlambatan penyampaian dokumen Kepmendagri kepada Kementerian Keuangan setelah batas akhir penyaluran Dana Desa telah terlampaui.

Rincian realisasi Dana Desa disajikan pada Lampiran 3F.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp947,69 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas, Defisit Anggaran TA 2020 mencapai Rp947.697.754.987.089, yang berarti 91,19 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.039.217.391.725.000, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Negara dan Hibah	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit) Anggaran	**(947.697.754.987.089)**	**(348.653.725.921.394)**

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp1.191,47 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2020 sebesar Rp1.193.293.831.252.057, yang berarti 114,83 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp1.039.217.391.725.000. Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp791.242.321.066.806 atau 196,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp402.051.510.185.251.

Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Rincian realisasi Pembiayaan TA 2020 berdasarkan rincian format dan struktur UU APBN 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembiayaan Utang	**1.220.461.601.247.000**	**1.229.628.463.063.775**	**100,75%**
1 Surat Berharga Negara (Neto)	1.173.738.188.593.000	1.177.152.327.902.793	100,29%
2 Pinjaman (Neto)	46.723.412.654.000	52.476.135.160.982	112,31%
2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.296.006.236.000	2.363.120.617.772	182,34%
2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)	45.427.406.418.000	50.113.014.543.210	110,31%
2.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	144.985.176.587.000	141.112.305.195.604	97,33%
2.2.1.1 Pinjaman Tunai	115.441.236.750.000	102.259.679.376.875	88,58%
2.2.1.2 Pinjaman Kegiatan	29.543.939.837.000	38.852.625.818.729	131,5%
2.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(99.557.770.169.000)	(90.999.290.652.394)	91,40%
Pembiayaan Investasi	**(257.103.839.778.000)**	**(104.698.164.882.768)**	**40,72%**
1 Investasi Kepada BUMN	(31.480.801.073.000)	(31.288.017.000.000)	99,39%
2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(5.000.000.000.000)	(25.000.000.000.000)	500,00%
3 Investasi kepada BLU	(42.014.582.699.000)	(31.306.582.699.000)	74,51%
4 Investasi kepada Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(702.352.406.000)	(660.695.141.097)	94,07%
5 Penerimaan kembali investasi	2.014.582.699.000	21.969.757.524.564	1090,54%
6 Investasi Pemerintah (tambahan modal kerja)	(19.650.000.000.000)	(38.412.627.567.235)	195,48%
7 Pembiayaan Investasi Lainnya	(160.270.686.299.000)		
Pemberian Pinjaman	**5.810.213.256.000**	**1.014.591.361.639**	**17,45%**
1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/ Badan Lainnya	(4.695.837.625.000)	(3.631.888.376.473)	77,34%
2 Pengembalian Penerusan Pinjaman	10.506.050.881.000	4.646.479.738.112	44,23%
Kewajiban Penjaminan	**(590.583.000.000)**	**(3.590.583.000.000)**	**607,97%**
Penjaminan Pemerintah	(590.583.000.000)	(3.590.583.000.000)	607,97%
Pembiayaan Lainnya	**70.640.000.000.000**	**70.939.524.709.410**	**100,42%**
Saldo Anggaran Lebih	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000	100,00%
Hasil Pengelolaan Aset		299.524.709.410	
Jumlah	**1.039.217.391.725.000**	**1.193.293.831.252.057**	**114,83%**

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Dalam Negeri Rp1.146,81 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp1.146.812.705.085.320 yang berarti 114,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp998.485.822.932.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (1) Rekening Pemerintah, (2) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (3) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (4) Surat Berharga Negara (Neto), (5) Pinjaman Dalam Negeri, (6) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (7) Kewajiban Penjaminan, (8) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (9) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah Rp70,64 triliun

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Pembiayaan dari Rekening Pemerintah sebesar Rp 70.640.000.000.000 atau 100 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2020 sebesar Rp70.640.000.000.000.

Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2020.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp4,64 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2020 sebesar Rp4.646.479.738.112, yang berarti 44,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp10.506.050.881.000. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam negeri sebesar Rp316.513.485.875, dan penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman luar negeri sebesar Rp4.329.966.252.237. Pada tahun 2020 tidak terdapat Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah dikarenakan piutangnya telah selesai/lunas di tahun 2019.

Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Pemda	2.549.970.776	1.488.943.865
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	163.608.868	163.606.368
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	306.228.770.204	325.380.560.953
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	7.571.136.027	9.008.197.429
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	67.885.383.832	68.285.709.980
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	4.241.264.585.775	3.230.558.129.893
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN kepada Non Pemerintah	20.816.282.630	27.977.334.187
Penerimaan Cicilan PokokPembiayaan Kredit Investasi Pemerintah		775.311.999.999
Jumlah	**4.646.479.738.112**	**4.438.174.482.674**

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp299,52 miliar

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2020 sebesar Rp299.524.709.410. Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero).

Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	259.445.722.509	169.188.403.022
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	40.078.986.901	10.793.752.140
Jumlah	**299.524.709.410**	**179.982.155.162**

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (Neto) Rp1.177,15 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2020 sebesar Rp1.177.152.327.902.793 atau 100,29 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.173.738.188.593.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	44.700.000.000.000	89.340.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN Non *Public Goods*	12.710.000.000.000	
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	418.307.456.000.000	443.560.323.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	8.651.350.806.018	8.348.270.101.000
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN *Public Goods*	397.560.000.000.000	
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN *Non Public Goods*	164.320.000.000.000	
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	287.334.266.738.000	162.963.065.547.400
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	4.203.740.452.656	2.899.618.230.714
Penerbitan/Penjualan SPNS	26.150.000.000.000	37.360.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN	18.162.770.262.000	28.434.745.452.600
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	123.490.220.000.000	119.059.172.200.000
Penerbitan SBSN Jangka Panjang-Valas	35.662.500.000.000	29.517.600.000.000
Total Penerimaan	**1.541.252.304.258.674**	**921.482.794.531.714**
Pengeluaran		

Pelunasan SPN	(73.580.000.000.000)	(109.440.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(92.201.031.130.207)	(152.631.506.730.386)
Pembelian Kembali Obligasi DN		(6.870.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(8.114.851.323.018)	(8.033.396.484.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(105.818.864.000.000)	(92.013.671.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN-Jk Panjang	(4.279.978.152.656)	(2.691.011.895.714)
Pelunasan SPN syariah	(33.310.000.000.000)	(41.050.000.000.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	(46.795.251.750.000)	(40.999.607.300.000)
Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas (Jangka Panjang)		(21.465.000.000.000)
Total Pengeluaran	**(364.099.976.355.881)**	**(475.194.193.410.100)**
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	**1.177.152.327.902.793**	**446.288.601.121.614**

Realisasi SBN Neto TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp730.863.726.781.179 atau 163,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp446.288.601.121.614. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan strategi pengelolaan utang Pemerintah. Realisasi penerbitan SBN melalui lelang oleh BI sesuai SKB I dan pembiayaan *Public Goods* sesuai SKB II akan dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, termasuk untuk pengadaan vaksin. Realisasi Penerimaan SBN di dalamnya termasuk penerimaan atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk rupiah sebesar Rp8.651.350.806.018 dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang dalam bentuk rupiah sebesar Rp4.203.740.452.656 dengan total realisasi sebesar Rp12.855.091.258.674,00.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran pembayaran kupon (bunga atau imbalan). Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran kupon.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri Rp2,36 triliun

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp2.363.120.617.772 yang berarti 182,34 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp1.296.006.236.000. Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 turun sebesar Rp669.849.516.327 atau 22,09 persen dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 sebesar Rp3.032.970.134.099. Tingginya realisasi pinjaman dalam negeri mencerminkan adanya percepatan penarikan pinjaman sehingga realisasi pada Tahun 2020 melebihi jumlah yang dianggarkan.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	3.767.381.621.350	4.242.231.101.525
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.404.261.003.578)	(1.209.260.967.426)
Jumlah	**2.363.120.617.772**	**3.032.970.134.099**

Pada tahun 2020 penarikan pinjaman berasal dari Bank BUMN dan tidak terdapat penarikan pinjaman dari Perusahaan Daerah.

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp94,70 triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2020 sebesar minus Rp94.698.164.882.767, yang berarti 39,61 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp239.103.839.778.000. Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp50.309.184.494.017 atau 113,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar minus Rp44.388.980.388.750. Peningkatan signifikan tersebut antara lain untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan *leverage* BUMN sebagai agen pembangunan.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan PMN TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(12.218.017.000.000)	(17.800.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(660.695.141.097)	(2.275.076.593.824)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(12.014.582.699.000)	(8.200.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara/investasi Lainnya	(13.000.000.000.000)	(3.490.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		(12.000.000.000.000)
Investasi Pemerintah		(2.000.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(19.070.000.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(19.650.000.000.000)	
Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(20.000.000.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(1.292.000.000.000)	
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	(18.762.627.567.235)	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.014.582.699.001	1.376.096.205.074
Penerimaan Kembali Investasi LMAN untuk pengesahan Belanja Modal Pengadaan Tanah PSN	19.955.174.825.564	
Jumlah	**(94.698.164.882.767)**	**(44.388.980.388.750)**

Realisasi PMN kepada BUMN sebesar Rp12.218.017.000.000 merupakan realisasi atas PMN tunai dan nontunai yang terdiri dari:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendukung pendanaan ekuitas guna melanjutkan Penugasan Pemerintah dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp5.000.000.000.000 untuk mendukung pendanaan guna melanjutkan Penugasan Pemerintah dalam menjamin kesinambungan pembangunan instalasi ketenagalistrikan dan pemerataan akses terhadap tenaga listrik.
3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp268.017.000.000 merupakan utang pokok yang dikonversi menjadi PMN.
4. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk meningkatkan kapasitas permodalan guna mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi.
5. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1.750.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan
6. PT Geo Dipa Energi (Persero) sebesar Rp700.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp12.014.582.699.000 untuk BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebesar Rp2.014.582.699.000, BLU BLU PIP sebesar Rp1.000.000.000.000 (alokasi untuk program pembiayaan ultra mikro (UMi)), dan BLU PPDPP sebesar Rp9.000.000.000.000 untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyertaan Modal Negara/investasi lainnya sebesar Rp13.000.000.0000.000 terdiri dari investasi untuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000.000.000.000, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp3.000.000.000.000, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp1.000.000.000.000, dan untuk PMN kepada LPEI sebesar Rp5.000.000.000.000 untuk meningkatkan kapasitas usaha dan untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah kepada LPEI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.06/2020, terdapat 3 (tiga) Dana Abadi yang dititipkan pada rekening BLU LPDP yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Pada tahun anggaran 2019, terdapat pencairan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000, sehingga per 31 Desember 2020 saldo Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh LPDP adalah sebesar Rp8.990.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada poin D.2.1.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Perlakuan atas saldo dana abadi penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan yang masih berada di rekening BLU LPDP diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh LPDP akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, yang saat ini proses penetapannya dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Usulan berupa program dari Kementerian Teknis terkait penggunaan masing-masing Dana Abadi yang dititipkan kepada LPDP masih terus dilakukan pembahasan dan pematangan, baik dari segi program maupun skema penyaluran dan pertanggungjawaban.

Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka program PEN sebesar Rp19.070.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp6.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah guna mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo.
3. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha melalui pelaksanaan pembiayaan berbasis kelompok kepada perempuan pra sejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
4. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) sebesar Rp500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

5. PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional.
6. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebesar Rp1.570.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PII dalam program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha.

Realisasi investasi pemerintah dalam rangka program PEN bagi BUMN sebagai tambahan modal kerja sebesar Rp19.650.000.000.000 terdiri dari:

1. PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp8.500.000.000.000 untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
3. Perum Perumnas Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia.
4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp4.000.000.000.000 untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan, serta untuk revitalisasi *on farm* dan *off farm* pabrik gula nasional.
5. PT Krakatau Steel (Persero) Rp3.000.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Program PEN sebesar Rp20.000.000.000.000 terdiri dari penyertaan modal negara kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 sebagai modal awal untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Lembaga Pembiayaan Investasi, dan sebesar Rp5.000.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka program PEN sebesar Rp1.292.000.000.000 adalah berupa investasi pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditujukan untuk penyaluran dana bergulir pada Koperasi yang usaha anggotanya terdampak oleh Pandemi Covid-19, dan mendukung relaksasi oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir atas pinjaman koperasi tersebut.

Realisasi program PEN untuk pinjaman daerah sebesar Rp18.762.627.567.235 disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp2.014.582.699.001 berasal dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Penerimaan Kembali Investasi yang berasal dari BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pengesahan Belanja Modal Pengadaan Tanah PSN sebesar Rp19.955.174.825.564.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan minus Rp3,59 triliun

Pada TA 2020 realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp3.590.583.000.000, yang berarti 607,97 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp590.583.000.000.

Kewajiban penjaminan digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program PEN. Namun demikian, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar *(default)* dari pihak terjamin dalam mendukung kedua program penugasan infrastruktur tersebut, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Realisasi Kewajiban penjaminan TA 2020 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp590.583.000.000 dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp3.000.000.000.000.

Realisasi Dana Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp3.000.000.000.000 tersebut merupakan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program PEN, yang terdiri dari penjaminan *loss limit* UMKM sebesar Rp1.000.000.000.000 dan penjaminan *backstop loss limit* korporasi sebesar Rp2.000.000.000.000. Sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.08/2020, Penjaminan Program PEN ini merupakan penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Realisasi kewajiban penjaminan dalam rangka pembangunan infrastruktur sebesar Rp590.583.000.000 terdiri dari Rp421.066.000.000 penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dan sebesar Rp169.517.000.000 dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah mengalokasikan dana Kewajiban Penjaminan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terakhir diubah postur dan rinciannya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang kemudian rinciannya ditetapkan dalam KMK Nomor 525/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua Atas KMK nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03), sebesar Rp3.590.583.000.000.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional minus Rp10,00 triliun

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10.000.000.000.000, sedangkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp18.000.000.000.000 atau 55,56 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional disalurkan melalui oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai

bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Kebijakan pada Tahun 2020 antara lain: (1) memperkuat program beasiswa melalui sistem pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik untuk pengembangan pendidikan yang bersifat *degree* maupun *non degree,* peningkatan kapasitas profesional (*professional development program*), pengelolaan para alumni (*returnee management*), serta optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang; (2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3) meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pembiayaan Lain-lain Rp0

B.2.4.1.9. Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain pada tahun 2020.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan LN (Neto) Rp46,48 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2020 sebesar Rp46.481.126.166.737 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp40.731.568.793.000 atau 114,12 persen, hal ini terutama disebabkan adanya pelebaran defisit pada tahun 2020, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan membiayai kegiatan/proyek pembangunan, serta dalam rangka pengelolaan portofolio utang.

Pembiayaan luar negeri neto berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp139.294.051.300.287 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp94.631.179.028.867. Penerimaan pembiayaan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman tunai sebesar Rp102.259.679.376.875 dan pinjaman kegiatan sebesar Rp38.852.625.818.729. Pengeluaran pembiayaan berupa pemberian pinjaman sebesar Rp3.631.888.376.473 dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp90.999.290.652.394.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman LN Rp141,11 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2020 sebesar Rp141.112.305.195.604 yang berarti 97,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp144.985.176.587.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program/tunai dan (ii) penarikan pinjaman proyek/kegiatan. Penarikan Pinjaman Program/Tunai sebesar Rp102.259.679.376.875 sedangkan Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan sebesar Rp38.852.625.818.729.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program/Tunai

Penarikan Pinjaman Program Rp102,25 triliun

Realisasi Pinjaman Program TA 2020 sebesar Rp102.259.679.376.875. Realisasi tersebut berarti 88,58 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp115.441.236.750.000. Realisasi Pinjaman Program TA 2020 mengalami kenaikan Rp65.542.049.092.827 atau 178,50 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.492.371.462.406. Hal ini disebabkan oleh adanya realisasi yang ditujukan untuk pembiayaan dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp76.585.407.776.875.

Pinjaman tunai merupakan pinjaman yang ditujukan untuk membiayai general financing (pembiayaan umum) dan tidak dispesifikkan untuk membiayai suatu kegiatan seperti pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai diterima di

Rekening Kas Umum Negara dan digunakan untuk membiayai APBN secara umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, *stand by loan*, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance*/ODA (bilateral),Concessional multilateral), *Non Official Development Assistance*/Non-ODA (bilateral), *Non Concessional* (multilateral), komersial dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral). Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator capaian berupa target yang harus dicapai dan telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Kenaikan pinjaman tunai pada tahun 2020 antara lain disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp76.585.407.776.875 dan berasal dari beberapa lembaga yaitu Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Japan International Cooperation Agency, International Bank for Reconstruction and Development), KfW Development Bank, dan Australia.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan

Penarikan Pinjaman Proyek Rp38,85 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2020 sebesar Rp38.852.625.818.729, yang berarti 131,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp29.543.939.837.000. Realisasi Pinjaman Proyek TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.360.254.356.323 atau 3,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.492.371.462.406. Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan melebihi jumlah yang dianggarkan karena adanya percepatan penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan pada Tahun 2020, terutama untuk kegiatan pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan, dan beberapa kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian RI.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman (Neto) minus Rp3,63 triliun

Realisasi Pengeluaran Penerusan Pinjaman (Neto) TA 2020 sebesar minus Rp3.631.888.376.473, yang berarti 77,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp4.695.837.625.000. Rincian Penerusan Pinjaman (Neto) sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(239.447.430.651)	(1.971.239.845.494)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(3.392.440.945.822)	(3.745.241.256.886)
Penerusan Pinjaman	**(3.631.888.376.473)**	**(5.716.481.102.380)**

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.731.792.414.843 atau turun 87,85 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar minus Rp5.716.481.102.380. Realisasi Penerusan Pinjaman

Luar Negeri kepada Daerah sebesar Rp239.447.430.651 seluruhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN sebesar Rp3.392.440.945.822 kepada 3 (tiga) BUMN, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp2.079.052.795.862, PT Pertamina sebesar Rp85.642.149.960, dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1.227.746.000.000.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN minus Rp90,99 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2020. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2020 sebesar minus Rp90.999.290.652.394, yang berarti 91,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp99.557.770.169.000. Realisasi tersebut lebih kecil dari yang dianggarkan disebabkan oleh adanya penguatan kurs transaksi pembayaran.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai	(36.364.451.431.115)	(31.317.372.208.106)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(54.634.839.221.279)	(54.675.385.755.516)
Jumlah	**(90.999.290.652.394)**	**(85.992.757.963.622)**

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp245,70 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp947.697.754.987.089 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp1.193.293.831.252.057 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp245.596.076.264.968, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Negara dan Hibah	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit)	(947.697.754.987.089)	(348.653.725.921.394)
Pembiayaan Neto	1.193.293.831.252.057	402.051.510.185.251
SiLPA (SiKPA)	**245.596.076.264.968**	**53.397.784.263.857**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional**

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Melalui Sidang Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Dari sisi kebijakan stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan antara lain melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penetapan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement (Repo)* SBN milik LPS, serta perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS.

a. Pelaksanaan Amanat Pasal 2

Untuk melaksanakan amanat Pasal 2, Pemerintah melalukan penyesuaian APBN TA 2020 sehingga peran APBN dalam mengendalikan perekonomian dapat berjalan secara efektif sebagai instrument *countercyclical.*

1) Penyesuaian Batasan Defisit Anggaran

Pemerintah melakukan penyesuaian postur APBN 2020 dari defisit 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) dan disesuaikan kembali menjadi 6,34 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020, diundangkan 25 Juni 2020) yang antara lain untuk menampung berbagai tambahan belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Walaupun demikian, defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara prudent dan sustainable dengan melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara.

Realisasi defisit pada tahun 2020 adalah Rp947.697.754.987.089 triliun atau sebesar 6,14 % PDB (PDB Nominal Tahun 2020 adalah Rp15.434 Trilun)

Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter cyclical*, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2020

mengalami peningkatan sebesar 7,82 persen yaitu dari Rp2.540,42 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp2.739,17 triliun (Perpres 72/2020) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, berbagai program stimulus Pemerintah telah terealisasi dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan dinamika kebijakan tersebut, maka target pendapatan negara dan hibah dalam postur APBN tahun anggaran 2020 (Perpres 72/2020) lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 2019 sedangkan alokasi belanja negara lebih tinggi. Target Pendapatan Negara dan Hibah yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya target Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai konsekuensi menurunnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit yang makin melebar dan pembiayaan yang meningkat.

2) ***Mandatory Spending***

Sebagai dampak dari hal-hal tersebut, dan perubahan postur APBN, pemerintah juga melakukan Penyesuaian besaran *mandatory spending.* Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp508.843.834.877.000 dengan realisasi sebesar Rp473.658.845.623.143 atau 93,08 persen. Untuk Total Anggaran Kesehatan adalah sebesar Rp212.452.700.000.000, dan realisasi sebesar Rp172.254.667.576.844 atau 84,02 persen. Rincian Anggaran dan realisasi *mandatory spending* dapat dilihat pada Lampiran 2F.

3) **Pergeseran Anggaran**

Terkait dengan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah menetapkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 3 April 2020.
Mencermati perubahan situasi dan dampak pandemi Covid-19, pada tanggal 25 Juni 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Rincian Pergeseran anggaran sebagaimana di jelaskan dalam perubahan Postur APBN TA 2020.
Terdapat pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 melalui penerbitan SABA kepada Kementerian/Lembaga dan BA BUN dengan nilai Rp190.277.889.604.000.

4) **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih**

Pada pelaksanaan APBN Tahun 2020 salah satu sumber pendanaan adalah penggunaan SAL sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2020 yang mengalami tekanan sebagai dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

5) **Penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU**

Terdapat penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU LMAN sebesar Rp1.116.422.586.550 kepada 29 BLU rumpun kesehatan untuk penanganan Covid-19

6) Penggunaan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara.

Pada tahun 2020, dalam rangka melaksanakan pasal 2, Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara

7) Penerbitan SBN Khusus

Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN dengan tujuan tertentu untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban (burden sharing) antara Pemerintah dan BI. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pertama (SKB I) dengan Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2020, menyepakati bahwa BI dapat membeli SBN berjangka panjang pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). Penerbitan SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang, di mana Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Pemerintah dan BI melanjutkan sinerginya melalui SKB II pada bulan Juli 2020 untuk melaksanakan skema berbagi beban (burden sharing) dalam melaksanakan penanganan COVID-19 dan PEN. Dengan Skema burden sharing, disepakati bahwa BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods*, serta (b) belanja/pembiayaan *Non-Public Goods*. Skema *burden sharing* dilaksanakan dalam rangka menyediakan *fiscal space* dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan COVID-19 dan PEN. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun.

Pemerintah juga mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan anggaran dari dalam dan/ atau luar negeri seperti Pinjaman Tunai yang pada Tahun Anggaran 2020 realisasi total Pinjaman Tunai sebesar Rp102.259.679.376.875, dan didalamnya terdapat pinjaman tunai yang ditarik untuk menutup defisit APBN sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga untuk memperkuat pendanaan APBN TA 2020 dalam penanganan dan pengendalian dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp76.585.407.776.875.

8) Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi TKDD

Sebagai langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah, Pemerintah juga melakukan kebijakan refocusing dan realokasi TKDD yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Adanya realokasi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Di

samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan masing-masing sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen terhadap pagu dan Rp381,61 triliun atau 99,28 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan terkait DBH dan DAU dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah i) Alokasi DAU bersifat tidak final; ii) percepatan penyelesaian kurang bayar DBH s.d. TA 2019; dan iii) relaksasi penggunaan anggaran sebagian atau seluruh belanja infrastruktur minimal 25% dari DTU yang dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*).

9) Hibah kepada Pemda

Realisasi belanja hibah tahun 2020 mencapai Rp6,28 triliun atau 123,73 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan hibah pada Tahun 2020 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Selain itu, juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian hibah pariwisata ke pemerintah daerah dalam kerangka program PEN dengan realisasi mencapai Rp2.264.647.247.182 dalam rangka membantu Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan PAD serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.

b. Pelaksanaan Amanat Pasal 3

Untuk melaksanakan amanat dalam pasal 3 yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Bersama No. 199/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. SKB ini mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 di daerah, serta ikut menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Beberapa hal penting yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terutama untuk melakukan penyesuaian maupun rasionalisasi Belanja khususnya pada Belanja Barang/Jasa, Belanja terkait honorarium, dan Belanja Modal. Rasionalisasi ini kemudian digunakan untuk mendanai Belanja di bidang kesehatan terkait pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 seperti pengadaan alat perlindungan diri, sarana dan prasarana pencegahan maupun penanganan Pasien Covid-19. Selain itu juga untuk penyediaan jaring pengamanan social antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya Pandemi Covid-19, dan penanganan dampak ekonomi terutama agar dunia usaha di daerah tetap hidup antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan kegiatan perekonomian di daerah.

Secara nasional, pendapatan daerah turun 15,87% termasuk penurunan PAD yang cukup tajam 28,87% khususnya di Jawa-Bali yang tingkat pandemi Covid-19 tinggi. Belanja daerah turun 17,56%, dimana belanja barang/jasa dan modal masing-masing turun 34,82% dan 47,32% untuk direalokasi bagi penanganan Covid-19

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional yang telah diubah dengan PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 35/PMK.07/2020 dan PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 35/PMK.07/2020.

c. Pelaksanaan Pasal 4

Untuk pelaksanaan Pasal 4 mengenai kebijakan di bidang perpajakan yang meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
Terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 dengan rincian sebagai berikut:

- Pasal 8 huruf a terkait perpanjangan jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan;
- Pasal 8 huruf b terkait perpanjangan jatuh tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
- pasal 8 huruf c terkait perpanjangan jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, dan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19. Terhadap Skema ini Pemerintah memberikan fasilitas khusus alat kesehatan untuk COVID-19 dengan total realisasi sebesar Rp2,18 Triliun.

d. Pelaksanaan Pasal 5

Untuk pelaksanaan Pasal 5 Pemerintah telah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
Menteri Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 Ketentuan terkait pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek.
Ketentuan terkait pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 37/PJ/2020. Realisasi dari kebijakan ini dapat tercermin dari

- Laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa;
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek;
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.

e. Pelaksanaan Pasal 6

Terkait dengan perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Implementasi dari Peraturan ini adalah pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebanyak 65 Pemungut PPN PMSE (untuk periode bulan Juli 2020 sampai dengan April 2021, dan untuk periode bulan September 2020 sampai dengan April 2021, realisasi penerimaan PPN PMSE sebesar Rp1.844,61 miliar

Terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, untuk tahun 2020 belum diimplementasikan. Untuk Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

f. Pelaksanaan Pasal 7

Pada pasal 7 di atur bahwa Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal juga menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dikenai sanksi administratif juga dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran. Pemutusan akses ini dilakukan dalam sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran telah terlewati. Untuk itu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian teguran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Pelaksanaan Pasal 8

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

   Terhadap hal ini, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19, maka atas pengajuan keberatan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pengajuan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengajuan keberatannya paling lama menjadi 9 (sembilan) bulan (3 bulan + 6 bulan) sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.

2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

   Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB Pasal 17 ayat (1)/17 ayat (2)/17B, atau sejak diterbitkannya SKPPKP Pasal 17C/17D, atau sejak diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SP Pasal 36 ayat (1), atau sejak diterimanya Putusan Banding atau PK, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka atas proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) bulan, sehingga jangka waktu penyelesaiannya paling lama menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan).

3) Atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
   a) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
   b) pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
   c) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Petunjuk teknis yang telah diterbitkan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-22/PJ/2020 dan SE-32/PJ/2020. Mengacu pada Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain Pasal 17C/17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat ketetapan pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penerbitan ketetapan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian ketetapannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat keputusan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima.

Selanjutnya terkait, Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi, maka pemberian keputusan atas permohonan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 12 (dua belas) bulan (6 bulan + 6 bulan) sejak tanggal permohonan diterima.

Terkait penetapan status keadaan kahar, pemerintah merujuk Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020, status keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada Keputusan Presiden.

h. Pelaksanaan Pasal 9 dan Pasal 10

Terkait dengan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19 (sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.04/2020).

Untuk itu Pemerintah memberikan insentif fiskal terkait kepabeanan dan cukai. Total realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Desember 2020 sekurang-kurangnya senilai Rp2,89 triliun (76,8% dari pagu anggaran Rp3,76 triliun). Skema PMK 34/PMK.04/2021 merupakan pemberian fasilitas khusus alkes untuk Covid-19 sebesar Rp2,18 Triliun. Skema PMK 171 merupakan fasilitas untuk Pempus, Pemda atau BLU sebesar Rp564 Miliar. Skema PMK 70 merupakan fasilitas untuk Yayasan/Lembaga non profit sebesar Rp148 Miliar.

Realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang tersebut bersumber dari dokumen pemberitahuan pabean yang diajukan secara *self assesment*, dan selanjutnya akan dilakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sementara, terdapat potensi lebih saji berdasarkan penetapan klasifikasi HS dan Nilai Pabean oleh pejabat bea cukai sekurang-kurangnya senilai Rp5.087.358.450.

Selain itu, juga ditetapkan PMK 30/2020 yang memberikan insentif cukai yang berlaku untuk pemesanan tanggal 9 April sampai dengan 9 Juli 2020 yakni perpanjangan waktu penundaan cukai dari 60 hari menjadi 90 hari serta pemberian ijin produksi di tempat lain.

Guna mendorong industri, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Atas BM-DTP tersebut terealisasi Rp91.418.621.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp583.287.000.000,00.

i. Pelaksanaan Pasal 11

Pelaksanaan dari pasal 11, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

j. Pelaksanaan Pasal 12

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Untuk itu Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2020. Terkait dengan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah juga telah menetapkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 3 April 2020.

Mencermati perubahan situasi dan dampak pandemi Covid-19, pada tanggal 25 Juni 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penerbitan Perpes 72 Tahun 2020 adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid- 19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Anggaran pada Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 .

Mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I hanya tumbuh 2,97 persen yang menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap perekonomian berpotensi menjadi lebih dalam dari perkiraan semula. Selain itu, implementasi kebijakan PSBB pada pertengahan bulan April s.d. akhir bulan Mei 2020 juga berakibat pada pembatasan aktivitas perekonomian yang berakibat pada kontraksi yang semakin dalam pada periode ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan negara dapat menjadi lebih rendah dari perkiraan semula. Di sisi lain, Pemerintah perlu mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk menambah stimulus perekonomian. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020 pada tanggal 24 Juni 2020. Pemerintah telah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan perubahan APBN tahun 2020 tersebut.

Perubahan postur APBN 2020 tersebut dapat dilihat sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	UU APBN 2020	Perpres No. 54/2020	Perpres No. 72/2020
Pendapatan Negara	2.233.196.701.660.000	1.760.883.901.130.000	1.699.948.459.678.000
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.232.697.961.660.000	1.760.385.161.130.000	1.698.648.459.678.000
1. Penerimaan Perpajakan	1.865.702.816.382.000	1.462.629.688.832.000	1.404.507.505.772.000
2. Penerimaan PNBP	366.995.145.278.000	297.755.472.298.000	294.140.953.906.000

II. Penerimaan Hibah	498.740.000.000	498.740.000.000	1.300.000.000.000
Belanja Negara	2.540.422.500.559.000	2.613.819.877.869.000	2.739.165.851.403.000
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683.477.179.135.000	1.851.101.008.789.000	1.975.240.206.353.000
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856.945.321.424.000	762.718.869.080.000	763.925.645.050.000
Keseimbangan Primer	(12.012.458.899.000)	(517.779.676.739.000)	(700.433.083.725.000)
Surplus/(Defisit) Anggaran	(307.225.798.899.000)	(852.935.976.739.000)	(1.039.217.391.725.000)
Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%)	(1,76)	(5,07)	(6,34)
Pembiayaan Anggaran	307.225.798.899.000	852.935.976.739.000	1.039.217.391.725.000
I. Pembiayaan Utang	351.853.256.250.000	1.006.400.481.800.000	1.220.461.601.247.000
II. Pembiayaan Investasi	(74.229.874.207.000)	(229.324.135.317.000)	(257.103.839.778.000)
III. Pemberian Pinjaman	5.192.999.856.000	5.810.213.256.000	5.810.213.256.000
IV. Kewajiban Penjaminan	(590.583.000.000)	(590.583.000.000)	(590.583.000.000)
V. Pembiayaan Lainnya	25.000.000.000.000	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000

Perubahan rincian alokasi anggaran pada Perpres 54 Tahun 2020 menjadi Perpres 72 Tahun 2020 telah memperhitungkan rencana kebutuhan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan alokasi sebesar Rp695,2 triliun yang alokasinya dalam bentuk anggaran Belanja di 21 Kementerian/Lembaga, Bagian Anggaran BUN (Belanja dan TKDD, Pembiayaan, dan Penempatan Dana), dan berbentuk insentif perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mempercepat, meningkatkan efektifitas dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 khususnya terkait pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan sepanjang tahun 2020.

Daftar Peraturan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari:

No.	Nomor PMK	Tanggal PMK	Keterangan
1.	28/PMK.03/2020	6 April 2020	Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19
2.	34/PMK.04/2020	16 April 2020	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19
3.	63/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
4.	64/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
5.	65/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
6.	71/PMK.08/2020	23 Juni 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
7.	75/PMK.09/2020	26 Juni 2020	Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
8.	98/PMK.08/2020	28 Juli 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
9.	101/PMK.07/2020	05 Agustus 2020	Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

10.	103/PMK.05/2020	06 Agustus 2020	Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
11.	104/PMK.05/2020	06 Agustus 2020	Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
12.	105/PMK.07/2020	06 Agustus 2020	Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah
13.	118 /PMK.06/2020	31 Agustus 2020	Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
14.	138/PMK.05/2020	25 September 2020	Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
15.	136/PMK.02/2020	21 September 2020	Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
16.	179/PMK.07/2020	11 November 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
17.	185/PMK.02/2020	24 November 2020	Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional
18.	187/PMK.05/2020	26 November 2020	Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021
19.	211/PMK.08/2020	22 Desember 2020	Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
20.	234/PMK.05/2020	30 Desember 2020	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Alokasi Anggaran dan Realisasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Covid-19

Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 melalui sisi permintaan dan penawaran karena kondisi pandemi menimbulkan tekanan atas sisi penawaran akibat melambatnya transaksi dan menurunnya kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, dan tekanan atas sisi permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan sisi permintaan adalah dengan mempercepat dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian, serta tetap memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemic Covid-19.

Di sisi penawaran, Pemerintah merancang berbagai kebijakan berupa insentif yang diberikan kepada sisi penawaran perekonomian tersebut, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, terdapat –berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia/penerima manfaat secara luas.

Alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung Nomor BA-30/PB.3/2021 tanggal 25 Mei 2021 sebagai berikut (dalam triliun rupiah).

KATEGORI/KLASTER PC-PEN	ALOKASI AWAL/ NILAI PEMBIAYAAN MELALUI PENERBITAN SBN	ALOKASI SETELAH REKLASTERISASI	REALISASI PROGRAM/ KLASTER*	% REALISASI PROGRAM	SISA PEMBIAYAAN	PERLAKUAN PENCATATAN ATAS SISA PEMBIAYAAN
I. *Public Goods* (PG)	**397,56**	**397,56**	**344,48**	**86,64%**	**53,08**	**SiLPA *earmark PG***
1. Klaster Kesehatan	87,55	99,50	62,67	62,99%	-	
2. Klaster Perlindungan Sosial	203,90	230,20	216,59	94,09%	-	
3. Klaster Sektoral KL dan pemda	106,11	67,86	65,22	96,11%	-	
II. *Non Public Goods* (NPG)	**177,03**	**177,03**	**172,99**	**97,72%**	**4,04**	**SiLPA *earmark NPG***
4. Klaster Dukungan UMKM	123,46	116,30	112,26	96,53%	-	
5. Klaster Pembiayaan Korporasi	53,57	60,73	60,73	100%	-	
III. SBN Reguler	**120,61**	**120,61**	**58,38**	**48,40%**	**62,23**	**SiLPA *non earmark***
6. Klaster Insentif Usaha	120,61	120,61	55,38	48,40%	-	
Total (I + II + III)	**695,20**	**695,20**	**575,85**	**82,83%**	**119,35**	**57,12 *earmark* + 62,23 *non earmark***

1) Sisa Pembiayaan untuk Program PEN yang Dibiayai dari Penerbitan SBN

Sisa Pembiayaan untuk Program PEN yang dibiayai dari penerbitan SBN sebesar Rp574.590.000.000.000 adalah sebesar Rp57.116.330.873.078 yang terdiri dari Rp53.075.668.740.190 dari sisa untuk *Public Goods* dan Rp4.040.662.132.888 dari sisa untuk *Non Public Goods*.

Atas penggunaan sisa dana tersebut, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a) Sisa dana penerbitan SBN akan dimanfaatkan untuk pendanaan beberapa kegiatan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, sebagai berikut:

Sisa dana PC PEN PG sebesar Rp53,076 triliun untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan (program vaksinasi dan biaya perawatan pasien Covid-19)

Sisa dana PC PEN Non PG Rp4,041 triliun untuk pendanaan dukungan UMKM (kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2020, serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2021).

b) Alokasi pemanfaatan sisa dana PC PEN PG dan NPG akan terus dievaluasi sesuai dengan progres realisasi APBN tahun 2021.

Dalam hal terjadi pengembalian belanja atau pengembalian atas pembiayaan PC PEN tahun 2020 pada tahun 2021, maka pengembalian tersebut akan dicatat sebagai PNBP dari pengembalian belanja TAYL atau penerimaan pembiayaan pada TA 2021. Namun demikian, pengembalian belanja atau penerimaan pembiayaan ini selanjutnya akan diperhitungkan menambah sisa dana PC PEN PG dan NPG pada rekening khusus dan dilaporkan sebagai bagian dari Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Dalam hal terdapat program/kegiatan PC PEN yang telah dikontrakkan pada tahun 2020 namun belum selesai, tunggakan kegiatan PC PEN 2020, atau kegiatan yang tidak terlaksana, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a) Untuk kegiatan penanganan PC-PEN yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021, kegiatan dapat diusulkan untuk direviu dan dapat disetujui melalui refokusing/realokasi/revisi anggaran atau sebagai penambahan anggaran untuk diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC PEN 2021.

b) Untuk tunggakan kegiatan PC-PEN TA 2020, dapat dilakukan penambahan anggaran setelah dilakukan reviu/audit, dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC-PEN Tahun 2021.

c) Untuk kegiatan PC-PEN TA 2020 yang telah dialokasikan dan belum terlaksana, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC-PEN Tahun 2021, selama tidak diusulkan kembali dalam pelaksanaan program/kegiatan APBN TA 2021.

Penggunaan sisa dana dari SBN PG dan NPG sebesar Rp 57,117 triliun ditambah pengembalian kepada reksus dalam periode tahun 2021 sebagaimana kebijakan di atas, akan dilakukan perhitungan rampung akhir atas penggunaan dana dimaksud dalam batasan kegiatan PG dan NPG sebagaimana yang disepakati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam tahun anggaran 2021. Perhitungan rampung akhir tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2021 yang disampaikan dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021.

2) Penyertaan Modal Awal pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dilakukan penempatan dana pada Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) sebesar Rp15.000.000.000.000. Rekening tersebut adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020.

Setelah terbentuk organ, Pemerintah melalui KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI memindahbukukan modal awal LPI ke rekening LPI. Pada tanggal 22 Januari 2021 Presiden menetapkan Dewan Pengawas melalui Keppres Nomor 6/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang kemudian dilantik oleh Presiden tanggal 26 Januari 2021. Selang kurang dari sebulan setelah itu, Dewan Pengawas telah mengangkat Dewan Direktur LPI melalui KepDewas LPI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 26 Februari 2021, sesuai KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI dilakukan pemindahbukuan modal awal LPI ke rekening LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 dari Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980).

3) Program Investasi Pemerintah –Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN)

Investasi Pemerintah sebagai salah satu modalitas dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya, dengan dasar hukum PP Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 mengatur bahwa untuk melaksanakan program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan dan Belanja Negara.

Sebagai sebuah skema baru, pemerintah harus menciptakan satu sistem yang baru, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN), Pemerintah berusaha melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para BUMN terdampak. Dalam melaksanakan IPPEN Pemerintah dibantu oleh Pelaksana Investasi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah secara profesional untuk menilai mengingat IPPEN sangat berkaitan erat dengan kondisi dan proyeksi keuangan dan operasional BUMN yang memerlukan dukungan, sehingga sangat diperlukan adanya skema yang baik dan tepat dalam menguatkan kembali kemampuan ekonomi BUMN yang bersangkutan.

Pada tahun 2020, Pemerintah merealisasikan pengeluaran pembiayaan non permanen dalam rangka PEN sebesar Rp19.650.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada bagian B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, yang telah dilakukan penyaluran investasi Pemerintah PEN kepada beberapa BUMN sebesar Rp 5.900.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada bagian D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya. Per 31 Desember 2020, dana yang belum disalurkan kepada BUMN penerima investasi sebesar Rp13.750.000.000.000.

Dalam Skema IPPEN Pemerintah, sedapatnya semua pihak termasuk pemegang saham maupun kreditur turut andil dalam mengembalikan kemampuan ekonomi BUMN, sehingga pemberian modalitas investasi pemerintah PEN ini terlaksana dengan efektif. Hal ini turut dipersyaratkan kepada BUMN yang terdampak, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi. Dengan demikian, pencairan modalitas dukungan ini juga menjadi bergantung pada efektifitas usaha BUMN yang bersangkutan dalam melakukan perbaikan sebagai *sharing the pain* /risk selain pemerintah melalui IPPEN. Selanjutnya tata kelola pencairan dana tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020.

Sampai dengan 25 Mei 2021, sesuai dengan perjanjian pelaksanaan investasi dan kesesuaian dengan PMK 118/PMK.06/2020 telah dilaksanakan pemindahbukuan dari RIPPEN ke Rekening Penerima Investasi sesuai KMK 533/KMK.06/2020 dengan rincian sebagai berikut:

- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp627.409.598.719

Sebagaimana perjanjian pelaksanaan investasi, Pengaturan PMK 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN), Pemerintah membutuhkan Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN) untuk dapat menyalurkan dana secara bertahap sesuai dengan perjanjian investasinya sebagai mitigasi risiko Pemerintah atas risiko bisnis yang dapat terjadi. Dana IP PEN dalam RIPPEN sebagai bukti komitmen Pemerintah kepada Stakeholder Penerima Investasi lainnya bahwa Pemerintah turut serta *sharing the pain* untuk terlibat memulihkan keadaan keuangan Penerima Investasi akibat dampak pandemi Covid-19.

Sesuai dengan perjanjian investasi berikut adalah komitmen penyaluran 2021 sampai dengan paling lambat 2023.

dalam miliar rupiah

Uraian	Dana 31 Des 2020	Pengeluaran s.d. 25 Mei 2021	Komitmen yang Akan Disalurkan di 2021 (setelah 25 Mei 2021)	Saldo Dana yang Akan Disalurkan di 2022-2023

Komitmen Penyaluran 2021 (Garuda, PTPN, Perumnas, Krakatau Steel)*	6.645	1.627	5.018	-
Komitmen Penyaluran 2022 (Garuda, PTPN)*	2.759			2.759
Komitmen Penyaluran 2023 (Garuda, PTPN)*	4.346			4.346
Total Komitmen 2021-2023	**13.750**	**1.627**	**5.018**	**7.105**

Namun demikian, Sesuai Perjanjian Investasi antara Pemerintah dan Pelaksana Investasi terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh BUMN penerima investasi untuk penggunaan dana investasi yang ada pada Rekening Investasi Pemerintah antara lain, sebagai berikut:

- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi Pemerintah sebesar Rp8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Dana investasi tersebut diperjanjikan untuk digunakan sebagai modal kerja. Penerbian OWK seri A sebesar Rp1 triliun akan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi antara lain rencana restruktrurisasi perusahaan, due diligence atas aspek finansial dan legal, rencana penggunaan dana, persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dipenuhi. . Persyaratan pencairan berikutnya antara lain persetujuan RUPS, Dekom, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan progres restrukturasi perusahaan.
- Perum Perumnas: Penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) seri selanjutnya akan dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat sesuai seri A dan tambahan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, termasuk pemenuhan Risiko Keuangan sesuai perjanjian
- PT Perkebunan Nusantara III: Pencairan pertama dilakukan setelah Penerima Investasi menandatangani perjanjian dengan kreditur PTPN Group sehubungan dengan Rencana Transformasi Keuangan Jangka Panjang (RTKJP) dan telah berlaku efektif dan mengikat seluruh kreditur PTPN Group. Untuk Kemudian Penerima investasi akan menerima Dana IP PEN sesuai dengan hasil verifikasi Konsultan Pengawas atas rencana penggunaan dana yang dimasukkan dalam RAB IP PEN dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya serta Penerima Investasi tidak dalam keadaan lalai terhadap ketentuan perjanjian IP PEN. termasuk menjaga Risiko Keuanganyang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian IP PEN.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk OWK Seri B sebesar Rp800 miliar dengan persyaratan pencairan antara lain: persetujuan Dekom, RUPS, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN; dan perbaikan kinerja perusahaan.

4) Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah yang merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dalam kondisi *extraordinary* sehingga memerlukan relaksasi terhadap ketentuan regular yang ada dan percepatan waktu proses pinjaman dengan penyederhanaan prosedur. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN Daerah tetap memperhatikan aspek tata kelola yang baik.

Pemberian Pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui PT SMI. PT SMI sebagai pelaksana pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah akan melakukan penilaian dan perikatan penerusan pinjaman dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa regulasi yang mengatur Pinjaman PEN Daerah antara lain:

- PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020.
- Perjanjian antara Kementerian Keuangan dan PT SMI No. PRJ-2/PK/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana terakhir diubah dengan PRJ-3/PK/2020.

Untuk tahun 2020 alokasi dan pencairan dana Pinjaman PEN Daerah bersumber dari APBN sebesar Rp20 Triliun. Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan untuk selanjutnya dikelola PT SMI. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman PEN Daerah antara PT SMI dan 28 Pemda untuk 30 fasilitas dengan nilai komitmen sebesar Rp19.131.891.015.948, dan telah dicairkan kepada 21 Pemda dengan total nilai sebesar Rp7.623.104.189.784. Pada tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan pengembalian sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda ke RKUN sebesar Rp1.237.372.432.764. Dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di rekening PT SMI per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.139.523.377.451.

Pinjaman PEN Daerah digunakan untuk Pemberian Pinjaman oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK nomor 105/PMK.07/2020 beserta perubahannya. Jenis Pinjaman yang dapat diberikan oleh PT SMI adalah Pinjaman Kegiatan dan Pinjaman Program. Untuk Tahun 2020, fokus pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah adalah pada Pinjaman Kegiatan.

Sampai dengan bulan Mei 2021, terdapat realisasi penyaluran kepada Pemda sebesar Rp1.985.204.371.398 dan pengembalian dana ke RKUN sebesar Rp155.802.344, sehingga saldo dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di rekening PT SMI per 27 Mei 2021 adalah sebesar Rp9.154.163.203.710 yang ditargetkan untuk disalurkan dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.505.223.860.401 dan sisanya sebesar Rp648.939.343.309 akan disalurkan paling lambat tahun anggaran 2022.

5) Program Belanja Subsidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, telah disalurkan subsidi bunga/margin kepada debitur UMKM melalui lembaga penyalur dengan rincian: (i) KUR sebesar Rp 4.984.218.342.076 dan (ii) non KUR sebesar Rp7.822.284.347.056. Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah dana subsidi yang belum tersalurkan ke debitur sebesar Rp3.962.803.109.569.

Sesuai PMK No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, penyalur menatausahakan dan menyalurkan subsidi kepada debitur. Sisa dana Rp3.962.803.109.569 diminta untuk disalurkan kepada debitur melalui surat KPA (Direktorat SMI) No. S-34/PB.4/2021 tanggal 28 Januari 2021 hal Permintaan Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin UMKM, kemudian No. S-131/PB.4/2021 tanggal 06 April 2021 hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin ke Debitur dan yang terakhir Surat No. S-224/PB.4/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin Non KUR ke Debitur.

Dari subsidi bunga Rp3.962.803.109.569 yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2020, sampai dengan 25 Mei 2021 telah disalurkan sebesar Rp3.446.215.093.901, sehingga terdapat saldo sebesar Rp516.588.015.668 yang terdiri dari: (i) KUR sebesar Rp188.385.194.139 dan (ii) non KUR sebesar Rp328.202.821.419.

Berdasarkan surat Direktur SMI 224/PB.4/2021 tanggal 20 Mei 2021 Hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin Non KUR ke Debitur, penyalur untuk:

- Menyampaikan laporan pendistribusian subsidi bunga/margin ke debitor ier-update paling lambat tanggal 28 Mei 2021.
- Terhadap subsidi bunga/margin yang belum didistribusikan (dana yang mengendap) sampai dengan 30 April 2021, agar dana tersebut disetor ke Kas Negara beserta jasa giro (Tata Cara Pengembalian terlampir).
- Jika sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, Penyalur belum mengirimkan Laporan Update per 30 April 2021 dan Surat Pengembalian atas Dana yang belum didistribusikan, maka pencairan tagihan penyalur di periode berikutnya akan ditunda

Saat ini beberapa penyalur (BNI/Mandiri) telah menyampaikan komitmen penyaluran ke debitur setelah mereka selesai melakukan perhitungan ulang atas selisih pendistribusian yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan penyalur PT Pegadaian telah berkomitmen untuk menyelesaikan pendistribusian subsidi bunga ke debiturnya sesuai dengan core bisnis nasabah gadai per Juni 2021.

6) Program Kartu Prakerja

Pada tahun 2020, Pemerintah merealisasikan belanja lain-lain untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp18.252.242.050.924 melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Manajemen Pelaksana di Bank BNI dengan saldo per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 yang dicatat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 telah disalurkan pada Bulan Januari, Februari, Maret 2021 dengan rincian: (a) Biaya pelatihan dan insentif peserta yang tidak digunakan oleh peserta penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.620.973.748.317, (b) Biaya Pelatihan dan insentif peserta penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang disalurkan selama periode Januari – Maret 2021 sebesar Rp 2.539.918.672.758, dan (c) Biaya Pelatihan dan insentif yang tidak berhasil disalurkan selama periode tahun 2021 sebesar Rp 278.178.168.045 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara tanggal 24 Maret 2021. Sehingga, saldo Rekening RPL Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja per tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp0.

7) Transfer DAK Non Fisik BOK Tambahan

Pada tahun 2020, untuk mendukung Program PEN dialokasikan Dana BOK Tambahan sebesar Rp4.173.330.000.000, dan direalisasikan sebesar Rp4.173.318.578.376 yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan daerah.

Per 31 Desember 2020, terdapat sisa dana sebesar Rp1.044.190.435.164 yang berada pada RKUD. Atas sisa dana tersebut, sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya. Sisa dana digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2020 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2021. Berdasarkan laporan

dari Pemda, sampai dengan 27 Mei 2021, masih terdapat sisa dana BOK Tambahan di RKUD sebesar Rp947.374.312.198.

Penggunaan atas sisa dana kegiatan dalam pelaksanaan APBN TA 2020, baik yang berasal dari belanja atau pun pengeluaran pembiayaan sebagaimana di atas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing kegiatan. Sisa dana atas kegiatan Pembiayaan LPI, Program IPPEN, Belanja Subsidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR, dan Program Kartu Prakerja, yang belum tersalurkan kepada pihak ketiga atau penerima akhir, diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan dimaksud akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Realisasi Anggaran PEN per Klaster dan Subklaster

Adapun rincian realisasi anggaran PEN per klaster dan subklaster sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian Klaster dan Subklaster	Alokasi	Realisasi
Perlindungan Sosial		
Program Keluarga Harapan (PKH)	41.970.000.000.000	41.940.368.869.358
Sembako (BPNT)	46.200.000.000.000	43.888.985.603.016
Paket Sembako Jabodetabek	7.000.000.000.000	7.094.322.604.917
Bansos Tunai (BST) Non Jabodetabek	33.610.000.000.000	32.603.359.599.673
Kartu Prakerja	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924
Diskon Listrik	11.540.000.000.000	11.448.439.134.297
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	31.800.000.000.000	23.737.018.473.021
Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29.780.000.000.000	29.483.840.923.223
Subsidi Kuota Internet Kemendikbud	3.820.000.000.000	3.828.410.431.000
Bantuan Internet dan Bantuan Tunai Guru Kemenag	390.000.000.000	234.847.665.000
Bantuan Gaji Guru Honorer Kemenag	1.150.000.000.000	1.132.568.639.400
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk PTK non PNS Kemendikbud	2.940.000.000.000	2.942.697.600.000
Jumlah Perlindungan Sosial	**230.200.000.000.000**	**216.587.101.593.829**
Kesehatan		
Belanja Penanganan Covid Lainnya	43.410.000.000.000	41.773.346.302.532
Insentif Tenaga Medis	7.660.000.000.000	8.826.352.577.424
Santunan Tenaga Medis	60.000.000.000	58.800.000.000
Bantuan Iuran JKN	4.110.000.000.000	4.118.240.745.500
Gugus Tugas Covid-19	3.220.000.000.000	3.210.480.608.210
Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	4.600.000.000.000	4.053.681.404.580
Penanganan Vaksin Covid-19 Tahun 2020	36.440.000.000.000	633.846.000.000
Jumlah Kesehatan	**99.500.000.000.000**	**62.674.747.638.246**
Sektoral K/L dan Pemda		
Padat Karya K/L	20.960.000.000.000	19.791.640.948.095
Insentif perumahan	540.000.000.000	482.785.765.525
Pariwisata	2.850.000.000.000	2.897.280.569.198
DID Pemulihan Ekonomi	5.000.000.000.000	4.955.285.206.000
Cadangan DAK Fisik	7.290.000.000.000	7.285.623.090.246
Fasilitas Pinjaman Daerah	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235
Cadangan perluasan	11.220.000.000.000	11.047.238.881.436
Jumlah Sektoral K/L dan Pemda	**67.860.000.000.000**	**65.222.482.027.735**
UMKM		
Subsidi Bunga UMKM	28.800.000.000.000	12.806.502.689.132
Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan	12.930.000.000.000	66.750.000.000.000

IJP UMKM	66.750.000.000.000	1.091.611.029.137
Penjaminan untuk Modal Kerja (*Stop Loss*)	1.500.000.000.000	1.000.000.000.000
PPh Final UMKM DTP	1.000.000.000.000	871.166.848.877
Pembiayaan Investasi untuk LPDB KUKM	1.070.000.000.000	1.292.000.000.000
Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	1.290.000.000.000	28.648.187.811.609
Cadangan UMKM	2.960.000.000.000	
Jumlah UMKM	**116.300.000.000.000**	**112.259.468.378.755**
Pembiayaan Koorperasi		
PMN	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000
Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000
IJP Korporasi	10.000.000.000	9.105.288.357
Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*		764.200.000
Stop Loss Penjaminan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Pembiayaan SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Koorporasi	**60.730.000.000.000**	**60.729.869.488.357**
Insentif Usaha		
PPh 21 DTP	4.030.000.000.000	1.722.767.990.009
Pengurangan Angsuran PPh 25	21.590.000.000.000	20.625.776.797.644
Penurunan Tarif PPh Badan	18.780.000.000.000	12.677.845.239.238
Pembebasan PPh 22 Impor	13.390.000.000.000	14.001.829.078.329
Pengembalian Pendahuluan PPN	7.550.000.000.000	7.570.475.576.080
BM DTP	580.000.000.000	91.076.746.670
Pembebasan abonemen listrik	1.690.000.000.000	1.688.040.000.000
Cadangan/bantalan untuk PPh DTP dan Insentif usaha	53.000.000.000.000	
Jumlah Insentif Usaha	**120.610.000.000.000**	**58.377.811.427.970**
Jumlah	**695.200.000.000.000**	**575.851.480.554.892**

Rincian secara lebih detail mengenai Alokasi, Pagu DIPA, Realisasi per KL dan BA BUN pelaksana program PEN dapat dilihat pada Lampiran 4.

Realisasi sebesar Rp575.851.480.554.892 terdiri dari alokasi yang direalisasikan melalui:

1) Kementerian/Lembaga yaitu pada 21 Kementerian/Lembaga dengan pagu DIPA sebesar Rp283.182.605.906.276 dan realisasi sebesar Rp270.461.400.605.672, terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp119.796.600.208.302, Belanja Modal sebesar Rp18.018.365.405.771, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp132.646.434.991.599. Realisasi ini terdiri dari realisasi yang menggunakan akun khusus sebesar Rp180.360.935.764.811 dan akun regular Rp90.100.464.840.861.
2) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan realisasi sebesar Rp248.396.690.486.285 yang terdiri dari:
   - Belanja Rp 59.720.817.571.407 terdiri dari Belanja Barang Rp764.200.000, Belanja Hibah Rp2.264.647.247.182, Belanja Subsidi Rp33.396.883.327.801 dan Belanja Lain-lain Rp24.058.522.796.424.
   - Transfer ke Daerah Rp40.151.245.347.643.
   - Pembiayaan Rp81.774.627.567.235.
   - Penempatan Dana Rp66.750.000.000.000.
   - Insentif Perpajakan berupa Pajak DTP dihitung berdasarkan realisasi SP2D yang telah diterbitkan oleh BUN.

Permohonan, Pelaporan Realisasi, dan Pengawasan Pemanfaatan Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan cepat, diharapkan insentif yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara maksimal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Perpu 1 Tahun 2020, PMK-23/PMK.03/2020 dan perubahannya, PMK-28/PMK.03/2020 dan perubahannya,

serta PMK-125/PMK.010/2020, antara lain diatur mengenai kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat memanfaatkan insentif, prosedur pengajuan permohonan dan pelaporannya, serta mengenai mekanisme pengawasannya.

Terkait dengan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan kemudian disetujui beserta nilai pelaporannya per 31 Desember 2020, dapat disajikan sebagaimana berikut.

Tabel Pemanfaatan Insentif Pajak dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

No	Jenis Insentif	Jumlah Wajib Pajak			Laporan Wajib Pajak
		Permohonan	Yang Ditolak	Disetujui	(RpTriliun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020)					
1	Penurunan Tarif PPh Badan	-	-	-	12.677.845.239.238
	SUBTOTAL Perppu-1	-	-	-	12.677.845.239.238
B. PMK-110					
1	PPh Pasal 21 - DTP	146 068	14 179	131.889	3.470.467.903.902
2	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	18.753	3.812	14.941	13.634.842.505.823
3	Pengurangan Angsuran PPh Ps 25	79.796	13 114	66.682	20 625 776.797 644
4	Pengembalian Pendahuluan	2 593	-	2 593	7 570 475.576.080
5	PPh Final PP 23 - DTP	248.607	332	248.275	782.340.637 124
6	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	-	-	-	27.158.819.375
	SUBTOTAL PMK-9	498.817	31.437	484.380	46.111.982.236.948
C. PMK-143					
1	PPN DTP	1.501	-	1.501	2.117.462 771.844
2	PPh Ps 21 - Dibebaskan	1.224	-	1.224	34.930.310.115
3	PPh Ps 22 DN - Dibebaskan	7.191	-	7.191	210.820.359.226
4	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	627	-	627	306.906.572.506
5	PPh Ps 23 - Dibebaskan	7 053	-	7.053	11.551.534.857
	SUBTOTAL PMK-143	17.996	-	17.996	2.741.781.546.348
D. PMK-125					
1	PPN DTP Atas Kertas Koran	-	-	-	319.856.048
	SUBTOTAL PMK-125	-	-	-	319.856.048
TOTAL		513.413	31.437	481.976	61.530.978.883.982

Sumber: Aplikasi Portal DJP - PKP s.d. 31 Desember 2020 diakses 19 Februari 2021

Realisasi pemanfaaatan insentif pajak sebagaimana disajikan di atas, bersumber dari laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, untuk realisasi Penurunan Tarif PPh Badan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan realisasi insentif, sehingga realisasi insentif dihitung dengan menggunakan *proxy* PPh Pasal 25 Badan (menggunakan data pembayaran PPh Pasal 25 Badan dan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25). Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak Badan tanpa didahului dengan permohonan. Meskipun demikian, atas Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini akan tetap dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai konsekuensi kemudahan pelaporan dan pelayanan dalam kondisi darurat secara *self assessment*.

Dapat dilaporkan bahwa insentif perpajakan yang telah diperhitungkan dalam realisasi Program PEN (sebagaimana pada tabel penjelasan realisasi Program PEN per Klaster tersebut di atas), sepanjang tahun 2020 berdasarkan PMK 143/PMK.03/2020, Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh Pasal 21 dibebaskan dengan realisasi pemanfaatan oleh WP sebesar Rp34.930.310.115, PPh Pasal 22 Dalam Negeri dibebaskan sebesar Rp210.820.359.226, dan PPh Pasal 23 dibebaskan sebesar Rp11.551.534.857.

Insentif perpajakan ini merupakan dalam rangka penanganan Covid-19, namun tidak masuk ke dalam perhitungan alokasi Klaster dan subklaster insentif usaha Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kewajiban terkait Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka PC PEN yang Belum Diselesaikan Tahun 2020
Laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan data tagihan melalui SPM adalah sebagai berikut:

No	Jenis Insentif	Nilai Laporan Pemanfaatan Insentif oleh Wajib Pajak	Nilai Tagihan/SPM	Selisih
1	PPh Pasal 21 - DTP	3.470.467.903.902	1.709.586.633.777	1.760.881.270.125
2	PPh Final PP 23 - DTP	782.340.637.124	671.166.848.877	111.173.788.247
3	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	27.158.819.375	13.181.356.232	13.977.463.143
4	PPN DTP	2.117.462.771.644	1.936.218.632.936	181.244.138.708
5	PPN DTP atas Kertas Koran	319.856.048	-	319.856.048
TOTAL		6.397.749.988.093	4.330.153.471.822	2.067.596.516.271

Atas nilai selisih di atas, sedang dilakukan penelitian atas kesesuaian antara laporan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan dengan kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Terkait dengan nilai insentif perpajakan baik dalam Klaster PEN maupun diluar Klaster PEN, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyatakan asersi manajemen terhadap penyajian insentif perpajakan tersebut (pernyataan asersi sebagaimana pada lampiran).

b. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penanggulanan pandemi Covid-19, selain menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, pemerintah juga mengupayakan penanggulangan dampak pandemi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga melakukan relokasi/*refocusing* anggaran untuk kegiatan penanggulangan pandemi sehingga dapat melindungi Aparatur yang bertugas, termasuk *stakeholder* layanan dari kantor pemerintah dalam rangka operasional pelayanan pemerintahan berjalan dengan tetap optimal sekaligus membatasi laju penularan Covid-19.

Seluruh Kementerian/Lembaga telah mengalokasikan dan merealisasikan kegiatan dimaksud sepanjang tahun 2020, setelah pemerintah menetapkan status Pandemi.

Total Realisasi Belanja K/L sebesar Rp13.160.752.895.715 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp10.667.601.420.061, Belanja Modal sebesar Rp2.486.947.575.654, Belanja Bansos sebesar Rp6.203.900.000. Realisasi tersebut menggunakan akun khusus Covid-19 sebesar Rp12.808.849.754.917 terdiri dari Belanja Barang Akun khusus sebesar Rp10.318.570.108.781, Belanja Modal Akun khusus sebesar Rp2.484.075.746.136 dan Belanja Bansos akun khusus sebesar Rp6.203.900.000. Sedangkan realisasi yang menggunakan akun regular sebesar Rp351.903.140.798 terdiri dari Belanja Barang Akun Reguler sebesar Rp349.031.311.280, dan Belanja Modal Akun Reguler sebesar Rp2.871.829.518.

Rincian Alokasi dan realisasi belanja dalam rangka operasional pencegahan dan penanganan Covid-19 TA 2020 di lingkungan K/L selain program PEN sebagai berikut (dalam rupiah).

Kementerian/Lembaga	Pagu DIPA	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Total Belanja
Majelis Permusyawaratan Rakyat	3.530.199.000	2.749.656.800	193.270.000		2.942.926.800
Dewan Perwakilan Rakyat	25.136.221.000	14.856.815.535	7.635.262.850		22.492.078.385
Badan Pemeriksa Keuangan	27.200.815.000	23.311.068.085	476.693.050		23.787.761.135
Mahkamah Agung	44.286.330.000	41.836.962.926	2.514.136.350		44.351.099.276
Kejaksaan Republik Indonesia	162.415.360.000	152.332.946.406	9.233.262.677		161.566.209.083
Kementerian Sekretariat Negara	97.848.139.000	46.972.963.051	43.294.130.416		90.267.093.467
Kementerian Dalam Negeri	135.317.850.000	94.600.479.188	38.448.963.742		133.049.442.930
Kementerian Luar Negeri	150.929.422.000	158.533.820.728	741.824.511		159.275.645.239
Kementerian Pertahanan	2.347.241.588.360	1.160.915.311.203	1.117.897.574.525		2.278.812.885.728
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	242.273.938.000	229.253.583.268	55.226.908.439		284.480.491.707
Kementerian Keuangan	237.336.777.000	206.482.476.016	5.532.686.300		212.015.162.316
Kementerian Pertanian	229.696.159.029	218.340.117.796	1.323.764.048		219.663.881.844
Kementerian Perindustrian	153.072.977.000	144.446.284.066	1.345.419.732		145.791.703.798
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	235.663.748.000	206.174.186.420	14.915.384.018		221.089.570.438
Kementerian Perhubungan	1.170.017.559.000	732.870.566.841	93.958.885.844		826.829.452.685
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	865.974.850.000	631.331.103.682	66.392.136.559	6.000.000.000	703.723.240.241
Kementerian Kesehatan	1.397.790.998.409	850.380.432.608	251.541.444.245		1.101.921.876.853
Kementerian Agama	310.712.520.000	263.755.080.452	5.291.758.042	28.900.000	269.075.739.494
Kementerian Ketenagakerjaan	60.263.143.740	52.348.597.167	2.365.925.065		54.714.522.232
Kementerian Sosial	155.566.440.000	147.903.750.062	1.999.048.264	175.000.000	150.077.798.326
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	171.231.803.000	150.523.044.553	2.660.145.895		153.183.190.448
Kementerian Kelautan dan Perikanan	690.289.996.680	487.165.571.349	2.596.475.635		489.762.046.984
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	960.539.853.000	419.772.670.285	473.541.088.112		893.313.758.397
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10.384.615.000	6.391.517.694	3.528.022.000		9.919.539.694
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.090.033.000	9.208.346.201	-		9.208.346.201
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12.001.598.000	10.825.625.559	42.394.000		10.868.019.559
Kementerian Pariwisata	455.497.654.759	437.001.997.169	400.388.000		437.402.385.169
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3.922.479.000	2.087.488.087	199.796.453		2.287.284.540
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	180.745.947.000	51.337.864.505	19.344.341.450		70.682.205.955
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	16.267.163.000	11.350.740.211	129.470.000		11.480.210.211

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.085.884.000	22.717.962.872	17.526.000		22.735.488.872
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	9.178.674.000	5.744.695.392	692.410.250		6.437.105.642
Badan Intelijen Negara	264.032.512.030	264.032.512.030	-		264.032.512.030
Lembaga Sandi Negara	6.438.546.000	5.285.186.050	84.227.000		5.369.413.050
Dewan Ketahanan Nasional	862.653.000	816.826.593	-		816.826.593
Badan Pusat Statistik	83.318.738.000	68.980.688.419	2.105.065.150		71.085.753.569
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	39.440.030.000	33.594.593.985	1.855.831.762		35.450.425.747
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	102.989.513.000	70.284.926.759	603.183.937		70.888.110.696
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	4.456.305.000	4.329.372.034	20.589.800		4.349.961.834
Kementerian Komunikasi dan Informatika	106.335.406.833	83.964.634.690	29.413.000		83.994.047.690
Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.231.311.281.809	1.044.053.857.175	138.792.386.874		1.182.846.244.049
Badan Pengawas Obat dan Makanan	50.272.538.000	41.500.414.039	7.410.108.299		48.910.522.338
Lembaga Ketahanan Nasional	13.256.799.000	3.015.916.801	9.642.285.655		12.658.202.456
Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.891.795.000	4.295.637.928	532.450.000		4.828.087.928
Badan Narkotika Nasional	36.709.578.000	36.847.286.908	1.077.363.787		37.924.650.695
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	21.058.863.000	18.927.114.095			18.927.114.095
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	44.218.881.000	39.756.333.866	1.252.013.176		41.008.347.042
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.201.268.000	2.743.556.836	173.329.900		2.916.886.736
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	12.224.724.000	10.454.826.066	198.940.000		10.653.766.066
Komisi Pemilihan Umum	3.196.850.734.000	1.194.755.422.362	1.154.869.150		1.195.910.291.512
Mahkamah Konstitusi RI	2.190.350.000	1.972.574.284	355.986.000		2.328.560.284
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2.974.437.000	1.949.721.240	358.826.811		2.308.548.051
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	16.925.454.000	12.124.546.133	1.937.007.890		14.061.554.023
Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.921.936.000	3.911.248.522	136.348.275		4.047.596.797
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19.406.609.000	17.054.357.283	269.992.500		17.324.349.783
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	3.726.930.000	2.752.112.371	121.735.033		2.873.847.404
Badan Informasi Geospasial	7.362.027.000	2.999.919.889	645.032.690		3.644.952.579
Badan Standardisasi Nasional	246.863.909.000	3.254.730.369	64.625.000		3.319.355.369
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.258.338.000	1.154.952.911	204.601.320		1.359.554.231
Lembaga Administrasi Negara	6.524.499.940	5.799.809.420	713.390.520		6.513.199.940

Arsip Nasional Republik Indonesia	9.181.889.000	8.352.615.104	-		8.352.615.104
Badan Kepegawaian Negara	19.011.258.000	13.629.151.364	3.137.039.305		16.766.190.669
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	209.206.030.000	137.162.303.835	57.840.767.934		195.003.071.769
Kementerian Perdagangan	61.173.428.000	54.748.569.352	443.808.900		55.192.378.252
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	97.693.549.000	89.994.582.640	2.028.562.679		92.023.145.319
Komisi Pemberantasan Korupsi	13.271.255.000	9.574.519.878	-		9.574.519.878
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	3.549.340.000	3.193.752.185	300.945.750		3.494.697.935
Komisi Yudisial RI	3.748.852.000	3.197.200.521	479.374.380		3.676.574.901
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	12.810.155.000	12.661.377.716	-		12.661.377.716
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8.066.720.000	7.740.484.004	150.505.000		7.890.989.004
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.063.439.000	1.004.174.083	-		1.004.174.083
Badan SAR Nasional	1.736.251.000	1.636.314.688	-		1.636.314.688
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	4.855.099.000	4.753.500.852	-		4.753.500.852
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	635.444.000	615.129.590			615.129.590
Ombudsman Republik Indonesia	1.689.332.552	1.603.424.988	14.450.000		1.617.874.988
Badan Nasional Pengelola Perbatasan	5.432.240.000	4.692.156.299	-		4.692.156.299
Badan Usaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	185.585.146.243	90.232.933.703	8.668.239.332		98.901.173.035
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	7.158.669.000	6.485.891.811	-		6.485.891.811
Sekretariat Kabinet	5.248.982.000	4.000.898.940	-		4.000.898.940
Badan Pengawasan Pemilihan Umum	301.588.366.000	204.583.702.236	1.303.341.495		205.887.043.731
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	13.621.364.000	12.148.501.319	350.495.842		12.498.997.161
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	3.992.245.000	3.353.914.894	52.625.467		3.406.540.361
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2.014.726.020	563.870.020	1.297.021.250		1.860.891.270
Badan Keamanan Laut	2.138.371.000	1.883.696.500	172.360.000		2.056.058.500
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	28.472.631.000	11.491.026.737	17.276.977.319		28.768.004.056
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4.435.189.000	4.160.921.567	210.920.000		4.371.841.567
Jumlah	**17.137.915.361.404**	**10.667.601.420.061**	**2.486.947.575.654**	**6.203.900.000**	**13.160.752.895.715**

c. Pemindahbukuan Saldo Kas LMAN

Dalam rangka mendukung penanganan COVID-19, pemerintah menetapkan KMK Nomor 319/KMK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pemindahan Saldo Kas BLU LMAN ke BLU Rumpun Layanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan KMK tersebut telah dilakukan pemindahan dana sebesar Rp1.116.422.586.550,00 dari BLU LMAN Kementerian Keuangan kepada 29 BLU rumpun kesehatan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Polri. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, pemindahan dana tersebut telah digunakan sebesar Rp1.047.555.827.483, dan masih terdapat sisa dana pada 20 BLU sebesar Rp68.866.759.068 yang telah dilakukan penyetoran pada bulan Mei 2021 sebesar Rp68.743.384.475, dan sebesar Rp123.374.593 belum dilakukan penyetoran.

d. Penarikan Pinjaman Tunai dalam Rangka Mendukung Pendanaan Pelaksanaan APBN TA 2020 yang terdampak Pandemi Covid-19

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai collateral dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi besarnya defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui pinjaman tunai antara lain digunakan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp76.585.407.776.875. Pinjaman tunai tersebut berasal dari beberapa lembaga yaitu Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Japan International Cooperation Agency, International Bank for Reconstruction and Development, KfW Development Bank, dan Australia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Negara	Lender	MTU	Jumlah Valas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	A D B	ADB	EUR	1.388.760.000	22.648.930.391.600	CSF-CARES PROGRAM
2	AIIB	AIIB	USD	750.000.000	10.961.250.000.000	CARES PROGRAM
				212.500.000	3.048.475.000.000	EMERGENCY RESPONSE TO COVID-19
3	AUSTRALIA	AUSTRALIA	IDR	16.106.310.000.000	16.106.310.000.000	CARES PROGRAM LOAN AUSTRALIA
4	GERMANY	KfW	EUR	250.000.000	4.288.912.500.000	CARES
				300.000.000	5.195.598.000.000	CARES II
5	I B R D	IBRD	JPY	31.975.600.000	4.423.526.885.275	DPF: COVID-19 SUPPLEMENTAL FIN
			USD	212.500.000	3.056.425.000.000	Emergency COVID-19
6	JAPAN	JICA	JPY	50.000.000.000	6.855.980.000.000	CARES Program Loan
Total					76.585.407.776.875	

CARES = Covid-19 Active Response and Expenditure Support

e. Hibah Langsung yang diterima K/L dalam rangka penanganan Covid-19

Untuk penanganan Covid-19 beberapa Kementerian/Lembaga juga menerima hibah langsung berupa uang dan barang pada tahun 2020. Hibah berasal dari donor dalam negeri maupun luar negeri yaitu terdapat 211 register yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah terkait Covid-19 sebesar Rp884.762.239.530. Rincian Hibah per K/L adalah sebagai berikut (dalam rupiah).

Kementerian/Lembaga	Hibah Langsung Barang/Jasa	Hibah Langsung Uang	Total Hibah
Kejaksaan Republik Indonesia		10.144.978.300	10.144.978.300
Kementerian Dalam Negeri	39.275.000		39.275.000

Kementerian Kesehatan	423.315.661.405		423.315.661.405
Kementerian Keuangan	30.090.000		30.090.000
Kementerian Pariwisata	1.006.746.270		1.006.746.270
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	1.828.248.900	25.000.000	1.853.248.900
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	270.000.000		270.000.000
Kementerian Pertahanan	16.699.593.894	25.542.591.600	42.242.185.494
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi		5.949.905.000	5.949.905.000
Kepolisian Negara Republik Indonesia	205.714.000	72.044.874.950	72.250.588.950
Komisi Pemilihan Umum	10.587.794.700		10.587.794.700
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		100.000.000	100.000.000
Badan Koordinasi Penanaman Modal	12.099.777.614		12.099.777.614
Badan Narkotika Nasional	-	150.000.000	150.000.000
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	138.951.229.885	161.081.606.228	300.032.836.113
Badan Pengawas Pemilihan Umum	4.659.151.784		4.659.151.784
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	30.000.000		30.000.000
Total	**609.723.283.452**	**275.038.956.078**	**884.762.239.530**

Selain rincian Hibah di atas, terdapat hibah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat Hibah berupa barang untuk penanganan Covid-19 dari Kedutaan Besar China (hibah langsung dalam negeri) berupa masker dan disinfektan sebesar Rp437.980.000, Hibah Langsung Uang sebesar Rp14.900.492.986, Hibah Langsung Barang sebesar Rp464.350.000, Hibah Langsung Jasa sebesar Rp3.760.081.468.

f. Relaksasi/Insentif PNBP Kementerian/Lembaga

Pemerintah juga memberikan relaksasi PNBP yang merupakan insentif atau relaksasi pungutan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan dengan nilai total sebesar Rp79.004.359.363. Relaksasi yang diberikan adalah dalam bentuk penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi/perizinan/paspor/sertifikasi, pengenaan tarif 50%, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah.

g. Biaya *Burden Sharing* yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah

Realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah dan diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga atas SUN sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.753.214.980.000 untuk *Public Goods* dan sebesar Rp941.773.886.995 untuk *Non Public Goods*.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	10/Nov/20	779.950.000.000	-	779.950.000.000
2	30/Nov/20	163.024.980.000	-	163.024.980.000
3	28/Dec/20	810.240.000.000	-	810.240.000.000
4	Penyesuaian Akrual	1.456.927.480.000	-	1.456.927.480.000
SUBTOTAL PG		3.210.142.460.000	-	3.210.142.460.000
B. Non Public Goods				
1	15/Dec/20	941.773.886.995	832.657.444.604	1.774.431.331.599
2	Penyesuaian Akrual	255.535.887.600	212.171.279.523	467.707.167.123
SUBTOTAL NPG		1.197.309.774.595	1.044.828.724.127	2.242.138.498.722
TOTAL PG DAN NPG		4.407.452.234.595	1.044.828.724.127	5.452.280.958.722

Pada Laporan Operasional, terdapat penyesuaian akrual untuk kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah sebesar Rp1.456.927.480.000 untuk SBN PG dan sebesar Rp255.535.887.600 untuk SBN NPG.

Untuk bagian pemerintah adalah sebesar Rp1.044.828.724.127 yang terdiri dari Rp832.657.444.604 dan Rp212.171.279.523 (penyesuaian akrual).

h. Program Belanja Subsidi yang telah dialokasikan pada APBN Tahun 2020 selain penambahan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka menjaga perekonomian nasional serta melindungi masyarakat, Pemerintah selain program Pemulihan Ekonomi Nasional, juga tetap menjalankan program-program yang telah direncanakan dan dialokasikan sebelumnya pada APBN Tahun 2020, khususnya program subsidi dengan alokasi total sebesar Rp107,63 triliun. Alokasi Subsidi ini meliputi Subsidi Listrik sebesar Rp51,04 triliun, Subsidi Bunga KUR sebesar Rp13,77 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp0,60 triliun, Subsidi Suku Bunga Perumahan sebesar Rp3,87 triliun, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp0,18 triliun, Subsidi Pupuk sebesar Rp26,63 triliun dan Subsidi Pajak DTP sebesar Rp11,54 triliun.

i. Tambahan anggaran Belanja pada Perpres 72 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang belum dikategorikan dalam Program PEN

Selain anggaran Rp695,2 Triliun dalam bentuk Program PEN, juga terdapat tambahan anggaran Belanja yang menjadi bagian dari pergeseran anggaran pada Perpres 72 Tahun 2020 tetapi tidak menjadi bagian dari alokasi dalam Program PEN, dan merupakan alokasi yang bersifat sebagai Dana Cadangan (alokasi ini tidak diterbitkan DIPA sampai dengan akhir tahun 2020 sehingga tidak terdapat realisasi atas alokasi tersebut).

2. Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Di tengah meningkatnya kebutuhan dana yang signifikan untuk memastikan kegiatan PC-PEN dapat berjalan dengan baik, terdapat arahan dari pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Bank Indonesia (BI) selaku regulator kebijakan moneter untuk memberikan dukungan dana kepada Pemerintah terutama melalui Kemenkeu dengan kerjasama pembiayaan utang untuk memastikan kebutuhan dana dimaksud dapat tersedia tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap keuangan negara.

Menindaklanjuti pembicaraan di DPR, Kemenkeu dan BI kemudian melaksanakan pembahasan mengenai skema kerjasama pembiayaan utang antara Pemerintah dan Bank Sentral, yang menghasilkan kesepakatan kerjasama terkait pendanaan PC-

PEN dengan skema pembagian beban *(Burden Sharing)* antara Kemenkeu dan BI. Kerjasama Kemenkeu dan BI tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. nomor 347/KMK.08/2020 dan nomor 22/9/KEP.GBI/2020 Tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk mengatur hal yang lebih teknis, disusun juga aturan turunan teknis pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal PPR dan Deputi Gubernur BI nomor PRJ-289/PR/2020 dan nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam kerjasama pembiayaan dengan skema *burden sharing*, BI sepakat untuk memberikan kepastian penyediaan dana dalam bentuk pembelian instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah untuk pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Public Goods* (PG) tanpa menimbulkan beban kupon atas instrumen dimaksud, serta berbagi beban/kontribusi kepada Pemerintah atas beban yang ditimbulkan atas penerbitan instrumen SBN untuk pembiayaan pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Non Public Goods* (NPG) untuk UMKM dan Korporasi.

SKB I yang ditetapkan bulan April 2020 memberikan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP). SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang, di mana BI berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Sementara itu, dalam SKB II yang ditetapkan bulan Juli 2020, BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban untuk penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods* dalam rangka pembiayaan untuk belanja Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, (b) Belanja/Pembiayaan *Non Public Goods* dalam mendukung UMKM dan korporasi. Skema burden sharing dilaksanakan dalam rangka menyediakan fiscal space dan menjaga kesinambungan APBN dalam jangka menengah - panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan Covid-19 dan PEN.

Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan atas belanja/pembiayaan PG dan NPG untuk UMKM dan Korporasi, sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan 8 kali *private placement* dalam rangka pemenuhan pembiayaan untuk *Public Goods* dengan nilai Rp397.560.000.000.000 dan 9 kali lelang dalam rangka pemenuhan pembiayaan *Non Public Goods* dengan nilai Rp177.030.000.000.000 sehingga nilai totalnya sebesar Rp574.590.000.000.000

3. **Rincian Belanja terkait dengan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/desentralisasi TA 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2020 (dalam rupiah)	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	3.642.201.674	170.689.000
018	Kementerian Pertanian	1.158.216.790.342	3.222.978.846.243
019	Kementerian Perindustrian	56.937.258.418	
024	Kementerian Kesehatan	208.081.059.950	
026	Kementerian Ketenagakerjaan	108.252.233.195	37.710.419.394

027	Kementerian Sosial	291.503.280.236	54.507.761.516
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		75.250.935.699
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	58.314.847.051	35.147.301.020
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1.136.406.640.982
040	Kementerian Pariwisata	1.544.743.620	
044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	76.801.207.401	
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.572.498.029	
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	9.768.500.685	
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	14.667.998.175	
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	11.908.458.103	
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.592.952.538.207	128.440.517.466
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.286.019.290	
090	Kementerian Perdagangan	28.787.176.424	307.112.186.855
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	88.149.737.882	
	Jumlah	3.732.386.548.682	4.997.725.298.175

4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa *(quasi public goods)*, meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2020, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam

laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 244 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 22 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Pertahanan	24
3	Kementerian Keuangan	7
4	Kementerian Pertanian	3
5	Kementerian Perindustrian	5
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	8
7	Kementerian Perhubungan	34
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35
9	Kementerian Kesehatan	58
10	Kementerian Agama	19
11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
14	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
15	Kementerian Riset dan Teknologi	1
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	2
17	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	1
18	Kepolisian Negara Republik Indonesia	40
19	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
20	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1
21	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
22	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
	Jumlah BLU	**247**

*terdapat 4 BLU pada Kementerian Perhubungan yang telah dicabut pada bulan Maret 2020, namun masih terdapat masa transisi selama 6 bulan setelah pencabutan KMK yang mengatur hal tersebut.

Ditinjau dari jenis layanan, dari 247 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

1. 26 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 5 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 106 BLU bidang Kesehatan;
4. 100 BLU bidang Pendidikan;
5. 10 BLU bidang Pengelolaan Dana;

Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2C.**

5. **Kontrak Tahun Jamak**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai dengan **Lampiran 2G**.

6. ***Notice of Disbursement* (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2020**

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman,dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2020 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan TA 2020, terdapat 2 (dua) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar Rp126.001.628.818 yaitu pada Kepolisian RI sebesar Rp115.381.080.633 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.620.548.185 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri belum dapat dilakukan pengesahan dikarenakan ketidakcukupan pagu anggaran.

7. **Pengembalian Pinjaman Kegiatan**

Terdapat *refund* senilai Rp211.693.471.354 dilakukan pemerintah selama TA 2020. *Refund* tersebut terjadi karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp6.596.448.672 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp205.097.022.682.

8. **Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)**

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA).

Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

9. **Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri**

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/I/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2020.

Secara ringkas, realisasi belanja yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada KL sebagai berikut.(dalam rupiah).

Pinjaman Luar Negeri

No	Kementerian/Lembaga	Realisasi Pinjaman Luar Negeri
1	Kementerian Dalam Negeri	96.540.560.373
2	Kementerian Pertahanan	12.628.196.970.794
3	Kementerian Pertanian	113.471.919.126
4	Kementerian Perhubungan	2.751.853.174.093
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	981.794.108.592
6	Kementerian Kesehatan	152.398.319.248
7	Kementerian Agama	769.478.042.850
8	Kementerian Ketenagakerjaan	52.295.840.600
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.254.395.784.086
10	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.568.810.600
11	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	33.128.975.216
12	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	136.704.503.981
13	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	180.589.282.320
14	Kepolisian Republik Indonesia	2.418.658.576.571
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	38.147.292.579
16	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	194.738.293.817
17	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	73.912.018.594
18	Badan Informasi Geospasial	39.579.080.295
19	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	19.488.362.209
20	Badan Pengusahaan Batam	132.753.184.114
	Grand Total	**32.077.693.100.058**

Hibah Luar Negeri

No	Kementerian/Lembaga	Realisasi Hibah Luar Negeri
1	Kementerian Sekretariat Negara	29.736.103.027
2	Kementerian Dalam Negeri	23.328.008.943
3	Kementerian Keuangan	17.551.915.875
4	Kementerian Perhubungan	3.901.982.042
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	240.346.544.948
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	47.361.434.349
7	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	32.219.585.229
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	202.581.000
	Grand Total	**394.648.155.413**

Nilai realisasi yang disajikan merupakan nilai realisasi berdasarkan SP2D yang berasal dari sumber dana pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri di masing-masing KL. Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana **Lampiran 2D dan 2E.**

10. Pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi
Badan Standardisasi Nasional	70.000.000.000	69.538.523.850
Kementerian Agama	3.513.052.680.000	3.165.392.440.533
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	237.977.327.000	204.043.457.744
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	7.611.341.666.000	7.191.899.099.844
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	1.502.157.057.000	1.278.959.667.890
Kementerian Perhubungan	9.726.832.473.000	8.907.739.864.214
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	508.702.101.000	300.682.804.073

Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	125.000.000.000	56.071.974.937
Jumlah	**23.295.063.304.000**	**21.174.327.833.085**

11. Hibah melalui Mekanisme Rekening Khusus yang belum diterima NoD-nya

Terdapat hibah melalui mekanisme Reksus yang belum diterima NoD-nya yang direklasifikasi menjadi pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam: PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana *(withdrawal application)* untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN". Berdasarkan ketentuan tersebut atas transaksi penerimaan hibah melalui Reksus tahun 2020 yang belum diterima NoD-nya sampai dengan 31 Maret 2021, maka dilakukan reklasifikasi sebagai pendapatan hibah pada tahun 2020.

12. Hibah RR dan Hibah Pariwisata kepada Pemerintah Daerah

Pada Belanja Hibah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni terdapat 2 (dua) jenis Hibah yang memiliki karakteristik penyaluran yang berbeda dengan belanja hibah dalam negeri lainnya, yaitu Hibah RR dan Hibah Pariwisata karena kedua jenis hibah ini tidak bersifat reimbursement melainkan dana disalurkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah melalui RKUD.

Terhadap dana Hibah RR dan Hibah Pariwisata yang tidak termanfaatkan harus dikembalikan ke RKUN. Bukti pengembalian sisa dana harus disampaikan kepada *executing agency* bersamaan dengan penyampaian laporan akhir atau secara terpisah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penyampaian bukti pengembalian sisa dana hibah merupakan kelengkapan penyelesaian pemanfaatan anggaran hibah RR maupun Hibah Pariwisata.

Penyaluran Hibah RR dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dengan jangka waktu pemanfaatan oleh Pemda adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan hibah kepada Pemda dapat diberikan paling banyak dua kali perpanjangan yaitu perpanjangan pertama diberikan paling lama 12 bulan, dan perpanjangan kedua diberikan paling lama 9 bulan. Dengan adanya pengaturan ini, sisa dana yang masih ada di RKUD dan tidak termanfaatkan sulit untuk terindentifikasi.

Terhadap Hibah Pariwisata, pada Diktum Kelimabelas KMK Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 mengatur bahwa setelah hibah pariwisata dalam rangka PEN TA 2020 berakhir dan masih terdapat sisa dana hibah di RKUD, sisa dana hibah tersebut disetorkan ke RKUN. Nilai sisa dana tersebut selanjutnya diungkapkan pada Laporan Akhir Hibah Pariwisata yang telah mendapat reviu APIP daerah.

Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan Hibah Pariwisata diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/Pl.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, yaitu jangka waktu pelaksanaan sampai dengan Desember 2020, dan diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Hibah Daerah, yaitu dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan, sampai dengan Desember 2020, namun masih terdapat sisa dana hibah, maka sisa dana hibah tersebut wajib disetorkan kembali ke kas negara.

Terkait pengembalian sisa dana, Pasal 12 ayat (10) PMK Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 mengatur bahwa penyetoran sisa dana ke RKUN adalah sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian

sasaran keluaran, atau 6 bulan sejak berakhirnya TA 2020 yaitu 30 Juni 2021. Dalam hal sisa dana belum disetorkan sampai dengan 30 Juni 2021, Bendahara Umum Negara dapat melakukan pemotongan DAU/DBH.

Sampai dengan tanggal 6 April 2021, dari 97 masih terdapat 20 pemerintah daerah yang belum menyampaikan sisa dana Hibah Pariwisata. Sampai saat ini, tercatat sisa dana Hibah Pariwisata sebesar Rp441.926.141.846.

Identifikasi data sisa dana Hibah RR yang masih terdapat pada RKUD dilakukan berdasarkan verifikasi laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada BNPB selaku *executing agency*. Berikut data pemda penerima Hibah RR yang telah dan belum menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah RR:

Tahun	Daerah Penerima	Penyampaian Laporan	
		Sudah	Belum
2015	116	92	24
2016	92	60	32
2017	130	63	67
2018	13	1	12
2019	131	70	61

Terhadap pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan akhir penggunaan Dana Hibah RR, DJPK akan mendorong pengelolaan pelaporan atas Hibah RR dan pengembalian sisa dana Hibah RR dari pemerintah daerah. Selanjutnya pelaksanaan rekonsiliasi akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta penyampaian laporan dari pemerintah daerah.

13. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 dilakukan pengesahan Penerimaan Pembiayaan pada BUN dan Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga sebesar yang telah bayarkan oleh BLU LMAN.

14. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
b. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

e. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2020 sebesar Rp508.843.834.877.000. Realisasi fungsi pendidikan TA 2020 sebesar Rp473.658.845.623.143 atau 93,08 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*
Belanja Pemerintah Pusat	174.247.215.018.051
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	281.411.630.605.092
Pembiayaan	18.000.000.000.000
Jumlah	**473.658.845.623.143**

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2020 sebesar Rp212.452.700.000.000. Realisasi fungsi kesehatan TA 2020 sebesar Rp172.254.667.576.844 atau 84,02 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*
Belanja Pemerintah Pusat	135.144.442.913.789
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	37.110.224.663.055
Pembiayaan	-
Jumlah	**172.254.667.576.844**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2F.**

15. Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU APBN Tahun 2020 ditetapkan perubahan dan pergeseran pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Rincian pergeseran pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Bagian Anggaran	Nilai Pagu Dialokasikan
Kementerian/Lembaga	190.987.207.849.000
Non Kementerian/Lembaga	55.130.436.022.000
Jumlah	**246.117.643.871.000**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL per 1 Januari 2020 sebesar Rp 212,69 triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp212.698.374.791.778 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 *(Audited)*. Saldo Anggaran Lebih Awal dapat dirinci sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	1 Januari 2020	1 Januari 2019
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Saldo Awal Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
	212.723.083.673.014	**175.984.640.119.749**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(12.345.086.135)	(277.316.178.796)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(22.102.871)	(485.172.315)
Selisih Kiriman Uang	52.495.332	(330.588.756.176)
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(12.394.187.562)	(134.534.327.816)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(24.708.881.236)**	**(742.924.435.103)**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp70,64 triliun

Pada tahun 2020 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Rincian SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (dalam rupiah).

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp245,59 triliun

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Pendapatan Negara	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit)	**(947.697.754.987.089)**	**(348.653.725.921.394)**
Pembiayaan Neto	1.193.293.831.252.057	402.051.510.185.251
SiLPA/(SiKPA)	**245.596.076.264.968**	**53.397.784.263.857**

SiLPA TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp192.198.292.001.111 atau 359,94% dari SiLPA TA 2019 sebesar Rp53.397.784.263.857.

Pada tahun 2020, Pemerintah membuka Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Public Goods* (510000287980) dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980) di Bank Indonesia. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Per 31 Desember 2020, terdapat SiLPA earmark *Public Goods* sebesar 53.075.668.740.190 dan *Non Public Goods* sebesar 4.040.662.132.888. Nilai SiLPA *earmark* direncanakan untuk digunakan dalam program PC PEN pada tahun 2021.

Terdapat nilai sebesar Rp66.750.000.000.000 pada SiLPA yang merupakan saldo penempatan dana pada Bank Umum Mitra baik di pusat maupun daerah dalam bentuk manajemen kas Pemerintah. Penempatan dana pada Bank Umum Mitra merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas pada sektor perbankan.

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs *(unrealized)*, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp25.425.421.216 dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp25,42 milyar

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Koreksi SiLPA	447.536.410.409	(1.337.580.362.637)
Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(227.575.834.013)	(69.218.984.057)
Koreksi Kas BUN	(211.693.471.353)	(168.278.530.526)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(7.551.767.998)	(9.921.980.606)
Koreksi Kas BLU	(50.865.145.620)	(62.087.570.751)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Koreksi Utang PFK	(2)	(121.911.422)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(8.084.795)	(55.874.460)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**(25.425.421.216)**	**(1.666.230.746.416)**

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp447.536.410.409 merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp165.007.135.154 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp612.543.545.563. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai minus Rp158.272.894.029 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah senilai minus Rp6.734.241.125.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp227.575.834.013 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp66.576.019.441 dan kerugian selisih kurs sebesar Rp294.151.853.454 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp211.693.471.353 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian *(refund)* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan, melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp7.551.767.998 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2019 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar minus Rp4.366.018.094, penyesuaian selisih kurs Kas Hibah Valas sebesar minus Rp1.963.214.199, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar minus Rp1.222.535.705.
5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp50.865.145.620 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2020 sebesar Rp93.448.550.028, koreksi pencatatan Kas BLU pada Universitas Negeri Malang akibat pemindahan sisa dana SNMPTN-SBMPTN tahun 2019 yang belum dicatat sebesar minus Rp70.432.626.825, koreksi reklasifikasi pencatatan Kas BLU menjadi Piutang BLU dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada UIN Sumatera Utara sesuai rekomendasi BPK sebesar minus Rp74.332.677.600, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar Rp451.608.777.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.732.472.156 merupakan koreksi terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp25.108.658.384, reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi Piutang TP/TGR pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar minus Rp367.763.821, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar minus Rp8.422.407.
7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp2 merupakan pembulatan.
8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp8.084.795 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp490,05 milyar

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp490.055.695.596 dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	481.201.524.869	211.994.966.699
Penyesuaian Transaksi Rek. *Escrow*	(3.487.521.503)	47.987.539.000
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	12.341.692.230	465.123.083.992
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**490.055.695.596**	**725.105.589.691**

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL TA 2020 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	234.188.766.627	234.188.766.627	-
Saldo Akhir	731.061.274.902	731.061.274.902	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp481.201.524.869 dan Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp3.487.521.503 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.

3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp12.341.692.230 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(52.495.332)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	12.394.187.562
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**12.341.692.230**

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada **Tabel 14** (dalam rupiah).

Tabel 14
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	**142.058.374.791.778**	**160.241.715.684.646**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	245.596.076.284.968	53.397.784.263.857
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	**387.654.451.056.746**	**213.639.499.948.503**
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	447.536.410.409	(1.337.580.362.637)
Selisih Kurs (*Unrealized*)	(227.575.834.013)	(69.218.984.057)
Koreksi Kas BUN	(211.693.471.353)	(168.278.530.526)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(7.551.767.998)	(9.921.980.606)
Koreksi Kas BLU	(50.865.145.620)	(62.087.570.751)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) [1]	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Koreksi Utang PFK [2]	(2)	(121.911.422)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) [3]	(8.084.795)	(55.874.460)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	**(25.425.421.216)**	**(1.666.230.746.416)**
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP [1]	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL [4]	481.201.524.869	211.994.966.699
Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* [5]	(3.487.521.503)	47.987.539.000
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris [6]	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada Tahun Berjalan	12.341.692.230	465.123.083.992
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	**490.055.695.596**	**725.105.589.691**
SALDO AKHIR CATATAN SAL	**388.119.081.331.126**	**212.698.374.791.778**

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	731.061.274.902	234.188.766.627
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	(496.872.508.275)	50.961.506.842
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	(472.140.036.119)	31.995.974.885
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	**24.732.472.156**	**(18.965.531.957)**
Keterangan:	**24.732.472.156**	**(18.965.531.957)**
Penyesuaian Selisih Kurs dan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN		
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = **Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP**	-	-

2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Utang PFK (I)	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494
Saldo Akhir Utang PFK (II)	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(1.675.772.800.162)	1.717.219.259.845
Mutasi Transaksi PFK (III)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	**307.482.157**	**(804.160.913)**
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk *Invoice* (IV)	307.482.159	682.249.491
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk *Invoice* = **Koreksi Utang PFK pada BUN**	**(2)**	**(121.911.422)**
Keterangan:	(2)	(121.911.422)
Pembulatan.		

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	118.429.956.817	197.868.217.285
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	403.356.201.213	118.429.956.817
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	284.926.244.396	(79.438.260.468)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	284.918.159.601	(79.494.134.928)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)**	**(8.084.795)**	**(55.874.460)**
Keterangan: Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(8.084.795)	(55.874.460)

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal RPL	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	(118.407.853.946)	(197.383.044.970)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Koreksi Saldo RPL	-	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Saldo Akhir RPL	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun	(403.055.376.084)	(118.407.853.946)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	2.482.672.653.380	2.816.585.443.070
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(333.912.789.690)	(2.837.971.226.184)
Mutasi Transaksi RPL (III)	147.288.735.179	(2.625.976.259.485)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = **Penyesuaian Transaksi RPL**	**481.201.524.869**	**211.994.966.699**
Keterangan: Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	481.201.524.869	211.994.966.699

5) Rekening *Escrow*

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Rekening *Escrow*	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Dikurangi:	(5.695.887.440.489)	(3.714.379.337.474)
Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun		
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Koreksi Saldo Rek. *Escrow*	-	-
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Saldo Akhir Rekening *Escrow*	136.301.448.612.099	20.053.770.625.020
Dikurangi:	(78.531.853.711.234)	(5.695.887.440.489)
Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun		
Saldo Akhir Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL (II)	57.769.594.900.865	14.357.883.184.531
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	43.411.711.716.334	(40.528.910.089.016)
Mutasi Transaksi Rekening *Escrow* (III)	43.408.224.194.831	(40.480.922.550.016)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow***	**(3.487.521.503)**	**47.987.539.000**
Keterangan: Nilai Selisih Kurs Rekening Dana Cadangan Alutsista dan Rekening Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	(3.487.521.503)	47.987.539.000

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Kas Transitoris	-	-
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	-
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	-	-
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	-
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	-	-
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris**	-	-
Keterangan:	-	-

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp388.119.081.331.126. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut (dalam rupiah).

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Saldo Akhir Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
	264.341.559.608.896	**212.723.083.673.014**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN	57.116.330.873.078	-
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(88.455.830.387)	(12.345.086.135)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(300.825.129)	(22.102.871)
Selisih Kiriman Uang	(52.495.332)	52.495.332
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	-	(12.394.187.562)
Transito Lainnya	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	66.750.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**123.777.521.722.230**	**(24.708.881.236)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**388.119.081.331.126**	**212.698.374.791.778**

Dengan demikian, SAL Akhir pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp175.420.706.539.348 atau 82,47 persen dibandingkan dengan dari SAL Akhir Tahun 2019 sebesar Rp212.698.374.791.778.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut (dalam rupiah)

Posisi Neraca secara umum

(dalam rupiah)

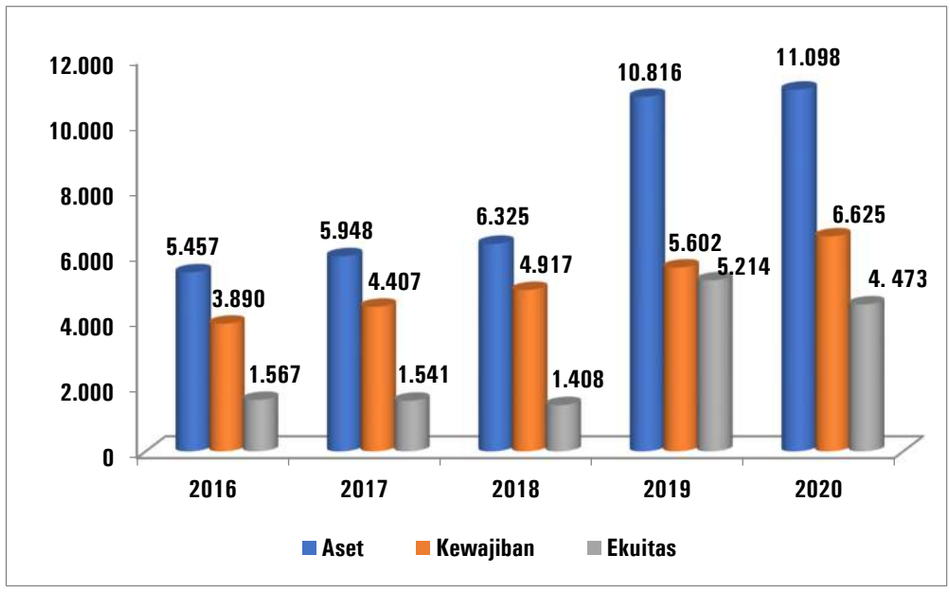
Neraca	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	665.161.112.767.725	491.867.510.128.337	35,23
Investasi Jangka Panjang	3.173.076.804.223.285	3.001.201.131.873.675	5,73
Aset Tetap	5.976.014.521.058.706	5.949.595.402.491.414	0,44
Piutang Jangka Panjang	59.321.820.079.721	56.888.975.528.228	4,28
Aset Lainnya	1.225.100.226.220.041	967.981.447.325.579	26,56
Jumlah Aset	**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**	**6,03**
Kewajiban Jangka Pendek	701.606.358.286.875	704.682.072.672.981	(0,44)
Kewajiban Jangka Panjang	5.923.869.627.304.123	4.635.539.513.513.850	27,79
Jumlah Kewajiban	**6.625.475.985.590.998**	**5.340.221.586.186.831**	24,07
Ekuitas	**4.473.198.498.758.480**	**5.127.312.881.160.402**	(12,76)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**	**6,03**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 35,23 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2019. Sementara nilai Kewajiban per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 24,07 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2019.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 27.**

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

(dalam triliun rupiah)



Grafik 27. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2016 – 2020

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1 ASET

D.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp665.161.112.767.725 dan Rp491.867.510.128.337.

Aset Lancar Rp665,16 triliun

Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lancar	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	256.923.467.961.654	208.962.960.718.114	22,95
Uang Muka dari Rekening BUN	11.763.117.361	5.455.736.715	115,61
Investasi Jangka Pendek	80.997.797.371.759	10.817.836.834.384	648,74
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	34.421.569.421.725	34.972.003.392.136	(1,57)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5.591.639.511.588	3.028.979.606.205	84,60
Piutang	126.700.067.094.014	110.630.183.915.948	14,53
Persediaan	160.514.808.289.624	123.450.089.924.835	30,02
Jumlah	**665.161.112.767.725**	**491.867.510.128.337**	**35,23**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 35,23 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Investasi Jangka Pendek yang mengalami kenaikan sebesar Rp70.179.960.537.375 karena adanya kenaikan Investasi dalam Deposito. Investasi dalam Deposito mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp66.750.000.000.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum

Kas di Rekening Pemerintah di BI dan BU Rp198,51 triliun

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp198.514.075.299.703 dan Rp151.409.014.474.516, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp47.105.060.825.187 atau 31,11 persen dibandingkan tahun 2019. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp165.359.616.060.407 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp33.154.459.239.296.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp165.359.616.060.407 dan Rp135.363.107.144.280, mengalami kenaikan sebesar Rp29.996.508.916.127 atau 22,16 persen.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah).

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.331.011.686.942	2.404.070.486.688
Rekening SAL Nomor 500.000002980	69.110.234.248.077	92.839.841.214.312
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	70.672.433.215.706	28.700.791.990.043
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	2.092.811.843.651	1.769.926.850.368
Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program SKR (510000277980)	209.643.691	159.643.691
Rekening Khusus dalam Rupiah	3.681.703.962.414	9.648.316.959.174
Jurnal Penyesuaian pada Rekening BUN	17.471.211.459.922	
Jumlah	**165.359.616.060.403**	**135.363.107.144.276**

**) Selisih TA 2020 Rp4 karena pembulatan*

Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan saldo pada pos kas di Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah yang menjadi rekening tujuan akhir dari transaksi penerimaan negara baik berupa pendapatan negara maupun penerimaan pembiayaan.
2. Transaksi pindah buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pemindahan saldo SAL Likuid ke Rekening Saldo Anggaran Lebih berdasarkan Berita Acara Perhitungan SAL Likuid dan SAL *Non Likuid* 2019 sesuai LKPP 2019 *Audited* senilai Rp46,9 triliun.
3. Transaksi pindah buku dari Rekening Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam rangka realisasi penggunaan dana SAL sebagai instrumen pembiayaan dalam negeri sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 senilai Rp70,6 triliun.
4. Pembebanan rekening khusus SBSN dan Rekening Khusus PHLN di Bank Umum dalam Rupiah yang mengurangi saldo audited tahun 2019 senilai Rp5,9 triliun.
5. Telah dilakukan jurnal penyesuaian pada SPAN yang mengakibatkan bertambahnya saldo pada Rekening Kas Umum Negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.471.211.459.922, yang berasal dari:
   a. Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi PG dan NPG berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung nomor BA-018/PB.3/2021 untuk PG sebesar Rp16.242.360.386.209,00 dan NPG sebesar Rp283.047.126.112.
   b. Adanya *updating* data realisasi belanja yang bersumber dari pembiayaan PC-PEN dari Kementerian/Lembaga untuk *Public Goods* yang bertambah sebesar Rp945.803.947.601, yang akan dibuatkan Berita Acara Perhitungan Rampung untuk posisi *Audited* dan ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan dana dari Rek PG ke RKUN.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp33.154.459.239.296 dan Rp16.045.907.330.236, mengalami kenaikan sebesar Rp17.108.551.909.060 atau 106,62 persen. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo pos di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat yang dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah).

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	2.713.849.534	18.061.891.108
Rekening Khusus dalam Valuta Asing	3.232.945.581.416	3.353.370.060.258
Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	20.224.223.480.070	12.546.993.267.714
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	1.151.202.331.814	30.571.198.642
Rekening KUN dalam Valuta EUR	8.543.373.996.462	96.910.912.514
Jumlah	**33.154.459.239.296**	**16.045.907.330.236**

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, dapat disarikan bahwa penyumbang terbesar kenaikan saldo pos tersebut di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO, Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD dan Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980) sejumlah Rp8.446.463.083.948 dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi uang masuk yang berasal Pinjaman dari KFW Jerman dengan nomor *Loan Agreement* 29931 dan 30061 dalam rangka *disbursement.*
2. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980) sejumlah Rp7.677.230.212.356 dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi setoran MPN dalam Valuta USD.
3. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen (600502111980) sejumlah Rp1.120.631.133.172 dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi pinjaman dari JICA Jepang program *Connectivity Development Policy* dengan nomor *Loan Agreement* INP-45 dan pemindahbukuan saldo rekening tidak aktif sebagai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKTBI tahun 2018 sebagaimana Surat BI Nomor 22/227/DPPT/Srt/B tanggal 30 Desember 2020.

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya Rp2,88 triliun

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.885.728.029.464 dan Rp2.934.993.297.016, mengalami penurunan sebesar Rp49.265.267.552 atau 1,68 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pendapatan hasil minyak perjanjian *production sharing* pada rekening penerimaan migas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	7	6
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	24	21
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	1.262.382.108.906	1.788.702.844.687
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.220.126.090.533	1.027.878.594.178
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	164.453.910	4.004.178
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	387.572.282.344	102.445.861.040
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	9.826.810	22.588.300
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	15.473.266.930	15.939.404.606
Jumlah	**2.885.728.029.464**	**2.934.993.297.016**

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp1.262.382.108.906 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* atau Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.220.126.090.533 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Penjelasan mengenai Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 1.**

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN Rp3,54 triliun

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.545.188.057.685 dan Rp2.891.119.214.103, mengalami kenaikan sebesar Rp654.068.843.582 atau 22,62 persen. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.545.188.057.685 terdiri dari:

a. Saldo Rekening Retur Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta YEN (609009111980) sebesar Rp400.953;
b. Saldo Rekening SUBRKUN KPPN Khusus Penerimaan pada Bank Indonesia sebesar Rp3.545.187.656.732.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam Transito Rp0

Kas dalam Transito per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp52.495.330. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN, rekening pinjaman/hibah,dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah.

Rincian Kas dalam Transito disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas Dalam Transito	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. Kas Dalam Transito – BUN	52.495.332	52.495.329
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	(52.495.332)	0
3. Pembulatan	-	1
Jumlah	**0**	**52.495.330**

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp731,06 miliar

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp731.061.274.902 dan Rp234.188.766.627, mengalami kenaikan sebesar Rp496.872.508.275 atau 212,17 persen. Kenaikan signifikan Kas di Bendahara Pengeluaran karena adanya saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang signifikan pada BNPB sebesar Rp481.036.991.370. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp124,23 miliar

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp124.232.758.259 dan Rp166.170.010.917, mengalami penurunan sebesar Rp41.937.252.658 atau 25,24 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp7,68 triliun

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.682.561.400.884 dan Rp5.591.063.945.100, mengalami kenaikan sebesar Rp2.091.497.455.784 atau 37,41 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
K/L	7.655.958.524.602	5.589.286.954.858
BUN	3.889.419.340.372	1.634.617.895.228
Penyesuaian	(3.862.816.464.090)	(1.632.840.904.986)
Jumlah	**7.682.561.400.884**	**5.591.063.945.100**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Setara Kas Lainnya	348.743.774	760.656.061
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.518.653.472.655	2.371.880.286.238
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	273.586.529	4.941.163.989
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	440.441.368.915	506.175.037.833
Kas Lainnya di BLU	776.726.974.109	685.474.767.370
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	56.697.914.530	385.493.107.128
Jumlah	**7.655.958.524.602**	**5.589.286.954.858**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp2.179.138.992.023 sebagian besar merupakan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan.
2. Kementerian Sosial sebesar Rp2.058.132.172.068 sebagian besar merupakan dana bantuan sembako yang belum tersalurkan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Setara kas lainnya	26.602.876.282	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	55.958.989
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Jumlah	**3.889.419.340.372**	**1.634.617.895.228**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp3.889.419.340.372, terdiri dari:

1. Setara Kas lainnya sebesar Rp26.602.876.282, terdiri dari:
   1) Setara Kas Lainnya pada BA 999.07 sebesar Rp26.595.671.282 merupakan Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Umum Negara per tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Setara Kas Lainnya pada Kementerian PUPR terdapat pada Subsidi Perumahan sebesar Rp25.496.883.307;
- Setara Kas Lainnya pada Kementerian BUMN sebesar Rp1.098.787.975;

2) Setara Kas Lainnya pada BA 999.08 sebesar Rp7.205.000 merupakan sisa dana yang belum dikembalikan ke Kas Umum Negara pada posisi 31 Desember 2020 dari Program Kartu Prakerja.

2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp3.862.816.464.090 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab K/L yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima K/L dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2020.

Penyesuaian sebesar minus Rp3.862.816.464.090 merupakan eliminasi atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada BUN.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp43,44 triliun

Kas pada BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp43.440.621.140.757 dan Rp45.736.358.514.505, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.295.737.373.748 atau 5,02 persen.

Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas pada BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	836.901.048.069	936.232.567.791
BLU di Kementerian Pertahanan	466.326.745.954	182.756.852.058
BLU di Kementerian Keuangan	15.291.756.790.253	19.207.516.720.261
BLU di Kementerian Pertanian	14.072.713.865	103.390.209.184
BLU di Kementerian Perindustrian	83.866.965.360	79.751.016.128
BLU di Kementerian ESDM	170.911.700.063	163.067.505.213
BLU di Kementerian Perhubungan	879.610.814.067	964.747.956.127
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.586.372.978.861	-
BLU di Kementerian Kesehatan	4.222.477.521.960	2.236.198.821.615
BLU di Kementerian Agama	1.481.636.878.323	1.110.285.022.766
BLU di Kementerian LH dan Kehutanan	-	1.010.393.623.043
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	101.492.914.987	79.080.567.361
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.827.610.615.858	1.506.030.211.811
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	118.684.792	3.405.488.920.088
BLU di Kementerian KUKM	1.144.688.527.861	1.038.852.694.897
BLU di Kementerian Kominfo	10.456.680.995.475	12.358.445.398.090
BLU di Kepolisian RI	856.498.869.323	318.598.320.819
BLU di BPPT	21.526.034.223	19.937.109.912
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	220.983.463.638	235.863.792.715
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	772.002.615.335	775.420.675.409
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	5.084.262.490	4.300.529.217
Jumlah	**43.440.621.140.757**	**45.736.358.514.505**

Terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp14.247.797.371.759, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp57.688.418.512.516 (Rp43.440.621.140.757 ditambah Rp14.247.797.371.759).

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka Rekening BUN Rp11,76 miliar

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.763.117.361 dan Rp5.455.736.715, mengalami kenaikan sebesar Rp6.307.380.646 atau 115,61 persen. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lender	**31 Desember 2020 (*Audited*)**	**31 Desember 2019 (*Audited*)**
ADB	1.507.982.835	549.682.608
IFAD	610.334.986	35.731.300
Bank Dunia	6.155.747.749	3.728.706.597
KFW	3.489.051.791	1.141.616.210
Jumlah	**11.763.117.361**	**5.455.736.715**

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Rp80,99 triliun

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp80.997.797.371.759 dan Rp10.817.836.834.384, mengalami kenaikan sebesar Rp70.179.960.537.375 atau 648,74 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, yang terdiri dari Investasi dalam Deposito sebesar Rp66.750.000.000.000 dan Investasi Jangka Pendek BLU sebesar Rp14.247.797.371.759.

Per 31 Desember 2020, tercatat saldo investasi dalam deposito pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat adalah sebesar Rp66.750.000.000.000. Hal ini merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas kepada sektor perbankan dengan melakukan penempatan uang negara pada bank umum mitra. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penempatan uang negara pada bank umum mitra ini diharapkan dapat membantu likuiditas perbankan sehingga perbankan dapat terus menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor riil maupun UMKM, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengakselerasi laju percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penempatan uang negara sejumlah Rp66.750.000.000.000 terbagi ke-14 Bank Umum Mitra dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nominal Penempatan	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	Bunga
1	BPD Jabar Banten	2.500.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
2	Bank DKI	2.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
3	BPD Jateng	2.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
4	BPD Sulutgo	1.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%

5	BPD DIY	1.000.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
6	BPD Jatim	2.000.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
7	BPD Bali	700.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
8	Bank Mandiri	15.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
9	Bank BRI	15.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
10	Bank BNI	7.500.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
11	Bank BTN	10.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
12	Bank Syariah Mandiri	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
13	Bank BRI Syariah	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
14	Bank BNI Syariah	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
15	Bank Kalbar	500.000.000.000	2 Okt 2020	1 Apr 2021	2,84%
16	Bank Sulselbar	1.000.000.000.000	2 Okt 2020	1 Apr 2021	2,84%
17	Bank Sumut	1.000.000.000.000	9 Okt 2020	8 Apr 2021	2,85%
18	Bank Jambi	300.000.000.000	9 Okt 2020	8 Apr 2021	2,85%
19	BPD Aceh Syariah	300.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
20	BPD Sumatera Barat	250.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
21	BPD Bengkulu	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
22	BPD Sumselbabel	400.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
23	BPD Kalimantan Tengah	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
24	BPD Sulawesi Tengah	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
25	BPD Sulawesi Tenggara	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
26	BPD NTB	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
27	BPD NTT	100.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
28	BPD Makuku dan Maluku Utara	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
Jumlah		**66.750.000.000.000**			

Investasi Jangka Pendek BLU merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU pada Kementerian Keuangan	10.370.817.194.793	7.652.521.798.124
BLU pada Kementerian Pertanian	115.500.000.000	-
BLU pada Kementerian ESDM	30.000.000.000	18.000.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	99.000.000.000	19.000.000.000
BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.575.102.041.162	-
BLU pada Kementerian Kesehatan	973.068.001.370	497.297.961.926
BLU pada Kementerian Agama	80.250.000.000	40.250.000.000
BLU pada Kementerian Ristek Dikti	-	2.590.767.074.334
BLU pada Kepolisian RI	4.060.134.434	-
Jumlah	**14.247.797.371.759**	**10.817.836.834.384**

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.421.569.421.725 dan Rp34.972.003.392.136, yang mengalami penurunan sebesar Rp550.433.970.411 atau 1,57 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja Rp34,42 triliun

(dalam rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. Belanja Dibayar Dimuka	10.063.191.906.075	10.459.525.595.574
2. Uang Muka Belanja	24.358.377.515.650	24.512.477.796.562
Jumlah	**34.421.569.421.725**	**34.972.003.392.136**

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp3.654.521.589.193 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp1.979.343.395.838.

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp22.317.263.212.916 dan Kepolisian RI sebesar Rp1.989.376.302.214.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp5,59 triliun

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.591.639.511.588 dan Rp3.028.979.606.205, mengalami kenaikan sebesar Rp2.562.659.905.383 atau 84,60 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31 Desember 2020 (*Audited*)
K/L	3.873.433.233.292
BUN	1.718.206.278.296
Jumlah	**5.591.639.511.588**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada K/L dengan nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.744.876.083.099, yang sebagian besar berasal dari Pendapatan KPU/USO pada BLU BAKTI dan Pendapatan BHP Telekomunikasi.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BUN sebesar Rp1.718.206.278.296, berasal dari Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BA 999.01 sebesar Rp1.712.463.367.600 berupa penyesuaian akrual kontribusi BI dalam skema *burden sharing* dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dan BA 999.00 sebesar Rp5.742.910.696.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.6 Piutang

Piutang Perpajakan Rp101,48 triliun

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp101.481.619.150.090 dan Rp94.699.061.189.535, mengalami kenaikan sebesar Rp6.782.557.960.555 atau 7,16 persen. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan *(net realizable*

value) sebesar Rp60.575.160.717.540 berasal dari nilai bruto sebesar Rp101.481.619.150.090 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp40.906.458.432.550.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	69.891.088.751.611	72.630.633.482.223
Penyisihan	(37.439.661.756.573)	(44.894.689.751.448)
Nilai Neto	**32.451.426.995.038**	**27.735.943.730.775**
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	31.590.530.398.479	22.068.427.707.312
Penyisihan	(3.466.796.675.977)	(3.439.615.711.541)
Nilai Neto	**28.123.733.722.502**	**18.628.811.995.771**
Jumlah Bruto	**101.481.619.150.090**	**94.699.061.189.535**
Penyisihan Piutang Perpajakan	(40.906.458.432.550)	(48.334.305.462.989)
Jumlah Neto	**60.575.160.717.540**	**46.364.755.726.546**

Kenaikan Piutang Perpajakan bruto sebesar Rp6.782.557.960.555 atau sebesar 7,16 persen antara lain karena adanya kenaikan saldo pada Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar Rp9.591.942.178.880.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak PPh Migas	7.779.242	0	100
Piutang Pajak PPH Non Migas	30.382.062.865.470	30.435.164.967.836	(0,17)
Piutang Pajak PPN	24.499.168.506.887	24.748.525.693.141	(1,01)
Piutang Pajak PPnBM	317.229.536.820	418.059.961.635	(24,12)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.419.642.878.379	6.626.561.564.996	(3,12)
Piutang Cukai dan Bea Materai	27.093.415.840.456	17.501.473.661.576	54,81
Piutang Pajak Lainnya	8.609.613.738.436	10.813.279.460.638	(20,38)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.104.492.600.801	4.124.104.112.405	(0,48)
Piutang Bea Masuk Tindakan	55.985.403.599	31.891.767.308	75,55
Jumlah	**101.481.619.150.090**	**94.699.061.189.535**	**7,16**

Penyebab kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tren kenaikan Piutang Perpajakan Cukai dan Bea Meterai pada Unit Eselon I DJBC sejak tahun 2018 disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Pada pasal 31 dijelaskan ketentuan jatuh tempo penundaan untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.
2. Kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan pada Unit Eselon I DJP adalah sebagai berikut:

a) Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 OP, PPh Pasal 26, dan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPh Pasal 25 Badan, PPN, PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh WP dan penyelesaian melalui upaya hukum.

b) Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Non Migas, dan PBB Lainya karena adanya penerbitan SPPT yang belum dilunasi oleh WP. Sedangkan untuk Piutang PBB Pertambangan Migas terjadi penurunan karena terdapat pelunasan piutang tahun pajak sebelumnya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

c) Untuk Piutang Pajak lainnya, Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, dan Bunga Penagihan PPnBM terjadi penurunan karena ketetapan induk atas ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PPh Minyak Bumi	38.896		100
Piutang Pajak PPH Non Migas	17.638.362.998.851	19.093.073.805.458	(7,62)
Piutang Pajak PPN	12.351.894.403.486	13.589.170.170.748	(9,10)
Piutang Pajak PPnBM	240.294.177.779	327.960.650.186	(26,73)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	3.803.354.535.742	3.491.773.938.977	8,92
Piutang Cukai dan Bea Materai	213.850.008.388	166.669.070.597	28,31
Piutang Pajak Lainnya	3.460.326.909.908	8.518.179.658.035	(59,38)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.198.375.359.500	3.147.478.168.988	1,62
Jumlah	**40.906.458.432.550**	**48.334.305.462.989**	**(15,37)**

Rincian Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp189,89 triliun

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp189.891.302.692.258 dan Rp166.256.763.245.523, mengalami kenaikan sebesar Rp23.634.539.446.735 atau 14,22 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp48.453.586.017.530, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp189.891.302.692.258 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp141.437.716.674.728. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	54.609.431.065.961	44.529.590.076.959
Penyisihan	(40.750.702.680.467)	(33.086.823.822.958)
Nilai Neto	**13.858.728.385.494**	**11.442.766.254.001**
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	135.281.871.626.297	121.727.173.168.564
Penyisihan	(100.687.013.994.261)	(88.787.782.708.214)
Nilai Neto	**34.594.857.632.036**	**32.939.390.460.350**
Jumlah Bruto	**189.891.302.692.258**	**166.256.763.245.523**
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(141.437.716.674.728)	(121.874.606.531.172)
Jumlah Neto	**48.453.586.017.530**	**44.382.156.714.351**

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.609.431.065.961 mengalami kenaikan sebesar Rp10.079.840.989.002 atau 22,64 persen dibandingkan tahun 2019.

Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan antara lain sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak di K/L Rp54,60 triliun

1. Kementerian ESDM sebesar Rp21.369.570.560.904 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalti dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment.*
2. Kejaksaan RI sebesar Rp20.075.661.473.176 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.998.679.633.980 sebagian besar merupakan piutang PNBP atas pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.290.785.565.446 sebagian besar merupakan piutang pada Ditjen Bina Marga.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.660.011.687.564 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Piutang Lainnya pada BA 999.02	504.964.817.161	0
b. Piutang Deviden pada BA 999.03	59.858.516.263	59.050.762.469
c. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	12.358.299.808.360	9.563.590.118.299
d. Piutang Subsidi pada BA 999.07	1.818.843.674.284	968.845.714.398
e. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	2.280.649.900.253	279.500.611.672
f. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	118.259.254.909.976	110.856.185.961.726
Jumlah	**135.281.871.626.297**	**121.727.173.168.564**

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp135,28 triliun

a. Piutang Lainnya pada BA 999.02 per 31 Desember 2020 sebesar Rp504.964.817.161 terdiri dari piutang sisa dana hibah RR sebesar Rp27.718.682.691, piutang sisa dana hibah Pariwisata sebesar Rp477.246.134.470. Nilai piutang atas sisa dana Hibah RR berdasarkan hasil rekonsiliasi antara DJPK dan BNPB selaku *executing agency* atas hibah RR yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Mei 2021, untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020.

b. Piutang Deviden (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.858.516.263 dan Rp59.050.762.469, mengalami kenaikan sebesar Rp807.753.794 atau 1,37 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Deviden pada BA 999.03	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Pokok Dividen	25.868.877.697	24.991.123.902
Denda	33.989.638.566	34.059.638.567
Jumlah	**59.858.516.263**	**59.050.762.469**

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi saldo Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) tersebut. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

a. Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp59.050.762.469 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp24.991.123.902 dan denda sebesar Rp34.059.638.567.
b. Selama Tahun Anggaran 2020 terdapat 128 BUMN yang telah menyampaikan dokumen/risalah RUPS TB 2019 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan kepada Kementerian Keuangan. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran awal piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2019 didasarkan pada tanggal pelaksanaan RUPS dan nilai dividen yang ditetapkan sesuai dokumen/risalah RUPS atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan yang telah disampaikan oleh BUMN tersebut. Dari pengakuan piutang sampai dengan 31 Desember 2020, seluruhnya telah dilunasi kecuali piutang dividen TB 2019 PT Prasadha Pamunah Limbah sebesar Rp1.177.753.794 yang akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021.

   Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2020, saldo piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2019 sebesar Rp1.177.753.794.
c. Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang timbul sebelum TB 2019 sebesar Rp370.000.000. Pembayaran tersebut merupakan pelunasan piutang negara bukan pajak dari pokok dividen PT Inhutani V (1999) sebesar Rp300.000.000 dan denda keterlambatan PT Bina Karya (TB 2001) sebesar Rp70.000.000.
d. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2020 tercatat menjadi sebesar Rp59.858.516.263 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp25.868.877.697 dan denda sebesar Rp33.989.638.566.

Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN PNBP Laba BUMN TA 2020 Audited, terdapat 10 BUMN yang belum ada dokumen/risalah RUPS atau yang dipersamakan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan besaran dividen Tahun Buku 2019. Sepuluh BUMN tersebut yakni : Perum Perumnas, PT Asabri (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Asean Bintulu Fertilizer, PT Kawasan Industri Lampung.

c. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.358.299.808.360 mengalami kenaikan sebesar Rp2.794.709.690.061 atau 29,22 persen. Piutang TKD merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Piutang TKD	12.296.104.383.024	9.436.680.927.179
2) Piutang TKDD Diestimasi	17.860.765.163	126.909.191.120
3) Piutang TKDD Lainnya	44.334.660.173	-
Jumlah	**12.358.299.808.360**	**9.563.590.118.299**

1) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.296.104.483.024 dan Rp9.436.680.827.179, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang TKD	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
Satker Dana Bagi Hasil	7.652.864.361.849	8.496.616.257.999
Satker DAU dan DAK Non Fisik	4.602.812.676.254	906.640.797.401
Satker Dana Keistimewaan DIY	40.427.344.921	33.423.771.779
Jumlah	**12.296.104.483.024**	**9.436.680.827.179**

- Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.652.864.361.849, mengalami penurunan sebesar Rp843.751.896.150 atau sebesar 9,93 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Piutang TKD Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer DBH yang terjadi pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 dengan nilai sebesar Rp9.548.604.939.434. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui Perdirjen Nomor 6 tahun 2020 sebesar Rp1.892.530.499.355 sehingga sisa saldo Piutang Transfer Dana Perimbangan per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp7.656.074.440.079. Dengan adanya PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021, maka terdapat perubahan angka Lebih Bayar PBB Bagian Daerah dan Pemungutan/Upah Pungut Migas TA 2019 disebabkan koreksi penerimaan dari Direktorat Jenderal Pajak yang baru disampaikan ke DJPK pada tahun 2021, sehingga sisa saldo Lebih Bayar *Audited* TA 2020 menjadi Rp7.652.864.361.849.
- Piutang TKD pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.602.812.676.254, nilai tersebut naik sebesar Rp3.696.171.878.853 bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019. Kenaikan Piutang TKD dikarenakan terdapat pengakuan piutang atas sisa dana TAYL di RKUD per 31 Desember 2020.
- Piutang TKD pada Satker Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.427.344.921 merupakan sisa dana DK DIY TA 2020 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III TA 2020, mengacu pada pasal 17 PMK No 15/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2020 sesuai dengan PMK No 15/PMK.07/2020.

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.860.765.163 dan Rp126.909.191.120, atau mengalami penurunan sebesar Rp109.048.425.957 atau 85,93 persen dibandingkan Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2019. Penurunan TKD Diestimasi disebabkan saldo per 31 Desember TA 2019 telah direklasifikasi menjadi Piutang Transfer Dana Perimbangan, dengan ditetapkannya PMK Nomor 113/PMK.07/2020, selain itu juga dikarenakan turunnya Pagu DBH TA 2020.

Piutang TKD Diestimasi merupakan piutang pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan yang dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

3) Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp44.334.660.173 dan Rp0 atau meningkat sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan oleh pengakuan piutang sisa Dana Desa yang baru pertama kali diakui pada tahun 2020 dikarenakan adanya kegiatan rekonsiliasi atas sisa Dana Desa pada RKD dan RKUD Tahun 2015 s.d. 2019. Piutang TKDD Lainnya sebesar Rp44.334.660.173 terdiri atas:

a) Sisa Dana Desa dari hasil rekonsiliasi yang belum disetor sebesar Rp44.290.401.618; dan
b) Setoran sisa Dana Desa pada daerah yang belum selesai rekonsiliasi yang disetorkan setelah tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.258.555.

Atas sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi yang belum disetorkan maupun yang disetorkan setelah tanggal 31 Desember 2020 tersebut menimbulkan adanya hak tagihan Tahun 2021 dan dicatat sebagai pengakuan piutang atas sisa Dana Desa tersebut.

d. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.818.843.674.284 dan Rp968.845.714.398. Rincian Piutang Subsidi pada BA 999.07 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Subsidi pada BA 999.07	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Kementerian Keuangan	1.666.967.241.095	954.684.699.264
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	1.708.000.000
Kementerian Pertanian	151.749.352.774	12.453.015.134
Kementerian BUMN	127.080.415	-
Jumlah	**1.818.843.674.284**	**968.845.714.398**

Jumlah Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.818.843.674.284 terdiri dari:

- Piutang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.666.967.241.095 merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero), yaitu realisasi subsidi listrik sebesar Rp49.655.080.902.612, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT

PLN (Persero) untuk Tahun Anggaran 2020 Beban Subsidi Listrik TA 2020 sebesar Rp47.988.113.661.517 sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas Subsidi Listrik sebesar Rp1.666.967.241.095.

- Piutang Subsidi Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp151.749.352.774 berupa sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp12.453.015.134 dan piutang atas kelebihan pembayaran subsidi pupuk berdasarkan BA Perhitungan TA 2020 oleh BPK pada PT Pupuk Kalimantan Timur sebesar Rp139.296.337.640.
- Piutang Subsidi pada Kementerian BUMN sebesar Rp127.080.415 merupakan koreksi atas nilai yang terlanjur tersalurkan dan akan disetorkan ke kas negara setelah dilakukan penagihan kembali kepada nasabah oleh PT Pegadaian.

e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.280.649.900.253 dan Rp279.500.611.672.

Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1) Kementerian Pertanian	293.784.797.984	278.094.108.217
2) SKK Migas	116.331.007	619.689.095
3) Otoritas Jasa Keuangan	458.678.521	786.814.360
4) MPP Kartu Prakerja	1.376.243.745	-
5) DJA	1.984.913.848.996	
Jumlah	**2.280.649.900.253**	**279.500.611.672**

1) Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Piutang CBN	272.107.336.166	258.706.584.419
Biaya Distribusi Benih CBN	16.832.310.441	14.315.134.984
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	33.543.420	71.678.605
Benih Rusak/Kadaluwarsa	-	189.102.252
Jumlah	**293.784.797.984**	**278.094.108.217**

2) Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp116.331.007 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.
3) Piutang Bukan Pajak pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp458.678.521 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.
4) Piutang Bukan Pajak pada MPP Kartu Prakerja sebesar Rp1.376.243.745 merupakan pengembalian atas belanja operasional Manajemen Pelaksana atas kegiatan Diseminasi dan

Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja melalui *platform* digital SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) sebesar Rp255.000, pengembalian atas realisasi tagihan sebesar Rp1.161.648.181 dan pengembalian atas realisasi tagihan sebesar Rp214.340.564.

5) Piutang Bukan Pajak pada DJA sebesar Rp1.984.913.848.996 merupakan pengakuan piutang dan penyisihannya yang berasal dari koreksi atas kelebihan pembayaran kompensasi pada tahun 2020 pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.

f. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp118.259.254.909.976 dan Rp110.856.185.961.726.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB	737.059.502.586	119.229.957.112
2) Piutang pada UAPBUN TK DJA	13.934.280.641.869	17.810.948.543.909
3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN	103.587.914.765.521	92.926.007.460.705
Jumlah	**118.259.254.909.976**	**110.856.185.961.726**

1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp737.059.502.586, terdiri dari:

a. Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar Rp133.182.204.691, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Keterlanjuran pembayaran pensiun (Uji Petik KC Semarang)	49.746.810
Keterlanjuran pembayaran pensiun (Uji Petik KC Bandung)	28.485.300
SUP Retur Bulan Desember 2020 taspen	14.676.643.627
SUP Kompensasi bulan Desember 2020 taspen	71.458.936.504
SUP lebih dari 3 bulan Desember 2020 taspen	177.117.839
Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2020 taspen	27.003.540.818
Kelebihan pendanaan bersama pensiun Ketigabelas tahun 2018 program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d. Desember 2020	887.016
Potongan utang non TGR (setoran Kasneg Non Dapem dan Susulan Desember 2020)	5.548.212.647
Jasa Giro bulan Desember 2020 Taspen	1.673.661.600
Setor dan Retur bulan Desember 2020 Asabri	4.424.570.055
Jasa Giro bulan Desember 2020 asabri	195.743.535
Potongan utang non TGR (Non Dapem Desember 2020) asabri	302.299.727
Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun Bulan Desember 2020 Asabri	7.642.359.213
Jumlah	**133.182.204.691**

b. Piutang pada satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp603.877.297.895 berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Piutang Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sampai dengan bulan September 2020	528.290.136.986
Piutang Pendapatan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan September 2020 yang akan diterima bulan Oktober 2020	75.587.160.909
Jumlah	**603.877.297.895**

2) Piutang pada UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp13.934.280.641.869 dan Rp17.810.948.543.909, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJA	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
Hasil Penjualan Minyak	4.301.142.368.677	9.929.120.618.652
Hasil Penjualan Gas	3.318.844.378.814	4.391.218.488.982
Overlifting KKKS	6.315.358.781.084	3.488.934.962.005
PNBP Migas Lainnya	(1.064.886.705)	1.674.474.270
Jumlah	**13.934.280.641.870**	**17.810.948.543.909**

**) Selisih Tahun 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan*

3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp103.587.914.765.521 dan Rp92.926.007.460.705 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	11.426.167.934	1.525.000
c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	102.378.727.731.955	91.729.365.842.690
d) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	21.045.512.713	19.924.740.096
Jumlah	**103.587.914.765.521**	**92.926.007.460.705**

a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919. Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan.

Mutasi Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q.

PT Pertamina EP hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp1.176.715.352.919 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Mutasi Piutang PNBP	Nilai
Saldo 1 Januari 2020	**1.176.715.352.919**
Mutasi Tambah:	
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selamaTahun 2020	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selamaTahun 2020	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2020	**1.176.715.352.919**

Untuk Saldo Piutang PNBP yang masih terdapat di Neraca, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Direktorat APK DJPb mengenai perlakuan akuntansi atas saldo *existing* Piutang PNBP dalam neraca terkait perbedaan dasar perhitungan nilai sewa aset eks Pertamina periode 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2016 dengan periode selanjutnya, dan disetujui untuk tetap menyajikan di neraca sampai dengan adendum perjanjian sewa. Adapun progres sampai dengan saat ini, DJKN telah mengirimkan surat klarifikasi besaran nilai sewa Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang Atas Sewa BMN Eks Pertamina oleh PT Pertamina EP. Atas surat tersebut, PT Pertamina EP telah menyampaikan jawaban melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021, meminta untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu untuk sewa BMN Eks Pertamina.

b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp11.426.167.934 yang berasal dari hasil operasional PT TLI bulan Oktober-Desember 2020. Saldo aset lancar neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.426.167.934.

c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp102.378.727.731.955 dan Rp91.729.365.842.690. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Aset Kredit Eks BPPN	83.439.360.043.921	72.671.187.612.605
2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	8.904.496.430.679	8.983.004.420.829
3) Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.034.871.257.355	10.075.173.809.256
Jumlah	**102.378.727.731.955**	**91.729.365.842.690**

1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp83.439.360.043.921 dan Rp72.671.187.612.605, terjadi kenaikan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp10.768.172.431.316 atau sebesar 14,82 persen. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.904.496.430.679 dan Rp8.983.004.420.829. Terjadi penurunan piutang pada Aset Kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp78.507.990.150 atau sebesar 0,87 persen. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.034.871.257.355 dan Rp10.075.173.809.256. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan.
Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI tahun 2006	7.762.763.678.751	11.888.938.781.558
Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 2019	-	(4.126.175.102.807)
Dikurangi : Pengembalian s.d. 31 Desember 2020	(37.251.106.496)	-
Saldo I	**7.725.512.572.255**	**7.762.763.678.751**
II. Eks Dana Penjaminan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	2.312.410.130.505	3.321.282.950.812
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2019	-	(1.008.872.820.307)
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2020	(3.051.445.405)	-
Saldo II	**2.309.358.685.100**	**2.312.410.130.505**
Jumlah Saldo I & II*)	**10.034.871.257.355**	**10.075.173.809.256**

Rincian Piutang Eks BDL dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS
Rincian Piutang KKKS Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.045.512.713 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BMN KKKS Yang Disewakan	Pihak Ketiga	Jumlah (USD)**	Jumlah (Rp)
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	1.413.347	19.935.254.498
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	68.393	964.676.213
Conoco Phillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	0	145.582.002
Jumlah*			**21.045.512.713**

**) Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD*

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjalan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp7,95 miliar

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.952.121.446 dan Rp9.717.488.844, mengalami penurunan sebesar Rp1.765.367.398 atau 18,17 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp6.298.904.501 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.952.121.446 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.653.216.945. Bagian Lancar TPA yang paling signifikan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.330.557.287 dan Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp194,03 miliar

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp194.035.354.942 dan Rp135.727.647.729, mengalami kenaikan sebesar Rp58.307.707.213 atau 42,96 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp128.872.264.166 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp194.035.354.942 dikurangi penyisihan sebesar Rp65.163.090.776. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Rp22,42 triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp22.427.918.639.595 dan Rp23.110.067.194.249, mengalami penurunan sebesar Rp682.148.554.654 atau 2,95 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp10.593.477.528.554 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp22.427.918.639.595 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.834.441.111.041.
Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.471.476.202.383	13.156.182.595.276
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	9.500.275.401.357	9.422.059.227.749
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual	456.167.035.855	531.825.371.224
Jumlah	**22.427.918.639.595**	**23.110.067.194.249**

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp6,58 triliun

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.586.899.675.108 dan Rp6.197.466.897.279, mengalami kenaikan sebesar Rp389.432.777.829 atau 6,28 persen.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun	773.382.049.559	773.382.049.559
Penerimaan pembiayaan untuk Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Bunga	201.079.332.886	163.956.994.507
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	1.264.479.651.029	981.421.820.890
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.338.958.641.635	4.276.206.032.324
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	14.000.000.000	7.500.000.000
Jumlah*	**6.586.899.675.109**	**6.197.466.897.280**

**) Selisih TA 2020 dan 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU Rp5,72 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.729.150.674.002 dan Rp7.496.739.323.375 mengalami penurunan sebesar Rp1.767.588.649.373 atau 23,58 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.505.635.611.743 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.729.150.674.002 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.185.486.314.634.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp5.028.767.901.767 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp700.382.772.235.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.263.232.399.914	906.397.053.501
BLU di Kementerian Pertahanan	181.410.933.267	577.812.458.813
BLU di Kementerian Keuangan	24.324.582.883	72.842.746.758
BLU di Kementerian Pertanian	187.810.000	1.263.092.570
BLU di Kementerian Perindustrian	2.413.294.500	2.374.533.340
BLU di Kementerian ESDM	47.436.988.139	51.562.153.259
BLU di Kementerian Perhubungan	53.474.163.986	30.607.002.504
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	120.433.817.216	-
BLU di Kementerian Kesehatan	1.940.359.415.383	3.793.028.145.586
BLU di Kementerian Agama	6.744.973.878	5.425.465.064
BLU di Kementerian PUPR	129.764.554	390.623.204
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	123.480.566.340
BLU di Kementerian KUKM	229.908.551.589	6.914.246.522
BLU di Kementerian Kominfo	146.683.595.775	140.575.236.835
BLU di Kepolisian RI	196.343.081.975	426.582.022.074
BLU di BPPT	17.111.339.221	26.263.798.295
BLU di BPKPBPB Batam	798.573.189.487	629.777.587.207
Jumlah Bruto	**5.028.767.901.767**	**6.795.296.731.872**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1.118.969.334.990)	(887.283.953.040)
Jumlah Neto	**3.909.798.566.777**	**5.908.012.778.832**

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	5.784.071.268	467.335.113
BLU di Kementerian ESDM	149.615.057	
BLU di Kementerian Perhubungan	13.170.913.062	5.409.389.147
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40.927.336.298	-
BLU di Kementerian Kesehatan	34.388.509.619	20.972.210.883
BLU di Kementerian Agama	41.105.360.715	3.202.798.191
BLU di Kementerian PUPR	513.852.087	397.644.873
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	63.946.480.183
BLU di Kementerian Kominfo	563.779.924.034	606.471.293.018
BLU di Kepolisian RI	-	12.250.000
Jumlah Bruto	**700.382.772.235**	**701.442.591.503**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(66.515.496.644)	(60.071.241.007)
Jumlah Neto	**633.867.275.591**	**641.371.350.496**

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

Piutang PFK Rp605,42 juta

Piutang PFK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp605.426.556 dan Rp912.908.715, mengalami penurunan sebesar Rp307.482.159 atau 33,68 persen. Piutang PFK berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara yang disebabkan hal berikut.

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

D.2.1.1.6.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp199,61 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp199.619.416.639.983 dan Rp187.276.271.979.301. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. Piutang Pajak	40.906.458.432.550	48.334.305.462.989
2. Piutang Bukan Pajak	141.437.716.674.728	121.874.606.531.172
3. Bagian Lancar TPA	1.653.216.945	1.771.196.206
4. Bagian Lancar TP/TGR	65.163.090.776	95.254.549.942
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	11.834.441.111.041	11.747.096.771.948
6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.188.499.282.309	4.275.882.272.997
7. Piutang dari Kegiatan BLU	1.185.484.831.634	947.355.194.047
Jumlah	**199.619.416.639.983**	**187.276.271.979.301**

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.906.458.432.550 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8.**
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.437.716.674.728 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp40.750.702.680.467 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp100.687.013.994.261. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.653.216.945 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR sebesar Rp31.652.786, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp401.011.871.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.163.090.776. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 13.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.834.441.111.041.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.188.499.282.309 merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.185.484.831.634 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	104.611.255.216	83.425.653.985
BLU di Kementerian Pertahanan	3.109.794.863	23.796.516.924
BLU di Kementerian Keuangan	4.077.393.387	2.297.097.171
BLU di Kementerian Pertanian	939.050	6.727.763
BLU di Kementerian Perindustrian	929.166.038	459.701.305
BLU di Kementerian ESDM	14.292.560.348	16.039.461.640
BLU di Kementerian Perhubungan	6.184.111.756	3.029.897.733
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	48.042.883.170	
BLU di Kementerian Kesehatan	438.287.207.167	457.019.134.086

BLU di Kementerian Agama	2.360.739.447	2.537.697.263
BLU di Kementerian PUPR	3.218.084	4.104.341
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	37.944.512.772
BLU di Kementerian KUKM	223.139.241.966	6.592.115.723
BLU di Kementerian Kominfo	183.598.056.088	180.191.717.160
BLU di Kepolisian RI	1.472.893.842	3.336.674.343
BLU di BPPT	727.488.471	469.268.994
BLU di BPKPBPB Batam	154.647.882.741	130.204.912.844
Jumlah	**1.185.484.831.634**	**947.355.194.047**

D.2.1.1.7 Persediaan

Persediaan Rp160,51 triliun

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 160.514.808.289.624 dan Rp123.450.089.924.835, mengalami kenaikan sebesar Rp37.064.718.364.789 atau 30,02 persen. Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Persediaan di K/L	160.512.514.584.112	123.447.381.818.805
2. Persediaan di BUN	2.293.705.512	2.708.106.030
Jumlah	**160.514.808.289.624**	**123.450.089.924.835**

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga
   Persediaan di K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp160.512.514.584.112. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp65.201.218.177.534, Kementerian PUPR sebesar Rp47.472.973.277.367, Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.774.985.123.705, Kementerian Perhubungan sebesar Rp9.522.086.670.412, dan POLRI sebesar Rp7.123.186.845.458. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 14.**
2. Persediaan di Bendahara Umum Negara
   Persediaan di BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.293.705.512 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan di BUN	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Otoritas Jasa Keuangan	167.428.690	181.089.590
b. SKK Migas	1.938.176.812	2.527.016.440
c. Istana Kepresidenan	188.100.000	-
Jumlah	**2.293.705.502**	**2.708.106.030**

   a. Persediaan pada OJK sebesar Rp167.428.690 merupakan Barang Konsumsi.
   b. Persediaan pada SKK sebesar Rp1.938.176.812 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
Barang Konsumsi	1.923.132.022	2.508.105.620
Barang untuk Pemeliharaan	15.044.790	18.910.820
Jumlah	**1.938.176.812**	**2.527.016.440**

c. Persediaan pada Istana Kepresidenan sebesar Rp188.100.000 terdiri dari 57 unit sepeda dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.300.000.

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.173.076.804.223.285 dan Rp3.001.201.131.873.675.
Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Rp3.173,07 triliun

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	142.048.490.744.777	97.162.978.446.357	46,20
Investasi Permanen	3.031.028.313.478.508	2.904.038.153.427.318	4,37
Jumlah	**3.173.076.804.223.285**	**3.001.201.131.873.675**	**5,37**

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp171.875.672.349.610 atau 5,73 persen. Kenaikan Investasi Jangka Panjang terutama berasal dari Investasi Permanen yang mengalami kenaikan sebesar Rp126.990.160.051.190 atau 4,37 persen. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan tertinggi sebesar 46,20 persen.

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp58,15 triliun

Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp58.150.909.777.379 dan Rp47.117.342.143.810, mengalami kenaikan sebesar Rp11.033.567.633.569 atau 23,42 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Bergulir	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	4.816.029.013.768	3.640.385.771.818
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.271.993.794.927	4.271.993.794.926
3. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	42.596.006.813.832	34.404.077.877.505
4. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H)	-	1.306.171.462.908
5. UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS)	17.912.211.670	18.019.135.685
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	4.560.647.415.498	3.152.741.173.643
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	458.088.556.880	323.952.927.325
8. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	1.430.231.970.804	-
Jumlah	**58.150.909.777.379**	**47.117.342.143.810**

1. Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.816.029.013.768 dan Rp3.640.385.771.818. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan

pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Piutang Dana Bergulir	4.442.539.240.870
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2020	373.489.772.898
Jumlah	**4.816.029.013.768**

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.271.993.794.927 dan Rp4.271.993.794.926 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

   Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
PT. Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang *Toll Road* / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok *Port Tollways* / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung *Tollway* / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	**4.271.993.794.927**	**4.271.993.794.927**

**) Selisih TA 2019 Rp1 karena pembulatan*

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp42.596.006.813.832 dan Rp34.404.077.877.505 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka

panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Penyaluran Dana Bergulir	
	* Tahun 2010	242.656.944.516
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824
	* Tahun 2015	6.055.232.493.208
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677
	* Tahun 2019	7.545.288.389.505
	* Tahun 2020	11.231.193.635.691
Total Penyaluran Dana Bergulir		**55.598.057.859.794**
2.	Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir	
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.877
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.057
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.361
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829
	* Pengembalian Pokok 2019	2.604.401.404.831
	*Pengembalian Pokok 2020	3.039.264.699.364
Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir		**13.002.051.045.962**
Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)		**42.596.006.813.832**

4. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp1.306.171.462.908. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA 999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber dari BA Kementerian Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

   Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Mentari Keuangan Nomor137/PMK.01/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dimana Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) akan terintegrasi kedalamnya, maka pada tanggal 29 September 2020 telah dilakukan serah terima Pengelolaan Dana Bergulir berupa Dana Reboisasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

kepada Menteri Keuangan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: BA.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2020 dan Nomor:BA-105/MK.05/2020.

Dana bergulir yang semula dikelola oleh BLU Pusat P2H telah dilakukan serah terima kepada BPDLH sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat BLU Pusat P2H kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama BPDLH Nomor:BA-51/P2H/KU/Set.1/11/2020 dan Nomor:BA-02/BPDLH/2020 tanggal 05 November 2020, sehingga saldo Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

5. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp18.019.135.685. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dilikuidasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang disebabkan adanya pelunasan piutang dari debitur/penerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.560.647.415.498 dan Rp3.152.741.173.643. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.407.906.241.855 atau 44,66 persen karena penambahan dana bergulir BLU PIP berupa pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp458.088.556.880 dan Rp323.952.927.325. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

8. Dana BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.430.231.970.804 dan Rp0. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan Satuan Kerja dibawah Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan memiliki tugas melakukan investasi berupa pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro.

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp5,26 triliun

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.263.474.230.423 dan Rp1.120.492.707.453 mengalami kenaikan sebesar Rp4.142.981.522.970 atau 369,75 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk

mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	1.092.760.209.926	1.014.120.465.977
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.041.142.318.299	21.359.968.975
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	61.295.924.258
4. KBLU pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.912.211.670	18.019.135.685
5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	4.308.229.336	5.697.212.558
6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	107.351.261.192	-
Jumlah	**5.263.474.230.423**	**1.120.492.707.453**

1. BLU LPDB KUMKM

Dana bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.092.760.209.926 dan Rp1.014.120.465.977. Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp620.200.273.721.

Pada periode pelaporan 31 Desember 2020, perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih LPDB-KUMKM per 31 Desember 2020 sudah sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan, dengan rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Tahun 2019 *(Audited)*	1.014.120.465.977
Biaya Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Semester I 2020	(171.988.213.992)
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester II 2020	(132.617.515.421)
Koreksi BPK Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	383.245.473.362
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 *(Audited)*	**1.092.760.209.926**

2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.041.142.318.299 dan Rp21.359.968.975. Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 dan 169/PMK.05/2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen dari saldo *outstanding* Investasi Non Permanen BLU. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2020
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang *Toll Road* / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382
PT. MTD-CPP *Expressway* / Cibitung-Cilincing	143.998.394.809
PT Cimanggis Cibitung *Toll Way* / Cimanggis-Cibitung	86.853.081.820
Jumlah	**4.041.142.318.300**

**) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan*

3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp61.295.924.258.

   Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 karena sudah diserahterimakan kepada BPDLH sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat BLU Pusat P2H kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama BPDLH Nomor:BA-51/P2H/KU/Set.1/11/2020 dan Nomor:BA-02/BPDLH/2020 tanggal 05 November 2020.

4. BLU pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

   Dana bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp18.019.135.685. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir.

   Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangl dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan kriteria diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan kriteria diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.308.229.336 dan Rp5.697.212.558. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	31 Desember 2020 (*Audited*)
Lancar	327.852.756
Kurang Lancar	321.347.887
Diragukan	211.105.520
Macet	3.447.923.442
Jumlah	**4.308.229.605**

**) Selisih sebesar Rp269 karena pembulatan*

6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp107.351.261.192 dan Rp0. BPDLH memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan PMK-168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	Nilai Outstanding	Tarif Penyisihan	Nominal Penyisihan
Lancar	1.277.354.970.328	0,5%	6.386.774.852
Kurang Lancar	56.291.274.524	10%	5.629.127.453
Diragukan	2.503.642.872	50%	1.251.821.436
Macet	94.083.537.451	100%	94.083.537.451
Lunas	(1.454.372)		
Jumlah	**1.430.231.970.803**		**107.351.261.192**

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp89,45 triliun

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp89.459.149.834.715 dan Rp51.422.761.195.268, mengalami kenaikan sebesar Rp38.036.388.639.447 atau 73,97 persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Investasi Pemerintah PEN Kementerian BUMN	5.900.000.000.000	-
2. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)	278.424.972.767	4.089.232.181
3. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	61.518.097.294.713	51.418.671.963.087
4. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI)	3.000.000.000.000	-
5. Pinjaman PEN Daerah	18.762.627.567.235	-
Jumlah	**89.459.149.834.715**	**51.422.761.195.268**

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.900.000.000.000. Investasi Pemerintah PEN baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Investasi Pemerintah PEN yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut.

   a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

b. Perum Perumnas sebesar Rp200.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia.
c. PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada UAIP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp278.424.972.767 dan Rp4.089.232.181 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.089.232.181
b) PT Karabha Digdaya, PT SEG, dan PT Aldevco	274.335.740.586	-
Jumlah	**278.424.972.767**	**4.089.232.181**

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.
b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2020 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.
Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan *(estate)* di Cimanggis, Kota Depok.
Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT SEG Sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tesebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata *(club house)* yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya". Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir.A.R. Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp61.518.097.294.713 dan Rp51.418.671.963.087, mengalami kenaikan sebesar Rp10.099.425.331.626 atau 19,64 persen. Kenaikan investasi jangka panjang tersebut terutama dikarenakan adanya penempatan pada Obligasi Negara sebesar Rp15.241.963.120.399.
Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1	Deposito	26.318.762.090.383	31.461.299.879.156
2	Obligasi menurut harga perolehan:		
	a. Obligasi Negara – HTM	32.562.335.204.330	17.270.372.083.931
	b. Obligasi Korporasi – HTM	100.000.000.000	0
	c. Obligasi Korporasi – AFS	2.537.000.000.000	2.687.000.000.000
	Jumlah	**61.518.097.294.713**	**51.418.671.963.087**

Nilai bruto/kotor investasi diperoleh dari harga perolehan portofolio investasi. Berdasarkan rincian portofolio investasi pada tabel di atas , LPDP menempatkan pokok dana abadi pada instrumen deposito, obligasi negara, dan obligasi korporasi. Saldo deposito sebesar Rp26.318.762.090.383 diperoleh dari saldo deposito secara menyeluruh per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.590.012.090.383 dikurangi dengan saldo reinvestasi PNBP sebesar Rp3.571.250.000.000.

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LDKPI per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000.000.000.

   Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 369/KMK.06/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Nomor ND-854/PB.6/2020, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.08/2020 tentang Pemindahan Dana Bantuan Internasional dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional ke Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas penerimaan pemindahbukuan saldo DKPI dan DBI senilai Rp3.000.000.000.000 dengan mendebit Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dan mengkredit Ekuitas. Investasi jangka Panjang Non Permanen BLU LDKPI sampai dengan 31 Desember2020 pada Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp3.000.000.0000.000.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya untuk Pinjaman PEN Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.762.627.567.235. Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II , PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

   Dari investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang di transfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

   Berdasarkan Laporan Tahunan Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur, jumlah perjanjian pinjaman PEN yang di tandatangani oleh daerah dalam kurun waktu 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari total Pemda sebanyak 28 Pemda (12 Provinsi, 12 Kabupaten, 4 Kota), dan terdapat 2 Pemda berulang yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

D.2.1.2.1.4 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Rp298,09 miliar

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp298.094.636.894 dan Rp256.632.185.268. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI - BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp294.005.404.713.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Unit Pengelola	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	294.005.404.713	252.542.953.087
Jumlah	**298.094.636.894**	**256.632.185.268**

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Rp2.403,27 triliun

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.403.279.903.397.823 dan Rp2.397.253.380.483.284, mengalami kenaikan sebesar Rp6.026.522.914.540 atau 0,25 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi PMP	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Persero	2.312.102.844.197.970	2.299.839.260.249.170
2. Perum	31.286.007.429.465	47.207.288.044.436
3. Lembaga Keuangan Internasional	26.495.780.373.991	22.637.252.581.227
4. Badan Usaha Lainnya	33.395.271.396.391	27.569.579.608.441
	2.403.279.903.397.817	**2.397.253.380.483.274**

**) selisih TA 2020 sebesar Rp6 dan TA 2019 sebesar Rp10 karena pembulatan*

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.312.102.844.197.970 dan Rp2.299.839.260.249.170, mengalami kenaikan sebesar Rp12.263.583.948.800 atau 0,53 persen. PMP pada Persero merupakan kepemilikan negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen sehingga nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas negatif (penihilan) terhadap 11 (sebelas) perseroan yang mengalami kerugian.

PMP pada Persero dikelola oleh 2 pihak, yaitu:

a. PMP Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.246.235.877.853.530 dan Rp2.239.910.324.407.980 mengalami kenaikan sebesar Rp6.325.553.445.550 atau 0,28 persen. Kenaikan nilai investasi permanen pada BUMN dipengaruhi oleh peningkatan ekuitas PLN sebesar Rp15,8 triliun antara lain akibat adanya tambahan PMN Rp5 triliun dan membukukan Laba Rp12,8 triliun.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Rincian PMP pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

b. PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp65.866.966.344.442 dan Rp59.928.935.841.191.

Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
PT Sarana Multigriya Finansial	100%	11.428.972.000.000	9.348.938.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	37.523.443.307.029	36.854.208.051.526
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	13.343.432.178.000	10.971.782.943.000
PT Geo Dipa Energi	94,5%	3.571.118.859.413	2.754.006.846.665
Total		**65.866.966.344.442**	**59.928.935.841.191**

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp31.286.007.429.465 dan Rp47.207.288.044.436. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2020, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 13 BUMN.

3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar

Rp26.495.780.373.991 dan Rp22.637.252.581.227. Saldo Investasi Pemerintah pada LKI mengalami kenaikan meskipun tidak ada transaksi setoran penambahan investasi pada tahun berjalan. Berdasarkan *Board of Governors Resolution No.270* tanggal 16 April 2020 perihal *2018 Conversion of Retained Earnings and General Capital Increase*, pihak LKI membagikan saham kepada Pemerintah RI yang berasal dari laba ditahan (*retained earning*) sebesar USD209.350.000 atau setara dengan Rp2.952.883.843.500 (kurs tengah BI tangal 31 Desember 2020). Kenaikan tersebut telah sesuai dengan surat jawaban konfirmasi saldo per 31 Desember 2020 dari pihak LKI.

Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp33.395.271.396.391 dan Rp27.569.579.608.441.

   Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	26.379.835.228.900	18.938.752.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	583.099.695	563.659.541
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	2.600.069.371.672	2.786.422.786.500
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.749.021.240.000	1.723.724.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.665.762.456.124	2.615.692.282.400
Penyertaan Pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) (UAKPA KND DJKN)	-	1.504.424.880.000
Jumlah	**33.395.271.396.391**	**27.569.579.608.441**

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp8,91 miliar

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.913.486.508 dan Rp8.913.486.508. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.913.486.508 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Kementerian Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp2.276.292.008 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp627,73 triliun

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp627.739.496.594.177 dan Rp506.775.859.457.526, mengalami kenaikan sebesar Rp120.963.637.136.651 atau 23,87 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Bank Indonesia	440.462.828.000.000	340.833.461.000.000
2. Lembaga Penjamin Simpanan	139.179.651.136.000	119.829.633.684.000
3. PMP Lain-lain	48.097.017.458.177	46.112.764.773.526
Jumlah	**627.739.496.594.177**	**506.775.859.457.526**

1. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp440.462.828.000.000 dan Rp340.833.461.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

2. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp139.179.651.136.000 dan Rp119.829.633.684.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

3. Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp48.097.017.458.177 dan Rp46.112.764.773.526.
   Rincian PMP Lain-lain disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

PMN Lain-lain	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	2.065.341.820.619	1.785.730.338.835
Universitas Airlangga	2.937.904.398.629	2.389.871.206.147
Institut Teknologi Bandung	2.432.907.208.258	2.300.032.853.702
Universitas Indonesia	4.086.601.501.961	3.622.738.562.275
Universitas Gajah Mada	3.929.093.493.142	3.990.498.155.083
Universitas Pendidikan Indonesia	894.810.128.263	876.900.781.690
Universitas Sumatera Utara	1.772.423.299.930	1.823.667.495.644
Universitas Padjajaran	1.226.640.045.055	1.191.246.206.323
Universitas Diponegoro	2.748.420.852.234	2.216.135.638.034
Universitas Hasanuddin	2.337.808.161.490	2.208.121.563.247
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.248.371.590.094	1.082.371.976.722
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.162.440.504.994	10.303.087.282.749
BPJS Ketenagakerjaan	12.254.254.453.508	12.322.362.713.074
Jumlah	**48.097.017.458.177**	**46.112.764.773.526**

a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN
   Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah.

Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.

b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

D.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Rp6.800,86 triliun

Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.800.865.200.181.311 dan Rp6.614.964.945.715.306. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.976.014.521.058.706 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.800.865.200.181.311 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp824.850.679.122.605. Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tetap	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / Penurunan (%)
Tanah	4.539.889.164.724.754	4.565.754.448.540.161	(0,57)
Peralatan dan Mesin.	706.966.249.385.561	643.684.366.617.610	9,83
Gedung dan Bangunan	395.808.354.433.284	365.443.028.479.378	8,31
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	940.895.010.856.918	852.163.469.354.018	10,41
Aset Tetap Lainnya	55.493.664.420.893	50.631.130.262.102	9,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.812.756.359.901	137.288.502.462.037	17,86
Jumlah Bruto	**6.800.865.200.181.311**	**6.614.964.945.715.306**	**2,81**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(824.850.679.122.605)	(665.369.543.223.892)	23,97
Jumlah Neto	**5.976.014.521.058.706**	**5.949.595.402.491.414**	**0,44**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp185.900.254.466.004 atau 2,81 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp24.524.253.897.864 atau sebesar 17,86 persen. Tanah mengalami penurunan sebesar 0,57 persen. Sementara nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp26.419.118.567.290 atau 0,44 persen karena adanya kenaikan nilai bruto Aset Tetap.

D.2.1.3.1 Tanah

Tanah Rp4.539,88 triliun

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.539.889.164.724.754 dan Rp4.565.754.448.540.161. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp25.865.283.815.407 atau sebesar 0,57 persen. Penurunan nilai tanah antara lain disebabkan adanya koreksi nilai tanah akibat pencatatan ganda pada Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

- Pencatatan ganda oleh Kementerian Sekretariat Negara yang juga dicatat oleh LPP TVRI sebesar Rp5.701.893.036.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di LPP TVRI;
- Pencatatan ganda oleh Badan Pusat Statistik yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp104.278.709.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Badan Pusat Statistik;
- Pencatatan ganda oleh Kepolisian Republik Indonesia yang juga dicatat oleh Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.496.393.822.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di POLRI;
- Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pertahanan;

Atas pencatatan ganda aset tanah yang masih ada pada beberapa K/L dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Dalam Negeri atas tanah seluas 5.943 m2 di Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat seluas 5.943 m2 dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mencatat kepemilikan tanah seluas 3.099 m2. Atas kedua tanah tersebut tetap disajikan sesuai dengan dokumen pendukung pada masing-masing Kementerian/Lembaga, hal ini dilakukan karena pencatatan telah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham sesuai dengan sertipikat masing-masing. Terkait dengan adanya dugaan irisan lahan seluas 374 m2 tersebut selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk pengukuran dan penentuan batas tanah.
2. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencatatan dengan nilai Rp1 per meter persegi, saat ini Kemendikbud menyajikan tanah dimaksud sebagai BMN tidak ditemukan dalam proses Penilaian Kembali. Penyelesaian atas pencatatan ganda tersebut dilakukan melalui mekanisme tindak lanjut atas BMN Tidak Ditemukan yang saat ini sudah dalam proses pelaksanaan penghapusan.

Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.452.256.556.019.200, Kementerian PUPR sebesar Rp861.022.746.759.175, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp624.043.348.021.233, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp362.926.207.366.365 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp307.637.163.028.720.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp706,96 triliun

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp706.966.249.385.561 dan Rp643.684.366.617.610. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp63.281.882.767.951 atau sebesar 9,83 persen. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp278.199.640.486.008, POLRI sebesar Rp138.359.711.217.093, Kementerian Perhubungan sebesar

Rp51.721.317.786.356, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.758.069.685.438 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp26.416.281.114.199.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp395,80 triliun

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp395.808.354.433.284 dan Rp365.443.028.479.378. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp30.365.325.953.906 atau sebesar 8,31 persen. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp82.450.443.365.592, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp44.682.540.415.084, Kementerian Agama sebesar Rp37.113.610.592.228, POLRI sebesar Rp33.635.963.393.373 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp27.501.018.488.532.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp940,89 triliun

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp940.895.010.856.918 dan Rp852.163.469.354.018. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp88.731.541.502.900 atau sebesar 10,41 persen. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp750.227.340.882.791, Kementerian Perhubungan sebesar Rp140.715.591.306.257, Kementerian Pertahanan sebesar Rp14.543.655.300.107, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp11.262.645.199.993, dan Kementerian ESDM sebesar Rp6.166.635.754.555.

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp55,49 triliun

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.493.664.420.893 dan Rp50.631.130.262.102. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.862.534.158.791 atau 9,60 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp36.227.381.061.615, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.515.900.395.684, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.193.461.656.743, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.744.591.656.093, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.738.722.790.707.

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap KDP Rp161,81 triliun

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp161.812.756.359.901 dan Rp137.288.502.462.037. Terjadi peningkatan nilai KDP dibandingkan tahun lalu sebesar Rp24.524.253.897.864 atau sebesar 17,86 persen disebabkan antara lain karena penyelesaian pembangunan dengan KDP lebih kecil dibandingkan dengan mutasi penambahan KDP. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp71.648.472.943.207, Kementerian Perhubungan sebesar Rp52.097.911.080.290, Kementerian Pertahanan sebesar Rp12.244.338.664.394, POLRI sebesar Rp8.459.739.301.599, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.387.520.151.209.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN dapat dilihat pada **Lampiran 20.**

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp824,85 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp824.850.679.122.605 dan Rp665.369.543.223.892. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin	449.715.857.392.944	387.859.172.729.229
Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.501.215.562.639	36.519.733.114.032
Akum Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	322.749.238.677.762	234.115.041.589.829
Akum Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.884.367.489.260	6.875.595.790.802
Jumlah	**824.850.679.122.605**	**665.369.543.223.892**

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp63,15 triliun

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp63.159.308.654.033 dan Rp60.567.534.435.197. Piutang Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp2.591.774.218.836 atau 4,28 persen. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp59.321.820.079.721 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp63.159.308.654.033 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.837.488.574.312 .

Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Tagihan Penjualan Angsuran	107.120.739.065	85.835.295.500
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	297.191.420.066	179.183.980.687
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	59.898.131.927.338	57.465.257.010.430
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.856.864.567.564	2.837.258.148.580
Jumlah Bruto	**63.159.308.654.033**	**60.567.534.435.197**
5. Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.837.488.574.312)	(3.678.558.906.969)
Jumlah Neto	**59.321.820.079.721**	**56.888.975.528.228**

D.2.1.4.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp107,12 miliar

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp107.120.739.065 dan Rp85.835.295.500, mengalami kenaikan sebesar Rp21.285.443.565 atau 24,80 persen. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp106.585.135.369 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp107.120.739.065 dikurangi penyisihan sebesar Rp535.603.696, merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR.

D.2.1.4.2 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan TGR Rp297,19 miliar

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp297.191.420.066 dan Rp179.183.980.687, mengalami kenaikan sebesar Rp118.007.439.379 atau 65,86 persen. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp60.289.702.823 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp297.191.420.066 dikurangi penyisihan sebesar Rp236.901.717.244. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 21.**

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman Rp59,89 triliun

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.898.131.927.338 dan Rp57.465.257.010.430, mengalami kenaikan sebesar Rp2.432.874.916.908 atau 4,23 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Pemberian Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca terdiri atas Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp59.274.130.865.450 dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar Rp624.001.061.888. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp58.977.760.211.123 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp59.898.131.927.338 dikurangi penyisihan sebesar Rp920.371.716.215.

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp2,85 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.856.864.567.564 dan Rp2.837.258.148.580, mengalami kenaikan sebesar Rp19.606.418.984 atau 0,69 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp177.185.030.407 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.856.864.567.564 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.679.679.537.157. Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Dewan Perwakilan Rakyat	15.115.704	10.700.000
2. Kementerian Hukum dan HAM	5.856.300.000	7.683.800.000
3. Kementerian Keuangan	925.823.061	1.110.987.674
4. Kementerian Perindustrian	92.062.253	398.062.253
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
6. Kementerian Kesehatan	1.197.853.374	356.191.881
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.326.274.000	23.442.095.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	107.370.306.936	109.286.679.242
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
11. BKKBN	8.228.183.016	8.238.183.016
12. BATAN	1.799.282.000	22.080.688
13. BNP2TKI	2.556.646.500	2.556.646.500
14. BUN	2.041.561.899.152	2.020.217.900.758
Jumlah Bruto	**2.856.864.567.564**	**2.837.258.148.580**
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.679.679.537.157)	(2.648.987.440.887)
Jumlah Neto	**177.185.030.407**	**188.270.707.693**

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp15.115.704 merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp5.856.300.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp925.823.061 merupakan hasil temuan BPK pada satker Pusdiklat PSDM untuk kegiatan Latsar tahun anggaran 2018.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp92.062.253 merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.197.853.374 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Ditjen P2P.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp23.326.274.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp107.370.306.936 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp648.052.353.168 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT. Bakrie Telecom dan PT Internux.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.228.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BATAN sebesar Rp1.799.282.000 merupakan piutang penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar Rp2.556.646.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
14. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.041.561.899.152 terdiri dari :
    a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp47.225.637.648 merupakan bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perum Perumnas.
    b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp1.994.336.261.504 merupakan piutang migas yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah

tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalty PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp30.449.563.690. Saldo piutang jangka panjang 2020 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

Piutang tersebut merupakan kekurangan pembayaran atas transaksi penjualan kondensat bagian negara yang harus dibayarkan oleh PT TPPI sebagai korporasi dalam suatu perikatan perdata. Atas transaksi penjualan kondensat bagian Negara tersebut, telah terdapat putusan hakim tipikor yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara dan diputuskan adanya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Piutang uang pengganti tersebut juga dilaporkan sebagai piutang bukan pajak pada Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2020. Dengan demikian, hak pemerintah atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara diakui secara perdata dan pidana pada pada LKPP Tahun 2020.

Piutang tersebut belum dilakukan eliminasi di tingkat LKPP, karena masih dalam proses koordinasi dengan Kejaksaan RI untuk mendapatkan kejelasan status piutang Pemerintah kepada PT TPPI. Berdasarkan notulensi hasil Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dirjen Anggaran dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada tanggal 24 Mei 2021, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Piutang Pemerintah pada PT TPPI yang dihasilkan dari sebuah proses hukum perdata berdiri sendiri dan tidak saling meniadakan dengan piutang pemerintah yang berasal dari proses hukum pidana. Dengan demikian, pencatatan piutang dari dua proses tersebut tetap dapat dilakukan.
2. Penyelesaian piutang pemerintah yang tercatat di BUN cenderung lebih dapat dieksekusi. Sedang penyelesaian piutang pemerintah yang berasal dari uang pengganti sebesar USD128,57 juta sangat bergantung pada terpidana.
3. Apabila terpidana tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk membayar secara tunai atau harta I aset terpidana tidak mencukupi untuk melunasi uang pengganti sebesar USD128,57 juta, maka sesuai dengan putusan hakim kepada terpidana akan dikenakan hukuman pengganti berupa hukuman kurungan badan. Oleh karena itu, terdapat potensi tidak dapat diselesaikan.
4. Dengan mempertimbangkan kondisi di alas, maka penyelesaian piutang pemerintah yang dilaksanakan secara hukum perdata akan memiliki potensi yang lebih jelas untuk dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai kepada pemerintah.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, telah diterbitkan Surat Dirjen Anggaran Nomor S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021 kepada Jamdatun, untuk mendapatkan pandangan hukum atas status hukum piutang Pemerintah kepada PT TPPI , khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Penjelasan dari aspek legalitas atas substansi pengenaan pidana tambahan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar USD128,57 juta. Dalam kaitan ini, apakah piutang pemerintah dalam bentuk kewajiban uang pengganti dimaksud dapat menggantikan atau menghilangkan piutang pemerintah kepada PT TPPI dari pelaksanaan proses hukum perdata.
b. Implikasi dari perspektif hukum apabila pencatatan piutang pemerintah dilaksanakan secara bersamaan atas piutang pemerintah kepada PT TPPI yang bersumber dari pelaksanaan hukum perdata, maupun pencatatan atas piutang pemerintah kepada terpidana berupa kewajiban uang pengganti yang bersumber dari pelaksanaan hukum pidana.
c. Dalam hal pelaksanaan pencatatan piutang pemerintah hanya dapat diakui salah satu (secara

perdata atau pidana), dari perspektif hukum preferensi mana yang lebih diutamakan oleh pemerintah bila dikaitkan dengan minimalisasi resiko dan optimalisasi tingkat ketertagihan piutang dimaksud.

D.2.1.4.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp3,83 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.837.488.574.312 dan Rp3.678.558.906.969.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Tagihan Penjualan Angsuran	535.603.696	429.176.478
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	236.901.717.244	113.466.641.127
3. Piutang Pemberian Pinjaman	920.371.716.215	915.675.648.477
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.679.679.537.157	2.648.987.440.887
Jumlah	**3.837.488.574.312**	**3.678.558.906.969**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp535.603.696 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp236.901.717.244. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR terdapat pada **Lampiran 21.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp920.371.716.215 merupakan Penyisihan pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp296.370.654.327 dan Piutang Kredit Program sebesar Rp624.001.061.888.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.679.679.537.157 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

   Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Dewan Perwakilan Rakyat	75.579	53.500
Kementerian Hukum dan HAM	29.281.500	38.419.000
Kementerian Keuangan	4.629.115	5.554.938
Kementerian Perindustrian	460.311	1.990.311
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
Kementerian Kesehatan	1.197.853.374	356.191.881
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.332.627.400	2.344.209.500
Kementerian Kelautan dan Perikanan	536.851.525	546.433.395
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
BKKBN	8.228.183.016	8.238.183.016
BATAN	1.799.282.000	110.403

BNP2TKI	2.556.646.500	2.556.646.500
BUN	1.999.058.825.269	1.970.964.826.875
Jumlah	**2.679.679.537.157**	**2.648.987.440.887**

D.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp1.562,48 triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.562.484.974.599.425 dan Rp1.264.178.048.235.928, mengalami kenaikan sebesar Rp298.306.926.363.500 atau sebesar 23,60 persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.225.100.226.220.041 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.562.484.974.599.425 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp318.753.044.535.507 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp18.631.703.843.877.
Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039	38,58
2. Aset Tak Berwujud	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235	10,91
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	365.366.108.391.343	192.908.799.354.854	89,40
4. Dana Penjaminan	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785	93,00
5. Dana Kelolaan BLU	34.019.184.774.266	53.731.897.004.834	(36,69)
6. Aset Lain-lain	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987	2,92
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	17.297.142.477.109	11.808.679.526.194	46,48
Jumlah Bruto	**1.562.484.974.599.425**	**1.264.178.048.235.928**	**23,60**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(318.753.044.535.507)	(281.071.678.085.183)	13,41
Amortisasi Aset Lainnya	(18.631.703.843.877)	(15.124.922.825.166)	23,19
Jumlah Neto	**1.225.100.226.220.041**	**967.981.447.325.579**	**26,56**

Kenaikan nilai Aset Lainnya terutama berasal dari Dana Penjaminan sebesar 93 persen, dan nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 26,56 persen.

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp402,41 triliun

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp402.415.771.649.117 dan Rp290.379.621.425.039, mengalami kenaikan sebesar Rp 112.036.150.224.078 atau 38,58 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.
Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp396.812.401.368.225 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp402.415.771.649.117 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp5.603.370.280.892.
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Kementerian Luar Negeri	191.546.318.428	191.485.201.428
2. Kementerian Pertahanan	12.374.567.854.641	11.781.300.377.000
3. Kementerian Perhubungan	13.615.982.537.144	4.074.137.057.481
4. Kementerian Kesehatan	2.121.420.000	2.121.420.000
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	140.477.822.000	130.883.109.000
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	374.509.359.561.779	272.523.350.587.662
8. Kementerian Pariwisata	804.837.530.000	804.837.530.000
9. Kementerian PPN/BAPPENAS	490.209.375.000	490.209.375.000
10. Badan PKPB2 Batam	72.437.831.953	167.065.369.296
Jumlah	**402.415.771.649.117**	**290.379.621.425.039**

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2020 sebesar Rp191.546.318.428. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan reklasifikasi atas tanah yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika. Kenaikan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disebabkan penyajian hasil penilaian kembali atas Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang sebelumnya di-*take out* pada satker konsolidasi.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.374.567.854.641. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada TNI AL berupa tanah yang disewakan pada Lantamal I Belawan, Lantamal III Jakarta, dan Lantamal V Surabaya.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.615.982.537.144. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara berupa aset pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui Skema Kerjasama Pemanfaatan.
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.121.420.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp140.477.822.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan Luas 1.954.180 m2 pada satuan kerja Biro Umum. Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor S.70/MK.6/WKN.07/KNL.02/2014 tanggal 6 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) sebagian BMN berupa Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang di-KSP-kan seluas 1.950.000 m2 dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m2. Sisa tanah seluas 4.180 m2 dioperasionalkan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp214.231.398.172. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah di Pulau Nipah, Batam milik Ditjen PRL yang dikerjasamakan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN.

7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2020 sebesar Rp374.509.359.561.779. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp612.226.551.900 dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp373.897.133.009.879.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2020 sebesar Rp804.837.530.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa tanah seluas 9.419 m^2 yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan Nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan *(Build, Operate, and Transfer)* Tanah dan Gedung Sapta Pesona B, antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan PT Sisindosat Lintas Buana Nomor 05/SL/PKS/1995 tanggal 21 Juni 1995, dan telah di-*addendum* pertama pada tanggal 25 Maret 2004 Nomor KS.001/1/10/Sesmen/KKP/04 dan Nomor 02/GLP/P.D/2004 serta *addendum* kedua tanggal 3 Maret 2008 Nomor 52/Khusus/SEKJEN/DKP/III/08 dan Nomor 001/GLP/D/08. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT Sisindosat Lintas Buana selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 26 September 2010 sampai 25 September 2040.
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2020 sebesar Rp490.209.375.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2, dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
10. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.437.831.953. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 merupakan aset berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jaringan, Irigasi, dan Jalan yang dikelola melalui kerja sama pada Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

D.2.1.5.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp44,02 triliun

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp44.029.306.388.378 dan Rp39.697.831.857.235, mengalami kenaikan sebesar Rp4.331.474.531.143 atau 10,91 persen. Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa *goodwill,* hak cipta, paten, *software,* lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tak berwujud lainnya. Nilai neto Aset Tak Berwujud sebesar Rp25.397.602.544.501 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp44.029.306.388.378 dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp18.631.703.843.877. Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Hak Cipta	113.140.796.975	134.952.663.763
2. Paten	248.384.852.831	216.994.339.458
3. Software	23.211.690.979.031	19.235.389.864.532
4. Lisensi	4.286.291.663.314	4.149.811.660.278
5. Hasil Kajian/Penelitian	7.118.879.386.042	7.068.040.271.117
6. Aset Tak Berwujud Lainnya	8.465.120.909.235	8.439.486.065.126
7. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	585.797.800.950	453.156.992.961
Jumlah Bruto	**44.029.306.388.378**	**39.697.831.857.235**
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(18.631.703.843.877)	(14.713.675.033.410)
Jumlah Neto	**25.397.602.544.501**	**24.984.156.823.825**

Aset Tak Berwujud pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Aset Tak Berwujud pada K/L	43.854.699.759.983	39.526.864.994.040
2. Aset Tak Berwujud pada BUN	174.606.628.395	170.966.863.195
Jumlah Bruto	**44.029.306.388.378**	**39.697.831.857.235**
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya:	**(18.631.703.843.877)**	**(14.713.675.033.410)**
K/L	(18.531.495.869.519)	(14.629.669.137.469)
BUN	(100.207.974.358)	(84.005.895.941)
Jumlah Neto	**25.397.602.544.501**	**24.984.156.823.825**

1. Aset Tak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.854.699.759.983 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.154.407.763.966 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.282.339.792.068;
   b. Kepolisian RI sebesar Rp6.616.737.267.050 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp5.626.148.849.756;
   c. Badan Intelijen Negara sebesar Rp4.793.510.595.122 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp3.390.383.470.362.
2. Aset Tak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp174.606.628.395 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
   a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp4.900.057.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
   b. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
   c. Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp86.179.505.333 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tak Berwujud disajikan pada **Lampiran 22.**

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp365.366.108.391.343 dan Rp192.908.799.354.854, mengalami kenaikan sebesar Rp172.457.309.036.489 atau 89,40 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp365,36 triliun

digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	17.526.099.859.332	9.241.146.075.657
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	351.598.431.226.842	184.868.272.082.194
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(3.758.422.694.831)	(1.200.618.602.997)
Jumlah	**365.366.108.391.343**	**192.908.799.354.854**

1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.526.099.859.332 dan Rp9.241.146.075.657. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
   a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.833.587.592.401. Dana tersebut paling signifkan berada pada UO Kemhan berupa dana *escrow* atas kontrak tahun 2020, dana *local content,* dan dana perwira FMS.
   b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.489.493.159.244. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbud adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP)), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan bantuan Bidikmisi yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank penyalur yang belum diaktivasi oleh siswa/mahasiswa penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2021 sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut tercatat pada Setjen, Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Ditjen Dikti, serta Ditjen Vokasi.
   c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2020 sebesar Rp680.211.889.105. Dana tersebut berupa Dana Lainnya sebesar Rp60.936.367.804 dan Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp619.275.521.301. Dana Lainnya berupa Dana yang dibatasi penggunaannya untuk pembayaran renovasi Gedung kantor (KJRI Johor Bahru dan KRI Tawau), dan pembayaran renovasi Wisma Duta Besar (KBRI Warsawa). Sementara Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan saldo Dana Kas Besi Perwakilan RI.
   d. Dana Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp6.230.681.398.855. Dana Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang masih dalam penguasaan pemerintah untuk membiayai penyaluran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) pada Satker Deputi Bidang Pembiayaan, dana tersebut sudah disalurkan ke rekening penerima BPUM namun belum dapat diaktivasi per 31 Desember 2020 dan masih dapat digunakan sampai dengan batas akhir waktu penyaluran yaitu tanggal 18 Februari 2021.
2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp351.598.431.226.842 dan Rp184.868.272.082.194. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.
   a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp97.041.188.152.177 dan Rp15.605.304.625.020, yang mengalami

peningkatan sebesar Rp81.435.883.527.157 atau 521,85 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2019.

Penyebab peningkatan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2020 utamanya berasal dari saldo Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* (510000287980), Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980), Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) dan Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980). Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya BA 999.00	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	3.545.565.088.089	302.239.103.987
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	1.190.550.902.019	779.706.666.210
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	213.459.899.200	72.325.400.000
4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	-	13.498.000.000
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	167.860.809.595	-
6) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	-	1.000.000.000.000
7) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	11.299.218.500.000	-
8) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.944.311.378.234	5.695.887.440.489
9) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
10) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	91.028.834.813	89.942.361.389
11) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	7.666.532.000.000	4.245.466.000.000
12) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	372.517.000.000	203.000.000.000
13) Rekening Cadangan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (519000149980))	-	2.000.000.000.000
14) Rekening Dana Abadi Penelitian (519000150980)	-	990.000.000.000
15) Rekening Dana Cadangan TNI AU dalam USD (609027411980)	11.737.197.599	32.720.173.800
16) Rekening Pembangunan Hutan (032901040474407)	-	167.860.809.595
17) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Public Goods* (510000287980)	53.075.668.740.190	-
18) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980)	4.040.662.132.888	-
19) Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980)	13.750.000.000.000	-
20) Rekening Pembangunan Hutan (032901040472405)	-	4.379.017.301.000
21) Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980)	15.000.000.000.000	-
22) Rekening Pembangunan Hutan (032901043639404)	4.379.017.301.000	-
23) Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah	(21.789.049.000.000)	(4.448.466.000.000)
Jumlah	**97.041.188.152.177**	**15.605.304.625.020**

Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah sebesar Rp21.789.049.000.000 terdiri dari:

1. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000166980) sebesar Rp7.666.532.000.000;
2. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) sebesar Rp372.517.000.000; dan
3. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) sebesar Rp13.750.000.000.000.

   Ketiga rekening tersebut menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset (dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya) sehingga nilai dana dibatasi penggunaannya pada BA BUN 999.00 dieliminasi sebesar Rp21.789.049.000.000.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat PKN melakukan jurnal penyesuaian pada SPAN yang mengakibatkan terdapat perubahan saldo pada Rekening PG dan NPG, yaitu:

1. Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi PG dan NPG berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung nomor BA-018/PB.3/2021 untuk PG sebesar Rp16.242.360.386.209 dan NPG sebesar Rp283.047.126.112.
2. Adanya *updating* data realisasi belanja yang bersumber dari pembiayaan PC-PEN dari Kementerian/Lembaga untuk *Public Goods* yang bertambah sebesar Rp945.803.947.601, yang akan dibuatkan Berita Acara Perhitungan Rampung untuk posisi *Audited* dan ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan dana dari Rek PG ke RKUN.

Berdasarkan hal tersebut, maka posisi saldo pada Rekening PG dan NPG per 31 Desember 2020 berubah sebagai berikut.

Realisasi	Posisi Saldo 31 Desember 2020 (Unaudited)	Perubahan	Posisi Saldo 31 Desember 2020 (Audited)
Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Public Goods (PC-PEN PG)	70.263.833.074.000	17.188.164.333.810	53.075.668.740.190
Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Non Public Goods (PC-PEN NPG)	4.323.709.259.000	283.047.126.112	4.040.662.132.888

Pemerintah masih dalam proses identifikasi dan rekonsiliasi atas sisa dana pengeluaran penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN tahun 2020 termasuk yang ada pada Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Public Goods* dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* per 31 Desember 2020, agar Pemerintah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021.

Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut untuk menempatkan dana modal awal Lembaga Pengelola Investasi yang telah dialokasikan pada UU APBN Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan operasional dan

kegiatan investasi Lembaga Pengelola Investasi. Sesuai KMK tersebut, dalam rangka pelaksanaan anggaran, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Penempatan dana tersebut dilakukan karena pada tanggal 31 Desember 2020, Pemerintah masih melakukan proses penyiapan organ LPI. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, organ pada LPI terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Sesuai dengan KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening Lembaga Pengelola Investasi telah dilakukan proses pemindahbukuan modal awal LPI dan diterima di rekening LPI pada tanggal 26 Februari 2021. Hal ini menjadi dasar pencatatan kembali Investasi Pemerintah.

b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.798.329.726.969, dengan rincian sebagai berikut :
   1) Cadangan Dana Reboisasi, yang merupakan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* (DNS) pada rekening satker UAIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp58.329.726.968;
   2) Dana di Rekening Investasi Pemerintah, merupakan Investasi Pemerintah yang berada di Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (RIPPEN) dan belum disalurkan kepada BUMN penerima investasi sebesar Rp13.750.000.000.000; Rencana penggunaan kas yang dibatasi penggunaanya tersebut akan dicairkan sesuai jadwal yang disepakati dalam dokumen perjanjian sebagai berikut.

(dalam miliar rupiah)

BUMN	Dana di RIP PEN	Jadwal Pencairan		
		2021	2022	2023
PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500	2.500	2.000	4.000
Perum Perumnas	450	450		
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000	2.895	759	346
PT Krakatau Steel (Persero)	800	800		
Jumlah	**13.750**	**6.645**	**2.759**	**4.346**

Sesuai Perjanjian Investasi antara Pemerintah dan Pelaksana Investasi terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh BUMN penerima investasi untuk penggunaan dana investasi yang ada pada Rekening Investasi Pemerintah antara lain, sebagai berikut.

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi pemerintah sebesar Rp8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Dana investasi tersebut diperjanjikan untuk digunakan sebagai modal kerja. Penerbian OWK seri A sebesar Rp1 triliun akan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi antara lain rencana restruktrurisasi perusahaan, *due diligence* atas aspek finansial dan legal, rencana penggunaan dana, persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dipenuhi. Persyaratan pencairan berikutnya antara lain persetujuan RUPS, Dekom, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan progres restrukturasi perusahaan.
2. Perum Perumnas : Penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) seri selanjutnya akan dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat sesuai seri A dan tambahan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, termasuk pemenuhan risiko keuangan sesuai perjanjian.
3. PT Perkebunan Nusantara III : Pencairan pertama dilakukan setelah penerima investasi

menandatangani perjanjian dengan kreditur PTPN Group sehubungan dengan Rencana Transformasi Keuangan Jangka Panjang (RTKJP) dan telah berlaku efektif dan mengikat seluruh kreditur PTPN Group. Untuk Kemudian Penerima investasi akan menerima Dana IP PEN sesuai dengan hasil verifikasi konsultan pengawas atas rencana penggunaan dana yang dimasukkan dalam RAB IP PEN dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya serta penerima investasi tidak dalam keadaan lalai terhadap ketentuan perjanjian IP PEN, termasuk menjaga risiko keuangan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian IP PEN.

4. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk OWK Seri B sebesar Rp800 miliar dengan persyaratan pencairan antara lain persetujuan Dekom, RUPS, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan perbaikan kinerja perusahaan.

3) Dana Lainnya, terdiri dari dana yang dititipkan pada rekening BLU LPDP sebesar Rp8.990.000.000.000 sesuai dengan KMK 594/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dan Pemindahbukuan Dana Abadi Penelitian Tahun Anggaran 2019 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 mengamanatkan bahwa bentuk, skema dan cakupan bidang masing-masing dana abadi diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Pelaksanaan amanat tersebut telah dimulai dan diinisiasi melalui revisi/perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (Perpres 12/2019). Dalam proses penyusunan dan pembahasan substansi perubahan Perpres 12/2019 tersebut, terdapat substansi yang secara signifikan merubah secara keseluruhan Perpres 12/2019. Saat ini proses perubahan Perpres 12 Tahun 2019 tersebut telah dalam tahapan pembahasan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

c. Dana yang dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.990.945.109.569. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi berada pada:

1. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.545.523.579.930, merupakan kelebihan pembayaran subsidi bunga/margin program PEN yang didistribusikan melalui bank/Lembaga penyalur subsidi sebesar Rp56.763.527.645 dan beban subsidi yang sudah bayarkan kepada bank penyalur tetapi belum disalurkan kepada debitur sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.488.760.052.285;
2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan, dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp28.142.000.000;
3. Sekretariat Kementerian BUMN sebesar Rp1.228.894.335.500;
4. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM sebesar Rp188.385.194.139, merupakan realisasi belanja subsidi bunga KUR yang gagal dilakukan pembukuan ke rekening pinjaman debitur.

d. Dana yang dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 merupakan dana yang dibatasi penggunaannya yang terdapat di dalam rekening pemerintah lainnya MPPKP berasal dari dana biaya pelatihan, biaya mencari kerja, dan

pembayaran insentif survei yang belum diserahkan kepada masyarakat dan *digital platform*.

e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp193.232.383.165.340 dan Rp169.098.380.731.016 atau mengalami peningkatan sebesar Rp24.134.002.434.324, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652
2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.786.640.129.813	17.669.911.410.364*)
Jumlah	**193.232.383.165.340**	**169.098.380.731.016**

*) Saldo AIP per 31 Desember 2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri 2019 *Unaudited*.

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Saldo Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yaitu:

1) Adanya kenaikan nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Taspen (Persero) dari sebesar Rp151.428.469.320.652 pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp171.445.743.035.527 pada 31 Desember 2020 terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan hasil investasi dan nilai investasi AIP yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero), sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Taspen (Persero).
2) Adanya kenaikan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Asabri (Persero) dari Rp17.669.911.410.364 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp21.797.937.705.714 per 31 Desember 2020 dipengaruhi kenaikan hasil dan nilai investasi yang dikelola PT Asabri (Persero) sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Asabri (Persero).

f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR)

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Dana ASR) per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2,062,851,080.02 atau Rp29.096.514.483.667 (Kurs USD Rp14.105) yang merupakan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas. Dari nilai tersebut, sebesar USD2,055,408,656,20 atau Rp28.991.539.095.686 dikelola oleh SKK Migas yang disimpan pada Rekening Dana ASR di Bank Mandiri, BNI dan BRI; dan sebesar USD7,442,423.82 atau Rp104.975.387.981 dikelola oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang disimpan pada Rekening Dana ASR di Bank Syariah Mandiri atas ASR Wilayah Kerja NSB yang dialihkelolakan dari SKK Migas kepada BPMA pada bulan Agustus tahun 2019. Rekening Dana ASR merupakan Rekening Bersama (rekening yang dikelola SKK Migas/BPMA dan KKKS untuk menampung dana ASR) yang dibuka dengan nama "ASR Wilayah Kerja" berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama. Selain itu, dari nilai sebesar USD2,062,851,080.02 tersebut, sebesar USD9,824,732.11 atau Rp138.577.846.411 merupakan Nilai Dana ASR dengan mekanisme KBH – *Gross Split* dan sisanya merupakan Nilai Dana ASR dengan mekanisme PSC- *Cost Recovery*.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas/BPMA dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan

usaha hulu migas. Kegiatan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (*cost recoverable*). Dana ASR dapat diajukan *cost recovery* pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) telah diatur sebelumnya dalam S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaanya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker. Pada LKBUN Tahun 2020, terdapat perubahan kebijakan akuntansi pencatatan dana ASR berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas yang tertuang dalam Notulensi Rapat tanggal 21 Mei 2021 tentang Pembahasan Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration* (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration* Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut :

a. Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat kami nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaanya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;
b. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
c. Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (Cost Recovery) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);

d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;

e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.

Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut, maka Dana ASR yang sebelumnya disajikan pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dan dikonsolidasikan pada LKBUN melalui Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL, mulai Tahun 2020 disajikan langsung pada LKBUN sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Pada Tahun 2020, Pemerintah memberikan insentif relaksasi berupa penundaan penyetoran Dana ASR sebesar USD38.900.339,70 kepada 30 KKKS.

3) Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp3.758.422.694.831 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

Dana Penjaminan Rp8,58 triliun

Dana Penjaminan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.586.595.521.620 dan Rp4.449.053.184.785, mengalami kenaikan sebesar Rp4.137.542.336.835 atau 93 persen. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Dana Penjaminan pada K/L	547.546.521.620	587.184.785
2. Dana Penjaminan pada BUN	8.039.049.000.000	4.448.466.000.000
Jumlah	**8.586.595.521.620**	**4.449.053.184.785**

a. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp547.546.521.620 terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan yang digunakan sebagai penampungan kas dari dana penjaminan pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), bahwa penanggung jawab P3MI wajib menyerahkan sertifikat atau deposito asli atas nama Menteri q.q. P3MI sebesar Rp1.500.000.000 kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja di Kemenaker.
Rincian Dana Penjaminan pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Uraian	Nilai (dalam rupiah)
Deposito jaminan 328 P3MI Aktif Tahun 2020 yang sertifikat depositonya disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker q.q. nama P3MI	491.921.521.620
Deposito jaminan 111 P3MI yang dicabut izinnya pada tahun 2020, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan kew ajiban. Deposito tersebut atas nama Kemnaker q.q. nama P3MI	55.125.000.000
Deposito jaminan 1 P3MI yang dicabut izinnya pada 2019, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker	500.000.000
Total	**547.546.521.620**

b. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.039.049.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Penjaminan pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	7.666.532.000.000	4.245.466.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	372.517.000.000	203.000.000.000
Jumlah	**8.039.049.000.000**	**4.448.466.000.000**

a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp7.666.532.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
   1) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
   2) Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
   3) Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
   4) Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
   5) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
   6) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;
   7) Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
   8) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
   9) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;
   10) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.

b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar

Rp372.517.000.000 merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Pada Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari Satker Direktorat PRKN (999986) ke Satker Direktorat EAS (970974).

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU Rp34,01 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.019.184.774.266 dan Rp53.731.897.004.834, mengalami penurunan sebesar Rp19.712.712.230.568 atau 36,69 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarannya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.
Dana Kelolaan BLU terdiri dari Dana Kelolaan BLU sebesar Rp9.581.161.805.699 dan Dana Jangka Panjang sebesar Rp24.438.022.968.567.

a. Dana Kelolaan BLU
Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	1.459.107.186.168	651.036.122.495
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	0	708.411.236.092
3. BLU LPDB KUMKM	1.882.337.457.583	1.756.677.326.054
4. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.324.102.406.130	45.742.466.421.161
5. BLU Pusat Investasi Pemerintah	3.439.352.584.502	3.847.258.826.357
6. BLU LPMUKP	891.911.443.120	1.026.047.072.675
7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	584.350.728.196	0
Jumlah	**9.581.161.805.699**	**53.731.897.004.834**

1. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.459.107.186.168. Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam **Lampiran 30.**
2. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.
3. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.882.337.457.583. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
   a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp519.044.302.000;
   b. Disetujui komite sebesar Rp361.019.187.500;
   c. Sisa sebesar Rp1.001.873.968.083 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2021;
4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.324.102.406.130. Dana Kelolaan BLU LMAN disajikan sebagai berikut. Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	**45.742.466.421.161**
a. Reklasifikasi dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN ke pos dana jangka panjang	(44.352.257.170.072)
b. Penggunaan dana untuk *upgrade* aset eks PPA	(6.795.880.141)
c. Penggunaan dana untuk *upgrade* aset eks HTBI dan penebusan HTBI ke Bank Indonesia	(56.103.767.388)
d. Penggunaan dana untuk *upgrade* aset eks Pertamina	(2.969.070.792)
e. Pengembalian kelebihan pembayaran *upgrade* oleh penyedia jasa *upgrade* aset eks PPA	(238.126.638)
Saldo per 31 Desember 2020	**1.324.102.406.130**

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur yang pengadaan tanahnya merupakan bagian dari belanja modal Kementerian/Lembaga yang terkait dengan PSN. Sumber pendanaan belanja modal tersebut berasal dari Dana Kelolaan LMAN yang berfungsi sebagai dana cadangan yang dibentuk melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA 2021 serta RUU APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.

5. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.439.352.584.502 dan Rp3.847.258.826.357. Terjadi penurunan sebesar Rp407.906.241.855.

6. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp891.911.443.120. Jumlah Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp891.911.443.120 setelah LPMUKP melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp602.063.073.490 dikurangi dengan Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp143.974.516.610.

7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
   Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPDLH per 31 Desember 2020 sebesar Rp584.350.728.196.

b. Dana Jangka Panjang
   Dana Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.438.022.968.567 dan Rp0. Dana Jangka Panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional yang dikelola oleh LMAN. Pada tahun 2020, melalui surat Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

Mutasi Dana Jangka Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	**0**
Reklasifikasi dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN ke pos dana jangka panjang	44.352.257.170.072
Penggunaan di tahun 2020 untuk penggantian dana badan usaha	(16.166.602.186.499)
Penggunaan di tahun 2020 untuk pembayaran langsung	(3.747.632.015.006)
Saldo per 31 Desember 2020	**24.438.022.968.567**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor KU.05.03-P/248 tanggal 30 Maret 2021, dari tahun 2016 hingga 31 Desember 2020, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah merealisasikan dana talangan pengadaan tanah PSN (DTT) sebesar Rp63.786.399.133.021,00. Sedangkan, berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air nomor PW.02.03-AJ/381 tanggal 25 Mei 2021, diketahui bahwa realisasi dana talangan tanah (DTT) bendungan hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp990.742.604.744.

(dalam rupiah)

No.	Jenis PSN	Realisasi Dana Talangan Tanah (DTT) Badan Usaha per 31 Desember 2020	Penggantian DTT oleh LMAN per 31 Desember 2020	Selisih	Keterangan
1.	Jalan Tol	63.786.399.133.021	56.055.523.173.975	7.730.875.959.046	Surat Kepala Badang Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor KU.05/03-P/248 tanggal 30 Maret 2021
2.	Bendungan	990.742.604.744	988.706.939.044	2.035.665.700	Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air nomor PW.02.03-AJ/381 tanggal 25 Mei 2021
Jumlah		**64.777.141.737.765**	**57.044.230.113.019**	**7.732.911.624.746**	

Selisih antara realisasi DTT Badan Usaha dengan penggantian DTT oleh LMAN sebesar Rp7.732.911.624.746,00 yang terdiri dari Rp7.730.875.959.046,00 untuk jalan tol dan Rp2.035.665.700,00 untuk bendungan. Atas hal dimaksud, LMAN akan melakukan rekonsiliasi dengan Badan Usaha terkait serta BPJT dan/atau Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Lebih lanjut, Badan Usaha akan menagihkan nilai tersebut melalui K/L kepada LMAN sesuai dengan regulasi PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp690,77 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp690.770.865.397.592 dan Rp671.202.165.882.987, mengalami kenaikan sebesar Rp19.568.699.514.605 atau 2,92 persen. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp377.621.191.142.977 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp690.770.865.397.592 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp313.149.674.254.615.
Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Aset Lain-lain pada K/L	71.429.632.975.833	83.922.411.398.055
2. Aset Lain-lain pada BUN	619.341.232.421.759	587.279.754.484.932
Jumlah Bruto	**690.770.865.397.592**	**671.202.165.882.987**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
K/L	(33.515.390.537.306)	(34.775.745.226.986)
BUN	(279.634.283.717.309)	(245.910.489.788.749)
Jumlah Neto	**377.621.191.142.977**	**390.515.930.867.252**

1. Aset Lain-lain pada K/L
   Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.429.632.975.833 dan Rp83.922.411.398.055. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.914.242.438.527 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp71.429.632.975.833 dikurangi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-lain pada K/L sebesar Rp33.515.390.537.306. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp32.119.006.615.739 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Cipta Karya.
   b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp12.842.175.264.211 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
   c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.291.218.701.775 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Mabes TNI AD.

   Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 24**.

2. Aset Lain-lain pada BUN
   Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp619.341.232.421.759 dan Rp587.279.754.484.932. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp339.606.740.730.092 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp619.341.232.421.759 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp279.634.283.717.309.

Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.03)	29.414.277.182.843	29.273.033.202.796
2.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.99)	589.926.955.238.916	558.006.721.282.136
	Jumlah	**619.341.232.421.759**	**587.279.754.484.932**

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)
Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp29.414.277.182.843 dan Rp29.273.033.202.796.

Rincian Aset Lain-Lain BUN Pengelolaan Investasi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. **UAIP**		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
b. **BLU LMAN**		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	199.263.196.205	191.885.476.870
b) Aset Eks Pertamina	28.621.155.620.685	28.511.710.609.563
c) Aset Lain-lain BUN	580.623.762.972	556.202.513.382
Jumlah	**29.414.277.182.843**	**29.273.033.202.796**

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi sasaran program ini yang pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam pemberdayaannya.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA
Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.263.196.205. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN

Eks kelolaan PT PPA yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Berdasarkan penyerahkelolaannya, rincian aset eks PPA adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Bruto	Akumulasi Penyusutan
1.	10 Unit Apartemen di Puri Casablanca	117.534.757.489	26.876.629.183
2.	12 unit aset di Taman Anggrek, Slipi, dan Kelapa Gading	15.866.375.563	1.966.527.882
3.	87 aset (ruko, apartemen, dan tanah)	65.862.063.153	-
	Jumlah	**199.263.196.205**	**28.843.157.065**

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus *Audited* pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.621.155.620.685. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada tahun 2020 merupakan pekerjaan *upgrade* (fisik dan non fisik) serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun. Rincian nilai Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2019	Mutasi	31 Desember 2020
Aset Kilang:			
Kilang Gas Arun	10.821.108.475.290	1.668.245.521	10.822.776.720.811
Kilang LNG Badak	16.302.865.123.473		16.302.865.123.473
Kawasan Ciperna, Cirebon, Jawa Barat	-	106.475.940.330	106.475.940.330
Sub Total Aset Kilang	27.123.973.598.763	108.144.185.851	27.232.117.784.614
Aset Properti:			
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	1.233.433.545.000	-	1.233.433.545.000
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	5.569.314.800	1.300.825.271	6.870.140.071
Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	35.037.558.000	-	35.037.558.000
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	36.505.456.000	-	36.505.456.000
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	77.191.137.000	-	77.191.137.000
Sub Total Aset Properti	1.387.737.010.800	1.300.825.271	1.389.037.836.071
Total	**28.511.710.609.563**	**109.445.011.122**	**28.621.155.620.685**

Pada 2020, LMAN memperoleh tambahan aset kelolaan yang berasal dari Aset eks Pertamina berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang terletak di Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

c) Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN per 31 Desember 2020 sebesar Rp580.623.762.972. Aset Lain lain BUN tersebut terdiri dari Tanah dari hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BUN BLU LMAN	31 Desember 2020 *(Audited)*
Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	0
Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	580.623.762.972
Jumlah	**580.623.762.972**

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak ada aset Tanah Infrastruktur PSN per 31 Desember 2020. Aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Rincian mutasi saldo tanah PSN selama periode tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Tanah PSN	Nilai (dalam rupiah)
Saldo Awal 1 Januari 2020	**0**
Pengakuan aset tanah PSN dari hasil verifikasi BPKP atas dana badan usaha terlebih dahulu	10.755.987.555.910
Pembayaran langsung tanah PSN	3.766.644.434.006
Penggantian dana talangan badan usaha tanpa melalui verifikasi BPKP	2.986.472.704.491
Penghentian pengakuan aset tanah PSN dengan pengesahan belanja modal oleh KL atas aset tanah PSN yang baru diakui di 2020	(16.943.776.500.687)
Penghentian pengakuan aset tanah PSN yang terverifikasi BPKP di 2020 namun belum dilakukan penggantian	(565.328.193.720)
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**0**

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2020 sebesar Rp580.623.762.972. Rincian mutasi Aset Eks HTBI selama periode tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Aset Eks HTBI	Nilai (dalam rupiah)
Saldo Awal 1 Januari 2020	**556.202.513.381**
Pengembangan/*upgrade asset*	327.190.838
Penebusan HT untuk 63 sertipikat aset eks bank beku operasi/bank beku kegiatan usaha kepada Bank Indonesia	55.776.576.150
Mutasi kurang Aset eks HTBI berasal dari penarikan aset oleh Pengelola Barang	(31.682.517.400)
Saldo Akhir 31 Desember 2020*	**580.623.762.969**

**) selisih Rp3 karena pembulatan*

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp589.926.955.238.916 dan Rp558.006.721.282.136.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Aset KKKS	526.182.856.889.892	497.614.873.512.269
2) Aset Eks BPPN	9.701.575.914.089	7.931.288.550.708
3) Aset Eks Pertamina	14.044.808.672.039	13.487.935.402.320
4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	81.736.349.600	78.520.698.400
5) Aset BMN *Idle*	75.042.226.330	74.778.884.370
6) Aset PKP2B	39.726.519.312.265	38.704.267.850.386
7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN	114.415.874.701	115.056.383.683
Jumlah	**589.926.955.238.916**	**558.006.721.282.136**

1) Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp526.182.856.889.892 dan Rp497.614.873.512.269. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp296.036.036.382.160 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp526.182.856.889.892 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp230.146.820.507.732 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Aset Tanah	**17.224.950.542.877**	**10.069.984.072.287**
b) Aset Non-Tanah	**508.957.906.347.016**	**487.544.889.439.982**
1. HBM	481.877.794.960.506	462.116.330.419.664
2. HBI	126.503.013.699	109.937.191.954
3. Material Persediaan	26.953.608.372.810	25.318.621.828.364
Jumlah Bruto	**526.182.856.889.892**	**497.614.873.512.269**
Akumulasi Penyusutan	(230.146.820.507.732)	(198.145.865.990.360)
Jumlah Neto	**296.036.036.382.160**	**299.469.007.521.909**

a) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.224.950.542.877. Mutasi Aset KKKS berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2020 *(Audited)*
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**10.069.984.072.287**
Mutasi Tambah	**7.236.063.916.759**
Penambahan Aset baru	259.816.124
Penambahan aset tahun sebelumnya	120.301.303.217
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	245.824.000
Koreksi Tambah Hasil Sertipikasi	61.168.436.603
Koreksi Alih kelola KKKS Terminasi	6.420.675.262
Koreksi Oleh SKK Migas	4.967.329.705
Koreksi Oleh BPMA	55.302.850.378
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	22.888.889.520
Reclass dari Calk	6.964.508.791.950
Mutasi Kurang	**81.097.446.169**
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	1.569.765.835
Koreksi Kurang Hasil Sertipikasi	61.168.436.603
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	6.530.579.845
Koreksi Alih kelola KKKS Terminasi	6.420.675.262
Koreksi Oleh SKK Migas	5.407.988.624
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**17.224.950.542.877**

Penjelasan atas mutasi aset tanah KKKS adalah sebagai berikut.

1. Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2019 *(Audited).* Saldo awal aset tanah KKKS sebesar Rp10.069.984.072.287.
2. Mutasi tambah sebesar Rp7.236.063.916.760 berasal dari:
   a. Terdapat penambahan aset baru pada KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp259.816.124;
   b. Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2020 pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp119.220.794.719;
   c. Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2020 pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp1.080.508.498;
   d. Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh KKKS Montd'or Oil Tungkal sebesar Rp245.824.000;
   e. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan 5 *line item* BMN Tanah menjadi 2 line/sertipikat tanah oleh KKKS Eni Muara Bakau sebesar Rp4.667.604.083;
   f. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan *line item* BMN Tanah hasil sertipikasi oleh KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp56.500.832.520;
   g. Terdapat koreksi tambah dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED sebesar Rp6.420.675.262;
   h. Terdapat koreksi dikarenakan *update* nilai perolehan berdasarkan dokumen kepemilikan yang dikuasai KKKS VICO CBM sebesar Rp960.000;
   i. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan aset sebelumnya tercatat di KKKS VICO LLC yang seharusnya tercatat di VICO CBM sebesar Rp509.053.105;
   j. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan kesalahan pencatatan nilai pembayaran pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp4.457.316.600;
   k. Terdapat koreksi dari BPMA dikarenakan kesalahan pencatatan saldo awal pada KKKS

PT Medco E&P Malaka sebesar Rp55.302.850.378;

l. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp19.761.103.520;

m. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp3.127.786.000;

n. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp6.829.251.000;

o. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp3.875.478.727.414;

p. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp2.130.140.954.000;

q. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp952.059.859.537.

3. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp81.097.446.169 berasal dari:

a. Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp1.569.765.834,62;

b. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan 5 *line item* BMN Tanah menjadi 2 line/sertipikat tanah oleh KKKS Eni Muara Bakau sebesar Rp4.667.604.083;

c. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan *line Item* BMN Tanah hasil sertipikasi oleh KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp56.500.832.520;

d. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS ConocoPhillips (Grissik) sebesar Rp550.493.124;

e. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp363.000.000;

f. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp2.336.270.573;

g. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp3.280.816.148;

h. Terdapat koreksi kurang dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED sebesar Rp6.420.675.262;

i. Terdapat koreksi kurang dikarenakan BMN Tanah VICO CBM tercatat di VICO LLC sebesar Rp2.337.160.688;

j. Terdapat koreksi dikarenakan *update* nilai perolehan berdasarkan dokumen kepemilikan yang dikuasai KKKS VICO CBM sebesar Rp271.782.211;

k. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan kesalahan pencatatan nilai pembayaran pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp2.799.045.725.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset KKKS dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 3.**

b) Aset KKKS Non Tanah

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2020 sebesar Rp481.877.794.960.506. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Harta Benda Modal (HBM)	31 Desember 2020 *(Audited)*
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**462.116.330.419.664**
Mutasi Tambah:	**34.548.320.301.266**
Penambahan Aset Baru pada saat *Place Into Service* (PIS)	3.771.056.005.119
PIS Tahun Sebelumnya	6.800.164.894.663
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	11.415.065.045.582
Transfer in	208.645.633.981
Selisih pembulatan	4.140.309
Koreksi Tambah SKK Migas	4.420.612.328.164
Subsequent Expenditure (SE)	568.443.870.568
Alih terima	7.360.337.315.143
Perbaikan Kurs	3.991.067.737
Mutasi Kurang:	**14.786.855.760.424**
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	2.660.247.297.505
Transfer Out	211.026.520.531
Selisih pembulatan	3.879
Koreksi Kurang SKK Migas	4.512.380.955.132
Perbaikan Kurs	1.730.916.570
Dalam Proses Penghapusan/penjualan	13.788.158.829
Penghapusan	27.344.592.835
Alih Serah	7.360.337.315.143
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**481.877.794.960.506**

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

a. Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
b. Dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2020 sebesar Rp126.503.013.699. Mutasi Aset KKKS berupa HBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Harta Benda Inventaris (HBI)	31 Desember 2020 *(Audited)*
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**109.937.191.954**
Mutasi Tambah :	**22.591.057.360**
Penambahan Aset Baru pada saat *Place Into Service* (PIS)	11.099.663.547
PIS Tahun Sebelumnya	7.170.598.937
Mutasi Tambah Nilai Wajar Rekon UAKPA	2.769.199.635
Transfer In	815.888.416
Koreksi Tambah SKK Migas	28.128.882
Alih Terima	702.703.052
Koreksi Tambah Perbaikan Kurs	4.874.891
Mutasi Kurang :	**6.025.235.615**
Mutasi Kurang Nilai Wajar Rekon UAKPA	4.324.548.458
Transfer Out	829.934.461
Koreksi Kurang SKK Migas	14.823.401
Koreksi Kurang Perbaikan Kurs	5.112.063
Penghapusan	148.114.180
Alih Serah	702.703.052
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**126.503.013.699**

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US Dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.953.608.372.810. Mutasi Aset KKKS berupa Material Persediaan dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Saldo Awal (USD)	1.821.352.551,22	1.792.173.432,97
Penambahan (USD)	871.615.483,70	857.672.647,61
Pengurangan	(782.042.238,48)	(828.493.527,91)
Saldo Akhir USD	**1.910.925.797,43**	**1.821.352.552,22**
Konversi Rp	**26.953.608.372.810**	**25.318.621.828.363**

Saldo awal aset material persediaan tahun 2019 merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2019 *Audited* sebesar USD1,821,352,551.22 atau setara Rp25.318.621.828.364 (kurs per 31 Desember 2019 adalah Rp13.901/USD).

Mutasi tambah sebesar USD871,615,483.70 berasal dari:

a. Koreksi Tambah sebesar USD77,652,843.95 terdiri dari koreksi saldo awal *capital* sebesar USD9,921,244.27 koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD16,243,680.49 dan koreksi *return capital* sebesar USD51,487,919.19,
b. Pembelian material persediaan sebesar USD720,874,697.00
c. *Transfer In* sebesar USD22,094,705.17

d. Alih Kelola Terima USD20,124,941.93
e. Pengembalian material persediaan perolehan Tahun 2020 sebesar USD30,868,295.63.

Mutasi kurang sebesar USD782,042,238.48 berasal dari:
a. Koreksi Kurang sebesar USD312,536,720.09 terdiri dari Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD16,589,081.34 dan *non-capital* sebesar USD10,076,195.82, serta *usage capital* sebesar USD285,871,442.93
b. *Transfer Out* sebesar USD22,225,890.98
c. Penghapusan sebesar USD20,581,648.78
d. Alih Kelola Serah sebesar USD20,124,941.93
e. Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD21,838,608.82
f. Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain sebesar USD363,774.30
g. Pemakaian MP *Non-Capital* sebesar USD384,370,653.58

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2020 senilai USD1,910,925,797.43 atau ekuivalen Rp26.953.608.372.810 (kurs per 31 Desember 2020 adalah Rp14.105/USD).

2) Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.701.575.914.089 dan Rp7.931.288.550.708. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Eks BPPN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Aset Properti Eks BPPN	3.347.402.409.446	2.353.306.709.831
b) Aset Inventaris	8.476.788.158	8.476.788.158
c) Aset Nostro	5.257.616.773	9.434.351.296
d) Surat Berharga Eks BPPN	472.824.219.614	466.078.565.798
e) Saham Eks BPPN	58.539.309.565	337.710.521.969
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	5.809.075.570.533	4.756.281.613.656
Jumlah	**9.701.575.914.089**	**7.931.288.550.708**

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2020 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp3.347.402.409.446. Sedangkan Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2019 sejumlah 1.472 aset dengan nilai sebesar Rp2.353.306.709.831.Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp5.752.019.500 terletak di Jalan Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara, yang berasal dari penarikan kembali aset yang telah diserahkelolakan ke LMAN sesuai Kepdirjen KN Nomor 282/KN/2020 tanggal 10 September 2020.

- Penambahan sejumlah 2 aset dengan nilai Rp249.285.001.000 terletak di Plaza Shinta, Jalan Teuku Umar, Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang berasal dari aset eks PKPS Bank Indonesia Raya.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp10.840.750.000 terletak di Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang sebelumnya tercatat sebagai aset kredit.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp657.660.581.000 terletak di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang berasal dari aset obligor Bank Umum Nasional.
- Perubahan nilai dikarenakan penilaian terhadap luas *existing* aset yang terletak di Kelurahan Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sebelumnya memiliki luas tanah 108.995 m2, berkurang sebanyak 24.27 m2 akibat terkena proyek pembangunan jalan tol, dan berkurang 20.851 m2 karena sebagian aset telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp5.859.614.020, setelah dilakukan penilaian pada tahun 2020 terhadap luas *existing*, nilainya menjadi Rp53.989.450.000.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp12.327.892.500 terletak di Jalan Pemuda No. 46, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah yang ditarik kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN Nomor 452/KN/2020 tanggal 17 Desember 2020. Aset saat ini digunakan sementara oleh Kementerian Keuangan c.q. KPP Madya Semarang. Terjadi penambahan nilai wajar terhadap aset tersebut sejumlah Rp10.099.619.635 akibat hasil pekerjaan renovasi yang dilakukan KPP Madya Semarang sesuai BA-31/SJ.7/2020.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen *copy*	262
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	31
Jumlah	**709**

b) Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.476.788.158 untuk 18.620 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti.

c) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.257.616.773. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya pencairan dana BDR dari Bank Ganesha sebesar Rp584.179.642 dan pencairan dana nostro Bank BIRA pada *Clearstream Banking* sebesar Rp3.592.554.881.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp472.824.219.614. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.539.309.565. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBKU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama tahun 2020.

Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada Kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.539.309.565. Penyajian nilai aset saham eks BPPN yang ada di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 31 Desember 2020 dan data nilai saham perusahaan terbuka pada BEI yang diakses secara online.

f) Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.809.075.570.533. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1	Aset Properti eks PPA	4.747.585.779.001	4.693.651.039.601
2	Surat Berharga eks PPA	1.041.750.141.601	16.657.242.209
3	Saham Non Bank eks PPA	19.739.649.931	45.973.331.846
	Jumlah	**5.809.075.570.533**	**4.756.281.613.656**

Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada **Lampiran 23.**

3) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.044.808.672.039.

Rincian Aset Eks Pertamina disajikan sebagai berikut.

- Aset berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp47.580.000.000;
- BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp13.997.228.672.039.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian terhadap

42.989 unit aset eks Kontrak Kerjasama Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 pada tahun 2012 dan membagi rincian aset tersebut Atas BMN sejumlah 42.989 unit tersebut telah dilakukan inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d. 2020 adalah 34.932 unit. Adapun untuk sisanya, 8.057 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.895.329.970.990, akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d 2020 terdapat 45 unit Aset Tidak Ditemukan dengan nilai Rp3.245.324.000 dan 4.285 Unit Aset Kondisi Rusak Total dan atau FUPP dengan nilai Rp422.597.125.014 yang belum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI melalui surat Direktur PKNSI Nomor 1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 telah menyampaikan permintaan kepada Pertamina EP untuk segera menindaklanjuti dengan mengajukan usul penghapusan dan penjualan atas aset tersebut kepada Menteri Keuangan.

4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp81.736.349.600. ABMA/T merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp78.520.698.400 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp7.553.307.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp4.337.655.800.

5) Aset BMN *Idle*

Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2020 sebesar Rp75.042.226.330. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp74.778.884.370, dan pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.264.065.000 dan mutasi kurang Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.000.723.040.

Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 25.**

6) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.726.519.312.265. Aset ini berupa Tanah sebesar Rp2.912.344.062.224 dan non-Tanah sebesar Rp36.814.175.250.041. Rincian mutasi Aset non-Tanah PKP2B disajikan sebagai berikut.

Mutasi tambah aset non-Tanah sebesar Rp1.745.739.814.048 berasal dari:

- Pengadaan aset non-Tanah sebesar Rp691.698.486.176;
- Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp735.559.698.588;
- Koreksi nilai perolehan sebesar Rp318.481.629.284.

Mutasi kurang aset non-Tanah sebesar Rp723.488.352.194 berasal dari koreksi nilai dan penghapusan aset melalui penjualan lelang.

7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp114.415.874.701 dan Rp115.056.383.683.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Barang Gratifikasi KPK	114.187.474.701	114.202.983.683
Aset Eks USAID/ eks GIZ	228.400.000	228.400.000
Saham PT Aldevelco	-	625.000.000
Jumlah	**114.415.874.701**	**115.056.383.683**

Atas Aset lain-lain dalam Pengelolaan DJKN Tahun 2020 terdapat mutasi masuk Aset Eks Program N250, berupa *prototype* pesawat PA-001, *prototype* pesawat PA-02, pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dengan nilai sebesar Rp682.927.486.000. Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-01 dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada Kementerian Pertahanan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-16/KN.5/2020 tanggal 16 September 2020.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-02, *prototype* pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada LAPAN melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Nomor 164/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dan Nomor 165/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan LAPAN melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA-183/KN/2020 tanggal 23 November 2020.

Namun demikian, dalam perkembangannya LAPAN mengeluarkan pencatatan terhadap dokumen HAKI sebesar Rp675.950.000.000 di dalam Laporan Keuangan Tahun 2020. Menindaklanjuti hal tersebut masih dilakukan koordinasi antara DJKN dan LAPAN terkait dengan rencana penyelesaian dan pengelolaan aset berupa dokumen HAKI tersebut. Untuk itu terhadap aset eks N250 berupa dokumen HAKI hanya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp17,29 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.297.142.477.109 dan Rp11.808.679.526.194, mengalami kenaikan sebesar Rp5.488.462.950.915 atau 46,48 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Yayasan TMII	68.368.872.564	90.879.019.884
2. Otorita Asahan	6.852.392.874	6.852.392.874
3. Yayasan Gedung Veteran	6.110.231.063	5.675.729.236
4. Badan Zakat Nasional	174.492.318.999	124.793.302.104
5. Badan Wakaf Indonesia	11.738.847.033	1.392.875.859
6. SKK Migas	(51.816.785.919)	(44.261.246.631)
7. Bapertarum PNS	0	843.916.661.365
8. OJK	6.253.202.783.624	5.945.724.548.298
9. Badan Pengelola Keuangan Haji	10.828.193.816.871	4.833.706.243.205
Jumlah	**17.297.142.477.109**	**11.808.679.526.194**

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

   Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.368.872.564 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020.

   Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

   Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.852.392.874 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 31 Desember 2019.

   Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

   Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2019 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan atau paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

   Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.110.231.063 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2020.

4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

   Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp174.492.318.999

merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020.

5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)
   Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.738.847.033 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2020.

6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
   Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2020 sebesar minus Rp51.816.785.919 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2020 dengan ekuitas sebesar minus Rp1.193.973.581.648 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.268.461.786.308 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp126.304.990.579.

7. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)
   Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2020.

   Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS akfif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

   Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2019. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2017. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

8. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.253.202.783.624 merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

9. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
   Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.828.193.816.871 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020.

D.2.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp318,75 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp318.753.044.535.507 dan Rp281.071.678.085.183, mengalami kenaikan sebesar Rp37.681.366.450.324 atau 13,40 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	39.118.760.818.198	35.161.188.296.434
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	279.634.283.717.309	245.910.489.788.749
Jumlah	**318.753.044.535.507**	**281.071.678.085.183**

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L
   Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.118.760.818.198 terdiri dari:
   a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp5.603.370.280.892;
   b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp16.191.001.848;
   c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp33.499.199.535.458.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN
   Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.634.283.717.309 terdiri dari:
   a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp230.146.820.507.732;
   b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp33.774.876.126;
   c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp21.432.859.026.591, terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.03 sebesar Rp15.621.012.454.760 dan Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp5.811.846.571.831;
   d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp28.007.346.870.761;
   e. Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp4.287.920.799; dan
   f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp9.194.515.300 terdiri dari Akumulasi penyusutan aset lain-lain BA 999.99 sebesar Rp228.400.000 dan BA 999.03 sebesar Rp8.966.115.300.

D.2.1.5.9 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Rp18,63 triliun

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.631.703.843.877 dan Rp15.124.922.825.166, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.506.781.018.711 atau 23,19 persen.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	18.531.495.869.519	15.040.916.929.225
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	100.207.974.358	84.005.895.941
Jumlah	**18.631.703.843.877**	**15.124.922.825.166**

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L
   Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.531.495.869.519 terdiri dari:
   a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp17.885.071.582;
   b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp91.740.742.192;
   c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp13.694.732.040.610;
   d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.445.599.635.730;
   e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp2.221.467.439.969;
   f. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp1.060.070.939.436.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN
   Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp100.207.974.358 dan Rp84.005.895.941. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:
   a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp66.923.992.288;
   b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp33.283.982.070.

D.2.2 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp701,60 triliun

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp701.606.358.286.875 dan Rp704.682.072.672.981, mengalami penurunan Rp3.075.714.386.106 atau 0,44 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339	(29,35)
Utang kepada Pihak Ketiga	49.519.940.549.323	130.742.404.048.899	(62,12)
Utang Bunga	78.397.479.060.871	67.847.210.447.268	15,55
Utang Subsidi	20.411.311.149.154	11.234.735.172.695	81,68
Utang Transfer	43.869.090.853.813	48.735.153.480.379	(9,98)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	416.341.570.576.012	316.317.377.496.950	31,62
Unamortized Discount	(222.819.437.000)	(127.084.431.000)	75,33
Unamortized Premium	226.991.689.000	215.059.457.000	5,55
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000	(29,49)
Unamortized Discount	(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)	(56,17)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	26.431.751.511.477	28.578.908.772.939	(7,51)
Pendapatan Diterima Dimuka	6.799.741.953.913	16.963.437.058.895	(59,92)
Pendapatan yang Ditangguhkan	179.632.783.759	197.917.075.973	(9,24)
Utang Jangka Pendek Lainnya	335.376.236.376	291.951.872.644	14,87
Jumlah	**701.606.358.286.875**	**704.682.072.672.981**	(0,44)

Penurunan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp81.222.463.499.576 atau menurun sebesar 62,12 persen. Utang Subsidi mengalami kenaikan tertinggi sebesar 81,68 persen.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp4,03 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.033.372.635.177 dan Rp5.709.145.435.339, mengalami penurunan sebesar Rp1.675.772.800.162 atau 29,35 persen. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan Utang PFK Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp1.991.477.209.661. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang PFK	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Utang PFK DJPK	2.815.784.887.193	4.807.262.096.854
2. Utang PFK DJPB	1.217.352.091.529	901.443.639.834
3. Utang PFK DJKN	235.656.455	439.698.651
Jumlah	**4.033.372.635.177**	**5.709.145.435.339**

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
   Utang PFK DJPK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.815.784.887.193 dan Rp4.807.262.096.854. Utang PFK DJPK sebesar Rp2.815.784.887.193 merupakan merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada pada triwulan I TA 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)
   Utang PFK DJPB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.217.352.091.529 dan Rp901.443.639.834, mengalami kenaikan sebesar Rp315.908.451.695 atau 35,04 persen.
   Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Badan Penyelenggara	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. BPJS Kesehatan	1.175.045.899.410	228.369.973.005
b. Perum Bulog	-	1.676.894
c. PT. Taspen (Persero)	41.865.515.366	32.925.571.844
d. PT. Asabri (Persero)	440.645.753	234.510.462
e. Bapertarum PNS	31.000	639.911.907.629
Jumlah	**1.217.352.091.529**	**901.443.639.834**

3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
   Utang PFK DJKN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp235.656.455 dan Rp439.698.651. Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp49,51 Triliun

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp49.519.940.549.323 dan Rp130.742.404.048.899, mengalami penurunan sebesar Rp81.222.463.499.576 atau 62,12 persen. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. K/L	28.322.112.422.294	17.329.403.887.015
2. BUN	21.197.828.127.030	113.413.000.161.884
Jumlah	**49.519.940.549.324**	**130.742.404.048.899**

**Selisih TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L
   Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.322.112.422.294 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian Peralatan dan Mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.
   Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lainterdapat pada K/L sebagai berikut.
   a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.931.310.278.863 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
   b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.777.694.463.196 merupakan terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi, belanja modal yang masih harus dibayar dan dana pihak ketiga.
   c. Kementerian Keuangan sebesar Rp4.059.680.628.081 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
   d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.450.990.883.443 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN
   Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 21.197.828.127.030 dan Rp113.413.000.161.885.
   Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BA 999.03 (Investasi)	1.292.314.032.605	5.651.103.795.171
BA 999.08 (Belanja Lain-lain)	1.203.086.296.646	91.506.354.896.107
BA 999.99 (Transaksi Khusus)	18.495.174.871.077	16.328.389.618.740
BA.999.00 (Utang Kepada Pihak Ketiga)	403.356.201.213	118.429.956.817
Eliminasi BUN 999	(196.103.274.511)	(191.278.104.950)
Jumlah	**21.197.828.127.030**	**113.413.000.161.885**

a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada BA 999.03 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.292.314.032.605 dan Rp5.651.103.795.171. Nilai tersebut merupakan merupakan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kewajiban kepada penyedia jasa terkait upgrade aset kelolaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp1.291.928.573.399;
2) Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp385.459.206.

Uraian	Nominal (Rp)
Retensi pekerjaan pengawasan *upgrade* aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000
Retensi pekerjaan perencanaan *upgrade* Puri Casablanca tahap III	37.416.500
Retensi pekerjaan pengawasasn *upgrade* Puri Casablanca tahap I	1.877.150
Retensi pekerjaan standard minimum *upgrade* 4 unit Kondominium Kelapa Gading	61.438.053
Retensi pekerjaan pengawas *upgrade* Puri Casablanca tahap III	8.513.450
Retensi pekerjaan konstruksi *upgrade* Puri Casablanca tahap III	273.761.053
TOTAL	**385.459.206**

b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.203.086.296.646 dan Rp91.506.354.896.107. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.08	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Kementerian Keuangan	1.199.870.519.021	415.045.649.535
2) MPP Kartu Prakerja	7.205.000	-
3) SKK Migas	2.951.484.125	4.864.554.151
4) Istana Kepresidenan	257.088.500	
5) Satker *Suspense*	-	91.086.444.692.421
Jumlah	**1.203.086.296.646**	**91.506.354.896.107**

1) Kementerian Keuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.199.870.519.020 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.103.805.250
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
Ditjen Perbendaharaan	909.594.038.771
Direktorat Sistem Perbendaharaan	284.998.507.000
Jumlah	**1.199.870.519.021**

**) Selisih TA 2019 sebesar Rp1 merupakan pembulatan*

a. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.103.805.250 yang berasal dari pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200.000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2020.

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat
Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp2.174.168.000. Utang tersebut merupakan Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.

c. Ditjen Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp909.594.038.771. Utang tersebut merupakan kurang bayar Cadangan Beras Pemerintah tahun 2020.

d. Direktorat Sistem Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 pada Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp284.998.507.000. Utang tersebut merupakan kurang bayar bantuan iuran JKN kelas III setelah dikurangi kelebihan bayar.

2) MPP Kartu Prakerja
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga MPP Kartu Prakerja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.205.000 dan Rp0 merupakan penyetoran dana dari peserta Program Kartu Prakerja ke rekening RPL BNI MPPKP.

3) SKK Migas
Utang kepada pihak ketiga SKK Migas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.951.484.125 dan Rp4.864.554.151 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4) Istana Kepresidenan
Utang kepada Pihak Ketiga pada Istana Kepresidenan per 31 Desember 2020 dan31 Desember 2019 adalah Rp257.088.500 dan Rp0. Utang tersebut merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan berupa tagihan biaya ekspedisi buku tulis yang belum terbayar ditahun 2020.

5) Satker *Suspense*
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada Satker *Suspense* adalah sebesar Rp0 dan Rp91.086.444.692.421, dimana mengalami penurunan sebesar Rp91.086.444.692.421 atau 100 persen.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.495.174.871.077 dan Rp16.328.389.618.740. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	937.778.057.916	4.935.603.947.760
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	17.555.643.596.008	11.391.057.810.983
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	1.753.217.153	1.727.859.997
Jumlah	**18.495.174.871.077**	**16.328.389.618.740**

1. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp937.778.057.916, rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi sd Desember 2020 (termasuk IJP rampung 2020)	61.815.238.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI 2020	459.953.651
3	Utang Bunga Negatif Desember 2020	1.955.966
4	Utang PPN BI-RTGS BO Bulan Desember 2020	7.856.800
5	Utang Swift BO Valas bulan Desember 2020	57.557.500
6	Utang pembayaran kekurangan Jamkes TW IV 2020	141.245.290.147
7	Kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2020	53.240.635.530
8	Kekurangan pensiun program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) Triwulan IV 2020	1.976.806.492
9	Kekurangan pensiun Ketigabelas tahun 2018 program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d. Desember 2020	1.741.584
10	UPSL 2015-2016	669.808.470.045
11	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2020 Asabri	147.773.298
12	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja triwulan IV Tahun 2020 Taspen	187.423.420
13	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja triwulan IV Tahun 2020 Asabri	5.906.279.875
14	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian Kerja triwulan IV Tahun 2020 Taspen	562.270.286
15	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian Kerja triwulan IV Tahun 2020 Asabri	2.358.805.322
Jumlah		**937.778.057.916**

2. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA
   Utang Kepada Pihak Ketiga TK-DJA per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.555.643.596.008, terdiri dari :

   a. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas
      Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. sebesar Rp15.747.845.852.614, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	7.739.221.527
DMO Fee KKKS sebesar USD152,504,699	2.151.078.784.601
Reimbursement PPN	2.409.934.117.343
Underlifting KKKS sebesar USD541,135,020	7.632.709.462.813
Fee Penjualan Migas Bagian Negara USD 251,427,455	3.546.384.266.330
Jumlah	**15.747.845.852.614**

Sebagai informasi, terhadap Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, terdapat tagihan Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru yang disampaikan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0032/SKKMG0000/2020/S4 tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp25.333.572.047,00, berdasarkan hasil penelitian DJA atas dokumen tagihan PAT dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang menjadi pedoman bagi pemda dalam menetapkan NPA Tanah belum mengatur pengguna air tanah untuk industri hulu migas.
b. Berkenaan dengan hal tersebut, maka DJA berpendapat bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah tidak dapat menjadi dasar bagi Pemda dalam menghitung besaran nilai Pajak Air Tanah (PAT).

Selanjutnya, tagihan Pajak Air Tanah tersebut dikembalikan oleh Ditjen Anggaran melalui surat Nomor S-195/AG/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Sebagai informasi, atas Utang *Underlifting* tersebut masih terdapat tagihan yang belum dapat diakui sebagai utang *Underlifting* yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat tagihan *underlifting* pada KKKS PT PHE Tuban tahun 2017 sebesar USD2,048,837.40 sebagaimana ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0419/SKKMG0000/2018/S4 tanggal 11 Juni 2018, yang belum dapat di proses penyelesaiannya/pembayarannya oleh Ditjen Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian Ditjen Anggaran atas dokumen tagihan *underlifting* dimaksud, dalam Laporan AO tahun 2018 terdapat penyesuaian

harga gas suar yang diberlakukan surut sejak tahun 2014 sebagaimana Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017 tanggal 4 September 2017, yang menghasilkan dampak bagi pemerintah berupa kewajiban *underlifting* kepada PT PHE Tuban. Sehubungan dengan penyesuaian harga gas suar dimaksud yang dilakukan oleh SKK Migas dalam Laporan AO Tahun 2018, Ditjen Anggaran tidak dapat meyakini kebenaran nilai tagihan *underlifting* PT PHE Tuban tahun 2017 karena berdasarkan hasil penelitian Ditjen Anggaran atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2017 yang menjadi dasar penerbitan Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017, tidak terdapat norma ketentuan yang mengatur masa berlaku retroaktif.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pengeluaran keuangan negara, Ditjen Anggaran telah meminta pandangan/pendapat hukum dari Biro Hukum Kemenkeu melalui Surat Nomor S-264/AG.6/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan Nota Dinas Nomor ND-12/AG.6/2019 tanggal 4 Januari 2019, namun sampai dengan saat ini Biro Hukum Kemenkeu belum menjawab Nota Dinas Ditjen Anggaran Nomor ND-12/AG.6/2019 tersebut.

Berdasarkan monitoring Ditjen Anggaran atas laporan AO *natural gas* bulan September tahun 2017, dapat disampaikan bahwa SKK Migas telah melakukan penyesuaian harga gas suar (November 2014 sampai dengan Juli 2017) yang mengakibatkan berkurangnya bagian pemerintah sebesar USD769,420.28. Berkenaan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan bahwa DJA belum meyakini nilai tagihan *underlifting* PT PHE Tuban tahun 2017 karena adanya penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut, maka nilai sementara *underlifting* PT PHE Tuban Tahun 2017 yang diyakini oleh DJA adalah sebesar USD1,279,417.11 (nilai tagihan sebesar USD2,048,837.40 dikurangi dengan pengurangan bagian pemerintah sebesar USD769,420.28). Namun demikian, untuk meyakini nilai *underlifting* PT PHE Tuban Tahun 2017 tersebut Ditjen Anggaran masih menunggu pandangan/pendapat hukum dari Biro Hukum Kemenkeu terhadap norma ketentuan yang mengatur masa berlaku retroaktif dalam Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017.

2. Terdapat tagihan *underlifting* pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia Tahun 2020 sebesar USD256,761,110.62 sebagaimana ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0780/SKKMG0000/2020/S4 tanggal 10 Desember 2020 dan Nomor SRT-0138/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 18 Februari 2021 yang belum dapat di proses penyelesaiannya/pembayarannya oleh Ditjen Anggaran. Terdapat 2 substansi pokok yang masih perlu diteliti lebih lanjut oleh Ditjen Anggaran, yaitu:
   a. Mekanisme perhitungan atas tagihan *underlifting* KKKS PT Chevron Pacific Indonesia yang ditagihkan oleh SKK Migas, yang menghasilkan angka tagihan *underlifting* USD256,761,110.62.
   b. Status atau posisi hukum dari *Heads of Agreement* (HoA) WK Rokan yang

di tandatangani oleh SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, serta diakui dan disetujui oleh Kementerian ESDM dan diakui oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, apakah setara atau bagian yang tidak terpisah dengan PSC KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Kepastian mengenai status hukum dari HoA dimaksud menjadi penting untuk diperoleh mengingat dalam HoA terdapat ketentuan atau norma kesepakatan yang bertentangan dan/atau tidak diatur dalam PSC KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (PSC Induk).

b. Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp1.807.797.743.394.

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian *(reimbursement)* PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Rincian Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-*reimbursement* PPN	384.703.903.650
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi	93.919.959.611
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- *reimbursement* PPN	819.093.565.402
5	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	313.977.040.220
6	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	-
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	196.103.274.511
8	**Total (1+2+3+4+5+6+7)**	**1.807.797.743.394**

3. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF
   Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.753.217.153 dan Rp1.727.859.997. Saldo utang kepada pihak ketiga dalam rupiah menurun dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EUR dan USD).

d. Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.00
   Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2020 dan Desember 2019 sebesar Rp403.356.201.213 dan Rp118.429.956.817, mengalami kenaikan sebesar Rp284.926.244.396 atau 240,59 persen. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan /atau nomor rekening dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan.

   Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Utang	Nilai (Rp)	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	402.845.323.788	Utang retur SP2D di KPPN
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	287.055.510	Utang Retur Migas dengan SP2D Nomor 209992803000047 Tanggal 20 November 2020 (dengan nilai valuta asing sebesar USD20.351,33 an. KG BERAU PETROLEUM LTD
Utang Jangka Pendek Lain-lain	223.294.665	Kewajiban ini berasal dari Kelebihan Limpah Bank/Pos Persepsi sampai dengan tahun 2019 yang belum diminta pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi.
Utang Karena Kesalahan Perbankan	527.250	Dobel transaksi retur pada RR RPKBUNP SPAN BRI. Sudah ditindaklanjuti melalui S-74/PB.3/2021 tanggal 18 Januari 2020
Jumlah	**403.356.201.213**	

   Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.1.3 Utang Bunga

Utang Bunga Rp78,39 triliun

Utang Bunga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp78.397.479.060.871 dan Rp67.847.210.447.268, mengalami kenaikan sebesar Rp 10.550.268.613.603 atau 13,03 persen. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.
Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Bunga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Utang Bunga Surat Berharga Negara	76.186.533.334.547	63.765.290.222.549
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman		
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	116.096.050.634	111.018.797.511
b. Utang Bunga Luar Negeri	2.094.849.675.690	3.970.901.427.208
Jumlah	**78.397.479.060.871**	**67.847.210.447.268**

Utang Biaya Pinjaman merupakan Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN yang besarnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.397.479.060.871 yang terdiri dari:

1. Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp76.186.533.334.547, didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp1.168.220.350.000.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.210.945.726.324, terdiri dari:
   a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp116.096.050.634; dan
   b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp2.094.849.675.690.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp20,41 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp20.411.311.149.154 dan Rp11.234.735.172.695, mengalami kenaikan sebesar Rp9.176.575.976.459 atau 81,68 persen.

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifkasi atas tagihan dimaksud sebesar Rp8.693.736.060.616 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

(dalam rupiah)

Utang Subsidi	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Kementerian Keuangan	11.951.806.825.973	3.742.908.280.041
2. Kementerian Pertanian	-	5.712.863.663.000
3. Kementerian PUPR	44.966.563.489	292.110.245.218
4. Kementerian KUKM	8.414.537.759.692	1.486.852.984.436
Jumlah	**20.411.311.149.154**	**11.234.735.172.695**

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan
   Utang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.951.806.825.973 dan Rp3.742.908.280.041. Jumlah Utang Subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp8.208.898.545.932 atau 219,32 persen dibanding Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2019. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	11.687.561.909.507	2.468.700.000.000
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	-	1.222.759.999.792
c. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	262.373.737.435	-
d. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	1.871.179.031	51.448.280.249
Jumlah	**11.951.806.825.973**	**3.742.908.280.041**

a. Utang Subsidi pada DJA

Saldo Awal utang subsidi jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp2.468.700.000.000. Kemudian sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pembayaran kekurangan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sejumlah Rp2.468.698.062.155 yang berdampak pada penurunan Utang Subsidi Jangka Pendek, yang terdiri atas:

1) Rp1.021.996.954.166 merupakan pembayaran kekurangan JBT Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero);
2) Rp21.661.045.834 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo, Tbk;
3) Rp190.670.411.505 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Tanah kepada PT AKR Corporindo, Tbk, yang terdiri atas subsidi harga sebesar Rp176.634.007.162 dan PPN atas JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp14.036.404.343;
4) Rp1.234.369.650.650 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero), yang terdiri atas subsidi harga sebesar Rp1.063.000.000.000 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp171.369.650.650;

Telah terbit DIPA Subsidi Energi Tahun Anggaran 2021 nomor SP DIPA-999.07.1.979321/2021 tanggal 12 Januari 2021. Dalam DIPA tersebut terdapat anggaran untuk membayar kekurangan subsidi tahun 2018 dan 2019 sebesar Pada Tahun 2020 utang subsidi jangka pendek sebesar 10.868.494.466.558 karena terdapat pengakuan kekurangan subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik atas tagihan dari Badan Usaha yang telah diverifikasi oleh KPA, yang terdiri atas:

1) Rp6.596.044.358.558 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi Minyak Solar Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).
2) Rp551.528.166.000 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi Minyak Tanah Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).
3) Rp3.720.921.942.000 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).

Pencatatan utang subsidi listrik dalam asersi manajemen Rp150.282.473.958, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI, besaran kurang bayar Diskon Tarif Listrik Rumah Tangga dan Diskon Tarif Bisnis dan Industri 2020 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp819.067.442.949 atau terdapat penambahan sebesar Rp668.784.968.991. Pembayaran atas utang subsidi listrik tersebut telah masuk dalam alokasi anggaran pada DIPA Subsidi Energi Tahun Anggaran 2021.

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.222.759.999.792. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang atas kekurangan bayar subsidi tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 dan tahun 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869 yang kemudian direklasifikasi ke akun Utang Subsidi/Kewajiban Jangka Pendek karena sudah dialokasikan dalam APBN TA 2020.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp262.373.737.435 yang merupakan Utang Subsidi Estimasi. Utang Subsidi Estimasi adalah estimasi nilai tagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) periode Desember 2020 atas pelaksanaan penjaminan pemerintah program PEN untuk pelaku usaha UMKM yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2021.

d. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan
Utang subsidi Kredit Program per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.871.179.031 dan Rp51.448.280.249. Kewajiban jangka pendek berupa Utang Subsidi (214111) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.871.179.031 merupakan Saldo akhir Utang Subsidi per 31 Desember 2019 senilai Rp51.448.280.249 ditambah Berita Acara Verifikasi (BAV) atas tagihan subsidi yang diterbitkan selama periode Januari s.d. Desember 2020 yang belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp77.078.793, dikurangi SPP Tahun 2020 atas BAV yang diterbitkan sebelum tahun 2020 sebesar Rp49.004.461.789, dan dikurangi SPP Tahun 2020 atas BAV yang diterbitkan pada *subsequent event* penyusunan laporan keuangan Tahun 2019 sebesar Rp0, dan koreksi atas kesalahan pencatatan Utang Subsidi pada penerbitan BAV Skema KPEN-RP Bank BRI Agro Periode Juli – September 2019 sebesar Rp649.718.222.
Saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran sebagai berikut.

Saldo utang Subsidi	Jumlah (Rp)
Periode penyaluran Tahun 2016	595.914.284
Periode penyaluran Tahun 2017	790.508.108
Periode penyaluran Tahun 2018	142.364.772
Periode penyaluran Tahun 2019	270.852.252
Periode penyaluran Tahun 2020 (sampai penyusunan LK belum diterbitkan SP2D-nya)	71.539.615
Total	**1.871.179.031**

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian
Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp5.712.863.663.000.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.966.563.489 dan Rp292.110.245.218. Jumlah utang subsidi per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp247.143.681.729 atau sebesar 84,61 persen dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2019.

Utang subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.966.563.489 terdiri dari:

a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.142.000.000 yang yang merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL 31 Desember 2020. Selain itu, terdapat Utang Subsidi – Estimasi Sebesar Rp15.608.498.815 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan yang merupakan tagihan SSB dan SBUM yang belum dilakukan verifikasi.

b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Utang subsidi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.216.064.674 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan estimasi tagihan subsidi bulan September s.d. Desember 2020.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM
Utang subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.414.537.759.692 dan Rp1.486.852.984.436. Utang Subsidi estimasi tersebut per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp6.927.684.775.256 atau sebesar 465,93 persen, dikarenakan terdapat pembayaran Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR berdasarkan tagihan belum diverifikasi juga selisih-selisih tagihan yang belum lolos verifikasi yang akan ditagihkan pada TA 2021.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

Utang Transfer Rp43,86 triliun

Utang Transfer per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp43.869.090.853.813 dan Rp48.735.153.480.379, mengalami penurunan sebesar Rp4.866.062.626.566 atau 9,98 persen. Penurunan ini disebabkan Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar-Estimasi seluruhnya telah direklasifikasi menjadi Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 serta turunnya angka prognosa realisasi penerimaan negara.

Rincian Utang Transfer disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Kewajiban TKD	11.159.928.742.993	10.316.654.476.421
2. Kewajiban TKD Estimasi	32.709.162.110.820	38.418.499.003.958
Jumlah	**43.869.090.853.813**	**48.735.153.480.379**

1. Kewajiban TKD

   Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD yang disajikan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.159.928.742.993 dan Rp10.316.654.476.421.

   Nilai Kewajiban TKD Satker DBH Per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp11.159.928.742.993 terdiri dari:

   1. Sebesar Rp9.566.131.404.935 Kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar (YMHD) yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya serta Kurang Bayar DBH pada TA 2020 yang baru ditetapkan melalui PMK Nomor 113/PMK.07/2020.
   2. Sebesar Rp1.593.797.338.058 merupakan pengakuan utang atas kurang salur Dana TPG PNSD, TKG PNSD, dan Tamsil Guru PNSD yang merupakan utang transfer dari DAK Nonfisik.

   Rincian Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

2. Kewajiban TKD Estimasi

   Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil Estimasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp32.709.162.110.820 dan Rp38.418.499.003.958. Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban transfer pada periode pelaporan keuangan tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pada Satker DBH, Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul sebagai akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan Pajak dan PNBP Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan dengan besaran DBH Pajak dan PNBP SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan hasil perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* dan akan menjadi definitif sebagai Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp416,34 triliun

Bagian Lancar UJP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp416.341.570.576.012 dan Rp316.317.377.496.950, mengalami kenaikan sebesar Rp100.024.193.079.062 atau 31,62 persen.

Bagian Lancar UJP merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp416.345.489.847.643 berasal dari nilai bruto sebesar Rp416.341.570.576.012 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp222.819.437.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp226.991.689.000.

Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	80.877.721.501.762	93.861.285.668.664
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.748.949.412.112	1.503.721.849.368
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	333.585.090.335.824	220.842.513.473.516
Bagian Lancar UJP BUN	**416.211.761.249.698**	**316.207.520.991.548**
KL		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	**129.809.326.314**	**109.856.505.402**
Jumlah Bruto	**416.341.570.576.012**	**316.317.377.496.950**
Unamortized Discount	(222.819.437.000)	(127.084.431.000)
Unamortized Premium	226.991.689.000	215.059.457.000
Jumlah Neto	**416.345.742.828.012**	**316.405.352.522.950**

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp55,78 triliun

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.780.000.000.000 dan Rp79.110.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp23.330.000.000.000 atau 29,49 persen. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp55.282.918.725.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp55.780.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp497.081.275.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Utang SBN Jangka Pendek	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000
Jumlah Bruto	**55.780.000.000.000**	**79.110.000.000.000**
Unamortized Discount	(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)
Unamortized Premium	0	0
Jumlah Neto	**55.282.918.725.000**	**77.975.856.785.000**

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp26,43 triliun

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp26.431.751.511.477 dan Rp28.578.908.772.939, mengalami penurunan sebesar Rp2.147.157.261.462 atau 7,51 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
SPM-KP yang belum terbit SP2D-nya pada Kementerian Keuangan.	26.115.243.195.066	28.255.733.681.955
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	316.472.108.729	323.169.904.285
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	3.187.000	3.645.760
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pusat Statistik	1.820.140	-
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	31.200.542	1.540.939
Jumlah	**26.431.751.511.477**	**28.578.908.772.939**

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp6,79 triliun

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.799.741.953.913 dan Rp16.963.437.058.895, mengalami penurunan sebesar Rp10.163.695.104.982 atau 59,92 persen. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. K/L	6.724.490.577.329	16.879.575.100.899
2. BUN	75.251.376.584	83.861.957.997
Jumlah*	**6.799.741.953.913**	**16.963.437.058.896**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L sebesar Rp6.724.490.577.329, terutama berasal dari Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp2.908.981.313.878 serta Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.151.441.736.898.

2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp75.251.376.584 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Pendapatan Diterima Dimuka pada BUN terdiri dari:

   a. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.093.085.212.
   b. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2020 adalah Rp7.736.177.288
   c. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.805.384.167
   d. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban hingga akhir Tahun 2020 adalah senilai Rp2.286.911.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan akhir Tahun 2020.

e. Kewajiban dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina berupa sewa dibayar dimuka yang dibayarkan penyewa pada 2020, kemudian menjadi pendapatan sewa pada 2021. Di samping itu, terdapat lelang aset eks Pertamina yang barangnya belum diambil oleh pembeli dan KMK terkait penghapusannya baru akan rilis di tahun 2021. Adapun total kewajiban jangka pendek adalah Rp8.304.768.342.

f. Saldo pendapatan diterima di muka Tahun 2020 sebesar Rp25.050.575, merupakan PNBP Migas Lainnya yang pembayaran atas Jasa Pemaduan dan Penundaan atas Kapal MT. Petroleum 115 dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum kontrak kerja sama ditandatangani (15 April 2020 s.d. 20 April 2020). Selanjutnya, kelebihan pembayaran tersebut, akan dikompensasikan terhadap kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan berikutnya.

Rincian pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp179,63 Miliar

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp179.632.783.759 dan Rp197.917.075.973, mengalami penurunan sebesar Rp18.284.292.214 atau 9,24 persen. Merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir periode pelaporan, yang berasal dari setoran penerimaan Negara yang belum dapat diidentifikasi peruntukkannya.

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp335,37 miliar

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp335.376.236.376 dan Rp291.951.872.644, mengalami kenaikan sebesar Rp43.424.363.732 atau 14,87 persen.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. K/L	363.924.976.182	339.806.045.078
2. BUN	876.106.823.115	4.861.788.467.503
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(904.655.562.921)	(4.909.642.639.937)
Jumlah	**335.376.236.376**	**291.951.872.644**

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp363.924.976.182 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.

2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp876.106.823.115 terdiri dari Utang jangka pendek lain-lain akun (219913). Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya BUN akun 219913 ini di LKPP direklas dan disajikan pada Pos Utang kepada Pihak Ketiga lainnya.

3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp904.655.562.921, terdiri dari reklas Utang Jangka Pendek Lainnya BUN ke Utang kepada pihak ketiga sebesar minus Rp876.106.823.115 karena

perbedaan posting rule akun 219913 antara KL dan BUN, jurnal penyesuaian saldo awal sebesar minus Rp28.548.739.806 merupakan utang pajak bendahara yang belum disetor.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Rp5.923,86 triliun

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.923.869.627.304.123 dan Rp4.635.539.513.513.850, mengalami kenaikan sebesar Rp1.288.330.113.790.273 atau 27,79 persen.
Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	5.159.738.104.535.449	3.967.764.907.186.497	30,04
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	764.131.522.768.674	667.774.606.327.353	14,43
Jumlah	**5.923.869.627.304.123**	**4.635.539.513.513.850**	**27,79**

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 terutama berasal dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp1.192.889.935.141.650. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 30,04 persen, begitu juga Utang Jangka Panjang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 14,43 persen.

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Rp10,78 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.781.832.927.370 dan Rp8.663.939.872.341, mengalami kenaikan sebesar Rp2.117.893.055.029 atau 24,44 persen, yang disebabkan adanya tambahan Utang Pinjaman Dalam Negeri pada tahun 2020. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri merupakan akun baru dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-304/PB/2019.
Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BJB	0	0
Bank Mandiri	5.697.226.992.481	4.024.892.232.370
PT BNI	5.016.334.264.655	4.310.197.389.156
PT BRI	49.678.121.521	82.796.869.202
Bank Jateng	18.593.548.713	55.780.646.123
Bank DKI	0	190.272735.491
Jumlah*	**10.781.832.927.370**	**8.663.939.872.342**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Utang Jangka Panjang SBN Rp4.832,28 triliun

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.832.289.530.565.900 dan Rp3.714.851.256.058.415, mengalami kenaikan sebesar Rp1.117.438.274.507.485 atau 30,08 persen. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.829.853.117.031.900 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.832.289.530.565.900 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp46.614.743.504.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp44.178.329.970.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Utang Jangka Panjang SBN	**4.832.289.530.565.900**	**3.714.851.256.058.415**
Unamortized Discount	(46.614.743.504.000)	(37.092.489.249.000)
Unamortized Premium	44.178.329.970.000	38.946.454.751.000
Jumlah Neto	**4.829.853.117.031.900**	**3.716.705.221.560.415**

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp11,29 triliun

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.299.218.500.000 dan Rp0. merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Rupiah Seri FR0064, FR0081, FR0082, PBS018 yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2021.

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp0

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp669.808.470.045. Penurunan utang kepada Dana Pensiun dan THT (UPSL) disebakan adanya pengalihan dari kewajiban jangka Panjang menjadi utang jangka pendek mengingat UPSL tersebut akan dibayarkan pada tahun 2021.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan.

Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
UPSL 2012-2013	**0**	**0**
UPSL 2014-2015	**0**	**0**
UPSL 2015-2016	**0**	**669.808.470.045**
Total	**0**	**669.808.470.045**

Unfunded Past Service Liability (UPSL) Pegawai Negeri Sipil Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability Program* (UPSL) Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

   Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah (Rp)	Tanggal/Keterangan	Jumlah (Rp)
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	**7.557.126.930.000**		**6.000.000.000.000**

   Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 - 2015

   Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah (Rp)	Tanggal/Keterangan	Jumlah (Rp)
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	**6.899.954.609.263**		**3.800.000.000.000**

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 - 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Dalam surat tersebut, utang pemerintah yang diakui sebesar Rp669.808.470.045 akan dibayarkan sekaligus pada tahun 2021.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp289,38 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp289.381.766.612.800 dan Rp224.737.743.429.342, mengalami kenaikan sebesar Rp64.644.023.183.458 atau 28,76 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.08	63.895.801.775.612	51.502.656.693.703
BA 999.09	-	843.916.661.365
BA 999.99	193.232.461.333.683	169.098.380.731.016
Dana atas *Abandonment and Site Restoration* (ASR)	29.096.514.483.667	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.245.061.292.679	1.380.861.616.099
Jumlah	**289.381.766.612.800**	**224.737.743.429.342**

1. BA 999.04

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.911.927.727.159 dan Rp1.911.927.727.159. Nilai tersebut merupakan Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur *(channeling)* ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360,

terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25 persen X Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas *Risk Sharing* Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola *Channeling* Sebesar Rp5,71 triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan non petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

Surat Bank Indonesia nomor 21/5/DOTP/Srt/B tanggal 16 Januari 2019 kepada Direktorat SMI perihal penyampaian dokumen klarifikasi Bank pelaksana KUT TP 1998/99 Pola *Channeling* menyatakan bahwa Bank pelaksana (Bank BRI, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Bukopin dan Bank Muamalat) mengalami kesulitan untuk melakukan pemilahan debitur penerima KUT TP 1998/99 Pola *Channeling* antara petani dan bukan petani.

2. **BA 999.08**

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp63.895.801.775.612 dan Rp51.502.656.693.703. Saldo utang tersebut merupakan kewajiban pemerintah kepada Badan Usaha terkait kebijakan penetapan dengan rincian sebagai berikut

1) Utang Jangka Panjang dari satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp18.823.101.252 yang merupakan utang bantuan kepada PT PLN (Persero) yang belum dapat dibayarkan hingga periode TA 2020.

2) Reklasifikasi utang dari kewajiban jangka pendek yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka panjang yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.101.407.559.716 karena dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penetapan HJE BBM dalam LKPP Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah baru merencanakan pembayaran utang kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat penetapan HJE BBM pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.259.037.426.780.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.101.407.559.716 merupakan utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM Minyak Solar Tahun 2018.

3) Kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018 diperhitungkan *set off* dengan kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Non Jamali sebesar Rp4.222.953.981.191 sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, sehingga sisa utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 menjadi sebesar Rp11.314.119.162.046.

4) Merujuk surat Menteri Keuangan nomor: S-109/MK.02/2021 hal permohonan pemeriksaan perhitungan dana kompensasi tahun 2020, BPKP telah melakukan reviu atas perhitungan kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020.

Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan bahwa perhitungan dana kompensasi BBM tahun 2020 atas penyaluran JBT dan JBKP adalah sebesar Rp5.589.490.147.448. Sebelumnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT Pertamina (Persero) Nomor BA-23/AG.6/2021 terkait Kelebihan dan/atau Kekurangan Penerimaan Sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Tahun 2020 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, disepakati bahwa nilai kompensasi BBM tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi BBM sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-136/D404/2/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebesar Rp5.589.490.147.448. Dimana Kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 sebesar Rp30.864.175.990.750, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 menjadi sebesar Rp29.214.696.246.652 dengan rincian:

a) JBT Minyak Solar sebesar Rp16.389.880.533.600;
b) JBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650; dan
c) JBKP Premium Jamali sebesar Rp5.488.824.389.500 diperhitungkan *set off* dengan Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Jamali sebesar Rp1.649.479.744.098, sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 sehingga utang dana kompensasi atas kekurangan penerimaan PT

Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBKP Premium Jamali Tahun 2019 menjadi sebesar Rp3.839.344.645.402.

Berdasarkan BAR Pencatatan dan Penyajian Utang-Piutang Kompensasi Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-S0 tanggal 15 Mei 2020, telah disepakati pencatatan dan penyajian Utang-Piutang Tidak Lancar antara Pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp51.502.656.693.703. Dalam hal terdapat perubahan atas pencatatan dan penyajian utang-piutang kompensasi atas kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM tahun 2018 dan 2019, maka BAR tersebut akan dilakukan revisi oleh kedua belah pihak. Penyelesaian utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

5) Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan Kekurangan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 sebesar Rp298.816.254.300.

6) Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-236/MK.02/2021 tanggal 26 Maret 2021 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2019, dinyatakan bahwa kekurangan penerimaan atas penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2019 pada PT AKR Corporindo, Tbk sebesar Rp52.859.702.822,45. Dan utang tersebut diperhitungkan set off dengan Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT AKR Corporindo, Tbk. Tahun 2020 sebesar Rp15.872.676.459. Dimana kelebihan penerimaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT AKR Corporindo, Tbk. Nomor BA-22/AG.6/2021 terkait Kelebihan Penerimaan Sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2020 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT AKR Corporindo, Tbk. yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, disepakati bahwa nilai kompensasi BBM tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi BBM sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 yaitu sebesar Rp15.872.676.459, sehingga sisa utang dana kompensasi pada PT AKR Corporindo, Tbk Tahun 2019 sebesar Rp36.987.026.363.

7) Di samping itu, pada akhir periode pelaporan TA 2020 (Audited) dilakukan reklasifikasi dari kewajiban jangka pendek, yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka Panjang, yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp6.444.692.421. Utang tersebut berasal dari sebagian kekurangan penerimaan akibat kebijakan penetapan HJE BBM Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp6.444.692.421 dari total kekurangan penerimaan sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018.

8) Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan bahwa perhitungan dana Kompensasi Listrik Tahun 2020, terdapat kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) sebagai akibat dari penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi bulan Januari sampai dengan

Desember Tahun 2020 sebesar Rp17.904.507.732.862. Dimana sebelumnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT PLN (Persero) Nomor BA-4/AG.6/2021 terkait Kekurangan Penerimaan atas Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT PLN (Persero), disepakati bahwa nilai kompensasi listrik tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi listrik sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-136/D404/2/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebesar Rp17.904.507.732.862.

Pencatatan atas utang-piutang kompensasi yang terjadi dalam TA 2020 mengacu pada Nota Kesepakatan Final, asersi manajemen badan usaha, dan hasil reviu BPKP atas Perhitungan Dana Kompensasi yang dituangkan dalam asersi manajemen KPA serta hasil kesepakatan Rapat Tiga Menteri. Pembayaran utang kompensasi TA 2020 di atas belum diperhitungkan dalam APBN TA 2021, kecuali dilakukan mekanisme revisi anggaran atau perubahan atas rincian postur APBN TA 2021.

3. BA 999.99

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebesar Rp193.232.461.333.683 dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN yang berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp78.168.343 berisi uang pembayaran sewa yang dibayarkan penyewa pada 2020, namun baru diakui menjadi pendapatan sewa setelah 2021. AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik pihak ketiga yang dikuasai oleh pemerintah.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.134.080.602.667 jika dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan/(Penurunan)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652	20.017.273.714.875
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.786.640.129.813	17.669.911.410.364	4.116.728.719.449
Jumlah	**193.232.383.165.340**	**169.098.380.731.016**	**24.134.002.434.324**

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Saldo Aset Lainnya berupa :

a. Kenaikan nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Taspen (Persero) dari sebesar Rp151.428.469.320.652 pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp171.445.821.203.870 pada 31 Desember 2020 terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan hasil investasi dan nilai investasi AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Taspen (Persero).
b. Kenaikan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Asabri (Persero) dari Rp17.669.911.410.364 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp21.786.640.129.813 per 31 Desember tahun 2020 dipengaruhi

kenaikan nilai investasi di PT Asabri (Pesero) sesuai dengan Laporan Keuangan Audited PT Asabri (Persero).

4. Dana atas *Abandonment and Site Restoration* (ASR)

Nilai Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya sebesar Rp29.096.514.483.668 merupakan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment and Site Restoration (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas/BPMA dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan Abandonment and Site Restoration (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.245.061.292.679. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya berada pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.217.499.595.450, Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp27.295.007.268, dan Kemenpora sebesar Rp266.689.961.

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi Rp18,42 triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.422.169.463.379 dan Rp16.988.193.854.354, mengalami kenaikan sebesar Rp1.433.975.609.025 atau 8,44 persen.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	K/L	Jumlah	
		31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1	Kementerian Keuangan	11.059.398.337.272	10.908.912.579.401
2	Kementerian Pertanian	6.283.932.584.546	5.485.688.506.936
3	Kementerian Perhubungan	1.078.838.541.561	593.592.768.017
Jumlah		**18.422.169.463.379**	**16.988.193.854.354**

1. Kementerian Keuangan

   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.059.398.337.272 dan Rp10.908.912.579.401. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.059.398.337.272, terdiri dari:

   a. Direktorat Jenderal Anggaran

      Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.172.267.720.202 dan Rp10.600.449.516.519 atau mengalami penurunan sebesar Rp428.181.796.317. Berdasarkan pengakuan kurang bayar, reklasifikasi serta hasil pemeriksaan BPK RI, rincian Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

      1) Utang Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.600.449.516.519;
      2) Penurunan Utang Subsidi Jangka Panjang 31 Desember 2020 sebesar minus Rp10.868.494.466.558;
      3) Koreksi Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp268.043.012.194;
      4) Kenaikan Utang Subsidi Jangka Panjang 31 Desember 2020 sebesar Rp10.172.269.658.047;
      5) Total Utang Subsidi Jangka Panjang Tahun 2020 sebesar Rp10.172.267.720.202

   b. Direktorat Jenderal Pajak

      Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp887.130.617.070 dan Rp308.463.062.882.

      Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 merupakan:

      1) Tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 sebesar Rp308.444.080.204 ditambah dengan *recurrent Cost* SPAN sebesar Rp18.982.678. Tagihan tersebut merupakan tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2019 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2019 tidak mencukupi.

      Tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2020 terdiri atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp341.871.338.039, PPh DTP SBN Valas sebesar Rp236.780.895.411 ditambah dengan *recurrent Cost* SPAN sebesar Rp15.320.738.

2. Kementerian Pertanian

   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.283.932.584.546 dan Rp5.485.688.506.936, utang subsidi jangka panjang mengalami kenaikan senilai Rp798.244.077.610 karena terdapat pembayaran kurang subsidi Tahun 2017 dan 2019.

   Utang Jangka Panjang Subsidi sampai dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp6.283.932.584.546 terdiri atas saldo Kurang Bayar Tahun 2019 senilai Rp3.783.466.067.715 dan koreksi utang jangka panjang subsidi sesuai hasil perhitungan BPK pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Sriwijaya sebesar Rp2.500.466.516.831.

3. Kementerian Perhubungan

   Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.078.838.541.561 dan Rp593.592.768.018. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.078.838.541.561 adalah sebagai berikut.

   a. Nilai Utang Jangka Panjang pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp596.323.617.905 dengan penjelasan:

1) Utang Jangka Panjang Subsidi sebesar Rp110.501.878.520 yang merupakan kekurangan pembayaran terhadap pelaksanaan PSO TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan TA 2016 sebesar Rp2.224.897.079.
2) Utang Jangka Panjang Subsidi sebesar Rp485.821.739.385 berdasarkan berita acara perhitungan subsidi pada PT.KAI oleh BPK..

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Sebesar Rp482.514.923.656 merupakan utang jangka panjang subsidi berdasarkan Berita Acara Perhitungan Subsidi pada PT.Pelni oleh BPK.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri Rp764,10 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp764.106.403.002.755 dan Rp667.750.107.263.114, mengalami kenaikan sebesar Rp96.356.295.739.641 atau 14,43 persen. Kenaikan Utang Jangka Panjang Luar Negeri tersebut disebabkan oleh adanya penambahan pembiayaan APBN.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Utang Program	438.966.473.667.352	349.111.788.301.602
Utang Proyek	325.139.929.335.404	318.638.318.961.512
Utang Jangka Panjang Luar Negeri*)	**764.106.403.002.756**	**667.750.107.263.114**

**)Selisih TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 28.**

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,11 miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp25.119.765.919 dan Rp24.499.064.239, mengalami kenaikan sebesar Rp620.701.680 atau 2,53 persen. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada periode per 31 Desember 2020. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Penurunan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan kurs. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	Mata Uang Asal		31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	16.009.440.240	15.777.885.218
Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450	3.872.424.134	3.483.277.476
Jumlah*			**25.119.765.919**	**24.499.064.239**

**) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD, Rp17.330/EUR*

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.

Promissory Note	Tanggal	Nilai (Rp)
2 *(two) promissory note*	19 Januari 1973	129.523.754,28
1 *(one) promissory note*	21 Juni 1973	355.340.803,50
1 *(one) promissory note*	26 Desember 1973	71.956.501,40
1 *(one) promissory note*	25 Mei 1974	514.542.828,77
1 *(one) promissory note*	30 Juni 2000	2.163.936.250
1 *(one) promissory note*	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		**5.237.901.544,95**

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas Rp4.473,19 triliun

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dan Rp5.127.312.881.160.402. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp654.114.382.401.920.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas dan Rekening Penerimaan Panas Bumi) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)***

Rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85 persen, yang terdiri dari 71,15 persen hak pihak lain dan 13,85 persen merupakan Pendapatan Pajak.

Tabel 15. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	31 Desember 2020 *(Audited)*		31 Desember 2019 *(Audited)*	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	**128.674.401,02**	**1.788.702,85**	**295.535.144,40**	**4.279.644,43**
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya [a]	2.173.901.950,26	31.873.703,32	3.567.006.612,58	50.468.419,08
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI [b]	27.898.345,54	389.823,57	-	-
3. Penerimaan lain-lain [c]	14.562.014,74	206.364,82	14.143.159,70	201.253,79
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening [d]	41.549,75	588,36	176.863,48	2.483,87
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit [e]	-	3.412.575,38	-	2.809.769,30
Total Penerimaan	**2.216.403.860,29**	**35.883.055,45**	**3.581.326.635,76**	**53.481.926,04**
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	802.870.191,06	11.573.738,30	824.568.647,83	11.639.819,89
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	4.666.972,48	68.247,07	4.798.347,18	67.466,72
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNBP SDA Migas	-	-	349.230.000,00	4.927.495,56
• Pendapatan dari PNBP Migas lainnya [f]	249.872,14	3.717,60	162.423.555,36	2.265.236,74
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	807.787.035,68	11.643.702,96	1.341.020.550,37	18.900.018,91
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. *Reimbursement* PPN ke Kontraktor	375.713.524,65	5.412.852,51	729.434.716,82	10.299.499,71
b. Pembayaran DMO *Fee* KKKS	526.605.366,98	7.584.062,48	783.346.322,11	10.816.078,09
c. Pembayaran *Underlifting* KKKS	515.393.774,69	7.470.500,76	913.083.747,36	12.915.011,11
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	1.417.712.666,32	20.447.415,75	2.405.864.786,29	34.032.588,91
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI [b]	27.898.345,54	389.823,57	-	-
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening	41.549,75	588,36	176.863,48	2.495,46
5. Pengeluaran Lainnya [g]	2.139.754,92	33.619,83	1.125.179,00	16.009,05
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit [e]	-	3.894.225,71	-	3.021.755,29
Total Pengeluaran	**2.255.579.352,21**	**36.409.376,18**	**3.748.187.378,14**	**55.972.867,62**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**(39.175.491,92)**	**(526.320,74)**	**(166.860.743,38)**	**(2.490.941,58)**
V. Saldo Akhir (I + IV) [h]	**89.498.909,10**	**1.262.382,11**	**128.674.401,02**	**1.788.702,85**

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas) per 31 Desember 2020 sebesar USD89,498,909.10 atau setara Rp1.262.382.112.856. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama tahun 2020.

Penjelasan:

1) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBP SDA Migas dan PNBP Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.
   - PNBP SDA Migas merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD2.173.780.086,31 atau setara Rp31.871.910.733.922.
   - PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas meliputi setoran atas Penerimaan dari Kegiatan *Non-Lifting*, Denda atas Keterlambatan Pembayaran, serta Keuntungan atas Selisih Transaksi Retur sebesar USD121.864 atau setara Rp1.792.589.190,51.
2) Koreksi Pembukuan oleh BI merupakan koreksi atas pendebetan dua kali transaksi di Rekening Migas sebesar USD27.898.345,54 atau setara Rp389.823.568.348. Atas transaksi tersebut, masing-masing telah dilakukan Koreksi Pembukuan Debit dan Kredit oleh BI.
3) Penerimaan Lain-Lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD14.562.014,74 atau setara Rp206.364.821.399 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
4) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Reimbursement* PPN sebesar USD20.351,33 atau setara Rp288.357.995 dan atas retur penyelesaian DMO Fee KKKS sebesar USD21.198,42 atau setara Rp300.000.000.
5) Selisih Kurs Pembukuan Kredit sebesar Rp3.412.575.376.224 dan debit sebesar Rp3.894.225.708.728 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.
6) Pendapatan dari PNBP Migas Lainnya berasal dari pemindahbukuan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebesar USD249.872,14 atau setara Rp3.717.597.698,92 adalah pemindahbukuan atas penerimaan migas dari kegiatan *non-lifting*, antara lain pendapatan jasa giro dan kompensasi penjualan gas bumi.
7) Pengeluaran Lainnya merupakan pemindahbukuan atas dua kali pengkreditan oleh PT Pertamina Persero untuk transaksi bagian negara dari produk LPG Domestik Wilayah Kerja Jabung sebesar USD2,139,754.92 atau setara Rp33.619.829.303.
8) Saldo Akhir sebesar USD89,498,909.10 atau setara Rp1.262.382.112.856 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain *reimbursement* PPN, PBB, dan lainnya. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.220.126.090.533 dan Rp1.027.878.594.169. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

	URAIAN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
I.	**Saldo Awal**	**1.027.878.594.178**	**1.374.911.063.212**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.631.392.972.046	2.251.334.080.206
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		2
	Total Penerimaan	**2.631.392.972.046**	**2.251.334.080.208**
III.	**Pengeluaran:**		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi [a]	384.008.328.296	361.728.617.338
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi [b]	95.531.904.768	199.232.752.080
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum [c]	74.880.717.100	142.158.316.231
	4. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN [d]	1.884.724.525.524	1.895.246.863.593
	5. Koreksi Pembukuan debit	3	
	Total Pengeluaran	**2.439.145.475.691**	**2.598.366.549.242**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**192.247.496.355**	**(347.032.469.038)**
V.	**Saldo Akhir (I + IV)** [e]	**1.220.126.090.533**	**1.027.878.594.178**

Penjelasan:

1) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp384.008.328.296 terdiri dari : (1) tahap pertama sebesar Rp341.224.620.729 dan (2) tahap kedua sebesar Rp42.783.707.567.

2) Pembayaran kembali *(reimbursement)* PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp95.531.904.768 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2019 dan 2020 dengan perincian: (1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2019 sebesar Rp85.057.684.777 dan (2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2020 sebesar Rp10.474.219.991.

3) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp74.880.717.100 dengan rincian:

   a) penggantian bonus produksi tahun 2014 sebesar Rp525.362.079

   b) penggantian bonus produksi tahun 2015 sebesar Rp2.912.114.448.
   c) penggantian bonus produksi tahun 2016 sebesar Rp693.390.828.
   d) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp15.788.416.788.
   e) penggantian bonus produksi tahun 2019 sebesar Rp31.307.067.580.
   f) penggantian bonus produksi tahun 2020 sebesar Rp23.654.365.377

4) Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2020 ke RKUN sebesar Rp1.884.724.525.524 terdiri dari:

   a) PNBP Panas Bumi Triwulan I TA 2020 sebesar Rp191.278.104.950.
   b) PNBP Panas Bumi Triwulan II TA 2020 sebesar Rp455.950.528.775.
   c) PNBP Panas Bumi Triwulan III TA 2020 sebesar Rp613.714.302.456.
   d) PNBP Panas Bumi Triwulan III TA 2020 sebesar Rp623.781.589.343

5) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2020 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian:

No	Pengusaha	*Reimbursement* PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	175.882.676.409	48.447.537.322	224.330.213.731
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	310.438.829.715	5.205.416.616	315.644.246.331
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	259.188.490.318	3.007.583.562	262.196.073.880
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	376.704.935.577	3.337.387.596	380.042.323.173
5.	PT. Geo Dipa Energy (Persero)	23.082.537.027	14.830.696.381	37.913.233.408
Jumlah*)		**1.145.297.469.046**	**74.828.621.477**	**1.220.126.090.523**

**)Selisih total sebesar Rp10 karena pembulatan*

c. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. 9 (sembilan) rekening kredit program yang dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP).*
2. 7 (tujuh) rekening penampungan PIR/UPP disetorkan ke RKUN melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

d. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003298301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	13.606.616.520
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	14.551.094.191
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	33.108.769.932
E1045	RETUR GAJI BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	5.193.000
E1046	RETUR.SPAN-BTN (000140139000511 3)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	326.305.801.701

	E9011	RR RPKBUNP GAJI BPD JABAR BANTEN (0022220170303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.633.810
	S0001	DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas – RPL	1.262.382.108.906
	S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.220.126.090.533
	T0001	Menteri Keuangan Rekening Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	24
	U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	7
	W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	107.855.308
	W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	37.935.100
	W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	3
	W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD) (1008275013)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	18.663.500
	W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
	W0018	RPL BUN PIR NON SPH (020601006221309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
	W0019	RPL BUN UPP NON SPH (020601006222305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
	W0020	RPL BUN PIR NON SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
	U8001	Rekening Kelolaan TDR (502000008980)	111318	Kas di Rekening Kelolaan Dana TDR	-
	S0008	Menkeu. utk Penerimaan Hibah Educt.Sector Support Prog.(ESSP)d/ Uni Eropa d/val.EUR-DCI-ASIE/2009/021-060 DCI-ASIE/2010/021-723 (609001991980)	111312	Kas di RPL dalam Valuta Asing	-
	E8001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	11.492.728
	E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	314.226.438
	E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	793.046.090
	E8004	RR Reksus SBSN DJ Perkeretaapian (0221401042)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
	E8005	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Udara (0221401044)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	11.867.984.568
	E8006	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Laut (0221401046)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
	E8007	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Darat (0221401048)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
	E8008	RR Reksus SBSN DJ Bina Marga (3314010423)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
	E8009	RR Reksus SBSN BP Jaminan Produk Halal (2514010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
	E8010	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Iptek & Dikti (4214010428)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
	E8011	RR Reksus SBSN LIPI (7914010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	1.657.296.708

E8012	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air (7331410424)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8013	RR Reksus SBSN DJ KONS SDA EKSTM (7291410426)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	60.218.181
E8014	RR Reksus SBSN BPP SDM KLHK (7291410442)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8015	RR Reksus SBSN BSN (7841410429)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3000	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (032901004409305)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	291.208.250
E3001	RR RKPHLN ISPHERE (0807209994)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3002	RR RKPHLN BALAI IPDMIP (1190077883377)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3003	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (0001401300021840)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8016	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air 2 (7139327149)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	99.639.622
E8017	RR Reksus SBSN Balitbang KLHK (7139328188)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8018	RR Reksus SBSN DTPA LAPAN (7139329036)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	125.990.455
E8019	RR Reksus SBSN DJ Bina Marga 2 (3314010467)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	252.163.890
E8020	RR Reksus SBSN DJ Perkeretaapian 2 (1048989288)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				**2.885.728.029.464**

2. Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah BMN yang menjadi target penilaian kembali dalam kurun waktu 2017-2018 adalah 884.064 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tersebar pada 13.782 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga (K/L). Hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sesuai data dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 12 Oktober 2018 sebanyak 945.460 NUP BMN (106,94% dari target) telah selesai dinilai kembali dengan wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Dari 945.460 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 748.568 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 157.531 NUP tidak dapat ditemukan, dan sebanyak 39.361 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (berlebih).

Inventarisasi				Penilaian		
Ditemukan	Tidak Ditemukan	Berlebih	Total	Nilai Buku	Perubahan	Nilai Wajar
748.568	157.531	39.361	945.460	1.538.185.259.209.587	4.190.306.958.698.349	5.728.492.217.907.936

Penyajian Hasil Penilaian Kembali Dalam Laporan Keuangan 2019

Pemerintah telah melaporkan bahwa seluruh K/L telah menyampaikan progres tindak lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP K/L yang terdiri atas 1.563 CHR dengan total catatan sebanyak 37.105 NUP. Seluruh catatan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja bersama KPKNL dimana sebanyak 30.416 NUP telah ditindaklanjuti dalam hasil perbaikan penilaian kembali di tahun 2019 sedangkan sisanya sebanyak 6.689 NUP merupakan objek penyelesaian target tahun 2020.

Terkait dengan penyajian hasil penilaian kembali BMN dalam Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga telah menyajikan koreksi hasil penilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019, dan melakukan proses *take in* jurnal di satuan kerja konsolidasi terkait jurnal *take out* Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2019 *(Audited)* dengan pengungkapan yang memadai.

Selama tahun 2019 Pemerintah telah melakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun atau mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp135,51 triliun atau 2,46 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp5.498,63 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	49.617	4.730.424.322.028.610	4.705.749.328.830.090	(24.674.993.198.520)	(0,52)%
2	Gedung dan Bangunan	113.163	188.407.059.414.563	172.571.322.642.624	(15.835.736.771.939)	(8,41)%
3	JJBA	32.819	579.796.366.220.147	484.792.297.321.634	(95.004.068.898.513)	(16,39)%
	TOTAL	195.599	5.498.627.747.663.320	5.363.112.948.794.350	(135.514.798.868.963)	(2,46)%

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2019 audited adalah sebesar Rp4.113,17 triliun, selama tahun 2019 telah dilakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun.

Pelaksanaan perbaikan dan penyajian hasil penilaian kembali BMN pada Tahun 2020

Target penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan di tahun 2020 adalah sejumlah 594.274 NUP atau sebesar 3 (tiga) kali lebih banyak dari jumlah NUP yang telah diselesaikan pada tahun 2019 yang merupakan jumlah keseluruhan atas hasil penilaian kembali BMN untuk BMN ditemukan dan BMN Berlebih tahun 2017-2018 di luar objek perbaikan penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019.

Penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN dilakukan dengan tahapan sampai dengan akhir semester I 2020 proses perbaikan penilaian kembali BMN sudah dapat dituntaskan sampai dengan tahap 4 (Kirim LHI ke KPKNL) dan pada semester II sudah bisa dimulai untuk penyelesaian dari tahap 5 (Penilaian Selesai) sampai dengan tahap 9 (BAR IP Selesai).

Adapun terkait hasil perbaikan penilaian kembali BMN, selama tahun 2020 telah dilakukan perbaikan penilaian kembali BMN 2017-2018 dengan total BMN sebanyak 597.139 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp303,895 triliun atau mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp75,708 triliun atau 33,18 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp228,18 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	55.311	63.784.782.473.610	66.450.810.743.142	2.666.028.269.532	4,18%
2	Gedung dan Bangunan	291.731	87.192.515.114.064	93.300.343.325.162	6.107.826.211.098	7,00%
3	JJBA	250.097	77.210.049.245.246	144.143.969.243.579	66.933.919.998.333	86,69%
	TOTAL	597.134	228.187.346.832.920	308.216.812.198.403	75.707.776.478.963	33,18%

Selanjutnya, pada tahun 2020 juga dilakukan proses penilaian atas BMN yang sebelumnya belum dilakukan penilaian kembali pada tahun 2017-2018 sebanyak 11.629 NUP dengan nilai wajar Rp32,697 triliun dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah NUP	Perubahan
1	Tanah	553	8.926.185.988.500
2	Gedung dan Bangunan	6.845	2.949.713.390.768
3	JJBA	4.231	20.820.688.514.771
	TOTAL	11.629	32.696.587.894.059

Koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 *Audited* sebesar Rp82,48 triliun dengan rincian koreksi hasil penilaian kembali BMN per Kementerian Lembaga sebagai berikut:

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Koreksi Penilaian Kembali BMN
1	002	Dewan Perwakilan Rakyat	16.121.664.578
2	004	Badan Pemeriksa Keuangan	284.839.464
3	005	Mahkamah Agung	198.218.702.710
4	006	Kejaksaan Republik Indonesia	140.493.581.532
5	010	Kementerian Dalam Negeri	72.280.893.102
6	011	Kementerian Luar Negeri	51.074.317.012
7	012	Kementerian Pertahanan	6.686.543.587.430
8	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	37.421.532.134
9	015	Kementerian Keuangan	(11.195.694.130)
10	018	Kementerian Pertanian	93.802.287.817
11	019	Kementerian Perindustrian	113.152.801.955
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10.373.707.447
13	022	Kementerian Perhubungan	9.975.609.230.258
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	126.993.476.530
15	024	Kementerian Kesehatan	152.670.974.083
16	025	Kementerian Agama	6.989.548.549.701

17	026	Kementerian Ketenagakerjaan	38.549.569.453
18	027	Kementerian Sosial	277.669.193.080
19	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.958.602.518
20	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	464.383.857.339
21	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	76.521.589.311.610
22	040	Kementerian Pariwisata	4.064.774.661
23	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	573.448.073.295
24	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.889.081.000
25	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	732.100.000
26	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	276.303.000
27	050	Badan Intelijen Negara	(187.351.000)
28	051	Lembaga Sandi Negara	30.767.215.809
29	054	Badan Pusat Statistik	7.520.813.074
30	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	57.006.925.695
31	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	36.749.733.478
32	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	696.127.860
33	059	Kementerian Komunikasi san Informatika	6.421.065.319
34	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	779.613.944.645
35	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	10.604.648.149
36	064	Lembaga Ketahanan Nasional	(62.314.000)
37	066	Badan Narkotika Nasional	(2.697.079.471)
38	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	20.896.734.600
39	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	26.149.220.428
40	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	40.619.651.553
41	076	Komisi Pemilihan Umum	515.034.214
42	077	Mahkamah Konstitusi	4.318.006.000
43	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	83.050.376.851
44	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.106.438.000
45	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.459.345.240
46	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	7.579.141.282
47	086	Lembaga Administrasi Negara	1.237.723.375

48	088	Badan Kepegawaian Negara	14.577.025.804
49	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	20.466.220.186
50	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	(508.429.676)
51	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	3.119.326.124
52	107	Badan SAR Nasional	22.541.851.336
53	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	44.774.000
54	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	936.256.391.794
55	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	150.721.397
56	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116.264.208.312
57	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	105.215.376.862
58	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	(35.332.822.664)
59	119	Badan Keamanan Laut	(4.077.928.683)
		TOTAL	**104.920.037.433.472**

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 32.

3. **Penilaian Kembali Barang Milik Negara Terhadap Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

Mulai Agustus tahun 2020, *underlying asset* atas penerbitan SBSN menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai hasil revaluasi berdasarkan LKPP Audited 2019 yang disampaikan oleh DJKN melalui Nota Dinas Dirjen Kekayaan Negara Nomor ND-420/KN/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Aset SBSN. BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN pada penerbitan SBSN selama tahun 2020 adalah sejumlah 1836 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp229.174.033.340.840. Dari total nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* pada penerbitan tahun 2020 tersebut, terdapat BMN sejumlah 1096 NUP dengan nilai sebesar Rp115.458.645.299.784 yang telah menggunakan nilai hasil revaluasi sebagaimana disampaikan oleh DJKN. Dengan demikian hasil revaluasi BMN tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penerbitan SBSN tahun 2020, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dari penerbitan SBSN yang jumlahnya mengalami peningkatan dari semula Rp191,8 Triliun menjadi Rp367,8 Triliun.

***Outstanding* SBSN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp960.681.146.000.000 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp974.998.046.000.000,00 (menggunakan kurs 30 Desember 2020). Adapun *Outstanding asset* per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 961.553.482.844.152,00 yang terdiri dari:**

a. **BMN sebesar Rp425.376.347.147.327,00 Nilai ini merupakan nilai sebelum revaluasi adalah sebesar Rp425.376.347.147.327,00 adapun nilai setelah revaluasi adalah sebesar Rp891.548.308.362.290,00 (per April 2021); (rincian terlampir)**
b. **Proyek sebesar Rp 516.496.729.194.678,00; dan**
c. **Jasa sebesar Rp19.697.000.000.000,00.**

Selain itu, dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying* asset antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, maka pada tahun 2020 juga telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset*, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Dengan adanya penggantian asset tersebut maka risiko atas *double underlying asset* dapat diminimalisir. Penggantian *underlying asset* berupa BMN dengan perolehan setelah tahun 2011 yang dilakukan pada tahun 2020 adalah untuk SBSN seri IFR0006, IFR0007, IFR0010, PBS002, PBS005, PBS011, PBS012, PBS014, PBS015, PBS019, PBS021, PBS022, PBS024, PBS025, PBS026, SNI0229, SNI0322, SNI0327, SNI0824, SNI21, SNI22, SNI24, SNI25, SNI26, SR011, USDPBS002.

4. Aset KKKS

Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020, karena tidak memenuhi kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2019	**13.472.698.350.945**
Mutasi Tambah:	**142.394.190.051,92**
Koreksi Alih Kelola KKKS Terminasi yang belum di IP	3.543.952.476,75
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	89.810.732.964,56
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	12.033.840.075,41
Koreksi Pelaporan Tanah Baru	37.005.664.535,20
Mutasi Kurang:	**371.023.859.649,67**
Reklas neraca hasil IP	185.791.372.139,62
Koreksi Kurang Rekkon UAKPA	32.147.436.179,00
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	148.924.561.954,30
Koreksi Alih Kelola KKKS Terminasi yang belum di IP	3.543.952.476,75
Koreksi Pembenahan pencatatan	616.536.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**13.244.068.681.347**

Penjelasan atas mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2019 *(Audited)*.
2) Mutasi tambah sebesar Rp142.394.190.051,92 terdiri dari:
   a) Terdapat koreksi tambah dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED yang merupakan aset perolehan dibawah tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan penilaian sebesar Rp3.543.952.476,75.
   b) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp84.977.438.548.
   c) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp3.968.216.120.
   d) Terdapat koreksi tambah dikarenakan terdapat aset tanah yang telah diidentifikasi oleh SKK Migas sebagai pelaporan tanah baru namun belum disertai dokumen pendukung dan masih akan dilakukan verifikasi kembali pada KKKS JOB Pertamina Medco E&P Simenggaris sebesar Rp491.300.000.
   e) Terdapat koreksi tambah dikarenakan terdapat aset tanah yang telah diidentifikasi oleh SKK Migas sebagai pelaporan tanah baru namun belum disertai dokumen pendukung dan masih akan dilakukan verifikasi kembali pada KKKS Medco E&P Tarakan sebesar Rp373.778.297.

f) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp12.033.840.075,41.

g) Terdapat koreksi dikarenakan pelaporan tanah baru pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp37.005.664.535.

3) Mutasi kurang sebesar Rp371.023.859.649,67 terdiri dari:

a) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS JOB Pertamina Medco Tomori sebesar Rp4.721.688.200.

b) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp168.514.647.689.

c) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp12.555.036.251.

d) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp32.147.436.179.

e) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp136.121.850.747.

f) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp1.645.559.900.

g) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp11.157.151.307.

h) Terdapat koreksi kurang dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED yang merupakan aset perolehan dibawah tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan penilaian sebesar Rp3.543.952.477.

i) Terdapat koreksi Pembenahan Pencatatan karena pencatatan ganda hasil koreksi penyesuaian pencatatan rekomendasi BPK atas KKKS hasil IP 2009/2010 pada Eks KKKS Medco Kampar sebesar Rp616.536.900.

Tindak Lanjut Pembenahan Selisih Tanah Aset KKKS atas Temuan Pemeriksaan BPK RI:

No	KKKS	Temuan BPK (Rp)	Selesai dilakukan Tindak lanjut (Rp)	Belum selesai dilakukan Tindak Lanjut (Rp)
1	JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi	3.274.558.000	3.274.558.000	-
2	a. PT Pertamina EP	1.041.133.782.335	25.527.879.335	1.015.605.903.000
	b. PT Pertamina EP (Aset TAC)	-	197.787.502.270	-
3	Eks VICO	371.056.100.334	3.968.216.120	367.087.884.214
4	PT Chevron Pacific Indonesia	10.592.439.949.130		10.592.439.949.130
5	PT Pertamina Hulu Energi Siak	9.403.683.400		9.403.683.400
6	Eks CICO	475.008.806.000		475.008.806.000
7	Eks Petroselat, Ltd.	10.602.840.000		10.602.840.000
8	Eks PT Medco E&P Indonesia (Kampar)	85.269.873.180	616.536.900	84.653.336.280
Total		**12.588.189.592.379**	**231.174.692.625**	**12.554.802.402.024**

Terdapat 8 (delapan) KKKS yang dilakuan Off Balance Sheet karena hasil IP 2009/2010 senilai Rp12.588.189.592.379. Dari keseluruhan KKKS tersebut, telah dilakukan *Desk Review* terhadap Dokumen Perolehan dan Rekonsiliasi serta telah selesai dilakukan Tindak Lanjut sebesar Rp231.174.692.625 dan masih terdapat 7 KKKS yang belum selesai dilakukan tindak lanjut sebesar Rp12.554.802.402.024. Terhadap KKKS yang belum selesai dilakukan tindak lanjut, telah dilakukan upaya perbaikan pencatatan tanah Off Balance

Sheet dengan penjelasan sebagai berikut:

1. KKKS PT Pertamina E&P
   Terdapat 18 aset telah diusulkan take out karena merupakan aset KMK 92 (nilai wajar pada 9 Aset dengan eks pertamina masih berbeda) dan menjadi temuan di Dit.PKNSI DJKN Kementerian Keuangan.
2. Eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga-Sanga
   Temuan Off Balance sheet tanah pada eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga Sanga belum selesai ditindaklanjuti, karena menunggu selesai dilakukan proses BAST (data catatan tanah eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga sanga mengacu pada BAST tersebut).
3. KKKS PT Chevron Pacific Indonesia
   Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia belum selesai ditindaklanjuti karena masih dalam proses Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan pelaporan *Unrecorded* belum selesai 100%.
4. KKKS PT Pertamina Hulu Energi Siak
   Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Siak belum ditindaklanjuti karena dalam proses pembenahan catatan di KKKS (data KKKS berbeda dengan data SKK Migas dan DJKN/PPBMN).
5. Eks KKKS Chevron Indonesia Company
   Hasil penelusuran DJKN/PPBMN, SKK Migas dan KKKS, tanah di lokasi Lawe-Lawe dan Penajam tersebut merupakan aset Pertamina Persero sesuai BA rapat IP tanggal 3 September 2015 (DJKN telah bersurat kepada Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Persero untuk meminta klarifikasi lebih lanjut).
6. Eks KKKS Petroselat Ltd
   Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS Petroselat Ltd belum dapat ditindaklanjuti karena pailit.
7. Eks KKKS Medco E&P Indonesia Kampar
   Temuan Off Balance Sheet tanah pada Eks KKKS PT Medco E&P Indonesia Kampar Sebagian belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu selesai dilakukannya proses BAST (data catatan tanah eks KKKS PT Medco E&P Indonesia Kampar mengacu pada BAST tersebut).

b. Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi *(plug and abandoned)*.

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2020 dengan total nilai USD USD152.437.284. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya disajikan sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Sumur 31 Desember 2019 (USD)
16 KKKS	152,572,616.67	57,249	192,582.00	152,437,284.00

a) Mutasi tambah sebesar USD57,249 berasal dari pembenahan asset pada KKKS Malacca Strait.
b) Mutasi kurang sebesar USD192,582 berasal dari adanya alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS CNOOC.

2) **Aset Kondisi Rusak Berat**

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
93,766,532	18, 985.234	6,133,270	106,618,496

a) Mutasi tambah sebesar USD18,985,234 berasal dari Reklasifikasi dari Neraca akibat pemutakhiran data kondisi barang oleh KKKS.

b) Mutasi kurang sebesar USD6,133,270 berasal dari adanya transaksi penjualan lelang/*transfer out*/selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

3) **Aset *Subsequence Expenditure* (SE)**

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1,283,582,746.07	68,772,549.44	635,872,015.27	716,483,280.24

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD68,772,549.44 berasal dari :
   a) penambahan SE yang dilaporkan oleh SKK Migas;
   b) Koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka pembenahan pencatatan aset.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD635,872,015.27 berasal dari kapitalisasi SE yang reklas ke neraca sebesar USD571,087,094.45 dan koreksi pembenahan aset sebesar Rp64,784,921.82.

c) Terdapat SE pada 8 KKKS yaitu Premiere Oil Natuna Sea B.V, Chevron Indonesia Company, Medco EP Natuna, Saka Indonesia Pangkah, Exxon Mobile Cepu, Petrochina International Jabung Ltd, Pertamina EP dan VICO Indonesia dengan nilai perolehan dibawah 50 persen nilai perolehan induk yang tidak dapat dikapitalisasi ke Neraca dengan rincian sebagaimana berikut.

Kode	Nama KKKS	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
A15	Medco EP Natuna	38.484.052	592.802.632.384
A23	Saka Pangkah	20.413.593	196.072.560.285
A80	Vico Sanga-sanga	627.211	9.256.878.800
A51	Premier Oil Natuna Sea BV	2.356.068	23.074.949.382
A47	Petrochina International Jabung LTD	5.045.207	49.618.324.309
A7	Chevron Indonesia Company East Kalimantan	12.849.266	57.375.293.927
A62	PT Pertamina EP	9.702.053	286.260.699.137
A39	ExxonMobil Cepu	19.249.891	260.242.761.350
Jumlah		**108.727.341**	**1.474.704.099.573**

Aset HBM KKKS Exxonmobil Cepu (A.39) dari SE sebesar Rp1.607.798.891.263, diketahui memiliki deskripsi aset "tanah", dengan rincian sebagai berikut.

No	Nomor Sinas	Deskripsi	Nilai perolehan (Rp)
1.	9913000001602	*Land - River Water Intake*	28.256.155.457
2.	9911990000102	*Land - Building and Other 2015*	54.185.333.406
3.	9915990026704	*Land Train B 2016*	177.801.272.487
4.	9915990026703	*Land EPC 1 Others 2016*	338.315.147.612
5.	9915990026702	*Land Train A 2015*	554.682.547.338
6.	9913000000802	*Land - Water Basin*	454.558.434.964
7.	9911990000103	*Land - Building and Other 2016*	-
Total			**1.607.798.891.263**

Atas SE tersebut akan dilakukan penelusuran ke dokumen sumber SE oleh SKK Migas untuk memastikan bahwa aset tersebut adalah tanah atau HBM. Hasil penelusuran tersebut akan digunakan untuk perbaikan nilai aset KKKS dalam Laporan Keuangan.

4) **Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2020.**

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2020 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
5,911,524,305.49	112,870,743.40	243,569,456.19	5,780,825,592.69

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD112,870,743.40 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan asset KKKS oleh SKK Migas.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD243.569.456,19 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5) **Aset dalam proses penghapusan**

Terdapat aset yang sudah terjual. namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
152,159,458	4,223,249	49,418,099	106,964,608

a) Mutasi Tambah aset sebesar USD4,736,788 merupakan reklasifikasi asset yang di *off-balance* ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada tahun 2019, namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.

b) Mutasi Kurang aset sebesar USD42,893,165 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) **Selisih Pencatatan dengan Unit Pengendali**

Terdapat selisih pencatatan nilai perolehan dan selisih *line item* HBM antara catatan Pengelola Barang dengan catatan Unit Pengendali pada 31 Desember 2020 yang direklas dari neraca dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi serta rekonsiliasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Unit Pengendali sebagai berikut:

Nilai Perolehan Audited 2019 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2020 (USD)
0	132,349,819.14	0	132,349,819.14

- Mutasi tambah sebesar USD132,349,819.14 merupakan nilai perolehan aset pada KKKS Pertamina EP yang masih perlu di Rekonsiliasi dengan SKK Migas dikarenakan perbedaan ID *Number Asset.*
- Selisih pencatatan yang dilakukan reklasifikasi dari Neraca sesuai ketentuan pada pasal 8 huruf b angka 4 PMK 116/PMK.05/2020 dengan nilai wajar sebesar Rp1.489.240.489,206 terdiri dari:
  - KKKS Chevron Indonesia Company sebesar Rp884.845.544.517,40.
  - KKKS Kalrez Petroleum Limited sebesar Rp11.538.453.525,36.
  - KKKS Medco EP Indonesia sebesar Rp44.871.576.233,35.
  - KKKS Pertamina Hulu Energi OSES sebesar Rp121.127.752.486.
  - KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp133.138.227.657.
  - KKKS Kangean Energy Indonesia sebesar Rp35.222.412.910,42.
  - KKKS Medco EP Rimau sebesar Rp35.816.813.144.
  - KKKS PHE Ogan Komering sebesar Rp1.355.919.273.
  - KKKS JOB Pertamina Golden Spike sebesar Rp117.600.000.
  - KKKS Pertamina EP sebesar Rp150.030.102.737.
  - KKKS BOB Siak Pusako sebesar Rp1.607.372.385,50
  - KKKS PHE Jambi Merang sebesar Rp293.677.750.
  - KKKS Premier Oil Natuna Sea sebesar Rp1.399.629.125.
  - KKKS Mobil Cepu Ltd sebesar Rp65.058.050.820.
  - Eks KKKS JOB Pertamina Jadestone Energy sebesar Rp1.355.919.273.
  - Eks KKKS JOB Pertamina Petrochina East Java sebesar Rp1.461.437.369.
- Terdapat selisih pencatatan yang telah dilakukan reklasifikasi dari Neraca pada periode sebelumnya dan belum selesai ditindaklanjuti pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp6.579.234.311.467,06

c. Aset Harta Benda Inventaris

Nilai Perolehan 2019 *Audited* (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2020 (USD)
4,565,579.49	366,971.29	378,957.69	4,553,593.10

1) Mutasi tambah aset sebesar USD366,971.29 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
2) Mutasi kurang akurang bayar DBHset sebesar USD378,957.69 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*/selisi pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2020 yaitu sebanyak 15.426 bidang tanah.
b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.
c. Satuan kerja mengajukan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah ke Kantor Pertanahan setempat.
d. Kantor Pertanahan memproses penerbitan pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan permohonan dari satuan kerja.
e. Penyusunan daftar usulan indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah.

Sebagai dampak kebijakan *refocusing* APBN yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menangani permasalahan pandemi virus COVID-19 yang dialami dunia, Kementerian ATR/BPN melakukan revisi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara sehingga output target pensertipikatan tahun 2020 yang semula sebanyak 15.426 bidang direvisi menjadi 6.921 bidang. Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2020 sebanyak 7.870 bidang (113,7%) dari target sebanyak 6.921 bidang.

Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2021, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah. Data bidang tanah usulan daftar indikatif tersebut telah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasikan biaya pensertipikatannya pada DIPA Kementerian ATR/BPN dan kepada Kementerian/Lembaga pemilik tanah agar dialokasikan biaya pendampingan lapangan di tahun 2021.

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat. Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.
b. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
c. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa Data Khasanah Arsip Statis yang terdiri atas:
   1) Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.370 meter linier.
   2) Poster sebanyak 336 lembar
   3) Arsip Kartografi/Peta sebanyak 131.072 lembar.
   4) Arsip foto sebanyak 3.474.532 lembar
   5) Arsip Film sebanyak 59.035 reel.
   6) Arsip Mikrofilm sebanyak 14.502 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.

7) Arsip Video sebanyak 25.774 kaset.
8) Arsip Rekaman Suara sebanyak 54.727 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 *reel*.
9) Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.363 keping.
10) Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
11) Arsip *Flashdisk* sebanyak 2 keping.
12) Arsip elektronik sebanyak 390 *terrabyte*.

Jumlah Aset Bersejarah pada Satker BAST Aceh, terdiri atas :

1) Arsip Kertas sebanyak 8.879 meter linier;
2) Arsip Kearsitekturan sebanyak 495 meter linier;
3) Arsip Peta sebanyak 5.536 lembar;
4) Arsip CD/DVD /VCD sebanyak 1228 keping;
5) Arsip Kaset sebanyak 52 kaset;
6) Arsip Foto sebanyak 1979 lembar;
7) Arsip Disket sebanyak 43 keping.

d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit berupa Tugu Lady Rafles, Tugu J.J. Smith, Tugu Teysmann, dan Arca Lembu Nandi di PKT Kebun Raya LIPI.
e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 977.283 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
   1) Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb);
   2) Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
g. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno.
h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
   1) Candi/ tugu peringatan/ prasasti sebanyak 15 unit;
   2) bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit; dan
   3) Laporan/ bahan perpustakaan sebanyak 9 buah.
j. Kementerian Luar Negeri berupa Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gedung Pancasila. Aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

7. <u>Badan Lainnya</u>

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:
a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, terdapat 2 (dua) jenis yaitu UBL Satker/Bagian Satker dan UBLBukan Satker.

Pada tahun 2020 terdapat penambahan 5 UBL baru dan pengurangan 12 UBL, sehingga jumlah UBL per 31 Desember 2020 adalah 70 UBL. Rincian penambahan/pengurangan UBL adalah sebagai berikut:

Penambahan 5 UBL baru, antara lain :

1. Tim Pengembangan Vaksin Covid-19
2. Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
3. Komite Cipta Kerja
4. Komite Nasional Geopark Indonesia
5. Komite Nasional Disabilitas

Pengurangan 12 UBL , antara lain:

1. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Badan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minur (BPP-SPAM)
5. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU)
6. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
7. Dewan Riset Nasional
8. Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia)
9. Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN)
10. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
11. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
12. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dari total 70 UBL, 61 UBL adalah UBL Satker/Bagian Satker dan 9 UBL adalah UBL Bukan Satker. Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
2. Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)
3. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
4. Otorita Asahan (dalam proses likuidasi)
5. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
6. Komite Nasional Geopark Indonesia
7. Komite Nasional Disabilitas
8. Otoritas Nasional Senjata Kimia
9. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pemerintah menyajikan ekuitas bersih atas beberapa UBL Bukan Satker sebagai aset lainnya pada Unit Badan Lainnya, yaitu berasal dari UBL sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI

4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Badan Pengelola Keuangan Haji

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 29.**

8. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	DATA ABMA/T	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Kompensasi	Nilai Pasar Aset	Besaran Kompensasi	Status
1	Rumah Tinggal di Hl. Sumatera No.27 (d.h. 13-15)	Surat Menkeu No.S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020	7.503.853.000	7.503.853.000	Belum dikunasi

9. Aset Kredit Eks BPPN

Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank. Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit *Asset Transfer Kit* (ATK), aset kredit *Non Asset Transfer Kit* (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB.SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

Daftar Aset Kredit Non ATK yang Belum Diterbitkan PB/ditandatangani PJPN

No	Uraian	31 Desember 2020
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	307.805.191.997
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	28.834.322.845.767
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	897.678.554.101
	Jumlah	**30.039.806.591.865**

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu pada Bank Centris (BBKU), PT sebesar Rp897.678.554.101.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN senilai Rp4.807.839.787.364 yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan BPK atas 7188 aset kredit tanpa disertai dengan dokumen kredit yang adanya dan besarnya piutang hanya berdasarkan bukti dari SAPB dengan rincian sebagai berikut.

No.	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Nilai Dalam Rupiah
1.	Dollar Amerika (USD)	232.486.020	3.279.216.479.185
2.	Dollar Australia (AUD)	7.191	77.455.916
3.	Dollar Hongkong (HKD)	12.807.644	23.301.458.707
4.	Dollar New Zeland (NZD)	1.785.135	18.058.645.160
5.	Dollar Singapura (SGD)	144.507	1.538.149.687
6.	Euro (EUR)	90.023	1.560.109.843
7.	Golden Belanda (NLG)	6.393	244.169.498
8.	Poundsterling (GBP)	83.503	1.593.686.546
9.	Rupiah (IDR)	1.479.580.554.909	1.479.580.554.909
10.	Yen Jepang (JPY)	19.557.775	2.669.077.913
	Jumlah	**1.479.847.523.100**	**4.807.839.787.364**

Direktorat PKNSI melakukan penatausahaan pada tahun 2020 terhadap barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain

PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) periode Semester II Tahun 2020 antara Direktorat PKNSI dan KPKNL. Adapun hasil penatausahaan dimaksud adalah sebagai berikut.

Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
AJB	139
Bukti Pemilikan Kapal	38
BPKB	658
Girik	294
SHGB	370
SHGU	6
SHM	816
SHP	10
Jumlah	**2.331**

Direktorat PKNSI akan menyempurnakan data penatausahaan barang jaminan dimaksud sampai dengan Semester II Tahun 2022. Atas daftar barang jaminan aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan eks Kelolaan PT. PPA (Persero) yang masih dikelola dan belum diadministrasikan oleh DJKN serta masih dalam proses inventarisasi DJKN, akan diungkapkan dalam LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI Tahun 2022.

10. Aset Properti Eks BPPN

Aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan, pada tahun 2009 - 2020 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN TA 2013 - 2020

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	626	400.289.684.383,89
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.069.231.521
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	248	73.615.607.202

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2016-2019, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	**272**	**85.328.090.117**
Hasil Penelusuran TA 2016-2019:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912,345,839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA		
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita		
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)		
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	0
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10,800,137,076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	**248**	**73.615.607.202**

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum. Rincian aset eks BPPN yang berperkara di lembaga peradilan sampai dengan per 31 Desember 2020 disajikan di **Lampiran 25H.**

11. <u>Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan dan Peralihan, serta Penguasaan Fisik atas Aset Eks BLBI</u>

Aset Lain berupa aset properti eks BPPN dan eks PT. PPA (Persero), Kementerian Keuangan telah melaksanakan inventarisasi Aset Properti dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN
   1) Terdapat 184 unit aset senilai Rp1.555.146.271.196 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan;
   2) Terdapat 1.072 unit aset senilai Rp1.019.550.453.562, yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan;
   3) Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan;
   4) Terdapat 709 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)
   1) Terdapat 1.195 unit aset senilai Rp3.247.509.025.705 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan;
   2) Terdapat 294 unit aset senilai Rp813.919.115.844 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan;
   3) Terdapat 31 unit aset senilai Rp686.157.637.452 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan;

4) Terdapat 557 unit aset senilai Rp1.725.818.297.515 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah:

a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 643 aset;
b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 1.463 aset;
c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 820 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan Pada tahun 2020 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebanyak 326 unit.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan dan/atau dokumen peralihan aset properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Terhambatnya penyelesaian inventarisasi terjadi karena adanya pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 selama beberapa waktu yang meniadakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (adanya cluster Gedung Arsip DJKN), sehingga perlu dilakukan penutupan dan sterilisasi Gedung Arsip DJKN selama beberapa minggu. Dengan demikian, kegiatan inventarisasi pada tahun 2020 terakhir dilaksanakan per tanggal 25 November 2020.

Kegiatan inventarisasi, yang dilakukan tahun 2020 dan masih berlangsung pada tahun 2021, belum sepenuhnya selesai dan belum dilakukan reviu oleh APIP, sehingga aset properti yang disajikan pada Neraca belum berdasarkan hasil inventarisasi per 25 November 2020. Hasil inventarisasi aset properti akan digunakan setelah kegiatan inventarisasi selesai dan dilakukan reviu oleh APIP, serta akan disajikan pada LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI periode Semester I Tahun 2022.

Atas piutang bukan pajak berupa aset kredit PKPS beserta jaminannya, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan akan melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan. Sedangkan aset kredit yang tidak memiliki jaminan akan dilakukan penelitian dan penelusuran ke harta kekayaan obligor, dan selanjutnya dilakukan upaya hukum melalui Kejaksaan Republik Indonesia paling lambat pada tahun 2022.

12. <u>Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)</u>

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan tahun 2020, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) persetujuan, dengan total PNBP sebesar Rp32.622.482.000. Rincian atas pemanfaatan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25C.**

13. <u>Penggunaan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Kementerian/Lembaga</u>

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga 2020, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 212 aset. Rincian atas penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25D.**

Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat

Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang. Rincian atas rencana penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25E.**

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri. Sesuai Surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Rincian atas usul penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25F.**

14. Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

a. Tanggal 17 Juni 2016
   Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).
b. Tanggal 18 Januari 2017
   Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa Apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.
c. Tanggal 22 September 2017
   Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).
d. Tanggal 27 Desember 2018
   Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.
e. Tanggal 18 Desember 2019
   Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.
f. Tanggal 27 Desember 2020
   Serah kelola 61 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp53.833.690.650.

Terkait daftar aset properti yang diserahkelolakan kepada LMAN sebagaimana tersebut di atas diuraikan rinci dalam **Lampiran 25G.**

15. Pemindahan Dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan

Pemindahan dana yang dikelola BLU ke BLU lainnya dilakukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dana yang dipindahkan berasal dari BLU LMAN kepada 29 BLU rumpun layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan RI, Kemhan/TNI, dan POLRI yang telah berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 dan mengalami kesulitan dalam kesinambungan layanan dan keuangan.

Dasar Hukum atas pemindahan dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan adalah sebagai berikut.

a. PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

b. KMK Nomor 319/KMK.05/2020 tentang Pemindahan Saldo Kas BLU LMAN ke BLU Rumpun Layanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19;

c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemindahan Dana yang Dikelola oleh BLU ke BLU Lain untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Total dana yang dipindahkan adalah Rp1.116.422.586.550. Sampai dengan 31 Desember 2020 dana tersebut sudah digunakan oleh BLU Penerima untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp1.047.555.827.482 atau 93,83 persen dari dana yang dipindahkan.

Dampak positif yang signifikan dari adanya pemindahan dana BLU antara lain:

a. Dalam waktu cepat berhasil menyediakan penambahan kapasitas ICU, Ruang Isolasi Tekanan Negatif, Ruang Isolasi Biasa serta fasilitas gedung/bangunan lainnya untuk meningkatkan layanan Covid-19;

b. Dalam waktu cepat berhasil meningkatkan keselamatan dan kepercayaan diri petugas layanan Covid-19 dengan penyediaan APD yang dibutuhkan;

c. Dalam waktu cepat berhasil memangkas waktu tunggu hasil pemeriksaan SWAB PCR dari yang semula 3-6 hari menjadi hanya 1 hari saja;

d. Dalam waktu cepat berhasil meningkatkan kualitas diagnosa dan kualitas pemeriksaan bagi pasien Covid-19 dengan penyediaan alat kesehatan yang lebih canggih dan/atau bersifat *portable* sehingga juga memudahkan pelaksanaan layanan;

Penyebab masih adanya sisa dana yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2020 adalah:

a. BLU Rumpun Layanan Kesehatan penerima pemindahan dana mampu melaksanakan efisiensi sehingga pencapaian output yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan biaya yang tidak sebesar sebagaimana yang dimintakan (48,1 persen dari total sisa dana).

b. Terdapat beberapa output yang secara tidak terduga mendapatkan komitmen pendanaan dari sumber lain di luar pemindahan dana BLU sehingga didahulukan mengunakan sumber dana lain tersebut untuk mencapai output yang direncanakan (34,5 persen dari total sisa dana).

c. Terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terkendala proses pengadaan, mulai dari proses impor sampai dengan adanya gagal lelang (9,1 persen dari total sisa dana).

d. Tagihan dari penyedia barang dan jasa atas kegiatan yang sudah dilakukan belum diterima oleh BLU rumpun layanan kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sehingga belum dapat dibayarkan meskipun kegiatan sudah 100% terselesaikan (4.7 persen dari total sisa dana).

e. Terdapat insentif perpajakan yang mengakibatkan pembayaran terhadap penyedia jasa menjadi tidak sebesar dana yang dialokasikan, sehingga tersisa dana senilai angka yang seharusnya merupakan potongan pajak (3,6 persen dari total sisa dana).

Rincian penggunaan Pemindahan Dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 4 D.**

16. **Investasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diatur bahwa:

Pasal 1: Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris

pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

Pasal 15: Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

Kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) belum dapat diukur secara memadai karena perlu memastikan ada tidaknya tanggung jawab hukum Pemerintah yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan informasi terakhir, terhadap putusan pengadilan atas kasus pidana tersebut masih akan terus berproses pada tahapan Banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam hal diputus (*incracht*) bersalah kepada pelaku tindak pidana akan dihukum dan hasil kejahatan yang merugikan negara disita untuk dikembalikan negara.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sesuai POJK nomor 71/POJK.05/2016 PT Asuransi Jiwasraya telah menyusun Buku Rencana Penyelamatan Keuangan (RPK) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN selaku RUPS pada tanggal 11 September 2020 dan telah dibahas dalam rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 14 September 2020. Dalam RPK tersebut PT Asuransi Jiwasraya mengajukan tiga opsi fundamental yakni (i) opsi *bail-out*, (ii) opsi likuidasi, dan (iii) opsi restrukturisasi dan *bail-in* yang mencakup dukungan Pemerintah untuk peningkatan modal. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, politik dan berbagai risiko lainnya, maka diputuskan opsi restrukturisasi dan *bail-in* sebagai opsi yang paling optimal dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada para pemegang polis.

Opsi Restrukturisasi dan *Bail-In* dijelaskan sebagai berikut :

1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan restrukturisasi seluruh portofolio polis eksisting, mengubah produk dengan karakterisik manfaat pasti (*defined benefit*) menjadi iuran pasti (*defined contribution*) dan disertai kemungkinan penyesuaian (*haircut*) nilai tunai dengan target penyelesaian restrukturisasi polis pada tanggal 31 Mei 2021.
2. Sebagai induk *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan, PT BPUI (Persero) telah membentuk anak usaha PT IFG *Life*, yang telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dari OJK pada tanggal 7 April 2021;
3. Setelah selesainya restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan memindahkan aset dan liabilitas hasil restrukturisasi kepada PT IFG *Life*. Sementara portofolio gagal restrukturisasi dan aset *non-clean and clear* akan tetap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
4. Dalam rangka mempertahankan *Risk Base Capital* (RBC) IFG *Life* paling sedikit 120%, sebagai indikator modalitas yang cukup sebagai perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan bisnisnya, Pemerintah dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 telah menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan untuk PMN kepada PT BPUI (Persero) yang nantinya akan bertindak selaku induk usaha IFG *Life* sebesar Rp20 triliun kepada BPUI. Kajian atas PMN tersebut saat ini sedang dalam proses;
5. Selain dari PMN, sumber pendanaan PT BPUI (Persero) dalam rangka peningkatan modal PT IFG *Life* adalah dengan melakukan *Fundraising* dengan *update dividen* dari anak perusahaan PT BPUI (Persero), yang diproyeksikan dapat menghimpun dana sebesar Rp4,7 triliun.

Sebagai bentuk peran dan tanggung jawab Pemerintah terhadap asuransi Asabri, Pemerintah sebagai pemegang saham menyiapkan regulasi untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan penyesuaian bunga aktuaria sebagai wujud pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan investasi PT Asabri (Persero). Selain itu, Pemerintah tengah mengkaji strategi pemulihan keuangan PT Asabri (Persero). Pemerintah akan segera menyelesaikan perbaikan regulasi terkait PT Asabri(Persero) , dimana sebagai wujud perbaikan tata kelola dimaksud, Pemerintah telah membentuk Komite Pengawas Badan Penyelenggara Asuransi/Jaminan Sosial sesuai KMK nomor 118/KMK.01/2020.

17. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu. Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP Nomor 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

a. karakteristik kewajiban kontinjensi;
b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
c. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan:

1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
2) percepatan penyediaan air minum;
3) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
4) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera;
6) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
7) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8) percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan
9) Penjaminan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat Pengaturan Pemberian Jaminan

1. Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
2. Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.
3. Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber *(risk factor)* dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber *(risk factor)* dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
4. Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.
5. Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
6. Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelengaraan *Light Rail Transit*/LRT Jabodebek.
7. Perpres Nomor 58/2017, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian /Lembaga /Pemda /BUMN /BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan badan usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.
8. Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya *(default)*. Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain :

1. Perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan dana;
2. Perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp590,58 miliar, yang terdiri atas anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp421,07 miliar dan anggaran kewajiban penjaminan untuk program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN sebesar Rp169,52 miliar. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional tersebut dalam APBN TA 2020 sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko *default* dari program penjaminan untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Sampai dengan tahun 2020, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Sampai dengan tahun 2020 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 89 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp594,82 triliun (USD25,49 miliar, Rp200,82 triliun dan EUR0,78), dimana terdapat 29 penjaminan yang telah berakhir sebesar ekuivalen Rp59,58 triliun (USD1,81 miliar dan Rp32,59 triliun) serta akumulasi posisi outstanding kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir triwulan III tahun 2020 adalah sebesar ekuivalen Rp295,25 triliun (USD14,48 miliar dan Rp70,59 triliun dan EUR0,49 miliar). Adapun rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)			Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
								Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	15	10	s.d.	15	USD 3,70 IDR 8.395,18	IDR 63.545,81	USD 1,03 IDR 3.763,16	IDR 19.153,02
2	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	6	6	s.d.	13	IDR 229,50	IDR 229,50	IDR 84,49	IDR 84,49
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	7	15	s.d.	35	EUR 0,78 USD 2,07	IDR 44.701,53	EUR 0,49 USD 1,23	IDR 26.898,88
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan	10	5	s.d.	25	IDR 54.943,75 USD 0,60	IDR 63.894,55	IDR 34.363,72 USD 0,60	IDR 43.314,52
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15	s.d.	20	USD 3,91	IDR 58.398,31	USD 3,88	IDR 57.927,28
6	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15	s.d.	21	USD 4,24 IDR 68.536,14	IDR 131.846,64	USD 3,56 IDR 19.332,06	IDR 72.368,35
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5	s.d.	9	IDR 4.454,80	IDR 4.454,80	IDR 2.751,10	IDR 2.751,10
8	Penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	15	s.d.	18	IDR 19.250,00	IDR 19.250,00	IDR 5.791,73	IDR 5.791,73
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	3	10	s.d.	10	IDR 12.423,79	IDR 148.923,49	IDR 4.504,48	IDR 66.958,63
			Pengembang Listrik Swasta	3	15	s.d.	20	USD 9,15		USD 4,19	
Total				60				USD 23,68 EUR 0,78 IDR 168.233,16	IDR 535.244,63	USD 14,48 EUR 0,49 IDR 70.590,74	IDR 295.248,00
Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 30 September 2020				(IDR/USD1)				14.918,00			
				(IDR/EUR1)				17.527,17			

**) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta) sejak Tanggal Operasi Komersial*

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp7,67 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

Pengungkapan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Penjaminan sampai dengan tahun 2020 hanya terkait kewajiban penjaminan di Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah) dan Bagian Anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

Pengungkapan Kewajiban Kontinjensi pada Kementerian Kesehatan

Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan terdapat Kewajiban Kontinjensi atas klaim COVID-19 dengan status *dispute* sebesar Rp7.758.199.309.700 dengan rincian klaim belum diverifikasi sebesar Rp1.279.718.055.600.

18. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

Pada Tahun 2020 terdapat persetujuan pemanfaatan BMN dengan rincian sebagai berikut:

1) Sewa BMN kepada PT. Elnusa Tbk berupa 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 6.510,08 m2 berikut bangunan diatasnya, terletak di Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp2.160.000.000, selama 5 tahun mulai Februari 2016 sampai dengan Januari 2021. Berikut detail sewa BMN Eks Pertamina oleh PT Elnusa:

a) Perjanjian Sewa BMN antara Kemenkeu RI dengan PT Elnusa Tbk Nomor PRJ-2/MK.6/KN.3/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan objek sewa berupa tanah dengan luas 4.611 m2 dan sebagian bangunan dengan luas 852,2 m2 yang berlokasi di Jalan Cirebon, Komplek Pertamina EP Aset 2 Lapangan Pendopo, Kabupaten Pali. Jangka waktu sewa selama 5 tahun mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 8 Februari 2021, dengan harga sewa sebesar Rp1.735.000.000.

b) Perjanjian Sewa BMN antara Kemenkeu RI dengan PT Elnusa Tbk Nomor PRJ-1/MK.6/KN.3/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan objek sewa tanah dengan luas 1.899,08 m2 dan sebagian bangunan dengan luas 562,7 m2 yang berlokasi di Jalan Pramuka, Komplek Pertamina EP Aset 2 Lapangan Prabumulih, Kotamdya Prabumulih, Sumatera Selatan. Jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2021. Harga sewa sebesar Rp.425.000.000.

2) Sewa BMN kepada Bass Oil Sukananti Limited berupa 1 (satu) bidang tanah dengan total luas 791,07 m2 berikut bangunan diatasnya, terletak di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp243.100.000, selama 5 tahun mulai Januari 2017 sampai dengan Januari 2021.

3) Sewa BMN kepada PT Pertamina (Persero) berupa 15 unit selain tanah dan/atau bangunan (Tanki-04 beserta fasilitas terkait) terletak di Terminal Jatibarang Balongan, sebesar Rp614.651.000, selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021.

19. PTNBH Universitas Indonesia

Laporan Keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya.

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2017

Berdasarkan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perhitungan Pencatatan Terkait Aset Tetap UI yang berasal dari hibah Pemerintah pada Laporan Keuangan UI Tahun 2017, dijelaskan bahwa UI telah mencatat sejumlah aset hibah Pemerintah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian PUPR) kepada Universitas Indonesia. Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil audit KAP yang berpedoman ketentuan PSAK 16 Aset Tetap di mana Auditor berpendapat bahwa aset tersebut dapat diakui sebagai aset tetap UI karena telah memenuhi kriteria dalam PSAK 116. Namun secara peraturan perundang-undangan, aset tersebut masih tercatat sebagai BMN karena belum diterbitkan BAST Hibah BMN yang menjadi dasar peralihan hak kepemilikan *"Strata of Title"*. Per tanggal 31 Desember 2020, Aset yang belum ada dokumen BAST Hibah BMN antara lain:

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai yang ditambahkan sebagai Beban Operasional UI (2019) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2019)	Progres Penyelesaian	Dokumen Pendukung
1	Gedung Asrama Blok H-1	Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR	16.545.400.000		16.545.400.000	Sedang proses	Surat Menkeu No, S-1121/MK.06/2020 hal Permohonan Persetujuan Hibah BMN pada Kementerian PUPR kepada UI tgl 2 Desember 2020

2	Hibah RS UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti	1.072.343.623.551	5.122.248.372	1.067.221.375.179	Sedang proses	Berita Acara Penetapan Nilai Aset Tetap UI (RS UI) No. B/24/B1.3/PL02/2019
3	Hibah Klinik Satelit	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti	10.372.032.228	37.313.650	10.334.718.578	Sedang proses	Berita Acara Pencatatan Aset UI di Sistem Akuntansi RS UI No. 002/BA.KEU/UI/2020
		Total	**1.009.261.055.779**	**5.159.562.022**	**1.094.101.493.757**		

Dari 11 Aset yang dihibahkan Pemerintah kepada UI pada tahun 2017, sampai dengan tahun 2020 status aset yang telah selesai proses hibahnya dari Kementerian Ristekdikti dan Kementerian PUPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2017)	Nilai yang dihibahkan dari Pemberi Hibah
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	5.347.889.590
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	21.598.007.200	-	21.598.007.200	21.598.007.200
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	49.830.000.000	0	49.830.000.000	49.830.000.000
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	3.837.744.000	0	3.837.744.000	3.837.744.000
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	24.368.312.958	0	24.368.312.958	24.368.312.958
6	Peralatan Medical Research Laboratory *Equipment* MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	38.228.343.871	0	38.228.343.871	38.228.343.871
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting *Equipment* MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	16.830.777.445	0	16.830.777.445	16.830.777.445

8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	219.441.365.799
9	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	0	37.480.500.000	18.363.932.684
10	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	0	289.060.000	
		Total	550.002.960.244	132.785.444.381	417.217.515.862	397.846.373.546

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2019

Pada tahun 2019, UI mendapatkan aset hibah dari Kementerian Ristekdikti berupa Gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia berikut sarana dan prasarananya dengan nilai hibah sebesar Rp1.082.715.656.970. Aset tersebut telah dicatat sebagai aset Tetap UI mengacu berdasarkan dokumen hibah dan juga mengacu pada PSAK 16. Namun proses administrasi hibah masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian Ristekdikti.

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI (2019) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2019)	Dokumen Pendukung Hibah
1	Rumah Sakit Universitas Indonesia	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	Keputusan Rektor UI Nomor 1126/SK/R/UI/2019 tentang Pentapan Daftar Aset Tetap Rumah Sakit UI
	Total		**1.263.403.794.600**	**180.688.137.630**	**1.082.715.656.970**	

20. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahterimakan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.708.632.116.222.53 dan Rp18.399.657.640.674,60. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2019 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2020 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 (Rp)
PT Perusahaan Listrik Negara	13.806.824.973.945,00	8.661.179.646.845,00	70.435.403.088,00	5.075.209.924.012,00

PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	881.022.753.453,34	0	0
PT Pelindo I	0	0	0	0
PT ASDP	620.969.314.032,00	0	0	620.969.314.032,00
PT Pertamina	2.115.334.499.582,53	2.102.881.621.404,00	0	12.452.878.178,53
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	904.692.510.333,20	70.813.589.328,50	0
Jumlah	**18.399.667.640.674,60**	**12.549.776.532.035,50**	**141.248.992.416,00**	**5.708.632.116.222,53**

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.691.025.524.452. Pada tahun 2020, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut:

1) PT Perusahaan Listrik Negara
   a) Nilai PMN yang ditetapkan pada PT PLN pada tahun 2020 sebesar rp8.661.179.646.845 merupakan PP Nomor 60 Tahun 2019 sebesar Rp4.028.229.959 dan PP Nomor 36 Tahun 2020 sebesar Rp4.632.949.945.886;
   b) Pengurangan pada PT PLN sebesar Rp70.435.403.088 merupakan koreksi nilai BPYBDS (Eks UIP) yang berdasarkan reviu Itjen Kmeneterian bahwa atas asset tersebut sudah tercatat sebagai asewt PT PLN dan tidak tercatat sebagai BPYBDS pada PT PLN (LHR-209.Lap/07/IR.1/2020).
2) PT Angkasa Pura II
   Sebesar Rp881.022.753.453.34 telah ditetapkan dengan PP Nomor 38 Tahun 2020
3) PT ASDP
   a) Sebesar Rp598.637.032 menunggu penetapan Presiden;
   b) Sebesar Rp122.389.677.000 merupakan asset yang dihibahkan kepada Pemprov Jatim dan rencananya akan dikeluarkan dari daftar asset BPYBDS. Saat ini menunggu dokumen dari Kemenhub untuk mengeluarkan aaset dimaksud dari daftar BPYBDS dengan melakukan revisi BASTO Nomor 07/LLASDP-JTM/SRT-11/2015 sebagai dasar pengeluaran dari daftar asset BPYBDS
4) PT Pertamina
   a) Sebesar Rp2.102.881.621.404 telah ditetapkan PP Nomor 50 tahun 2020;
   b) BPYBDS pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp12.452.878.178,53 yang berdasarkan hasil reviu BPKP belum dapat di-PMN-kan kepada PT Pertamina karena belum terpenuhinya persyaratan sebagaimana pasal 23 ayat1 UU Nomor 19 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2013 bahwa asset dimaksud saat ini tidak digunakan dan/atau dioperasikan oleh PT Pertamina, para pihak berkomitmen untuk segera berkoordinasi guna penyelesaian status asset BPYBDS ini.
5) Perum LPPNPI
   a) Sebesar Rp904.692.520.333,2 telah ditetapkan PP Nomor 65 Tahun 2020;
   b) Pengurangan nilai BPYBDS pada Perum LPPNPI sebesar Rp70.813.589.328,50 merupakan koreksi nilai BMN untuk Satker Pengembangan Bandar Udara Duanda berdasasrkan Laporan Hasil Reviu BPKP Nomor :LHA-6416/PW09/4/2011 dan LR-80/D502/I/2014 (Surat Mensesneg Nomor B-221/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan surat Karo Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Kemenhub Nomor PM.003/1/3 PHB 2020 tanggL 14 Juli 2020.

21. **Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH Berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021**

Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan alokasi sementara Kurang Bayar DBH meliputi kurang bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019, lebih bayar DBH sampai dengan Tahun

Anggaran 2018, lebih bayar DBH Tahun Anggaran 2019 dan alokasi sementara kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2020, dengan uraian sebagai berikut:

a. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416, terdiri atas:
   - Bagian Daerah sebesar Rp3.317.353.017.726.
   - Biaya Pemungutan sebesar Rp121.404.263.690.

b. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.613.096.183.770, terdiri atas:
   - Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rpl.264.319.072.730.
   - Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp513.628.250.218.
   - Lebih Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp3.337.065.903.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rpl.089.748.910.090.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp3.664.424.773.555.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp828.998.422.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp74.264.368.550.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp2.544.744.302.

c. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 sebesar Rpl.039.768.178.079, terdiri atas:
   - Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp120.130.578.561.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp357.128.941.577.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp275.092.357.702.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi berupa Iuran Tetap *(landrent)* sebesar Rp542.096.485.
   - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp286.874.203.754.

d. Alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp9.907.810.566.250, terdiri atas:
   - Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.897.248.455.500.
   - Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp2.010.562.110.750.

Untuk penyalurannya, ditetapkan dalam KMK 3/KMK.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar pada Tahun 2021. Penyaluran sebagaimana terdapat dalam peraturan ini meliputi, penyaluran PBB sektor Migas TA 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416 dan penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp9.907.810.566.250 serta adanya penyelesaian Lebih Bayar dengan memperhitungkan penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp2.396.430.919.807.

22. <u>Data Tuntutan Hukum</u>

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang telah diubah menjadi PMK 234/PB.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Kewajiban

   a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.

b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntuan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.

c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)* atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

2. Pencatatan Aset Tetap

a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:

1) Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;

2) Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL jika SK penghapusan belum terbit.

b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; dan

c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Data Tuntutan Hukum pada seluruh Kementerian/Lembaga diperoleh dari aplikasi Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH). Untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan yang memadai terkait kewajiban Pemerintah yang berasal tuntutan hukum yang telah *inkracht*, Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-4PB/PB.6/2020 tanggal 29 Januari 2021 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hal Konfirmasi Pencatatan/Pengungkapan Data Tuntutan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Tetap *(inkracht)*.

Berdasarkan surat tanggapan dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020, maka Data Tuntutan Hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2020 yang dapat diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2020 sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan hukum pada Kementerian Keuangan:

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 5 (lima) tuntutan hukum pada Kementerian Kuangan yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran *(aanmaning)* dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah senilai Rp201.369.286.270,75 dan tanah seluas 50.156,20 m2, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perkara Nomor 45/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst jo. No. 495/Pdt/2007/PT.DKI jo. No. 367K/Pdt/2009 jo. No. 706PK/Pdt/2014, dengan gugatan senilai Rp836.478.647 dan bunga Rp198.663.678;
b. Perkara Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Jo. 205/PDT/2007/PT.DKI No.277K/Pdt/2017 dengan gugatan senilai Rp199.821.818.945;

c. Perkara Nomor 2301K/Pdt/2018 jo Nomor: 371/Pdt/2017/PT.Mks jo Nomor: 236/Pdt.G/2015/PN.MKS tanggal 12 Mei 2016 dengan gugatan berupa tanah/bangunan seluas 785 m2;
d. Perkara Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Sda jo. No.675/Pdt/2014/PT.Sby jo. No.675K/Pdt/2016 jo. No. 22/Eks/2019 dengan gugatan berupa tanah seluas 49.371,2 m2;
e. Perkara Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.MDO senilai Rp512.325.000.

Atas 5 (lima) tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut, Kementerian Keuangan belum menganggarkan dalam DIPA. Terkait alokasi anggaran terhadap tuntutan hukum *inkracht* oleh pihak ketiga dimaksud, saat ini sedang dikaji kembali mengingat adanya risiko fiskal yang berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi pengeluaran negara dari APBN. Negara juga berisiko kehilangan potensi penerimaan negara dan hak kepemilikan atas aset tanah dan/atau bangunan. Selain itu, alokasi anggaran atas tuntutan hukum *inkracht* di masa pandemi Covid-19 tidak semudah yang diperkirakan karena struktur anggaran yang ada difokuskan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

2. Tuntutan hukum pada Kementrian Komunikasi dan Informatika:

Putusan *inkracht* kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa program KPU/ USO Tahun Jamak *(multiyears)* melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebesar Rp1.638.520.805.645 dan USD1,129,208. Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2020 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada Kementerian ATR/BPN:
Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum yang telah memiliki hukum tetap *(inkracht),* telah dilakukan teguran *(anmaaning),* dan tidak ada upaya hukum lanjutan sebesar Rp1.000.860.816.74, namun belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :
a. Kasus Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 7267 seluas 160.000 m2 (16 Ha) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pdt.G/2001/Jak.Sel tanggal 14 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 11 September 2003, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611/K/Pdt/2004 tanggal 25 Oktober 2005, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 PK/Pdt/2007 tanggal 3 Juli 2008.
Dalam amar keputusan pengadilan tersebut di atas, pengadilan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas tanah milik para penggugat, yaitu bagian eks *Eigendom Verponding* Nomor 7267 terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20 persen dari seluas 132 Ha yakni 16 Ha sebesar Rp960.030.816.744. Dalam putusan ini tidak diketahui lokasi pasti 20 persen areal atau 16 Ha yang dimaksud. Dengan demikian belum dapat diketahui porsi jumlah pasti nilai ganti rugi yang menjadi kewajiban dari Kementerian ATR/BPN. Atas tuntutan hukum *inkracht* tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk pembayaran ganti rugi dimaksud, karena gugatan ini tidak terkait dengan aset Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, melainkan terkait proses pembebasan tanah masyarakat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini Kementerian ATR/BPN terlibat sebagai pihak pelaksana pembebasan lahan yaitu pemutusan hubungan hukum dan pembayaran ganti rugi.
b. Kasus tanah bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Wonokromo s.d. Nomor 7/Wonokromo seluas 6.000 m2 dengan jumlah ganti rugi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 1997 Nomor 436/Pdt.G/1996/PN.SBY jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 September 1997 Nomor 534/PDT/1997/PT.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 September 2004 Nomor 2631K/Pdt.G/1999. Gugatan ini terkait dengan proses tukar menukar aset dengan Kementerian ATR/BPN, yang dimenangkan oleh penggugat. Atas tuntutan hukum *inkracht* tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk pembayaran ganti rugi dimaksud.

4. Tuntutan hukum pada BAPPENAS:

   Terdapat satu tuntutan hukum yang telah memiliki hukum tetap *(inkracht)*, telah dilakukan teguran (*anmaaning*), dan tidak ada upaya hukum lanjutan, yang tertuang pada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 No: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No: 116/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal tanggal 19 Oktober 2017 No.1950/Pdt/2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 No: 451 PK/Pdt/2019. Tuntutan hukum tersebut senilai Rp3.944.514.500.000 yang nantinya akan ditanggung renteng oleh 10 instansi. Tuntutan ini belum dianggarkan kedalam DIPA tahun 2020, sehingga belum dilakukan pencatatan atas utang.

5. Tuntutan hukum pada Kementerian PUPR:

   Data tuntutan hukum pada Kementerian PUPR yang telah berstatus *inkracht*, *anmaaning*, dan tidak ada upaya hukum lanjutan, tetapi belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

   a. Perkara Perdata No. 202/Pdt.G/2003/PN.TNG atas Gugatan dan tuntutan ganti rugi tanah seluas 5.500 m2 untuk Jalan Tol Serpong – Jakarta sebesar Rp10.400.000.000.
   b. Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2004/PN.LP atas gugatan sebidang tanah seluas 3.603 m2 yang terkena pembangunan jalan tol incasu pembangunan *interchange* Mabar sebesar Rp. 1.207.005.000,- ditambah Dwangsom Rp. 300.000/hari terhitung sejak 25 Februari 1993.
   c. Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2007/PN.BKS hal Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi atas tanah seluas 8.094 m2 yang digunakan untuk Jalan Tol JORR sebesar Rp8.104.060.000.
   d. Perkara Perdata No. 273/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM, Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi atas tanah seluas 6.670 m2 untuk Jalan Tol JORR sebesar Rp13.505.000.000.
   e. Perkara Perdata No. 83/PDT.G/2012/PN.MKS hal Tanah seluas 72.786 m2 untuk UGR Jalan Tol Makassar sebesar Rp14.557.200.000.
   f. Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2014/PN.SGU atas Gugatan Ganti Rugi atas Tanah Aset BMN di Kabupaten Sanggau seluas ± 6 ha senilai Rp3.000.000.000 dan penggantian seharg emas pada tahun 1984.
   g. Perkara No 3/Pdt.G/2016/PN.Kgn atas Gugatan Keberatan terhadap Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kepala BWS Kalimantan II sebesar Rp428.203.200;
   h. Perkara Perdata No. 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar atas Gugatan Uang Ganti Rugi dalam Pembangunan Tol Bandara sebesar Rp24.250.000.000;
   i. Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl atas Gugatan Wanprestasi sisa pembayaran nilai kontrak pekerjaan pelebaran jalan air Sebakul – Betungan sebesar Rp3.082.459.046,00 ditambah bunga Rp616.491.809.

6. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri

   Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat permasalahan tuntutan hukum mantan pegawai setempat yang sudah *inkracht* sebagai berikut

   a. KBRI Buenos Aires

      Pegawai setempat KBRI Buenos Aires melakukan gugatan kepada KBRI Buenos Aires atas uang pensiun dan ganti kerugian atas tidak dibayarkannya uang lembur, *provident fund*, dan pembayaran pajak sebesar USD24,218.00. Pengadilan melalui amar putusannya tanggal 13 September 2016 memerintahkan KBRI Buenos Aires untuk membayar tuntutan materiil ditambah dengan fasilitas hukum (15%), biaya penggugat (13%), psikolog (7%) dan bunga (10%) sejumlah total USD24,218.00.

   b. KBRI Mexico City

      Pegawai setempat KBRI Mexico City melakukan gugatan atas tuntutan pesangon dan pengadilan negeri setempat telah memberikan putusan memerintahkan KBRI Mexico City untuk melakukan pembayaran sebesar MXN468.875,88

23. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle*. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN *Idle* yang diketahui nilainya dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya. BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. BMN *Idle* yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN *Idle* adalah sebagai berikut :

a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bngunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak Lanjut proses pelaksanaan penghapusan adalah pada tahapan permohonan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu sesuai nota dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-173/KN/2019 tanggal 18 April 2019

b. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

   1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang. Kepala KPKNL Surabaya telah menyampaikan surat Nomor S-2826/WPJ.24/KP.04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Permintaan Sertifikat Tanah BMN *Idle*.
   2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017. KPKNL Surabaya telah melakukan cek fisik dan ditemukan fakta bahwa tanah dimaksud telah terpasang papan nama Pemerintah Kota Surabaya. Melalui nota dinas Kepala KPKNL Surabaya kepada Kepala KPP Gresik Utara Nomor ND-269/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019, Kepala KPKNL telah menyampaikan permohonan penjelasan dokumen kepemilikan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima BMN *Idle* dimaksud.

c. Terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:

   1) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Pemerintah yang terletak di Jalan Cideng Timur No. 54 Jakarta Pusat ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
   2) Satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jalan Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.

d. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2020 adalah nol, yaitu sebagai berikut:
   1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
   2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun

1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec.Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
6) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen yang terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 31 Jember, perolehan tahun 1969 dengan nilai perolehan Rp125.552.000 yang dicatat oleh KPKNL Jember.

Pada periode Tahun 2020, telah dianggarkan pelaksanaan inventarisasi atas BMN eks BMN idle sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.0/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Pelaksanaan inventarisasi BMN eks BMN idle tidak dapat dilakukan serentak pada seluruh KPKNL disebabkan kendala dampak pendemi COVID-19 dan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Kanwil DJKN yang telah melaksanakan dan menyampaikan laporan inventarisasi adalah sebagai berikut: 1. Kanwil DJKN Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. 2. Kanwil DJKN Kanwil DJKN Jawa Timur.

24. Piutang kepada Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan Rp4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018).

Sepanjang Tahun 2020 tidak terdapat transaksi apapun terkait penyelesaian piutang. Namun demikian terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs dan penilaian aset sitaan. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-

U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.

4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.

5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara.

6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa outstanding Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:

   a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);

   b. Sebidang tanah seluas 8.120 m^2 (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).

7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.

8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.

9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tangggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.

10. Kejaksaan Republik Indonesia telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).

11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.

12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar

menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.

13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.

14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.

15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.

25. <u>Penyelesaian Piutang Negara</u>

a. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang negara pada PDAM sebagai berikut:

1) Untuk melaksanakan 9 agenda prioritas (Nawacita) yang diwujudkan dalam salah satu target RPJMN 2015-2019 yaitu 100 persen Akses Aman Air Minum, perlu segera mengupayakan perbaikan kondisi keuangan PDAM yang saat ini mengalami utang macet sebesar Rp4,3 triliun (tingkat NPL 85 persen), agar PDAM semakin *bankable* di tengah terbatasnya sumber pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
2) Program 10 juta sambungan rumah harus didukung dengan perbaikan kemampuan keuangan PDAM sehingga perlu upaya untuk mengubah hambatan di PDAM menjadi potensi pencapaian target.
3) Target MDGs untuk cakupan pelayanan air minum tahun 2019 adalah 100 persen, namun baru tercapai 71,14 persen di tahun 2016 dan 72,04 persen di tahun 2017.
4) Utang PDAM selama bertahun-tahun telah membebani PDAM, sehingga mempengaruhi kemampuan PDAM dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2020 terdapat 2 PDAM masih dalam proses penyelesaian utang, yaitu PDAM Kabupaten Nganjuk (kewenangan penghapusan utang pada Presiden) dan PDAM Kota Ambon (kewenangan penghapusan utang pada Menteri Keuangan).

Piutang Negara terhadap PDAM Kabupaten Nganjuk berupa Piutang Non Pokok senilai Rp11.253.042.579 telah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4089/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2005 jo. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang tersebut telah dihapusbukukan dari Neraca Pengelolaan Pemberian Pinjaman tanpa dihapuskan dari hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara pada PDAM Kabupaten Nganjuk mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden.

Piutang Negara terhadap PDAM Kota Ambon berupa Piutang Non Pokok senilai Rp589.182.544 telah mendapatkan persetujuan penyelesaian piutang negara dari Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Nomor S-949/MK.052016 Tanggal 8 November 2016. Pada saat ini penyelesaian pinjaman PDAM Kota Ambon masih dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dengan Bank Indonesia.

b. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

1) Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.
2) Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
3) Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
4) Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Pada Tahun 2020 terdapat 2 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara mutlak Piutang Negara Non Pokok, yaitu :

1) Pemkab Musi Rawas Rp263.817.337,08 melalui KMK 71/KMK.05/2020 tanggal 28 Februari 2020.
2) Pemkot Bitung Rp8.230.202.848,15 melalui KMK No. 267/KMK.05/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Selain itu, terdapat 1 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara bersyarat Piutang Negara Non Pokok yaitu Pemkab Kepulauan Sangihe, penghapusan piutang negara secara bersyarat sebesar Rp4.244.724.549 melalui KMK No. 352/KMK.05/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 Pemda dalam proses penyelesaian piutang Negara, sebagai berikut:

1) 4 Pemda dalam proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok di Presiden yaitu Pemkot Palembang, Pemkot Singkawang, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Propinsi Riau.
2) 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penyelesaian debt swap yaitu Pemkot Manado dan Pemprov Maluku.
3) 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Sangihe dan Pemkab Labuhan Batu.
4) 1 Pemda dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) yaitu Pemkot Makassar.
5) 2 Pemda dalam proses persetujuan penyelesaian piutang negara yaitu Pemkab Lampung Utara dan Eks Provinsi Timor Timur.

Berikut daftar Piutang Pemberian Pinjaman kepada Pemda yang telah mendapat penetapan penghapusan piutang negara non pokok:

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok
1	Pemkab Musirawas	Menkeu	S-842/MK.05/2018	263.817.337
2	Pemkot Bitung	Menkeu	S-750/MK.05/2011	8.230.202.848
Jumlah				**8.494.020.185**

Berikut daftar Piutang kepada Pemda yang masih melaksanakan Restrukturisasi:

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang non pokok
1	Pemprov Riau	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	14.328.031.497
2	Pemkot Palembang	Presiden	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013	64.933.488.506
3	Pemkot Singkawang	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	17.666.354.370
4	Pemerintah Aceh	Presiden	B-1372/Kemensetneg/Ses/PB.02/05/2019	23.833.926.048
Jumlah				**120.761.800.422**

c. Dampak Covid-19 terhadap piutang Negara yang berasal dari pemberian pinjaman kepada BUMN/PT/BHL :

1) Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri dalam rangka pembiayaan RIDF pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Sampai dengan Tahun 2020, PT SMI memiliki 5 (lima) *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) untuk pembiayaan dalam rangka *Regional Infrastructure Development Program Funds* (RIDF) dan Indonesia *Infrastructure Financial Funds* (IIFF) dengan status pembayaran aktif, yakni:

No	Nomor RDI/SLA	Tujuan Pinjaman
1	AMA-464/SLA-1229/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
2	AMA-466/SLA-1230/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
3	SLA-1268/DSMI/2017	Tambahan pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
4	SLA-1266/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF
5	SLA-1267/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF

Status keseluruhan pembayaran pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh PT SMI adalah lancar dengan ditandai dengan pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah atas tagihan pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian pinjaman (SLA).

Namun demikian, terdapat permohonan amandemen terkait dengan SLA pembiayaan kegiatan RIDF sesuai dengan Nota Dinas Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor ND-521/PB.4/2020 Tanggal 23 Juni 2020 hal Pinjaman World Bank No. 8714-ID dan AIIB No. 000012-1-IDN: *Regional Infrastructure Development Fund Project* (RIDF)-konfirmasi penyesuaian tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri. Permohonan penyesuaian tingkat bunga tersebut dilatarbelakangi oleh permohonan dari PT SMI atas terjadinya *negative carry* dalam pelaksanaan pembiayaan RIDF. *Negative carry* disebabkan perbedaan tingkat bunga antara pinjaman SLA dengan pinjaman RIDF kepada Pemda. Sesuai perkiraan dari PT SMI bahwa hingga akhir program pembiayaan RIDF *negative carry* akan mencapai Rp307,8 miliar yang dirasa memberatkan bagi keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan telah memberikan usulan atau masukan berdasarkan hasil kajian aspek finansial maupun aspek legal terkait penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF melalui Nota Dinas nomor ND-521/PB.4/2020 tanggal 23 Juni 2020. Usulan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 108/PMK.05/2019 yaitu ditetapkan sebesar imbal hasil Surat Utang Negara Seri *Benchmark* dengan tenor 10 tahun (setara jangka waktu Penerusan Pinjaman Luar Negeri).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan meminta Bank Dunia untuk menyetujui permintaan perubahan perjanjian atas pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan RIDF melalui surat nomor S-134/MK.8/2020 tanggal 29 Juni 2020. Proposal amandemen perjanjian yang tertuang pada surat tersebut, antara lain berupa:

a) Penambahan komponen 3: *Early Response and Recovery* (ERRC), komponen ini merupakan dukungan pemerintah dalam rangka penanganan dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
b) Perpanjangan *Closing Date* atas pinjaman SLA RIDF dari tanggal 31 Desember 2020 menjadi 31 Desember 2022.
c) Penghapusan klausul pada LA terkait tingkat suku bunga pada SLA dengan tujuan fleksibilitas atau kemudahan kepada pemerintah untuk menyesuaikan tingkat bunga pinjaman pada SLA.

2) Pengajuan relaksasi penyelesaian piutang Negara pada BUMN terkait Covid-19
Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa untuk beberapa BUMN sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian utang terhadap Negara. Terdapat beberapa BUMN yang mengajukan restrukturisasi/relaksasi dalam penyelesaian utang

terhadap Negara, diantaranya:

a) Bank Jatim - Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis)
b) PT Barata (Persero)
c) PT Djakarta Lloyd (Persero)
d) Perum PPD
e) PT Amarta Karya (Persero)

25. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela karena belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti *(Defined Benefit)*. Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *pay as you go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *Pay As You Go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Terkait penerapan PSAP Nomor 10 – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), dalam hal penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas, Pemerintah telah mempertimbangkan IPSAS 39 dan PSAK 24 dalam merumuskan kebijakan akuntansi mengenai pencatatan hak dan kewajiban terkait program pensiun PNS dan TNI/Polri. Setelah mempertimbangkan IPSAS 39 dan PSAK 24, Pemerintah memilih kebijakan yaitu pengungkapan atas nilai kewajiban program pensiun PNS dan TNI/Polri di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2020 merupakan hasil perhitungan aktuaris badan penyelenggara (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)) berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam surat nomor S-274/MK.02/2021 tanggal 13 April 2021 hal Permintaan Perhitungan atas Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun adalah sebesar Rp2.928.926.839.599.440.

Asumsi-asumsi perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Asumsi/Metoda
1	Tabel Mortalita	GAM 1983
2	Selisih Usia Peserta dengan istri/suami	Menggunakan data factual
3	Selisih Usia Peserta dengan Anak	Menggunakan data factual
4	Skala Kenaikan Gaji	3,5%
5	Tingkat Bunga Aktuaria	7%
6	Tingkat Inflasi	2%
7	Metode Perhitungan	*Accrued Benefit Cost Method*

Sedangkan asumsi-asumsi perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang digunakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Asumsi/Metoda
1	Tabel Mortalita	GAM 1971
2	Selisih Usia peserta dengan istri/suami	5 tahun
3	Selisih Usia peserta dengan anak	25 tahun
4	Skala kenaikan gaji	2,5% per tahun
5	Tingkat bunga aktuaria	9,7%
6	Tingkat Inflasi	3% per tahun
7	Metode Penghitungan	*Projected Benefit Cost Method*

Dampak perubahan asumsi/metoda perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun ialah terdapat peningkatan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Taspen (Persero) dari Rp2.511.825.655.479.840 menjadi Rp2.583.314.764.599.440 dan penurunan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Asabri (Persero) dari Rp364.936.226.000.000 menjadi Rp345.612.075.000.000.

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Saldo dana AIP per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, berturut-turut adalah sebesar Rp194,26 triliun dan Rp169,09 triliun. Sesuai dengan regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunakan untuk (i) mengembalikan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, (ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran manfaat pensiun, (iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta (iv) Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah khusus untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Perhitungan AIP antara KPA dan badan penyelenggara yaitu PT Taspen dan PT Asabri, saldo dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Dana AIP	31 Desember 2020	31 Desember 2019
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	172.467.456.216.202	151.428.469.320.652
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.797.937.705.714	17.669.911.410.364
Jumlah	**194.265.393.921.916**	**169.098.380.731.016**

Dibandingkan dengan data Per 31 Desember 2019, Dana AIP pada PT Taspen mengalami kenaikan sebesar Rp21.038.986.895.550 berdasarkan Berita Acara Perhitungan AIP Nomor 2/BA/LK/DJPb-TSP/2021 tanggal 29 Januari 2021. Begitu pula dengan Dana AIP pada PT Asabri mengalami kenaikan sebesar Rp4.116.728.719.449.

Karena AIP bukan merupakan Dana Pensiun dan belum memenuhi kriteria sebagai Aset Program dari Dana Pensiun, maka Dana AIP tidak diperhitungkan dengan potensi kewajiban Manfaat Pasti Masa Depan Program Pensiun Pemerintah.

26. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.096.069	963.408	2.059.477
	b. Pinjaman luar negeri	845.775	-	845.775
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.941.844	963.408	2.905.252
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	99.964	3.062.213	3.162.177
	b. Pinjaman dalam negeri	-	12.531	12.531
	Jumlah Utang Dalam Negeri	99.964	3.074.744	3.174.708
Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah		**2.041.808**	**4.038.152**	**6.079.980**

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (Part IV *Balance of Payments Manual* (BOPM) IMF, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Buletk SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.

Dampak Covid-19 Pada Kebijakan Pengelolaan Utang Tahun 2020

a. Pada tahun 2020 ini terdapat kejadian luar biasa yaitu pandemi Covid-19, pemerintah kemudian mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya ditetapkan Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, dimana Pemerintah memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN), tentunya memberikan dampak terhadap kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit yang diakibatkan karena penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.
b. Di tengah meningkatnya kebutuhan dana yang signifikan untuk memastikan kegiatan PC-PEN dapat berjalan dengan baik, terdapat arahan dari pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Bank Indonesia (BI) selaku regulator kebijakan moneter untuk memberikan dukungan dana kepada Pemerintah terutama melalui Kemenkeu dengan kerjasama pembiayaan utang untuk memastikan kebutuhan dana dimaksud dapat tersedia tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap keuangan negara. Menindaklanjuti pembicaraan di DPR, Kemenkeu dan BI kemudian melaksanakan

pembahasan mengenai skema kerjasama pembiayaan utang antara Pemerintah dan Bank Sentral, yang menghasilkan kesepakatan kerjasama terkait pendanaan PC-PEN dengan skema pembagian beban/*Burden Sharing* antara Kemenkeu dan BI. Kerjasama Kemenkeu dan BI tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. nomor 347/KMK.08/2020 dan nomor 22/9/KEP.GBI/2020 Tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional. Untuk mengatur hal yang lebih teknis, disusun juga aturan turunan teknis pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal PPR dan Deputi Gubernur BI nomor PRJ-289/PR/2020 dan nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional.

Dalam kerjasama pembiayaan dengan skema *burden sharing*, BI sepakat untuk memberikan kepastian penyediaan dana dalam bentuk pembelian instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah untuk pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Public Goods* (PG) tanpa menimbulkan beban kupon atas instrumen dimaksud, serta berbagi beban/kontribusi kepada Pemerintah atas beban yang ditimbulkan atas penerbitan instrumen SBN untuk pembiayaan pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Non Public Goods* (NPG) untuk UMKM dan Korporasi.

27. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT. Kebijakan akuntansi dan Pengaturan Teknis pencatatan konsesi jasa telah diatur dalam:

a. Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang sebagaimana Lampiran dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

b. Teknis perekaman untuk penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa di Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020. Teknis pencatatan dan penatausahaan aset konsesi jasa dapat diakomodir oleh Aplikasi SIMAK-BMN.

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Pemerintah, terdapat dua Kementerian yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Kementerian PUPR untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik jalan tol. Perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian PUPR merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Sedangkan pengaturan konsesi jasa yang teridentifikasi pada Kementerian Kominfo adalah KPBU penyelenggaraan pelayanan publik jaringan telekomunikasi dan informatika (Palapa Ring). Perjanjian konsesi jasa untuk Proyek Palapa Ring merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan *(financial liability model/scheme)*.

Pendekatan/metode yang utama yang digunakan dalam pencatatan pertama kali aset dan kewajiban konsesi jasa adalah retrospektif, yaitu K/L harus bisa menyajikan nilai aset konsesi jasa berikut akumulasi penyusutan aset pada saat awal perjanjian aktif di masa lalu. Namun demikian apabila tidak dimungkinkan untuk disajikan nilainya secara retrospektif karena tidak tersedia datanya, atau kesulitan mendapatkan nilai yang andal, maka dibolehkan untuk menentukan nilai aset dimaksud secara metode prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa pertimbangan dan catatan manajemen harus disertai alasan yg kuat dan jelas, bukan semata-mata untuk alasan pemilihan metode yang lebih muda dan tidak berupaya untuk memperoleh nilai yang andal.

Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 sebagai perubahan PMK Nomor 225/PMK.05/2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.5/2020.

Dalam surat Menteri Keuangan dimaksud diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki perjanjian dengan karakteristik pengaturan konsesi jasa agar mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengungkapan pengaturan konsesi jasa dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat informasi mengenai:
   b. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan, termasuk penyediaan aset dan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian;
   b. Jenis skema kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mitra/badan usaha dalam penyediaan aset dan jasa pelayanan publik (misalnya skema pembayaran oleh pemerintah, skema pemberian hak konsesi jasa, atau kombinasi skema);
   c. Ketentuan signifikan dalam pengaturan konsesi jasa yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang); dan
   d. Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa
3. Dalam hal terdapat Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa, hal tersebut tetap disajikan di *face* Neraca sebagai aset kemitraan dan diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan mempedomani, ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.05/2020 dimaksud, maka pada laporan Keuangan tahun 2020, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa di neraca atau *face* laporan keuangan, namun hanya mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR dijelaskan bahwa terdapat aset kontruksi jalan tol per 31 Desember 2020 sebesar Rp 638,039 triliun yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Aset konstruksi jalan tol tersebut saat ini masih dalam masa konsesi dan akan diserahkan kepada Kementerian PUPR setelah masa konsesi.

Pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo diperoleh informasi bahwa Perolehan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Proyek Palapa Ring	Nilai
1	Paket Barat	1.335.729.218.541
2	Paket Tengah	1.082.269.778.326
3	Paket Timur	5.378.127.196.087
Total		**7.796.126.192.954**

Sedangkan untuk kewajiban konsesi jasa, sampai dengan 31 Desember 2020 Menteri Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah membayar kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) sesuai dengan penyediaan ketersediaan layanan masing-masing BUP dengan jumlah sebesar Rp3.155.041.317.625 dari jumlah kewajiban konsesi jasa sebesar Rp21.214.465.106.848 sebagai berikut:
a. PTPRB sebesar Rp860.165.580.043 dari jumlah kewajiban sebesar Rp3.486.383.120.000;
b. PT LTI sebesar Rp625.225.909.370 dari jumlah kewajiban sebesar Rp3.736.930.208.900;
c. PT PTT sebesar Rp1.669.649.828.212 dari jumlah kewajiban sebesar Rp13.991.151.777.948.

28. Penempatan Dana dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Bank Umum

Untuk penanganan Covid-19 dan PEN terdapat mekanisme pembiayaan kebutuhan *Public Goods* dan *Non Public Goods* sesuai dengan skema *burden sharing* yang telah disepakati antara Pemerintah dan bank Indonesia. Hasil penerbitan SUN/SBSN dipindahkan dari RKUN ke dalam dua rekening khusus sesuai dengan peruntukannya yaitu Rekening Khusus PEN *Public Goods* dan Rekening Khusus PEN *Non Public Goods*. Pada rekening khusus PEN *Non Public Goods* dilakukan Penempatan dana kepada bank umum mitra melalui mekanisme PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penempatan dana pada bank umum mitra dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara dan merupakan bagian dari pembiayaan program PEN *Non Public Goods*. Bank umum mitra menggunakan penempatan dana untuk menyalurkan kredit kepada debitur untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kategori debitur mencakup debitur UMKM, Koperasi, debitur non-UMKM (debitur kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, kredit komersial, dan kredit korporasi) serta lembaga keuangan. Bank umum mitra merupakan bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra Kuasa BUN Pusat dalam penempatan dana untuk pelaksanaan program PEN dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
2. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/Badan Hukum Indonesia/Pemerintah Daerah;
3. Memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional berupa ekspansi kredit kepada debitur UMKM, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan/atau pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Akuntansi dan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan penempatan dana dalam rangka program PEN didesain mengikuti proses bisnisnya. Pengaturan pada PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang secara spesifik mengatur proses bisnis penempatan dana dalam rangka program PEN yang ditempatkan dalam bentuk deposito, dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan batas maksimal/limit penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penetapan batas maksimal/limit penempatan dilakukan dengan memperhitungkan rencana penggunaan penempatan dana, penilaian tingkat risiko dan tingkat likuiditas bank.
2. Berdasarkan keputusan penetapan transaksi *over the counter*, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* ke rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Umum Mitra melakukan pemindahbukuan dana hasil setelmen tersebut ke rekening penempatan deposito atas nama Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara di Bank Umum Mitra.
3. Jangka waktu penempatan dana pada Bank Umum Mitra paling lama enam bulan.
4. Penarikan atas penempatan dana pada bank umum mitra dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Adapun penarikan penempatan dana sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemerintah dan/atau meningkatnya risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.

Berdasarkan proses bisnis pada PMK Nomor 104/PMK.05/2020 dan kesesuaian dengan PSAP Nomor 6 (Akuntansi Investasi) kebijakan Pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. PSAP 06 tidak berlaku untuk penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas (0 s.d 3 bulan), namun demikian untuk investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan s.d 12 bulan merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan dengan penempatan dana dalam rangka manajemen kas.

2. Penempatan Dana Dalam Rangka Manajemen Kas akan dicatat sebagai Setara Kas (0 s.d 3 bulan) atau Investasi Jangka Pendek (> 3 s.d 12 bulan).
3. Penempatan dana pada bank umum mitra dengan mekanisme pengelolaan uang negara/manajemen kas disajikan pada Laporan Arus Kas sebagai transaksi transitoris; dan Neraca sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas (untuk penempatan dana dengan jangka waktu s.d. 3 bulan) atau Investasi Jangka Pendek (untuk penempatan dana dengan jangka waktu > 3 s.d. 12 bulan), serta dilakukan pengungkapan secara memadai di CaLK.
4. Pada akhir periode pelaporan di akhir tahun, catatan akuntansi terkait dengan transaksi penempatan dana dalam rangka program PEN adalah sebagai berikut:
   a. Catatan aset berupa Kas Lainnya Dan Setara Kas dan/atau Investasi Dalam Deposito Jangka Pendek pada neraca apabila pada akhir tahun terdapat penempatan dana program PEN pada Bank Umum Mitra yang belum jatuh tempo.
   b. Catatan aset berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas kas yang tersedia pada Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* dan *Non Public Goods*.
   c. Catatan pengakuan piutang bukan pajak dan pendapatan remunerasi atas penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program PEN secara akrual, sesuai dengan perhitungan penyisihan piutang dan pendapatan yang dihitung secara akrual.

29. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait Investasi Pemerintah

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Pemerintah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PNBP).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam rangka program PEN kepada BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan talangan (investasi) untuk modal kerja yang menambah nilai investasi pemerintah yaitu.

No	BUMN	REALISASI	KETERANGAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA		**17.500.000.000.000**	
1	PT Hutama Karya (Persero)	7.500.000.000.000	PP 71/2020
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	6.000.000.000.000	PP 72/2020
3	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.500.000.000.000	PP 63/2020
4	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC	500.000.000.000	PP 64/2020
5	PT Bio Farma (Persero)	2.000.000.000.000	PP 80/2020
Investasi Non Permanen PEN		**19.650.000.000.000**	
1	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000	-
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	-
3	Perum Perumnas	650.000.000.000	-
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000	-
5	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000	-
TOTAL		**37.150.000.000.000**	

Selain itu terdapat PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan pembiayaan SWF. Sampai dengan 31 Desember alokasi tersebut dapat terealisasi seluruhnya dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi
Penyertaan Modal Negara		Rp1.570.000.000.000
1	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Rp1.570.000.000.000
Pembiayaan SFW		Rp15.000.000.000.000
1	Lembaga Pengelola Investasi	Rp15.000.000.000.000
	Total	Rp16.570.000.000.000

Penambahan penyertaan modal negara untuk modal awal kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah) dititipkan sementara pada rekening BUN pada Bank Indonesia (rekening *escrow*) berdasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

30. Piutang Pajak

Dalam rangka mengatasi kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Piutang Perpajakan DJP telah mengimplementasikan *Revenue Accounting System* (RAS) secara nasional mulai tanggal 1 Juli 2020. Dengan diterapkannya RAS, maka pemutakhiran dan validasi data piutang dilakukan pada setiap transaksi sehingga Saldo Piutang dapat diketahui secara *real time*.

Jumlah Piutang Pajak Bruto Unit Eselon I DJP Per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.891.088.751.611. Saldo piutang tersebut berdasarkan Laporan Piutang Pajak dari sistem aplikasi *Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS). Rincian mutasi piutang pajak DJP per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Saldo Awal**	**72.630.633.482.247**
2	**Penambah Piutang :**	
	Penetapan Pajak	56.524.249.304.581
	Inkracht Ketetapan	8.841.257.021.097
	Upaya Hukum Menambah	16.746.387.626.300
	Penerbitan Kembali Menambah	10.108.788.681
	Pindah Masuk	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Menambah	406.626.457.629
	Koreksi Menambah	5.338.478.655.249
	Tambah Lain	716.770.936.791
	Total Penambah	**90.893.252.301.087**
3	**Pengurang Piutang :**	
	Penyesuaian jurnal manual	28.423.129.559
	Pembayaran	45.824.473.163.683
	Pemindahbukuan	5.892.762.078.260
	Kompensasi	7.504.876.547.719

	Upaya Hukum Berkurang	4.919.472.180.232
	Penerbitan Kembali Berkurang	7.090.568.387
	Pindah Keluar	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Berkurang	369.752.582.072
	Koreksi Berkurang	7.259.012.630.688
	Kurang Lain	6.371.622.968.525
	Hapus Buku	13.145.937.671.821
	Total Pengurang	**93.632.797.031.703**
4	**Saldo Akhir**	**69.891.088.751.631**
5	**Nilai Penyisihan**	**37.439.661.754.138**
6	**Saldo Net*)**	**32.451.426.997.493**

**) terdapat selisih pembulatan nilai saldo antara Laporan Piutang TPA Modul RAS dengan Aplikasi SAKTI dan E-Rekon-LK*

1. Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari:

(1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang *(realized gain and unrealized gain);* dan

(2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari :

(1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang *(realized loss and unrealized loss),* penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan

(2) pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

4. **Upaya hukum keberatan, banding serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap**

   Selama tahun 2020, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, maupun pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 32.138 ketetapan pajak senilai Rp27.109.053.523.968,20;
   b. Ketetapan Pajak yang belum diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding) sebanyak 21.894 senilai Rp62.419.225.231.945,40

5. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp69.891.088.751.631 terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp37.439.661.754.138 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp32.451.426.997.493. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	69.891.088.751.631	72.602.210.352.657	(2.711.121.601.026)	(3,73)
Penyisihan Piutang Pajak	37.439.661.754.138	44.914.175.769.659	(7.474.514.015.521)	(16,64)
Piutang Pajak Netto	32.451.426.997.493	27.688.034.582.998	4.763.392.414.495	17,20

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai barang sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan. Nilai estimasi aset WP yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang, dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang per 31 Desember 2020 sebagai pengurang nilai Piutang untuk perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebesar Rp177.875.621.759.

Perhitungan nilai penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per 31 Desember 2020 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	15.801.496.315	12.856.237.873	10.046.140.160	31.187.214.403	**69.891.088.752**
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan	-	20.689.662	48.001.857	108.184.103	**177.875.622**
Dasar Penghitungan Penyisihan	15.801.496.315	12.835.548.211	9.998.138.303	31.078.030.300	**69.713.213.130**
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	79.007.482	1.283.554.821	4.999.069.152	31.078.030.00	**37.439.661.754**

Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel berikut.

Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Brute	Nilai Penyisihan	Piutang Netto
Sampai dengan 1 Tahun	17.241.692.215.989	223.029.861.634	17.018.662.354.355
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.524.322.359.575	1.701.677.658.660	10.822.644.700.915
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	9.000.570.471.375	4.499.634.631.244	4.500.935.840.131
Lebih dari 3 Tahun	31.124.503.704.693	31.015.319.602.600	109.184.102.093
Total	**69.891.088.751.631**	**37.439.661.754.138**	**32.451.426.997.493**

6. Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
   Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp43.256.163.879.792 mengalami kenaikan sebesar Rp11.346.267.952.629 dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Rincian Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Daluwarsa	43.256.163.879.792	31.909.895.927.163	11.346.267.952.629	35,56

Kenaikan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp11.346.267.952.629 berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.820, dikurangi Penghapustagihan Piutang Pajak tahun 2020 sebesar Rp1.769.392.480.418, dan *restate* piutang daluwarsa 2019 menjadi belum daluwarsa sebesar Rp30.277.238.774.

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal Daluwarsa	31.909.895.927.163
Penambahan Daluwarsa	13.145.937.671.821
Penghapustagihan	(1.769.392.480.418)
Restate Hapus Buku	(30.277.238.774)
Saldo Akhir Daluwarsa	**43.256.163.879.792**

Rincian penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.821 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang PPh Psl. 21	107.924.125.958,30
Piutang PPh Psl. 22	9.643.908.960,50
Piutang PPh Psl. 23	321.636.904.457,83
Piutang PPh Psl. 25 OP	209.393.701.067,22
Piutang PPh Psl. 25 Badan	2.244.085.667.956,02
Piutang PPh Psl. 26	422.445.361.846,34
Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	164.384.198.074,58
Piutang PPN	2.549.006.994.697,73
Piutang PPn BM	41.148.473.148,00
Piutang PBB Perkebunan	168.986.691.522,66
Piutang PBB Kehutanan	90.746.574.353,00
Piutang PBB Pertambangan Migas	473.865.260.245,00
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	771.886.285.995,00
Piutang PBB Sektor Lainnya	1.336.550.260,00
Piutang Bunga Penagihan PPh	3.697.583.926.796,66
Piutang Bunga Penagihan PPN	1.850.936.218.795,78
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	20.916.827.686,00
Jumlah	**13.145.937.671.820,60**

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dilakukan penghapustagihan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada periode terjadinya penghapustagihan.

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2020 dilakukan penghapustagihanan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 7 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp1.769.392.480.418 dari 7 Kanwil dengan rincian pada tabel dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan), dengan rincian berikut.

Tabel Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jawa Timur III	35/KMK.03/2020	12/02/2020	884	168.582.075.455
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	36/KMK.03/2020	12/02/2020	646	852.387.628.582
Kanwil DJP Jawa Tengah II	121/KMK.03/2020	18/03/2020	692	150.010.871.251
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	434/KMK.03/2020	25/09/2020	704	207.888.350.448
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	475/KMK.03/2020	20/10/2020	635	225.010.521.434
Kanwil DJP Jakarta Utara	476/KMK.03/2020	20/10/2020	6	1.316.519.556
Kanwil DJP Jawa Timur II	534/KMK.03/2020	24/11/2020	682	164.196.513.692
Total			**4.249**	**1.769.392.480.418**

7. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.
Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh WP belum diakui sebagai piutang pajak.

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh WP untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 2.922.757 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp99.052.637.578.352 dan USD654,561,063. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020

Jenis Pajak	Kurs	Jml Trx	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	5	1.011.462.559	1.011.462.559	0
	USD	1	415	415	0
PPh Psl. 21	IDR	362.699	2.193.660.065.375	1.400.497.885.863	793.162.179.512
PPh Psl. 22	IDR	12.611	689.447.645.170	228.586.942.062	460.860.703.108
PPh Pasal 22 Impor	IDR	158	5.616.634.856	3.275.415.789	2.341.219.067

PPh Psl. 23	IDR	127.265	7.063.638.672.415	1.592.096.041.947	5.471.542.630.468
	USD	1	522.760	258.861	263.899
PPh Psl. 25 OP	IDR	729.034	1.241.499.717.522	907.601.018.096	333.898.699.426
PPh Psl. 25 Badan	IDR	259.868	27.082.716.155.019	7.745.010.918.424	19.337.705.236.595
	USD	606	502.559.427	145.138.956	357.420.472
PPh Psl. 26	IDR	6.390	5.086.164.370.492	909.047.542.343	4.177.116.828.149
PPh Psl.4 Ayat (2)	IDR	749.188	6.380.843.982.412	1.547.454.842.129	4.833.389.140.283
	USD	2	208.310	166.492	41.818
PPN	IDR	650.804	22.862.333.584.143	11.709.347.114.051	11.152.986.470.092
PPN Impor	IDR	289	88.724.534.265	28.980.340.483	59.744.193.782
PPn BM	IDR	15	18.115.301.229	699.559.016	17.415.742.213
PBB Perkebunan	IDR	7.599	3.060.896.819.546	3.060.896.819.546	0
PBB Kehutanan	IDR	1.207	888.010.812.531	888.010.812.531	0
PBB Pertambangan Migas	IDR	7.805	18.103.871.902.656	18.103.871.902.656	0
PBB Sektor Lainnya	IDR	1.773	163.474.647.270	163.474.647.270	0
Bea Materai	IDR	526	269.959.668.859	37.532.425.431	232.427.243.428
PTLL	IDR	2	514.553.479	514.553.479	0
Bunga Penagihan PPh	IDR	2.212	2.772.828.539.544	2.772.828.539.544	0
	USD	19	151.270.150	151.270.150	0
Bunga Penagihan PPN	IDR	2.678	1.079.308.509.011	1.079.308.509.011	0
TOTAL	IDR	2.922.128	99.052.637.578.352	52.180.047.292.229	46.872.590.286.123
	USD	629	654.561.063	296.834.874	357.726.189

Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh WP. Terhadap pajak terutang yang disetujui WP wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, WP dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian WP membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal WP belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatanya diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Nilai pembayaran terkait ketetapan pajak atas jumlah yang tidak disetujui WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.162.411.560.710.

WP yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila WP mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasil upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai dasar bagi DJP dalam mencatat piutang perpajakan, baik sebagai penambah maupun pengurang piutang perpajakan WP.

8. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke

Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).
Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Pengadilan Pajak namun belum diterbitkan SP2B	IDR	37	230.548.745.758
	USD	3	5.809.696

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terdapat Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali sedang proses penerbitan SP2PK dengan diteruskan ke KPP tempat WP terdaftar karena WP pindah sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Mahkamah Agung namun belum diterbitkan SP2PK	IDR	171	1.324.514.753.342

31. Piutang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

a. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli.

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi yaitu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur. Pada tanggal 11 Februari 2020 telah diadakan pembahasan Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

32. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021

Pemerintah akan berkoordinasi dengan KSAP untuk mendorong percepatan penyelesaian PSAP yang terkait:

a. Kewajiban Jangka Panjang Pensiun PNS dan TNI/Polri;
b. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa;
c. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Transaksi Pajak.

Selanjutnya, pemerintah akan mengimplementasikan PSAP mengenai hal tersebut segera setelah PSAP berlaku. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan negara di dalam laporan keuangan Pemerintah.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp872.618.264.239.235. Nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp623.391.624.668.022 atau 250,13 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp249.226.639.571.213. Defisit LO Tahun 2020 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp817.921.696.353.299 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54.696.567.885.936, serta Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp817.921.696.353.299, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp1.783.192.349.751.058 dan Beban Operasional sebesar Rp2.601.114.046.104.357.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54.696.567.885.936, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp15.620.045.735.162, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp39.076.522.150.774.

Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2015- 2020

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

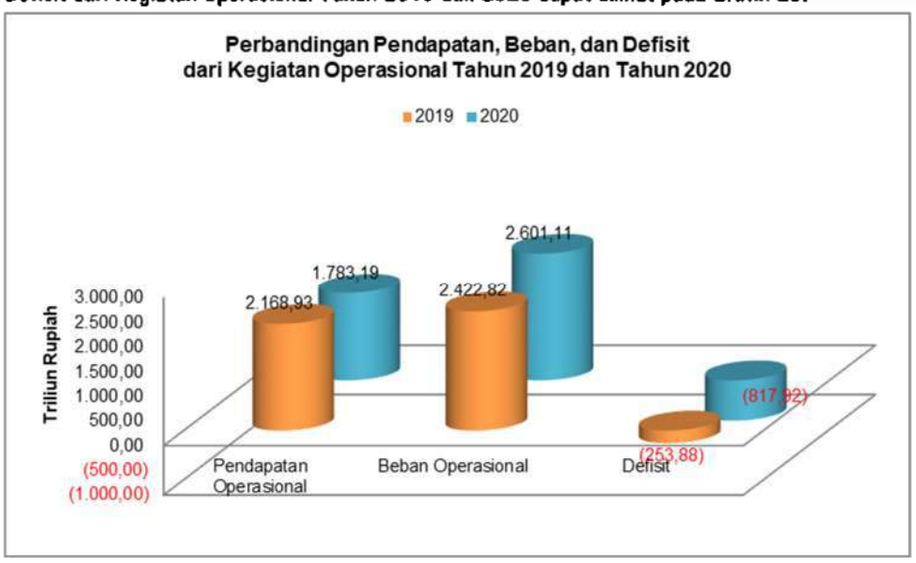
E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-Lain. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-Lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2020 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp817.921.696.353.299. Nilai defisit tersebut bertambah sebesar Rp564.036.708.978.818 atau 222,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp253.884.987.374.481. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Grafik 29.



Grafik 29. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp1.783,19 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp1.783.192.349.751.058 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.296.658.808.569.667, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp457.556.142.971.260, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp28.977.398.210.131. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2020 lebih rendah sebesar Rp385.738.461.614.779 atau 17,78 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp2.168.930.811.365.837. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 30.



Grafik 30. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2020

Pendapatan Perpajakan Rp1.296,65 triliun

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2020, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.296.658.808.569.667. Nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp280.875.074.016.380 atau 17,80 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.577.533.882.586.047. Pendapatan Perpajakan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Pajak Penghasilan	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437
Pendapatan Cukai	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271
Pendapatan Pajak Lainnya	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661
Pendapatan Bea Masuk	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126
Pendapatan Bea Keluar	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269
Pendapatan Pajak Lain-lain	(19.303.388.856)	22.422.050.495
Total	**1.296.658.808.569.667**	**1.577.533.882.586.047**

Pendapatan Pajak yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya merupakan dampak dari perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Kontraksi juga dialami oleh Pendapatan Bea Masuk sejalan dengan penurunan aktivitas impor. Namun demikian, masih terdapat pertumbuhan Pendapatan Kepabeanan dan Cukai yang ditopang

oleh kenaikan Pendapatan Cukai. Tumbuhnya Pendapatan Cukai merupakan dampak dari kebijakan tarif efektif cukai hasil tembakau dan pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, Pendapatan Bea Keluar juga mengalami pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan harga komoditas tembaga dan kelapa sawit.

Pendapatan Pajak Penghasilan Rp588,31 triliun

E.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 adalah sebesar Rp588.311.959.554.395. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp202.029.361.616.619 atau 25,56 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp790.341.321.171.014. Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan PPh Minyak Bumi	10.767.293.105.466	24.476.377.046.788
Pendapatan PPh Gas Bumi	21.685.235.687.599	34.652.118.896.779
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.370.461.126	2.541.269.599
Pendapatan PPh Pasal 21	139.575.497.367.579	148.962.352.462.971
Pendapatan PPh Pasal 22	16.898.546.592.900	21.450.645.481.140
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	27.094.680.529.938	53.750.052.700.672
Pendapatan PPh Pasal 23	40.580.199.641.894	45.499.149.466.003
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.859.262.159.002	11.557.660.082.012
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	160.573.261.368.734	261.687.731.414.986
Pendapatan PPh Pasal 26	44.601.670.971.389	46.731.219.638.473
Pendapatan PPh Final	113.379.490.545.307	130.283.487.190.539
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	111.539.653.990	134.377.615.887
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	97.269.537
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	-	7.345.980
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	-	730.495
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	-	472.736.000
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	-	(22.247.678)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	-	2.240.629.780.907
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	1.179.911.469.471	8.912.420.935.294
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	-	854.630
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	-	500.000
Jumlah	**588.311.959.554.395**	**790.341.321.171.014**

Penurunan besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi nasional, di antaranya konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, kegiatan ekspor impor tertekan, turunnya kinerja sektor riil, dan melemahnya pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi kebijakan insentif perpajakan juga memengaruhi besaran Pendapatan Pajak Penghasilan.

SK No 117454 A

Penurunan Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 yang paling signifikan terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019, melemahnya harga komoditas utama, meningkatnya restitusi pajak dan diberlakukannya insentif pajak. Penurunan PPh Migas disebabkan oleh tren penurunan harga minyak di pasar global karena turunnya permintaan sebagai dampak pandemi serta *oversupply* minyak sebagai akibat dari eskalasi politik negara-negara penghasil minyak.

E.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Rp453,59 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 adalah sebesar Rp453.594.425.319.088. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.344.276.836.686 atau 15,21 persen dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp534.938.702.155.774.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan PPN Dalam Negeri	304.017.056.179.001	347.356.073.946.386
Pendapatan PPN Impor	140.348.420.416.740	171.290.004.084.136
Pendapatan PPN Lainnya	713.298.440.085	162.985.906.464
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5.508.290.452.818	11.318.474.863.766
Pendapatan PPnBM Impor	3.006.550.518.122	4.778.052.113.626
Pendapatan PPnBM Lainnya	809.312.322	33.111.241.396
Jumlah	**453.594.425.319.088**	**534.938.702.155.774**

Penurunan pada Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2020 paling signifikan terdapat pada PPN Dalam Negeri yang dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga dan pemerintah akibat rendahnya daya beli masyarakat, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi, penurunan volume penjualan kendaraan bermotor, dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Penurunan tertinggi kedua adalah PPN Impor dipengaruhi oleh berlanjutnya tren penurunan volume dan nilai impor sepanjang tahun 2020 sebagai dampak menurunnya aktivitas perdagangan global akibat penerapan kebijakan *lockdown* di negara mitra dagang utama dan berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang terhenti selama pembatasan sosial. Penurunan PPnBM Impor terutama karena penurunan volume impor mobil CBU.

E.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Rp 21,87 triliun

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp21.873.478.094.366. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp245.819.172.929 atau 1,14 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp21.627.658.921.437. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan PBB Perkebunan	2.875.110.174.042	2.679.871.714.018
Pendapatan PBB Kehutanan	736.092.315.967	707.311.119.548
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	3.624.067.977.841	3.488.813.971.721
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.020.848.448.733	14.254.853.341.298
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	453.101.854.619	368.605.843.245
Pendapatan PBB Lainnya	164.257.323.164	128.202.931.607
Jumlah	**21.873.478.094.366**	**21.627.658.921.437**

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 relatif tidak terpengaruh dengan Pandemi Covid-19 karena realisasinya dihitung berdasarkan aktivitas pertambangan migas tahun 2019. Kinerja Pendapatan PBB ditopang oleh PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai kontributor utama. Namun demikian, Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam pada bulan April tahun 2020. Harga minyak *West Texas Intermediate Crude* (WTI) saat itu sempat mencatatkan harga minyak negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai Rp185,89 triliun

Pendapatan Cukai Tahun 2020 mencapai nilai Rp185.896.669.118.177. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.886.750.676.906 atau 2,70 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp181.009.918.441.271. Pendapatan Cukai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	179.829.381.555.178	173.457.613.724.100
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	241.785.540.000	122.516.071.000
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.760.903.436.430	7.339.164.710.070
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	52.485.794.559	75.024.437.900
Pendapatan Cukai Lainnya	12.112.792.010	15.599.498.201
Jumlah	**185.896..669.118.177**	**181.009.918.441.271**

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2020 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol. Peningkatan yang signifikan terhadap Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol disebabkan oleh peningkatan permintaan bahan dasar pembuatan produk disinfektan yang terjadi sejak pertengahan April 2020. Namun demikian, Pendapatan Cukai Hasil Tembakau tetap merupakan penopang utama peningkatan Pendapatan Cukai. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta kebijakan penyesuaian tarif cukai. Sedangkan untuk Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap sektor pariwisata nasional.

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya Rp10,49 triliun

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.497.063.339.658. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.896.208.854.997 atau 22,05 persen dibandingkan Tahun

2019 sebesar Rp8.600.854.484.661. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Bea Materai	1.451.068.784.948	1.480.547.017.178
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.638.052.138.011	4.117.446.934.631
Pendapatan PPn Batubara	485.164.815.391	538.680.322.182
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	8.160.222.960	97.145.996.283
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.077.680.856.075	1.229.599.650.789
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	836.860.288.869	917.242.557.662
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.863.959	220.033.197.452
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	74.369.445	158.808.484
Jumlah	**10.497.063.339.658**	**8.600.854.484.661**

Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya disebabkan oleh lonjakan setoran komponen Pendapatan Bunga Penagihan Pajak pada tahun 2020, sedangkan komponen lain mengalami penurunan.

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk Rp 32,45 triliun

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp32.451.724.568.651. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.109.121.639.475 atau 13,60 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp37.560.846.208.126. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Bea Masuk	29.699.692.420.467	35.103.349.503.286
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	804.979.187.019	523.769.571.149
Pendapatan Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	544.681.579.309	557.592.576.555
Pendapatan BM-DTP	-	354.326.302.000
Pendapatan Pabean Lainnya	(1.972.648.229)	8.516.851.048
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	179.547.240.000	271.986.036.790
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	1.864.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.224.796.790.085	741.303.503.298
Jumlah	**32.451.724.568.651**	**37.560.846.208.126**

Secara umum Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak melambatnya aktivitas impor nasional yang disebabkan oleh perlambatan perekonomian global sehingga devisa bayar impor Indonesia menurun. Faktor lain yang memengaruhi penurunan ini antara lain penguatan kurs Rupiah terhadap USD dan impor yang mengalami penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC).

E.2.1.1.1.7 Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan Bea Keluar Rp4,05 triliun

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2020 mencapai Rp4.052.791.964.188. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp620.632.810.919 atau 18,08 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp3.432.159.153.269. Pendapatan Bea Keluar terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Bea Keluar	4.039.312.741.098	3.431.785.216.838
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	972.895.569	373.535.431
Pendapatan Bunga Bea Keluar	12.506.327.521	401.000
Jumlah	**4.052.791.964.188**	**3.432.159.153.269**

Pendapatan Bea Keluar menunjukkan kinerja positif dibandingkan periode tahun lalu. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan harga komoditas ekspor, terutama pada tembaga dan hasil kelapa sawit.

E.2.1.1.1.8 Pendapatan Pajak Lain-Lain

Pendapatan Pajak Lain-lain minus Rp19,30 miliar

Pendapatan Pajak Lain-lain Tahun 2020 sebesar minus Rp19.303.388.856, sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp22.422.050.495.

Pendapatan Pajak Lain-Lain merupakan penyesuaian pendapatan pajak atas nilai pajak yang telah berada di rekening kas bendahara (dipungut bendahara) namun belum disetorkan ke kas negara sampai dengan periode tahun anggaran berakhir, sehingga diakui sebagai pendapatan Pajak Lain-lain. Karena Pendapatan Pajak Lain-Lain yang diakui tahun lalu telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan jenis pajaknya, maka pada tahun 2020, atas nilai tahun lalu dilakukan jurnal balik dan atas pungutan tahun 2020 yang belum disetorkan ke kas negara, dilakukan pengakuan pendapatan pajak lain-lain.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 457,55 triliun

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp457.556.142.971.260 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp107.208.373.405.304, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp170.294.841.425.980, Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp114.412.629.710.689. dan Pendapatan BLU sebesar Rp65.640.298.429.287. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp119.536.100.871.513 atau 20,71 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp577.092.243.842.773. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan dampak pelemahan ekonomi. Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terbatasnya aktivitas masyarakat. Penurunan ini terjadi juga pada porsi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pendapatan negara. Belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik, baik dari sisi *supply* dan *demand* mengakibatkan kontraksi pada Pendapatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Walaupun mengalami penurunan, Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun 2020 masih menunjukkan kinerja yang positif dalam menopang pendapatan negara dibuktikan dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam Rp 107,20 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2020 adalah sebesar Rp107.208.373.405.304. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.418.797.295.545 atau 37,90 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp172.627.170.700.849. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Minyak Bumi	52.511.224.852.254	96.743.924.765.308
Pendapatan Gas Bum	25 571.141.491.082	4[illegible] 71[illegible] 43[illegible]
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1 055.716.410.561	32[illegible] 89[illegible] 89[illegible] 65[illegible]
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	20.746.020.965.002	25 336 541 437 191
Pendapatan Dana Reboisasi	1.332.470.711.889	1.621.321.817.342
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	997.138.816.959	1.054.313.008.732
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	36.786.009.400	153.200.888.858
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.744.312.258.609	1.669.225.474.530
Pendapatan Perikanan	-	521.936.215.435
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	10.669.946.160	-
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	589.992.820.528	-
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.538.791.778.007	2.133.823.161.944
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	30.792.710.176	33.769.617.067
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	43.314.634.677	3.682.709.348
Jumlah	**107.208.373.405.304**	**172.627.170.700.849**

Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi dan gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Apabila tidak dilakukan koreksi penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB migas sebanyak dua kali.

Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2020. Pendapatan SDA Tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan Minyak Bumi dipengaruhi terutama oleh rata-rata ICP tahun

2020, sedangkan Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara dipengaruhi antara lain oleh harga dan kinerja produksi batubara serta komoditas pertambangan mineral. Penurunan dengan nilai yang signifikan pada Pendapatan SDA Tahun 2020 antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batubara. Selain itu, penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Indonesia *Crude Price* (ICP) pada tahun 2020, serta *lifting* migas.

Realisasi Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perusahaan tambang yang mengajukan izin penggunaan kawasan hutan, dampak dari mulai naiknya Harga Batubara Acuan (HBA) serta terdapat pembayaran pokok dan denda Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan tahun-tahun sebelumnya.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp 170,29 triliun

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 adalah sebesar Rp170.294.841.425.980. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp67.116.042.436.122 atau 28,27 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp237.410.883.862.102. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan dari KND Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi. Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	44.598.740.807.393	50.629.562.819.999
Pendapatan dari KND Lainnya	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	104.214.490.130.849	156.689.413.217.400
Jumlah	**170.294.841.425.980**	**237.410.883.862.102**

Menurunnya realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan disebabkan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 dan turunnya setoran dividen BUMN (akibat dampak Pandemi Covid-19). Target tidak tercapai pada beberapa BUMN disebabkan karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, kontribusi terbesar dalam penurunan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dikarenakan penurunan ekonomi nasional yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan kinerja perusahaan negara dalam meraih laba. Penurunan pendapatan pada BUMN perbankan dan migas berkontribusi besar. Hal ini dikarenakan Pendapatan penyesuaian untuk BUMN disajikan dalam mata uang rupiah sehingga untuk BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Pada empat BUMN, dua diantaranya membukukan laba sehingga dicatat sebagai pendapatan penyesuaian investasi adalah PT Pertamina dan PT Krakatau Steel dengan menggunakan kurs untuk nilai laba rugi Rp14.577.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBP Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBP Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2020 sebesar Rp44.598.740.807.393 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp23.987.948.592.740 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp20.610.792.214.653.

Pendapatan dari KND Lainnya berupa Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia sebesar Rp21.481.610.487.738 merupakan setoran PNBP yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah dari Surplus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp104.214.490.130.849. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari:

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp74.420.764.697merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan.
2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp3.468.961.940.048, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan.
3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp19.440.154 merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito *mudharabah* dari penempatan dana Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin.
4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp26.217.927.680.100 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (IPB, UNAIR, ITB, UI, UGM, UPI, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2020 terdapat kenaikan pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah apabila dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan kenaikan atas investasi pada Bank Indonesia,
5. Pendapatan Penyesuaian sebesar Rp57.962.880.000 berupa kenaikan nilai wajar investasi LPDP dari nilai per 31 Desember 2019 dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karateristik *available for sale*.

6. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp48.853.825.850 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp114,41 triliun

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp114.412.629.710.689. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.367.344.222.769 atau 2,03 persen dari tahun 2019 sebesar Rp116.779.973.933.458. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	13.541.058.365.679	18.257.607.077.740
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	483.020.614.148	584.054.856.489
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	440.104.804.791	261.320.052.508
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	33.869.453.997	83.695.898.935
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	10.856.422.377.125	22.389.594.380.397
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	920.843.169.891	1.262.712.091.113
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	**26.275.318.785.631**	**42.838.984.357.182**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.758.337.809.264	4.152.387.184.196
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	397.886.851.223	672.001.706.644
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	592.638.693.045	878.817.568.804
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	3.046.746.138.564	2.040.746.153.806
Pendapatan Perizinan	1.375.185.071.553	1.643.400.661.631
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	6.603.787.005.914	8.166.831.888.928
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	853.292.371.857	960.165.945.007
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	549.081.875.432	598.656.088.407
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	**16.176.955.816.852**	**19.113.007.197.423**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.066.576.743.768	3.075.628.977.654
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	201.669.505.022	204.150.647.780
Pendapatan Jasa Karantina	351.274.090.335	361.118.490.833
Pendapatan Jasa Agraria	1.749.435.231.950	2.276.753.279.082
Pendapatan Jasa Keagamaan	761.085.175.808	908.056.396.376
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	**5.130.040.746.883**	**6.825.707.791.725**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.206.493.099.950	4.333.756.020.756
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.533.713.527	471.035.859.158
Pendapatan Penelitian/Riset, *Survey*, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	316.955.252.409	470.818.683.410
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	3.261.451.100	7.307.894.897
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	**4.712.243.516.986**	**5.282.918.458.221**

Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.200.043.539.410	6.800.583.039.237
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	22.110.390.216.786	17.806.844.910.890
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	249.436.250.396	172.363.356.753
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	**28.559.870.006.592**	**24.779.791.306.880**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79.213.416.054	193.144.073.199
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	48.859.241.039	29.304.366.554
Pendapatan Jasa Lainnya	184.030.673.189	208.613.608.815
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	**312.103.330.282**	**431.062.048.568**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.751.517.612.408	1.856.126.995.439
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	5.575.987.844.000	4.906.089.972.942
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan *Fee* Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	234.568.829.914	112.468.995.089
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	425.207.410.926	250.300.537.228
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	7.906.858.335.025	7.762.671.609.771
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	563.457.541.590	661.434.155.257
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**16.457.697.573.863**	**15.549.092.265.726**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	1.089.513.149.580	607.707.985.438
Pendapatan Denda II	54.837.573.366	302.145.470.923
Pendapatan Denda III	429.062.743.677	396.251.260.289
Subtotal Pendapatan Denda	**1.573.413.466.623**	**1.306.104.716.650**
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	7.948.511.344.000	476.204.460
Pendapatan Lain-Lain II	6.885.809.814.656	305.891.401.869
Subtotal Pendapatan Lain-lain	**14.834.321.158.656**	**306.367.606.329**
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	110.135.193	795.220.944
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	**110.135.193**	**795.220.944**
Pendapatan Penyesuaian Akrual		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	380.555.173.128	346.142.963.810
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrual	**380.555.173.128**	**346.142.963.810**
Jumlah PNBP Lainnya	**114.412.629.710.689**	**116.779.973.933.458**

Penurunan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 yang signifikan terdapat pada Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan dan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha terutama pada Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pendapatan iuran produksi/royalti dan hasil produksi pada sektor mineral dan batubara serta pendapatan *firm commitment* wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Meskipun cenderung mengalami penurunan, beberapa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tahun 2020 mengalami kenaikan di antaranya Pendapatan Lain-lain, dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terutama karena pada tahun 2020 terdapat Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara dengan nilai yang cukup signifikan dan kenaikan pada Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara. Pada tahun 2020 ini Pendapatan dari Selisih Kurs disajikan dalam Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Selain itu, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum juga mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelayanan umum masyarakat (pelayanan paspor, visa, perizinan), serta semakin baiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada Pendapatan Lain-lain termasuk di dalamnya telah memperhitungkan Penyetoran dari Bank Indonesia sebesar Rp2.696.798.988.866.995 yang merupakan kontribusi Bank Indonesia atas Public Goods sebesar Rp1.753.214.980.000, dan kontribusi atas Non Public Goods sebesar Rp941.773.886.995 yang diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain, serta penyesuaian akrual atas kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan atas PG sebesar Rp1.456.927.480.000, dan NPG sebesar Rp255.535.887.600 yang juga diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Rp 65,64 triliun

Pendapatan BLU Tahun 2020 adalah sebesar Rp65.640.298.429.287. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.366.083.082.923 atau 30,56 persen dari tahun 2019 sebesar Rp50.274.215.346.364. Pendapatan BLU Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	30.133.935.535.607	34.409.116.101.702
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	969.446.015.272	1.193.071.664.155
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	24.859.153.399.744	5.302.611.898.735
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	545.753.149.780	715.253.770.340
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	**56.508.288.100.403**	**41.620.053.434.932**
Pendapatan Hibah BLU	1.050.388.351.754	744.837.706.710
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.044.785.516.662	976.138.212.549
Pendapatan dari Alokasi APBN	654.622.181.174	157.282.122.276
Pendapatan BLU Lainnya	6.382.214.279.294	6.775.903.869.897
Jumlah	**65.640.298.429.287**	**50.274.215.346.364**

Peningkatan Pendapatan BLU paling signifikan terdapat pada Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 2020 terutama berasal dari rumpun Pengelola Dana yaitu BLU BPDPKS (Sawit) karena pemberlakuan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan

produk turunannya terhitung mulai 1 Januari 2020, setelah di tahun 2019 relaksasi pungutan RpO. Selain itu, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 terdapat kenaikan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Peningkatan Pendapatan BLU ini juga dipengaruhi oleh pendapatan layanan kesehatan.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2020 yang signifikan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Rp28,97 triliun

Pendapatan Hibah selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp28.977.398.210.131. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.672.713.273.114 atau 102.57 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp14.304.684.937.017. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	4.362.717.987.979	4.535.834.189.821
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	5.120.550.591	854.875.450
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**21.365.855.163.212**	**8.209.767.397.950**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	533.880.884.575	591.671.964.284
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	1.188.769.070.469	469.822.176.046
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	5.040.568.486.761	4.557.091.285.795
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.300.917.711.407	1.232.593.695.958
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	**8.064.136.153.212**	**6.851.179.122.083**
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(452.593.106.293)	(756.261.583.016)
Jumlah Pendapatan Hibah	**28.977.398.210.131**	**14.304.684.937.017**

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendali penerima hibah. Pada tahun 2020, Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh hibah terkait dengan Pilkada, hibah dalam rangka penanganan pandemic Covid-19, dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkannya pendapatan hibah langsung kepada BUN. Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami kenaikan pada Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan hibah dalam bentuk jasa.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp452.593.106.293 berasal dari jurnal balik dari tahun 2019, pendapatan hibah yang belum disahkan pada 2019 sebesar Rp503.813.880.194 dan jumlah neto dari pendapatan hibah K/L yang belum disahkan di tahun 2020 sebesar Rp51.220.773.901, dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Pertahanan Nasional.
Terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak awal tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Sampai dengan periode Tahun 2020 *(Audited)*, terdapat 213 hibah yang telah diregistrasi oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR dan Kanwil DJPb.

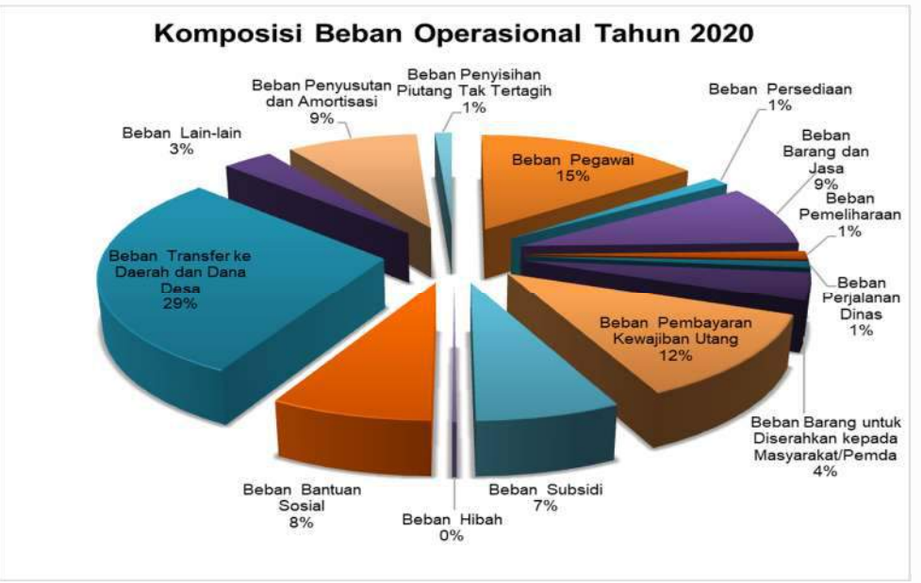
Dari 213 register hibah, terdapat 211 register yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah terkait Covid-19 sebesar Rp884.762.239.530,00.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp 2.601,11 triliun

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.601.114.046.104.357. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp178.298.247.364.039 atau 7,36 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp2.422.815.798.740.318. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Beban Operasional Tahun 2020

Rincian Beban Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Pegawai	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470
Beban Persediaan	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784
Beban Barang dan Jasa	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638
Beban Pemeliharaan	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258
Beban Perjalanan Dinas	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610
Beban Subsidi	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202
Beban Hibah	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209
Beban Bantuan Sosial	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535
Beban Lain-lain	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116
Beban Penyusutan dan Amortisasi	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843
Jumlah	**2.601.114.046.104.357**	**2.422.815.798.740.318**

Beban Pegawai Rp 386,48 triliun

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp386.481.644.924.399. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.230.548.074.929 atau 1,11 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp382.251.096.849.470. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	80.754.793.678.002	85.226.296.329.141
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	66.822.788.042.088	61.403.616.357.443
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	931.485.002.871	1.012.151.341.499
Beban Gaji Dokter PTT	2.146.411.864	66.709.821.503
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	17.612.008.275.271	15.829.893.376.147
Beban Honorarium	1.671.855.242.202	1.875.981.047.121
Beban Lembur	738.970.077.370	722.353.102.378
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	75.747.725.543.224	82.912.239.677.327
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	120.597.991.461.591	114.621.544.011.613
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	10.179.323.191.990	7.311.746.189.636
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	11.422.557.997.926	11.268.565.595.662
Jumlah	**386.481.644.924.399**	**382.251.096.849.470**

Persentase kenaikan signifikan pada komponen dari Beban Pegawai Tahun 2020 terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS, Beban Pensiun dan Uang Tunggu serta Beban Program Jaminan Sosial Pegawai. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan kenaikan tarif dan dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

Beban Pegawai dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada BA BUN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan. Beban Pegawai pada BA BUN antara lain terdapat pada satuan kerja PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp 30,46 triliun

Beban Persediaan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp30.460.702.045.047. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.946.484.108.157 atau 8,82 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp33.410.271.463.784. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Persediaan Konsumsi	19.600.690.884.556	19.359.077.297.762
Beban Persediaan Amunisi	1.498.948.995.541	1.490.379.822.174
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	3.085.310.580
Beban Persediaan Bahan Baku	2.023.727.007.070	5.063.418.526.096
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	16.533.115.935	12.270.625.963
Beban Persediaan Lainnya	7.320.802.041.945	7.482.039.881.209
Jumlah	**30.460.702.045.047**	**33.410.271.463.784**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Secara umum Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Terlihat dari seluruh komponen Beban Persediaan tidak ada yang mengalami kenaikan. Namun, yang menunjang nilai Beban Persediaan terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan , Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Penurunan Beban Persediaan yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges karena tidak terdapat realisasi di Tahun 2020. Selanjutnya, yang mengalami penurunan yang signifikan terdapat pada komponen Beban Persediaan Bahan Baku, penunjang terbesar komponen ini adalah Komisi Pemilihan Umum.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 220,55 triliun

Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp220.554.499.337.304. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.125.367.385.666 atau 28,66 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp171.429.131.951.638. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Barang Operasional	42.216.873.039.311	43.498.846.215.645
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	2.438.273.727.061	-
Beban Barang Non Operasional	58.289.564.227.151	69.651.215.376.781
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.212.742.369.592	-
Beban Kontribusi	61.486.467.641	509.322.684.387
Beban Kontribus Dana Dukungan Kelayakan *(Viability Gap Fund)*	641.849.435.152	-
Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	764.200.000	-
Beban Selisih Harga Biodesel	2.779.998.939.792	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.658.795.803.944	6.679.970.288.081
Beban Jasa Pos dan Giro	28.041.086.035	23.631.222.946
Beban Jasa Konsultan	5.809.425.616.730	5.971.711.705.594
Beban Sewa	5.315.718.874.956	5.802.846.302.732
Beban Jasa Profesi	3.167.834.350.722	4.602.959.572.516
Beban Jasa kepada BLU	14.598.614.643	1.233.431.300
Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	422.761.212.000	-
Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	875.816.796	-
Beban Jasa Lainnya	12.738.841.176.787	14.436.659.763.891
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.034.561.514.854	-
Beban Barang dan Jasa BLU	45.848.544.261.719	19.939.593.574.379
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	9.095.332.785	7.226.178.000
Beban Barang dan Jasa BLU II	593.417.776.298	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	270.435.493.335	303.915.635.386
Jumlah	**220.554.499.337.304**	**171.429.131.951.638**

Pertumbuhan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 disebabkan adanya penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alasan lain pertumbuhan realisasi tersebut adalah adanya pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit.

Beban Barang dan Jasa memiliki enam komponen baru yang tidak dimiliki pada Tahun 2019 yaitu:

1. **Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (*Viiability Gap Fund*) yang memiliki dukungan kelayakan pada Proyek KPBU SPAM Umbulan tahap IV dan V belum dapat dicairkan sehingga dijadwalkan untuk dicairkan pada tahun 2020 sesuai dengan jadwal pada perubahan terakhir Surat Dukungan Kelayakan Menteri Keuangan nomor S-112/MK.08/2020 tanggal 14 Februari 2020. Selain itu komponen ini juga terdapat alokasi pencairan dukungan kelayakan untuk proyek SPAM Kota Bandar Lampung sesuai dengan jadwal pada Surat Dukungan Kelayakan**

Menteri Keuangan nomor S-426/MK.08/2018 tanggal 6 Juni 2018.

2. Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*. Komponen ini tidak terdapat pada tahun sebelumnya dikarenakan DIPA pembayaran kompensasi penugasan dukungan *loss limit* baru diterbitkan pada TA 2020 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga tidak terdapat realisasi anggaran kompensasi penugasan dukungan *loss limit* pada TA 2019.
3. Beban Kompensasi Penugasan – Penanganan Pandemi Covid-19 ini adalah komponen dari akun beban selisih harga biodiesel.
4. Beban *Fee* Pelayanan Bank/Pos Persepsi digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA).
5. Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan yang digunakan untuk membayar layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGA/SWIFT, pembayaran jasa SWIFT BO Valas, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional dan pembayaran imbalan jasa Bank Kustodian.
6. Beban Barang dan Jasa BLU II merupakan komponen dari gabungan Belanja Barang dan Jasa BLU Penanganan Pandemi Covid-19.

Kenaikan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang dan Jasa BLU, dan Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19. Meskipun secara keseluruhan mengalami kenaikan, namun nilai Beban Barang Operasional dan Beban Jasa Lainnya mengalami penurunan yang signifikan.

Pada Beban Barang dan Jasa terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Nilai Beban Barang dan Jasa akun khusus Covid-19 signifikan pada komponen Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beban Barang dan Jasa dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kementerian Keuangan memiliki nilai Beban Barang dan Jasa paling signifikan, terjadi karena kenaikan Beban Barang dan Jasa BLU. Hal tersebut terjadi diakibatkan peningkatan signifikan dana insentif biodiesel yang harus dibayarkan oleh BPDPKS. Penurunan harga minyak solar dunia mengakibatkan selisih harga biodiesl dengan solar semakin besar. Selain itu, pencanangan Program B30 di tahun 2020 sehingga volume penyaluran biodiesel semakin meningkat.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp30,55 triliun

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp30.553.180.667.458. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.447.195.695.200 atau 4,97 persen dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp29.105.984.972.258. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.413.271.951.149	4.666.495.098.778
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	22.715.442.440	1.771.922.951
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19	242.049.279.113	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	354.265.946.837	333.943.271.605
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.169.344.786.876	8.136.195.593.397
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.184.676.392.142	1.660.317.338.249
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	759.786.120	697.108.466
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.483.804.722	224.468.257.037
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.881.619.699.849	4.632.109.600.502
Beban Pemeliharaan Irigasi	884.653.639.924	843.607.481.181
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.971.361.332.587	1.604.081.612.615
Beban Pemeliharaan Lainnya	400.351.457.277	447.939.541.640
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.276.314.958.414	1.231.868.310.247
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU	102.562.600	111.224.200
Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	44.102.949.816	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	283.418.783.521	284.796.130.643
Beban Persediaan Suku Cadang	5.188.533.055.937	5.030.792.011.808
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	20.154.838.134	6.790.468.939
Jumlah	**30.553.180.667.458**	**29.105.984.972.258**

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Beban Persediaan Suku Cadang. Penunjang utama Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Beban Pemeliharaan Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua komponen tersebut Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki nilai paling besar terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akun ini digunakan sebagian besar untuk penyediaan fasilitas cuci tangan di lingkungan perkantoran.

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp24,38 triliun

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 adalah sebesar Rp24.381.867.318.524. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.654.528.704.806 atau 47,04 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp46.036.396.023.330. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.710.878.105.506	21.545.832.538.626
Beban Perjalanan Dinas Tetap	45.812.115.237	81.622.654.790
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.934.082.604.901	3.009.695.727.331
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	2.977.624.787.729	6.776.673.431.833
Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	1.049.336.105.397	-
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	4.374.973.403.991	9.768.362.441.018
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	463.134.187.814	1.783.767.706.245
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	19.027.390.754	44.060.179.995
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	265.810.920.671	1.712.236.079.558
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	506.244.725.550	1.314.145.263.934
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19	34.942.970.974	-
Jumlah	**24.381.867.318.524**	**46.036.396.023.330**

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalananan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Jika dilihat dari tabel tersebut hampir seluruh Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Penurunan signifikan terdapat pada komponen Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota. Menurunnya realisasi Beban Perjalanan Dinas merupakan dampak kebijakan *refocusing*/realokasi anggaran belanja K/L, pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan mekanisme kerja *working from home/ flexible working space*.

Pada Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua Beban Perjalanan Dinas pada kelompok akun khusus Covid-19 yang memiliki nilai signifikan adalah Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 adalah sebesar Rp103.388.684.664.344. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp45.982.918.992.060 atau 80,10 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp57.402.680.361.704. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda Rp103,38 triliun

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.793.679.012.047	6.247.584.732.816
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	7.820.290.000	-
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	2.343.300.000	330.494.682
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	11.814.437.871.782	17.804.744.758.176
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	58.604.270.085.952	-
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa Penanganan Covid-19	4.226.303.530.380	-
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.939.830.574.183	33.350.020.376.030
Jumlah	**103.388.684.664.344**	**57.402.680.361.704**

Secara umum Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan pada tahun 2020. Akan tetapi komponen-komponen yang memiliki realisasi pada Tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan terbesar terdapat pada Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

Pada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19, Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 dan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Ketiga belanja tersebut yang memiliki nilai signifikan adalah Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 terutama pada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Agama.

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda paling signifikan terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Kementerian Ketenagakerjaan, beban paling besar terdapat pada Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang Rp 317,89 triliun

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2020 sebesar Rp317.892.180.673.151 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp40.658.870.729.541 atau 14,67 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp277.233.309.943.610. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban

Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	**15.653.120.052.865**	**20.882.043.996.401**
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	595.797.036.630	570.898.022.241
Beban Bunga Pinjaman Program	6.981.026.176.203	10.760.229.959.412
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	245.610.120.997	100.552.464.466
Beban Bunga Pinjaman Proyek	6.907.259.838.583	8.506.655.899.156
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	923.017.494.020	943.218.054.388
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	409.386.432	489.596.738
Beban Bunga SBN	**293.878.360.999.045**	**246.698.626.996.109**
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	200.604.245.078.152	168.287.501.028.232
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	120.809.813.682	114.302.414.090
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	39.521.333.127.852	35.432.465.969.539
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	67.821.789.876	81.057.207.629
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	43.520.423.525.854	33.751.880.934.060
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	156.387.006.408	132.542.448.817
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	9.860.581.848.221	8.875.876.187.742
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	26.758.809.000	23.000.806.000
Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	**8.360.699.621.241**	**9.652.638.951.100**
Jumlah	**317.892.180.673.151**	**277.233.309.943.610**

Beban Pembayaran Kewajiban Hutang terbesar terdapat pada BA BUN. Tumbuhnya realisasi Beban Pembayaran Kewajiban Hutang, sejalan dengan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Beban Bunga Instrumen Pinjaman Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 antara lain karena adanya pembayaran bunga pinjaman program yang lebih kecil dibandingkan Tahun 2019.. Adapun Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp293.878.360.999.045 dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar Rp8.360.699.621.241.

Pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah telah memperhitungkan pengembalian atas kelebihan pembayaran bunga atas SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1.809.592.188.

Di samping itu, nilai beban bunga atas SBN TA 2020 yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 Audited termasuk nilai beban discount sebagai penambah beban bunga..

Perbedaan nilai antara beban pembayaran kewajiban utang di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan,

pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2020.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2020 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).
Beban diskonto menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 (*Audited*)
542111	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	1.742.915.185.000	3.353.190.803.000
542121	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	3.918.914.715.768	3.274.832.902.500
542141	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	394.554.456.100	373.544.996.000
545111	Beban Pembayaran *Discount* SBSN - Jangka Panjang	1.703.892.389.373	1.123.099.682.600
545131	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara Syariah	600.422.875.000	1.527.970.567.000
Jumlah		**8.360.699.621.241**	**9.652.638.951.100**

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi Rp 183,62 triliun

Beban Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp183.621.464.262.798 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.707.922.162.404 atau 3,01 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp189.329.386.425.202. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Subsidi Minyak Solar	13.992.009.748.310	32.438.883.567.686
Beban Subsidi Minyak Tanah	1.213.190.526.436	2.868.252.604.635
Beban Subsidi Elpiji	40.235.383.299.234	41.588.894.626.543
Beban Subsidi Listrik	47.988.113.661.517	51.711.774.354.480
Beban Subsidi Pupuk	26.045.775.388.134	29.975.667.317.918
Beban Subsidi PPh-DTP	-	10.557.240.293.147
Beban Subsidi BM-DTP	-	354.326.302.000
Beban Subsidi PT KAI	2.887.184.259.086	2.316.457.506.279
Beban Subsidi PT PELNI	2.193.106.619.656	2.130.280.875.028
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya	151.853.103.000	156.132.228.800
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	159.458.000.000	632.060.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.571.573.732.509	3.323.491.684.431
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	-	1.156.833.360
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	-	16.265.935.542
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	11.670.923.731.073	9.579.101.472.424
Beban Subsidi *Risk Sharing* KKP dan Energi	-	265.313.074
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	197.426.768	1.476.359.572
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	148.670.929	532.604.682
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	-	4.699.315.947
Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	12.267.506.577.246	-
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	-
Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	-

Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	4.795.833.147.937	-
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	4.047.739.351.211	-
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	-
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.861	
Beban Subsidi Estimasi	8.680.755.733.872	1.672.427.229.654
Jumlah	**183.621.464.262.798**	**189.329.386.425.202**

Penurunan besaran Beban Subsidi Tahun 2020 yang signifikan terdapat pada Beban Subsidi Minyak Solar dan Beban Subsidi PPh-DTP.

Penurunan Beban Subsidi bunga dan IJP antara lain disebabkan karena jumlah tagihan yang diajukan oleh bank penyalur lebih kecil, nilai BAV periode penagihan subsidi yang ditagihkan bank penyalur sebagian besar merupakan tagihan periode TAYL, dan skema penyaluran belanja subsidi telah berakhir kecuali Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) yang masih berjalan

Meskipun secara umum mengalami penurunan, terdapat peningkatan pada komponen-komponen Beban Subsidi dari tahun sebelumnya antara lain Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya, Beban Subsidi PT PELNI dan Beban Subsidi PT KAI.

Pada Beban Subsidi Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19 berupa penyaluran diskon tarif Listrik Rumah Tangga Tahun 2020 dan Kurang Bayar Diskon Tarif Bisnis dan Industri 450 VA 2020; Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Bank BTN, Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19 pada Provinsi Papua dan Papua Barat, dan Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19 yang terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, terdapat Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2020 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2020 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2020. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp8.680.755.733.872 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Keuangan.

Pada Beban Subsidi Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi BM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19, dan Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Beban yang memiliki nilai signifikan diantara

akun khusus Covid-19 adalah Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada BA BUN.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

Beban Hibah Rp5,79 triliun

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera pada BAST atau apabila dalam BAST tidak terdapat nilai barang/jasa menggunakan nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2020 sebesar Rp5.798.660.821.822. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp677.546.464.387 atau 10,46 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp6.476.207.286.209. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	3.981.718.191.660	6.241.521.667.087
Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	1.787.401.112.712	-
Beban Hibah Lainnya	129.939.658	411.231.836
Jumlah	**5.798.660.821.822**	**6.476.207.286.209**

Beban Hibah hanya berasal dari BUN. Pada Beban Hibah Tahun 2020 terdapat akun khusus Covid-19 yang digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu klasifikasi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182. Dari nilai tersebut, dilakukan koreksi Penyesuaian Beban Hibah Pariwisata atas Sisa Dana Hibah per 31 Desember 2020 yang masih di RKUD dan harus disetorkan kembali ke RKUN sebesar Rp477.246.134.470.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp204,77 triliun

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp204.774.725.400.005. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.961.109.927.583 atau 89,93 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp107.813.615.472.422. Beban Bantuan Sosial merupakan merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 (*Audited*)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	3.981.718.191.660	6.241.521.667.087
Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	1.787.401.112.712	-
Beban Hibah Lainnya	129.939.658	411.231.836
Jumlah	**5.798.660.821.822**	**6.476.207.286.209**

Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	777.570.433.000	2.918.167.739.000
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	9.291.927.285.528	3.950.717.607.408
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	2.593.222.370.842	33.860.057.941.981
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	36.320.608.388.361	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	399.673.065.913	14.273.215.574.714
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	73.767.150.417.671	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	4.671.188.662.475	2.717.527.043.331
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang	6.842.771.860.010	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.383.485.183.634	3.196.933.907.896
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.669.612.356.671	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.107.048.827.535	-
Jumlah	**204.774.725.400.005**	**107.813.615.472.422**

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya karena dorongan perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Alasan lain terjadi peningkatan adalah tumbuhnya serapan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kementerian-kementerian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program bantuan sosial yang mendukung Penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada Kementerian Sosial meningkatnya Beban Bantuan sosial dipengaruhi oleh :

1. Adanya peningkatan target penerima bantuan sosial Program Sembako menjadi 15.200.000 KPM pada awal tahun 2020, serta adanya peningkatan kembali target Program Sembako akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi 20.000.000 KPM. Selain itu disebabkan juga kenaikan indeks Program Sembako dari Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan.
2. Adanya kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai respon atas adanya pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk 9.000.000 KPM dengan nilai Rp600.000/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2020 dan Rp300.000/bulan yang diberikan selama 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020.
3. Adanya kenaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebesar 25% yang disalurkan pada bulan April, Mei, dan September 2020.

Pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 terdapat akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 pada Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara, Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19, Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 berupa Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah Covid-19 sejumlah 9 juta KPM. Selain itu, terdapat juga Beban

Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang dan Jasa-Penanganan Covid-19 yang berasal dari Beban Hibah Covid-19 Dalam Negeri dan Luar Negeri. Diantara beban-beban tersebut, beban terbesar terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 yang terdapat pada Kementerian Sosial.

Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dari tahun sebelumnya terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang, Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang, dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

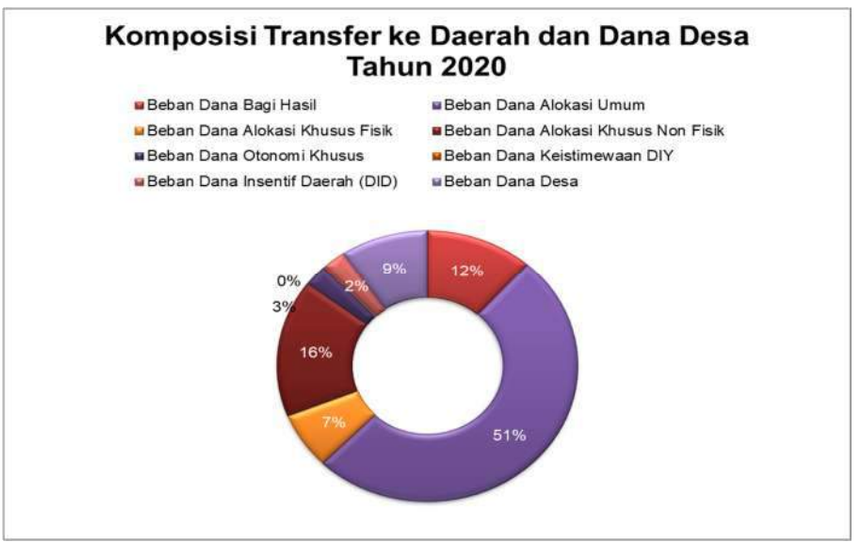
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 752,58 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp752.583.826.022.245 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.183.508.136.290 atau 7,40 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp812.767.334.158.535. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Dana Bagi Hasil	87.032.902.063.295	104.713.947.999.521
Beban Dana Alokasi Umum	381.612.451.495.551	420.910.238.556.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	50.175.976.373.103	64.165.654.543.270
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.414.726.609.534	121.322.377.555.524
Beban Dana Otonomi Khusus	19.556.727.696.000	20.979.943.308.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	1.279.572.655.079	1.166.576.228.221
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	18.455.285.206.000	9.694.447.489.000
Beban Dana Desa	71.056.183.923.683	69.814.148.478.999
Jumlah	**752.583.826.022.245**	**812.767.334.158.535**

Jumlah Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 lebih kecil dari Tahun 2019 disebabkan adanya kebijakan relaksasi percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 32 berikut.



Grafik 32. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020

Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 adalah sebesar Rp87.032.902.063.295. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.681.045.936.226 atau 16,89 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp104.713.947.999.521. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya pagu Dana Bagi Hasil dari tahun sebelumnya disebabkan adanya kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Alasan lain penurunan pagu Dana Bagi Hasil ini adalah turunnya rencana penerimaan Pajak dan PNBP yang dibagihasilkan pada tahun anggaran 2020. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	28.212.170.568.820	29.700.461.156.954
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.758.006.450.796	2.806.363.414.670
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.396.725.062.979	3.459.140.234.859
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	13.575.699.048.167	13.669.038.797.935
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	109.671.757.169	105.515.816.770
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	482.660.723.639	489.996.644.211
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	2.095.361.001.376	2.114.590.004.049
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	5.762.178.967.576	11.901.910.112.248
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5%	189.453.317.037	390.671.141.718
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	302.781.100.729	668.881.581.817
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	5.095.201.445.602	9.797.587.763.681
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0,5%	70.875.576.676	145.205.689.471
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.181.793.748.122	1.484.800.270.188
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Iuran Tetap	350.167.044.637	360.691.989.728
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	16.593.026.029.061	20.714.261.451.552
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.511.421.365.408	1.516.197.490.874
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	23.368.532.647	26.888.711.800
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	34.651.707.742	2.946.167.478
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	51.138.945.320	122.617.293.659
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	949.263.232.639	862.768.231.175
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	403.442.596.500	661.582.338.020
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	480.530.213.350	417.105.678.324
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.403.313.627.303	3.294.726.018.340
Jumlah	**87.032.902.063.295**	**104.713.947.999.521**

Penurunan Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi. Meskipun demikian, terdapat peningkatan dengan nilai signifikan pada Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan

Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH.
Kebijakan pada UU APBN Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya.
Beban Transfer DBH merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2020. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 ini juga memperhitungkan pengakuan beban atas potensi/estimasi kurang bayar dan lebih bayar DBH di tahun berjalan.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Beban DAU Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp420.910.238.556.000. Penurunan tersebut disebabkan oleh alokasi DAU Formula tahun anggaran 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula tahun anggaran 2019 karena penurunan Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN tahun anggaran 2020. Alasan lain yang menimbulkan penurunan Nilai Beban DAU adalah peyaluran DAU tahun anggaran 2020 dikaitkan dengan basis kinerja.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 adalah sebesar Rp50.175.976.373.103. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus. dan kriteria teknis. Beban DAK Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270. Penurunan ini terjadi akibat penurunan pagu DAK Fisik dari adanya kebijakan *refocusing* pagu anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Beban DAK Fisik Tahun 2020 sebesar Rp50.175.976.373.103 terdiri dari Beban DAK Reguler sebesar Rp31.993.306.369.443, Beban DAK Penugasan sebesar Rp12.826.103.642.806, Beban DAK Afirmasi sebesar Rp5.356.566.360.854.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 adalah sebesar Rp123.414.726.609.534. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.092.349.054.010 atau 1,72 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp121.322.377.555.524. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.333.831.058.494	52.001.837.749.380
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	995.067.035.767	1.977.231.267.885
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	168.035.770.138	463.968.756.915
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.413.477.330.782	49.200.273.626.885
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.834.908.476.291	9.729.473.301.595
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.638.121.587.819	1.723.241.760.092
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	168.829.475.417	193.663.883.050
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	858.464.679.519	867.822.995.199
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.665.172.473.990	3.659.144.963.421
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	1.096.715.820.783	1.167.549.190.102
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	115.348.463.502	127.476.500.000
Beban Dana Pelayanan Kepariwisataan	126.754.437.032	210.693.561.000
Jumlah	**123.414.726.609.534**	**121.322.377.555.524**

Peningkatan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Bantuan Operasonal Kesehatan. Pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 terdapat perubahan pola penyaluran yaitu pemindahbukuan Dana BOS dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Sekolah serta disalurkan secara bertahap. Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan lebih salur Dana BOS TA 2019 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan.

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2020 adalah sebesar Rp19.556.727.696.000. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.423.215.612.000 atau 6,78 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000. Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.288.694.844.000	5.850.230.158.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.711.275.076.000	2.824.446.537.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.583.504.000	2.507.241.496.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.734.895.924.000	1.440.553.463.000
Jumlah	**19.556.727.696.000**	**20.979.943.308.000**

Beban Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian pagu sesuai dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Akan tetapi, Beban Dana Otonomi Khusus di Tahun 2020 mengalami percepatan penyaluran, hal ini disebabkan adanya relaksasi penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap II yang tanpa syarat dan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020.

Beban Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode tahun 2020. Tidak terdapat realisasi kurang bayar periode sebelumnya yang dibayarkan selama Tahun 2020 dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan serta tidak ada pengembalian lebih salur tahun sebelumnya.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.279.572.655.079 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp112.996.426.858 atau 9,69 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp1.166.576.228.221. Peningkatan tersebut sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 yang sejalan dengan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2020, dengan nilai sebesar Rp40.427.344.920.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar Rp18.455.285.206.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2020. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp8.760.837.717.000 atau 90,37 persen dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp9.694.447.489.000.

Jumlah Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sama dengan realisasi DID Tahun 2020 karena semua SPM Transfer Dana Insentif Daerah yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan. Pertumbuhan capaian realisasi ini salah satunya disebabkan karena Kelompok Kategori Bidang Kesehatan pada tahap I disalurkan secara sekaligus 100 persen. Selain itu, terjadi relaksasi syarat salur pada kategori lainnya dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penyebab lainnya adalah pemerintah pusat mengalokasikan Dana Insentif Daerah Tambahan sebesar Rp5.000.000.000.000 kepada pemerintah daerah dalam 3 periode untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.

Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2020. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah dapat

meningkatkan kinerja dan dukungannya untuk meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dukungan terhadap peningkatan kinerja ekspor, mendorong penurunan angka stunting serta peningkatan pengelolaan lingkungan melalui pengurangan sampah plastik.

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2020 adalah sebesar Rp71.056.183.923.683. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.242.035.444.684 atau 1,78 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp69.814.148.478.999. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2020 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang terlah diterima Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut merupakan upaya pemerintah dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa. Selain itu, sebagai respon atas Pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian dalam kebijakan pengelolaan Dana Desa.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain Rp86,22 triliun

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2020 sebesar Rp86.222.605.803.664. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.965.179.316.548 atau 45,51 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp59.257.426.487.116. Beban Lain-lain Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Cadangan Beras Pemerintah	2.583.365.569.008	880.895.042.614
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	53.116.712.664	53.917.840.896
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	-	519.773.868.148
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	108.794.852.646	103.520.762.425
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	543.291.772.307	635.037.508.668
Beban Lain-Lain BUN Lainnya	12.315.017.585.414	-
Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19	18.921.897.571.811	-
Beban Lain-lain	1.837.533.068.319	2.116.234.499.871
Biaya Perbankan (Bank *Charge*)	-	533.665
Beban Pihak Ketiga Migas	24.390.020.073.105	36.809.117.831.201
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - *Reimbursement* PPN	153.260.995.363	216.520.542.309
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	91.134.138.274	82.064.311.148

Beban Diestimasi *Reimbursement* PPN dan Penggantian Bonus Produksi	185.707.974.761	335.462.257.956
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	313.977.040.220	235.732.424.035
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	24.725.488.449.772	17.269.149.064.180
Jumlah	**86.222.605.803.664**	**59.257.426.487.116**

Beban Lain-Lain pada Tahun 2020 mengalami kenaikan disebabkan adanya kegiatan baru pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain yaitu Program Kartu Prakerja, Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Tagihan Listrik. Penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Pihak Ketiga Migas dan Beban Lain-Lain. Beban Lain-Lain hanya terdapat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan BA BUN. Kenaikan tertinggi pada Beban Lain-Lain terdapat pada Beban Penyesuaian Nilai Investasi.

Pada Beban Lain-Lain Tahun 2020 terdapat akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19. Komponen ini berisi Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp4.403.239.252.500, Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp12.811.795.218.059, dan Beban lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.706.863.101.252..

Rincian beban Lain-lain BUN Lainnya pada tahun 2020 bernilai Rp12.315.017.585.414 pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai
1	Kekurangan penerimaan dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero)	298.816.254.300
2	Kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi bulan Januari sampai dengan Desember	17.904.507.732.862
3	Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual Premium PT Pertamina (Persero)	(4.222.953.981.191)
4	Piutang Lainnya atas Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Jamali	(1.649.479.744.098)
5	Piutang Lainnya atas Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT AKR Corporindo, Tbk	(15.872.676.459)
Jumlah		12.315.017.585.414

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp24.390.020.073.105 antara lain berasal dari Beban Pihak Ketiga Migas - DMO *Fee* KKKS sebesar Rp7.100.908.928.692 Beban Pihak Ketiga Migas - *Reimbursement* PPN KKKS sebesar Rp6.097.587.552.284, Beban Pihak Ketiga Migas - *Underlifting* KKKS sebesar Rp11.159.160.026.429, Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah ke Pemda sebesar Rp189.430.498 dan Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Penerangan Jalan nonPLN ke Pemda sebesar Rp32.174.135.202.

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp24.725.488.449.772 berasal dari penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari PTNBH Universitas Sumatera Utara dan BPJS kesehatan sebesar Rp79.284.762.878, bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam laporan keuangannya sebesar Rp24.597.739.610.594, dan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp48.464.076.300 pada PT Tuban Petrochemical Industries. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun lalu karena adanya peningkatan beban/rugi operasional BUMN pada KPA Kementerian BUMN. Hal ini diakibatkan Beban Penyesuaian Nilai Investasi BUMN disajikan dalam mata uang rupiah sehingga untuk BUMN yang menyusun laporan keuangan dengan mata uang asing akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Dari empat BUMN yang menggunakan mata uang dollar terdapat dua BUMN yang mengalami kerugian yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 2020 kurs yang digunakan untuk nilai beban penyesuaian adalah Rp14.577.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp225,17 triliun

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp225.173.233.636.287. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.254.475.206.910 atau 5,95 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp239.427.708.843.197.

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.007.506.496.536	62.600.232.488.375
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	-	72.321.600
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.644.871.210.388	13.351.596.641.309
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	77.186.614.118.471	90.457.968.883.373
Beban Penyusutan Irigasi	25.113.271.980.801	34.388.148.666.323
Beban Penyusutan Jaringan	1.646.796.632.170	2.053.072.972.453
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.590.074.606.977	1.415.556.923.775
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.756.928.273	1.839.528.986
Beban Amortisasi Paten	12.398.417.731	15.139.312.402
Beban Amortisasi *Software*	2.976.025.768.610	2.136.825.864.602
Beban Amortisasi Lisensi	370.040.938.111	360.106.409.418
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	379.583.488.966	365.001.156.398
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	118.624.827.474	8.564.924.672
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.126.922.491.703	238.718.117.918
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.907.313.279.869	2.782.722.791.815
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	26.191.320.007.615	24.908.802.394.824
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA	4.795.638.293	4.424.901.690
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.148.676.356.078	2.128.496.846.079

Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	1.743.543.686.115	2.207.368.946.572
Beban Penyusutan Aset *Idle* yang Sudah Diserahkan ke DJKN	377.666.850	386.575.300
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain BUN	2.719.095.256	2.662.175.313
Jumlah	**225.173.233.636.287**	**239.427.708.843.197**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan adalah Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan, Beban Penyusutan Irigasi, dan Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B. Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan terbesar terdapat pada Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BA BUN, dan Kementerian Pertahanan. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada BA BUN beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada Kementerian Pertahanan beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Nilai beban penyusutan Aset Eks Pertamina pada LKPP sebesar Rp2.148.676.356.078, terdiri dari BA 999.03 sebesar Rp1.455.484.615.810 dan BA 999.99 sebesar Rp693.191.740.268

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp29,22 triliun

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 adalah sebesar Rp29.226.770.527.309. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.351.522.025.466 atau 168,75 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.875.248.501.843. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2020. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas	38.896	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	2.024.861.122.586	6.174.418.091.108
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	1.311.744.681.313	2.869.164.894.580
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	(46.518.001.329)	263.925.244.581
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	1.818.411.959.141	3.019.767.987.122
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	47.164.005.949	9.471.191.328
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	511.584.224.822	594.489.740.229
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	50.522.091.177	(22.344.717.168)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	3.547.680.399.834	323.105.593.835
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	14.974.680.338.609	(1.018.188.531.727)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	364.301.183.075	(1.823.598.864.031)

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	(87.382.990.688)	(182.698.116.118)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	4.258.529.799	3.206.751.877
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(121.384.396)	(48.575.983)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	10.152.407.583	(9.342.950.323)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(177.319)	7.693.847.543
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	3.075.404.707	53.445.540.072
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	144.763.363.703	474.537.573.577
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	408.169.238	(511.075.744)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	6.693.977.614	36.782.669.499
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	4.143.401.716.384	105.205.574.325
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	99.832.353	(11.430.425)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR	8.505.391.872	19.302.940.938
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR BLU	(4.679.234)	(4.688.169)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	388.488.921.620	(22.520.189.083)
Jumlah	**29.226.770.527.309**	**10.875.248.501.843**

Secara umum Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Nilai Beban Penyisihan piutang terdapat pada BA BUN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Beban Penyisihan Utang di BA BUN terdapat pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah yang tersebar pada 6 Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai terbesar pada Kuasa Pengguna Anggaran BLU Set BPJT. Kenaikan terbesar terdapat pada komponen Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya terutama pada BA BUN. Selain itu, terdapat penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2020 antara lain Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB, dan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Defisit Rp 54,69 triliun

Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp54.696.567.885.936. Defisit kegiatan non operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar dan defisit kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 sebesar Rp4.658.347.803.268, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp59.354.915.689.204 atau 1.274,16 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya

tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp15,62 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 sebesar Rp15.620.045.735.162. Defisit ini menurun sebesar Rp9.724.177.714.511 atau 164,93 persen dari Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.895.868.020.651. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp310.006.160.448 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp15.930.051.895.610.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp 310,00 miliar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp310.006.160.448. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp170.757.715.849 atau 35,52 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp480.763.876.297.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	3.641.558.151	3.948.035.294
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	102.113.573.693	111.118.368.021
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	24.501.985.560	196.870.000
Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.000.000	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	168.423.082.816	209.010.880.903
Pendapatan Pelepasan Aset	11.224.960.228	156.489.722.079
Jumlah	**310.006.160.448**	**480.763.876.297**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp15,93 triliun

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp15.930.051.895.610. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.553.419.998.662 atau 149,82 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp6.376.631.896.948.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun

barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 (*Audited)*
Beban Kerugian Pelepasan Aset	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948
Jumlah	**15.930.051.895.610**	**6.376.631.896.948**

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp15.904.631.202.619 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp25.420.692.991. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/(Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka. Panjang

Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Defisit ini menurun sebesar Rp378.083.000.000 atau 100,00 persen dibandingkan defisit Tahun 2019 sebesar Rp378.083.000.000. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption*/*Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang.

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Pendapatan ini menurun sebesar Rp5.807.000.000 atau 100,00 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp5.807.000.000. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Beban ini menurun sebesar Rp383.890.000.000 atau 100,00 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp383.890.000.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya minus Rp 39,07 triliun

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 sebesar minus Rp39.076.522.150.774 yang menandakan defisit. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp50.008.820.974.693 atau 457,44 persen dibandingkan surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.932.298.823.919. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp54.620.720.966.608 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp93.697.243.117.382.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 54,62 triliun

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp54.620.720.966.608. Nilai tersebut turun sebesar Rp71.131.010.899.071 atau 56,56 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp125.751.731.865.679. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Pendapatan BLU Lainnya	68.947.505.785	60.296.406.733
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.821.299.061	4.950.810.289
Pendapatan dari Selisih Kurs	1.843.487.181.965	12.531.024.709
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	33.071.130.987	45.492.863.731
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	2.424.633.478.019	5.239.509.424.727
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	176.625.321.942	172.806.638.038
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	18.033.647.648	24.218.407.398
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	17.818.255.957.464	74.723.098.430.575
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	4.253.083.286.888	92.742.711.721
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	19.564.631.485.724	25.461.150.481.941
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.415.130.671.125	19.914.934.665.817
Jumlah	**54.620.720.966.608**	**125.751.731.865.679**

Turunnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (999). Kementerian Pertahanan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar Rp 15.958.191.143.846 diantaranya adalah selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya. Sedangkan defisit selisih kurs belum terealisasi Tahun 2020 berasal dari beban kerugian selisih kurs belum terealisasi atas transaksi pembayaran *banking commission* kepada MUFG Tokyo.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar 15.697.354.499.164 berupa penambahan pencatatan aset baru HBM, HBI dan Tanah pada KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.270.961.392.697 dan penambahan pencatatan aset nontanah, aset baru dan kapitalisasi aset induk Aset PKP2B sebesar Rp1.427.258.184.764. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan nilai signifikan berasal dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, persentase peningkatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I terutama pada Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali transfer ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu. Selain itu di dalamnya terdapat setoran pengembalian belanja hibah dari Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak rutin. Setoran tersebut diidentifikasi sebagai pengembalian Belanja Hibah

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 93,69 triliun

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp93.697.243.117.382. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp21.122.189.924.378 atau 18,40 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp114.819.433.041.760. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	1.876.738.097	3.321.314.672
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	8.053.503.251	5.138.251.399
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8.673.197.834.928	10.334.914.070.220
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	4.986.150.758.902	5.654.603.528.934
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pembulatan	534.191.815.848	458.037.177.476
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	-	240.984.341
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	78.432.394.301.193	5.889.071.283.348
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	2.907.199.251	3.672.195.959
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	487.151.717.787	-
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	199.218.607.873	59.079.719.679
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	372.100.636.465	92.411.354.515.746
Pembulatan	3.787	(14)
Jumlah	**93.697.243.117.382**	**114.819.433.041.760**

Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2020 terdapat pada Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional dan Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2020 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan

Beban Lain-lain pada Kegiatan non Operasinal Lainnya terdiri dari selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman yang dilakukan tahun 2020. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan dan dicatat sebagai beban lain-lain antara lain sebesar 352.579.879.798, Beban lain-lain dari satker Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar minus Rp62.752.609.311 dan beban lainnya atas pendapatan perolehan jasa pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp82.273.365.978.

Meskipun secara keseluruhan nilainya mengalami penurunan namun terdapat peningkatan yang signifikan pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp78.432.394.301.193 terdapat pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp76.771.165.702.557 dan pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.661.228.598.636. Nilai ini mengalami peningkatan nilai surat hutang/*promissory notes* akibat perubahan kurs.

Beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Beban penyesuaian nilai persediaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan sebesar Rp4.986.150.758.902 adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas, termasuk penyesuaian akibat selisih kursnya.

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Rp0

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat transaksi pada Pos Luar Biasa di Tahun 2020.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp0

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2020.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Rp0

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2020.

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Beban LO yang Berkaitan dengan Penanganan Covid-19 dan PEN

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa termasuk realokasi APBN 2020. Penajaman program-program penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Sampai dengan Tahun 2020, beban atas penanganan Covid-19 dan PEN dapat dirinci sebagai berikut.

NO	AKUN	URAIAN	RUPIAH	SEBARAN BA
1	521131	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	2.438.273.727.061	81 BA
2	521241	Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.212.742.389.592	80 BA
3	521731	Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	764.200.000	BA BUN
4	522192	Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.034.561.514.854	83 BA
5	525162	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	417.557.124.364	18 BA
6	525154	Beban Jasa BLU-Penangan Pandemi Covid-19	175.860.651.934	16 BA
7	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19	242.049.278.113	55 BA
8	525155	Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	44.102.948.816	9 BA
9	524115	Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	1.049.336.105.397	71 BA

10	525156	Beban Perjalanan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	34.942.970.974	15 BA
11	526131	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	7.820.290.000	4 BA
12	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	58.604.270.085.952	13 BA
13	526323	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Jasa Penanganan Covid-19	4.226.303.530.380	2 BA
14	554111	Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	12.267.506.577.246	BA BUN
15	554112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	BA BUN
16	554113	Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	BA BUN
17	554114	Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	4.984.218.342.076	BA BUN
18	554117	Belanja Subsidi Bunga/Subsidi *Margin* Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	7.695.512.627.586	BA BUN
19	554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	BA BUN
20	554121	Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.292.861	BA BUN
21	563131	Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	2.264.647.247.182	BA BUN
22	572114	Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	28.900.000	Kemenag
23	574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	36.320.608.388.361	Kemensos
24	575114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	73.767.150.417.671	Kemensos
25	576114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.669.812.356.671	BNPB, Kemdikbud
26	576116	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.107.048.827.535	BNPB
27	581521	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi Covid-19	4.403.239.252.500	BA BUN
28	581522	Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	12.811.795.218.059	BA BUN
29	581523	Beban Lain-Lain Pembayaran Dana Bantuan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi	1.706.863.101.252	BA BUN
JUMLAH			264.207.527.341.456	

Realokasi anggaran terdapat di BA BUN dan Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN seperti Kementerian Kesehatan, BNPB dan Kementerian Sosial. Kementerian Kesehatan telah mengusulkan tambahan anggaran belanja melalui stimulus belanja negara yang sebagian sudah disetujui dan diterbitkan dalam Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA 999.08) dengan mempertimbangkan perkembangan kejadian kasus di lapangan. SP SABA tersebut diperuntukkan kegiatan insentif nakes dan santuan kematian nakes Covid-19 di tingkat Pusat. Kementerian Kesehatan juga masih berproses merevisi DIPA nya pada Semester II Tahun 2020 untuk *refocusing* pada penanganan Pandemi Covid-19. Selain itu, pada BNPB terdapat Dana Siap Pakai (DSP) yang seluruhnya digunakan dalam rangka penanganan darurat bencana di seluruh Indonesia. Bantuan DSP Tahun 2020 terbesar adalah untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pemanfaatan DSP untuk penanganan Covid-19 telah disalurkan pada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat kesehatan RS Rujukan Covid-19, Pencegahan dan pengendalian Covid-19 Tahun 2020, Operasional pelayanan kesehatan di Pulau Sebaru dan klaim 13.000 pasien, dan pembelian APD. Selain itu DSP juga telah disalurkan pada BNPB, Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur, Mabes TNI, Lembaga Biologi Eijkman, dan Universitas Airlangga. Pada Kementerian Sosial terdapat Beban Bantuan Sosial, di mana pada Triwulan III tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yang dipengaruhi oleh penanganan dampak Pandemi Covid-19 baik yang melekat pada Beban

Bantuan Sosial yang telah ada sebelumnya maupun Beban Bantuan Sosial dengan akun khusus Covid-19.

Beberapa beban terkait penanganan Covid-19 dan PEN juga terdapat pada BA BUN dengan menggunakan akun normal karena berkaitan dengan program yang selama ini telah berjalan. Dalam penyaluran DAU bulan Mei s.d. September 2020 terdapat persyaratan tambahan berupa laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19; dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Sementara itu, untuk insentif tenaga kesehatan di tingkat daerah, telah disiapkan anggaran yang akan disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (BOK tambahan). Sejalan dengan itu, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan penanganan Covid-19 dan/ atau untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19; Dana Keistimewaan Yogyakarta juga dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Selain itu, penyesuaian alokasi DID untuk masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan secara proporsional untuk seluruh kelompok kategori DID, kecuali kelompok kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan. Dalam Beban Subsidi, terdapat kelompok akun khusus Covid-19 antara lain berupa Beban Subsidi Listrik, Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, Beban Subsidi Bunga KPR dan Beban Subsidi Bunga KUR.

2. Porsi Pemerintah dan BI dan penyesuaian akrual TA 2020 dalam skema burden sharing serta perbedaan nilai penyesuaian akrual kontribusi BI yang disajikan di LKPP TA 2020 dan LKTBI Tahun 2020

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema Burden Sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	10/Nov/20	779.950.000.000	-	779.950.000.000
2	30/Nov/20	163.024.980.000	-	163.024.980.000
3	28/Dec/20	810.240.000.000	-	810.240.000.000
4	Penyesuaian Akrual	1.456.927.480.000	-	1.456.927.480.000
SUBTOTAL PG		3.210.142.460.000	-	3.210.142.460.000
B. Non Public Goods				
1	15/Dec/20	941.773.886.995	832.657.444.604	1.774.431.331.599
2	Penyesuaian Akrual	255.535.887.600	212.171.279.523	467.707.167.123
SUBTOTAL NPG		1.197.309.774.595	1.044.828.724.127	2.242.138.498.722
TOTAL PG DAN NPG		4.407.452.234.595	1.044.828.724.127	5.452.280.958.722

Penyesuaian Akrual Kontribusi Bank Indonesia yang disajikan LKBUN Tahun 2020 sebagaimana tabel di atas, berbeda dengan yang disajikan oleh Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kontribusi BI yang tersaji pada LKBUN	Kontribusi BI yang tersaji pada LKTBI	Selisih
1	Penyesuaian Akrual PG	1.456.927.480.000	1.455.772.056.575	1.155.423.425
2	Penyesuaian Akrual NPG	255.535.887.600	255.536.113.005	(225.405)

Selisih Penyesuaian Akrual PG disebabkan karena pada LKBUN Tahun 2020 menghitung berdasarkan pola perhitungan untuk pembayaran bunga yang sama dengan sistem BI-SSSS (Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System*) sedangkan BI pada LKTBI menghitung menggunakan pola perhitungan pada FOMOBO (*Front Office Midle Office Back Office*) Bank Indonesia. Selisih Penyesuaian NPG disebabkan adanya pembulatan pada LKTBI Tahun 2020 dimana angka pada LKTBI Tahun 2020 dalam satuan jutaan Rupiah.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 sebesar Rp235,47 triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp235.477.658.828.423, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2019. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2019 sebesar Rp240.152.602.171.525, Saldo Awal Kas TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.674.943.343.102.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Kas Transitoris	-	-
Kas *Escrow*	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Kas pada BLU yang telah disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
Saldo Awal Kas	**235.477.658.828.423**	**240.152.602.171.525**

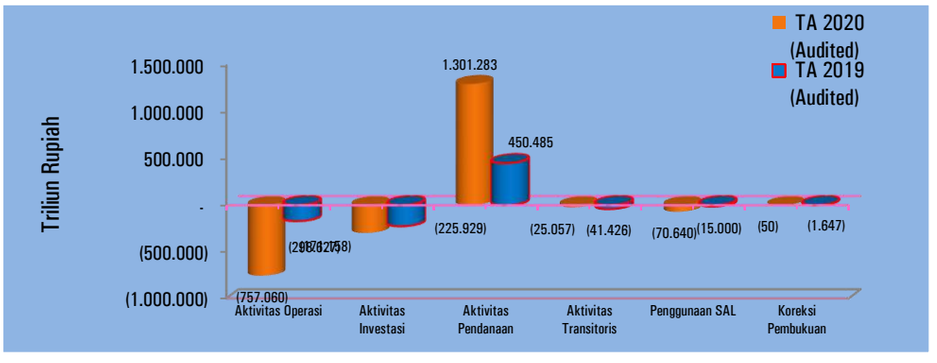
F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut.

Kenaikan (Penurunan) Kas sebesar Rp149,84 triliun

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(757.060.086.481.976)	(171.158.277.117.462)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(298.626.891.678.470)	(225.929.135.037.521)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.301.283.054.425.414	450.485.196.418.840
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(25.057.121.769.181)	(41.425.640.178.382)
Penggunaan SAL *)	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan**)	(50.149.808.575)	(1.647.087.428.577)
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	**149.848.804.687.212**	**(4.674.943.343.102)**

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2020 disajikan dalam Grafik 33.



Grafik 33. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2020

*) Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

**) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp50.149.808.575, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SiLPA	447.536.410.409
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(227.575.834.013)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(270.110.384.971)
Total Koreksi Pembukuan		**(50.149.808.575)**

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp447.536.410.409 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp165.007.135.154 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp612.543.545.563. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai minus Rp158.272.894.029 dan transaksi pengembalian pendapatan hibah senilai minus Rp6.734.241.125.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar minus Rp227.575.834.013 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp270.110.384.971, terdiri dari:
   a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp50.865.145.620 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN BANDA ACEH (001)	8.490.697.140
2	KPPN JAKARTA II (019)	1.054.958.530.721
3	KPPN BANDUNG I (022)	1
4	KPPN BOGOR (023)	1.072.289.448
5	KPPN YOGYAKARTA (030)	(2.711.792.764)
6	KPPN MALANG (032)	(70.432.626.825)
7	KPPN KUPANG (039)	(230.821.103)
8	KPPN TERNATE (062)	9.670.295.858
9	KPPN JAYAPURA (063)	5.688.598.709
10	KPPN MEDAN II (123)	(74.332.677.600)
11	KPPN SURABAYA II (135)	(442.605.538)
12	KPPN BLITAR (150)	68.526.668.873
13	KPPN JAKARTA VII (182)	(1.051.121.702.540)
		(50.865.145.620)

b. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp7.551.767.998 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN SURABAYA I (031)	(87.929.778)
2	KPPN BANJARMASIN (045)	(99.682.020)
3	KPPN MANADO (049)	(35.792.338)
4	KPPN MANOKWARI (065)	(984.572.000)
5	KPPN JAKARTA III (088)	(4.064.724.267)
6	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	(288.353.396)
7	KPPN CURUP (146)	(27.500.000)
8	KPPN JAKARTA VI (175)	(1.963.214.199)
		(7.551.767.998)

c. Koreksi Kas di BUN merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian *(refund)* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp211.693.471.353.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp256.923.467.961.654 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp256,92 triliun

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Saldo Akhir Kas[1])	**385.326.463.515.635**	**235.477.658.828.423**
Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan	124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan [2])	3.819.744.936.794	3.956.502.008.861
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(14.247.797.371.759)	(10.817.836.834.384)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan [3])	-	(3.932.640)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) [4])	(118.830.237.152.177)	(20.053.770.625.020)
Kas Transito (Kiriman Uang)	-	52.495.330
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**256.923.467.961.654**	**208.962.960.718.114**

[1]) Saldo Akhir Kas sebesar Rp385.326.463.515.635 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode TA 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Rekening Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening DDP)	118.830.237.152.177	20.053.770.625.020
Jumlah	**385.326.463.515.635**	**235.477.658.828.423**

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2020 sebesar Rp57.688.418.512.516 termasuk Kas yang telah didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU) sebesar Rp14.247.797.371.759 oleh Satker BLU.

[2]) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.819.744.936.794 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp7.682.561.400.884 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp3.862.816.464.090.

[3]) Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Total Kas pada BLU menurut K/L	43.440.621.140.757	45.736.358.514.505
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	14.247.797.371.759	10.817.836.834.384
	57.688.418.512.516	56.554.195.348.889
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Kas pada BLU yang belum disahkan	-	**(3.932.640)**

[4]) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) sebesar minus Rp118.830.237.152.177 merupakan kumpulan Saldo Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya yang rekeningnya dikelola oleh UAPBUN-AP dan disajikan dalam komponen Aset Lainnya pada Neraca LKPP (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat TA 2020 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp757,06 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2020. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp757.060.086.481.976 dan minus Rp171.158.277.117.462, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.647.501.178.312.215	1.960.287.552.753.207
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.404.561.264.794.191	2.131.445.829.870.669
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**(757.060.086.481.976)**	**(171.158.277.117.462)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp585.901.809.364.514 atau 342,32 persen dari TA 2019.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2020 sebesar minus Rp757.060.086.481.976 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat penurunan arus kas masuk pada TA 2020 jika dibandingkan dengan TA 2019 disebabkan penurunan realisasi penerimaan negara. Namun demikian, arus kas keluar lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja

pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah terjadi terutama pada peningkatan belanja pemerintah dalam bentuk belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mempertahankan perekonomian dan menanggulangi pandemi Covid-19.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2020 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.285.136.317.135.799 dan Rp1.546.141.893.392.193, dengan rincian sebagai berikut.

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285,13 triliun

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
Pendapatan BPHTB	-	-
Pendapatan Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
Pendapatan Pajak Lainnya	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**1.248.415.111.170.305**	**1.505.088.202.287.697**
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**36.721.205.965.494**	**41.053.691.104.496**
Penerimaan Perpajakan	**1.285.136.317.135.799**	**1.546.141.893.392.193**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp261.005.576.256.394 atau 16,88 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp594.033.333.770.490 dan Rp772.265.718.286.668, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp594,03 triliun

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	11.332.221.314.991	24.493.086.993.337
Pendapatan PPh Gas Bumi	21.689.144.755.946	34.654.705.206.760
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.370.055.232	2.522.619.831
Jumlah Pendapatan PPh Migas	**33.026.736.126.169**	**59.150.314.819.928**
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	139.351.267.744.195	148.503.893.801.199
Pendapatan PPh Pasal 22	16.849.783.981.344	21.308.577.041.891
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	27.117.480.784.100	53.704.105.315.897
Pendapatan PPh Pasal 23	40.013.897.522.066	42.582.956.281.130
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.563.111.563.072	11.200.108.698.779

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	155.076.444.520.586	252.167.838.904.327
Pendapatan PPh Pasal 26	43.602.468.786.460	46.138.482.953.287
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	112.164.589.833.830	126.223.171.183.087
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	15.156.290.554.678	11.153.510.635.628
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	111.262.353.990	132.758.651.515
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	**561.006.597.644.321**	**713.115.403.466.740**
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	**594.033.333.770.490**	**772.265.718.286.668**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp178.232.384.516.178 atau 23,08 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan PPN sebesar Rp450,32 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp450.328.063.257.688 dan Rp531.577.293.855.031, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	298.670.175.293.033	344.440.292.858.365
Pendapatan PPN Impor	140.453.213.447.920	171.368.962.616.010
Pendapatan PPN Lainnya	713.064.561.571	162.381.392.806
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5.554.000.093.959	10.847.390.983.819
Pendapatan PPnBM Impor	3.000.581.915.947	4.725.154.762.635
Pendapatan PPnBM Lainnya	809.312.322	33.111.241.396
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	1.936.218.632.936	-
Jumlah Pendapatan PPN dan PPnBM	**450.328.063.257.688**	**531.577.293.855.031**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp81.249.230.597.343 atau 15,28 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp20.953.610.013.766 dan Rp21.145.900.040.486, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan PBB sebesar Rp20,95 triliun

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.627.109.411.467	2.486.750.566.151
Pendapatan PBB Kehutanan	653.561.272.344	487.201.065.051
Pendapatan PBB Pertambangan	3.004.587.635.379	3.477.736.065.334
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.081.875.255.844	14.250.961.673.713
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	408.132.427.296	368.435.097.874
Pendapatan PBB Lainnya	178.344.011.436	74.815.572.363
Jumlah Pendapatan PBB	**20.953.610.013.766**	**21.145.900.040.486**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp192.290.026.720 atau 0,91 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pendapatan BPHTB sebesar Rp0

Pada TA 2020 dan TA 2019 tidak terdapat Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB).

Pendapatan Cukai sebesar Rp176,30 triliun

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp176.309.313.789.576 dan Rp172.421.940.270.562, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	170.239.842.643.814	164.872.445.405.658
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	241.784.163.000	122.528.191.000
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.759.288.405.930	7.338.510.818.070
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	56.239.915.199	73.182.280.071
Pendapatan Cukai Lainnya	12.158.661.633	15.273.575.763
Jumlah Pendapatan Cukai	**176.309.313.789.576**	**172.421.940.270.562**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp3.887.373.519.014 atau 2,25 persen dari TA 2019.

Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp6,79 triliun

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp6.790.790.338.785 dan Rp7.677.349.834.950, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Lainnya		
Pendapatan Bea Meterai	1.446.535.466.431	1.480.577.017.178
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.638.052.138.011	4.117.446.934.631
Pendapatan PPn Batubara	485.164.790.391	538.680.322.182
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	10.832.559.640	75.490.463.210
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**5.580.584.954.473**	**6.212.194.737.201**
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.179.768.900.131	655.039.379.502
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	30.360.250.777	589.923.712.311
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.863.959	220.033.197.452
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	74.369.445	158.808.484
Jumlah Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	**1.210.205.384.312**	**1.465.155.097.749**
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**6.790.790.338.785**	**7.677.349.834.950**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp886.559.496.165 atau 11,55 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp36,72 triliun

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp36.721.205.965.494 dan Rp41.053.691.104.496, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	29.750.557.857.631	34.824.420.858.209
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	-
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	567.207.949.682	682.054.914.763
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	502.288.602.777	589.890.171.268
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	-
Perdapatan BM – DTP	233.478.860.370	354.326.302.000

Pendapatan Pabean Lainnya	(8.782.796.689)	29.077.858.500
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	183.028.721.000	308.468.786.790
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	22.101.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.215.719.773.794	738.720.319.589
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	**32.443.498.968.565**	**37.526.981.312.119**
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	4.264.317.752.839	3.526.335.855.946
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	891.590.569	373.535.431
Pendapatan Bunga Bea Keluar	12.497.653.521	401.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	**4.277.706.996.929**	**3.526.709.792.377**
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**36.721.205.965.494**	**41.053.691.104.496**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp4.332.485.139.002 atau 10,55 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP sebesar Rp343,53 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp343.532.045.955.792 dan Rp408.648.315.368.093, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Sumber Daya Alam	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790
Pendapatan PNBP Lainnya	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366
Jumlah PNBP	**343.532.045.955.792**	**408.648.315.368.093**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp65.116.269.412.301 atau 15,93 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan SDA sebesar Rp97,22 triliun

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp97.225.067.272.619 dan Rp154.895.286.766.287, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	44.868.847.085.493	83.622.340.876.020
Pendapatan Gas Bumi	24.211.325.322.339	37.467.520.404.392
Pendapatan Pertambangan Umum	21.178.987.879.156	26.343.691.801.600
Pendapatan Kehutanan	4.403.263.272.502	5.007.257.006.149
Pendapatan Perikanan	600.662.766.688	521.936.215.435
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.961.980.946.441	1.932.540.462.691
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	**97.225.067.272.619**	**154.895.286.766.287**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp57.670.219.493.668 atau 37,23 persen dari TA 2019.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp66,08 triliun

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp66.080.543.541.337 dan Rp80.726.119.206.790, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	43.888.106.053.599	49.773.695.752.482
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	710.827.000.000	860.515.629.605
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Jumlah Pendapatan KND	**66.080.543.541.337**	**80.726.119.206.790**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp14.645.575.665.453 atau 18,14 persen dari TA 2019.

Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp110,91 triliun

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp110.918.107.259.637 dan Rp124.157.596.399.650, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	110.135.193	795.220.944
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	16.883.143.705.279	32.083.100.353.355
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	13.646.524.410.853	18.366.375.054.747
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	5.396.987.712.963	6.728.386.646.421
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.788.763.353.158	5.229.029.641.870
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	28.185.586.049.245	25.903.218.006.612
Pendapatan Jasa Lainnya	304.133.236.159	429.902.216.890
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	22.980.902.226.353	19.333.882.339.344
Pendapatan Denda	503.790.164.112	614.389.891.175
Pendapatan Lain-lain	18.228.166.266.322	15.468.517.028.292
Jumlah PNBP Lainnya	**110.918.107.259.637**	**124.157.596.399.650**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp13.239.489.140.013 atau 10,66 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU sebesar Rp69,30 triliun

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp69.308.327.882.199 dan Rp48.869.312.995.366, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.460.957.814.443	40.698.144.354.523
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	123.568.742.424	154.843.013.918
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	587.981.383.580	855.074.995.219
Pendapatan Dari Alokasi APBN	1.370.313.178.626	328.485.663.104
Pendapatan BLU Lainnya	5.765.506.763.126	6.832.764.968.602
Jumlah Pendapatan BLU	**69.308.327.882.199**	**48.869.312.995.366**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp20.439.014.886.833 atau 41,82 persen dari TA 2019.

Pendapatan Hibah sebesar Rp18,83 triliun

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha, dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp18.832.815.220.624 dan Rp5.497.343.992.921, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Bentuk Uang – Perorangan	106.054.090.800	65.693.597.291
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	136.446.170.086	292.430.943.086
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	16.677.597.815.474	3.312.864.612.302
Bentuk Uang – Lainnya	77.918.548.282	2.089.180.000
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**16.998.016.624.642**	**3.673.078.332.679**
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Terencana Bilateral	152.509.083.261	284.221.022.174
Terencana Multilateral	381.371.801.314	305.016.747.985
Terencana Lainnya	-	2.434.194.125
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Langsung Bentuk Uang Perorangan	421.800.000	-
Langsung Bentuk Uang Bilateral	490.258.603.112	686.083.404.317
Langsung Bentuk Uang Multilateral	671.422.064.921	514.852.423.425
Langsung Bentuk Uang Lainnya	138.815.243.374	31.657.868.216
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	**1.834.798.595.982**	**1.824.265.660.242**
Jumlah Pendapatan Hibah	**18.832.815.220.624**	**5.497.343.992.921**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp13.335.471.227.703 atau 242,58 persen dari TA 2019.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp380,53 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp380.532.228.590.618 dan Rp376.074.259.852.619, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.671.631.840.396	85.321.262.531.959
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	62.034.543.646.479	61.403.644.284.678
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	932.231.171.338	1.011.570.524.956
Belanja Gaji Dokter PTT	2.160.810.114	66.695.423.253
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.014.581.489.535	15.785.948.877.732
Belanja Honorarium	1.672.163.315.177	1.876.741.556.492
Belanja Lembur	738.864.388.804	723.295.487.788
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	75.902.029.595.284	83.006.573.420.266
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	125.525.829.327.121	119.482.270.828.040
Belanja Asuransi Kesehatan	10.038.193.006.370	7.396.256.917.455
Total Belanja Pegawai	**380.532.228.590.618**	**376.074.259.852.619**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp4.457.968.737.999 atau 1,19 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp422,33 triliun

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp422.338.225.598.487 dan Rp334.418.207.630.784, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Barang	154.711.094.977.522	131.972.860.461.463
Belanja Jasa	31.719.971.475.536	32.584.478.436.045
Belanja Pemeliharaan	38.090.179.431.346	36.134.531.242.498
Belanja Perjalanan	23.834.433.535.430	44.705.074.918.849
Belanja Badan Layanan Umum	63.616.794.783.911	41.238.015.097.725
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	110.365.751.394.742	47.783.247.474.204
Jumlah Belanja Barang	**422.338.225.598.487**	**334.418.207.630.784**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp87.920.017.967.703 atau 26,29 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp314,08 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp314.088.112.296.556 dan Rp275.521.165.410.219. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp38.566.946.886.337 atau 14,00 persen dari TA 2019.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp297.154.737.528.797 dan Rp16.933.374.767.759, dengan rincian sebagai berikut.

a. **Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri**
   Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp297.154.737.528.797 dan Rp254.075.967.998.852, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	590.719.783.504	562.706.663.882
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	228.629.948.417.773	200.915.665.461.632
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	50.592.442.385.279	40.902.078.447.238
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara	9.413.603.000.868	7.923.133.935.500
Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*	-	383.890.000.000
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara	7.928.023.941.373	3.388.493.490.600
Jumlah Belanja Pembayaran Bunga atas Utang DN	**297.154.737.528.797**	**254.075.967.998.852**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp43.078.769.529.945 atau 16,96 persen dari TA 2019.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp16.933.374.767.759 dan Rp21.445.197.411.367, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Bunga Pinjaman Program	8.624.802.890.283	11.653.996.532.055
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	8.308.162.491.044	9.790.711.282.574
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	409.386.432	489.596.738
Jumlah Pembayaran Bunga atas Utang LN	**16.933.374.767.759**	**21.445.197.411.367**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp4.511.822.643.608 atau 21,04 persen dari TA 2019.

Belanja Subsidi sebesar Rp196,23 triliun

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp196.231.455.278.876 dan Rp201.802.566.846.111, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM	47.737.013.915.933	84.209.349.146.017
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM	93.659.530.043.258	98.482.626.361.250
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO	4.746.898.208.197	4.143.114.912.890
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**146.143.442.167.388**	**186.835.090.420.157**
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	16.691.129.783.687	14.967.476.425.954
Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	-	-
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	**16.691.129.783.687**	**14.967.476.425.954**
Belanja Subsidi - Darurat Bencana		
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	33.396.883.327.801	-
Jumlah Belanja Subsidi - Darurat Bencana	**33.396.883.327.801**	-
Jumlah Belanja Subsidi	**196.231.455.278.876**	**201.802.566.846.111**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Subsidi sebesar Rp5.571.111.567.235 atau 2,76 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah sebesar Rp6,27 triliun

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp6.275.907.926.228 dan Rp6.476.205.662.045, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	6.246.365.438.842	6.241.521.667.087
Belanja Hibah Lainnya	130.909.594	409.607.672
Jumlah Belanja Hibah	**6.275.907.926.228**	**6.476.205.662.045**

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp200.297.735.817 atau 3,09 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp202,52 triliun

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp202.529.969.428.206 dan Rp112.480.254.777.629, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	231.593.203.136	397.798.295.384
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	64.530.742.396.461	47.129.306.212.971
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	4.903.114.838.186	2.827.675.472.473
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	38.810.923.377.200	34.703.408.078.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	75.631.317.802.066	19.789.409.255.595
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	18.422.277.811.157	7.632.657.463.206
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**202.529.969.428.206**	**112.480.254.777.629**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp90.049.714.650.577 atau 80,06 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp120,03 triliun

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp120.035.189.519.041 dan Rp11.699.746.548.649, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.083.584.096.722	8.028.004.141.391
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	53.116.712.664	567.760.624.610
Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian	-	-
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	-	-
Belanja Lain-lain BUN	91.732.086.624.853	749.878.030.942
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	24.058.522.796.424	-
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	66	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.107.879.288.312	2.354.103.751.706
Jumlah Belanja Lain-lain	**120.035.189.519.041**	**11.699.746.548.649**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Lain-lain sebesar Rp108.335.442.970.392 atau 925,96 persen dari TA 2019.

Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp44,28 triliun

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp44.283.738.827.545 dan Rp39.158.751.141.991, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	31.159.010.681.964	22.073.087.555.530
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.124.728.145.581	17.085.663.586.461
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**44.283.738.827.545**	**39.158.751.141.991**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp5.124.987.685.554 atau 13,09 persen dari TA 2019.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp46,49 triliun

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp46.498.603.739.756 dan Rp61.684.868.346.770, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	10.034.450.778.887	15.219.315.833.056
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	10.637.937.161.265	16.739.397.376.741
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	22.795.930.108.197	25.884.279.134.431
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	1.333.181.001.349	1.372.588.054.173
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.296.813.708.379	2.119.085.885.757
Dana Bagi Hasil Perikanan	400.290.981.679	350.202.062.612
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**46.498.603.739.756**	**61.684.868.346.770**

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp15.186.264.607.014 atau 24,62 persen dari TA 2019.

Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp3,12 triliun

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp3.124.018.679.699 dan Rp3.136.352.925.658. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp12.334.245.959 atau 0,39 persen dari TA 2019.

Dana Alokasi Umum sebesar Rp381,61 triliun

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 dan Rp420.910.238.556.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Umum sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dari TA 2019.

Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp50,17 triliun

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp50.175.976.373.103 dan Rp64.165.654.543.270. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dari TA 2019.

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah sebesar Rp39,33 triliun

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp39.332.012.902.000 dan Rp31.874.390.797.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audit ed*)	TA 2019 (*Audit ed*)
Dana Otonomi Khusus Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Dana Otonomi Khusus Papua	7.999.969.920.000	8.674.676.695.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.001.479.428.000	3.947.794.959.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.200.000.000.000
Dana Insentif Daerah	18.455.285.206.000	9.694.447.489.000
Jumlah	**39.332.012.902.000**	**31.874.390.797.000**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp7.457.622.105.000 atau 23,40 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp126,40 triliun

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp126.402.855.554.669 dan Rp122.229.018.352.925, dengan rincian sebagai berikut.

[illegible]	[illegible] 2020 (*Audited*)	[illegible] 2019 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	52.178.079.254.000	53.979.069.017.265
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.164.000	463.968.756.915
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293	49.200.273.626.885
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	15.704.774.423.376	12.052.644.554.156
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisataan	1.294.266.820.000	1.318.013.311.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.308.731.600.000	5.215.049.086.704
[illegible]	126.402.855.554.669	122.229.018.352.925

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp4.173.837.201.744 atau 3,41 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp71,10 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp71.100.518.583.856 dan Rp69.814.148.478.999. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp1.286.370.104.857 atau 1,84 persen dari TA 2019.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp298,62 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp298.626.891.678.470 dan minus Rp225.929.135.037.521, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	22.551.446.110.746	2.677.421.193.017
Dikurangi Arus Kas Keluar	321.178.337.789.216	228.606.556.230.538
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(298.626.891.678.470)**	**(225.929.135.037.521)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp72.697.756.640.949 atau 32,18 persen dari TA 2019. Penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagian diakibatkan oleh peningkatan belanja modal pemerintah khususnya untuk belanja modal peralatan dan mesin dan peningkatan investasi pemerintah terutama dalam rangka mendukung proyek strategis nasional serta dukungan kepada

Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

F.2.2.1 Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp282,16 miliar

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp282.163.876.771 dan Rp346.030.832.782, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	281.310.250.571	341.531.328.482
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	853.626.200	4.499.504.300
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	282.163.876.771	346.030.832.782

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp63.866.956.011 atau 18,46 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp299,52 miliar

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp299.524.709.410 dan Rp179.982.155.162, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	259.445.722.509	169.188.403.022
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	40.078.986.901	10.793.752.140
Jumlah Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	299.524.709.410	179.982.155.162

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp119.542.554.248 atau 66,42 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp2,01 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp2.014.582.699.001 dan Rp1.376.096.205.074. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp638.486.493.927 atau 46,40 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp19,95 triliun

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah, Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah dan Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp19.955.174.825.564 dan Rp775.311.999.999, yang merupakan penerimaan yang berasal dari Manajemen Aset Negara.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp19.179.862.825.565 atau 2.473,83 persen dari TA 2019.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1 Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp190,91 triliun

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp190.919.832.381.884 dan Rp177.841.479.636.714, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	23.537.354.331.766	4.195.231.872.492
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.102.627.430.616	60.175.192.195.620
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.349.710.208.626	27.559.666.510.439
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	52.450.183.388.085	74.559.542.865.905
Belanja Modal Fisik Lainnya	6.054.072.120.731	6.497.371.766.901
Belanja Modal BLU	4.425.884.902.060	4.854.474.425.357
Jumlah Belanja Modal	**190.919.832.381.884**	**177.841.479.636.714**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Modal sebesar Rp13.078.352.745.170 atau 7,35 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10,00 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp10.000.000.000.000 dan Rp5.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000 atau 100,00 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp13,30 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp13.306.582.699.000 dan Rp8.200.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp5.106.582.699.000 atau 62,28 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara sebesar Rp64,28 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN Lainnya. Penyertaan Modal Negara TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp64.288.017.000.000 dan Rp23.565.076.593.824, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	31.288.017.000.000	17.800.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	-	2.275.076.593.824
Penyertaan Modal Negara Lainnya	33.000.000.000.000	3.490.000.000.000
Jumlah PMN	**64.288.017.000.000**	**23.565.076.593.824**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp40.722.940.406.176 atau 172,81 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp42,66 triliun

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp42.663.905.708.332 dan Rp14.000.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Investasi Pemerintah	660.695.141.097	2.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	19.650.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	-	12.000.000.000.000
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	18.762.627.567.235	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	590.583.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.000.000.000	-
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	**42.663.905.708.332**	**14.000.000.000.000**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp28.663.905.708.332 atau 204,74 persen dari TA 2019

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp757.060.086.481.976 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp298.626.891.678.470 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp1.055.686.978.160.446. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.301,28 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.301.283.054.425.414 dan Rp450.485.196.418.840, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.761.418.470.813.740	1.018.597.889.862.368
Dikurangi Arus Kas Keluar	460.135.416.388.326	568.112.693.443.528
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	**1.301.283.054.425.414**	**450.485.196.418.840**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp850.797.858.006.574 atau 188,86 persen dari TA 2019. Peningkatan pada Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan terutama akibat upaya pemerintah dalam melakukan penerimaan pembiayaan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan penerimaan dimaksud dilakukan dalam rangka menutupi defisit APBN TA 2020 dan percepatan target pembangunan serta pemulihan ekonomi nasional,

penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program PEN, serta mendukung pertumbuhan UMKM dan dunia usaha.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp1.615,65 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.615.659.685.880.024 dan Rp940.725.025.633.239, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	70.640.000.000.000	15.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	-
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	1.382.099.584.258.674	772.906.022.331.714
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	159.152.720.000.000	148.576.772.200.000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	3.767.381.621.350	4.242.231.101.525
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	**1.615.659.685.880.024**	**940.725.025.633.239**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp674.934.660.246.785 atau 71,75 persen dari TA 2019.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp70.640.000.000.000 dan Rp15.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan sebesar Rp55.640.000.000.000 atau 370,93 persen dari TA 2019.

Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2020 sebesar Rp70.640.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN tahun 2020 yang seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilakukan penarikan dari Rekening SAL sampai dengan 31 Desember 2020. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan pada TA 2020 dan TA 2019.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.382.099.584.258.674 dan Rp772.906.022.331.714, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	57.410.000.000.000	89.340.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	988.838.806.806.018	451.908.593.101.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	291.538.007.190.656	165.862.683.778.114
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	26.150.000.000.000	37.360.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	18.162.770.262.000	28.434.745.452.600
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	**1.382.099.584.258.674**	**772.906.022.331.714**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri sebesar Rp609.193.561.926.960 atau 78,82 persen dari TA 2019.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp159.152.720.000.000 dan Rp148.576.772.200.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan Obligasi Negara Valuta Asing	123.490.220.000.000	119.059.172.200.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing - Jangka Panjang	35.662.500.000.000	29.517.600.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	**159.152.720.000.000**	**148.576.772.200.000**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp10.575.947.800.000 atau 7,12 persen dari TA 2019.

e. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp3.767.381.621.350 dan Rp4.242.231.101.525. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp474.849.480.175 atau 11,19 persen dari TA 2019.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp141,11 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp141.112.305.195.604 dan Rp74.210.001.746.454, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Tunai	102.259.679.376.875	36.717.630.284.048
Penarikan Pinjaman Kegiatan	38.852.625.818.729	37.492.371.462.406
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**141.112.305.195.604**	**74.210.001.746.454**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp66.902.303.449.150 atau 90,15 persen dari TA 2019.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp4,64 triliun

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp4.646.479.738.112 dan Rp3.662.862.482.675, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	316.513.485.875	336.041.308.615
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	4.329.966.252.237	3.326.821.174.060
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	**4.646.479.738.112**	**3.662.862.482.675**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp983.617.255.437 atau 26,85 persen dari TA 2019.

Penerimaan Pembiayaan Lain sebesar Rp0

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2020 dan TA 2019.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp365,50 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp365.504.237.359.459 dan Rp476.403.454.377.526, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	-
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara - Rupiah	317.304.724.605.881	412.729.586.110.100
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	46.795.251.750.000	62.464.607.300.000
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.404.261.003.578	1.209.260.967.426
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	**365.504.237.359.459**	**476.403.454.377.526**

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp110.899.217.018.067 atau 23,28 persen dari TA 2019.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp90,99 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp90.999.290.652.394 dan Rp85.992.757.963.622, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	36.364.451.431.115	31.317.372.208.106
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	54.634.839.221.279	54.675.385.755.516
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	**90.999.290.652.394**	**85.992.757.963.622**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp5.006.532.688.772 atau 5,82 persen dari TA 2019.

F.2.3.2.3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement sebesar Rp3,63 triliun

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp3.631.888.376.473 dan Rp5.716.481.102.380. Dengan demikian, terdapat penurunan Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* sebesar Rp2.084.592.725.907 atau 36,47 persen dari TA 2019.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp245,59 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.301.283.054.425.414 dan defisit anggaran sebesar Rp1.055.686.978.160.446, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp245.596.076.264.968.

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp25,05 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp25.057.121.769.181 dan minus Rp41.425.640.178.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
Transito (Neto)	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	52.495.332	(52.495.332)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	**(25.057.121.769.181)**	**(41.425.640.178.382)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp16.368.518.409.201 atau 39,51 persen dari TA 2019.

F.2.4.1 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar minus Rp1,67 triliun

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp1.675.465.318.005 dan Rp1.716.415.098.932, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	24.618.345.533.285	25.515.614.381.003
Penerimaan PFK Beras BULOG	279.696.218.459	280.466.003.968
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	8.418.242.210.391	4.581.202.139.229
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	2.975.598.117	1.259.915.539
Penerimaan PFK Lain-lain	252.028.385.257	679.884.687.668
Jumlah Penerimaan PFK	**33.571.287.945.509**	**31.058.427.127.407**
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	16.992.959.549.171	16.441.954.391.147
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	25.000.000.000	52.559.070.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	113.566.813	129.104.986
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	744.679.310.501	1.122.009.541.801
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	-	3.467.016.222.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	71.100.556.962.856	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**88.863.309.389.341**	**21.083.668.329.934**
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji	(21.727.375.893.278)	(23.172.051.236.852)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.863.241.998.108)	(1.764.977.656.829)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(279.719.345.401)	(280.491.880.002)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	(8.480.524.625.406)	(5.017.916.032.378)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	(13.312.520)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji	(3.002.134.286)	(2.120.354.344)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(901.208.015.176)	(307.548.821.039)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(33.255.072.011.655)**	**(30.545.119.293.964)**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(18.984.436.758.832)	(15.238.976.230.644)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(25.000.000.000)	(52.559.070.000)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	(317.609.011)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(744.679.310.501)	(1.122.009.541.801)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	-	(3.467.016.222.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	(71.100.556.962.856)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**(90.854.990.641.200)**	**(19.880.561.064.445)**
Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	**(1.675.465.318.005)**	**1.716.415.098.932**

Dengan demikian, terdapat penurunan Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) sebesar Rp3.391.880.416.937 atau 197,61 persen dari TA 2019.

F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito (Neto) sebesar Rp31,63 triliun

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu. Transito (Neto) juga berasal dari

transaksi penerimaan *Escrow*. Transito (Neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp31.636.865.658.712 dan Rp2.817.768.874.869, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	14.870.819.147.387	11.291.293.101.338
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	80.562.439.904	8.971.178.672.357
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	328.513.851	152.554.329
Penerimaan atas transaksi pemindahan kas antar BLU	1.116.422.586.551	-
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	49.123.735.148.036	23.480.128.286.930
Penerimaan *Escrow*	47.698.088.789.481	8.737.496.913.592
Jumlah Penerimaan Transito	**112.889.956.625.210**	**52.480.249.528.546**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(15.340.689.945.358)	(11.309.426.786.254)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	(80.562.439.904)	(8.971.178.672.357)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(328.513.851)	(152.554.329)
Pengeluaran atas transaksi pemindahan kas antar BLU	(1.116.422.586.551)	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(49.126.004.386.184)	(23.429.998.627.129)
Pengeluaran *Escrow*	(15.589.083.094.650)	(5.951.724.013.608)
Jumlah Pengeluaran Transito	**(81.253.090.966.498)**	**(49.662.480.653.677)**
Jumlah Transito (Neto)	**31.636.865.658.712**	**2.817.768.874.869**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transito (Neto) sebesar Rp28.819.096.783.843 atau 1.022,76 persen dari TA 2019.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar minus Rp55,01 triliun

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditangguhkan dan Kesalahan Sistem Perbankan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) juga berasal dari transaksi non anggaran pihak ketiga Rekening Pemerintah Lainnya, Migas, Non Migas, Rekening Khusus dan Optimalisasi Kas.

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp55.018.574.605.220 dan minus Rp45.959.771.656.851, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	107.250.288.389.717	40.312.556.247.186
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.600.718.321.518.214	942.358.812.624.291
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	3.717.597.699	17.776.784.379.532
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	509.868.017.795.874	562.020.730.222.589
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.999.178.000.155	8.156.386.337.513
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	85.857.839.026.533	71.975.041.983.110
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**2.310.697.362.328.192**	**1.642.600.311.794.221**

Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga	(106.965.579.952.374)	(40.392.038.442.495)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(1.557.342.752.471.365)	(952.732.631.126.359)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(32.125.026.905.725)	(52.948.605.117.911)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(509.675.770.299.518)	(562.367.762.691.627)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(6.999.178.000.155)	(8.143.992.149.951)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(152.607.839.026.533)	(71.975.041.983.110)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	**(2.365.716.146.655.670)**	**(1.688.560.071.511.453)**
Neto	**(55.018.784.327.478)**	**(45.959.759.717.232)**
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	18.367.125.378.547	5.026.821.072.580
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(18.367.124.834.211)	(5.026.821.072.577)
	544.336	**3**
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	160.097.938.286	152.350.074.997
Koreksi PenerimaanPemindahbukuan	(159.888.760.364)	(152.362.014.619)
	209.177.922	**(11.939.622)**
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	**(55.018.574.605.220)**	**(45.959.771.656.851)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp9.058.802.948.369 atau 19,71 persen dari TA 2019.

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp52,49 juta

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang, serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp52.495.332 dan minus Rp52.495.332, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	17.138.677.449.804.027	14.838.442.845.811.636
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(17.138.677.397.308.695)	(14.838.442.898.307.968)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	**52.495.332**	**(52.495.332)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp104.990.664 atau 200,00 persen dari TA 2019.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Rp5.127,31 triliun

Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dan Rp1.407.808.224.645.741. Nilai Ekuitas Awal tahun 2020 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2019 pada LKPP Tahun 2019 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit LO Rp872,61 triliun

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp872.618.264.239.235 dan Rp249.226.639.571.213. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0.

G.3.2. Penyesuaian SiLPA

Penyesuaian SiLPA Rp454,27 miliar

Penyesuaian SiLPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp454.270.651.534 dan minus Rp1.304.223.887.208. Penyesuaian SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu. Penyesuaian SiLPA dibentuk dari Jurnal Penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui *(null)* sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas pendapatan tahun anggaran yang lalu 311212.
Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
311211	SILPA	612.543.545.563	(943.746.557.215)
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(158.272.894.029)	(360.477.329.993)
Jumlah		**454.270.651.534**	**(1.304.223.887.208)**

G.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp2,87 triliun

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.873.247.690.030 dan Rp4.175.849.408.082. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan

koreksi atas nilai persediaan pada K/L dan BUN yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Persediaan pada KL sebesar Rp2.873.059.590.030. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:
   a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.799.984.765.567 yang disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu;
   b. Kementerian PUPR sebesar Rp2.028.352.747.391 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   c. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar minus Rp955.277.922.928.
2. Koreksi Nilai Persediaan pada BUN sebesar Rp188.100.00

G.3.4. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp104,77 triliun

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp104.773.275.462.472 dan Rp4.113.213.336.254.225. Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan baru disetujui oleh BPK untuk dapat disajikan di dalam LKPP tahun 2019.

G.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp71,29 triliun

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.297.154.112.414 dan minus Rp82.075.076.826.694. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2020 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang dilakukan di tahun 2020, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelum tahun 2019.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dikurangi Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	59.104.912.220.029	(74.763.226.060.772)
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	(1.680.370.687.043)	2.942.057.554.556
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	(2.268.049.973)	(3.670.950.852)
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	15.705.822.438.822	(5.381.414.523.626)
5. Penyesuaian Konsolidasi	(1.830.941.809.421)	(4.868.822.846.000)
Jumlah	**71.297.154.112.414**	**(82.075.076.826.694)**

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar Rp59.104.912.220.029. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 *(Audited)*
Kementerian Sekretariat Negara	60.241.594.956.027
Kementerian PUPR	(18.635.855.226.050)
Kementerian Pertahanan	13.352.810.994.272
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.938.740.294.339
Kementerian Kesehatan	(4.477.101.037.857)
Kementerian Perhubungan	1.434.096.937.805
Kepolisian RI	1.269.014.410.230
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	981.610.891.263
Jumlah	**59.104.912.220.029**

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp1.680.370.687.043. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 *(Audited)*
Kementerian PUPR	(1.355.411.601.614)
Kementerian Perhubungan	(431.307.516.759)
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	106.348.431.330
Jumlah	**(1.680.370.687.043)**

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp2.268.049.973 merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada SKK Migas (BA 999.08).
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp15.705.822.438.822. Koreksi tersebut berasal dari:
   a. BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) sebesar minus Rp2.429.223.160 merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset kelolaan pada KPA Satker BLU LMAN.

b. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp48.250.000 yang merupakan nilai koreksi pencatatan nilai/kuantitas pada BP Kawasan Karimun atas Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Pengembangan Website;

c. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp15.708.203.411.982. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut terdiri dari:

1) Satker Pengelola BMN PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.918.265.958.793.

2) Satker Pengelola BMN KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp13.789.937.453.189. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan karena revaluasi.

5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp1.830.941.809.421 dan minus Rp4.868.822.846.000. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 terdiri dari:

   Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar minus Rp1.642.932.406.000 merupakan penyesuaian pencatatan ganda atas tanah pada K/L, yaitu:

   1. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah antara BPS yang juga dicatat oleh Kemenhan sebesar Rp104.278.709.000;
   2. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah antara POLRI dengan Kemensetneg sebesar Rp1.496.393.822.000;
   3. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah Kemenhan dengan Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000.

   Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar minus Rp188.009.403.421 merupakan penyesuaian atas reklasifikasi BMN yang Dihentikan dari Penggunaan menjadi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Kementerian Perhubungan.

Atas pencatatan ganda aset tanah pada beberapa K/L dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Dalam Negeri atas tanah seluas 5.943 m2 di Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat seluas 5.943 m2 dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mencatat kepemilikan tanah seluas 3.099 m2. Atas kedua tanah tersebut tetap disajikan sesuai dengan dokumen pendukung pada masing-masing Kementerian/Lembaga, hal ini dilakukan karena pencatatan telah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham sesuai dengan sertipikat masing-masing. Terkait dengan adanya dugaan irisan lahan seluas 374 m2 tersebut selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Kantah pengukuran dan penentuan batas Badan Pertanahan.
2. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kemensetneg dengan Kemekdikbud dimana Kemekdikbud melakukan pencatatan dengan nilai Rp1 per meter persegi, saat ini Kemendikbud menyajikan tanah dimaksud sebagai BMN tidak ditemukan dalam proses Penilaian Kembali. Sehingga penyelesaian atas dobel pencatatan tersebut dilakukan melalui mekanisme tindak lanjut atas BMN Tidak Ditemukan yang saat ini sudah dalam proses pelaksanaan penghapusan.

G.3.6. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi minus Rp 7,54 triliun

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.542.957.446.049 dan minus Rp7.901.610.374.191. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp7.542.957.446.049 terdiri dari Koreksi Atas Reklasifikasi pada KL sebesar Rp7.542.081.937.994 dan Koreksi Atas Reklasifikasi pada BUN (BA 999.08) sebesar Rp875.508.055.

Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada KL sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 *(Audited)*
Kementerian Pertahanan	(532.824.028.698)
Kementerian Perhubungan	707.489.442.002
Kementerian PUPR	7.718.430.811.581
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(351.014.286.891)
Jumlah	**7.542.081.937.994**

Koreksi Atas Reklasifikasi pada BUN berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp875.508.055 merupakan Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada SKK Migas.

G.3.7. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya Rp31,98 triliun

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp31.986.614.856.946 dan minus Rp57.777.054.738.064. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2019 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Koreksi Lainnya pada K/L	9.091.462.482.372	(7.606.703.373.338)
2. Koreksi Lainnya pada BUN	25.058.730.405.441	(48.872.200.812.343)
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(2.163.578.030.866)	(1.298.150.552.384)
Jumlah	**31.986.614.856.947**	**(57.777.054.738.065)**

**) selisih TA 2019 dan TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Koreksi Lainnya pada K/L

   Koreksi Lainnya pada K/L untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp9.091.462.482.372 dan minus Rp7.606.703.373.338. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2020 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Kementerian Komunikasi dan Informatika	10.994.673.781.808	2.146.839.824.485
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	(6.210.220.841.332)	(40.721.498.306)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.920.224.645.590	(302.477.453)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.507.903.674.672	250.679.958.529
Kementerian Keuangan	(4.531.119.200.934)	(12.234.512.666.453)
Kementerian Pertahanan	(1.591.943.414.416)	863.856.283.759
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(998.056.163.016)	1.407.457.202.101
Jumlah	**9.091.462.482.372**	**(7.608.703.373.338)**

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp25.058.730.405.441 dan minus Rp48.872.200.812.343. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
999.00 Kuasa BUN	(48.183.763.352.239)	(9.710.896.704.384)
999.01 Pengelolaan Utang	590.209.933.252	23.817.039.836
999.02 Pengelolaan Hibah	879.664.835.372	1.713.550.086.234
999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	4.196.341.555.631	(56.554.564.930.800)
999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman	(2.705.358.870)	2.701.116.570
999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	531.135.366.213	(4.212.787.952.888)
999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(1.358.176.531.478)	1.732.661.632.352
999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	(37.155.948.956)	216.262.939.952
999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	6.332.379.612.280	966.590.553.080
999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	79.642.661.399.186	17.116.302.925.293
Penyesuaian	(17.531.861.104.950)	(165.837.517.678)
Jumlah	**25.058.730.405.441**	**(48.872.200.812.433)**

**) Selisih TA 2019 sebesar Rp90 karena pembulatan*

a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN (BA 999.00)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp48.109.430.674.639 dan minus Rp9.710.896.704.384. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	496.872.508.275	(50.643.356.242)
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.228.254.527.851	907.673.305.405
Mutasi Kas BLU	1.134.219.230.987	1.543.557.229.176
Koreksi SAL (311111)	(52.495.330)	(154.125.800.908)
Koreksi Penggunaan SAL (311112)	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Ekuitas (391111)	18.596.942.875.978	3.042.641.918.10
Jumlah*	**(48.183.763.352.239)**	**(9.710.896.704.379)**

**) Selisih TA 2019 Rp5 karena pembulatan*

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp590.209.933.252 dan Rp23.817.039.836. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.01	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Koreksi nilai Utang Proyek	590.209.933.252	(5.925.391.708)
Koreksi nilai Utang Program	-	22.096.642.908
Koreksi nilai Utang Lainnya	-	8.783.284.092
Penyesuaian Beban Bunga LO	-	134.458.544
Penyesuaian Pendapatan LO	-	(1.271.954.000)
Jumlah	**590.209.933.252**	**23.817.039.836**

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp879.664.835.372 dan Rp1.713.550.086.234. Koreksi lain-lain sebesar Rp879.664.835.372 terdiri dari Koreksi Lain-Lain atas sisa dana hibah RR tahun 2015 s.d 2019 yang masih harus disetorkan kembali ke RKUN sebesar Rp27.718.682.691 dan pengesahan hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp851.946.152.681.

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.196.341.555.631 dan minus Rp56.554.564.930.800. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.03	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
KPA Dit PNBP DJA	1.220.000.001	64.899.993.857
BLU LPDB KUMKM	9.303.373.479	(5.697.606.196)
KPA Kemen BUMN	(73.123.122.338.357)	(28.295.649.664.359)
KPA DJKN	(20.565.809.011.597)	(2.223.363.743.339)
UAIP	94.825.101.143.444	(23.104.753.910.763)
BPJT	2	-
LMAN	3.048.118.771.386	-
P2H	76.699.306.391	-
BLU LDKPI	3.000.000.000.000	-
KPA Dit. SMI (DJPB)	(76.386.036.992)	(990.000.000.000)
KPA Dit. Pinjaman dan Hibah (DJPPR)	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF	(1.000.000.000.000)	-
KPA Dit. Pembiayaan (Modal Awal BP Tapera)	1.216.347.874	-
Jumlah	**4.196.341.555.631**	**(56.554.564.930.800)**

e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp2.705.358.870 dan Rp2.701.116.570. Koreksi Lain-lain ini berasal dari pengurangan atas pengakuan piutang jangka panjang pada NoD/SP4H yang memiliki *value date* Tahun 2019 namun belum diterbitkan SP3 di Tahun Anggaran 2019 dan telah diterbitkan SP3-nya di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.705.358.870.

f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp531.135.366.213 dan minus Rp4.212.787.952.888 . Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD sebesar Rp531.135.366.213 merupakan selisih antara nilai estimasi DBH dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif sebesar Rp526.130.858.167 dan saldo koreksi piutang atas sisa DAK nonfisik TA 2019 Audited sebesar minus Rp5.004.508.046.

g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)
Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Belanja Subsidi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp1.358.176.531.478 dan Rp1.732.661.632.352. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.07	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Kementerian PUPR	16.010.143.398	60.257.298.971
Kementerian Pertanian	10	(15.467.053.196)
Kementerian Keuangan	(806.636.142.345)	(565.647.093.460)
Kementerian Koperasi dan UKM	(567.550.532.542)	2.253.518.479.336
Kementerian Perhubungan	1	701
Jumlah Koreksi Lainnya	**(1.358.176.531.478)**	**1.732.661.632.352**

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp37.155.948.956 dan Rp216.262.939.952, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Ditjen Anggaran	(52.859.702.722)	(7.456.451.880.000))
Ditjen Tanaman Pangan	15.728.824.952	(392.787.899)
SKK Migas	(25.071.186)	156.402.193
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	-	525.889.755
Satker Suspen	-	7.672.425.315.903
Jumlah*	**(37.155.948.956)**	**216.262.939.952**

1) Dit. PNBP SDA dan KND (999510) merupakan Koreksi Lainnya atas sisa kewajiban Pemerintah atas kebijakan penetapan tarif tenaga listrik tahun 2019 yang belum terbayarkan sebesar Rp100 dan Koreksi lainnya sebesar minus Rp52.859.702.822 berupa pengakuan utang PT AKR yang merupakan kekurangan penerimaan BBM Solar Tahun 2019 sebagaimana surat Menteri Keuangan kepada Presiden Direktur PT. AKR Corporindo Tbk. Nomor: S-236/MK.02/2021 tanggal 26 Maret 2021.
2) Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp15.728.824.952 yang merupakan koreksi lainnya yang disebabkan audit Itjen Kementan.
3) SKK Migas sebesar minus Rp25.071.186 merupakan Koreksi Lainnya.

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya (BA 999.09)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.332.379.612.280 dan Rp966.590.553.080. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.09	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Otorita Asahan	-	(1.040.454.951)
Yayasan TMII	(22.510.147.320)	85.151.640
Yayasan Gedung Veteran	434.501.827	(1.215.524.084)
Baznas	49.699.016.895	21.568.082.370
Badan Wakaf Indonesia	10.345.971.174	99.654.207
SKK Migas	(7.555.539.288)	(29.124.427.010)
OJK	307.478.235.326	293.570.506.332
Badan Pengelola Keuangan Haji	5.994.487.573.666	682.647.564.576
Jumlah	**6.332.379.612.280**	**966.590.553.080**

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp79.642.661.399.186 dan Rp17.116.302.925.293. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

UAPBUN TK	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	70.639.973.270.768	14.983.448.665.698
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	11.858.199.419.918	2.614.340.557.155
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(2.855.511.291.500)	(481.486.297.560)
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	**79.642.661.399.186**	**17.116.302.925.293**

k. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp17.531.861.104.950 dan minus Rp165.837.517.678. Penyesuaian pada LKBUN diantaranya merupakan bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp2.163.578.030.866 dan minus Rp1.298.150.552.384. Penyesuaian konsolidasian antara lain berasal dari eliminasi penyajian ganda antara KL dengan BA BUN.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas minus Rp423,63 miliar

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp423.638.382.132 dan Rp400.076.249.724. Transaksi Antar Entitas TA 2020 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Ditagihkan Ke Entitas Lain	10.799.508.700.068.219	9.464.964.346.763.850
Diterima Dari Entitas Lain	(10.829.656.773.066.617)	(9.479.843.736.107.350)
Pengesahan Hibah Langsung	28.957.570.035.691	14.584.887.973.846
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(53.120.253.929)	(117.296.886.522)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	842.976.246.238	846.768.035.664
Setoran Surplus BLU	(80.562.439.904)	(1.171.178.672.357)
Transfer Keluar	(968.346.022.060.134)	(243.191.067.333.248)
Transfer Masuk	968.403.593.088.304	244.327.352.475.842
Jumlah	**(423.638.382.132)**	**400.076.249.724**

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dicatat pada BUN. Dana lainnya juga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan sehingga agar tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp10.799.508.700.068.219, DDEL sebesar minus Rp10.829.656.773.066.617,

pengesahan hibah langsung sebesar Rp28.957.570.035.691, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp53.120.253.929, pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp842.976.246.238, dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp80.562.439.904. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebesar minus Rp481.209.410.302 sudah dapat dijelaskan seluruhnya. Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020 *(Audited)*
a) Perbedaan pencatatan TAE pada BA BUN 999.99	-
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(471.811.522.268)
c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara catatan KL dengan SiAP	(8.768.716.466)
d) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	6.371
e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(630.556.530)
f) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL	1.378.591
Jumlah	**(481.209.410.302)**

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp481.209.410.302 di antaranya sebagai berikut.

a) Tidak ada perbedaan TAE pada BUN.

b) Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan *posting rule* ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp471.811.522.268.

c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp8.768.716.466. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih kecil dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL) yang disebabkan antara lain karena selisih kurs transaksi penerimaan perpajakan.

d) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp6.371 lebih besar catatan KL.

e) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp630.556.530. Selisih tersebut disebabkan antara lain karena terdapat Pengesahan Hibah Langsung Uang TAYL yang belum dicatat di K/L. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.

f) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL sebesar Rp1.378.591.

2. Setoran Surplus BLU, merupakan penyetoran saldo kas BLU ke Kas Negara sehubungannya dengan adanya pencabutan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada 4 (empat) Unit

Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan. Rincian Setoran Surplus BLU adalah sebagai berikut.

No	Satuan Kerja	Setoran Surplus BLU (Rp)
1	BLU UPBU H.A.S. Hanandjoedin	6.780.644.779
2	BLU UPBU Radin Inten	29.194.225.169
3	BLU UPBU Sentani	22.524.340.439
4	BLU UPBU Fatmawati Soekarno	22.063.229.517
	Jumlah	**80.562.439.904**

3. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK) konsolidasian LKPP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
K/L	(1.104.894.671.105.993)	1.103.673.549.670.533	(1.221.121.435.460)
BUN	136.548.649.045.859	(135.269.956.582.229)	1.278.692.463.630
Eliminasi LKPP	-	-	-
Total LKPP*	(968.346.022.060.134)	(968.403.593.088.304)	57.571.028.170

Selisih lebih kecil Transfer Masuk pada KL dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

a) Selisih pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp389.053.170.983.308, antara lain disebabkan oleh selisih Harga Perolehan Terakhir (HPT) atas barang konsumsi, transfer keluar dari Aset Tetap yang tidak digunakan operasi pemerintahan, perbedaan *posting rule* pada aset ATR dan KDP.

b) Selisih pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp388.816.508.232.307, antara lain disebabkan oleh karena transfer keluar barang dihentikan, transfer keluar dari Aset Tetap dan/atau Aset Lain-lain yang tidak digunakan operasi pemerintahan.

c) Selisih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.132.477.019.649 antara lain karena kode satker pengirim/penerima tidak muncul dalam aplikasi namun secara total tidak terdapat selisih, transfer aset yang dihentikan dari operasi penggunaan diterima sebagai aset aktifnya sebagaimana *posting rule* Aplikasi SIMAK-BMN, koreksi pencatatan atas tanah PSN pada Satker Konsolidasi Kementerian PUPR, serta transfer keluar atas Aset Tetap Renovasi (ATR) yang diterima dengan penerimaan ATR yang langsung mengkapitalisasi aset induknya.

d) Selisih pada Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp4.224.329.717.628 antara lain disebabkan karena perbedaan Harga Perolehan Terakhir (HPT) atas barang konsumsi, akibat koreksi non revaluasi, kesalahan pengisian kode barang, dan aset yang dihentikan penggunaannya pada satker Transfer Masuk berubah ke kelompok induk golongan barang Aset Tetap.

e) Selisih pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar minus Rp1.100.736.543.801 sebagian besar disebabkan adanya transfer masuk aset tetap dari Kementerian PUPR.

f) Selisih Transfer Keluar Transfer Masuk pada BA BUN sebesar Rp1.278.692.463.630 dapat dijelaskan sebagai berikut.

BA	Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
999.03	Transfer Keluar	BLBI, PUPR	1.320.272.810.397
999.03	Transfer Masuk	Karaba Digdaya, Sejahtera Eka Graha, Aldevco	274.335.740.586
999.99	Transfer Keluar	Kemendikbud, Kemenkeu, BIN, Karaba Digdaya, Sejahtera Eka Graha	(340.535.757.588)
999.99	Transfer Masuk	LMAN	31.682.517.400
999.99	Transfer Keluar	Aldevco, Kemenhan, Kemenkeu, LAPAN	(7.661.053.000)
999.99	Transfer Masuk	KPK	558.823.252
999.99	Transfer Keluar	Kemenkeu	(4.757.006.511)
999.99	Transfer Masuk	Kemenkeu	4.796.389.094
	Jumlah		1.278.692.463.630

Beberapa selisih TKTM yang merupakan transaksi wajar dan pada umumnya terjadi di Kementerian/Lembaga berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 33/PB/2018, antara lain sebagai berikut:

a) Transaksi lintas wilayah/eselon I/Kementerian/Lembaga
Transfer yang dilakukan suatu satker kepada satker lain yang berada di bawah wilayah/eselon I/K/L lain, dapat menagakibatkan perbedaan nilai TKTM pada laporan keuangan unit pelaporan wilayah/eselon I/KL selalu konsolidator laporan keuangan satker, karena dalam laporan keuangan unit konsolidator hanya tersaji transaksi transfer dari salah satu pihak saja, TK atau TM saja, sedangkan transaksi transfer pihak lainnya akan tersaji pada laporan unit konsolidator lain.

b) Transfer lintas periode pelaporan
Transfer dari suatu satker kepada satker lain yang dilakukan lintas periode pelaporan keuangan dapat mengakibatkan perbedaan nilai TKTM di laporan keuangan unit pelaporan di atasnya, karena dalam laporan keuangan unit pelaporan tersebut hanya tersaji transaksi TK saja, sedangkan transaksi TM akan tersaji pada semester berikutnya.

c) Transfer atas Aset tetap Renovasi (ATR)
Transfer atas ATR seolah-olah mengakibatkan selisih TKTM pada monitoring TKTM, hal ini karena pada Aplikasi SIMAK BMN, pengeluaran aset dilakukan melalui Menu Transfer Keluar sedangkan penerimaan aset dicatat melalui menu Pengembangan Langsung. Pada saat transfer ATR, satker pengirim mengeluarkan ATR melalui TK, sedangkan satker penerima merekam pengembangan aset definitif atas aset yang diterimanya.

d) Penyesuaian nilai transfer persediaan karena penggunaan metode HPT (Harga Perolehan Terakhir) yang dapat berimplikasipada perbedaan nilai TKTM.

Secara lengkap, rincian per KL terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada **Lampiran 31.**

G.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Kenaikan Ekuitas minus Rp654,11 triliun

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp654.114.382.401.922 dan Rp3.719.504.656.514.661. Nilai Kenaikan/ Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Rp4.473,19 triliun

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dan Rp5.127.312.881.160.402. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp654.114.382.401.922.

H. PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Asersi final yang disajikan dalam LKPP tahun 2020 telah melalui proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

			Halaman
Catatan	**B.2.1**	**Pendapatan Negara dan Hibah**	**126**
Catatan	**B.2.1.1**	**Penerimaan Perpajakan**	**127**
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	128
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	130
Catatan	**B.2.1.2**	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**131**
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	131
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	133
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	133
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	135
Catatan	**B.2.1.3**	**Penerimaan Hibah**	**136**
Catatan	**B.2.2**	**Belanja Negara**	**136**
Catatan	**B.2.2.1**	**Belanja Pemerintah Pusat**	**136**
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	140
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	141
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	142
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	143
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	144
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	146
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	147
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	148
Catatan	**B.2.2.2**	**Transfer ke Daerah dan Dana Desa**	**149**
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	149
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	149
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	150
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	150
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	151
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	153
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	153
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	154
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	155
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	155
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	155
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	156
Catatan	**B.2.3**	**Defisit Anggaran**	**157**
Catatan	**B.2.4**	**Pembiayaan**	**157**
Catatan	**B.2.4.1**	**Pembiayaan Dalam Negeri**	**158**
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah	158
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	158
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	159
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	159

Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	160
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	161
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	164
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	164
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain	165
Catatan	**B.2.4.2**	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	**165**
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	165
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program/Tunai	166
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	166
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	166
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	167
Catatan	**B.2.5**	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	**167**
Catatan	**B.3**	**CATATAN PENTING LAINNYA**	**168**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	**C.1**	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**203**
Catatan	**C.2**	**Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**203**
Catatan	**C.3**	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**	**203**
Catatan	**C.4**	**Penyesuaian Pembukuan**	**204**
Catatan	**C.5**	**Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)**	**205**
Catatan	**C.6**	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**210**

NERACA

Catatan	**D.2.1**	**ASET**	**212**
Catatan	**D.2.1.1**	**Aset Lancar**	**212**
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	212
Catatan	D.2.1.1.1.1	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	212
Catatan	D.2.1.1.1.2	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	214
Catatan	D.2.1.1.1.3	Kas di Rekening Kas di KPPN	215
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transito	216
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	216
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	216
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	216
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas pada BLU	218
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka Rekening BUN	219
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	219
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	220
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	221
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	221
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	221
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	223
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	233
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian LancarTagihan TP/TGR	233
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	233
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	233
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	234

Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	235
Catatan	D.2.1.1.6.9	Penyisihan Piutang TidakTertagih – Piutang Jangka Pendek	235
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	237
Catatan	**D.2.1.2**	**Investasi Jangka Panjang**	237
Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	238
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	238
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	241
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	244
Catatan	D.2.1.2.1.4	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	247
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	247
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	247
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	249
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	249
Catatan	**D.2.1.3**	**Aset Tetap**	**251**
Catatan	D.2.1.3.1	Tanah	252
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	252
Catatan	D.2.1.3.3	Gedung dan Bangunan	253
Catatan	D.2.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	253
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	253
Catatan	D.2.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	253
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	254
Catatan	**D.2.1.4**	**Piutang Jangka Panjang**	**254**
Catatan	D.2.1.4.1	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	254
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tagihan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	255
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	255
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Lainnya	255
Catatan	D.2.1.4.5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	258
Catatan	**D.2.1.5**	**Aset Lainnya**	**259**
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	259
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	261
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	262
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	270
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	272
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	275
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	288
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	291
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	291
Catatan	**D.2.2**	**KEWAJIBAN**	**292**
Catatan	**D.2.2.1**	**Kewajiban Jangka Pendek**	**292**
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	293
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	294
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Bunga	301
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	302
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	305
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)	306
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	307
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	307
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	308

Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	309
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	309
Catatan	**D.2.2.2**	**Kewajiban Jangka Panjang**	**310**
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	310
Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	310
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	311
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	311
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	311
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	313
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	318
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	320
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	320
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	320
Catatan	**D.2.3**	**EKUITAS**	**321**
Catatan	**D.3**	**CATATAN PENTING LAINNYA**	**322**

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	**E.2.1**	**Kegiatan Operasional**	**383**
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	384
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	385
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	386
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	387
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	387
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	388
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	388
Catatan	E.2.1.1.1.6	Pendapatan Bea Masuk	389
Catatan	E.2.1.1.1.7	Pendapatan Bea Keluar	389
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	390
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	390
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	391
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	392
Catatan	E.2.1.1.2.3	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	394
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	396
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	397
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	398
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	399
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	400
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	401
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	402
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	403
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	404
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	405
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	407
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	409
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	410
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	411
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	416

Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	418
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	419
Catatan	**E.2.2**	**Kegiatan Non Operasional**	**420**
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	421
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	421
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	421
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	422
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	422
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	422
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	422
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	423
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	424
Catatan	**E.2.3**	**Pos Luar Biasa**	**425**
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	425
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	425
Catatan	**E.3**	**CATATAN PENTING LAINNYA**	**425**
LAPORAN ARUS KAS			
Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	429
Catatan	F.1.2	Kenaikan (Penurunan) Kas	429
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	431
Catatan	F.2.1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	432
Catatan	**F.2.1.1**	**Arus Kas Masuk**	**433**
Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	433
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	433
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	434
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	434
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	434
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	435
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	435
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	435
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	436
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	436
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	437
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	437
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum	437
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	438
Catatan	**F.2.1.2**	**Arus Kas Keluar**	**438**
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	438
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	439
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	439
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	440
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	441
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	441
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	441

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Catatan	F.2.1.2.8	Dana Bagi Hasil Pajak	442
Catatan	F.2.1.2.9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	442
Catatan	F.2.1.2.10	Dana Bagi Hasil Cukai	443
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	443
Catatan	F.2.1.2.12	Dana Alokasi Khusus Fisik	443
Catatan	F.2.1.2.13	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	443
Catatan	F.2.1.2.14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	444
Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	444
Catatan	**F.2.2**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**444**
Catatan	**F.2.2.1**	**Arus Kas Masuk**	**445**
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	445
Catatan	F.2.2.1.2	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	445
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	445
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	445
Catatan	**F.2.2.2**	**Arus Kas Keluar**	**446**
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	446
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Dalam Negeri – Pengembangan Pendidikan Nasional	446
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	446
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	446
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	447
Catatan	**F.2.3**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**447**
Catatan	**F.2.3.1**	**Arus Kas Masuk**	**448**
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	448
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	449
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	450
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	450
Catatan	**F.2.3.2**	**Arus Kas Keluar**	**450**
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	450
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	451
Catatan	F.2.3.2.3	Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari SLA	451
Catatan	**F.2.4**	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**451**
Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	451
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	452
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	453
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	454

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	**G.1**	**Ekuitas Awal**	**455**
Catatan	**G.2**	**Surplus/Defisit LO**	**455**
Catatan	**G.3**	**Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas**	**455**
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	455
Catatan	G.3.2	Penyesuaian SiLPA	455
Catatan	G.3.3	Koreksi Nilai Persediaan	455
Catatan	G.3.4	Revaluasi Aset Tetap	456
Catatan	G.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	456
Catatan	G.3.6	Koreksi atas Reklasifikasi	459

Catatan	G.3.7	Koreksi Lainnya	459
Catatan	**G.4**	**Transaksi Antar Entitas**	**464**
Catatan	**G.5**	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**469**
Catatan	**G.6**	**Ekuitas Akhir**	**469**

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	BantuanPemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CAR	:	*Capital Adequate Ratio*
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
CICR	:	*Consolidated Interest Coverage Ratio*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat

DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea danCukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DNS	:	*Debt for Nature Swap*
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN		Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	*Debt Service Coverage Ratio*
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	*Electronic Data Interchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions*
GIZ-GGPAS	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems*
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	*Japanese Yen*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor *Production Sharing*
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	*Project Based Sukuk*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	*Real Time Gross Settlement*
SAA	:	*Separate Arrangement Agreement*
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara

SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	:	Sarana Pengembangan Usaha
SUN	:	Surat Utang Negara
SWIFT	:	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan HariTua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USAID	:	*United State Agency for International Development*
USD	:	*United State Dollar*
UPP	:	Unit Pelaksana Proyek
UP3	:	Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2020 485

2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 507

3 Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 549

4 Rincian Realisasi Program PC-PEN Tahun 2020 661

5 Saldo Kas Di Rekening KPPN Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 676

6 Kas Pada K/L dan BUN Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 678

7 Belanja Dibayar Di Muka, Uang Muka Belanja dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 683

8 Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2020 690

9 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 697

10 Rincian Piutang Transfer Ke Daerah Per 31 Desember 2020 703

11 Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2020 715

12 Rincian Aset Kredit Eks BPPN dan Eks PT PPA Per 31 Desember 2020 718

13 Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 729

14 Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 732

15 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2020 736

16 Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan Tahun 2020 746

17 Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2020 749

18 Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (Minoritas) Tahun 2020 753

19 Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Per 31 Desember 2020 758

20 Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 760

21 TP/TGR Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 785

22 Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 791

23 Rincian Aset Eks BPPN Per 31 Desember 2020 799

24 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 816

25 Daftar BMN Eks BMN *Idle* yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda Tahun 2020 & Pemanfaatan Aset Eks BLBI/Eks PT PPA 823

26 Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 947

27 Rincian Utang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Dana Bagi Hasil) 954

28 Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Per 31 Desember 2020 963

29 Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Per 31 Desember 2020 973

30 Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan Per 31 Desember 2020 982

31 Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2020 985

32 Rekapitulasi Revaluasi Aset Tetap Kementerian Lembaga Tahun 2020 988

33 Laporan Pertanggungjawaban SBN Tahun 2020 1027

34 Representasi Manajemen DJP dan DJBC Terkait Insentif Perpajakan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 1073

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1
LRA PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TA 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
4	**PENDAPATAN NEGARA**	**1.699.948.459.678.000**	**1.647.783.342.188.890**	**96,93%**	**1.960.633.583.585.990**	**(312.850.241.397.003)**	**-15,96%**
41	**PENDAPATAN PERPAJAKAN**	**1.404.507.505.772.000**	**1.285.136.317.135.860**	**91,50%**	**1.546.141.893.392.190**	**(261.005.576.256.394)**	**-16,88%**
411	**PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI**	**1.371.020.559.002.000**	**1.248.415.111.170.300**	**91,06%**	**1.505.088.202.287.700**	**(256.673.091.117.392)**	**-17,05%**
4111	**Pendapatan Pajak Penghasilan**	**670.379.543.409.000**	**594.033.333.770.490**	**88,61%**	**772.265.718.288.668**	**(178.232.384.516.178)**	**-23,08%**
41111	**Pendapatan PPh Migas**	**31.859.004.222.000**	**33.026.736.126.169**	**103,67%**	**59.150.314.819.928**	**(26.123.578.693.759)**	**-44,16%**
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	14.662.391.743.000	11.332.221.314.991	77,29%	24.493.086.993.337	(13.160.865.678.346)	-53,73%
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	17.196.612.479.000	21.689.144.755.946	126,12%	34.654.705.206.760	(12.965.560.450.814)	-37,41%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya		5.370.055.232		2.522.619.831	2.847.435.401	112,88%
41112	**Pendapatan PPh Non-Migas**	**638.520.539.178.000**	**545.850.307.089.643**	**85,49%**	**701.961.892.831.112**	**(156.111.585.741.469)**	**-22,24%**
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	134.592.462.848.000	139.351.267.744.195	103,54%	148.503.893.801.199	(9.152.626.057.004)	-6,16%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	19.139.368.790.000	16.849.783.981.344	88,04%	21.308.577.041.891	(4.458.793.060.547)	-20,92%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	47.378.967.342.000	27.117.480.784.100	57,24%	53.704.105.315.697	(26.586.624.531.797)	-49,51%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	37.845.767.974.000	40.013.897.522.066	105,73%	42.582.956.281.130	(2.569.058.759.064)	-6,03%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.237.830.904.000	11.563.111.563.072	112,94%	11.200.108.698.779	363.002.864.293	3,24%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	224.539.270.897.000	155.076.444.520.586	69,06%	252.167.838.904.327	(97.091.394.383.741)	-38,50%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	49.801.009.939.000	43.602.468.786.460	87,55%	46.138.482.953.287	(2.536.014.166.827)	-5,50%
411128	Pendapatan PPh Final	114.869.405.088.000	112.164.589.833.830	97,65%	126.223.171.183.087	(14.058.581.349.257)	-11,14%
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	116.455.396.000	111.262.353.990	95,54%	132.758.651.515	(21.496.297.525)	-16,19%
41114	**Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah**		**15.156.290.554.678**		**11.153.510.635.628**	**4.002.779.919.050**	**35,89%**
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		1.709.586.633.777		7.345.960	1.709.579.287.797	23272310,68%
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah				730.495	(730.495)	-100,00%
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah		358.937.283		472.736.000	(113.798.717)	-24,07%
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah				22.247.678	22.247.678	-100,00%
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah		2.964.908.597.094		2.240.629.780.907	724.278.816.187	32,32%
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah		9.797.088.181.415		8.912.420.935.294	884.667.246.121	9,93%
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah		684.348.205.109		854.630	684.347.350.479	80075278,25%
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah				500.000	(500.000)	-100,00%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
4112	**Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai**	**507.516.237.686.000**	**450.329.063.257.688**	**88,73%**	**531.577.293.855.031**	**(81.249.230.597.343)**	**-15,28%**
41121	**Pendapatan PPN**	**493.039.805.753.000**	**439.836.453.302.524**	**89,21%**	**515.971.636.887.181**	**(76.135.183.584.657)**	**-14,76%**
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	330.106.967.671.000	298.670.175.293.033	90,48%	344.440.292.858.365	(45.770.117.565.332)	-13,29%
411212	Pendapatan PPN Impor	162.829.440.346.000	140.453.213.447.920	86,26%	171.368.962.616.010	(30.915.749.168.090)	-18,04%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	103.397.736.000	713.064.561.571	689,63%	162.381.392.806	550.683.168.765	339,13%
41122	**Pendapatan PPnBM**	**14.476.431.843.000**	**8.555.391.322.228**	**59,10%**	**15.605.656.987.850**	**(7.050.265.665.622)**	**-45,18%**
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	9.963.284.270.000	5.554.000.093.959	55,74%	10.847.390.983.819	(5.293.390.889.860)	-48,80%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	4.513.147.673.000	3.000.581.915.947	66,49%	4.725.154.762.635	(1.724.572.846.688)	-36,50%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya		809.312.322		33.111.241.396	(32.301.929.074)	-97,56%
41124	**Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah**		**1.936.218.632.936**			**1.936.218.632.936**	
411241	Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah		1.936.218.632.936			1.936.218.632.936	
4113	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**13.441.937.380.000**	**20.953.610.013.766**	**155,88%**	**21.145.900.040.486**	**(192.290.026.720)**	**-0,91%**
41131	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**13.441.937.380.000**	**20.953.610.013.766**	**155,88%**	**21.145.900.040.486**	**(192.290.026.720)**	**-0,91%**
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.512.973.053.000	2.627.109.411.467	173,64%	2.486.750.566.151	140.358.845.316	5,64%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	522.758.943.000	653.561.272.344	125,02%	487.201.065.051	166.360.207.293	34,15%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.187.925.109.000	3.004.587.635.379	252,93%	3 477 736.065.334	(473.148.429.955)	-13,61%
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	9.931.480.107.000	14.081.875.255.844	141,79%	14.250.961.673.713	(169.086.417.869)	-1,19%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	258.725.816.000	408.132.427.296	157,75%	368.435.097.874	39.697.329.422	10,77%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	28.074.352.000	178.344.011.436	635,26%	74.815.572.363	103.528.439.073	138,38%
4115	**Pendapatan Cukai**	**172.197.172.827.000**	**176.309.313.789.576**	**102,39%**	**172.421.940.270.562**	**3.887.373.519.014**	**2,25%**
41151	**Pendapatan Cukai**	**172.197.172.827.000**	**176.309.313.789.576**	**102,39%**	**172.421.940.270.562**	**3.887.373.519.014**	**2,25%**
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	164.944.132.827.000	170.239.842.643.814	103,21%	164.872.445.405.658	5.367.397.238.156	3,26%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	154.600.000.000	241.784.163.000	156,39%	122.528.191.000	119.255.972.000	97,33%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	7.098.440.000.000	5.759.288.405.930	81,13%	7.338.510.818.070	(1.579.222.412.140)	-21,52%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai		56.239.915.199		73.182.280.071	(16.942.364.872)	-23,15%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya		12.158.861.633		15.273.575.763	(3.114.914.130)	-20,39%
4116	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**7.485.867.699.000**	**8.790.790.338.785**	**90,72%**	**7.677.348.634.950**	**(886.558.496.165)**	**-11,55%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
41161	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**7.485.667.699.000**	**5.580.584.954.473**	**74,55%**	**6.212.194.737.201**	**(631.609.782.728)**	**-10,17%**
411611	Pendapatan Bea Meterai		1.445.535.466.431		1.480.577.017.178	(34.041.550.747)	-2,30%
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai		3.638.052.138.011		4.117.446.934.631	(479.394.796.620)	-11,64%
411613	Pendapatan PPn Batubara		485.164.790.391		538.680.322.182	(53.515.531.791)	-9,93%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	7.485.667.699.000	10.832.559.840	0,14%	75.490.463.210	(64.657.903.570)	-85,65%
41162	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak**		**1.210.205.384.312**		**1.465.155.097.749**	**(254.949.713.437)**	**-17,40%**
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh		1.179.768.900.131		655.039.379.502	524.729.520.629	80,11%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN		30.360.250.777		589.923.712.311	(559.563.461.534)	-94,85%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM		1.863.959		220.033.197.452	(220.031.333.493)	-100,00%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL		74.369.445		158.808.484	(84.439.039)	-53,17%
412	**PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL**	**33.486.948.770.000**	**36.721.205.965.494**	**109,66%**	**41.053.691.104.496**	**(4.332.485.139.002)**	**-10,55%**
4121	**Pendapatan Bea Masuk**	**31.833.785.159.000**	**32.443.498.968.565**	**101,92%**	**37.526.981.312.119**	**(5.083.482.343.554)**	**-13,55%**
41211	**Pendapatan Bea Masuk**	**31.833.785.159.000**	**31.044.750.473.771**	**97,52%**	**36.479.770.104.740**	**(5.435.019.630.969)**	**-14,90%**
412111	Pendapatan Bea Masuk	31.833.785.159.000	29.750.557.857.631	93,46%	34.824.420.858.209	(5.073.863.000.578)	-14,57%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		567.207.949.682		682.054.914.763	(114.846.965.081)	-16,84%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		502.288.602.777		589.890.171.268	(87.601.568.491)	-14,85%
412116	Pendapatan BM-DTP		233.478.860.370		354.326.302.000	(120.847.441.630)	-34,11%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		8.782.796.689		29.077.858.500	(37.860.655.189)	-130,20%
41212	**Pendapatan Bea Masuk Tindakan**		**1.398.748.494.794**		**1.047.211.207.379**	**351.537.287.415**	**33,57%**
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping		183.028.721.000		308.468.786.790	(125.440.065.790)	-40,67%
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan				22.101.000	(22.101.000)	-100,00%
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan		1.215.719.773.794		738.720.319.589	476.999.454.205	64,57%
4122	**Pendapatan Bea Keluar**	**1.653.161.611.000**	**4.277.706.996.929**	**258,76%**	**3.526.709.792.377**	**750.997.204.552**	**21,29%**
41221	**Pendapatan Bea Keluar**	**1.653.161.611.000**	**4.277.706.996.929**	**258,76%**	**3.526.709.792.377**	**750.997.204.552**	**21,29%**
412211	Pendapatan Bea Keluar	1.653.161.611.000	4.264.317.752.839	257,95%	3.526.335.855.946	737.981.896.893	20,93%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		891.590.569		373.535.431	518.055.138	138,68%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		12.497.653.521		401.000	12.497.252.521	3116521,83%

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
42	**PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**	294.140.953.906.000	343.814.209.832.563	116,89%	408.994.346.200.875	(65.180.136.368.312)	-15,94%
421	**PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM**	79.086.884.879.000	97.225.067.272.619	122,93%	154.895.286.766.287	(57.670.219.493.668)	-37,23%
4211	**PENDAPATAN MINYAK BUMI**	40.385.879.343.000	44.868.847.085.493	111,10%	83.622.340.876.020	(38.753.493.790.527)	-46,34%
42111	**Pendapatan Minyak Bumi**		44.868.847.085.493		83.622.340.876.020	(38.753.493.790.527)	-46,34%
421111	Pendapatan Minyak Bumi		44.868.847.085.493		83.622.340.876.020	(38.753.493.790.527)	-46,34%
4212	**PENDAPATAN GAS BUMI**	12.909.043.600.000	24.211.325.322.339	187,55%	37.467.520.404.392	(13.256.195.082.053)	-35,38%
42121	**Pendapatan Gas Bumi**		24.211.325.322.339		37.467.520.404.392	(13.256.195.082.053)	-35,38%
421211	Pendapatan Gas Bumi		24.211.325.322.339		37.467.520.404.392	(13.256.195.082.053)	-35,38%
4213	**PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**	19.351.516.817.000	21.178.987.878.156	109,44%	26.343.691.801.600	(5.164.703.922.444)	-18,61%
42132	**Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara**		437.708.805.796		450.864.987.180	(13.156.181.384)	-2,92%
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi		42.816.046.082		54.471.693.795	(11.655.647.713)	-21,40%
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi		394.888.344.632		396.383.327.407	(1.494.982.775)	-0,38%
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat		4.415.082		9.965.958	(5.550.876)	-55,70%
42133	**Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara**		20.741.279.073.360		25.892.826.814.440	(5.151.547.741.080)	-19,90%
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara		12.558.022.864.632		19.718.730.438.003	(7.160.707.573.371)	-36,31%
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga		1.525.271.498.390		1.249.063.747.310	276.207.751.080	22,11%
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas		2.345.256.561.192		1.891.027.836.171	454.228.725.021	24,02%
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak		90.505.319.283		68.373.867.540	22.131.451.743	32,37%
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel		2.918.853.139.180		2.014.421.160.336	904.431.978.844	44,90%
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah		513.014.600.220		574.626.561.705	(61.611.961.485)	-10,72%
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya		790.355.090.463		376.583.203.375	413.771.887.088	109,88%
4214	**PENDAPATAN KEHUTANAN**	4.197.183.539.000	4.403.263.272.502	104,91%	5.007.257.006.149	(603.993.733.647)	-12,06%
42141	**Pendapatan Dana Reboisasi**		1.404.552.989.544		1.653.956.206.171	(249.403.216.627)	-15,08%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi		1.404.552.989.544		1.653.956.206.171	(249.403.216.627)	-15,08%
42142	**Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan**		1.009.577.399.789		1.078.460.288.969	(68.882.889.180)	-6,39%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan		1.009.577.399.789		1.078.460.288.969	(68.882.889.180)	-6,39%
42143	**Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)**		63.121.473.400		153.271.617.074	(90.150.143.674)	-58,82%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)		63.121.473.400		153.271.617.074	(90.150.143.674)	-58,82%
42144	**Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan**		**1.926.011.409.769**		**2.121.568.893.935**	**(195.557.484.166)**	**-9,22%**
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan		1.926.011.409.769		2.121.568.893.935	(195.557.484.166)	-9,22%
4215	**PENDAPATAN PERIKANAN**	**900.354.236.000**	**600.662.766.688**	**66,71%**	**521.936.215.435**	**78.726.551.253**	**15,08%**
42152	**Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan**		**10.669.946.160**		**6.727.835.681**	**3.942.110.479**	**58,59%**
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap		10.491.009.160		6.173.718.151	4.317.291.009	69,93%
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		178.937.000		554.117.530	(375.180.530)	-67,71%
42153	**Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan**		**589.992.820.528**		**515.208.379.754**	**74.784.440.774**	**14,52%**
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan		589.992.820.528		515.208.379.754	74.784.440.774	14,52%
4216	**PENDAPATAN PANAS BUMI**	**1.342.907.344.000**	**1.981.980.946.441**	**146,10%**	**1.932.540.462.691**	**29.440.483.750**	**1,52%**
42162	**Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi**		**1.889.276.706.760**		**1.895.246.863.593**	**(5.970.156.833)**	**-0,32%**
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi		1.889.276.705.760		1.895.246.863.593	(5.970.156.833)	-0,32%
42163	**Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi**		**29.389.695.004**		**33.610.889.750**	**(4.221.284.746)**	**-12,56%**
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi		21.483.606.226		32.075.873.025	(10.592.266.799)	-33,02%
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi		7.905.988.778		1.535.016.725	6.370.982.053	415,04%
42164	**Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi**		**43.314.634.677**		**3.682.709.348**	**39.631.925.329**	**1076,16%**
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi		43.314.634.677		3.682.709.348	39.631.925.329	1076,16%
422	**PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)**	**65.000.000.000.000**	**66.080.543.541.337**	**101,66%**	**80.726.119.208.790**	**(14.645.575.665.453)**	**-18,14%**
4221	**PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN**	**65.000.000.000.000**	**44.598.933.053.599**	**68,61%**	**50.634.211.382.087**	**(6.035.278.328.488)**	**-11,92%**
42213	**Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN**		**43.888.106.053.599**		**49.773.695.752.482**	**(5.885.588.698.883)**	**-11,82%**
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN		23.987.948.592.740		18.595.470.253.531	5.392.478.339.209	29,00%
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN		19.900.157.460.859		31.178.225.498.951	(11.278.068.038.092)	-36,17%
42214	**Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan**		**710.827.000.000**		**860.515.629.605**	**(149.688.629.605)**	**-17,40%**
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan		710.827.000.000		860.515.629.605	(149.688.629.605)	-17,40%
4222	**PENDAPATAN DARI KND LAINNYA**		**21.481.610.487.738**		**30.091.907.824.703**	**(8.610.297.336.965)**	**-28,61%**
42221	**Pendapatan dari Surplus Lembaga**		**21.481.610.487.738**		**30.091.907.824.703**	**(8.610.297.336.965)**	**-28,61%**
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia		21.481.610.487.738		30.091.907.824.703	(8.610.297.336.965)	-28,61%

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
424	**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM**	**50.000.280.182.000**	**69.308.327.882.198**	**138,62%**	**48.869.312.995.366**	**20.439.014.886.833**	**41,82%**
4241	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**		**61.460.957.814.443**		**40.698.144.354.523**	**20.762.813.459.920**	**51,02%**
42411	**Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat**		**33.948.496.986.500**		**33.307.807.529.959**	**640.689.456.541**	**1,92%**
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit		17.464.123.392.311		16.357.696.591.964	1.106.426.800.347	6,76%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		12.658.979.393.162		12.647.247.226.609	11.732.166.553	0,09%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi		446.358.981.191		530.882.505.266	(84.523.524.075)	-15,92%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan		55.000.000		161.068.800	(106.068.800)	-65,85%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian		63.989.891.678		303.688.692.268	(239.698.800.590)	-78,93%
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi		2.475.207.132.376		2.743.344.770.718	(268.137.638.342)	-9,77%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran		4.579.182		220.786.962	(216.207.780)	-97,93%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang		955.362.590		1.189.210.350	(233.847.760)	-19,66%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		838.823.254.010		723.376.677.022	115.446.576.988	15,96%
42412	**Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu**		**1.462.658.598.988**		**1.615.780.715.685**	**(153.122.116.697)**	**-9,48%**
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita		1.308.579.056.567		1.332.326.711.631	(23.747.655.064)	-1,78%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya		154.079.542.421		283.454.003.964	(129.374.461.543)	-45,64%
42413	**Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat**		**25.443.176.871.730**		**5.003.672.214.239**	**20.439.504.757.491**	**408,49%**
424133	Pendapatan Program Modal Ventura		8.426.087.952		5.252.628.262	3.173.459.690	60,42%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral		265.833.746.346		315.069.336.520	(49.235.590.174)	-15,63%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah		42.882.630.116		25.454.026.350	17.428.603.766	68,47%
424136	Pendapatan Investasi		951.069.211.629		1.037.684.147.207	(86.614.935.578)	-8,35%
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional		3.908.193.732.847		3.607.055.917.983	301.137.814.864	8,35%
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		20.262.827.078.266			20.262.827.078.266	
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya		3.944.484.774		13.156.157.917	(9.211.673.143)	-70,02%
42414	**Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang**		**606.625.257.225**		**770.883.894.730**	**(164.258.637.505)**	**-21,31%**
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang		606.625.257.225		770.883.894.730	(164.258.637.505)	-21,31%
4242	**Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum**		**123.568.742.424**		**154.843.013.918**	**(31.274.271.494)**	**-20,20%**
42421	**Pendapatan Hibah Terikat - Uang**		**43.163.931.862**		**89.369.579.649**	**(46.205.647.787)**	**-51,70%**

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang		518.896.191		198.211.372	320.684.819	161,79%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		20.353.429.482		17.222.959.992	3.130.469.490	18,18%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang		20.650.082.791		67.576.698.713	(46.926.615.922)	-69,44%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang				138.613.955	(138.613.955)	-100,00%
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		1.641.523.398		4.233.095.617	(2.591.572.219)	-61,22%
42422	**Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang**		**80.404.810.582**		**65.473.434.269**	**14.931.376.283**	**22,81%**
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang		62.785.903.974		59.880.889.272	2.905.014.702	4,85%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		17.217.906.588		4.624.889.507	12.593.017.081	272,29%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang				967.655.490	(967.655.490)	-100,00%
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya - Uang		401.000.000			401.000.000	
4243	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**		**587.981.383.580**		**855.074.995.219**	**(267.093.611.639)**	**-31,24%**
42431	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**		**587.981.383.580**		**855.074.995.219**	**(267.093.611.639)**	**-31,24%**
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		37.865.071.780		64.938.557.559	(27.073.485.779)	-41,69%
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		463.405.931.457		662.062.231.024	(198.656.299.567)	-30,01%
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah		86.710.380.343		128.074.206.636	(41.363.826.293)	-32,30%
4244	**Pendapatan dari Alokasi APBN**		**1.370.313.178.626**		**328.485.663.104**	**1.041.827.515.522**	**317,16%**
42442	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**		**1.370.313.178.626**		**328.485.663.104**	**1.041.827.515.522**	**317,16%**
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga		1.192.644.918.747		173.181.163.285	1.019.463.755.462	588,67%
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU		177.668.259.879		155.304.499.819	22.363.760.060	14,40%
4249	**Pendapatan BLU Lainnya**		**5.765.508.763.126**		**6.832.764.968.602**	**(1.067.256.205.476)**	**-15,62%**
42491	**Pendapatan BLU Lainnya**		**5.664.375.460.353**		**6.700.931.131.892**	**(1.036.555.671.539)**	**-15,47%**
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		5.400.704.156.066		6.457.293.927.737	(1.056.589.771.671)	-16,36%
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya		499.200.971			499.200.971	
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU		2.886.625.462		583.725.327	2.302.900.135	394,52%
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU		322.858.330		2.578.745	325.237.075	-12612,22%
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		45.559.327.415		23.507.243.728	22.052.083.687	93,81%
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		4.522.815.957		30.206.906.626	(25.684.090.669)	-85,03%

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU		2.209.523.518		2.855.526.484	(646.002.966)	-22,62%
424919	Pendapatan Lain-lain BLU		207.671.152.834		186.486.380.735	21.184.771.899	11,36%
42492	**Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa**		**101.085.490.791**		**131.542.324.010**	**(30.536.833.219)**	**-23,21%**
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah		11.190.470.545		8.488.775.977	2.701.694.568	31,83%
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		23.857.565.189		40.193.556.153	(16.335.990.964)	-40,64%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		37.759.706.943		55.331.546.499	(17.571.839.556)	-31,76%
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin		18.931.500.474		15.466.998.253	3.464.502.221	22,40%
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya		5.453.381.574		6.417.857.752	(964.476.178)	-15,03%
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya		3.812.866.066		5.643.589.376	(1.830.723.310)	-32,44%
42493	**Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU**		**125.811.982**		**291.512.700**	**(165.700.718)**	**-56,84%**
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU		34.250.000		55.000.000	(20.750.000)	-37,73%
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU		17.833.982			17.833.982	
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU				133.517.000	(133.517.000)	-100,00%
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU		73.728.000		102.995.700	(29.267.700)	-28,42%
425	**PENDAPATAN PNBP LAINNYA**	**100.853.788.845.000**	**111.200.271.136.408**	**111,14%**	**124.503.827.232.432**	**(13.303.356.096.024)**	**-10,69%**
4251	**Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**	**15.181.044.351.000**	**17.185.307.582.050**	**113,07%**	**32.429.131.188.137**	**(15.243.823.604.087)**	**-47,07%**
42511	**Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang**	**12.062.031.538.000**	**13.539.707.459.461**	**112,25%**	**19.006.470.818.652**	**(5.466.763.359.191)**	**-28,76%**
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	12.062.031.538.000	13.468.556.728.171	111,66%	18.580.975.151.710	(5.112.418.423.539)	-27,51%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		49.831.364.688		68.668.735.753	(18.837.371.065)	-27,43%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan		4.000.016.780		1.452.205.712	2.547.811.068	175,44%
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni				339.727.022.946	(339.727.022.946)	-100,00%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		17.319.349.822		15.647.702.531	1.671.647.291	10,68%
42512	**Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN**		**281.310.250.571**		**341.531.328.482**	**(60.221.077.911)**	**-17,63%**
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		3.721.822.537		3.948.035.294	(226.212.757)	-5,73%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		101.783.596.489		111.020.574.073	(9.236.977.584)	-8,32%
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III		4.861.677.545		10.831.948.400	(5.970.271.855)	-55,12%
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan		101.000.000			101.000.000	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		170.842.154.000		215.730.769.715	(44.888.615.715)	-20,81%
42513	**Pendapatan dari Pemanfaatan BMN**		**513.738.203.370**		**522.960.362.436**	**(9.222.159.066)**	**-1,76%**
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		441.318.174.033		430.901.024.632	10.417.149.401	2,42%
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		996.070.765		4.427.843.340	(3.431.772.575)	-77,50%
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.395.464.844		4.427.118.712	(2.031.653.868)	-45,89%
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan		39.884.325.808		50.082.127.864	(10.197.802.056)	-20,36%
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan				30.788.411	(30.788.411)	-100,00%
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)		2.366.939.546		360.047.373	2.006.892.173	557,40%
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya		26.777.228.374		32.731.412.104	(5.954.183.730)	-18,19%
42514	**Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang**		**412.885.184.853**		**626.866.552.049**	**(213.981.367.196)**	**-34,14%**
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS		183.040.831.130		352.293.827.465	(169.252.996.335)	-48,04%
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B		127.784.000		10.953.567.000	(10.825.783.000)	-98,83%
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti		2.777.775.000		5.753.369.980	(2.975.594.980)	-51,72%
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain		394.969.388		1.721.611.720	(1.326.642.332)	-77,06%
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa		853.626.200		4.499.504.300	(3.645.878.100)	-81,03%
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dan Pengelola Barang		225.690.199.135		251.644.671.584	(25.954.472.449)	-10,31%
42515	**Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**		**34.883.315.174**		**81.725.622.928**	**(46.842.307.754)**	**-57,32%**
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		34.883.315.174		81.725.622.928	(46.842.307.754)	-57,32%
42516	**Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas**	**3.119.012.813.000**	**1.413.819.541.242**	**45,33%**	**10.530.277.358.314**	**(9.116.457.818.072)**	**-86,57%**
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	3.119.012.813.000	1.349.251.006.233	43,26%	5.604.477.690.308	(4.255.226.684.075)	-75,93%
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		64.568.535.009		4.925.799.669.006	(4.861.231.133.997)	-98,69%
42517	**Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**		**968.963.627.379**		**1.319.299.142.276**	**(350.335.514.897)**	**-26,55%**
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM		724.686.510.502		1.033.323.653.631	(308.637.143.129)	-29,87%
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa		239.032.982.093		285.666.685.044	(46.633.702.951)	-16,32%
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN		5.244.134.784		308.803.601	4.935.331.183	1598,21%
4252	**PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM**		**13.646.524.410.853**		**18.366.375.054.747**	**(4.719.850.643.894)**	**-25,70%**
42521	**Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum**		**2.880.688.923.673**		**4.303.327.782.245**	**(1.422.658.858.572)**	**-33,06%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425211	Pendapatan Paspor		451.296.950.000		1.253.341.710.000	(802.044.760.000)	-63,99%
425212	Pendapatan Visa		229.088.321.928		406.729.595.455	(177.641.273.527)	-43,68%
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)		605.627.700.000		716.924.200.000	(111.296.500.000)	-15,52%
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya		52.946.700.000		182.197.521.707	(129.250.821.707)	-70,94%
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia		487.999.450.000		750.037.350.000	(262.037.900.000)	-34,94%
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum		220.362.824.484		238.892.867.249	(18.530.042.765)	-7,76%
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya		42.654.863.729		40.468.433.955	2.186.429.774	5,40%
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual		789.272.323.564		714.326.594.505	74.945.729.059	10,49%
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya		1.419.789.968		408.509.374	1.010.280.594	246,71%
42522	**Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri**		**398.679.943.717**		**737.756.064.394**	**(339.076.120.677)**	**-45,96%**
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri		75.845.274.019		300.888.401.352	(225.043.127.333)	-74,79%
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri		108.480.933.838		129.232.888.295	(20.751.954.457)	-16,06%
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran		139.377.582.957		157.602.960.540	(18.225.377.583)	-11,56%
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri		36.845.959.624		50.513.757.196	(13.667.797.572)	-27,06%
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri		9.297.828.286		13.032.788.858	(3.734 960.572)	-28,66%
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri		28.832.364 983		86.485.268.153	(57.652.903.160)	-66,66%
42523	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi**		**570.140.874.539**		**738.384.144.329**	**(168.243.269.790)**	**-22,79%**
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		245.930.000		453.775.000	(207.845.000)	-45,80%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		2.873.491.000		2.728.044.000	145.447.000	5,33%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara		27.649.955.721		30.675.082.972	(3.025.127.251)	-9,86%
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara		3.208.869.572		3.306.854.563	(97.884.991)	-2,96%
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi		254.641.392		291.420.200	(36.778.808)	-12,62%
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan		92.516.447.012		95.941.361.611	(3.424.914 599)	-3,57%
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas		290.664.650.816		468.135.317.658	(177.470.666.842)	-37,91%
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya		44.774.830.863		70.856.062.920	(26.081.232.057)	-36,81%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		107.952.058.163		65.996.225.405	41.955.832.758	63,57%
42524	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**		**540.405.823.287**		**1.150.028.180.079**	**(609.622.356.792)**	**-53,01%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		253.027.454.018		208.172.274.861	44.855.179.157	21,55%
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		22.582.316.251		66.923.562.763	(44.341.246.512)	-66,26%
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		142.215.926.951		748.286.543.236	(606.070.616.285)	-80,99%
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang		9.925.927.845		5.523.390.703	4.402.537.142	79,71%
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi		4.242.280.237		4.067.467.388	174.812.849	4,30%
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi		58.292.617.206		78.164.268.761	(19.871.651.555)	-25,42%
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang		110.000.000		100.000.000	10.000.000	10,00%
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara		2.171.361.238		4.579.268.922	(2.407.907.684)	-52,58%
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan		47.837.939.541		34.211.403.445	13.626.536.096	39,83%
42525	**Pendapatan Perizinan**		**1.264.212.053.867**		**1.705.887.057.430**	**(441.675.004.363)**	**-25,89%**
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing		1.112.731.807.308		1.562.679.096.600	(449.947.289.292)	-28,79%
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian		17.109.860.000		16.125.200.000	984.660.000	6,11%
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan		26.573.250.089		44.064.625.000	(17.491.374.911)	-39,69%
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan		68.014.250.001		49.776.000.000	18.238.250.001	36,64%
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		9.125.683.055		9.095.993.526	29.689.529	0,33%
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya		30.657.202.614		24.146.142.304	6.511.060.310	26,97%
42526	**Pendapatan Pelayanan Kepolisian I**		**6.597.417.235.000**		**8.165.177.999.800**	**(1.567.760.764.800)**	**-19,20%**
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)		488.739.635.000		662.022.775.000	(173.283.140.000)	-26,17%
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)		611.184.475.000		643.802.560.000	(32.618.085.000)	-5,07%
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		1.999.538.300.000		2.416.492.675.000	(416.954.375.000)	-17,25%
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		1.759.266.825.000		2.426.285.000.000	(667.018.175.000)	-27,49%
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		1.117.272.300.000		1.366.160.314.000	(248.888.014.000)	-18,22%
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi		27.912.200.000		29.462.750.000	(1.550.550.000)	-5,26%
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah		184.751.000.000		169.194.425.000	15.556.575.000	9,19%
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan		408.752.500.000		451.757.500.000	(43.005.000.000)	-9,52%
42527	**Pendapatan Pelayanan Kepolisian II**		**854.384.965.215**		**959.273.623.322**	**(104.888.658.107)**	**-10,93%**
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara		392.500.000		1.354.200.000	(961.700.000)	-71,02%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara		392.100.000		1.099.800.000	(707.700.000)	-64,35%
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian		220.293.045.000		304.062.795.000	(83.769.750.000)	-27,55%
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)		133.169.725.000		220.762.225.000	(87.592.500.000)	-39,68%
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman		24.714.500.000		29.633.095.000	(4.918.595.000)	-16,60%
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital		471.384.595.215		397.718.508.322	73.666.086.893	18,52%
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya		4.038.500.000		4.643.000.000	(604.500.000)	-13,02%
42528	**Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi**		**540.514.592.355**		**606.540.203.948**	**(65.925.611.593)**	**-10,87%**
425281	Pendapatan Akreditasi		28.698.136.022		37.130.370.000	(8.432.233.978)	-22,71%
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		680.406.620		1.275.790.950	(595.382.330)	-46,67%
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian		65.945.023.325		97.941.517.905	(31.996.494.580)	-32,67%
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan		14.524.495.157		24.719.552.313	(10.195.057.156)	-41,24%
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan		45.799.218.209		52.987.983.138	(7.188.764.929)	-13,57%
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum		7.674.872.000		9.799.166.696	(2.124.294.696)	-21,68%
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan		119.606.869.517		122.729.386.536	(3.122.517.019)	-2,54%
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika		191.703.842.000		182.769.738.300	8.934.103.700	4,89%
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya		85.981.727.505		77.186.698.110	(11.204.970.605)	-14,52%
4253	**PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN**		**5.396.887.712.963**		**6.728.386.646.421**	**(1.331.398.933.458)**	**-19,79%**
42531	**Pendapatan Jasa Kesehatan**		**2.297.548.113.551**		**3.007.631.953.650**	**(710.083.840.099)**	**-23,61%**
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).		314.996.579.888		310.473.901.765	4.522.678.123	1,46%
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)		1.509.854.718.999		2.004.913.997.324	(495.059.278.325)	-24,69%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan		331.702.519.829		422.332.391.494	(90.629.871.665)	-21,46%
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan		63.127.644.835		50.478.258.829	12.649.386.006	25,06%
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan		41.585.300.000		186.486.124.238	(144.900.824.238)	-77,70%
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan		36.281.350.000		32.947.280.000	3.334.070.000	10,12%
42532	**Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan**		**195.367.640.022**		**196.358.994.030**	**(991.354.008)**	**-0,50%**
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan		195.367.640.022		196.358.994.030	(991.354.008)	-0,50%
42533	**Pendapatan Jasa Karantina**		**351.362.411.935**		**361.295.658.526**	**(9.933.246.591)**	**-2,75%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan		277.462.493.803		282.423.147.523	(4.960.653.720)	-1,76%
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan		73.899.918.132		78.872.511.003	(4.972.592.871)	-6,30%
42534	**Pendapatan Jasa Agraria**		**1.790.813.098.252**		**2.255.101.568.584**	**(464.288.470.332)**	**-20,59%**
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan		1.790.812.275.252		2.255.050.745.584	(464.238.470.332)	-20,59%
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora		823.000		50.823.000	(50.000.000)	-98,38%
42535	**Pendapatan Jasa Keagamaan**		**761.898.449.203**		**907.898.471.631**	**(146.102.022.428)**	**-16,09%**
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama		748.263.703.259		883.380.971.243	(135.117.267.984)	-15,30%
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya		13.632.745.944		24.617.500.388	(10.984.754.444)	-44,62%
4254	**PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI**		**4.788.763.363.158**		**5.229.029.641.870**	**(440.266.288.712)**	**-8,42%**
42541	**Pendapatan Pendidikan**		**4.205.010.467.015**		**4.234.651.512.314**	**(29.641.045.299)**	**-0,70%**
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan		68.430.767.843		77.814.031.824	(9.383.263.981)	-12,06%
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		3.907.988.972.359		3.880.258.521.192	27.730.451.167	0,71%
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat		54.209.545.906		64.809.654.774	(10.600.108.868)	-16,36%
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya		174.381.180.907		211.769.304.524	(37.388.123.617)	-17,66%
42542	**Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**185.597.786.527**		**471.750.913.878**	**(286.153.127.351)**	**-60,66%**
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan		167.810.164.139		432.209.746.650	(264.399.582.511)	-61,17%
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya		17.787.622.388		39.541.167.228	(21.753.544.840)	-55,01%
42543	**Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek**		**393.225.995.891**		**515.980.531.081**	**(122.754.535.190)**	**-23,79%**
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek		63.663.176.792		96.697.907.922	(33.034.731.130)	-34,16%
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan		180.891.683.722		141.095.689.020	39.795.994.702	28,20%
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika		87.171.998.518		158.700.588.501	(71.528.589.983)	-45,07%
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek		16.221.057.830		16.285.033.806	(63.975.976)	-0,39%
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan		24.603.800.619		29.271.262.669	(4.667.462.050)	-15,95%
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual		4.229.011.805		9.446.517.906	(5.217.506.101)	-55,23%
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya		16.445.266.605		64.483.531.257	(48.038.264.652)	-74,50%
42545	**Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan**		**4.929.103.725**		**8.646.684.597**	**(1.717.580.872)**	**-25,84%**
425451	Pendapatan Museum		765.673.000		3.280.582.500	(2.514.909.500)	-76,66%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya		4.163.430.725		3.366.102.097	797.328.628	23,69%
4255	**PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**26.186.586.049.245**		**25.903.218.006.612**	**2.282.368.042.633**	**8,81%**
42551	**Pendapatan Jasa Transportasi**		**6.053.993.240.597**		**6.965.694.762.838**	**(911.701.522.241)**	**-13,09%**
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		1.136.547.385.000		1.327.042.275.000	(190.494.890.000)	-14,35%
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge		544.520.182.917		754.538.627.463	(210.018.444.546)	-27,83%
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan		2.284.086.549.888		2.377.829.710.302	(93.743.160.414)	-3,94%
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran		573.040.644.803		583.366.693.379	(10.326.048.576)	-1,77%
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan		250.917.198.787		256.654.687.547	(5.737.488.760)	-2,24%
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan		189.352.834.441		334.869.823.037	(145.516.988.596)	-43,45%
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan		401.952.937.112		600.916.462.942	(198.963.525.830)	-33,11%
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi		583.968.621.578		628.949.891.930	(44.981.270.352)	-7,15%
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya		89.606.886.071		101.526.591.238	(11.919.705.167)	-11,74%
42552	**Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika**		**21.894.424.385.636**		**18.767.984.812.439**	**3.126.439.573.197**	**16,66%**
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio		20.706.918.508.536		17.805.970.108.203	3.100.948.400.333	17,61%
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi		1.118.429.585.689		1.098.145.698.318	20.283.887.371	1,85%
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran		57.614.162.420		53.817.359.746	3.796.802.674	7,05%
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos		822.000.000		860.002.500	(38.002.500)	-4,42%
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal		5.289.977.070		4.364.165.031	925.812.039	21,21%
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia		1.528.938.921		1.437.450.524	91.488.397	6,36%
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya		3.821.213.000		3.390.028.117	431.184.883	12,72%
42553	**Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik**		**237.168.423.012**		**169.538.431.335**	**67.629.991.677**	**39,89%**
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI		27.973.661.786		23.325.621.006	4.648.040.780	19,93%
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI		8.750.000		23.650.000	(14.900.000)	-63,00%
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI		185.610.646.053		99.720.388.759	85.890.257.294	86,13%
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI		23.575.365.173		46.468.771.570	(22.893.406.397)	-49,27%
4256	**PENDAPATAN JASA LAINNYA**		**304.133.236.159**		**429.902.216.890**	**(125.768.980.731)**	**-29,26%**
42561	**Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**		**89.463.033.718**		**200.710.655.162**	**(111.247.621.444)**	**-55,43%**

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425611	Pendapatan Wisata Alam		46.626.912.347		163.397.316.441	(116.770.404.094)	-71,46%
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		23.435.819.408		22.813.875.898	621.943.510	2,73%
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya		19.400.301.963		14.499.462.823	4.900.839.140	33,80%
42562	**Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan**		**40.438.401.258**		**30.821.873.691**	**9.616.527.567**	**31,20%**
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan		39.860.456.258		27.586.904.928	12.273.551.330	44,49%
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya		577.945.000		3.234.968.763	(2.657.023.763)	-82,13%
42569	**Pendapatan Jasa Lainnya**		**174.231.801.183**		**198.369.688.037**	**(24.137.886.854)**	**-12,17%**
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan		3.951.942.374		7.061.872.692	(3.109.930.318)	-44,04%
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi		32.362.198.697		43.416.365.465	(11.054.166.768)	-25,46%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya		137.917.660.112		147.891.449.880	(9.973.789.768)	-6,74%
4257	**PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**		**22.980.902.226.353**		**19.333.882.339.344**	**3.647.019.887.009**	**18,86%**
42571	**Pendapatan Bunga**		**1.738.056.334.505**		**1.825.320.700.269**	**(87.264.365.764)**	**-4,78%**
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman		1.414.878.784.678		1.427.160.584.693	(12.281.800.015)	-0,86%
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah				34.297.104.173	(34.297.104.173)	-100,00%
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program		1.169.801			1.169.801	
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan		321.986.818.123		363.779.834.791	(41.793.016.668)	-11,49%
425719	Pendapatan Bunga Lainnya		1.189.561.903		83.176.612	1.106.385.291	1330,16%
42572	**Pendapatan Gain on Bond Redemption**				**5.807.000.000**	**(5.807.000.000)**	**-100,00%**
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang				5.807.000.000	(5.807.000.000)	-100,00%
42573	**Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara**		**10.819.795.285.000**		**8.713.038.583.942**	**2.106.756.711.058**	**24,18%**
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah		4.585.718.321.300		6.467.340.854.900	(1.881.622.533.600)	-29,09%
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah		6.234.076.973.700		2.245.697.729.042	3.988.379.244.658	177,60%
42574	**Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara**		**200.631.019.737**		**118.681.119.410**	**81.949.900.327**	**69,05%**
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur		74.339.065.475		109.490.920.300	(35.151.854.825)	-32,10%
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo		2.019.076.533		9.190.199.110	(7.171.122.577)	-78,03%
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit		124.272.877.729			124.272.877.729	
42575	**Pendapatan dari Selisih Kurs**		**1.843.194.491.548**		**12.607.030.733**	**1.830.587.460.815**	**14520,37%**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN		1.843.093.474.875		12.344.438.960	1.830.749.035.915	14830,56%
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan		101.013.488		262.591.562	(161.578.074)	-61,53%
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D		3.185		211	2.974	1409,48%
42576	**Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening**		**425.899.686.978**		**232.120.267.593**	**193.779.419.285**	**83,48%**
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan		27.246.877		1.196.378	26.050.499	2177,45%
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman		318.415.000		621.867.500	(303.452.500)	-48,80%
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman		52.556.762.832		62.068.077.051	(9.511.314.219)	-15,32%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		151.180.801.451		169.361.376.368	(18.180.574.917)	-10,73%
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening		221.816.460.718		67.750.296	221.748.710.422	327302,94%
42577	**Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara**		**7.357.805.092.258**		**7.736.672.109.436**	**(378.867.017.177)**	**-4,90%**
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum		370.871.747.945		341.764.926.905	29.106.821.040	8,52%
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		784.362.529.745		334.653.594.490	449.708.935.255	134,38%
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia		6.202.570.814.568		7.060.253.588.040	(857.682.773.472)	-12,15%
42578	**Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara**		**565.743.212.949**		**660.546.658.421**	**(94.803.445.472)**	**-14,35%**
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa		1.555.014.720		1.720 573 299	(165.558.579)	-9,62%
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		367.163.631.212		419.520.706.655	(52.357.075.443)	-12,48%
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II		85.706.265.700		75.207.825.916	10.498.439.784	13,96%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian		84.904.706.550		96.652.758.212	(12.648.052.662)	-13,09%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		27.313.594.767		67.444.793.339	(40.131.198.572)	-59,50%
42579	**Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara**		**29.777.093.478**		**29.088.869.541**	**688.223.937**	**2,37%**
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.		15.090.834.156		14.941.008.384	149.825.772	1,00%
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara		2.067.900.643		1.021.552.126	1.046.348 517	102,43%
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga		12.618.358.679		13.126.309.031	(507.950.352)	-3,87%
4258	**PENDAPATAN DENDA**		**503.790.184.112**		**614.389.891.175**	**(110.599.727.063)**	**-18,00%**
42581	**Pendapatan Denda I**		**459.876.608.867**		**417.029.576.247**	**42.847.032.620**	**10,27%**
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		420.418.065.013		372.701.521.461	47.716.543.552	12,80%
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		37.369.898.638		38.563.210.702	(1.193.312.064)	-3,09%

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan		1.313.400.000		387.200.000	926.200.000	239,20%
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA		1.226.586			1.226.586	
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		30.567.703		7.544.393	23.023.310	305,17%
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi		635.131.479		5.013.364.234	(4.378.232.755)	-87,33%
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas		20.401.520		89.629.117	(69.227.597)	-77,24%
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi		87.917.928		267.106.340	(179.188.412)	-67,09%
42582	**Pendapatan Denda II**		**41.609.380.736**		**189.899.072.757**	**(148.289.692.021)**	**-78,09%**
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji		151.449			151.449	
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman		274.478.770		70.201.415	204.277.355	290,99%
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program		923.608.306		1.816.802.234	(893.193.928)	-49,16%
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik		208.298.248		386.907.790	(178.609.542)	-46,16%
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)				3.894.939	(3.894.939)	-100,00%
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III		306.582.825		768.954.214	(460.371.389)	-59,87%
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		39.894.261.138		186.852.312.165	(146.958.051.027)	-78,65%
42583	**Pendapatan Denda III**		**2.304.174.509**		**7.461.242.171**	**(5.157.067.662)**	**-69,12%**
425839	Pendapatan Denda Lainnya		2.304.174.509		7.461.242.171	(5.157.067.662)	-69,12%
4259	**PENDAPATAN LAIN-LAIN**		**18.228.276.401.515**		**15.469.312.249.236**	**2.758.964.152.279**	**17,84%**
42591	**Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I**		**9.563.345.512.882**		**14.879.041.347.105**	**(5.315.695.834.223)**	**-35,73%**
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		119.073.722.482		353.165.642.076	(234.091.919.594)	-66,28%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		1.338.665.346.400		1.648.403.305.946	(309.737.959.546)	-18,79%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		966.387.498.612		1.261.227.358.017	(294.859.859.405)	-23,38%
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu		980.759.311.703		1.178.030.618.466	(197.271.306.763)	-16,75%
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu		28.313.526.967		73.285.930.819	(44.972.403.852)	-61,37%
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		2.854.209.137.424		1.071.160.235.179	1.783.048.902.245	166,46%
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu		11.423.596.898		20.573.663.715	(9.150.067.017)	-44,47%
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu		3.264.533.372.596		9.273.194.592.887	(6.008.661.220.291)	-64,80%
42592	**Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II**		**237.882.685.505**		**308.842.085.674**	**(70.959.400.169)**	**-22,98%**

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL		237.882.685.505		308.842.085.674	(70.959.400.169)	-22,98%
42593	**Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan**		**18.082.294.056**		**24.230.256.247**	**(6.147.962.191)**	**-25,37%**
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS		15.374.604.619		17.114.436.445	(1.739.831.826)	-10,17%
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan		1.947.860.928		6.260.237.939	(4.312.377.011)	-68,89%
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri		602.788.061		631.281.364	(28.493.303)	-4,51%
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara		157.040.448		224.300.499	(67.260.051)	-29,99%
42598	**Pendapatan Lain-Lain I**		**7.948.611.344.000**		**476.204.460**	**7.948.035.139.540**	**1669038,37%**
425982	Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun		7.948.205.994.000			7.948.205.994.000	
425983	Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye		305.350.000		476.204.460	(170.854.460)	-35,88%
42599	**Pendapatan Lain-Lain II**		**460.454.565.072**		**256.722.355.750**	**203.732.209.322**	**79,36%**
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan		110.135.193		795.220.944	(685.085.751)	-86,15%
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		64.886.154.407		5.449.196.082	59.436.958.325	1090,75%
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak		1.042.933.741		171.834.472	871.099.269	506,94%
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN		568.025.000		670.320	567.354.680	84639,38%
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan		25.600		79.508.146	(79.482.546)	-99,97%
425998	Pendapatan dari Retur SP2D		12.986.839.337		10.936.423.836	2.050.415.501	18,75%
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		380.860.451.794		239.289.501.950	141.570.949.844	59,16%
43	**PENDAPATAN HIBAH**	**1.300.000.000.000**	**18.832.815.220.624**	**1448,68%**	**5.497.343.992.921**	**13.335.471.227.703**	**242,58%**
431	**PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**	**1.300.000.000.000**	**18.832.815.220.624**	**1448,68%**	**5.497.343.992.921**	**13.335.471.227.703**	**242,58%**
4311	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**		**16.998.016.624.842**		**3.673.078.332.679**	**13.324.938.291.963**	**362,77%**
43113	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang**		**16.998.016.624.842**		**3.673.078.332.679**	**13.324.938.291.963**	**362,77%**
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan		106.054.090.800		65.693.597.291	40.360.493.509	61,44%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha		136.446.170.086		292.430.943.086	(155.984.773.000)	-53,34%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah		16.677.597.815.474		3.312.864.612.302	13.364.733.203.172	403,42%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya		77.918.548.282		2.089.180.000	75.829.368.282	3629,62%
4312	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**	**1.300.000.000.000**	**1.834.798.595.982**	**141,14%**	**1.824.265.660.242**	**10.532.935.740**	**0,58%**
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	1.300.000.000.000	533.980.884.575	41,07%	591.671.964.284	(57.791.079.709)	-9,77%

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	APBN	Realisasi 2020	% thd APBN	Realisasi 2019	Kenaikan/penurunan	% Kenaikan/ penurunan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	1.300.000.000.000	152.509.083.261	11,73%	284.221.022.174	(131.711.938.913)	-46,34%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral		381.371.801.314		305.016.747.985	76.355.053.329	25,03%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya				2.434.194.125	(2.434.194.125)	-100,00%
43123	**Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang**		**1.300.917.711.407**		**1.232.593.695.958**	**68.324.015.449**	**5,54%**
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan		421.800.000			421.800.000	
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral		490.258.603.112		686.083.404.317	(195.824.801.205)	-28,54%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral		671.422.064.921		514.852.423.425	156.569.641.496	30,41%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya		138.815.243.374		31.657.868.216	107.157.375.158	338,49%
Grand Total		**1.699.948.459.678.000**	**1.647.783.342.188.990**	**96,93%**	**1.960.633.583.585.990**	**(312.850.241.397.003)**	**-15,96%**

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2020

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
	Non Perbankan (Minoritas)	
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	27.072.840.908
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	27.088.902.500
3	PT Socfin Indonesia	29.532.092.400
4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.632
5	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	3
6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	42
7	PT Perkebunan Nusantara IV	4.414.343.300
8	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	129.694
9	PT Jasa Raharja (Persero)	156.000
10	Perum Jaminan Kredit Indonesia	56.554
	Jumlah I	88.108.523.033
II	Pembayaran Dividen Interim	
1	PT Socfin Indonesia	31.835.631.600
	Jumlah II	31.835.631.600
III	Perbankan (Mayoritas)	
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.774.153.468.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.893.567.936.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.307.671.406.731
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12.555.782.009
	Jumlah III	23.987.948.592.740
IV	Non Perbankan (Mayoritas)	
1	PT Pertamina (Persero)	8.500.000.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.950.281.728.753
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	973.500.000.000
4	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	122.023.622.510
5	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	77.249.117.305
6	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	708.218.661.061
7	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	524.815.825.889
8	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	83.958.445.763
9	PT Biofarma (Persero)	71.187.955.348
10	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	60.050.953.594
11	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	297.314.781.801
12	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	30.975.850.789
13	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	4.650.521.000
14	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	107.005.744.428
15	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	33.854.377.955
16	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	16.934.781.205
17	Perum Jasa Tirta II	20.764.222.676

SK No 095032 A

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2020

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
18	Perum Jasa Tirta I	17.669.777.501
19	PT Sucofindo (Persero)	49.337.320.926
20	PT Surveyor Indonesia (Persero)	14.047.751.110
21	PT Kawasan Industri Makassar	1.145.953.248
22	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	73.000.000.000
23	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	11.015.000.000
24	Perum Perhutani	20.594.000.000
25	Kawasan Industri Medan	9.246.913.364
	Jumlah IV	19.778.843.306.226
V	Pembayaran Piutang Sebelum TA 2020	
1	PT Inhutani V	300.000.000
2	PT Bina Karya	70.000.000
3	Perum Perumnas	1.000.000.000
	Jumlah V	1.370.000.000
VI	BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	500.000.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	100.000.000.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	110.827.000.000
	Jumlah VI	710.827.000.000
	JUMLAH I + II + III + IV + V	44.598.933.053.599
PENDAPATAN DARI SURPLUS BANK INDONESIA		21.481.610.487.738
JUMLAH TOTAL		66.080.543.541.337

LAMPIRAN 2
LRA BELANJA
PEMERINTAH PUSAT
TA 2020

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**576.139.182.000**	**800.513.132.000**	**702.440.692.102**	**(98.072.439.898)**	**87,75%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	148.263.800.000	183.427.232.000	164.615.869.638	(18.811.362.362)	89,74%
02	M A J E L I S	427.875.382.000	617.085.900.000	537.824.822.464	(79.261.077.536)	87,16%
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**4.897.999.780.000**	**5.128.671.829.000**	**4.821.602.269.373**	**(307.069.559.627)**	**94,01%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.206.318.477.000	1.280.038.081.000	1.245.675.133.454	(34.362.947.546)	97,32%
02	D E W A N	3.691.681.303.000	3.848.633.748.000	3.575.927.135.919	(272.706.612.081)	92,91%
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**3.457.674.941.000**	**3.599.443.771.000**	**3.439.084.663.084**	**(160.359.107.916)**	**95,54%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.457.674.941.000	3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	(160.359.107.916)	95,54%
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**9.854.906.030.000**	**9.855.005.915.000**	**9.406.446.508.251**	**(448.559.406.749)**	**95,45%**
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	9.266.526.824.000	9.256.025.882.000	8.822.787.974.703	(433.237.907.297)	95,32%
02	KEPANITERAAN	169.033.639.000	170.762.255.000	169.036.146.316	(1.726.108.684)	98,99%
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	138.938.623.000	138.938.623.000	133.486.673.583	(5.451.949.417)	96,08%
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	78.411.619.000	87.283.830.000	86.027.451.650	(1.256.378.350)	98,56%
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA	26.251.651.000	26.251.651.000	24.450.948.675	(1.800.702.325)	93,14%
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN	143.771.338.000	143.771.338.000	141.373.866.706	(2.397.471.294)	98,33%
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	31.972.336.000	31.972.336.000	29.283.446.618	(2.688.889.382)	91,59%
006	**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**	**5.661.907.661.000**	**6.996.809.443.000**	**6.880.109.600.910**	**(116.699.842.090)**	**98,33%**
01	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.661.907.661.000	6.996.809.443.000	6.880.109.600.910	(116.699.842.090)	98,33%
007	**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**	**1.633.673.716.000**	**2.222.461.374.000**	**2.040.634.574.217**	**(181.826.799.783)**	**91,82%**
01	SEKRETARIAT NEGARA	880.788.626.000	1.297.811.921.000	1.214.618.060.391	(83.193.860.609)	93,59%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
03	SEKRETARIAT PRESIDEN	360.993.715.000	437.708.319.000	390.364.174.458	(47.344.144.542)	89,18%
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	157.817.951.000	144.324.099.000	119.076.839.662	(25.247.259.338)	82,51%
05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	23.309.304.000	23.933.985.000	23.831.959.195	(102.025.805)	99,57%
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	59.996.255.000	97.010.396.000	75.804.799.487	(21.205.596.513)	78,14%
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	29.319.615.000	29.103.107.000	28.262.195.188	(840.911.812)	97,11%
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	45.842.457.000	101.412.918.000	100.405.646.847	(1.007.271.153)	99,01%
10	KANTOR STAF PRESIDEN	75.605.793.000	91.156.629.000	88.270.898.989	(2.885.730.011)	96,83%
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**2.471.591.078.000**	**2.778.026.233.000**	**2.746.593.074.849**	**(31.433.158.151)**	**98,87%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	928.023.279.000	979.525.830.000	966.469.629.728	(13.056.200.272)	98,67%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	49.937.754.000	54.780.543.000	54.441.110.808	(339.432.192)	99,38%
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	189.173.691.000	193.629.347.000	193.167.776.060	(461.570.940)	99,76%
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	74.434.546.000	74.434.546.000	73.958.090.929	(476.455.071)	99,36%
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	158.878.714.000	133.524.506.000	129.721.177.720	(3.803.328.280)	97,15%
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	188.010.165.000	202.468.886.000	200.074.540.934	(2.394.345.066)	98,82%
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	63.517.364.000	63.017.364.000	62.699.885.657	(317.478.343)	99,50%
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	539.112.970.000	803.890.983.000	799.761.415.021	(4.129.567.979)	99,49%
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	51.790.866.000	52.590.866.000	52.066.166.073	(524.699.927)	99,00%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	47.862.486.000	46.862.486.000	46.013.421.275	(849.064.725)	98,19%
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	180.849.243.000	173.300.876.000	168.219.860.644	(5.081.015.356)	97,07%
011	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**7.662.459.507.000**	**7.490.563.031.000**	**7.143.103.684.774**	**(347.459.346.226)**	**95,36%**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.666.350.035.000	6.545.338.784.000	6.228.716.672.980	(316.622.111.020)	95,16%
02	DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	46.687.731.000	46.287.731.000	45.218.208.016	(1.069.522.984)	97,69%
03	DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA	43.132.599.000	39.972.599.000	38.648.611.514	(1.323.987.486)	96,69%
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN	39.291.103.000	35.803.151.000	34.066.420.063	(1.736.730.937)	95,15%
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	609.934.363.000	606.701.763.000	603.595.514.952	(3.106.248.048)	99,49%
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	59.220.320.000	54.401.263.000	49.373.377.380	(5.027.885.620)	90,76%
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	30.337.683.000	26.867.683.000	26.730.414.935	(137.268.065)	99,49%
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	118.169.428.000	92.198.812.000	74.703.435.629	(17.495.376.371)	81,02%
09	INSPEKTORAT JENDERAL	25.460.865.000	20.560.865.000	20.327.664.937	(233.200.063)	98,87%
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	23.875.380.000	22.430.380.000	21.723.364.368	(707.015.632)	96,85%
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**	**117.909.050.388.000**	**144.207.914.335.000**	**136.871.429.771.736**	**(7.336.484.563.264)**	**94,91%**
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	18.267.119.850.000	38.440.734.525.000	34.623.722.097.970	(3.817.012.427.030)	90,07%
21	MARKAS BESAR TNI	8.480.227.232.000	10.663.596.732.000	10.372.691.927.117	(290.904.804.883)	97,27%
22	MARKAS BESAR TNI AD	56.810.205.914.000	59.453.809.247.000	56.854.867.280.650	(2.598.941.966.350)	95,63%
23	MARKAS BESAR TNI AL	19.648.245.599.000	20.230.494.775.000	19.782.421.028.668	(448.073.746.332)	97,79%
24	MARKAS BESAR TNI AU	14.703.251.773.000	15.419.279.056.000	15.237.727.437.331	(181.551.618.669)	98,82%
013	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**	**13.151.324.014.000**	**13.316.389.571.000**	**12.399.546.538.086**	**(916.843.032.914)**	**93,11%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.950.268.471.000	3.824.578.224.000	3.793.728.406.003	(30.849.817.997)	99,19%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	40.351.639.000	40.351.639.000	39.241.200.164	(1.110.438.836)	97,25%
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	656.126.286.000	658.150.387.000	455.684.459.855	(202.465.927.145)	69,24%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	5.588.051.879.000	5.668.211.858.000	5.556.703.938.014	(109.507.919.986)	98,07%
06	DITJEN IMIGRASI	2.248.013.429.000	2.287.096.865.000	1.752.315.595.441	(534.781.269.559)	76,62%
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	212.431.838.000	379.609.753.000	352.149.150.377	(27.460.602.623)	92,77%
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.732.211.000	41.732.211.000	40.937.761.219	(794.449.781)	98,10%
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	40.582.351.000	41.851.594.000	40.964.340.210	(887.253.790)	97,88%
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	105.187.810.000	106.552.521.000	103.707.365.689	(2.845.155.311)	97,33%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	37.230.110.000	36.375.008.000	36.004.793.098	(370.214.902)	98,98%
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	231.347.990.000	233.879.511.000	228.109.528.016	(5.769.982.984)	97,53%
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**	**39.025.438.102.000**	**65.720.685.696.000**	**62.083.004.306.573**	**(3.637.681.389.427)**	**94,46%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	19.759.796.843.000	20.250.501.149.000	18.216.701.551.594	(2.033.799.597.406)	89,96%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	87.847.130.000	87.847.130.000	75.220.769.748	(12.626.360.252)	85,63%
03	DITJEN ANGGARAN	122.250.716.000	122.250.716.000	118.364.523.299	(3.886.192.701)	96,82%
04	DITJEN PAJAK	6.543.681.055.000	6.643.681.055.000	6.372.169.760.131	(271.511.294.869)	95,91%
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	3.171.184.516.000	3.596.197.935.000	3.453.257.359.007	(142.940.575.993)	96,03%
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	81.342.606.000	81.342.606.000	71.613.100.067	(9.729.505.933)	88,04%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO	88.818.575.000	93.448.240.000	87.675.978.114	(5.772.261.886)	93,82%
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	7.766.510.841.000	33.405.636.045.000	32.413.176.548.181	(992.459.496.819)	97,03%
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	656.295.969.000	715.572.969.000	657.670.943.049	(57.902.025.951)	91,91%
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	556.549.579.000	533.047.579.000	457.953.218.886	(75.094.360.114)	85,91%
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	103.805.317.000	103.805.317.000	76.978.687.877	(26.826.629.123)	74,16%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
13	LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW	87.354.955.000	87.354.955.000	82.221.866.620	(5.133.088.380)	94,12%
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	**14.049.785.814.000**	**15.886.240.106.000**	**15.188.739.413.432**	**(697.500.692.568)**	**95,61%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.814.543.174.000	1.694.234.641.000	1.583.137.035.101	(111.097.605.899)	93,44%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	79.581.831.000	79.581.831.000	76.171.876.625	(3.409.954.375)	95,72%
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.356.143.498.000	4.765.343.498.000	4.511.862.098.135	(253.481.399.865)	94,68%
04	DITJEN HORTIKULTURA	556.146.411.000	620.481.902.000	578.873.473.965	(41.608.428.035)	93,29%
05	DITJEN PERKEBUNAN	812.670.698.000	1.000.057.871.000	907.956.733.977	(92.101.137.023)	90,79%
06	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.219.759.789.000	1.299.595.278.000	1.253.144.887.704	(46.450.390.296)	96,43%
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	1.932.440.445.000	2.925.084.980.000	2.832.574.253.081	(92.490.726.919)	96,84%
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.457.118.372.000	1.060.400.650.000	1.035.260.364.449	(25.140.285.551)	97,63%
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.379.187.543.000	1.057.850.961.000	1.043.140.666.542	(14.710.294.458)	98,61%
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	475.903.216.000	475.903.216.000	466.931.810.211	(8.971.405.789)	98,11%
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	966.290.837.000	907.725.278.000	899.686.213.642	(8.039.064.358)	99,11%
019	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**	**2.093.175.026.000**	**2.107.801.309.000**	**1.975.729.108.365**	**(132.072.200.635)**	**93,73%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	164.886.421.000	174.092.740.000	162.355.353.266	(11.737.386.734)	93,26%
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	54.098.389.000	54.098.389.000	46.067.117.610	(8.031.271.390)	85,15%
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	66.285.336.000	62.785 336.000	61.334.612.099	(1.450.723.901)	97,69%
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	66.698.469.000	63.698.469.000	60.299.348.982	(3.399.120.018)	94,66%
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	286.846.391.000	324.596.391.000	315.773.566.719	(8.822.824.281)	97,28%
06	INSPEKTORAT JENDERAL	30.111.422.000	30.111.422.000	29.125.573.823	(985.848.177)	96,73%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	568.237.420.000	562.942.220.000	496.187.719.114	(66.754.500.886)	88,14%
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	101.972.213.000	100.472.213.000	94.305.207.014	(6.167.005.986)	93,86%
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	754.038.965.000	735.004.129.000	710.280.609.738	(24.723.519.262)	96,64%
020	**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**6.201.412.633.000**	**6.242.113.848.000**	**5.871.880.036.293**	**(370.233.811.707)**	**94,07%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	409.531.371.000	387.082.446.000	379.908.489.765	(7.173.956.235)	98,15%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	149.061.262.000	120.657.859.000	111.056.568.611	(9.601.290.389)	92,04%
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	1.779.700.589.000	2.013.617.820.000	1.953.482.567.046	(60.135.252.954)	97,01%
05	DITJEN KETENAGALISTRIKAN	133.666.727.000	125.581.146.000	123.746.461.863	(1.834.684.137)	98,54%
06	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA	490.940.242.000	445.992.312.000	441.594.889.959	(4.397.422.041)	99,01%
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	51.734.671.000	49.050.204.000	46.832.553.114	(2.217.650.886)	95,48%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	573.142.750.000	592.968.246.000	503.995.186.169	(88.973.059.831)	85,00%
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	643.416.928.000	608.461.929.000	574.954.612.758	(33.507.316.242)	94,49%
13	BADAN GEOLOGI	814.044.798.000	767.681.551.000	707.585.256.876	(60.096.294.124)	92,17%
14	BPH MIGAS	249.700.000.000	249.700.000.000	223.072.226.266	(26.627.773.734)	89,34%
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	827.196.575.000	803.528.011.000	734.304.353.157	(69.223.657.843)	91,39%
16	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	79.276.720.000	77.792.324.000	71.346.870.709	(6.445.453.291)	91,71%
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	**32.745.701.301.000**	**36.321.164.960.000**	**34.717.825.579.891**	**(1.603.339.380.109)**	**95,59%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	608.078.606.000	597.504.566.000	589.863.661.979	(7.640.904.021)	98,72%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	89.087.483.000	86.587.483.000	85.469.610.455	(1.117.872.545)	98,71%
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	5.664.106.959.000	5.748.848.778.000	5.631.173.929.193	(117.674.848.807)	97,95%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	8.999.716.035.000	9.911.938.562.000	9.513.422.842.201	(398.515.719.799)	95,98%
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	6.120.807.171.000	5.806.575.875.000	5.481.792.247.764	(324.783.627.236)	94,41%
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	7.860.229.196.000	10.944.517.605.000	10.271.105.992.183	(673.411.612.817)	93,85%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	163.660.744.000	157.347.077.000	155.444.975.066	(1.902.101.934)	98,79%
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	3.021.179.217.000	2.840.209.124.000	2.764.482.039.080	(75.727.084.920)	97,33%
13	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	218.835.890.000	227.635.890.000	225.070.281.970	(2.565.608.030)	98,87%
023	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**70.718.123.434.000**	**86.386.047.573.000**	**79.061.797.338.948**	**(7.324.250.234.052)**	**91,52%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	22.081.627.145.000	34.145.468.261.000	30.894.234.132.631	(3.251.234.128.369)	90,48%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	185.402.955.000	185.402.955.000	169.643.631.744	(15.759.323.256)	91,50%
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	5.069.637.405.000	4.812.589.293.000	4.675.871.795.073	(136.717.497.927)	97,16%
05	DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	133.964.454.000	144.673.267.000	140.710.035.493	(3.963.231.507)	97,26%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	683.792.559.000	633.292.559.000	536.219.861.394	(97.072.697.606)	84,67%
13	BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN	416.162.160.000	385.162.160.000	352.864.488.030	(32.297.671.970)	91,61%
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.394.431.152.000	1.327.431.152.000	1.239.607.365.702	(87.823.786.298)	93,38%
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.518.394.435.000	2.236.061.732.000	2.131.732.037.567	(104.329.694.433)	95,33%
17	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	31.617.158.059.000	35.887.814.203.000	32.885.032.852.127	(3.002.781.350.873)	91,63%
18	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI	6.617.553.110.000	6.628.151.991.000	6.035.881.139.187	(592.270.851.813)	91,06%
024	**KEMENTERIAN KESEHATAN**	**78.506.724.870.000**	**107.033.608.465.000**	**102.207.399.746.493**	**(4.826.208.718.507)**	**95,49%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	50.442.594.268.000	51.171.377.446.000	50.240.067.587.738	(931.309.858.262)	98,18%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	84.965.935.000	81.480.999.000	78.736.761.553	(2.744.237.447)	96,63%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
03	DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT	893.160.904.000	912.278.290.000	885.781.937.849	(26.496.352.151)	97,10%
04	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	16.484.082.226.000	37.415.416.049.000	34.474.945.198.042	(2.940.470.850.958)	92,14%
05	DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1.576.337.669.000	4.203.943.210.000	3.838.076.301.658	(365.866.908.342)	91,30%
07	DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	2.792.619.132.000	4.182.277.051.000	4.054.663.877.758	(127.613.173.242)	96,95%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	538.155.166.000	582.506.013.000	523.522.461.686	(58.983.551.314)	89,87%
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	5.694.809.570.000	8.484.329.407.000	8.111.605.620.209	(372.723.786.791)	95,61%
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	**62.411.389.983.000**	**70.570.581.962.000**	**67.984.181.158.634**	**(2.586.400.803.366)**	**96,34%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.937.389.455.000	1.934.744.602.000	1.887.379.372.478	(47.365.229.522)	97,55%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	141.265.446.000	135.213.119.000	133.932.403.883	(1.280.715.117)	99,05%
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5.515.587.545.000	5.570.128.422.000	5.441.390.758.406	(128.737.663.594)	97,69%
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	49.425.476.216.000	57.366.826.574.000	55.302.157.660.838	(2.064.668.913.362)	96,40%
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.704.235.017.000	1.747.440.937.000	1.695.098.286.095	(52.342.650.905)	97,00%
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	843.263.864.000	849.175.849.000	809.088.961.009	(40.086.887.991)	95,28%
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	712.091.838.000	706.064.290.000	681.927.851.222	(24.136.438.778)	96,58%
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	244.310.235.000	239.567.545.000	232.442.299.845	(7.125.245.155)	97,03%
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	1.366.359.265.000	1.410.085.537.000	1.204.214.917.073	(205.870.619.927)	85,40%
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	489.297.220.000	478.597.220.000	465.625.970.900	(12.971.249.100)	97,29%
12	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	32.113.882.000	132.737.867.000	130.922.677.085	(1.815.189.915)	98,63%
026	**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**	**4.479.796.847.000**	**34.885.914.698.000**	**34.246.307.050.046**	**(639.607.647.954)**	**98,17%**
01	SEKRETARIS JENDERAL	261.218.597.000	261.218.597.000	253.063.419.501	(8.155.177.499)	96,88%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
02	INSPEKTUR JENDERAL	58.274.529.000	58.274.529.000	55.965.696.247	(2.308.832.753)	96,04%
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	577.506.190.000	1.087.565.930.000	1.054.546.348.651	(33.019.581.349)	96,96%
05	DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	143.814.024.000	29.991.877.767.000	29.621.251.090.043	(370.626.676.957)	98,76%
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN	167.712.760.000	190.701.535.000	177.078.335.476	(13.623.199.524)	92,86%
11	BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	92.675.186.000	92.675.186.000	91.481.880.892	(1.193.305.108)	98,71%
13	DIRJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	3.178.595.561.000	3.203.601.154.000	2.992.920.279.236	(210.680.874.764)	93,42%
027	**KEMENTERIAN SOSIAL**	**104.440.903.730.000**	**134.171.889.274.000**	**130.288.443.238.820**	**(3.883.446.035.180)**	**97,11%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	340.586.591.000	405.637.271.000	392.155.995.237	(13.481.275.763)	96,68%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	32.550.770.000	32.550.770.000	31.824.447.870	(726.322.130)	97,77%
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	261.757.849.000	5.695.998.226.000	5.685.852.047.219	(10.146.178.781)	99,82%
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	893.764.729.000	895.793.030.000	850.643.474.141	(45.149.555.859)	94,96%
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	42.542.073.615.000	46.216.528.775.000	46.161.541.297.254	(54.987.477.746)	99,88%
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	59.993.150.028.000	80.552.566.002.000	76.808.991.707.799	(3.743.574.294.201)	95,35%
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL	377.020.148.000	372.815.200.000	357.434.269.300	(15.380.930.700)	95,87%
029	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**	**6.779.614.954.000**	**7.658.838.783.000**	**7.196.166.202.928**	**(462.672.580.072)**	**93,96%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	490.113.410.000	479.910.542.000	431.760.909.231	(48.149.632.769)	89,97%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	54.613.724.000	54.613.724.000	50.751.346.088	(3.862.377.912)	92,93%
03	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	235.167.798.000	243.201.686.000	236.682.939.150	(6.518.726.850)	97,32%
04	DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	1.799.350.387.000	2.215.375.908.000	2.129.138.180.338	(86.237.727.662)	96,11%
05	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.659.873.444.000	1.684.998.371.000	1.585.513.048.394	(99.485.322.606)	94,10%

SK No 003663 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	350.007.464.000	447.060.836.000	403.868.152.731	(43.192.683.269)	90,34%
07	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	373.643.107.000	402.726.612.000	372.296.696.051	(30.429.915.949)	92,44%
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	276.286.386.000	285.216.386.000	264.000.609.643	(21.215.776.357)	92,56%
09	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	330.949.570.000	347.153.115.000	310.842.077.462	(36.311.037.538)	89,54%
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	313.665.771.000	313.665.771.000	310.936.183.079	(2.729.587.921)	99,13%
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	247.988.868.000	255.248.067.000	247.789.616.150	(7.458.450.850)	97,08%
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA	261.468.377.000	261.468.377.000	256.162.322.492	(5.306.054.508)	97,97%
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	386.486.648.000	668.199.408.000	596.424.122.119	(71.775.285.881)	89,26%
032	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**4.600.264.778.000**	**5.269.869.632.000**	**4.809.863.593.815**	**(460.006.038.185)**	**91,27%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	381.643.774.000	400.700.274.000	371.774.244.798	(28.926.029.202)	92,78%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	64.704.539.000	68.784.539.000	65.520.750.972	(3.263.788.028)	95,26%
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	469.617.324.000	575.400.303.000	492.002.433.664	(83.397.869.336)	85,51%
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	721.055.687.000	1.018.205.687.000	816.747.196.652	(201.458.490.348)	80,21%
05	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	697.889.085.000	708.278.921.000	678.507.729.219	(29.771.191.781)	95,80%
06	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	161.970.795.000	212.391.107.000	205.412.538.137	(6.978.568.863)	96,71%
07	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	208.287.583.000	411.880.638.000	393.614.623.041	(18.266.014.959)	95,57%
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.406.992.451.000	1.384.789.374.000	1.320.746.519.611	(64.042.854.389)	95,38%
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	488.103.540.000	489.438.789.000	465.537.557.721	(23.901.231.279)	95,12%
033	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**	**75.632.407.614.000**	**107.159.063.172.000**	**100.793.056.240.518**	**(6.366.006.931.482)**	**94,06%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	502.055.390.000	502.055.390.000	447.798.389.551	(54.257.000.449)	89,19%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	111.744.238.000	103.744.238.000	92.401.428.374	(11.342.809.626)	89,07%
04	DITJEN BINA MARGA	25.396.919.107.000	48.450.468.470.000	47.255.031.689.994	(1.195.436.780.006)	97,53%
05	DITJEN CIPTA KARYA	13.774.579.244.000	16.802.855.504.000	15.032.515.354.814	(1.770.340.149.186)	89,46%
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	27.308.236.935.000	31.133.513.384.000	28.870.794.984.318	(2.262.718.399.682)	92,73%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN	6.684.874.257.000	7.917.660.914.000	7.454.299.524.069	(463.361.389.931)	94,15%
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	365.072.414.000	369.425.686.000	308.720.793.558	(60.704.892.442)	83,57%
13	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	610.484.410.000	613.506.738.000	501.552.896.795	(111.953.841.205)	81,75%
14	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	175.877.709.000	205.748.635.000	183.421.123.515	(22.327.511.485)	89,15%
15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	463.788.892.000	416.474.512.000	358.481.236.287	(57.993.275.713)	86,08%
16	DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	238.775.018.000	643.609.701.000	288.038.819.243	(355.570.881.757)	44,75%
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**	**268.970.603.000**	**268.970.603.000**	**254.655.179.652**	**(14.315.423.348)**	**94,68%**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	268.970.603.000	268.970.603.000	254.655.179.652	(14.315.423.348)	94,68%
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**393.334.438.000**	**421.095.548.000**	**406.114.336.588**	**(14.981.211.412)**	**96,44%**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	393.334.438.000	421.095.548.000	406.114.336.588	(14.981.211.412)	96,44%
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**	**232.623.827.000**	**232.623.827.000**	**207.287.358.066**	**(25.336.468.934)**	**89,11%**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	232.623.827.000	232.623.827.000	207.287.358.066	(25.336.468.934)	89,11%
040	**KEMENTERIAN PARIWISATA**	**3.321.757.461.000**	**3.684.440.605.000**	**3.410.271.877.209**	**(274.168.727.791)**	**92,56%**
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	3.321.757.461.000	3.684.440.605.000	3.410.271.877.209	(274.168.727.791)	92,56%
041	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**266.392.551.000**	**266.392.551.000**	**260.130.543.993**	**(6.262.007.007)**	**97,65%**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	266.392.551.000	266.392.551.000	260.130.543.993	(6.262.007.007)	97,65%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
042	**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**	**1.873.258.843.000**	**1.977.563.886.000**	**1.766.292.613.082**	**(211.271.272.918)**	**89,32%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	623.961.813.000	508.876.663.000	364.063.090.771	(144.813.572.229)	71,54%
02	INSPEKTORAT JENDERAL		0	526.336.548	526.336.548	
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN	1.220.221.494.000	1.313.905.930.000	1.278.772.236.725	(35.133.693.275)	97,33%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI	29.075.536.000	154.781.293.000	122.930.949.038	(31.850.343.962)	79,42%
044	**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**649.771.358.000**	**29.474.605.608.000**	**29.256.403.276.678**	**(218.202.331.322)**	**99,26%**
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	649.771.358.000	29.474.605.608.000	29.256.403.276.678	(218.202.331.322)	99,26%
047	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**200.777.485.000**	**203.487.939.000**	**199.479.107.576**	**(4.008.831.424)**	**98,03%**
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.777.485.000	203.487.939.000	199.479.107.576	(4.008.831.424)	98,03%
048	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**224.366.346.000**	**224.366.346.000**	**208.970.613.949**	**(15.395.732.051)**	**93,14%**
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	224.366.346.000	224.366.346.000	208.970.613.949	(15.395.732.051)	93,14%
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**5.210.465.702.000**	**8.321.681.983.000**	**8.267.884.098.765**	**(53.797.884.235)**	**99,35%**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.210.465.702.000	8.321.681.983.000	8.267.884.098.765	(53.797.884.235)	99,35%
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**1.061.943.726.000**	**1.061.943.726.000**	**1.021.890.641.538**	**(40.053.084.462)**	**96,23%**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.061.943.726.000	1.061.943.726.000	1.021.890.641.538	(40.053.084.462)	96,23%
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**46.285.830.000**	**49.051.252.000**	**45.884.008.144**	**(3.167.243.856)**	**93,54%**
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	46.285.830.000	49.051.252.000	45.884.008.144	(3.167.243.856)	93,54%
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**4.641.097.503.000**	**4.649.035.198.000**	**4.265.978.556.609**	**(383.056.641.391)**	**91,76%**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	4.641.097.503.000	4.649.035.198.000	4.265.978.556.609	(383.056.641.391)	91,76%
055	**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**	**1.188.267.498.000**	**1.217.757.708.000**	**1.116.861.179.149**	**(100.896.528.851)**	**91,71%**

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
01	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.188.267.498.000	1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	(100.896.528.851)	91,71%
056	**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**	**8.180.542.799.000**	**8.269.860.586.000**	**6.925.656.132.044**	**(1.344.004.453.956)**	**83,75%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	7.489.561.873.000	7.613.634.997.000	6.370.094.600.296	(1.243.540.396.704)	83,67%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	19.606.400.000	19.606.400.000	18.793.510.117	(812.889.883)	95,85%
03	DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	180.712.521.000	232.595.929.000	213.412.761.553	(19.183.167.447)	91,75%
04	DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN	289.357.477.000	201.018.732.000	147.631.717.296	(53.387.014.704)	73,44%
05	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN	21.703.735.000	21.703.735.000	18.499.579.057	(3.204.155.943)	85,24%
06	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA	20.948.607.000	20.948.607.000	19.961.711.236	(986.895.764)	95,29%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH	13.229.627.000	13.229.627.000	12.542.774.424	(686.852.576)	94,81%
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN	128.971.857.000	130.471.857.000	111.200.384.889	(19.271.472.111)	85,23%
09	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA,PEMANFAATAN RUANG DAN	16.450.702.000	16.450.702.000	13.519.093.176	(2.931.608.824)	82,18%
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**454.777.211.000**	**454.777.211.000**	**439.399.016.449**	**(15.378.194.551)**	**96,62%**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	454.777.211.000	454.777.211.000	439.399.016.449	(15.378.194.551)	96,62%
059	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**5.078.010.147.000**	**8.093.071.658.000**	**7.945.022.266.785**	**(148.049.391.215)**	**98,17%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	212.943.347.000	580.175.844.000	568.596.741.373	(11.579.102.627)	98,00%
02	INSPEKTORAT JENDERAL	25.788.863.000	29.394.817.000	28.955.943.458	(438.873.542)	98,51%
03	DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	665.163.535.000	698.710.991.000	673.815.474.327	(24.895.516.673)	96,44%
04	DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	164.877.563.000	394.777.455.000	360.335.097.901	(34.442.357.099)	91,28%
05	DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	275.006.277.000	282.676.766.000	278.503.914.235	(4.172.851.765)	98,52%
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	371.833.476.000	304.801.530.000	271.407.492.196	(33.394.037.804)	89,04%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
07	DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	191.639.929.000	272.133.310.000	263.572.277.703	(8.561.032.297)	96,85%
08	BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI)	3.170.757.157.000	5.530.400.945.000	5.499.835.325.592	(30.565.619.408)	99,45%
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**92.619.921.082.000**	**105.481.989.493.000**	**100.373.548.208.183**	**(5.108.441.284.817)**	**95,16%**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	92.619.921.082.000	105.481.989.493.000	100.373.548.208.183	(5.108.441.284.817)	95,16%
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**1.544.407.583.000**	**1.544.827.210.000**	**1.459.523.487.684**	**(85.303.722.316)**	**94,48%**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.544.407.583.000	1.544.827.210.000	1.459.523.487.684	(85.303.722.316)	94,48%
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**189.431.030.000**	**189.431.030.000**	**176.265.110.244**	**(13.165.919.756)**	**93,05%**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	189.431.030.000	189.431.030.000	176.265.110.244	(13.165.919.756)	93,05%
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**439.503.802.000**	**524.406.706.000**	**512.081.055.659**	**(12.325.650.341)**	**97,65%**
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	439.503.802.000	524.406.706.000	512.081.055.659	(12.325.650.341)	97,65%
068	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**1.628.341.024.000**	**1.650.244.863.000**	**1.554.150.015.593**	**(96.094.847.407)**	**94,18%**
01	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.628.341.024.000	1.650.244.863.000	1.554.150.015.593	(96.094.847.407)	94,18%
067	**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**	**2.376.218.926.000**	**2.564.755.594.000**	**2.451.244.317.401**	**(113.511.276.599)**	**95,57%**
02	INSPEKTORAT JENDERAL	27.901.857.000	28.364.144.000	28.084.867.912	(279.276.088)	99,02%
03	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.603.456.615.000	1.791.993.283.000	1.719.516.501.715	(72.476.781.285)	95,96%
04	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	46.868.603.000	46.868.603.000	46.648.742.969	(219.860.031)	99,53%
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU	38.196.530.000	38.196.530.000	37.684.472.748	(512.057.252)	98,66%
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	42.619.958.000	44.557.252.000	44.189.329.550	(367.922.450)	99,17%
07	DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	128.783.704.000	128.783.704.000	126.316.051.722	(2.467.652.278)	98,08%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	143.150.949.000	142.688.662.000	139.815.936.052	(2.872.725.948)	97,99%
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA INFORMASI	170.663.339.000	170.663.339.000	144.334.803.380	(26.328.535.620)	84,57%
10	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA,PDT, DAN TRANSMIGRASI	174.577.371.000	172.640.077.000	164.653.611.353	(7.986.465.647)	95,37%
068	**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**3.172.994.896.000**	**3.209.531.284.000**	**2.913.825.985.027**	**(295.705.298.973)**	**90,79%**
01	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.172.994.896.000	3.209.531.284.000	2.913.825.985.027	(295.705.298.973)	90,79%
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**100.312.787.000**	**105.534.794.000**	**95.988.673.522**	**(9.546.120.478)**	**90,95%**
01	KOMNAS HAM	100.312.787.000	105.534.794.000	95.988.673.522	(9.546.120.478)	90,95%
075	**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**	**2.157.797.896.000**	**2.241.579.204.000**	**2.076.026.802.297**	**(165.552.401.703)**	**92,61%**
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.157.797.896.000	2.241.579.204.000	2.076.026.802.297	(165.552.401.703)	92,61%
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**1.861.968.253.000**	**15.328.654.212.000**	**11.205.978.044.122**	**(4.122.676.167.878)**	**73,10%**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.861.968.253.000	15.328.654.212.000	11.205.978.044.122	(4.122.676.167.878)	73,10%
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**187.763.424.000**	**222.388.424.000**	**219.575.877.394**	**(2.812.546.606)**	**98,74%**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	187.763.424.000	222.388.424.000	219.575.877.394	(2.812.546.606)	98,74%
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**243.960.199.000**	**243.960.199.000**	**208.269.277.734**	**(35.690.921.266)**	**85,37%**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	243.960.199.000	243.960.199.000	208.269.277.734	(35.690.921.266)	85,37%
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**1.526.513.481.000**	**1.503.374.248.000**	**1.185.612.287.850**	**(317.761.960.150)**	**78,86%**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.526.513.481.000	1.503.374.248.000	1.185.612.287.850	(317.761.960.150)	78,86%
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**672.909.868.000**	**669.407.836.000**	**604.365.612.359**	**(65.042.223.641)**	**90,28%**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	672.909.868.000	669.407.836.000	604.365.612.359	(65.042.223.641)	90,28%
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**1.476.455.616.000**	**1.497.762.242.000**	**1.350.475.623.929**	**(147.286.618.071)**	**90,17%**

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.476.455.616.000	1.497.762.242.000	1.350.475.623.929	(147.286.618.071)	90,17%
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**680.331.450.000**	**682.841.245.000**	**547.953.322.590**	**(134.887.922.410)**	**80,25%**
01	LAPAN	680.331.450.000	682.841.245.000	547.953.322.590	(134.887.922.410)	80,25%
083	**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**	**541.450.843.000**	**537.093.455.000**	**430.275.105.242**	**(106.818.349.758)**	**80,11%**
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	541.450.843.000	537.093.455.000	430.275.105.242	(106.818.349.758)	80,11%
084	**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**	**249.142.555.000**	**246.863.909.000**	**245.229.035.228**	**(1.634.873.772)**	**99,34%**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	249.142.555.000	246.863.909.000	245.229.035.228	(1.634.873.772)	99,34%
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**106.658.189.000**	**106.658.189.000**	**90.920.939.678**	**(15.737.249.322)**	**85,25%**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	106.658.189.000	106.658.189.000	90.920.939.678	(15.737.249.322)	85,25%
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**305.044.603.000**	**308.155.040.000**	**285.718.264.130**	**(22.436.775.870)**	**92,72%**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	305.044.603.000	308.155.040.000	285.718.264.130	(22.436.775.870)	92,72%
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**165.418.004.000**	**165.418.004.000**	**156.632.536.842**	**(8.785.467.158)**	**94,69%**
01	ARSIP NASIONAL	165.418.004.000	165.418.004.000	156.632.536.842	(8.785.467.158)	94,69%
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**700.644.563.000**	**701.558.963.000**	**595.325.743.616**	**(106.233.219.384)**	**84,86%**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	700.644.563.000	701.558.963.000	595.325.743.616	(106.233.219.384)	84,86%
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.412.618.193.000**	**1.546.287.963.000**	**1.485.298.168.205**	**(60.989.794.795)**	**96,06%**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.412.618.193.000	1.546.287.963.000	1.485.298.168.205	(60.989.794.795)	96,06%
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	**2.919.115.968.000**	**3.477.064.284.000**	**3.244.652.636.286**	**(232.411.647.714)**	**93,32%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	949.083.007.000	949.083.007.000	901.458.497.877	(47.624.509.123)	94,98%
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.211.768.948.000	1.769.181.122.000	1.664.709.372.071	(104.471.749.929)	94,09%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	125.678.711.000	125.678.711.000	107.261.648.588	(18.417.062.412)	85,35%
04	DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	104.784.020.000	104.784.020.000	93.393.211.487	(11.390.808.513)	89,13%
05	INSPEKTORAT JENDERAL	39.795.164.000	39.795.164.000	34.901.987.527	(4.893.176.473)	87,70%
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	170.390.443.000	170.390.443.000	155.039.932.332	(15.350.510.668)	90,99%
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	59.075.529.000	59.075.529.000	52.456.941.457	(6.618.587.543)	88,80%
08	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	33.056.420.000	33.056.420.000	27.041.404.651	(6.015.015.349)	81,80%
09	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	225.483.726.000	226.019.868.000	208.389.640.296	(17.630.227.704)	92,20%
092	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**1.173.661.690.000**	**1.175.868.688.000**	**1.114.645.758.311**	**(61.222.929.689)**	**94,79%**
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.173.661.690.000	1.175.868.688.000	1.114.645.758.311	(61.222.929.689)	94,79%
093	**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**	**859.975.256.000**	**920.280.999.000**	**873.027.305.489**	**(47.253.693.511)**	**94,87%**
01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	859.975.256.000	920.280.999.000	873.027.305.489	(47.253.693.511)	94,87%
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**899.729.904.000**	**988.275.448.000**	**946.617.204.727**	**(41.658.243.273)**	**95,78%**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	229.796.088.000	243.485.988.000	229.945.752.260	(13.540.235.740)	94,44%
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	669.933.816.000	744.789.460.000	716.671.452.467	(28.118.007.533)	96,22%
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**80.196.352.000**	**81.731.950.000**	**80.476.068.463**	**(1.255.881.537)**	**98,46%**
01	KOMISI YUDISIAL RI	80.196.352.000	81.731.950.000	80.476.068.463	(1.255.881.537)	98,46%
103	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.926.128.774.000**	**12.713.492.686.000**	**11.757.551.961.151**	**(955.940.724.849)**	**92,48%**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.926.128.774.000	12.713.492.686.000	11.757.551.961.151	(955.940.724.849)	92,48%
104	**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**	**260.635.351.000**	**260.635.351.000**	**256.027.656.165**	**(4.607.694.835)**	**98,23%**
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	260.635.351.000	260.635.351.000	256.027.656.165	(4.607.694.835)	98,23%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
106	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**	**129.575.851.000**	**136.677.585.000**	**133.403.172.724**	**(3.274.412.276)**	**97,60%**
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	129.575.851.000	136.677.585.000	133.403.172.724	(3.274.412.276)	97,60%
107	**BADAN SAR NASIONAL**	**1.583.163.924.000**	**1.585.594.299.000**	**1.499.824.232.321**	**(85.770.066.679)**	**94,59%**
01	BADAN SAR NASIONAL	1.583.163.924.000	1.585.594.299.000	1.499.824.232.321	(85.770.066.679)	94,59%
108	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**	**103.087.521.000**	**114.053.530.000**	**113.228.643.932**	**(824.886.068)**	**99,28%**
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	103.087.521.000	114.053.530.000	113.228.643.932	(824.886.068)	99,28%
109	**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU**	**156.866.492.000**	**156.866.492.000**	**68.951.937.748**	**(87.914.554.252)**	**43,96%**
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	156.866.492.000	156.866.492.000	68.951.937.748	(87.914.554.252)	43,96%
110	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**	**137.839.359.000**	**137.839.359.000**	**135.599.123.417**	**(2.240.235.583)**	**98,37%**
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	137.839.359.000	137.839.359.000	135.599.123.417	(2.240.235.583)	98,37%
111	**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**	**213.002.832.000**	**213.002.832.000**	**203.875.475.187**	**(9.127.356.813)**	**95,71%**
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	213.002.832.000	213.002.832.000	203.875.475.187	(9.127.356.813)	95,71%
112	**BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**	**2.014.195.179.000**	**2.198.101.902.000**	**1.693.496.603.566**	**(504.605.298.434)**	**77,04%**
01	BPKPB BATAM	2.014.195.179.000	2.198.101.902.000	1.693.496.603.566	(504.605.298.434)	77,04%
113	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**	**440.818.091.000**	**443.579.218.000**	**428.334.421.623**	**(15.244.796.377)**	**96,56%**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	440.818.091.000	443.579.218.000	428.334.421.623	(15.244.796.377)	96,56%
114	**SEKRETARIAT KABINET**	**250.941.188.000**	**250.941.188.000**	**231.593.164.881**	**(19.348.023.119)**	**92,29%**
01	SEKRETARIAT KABINET	250.941.188.000	250.941.188.000	231.593.164.881	(19.348.023.119)	92,29%
115	**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**	**1.573.240.603.000**	**5.231.437.386.000**	**4.582.402.434.860**	**(649.034.951.140)**	**87,59%**
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.573.240.603.000	5.231.437.386.000	4.582.402.434.860	(649.034.951.140)	87,59%

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	PAGU APBN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) PAGU DIPA	%
116	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**	**1.075.756.201.000**	**1.076.120.781.000**	**946.139.242.824**	**(129.981.538.176)**	**87,92%**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.075.756.201.000	1.076.120.781.000	946.139.242.824	(129.981.538.176)	87,92%
117	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**	**996.062.655.000**	**1.284.385.142.000**	**1.201.587.777.606**	**(82.797.364.394)**	**93,55%**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	996.062.655.000	1.284.385.142.000	1.201.587.777.606	(82.797.364.394)	93,55%
118	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**	**110.143.715.000**	**110.143.715.000**	**71.730.782.618**	**(38.412.932.382)**	**65,12%**
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	110.143.715.000	110.143.715.000	71.730.782.618	(38.412.932.382)	65,12%
119	**BADAN KEAMANAN LAUT**	**442.605.503.000**	**565.473.073.000**	**544.469.245.208**	**(21.003.827.792)**	**96,29%**
01	BADAN KEAMANAN LAUT	442.605.503.000	565.473.073.000	544.469.245.208	(21.003.827.792)	96,29%
120	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**	**259.596.417.000**	**259.596.417.000**	**244.408.582.366**	**(15.187.834.634)**	**94,15%**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	259.596.417.000	259.596.417.000	244.408.582.366	(15.187.834.634)	94,15%
122	**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**	**160.050.978.000**	**160.050.978.000**	**147.442.970.121**	**(12.608.007.879)**	**92,12%**
01	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	160.050.978.000	160.050.978.000	147.442.970.121	(12.608.007.879)	92,12%
999	**BENDAHARA UMUM NEGARA**	**1.138.859.899.591.000**	**849.064.820.474.000**	**773.333.585.931.730**	**(75.731.234.542.270)**	**91,08%**
01	PENGELOLAAN UTANG	338.784.308.000.000	337.855.506.000.000	314.088.112.296.556	(23.767.393.703.444)	92,97%
02	PENGELOLAAN HIBAH	5.072.136.588.000	8.946.027.133.000	6.275.907.926.228	(2.670.119.206.772)	70,15%
07	PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI	192.023.203.430.000	241.026.561.739.000	196.231.455.278.876	(44.795.106.460.124)	81,41%
08	PENGELOLAAN BELANJA LAIN	463.810.531.965.000	122.210.091.802.000	119.438.781.034.004	(2.771.310.767.996)	97,73%
99	PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS	139.169.719.608.000	139.026.633.800.000	137.299.329.398.066	(1.727.304.403.934)	98,76%
XXX	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA SIAP DAN SAI			-6.371		
JUMLAH		**1.975.240.206.353.000**	**1.968.558.902.231.000**	**1.832.950.921.019.900**	**142.289.285.326.733**	**92,60%**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	96 783 487 649	568 259 495 709	36 357 708 749						702 448 692 102
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	975 753 289 672	3 516 390 126 430	329 468 853 271						4 821 662 268 373
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1 981 586 733 636	1 213 615 416 985	263 882 512 463						3 459 084 663 084
005	MAHKAMAH AGUNG	6 715 009 279 141	2 044 407 831 008	647 029 396 102						9 406 446 506 251
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4 140 477 834 840	1 474 777 995 387	1 264 853 770 683						6 880 109 600 910
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	425 166 111 055	1 462 673 859 379	152 794 604 783						2 040 634 574 217
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	712 869 891 512	1 879 523 513 652	154 199 669 685						2 746 593 074 849
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3 603 815 040 559	2 774 717 527 101	764 571 117 114						7 143 103 684 774
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	49 686 234 009 716	43 279 428 232 336	44 905 767 529 689						136 871 429 771 736
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	6 474 614 295 030	5 004 314 364 126	920 617 874 930						12 399 546 536 886
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	19 940 855 982 585	40 483 804 106 968	1 658 344 217 020						62 083 004 306 573
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2 289 121 687 344	12 269 003 400 659	621 614 325 229						15 188 739 413 432
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	658 944 763 614	1 136 628 925 649	179 155 418 102						1 976 729 108 365
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	816 213 772 108	3 115 227 788 999	1 940 438 475 186						5 871 880 036 293
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3 446 103 121 152	12 570 252 618 909	18 701 469 639 830						34 717 825 579 891
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24 252 244 406 323	33 110 580 911 847	5 520 413 112 022				16 178 558 908 756		79 061 797 338 948
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5 010 576 630 437	43 720 797 191 892	4 851 079 008 164				48 624 944 866 090		102 207 399 746 493
025	KEMENTERIAN AGAMA	38 211 897 062 155	21 380 734 953 589	5 380 799 886 006				2 010 749 574 882		67 984 181 156 634
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	386 745 975 233	33 278 696 783 101	580 864 311 713						34 246 307 068 045
027	KEMENTERIAN SOSIAL	445 566 309 665	5 215 424 069 046	247 360 930 337				124 380 091 809 552		130 288 443 238 920
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1 786 863 943 993	4 895 393 714 560	512 906 544 375						7 195 164 202 928
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 713 484 863 225	2 786 436 267 846	307 942 442 744						4 808 863 573 815
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2 603 844 176 503	30 632 382 972 375	67 558 829 991 640						100 793 059 240 518
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	54 631 303 285	188 062 760 110	11 961 116 277						254 655 179 652

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	97 072 256 965	295 346 903 008	13 696 176 615						486 114.336.568
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	54 888.191 884	143 863 893 077	8 735 283 095						207 287.368.056
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	292 892 527 342	2 639 331 173 611	478 048 176 258						3.410.271.877.209
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	57 640 218 705	97 614.016 866	104 876 308 432						260 130.543 993
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	117 096 921 231	1 544 390 875 210	104 804 816 541						1.766.292.613.062
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	101 270 101 843	28.139 302 310 273	16 830 884 562						28.256.483.276.678
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47 412 373.226	148.873 576 014	3 193.158 336						199.479.107 576
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	78 999.636 664	110 925 757 586	18 045 219 699						208.970.613.949
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	382 285 227 994	5 427 138 880.771	2 458 459 990 000						8 267.884.098.765
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	171 635 089 508	207.745 805 262	642 509 746 770						1.021.890.641.539
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	24 739 083 239	21.104 516 805	40.408 000						45.884.088.144
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2 024 719 411 218	2 120 308 074 748	120 951.070 843						4 265.978.556 809
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	149 321 536 269	884.565 670 476	82 993 972 404						1.116.881 179.149
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	2 141 035 765.805	4 418 925 393 452	365 695 002 987						6.925.656.132.044
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	116 968 769 840	288 827 837 664	53 601 408 745						439.389.916.449
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	482 346.101 685	7 089 738 956 299	372 937 206 801						7.945.022.266.785
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	49 201 263.271 349	27 582.309 486 287	23 589 675 350 542						100.373.548.208.183
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	597 113 534 161	711 595 721.070	150 814.232 463						1.459.523 487 694
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	68 591 058 958	87 238 745 201	20 435 306 085						176 265.110.244
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	129 469 640 263	351.728.489 654	30 882 525 842						512.081.655.659
068	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	457 635.890 906	864 317 957 969	222 196.076 716						1.554.150 015 593
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	253 454 101 379	2 151 823 109 760	45 967 106.262						2 451.244.317 401

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Belanja Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1 969 063 527 951	864 037 492 269	80 724 984 807						2.913.826.995.027
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	36 184 977.778	56 321 383 061	3 482 312 683						95.988 673 522
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	674.042 832 797	756 384 359 657	645 599 609 843						2.076.026.802.297
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1 236 985 942 677	9 888 791.935.705	80 200 105 740						11.205.978.044.122
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	52 140 478 954	149 606 351 656	17 829 046 884						219 576.877.394
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	111 710 028 261	51 117 245 930	45 442 003 543						208 269.277.734
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	587 466 929 134	172 468 368 091	425 857.989 625						1.185.812.287.850
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	371.442 098 379	187.225 600 387	45 696 913.593						604 365.612.359
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	454 612 881 202	510 333.126.775	395 529 815 952						1.350.475.823.929
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	176 792 256 912	121.837 739 047	247 323 326 631						547.953.322.590
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	80 132 250 826	122 205 948 050	227 936.906 366						430 275.105 242
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	67 642 567 708	82 652 892 250	94 733 575 270						245.229.035.228
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	55 278 409.612	32 994 703 770	2 647 826 396						90.920.939.678
088	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	143.012 407 710	112 712.390 123	29 993 466 297						285.718.264 130
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93 716 986 297	56.082 281 205	4 833 267.340						156.632.536.842
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	288 246 157 774	258.381 290.483	38 698 295.359						595.325.743.616
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	929 092 822 278	430 413 348 691	125 791 988.236						1.485.298.160.205
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	480 018 386 347	2.485 335 194 701	299 299 065 238						3.244.652.636.286
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	112 924 443.049	980 736 876 635	20 984 436 627						1.114.645.758.311
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	609.284.332.078	217 712 922 349	46.030 051 082						873 027.305.489
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	324 485 092 838	602 237.360 809	19.894 761 080						946 617.206 727
100	KOMISI YUDISIAL RI	35 104 113.536	44 581 142 547	790 812 380						80.476.068.463
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	71 248 910 205	338.591 539.842	14.089 362 085				11 335 624.149.016		11.757.561.961 151



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	108 608 446 276	144 953 710 544	2 464 498 943						256 027 655 763
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	43 358 477 106	81 119 599 067	8 925 096 551						133 403 172 724
107	BADAN SAR NASIONAL	403 879 101 376	663 731 124 547	432 214 006 398						1 499 824 232 321
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	40 384 869 250	67 509 560 837	5 334 193 845						113 228 643 932
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	9 293 579 100	57 754 778 093	1 903 580 555						68 951 937 748
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	72 845 981 497	60 386 719 089	2 597 442 831						135 830 123 417
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	30 239 901 220	167 565 023 972	6 070 549 995						203 875 475 187
112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM		1 088 555 272 232	594 941 331 334						1 683 496 603 566
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	29 991 744 397	392 104 075 318	8 237 701 808						426 334 421 523
114	SEKRETARIAT KABINET	158 767 267 165	73 130 038 326	1 695 859 400						231 593 164 891
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	384 123 184 491	4 149 805 455 412	48 473 794 957						4 582 402 434 860
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	510 346 852 331	314 129 006 992	121 869 384 501						946 138 242 824
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	575 965 858 150	497 213 007 088	128 406 912 368						1 201 587 777 606
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		34 788 609 307	36 942 173 311						71 730 782 618
119	BADAN KEAMANAN LAUT	63 862 816 101	302 534 693 125	188 071 746 982						544 469 245 208
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	50 866 358 648	169 332 045 697	24 210 176 821						244 408 582 366
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	46 187 355 212	92 217 890 773	9 037 724 136						147 442 970 121
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	135 564 022 333 491	1 138 999 577 538		314 068 112 296 556	186 231 455 278 876	6 275 907 926 228		120 035 189 519 041	773 333 585 931 730
	JUMLAH BELANJA K/L (SAI)	360 532 228 592 708	422 338 225 902 708	190 919 832 381 883	314 068 112 296 556	186 231 455 278 876	6 275 907 926 228	282 529 988 428 286	120 035 189 519 041	1 832 950 921 619 308
	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA SIAP DAN SAI	(2 151)	(4 221)	1						(6 371)
	JUMLAH BELANJA (SIAP)	360 532 228 590 618	422 338 225 898 487	190 919 832 381 884	314 068 112 296 556	186 231 455 278 876	6 275 907 926 228	282 529 988 428 286	120 035 189 519 041	1 832 950 921 619 308

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Satker BLU	Rumpun	Audit KAP		Keterangan
					Ya	Tidak	
1	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan Surabaya	Kesehatan	√		
2	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo-Jakarta	Kesehatan	√		
3	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Fatmawati Jakarta	Kesehatan	√		
4	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Pelamar Sekolahaban Jakarta	Kesehatan	√		
5	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	Kesehatan	√		
6	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin Bandung	Kesehatan	√		
7	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Marzoeki Mahdi Bogor	Kesehatan	√		
8	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang	Kesehatan	√		
9	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten	Kesehatan	√		
10	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta	Kesehatan	√		
11	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	Kesehatan	√		
12	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr M Djamil Padang	Kesehatan	√		
13	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Moh Hoesin Palembang	Kesehatan	√		
14	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Kesehatan	√		
15	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	Kesehatan	√		
16	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Sanglah Denpasar	Kesehatan	√		
17	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum H Adam Malik Medan	Kesehatan	√		
18	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Prof Dr R Kandou Manado	Kesehatan	√		
19	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar	Kesehatan			
20	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AU dr. Hardjolukito Yogyakarta	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
21	022	Kementerian Perhubungan	Balai Kesehatan Penerbangan	Kesehatan	√		
22	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Stroke Nasional, Bk Tinggi	Kesehatan	√		
23	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kusta Dr Tadjuddin Chalid Makassar	Kesehatan	√		
24	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	Kesehatan	√		
25	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	Kesehatan	√		
26	024	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	Kesehatan	√		
27	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jiwa Dr Soeharto Heerdjan Jakarta	Kesehatan	√		
28	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Paru Dr Rotinsulu Bandung	Kesehatan	√		
29	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	Kesehatan	√		
30	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Paru Goesnawan Partowidigdo, Cisarua Bogor	Kesehatan	√		
31	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang	Kesehatan	√		
32	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jiwa Dr Soeroyo Magelang	Kesehatan	√		
33	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Paru Dr Ario Wirawan, Salatiga	Kesehatan	√		
34	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Orthopedi Prof Dr R SoehaRumah Sakito-Solo	Kesehatan	√		
35	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wl. Lawang	Kesehatan	√		
36	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang	Kesehatan	√		
37	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Ketergantungan Obat , Jakarta	Kesehatan	√		
38	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso Jakarta	Kesehatan	√		
39	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita Jakarta	Kesehatan	√		
40	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta	Kesehatan	√		
41	024	Kementerian Kesehatan	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar	Kesehatan	√		
42	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta	Kesehatan	√		
43	024	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	Kesehatan	√		
44	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
45	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD Tk II Putri Hijau Medan	Kesehatan		√	Belum penunjukan KAP
46	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD Tk III Dustira Cimahi	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
47	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD Tk III Ciremai Cirebon	Kesehatan	√		
48	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD Tk III dr. Soepraoen Malang	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
49	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit TNI AD Tk III Pelamonia Makassar	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
50	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk .IV Pontianak	Kesehatan	√		
51	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Medan	Kesehatan	√		
52	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Sesampena Lemadokat pelni	Kesehatan	√		
53	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Brawijo Kelapa Dua	Kesehatan	√		
54	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Bandung	Kesehatan	√		
55	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kediri	Kesehatan	√		
56	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Biyonegoro	Kesehatan	√		
57	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso	Kesehatan	√		
58	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Mappang Oedang Makassar	Kesehatan	√		
59	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto	Kesehatan	√		
60	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara PusdikkabharaTk IV Porong	Kesehatan	√		
61	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa Sukabumi	Kesehatan	√		
62	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi	Kesehatan	√		
63	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Jambi	Kesehatan	√		
64	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang	Kesehatan	√		
65	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Semarang	Kesehatan	√		
66	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II H S. Samsoen Mertoyoso Surabaya	Kesehatan	√		
67	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tejata Pekda Bali	Kesehatan	√		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.C

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Satker BLU	Rumpun	Audit KAP	Keterangan
68	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Mataram	Kesehatan	√	
69	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palangkaraya	Kesehatan	√	
70	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Sabhapapan	Kesehatan	√	
71	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Kendari	Kesehatan	√	
72	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Manado	Kesehatan	√	
73	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Padang	Kesehatan	√	
74	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru	Kesehatan	√	
75	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu	Kesehatan	√	
76	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Indramayu	Kesehatan	√	
77	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk	Kesehatan	√	
78	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Tulungagung	Kesehatan	√	
79	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Lumajang	Kesehatan	√	
80	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Kupang	Kesehatan	√	
81	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin	Kesehatan	√	
82	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Palu	Kesehatan	√	
83	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura	Kesehatan	√	
84	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta	Kesehatan	√	
85	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek	Kesehatan	√	
86	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Nastiti Ibrata Baru	Kesehatan	√	
87	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Jakarta	Pendidikan	√	
88	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Semarang	Pendidikan	√	
89	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Jenderal Soedirman	Pendidikan	√	
90	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Yogyakarta	Pendidikan	√	
91	022	Kementerian Perhubungan	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	Pendidikan	√	
92	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Surabaya	Pendidikan	√	
93	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Brawijaya Malang	Pendidikan	√	
94	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Malang	Pendidikan	√	
95	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Syiah Kuala Aceh	Pendidikan	√	
96	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Medan	Pendidikan	√	
97	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Andalas	Pendidikan	√	
98	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pendidikan	√	
99	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Pendidikan		Proses penunjukan KAP
100	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Jember	Pendidikan	√	
101	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Sriwijaya	Pendidikan	√	
102	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Lampung	Pendidikan	√	
103	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Tanjung Pura	Pendidikan	√	
104	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Mulawarman Samarinda	Pendidikan		Proses penunjukan KAP
105	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Sam Ratulangi	Pendidikan	√	
106	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Gorontalo	Pendidikan	√	
107	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendidikan		Proses penunjukan KAP
108	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Pattimura, Maluku	Pendidikan	√	
109	022	Kementerian Perhubungan	Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya	Pendidikan	√	
110	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Surabaya	Pendidikan	√	
111	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Nusa Cendana	Pendidikan	√	
112	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Bengkulu	Pendidikan	√	
113	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Halu Oleo	Pendidikan	√	
114	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Riau	Pendidikan	√	
115	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Pendidikan		Proses penunjukan KAP
116	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendidikan	√	Proses Revisi DIPA
117	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	Pendidikan	√	Proses penunjukan KAP
118	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Pendidikan	√	

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Satker BLU	Rumpun	Audit KAP		Keterangan
119	022	Kementerian Perhubungan	Politeknik Penerbangan Surabaya	Pendidikan	√		
120	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pendidikan	√		
121	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Pendidikan	√		
122	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	Pendidikan	√		
123	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pendidikan	√		
124	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendidikan	√		
125	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Pendidikan	√		
126	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Malang	Pendidikan	√		
127	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Surakarta	Pendidikan	√		
128	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Pendidikan	√		
129	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	Pendidikan	√		
130	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Pendidikan		√	Proses penunjukan KAP
131	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin	Pendidikan	√		
132	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Pontianak	Pendidikan	√		
133	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Malang	Pendidikan	√		
134	015	Kementerian Keuangan	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Pendidikan		√	Belum penunjukan KAP
135	019	Kementerian Perindustrian	Politeknik AKA Bogor	Pendidikan	√		
136	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PPSDM Migas Cepu	Pendidikan	√		
137	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS	Pendidikan	√		
138	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PPSDM Geologi, Mineral dan Batubara	Pendidikan		√	Belum penunjukan KAP
139	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PPSDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Pendidikan	√		
140	022	Kementerian Perhubungan	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	Pendidikan	√		
141	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Udayana	Pendidikan	√		
142	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Terbuka	Pendidikan	√		
143	022	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	Pendidikan	√		
144	022	Kementerian Perhubungan	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	Pendidikan	√		
145	022	Kementerian Perhubungan	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Pendidikan	√		
146	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta	Pendidikan	√		
147	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Bengkulu	Pendidikan	√		
148	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Terbuka	Pendidikan	√		
149	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Serang	Pendidikan	√		
150	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Makassar	Pendidikan	√		
151	022	Kementerian Perhubungan	Politeknik Transportasi Sungai ,Danau dan Penyeberangan Palembang	Pendidikan	√		
152	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pendidikan	√		
153	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Politeknik Negeri Malang	Pendidikan	√		
154	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang	Pendidikan	√		
155	022	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug	Pendidikan	√		
156	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura	Pendidikan	√		
157	022	Kementerian Perhubungan	Akademi Pertanahan Indonesia Madiun	Pendidikan	√		
158	022	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	Pendidikan	√		
159	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali	Pendidikan	√		
160	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug	Pendidikan	√		
161	022	Kementerian Perhubungan	Politeknik Pelayaran Banten	Pendidikan	√		
162	022	Kementerian Perhubungan	Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi	Pendidikan	√		
163	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Medan	Pendidikan	√		
164	025	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Islam Bengkulu	Pendidikan		√	Proses penunjukan KAP
165	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	Pendidikan	√		
166	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Jakarta II	Pendidikan	√		
167	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Jakarta III	Pendidikan	√		
168	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Bandung	Pendidikan	√		
169	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Semarang	Pendidikan	√		
170	022	Kementerian Perhubungan	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan	Pendidikan	√		
171	022	Kementerian Perhubungan	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar	Pendidikan	√		
172	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang	Pendidikan	√		
173	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Makassar	Pendidikan	√		
174	020	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Padang	Pendidikan	√		
175	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Pendidikan Ganesha	Pendidikan	√		
176	015	Kementerian Keuangan	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Pengelola Dana	√		

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Satker BLU	Bungan	Audit KAP		Keterangan
177	015	Kementerian Keuangan	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Pengelola Dana	√		
178	015	Kementerian Keuangan	Pusat Investasi Pemerintah	Pengelola Dana	√		
179	029	Kementerian Kehutanan	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	Pengelola Dana	√		
180	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Pengelola Dana	√		
181	039	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Pusat Pengelolaan Dana Pemberdayaan Perumahan	Pengelola Dana	√		
182	044	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pengelola Dana	√		
183	059	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Pengelola Dana	√		
184	007	Kementerian Sekretariat Negara	Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno	Kawasan		√	Proses penunjukan KAP
185	007	Kementerian Sekretariat Negara	Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran	Kawasan		√	Proses penunjukan KAP
186	015	Kementerian Keuangan	Lembaga Manajemen Aset Negara	Barang Jasa Lainnya		√	Proses penunjukan KAP (gagal lelang)
187	092	Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan	Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Koperasi	Barang Jasa Lainnya		√	Proses penunjukan KAP
188	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Kawasan		√	Belum ditetapkan KAP, sedang diaudit BPK (Bagian Anggaran tersendiri)
189	113	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	Kawasan		√	Belum ditetapkan KAP, sedang diaudit BPK (Bagian Anggaran tersendiri
190	018	Kementerian Pertanian	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	Barang Jasa Lainnya	√		
191	018	Kementerian Pertanian	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Barang Jasa Lainnya		√	Proses penunjukan KAP
192	019	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Industri Agro	Barang Jasa Lainnya	√		
193	019	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Kaca dan Barang Teknik	Barang Jasa Lainnya	√		
194	019	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	Barang Jasa Lainnya	√		
195	019	Kementerian Perindustrian	Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung	Barang Jasa Lainnya	√		
196	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Barang Jasa Lainnya	√		
197	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Barang Jasa Lainnya	√		
198	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Barang Jasa Lainnya	√		
199	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Barang Jasa Lainnya	√		
200	022	Kementerian Perhubungan	Bandar Udara Juwata Tarakan	Barang Jasa Lainnya	√		
201	022	Kementerian Perhubungan	Bandara Djalaluddin Gorontalo	Barang Jasa Lainnya		√	Belum ditetapkan KAP
202	022	Kementerian Perhubungan	Bandara Mutiara-SIS Al Jufri Palu	Barang Jasa Lainnya	√		
203	022	Kementerian Perhubungan	Bandar Udara Kuhmarau di Tanjung Redeb	Barang Jasa Lainnya	√		
204	022	Kementerian Perhubungan	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Barang Jasa Lainnya		√	Proses penunjukan KAP
205	042	Kementerian Riset Dan Teknologi	Pusat Pengajian (PTEK Jakarta	Barang Jasa Lainnya	√		
206	044	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Barang Jasa Lainnya	√		
207	081	Badan Penghajian Dan Penerapan Teknologi	BPPT Enjiering Jakarta	Barang Jasa Lainnya		√	Proses penunjukan KAP
208	025	Kementerian Agama	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	Pendidikan	√		
209	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Pendidikan	√		
210	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Ambon	Kesehatan	√		
211	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung	Kesehatan	√		
212	025	Kementerian Agama	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Barang Jasa Lainnya		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
213	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk II Udayana	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
214	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk II Kartika Husada	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
215	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit AD Tk IV dr. Bratanata Unang	Kesehatan		√	Belum penunjukan KAP
216	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit AD Tk II dr. M. Salamun Bandung	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
217	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit AD Tk II dr. Soedjono Magelang	Kesehatan	√		
218	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit AD Tk II Bhayangkara Purwokerto	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
219	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Universitas Negeri Makassar	Pendidikan	√		
220	040	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Kawasan		√	Belum ditetapkan KAP
221	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur	Pendidikan		√	Belum penunjukan KAP
222	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Denpasar	Pendidikan	√		
223	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Manado	Pendidikan	√		
224	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Tasikmalaya	Pendidikan	√		
225	012	Kementerian Pertahanan	RS TNI AD Tk II Prof. dr. J. A. Latumenten Ambon	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
226	012	Kementerian Pertahanan	RS TNI AD Tk II Robert Wolter Monginsidi Manado	Kesehatan		√	Proses penunjukan KAP
227	012	Kementerian Pertahanan	RS TNI AU DR. Esnawan Antariksa	Kesehatan	√		
228	024	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Kupang	Pendidikan		√	Belum penunjukan KAP
229	015	Kementerian Keuangan	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Pengelola Dana		√	LK 2020 hasil audited BLU PSH dalam pendampingan BPKP dan Ijen Konsultan
230	015	Kementerian Keuangan	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	Pengelola Dana		√	BLU Baru ditetapkan

DAFTAR BADAN LAYANAN UMUM
Per 31 Desember 2020

No	Kode BA	Kementerian	Nama Satker BLU	Rumpun	Audit KAP		Keterangan
231	022	Kementerian Perhubungan	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Barang Jasa Lainnya	√		
232	018	Kementerian Pertanian	Balai Besar Inseminasi Buatan Lembang	Barang Jasa Lainnya	√		
233	025	Kementerian Agama	nstitut Agama Islam Negeri Tulungagung	Pendidikan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
234	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Jniversitas Khairun	Pendidikan	√		
235	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk II dr. Hardjanto Kesdam V/Mlw	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
236	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk IV Guntur Kesdam III/Slw	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
237	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk.II Rahayan Moerdoko Kesdam Jaya	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
238	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk.IV Sahak Kesdam III/Slw	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
239	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk II dr. RK Gani Kesdam IM/Sw	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
240	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk II Banda Aceh Kesdam IM	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
241	012	Kementerian Pertahanan	Rumah Sakit Tk II Marthen Indey Kesdam XVII/Cen	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
242	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh	Kesehatan	√		
243	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Jniversitas Jember	Pendidikan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020
244	022	Kementerian Perhubungan	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	Kesehatan		√	Baru ditetapkan sebagai BLU 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
Kementerian Dalam Negeri																								
1	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX78CA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	19.839.853	14.747.160	215.247.630.189	-	11.301.360.378	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Cipta Karya (KemenPUPR)	**BPK**
2	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	IPDMIP	21256000	1Z83Y0PA	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	500.000.000,00	56.644.000,00	97.252.115,87	1.615.163.140.369	-	22.283.087.218	78.388.065	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen	**BPK**
					21257000	11DDKS1A	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	100.000.000,00	11.356.000,00	19.497.122,87	323.808.208.250		4.462.392.143	15.715.254						
3	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NAHP	20426000	1HG72SWA	30 November 2017	24 Januari 2018	28 Februari 2022	USD	450.000.000,00	131.310.800,00	86.027.995,00	1.249.807.104.790	-	18.100.000.000	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KemenPUPR	**BPK**
4	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NUDP	20436000	1PF7SCLA	15 November 2019	25 November 2019	31 Desember 2024	USD	49.600.000,00	-	2.562.500,00	37.825.062.500	-	5.772.806.723	65.150.000	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Sumber Daya Air, KemenPUPR	**BPK**
5	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NUWSP	20432000	1CPUK3GA	02 Agustus 2018	08 Agustus 2018	31 Desember 2022	USD	100.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	144.540.500.000	-	14.964.049.398		-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Penbiayaan Perumahan, KemenPUPR	**BPK**
6	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	P3PD/Village Service Delivery	20439000	1CZ6CF2A	30 Januari 2020	19 Februari 2020	31 Desember 2024	USD	300.000.000,00	-	5.170.000,00	73.233.050.000	-	850.976.500	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Cipta Karya (KemenPUPR)	**BPK**
7	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	PAMSIMAS III	20418000	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2021	USD	300.000.000,00	195.250.000,00	77.900.000,00	1.137.245.200.000	-	2.755.898.943		-	-	-	-	-		**BPKP**
8	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	AIIB & IBRD	SIMURP	20430000	1NF3PM6A	25 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,42	5.000.000,00	73.590.000.000	-	7.945.367.875		-	-	-	-	-		**BPK**
					20600004	1HS4NF8A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,41	5.000.000,00	72.785.000.000	-	7.945.367.875		-	-	-	-	-		**BPK**
	Total														-	**96.381.307.054**	**159.253.319**	-	-	-	-	-		-
	Kementerian Pertahanan																							
9	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Assault Helicopter	28609300	1YAEBN9A	27 November 2019	08 April 2020	27 Februari 2022	USD	156.398.376,15	-	66.100.302,90	982.904.557.917,84		-	982.904.557.917	-		982.904.557.917				-
10	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Procurement of UAV	28609200	1T7QZ4PA	15 November 2019	20 Maret 2020	15 Oktober 2021	USD	93.499.997,45	-	32.999.999,10	527.889.985.603,00		-	527.889.985.602	-		527.889.985.602				-
11	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	BBVA	MLM 2ND PHASE	23770700	1EQSSDPA	30 Maret 2016	30 Maret 2016	30 April 2020	USD	15.287.250,00	14.388.000,00	899.250,00	13.998.633.742,50		-	13.998.633.742	-		13.998.633.742				-
					23770800	14UPJC8A	30 Maret 2016	30 Maret 2016	30 April 2020	USD	27.212.750,00	25.612.000,00	1.600.750,00	24.918.891.257,50		-	104.727.974.772	-		104.727.974.772				-
12	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	40MM CANNON TWIN BARREL	23582000	1JJKXGXA	22 Desember 2015	22 Juni 2018	30 September 2020	EUR	9.732.500,00	5.725.000,00	1.717.500,00	27.366.249.975,00		-	27.366.249.975	-		27.366.249.975				-
13	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Meriam Kaliber 30 MM	23589000	1WLVADRA	25 Oktober 2017	13 Juli 2018	31 Oktober 2020	EUR	19.346.850,00	8.819.887,50	3.507.210,66	80.310.163.870,12		-	80.310.163.869	-		80.310.163.869				-
14	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Meriam Kaliber 40 MM	23590000	142FXVJA	25 Oktober 2017	13 Juli 2018	31 Oktober 2020	EUR	24.184.200,00	8.958.200,00	2.045.225,18	33.030.509.370,51		-	33.030.509.370	-		33.030.509.370				-
15	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Torpedo A244S Mod. 3	23585000	1SDVQT1A	10 Maret 2017	13 Juli 2018	31 Maret 2021	EUR	4.110.557,50	967.190,00	1.450.785,00	25.142.263.636,35		25.142.263.636	-	-		-				-
16	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	BBVAIT	Torpedo Black Shark	23591000	18GWZABA	25 Oktober 2017	13 Juli 2018	28 Februari 2021	EUR	18.893.927,27	7.779.852,41	2.222.814,97	39.268.916.104,51		39.268.916.104	-	-		-				-
17	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	BNP PARIBAS, PARIS	PENGADAAN AWR AWSS	23583000	1P4XZ2YA	07 September 2016	30 Mei 2017	31 Desember 2019	USD	4.152.250,00	4.152.249,99	-	-		-	17.646.177.438	-		17.646.177.438				-
18	LK PLN 10	Pinjaman Luar Negeri	BNP PARIBAS, PARIS	Pengadaan PSU LPKE TA 2016	28608100	17PRJ1UA	29 Desember 2017	05 November 2018	29 Juni 2021	CHF	101.946.786,00	59.968.698,00	35.981.217,67	580.506.255.356,74		-	580.506.255.356	-		580.506.255.356				-
19	LK PLN 11	Pinjaman Luar Negeri	BRI-CAYMAN ISLAND	SIMULATOR SUKHOI	24097008	1UENV33A	25 Januari 2017	25 Januari 2017	31 Desember 2020	USD	38.160.750,00	17.120.000,00	21.040.750,00	304.158.703.000,00		-	304.158.703.000	-		304.158.703.000				-
20	LK PLN 12	Pinjaman Luar Negeri	COMMERZBANK	MINE COUNTER	22146000	12F66MBA	25 November 2019	28 Agustus 2020	25 November 2023	EUR	152.721.115,00	-	35.934.380,00	623.324.223.668,40		-	623.324.223.668	-		623.324.223.668				-
21	LK PLN 13	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	155MM Gun Howitzer	23588000	1GQ1HVJA	06 September 2017	30 April 2018	07 Desember 2020	EUR	100.533.750,00	24.300.117,32	68.804.552,67	1.149.064.465.429,79		-	1.149.064.465.426	-		1.149.064.465.426				-
22	LK PLN 14	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	HELI ANGKUT BERAT	23587002	1KT7ZLMA	15 November 2019	31 Maret 2020	15 Maret 2024	EUR	243.908.150,85	-	68.617.787,86	1.163.850.203.622,91		-	1.163.850.203.622	-		1.163.850.203.622				-
23	LK PLN 15	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	PENGADAAN RUDAL TNI AD	23586000	1YQYPA9A	22 Mei 2017	19 September 2017	28 Februari 2021	USD	170.000.000,00	81.033.512,02	75.003.133,14	1.104.606.178.198,18		1.104.606.178.196	-	-		-				-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
24	LK PLN 16	Pinjaman Luar Negeri	CREDIT AGRICOLE CIB	UPGRADE FCS EXOCET	23587000	140PDHPA	08 Oktober 2018	27 Mei 2019	08 Juni 2023	EUR	35.214.565,00	-	12.428.670,00	200.633.347.645,95		-	200.633.347.645	-		200.633.347.645				-
25	LK PLN 17	Pinjaman Luar Negeri	CZECH EXPORT BANK	Amphibious Bridging and Ferry	22901001	1QW5JMNA	29 September 2017	29 September 2017	29 Maret 2021	USD	130.474.830,00	56.499.105,94	66.457.693,16	988.336.928.044,74		-	988.336.988.395	-		988.336.988.395				-
26	LK PLN 18	Pinjaman Luar Negeri	ERSTE BANK, VIENNA	Gatot Subroto Hospital (APFA)	23859000	1GCCNUCA	02 Oktober 2019	07 Januari 2020	02 April 2020	EUR	20.250.000,00	-	20.250.000,00	315.457.942.500,00		-	315.457.942.500	-		315.457.942.500				-
27	LK PLN 19	Pinjaman Luar Negeri	ERSTE BANK, VIENNA	Gatot Subroto Hospital (ECFA)	23860000	1G5OJW7A	02 Oktober 2019	27 Maret 2020	27 Maret 2023	EUR	114.750.000,00	-	37.289.309,00	679.838.450.533,77		-	679.838.450.533	-		679.838.450.533				-
28	LK PLN 20	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK KOREA	KAPAL SELAM DIESEL ELEKTRIK	28845000	40206401	06 Juli 2012	06 Juli 2012	31 Desember 2020	USD	917.999.150,00	900.213.333,33	17.785.816,67	251.598.162.613,82		-	748.035.877.366	-		748.035.877.366				-
29	LK PLN 21	Pinjaman Luar Negeri	ING BANK AMSTERDAM	2SHIPSET FFBNW PKR VESSEL10514	22569000	1FESR85A	14 Desember 2016	14 Juni 2017	08 Maret 2021	EUR	166.961.250,00	137.497.500,00	14.731.875,00	229.363.901.100,00		-	229.363.901.099	-		229.363.901.099				-
30	LK PLN 22	Pinjaman Luar Negeri	PT BNI TOKYO BRANCH	PROC.OF MISSILE MLRS AVIB/AST	28226000	1WGFUXVA	02 November 2018	02 November 2018	02 November 2020	USD	18.700.000,00	17.444.200,00	1.255.800,00	17.754.560.400,00		17.754.560.400	-	-		-				-
31	LK PLN 23	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI CAYMAN IS	PROCUREMENT OF RADAR PASSIVE	24097013	1E7ZAEXA	20 November 2019	19 Maret 2020	20 November 2021	USD	34.849.150,00	-	24.599.400,00	382.295.216.499,00		-	382.295.216.499	-		382.295.216.499				-
32	LK PLN 24	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI CAYMAN IS	ROCKET AND AVRMD AVFCU	24097009	1JWHPTXA	20 September 2017	20 April 2018	31 Desember 2020	USD	321.300.000,00	216.909.482,26	104.390.517,74	1.465.320.107.217,44		-	1.465.320.107.217	-		1.465.320.107.217				-
33	LK PLN 25	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-HONG KONG	Overhaul KRI Cakra-401	28747000	144PPR5A	29 November 2017	24 Juli 2018	29 Juni 2021	USD	34.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	81.912.000.000,00		-	81.912.000.000	-		81.912.000.000				-
34	LK PLN 26	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-SINGAPORE	UPGRADE RETROFIT C130 2009	28591000	40230201	17 Juli 2012	17 Oktober 2012	28 Februari 2020	USD	54.162.498,25	52.483.593,58	1.678.904,67	23.897.529.072,78		-	23.897.529.072	-		23.897.529.072				-
35	LK PLN 27	Pinjaman Luar Negeri	UBS, ZURICH	PENGADAAN PERALATAN SANDI	23780500	15CE1RCA	05 April 2019	06 November 2019	05 April 2021	CHF	25.390.380,60	11.584.814,40	11.244.814,40	181.137.767.451,26		-	181.137.767.451	-		181.137.767.451				-
36	LK PLN 28	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTR	ILS CORVETTE CLASS	28607100	1SR8AMNA	06 Desember 2016	20 Desember 2017	15 September 2020	EUR	19.141.207,77	16.665.805,66	2.475.402,11	43.218.416.748,81		-	43.218.416.748	-		43.218.416.748				-
37	LK PLN 29	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTR	MEDICAL EQUIP DODY SARJOTO MKS	23857000	13P18LTA	10 Desember 2018	08 April 2019	08 Oktober 2020	EUR	12.500.000,00	11.742.250,00	757.750,00	13.333.072.345,00		-	27.514.455.311	-		27.514.455.311				-
38	LK PLN 30	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTR	MEDICAL EQUIP WAHYU SLAMET	23858000	1LDCOAKA	10 Desember 2018	12 April 2019	12 Januari 2021	EUR	12.000.000,00	7.539.229,32	4.460.770,68	77.217.285.993,86		-	77.217.285.993	-		77.217.285.993				-
39	LK PLN 31	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTR	Putri Hijau Hospital	23862000	1LL3PDHA	30 Juni 2020	16 Oktober 2020	16 Oktober 2021	EUR	8.000.000,00	-	2.200.203,66	38.078.388.892,12		-	38.078.388.892	-		38.078.388.892				-
40	LK PLN 32	Pinjaman Luar Negeri	EKSPORTKREDITT AS	MEDIUM RANGE MISSILE	23819000	1HT9CCSA	21 Juni 2017	21 Juni 2017	01 Januari 2021	USD	101.660.000,00	92.049.935,00	9.610.065,00	136.165.010.985,00			136.165.010.984,00			136.165.010.984,00				-
41	LK PLN 33	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	PROC. OF INFANTRY VEHICLE	28752000	1K27S3AA	08 April 2020	28 September 2020	08 April 2023	USD	69.699.840,20	-	16.399.962,40	234.224.262.996,80			234.224.262.996,00			234.224.262.996,00				-
	Total														-	**1.186.771.918.336**	**11.441.425.052.458**	-	-	**11.441.425.052.458**	-	-		
	Kementerian Pertanian																							
42	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX78CA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000,00	19.839.852,64	14.747.160,27	215.247.630.189,36	-	7.408.108.052	54.000.000	-	-	-	-	-		**BPK**
43	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	AIIB	SIMURP	20600004	1HS4NF9A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,41	5.000.000,00	72.785.000.000,00	-	8.529.677.859	-	-	-	-	-	-		**BPK**
44	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	SIMURP	20430000	1NF3PM6A	25 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000,00	5.988.873,42	5.000.000,00	73.590.000.000,00	-	8.529.677.859	-	-	-	-	-	-		**BPK**
45	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	IPDMIP-IFAD	20918000	1116F8FA	13 Februari 2017	13 Februari 2017	30 September 2023	EUR	93.150.000,00	8.993.928,61	3.588.151,97	57.279.778.771,00	-	36.530.691.589	-	-	-	-	-	-		**BPKP**
46	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	READSI	20819000	191SRJYA	08 Januari 2018	08 Januari 2018	30 September 2023	USD	39.885.000,00	2.500.000,00	9.755.000,00	140.468.745.000,00	-	18.156.299.359	350.417.287	-	-	-	-	-		**BPK**
47	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	UPLANDs	20821000	1J275XUA	23 Desember 2019	23 Desember 2019	30 Juni 2025	EUR	44.850.000,00	-	300.000,00	4.936.329.000,00	-	1.378.059.127	364.537.000	-	-	-	-	-		**BPKP**
48	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	YOUTH ENTREPRENEURSHIP (YESS)	20820000	1DYTXR1A	17 Juni 2019	17 Juni 2019	31 Desember 2025	USD	55.300.000,00	500.000,00	3.500.000,00	47.925.500.000,00	-	23.136.137.938	9.034.313.056	-	-	-	-	-		**BPK**
	Total														-	**103.668.651.783**	**9.803.267.343**							
	Kementerian Perhubungan																							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date		Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
49	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB	EARR LOAN 2 TRANS INFRA	21266000	156H3E5A	30 September 2019	04 November 2019	30 September 2023	USD	109.750.000,00	-	1.012.705,04	14.390.751.296,00	-	14,390.751.296	-	-	-	-	-	-		BPK
50	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	JICA	EIS JKT MRT EAST WEST PHASE I	27769000	1LZT4FLA	04 Desember 2015	31 Maret 2016	31 Maret 2022	JPY	1.919.000.000,00	-	256.053.147,00	35.021.366.247,44	-	35.021.366.247	-	-	-	-	-	-		-
51	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	JICA	PATIMBAN PORT DEV. PROJECT (I)	27777000	1AVH2LAA	15 November 2017	13 Maret 2018	13 Maret 2026	JPY	118.906.000.000,00	37.369.061.798,00	23.412.082.259,00	3.210.844.180.882,89	-	2.702.441.056.550	-	-	-	-	-	-		-
	Total															**2.751.853.174.093**								
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan																							
52	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	AKSI	21263000	175D7J1A	17 Desember 2018	08 April 2019	30 Juni 2024	USD	200.000.000,00	2.142.000,00	3.519.360,30	50.103.530.000,00	-	58.798.380.714	-	-	-	-	-	-		BPK
53	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	IDB	4in1 HE	20999014	1YJJ8PSA	19 Mei 2016	06 November 2016	09 Juni 2021	USD	13.870.000,00	7.923.519,18	1.362.774,02	19.814.360.427,00	-	31.637.288.512	-	-	-	-	-	-		BPKP
					20999015	1ZPWV5NA	19 Mei 2016	12 November 2018	10 Desember 2022	USD	162.630.000,00	72.795.092,48	30.141.763,28	436.469.325.380,00	-	-	436.469.325.380	-	-	-	-	-		BPKP
54	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IDB	SUPPORT TO HIGHER EDUCATION	20999009	10879501	02 Januari 2014	14 April 2014	30 Juni 2021	USD	174.010.000,00	148.590.344,73	5.562.468,51	77.133.395.765,00	-	2.747.105.200	74.386.290.565	-	-	-	-	-		KAP
55	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	JICA	DEV. OF WORLD CLASS UNIV. UGM	27776000	1FAHSUWA	15 November 2017	13 Maret 2018	13 Maret 2025	JPY	8.309.000.000,00	1.122.294.873,00	1.718.102.691,00	235.245.337.406,68	-	235.245.337.405	-	-	-	-	-	-		-
56	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	KfW	Hasanuddin University Hospital	23594000	17T39EMA	01 November 2017	31 Agustus 2018	15 November 2022	EUR	30.000.000,00	1.871.283,64	5.777.959,22	99.881.006.918,63	-	99.881.006.916	-	-	-	-	-	-		-
57	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	SFD	DEV. OF EDUC. IN SEVEN UNIV.	27838000	21685701	12 Maret 2014	15 September 2014	30 Maret 2021	SAR	131.250.000,00	99.558.456,27	11.640.223,92	42.629.373.900,00	-	883.765.700	41.745.608.200	-	-	-	-	-		-
	Total														-	**429.192.884.447**	**552.601.224.145**	-	-	-	-	-		
	Kementerian Kesehatan																							
58	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	I-SPHERE	20429000	1B4ND8ZA	17 Juli 2018	09 Oktober 2018	30 April 2024	USD	150.000.000,00	37.500.000,00	11.797.500,00	166.144.192.500,00	-	-	152.398.319.248	-	-	-	-	-		BPK
	Total														-	-	**152.398.319.248**	-	-	-	-	-		
	Kementerian Agama																							
59	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	REALEDPRO	20437000	1NV2OU4A	15 November 2019	26 November 2019	31 Desember 2024	USD	250.000.000	-	8.300.000	115.531.700.000	-	55.948.641.950	2.079.607.650	-	-	-	-	-		BPK
60	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	IDB	4 in 1	20999003	10863301	16 Februari 2013	18 Mei 2013	18 Desember 2020	USD	123.750.000	54.158.082	48.576.958	711.449.779.201	-	15.823.984.000	695.625.809.250	-	-	-	-	-		BPKP
	Total														-	**71.772.625.950**	**697.705.416.900**							
	Kementerian Ketenagakerjaan																							
61	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	UNICREDIT BANK AUSTR	Maritime VTC Medan	23861000	17ZBTNNA	13 Desember 2019	21 Februari 2020	30 April 2023	EUR	12.400.000	-	3.100.000	52.295.840.600	-	-	52.295.840.600	-	-	-	-	-		-
	Total														-	-	**52.295.840.600**	-	-	-	-	-		
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																							
62	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	**ADB**	EARR LOAN 1 PUBLIC WORKS	21265000	17D37YEA	30 September 2019	04 November 2019	30 September 2023	USD	188.000.000	-	18.901.610	279.169.099.514	-	-	244.490.587.162	-	-	-	-	-		BPK
63	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	**ADB-OF**	ENGINEERING SERVICES PROJECT	21254000	1F1NDHGA	28 November 2016	21 Desember 2016	29 April 2022	USD	148.200.000	14.910.774	20.446.834	284.674.630.015	-	43.689.953.154	250.506.615.680	-	-	-	-	-		BPK
64	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	**ADB-OF**	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX78CA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	19.839.853	14.747.160	215.247.630.189	-	68.483.800	161.204.518.414	-	-	-	-	-		BPK
65	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	**ADB-OF**	IPDMIP	21256000	11DDKS1A	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	100.000.000	11.356.000	19.497.123	323.808.208.250	-	25.647.885.527	79.664.295.661	-	-	-	-	-		BPK
66	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	**ADB-OF**		21257000	1Z83Y0PA	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	500.000.000	56.644.000	97.252.116	1.615.163.140.369	-	127.512.988.275	416.662.761.345	-	-	-	-	-		BPK
67	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	**ADB-OF**	METRO SANITATION MAN & HEALTH	21228000	10811901	21 September 2010	22 Novembar 2010	31 Desember 2020	USD	33.673.448	28.207.087	4.014.505	57.939.429.777	-	-	57.939.429.777	-	-	-	-	-		BPK
68	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	**ADB-OF**	METRO SANITATION	21245000	10883301	13 Mei 2014	09 Juli 2014	31 Desember 2023	USD	80.000.000	6.912.862	4.766.155	67.881.137.227	-	25.292.989.125	39.312.311.073	-	-	-	-	-		BPK
69	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	**ADB-OF**	MAN INVEST PR	21246000	10884001	13 Mei 2014	09 Juli 2014	23 Desember 2023	USD	40.000.000	-	3.443.626	49.986.614.575	-	-	49.986.614.575	-	-	-	-	-		BPK
70	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	**AIIB**	DDISP PHASE II	20600002	1XH37L2A	29 Mei 2017	27 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	19.876.747	19.000.000	272.668.000.000	-	49.513.637.431	207.451.410.040	-	-	-	-	-		BPKP
71	LK PLN 10	Pinjaman Luar Negeri		NSUP	20600001	1PTDQOAA	01 September 2016	31 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	216.500.000	100.450.000	36.300.000	515.832.900.000	-	432.568.935.381	175.797.302.289	-	-	-	-	-		BPKP
72	LK PLN 11	Pinjaman Luar Negeri		SIMURP	20600004	1HS4NF9A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000	5.988.873	5.000.000	72.785.000.000	-	2.272.322.996	70.403.419.441	-	-	-	-	-		BPK

SK No 062576 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
73	LK PLN 12	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK KOREA	CONST OF KARIAN MULTIPURP DAM	22718000	21654001	22 Desember 2011	14 Februari 2012	14 Juni 2022	KRW	109.426.000.000	69.365.516.910	15.064.658.760	185.509.637.573	-	-	185.322.232.391	-	-	-	-	-		-
74	LK PLN 13	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	DEV.MANADO BITUNG CSU-01	28743000	1UG6AGFA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	78.099.963	70.423.132	6.627.121	95.337.646.867	-	-	95.337.646.867	-	-	-	-	-		-
75	LK PLN 14	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	CISUMDAWU Phase III	28748000	1SFVCKQA	07 Mei 2018	18 Oktober 2018	18 Oktober 2023	USD	130.387.426	47.554.803	37.735.904	543.205.128.651	-	-	543.205.128.651	-	-	-	-	-		-
76	LK PLN 15	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	TOLL ROAD BALIKPAPAN SAMARINDA	28741000	1VMMBHYA	29 Desember 2015	30 September 2016	30 September 2021	USD	53.405.756	37.072.647	11.419.608	168.941.652.389	-	-	168.941.652.389	-	-	-	-	-		-
77	LK PLN 16	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	TOLL ROAD CISUMDAWU PHASE II	28742000	1RVNVDTA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	219.398.580	138.555.739	47.523.330	680.123.977.395	-	-	680.123.977.395	-	-	-	-	-		-
78	LK PLN 17	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK OF CHINA	TOLL ROAD SOLO KERTOSONO I	28740000	1MZJG1EA	29 Desember 2015	30 September 2016	30 September 2021	USD	198.772.235	175.467.167	19.644.254	280.587.719.816	-	-	280.587.719.816	-	-	-	-	-		-
79	LK PLN 18	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	CSRRP	20441000	178292YA	05 Juni 2020	30 Juni 2020	30 Juni 2024	USD	150.000.000		3.650.000	53.322.850.000	-	3.076.618.400	16.067.896.650	-	-	-	-	-		BPK
80	LK PLN 19	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	DDISP PHASE II	20421000	1ZZ7LGXA	09 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	19.876.747	19.000.000	270.914.000.000	-	49.516.678.338	207.451.407.882	-	-	-	-	-		BPKP
81	LK PLN 20	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	ITDP	20433000	1M1JWRAA	24 Oktober 2018	28 November 2018	31 Desember 2023	USD	300.000.000	5.250.812	12.029.550	172.639.677.360	-	24.136.062.360	-	-	-	-	-	-		BPK
82	LK PLN 21	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NAHP	20428000	1HG72SWA	30 November 2017	24 Januari 2018	28 Februari 2022	USD	450.000.000	131.310.800	86.027.995	1.249.807.104.790	-	1.234.093.168.802	-	-	-	-	-	-		BPK
83	LK PLN 22	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NSUP	20419000	18K6ECNA	22 Agustus 2016	11 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	216.500.000	100.450.000	36.300.000	524.340.300.000	-	190.918.694.318	416.750.558.727	-	-	-	-	-		BPKP
84	LK PLN 23	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NUWSP	20432000	1CPUK3GA	02 Agustus 2018	08 Agustus 2018	31 Desember 2022	USD	100.000.000	2.500.000	10.000.000	144.540.500.000	-	27.758.509.272	53.455.934.056	-	-	-	-	-		BPK
85	LK PLN 24	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	PAMSIMAS III	20418000	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2021	USD	300.000.000	195.250.000	77.900.000	1.137.245.200.000	-	1.016.148.369.920	-	-	-	-	-	-		BPKP
86	LK PLN 25	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	SIMURP	20430000	1NF3PM8A	25 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250.000.000	5.988.873	5.000.000	73.590.000.000	-	2.361.303.858	70.314.459.955	-	-	-	-	-		BPK
87	LK PLN 26	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	WESTERN INDONES	20398000	10842601	14 Desember 2011	13 Maret 2012	28 Februari 2021	USD	250.000.000	206.615.770	15.086.434	221.905.742.448	-	3.840.564.158	213.268.776.020	-	-	-	-	-		BPK
88	LK PLN 27	Pinjaman Luar Negeri	IDB	NSUP	20999011	1ENYRFPA	19 Mei 2016	19 November 2016	09 Mei 2021	USD	311.760.000	192.558.263	32.725.332	489.538.243.482	-	411.299.199.381	187.142.030.597	-	-	-	-	-		BPKP
89	LK PLN 28	Pinjaman Luar Negeri	IDB		20999012	1NT81PXA	19 Mei 2016	19 November 2016	22 November 2021	USD	10.000.000	689.552	6.000.000	85.678.000.000	-	62.000.000.000	-	-	-	-	-	-		BPKP
90	LK PLN 29	Pinjaman Luar Negeri	IDB		20999013	1VFX57JA	19 Mei 2016	19 November 2016	04 Mei 2021	USD	8.000.000	2.943.668	1.226.135	18.331.940.797	-	23.585.937.210	500.000.000	-	-	-	-	-		BPKP
91	LK PLN 30	Pinjaman Luar Negeri	IDB	SANIMAS PROJECT	20999010	10880201	19 Februari 2014	19 Agustus 2014	12 Juni 2020	USD	100.000.000	70.710.966	-	-	-	22.176.149.540	-	-	-	-	-	-		BPKP
92	LK PLN 31	Pinjaman Luar Negeri	IDB	Trans South-South Java	20999016	1NO47EHA	16 Mei 2017	31 Mei 2018	02 Februari 2023	USD	235.000.000	8.584.698	42.195.346	612.647.423.240	-	-	612.647.423.240	-	-	-	-	-		BPKP
93	LK PLN 32	Pinjaman Luar Negeri	IDB	Road	20999017	1SMHNPCA	16 Mei 2017	07 November 2017	19 Januari 2024	USD	15.000.000	1.748.489	2.036.281	29.343.862.135	-	-	29.343.862.134	-	-	-	-	-		BPKP
94	LK PLN 33	Pinjaman Luar Negeri	JICA	BALI BEACH CONSERV. PRJ PHASE2	27775000	17HCS2YA	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	9.855.000.000	-	200.511.027	27.389.711.018	-	-	27.389.711.018	-	-	-	-	-		-
95	LK PLN 34	Pinjaman Luar Negeri	JICA	COUNT SEDIMENT WONOGIRI DAM II	27767000	21684001	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	4.954.000.000	2.374.432.704	310.152.215	41.416.581.240	-	7.338.235.600	41.416.581.237	-	-	-	-	-		-
96	LK PLN 35	Pinjaman Luar Negeri	JICA	E/S METRO SANITATION MAN	27765000	21683301	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	1.968.000.000	983.478.679	82.911.687	11.474.243.967	-	-	11.474.243.966	-	-	-	-	-		-
97	LK PLN 36	Pinjaman Luar Negeri	JICA	IRSL in Central Sulawesi	27780000	16CJY14A	09 Januari 2020	22 April 2020	22 April 2026	JPY	27.970.000.000	-	561.301.671	77.082.144.576	-	-	77.082.144.576	-	-	-	-	-		-
98	LK PLN 37	Pinjaman Luar Negeri	JICA	PATIMBAN PORT DEV. PROJECT (I)	27777000	1AVH2LAA	15 November 2017	13 Maret 2018	13 Maret 2026	JPY	118.906.000.000	37.369.061.798	23.412.082.259	3.210.844.180.883	-	-	508.403.206.216	-	-	-	-	-		-
99	LK PLN 38	Pinjaman Luar Negeri	JICA	RENTANG IRRIGATION MDRN PRJ.	27773000	1HJ95NBA	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2026	JPY	48.237.000.000	-	5.371.559.214	745.113.536.785	-	-	742.047.398.035	-	-	-	-	-		-
100	LK PLN 39	Pinjaman Luar Negeri	JICA	UPP CITARUM BASIN FLOOD MAN	27759000	21668801	28 Maret 2013	25 Juli 2013	25 Juli 2021	JPY	3.311.000.000	2.002.202.245	812.065.471	111.183.713.068	-	-	111.183.713.067	-	-	-	-	-		-
101	LK PLN 40	Pinjaman Luar Negeri	JICA	URGT DIS MERAPI & LOW PROGO II	27766000	21682601	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	5.111.000.000	4.603.732.342	371.773.893	50.138.806.039	-	-	50.138.806.038	-	-	-	-	-		-
102	LK PLN 41	Pinjaman Luar Negeri	KfW	EMISSION REDUCTION IN CITIES	22138000	21667101	02 Mei 2013	06 Mei 2014	30 Juni 2021	EUR	75.000.000	30.242.328	23.124.867	393.907.032.256	-	-	386.562.321.080	-	-	-	-	-		-
	Total														-	**3.784.816.686.646**	**7.469.579.097.440**	-	-	-	-	-		
Kementerian Pariwisata																								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date		Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
103	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	ITDP	20433000	1M1JWRAA	24 Oktober 2018	28 November 2018	31 Desember 2023	USD	300.000.000	5.250.812	12.029.550	172.639.677.360	-	9.568.810.600	-	-	-	-	-	-	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	**BPK**
	Total														-	9.568.810.600	-	-	-	-	-	-		
	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional																							
104	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	RESEARCH & INNOV SCIENCE TECHN	20408000	10864001	12 April 2013	12 Juni 2013	31 Desember 2021	USD	74.763.379	66.951.345	1.124.000	16.436.252.000	-	33.128.975.216	-	-	-	-	-	-		**BPK**
	Total														-	**33.128.975.216**	-	-	-	-	-	-		
	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas																							
105	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	FMSRB SECTOR PROJECT	21252000	1RUX78CA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108.700.000	19.839.853	14.747.160	215.247.630.189	-	5.049.580.424	49.000.000	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR	**BPK**
106	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	AIIB	DOISP PHASE II	20600002	1XH37L2A	29 Mei 2017	27 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	19.876.747	19.000.000	272.668.000.000	-	3.480.676.484	-	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR	**BPKP**
107	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	AIIB	NSUP	20600001	1PTDQOAA	01 September 2016	31 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	216.500.000	100.450.000	36.300.000	515.832.900.000	-	3.540.000.000	-	-	-	-	-	-	Deputi Bidang Pengembangan Regional	**BPKP**
108	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	COREMAP-CTI	20413000	10881901	17 Maret 2014	05 Juni 2014	30 Juni 2022	USD	47.380.000	28.000.000	6.750.000	94.348.200.000	-	8.180.460.582	-	-	-	-	-	-	Indonesian Institute of Sciences (LIPI)	**BPK**
109	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	DOISP PHASE II	20421000	1ZZ7L6XA	09 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Juni 2023	USD	125.000.000	19.876.747	19.000.000	270.914.000.000	-	3.480.676.484	-	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR	**BPKP**
110	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	NSUP	20419000	18K6ECNA	22 Agustus 2016	11 Oktober 2016	31 Desember 2022	USD	216.500.000	100.450.000	36.300.000	524.340.300.000	-	4.505.986.000	-	-	-	-	-	-	Deputi Bidang Pengembangan Regional	**BPKP**
111	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	JICA	KOMERING IRRIGATION PRJ PHASE3	27774000	1SYVA92A	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	15.896.000.000	-	9.408.894	1.304.712.592	-	1.304.712.592	-	-	-	-	-	-	Direktorat Jenderal SDA	-
112	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	JICA	PROF HUMAN RESOURCE DEV IV	27768000	21680201	24 Februari 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2023	JPY	7.075.000.000	4.916.722.295	695.090.451	95.368.021.346	-	104.047.272.665	-	-	-	-	-	-	Pusbindiklatren Bappenas	-
113	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	JICA	RENTANG IRRIGATION MORN PRJ.	27773000	1HJ95NBA	30 Maret 2017	27 Juli 2017	27 Juli 2026	JPY	48.237.000.000	-	5.371.559.214	745.113.536.785	-	3.066.138.750	-	-	-	-	-	-		-
	Total														-	**136.655.503.981**	**49.000.000**	-	-	-	-	-		
	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN																							
114	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	OMP	20434000	1BUY9N3A	26 Oktober 2018	15 November 2018	31 Oktober 2023	USD	200.000.000	7.784.948	28.176.000	403.816.496.000	-	161.601.376.343	18.987.905.977	-	-	-	-	-		**BPK RI**
	Total														-	**161.601.376.343**	**18.987.905.977**	-	-	-	-	-		
	Kepolisian Republik Indonesia																							
115	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	APC Multifungsi Brimob TA 2016	28608700	15QSAK2A	28 September 2018	18 Desember 2018	28 Juli 2021	USD	33.999.754	-	33.584.579	505.108.229.062	-	-	505.108.229.062	-	-	-	-	-		-
116	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	PENGADAAN PUSLABFOR 2011	28607600	1ELURJQA	27 Maret 2017	05 April 2019	27 Juli 2020	USD	25.498.059	23.989.915	1.508.144	21.073.316.783	-	-	21.073.316.781	-	-	-	-	-		-
117	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	PER PENG JARINGAN IT TA 2016	28608400	16GUAH6A	28 September 2018	11 Desember 2018	28 Maret 2021	USD	8.498.433	7.933.838	72.250	1.051.021.473	-	-	1.051.021.472	-	-	-	-	-		-
118	LK PLN 4	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	PERALATAN INTEL TA 2016	28608300	1DZKYRBA	28 September 2018	18 Desember 2018	28 Januari 2021	USD	42.313.477	34.698.913	7.614.563	110.399.246.201	-	-	110.399.246.200	-	-	-	-	-		-

SK No 062574 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount		Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
119	LK PLN 5	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Sabhara AWC TA 2016	28808500	18AP2S4A	28 September 2018	18 Desember 2018	28 Juni 2020	USD	16.999.111	16.940.319	58.792	868.301.411	-	-	868.301.411	-	-	-	-	-		-
120	LK PLN 6	Pinjaman Luar Negeri	BANK MANDIRI SIN	Sabhara Quick Patrol Vehicle	28808800	14JC47XA	28 September 2018	13 Desember 2018	28 Oktober 2020	USD	28.029.003	27.996.958	32.045	473.785.645	-	-	473.785.645	-	-	-	-	-		-
121	LK PLN 7	Pinjaman Luar Negeri	BNI SEOUL	BRIMOB LONG RANGE PATROL	28800002	1M1DVXNA	04 Maret 2019	04 Maret 2019	04 Juni 2021	USD	25.499.717	-	5.646.500	80.304.523.000	-	-	80.304.523.000	-	-	-	-	-		-
122	LK PLN 8	Pinjaman Luar Negeri	BNI SEOUL	PUSINAFIS EQUIPMENT	28800001	136EFZKA	04 Maret 2019	04 Maret 2019	04 Maret 2021	USD	12.747.960	-	12.747.960	178.413.505.455	-	-	178.413.505.455	-	-	-	-	-		-
123	LK PLN 9	Pinjaman Luar Negeri	MUFG SINGAPORE	PENGADAAN PERALATAN DVI	28807300	1CWHNY7A	27 Januari 2017	06 Mei 2020	28 Februari 2022	USD	5.939.237	-	385.157	5.528.542.143	-	-	5.528.542.142	-	-	-	-	-		-
124	LK PLN 10	Pinjaman Luar Negeri	PT BNI TOKYO BRANCH	PROC OF EDUC TECH IND NAT POL	28225000	1FFPYVVA	08 Agustus 2017	08 Agustus 2017	08 Maret 2020	USD	12.707.509	12.571.242	136.267	1.944.119.862	-	-	1.944.119.862	-	-	-	-	-		-
125	LK PLN 11	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI CAYMAN IS	Technology System of Budgeting	24097011	12ZZV7AA	06 Desember 2018	21 Maret 2019	14 Agustus 2021	USD	12.725.959	6.612.048	5.166.479	81.378.972.952	-	-	81.378.972.951	-	-	-	-	-		-
126	LK PLN 12	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	KBR EQUIPMENT T.A. 2016	28749000	1PYJBXHA	05 Desember 2018	13 Februari 2019	05 Oktober 2020	USD	12.725.945	12.166.490	559.455	7.641.597.342	-	-	7.641.597.341	-	-	-	-	-		-
127	LK PLN 13	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	PROCUREMENT OF HELICOPTER	28751000	1XB7D7GA	06 November 2019	24 Desember 2019	06 Maret 2022	USD	169.995.989	36.810.696	79.940.005	1.141.314.468.685	-	-	1.025.933.388.050	-	-	-	-	-		-
128	LK PLN 14	Pinjaman Luar Negeri	PT MANDIRI HONGKONG	SPECIAL EQUIPMENT FOR ANIMALS	28608600	1VOOQ95A	28 September 2018	08 Februari 2019	28 Juli 2020	USD	12.748.725	8.170.770	4.577.956	64.581.131.730	-	-	64.581.131.729	-	-	-	-	-		-
129	LK PLN 15	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-HONG KONG	PROC OF FORENSIC LAP EQ	28746000	127MLJ9A	14 September 2017	28 November 2017	14 Juli 2020	USD	25.499.985	19.392.241	6.107.744	86.625.580.457	-	-	86.625.580.456	-	-	-	-	-		-
130	LK PLN 16	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-SINGAPORE	Peng.Ind.Tek.Pol TA 2016	28609100	1AXPM6JA	11 Desember 2018	11 Maret 2019	11 Juni 2021	USD	22.082.702	5.092.827	16.789.744	246.120.340.366	-	-	246.120.340.364	-	-	-	-	-		-
131	LK PLN 17	Pinjaman Luar Negeri	PT. BNI-SINGAPORE	Peralatan Security Barrier	28609000	12GU9GDA	11 Desember 2018	11 Maret 2019	11 Desember 2020	USD	12.718.423	12.633.848	84.575	1.212.974.650	-	-	1.212.974.650	-	-	-	-	-		-
	Total														-	-	**2.418.658.576.571**	-	-	-	-	-		
	Kementerian Desa PDTT																							
132	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	P3PD/Village Service Delivery	20439000	1CZ6CF2A	30 Januari 2020	19 Februari 2020	31 Desember 2024	USD	300.000.000	-	5.170.000	73.233.050.000	-	18.745.681.885	13.830.012.999	-	-	-	-	-		**BPK**
133	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	PAMSIMAS III	20418000	1NPB3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2021	USD	300.000.000	195.250.000	77.900.000	1.137.245.200.000	-	1.559.802.740	-	-	-	-	-	-		**BPKP**
134	LK PLN 3	Pinjaman Luar Negeri	IFAD	TEKAD	20822000	1BXM576A	23 Desember 2019	23 Desember 2019	30 Juni 2026	EUR	29.800.000	-	3.000.000	50.924.880.000	-	4.011.794.955	-	-	-	-	-	-		**BPK**
	Total														-	**24.317.279.580**	**13.830.012.999**	-	-	-	-	-		
	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika																							
135	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	NATIXIS BANQUE	Scaling Up Strengthening BMKG	22461800	1XCJ3SRA	25 Januari 2019	06 Juli 2020	31 Juli 2024	EUR	20.779.100	-	4.891.996	83.843.289.483	-	-	110.895.004.335	-	-	-	-	-		-
136	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	NATIXIS BANQUE	DEVELOPMENT OF MMS1	22461500	164RS1QA	13 Agustus 2018	16 Desember 2020	31 Juli 2025	EUR	42.782.878	-	6.374.584	110.895.004.335	-	-	83.843.289.482	-	-	-	-	-		-
	Total														-	-	**194.738.293.817**	-	-	-	-	-		
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia																							
137	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	COREMAP-CTI	20413000	10881901	17 Maret 2014	05 Juni 2014	30 Juni 2022	USD	47.380.000	28.000.000	6.750.000	94.348.200.000	-	5.578.141.417	68.333.877.177	-	-	-	-	-		**BPK**
	Total														-	**5.578.141.417**	**68.333.877.177**	-	-	-	-	-		
	Badan Informasi Geospasial																							
138	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	DMP	20434000	1BUY9N3A	26 Oktober 2018	15 November 2018	31 Oktober 2023	USD	200.000.000	7.784.948	28.176.000	403.816.496.000	-	2.243.397.428	37.335.682.867	-	-	-	-	-		**BPK**
	Total														-	**2.243.397.428**	**37.335.682.867**	-	-	-	-	-		
	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan																							
139	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	ADB	STAR ADDITIONAL FINANCING	21268000	17JE53EA	09 Desember 2019	15 Januari 2020	30 September 2025	USD	90.000.000	-	Rp1.500.000	Rp22.053.000.000	-	8.638.511.591	6.340.891.956	-	-	-	-	-	**BPKP**	**BPK**
140	LK PLN 2	Pinjaman Luar Negeri	ADB-OF	STAR PROJECT	21238000	10859501	26 November 2012	19 Februari 2013	25 September 2020	USD	56.918.189	57.115.235	-	-	-	3.287.892.557	1.221.066.106	-	-	-	-	-		**BPK**

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date		Loan Amount	Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
	Total														-	11.926.404.148	7.561.958.061							
	Badan Pengusahaan Batam																							
141	LK PLN 1	Pinjaman Luar Negeri	EXIM BANK KOREA	DEV OF SEWERAGE SYST IN BATAM	22719000	21687101	21 Maret 2014	29 Desember 2014	30 Juni 2021	KRW	57.397.000.000	31.906.667.090	10.892.733.800	133.013.797.551	-	-	132.753.184.114	-	-	-	-	-		-
	Total														-	-	132.753.184.114	-	-	-	-	-		
	Total														-	8.809.477.137.022	23.268.215.963.036	-	-	-	-	-		

** nilai belanja merupakan nilai realisasi SP2D pada KL dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 2.E

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2020

No		PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan /GrantID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan/Grant Amount		Disbursement s.d 2019	Disbursement Tahun 2020	Nilai Ekuivalen IDR Disbursement	Jenis Belanja Pada Tahun 2020 (Rupiah)*				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
															Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
Kementerian Sekretariat Negara																								
1	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	INEY (STUNTING)	GIBR0296	278EATNA	01-08-2018	01-08-2018	31-12-2021	USD	20.000.000	-	3.000.000	44.091.500.000	-	29.736.103.027	-	-	-	-	-	-	Kementerian Sekretariat Negara cq. Sekretariat Wakil Presiden	BPK
Kementerian Dalam Negeri																								
2	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	INEY (STUNTING)	GIBR0296	278EATNA	01-08-2018	01-08-2018	31-12-2021	USD	20.000.000	-	3.000.000	44.091.500.000	-	23.328.008.943	-	-	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	BPK
Kementerian Keuangan																								
3	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	IIFD	GIBR0290	24DE9BGA	25-04-2016	25-04-2016	31-12-2021	USD	8.280.000	-	1.271.561	18.158.175.318	-	16.166.262.526	515.204.204	-	-	-	-	-		BPK
4	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	PFM MDTF II	GIBR0289	2H816GHA	21-03-2016	21-03-2016	14-08-2020	USD	2.384.321	-	(220.288)	(3.148.298.554)	-	870.449.145	-	-	-	-	-	-		-
Kementerian Perhubungan																								
5	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	KfW	STUDY SURABAYA REGIONAL RAIL	GBDE0078	2PVSR06J	12-01-2015	12-01-2015	09-07-2020	EUR	1.325.000	-	247.250	3.901.982.042	-	-	3.901.982.042	-	-	-	-	-		-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																								
6	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	ADB	Community-Focused Investments	GADB0159	25AWBGKA	26-10-2016	24-01-2017	30-06-2022	USD	17.000.000	-	3.297.708	48.405.526.920	-	40.500.056.226	4.890.325.014	-	-	-	-	-		BPK
7	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	BioCF-ISFL	GIBR0297	2P9VGJLA	31-10-2018	31-10-2018	30-09-2021	USD	1.500.000	-	425.945	5.901.846.170	-	1.443.738.600	246.250.000	-	-	-	-	-		BPK
8	LK HLN 3	Hibah Luar Negeri	IBRD	FCPF REDD + READINESS PREPRATION	GIBR0276	71671901	10-06-2011	10-06-2011	31-12-2020	USD	8.196.428	-	877.170	12.721.383.328	-	14.533.109.625	113.000.000	-	-	-	-	-		BPK
9	LK HLN 4	Hibah Luar Negeri	IBRD	Forest Investment Program	GIBR0293	22PS3R0A	29-06-2016	29-09-2016	31-12-2021	USD	17.350.000	-	4.791.690	68.761.010.210	-	49.255.712.253	852.635.600	-	-	-	-	-		BPK
10	LK HLN 5	Hibah Luar Negeri	IBRD	OPTF-HCFC Phase Out	GIBR0281	73921901	11-07-2013	11-07-2013	30-06-2023	USD	6.869.350	-	461.983	6.543.881.324	-	4.501.381.798	-	-	-	-	-	-		BPKP
11	LK HLN 6	Hibah Luar Negeri	KfW	FOREST PROG -SUP FOR MIN FORES	GBDE0068	71227101	19-10-2010	19-10-2010	07-01-2021	EUR	20.000.000	-	1.195.667	19.306.000.902	-	16.029.224.807	221.760.000	-	-	3.899.759.008	-	-		-
12	LK HLN 7	Hibah Luar Negeri	KfW	Forest Program IV	GBDE0082	2KYJAT3A	23-04-2019	23-04-2019	30-12-2026	EUR	23.500.000	-	413.597	6.953.524.611	-	1.197.614.800	3.868.733.809	-	-	-	-	-		-
13	LK HLN 8	Hibah Luar Negeri	KfW	FOREST PROGRAMME II	GBDE0075	267XEYY5	16-07-2014	16-07-2014	31-12-2022	EUR	23.000.000	-	2.949.691	51.576.895.863	-	58.601.519.518	4.717.453.195	-	-	-	-	-		BPK
14	LK HLN 9	Hibah Luar Negeri	KfW	FOREST PROGRAMME III SULAWESI	GBDE0079	21LHDAJA	29-12-2015	29-12-2015	31-12-2024	EUR	13.500.000	-	2.346.521	40.045.008.147	-	32.200.458.653	743.772.182	-	-	-	-	-		BPK
15	LK HLN 10	Hibah Luar Negeri	KfW	Gunung Leuser Ecosystem	GBDE0077	2AHFU6NL	25-11-2014	25-11-2014	07-12-2020	EUR	8.460.000	-	2.263.571	37.924.098.126	-	6.429.799.068	-	-	-	453.300.000	-	-		BPKP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																								
16	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IBRD	Support TF for PAMSIMAS III	GIBR0298	2B7K43PA	29-01-2019	29-01-2019	31-12-2021	USD	23.600.000	-	6.200.000	87.227.400.000	-	26.528.284.600	-	-	-	-	-	-		BPK
17	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	Tourism	GIBR0295	2XNH4UXA	21-11-2017	21-11-2017	30-06-2020	USD	2.100.000	-	1.021.247	14.000.668.049	-	14.000.668.049	-	-	-	-	-	-		BPK
18	LK HLN 3	Hibah Luar Negeri	KfW	Emission Reduction in Cities	GBDE0074	73657101	02-05-2013	02-05-2013	12-01-2021	EUR	6.980.000	-	410.000	6.832.481.700	-	-	6.832.481.700	-	-	-	-	-		BPKP
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas																								
19	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	A D B GROUP	COREMAP CTI	GADB0150	74828801	23-12-2013	23-03-2014	31-12-2022	USD	8.000.000,00	-	431.120	6.115.267.015	-	1.133.908.090	-	-	-	-	-	-		BPK
20	LK HLN 2	Hibah Luar Negeri	IBRD	COREMAP - CTI	GIBR0285	74975701	17-03-2014	15-06-2014	30-06-2022	USD	10.000.000,00	-	1.500.000	21.155.200.000	-	20.969.053.092	46.813.638	-	-	-	-	-		BPK
21	LK HLN 3	Hibah Luar Negeri	IBRD	INEY (STUNTING)	GIBR0296	278EATNA	01-08-2018	01-08-2018	31-12-2021	USD	20.000.000,00	-	3.000.000	44.091.500.000	-	5.594.188.736	-	-	-	-	-	-		BPK
22	LK HLN 4	Hibah Luar Negeri	IFAD	IPDMIP-IFAD	GIFAD0007	2E6LVHNA	13-02-2017	13-02-2017	30-09-2023	EUR	1.410.000,00	-	175.337	3.062.035.030	-	4.136.351.675	339.270.000	-	-	-	-	-		BPKP
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi																								
23	LK HLN 1	Hibah Luar Negeri	IFAD	TEKAD	GIFAD0010	2JUO5HBA	23-12-2019	23-12-2019	30-06-2026	EUR	1.360.000	-	250.000	4.170.852.500	-	202.581.000	-	-	-	-	-	-	-	BPK
Total															-	**367.358.474.031**	**27.289.681.382**	-	-	-	-	-		

** nilai belanja merupakan nilai realisasi SP2D pada KL dengan sumber dana Hibah Luar Negeri*

SK No 062571 C

Belanja Mandatory Spending
Realisasi Anggaran Pendidikan TA 2020

Uraian	Realisasi
APBN	**508.843.834.877.000**
Kementerian Dalam Negeri	554.993.424.793
Kementerian Pertahanan	185.386.951.424
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri	50.096.642.049
Kementerian Keuangan	2.173.856.555.341
Kementerian Pertanian	317.600.176.273
Kementerian Perindustrian	710.280.609.738
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	190.049.671.417
Kementerian Perhubungan	2.764.482.039.080
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	79.061.797.338.948
Kementerian Kesehatan	1.492.209.753.270
Kementerian Agama	58.496.176.938.806
Kementerian Ketenagakerjaan	2.576.430.216.613
Kementerian Sosial	70.254.581.740
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	102.782.196.703
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	392.203.714.974
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2.861.092.517.582
Kementerian Pariwisata	673.659.603.034
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	1.452.651.409.854
Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	50.265.662.959
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	246.924.916.442
Kementerian Komunikasi Dan Informatika	94.036.454.917
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	144.334.803.380
Badan Tenaga Nuklir Nasional	29.004.097.392
Lembaga Administrasi Negara	19.207.544.451
Kementerian Perdagangan	5.823.634.773
Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	397.471.511.174
Bendahara Umum Negara	19.134.142.050.924
Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	**174.247.215.018.051**
Dana Transfer Umum	150.224.700.000.000
DAK Fisik	18.028.306.418.799
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.859.259.952.000
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.318.819.302.000
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.184.000
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	191.909.875.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.998.367.300.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.174.932.300.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	135.432.000.000
Dana Otonomi Khusus	3.562.900.000.000

Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah	**281.411.630.605.092**
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	10.000.000.000.000
Dana Abadi Penelitian	4.000.000.000.000
Dana Abadi Kebudayaan	1.000.000.000.000
Dana Abadi Perguruan Tinggi	3.000.000.000.000
Jumlah Realisasi Pembiayaan	**18.000.000.000.000**
Total Realisasi Anggaran Pendidikan	**473.658.845.623.143**
% Realisasi Anggaran Pendidikan	**93,09%**

Realisasi Anggaran Kesehatan TA 2020

Uraian	Realisasi
APBN	**212.452.700.000.000**
Kementerian Kesehatan	100.715.189.993.223
BPOM	1.459.523.487.684
BKKBN	2.913.825.985.027
Kementerian Pertahanan	9.499.989.382.650
Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.141.616.239.091
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.913.825.985.027
Kementerian Komunikasi Dan Informatika	161.005.987.685
Badan Intelijen Negara	816.874.770.200
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	80.809.575.120
Bendahara Umum Negara	13.441.781.508.082
Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Pusat	**135.144.442.913.789**
DAK Fisik	19.174.650.239.679
DAK NonFisik	15.704.774.423.376
Dana Otonomi Khusus	2.230.800.000.000
Jumlah Realisasi Transfer ke Daerah	**37.110.224.663.055**
Jumlah Realisasi Pembiayaan	-
Total Realisasi Anggaran Kesehatan	**172.254.667.576.844**
% Realisasi Anggaran Kesehatan	**81,08%**

LAMPIRAN 2.G

PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)
PER 31 DESEMBER 2020

BA	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALOKASI ANGGARAN PER TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
005	MAHKAMAH AGUNG	513.046.000.000				
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	350.000.000.000	214.802.000.000			
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	43.500.000.000	23.035.370.000			
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	615.973.544.037	987.104.097.973	935.447.548.749	311.306.746.659	224.102.367.804
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.906.573.933.600	1.096.326.000.000	84.000.000.000		
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.485.067.887.000	1.257.373.644.000	387.095.171.000	826.261.649.000	
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	94.090.967.000				
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.903.714.064.000				
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	148.394.002.200				
025	KEMENTERIAN AGAMA	1.251.882.998.523	855.119.311.529			
027	KEMENTERIAN SOSIAL	275.385.904.837	275.385.904.837	275.385.904.836		
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	257.764.450.000	108.694.139.222	74.651.384.656		
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	78.386.750.000	214.599.962.000			
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	36.349.347.773.277	6.683.770.076.110	1.880.694.754.160	570.383.474.000	220.837.489.000
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8.013.942.439.000				
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	247.329.535.000	174.205.501.000			
080	BATAN	27.641.000.000	92.777.000.000	140.425.000.000		

LAMPIRAN 2.G

PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)
PER 31 DESEMBER 2020

BA	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALOKASI ANGGARAN PER TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	21.060.925.000				
107	BADAN SAR NASIONAL	376.347.264.000				
119	BADAN KEAMANAN LAUT	103.024.380.000				
JUMLAH		56.062.473.817.474	11.983.193.006.671	3.777.699.763.402	1.707.951.869.659	444.939.856.804

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI
TKDD TA 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.A

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	WILAYAH	DANA BAGI HASIL				DAU	DAK	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA INSENTIF DAERAH, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA DESA	TOTAL TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
		PAJAK	SDA	CUKAI	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Provinsi Aceh	537 689 048 922	583 615 241 009	17 613 689 642	1 138 917 959 573	14 236 289 376 000	5 186 703 931 583	13 095 925 452 462	33 657 836 721 618
2	Provinsi Sumatera Utara	1.335.874.881 620	216 629 981 920	15 155 699 399	1 567 660 742 939	22 937 576 589 000	10 012 265 974 095	5 221 200 520.691	39 738 703 828 635
3	Provinsi Sumatera Barat	395 006.187 394	70 751 450.825	4 770 102.770	470 527 740.989	12 872 260.806 000	5 211 895 216 839	1 599 802 491.319	19 954 486 355 247
4	Provinsi Riau	3 143 612.243 092	4 225 378.847 093	4 549.800	7 368 995 640 586	8 406 131 918 630	4 712 561 416 381	1 854 983 715.250	22 342 672 690 748
5	Provinsi Kepulauan Riau	807.342.773.134	1 368.486.217.859	575 730 721	1.976.404.721.714	4.317.726.419.000	1 817 323 762 272	534.369.016.241	8.445.825.919.227
6	Provinsi Jambi	649 924.020 192	1 129 488.705.241	2 256 867.698	1 781 649 593 041	7 502 959 382 000	3.040 777 722 721	1.557 560.113.895	13 882 936 811.657
7	Provinsi Sumatera Selatan	2 661 999.272 771	5 495 462.286 583	1 065.367.497	8 098 526 926 851	11 691 145 314 000	5.883 745 389 823	3 268 990 199.819	28 942 407 828.593
8	Provinsi Bangka Belitung	178 663 999 512	364 458.493 770	118.600	543 322 611 882	4 046 273 512 000	1.413 586 254.319	591 116 032 990	6 594 307 411 191
9	Provinsi Bengkulu	155 275 588 832	123 829 694 007	-	279 105.280 839	6 066 414 779 000	2.381 334.282 797	1 335 531 253 150	10 062 385 595 786
10	Provinsi Lampung	403 782 287 755	178 878 774 025	5.995 323.160	586 456 384 940	12 157 055 111 000	5.574 971 546 115	2 909 878 773.987	21 228 361 796.042
11	Provinsi DKI Jakarta	13 928 939.702 814	60 805 977 722	75 027.600	14 009.821 708.136	-	3.282 953 513 783	65 176 975 000	17 357 952 196.919
12	Provinsi Jawa Barat	4.069.071.393.027	1 783 670 823 028	372.732.648.170	6.205 474 852 225	32 798 632 956.021	21.298.174.559.801	7 254 987 020.841	67 557 269 388.888
13	Provinsi Banten	1 797 962.830 153	21.138.729 721	98 927.000	1 819.200 486.874	7 914 848.056.000	4.917 352 963 142	1 483 925 070.000	16.135.328 566 016
14	Provinsi Jawa Tengah	1 847 960.074 847	103.842.707 272	677 411 848 318	2 629.314 630 437	35 323 881 967 000	17 463.891 267.844	10 182 763 414 083	65 599.951 279 364
15	Provinsi Di Yogyakarta	288 348.676 633	4 105 282 650	11 971 000 857	314.424.959 940	5 257 118 715.000	2 371.940 770 312	2 209 886 610 300	10 153 053 055.552
16	Provinsi Jawa Timur	3 219 887.931 325	3 481 734.289 238	1 863 160 956 378	8 344 793 176 941	37 862 670 743 000	18 590 718 159.233	9 775.748.680.378	74 573 930 759.552
17	Provinsi Kalimantan Barat	425 041.451 153	301 649.332 556	189 058.882	726 958 642 591	10 930 487 685 000	4 726 758.140 020	2 395 816 806.760	18 779 931 474.371
18	Provinsi Kalimantan Tengah	500 097 978.062	1.513 423.314 041	164 069.899	2 013 675.362 002	9 361 863 643.000	3 297 946 914 158	1 945 724 215 854	16 818 900 135.014
19	Provinsi Kalimantan Selatan	660 911 582 664	4 258.924.830 381	496.600	4 919 836 709 645	7 581 907 115.000	3.342.512.542.080	2.322.829.925.892	18 188 986 292 727
20	Provinsi Kalimantan Timur	2 525.373.232 609	11.759.124 759 151	2 378.500	14 284 500.370 260	5 393 165 714.000	2 891 996.003 522	1 322 683 232 912	23 892 344 320.694
21	Provinsi Kalimantan Utara	327 106.310 086	922.916.505 057	-	1 250 022.815 143	3 726.056 753 000	1 081.769 954 103	667 891 599 000	6.727.741 121.246
22	Provinsi Sulawesi Utara	271 814.491 588	158 953 627 571	-	430 768 119 159	8 147 792 208 000	3 081.829 035.238	1 757 233 248 654	13 417 622 611.051
23	Provinsi Gorontalo	73 151 526 348	7 733 629 219	946 625	80 886 002 192	3 806 478 200 000	1 539 670 545 310	872 478.708 550	6 298 513 456.052
24	Provinsi Sulawesi Tengah	303.896.384 133	932 559.748 637	973 628.875	1 237 429 761 745	9 039 566 878 000	4 014 943 409 317	1 926 251 829 118	16 218 211 877.180
25	Provinsi Sulawesi Selatan	668 577.061 325	249 285 904 585	13 697 141 518	931 560 127 428	17 523 299 149 000	8 249 629.215 943	3 038 851 301 068	29 743 339 793.409

LAMPIRAN 3.A

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	WILAYAH	DANA BAGI HASIL				DAU	DAK	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA INSENTIF DAERAH, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA DESA	TOTAL TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
		PAJAK	SDA	CUKAI	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
26	Provinsi Sulawesi Barat	65 727 719 424	5 335 416 587		71 063 135 991	4 020 857 185 000	1 888 348 483 795	707 446 911 604	6 687 715 896 590
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	214 339 408 389	796 206 209 037	2 150 200	1 010 547 765 626	9 393 148 277 000	3 981 904 588 077	2 167 136 635 086	16 552 337 345 789
28	Provinsi Bali	540 753 126 811	7 094 456 601	8 449 010 621	556 296 624 233	6 739 800 992 000	2 615 089 242 010	1 395 718 121 000	11 306 904 979 243
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	276 673 523 008	296 659 394 000	323 406 151 127	896 739 068 135	8 148 705 304 000	4 161 646 658 487	1 668 759 250 000	14 875 850 280 632
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	239 518 955 174	25 548 845 363	4 275 711 232	269 343 511 769	12 849 034 910 000	6 202 787 231 148	3 382 423 804 265	22 703 589 457 182
31	Provinsi Maluku	186 362 399 022	100 901 643 312		287 264 042 334	7 449 371 467 000	2 796 779 502 930	1 298 473 859 428	11 811 888 871 692
32	Provinsi Maluku Utara	153 812 952 632	518 674 181 712	-	672 587 134 344	5 866 394 530 000	2 376 053 229 248	1 235 563 031 134	10 250 698 324 726
33	Provinsi Papua	681 677 669 827	2 154 107 284 669		3 035 784 954 496	20 797 198 612 000	5 255 144 582 614	13 563 380 259 072	42 651 508 418 182
34	Provinsi Papua Barat	757 352 156 667	3 359 147 335 354	-	4 116 499 492 021	7 544 514 748 000	2 114 517 648 682	5 822 251 407 663	19 597 783 496 366
35	Sisa Dana Cadangan					-	-	-	-
	JUMLAH	44.283.738.827 545	46.498.683.739 758	3.124.018 578.699	93.906.361 247.000	381 612.451.495 551	176.678.831.927 772	118 432.531.485.956	762.530.176.156.179

Catatan: Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatas adalah Total dari Realisasi Pemerintah Provinsi ditambah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
1	**Provinsi Aceh**	**148.003.235.864**	**100.400.658.353**	**47.602.577.511**	**148.003.235.864**
2	Kab. Aceh Barat	16.275.736.452	7.858.140.979	8.417.595.473	16.275.736.452
3	Kab. Aceh Besar	13.180.010.376	9.028.483.707	4.151.526.669	13.180.010.376
4	Kab. Aceh Selatan	9.143.609.483	5.073.904.001	4.069.705.482	9.143.609.483
5	Kab. Aceh Singkil	9.434.670.651	3.305.753.785	6.128.916.866	9.434.670.651
6	Kab. Aceh Tengah	10.426.832.623	5.771.246.480	4.655.586.143	10.426.832.623
7	Kab. Aceh Tenggara	6.753.881.485	2.848.279.680	3.905.601.805	6.753.881.485
8	Kab. Aceh Timur	29.088.848.341	8.749.536.715	20.339.311.626	29.088.848.341
9	Kab. Aceh Utara	62.152.788.892	8.010.941.627	54.141.847.265	62.152.788.892
10	Kab. Bireuen	11.911.368.894	6.982.822.370	4.928.546.524	11.911.368.894
11	Kab. Pidie	11.483.234.592	6.305.887.168	5.177.347.424	11.483.234.592
12	Kab. Simeulue	6.509.543.549	2.796.903.340	3.712.640.209	6.509.543.549
13	Kota Banda Aceh	32.992.501.068	29.593.992.228	3.398.508.840	32.992.501.068

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
14	Kota Sabang	6.970.927.675	3.561.794.981	3.409.132.694	6.970.927.675
15	Kota Langsa	9.371.328.219	5.550.051.229	3.821.276.990	9.371.328.219
16	Kota Lhokseumawe	40.054.803.857	13.500.512.603	26.554.291.254	40.054.803.857
17	Kab. Nagan Raya	8.818.401.629	3.190.477.432	5.627.924.197	8.818.401.629
18	Kab. Aceh Jaya	7.417.773.373	3.479.502.073	3.938.271.300	7.417.773.373
19	Kab. Pidie Jaya	7.141.064.464	3.615.307.074	3.525.757.390	7.141.064.464
20	Kab. Aceh Barat Daya	7.239.699.739	3.508.499.777	3.731.199.962	7.239.699.739
21	Kab. Gayo Lues	7.064.369.538	3.067.524.922	3.996.844.616	7.064.369.538
22	Kab. Aceh Tamiang	60.463.306.742	5.761.073.187	54.702.233.555	60.463.306.742
23	Kab. Bener Meriah	6.959.121.220	3.392.656.017	3.566.465.203	6.959.121.220
24	Kota Subulussalam	8.831.990.196	4.936.917.721	3.895.072.475	8.831.990.196
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**421.882.759.048**	**352.726.692.106**	**69.156.066.942**	**421.882.759.048**
26	Kab. Asahan	35.460.401.705	13.142.444.375	22.317.957.330	35.460.401.705

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
27	Kab. Dairi	12.315.795.748	8.199.028.141	4.116.767.607	12.315.795.748
28	Kab. Deli Serdang	57.557.879.403	38.876.627.188	18.681.252.215	57.557.879.403
29	Kab. Karo	14.798.574.420	10.414.749.118	4.383.825.302	14.798.574.420
30	Kab. Labuhanbatu	26.142.139.202	10.447.908.799	15.694.230.403	26.142.139.202
31	Kab. Langkat	113.591.683.384	15.461.211.426	98.130.471.958	113.591.683.384
32	Kab. Mandailing Natal	16.611.717.105	7.806.835.008	8.804.882.097	16.611.717.105
33	Kab. Nias	8.726.163.900	5.396.164.749	3.329.999.151	8.726.163.900
34	Kab. Simalungun	30.871.376.163	13.602.867.986	17.268.508.177	30.871.376.163
35	Kab. Tapanuli Selatan	28.642.080.810	13.227.529.896	15.414.550.914	28.642.080.810
36	Kab. Tapanuli Tengah	13.002.020.044	7.732.395.054	5.269.624.990	13.002.020.044
37	Kab. Tapanuli Utara	21.413.515.065	9.499.537.911	11.913.977.154	21.413.515.065
38	Kab. Toba Samosir	13.901.308.312	10.125.144.829	3.776.163.483	13.901.308.312
39	Kota Binjai	17.756.652.185	11.765.543.446	5.991.108.739	17.756.652.185

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
40	Kota Medan	214.375.276.463	207.350.661.985	7.024.614.478	214.375.276.463
41	Kota Pematang Siantar	21.666.828.747	18.323.920.422	3.342.908.325	21.666.828.747
42	Kota Sibolga	13.175.515.096	9.813.353.856	3.362.161.240	13.175.515.096
43	Kota Tanjung Balai	11.065.210.722	7.607.001.785	3.458.208.937	11.065.210.722
44	Kab. Batu Bara	20.509.550.011	14.243.176.104	6.266.373.907	20.509.550.011
45	Kab. Labuhanbatu Utara	20.560.850.846	8.631.412.965	11.929.437.881	20.560.850.846
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	30.201.105.410	8.220.316.829	21.980.788.581	30.201.105.410
47	Kab. Padang Lawas Utara	22.169.236.355	5.734.848.213	16.434.388.142	22.169.236.355
48	Kab. Padang Lawas	23.425.964.075	6.445.655.198	16.980.308.877	23.425.964.075
49	Kab. Nias Utara	9.674.605.988	6.091.041.136	3.583.564.852	9.674.605.988
50	Kab. Nias Barat	8.867.203.397	5.561.706.776	3.305.496.621	8.867.203.397
51	Kota Tebing Tinggi	12.277.321.473	8.971.396.439	3.305.925.034	12.277.321.473
52	Kota Padang Sidempuan	15.513.835.235	11.878.923.248	3.634.911.987	15.513.835.235

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
53	Kab. Pakpak Bharat	9.538.362.639	5.585.918.540	3.952.444.099	9.538.362.639
54	Kab. Nias Selatan	11.308.906.362	6.132.165.806	5.176.740.556	11.308.906.362
55	Kab. Humbang Hasundutan	10.357.163.896	6.241.392.187	4.115.771.709	10.357.163.896
56	Kab. Serdang Bedagai	25.669.475.805	10.382.438.233	15.287.037.572	25.669.475.805
57	Kab. Samosir	10.588.350.423	6.828.832.886	3.759.517.537	10.588.350.423
58	Kota Gunungsitoli	12.256.052.183	8.956.024.041	3.300.028.142	12.256.052.183
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**126.832.386.290**	**117.596.434.412**	**9.235.951.878**	**126.832.386.290**
60	Kab. Lima Puluh Kota	12.457.929.235	8.231.570.951	4.226.358.284	12.457.929.235
61	Kab. Agam	15.022.088.728	9.496.676.913	5.525.411.815	15.022.088.728
62	Kab. Kepulauan Mentawai	9.602.659.795	4.841.894.205	4.760.765.590	9.602.659.795
63	Kab. Padang Pariaman	6.855.006.957	3.096.488.815	3.758.518.142	6.855.006.957
64	Kab. Pasaman	9.548.740.290	5.658.469.036	3.890.271.254	9.548.740.290
65	Kab. Pesisir Selatan	11.596.581.178	4.332.208.404	7.264.372.774	11.596.581.178

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
66	Kab. Sijunjung	9.096.047.227	4.166.862.679	4.929.184.548	9.096.047.227
67	Kab. Solok	9.408.644.038	5.332.635.502	4.076.008.536	9.408.644.038
68	Kab. Tanah Datar	11.703.507.745	8.082.361.098	3.621.146.647	11.703.507.745
69	Kota Bukit Tinggi	13.374.457.145	10.242.175.804	3.132.281.341	13.374.457.145
70	Kota Padang Panjang	7.981.572.127	4.793.216.281	3.188.355.846	7.981.572.127
71	Kota Padang	71.716.209.265	65.722.744.099	5.993.465.166	71.716.209.265
72	Kota Payakumbuh	8.968.869.880	5.812.150.863	3.156.719.017	8.968.869.880
73	Kota Sawahlunto	8.191.265.542	4.379.082.368	3.812.183.174	8.191.265.542
74	Kota Solok	9.159.063.125	5.879.449.379	3.279.613.746	9.159.063.125
75	Kota Pariaman	9.991.242.393	6.574.662.447	3.416.579.946	9.991.242.393
76	Kab. Pasaman Barat	15.382.989.534	7.377.643.500	8.005.346.034	15.382.989.534
77	Kab. Dharmasraya	13.167.094.900	6.823.371.615	6.343.723.285	13.167.094.900
78	Kab. Solok Selatan	14.949.832.000	4.235.438.513	10.714.393.487	14.949.832.000

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
79	**Provinsi Riau**	**761.173.040.462**	**236.113.297.970**	**525.059.742.492**	**761.173.040.462**
80	Kab. Bengkalis	1.057.105.887.982	60.932.547.444	996.173.340.538	1.057.105.887.982
81	Kab. Indragiri Hilir	38.185.130.427	18.582.826.171	19.602.304.256	38.185.130.427
82	Kab. Indragiri Hulu	69.592.907.875	16.362.488.341	53.230.419.534	69.592.907.875
83	Kab. Kampar	209.060.247.705	21.498.612.996	187.561.634.709	209.060.247.705
84	Kab. Kuantan Singingi	25.306.008.512	13.386.872.328	11.919.136.184	25.306.008.512
85	Kab. Pelalawan	101.425.311.664	27.055.927.747	74.369.383.917	101.425.311.664
86	Kab. Rokan Hilir	243.877.637.518	17.046.718.842	226.830.918.676	243.877.637.518
87	Kab. Rokan Hulu	49.365.739.395	15.502.634.582	33.863.104.813	49.365.739.395
88	Kab. Siak	377.293.633.477	24.237.211.060	353.056.422.417	377.293.633.477
89	Kota Dumai	47.191.538.762	29.449.500.701	17.742.038.061	47.191.538.762
90	Kota Pekanbaru	112.929.387.645	98.168.864.684	14.760.522.961	112.929.387.645
91	Kab. Kepulauan Meranti	51.105.772.268	13.475.738.879	37.630.033.389	51.105.772.268

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**197.877.274.559**	**159.693.540.020**	**38.183.734.539**	**197.877.274.559**
93	Kab. Bintan	23.951.093.791	18.393.343.621	5.557.750.170	23.951.093.791
94	Kab. Natuna	95.668.721.641	14.224.322.854	81.444.398.787	95.668.721.641
95	Kab. Karimun	39.982.274.308	23.989.537.736	15.992.736.572	39.982.274.308
96	Kota Batam	128.308.534.367	122.025.656.595	6.282.877.772	128.308.534.367
97	Kab. Kepulauan Anambas	73.122.835.464	18.220.959.049	54.901.876.415	73.122.835.464
98	Kota Tanjung Pinang	30.239.812.719	26.091.949.837	4.147.862.882	30.239.812.719
99	Kab. Lingga	18.192.226.285	12.986.239.688	5.205.986.597	18.192.226.285
100	**Provinsi Jambi**	**157.012.580.626**	**62.786.280.779**	**94.226.299.847**	**157.012.580.626**
101	Kab. Batanghari	61.134.862.259	3.685.493.041	57.449.369.218	61.134.862.259
102	Kab. Bungo	21.114.288.301	8.474.492.123	12.639.796.178	21.114.288.301
103	Kab. Kerinci	7.921.017.842	3.312.302.100	4.608.715.742	7.921.017.842
104	Kab. Merangin	13.226.507.653	6.965.531.691	6.260.975.962	13.226.507.653

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
105	Kab. Muaro Jambi	69.950.618.201	6.641.859.512	63.308.758.689	69.950.618.201
106	Kab. Sarolangun	35.255.946.815	5.466.847.010	29.789.099.805	35.255.946.815
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	130.522.695.657	7.166.342.865	123.356.352.792	130.522.695.657
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	58.566.269.188	6.966.965.504	51.599.303.684	58.566.269.188
109	Kab. Tebo	23.401.917.326	5.391.521.624	18.010.395.702	23.401.917.326
110	Kota Jambi	62.351.931.035	34.799.281.400	27.552.649.635	62.351.931.035
111	Kota Sungai Penuh	9.465.385.289	6.125.698.232	3.339.687.057	9.465.385.289
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**618.638.614.053**	**209.498.342.896**	**409.140.271.157**	**618.638.614.053**
113	Kab. Lahat	115.659.079.940	12.906.406.059	102.752.673.881	115.659.079.940
114	Kab. Musi Banyuasin	701.940.644.992	20.472.356.498	681.468.288.494	701.940.644.992
115	Kab. Musi Rawas	152.607.425.687	9.270.889.344	143.336.536.343	152.607.425.687
116	Kab. Musi Rawas Utara	22.603.577.407	7.383.398.876	15.220.178.531	22.603.577.407
117	Kab. Muara Enim	376.916.500.950	37.205.208.400	339.711.292.550	376.916.500.950

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
118	Kab. Ogan Komering Ilir	35.097.554.961	13.387.943.157	21.709.611.804	35.097.554.961
119	Kab. Ogan Komering Ulu	68.963.797.654	11.913.428.042	57.050.369.612	68.963.797.654
120	Kota Palembang	112.591.140.912	107.386.735.961	5.204.404.951	112.591.140.912
121	Kota Pagar Alam	11.738.984.040	7.546.178.758	4.192.805.282	11.738.984.040
122	Kota Lubuk linggau	15.922.839.480	12.304.070.448	3.618.769.032	15.922.839.480
123	Kota Prabumulih	73.597.425.102	17.065.022.373	56.532.402.729	73.597.425.102
124	Kab. Empat Lawang	12.693.286.442	8.041.535.340	4.651.751.102	12.693.286.442
125	Kab. Banyuasin	57.994.104.860	13.156.212.972	44.837.891.888	57.994.104.860
126	Kab. Ogan Ilir	53.718.388.403	10.075.167.723	43.643.220.680	53.718.388.403
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	15.326.797.051	9.831.642.975	5.495.154.076	15.326.797.051
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	12.850.396.939	7.846.799.298	5.003.597.641	12.850.396.939
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	203.138.713.898	9.344.563.669	193.794.150.229	203.138.713.898
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**44.149.765.735**	**36.220.153.093**	**7.929.612.642**	**44.149.765.735**

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
131	Kab. Bangka	46.960.833.204	7.824.275.846	39.136.557.358	46.960.833.204
132	Kab. Belitung	13.279.867.799	6.586.387.783	6.693.480.016	13.279.867.799
133	Kota Pangkal Pinang	20.142.632.645	16.586.431.060	3.556.201.585	20.142.632.645
134	Kab. Bangka Selatan	12.381.724.468	5.122.661.096	7.259.063.372	12.381.724.468
135	Kab. Bangka Tengah	11.449.289.297	6.186.178.161	5.263.111.136	11.449.289.297
136	Kab. Bangka Barat	16.250.650.612	6.970.833.771	9.279.816.841	16.250.650.612
137	Kab. Belitung Timur	14.249.235.752	5.051.976.981	9.197.258.771	14.249.235.752
138	**Provinsi Bengkulu**	**44.071.942.030**	**38.654.706.642**	**5.417.235.388**	**44.071.942.030**
139	Kab. Bengkulu Selatan	8.325.357.845	4.723.449.413	3.601.908.432	8.325.357.845
140	Kab. Bengkulu Utara	12.574.387.413	5.088.876.464	7.485.510.949	12.574.387.413
141	Kab. Rejang Lebong	8.863.051.898	5.018.023.868	3.845.028.030	8.863.051.898
142	Kota Bengkulu	29.215.224.144	23.219.685.685	5.995.538.459	29.215.224.144
143	Kab. Kaur	6.387.616.976	2.329.084.412	4.058.532.564	6.387.616.976

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
144	Kab. Seluma	9.061.138.760	4.499.208.240	4.561.930.520	9.061.138.760
145	Kab. Mukomuko	12.239.352.191	3.839.298.577	8.400.053.614	12.239.352.191
146	Kab. Lebong	8.508.234.368	3.141.242.824	5.366.991.544	8.508.234.368
147	Kab. Bengkulu Tengah	8.699.042.541	3.475.427.880	5.223.614.661	8.699.042.541
148	Kab. Kepahiang	7.330.238.666	3.523.485.551	3.806.753.115	7.330.238.666
149	**Provinsi Lampung**	**124.428.970.920**	**106.352.951.257**	**18.076.019.663**	**124.428.970.920**
150	Kab. Lampung Barat	9.039.759.747	5.441.334.641	3.598.425.106	9.039.759.747
151	Kab. Lampung Selatan	22.337.228.083	15.081.752.241	7.255.475.842	22.337.228.083
152	Kab. Lampung Tengah	25.952.544.906	14.334.247.083	11.618.297.823	25.952.544.906
153	Kab. Lampung Utara	16.745.191.771	11.041.281.237	5.703.910.534	16.745.191.771
154	Kab. Lampung Timur	28.380.820.814	10.969.564.044	17.411.256.770	28.380.820.814
155	Kab. Tanggamus	29.283.470.594	6.734.940.655	22.548.529.939	29.283.470.594
156	Kab. Tulang Bawang	15.954.849.572	8.193.656.529	7.761.193.043	15.954.849.572

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
157	Kab. Way Kanan	11.469.324.607	5.353.446.819	6.115.877.788	11.469.324.607
158	Kab. Pesawaran	12.386.529.106	7.491.915.828	4.894.613.278	12.386.529.106
159	Kab. Pesisir Barat	8.365.819.950	4.592.033.156	3.773.786.794	8.365.819.950
160	Kab. Pringsewu	12.152.147.209	8.564.363.976	3.587.783.233	12.152.147.209
161	Kab. Mesuji	12.201.393.852	4.929.441.906	7.271.951.946	12.201.393.852
162	Kab. Tulang Bawang Barat	9.852.281.196	5.457.249.279	4.395.031.917	9.852.281.196
163	Kota Bandar Lampung	52.417.270.224	47.791.126.229	4.626.143.995	52.417.270.224
164	Kota Metro	12.814.665.204	9.347.136.825	3.467.528.379	12.814.665.204
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**13.928.939.702.814**	**13.871.004.305.394**	**57.935.397.420**	**13.928.939.702.814**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**1.482.168.039.735**	**1.376.116.801.553**	**106.051.238.182**	**1.482.168.039.735**
167	Kab. Bandung	126.554.751.084	68.101.545.635	58.453.205.449	126.554.751.084
168	Kab. Bekasi	366.687.739.191	323.982.779.748	42.704.959.443	366.687.739.191
169	Kab. Bogor	174.815.342.929	135.578.679.051	39.236.663.878	174.815.342.929

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
170	Kab. Ciamis	43.507.434.632	34.659.662.570	8.847.772.062	43.507.434.632
171	Kab. Cianjur	53.662.141.051	43.056.738.612	10.605.402.439	53.662.141.051
172	Kab. Cirebon	64.537.783.219	52.269.782.864	12.268.000.355	64.537.783.219
173	Kab. Garut	78.186.297.980	44.390.940.078	33.795.357.902	78.186.297.980
174	Kab. Indramayu	131.102.695.556	43.344.992.141	87.757.703.415	131.102.695.556
175	Kab. Karawang	204.978.701.642	165.196.102.513	39.782.599.129	204.978.701.642
176	Kab. Kuningan	41.628.575.206	35.339.768.919	6.288.806.287	41.628.575.206
177	Kab. Majalengka	48.634.153.432	35.557.186.403	13.076.967.029	48.634.153.432
178	Kab. Pangandaran	30.476.908.798	26.419.453.400	4.057.455.398	30.476.908.798
179	Kab. Purwakarta	71.818.124.294	64.577.061.332	7.241.062.962	71.818.124.294
180	Kab. Subang	116.309.718.940	44.091.342.931	72.218.376.009	116.309.718.940
181	Kab. Sukabumi	77.375.647.668	48.343.088.260	29.032.559.408	77.375.647.668
182	Kab. Sumedang	52.927.024.931	46.780.911.057	6.146.113.874	52.927.024.931

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
183	Kab. Tasikmalaya	42.291.455.471	35.176.832.729	7.114.622.742	42.291.455.471
184	Kab. Bandung Barat	57.625.833.881	50.639.824.195	6.986.009.686	57.625.833.881
185	Kota Bandung	307.033.109.103	300.799.365.308	6.233.743.795	307.033.109.103
186	Kota Bekasi	124.216.072.218	117.080.893.580	7.135.178.638	124.216.072.218
187	Kota Bogor	82.022.540.739	77.728.629.160	4.293.911.579	82.022.540.739
188	Kota Cirebon	46.519.860.578	42.156.395.343	4.363.465.235	46.519.860.578
189	Kota Depok	82.777.380.446	77.407.563.952	5.369.816.494	82.777.380.446
190	Kota Sukabumi	37.098.461.363	33.730.280.062	3.368.181.301	37.098.461.363
191	Kota Cimahi	46.150.746.334	42.517.164.195	3.633.582.139	46.150.746.334
192	Kota Tasikmalaya	47.655.786.825	41.463.752.998	6.192.033.827	47.655.786.825
193	Kota Banjar	30.309.055.781	26.549.351.437	3.759.704.344	30.309.055.781
194	**Provinsi Banten**	**698.762.829.603**	**691.488.827.316**	**7.274.002.287**	**698.762.829.603**
195	Kab. Lebak	58.123.345.750	50.996.533.911	7.126.811.839	58.123.345.750

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
196	Kab. Pandeglang	73.940.688.471	53.685.660.735	20.255.027.736	73.940.688.471
197	Kab. Serang	82.596.829.565	76.102.133.655	6.494.695.910	82.596.829.565
198	Kab. Tangerang	213.690.463.506	206.901.094.689	6.789.368.817	213.690.463.506
199	Kota Cilegon	118.029.778.682	114.440.138.651	3.589.640.031	118.029.778.682
200	Kota Tangerang	285.108.622.049	279.438.593.356	5.670.028.693	285.108.622.049
201	Kota Serang	76.228.843.588	72.466.817.791	3.762.025.797	76.228.843.588
202	Kota Tangerang Selatan	191.481.428.939	186.971.814.329	4.509.614.610	191.481.428.939
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**650.674.971.690**	**599.476.321.238**	**51.198.650.452**	**650.674.971.690**
204	Kab. Banjarnegara	25.512.890.561	17.953.573.083	7.559.317.478	25.512.890.561
205	Kab. Banyumas	43.654.509.766	35.115.018.069	8.539.491.697	43.654.509.766
206	Kab. Batang	29.223.358.127	22.544.204.774	6.679.153.353	29.223.358.127
207	Kab. Blora	78.014.144.646	18.625.679.709	59.388.464.937	78.014.144.646
208	Kab. Boyolali	23.953.678.017	17.661.800.228	6.291.877.789	23.953.678.017

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
209	Kab. Brebes	29.102.813.778	18.079.575.127	11.023.238.651	29.102.813.778
210	Kab. Cilacap	47.890.898.316	35.491.269.626	12.399.628.690	47.890.898.316
211	Kab. Demak	24.333.274.306	18.701.021.131	5.632.253.175	24.333.274.306
212	Kab. Grobogan	34.819.648.617	18.061.644.588	16.758.004.029	34.819.648.617
213	Kab. Jepara	34.792.803.366	28.236.976.097	6.555.827.269	34.792.803.366
214	Kab. Karanganyar	25.928.901.457	21.078.681.137	4.850.220.320	25.928.901.457
215	Kab. Kebumen	26.785.930.919	20.152.395.148	6.633.535.771	26.785.930.919
216	Kab. Kendal	24.992.754.273	17.070.599.245	7.922.155.028	24.992.754.273
217	Kab. Klaten	26.624.918.804	21.648.371.713	4.976.547.091	26.624.918.804
218	Kab. Kudus	82.708.366.676	77.798.627.460	4.909.739.216	82.708.366.676
219	Kab. Magelang	22.711.495.795	17.203.912.310	5.507.583.485	22.711.495.795
220	Kab. Pati	30.005.473.722	20.108.355.206	9.897.118.516	30.005.473.722
221	Kab. Pekalongan	22.970.606.359	14.672.178.302	8.298.428.057	22.970.606.359

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
222	Kab. Pemalang	24.870.946.270	17.015.128.688	7.855.817.582	24.870.946.270
223	Kab. Purbalingga	23.674.008.136	16.677.926.935	6.996.081.201	23.674.008.136
224	Kab. Purworejo	22.335.788.971	17.276.188.949	5.059.600.022	22.335.788.971
225	Kab. Rembang	24.082.333.172	16.210.671.399	7.871.661.773	24.082.333.172
226	Kab. Semarang	30.230.434.404	23.687.466.200	6.542.968.204	30.230.434.404
227	Kab. Sragen	22.393.299.405	17.213.989.317	5.179.310.088	22.393.299.405
228	Kab. Sukoharjo	31.803.696.495	27.215.840.815	4.587.855.680	31.803.696.495
229	Kab. Tegal	27.540.433.167	19.745.329.368	7.795.103.799	27.540.433.167
230	Kab. Temanggung	22.413.478.639	17.353.496.371	5.059.982.268	22.413.478.639
231	Kab. Wonogiri	22.286.233.001	16.572.694.754	5.713.538.247	22.286.233.001
232	Kab. Wonosobo	22.964.058.266	14.864.362.814	8.099.695.452	22.964.058.266
233	Kota Magelang	20.687.085.865	17.602.923.672	3.084.162.193	20.687.085.865
234	Kota Pekalongan	20.875.490.087	17.531.232.487	3.344.257.600	20.875.490.087

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
235	Kota Salatiga	18.852.304.840	15.665.572.791	3.186.732.049	18.852.304.840
236	Kota Semarang	153.568.304.499	146.839.429.991	6.728.874.508	153.568.304.499
237	Kota Surakarta	52.288.025.318	48.599.713.565	3.688.311.753	52.288.025.318
238	Kota Tegal	22.392.715.117	19.098.478.124	3.294.236.993	22.392.715.117
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**112.202.769.574**	**110.507.140.385**	**1.695.629.189**	**112.202.769.574**
240	Kab. Bantul	32.085.691.513	27.734.845.287	4.350.846.226	32.085.691.513
241	Kab. Gunung kidul	21.264.019.973	16.998.314.343	4.265.705.630	21.264.019.973
242	Kab. Kulon Progo	23.071.759.041	19.392.056.212	3.679.702.829	23.071.759.041
243	Kab. Sleman	57.802.014.193	53.233.427.950	4.568.586.243	57.802.014.193
244	Kota Yogyakarta	51.922.422.339	48.447.264.511	3.475.157.828	51.922.422.339
245	**Provinsi Jawa Timur**	**1.069.532.925.894**	**902.500.796.359**	**167.032.129.535**	**1.069.532.925.894**
246	Kab. Bangkalan	29.880.625.581	17.249.296.516	12.631.329.065	29.880.625.581
247	Kab. Banyuwangi	54.748.949.229	23.278.973.093	31.469.976.136	54.748.949.229

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
248	Kab. Blitar	25.908.968.528	18.236.548.194	7.672.420.334	25.908.968.528
249	Kab. Bojonegoro	445.059.403.978	27.047.990.226	418.011.413.752	445.059.403.978
250	Kab. Bondowoso	24.196.117.278	17.451.771.829	6.744.345.449	24.196.117.278
251	Kab. Gresik	128.341.951.271	92.304.408.516	36.037.542.755	128.341.951.271
252	Kab. Jember	44.270.190.135	32.078.165.803	12.192.024.332	44.270.190.135
253	Kab. Jombang	30.064.023.026	24.189.477.026	5.874.546.000	30.064.023.026
254	Kab. Kediri	34.809.475.193	26.621.857.654	8.187.617.539	34.809.475.193
255	Kab. Lamongan	29.991.076.201	21.415.375.174	8.575.701.027	29.991.076.201
256	Kab. Lumajang	24.913.046.877	16.572.706.378	8.340.340.499	24.913.046.877
257	Kab. Madiun	24.260.330.638	16.319.615.318	7.940.715.320	24.260.330.638
258	Kab. Magetan	23.181.127.049	19.023.925.315	4.157.201.734	23.181.127.049
259	Kab. Malang	51.127.019.390	33.528.052.500	17.598.966.890	51.127.019.390
260	Kab. Mojokerto	35.904.242.626	28.372.206.701	7.532.035.925	35.904.242.626

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
261	Kab. Nganjuk	28.835.914.247	21.703.968.126	7.131.946.121	28.835.914.247
262	Kab. Ngawi	29.138.642.256	19.153.772.556	9.984.869.700	29.138.642.256
263	Kab. Pacitan	20.929.437.200	16.771.790.869	4.157.646.331	20.929.437.200
264	Kab. Pamekasan	25.552.368.992	18.036.502.976	7.515.866.016	25.552.368.992
265	Kab. Pasuruan	54.180.307.948	47.418.734.254	6.761.573.694	54.180.307.948
266	Kab. Ponorogo	30.232.315.098	21.546.079.247	8.686.235.851	30.232.315.098
267	Kab. Probolinggo	28.031.643.967	20.570.515.561	7.461.128.406	28.031.643.967
268	Kab. Sampang	26.605.931.881	14.777.188.908	11.828.742.973	26.605.931.881
269	Kab. Sidoarjo	122.440.690.036	105.878.627.269	16.562.062.767	122.440.690.036
270	Kab. Situbondo	24.695.690.949	17.837.118.617	6.858.572.332	24.695.690.949
271	Kab. Sumenep	30.367.547.001	17.120.108.523	13.247.438.478	30.367.547.001
272	Kab. Trenggalek	23.752.716.353	17.860.668.122	5.892.048.231	23.752.716.353
273	Kab. Tuban	74.836.068.629	28.788.895.025	46.047.173.604	74.836.068.629

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
274	Kab. Tulungagung	32.062.077.488	24.323.381.606	7.738.695.882	32.062.077.488
275	Kota Blitar	19.606.466.007	16.445.653.467	3.160.812.540	19.606.466.007
276	Kota Kediri	38.241.439.693	34.869.201.596	3.372.238.097	38.241.439.693
277	Kota Madiun	26.960.613.761	23.735.525.023	3.225.088.738	26.960.613.761
278	Kota Malang	60.014.503.594	55.881.335.864	4.133.167.730	60.014.503.594
279	Kota Mojokerto	22.539.424.135	18.237.266.305	4.302.157.830	22.539.424.135
280	Kota Pasuruan	24.756.895.251	19.998.890.229	4.758.005.022	24.756.895.251
281	Kota Probolinggo	21.007.231.321	17.415.221.185	3.592.010.136	21.007.231.321
282	Kota Surabaya	358.889.027.837	351.692.116.247	7.196.911.590	358.889.027.837
283	Kota Batu	20.031.504.787	16.081.036.773	3.950.468.014	20.031.504.787
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	**119.636.912.875**	**91.396.632.522**	**28.240.280.353**	**119.636.912.875**
285	Kab. Bengkayang	20.941.954.752	5.589.631.591	15.352.323.161	20.941.954.752
286	Kab. Landak	16.923.958.258	6.089.539.653	10.834.418.605	16.923.958.258

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
287	Kab. Kapuas Hulu	19.892.039.864	6.306.445.464	13.585.594.400	19.892.039.864
288	Kab. Ketapang	50.624.531.487	13.373.718.253	37.250.813.234	50.624.531.487
289	Kab. Mempawah	10.998.531.619	6.085.660.136	4.912.871.483	10.998.531.619
290	Kab. Sambas	15.982.777.189	7.680.369.281	8.302.407.908	15.982.777.189
291	Kab. Sanggau	26.643.143.005	9.321.724.323	17.321.418.682	26.643.143.005
292	Kab. Sintang	24.278.912.132	9.529.032.695	14.749.879.437	24.278.912.132
293	Kota Pontianak	43.283.517.062	39.341.504.320	3.942.012.742	43.283.517.062
294	Kota Singkawang	11.639.956.935	8.010.018.972	3.629.937.963	11.639.956.935
295	Kab. Kayong Utara	11.726.755.324	4.199.613.662	7.527.141.662	11.726.755.324
296	Kab. Kubu Raya	19.252.611.295	9.627.988.748	9.624.622.547	19.252.611.295
297	Kab. Sekadau	18.809.781.851	5.823.482.237	12.986.299.614	18.809.781.851
298	Kab. Melawi	14.406.067.505	5.296.983.621	9.109.083.884	14.406.067.505
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**127.269.761.928**	**82.798.824.468**	**44.470.937.460**	**127.269.761.928**

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
300	Kab. Barito Selatan	12.243.737.642	6.025.362.583	6.218.375.059	12.243.737.642
301	Kab. Barito Utara	46.450.993.602	7.034.451.311	39.416.542.291	46.450.993.602
302	Kab. Kapuas	30.888.650.024	8.792.276.769	22.096.373.255	30.888.650.024
303	Kab. Kotawaringin Barat	29.740.702.411	13.877.247.354	15.863.455.057	29.740.702.411
304	Kab. Kotawaringin Timur	45.942.901.316	17.391.662.765	28.551.238.551	45.942.901.316
305	Kota Palangkaraya	29.130.154.327	25.489.903.764	3.640.250.563	29.130.154.327
306	Kab. Barito Timur	19.212.070.527	8.379.467.164	10.832.603.363	19.212.070.527
307	Kab. Murung Raya	34.919.690.261	6.591.018.995	28.328.671.266	34.919.690.261
308	Kab. Pulang Pisau	10.433.911.846	3.813.680.662	6.620.231.184	10.433.911.846
309	Kab. Gunung Mas	15.202.948.402	5.843.504.151	9.359.444.251	15.202.948.402
310	Kab. Lamandau	21.722.468.535	5.021.805.119	16.700.663.416	21.722.468.535
311	Kab. Sukamara	11.770.258.682	4.169.245.945	7.601.012.737	11.770.258.682
312	Kab. Katingan	40.791.060.925	5.552.794.928	35.238.265.997	40.791.060.925

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
313	Kab. Seruyan	24.378.667.634	5.895.864.144	18.482.803.490	24.378.667.634
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**192.688.520.562**	**132.719.274.866**	**59.969.245.696**	**192.688.520.562**
315	Kab. Banjar	24.768.239.859	11.274.086.554	13.494.153.305	24.768.239.859
316	Kab. Barito Kuala	11.690.861.885	6.269.268.754	5.421.593.131	11.690.861.885
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	19.715.067.090	8.373.890.359	11.341.176.731	19.715.067.090
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	13.003.022.248	9.149.703.873	3.853.318.375	13.003.022.248
319	Kab. Hulu Sungai Utara	13.009.129.346	8.903.131.408	4.105.997.938	13.009.129.346
320	Kab. Kotabaru	31.799.656.942	15.142.843.023	16.656.813.919	31.799.656.942
321	Kab. Tabalong	62.927.707.638	15.962.676.865	46.965.030.773	62.927.707.638
322	Kab. Tanah Laut	29.051.039.129	12.935.901.665	16.115.137.464	29.051.039.129
323	Kab. Tapin	61.988.969.431	9.336.864.626	52.652.104.805	61.988.969.431
324	Kota Banjarbaru	27.774.129.264	24.209.984.383	3.564.144.881	27.774.129.264
325	Kota Banjarmasin	50.635.541.420	46.672.377.971	3.963.163.449	50.635.541.420

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
326	Kab. Balangan	27.289.055.984	11.155.647.962	16.133.408.022	27.289.055.984
327	Kab. Tanah Bumbu	94.570.641.866	15.858.665.625	78.711.976.241	94.570.641.866
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	**680.158.788.279**	**380.218.004.082**	**299.940.784.197**	**680.158.788.279**
329	Kab. Berau	66.829.654.662	42.515.774.685	24.313.879.977	66.829.654.662
330	Kab. Kutai Kartanegara	952.892.026.691	74.704.678.180	878.187.348.511	952.892.026.691
331	Kab. Kutai Barat	72.983.677.923	29.747.707.734	43.235.970.189	72.983.677.923
332	Kab. Kutai Timur	193.251.359.468	63.989.840.443	129.261.519.025	193.251.359.468
333	Kab. Mahakam Ulu	28.252.047.168	20.271.178.564	7.980.868.604	28.252.047.168
334	Kab. Paser	53.464.546.532	32.874.993.385	20.589.553.147	53.464.546.532
335	Kota Balikpapan	147.855.573.617	142.465.466.818	5.390.106.799	147.855.573.617
336	Kota Bontang	147.435.458.017	72.131.064.675	75.304.393.342	147.435.458.017
337	Kota Samarinda	101.584.468.766	71.900.296.258	29.684.172.508	101.584.468.766
338	Kab. Penajam Paser Utara	80.665.631.486	22.805.428.316	57.860.203.170	80.665.631.486

SK No 062586 C

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**79.431.732.249**	**27.857.628.303**	**51.574.103.946**	**79.431.732.249**
340	Kab. Bulungan	69.722.242.811	12.341.023.458	57.381.219.353	69.722.242.811
341	Kab. Malinau	34.979.905.378	5.792.410.258	29.187.495.120	34.979.905.378
342	Kab. Nunukan	48.321.336.380	6.039.348.038	42.281.988.342	48.321.336.380
343	Kab. Tana Tidung	15.135.641.148	4.227.234.635	10.908.406.513	15.135.641.148
344	Kota Tarakan	79.515.452.120	13.520.885.262	65.994.566.858	79.515.452.120
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**79.481.090.193**	**68.024.274.365**	**11.456.815.828**	**79.481.090.193**
346	Kab. Bolaang Mongondow	10.750.141.203	3.228.652.473	7.521.488.730	10.750.141.203
347	Kab. Minahasa	14.236.276.860	6.918.694.864	7.317.581.996	14.236.276.860
348	Kab. Sangihe	8.709.066.305	5.138.705.885	3.570.360.420	8.709.066.305
349	Kota Bitung	27.001.541.616	6.669.156.269	20.332.385.347	27.001.541.616
350	Kota Manado	43.416.120.548	39.771.593.076	3.644.527.472	43.416.120.548
351	Kab. Kepulauan Talaud	7.405.535.854	3.547.189.621	3.858.346.233	7.405.535.854

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
352	Kab. Minahasa Selatan	8.816.726.684	4.714.218.777	4.102.507.907	8.816.726.684
353	Kab. Minahasa Tenggara	6.980.199.827	3.307.542.391	3.672.657.436	6.980.199.827
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	6.600.224.070	3.049.732.969	3.550.491.101	6.600.224.070
355	Kota Kotamobagu	10.462.345.133	7.153.261.973	3.309.083.160	10.462.345.133
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.650.405.272	2.973.647.561	3.676.757.711	6.650.405.272
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10.237.754.343	2.797.408.684	7.440.345.659	10.237.754.343
358	Kota Tomohon	12.823.375.810	5.305.293.742	7.518.082.068	12.823.375.810
359	Kab. Minahasa Utara	11.390.662.735	7.040.197.255	4.350.465.480	11.390.662.735
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6.853.025.135	3.136.028.009	3.716.997.126	6.853.025.135
361	**Provinsi Gorontalo**	**20.664.123.645**	**18.953.452.104**	**1.710.671.541**	**20.664.123.645**
362	Kab. Boalemo	6.701.816.752	2.945.260.513	3.756.556.239	6.701.816.752
363	Kab. Gorontalo	10.001.403.520	5.480.497.487	4.520.906.033	10.001.403.520
364	Kota Gorontalo	14.152.844.187	10.801.408.747	3.351.435.440	14.152.844.187

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
365	Kab. Pohuwato	7.409.591.835	3.123.677.334	4.285.914.501	7.409.591.835
366	Kab. Gorontalo Utara	6.814.911.136	2.689.287.985	4.125.623.151	6.814.911.136
367	Kab. Bone Bolango	7.406.835.273	3.678.630.778	3.728.204.495	7.406.835.273
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**88.827.579.996**	**58.263.023.315**	**30.564.556.681**	**88.827.579.996**
369	Kab. Banggai	82.249.274.000	10.418.439.293	71.830.834.707	82.249.274.000
370	Kab. Banggai Laut	6.686.326.837	3.129.642.173	3.556.684.664	6.686.326.837
371	Kab. Banggai Kepulauan	6.884.504.128	3.134.880.693	3.749.623.435	6.884.504.128
372	Kab. Buol	8.572.990.205	3.466.253.502	5.106.736.703	8.572.990.205
373	Kab. Tolitoli	8.617.673.755	4.607.881.745	4.009.792.010	8.617.673.755
374	Kab. Donggala	9.647.214.881	4.813.466.023	4.833.748.858	9.647.214.881
375	Kab. Morowali	19.133.495.240	11.906.971.874	7.226.523.366	19.133.495.240
376	Kab. Morowali Utara	11.055.593.923	3.675.650.230	7.379.943.693	11.055.593.923
377	Kab. Poso	10.057.539.447	5.358.657.195	4.698.882.252	10.057.539.447

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
378	Kota Palu	26.297.054.246	22.758.753.174	3.538.301.072	26.297.054.246
379	Kab. Parigi Moutong	9.677.000.746	5.114.537.777	4.562.462.969	9.677.000.746
380	Kab. Sigi	8.290.802.514	4.406.117.480	3.884.685.034	8.290.802.514
381	Kab. Tojo Una Una	7.899.334.215	3.659.313.497	4.240.020.718	7.899.334.215
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**223.098.997.855**	**207.805.724.254**	**15.293.273.601**	**223.098.997.855**
383	Kab. Bantaeng	9.780.935.639	6.163.488.335	3.617.447.304	9.780.935.639
384	Kab. Barru	10.399.718.677	6.805.655.881	3.594.062.796	10.399.718.677
385	Kab. Bone	19.875.686.202	13.684.281.008	6.191.405.194	19.875.686.202
386	Kab. Bulukumba	13.973.924.251	9.453.065.660	4.520.858.591	13.973.924.251
387	Kab. Enrekang	9.726.052.819	5.723.138.083	4.002.914.736	9.726.052.819
388	Kab. Gowa	16.321.680.269	10.828.278.396	5.493.401.873	16.321.680.269
389	Kab. Jeneponto	13.055.018.918	8.313.541.236	4.741.477.682	13.055.018.918
390	Kab. Luwu	12.143.677.337	7.121.797.135	5.021.880.202	12.143.677.337

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
391	Kab. Luwu Utara	11.553.435.329	6.983.841.503	4.569.593.826	11.553.435.329
392	Kab. Maros	16.600.486.869	11.742.107.570	4.858.379.299	16.600.486.869
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	20.242.051.573	14.005.294.847	6.236.756.726	20.242.051.573
394	Kab. Pinrang	12.286.822.318	8.365.368.318	3.921.454.000	12.286.822.318
395	Kab. Kepulauan Selayar	10.562.848.475	6.508.452.232	4.054.396.243	10.562.848.475
396	Kab. Sidenreng Rappang	10.948.046.348	6.795.661.037	4.152.385.311	10.948.046.348
397	Kab. Sinjai	10.977.249.909	7.350.837.690	3.626.412.219	10.977.249.909
398	Kab. Soppeng	11.739.798.919	7.998.578.709	3.741.220.210	11.739.798.919
399	Kab. Takalar	11.455.510.553	7.367.810.655	4.087.699.898	11.455.510.553
400	Kab. Tana Toraja	11.426.556.537	7.746.418.602	3.680.137.935	11.426.556.537
401	Kab. Wajo	32.778.116.010	10.286.916.918	22.491.199.092	32.778.116.010
402	Kota Parepare	12.918.528.143	9.569.523.547	3.349.004.596	12.918.528.143
403	Kab. Toraja Utara	9.937.970.914	6.340.264.552	3.597.706.362	9.937.970.914

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
404	Kota Makassar	113.943.184.588	108.596.990.852	5.346.193.736	113.943.184.588
405	Kota Palopo	13.444.909.193	10.098.664.494	3.346.244.699	13.444.909.193
406	Kab. Luwu Timur	29.385.873.680	16.890.514.366	12.495.359.314	29.385.873.680
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**16.754.272.669**	**13.885.896.576**	**2.868.376.093**	**16.754.272.669**
408	Kab. Majene	6.902.639.713	3.089.744.497	3.812.895.216	6.902.639.713
409	Kab. Mamuju	12.119.641.145	6.867.252.792	5.252.388.353	12.119.641.145
410	Kab. Mamuju Tengah	5.711.810.100	1.785.939.224	3.925.870.876	5.711.810.100
411	Kab. Polewali Mandar	8.477.776.899	4.394.595.067	4.083.181.832	8.477.776.899
412	Kab. Mamasa	6.076.572.614	2.146.688.399	3.929.884.215	6.076.572.614
413	Kab. Pasangkayu	9.685.006.284	2.600.048.084	7.084.958.200	9.685.006.284
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**53.578.906.334**	**40.443.347.492**	**13.135.558.842**	**53.578.906.334**
415	Kab. Buton	5.765.800.871	2.534.452.893	3.231.347.978	5.765.800.871
416	Kab. Konawe	8.205.171.903	2.778.305.257	5.426.866.646	8.205.171.903

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
417	Kab. Konawe Kepulauan	4.799.587.852	1.379.226.094	3.420.361.758	4.799.587.852
418	Kab. Kolaka	21.963.239.917	6.816.800.242	15.146.439.675	21.963.239.917
419	Kab. Kolaka Timur	5.259.079.925	1.682.350.352	3.576.729.573	5.259.079.925
420	Kab. Muna	6.882.779.661	3.511.768.141	3.371.011.520	6.882.779.661
421	Kota Kendari	24.618.642.558	21.064.690.706	3.553.951.852	24.618.642.558
422	Kota Bau-bau	8.407.369.098	4.563.697.495	3.843.671.603	8.407.369.098
423	Kab. Konawe Selatan	11.620.164.986	3.839.653.719	7.780.511.267	11.620.164.986
424	Kab. Bombana	11.653.391.439	2.000.649.991	9.652.741.448	11.653.391.439
425	Kab. Konawe Utara	19.140.409.146	1.746.620.823	17.393.788.323	19.140.409.146
426	Kab. Buton Utara	5.419.676.784	1.688.153.466	3.731.523.318	5.419.676.784
427	Kab. Wakatobi	5.957.125.395	2.222.823.992	3.734.301.403	5.957.125.395
428	Kab. Kolaka Utara	5.689.209.704	1.730.838.590	3.958.371.114	5.689.209.704
429	Kab. Muna Barat	4.968.612.699	1.798.626.808	3.169.985.891	4.968.612.699

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
430	Kab. Buton Tengah	5.185.680.631	1.763.751.133	3.421.929.498	5.185.680.631
431	Kab. Buton Selatan	5.224.557.486	1.635.216.496	3.589.340.990	5.224.557.486
432	**Provinsi Bali**	**204.331.407.396**	**202.156.769.121**	**2.174.638.275**	**204.331.407.396**
433	Kab. Badung	87.497.774.663	83.920.455.843	3.577.318.820	87.497.774.663
434	Kab. Bangli	18.235.715.856	14.763.487.390	3.472.228.466	18.235.715.856
435	Kab. Buleleng	30.907.360.846	26.735.429.304	4.171.931.542	30.907.360.846
436	Kab. Gianyar	30.991.950.542	27.401.941.089	3.590.009.453	30.991.950.542
437	Kab. Jembrana	18.660.092.261	14.916.731.486	3.743.360.775	18.660.092.261
438	Kab. Karangasem	21.429.345.761	17.509.881.242	3.919.464.519	21.429.345.761
439	Kab. Klungkung	18.439.978.173	15.098.426.191	3.341.551.982	18.439.978.173
440	Kab. Tabanan	25.821.821.932	21.894.163.600	3.927.658.332	25.821.821.932
441	Kota Denpasar	84.437.679.381	80.639.376.791	3.798.302.590	84.437.679.381
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**92.909.075.784**	**81.984.219.002**	**10.924.856.782**	**92.909.075.784**

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
443	Kab. Bima	14.011.518.785	9.055.083.530	4.956.435.255	14.011.518.785
444	Kab. Dompu	10.828.884.564	7.035.442.582	3.793.441.982	10.828.884.564
445	Kab. Lombok Barat	14.598.964.094	10.502.273.390	4.096.690.704	14.598.964.094
446	Kab. Lombok Tengah	13.959.796.873	9.372.037.954	4.587.758.919	13.959.796.873
447	Kab. Lombok Timur	16.219.427.091	11.025.216.109	5.194.210.982	16.219.427.091
448	Kab. Sumbawa	33.584.803.598	10.987.514.459	22.597.289.139	33.584.803.598
449	Kota Mataram	34.126.743.416	30.435.705.983	3.691.037.433	34.126.743.416
450	Kab. Lombok Utara	9.987.850.880	6.579.822.007	3.408.028.873	9.987.850.880
451	Kota Bima	11.996.865.746	8.547.896.719	3.448.969.027	11.996.865.746
452	Kab. Sumbawa Barat	24.449.592.177	17.367.139.776	7.082.452.401	24.449.592.177
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**65.427.679.043**	**59.222.650.846**	**6.205.028.197**	**65.427.679.043**
454	Kab. Alor	6.490.535.094	2.658.161.812	3.832.373.282	6.490.535.094
455	Kab. Belu	7.160.449.851	3.806.757.183	3.353.692.668	7.160.449.851

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
456	Kab. Ende	9.489.035.032	5.411.188.491	4.077.846.541	9.489.035.032
457	Kab. Flores Timur	7.153.972.716	3.120.180.503	4.033.792.213	7.153.972.716
458	Kab. Kupang	8.103.080.726	3.994.764.015	4.108.316.711	8.103.080.726
459	Kab. Lembata	6.232.300.654	2.613.496.711	3.618.803.943	6.232.300.654
460	Kab. Malaka	5.697.019.394	2.455.426.583	3.241.592.811	5.697.019.394
461	Kab. Manggarai	9.261.426.241	4.395.377.565	4.866.048.676	9.261.426.241
462	Kab. Ngada	6.164.476.763	2.313.660.614	3.850.816.149	6.164.476.763
463	Kab. Sikka	8.251.430.724	4.489.966.629	3.761.464.095	8.251.430.724
464	Kab. Sumba Barat	5.949.869.806	2.531.112.842	3.418.756.964	5.949.869.806
465	Kab. Sumba Timur	8.709.772.246	3.861.150.441	4.848.621.805	8.709.772.246
466	Kab. Timor Tengah Selatan	7.759.325.799	3.153.093.637	4.606.232.162	7.759.325.799
467	Kab. Timor Tengah Utara	6.498.596.626	2.657.526.384	3.841.070.242	6.498.596.626
468	Kota Kupang	28.322.114.125	24.565.159.439	3.756.954.686	28.322.114.125

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
469	Kab. Rote Ndao	6.451.987.875	2.756.812.894	3.695.174.981	6.451.987.875
470	Kab. Nagekeo	6.103.423.529	2.532.761.804	3.570.661.725	6.103.423.529
471	Kab. Sumba Tengah	5.287.348.855	1.737.449.420	3.549.899.435	5.287.348.855
472	Kab. Sumba Barat Daya	6.267.457.827	2.533.805.385	3.733.652.442	6.267.457.827
473	Kab. Manggarai Timur	6.217.126.766	2.534.384.774	3.682.741.992	6.217.126.766
474	Kab. Sabu Raijua	5.218.993.199	1.929.734.796	3.289.258.403	5.218.993.199
475	Kab. Manggarai Barat	7.301.532.283	3.505.069.954	3.796.462.329	7.301.532.283
476	**Provinsi Maluku**	**45.254.587.302**	**36.255.702.595**	**8.998.884.707**	**45.254.587.302**
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	7.067.906.813	2.536.671.693	4.531.235.120	7.067.906.813
478	Kab. Maluku Tengah	12.184.100.572	5.521.567.051	6.662.533.521	12.184.100.572
479	Kab. Maluku Tenggara	6.720.141.836	2.874.041.960	3.846.099.876	6.720.141.836
480	Kab. Buru	7.205.704.032	2.745.884.003	4.459.820.029	7.205.704.032
481	Kota Ambon	26.578.437.822	22.901.160.702	3.677.277.120	26.578.437.822

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
482	Kab. Seram Bagian Barat	7.310.034.905	2.801.786.104	4.508.248.801	7.310.034.905
483	Kab. Seram Bagian Timur	23.223.506.022	2.327.707.297	20.895.798.725	23.223.506.022
484	Kab. Maluku Barat Daya	11.403.973.355	6.486.190.566	4.917.782.789	11.403.973.355
485	Kab. Buru Selatan	6.292.789.366	1.992.330.420	4.300.458.946	6.292.789.366
486	Kab. Kepulauan Aru	7.432.116.763	2.574.371.850	4.857.744.913	7.432.116.763
487	Kota Tual	5.689.100.234	2.079.931.880	3.609.168.354	5.689.100.234
488	**Provinsi Maluku Utara**	**40.609.857.945**	**30.163.453.914**	**10.446.404.031**	**40.609.857.945**
489	Kab. Halmahera Tengah	7.162.493.144	2.135.215.753	5.027.277.391	7.162.493.144
490	Kab. Halmahera Barat	6.893.961.964	2.794.742.816	4.099.219.148	6.893.961.964
491	Kota Ternate	17.286.412.409	13.353.657.076	3.932.755.333	17.286.412.409
492	Kab. Halmahera Timur	12.139.130.316	3.091.843.133	9.047.287.183	12.139.130.316
493	Kota Tidore Kepulauan	8.643.686.934	4.808.882.958	3.834.803.976	8.643.686.934
494	Kab. Kepulauan Sula	6.659.529.126	2.123.431.393	4.536.097.733	6.659.529.126

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
495	Kab. Pulau Morotai	6.194.876.245	2.248.728.040	3.946.148.205	6.194.876.245
496	Kab. Pulau Taliabu	6.964.903.670	2.011.892.323	4.953.011.347	6.964.903.670
497	Kab. Halmahera Selatan	19.154.329.854	3.773.644.937	15.380.684.917	19.154.329.854
498	Kab. Halmahera Utara	22.103.771.025	10.335.585.855	11.768.185.170	22.103.771.025
499	**Provinsi Papua**	**269.060.225.668**	**222.650.508.357**	**46.409.717.311**	**269.060.225.668**
500	Kab. Yalimo	7.324.427.888	3.767.337.121	3.557.090.767	7.324.427.888
501	Kab. Lanny Jaya	7.691.134.973	3.926.075.498	3.765.059.475	7.691.134.973
502	Kab. Biak Numfor	11.465.280.376	8.007.056.838	3.458.223.538	11.465.280.376
503	Kab. Jayapura	13.806.807.479	8.516.803.657	5.290.003.822	13.806.807.479
504	Kab. Jayawijaya	11.493.308.872	7.916.516.770	3.576.792.102	11.493.308.872
505	Kab. Merauke	21.445.492.513	10.759.811.936	10.685.680.577	21.445.492.513
506	Kab. Mimika	272.474.081.449	158.162.014.864	114.312.066.585	272.474.081.449
507	Kab. Nabire	14.230.723.719	7.121.395.617	7.109.328.102	14.230.723.719

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
508	Kab. Paniai	9.672.524.281	5.608.078.533	4.064.445.748	9.672.524.281
509	Kab. Puncak Jaya	9.414.930.753	4.942.962.593	4.471.968.160	9.414.930.753
510	Kab. Kepulauan Yapen	10.793.883.601	6.593.715.390	4.200.168.211	10.793.883.601
511	Kota Jayapura	38.283.836.475	35.277.153.554	3.006.682.921	38.283.836.475
512	Kab. Sarmi	17.611.169.130	4.611.367.800	12.999.801.330	17.611.169.130
513	Kab. Keerom	11.046.825.100	5.115.971.250	5.930.853.850	11.046.825.100
514	Kab. Yahukimo	9.945.441.824	4.475.045.095	5.470.396.729	9.945.441.824
515	Kab. Pegunungan Bintang	10.363.780.999	4.897.747.682	5.466.033.317	10.363.780.999
516	Kab. Tolikara	9.241.866.603	4.601.002.413	4.640.864.190	9.241.866.603
517	Kab. Boven Digoel	20.301.031.221	8.411.266.266	11.889.764.955	20.301.031.221
518	Kab. Mappi	10.570.576.461	4.311.726.224	6.258.850.237	10.570.576.461
519	Kab. Asmat	11.633.757.403	5.517.552.598	6.116.204.805	11.633.757.403
520	Kab. Waropen	10.613.279.510	4.347.113.083	6.266.166.427	10.613.279.510

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
521	Kab. Mamberamo Raya	11.507.210.426	4.116.366.718	7.390.843.708	11.507.210.426
522	Kab. Mamberamo Tengah	8.219.684.721	4.402.687.306	3.816.997.415	8.219.684.721
523	Kab. Nduga	7.559.744.669	3.664.564.881	3.895.179.788	7.559.744.669
524	Kab. Dogiyai	8.462.242.521	4.147.891.359	4.314.351.162	8.462.242.521
525	Kab. Intan Jaya	8.982.081.010	4.582.845.234	4.399.235.776	8.982.081.010
526	Kab. Puncak	8.559.571.259	3.810.702.940	4.748.868.319	8.559.571.259
527	Kab. Deiyai	11.526.821.153	5.999.929.882	5.526.891.271	11.526.821.153
528	Kab. Supiori	8.375.927.770	4.384.646.018	3.991.281.752	8.375.927.770
529	**Provinsi Papua Barat**	**170.600.462.644**	**43.633.027.029**	**126.967.435.615**	**170.600.462.644**
530	Kab. Sorong	117.385.577.739	4.405.347.056	112.980.230.683	117.385.577.739
531	Kab. Manokwari	20.039.084.474	12.828.866.243	7.210.218.231	20.039.084.474
532	Kab. Manokwari Selatan	6.903.495.579	2.060.111.423	4.843.384.156	6.903.495.579
533	Kab. Fak Fak	19.120.062.297	3.559.752.183	15.560.310.114	19.120.062.297

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
534	Kota Sorong	26.424.715.818	12.817.990.216	13.606.725.602	26.424.715.818
535	Kab. Pegunungan Arfak	10.483.840.954	1.906.290.658	8.577.550.296	10.483.840.954
536	Kab. Sorong Selatan	8.912.952.563	3.065.930.629	5.847.021.934	8.912.952.563
537	Kab. Raja Ampat	11.406.222.944	2.657.502.468	8.748.720.476	11.406.222.944
538	Kab. Teluk Bintuni	332.980.447.765	14.289.689.761	318.690.758.004	332.980.447.765
539	Kab. Teluk Wondama	7.984.039.217	2.324.199.559	5.659.839.658	7.984.039.217
540	Kab. Tambrauw	7.568.950.029	1.881.409.235	5.687.540.794	7.568.950.029
541	Kab. Maybrat	7.560.634.102	1.814.984.382	5.745.649.720	7.560.634.102
542	Kab. Kaimana	9.981.670.542	3.037.417.563	6.944.252.979	9.981.670.542
	Dana Cadangan	-	-	-	-
	JUMLAH	**44.283.738.827.545**	**31.159.010.681.964**	**13.124.728.145.581**	**44.283.738.827.545**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Aceh	418.076.408.579	201.305.967.336	204.747.174.388	11.657.918.396	289.197.053	66.151.406	-	418.076.408.579
2	Kab. Aceh Barat	16.665.779.009	1.168.621.218	1.704.800.083	12.954.007.634	27.200.181	21.012.254	788.276.289	16.663 917.659
3	Kab. Aceh Besar	4.601.240.178	1.168.621.218	1.704.800.083	674.048.492	254.188.300	11 305.796	788.276.289	4.601.240.178
4	Kab. Aceh Selatan	4.368.711.855	1.168.621.218	1 704.800.083	669.222.267	27.200.181	8.588.417	789 276.289	4.366.708.455
5	Kab. Aceh Singkil	4.711 279.354	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.624.957	27.200 181	12 666.826	788.276.289	4.709 189.554
6	Kab. Aceh Tengah	5.010.290 433	1.168 621.218	1.704.800.083	1.268.770.345	27.200.181	52 622 317	788.276.289	5.010.290.433
7	Kab. Aceh Tenggara	4.702 295 054	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	27.200 181	5 800 182	788.276.289	4.702.295.054
8	Kab. Aceh Timur	10.567 447.758	914.218.247	7.814.050.057	1.007.597.101	27.200 181	13 067.483	788.276.289	10.564.409.358
9	Kab. Aceh Utara	40.891.421.366	16 792.753.915	22.260.902.791	1.007.597.101	27.200.181	12.987 089	788 276.289	40.689.717.366
10	Kab Bireuen	4.702.812.025	1.168.621 218	1.704 800.083	1 007.599.872	27 200.181	5.121.282	788.276.289	4 701.618.925
11	Kab Pidie	4.506.940.098	1.168.621.218	1.704.800.083	809.618 861	27.200.181	7.092 966	788.276.289	4.505.609 598
12	Kab Simeulue	4.716.096.184	1.168.621 218	1.704 800.083	1 007.597.101	27.200.181	19.601 312	788.276.289	4 716.096 184
13	Kota Banda Aceh	4.708.441.254	1.168.621.218	1.704.800.083	1.013.229.101	27.200.181	5.121.282	788.276.289	4.707.248.154
14	Kota Sabang	4.765.177.173	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	80.082.300	5.800 182	788.276.289	4.765.177.173
15	Kota Langsa	4 702.952.111	1.168.621.218	1.704.800.083	1 007.597.101	27.200.181	5.238.039	788.276.289	4 701.732.911
16	Kota Lhokseumawe	4.702 295.054	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007 597.101	27.200.181	5 800.182	788.276.289	4.702 295 054
17	Kab. Nagan Raya	6.608.148 826	1.168 621.218	1 704.800.083	2.902.208.297	27.200.181	14.635.958	788.276.289	6.605.742.026
18	Kab. Aceh Jaya	4.713.797.782	1.168.621.218	1.704.800.083	1.007.605.093	27.200.181	17.294.918	788.276.289	4.713 797 782
19	Kab. Pidie Jaya	4.702.296.411	1.168.621.218	1 704.800.083	1.007.598.458	27.200.181	5.800.182	788.276 289	4.702.296.411
20	Kab Aceh Barat Daya	4.756.052.200	1 168.621.218	1 704.800.083	1.062.838.586	27.200.181	5.122.743	788.276.289	4.756.859.100
21	Kab Gayo Lues	4.739.565.246	1.168.621.218	1 704.800.083	1.014.831.332	27.200.181	35.836.143	788.276 289	4.739.565.246
22	Kab Aceh Tamiang	6.291.308.854	2.754.758.000	1.704.800.083	1 007.598.865	27.200.181	8 675.436	788.276.289	6.291 308.854
23	Kab Bener Meriah	4.719.991.882	1 168.621.218	1.704.800.083	1.007.597.101	27.200.181	19.066.860	788.276.289	4.715.561.732

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Kota Subulussalam	4.707.348.323	1.168.621.218	1.704.800.083	1.009.577.287	27.200.181	7.680.165	788.276.289	4.706.155.223
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**50.054.517.483**	**1.388.215.649**	**2.447.905.099**	**32.141.836.764**	**2.157.945.760**	**9.208.845.071**	**-**	**47.343.948.283**
26	Kab. Asahan	3.217.747.384	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	149.175.152	788.276.289	3.188.090.884
27	Kab. Dairi	3.717.988.940	86.763.394	152.993.963	2.375.540.443	134.870.850	179.544.001	788.276.289	3.717.988.940
28	Kab. Deli Serdang	3.222.705.320	31.042.000	227.267.027	1.876.011.236	134.870.850	165.237.918	788.276.289	3.222.705.320
29	Kab. Karo	3.390.794.464	86.763.394	152.993.963	1.876.013.502	134.870.850	351.876.466	788.276.289	3.390.794.464
30	Kab. LabuhanBatu	3.195.358.644	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	126.820.162	788.276.289	3.165.735.894
31	Kab. Langkat	6.797.956.116	567.821.800	3.250.372.761	1.876.011.284	134.870.850	150.692.732	788.276.289	6.767.845.716
32	Kab. Mandailing Natal	10.862.855.988	86.763.394	152.993.963	4.902.203.156	4.315.893.350	557.831.486	788.276.289	10.803.961.638
33	Kab. Nias	3.204.695.676	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	165.779.944	788.276.289	3.204.695.676
34	Kab. Simalungun	4.233.846.033	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	1.088.356.501	788.276.289	4.127.272.233
35	Kab. Tapanuli Selatan	46.645.496.241	86.763.394	152.993.963	44.971.923.854	134.870.850	510.667.891	788.276.289	46.645.496.241
36	Kab. Tapanuli Tengah	3.881.094.661	86.763.394	152.993.963	2.574.511.103	134.870.850	143.679.062	788.276.289	3.881.094.661
37	Kab. Tapanuli Utara	4.100.175.709	86.763.394	152.993.963	2.339.354.032	134.870.850	597.917.181	788.276.289	4.100.175.709
38	Kab. Toba Samosir	3.621.311.919	86.763.394	152.993.963	1.876.030.779	134.870.850	582.376.644	788.276.289	3.621.311.919
39	Kota Binjai	3.230.114.759	113.027.794	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.230.114.759
40	Kota Medan	3.184.635.410	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	145.719.678	788.276.289	3.184.635.410
41	Kota Pematang Siantar	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
42	Kota Sibolga	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
43	Kota Tanjung Balai	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
44	Kab. Batu Bara	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
45	Kab. LabuhanBatu Utara	3.486.345.773	86.763.394	152.993.963	2.113.870.971	134.870.850	209.570.306	788.276.289	3.486.345.773
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	5.605.014.139	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	2.566.098.407	788.276.289	5.605.014.139

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kab. Padang Lawas Utara	3.652.459.862	86.763.394	152.993.963	1.878.012.627	134.870.850	613.542.739	786.276.289	3.652.459.862
48	Kab. Padang Lawas	3.875.671.419	269.251.600	105.382.629	1.876.011.236	134.870.850	701.878.815	788.276.289	3.875.671.419
49	Kab. Nias Utara	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
50	Kab. Nias Barat	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
51	Kota Tebing Tinggi	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
52	Kota Padang Sidempuan	3.518.527.374	86.763.394	152.993.963	2.190.688.251	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.518.527.374
53	Kab. Pakpak Bharat	3.224.236.714	86.763.394	152.993.963	1.885.854.639	134.870.850	175.477.579	788.276.289	3.224.236.714
54	Kab. Nias Selatan	3.869.880.046	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	783.423.464	788.276.289	3.822.339.196
55	Kab. Humbang Hasundutan	3.541.322.125	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	502.406.393	788.276.289	3.541.322.125
56	Kab. Serdang Bedagai	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
57	Kab. Samosir	3.561.802.990	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	434.608.608	788.276.289	3.473.524.340
58	Kota Gunungsitoli	3.203.850.359	86.763.394	152.993.963	1.876.011.236	134.870.850	164.934.627	788.276.289	3.203.850.359
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**21.226.632.583**	**121.446.200**	-	**6.009.405.666**	**3.531.910.500**	**8.736.178.287**	-	**18.399.940.633**
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.814.271.538	13.494.000	-	501.254.336	392.434.650	118.812.263	788.276.289	1.814.271.538
61	Kab. Agam	1.714.412.873	13.494.000	-	396.116.251	392.434.650	100.586.383	788.276.289	1.690.907.573
62	Kab. Kepulauan Mentawai	3.841.866.151	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	1.662.709.526	788.276.289	3.498.768.001
63	Kab. Padang Pariaman	1.948.710.482	13.494.000	-	641.853.557	392.434.650	112.651.986	788.276.289	1.948.710.482
64	Kab. Pasaman	2.058.650.659	13.494.000	-	746.750.677	392.434.650	117.695.043	788.276.289	2.058.650.659
65	Kab. Pesisir Selatan	1.781.040.996	13.494.000	-	462.724.000	392.434.650	124.112.057	788.276.289	1.781.040.996
66	Kab. Sijunjung	4.810.891.932	242.891.600	-	3.120.725.693	392.434.650	266.563.700	788.276.289	4.810.891.932
67	Kab. Solok	1.870.959.096	13.494.000	-	457.748.950	473.880.950	111.515.607	788.276.289	1.844.915.796
68	Kab. Tanah Datar	2.000.418.102	13.494.000	-	691.422.882	392.434.650	114.790.281	788.276.289	2.000.418.102
69	Kota Bukit Tinggi	1.948.710.461	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.651.986	788.276.289	1.948.710.461

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Kota Padang Panjang	1.948.710.461	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.651.986	788.276.289	1.948.710.461
71	Kota Padang	1.951.141.963	13.494.000	-	641.854.388	392.434.650	115.082.636	788.276.289	1.951.141.963
72	Kota Payakumbuh	1.948.804.761	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.746.286	788.276.289	1.948.804.761
73	Kota Sawahlunto	6.869.707.138	13.494.000	-	5.560.978.323	392.434.650	114.523.876	788.276.289	6.869.707.138
74	Kota Solok	1.948.737.961	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.679.486	788.276.289	1.948.737.961
75	Kota Pariaman	1.948.740.261	13.494.000	-	641.853.536	392.434.650	112.681.786	788.276.289	1.948.740.261
76	Kab. Pasaman Barat	1.702.758.535	13.494.000	-	393.034.450	392.434.650	115.519.146	788.276.289	1.702.758.535
77	Kab. Dharmasraya	2.232.552.686	13.494.000	-	800.580.673	392.434.650	196.415.524	788.276.289	2.191.201.136
78	Kab. Solok Selatan	8.454.422.436	13.494.000	-	482.302.150	6.982.373.200	187.976.797	788.276.289	8.454.422.436
79	**Provinsi Riau**	**1.081.954.623.283**	**1.024.329.791.086**	**15.469.674.385**	**12.778.899.819**	**-**	**27.456.578.252**	**-**	**1.080.034.943.533**
80	Kab. Bengkalis	678.795.484.056	664.127.549.795	2.437.549.637	2.116.852.709	-	9.325.255.626	788.276.289	678.795.484.056
81	Kab. Indragiri Hilir	217.141.053.090	186.241.780.185	2.812.667.412	11.870.909.091	-	15.427.420.113	788.276.289	217.141.053.090
82	Kab. Indragiri Hulu	135.089.692.830	122.037.868.469	2.437.549.637	4.871.349.598	-	4.954.648.837	788.276.289	135.089.692.830
83	Kab. Kampar	301.260.803.179	286.126.734.115	5.420.651.400	1.516.142.502	-	7.408.898.873	788.276.289	301.260.803.179
84	Kab. Kuantan Singingi	198.371.688.323	186.241.780.185	2.812.667.412	2.583.118.050	-	5.945.846.387	788.276.289	198.371.688.323
85	Kab. Pelalawan	162.213.408.312	124.029.406.535	23.002.846.874	2.169.054.710	-	12.223.823.904	788.276.289	162.213.408.312
86	Kab. Rokan Hilir	420.671.590.688	410.447.121.568	2.437.549.637	2.116.852.709	-	4.881.790.495	788.276.289	420.671.590.688
87	Kab. Rokan Hulu	146.177.129.855	136.721.430.610	2.437.549.637	1.536.167.170	-	4.693.706.149	788.276.289	146.177.129.855
88	Kab. Siak	342.358.735.100	326.280.381.882	2.437.549.637	2.116.852.709	-	10.755.694.583	788.276.289	342.358.735.100
89	Kota Dumai	197.525.362.203	186.241.780.185	2.812.667.412	2.116.852.709	-	5.565.785.608	788.276.289	197.525.362.203
90	Kota Pekanbaru	196.119.338.509	186.241.780.185	2.812.667.412	2.116.852.709	-	3.672.114.764	788.276.289	195.631.691.359
91	Kab. Kepulauan Meranti	150.925.654.067	128.400.829.545	5.335.509.745	9.767.492.630	-	5.815.156.358	788.276.289	150.107.264.567
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**263.350.472.820**	**59.225.856.348**	**185.154.952.845**	**7.717.764.250**	**-**	**728.399.277**	**-**	**262.826.971.820**

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Kab. Bintan	169.890.163.651	29.998.397.771	134.547.375.146	4.490.161.204	-	59.233.241	788.276.289	169.883.443.651
94	Kab. Natuna	142.613.163.396	73.514.540.564	64.552.219.866	3.695.534.467	-	55.997.010	788.276.288	142.606.568.196
95	Kab. Karimun	172.521.781.952	29.998.397.771	134.547.375.146	7.006.117.804	-	162.642.192	788.276.289	172.502.809.202
96	Kota Batam	168.094.963.385	29.998.397.771	134.547.375.146	3.695.534.467	-	58.382.962	788.276.289	169.087.968.635
97	Kab. Kepulauan Anambas	113.666.205.099	48.493.414.016	60.652.861.332	3.695.534.467	-	36.118.985	788.276.289	113.666.205.099
98	Kota Tanjung Pinang	169.085.640.104	29.998.397.771	134.547.375.146	3.671.366.596	-	80.204.302	788.276.289	169.085.640.104
99	Kab. Lingga	168.846.613.152	29.998.397.771	134.547.375.146	3.269.965.566	-	242.598.380	788.276.289	168.846.613.152
100	**Provinsi Jambi**	**287.970.986.801**	**69.806.145.732**	**169.254.868.721**	**43.151.246.616**	-	**5.995.788.932**	-	**287.448.050.001**
101	Kab. Batanghari	40.673.294.324	8.192.007.400	20.205.986.038	9.237.198.702	-	2.249.825.895	788.276.289	40.673.294.324
102	Kab. Bungo	70.948.851.371	13.801.228.804	33.850.974.823	21.485.876.888	-	1.022.694.567	788.276.289	70.948.851.371
103	Kab. Kerinci	57.643.344.547	13.801.228.804	33.850.974.823	8.212.393.311	-	990.471.320	788.276.289	57.643.344.547
104	Kab. Merangin	55.383.582.129	13.801.228.804	33.850.974.823	5.729.626.684	-	1.213.475.529	788.276.289	55.383.582.129
105	Kab. Muaro Jambi	37.612.729.716	9.654.008.600	20.481.103.556	4.935.739.051	-	1.753.602.218	788.276.289	37.612.729.716
106	Kab. Sarolangun	70.117.416.830	9.217.862.600	20.222.707.110	38.325.808.753	-	1.562.662.078	788.276.289	70.117.416.830
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	269.228.843.317	83.640.569.567	174.705.136.652	5.769.755.034	-	3.738.087.375	788.276.289	268.641.824.917
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	84.793.317.713	26.785.822.336	46.488.948.024	8.212.393.312	-	2.517.877.752	788.276.289	84.793.317.713
109	Kab. Tebo	59.997.036.928	13.085.018.595	33.950.974.823	10.485.493.489	-	1.807.273.732	788.276.289	59.997.036.928
110	Kota Jambi	38.539.994.057	9.394.321.400	20.150.278.238	8.212.393.311	-	994.724.819	788.276.289	38.539.994.057
111	Kota Sungai Penuh	57.669.262.708	13.801.228.804	33.850.974.823	8.212.393.311	-	1.016.389.481	788.276.289	57.669.262.708
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.337.714.908.132**	**137.815.727.204**	**827.944.724.992**	**361.336.756.514**	**1.483.648.200**	**8.276.289.222**	-	**1.336.857.066.132**
113	Kab. Lahat	304.779.330.227	12.671.423.960	84.596.876.520	204.864.165.050	581.687.000	1.276.901.408	788.276.289	304.779.330.227
114	Kab. Musi Banyuasin	1.212.965.665.238	173.820.337.137	953.637.705.532	80.716.001.796	185.915.100	3.817.429.384	788.276.289	1.212.965.665.238
115	Kab. Musi Rawas	217.486.916.225	18.535.243.402	160.838.733.832	35.366.472.496	185.915.100	2.026.122.656	734.428.739	217.486.916.225

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Kab. Musi Rawas Utara	113.183.515.242	14.160.350.477	70.019.632.607	27.004.128.700	185.996.350	1.078.978.369	734.428.739	113.183.515.242
117	Kab. Muara Enim	463.864.249.617	17.369.602.000	116.658.743.760	324.456.886.081	2.014.009.250	2.630.579.777	734.428.739	463.864.249.617
118	Kab. Ogan Komering Ilir	172.332.462.314	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.238.917	185.915.100	5.361.016.596	788.276.289	172.332.462.314
119	Kab. Ogan Komering Ulu	133.869.536.549	20.897.703.860	76.759.250.605	34.295.320.886	185.915.100	825.564.309	788.276.289	133.752.031.049
120	Kota Palembang	167.821.519.694	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.091.731	185.915.100	850.221.162	788.276.289	167.821.519.694
121	Kota Pagar Alam	169.028.480.878	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.091.731	740.939.350	502.158.096	788.276.289	168.028.480.878
122	Kota Lubuk Linggau	167.821.519.694	17.785.924.331	103.493.091.081	44.718.091.731	185.915.100	850.221.162	788.276.289	167.821.519.694
123	Kota Prabumulih	124.537.149.282	11.548.666.400	77.762.624.275	33.401.421.806	185.915.100	850.245.412	788.276.289	124.537.149.282
124	Kab. Empat Lawang	156.081.378.648	17.785.924.331	103.493.091.081	32.977.950.685	185.915.100	850.221.162	788.276.289	156.081.378.648
125	Kab. Banyuasin	126.784.039.487	14.361.998.800	70.019.632.607	37.814.705.383	185.915.100	3.613.511.308	788.276.289	126.784.039.487
126	Kab. Ogan Ilir	128.693.063.985	11.805.201.000	70.019.632.607	45.032.817.627	185.915.100	850.221.162	788.276.289	128.693.063.985
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	169.737.326.501	17.785.924.331	103.493.091.081	46.573.035.287	185.915.100	911.084.413	788.276.289	169.737.326.501
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	153.617.681.116	17.785.924.331	103.493.091.081	30.526.936.385	188.409.100	835.043.930	788.276.289	153.617.681.116
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	117.128.891.254	9.648.711.000	67.539.886.934	38.073.969.388	185.996.350	945.898.843	734.428.739	117.128.891.254
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**85.158.646.596**	**1.752.097.200**	**-**	**83.060.431.089**	**-**	**42.799.307**	**-**	**84.855.327.596**
131	Kab. Bangka	57.795.135.906	904.465.750	-	56.083.264.114	-	18.129.753	788.276.289	57.795.135.906
132	Kab. Belitung	30.877.045.729	904.465.750	-	29.155.291.900	-	28.011.790	788.276.289	30.877.045.729
133	Kota Pangkal Pinang	24.164.015.189	904.465.750	-	22.458.071.108	-	13.202.042	788.276.289	24.164.015.189
134	Kab. Bangka Selatan	42.876.894.940	904.465.750	-	41.170.798.974	-	13.353.927	788.276.289	42.876.894.940
135	Kab. Bangka Tengah	38.319.772.644	904.465.750	-	36.613.688.413	-	13.342.192	788.276.289	38.319.772.644
136	Kab. Bangka Barat	51.191.571.591	904.465.750	-	49.484.774.764	-	14.054.768	788.276.289	51.191.571.591
137	Kab. Belitung Timur	34.378.730.175	904.465.750	-	32.629.858.950	-	56.329.186	788.276.289	34.378.730.175
138	**Provinsi Bengkulu**	**29.314.660.784**	**-**	**-**	**28.225.551.061**	**279.782.030**	**408.091.693**	**-**	**29.913.404.784**

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Kab. Bengkulu Selatan	6.890.270.313	-	-	6.013.817.978	62.169.061	26.006.985	788.276.289	6.890.270.313
140	Kab. Bengkulu Utara	22.259.308.393	-	-	21.170.288.950	62.169.061	238.574.093	788.276.289	22.259.308.393
141	Kab. Rejang Lebong	6.981.135.002	-	-	6.013.807.929	153.641.950	25.408.834	788.276.289	6.981.135.002
142	Kota Bengkulu	6.874.353.601	-	-	6.013.807.929	62.169.061	10.100.322	788.276.289	6.874.353.601
143	Kab. Kaur	4.969.370.154	-	-	4.104.654.250	62.169.061	14.270.554	788.276.289	4.969.370.154
144	Kab. Seluma	6.194.695.534	-	-	5.300.381.000	62.169.061	43.869.184	788.276.289	6.194.695.534
145	Kab. Mukomuko	6.890.559.744	-	-	6.013.814.560	62.169.061	24.232.834	788.276.289	6.888.492.744
146	Kab. Lebong	5.890.823.836	-	-	5.029.366.350	62.169.061	8.945.136	788.276.289	5.888.756.836
147	Kab. Bengkulu Tengah	20.896.787.814	-	-	20.018.182.250	62.169.037	28.160.238	788.276.289	20.896.787.814
148	Kab. Kepahiang	7.073.118.832	-	-	6.013.807.929	203.532.350	67.502.264	788.276.289	7.073.118.832
149	**Provinsi Lampung**	**35.443.405.317**	**22.150.757.800**	**4.184.587.051**	**4.315.946.861**	**4.432.714.651**	**349.399.154**	**-**	**35.443.405.317**
150	Kab. Lampung Barat	8.013.286.100	5.249.193.048	559.003.599	774.815.781	644.126.850	51.718.083	734.428.739	8.013.286.100
151	Kab. Lampung Selatan	7.977.147.374	5.249.193.048	559.003.599	582.392.555	746.271.900	52.009.983	788.276.289	7.977.147.374
152	Kab. Lampung Tengah	7.786.446.534	5.249.193.048	559.003.599	502.282.808	637.869.386	49.821.404	788.276.289	7.786.446.534
153	Kab. Lampung Utara	7.861.927.098	5.249.193.048	559.003.599	577.141.393	637.869.386	50.443.383	788.276.289	7.861.927.098
154	Kab. Lampung Timur	16.247.432.037	13.635.391.400	559.003.599	577.140.830	637.869.386	49.750.533	788.276.289	16.247.432.037
155	Kab. Tanggamus	21.915.880.090	5.249.193.048	559.003.599	7.412.585.721	7.854.682.250	52.119.183	788.276.289	21.915.880.090
156	Kab. Tulang Bawang	7.818.456.910	5.249.193.048	559.003.599	534.364.055	637.889.388	49.750.533	788.276.289	7.818.456.910
157	Kab. Way Kanan	8.072.882.312	5.249.193.048	559.003.599	648.541.374	637.869.386	189.998.816	788.276.289	8.072.882.312
158	Kab. Pesawaran	7.951.816.894	5.249.193.048	559.003.599	548.563.625	757.029.800	49.750.533	788.276.289	7.951.816.894
159	Kab. Pesisir Barat	7.865.096.791	5.249.193.048	559.003.599	569.854.486	705.744.836	46.872.083	734.428.739	7.865.096.791
160	Kab. Pringsewu	7.861.404.395	5.249.193.048	559.003.599	577.311.540	637.869.386	49.750.533	788.276.289	7.861.404.395
161	Kab. Mesuji	8.270.644.036	5.249.193.048	559.003.599	496.146.055	637.869.386	540.155.659	788.276.289	8.270.644.036

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	Kab. Tulang Bawang Barat	7 861 232.341	5 249.193.048	559.003.599	577.139.486	637.869.386	49.750.533	788 276.289	7 861 232.341
163	Kota Bandar Lampung	7.870 503.455	5.249.193.048	559.003.599	577.139.486	647.140.500	49.750.533	788.276.289	7 870 503.455
164	Kota Metro	7 861 232.341	5 249.193.048	559.003.599	577.139.486	637 869.386	49.750.533	788.276.289	7.861.232.341
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**80.806.977.722**	**66.899.385.313**	**12.579.654.180**	-	-	**1.078.728**	**1.326.859.501**	**80.806.977.722**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**472.239.602.103**	**48.033.150.785**	**60.554.184.782**	**9.024.996.550**	**353.818.329.001**	**808.940.985**	-	**472.239.602.103**
167	Kab. Bandung	171.941.369.007	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	160.429.655.750	70.888.913	788.276.289	171.941.369.007
168	Kab. Bekasi	49.945.402.453	5.866 462.200	15.336.307.775	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	49.945.402.453
169	Kab Bogor	69.871.606.305	5.198 363.984	4.779.508.956	12.661.561.104	46.328.027.400	115.868.572	788.276.289	69.871 606.305
170	Kab. Cianis	38.250.589.905	4.440 481 584	4.779.508.956	626 712.865	27.216.795 079	452.662 682	734.428.739	38.250.589.905
171	Kab Cianjur	39.137.884.428	5.198.363.984	4.779.508.956	842.689.339	27.216.795.079	312.240.781	788 276.289	39.137 884.428
172	Kab Cirebon	38.576.825.943	5.198 363 984	4.779.508.956	520.127.817	27.216.795.079	73.753 818	788.276.289	38.576.825.943
173	Kab. Garut	87.298.303 692	5.198.363.984	4.779.508.956	641.599.517	75.810.137.200	80.417.748	788.276.289	87 298 303 692
174	Kab Indramayu	46.110.137.117	7.577.582.000	9.741.862.215	674.675.115	27 216.795.079	110 946.419	788.276.289	46.110.137.117
175	Kab. Karawang	57.204.406.443	5 509.740.600	22.927.006.998	674.675 115	27.216 795.079	87.912.362	788.276.289	57.204.406.443
176	Kab. Kuningan	38.842.684.674	5.198.363.984	4.779 508.956	674.675.115	27.216.795.079	185.055.251	788.276 289	38.842.684.674
177	Kab Majalengka	37.176.991 809	3 584.639.000	4.825.319.505	674.675.115	27.216.795.079	87.286.821	788.276.289	37.176.991 809
178	Kab Pangandaran	38.029.322.506	4.440.481.584	4.779 508.956	626 712 865	27.216 795 079	231.395.293	734.428.739	38.029.322.506
179	Kab. Purwakarta	23.518.537.478	5 198 363.984	4.779.508.956	516.844.667	12.139.846.300	95.897 282	788.276.289	23.518.537.478
180	Kab Subang	62.188.570.668	4.185.185.800	44.228.384.425	674 675.115	12 218.643 250	93.405.789	788.276.289	62.188.570.668
181	Kab. Sukabumi	55.918.887.573	5.198.363.984	4.779.508.956	879.245.962	44.048.833.850	224.658 532	788.276.289	55.918.887.573
182	Kab. Sumedang	23.643.742.373	5.198.363.984	4.779.508.956	674.695.715	12 060.615.750	142 281.679	788.276.289	23.643.742.373
183	Kab. Tasikmalaya	38.779 571.781	5.198.363.984	4.779.508.956	524.930.617	27.216.795.079	271.696.856	788.276.289	38 779 571 781
184	Kab. Bandung Barat	23.689.955.846	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	12.165.519.350	83.612.152	788.276.289	23.689.955.846

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	Kota Bandung	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
186	Kota Bekasi	41.684.087.669	5.198.363.984	7.743.091.207	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	41.684.087.669
187	Kota Bogor	38.721.289.571	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	63.670.148	788.276.289	38.721.289.571
188	Kota Cirebon	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
189	Kota Depok	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
190	Kota Sukabumi	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
191	Kota Cimahi	38.720.505.418	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.885.995	788.276.289	38.720.505.418
192	Kota Tasikmalaya	38.720.576.468	5.198.363.984	4.779.508.956	674.675.115	27.216.795.079	62.957.045	788.276.289	38.720.576.468
193	Kota Banjar	38.577.950.126	5.198.363.984	4.779.508.956	532.263.667	27.216.795.079	62.742.151	788.276.289	38.577.950.126
194	**Provinsi Banten**	**3.133.593.368**	-	-	**2.498.870.273**	**468.866.250**	**166.656.845**	-	**3.133.593.368**
195	Kab. Lebak	2.541.085.144	-	-	1.548.515.203	133.981.800	70.331.852	788.276.289	2.541.085.144
196	Kab. Pandeglang	5.432.663.467	-	-	3.997.003.937	336.832.900	310.550.341	788.276.289	5.432.663.467
197	Kab. Serang	2.086.014.522	-	-	622.348.562	607.729.400	47.662.271	788.276.289	2.086.014.522
198	Kab. Tangerang	1.596.570.364	-	-	626.716.212	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.596.570.364
199	Kota Cilegon	1.592.200.714	-	-	622.346.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
200	Kota Tangerang	1.592.200.714	-	-	622.346.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
201	Kota Serang	1.592.200.714	-	-	622.346.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
202	Kota Tangerang Selatan	1.592.200.714	-	-	622.346.562	133.961.800	47.616.063	788.276.289	1.592.200.714
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**16.813.183.862**	**953.548.771**	**12.093.116.943**	**36.455.183**	**648.100.727**	**3.191.961.458**	-	**16.813.183.862**
204	Kab. Banjarnegara	1.830.023.409	56.090.685	711.359.243	2.379.694	38.123.288	233.794.210	788.276.289	1.830.023.409
205	Kab. Banyumas	2.006.569.039	56.090.685	711.359.243	1.223.244	183.748.300	265.871.278	788.276.289	2.006.569.039
206	Kab. Batang	2.218.705.975	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	623.633.226	788.276.289	2.218.705.975
207	Kab. Blora	19.938.687.969	841.998.800	15.677.392.543	1.223.244	38.123.288	2.591.673.805	788.276.289	19.938.687.969

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	Kab. Boyolali	1.926.449.692	56.090.685	711.359.243	1.223.244	32.288.600	337.211.631	788.276.289	1.926.449.692
209	Kab. Brebes	2.331.939.529	56.090.685	711.359.243	1.223.244	78.634.750	696.355.318	788.276.289	2.331.939.529
210	Kab. Cilacap	2.025.913.303	56.090.685	711.359.243	44.939.078	38.123.288	318.279.670	788.276.289	1.957.068.253
211	Kab. Demak	1.788.051.496	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	182.978.747	788.276.289	1.788.051.496
212	Kab. Grobogan	2.609.268.027	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	1.014.195.278	788.276.289	2.609.268.027
213	Kab. Jepara	1.884.512.906	56.090.685	711.359.243	1.223.647	38.123.288	289.439.754	788.276.289	1.884.512.906
214	Kab. Karanganyar	1.895.508.662	56.090.685	711.359.243	1.223.244	158.567.650	179.991.551	788.276.289	1.895.508.662
215	Kab. Kebumen	1.851.024.063	56.090.685	711.359.243	30.596.766	38.123.288	226.577.792	788.276.289	1.851.024.063
216	Kab. Kendal	2.404.168.377	56.090.685	711.359.243	1.223.244	40.912.150	806.306.766	788.276.289	2.404.168.377
217	Kab. Klaten	1.782.400.253	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.327.504	788.276.289	1.782.400.253
218	Kab. Kudus	1.795.139.774	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	200.067.025	788.276.289	1.795.139.774
219	Kab. Magelang	1.817.769.014	56.090.685	711.359.243	1.223.244	68.762.700	194.056.853	788.276.289	1.817.769.014
220	Kab. Pati	2.209.658.497	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	614.585.748	788.276.289	2.209.658.497
221	Kab. Pekalongan	1.824.071.065	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	228.998.316	788.276.289	1.824.071.065
222	Kab. Pemalang	2.459.409.898	56.090.685	711.359.243	1.223.244	44.925.450	857.534.987	788.276.289	2.459.409.898
223	Kab. Purbalingga	1.800.716.287	56.090.685	711.359.243	1.223.244	47.639.100	196.127.726	788.276.289	1.800.716.287
224	Kab. Purworejo	1.808.882.396	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	213.809.647	788.276.289	1.808.882.396
225	Kab. Rembang	2.203.959.705	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	606.886.956	788.276.289	2.203.959.705
226	Kab. Semarang	2.328.682.218	56.090.685	711.359.243	1.223.244	409.703.550	362.029.207	788.276.289	2.328.682.218
227	Kab. Sragen	1.833.933.246	56.090.685	711.359.243	1.223.244	51.369.500	225.614.285	788.276.289	1.833.933.246
228	Kab. Sukoharjo	1.782.152.344	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.079.595	788.276.289	1.782.152.344
229	Kab. Tegal	2.383.490.261	56.090.685	711.359.243	1.223.244	40.810.700	785.730.100	788.276.289	2.383.490.261
230	Kab. Temanggung	1.795.931.414	56.090.685	711.359.243	1.223.244	43.299.750	195.682.203	788.276.289	1.795.931.414

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	Kab. Wonogiri	1.851.401.434	56.090.685	711.359.243	57.106.326	32.297.250	206.271.641	788.276.289	1.851.401.434
232	Kab. Wonosobo	1.816.925.247	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	221.852.498	788.276.289	1.816.925.247
233	Kota Magelang	1.782.156.584	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.083.835	788.276.289	1.782.156.584
234	Kota Pekalongan	1.782.152.053	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.079.304	788.276.289	1.782.152.053
235	Kota Salatiga	1.775.308.465	56.090.685	711.359.243	1.223.244	31.279.700	187.079.304	788.276.289	1.775.308.465
236	Kota Semarang	1.989.102.552	56.090.685	812.704.643	1.223.244	38.123.288	292.684.403	788.276.289	1.989.102.552
237	Kota Surakarta	1.782.152.053	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.079.304	788.276.289	1.782.152.053
238	Kota Tegal	1.782.152.053	56.090.685	711.359.243	1.223.244	38.123.288	187.079.304	788.276.289	1.782.152.053
239	Provinsi Di Yogyakarta	30.428.738	-	-	16.101.127	-	14.327.611	-	30.428.738
240	Kab. Bantul	796.436.770	-	-	788.301	-	7.372.180	788.276.289	796.436.770
241	Kab. Gunung kidul	800.519.498	-	-	788.301	-	11.454.908	788.276.289	800.519.498
242	Kab. Kulon Progo	856.685.368	-	-	61.245.098	-	7.163.981	788.276.289	856.685.368
243	Kab. Sleman	796.228.571	-	-	788.301	-	7.163.981	788.276.289	796.228.571
244	Kota Yogyakarta	824.983.705	-	-	788.301	-	35.919.115	788.276.289	824.983.705
245	Provinsi Jawa Timur	636.497.772.211	551.466.802.279	52.451.713.802	28.507.073.224	586.124.350	3.487.058.356	-	636.497.772.211
246	Kab. Bangkalan	66.384.258.891	32.731.734.313	31.083.516.126	1.534.713.771	31.628.750	214.389.642	788.276.289	66.384.258.891
247	Kab. Banyuwangi	88.406.296.312	37.803.687.552	5.382.490.341	42.320.970.803	395.814.850	1.715.056.477	788.276.289	88.406.296.312
248	Kab. Blitar	45.901.723.880	37.803.687.552	5.382.490.341	1.538.987.221	31.628.750	356.653.727	788.276.289	45.901.723.880
249	Kab. Bojonegoro	1.102.102.591.753	1.096.849.838.203	2.252.332.706	1.534.721.499	31.628.750	645.794.306	788.276.289	1.102.102.591.753
250	Kab. Bondowoso	46.030.647.615	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	212.679.900	308.792.034	788.276.289	46.030.647.615
251	Kab. Gresik	40.622.557.208	30.792.707.590	7.260.190.122	1.534.721.499	31.628.750	215.032.958	788.276.289	40.622.557.208
252	Kab. Jember	46.309.218.570	37.803.687.552	5.382.490.341	1.133.688.157	31.628.750	1.169.447.481	788.276.289	46.309.218.570
253	Kab. Jombang	45.910.157.007	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	369.352.676	788.276.289	45.910.157.007

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Kab. Kediri	45.895.590.069	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	354.785.638	788.276.289	45.895.590.069
255	Kab. Lamongan	45.988.321.038	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	447.516.607	788.276.289	45.988.321.038
256	Kab. Lumajang	45.371.015.713	37.803.687.552	5.382.490.341	1.126.191.007	31.628.750	238.741.774	788.276.289	45.371.015.713
257	Kab. Madiun	46.630.769.213	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	94.324.250	1.027.269.282	788.276.289	46.630.769.213
258	Kab. Magetan	45.746.782.677	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	45.858.050	191.748.946	788.276.289	45.746.782.677
259	Kab. Malang	45.431.098.073	37.803.687.552	5.382.490.341	1.130.799.807	39.226.900	286.617.384	788.276.289	45.431.098.073
260	Kab. Mojokerto	45.822.023.694	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	54.450.200	258.397.813	788.276.289	45.822.023.694
261	Kab. Nganjuk	46.135.109.001	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	594.304.570	788.276.289	46.135.109.001
262	Kab. Ngawi	46.410.594.180	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	66.669.100	834.749.399	788.276.289	46.410.594.180
263	Kab. Pacitan	45.817.858.249	37.803.687.552	5.382.490.341	1.617.406.564	31.628.750	194.368.753	788.276.289	45.817.858.249
264	Kab. Pamekasan	45.752.542.779	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	211.736.348	788.276.289	45.752.542.779
265	Kab. Pasuruan	45.787.566.653	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	48.671.300	229.719.672	788.276.289	45.787.566.653
266	Kab. Ponorogo	46.194.786.546	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.741.849	248.077.700	437.513.015	788.276.289	46.194.786.546
267	Kab. Probolinggo	45.868.155.558	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	327.351.127	788.276.289	45.868.155.558
268	Kab. Sampang	45.728.684.159	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	187.879.728	788.276.289	45.728.684.159
269	Kab. Sidoarjo	34.596.259.391	29.827.361.577	2.224.568.200	1.534.721.499	31.628.750	189.703.076	788.276.289	34.596.259.391
270	Kab. Situbondo	45.841.848.858	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	34.698.700	297.974.477	788.276.289	45.841.848.858
271	Kab. Sumenep	35.635.806.715	30.472.535.251	2.590.304.856	1.534.721.499	31.628.750	218.140.070	788.276.289	35.635.806.715
272	Kab. Trenggalek	45.415.276.906	37.803.687.552	5.382.490.341	1.129.675.757	31.628.750	279.518.217	788.276.289	45.415.276.906
273	Kab. Tuban	36.461.129.096	30.498.491.868	2.805.145.525	1.534.721.499	31.628.750	802.865.165	788.276.289	36.461.129.096
274	Kab. Tulungagung	45.449.953.482	37.803.687.552	5.382.490.341	1.130.318.457	31.628.750	313.552.093	788.276.289	45.449.953.482
275	Kota Blitar	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
276	Kota Kediri	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277	Kota Madiun	45.729.684.314	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.879.883	788.276.289	45.729.684.314
278	Kota Malang	45.729.200.395	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.513	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.395
279	Kota Mojokerto	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
280	Kota Pasuruan	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
281	Kota Probolinggo	45.729.200.381	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	188.395.950	788.276.289	45.729.200.381
282	Kota Surabaya	45.736.001.131	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	31.628.750	195.196.700	788.276.289	45.736.001.131
283	Kota Batu	45.747.205.996	37.803.687.552	5.382.490.341	1.534.721.499	47.804.000	190.126.315	788.276.289	45.747.205.996
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	**82.145.641.768**	-	-	**56.218.885.884**	-	**18.750.563.884**	-	**74.969.449.818**
285	Kab. Bengkayang	6.957.763.392	-	-	5.843.438.047	-	526.049.056	788.276.289	6.957.763.392
286	Kab. Landak	15.379.741.505	-	-	13.722.064.938	-	869.400.378	788.276.289	15.379.741.505
287	Kab. Kapuas Hulu	10.649.653.801	-	-	6.705.796.638	-	3.155.580.874	788.276.289	10.649.653.801
288	Kab. Ketapang	73.809.587.022	-	-	69.351.869.504	-	3.669.421.229	788.276.289	73.809.587.022
289	Kab. Sambawah	7.851.154.225	-	-	6.383.576.893	-	679.301.243	788.276.289	7.851.154.225
290	Kab. Sambas	7.957.887.484	-	-	6.711.849.784	-	349.231.711	788.276.289	7.849.357.784
291	Kab. Sanggau	45.118.445.900	-	-	43.630.652.214	-	699.517.397	788.276.289	45.118.445.900
292	Kab. Sintang	8.789.968.413	-	-	6.003.595.284	-	1.998.096.840	788.276.289	8.789.968.413
293	Kota Pontianak	8.096.823.598	-	-	6.711.903.029	-	596.644.280	788.276.289	8.096.823.598
294	Kota Singkawang	8.020.071.638	-	-	6.711.903.029	-	519.892.320	788.276.289	8.020.071.638
295	Kab. Kayong Utara	6.982.718.568	-	-	5.665.840.669	-	528.601.610	788.276.289	6.982.718.568
296	Kab. Kubu Raya	10.269.454.148	-	-	6.711.865.282	-	2.769.312.577	788.276.289	10.269.454.148
297	Kab. Sekadau	7.124.118.038	-	-	5.787.198.597	-	548.643.152	788.276.289	7.124.118.038
298	Kab. Melawi	9.780.025.606	-	-	7.879.316.665	-	1.112.432.652	788.276.289	9.780.025.606
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**524.072.363.025**	**7.770.809**	**147.494.208**	**383.092.138.807**	-	**158.862.658.918**	-	**462.210.062.725**

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	Kab. Banto Selatan	77.248.734.443	1.194.600	22.691.200	70.569.041.061	-	5.867.531.093	788.276.289	77.248.734.443
301	Kab. Banto Utara	138.330.393.486	10.570.600	294.990.000	128.792.692.089	-	8.443.864.508	788.276.289	138.330.393.486
302	Kab. Kapuas	173.612.571.795	1.193.800	22.691.200	165.493.861.314	-	7.306.549.192	788.276.289	173.612.571.795
303	Kab. Ketawaringin Barat	39.426.943.159	1.193.800	22.691.200	33.621.272.721	-	4.993.509.149	788.276.289	39.426.943.159
304	Kab. Ketawaringin Timur	51.797.490.976	1.193.800	22.691.200	41.841.226.116	-	9.144.103.571	788.276.289	51.797.490.976
305	Kota Palangkaraya	49.042.234.371	1.193.800	22.691.200	44.630.966.753	-	3.599.106.329	788.276.289	49.042.234.371
306	Kab. Banto Timur	66.326.559.926	4.958.000	22.691.200	59.806.013.034	-	5.704.621.403	788.276.289	66.326.559.926
307	Kab. Murung Raya	154.135.864.949	1.193.800	22.691.200	139.956.331.745	-	13.367.371.915	788.276.289	154.135.864.949
308	Kab. Pulang Pisau	49.292.859.968	1.193.800	22.691.200	44.633.362.165	-	3.847.336.514	788.276.289	49.292.859.968
309	Kab. Gunung Mas	51.587.932.581	1.193.800	22.691.200	37.021.449.510	-	13.754.321.782	788.276.289	51.587.932.581
310	Kab. Lamandau	54.181.217.585	1.193.800	22.691.200	41.664.914.521	-	11.704.141.775	788.276.289	54.181.217.585
311	Kab. Sukamara	49.476.670.722	1.193.800	22.691.200	44.915.012.881	-	3.749.496.552	788.276.289	49.476.670.722
312	Kab. Katingan	52.664.326.818	1.193.800	22.691.200	40.414.998.210	-	9.454.448.719	788.276.289	50.681.608.218
313	Kab. Seruyan	46.072.169.137	1.193.800	22.691.200	33.426.531.416	-	11.833.476.432	788.276.289	46.072.169.137
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**1.060.189.075.983**	**3.176.249.631**	-	**1.053.694.537.317**	-	**2.360.241.105**	-	**1.059.231.028.053**
315	Kab. Banjar	172.296.417.068	529.374.882	-	170.916.369.363	-	62.396.534	788.276.289	172.296.417.068
316	Kab. Banto Kuala	176.073.061.508	529.374.882	-	174.688.712.003	-	66.698.334	788.276.289	176.073.061.508
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	223.997.373.400	529.374.882	-	222.617.570.945	-	62.151.284	788.276.289	223.997.373.400
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	124.137.361.814	529.374.882	-	122.757.808.809	-	62.101.834	788.276.289	124.137.361.814
319	Kab. Hulu Sungai Utara	176.073.979.758	529.374.882	-	174.688.711.553	-	67.617.034	788.276.289	176.073.979.758
320	Kab. Kotabaru	202.337.413.487	529.374.882	-	200.858.913.676	-	120.848.640	788.276.289	202.337.413.487
321	Kab. Tabalong	363.882.079.966	2.753.576.400	-	359.940.370.832	-	399.856.445	788.276.289	363.882.079.966
322	Kab. Tanah Laut	424.987.245.741	529.374.882	-	423.575.832.613	-	93.761.957	788.276.289	424.987.245.741

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
323	Kab. Tapin	231.458.925.896	529.374.882	-	230.079.137.841	-	62.136.884	788.276.289	231.458.925.896
324	Kota Banjarbaru	176.928.202.312	529.374.882	-	175.546.332.041	-	64.219.100	788.276.289	176.928.202.312
325	Kota Banjarmasin	176.074.969.591	529.374.882	-	174.688.711.553	-	68.606.867	788.276.289	176.074.969.591
326	Kab. Balangan	308.571.749.775	398.446.400	-	307.322.903.302	-	62.123.784	788.276.289	308.571.749.775
327	Kab. Tanah Bumbu	442.874.822.012	529.374.882	-	441.223.306.144	-	333.864.697	788.276.289	442.874.822.012
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	**2.929.832.686.020**	**129.867.018.986**	**269.684.900.330**	**2.340.407.391.165**	**-**	**136.357.228.289**	**-**	**2.876.106.539.770**
329	Kab. Berau	890.043.185.568	45.717.457.999	120.575.465.675	714.867.934.932	-	8.094.050.673	788.276.289	890.043.185.568
330	Kab. Kutai Kartanegara	1.794.211.785.355	157.868.213.487	236.957.887.710	1.387.328.387.059	-	11.271.020.810	788.276.289	1.794.211.785.355
331	Kab. Kutai Barat	853.956.738.215	45.717.457.999	120.575.465.675	671.069.176.617	-	15.860.209.185	734.428.739	853.956.738.215
332	Kab. Kutai Timur	1.551.794.400.347	27.187.926.060	56.326.865.734	1.444.816.248.161	-	22.675.286.103	788.276.289	1.551.794.400.347
333	Kab. Mahakam Ulu	543.118.673.033	45.717.457.999	120.575.465.675	365.070.177.418	-	11.021.143.202	734.428.739	543.118.673.033
334	Kab. Paser	924.485.152.655	45.717.457.999	120.575.465.675	751.033.184.292	-	6.370.768.400	788.276.289	924.485.152.655
335	Kota Bakipapan	686.408.332.463	45.717.457.999	120.675.488.275	513.737.882.837	-	5.489.227.063	788.276.289	686.408.332.463
336	Kota Bontang	609.837.785.503	33.126.879.840	56.263.638.334	514.038.771.252	-	5.620.219.788	788.276.289	609.837.785.503
337	Kota Samarinda	539.709.469.196	27.064.560.316	56.387.728.854	449.980.985.551	-	5.487.918.186	788.276.289	539.709.469.196
338	Kab. Penajam Paser Utara	490.638.906.646	32.906.236.994	68.042.710.734	381.687.064.732	-	6.028.408.297	788.276.289	489.452.697.046
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**290.899.317.458**	**16.735.232.848**	**1.565.148.361**	**155.425.269.381**	**-**	**89.621.822.418**	**-**	**263.347.473.008**
340	Kab. Bulungan	114.633.144.803	12.126.939.600	1.377.714.215	85.460.500.112	-	14.879.714.587	788.276.289	114.633.144.803
341	Kab. Malinau	190.589.314.055	8.367.616.646	782.574.680	139.494.809.264	-	41.156.037.176	788.276.289	190.589.314.055
342	Kab. Nunukan	134.221.238.851	6.739.131.200	699.140.600	115.150.795.534	-	10.843.895.228	788.276.289	134.221.238.851
343	Kab. Tana Tidung	118.222.990.764	8.365.801.268	782.574.680	98.504.728.580	-	9.781.609.947	788.276.289	118.222.990.764
344	Kota Tarakan	101.902.343.584	16.158.227.542	1.751.244.200	76.992.239.426	-	6.212.356.127	788.276.289	101.902.343.584
345	Provinsi Sulawesi Utara	33.619.049.896	-	-	30.206.598.428	3.030.126.754	87.443.564	-	33.324.168.746

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	Kab. Bolaang Mongondow	15.686 641.264	-	-	14 457.991.333	432.875.324	6 081.418	788 276 289	15.685.224.364
347	Kab. Minahasa	7.229.975.598	-	-	4.124.087.978	2.312 982.400	4.628.931	788.276.289	7 229.975 598
348	Kab Sangihe	5.349.867 960	-	-	4.124.123.411	432.875.329	4.592 931	788.276.289	5 349.867.960
349	Kota Bitung	23.063.533.584	-	-	21.837 789.035	432.875.329	4.592.931	788.276.289	23.063 533 584
350	Kota Manado	5.331 502.764	-	-	4 125.124.344	413.509.200	4.592.931	788 276.289	5.331.502.764
351	Kab. Kepulauan Talaud	5.349.888.804	-	-	4.124.142.255	432.875.329	4 592.931	788 276.289	5.349.888.804
352	Kab. Minahasa Selatan	5.438.264 751	-	-	4.236.889.986	407.091.450	4.871.376	788.276 289	5 437.129.101
353	Kab Minahasa Tenggara	4.933.715.232	-	-	3.744.763.153	394.953 700	4.640.140	788.276.289	4 932.633.282
354	Kab. Kepulauan Sitau Tagulandang Biaro	5 349.832.527	-	-	4.124.087.978	432.875.329	4.592.931	788.276.289	5.349 832.527
355	Kota Kotamobagu	5.014.203.534	-	-	3.788.051.285	432.875.329	4 055.181	788.276.289	5.013.259.084
356	Kab Bolaang Mongondow Timur	6.759.922.191	-	-	5.533.479.343	432.875.329	4 291.180	788.276 289	6.758.922.141
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9.605.734.752	-	-	8.363.396.174	432.875 329	21.186.960	788.276.289	9 605.734.752
358	Kota Tomohon	8 207.138.948	-	-	4,124 087.978	3.290.181.750	4.592.931	788.276.289	8.207.138.948
359	Kab Minahasa Utara	13.228.582 137	-	-	11.890.280.817	545.432.100	4.592.931	788.276.289	13.228 582.137
360	Kab Bolaang Mongondow Utara	5.086 236.779	-	-	3.821.562.303	432.875.329	43 522.858	788 276.289	5.086.236.779
361	Provinsi Gorontalo	1.977.102.503	-	-	233.842.092	-	1.382.036.451	-	1.615.078.453
362	Kab. Boalemo	848.532.913	-	-	460.362	-	59.796.262	788.276.289	848.532.913
363	Kab. Gorontalo	1.009.203.177	-	-	168 211.642	-	52.715 246	788.276.289	1.009.203.177
364	Kota Gorontalo	848.647.262	-	-	1.357.324	-	59.013.649	788.276.289	848.647.262
365	Kab. Pohuwato	1 191.250.342	-	-	243.990.863	-	158.983.190	788.276.289	1 191.250.342
366	Kab Gorontalo Utara	1.038.862.179	-	-	11.989 449	-	238.596.441	788.276.289	1.038.862.179
367	Kab. Bone Bolango	1.192.120.043	-	-	335.918.363	-	57.860 241	788.276.289	1.182.054.893
368	Provinsi Sulawesi Tengah	194.621.274.290	22.623.727.530	124.189.108.120	42.640.999.877	-	4.424.637.061	-	193.878.472.588

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	Kab Banggai	296.424.516.001	36.499 015.725	248.378.216 239	7.652.264.359	-	2 658.717.239	788.276.289	295.976.489.851
370	Kab Banggai Laut	31.688.460.554	3 770 620.331	20.698 184 745	6.380.507 409	-	104.719.330	734.428.739	31.688.460.554
371	Kab. Banggai Kepulauan	31.702.953.401	3.770.620.331	20.698.184.745	6.377.541.259	-	104 119.677	734 428.739	31.684.894.751
372	Kab. Buol	30.817.836.842	3 770.620.331	20.698.184.745	5.332.822.244	-	202.673 983	788.276 289	30.792.577.592
373	Kab. Tolitoli	31.131.924 451	3.770.620.331	20.698 184.745	5.476.855 006	-	395.988.080	788.276.289	31.131.924.451
374	Kab. Donggala	30.923 670 506	3.770.620.331	20.698 184.745	5.532.176.103	-	111.928.538	788.276 289	30.901.184.006
375	Kab. Morowali	92.939.208.549	3.770.620.331	20.698.184.745	65.492.580.212	-	1 966 029.072	734.428.739	92 661.843.099
376	Kab Morowali Utara	34.912.583 959	3.921.559.731	20.698 184.745	9.331.908 289	-	226.502.455	734.428.739	34.912.583.959
377	Kab Poso	31 607.230.701	3.770.620 331	20.698.184.745	4.922.379.003	-	1 427 770 333	788.276 289	31 607.230.701
378	Kota Palu	32.081 815.520	3.770.620.331	20 698 184.745	8 679.035.546	-	145.698.609	788.276.289	32.081.815.520
379	Kab Pangi Moutong	31 275 628.141	3.770.620 331	20 698 184.745	5 876.135.403	-	142.411.373	788.276.289	31.275.628.141
380	Kab Sigi	31.815.741.713	3 770.620.331	20.698.184.745	6.444.677 573	-	113.982.775	788.276.289	31.815.741.713
381	Kab. Tojo Una Una	32 150.901.711	3.770.620 331	20.698.184.745	5.526.811.903	-	1 367 008 443	788.276.289	32 150.901.711
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**52.508.322.084**	**1.069.290**	**3.325.774.890**	**48.211.048.188**	-	**484.543.766**	-	**52.022.426.964**
383	Kab. Bantaeng	5.046.037.777	91.656	289.197.800	3 951 900 060	-	16.571.972	788.276.289	5.046.037.777
384	Kab. Barru	4.196.641.283	91.656	289.197.800	3.106.359 072	-	12.716.466	788.276.289	4 196.641.283
385	Kab. Bone	5.768.343.197	91.656	289.197.800	4.659.462 668	-	29.314.784	788.276.289	5.768.343.197
386	Kab. Bulukumba	5.044.675.953	91.656	289.197.800	3.951.902.840	-	15 207.368	788.276.289	5 044.675.953
387	Kab. Enrekang	5.088.006.086	91.656	289.197.800	3 971.518.920	-	18 921 421	788.276.289	5.089 006 086
388	Kab Gowa	5.078.654.932	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	49 189.127	788.276.289	5 078 654.932
389	Kab Jeneponto	5 045 179.470	91.656	289.197.800	3.951 900.060	-	15.713 665	788.276.289	5.045.179.470
390	Kab Luwu	4.472.648.300	91.656	289.197 800	3.379.387 409	-	15.695.146	788.276.289	4 472.648.300
391	Kab Luwu Utara	7.128 180 538	91.656	289.197 800	6 034 197.650	-	16.417.143	788.276.289	7.128.180.538

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	Kab. Maros	5.114.796.175	91.656	289.197.800	4.019.975.744	-	17.254.686	788.276.289	5.114.796.175
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	4.322.823.122	91.656	289.197.800	3.204.129.022	-	38.607.155	788.276.289	4.320.301.922
394	Kab. Pinrang	5.045.039.651	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	15.573.846	788.276.289	5.045.039.651
395	Kab. Kepulauan Selayar	5.057.137.927	91.656	289.197.800	3.964.364.814	-	15.207.368	788.276.289	5.057.137.927
396	Kab. Sidenreng Rappang	5.444.917.273	91.656	289.197.800	4.348.790.523	-	16.070.555	788.276.289	5.442.426.823
397	Kab. Sinjai	4.197.562.690	91.656	289.197.800	3.102.048.522	-	17.950.423	788.276.289	4.197.562.690
398	Kab. Soppeng	4.206.352.006	91.656	289.197.800	3.100.952.199	-	27.834.062	788.276.289	4.206.352.006
399	Kab. Takalar	5.044.675.417	91.656	289.197.800	3.951.902.304	-	15.207.368	788.276.289	5.044.675.417
400	Kab. Tana Toraja	4.267.694.674	91.656	289.197.800	3.161.686.789	-	28.442.140	788.276.289	4.267.694.674
401	Kab. Wajo	11.435.316.560	218.847	6.651.551.200	3.979.671.169	-	15.598.056	788.276.289	11.435.316.560
402	Kota Parepare	5.044.673.173	91.656	289.197.800	3.951.900.080	-	15.207.368	788.276.289	5.044.673.173
403	Kab. Toraja Utara	4.213.195.651	91.656	289.197.800	3.119.118.063	-	16.511.843	788.276.289	4.213.195.651
404	Kota Makassar	5.058.896.745	91.656	289.197.800	3.951.900.060	-	29.430.940	788.276.289	5.058.896.745
405	Kota Palopo	5.044.677.473	91.656	289.197.800	3.951.904.360	-	15.207.368	788.276.289	5.044.677.473
406	Kab. Luwu Timur	76.953.169.808	91.656	289.197.800	75.634.530.027	-	212.269.386	788.276.289	76.924.365.158
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**375.663.219**	-	-	**56.822.249**	-	**263.668.970**	-	**320.491.219**
408	Kab. Majene	808.003.892	-	-	2.097.213	-	17.630.390	788.276.289	808.003.892
409	Kab. Mamuju	899.675.862	-	-	145.002.020	-	20.245.103	734.428.739	899.675.862
410	Kab. Mamuju Tengah	815.379.103	-	-	2.111.157	-	78.839.207	734.428.739	815.379.103
411	Kab. Polewali Mandar	870.528.492	-	-	57.860.998	-	24.591.205	788.276.289	870.528.492
412	Kab. Mamasa	821.460.851	-	-	2.140.793	-	31.043.769	788.276.289	821.460.851
413	Kab. Pasangkayu	802.078.248	-	-	2.136.449	-	9.464.410	788.276.289	799.877.148
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**190.299.058.168**	-	-	**188.148.826.606**	-	**1.368.536.062**	-	**189.517.362.668**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	Kab. Buton	19.030.335.441	-	-	18.215.559.661	-	45.721.191	762.246.139	19.024.526.991
416	Kab. Konawe	24.672.217.568	-	-	19.250.861.062	-	4.036.441.068	734.428.739	24.021.730.869
417	Kab. Konawe Kepulauan	17.168.188.881	-	-	16.400.027.661	-	33.732.481	734.428.739	17.168.188.881
418	Kab. Kolaka	105.747.240.119	-	-	102.162.078.951	-	2.850.732.429	734.428.739	105.747.240.119
419	Kab. Kolaka Timur	27.028.672.864	-	-	26.245.857.036	-	39.282.389	734.428.739	27.019.568.164
420	Kab. Muna	24.070.503.176	-	-	23.249.177.665	-	47.065.272	768.754.789	24.064.997.726
421	Kota Kendari	18.054.668.717	-	-	17.241.390.718	-	25.001.710	788.276.289	18.054.668.717
422	Kota Bau-Bau	18.090.548.358	-	-	17.270.937.068	-	31.335.001	788.276.289	18.090.548.358
423	Kab. Konawe Selatan	50.482.201.655	-	-	49.650.608.258	-	43.317.108	788.276.289	50.482.201.655
424	Kab. Bombana	67.806.461.988	-	-	66.987.219.450	-	30.966.249	788.276.289	67.806.461.988
425	Kab. Konawe Utara	104.907.220.002	-	-	103.949.405.132	-	137.435.581	788.276.289	104.875.117.002
426	Kab. Buton Utara	18.097.676.977	-	-	17.278.693.018	-	26.583.920	788.276.289	18.091.553.227
427	Kab. Wakatobi	24.327.436.716	-	-	23.510.318.937	-	28.841.490	788.276.289	24.327.436.716
428	Kab. Kolaka Utara	21.670.309.334	-	-	20.802.912.314	-	79.120.731	788.276.289	21.670.309.334
429	Kab. Muna Barat	24.111.021.858	-	-	23.256.698.187	-	28.920.082	825.403.589	24.111.021.858
430	Kab. Buton Tengah	24.208.297.770	-	-	23.359.944.049	-	26.063.632	817.269.139	24.203.276.820
431	Kab. Buton Selatan	17.935.018.894	-	-	17.091.161.420	-	21.567.385	817.269.139	17.929.997.944
432	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Badung	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
434	Kab. Bangli	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
435	Kab. Buleleng	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
436	Kab. Gianyar	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
437	Kab. Jembrana	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289

SK No 062646 C

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438	Kab. Karangasem	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
439	Kab. Klungkung	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
440	Kab. Tabanan	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
441	Kota Denpasar	788.276.289	-	-	-	-	-	788.276.289	788.276.289
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**59.598.296.781**	-	-	**57.131.574.238**	-	**2.147.475.843**	-	**59.279.050.081**
443	Kab. Bima	13.722.401.476	-	-	12.886.728.950	-	43.786.637	788.276.289	13.718.791.876
444	Kab. Dompu	13.815.561.178	-	-	12.843.573.000	-	173.380.739	788.276.289	13.805.230.028
445	Kab. Lombok Barat	13.214.867.024	-	-	12.350.743.233	-	75.847.502	788.276.289	13.214.867.024
446	Kab. Lombok Tengah	13.171.366.622	-	-	12.305.081.913	-	74.556.020	788.276.289	13.167.914.222
447	Kab. Lombok Timur	13.305.578.189	-	-	12.437.680.150	-	72.457.100	788.276.289	13.298.613.539
448	Kab. Sumbawa	16.038.397.634	-	-	15.004.026.381	-	246.094.964	788.276.289	16.038.397.634
449	Kota Mataram	13.165.829.641	-	-	12.305.081.913	-	72.471.439	788.276.289	13.165.829.641
450	Kab. Lombok Utara	13.165.775.606	-	-	12.305.081.913	-	72.417.404	788.276.289	13.165.775.606
451	Kota Bima	13.165.775.606	-	-	12.305.081.913	-	72.417.404	788.276.289	13.165.775.606
452	Kab. Sumbawa Barat	114.656.045.293	-	-	113.475.500.500	-	375.371.954	788.276.289	114.639.148.743
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.799.305.113**	-	-	**719.215.459**	**1.064.088.971**	**16.000.684**	-	**1.799.305.113**
454	Kab. Alor	912.952.749	-	-	997.450	116.975.000	6.704.010	788.276.289	912.952.748
455	Kab. Belu	1.240.282.218	-	-	403.377.900	101.342.169	1.133.410	734.428.739	1.240.282.218
456	Kab. Ende	1.340.860.245	-	-	1.885.138	539.318.500	11.380.318	788.276.289	1.340.860.245
457	Kab. Flores Timur	904.645.021	-	-	1.261.072	113.399.950	1.383.560	788.276.289	904.320.871
458	Kab. Kupang	1.114.004.718	-	-	220.635.700	101.342.169	3.750.560	788.276.289	1.114.004.718
459	Kab. Lembata	1.027.514.871	-	-	1.261.072	236.409.600	1.567.910	788.276.289	1.027.514.871
460	Kab. Malaka	838.123.091	-	-	1.276.073	101.342.169	1.076.110	734.428.739	838.123.091

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	Kab. Manggarai	1.640.010.649	-	-	106.388.450	743.778.000	1.567.910	788.276.289	1.640.010.649
462	Kab. Ngada	891.427.374	-	-	1.262.475	100.320.700	1.567.910	788.276.289	891.427.374
463	Kab. Sikka	904.022.490	-	-	1.261.072	101.342.169	13.142.960	788.276.289	904.022.490
464	Kab. Sumba Barat	892.550.231	-	-	1.279.713	101.342.169	1.652.060	788.276.289	892.550.231
465	Kab. Sumba Timur	1.456.128.923	-	-	564.942.555	101.342.169	1.567.910	788.276.289	1.456.128.923
466	Kab. Timor Tengah Selatan	2.011.548.618	-	-	1.119.271.900	101.342.169	2.658.260	788.276.289	2.011.548.618
467	Kab. Timor Tengah Utara	1.367.155.918	-	-	475.969.550	101.342.169	1.567.910	788.276.289	1.367.155.918
468	Kota Kupang	892.447.440	-	-	1.261.072	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.447.440
469	Kab. Rote Ndao	892.183.818	-	-	997.450	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.183.818
470	Kab. Nagekeo	934.237.265	-	-	43.050.897	101.342.169	1.567.910	788.276.289	934.237.265
471	Kab. Sumba Tengah	892.477.404	-	-	1.291.036	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.477.404
472	Kab. Sumba Barat Daya	892.504.253	-	-	1.317.885	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.504.253
473	Kab. Manggarai Timur	920.419.468	-	-	29.233.100	101.342.169	1.567.910	788.276.289	920.419.468
474	Kab. Sabu Raijua	892.183.818	-	-	997.450	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.183.818
475	Kab. Manggarai Barat	892.183.818	-	-	997.450	101.342.169	1.567.910	788.276.289	892.183.818
476	**Provinsi Maluku**	**48.924.857.543**	**3.434.820.802**	-	**6.580.148.989**	-	**24.441.713.752**	-	**34.376.683.543**
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	5.126.102.418	686.964.260	-	1.256.102.975	-	2.087.758.394	788.276.289	4.819.101.918
478	Kab. Maluku Tengah	4.408.912.802	686.964.260	-	1.256.103.297	-	1.677.568.956	788.276.289	4.408.912.802
479	Kab. Maluku Tenggara	3.766.363.573	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.035.020.049	788.276.289	3.766.363.573
480	Kab. Buru	4.886.137.883	686.964.260	-	1.285.263.754	-	1.723.283.330	788.276.289	4.483.787.633
481	Kota Ambon	3.767.717.113	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.036.373.589	788.276.289	3.767.717.113
482	Kab. Seram Bagian Barat	4.333.243.986	686.964.260	-	1.502.021.413	-	1.355.982.024	788.276.289	4.333.243.986
483	Kab. Seram Bagian Timur	10.792.726.086	6.859.552.094	-	1.256.105.625	-	1.888.792.078	788.276.289	10.792.726.086

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
484	Kab. Maluku Barat Daya	13.692.356.800	686.964.260	-	11.183.643.981	-	1.033.472.270	788.276.289	13.692.356.800
485	Kab. Buru Selatan	9.336.169.409	686.964.260	-	1.256.109.525	-	6.057.847.484	788.276.289	8.789.197.558
486	Kab. Kepulauan Aru	3.906.913.330	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.175.569.806	788.276.289	3.906.913.330
487	Kota Tual	3.764.638.970	686.964.260	-	1.256.102.975	-	1.033.295.446	788.276.289	3.764.638.970
488	**Provinsi Maluku Utara**	**130.255.890.884**	-	-	**115.306.350.758**	**218.278.273**	**10.622.774.253**	-	**126.147.403.284**
489	Kab. Halmahera Tengah	48.704.191.709	-	-	47.194.865.246	48.785.045	672.265.129	788.276.289	48.704.191.709
490	Kab. Halmahera Barat	20.366.660.093	-	-	19.021.557.103	69.637.195	487.189.506	788.276.289	20.366.660.093
491	Kota Ternate	25.523.894.625	-	-	24.168.449.995	48.785.045	518.383.296	788.276.289	25.523.894.625
492	Kab. Halmahera Timur	50.156.846.064	-	-	48.452.733.716	48.785.045	867.051.014	788.276.289	50.156.846.064
493	Kota Tidore Kepulauan	25.874.504.260	-	-	24.508.894.935	48.785.045	528.447.991	788.276.289	25.874.504.260
494	Kab. Kepulauan Sula	23.364.291.978	-	-	21.482.190.503	47.531.345	1.100.141.391	734.428.739	23.364.291.978
495	Kab. Pulau Morotai	20.319.275.504	-	-	18.936.959.505	48.785.045	472.599.315	788.276.289	20.246.620.154
496	Kab. Pulau Taliabu	40.068.261.677	-	-	38.768.805.745	47.531.345	418.005.448	734.428.739	39.968.771.277
497	Kab. Halmahera Selatan	78.270.503.046	-	-	74.424.598.341	132.766.850	2.481.216.616	788.276.289	77.826.858.096
498	Kab. Halmahera Utara	60.694.140.172	-	-	59.250.788.031	48.785.045	606.290.807	788.276.289	60.694.140.172
499	**Provinsi Papua**	**533.030.988.719**	-	-	**478.985.163.412**	-	**39.160.629.057**	-	**518.145.792.469**
500	Kab. Yakmo	35.288.781.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.781.931
501	Kab. Lanny Jaya	35.288.781.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.781.931
502	Kab. Boik Numfor	35.285.114.642	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	784.599.000	35.285.114.642
503	Kab. Jayapura	26.983.595.324	-	-	25.313.609.722	-	885.386.602	784.599.000	26.983.595.324
504	Kab. Jayawijaya	26.732.407.707	-	-	25.397.245.514	-	550.563.193	784.599.000	26.732.407.707
505	Kab. Merauke	38.521.565.445	-	-	33.949.952.449	-	3.787.013.996	784.599.000	38.521.565.445
506	Kab. Nimika	712.165.966.309	-	-	709.342.054.796	-	1.853.636.563	784.599.000	711.780.290.359

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507	Kab. Nabire	32.007.783.167	-	-	26.213.099.164	-	4.095.541.714	788.276.289	31.096.917.167
508	Kab. Penai	27.375.716.746	-	-	26.036.877.264	-	550.563.193	788.276.289	27.375.716.746
509	Kab. Puncak Jaya	26.559.788.260	-	-	25.220.946.614	-	550.565.357	788.276.289	26.559.788.260
510	Kab. Kepulauan Yapen	35.288.829.174	-	-	33.949.989.692	-	550.563.193	788.276.289	35.288.829.174
511	Kota Jayapura	35.285.133.064	-	-	33.949.952.449	-	550.581.815	784.599.000	35.285.133.064
512	Kab. Sarmi	31.127.782.030	-	-	25.733.923.364	-	3.764.994.527	788.276.289	30.287.194.180
513	Kab. Keerom	30.194.357.162	-	-	26.849.789.814	-	2.269.616.659	788.276.289	29.707.682.762
514	Kab. Yahukimo	35.289.129.545	-	-	33.950.290.063	-	550.563.193	788.276.289	35.289.129.545
515	Kab. Pegunungan Bintang	30.741.804.204	-	-	29.402.864.722	-	550.563.193	788.276.289	30.741.804.204
516	Kab. Tolikara	26.732.341.196	-	-	25.393.501.714	-	550.563.193	788.276.289	26.732.341.196
517	Kab. Boven Digoel	36.959.379.593	-	-	33.949.972.424	-	2.221.130.880	788.276.289	36.959.379.593
518	Kab. Mappi	35.498.432.337	-	-	33.949.952.449	-	760.203.599	788.276.289	35.498.432.337
519	Kab. Asmat	35.547.420.364	-	-	33.949.952.449	-	809.191.626	788.276.289	35.547.420.364
520	Kab. Waropen	35.762.892.742	-	-	34.375.161.833	-	486.052.970	788.278.289	35.649.491.092
521	Kab. Mamberamo Raya	35.479.886.473	-	-	33.950.428.224	-	800.875.710	788.276.289	35.339.580.223
522	Kab. Mamberamo Tengah	35.373.554.331	-	-	33.949.952.449	-	635.325.593	788.276.289	35.373.554.331
523	Kab. Nduga	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
524	Kab. Dogiyai	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
525	Kab. Intan Jaya	26.559.786.096	-	-	25.220.946.614	-	550.563.193	788.276.289	26.559.786.096
526	Kab. Puncak	35.633.592.331	-	-	34.294.752.849	-	550.563.193	788.276.289	35.633.592.331
527	Kab. Deiyai	35.288.791.931	-	-	33.949.952.449	-	550.563.193	788.276.289	35.288.791.931
528	Kab. Supiori	35.288.796.403	-	-	33.949.953.676	-	550.566.438	788.276.289	35.288.796.403
529	**Provinsi Papua Barat**	**2.096.719.838.592**	**356.079.369.948**	**1.641.906.368.360**	**8.892.993.389**	-	**79.030.093.946**	-	**2.985.068.725.642**

SK No 062642 C

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
530	Kab. Sorong	55.757.256.097	10.738.238.400	34.743.149.665	3.477.560.157	-	5.395.568.286	788.276.289	55.142.792.797
531	Kab. Manokwari	74.064.774.701	2.801.941.224	65.503.345.230	1.415.401.956	-	3.250.640.002	716.479.939	73.687.808.351
532	Kab. Manokwari Selatan	73.208.737.174	2.801.941.224	65.503.345.230	1.415.128.831	-	2.771.841.950	716.479.939	73.208.737.174
533	Kab. Fak fak	82.201.628.717	3.158.885.624	67.110.033.830	1.421.943.615	-	9.722.489.359	788.276.289	82.201.628.717
534	Kota Sorong	75.921.864.862	3.158.885.624	67.110.033.830	1.421.747.531	-	3.442.921.588	788.276.289	75.921.864.862
535	Kab. Pegunungan Arfak	73.523.511.680	2.801.941.224	65.503.345.230	1.415.128.831	-	3.086.816.456	716.479.939	73.523.511.680
536	Kab. Sorong Selatan	77.420.096.540	3.158.885.624	67.110.033.830	1.419.388.563	-	4.406.608.834	788.276.289	76.883.193.140
537	Kab. Raja Ampat	53.491.652.311	2.519.227.324	31.420.577.158	15.481.198.122	-	3.282.373.418	788.276.289	53.491.652.311
538	Kab. Teluk Bintuni	394.318.836.030	8.261.723.400	368.904.287.091	1.422.151.685	-	13.687.068.965	788.276.289	393.083.507.430
539	Kab. Teluk Wondama	92.124.571.468	3.158.885.624	67.110.033.830	1.612.161.932	-	8.305.336.293	788.276.289	80.974.693.968
540	Kab. Tambrauw	78.500.389.575	3.158.885.624	67.110.033.830	1.421.747.531	-	3.589.853.001	788.276.289	76.068.586.275
541	Kab. Maybrat	75.858.106.766	3.158.885.624	67.110.033.830	1.570.224.320	-	2.777.197.553	788.276.289	75.404.617.616
542	Kab. Kaimana	84.546.005.391	3.158.885.624	67.110.033.830	1.519.533.866	-	11.969.275.782	788.276.289	84.546.005.391
JUMLAH		**46.725.847.541.156**	**10.934.450.778.887**	**10.637.937.161.265**	**22.795.930.108.187**	**1.333.181.001.349**	**1.296.813.788.378**	**408.290.981.679**	**46.406.603.739.756**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	**Provinsi Aceh**	**5.743.164.284**	**5.299.261.920**
2	Kab. Aceh Barat	286.347.773	264.150.849
3	Kab. Aceh Besar	565.174.015	522.346.933
4	Kab. Aceh Selatan	284.267.330	262.070.406
5	Kab. Aceh Singkil	278.026.000	255.829.076
6	Kab. Aceh Tengah	496.438.044	458.109.867
7	Kab. Aceh Tenggara	278.026.000	255.829.076
8	Kab. Aceh Timur	344.394.641	317.755.397
9	Kab. Aceh Utara	373.488.907	344.382.262
10	Kab. Bireuen	342.555.512	315.380.987
11	Kab. Pidie	621.301.159	573.100.841
12	Kab. Simeulue	278.026.000	255.829.076
13	Kota Banda Aceh	284.267.330	262.070.406
14	Kota Sabang	284.267.330	262.070.406
15	Kota Langsa	286.347.773	264.150.849
16	Kota Lhokseumawe	284.267.330	262.070.406
17	Kab. Nagan Raya	282.186.886	259.989.962
18	Kab. Aceh Jaya	286.347.773	264.150.849
19	Kab. Pidie Jaya	742.307.248	684.379.594
20	Kab. Aceh Barat Daya	282.186.886	259.989.962
21	Kab. Gayo Lues	4.715.785.244	4.350.611.592
22	Kab. Aceh Tamiang	286.347.773	264.150.849
23	Kab. Bener Meriah	1.181.526.913	1.091.837.228
24	Kota Subulussalam	286.347.773	264.150.849
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**4.949.271.897**	**4.570.414.178**
26	Kab. Asahan	156.787.907	144.948.755
27	Kab. Dairi	413.556.731	383.745.006
28	Kab. Deli Serdang	538.966.035	502.104.266
29	Kab. Karo	535.925.761	494.143.400
30	Kab. Labuhanbatu	150.415.977	108.214.656
31	Kab. Langkat	156.787.907	144.948.755
32	Kab. Mandailing Natal	160.512.509	148.593.173

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
33	Kab. Nias	154.663.930	142.824.778
34	Kab. Simalungun	579.785.907	534.175.761
35	Kab. Tapanuli Selatan	154.663.930	142.744.721
36	Kab. Tapanuli Tengah	156.787.907	144.948.755
37	Kab. Tapanuli Utara	1.023.000.614	942.117.753
38	Kab. Toba Samosir	154.663.930	142.824.778
39	Kota Binjai	152.539.954	140.700.802
40	Kota Medan	310.550.388	286.431.409
41	Kota Pematang Siantar	3.773.638.975	3.477.953.007
42	Kota Sibolga	156.787.907	144.948.755
43	Kota Tanjung Balai	156.787.907	144.948.755
44	Kab. Batu Bara	156.787.907	144.948.755
45	Kab. Labuhanbatu Utara	154.663.930	142.744.721
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	154.663.930	142.824.778
47	Kab. Padang Lawas Utara	154.663.930	142.824.778
48	Kab. Padang Lawas	209.996.907	193.909.595
49	Kab. Nias Utara	154.663.930	142.824.778
50	Kab. Nias Barat	150.415.977	138.576.825
51	Kota Tebing Tinggi	156.787.907	144.948.755
52	Kota Padang Sidempuan	154.663.930	142.824.778
53	Kab. Pakpak Bharat	165.744.520	153.402.863
54	Kab. Nias Selatan	156.787.907	144.948.755
55	Kab. Humbang Hasundutan	377.387.236	348.790.244
56	Kab. Serdang Bedagai	156.787.907	144.948.755
57	Kab. Samosir	154.663.930	142.824.778
58	Kota Gunungsitoli	154.663.930	142.824.778
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**1.549.088.581**	**1.434.980.580**
60	Kab. Limapuluh Kota	973.732.724	902.769.540
61	Kab. Agam	464.493.052	429.579.136
62	Kab. Kepulauan Mentawai	86.060.444	79.763.566
63	Kab. Padang Pariaman	86.060.444	79.763.566
64	Kab. Pasaman	96.516.042	90.219.164

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
65	Kab. Pesisir Selatan	84.262.833	77.923.453
66	Kab. Sijunjung	86.060.444	79.763.566
67	Kab. Solok	261.260.466	241.677.059
68	Kab. Tanah Datar	435.454.682	402.986.048
69	Kota Bukit Tinggi	86.060.444	79.721.064
70	Kota Padang Panjang	82.465.222	76.168.344
71	Kota Padang	86.060.444	79.763.566
72	Kota Payakumbuh	98.024.051	91.684.671
73	Kota Sawahlunto	252.323.798	233.594.676
74	Kota Solok	86.060.444	79.763.566
75	Kota Pariaman	86.060.444	79.721.064
76	Kab. Pasaman Barat	80.667.611	74.370.733
77	Kab. Dharmasraya	86.060.444	79.721.064
78	Kab. Solok Selatan	82.465.222	76.168.344
79	**Provinsi Riau**	**2.668.000**	**1.363.700**
80	Kab. Bengkalis	243.000	124.200
81	Kab. Indragiri Hilir	243.000	124.200
82	Kab. Indragiri Hulu	243.000	124.200
83	Kab. Kampar	243.000	124.200
84	Kab. Kuantan Singingi	243.000	124.200
85	Kab. Pelalawan	243.000	124.200
86	Kab. Rokan Hilir	243.000	124.200
87	Kab. Rokan Hulu	243.000	124.200
88	Kab. Siak	243.000	124.200
89	Kota Dumai	243.000	124.200
90	Kota Pekanbaru	3.560.000	1.819.900
91	Kab. Kepulauan Meranti	243.000	124.200
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**184.479.324**	**174.077.104**
93	Kab. Bintan	26.231.624	24.497.766
94	Kab. Natuna	30.747.247	29.013.389
95	Kab. Karimun	30.747.247	29.013.389
96	Kota Batam	245.969.882	232.100.579

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
97	Kab. Kepulauan Anambas	30.747.247	29.001.716
98	Kota Tanjung Pinang	30.747.247	29.013.389
99	Kab. Lingga	30.747.247	29.013.389
100	**Provinsi Jambi**	**724.104.316**	**671.054.793**
101	Kab. Batang hari	74.398.245	69.093.352
102	Kab. Bungo	70.422.623	65.117.730
103	Kab. Kerinci	702.447.844	653.357.590
104	Kab. Merangin	168.410.426	155.581.573
105	Kab. Muaro Jambi	72.410.434	67.105.541
106	Kab. Sarolangun	72.410.434	67.105.541
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	74.398.245	69.093.352
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	68.434.811	63.129.918
109	Kab. Tebo	74.398.245	69.093.352
110	Kota Jambi	74.398.245	69.093.352
111	Kota Sungai Penuh	257.465.017	238.041.514
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**614.719.990**	**404.294.362**
113	Kab. Lahat	34.576.000	21.424.070
114	Kab. Musi Banyuasin	34.576.000	-
115	Kab. Musi Rawas	34.576.000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	34.576.000	-
117	Kab. Muara Enim	34.576.000	17.675.900
118	Kab. Ogan Komering Ilir	37.139.211	23.987.281
119	Kab. Ogan Komering Ulu	34.576.000	-
120	Kota Palembang	35.857.605	1.281.605
121	Kota Pagar Alam	34.576.000	-
122	Kota Lubuk Linggau	34.576.000	-
123	Kota Prabumulih	34.576.000	-
124	Kab. Empat Lawang	39.702.422	12.385.422
125	Kab. Banyuasin	37.139.211	23.987.281
126	Kab. Ogan Ilir	38.420.816	25.268.886
127	Kab. OKU Timur	82.551.681	2.829.681
128	Kab. OKU Selatan	795.627.267	532.233.009

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	34.576.000	-
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**71.000**	**36.100**
131	Kab. Bangka	11.000	**5.700**
132	Kab. Belitung	11.000	**5.700**
133	Kota Pangkal Pinang	11.000	**5.700**
134	Kab. Bangka Selatan	11.000	**5.700**
135	Kab. Bangka Tengah	95.000	**48.300**
136	Kab. Bangka Barat	**11.000**	**5.700**
137	Kab. Belitung Timur	11.000	**5.700**
138	**Provinsi Bengkulu**	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	**Provinsi Lampung**	**1.960.076.879**	**1.812.739.170**
150	Kab. Lampung Barat	1.272.866.407	1.179.368.137
151	Kab. Lampung Selatan	149.047.157	137.846.984
152	Kab. Lampung Tengah	160.000.263	103.399.816
153	Kab. Lampung Utara	160.132.016	148.186.079
154	Kab. Lampung Timur	584.006.396	539.398.469
155	Kab. Tanggamus	324.250.810	299.729.726
156	Kab. Tulang Bawang	130.672.248	120.849.630
157	Kab. Way Kanan	151.442.584	140.027.995
158	Kab. Pesawaran	242.308.577	224.143.790
159	Kab. Pesisir Barat	139.516.248	128.987.619
160	Kab. Pringsewu	245.184.518	227.059.188

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
161	Kab. Mesuji	148.488.248	137.243.289
162	Kab. Tulang Bawang Barat	136.597.727	126.095.107
163	Kota Bandar Lampung	582.186.248	536.315.969
164	Kota Metro	144.838.736	133.932.192
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**146.764.000**	**75.027.600**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**121.422.171.238**	**111.997.250.335**
167	Kab. Bandung	14.837.140.008	13.680.941.872
168	Kab. Bekasi	4.579.216.832	4.213.879.259
169	Kab. Bogor	4.680.073.812	4.317.318.588
170	Kab. Ciamis	4.920.029.822	4.538.509.697
171	Kab. Cianjur	5.029.046.477	4.639.211.841
172	Kab. Cirebon	5.442.748.060	5.020.732.456
173	Kab. Garut	29.563.161.426	27.269.641.492
174	Kab. Indramayu	4.677.800.591	4.315.288.161
175	Kab. Karawang	97.341.022.333	89.731.010.577
176	Kab. Kuningan	6.438.705.719	5.939.315.444
177	Kab. Majalengka	11.167.252.711	10.294.811.015
178	Kab. Pangandaran	4.845.706.089	4.470.272.654
179	Kab. Purwakarta	4.646.370.166	4.283.873.172
180	Kab. Subang	4.803.396.906	4.431.052.934
181	Kab. Sukabumi	4.677.519.065	4.315.022.071
182	Kab. Sumedang	22.843.047.020	21.116.757.249
183	Kab. Tasikmalaya	4.844.396.994	4.466.233.064
184	Kab. Bandung Barat	5.480.455.285	5.055.350.133
185	Kota Bandung	4.741.299.098	4.370.785.240
186	Kota Bekasi	4.642.636.855	4.279.999.708
187	Kota Bogor	4.685.299.978	4.322.022.287
188	Kota Cirebon	4.641.879.903	4.279.382.909
189	Kota Depok	4.540.794.000	4.178.269.094
190	Kota Sukabumi	4.642.546.290	4.280.013.941
191	Kota Cimahi	4.675.333.242	4.310.127.364
192	Kota Tasikmalaya	4.664.583.413	4.300.313.864

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
193	Kota Banjar	4.677.868.307	4.315.259.749
194	**Provinsi Banten**	**58.052.000**	**29.677.500**
195	Kab. Lebak	7.257.000	**3.710.000**
196	Kab. Pandeglang	11.969.000	**6.118.800**
197	Kab. Serang	7.580.000	**3.875.000**
198	Kab. Tangerang	8.066.000	**4.123.400**
199	Kota Cilegon	**7.257.000**	**3.710.000**
200	Kota Tangerang	20.864.000	10.666.300
201	Kota Serang	7.257.000	3.710.000
202	Kota Tangerang Selatan	65.209.000	33.336.000
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**220.298.759.554**	**203.223.552.895**
204	Kab. Banjarnegara	6.893.489.734	6.359.322.016
205	Kab. Banyumas	6.571.561.672	6.062.010.067
206	Kab. Batang	7.632.772.199	7.038.975.956
207	Kab. Blora	7.771.675.646	7.173.507.710
208	Kab. Boyolali	19.072.538.234	17.594.364.508
209	Kab. Brebes	7.133.679.194	6.580.109.965
210	Kab. Cilacap	6.683.266.705	6.165.164.435
211	Kab. Demak	18.574.141.615	17.122.734.556
212	Kab. Grobogan	10.848.173.919	10.005.929.011
213	Kab. Jepara	7.839.329.953	7.229.434.598
214	Kab. Karanganyar	13.883.081.034	12.809.872.077
215	Kab. Kebumen	7.290.182.681	6.726.858.288
216	Kab. Kendal	15.955.280.416	14.726.805.697
217	Kab. Klaten	15.060.063.194	13.895.448.837
218	Kab. Kudus	155.302.754.474	143.277.291.868
219	Kab. Magelang	12.503.038.414	11.543.346.311
220	Kab. Pati	9.501.429.810	8.758.920.714
221	Kab. Pekalongan	6.559.538.528	6.051.083.833
222	Kab. Pemalang	7.630.930.862	7.039.336.261
223	Kab. Purbalingga	7.183.102.238	6.626.142.304
224	Kab. Purworejo	7.972.743.877	7.354.255.989

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
225	Kab. Rembang	29.927.595.266	27.585.260.014
226	Kab. Semarang	9.224.224.375	8.509.764.219
227	Kab. Sragen	7.011.925.183	6.469.552.827
228	Kab. Sukoharjo	7.027.094.572	6.483.793.965
229	Kab. Tegal	7.485.479.790	6.904.547.417
230	Kab. Temanggung	31.104.159.154	28.698.506.772
231	Kab. Wonogiri	8.684.757.402	8.008.887.798
232	Kab. Wonosobo	12.894.088.165	11.897.337.723
233	Kota Magelang	6.556.824.036	6.048.660.601
234	Kota Pekalongan	7.103.935.039	6.554.360.138
235	Kota Salatiga	6.699.456.036	6.179.676.155
236	Kota Semarang	8.907.105.479	8.215.382.603
237	Kota Surakarta	7.061.651.328	6.514.487.496
238	Kota Tegal	6.479.374.518	5.977.162.694
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**3.889.725.912**	**3.591.562.731**
240	Kab. Bantul	3.954.819.963	3.651.759.746
241	Kab. Gunung Kidul	1.474.105.275	1.360.418.664
242	Kab. Kulon Progo	972.430.744	897.890.097
243	Kab. Sleman	1.690.510.753	1.560.660.663
244	Kota Yogyakarta	984.156.382	908.708.756
245	**Provinsi Jawa Timur**	**540.994.216.135**	**498.948.284.475**
246	Kab. Bangkalan	17.581.348.189	16.211.009.227
247	Kab. Banyuwangi	18.864.654.005	17.397.287.565
248	Kab. Blitar	19.619.388.654	18.092.898.308
249	Kab. Bojonegoro	50.187.665.799	46.268.746.079
250	Kab. Bondowoso	33.937.954.349	31.292.981.201
251	Kab. Gresik	17.347.492.004	15.995.997.535
252	Kab. Jember	52.154.502.171	48.129.717.657
253	Kab. Jombang	42.244.088.524	38.950.616.613
254	Kab. Kediri	38.835.182.131	35.822.999.936
255	Kab. Lamongan	39.513.835.418	36.428.488.903
256	Kab. Lumajang	23.511.443.753	21.676.888.481

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
257	Kab. Madiun	19.562.772.328	18.036.110.153
258	Kab. Magetan	17.389.420.747	16.036.427.475
259	Kab. Malang	77.421.149.217	71.426.026.930
260	Kab. Mojokerto	18.997.263.463	17.515.761.792
261	Kab. Nganjuk	20.127.368.035	18.559.757.187
262	Kab. Ngawi	21.568.405.754	19.894.538.030
263	Kab. Pacitan	17.706.436.997	16.326.714.866
264	Kab. Pamekasan	55.025.316.778	50.746.349.661
265	Kab. Pasuruan	187.850.472.480	173.291.263.548
266	Kab. Ponorogo	19.797.915.392	18.254.278.591
267	Kab. Probolinggo	61.705.035.722	56.907.065.784
268	Kab. Sampang	25.216.772.991	23.248.533.628
269	Kab. Sidoarjo	17.918.082.672	16.522.040.119
270	Kab. Situbondo	29.724.232.153	27.420.468.549
271	Kab. Sumenep	40.095.631.675	36.978.488.028
272	Kab. Trenggalek	17.368.339.429	16.014.722.995
273	Kab. Tuban	23.995.701.638	22.129.593.085
274	Kab. Tulungagung	23.007.845.206	21.215.738.636
275	Kota Blitar	17.791.450.804	16.405.581.168
276	Kota Kediri	61.073.488.095	56.344.167.289
277	Kota Madiun	16.760.502.013	15.455.519.425
278	Kota Malang	30.529.704.385	28.157.136.356
279	Kota Mojokerto	17.770.386.371	16.385.835.885
280	Kota Pasuruan	16.329.600.876	15.058.856.093
281	Kota Probolinggo	16.298.512.850	15.030.405.648
282	Kota Surabaya	21.544.119.769	19.877.395.806
283	Kota Batu	15.946.364.563	14.706.263.671
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	70.503.501	**67.679.796**
285	Kab. Bengkayang	52.386.810	**2.702.810**
286	Kab. Landak	5.228.810	**3.994.310**
287	Kab. Kapuas Hulu	5.228.810	**3.460.610**
288	Kab. Ketapang	49.374.694	**49.173.091**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
289	Kab. Mempawah	5.228.810	**4.268.012**
290	Kab. Sambas	5.228.810	**4.268.012**
291	Kab. Sanggau	5.228.810	**3.210.210**
292	Kab. Sintang	5.228.810	**4.268.012**
293	Kota Pontianak	5.228.810	**3.994.310**
294	Kota Singkawang	5.228.810	**5.017.480**
295	Kab. Kayong Utara	**5.228.810**	**3.994.310**
296	Kab. Kubu Raya	5.228.810	4.258.285
297	Kab. Sekadau	5.228.810	3.752.154
298	Kab. Melawi	5.228.810	5.017.480
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**63.683.401**	**63.683.401**
300	Kab. Barito Selatan	5.789.429	5.789.429
301	Kab. Barito Utara	-	-
302	Kab. Kapuas	2.894.714	2.894.714
303	Kab. Kotawaringin Barat	23.307.051	23.307.051
304	Kab. Kotawaringin Timur	5.976.154	5.976.154
305	Kota Palangkaraya	5.789.429	5.789.429
306	Kab. Barito Timur	-	-
307	Kab. Murung Raya	5.789.429	5.789.429
308	Kab. Pulang Pisau	27.814.077	27.814.077
309	Kab. Gunung Mas	5.789.429	5.789.429
310	Kab. Lamandau	-	-
311	Kab. Sukamara	5.789.429	5.789.429
312	Kab. Katingan	1.447.357	1.447.357
313	Kab. Seruyan	-	-
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**288.000**	**147.100**
315	Kab. Banjar	55.000	**27.900**
316	Kab. Barito Kuala	23.000	**11.700**
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	23.000	**11.700**
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	23.000	**11.700**
319	Kab. Hulu Sungai Utara	23.000	**11.700**
320	Kab. Kotabaru	23.000	**11.700**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
321	Kab. Tabalong	23.000	11.700
322	Kab. Tanah Laut	23.000	11.700
323	Kab. Tapin	23.000	11.700
324	Kota Banjarbaru	184.000	94.100
325	Kota Banjarmasin	216.000	110.500
326	Kab. Balangan	23.000	11.700
327	Kab. Tanah Bumbu	23.000	11.700
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	1.399.000	715.300
329	Kab. Berau	139.000	71.200
330	Kab. Kutai Kartanegara	139.000	71.200
331	Kab. Kutai Barat	139.000	71.200
332	Kab. Kutai Timur	139.000	71.200
333	Kab. Mahakam Ulu	139.000	71.200
334	Kab. Paser	139.000	71.200
335	Kota Balikpapan	544.000	278.000
336	Kota Bontang	139.000	71.200
337	Kota Samarinda	1.595.000	815.600
338	Kab. Penajam Paser Utara	139.000	71.200
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	**Provinsi Gorontalo**	359.000	**330.411**
362	Kab. Boalemo	72.000	21.600
363	Kab. Gorontalo	379.000	348.804
364	Kota Gorontalo	170.000	87.100
365	Kab. Pohuwato	72.000	-
366	Kab. Gorontalo Utara	72.000	44.310
367	Kab. Bone Bolango	72.000	14.400
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**329.704.591**	**308.925.398**
369	Kab. Banggai	225.063.269	208.505.804
370	Kab. Banggai Laut	30.603.569	21.603.899
371	Kab. Banggai Kepulauan	30.603.569	28.701.899
372	Kab. Buol	30.603.569	28.714.713
373	Kab. Toli-Toli	28.867.676	19.868.006
374	Kab. Donggala	30.603.569	21.603.899
375	Kab. Morowali	28.867.676	19.868.006
376	Kab. Morowali Utara	30.603.569	21.603.899
377	Kab. Poso	28.867.676	19.868.006
378	Kota Palu	79.208.485	77.306.815
379	Kab. Parigi Moutong	152.636.954	141.377.912
380	Kab. Sigi	30.603.569	28.701.899
381	Kab. Tojo Una-Una	28.867.676	26.978.820
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**4.451.792.510**	**4.109.142.102**
383	Kab. Bantaeng	302.054.970	278.707.215
384	Kab. Barru	216.780.773	200.079.433

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
385	Kab. Bone	812.039.367	749.278.368
386	Kab. Bulukumba	296.799.647	274.186.450
387	Kab. Enrekang	245.428.830	226.389.543
388	Kab. Gowa	193.555.830	178.658.130
389	Kab. Jeneponto	206.582.295	190.682.502
390	Kab. Luwu	213.898.389	197.430.286
391	Kab. Luwu Utara	193.555.830	178.658.130
392	Kab. Maros	196.066.830	180.968.500
393	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	193.555.830	178.658.130
394	Kab. Pinrang	193.555.830	178.658.130
395	Kab. Kepulauan Selayar	193.555.830	178.658.130
396	Kab. Sidenreng Rappang	193.555.830	178.658.130
397	Kab. Sinjai	1.389.790.052	1.283.308.440
398	Kab. Soppeng	3.778.435.182	3.487.433.820
399	Kab. Takalar	193.555.830	178.658.130
400	Kab. Tana Toraja	193.555.830	178.658.130
401	Kab. Wajo	213.413.185	196.979.169
402	Kota Pare-pare	193.555.830	178.658.130
403	Kab. Toraja Utara	193.555.830	178.658.130
404	Kota Makassar	193.555.830	178.658.130
405	Kota Palopo	193.555.830	178.658.130
406	Kab. Luwu Timur	193.555.830	178.658.130
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Pasangkayu	-	-
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	1.259.000	**643.400**
415	Kab. Buton	75.000	38.100
416	Kab. Konawe	75.000	38.100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
417	Kab. Konawe Kepulauan	75.000	38.100
418	Kab. Kolaka	75.000	38.100
419	Kab. Kolaka Timur	75.000	38.100
420	Kab. Muna	75.000	38.100
421	Kota Kendari	1.683.000	860.400
422	Kota Bau-bau	75.000	38.100
423	Kab. Konawe Selatan	146.000	74.900
424	Kab. Bombana	75.000	38.100
425	Kab. Konawe Utara	75.000	38.100
426	Kab. Buton Utara	75.000	38.100
427	Kab. Wakatobi	75.000	38.100
428	Kab. Kolaka Utara	75.000	38.100
429	Kab. Muna Barat	75.000	38.100
430	Kab. Buton Tengah	75.000	38.100
431	Kab. Buton Selatan	75.000	38.100
432	**Provinsi Bali**	**2.746.029.642**	**2.535.755.848**
433	Kab. Badung	747.419.588	688.587.830
434	Kab. Bangli	396.096.597	365.744.770
435	Kab. Buleleng	1.289.011.788	1.194.602.437
436	Kab. Gianyar	673.890.832	623.969.639
437	Kab. Jembrana	368.638.282	340.468.855
438	Kab. Karangasem	397.261.173	367.059.649
439	Kab. Klungkung	343.253.451	316.969.243
440	Kab. Tabanan	541.423.451	499.317.943
441	Kota Denpasar	1.646.898.451	1.516.534.607
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**105.236.594.109**	**97.023.352.402**
443	Kab. Bima	12.409.810.767	11.440.085.308
444	Kab. Dompu	6.038.042.271	5.566.309.191
445	Kab. Lombok Barat	18.750.465.509	17.287.106.296
446	Kab. Lombok Tengah	61.092.543.926	56.320.147.364
447	Kab. Lombok Timur	65.305.377.065	60.226.343.839
448	Kab. Sumbawa	11.225.757.496	10.350.380.023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
449	Kota Mataram	53.754.459.134	49.541.649.218
450	Kab. Lombok Utara	10.903.205.222	10.054.052.623
451	Kota Bima	2.550.451.978	2.351.279.902
452	Kab. Sumbawa Barat	3.521.938.929	3.245.444.961
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**2.348.520.966**	**2.168.796.499**
454	Kab. Alor	183.415.000	93.531.500
455	Kab. Belu	157.276.000	80.202.000
456	Kab. Ende	137.252.000	125.642.871
457	Kab. Flores Timur	713.999.580	446.325.365
458	Kab. Kupang	157.537.659	145.268.955
459	Kab. Lembata	128.597.000	26.998.200
460	Kab. Malaka	182.454.000	-
461	Kab. Manggarai	762.182.000	-
462	Kab. Ngada	128.332.354	66.520.354
463	Kab. Sikka	429.328.000	-
464	Kab. Sumba Barat	119.440.415	7.481.415
465	Kab. Sumba Timur	181.576.612	94.277.812
466	Kab. Timor Tengah Selatan	135.522.000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	106.477.000	-
468	Kota Kupang	106.477.000	-
469	Kab. Rote Ndao	128.501.000	118.241.724
470	Kab. Nagekeo	446.072.567	410.690.994
471	Kab. Sumba Tengah	106.477.000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	451.217.700	114.910.700
473	Kab. Manggarai Timur	188.760.459	174.806.531
474	Kab. Sabu Raijua	124.750.000	-
475	Kab. Manggarai Barat	219.247.139	202.016.312
476	**Provinsi Maluku**	-	-
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-
487	Kota Tual	-	-
488	**Provinsi Maluku Utara**	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	**Provinsi Papua**	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	**Provinsi Papua Barat**	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
JUMLAH		**3.391.311.758.299**	**3.124.018.679.699**

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Provinsi Aceh**	**1.961.334.010.000**	**1.956.492.796.000**	**1.866.371.343.840**	**1.765.347.493.622**
2	Kab. Aceh Barat	556.256.963 000	553.850.567.000	156.733.772.460	154.158.397.706
3	Kab. Aceh Besar	763.979.511.000	759.179.351.000	226.939.170.912	223.419.898.306
4	Kab. Aceh Selatan	607.341.339.000	603.242.255.000	203.739.322.000	202.026.258.533
5	Kab. Aceh Singkil	411.019.642.000	409 538.540.000	131.601.009.000	128 581.026 386
6	Kab. Aceh Tengah	577.052.678.000	572.047.248.000	175.803.454.808	170.850.172.667
7	Kab. Aceh Tenggara	550.538.893.000	546.648.237.000	191.811.551.000	189.373.859.763
8	Kab. Aceh Timur	774.098.033.000	769.038.917.000	190.816.695.000	189.394.300.895
9	Kab. Aceh Utara	902.933.982.000	897.980.136.000	383.550.515.000	378 588.927.584
10	Kab. Bireuen	819.566.518.000	815.284.270.000	224.826.089.000	221.687.846.266
11	Kab. Pidie	842.069.723.000	836.281.109.000	239.974.342.998	236.967.047.815
12	Kab. Simeulue	423.660.373.000	422.324.539 000	77.023.967.000	75.660.193.129
13	Kota Banda Aceh	551.564.266 000	547 629.398.000	128.372.577.171	126 767.937 985
14	Kota Sabang	339.726.509.000	338.311.725.000	79.076.522.000	72 154.778.566
15	Kota Langsa	416.834.350.000	414.459 534 000	96.841.881.000	94.038.676.777
16	Kota Lhokseumawe	428.195.816.000	425.306.246.000	84.462.179.000	83.901.224 637
17	Kab. Nagan Raya	487.688.377 000	485.041.973.000	139.670.935.000	138 348.797.994
18	Kab. Aceh Jaya	399.247.229.000	397.557.699.000	88.172.744.000	87.019.047.742
19	Kab. Pidie Jaya	413.543.469.000	410.145.461.000	124.830.555.000	123.021.751.871
20	Kab. Aceh Barat Daya	418.989.448.000	415 850.396.000	111.738.369.000	111.231.042.072
21	Kab. Gayo Lues	425.668.061 000	423 662.731.000	102.562.079.000	100 377.282.837
22	Kab. Aceh Tamiang	497.724.291 000	493.782.581.000	122.070.139.000	121.063.114.154
23	Kab. Bener Meriah	427.246.462.000	424.584.268.000	132.503.277.000	131.457.952.854
24	Kota Subulussalam	319.242.599.000	318 039.401.000	62.125.004.000	61.266.891.422
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**2.483.124.579.000**	**2.474.485.343.000**	**4.534.964.288.000**	**4.404.905.425.375**
26	Kab. Asahan	837.408.029.000	830.586.749.000	207.218.869.000	203.640.416.243
27	Kab. Dairi	569.042.190.000	565.078.900.000	147.498.452.000	141.672.241.007
28	Kab. Dek Serdang	1.385.860 252 000	1 376.847.320.000	406.157.260.000	401.789.428 950
29	Kab. Karo	694.659.836.000	687.569.659.000	162.826.610.000	156.281.446.842
30	Kab. LabuhanBatu	652.519.523.000	649.797.327 000	142.944.468.000	141.885.645.054
31	Kab. Langkat	1.106.713.503 000	1 099.658.531.000	321.335.402.000	319,927.325 100
32	Kab. Mandailing Natal	754.946.034.000	751.402.758.000	222,743.783.041	214.805.539.148
33	Kab. Nias	419.794.128.000	417.880.380.000	121.641.719.000	120.003.693.317
34	Kab. Simalungun	1.146.405.476 000	1.136 239.874.000	343.415.356.454	342.322.328.983
35	Kab. Tapanuli Selatan	609.162.427.000	605.063.671.000	158.195.115.000	155.934.176.856
36	Kab. Tapanuli Tengah	614.127.615.000	609.816.945.000	220.017.752.295	218.573.854.886
37	Kab. Tapanuli Utara	609.962.657.000	606.062.527 000	182.906.267.410	179.466.901.072
38	Kab. Toba Samosir	522.549.596 000	519.088.428.000	127.453.911.000	123 304.514.898
39	Kota Binjai	544.802.063.000	535.778.557.000	109.684.604.000	109 312 150 396
40	Kota Medan	1.560.956.851.000	1.493.919.764.000	348.592.969.355	332.193.857.467
41	Kota Pematang Siantar	569.499.118.000	565.804.258.000	105.838.614.266	104.063.218.352
42	Kota Sibolga	393.325.325 000	391.676.649.000	58.132.817.000	56 327.365.218
43	Kota Tanjung Balai	412.466.823.000	410.581.497.000	69.112.855.000	65.181.784 950
44	Kab. Batu Bara	568.210.636.000	565.927.402.000	137.225.162.984	136.243.025.293
45	Kab. LabuhanBatu Utara	562.859.404.000	560 374.058 000	136.599.827.163	135.921.695.341
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	481.566.736 000	479.785.624.000	128.240.084.000	126.972.024.433
47	Kab. Padang Lawas Utara	523.820.730.000	521.528.022.000	157.358.247.567	149.964.719.310
48	Kab. Padang Lawas	498.935.494.000	496.576.468.000	153.920.789.000	152.417.988.816
49	Kab. Nias Utara	393.721.097.000	392 014.347 000	161.888.730.000	155.695.405.149

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
50	Kab. Nias Barat	333.762.307.000	332.435.947.000	135.066.035.000	132.881.922.300
51	Kota Tebing Tinggi	395.688.258.000	393.452.394.000	102.798.397.000	98.701.020.690
52	Kota Padang Sidempuan	478.792.324.000	476.335.400.000	115.005.289.000	111.240.529.756
53	Kab. Pakpak Bharat	324.896.653.000	323.371.338.000	67.053.908.000	59.170.322.589
54	Kab. Nias Selatan	628.496.288.000	626.743.578.000	336.151.738.000	330.253.546.843
55	Kab. Humbang Hasundutan	491.293.205.000	489.171.029.000	151.639.779.000	148.542.851.038
56	Kab. Serdang Bedagai	734.027.202.000	727.436.456.000	263.663.135.240	260.890.435.464
57	Kab. Samosir	422.251.066.000	418.883.094.000	117.485.547.000	113.710.367.331
58	Kota Gunungsitoli	408.549.541.000	406.222.095.000	109.960.809.999	108.068.804.568
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**1.901.922.227.000**	**1.891.323.979.000**	**2.085.030.566.809**	**1.966.673.956.310**
60	Kab. Lima Puluh Kota	702.365.062.000	696.866.984.000	255.404.414.100	243.348.664.710
61	Kab. Agam	762.542.948.000	758.378.532.000	279.549.333.391	273.763.270.526
62	Kab. Kepulauan Mentawai	557.853.377.000	556.457.541.000	94.172.610.000	88.727.843.885
63	Kab. Padang Pariaman	722.635.928.000	716.079.920.000	270.738.103.000	255.389.154.257
64	Kab. Pasaman	561.308.754.000	557.421.256.000	171.338.289.000	164.280.193.869
65	Kab. Pesisir Selatan	792.358.743.000	784.053.203.000	316.868.205.638	310.419.508.485
66	Kab. Sijunjung	513.243.259.000	509.071.532.000	167.097.120.000	145.195.451.116
67	Kab. Solok	668.243.259.000	661.472.507.000	202.576.204.837	195.126.204.145
68	Kab. Tanah Datar	651.739.765.000	646.914.341.000	232.449.015.000	222.232.695.277
69	Kota Bukit Tinggi	430.965.335.000	429.026.323.000	65.852.332.000	61.811.192.521
70	Kota Padang Panjang	354.367.009.000	352.753.271.000	55.791.027.768	51.344.545.210
71	Kota Padang	1.068.755.501.000	1.061.387.887.000	285.463.733.977	283.328.985.469
72	Kota Payakumbuh	423.286.932.000	421.054.226.000	94.506.039.000	88.625.959.927
73	Kota Sawahlunto	349.197.280.000	347.498.276.000	88.702.909.750	84.175.651.384
74	Kota Solok	377.778.817.000	376.130.341.000	54.558.205.000	53.123.129.963
75	Kota Pariaman	391.516.784.000	389.252.498.000	105.553.942.280	87.166.530.837
76	Kab. Pasaman Barat	606.699.346.000	598.772.766.000	226.953.470.000	209.636.347.115
77	Kab. Dharmasraya	482.461.174.000	478.355.774.000	243.557.356.803	239.862.423.955
78	Kab. Solok Selatan	445.646.713.000	441.989.749.000	194.869.582.297	187.662.507.978
79	**Provinsi Riau**	**1.439.451.620.000**	**1.432.349.278.000**	**2.029.374.641.000**	**2.002.731.291.347**
80	Kab. Bengkalis	344.485.486.000	338.731.609.000	213.428.238.851	210.031.551.844
81	Kab. Indragiri Hilir	897.840.706.000	884.826.668.000	275.473.080.000	266.627.100.585
82	Kab. Indragiri Hulu	640.211.130.000	636.230.964.000	192.739.307.266	170.808.203.304
83	Kab. Kampar	775.090.963.000	765.107.999.000	370.189.758.000	362.509.735.421
84	Kab. Kuantan Singingi	609.467.997.000	603.990.247.000	211.635.657.353	189.822.028.586
85	Kab. Pelalawan	602.962.236.000	601.518.018.390	163.028.910.000	144.123.971.777
86	Kab. Rokan Hilir	491.772.859.000	488.580.681.000	294.009.208.000	283.501.675.103
87	Kab. Rokan Hulu	651.348.142.000	647.253.374.000	220.568.448.782	217.350.875.282
88	Kab. Siak	365.851.291.000	363.379.380.140	254.175.609.000	246.200.293.171
89	Kota Dumai	437.822.618.000	424.090.440.000	211.513.844.878	203.945.255.402
90	Kota Pekanbaru	818.435.221.000	810.814.967.000	201.655.223.524	196.298.592.686
91	Kab. Kepulauan Meranti	411.574.919.000	408.248.293.000	228.460.356.000	218.510.841.873
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**1.101.552.533.000**	**1.099.291.405.000**	**736.075.458.008**	**723.348.646.915**
93	Kab. Bintan	487.690.253.000	486.117.589.000	147.906.848.000	142.280.703.139
94	Kab. Natuna	397.785.704.000	396.383.552.000	92.365.690.000	86.176.582.546
95	Kab. Karimun	422.360.762.000	415.443.182.000	146.741.883.000	143.649.675.034
96	Kota Batam	633.957.071.000	629.854.829.000	266.854.501.287	255.996.277.761
97	Kab. Kepulauan Anambas	376.722.003.000	375.518.805.000	74.817.449.000	74.058.223.149
98	Kota Tanjung Pinang	459.035.650.000	457.305.066.000	92.620.957.000	83.017.065.330

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
99	Kab. Lingga	459.083.527.000	457.814.011.000	109.362.522.000	108.796.588.398
100	**Provinsi Jambi**	**1.291.923.707.000**	**1.288.418.327.000**	**1.145.504.847.019**	**1.116.935.079.452**
101	Kab. Batanghari	571.897.802.000	569.633.516.000	190.126.924.353	180.393.385.685
102	Kab. Bungo	602.613.586.000	600.093.502.000	190.401.078.811	183.262.303.602
103	Kab. Kerinci	570.389.066.000	567.859.510.000	152.782.064.000	150.793.264.999
104	Kab. Merangin	669.437.089.000	666.860.141.000	230.423.826.000	228.176.066.269
105	Kab. Muaro Jambi	631.350.550.000	629.162.056.000	176.587.968.900	173.488.609.584
106	Kab. Sarolangun	539.027.521.000	536.952.715.000	173.325.750.000	169.603.177.135
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	490.342.499.000	487.550.827.000	179.627.134.389	176.246.637.961
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	523.900.364.000	521.920.298.000	174.573.978.000	170.201.426.594
109	Kab. Tebo	536.524.337.000	534.449.531.000	148.217.777.080	143.800.805.548
110	Kota Jambi	690.724.772.000	687.484.664.000	254.829.051.182	250.111.507.881
111	Kota Sungai Penuh	414.326.985.000	412.574.295.000	99.539.447.000	97.765.658.013
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.575.373.367.000**	**1.568.602.615.000**	**2.381.936.073.000**	**2.336.160.972.552**
113	Kab. Lahat	655.195.267.000	650.245.697.000	206.220.766.000	205.177.625.209
114	Kab. Musi Banyuasin	381.276.692.000	378.024.938.000	335.379.294.000	332.184.817.761
115	Kab. Musi Rawas	600.180.128.000	594.887.320.000	255.609.338.000	252.806.445.176
116	Kab. Musi Rawas Utara	368.081.248.000	365.295.893.000	107.733.534.000	106.466.475.230
117	Kab. Muara Enim	620.313.421.000	613.136.927.000	246.557.620.000	238.012.566.306
118	Kab. Ogan Komering Ilir	978.571.504.000	969.636.496.000	260.237.051.000	258.690.573.285
119	Kab. Ogan Komering Ulu	603.568.602.000	599.614.786.000	171.256.950.000	158.158.689.917
120	Kota Palembang	1.235.336.955.000	1.226.620.875.000	484.136.458.034	458.038.945.229
121	Kota Pagar Alam	374.034.900.000	372.566.430.000	98.397.808.000	95.934.758.657
122	Kota Lubuk Linggau	451.901.335.000	450.072.853.000	116.269.684.000	115.017.174.922
123	Kota Prabumulih	401.337.761.000	399.247.165.000	120.881.738.000	120.020.605.741
124	Kab. Empat Lawang	402.951.186.000	400.547.848.000	137.378.336.000	135.437.736.647
125	Kab. Banyuasin	886.097.109.000	878.495.803.000	343.323.045.228	341.483.438.395
126	Kab. Ogan Ilir	592.817.070.000	588.788.514.000	249.270.919.000	247.002.753.866
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	759.212.795.000	754.627.379.000	245.995.266.635	244.384.774.074
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	590.626.515.000	587.250.613.000	153.309.106.000	152.941.429.990
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	297.726.294.000	295.503.062.000	89.910.291.000	88.827.606.866
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**943.982.191.000**	**942.308.451.000**	**552.393.994.155**	**543.239.590.450**
131	Kab. Bangka	500.682.611.000	498.137.263.000	168.632.274.801	163.262.397.653
132	Kab. Belitung	463.002.382.000	460.955.998.000	126.697.401.594	119.611.180.985
133	Kota Pangkal Pinang	434.574.143.000	432.562.497.000	95.188.762.000	91.530.241.135
134	Kab. Bangka Selatan	442.497.090.000	441.031.778.000	135.381.068.000	133.160.784.214
135	Kab. Bangka Tengah	426.219.372.000	424.586.686.000	157.479.156.000	152.838.041.873
136	Kab. Bangka Barat	427.997.278.000	425.158.892.000	118.333.631.000	112.466.896.467
137	Kab. Belitung Timur	423.426.747.000	421.531.947.000	109.548.495.000	97.386.111.542
138	**Provinsi Bengkulu**	**1.223.341.227.000**	**1.219.949.535.800**	**743.632.412.526**	**731.821.341.084**
139	Kab. Bengkulu Selatan	525.650.342.000	519.472.760.000	255.377.229.726	252.469.895.006
140	Kab. Bengkulu Utara	590.456.935.000	588.327.285.000	257.516.202.581	255.568.903.856
141	Kab. Rejang Lebong	566.437.095.000	563.983.329.000	160.633.337.529	157,710 558 215
142	Kota Bengkulu	649.681.045.000	647.053.589.000	141.074.995.000	135.895.693.642
143	Kab. Kaur	415.365.742.000	413.916.220.000	141.926.846.000	140.119.474.480
144	Kab. Seluma	477.383.614.000	475.498.288.000	169.496.264.000	166.092.835.243
145	Kab. Mukomuko	460.324.684.000	457.001.337.000	160.973.102.000	156.145.828.246
146	Kab. Lebong	377.859.122.000	376.400.126.000	141.503.608.862	128.982.296.558
147	Kab. Bengkulu Tengah	409.476.286.000	407.865.706.000	132.872.292.000	130.569.534.940

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
148	Kab. Kepahiang	403.631.660.000	396.946.604.000	126.847.216.648	125.948.121.527
149	**Provinsi Lampung**	**1.739.916.377.000**	**1.732.551.921.000**	**2.275.113.853.051**	**2.232.035.122.921**
150	Kab. Lampung Barat	500.613.338.000	497.587.974.000	197.341.734.549	193.523.163.066
151	Kab. Lampung Selatan	969.397.258.000	966.261.362.000	331.083.521.000	323.112.507.172
152	Kab. Lampung Tengah	1.259.528.178.000	1.248.686.762.000	350.849.915.181	347.123.102.374
153	Kab. Lampung Utara	888.494.843.000	880.015.613.000	230.065.595.000	218.626.806.835
154	Kab. Lampung Timur	1.015.031.133.000	1.007.072.973.000	350.849.382.000	320.004.675.425
155	Kab. Tanggamus	725.176.840.000	718.696.624.000	314.354.225.358	311.206.580.730
156	Kab. Tulang Bawang	580.505.819.000	577.189.919.000	191.248.697.263	182.480.900.834
157	Kab. Way Kanan	626.301.547.000	621.848.767.000	245.881.325.000	244.431.794.888
158	Kab. Pesawaran	624.502.440.000	619.834.916.000	221.481.751.000	219.919.178.843
159	Kab. Pesisir Barat	406.509.124.000	404.769.086.000	146.017.162.000	142.967.686.310
160	Kab. Pringsewu	582.828.145.000	579.016.439.000	181.907.006.000	179.534.123.710
161	Kab. Mesuji	410.246.380.000	407.710.506.000	133.894.896.908	131.884.635.306
162	Kab. Tulang Bawang Barat	443.399.456.000	441.732.032.000	166.394.956.000	165.097.476.923
163	Kota Bandar Lampung	1.025.122.725.000	1.019.027.795.000	248.602.962.259	245.542.511.187
164	Kota Metro	437.364.108.000	435.052.452.000	123.688.792.000	117.481.279.591
165	**Provinsi DKI Jakarta**	-	-	**3.405.403.588.783**	**3.282.963.513.783**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**2.994.344.725.000**	**2.964.612.155.000**	**11.216.667.175.821**	**10.855.903.522.028**
167	Kab. Bandung	1.991.762.404.000	1.967.815.290.000	707.590.936.250	695.014.262.765
168	Kab. Bekasi	1.109.084.444.000	1.105.266.422.000	344.041.428.403	333.403.018.273
169	Kab. Bogor	1.883.157.955.000	1.849.796.843.000	742.290.363.490	734.880.598.347
170	Kab. Ciamis	1.124.523.808.000	1.112.349.718.000	435.074.830.000	432.038.291.082
171	Kab. Cianjur	1.508.219.679.000	1.472.420.591.000	526.309.000.021	521.888.245.452
172	Kab. Cirebon	1.430.715.056.000	1.417.094.602.000	522.238.467.886	511.304.207.898
173	Kab. Garut	1.697.761.221.000	1.663.193.753.000	686.878.332.851	679.248.393.595
174	Kab. Indramayu	1.307.670.691.000	1.297.006.125.000	429.706.829.000	418.212.803.738
175	Kab. Karawang	1.216.810.516.000	1.211.636.504.021	446.219.648.957	438.252.924.386
176	Kab. Kuningan	1.136.000.889.000	1.122.096.015.000	450.220.704.519	444.588.965.747
177	Kab. Majalengka	1.134.532.450.000	1.127.919.598.000	429.444.106.425	421.170.417.461
178	Kab. Pangandaran	514.231.954.000	508.879.144.000	172.213.815.000	168.647.531.738
179	Kab. Purwakarta	813.567.867.000	810.270.915.000	280.967.468.100	274.892.815.882
180	Kab. Subang	1.203.407.054.000	1.198.944.800.000	437.573.707.320	429.738.868.066
181	Kab. Sukabumi	1.514.827.358.000	1.494.898.266.000	510.068.250.260	507.104.731.289
182	Kab. Sumedang	1.082.326.099.000	1.065.253.951.000	476.185.235.000	466.775.336.332
183	Kab. Tasikmalaya	1.403.102.763.000	1.381.192.559.000	551.660.299.455	541.228.730.987
184	Kab. Bandung Barat	1.026.982.842.000	1.022.493.222.000	414.122.271.267	393.806.085.024
185	Kota Bandung	1.601.834.557.000	1.589.628.887.000	490.964.244.479	475.855.854.061
186	Kota Bekasi	1.163.901.497.000	1.147.628.323.000	328.304.988.000	324.848.231.970
187	Kota Bogor	769.048.963.000	762.556.115.000	204.633.650.265	201.168.777.874
188	Kota Cirebon	548.789.411.000	545.286.189.000	186.730.118.100	183.596.202.150
189	Kota Depok	862.665.355.000	843.978.499.000	227.571.317.000	222.001.836.210
190	Kota Sukabumi	474.164.097.000	471.842.967.000	157.404.253.529	147.675.497.214
191	Kota Cimahi	542.550.698.000	539.717.972.000	168.082.564.797	163.497.095.617
192	Kota Tasikmalaya	759.061.154.000	753.316.752.000	241.729.076.354	239.935.363.984
193	Kota Banjar	353.432.625.000	351.736.779.000	73.293.470.000	70.496.850.531
194	**Provinsi Banten**	**1.048.158.451.000**	**1.042.988.771.000**	**2.679.320.942.000**	**2.631.365.051.765**
195	Kab. Lebak	1.025.617.979.000	1.014.388.131.000	434.856.441.000	429.647.807.806
196	Kab. Pandeglang	1.125.384.369.000	1.107.241.659.000	462.681.150.000	457.784.587.395

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
197	Kab. Serang	1.034.125.411.000	1.030.506.343.000	342.917.871.000	336.365.544.059
198	Kab. Tangerang	1.126.643.872.000	1.107.392.704.000	389.746.894.036	386.616.004.338
199	Kota Cilegon	599.460.814.000	597.547.066.000	126.209.805.000	124.224.695.253
200	Kota Tangerang	846.130.955.000	843.094.535.000	234.458.258.348	234.236.898.423
201	Kota Serang	618.641.127.000	613.720.963.000	157.584.440.000	157.033.149.524
202	Kota Tangerang Selatan	564.580.206.000	558.077.884.000	184.712.592.950	160 079.414 578
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**3.460.064.369.000**	**3.438.709.973.000**	**7.465.851.587.582**	**7.333.764.336.013**
204	Kab. Banjarnegara	914.958.948.000	900.564.784 000	313.008.478.578	307.582.239 878
205	Kab. Banyumas	1.317.798.068.000	1.306 921.916.000	512.650.616.977	504.739.661.915
206	Kab. Batang	753.352.485.000	743.088.164.000	236.039.423.000	232.905.719.145
207	Kab. Blora	883.338.891.000	871.294.279.000	293.839.394.201	286.602.728.815
208	Kab. Boyolali	966.489.944.000	956.428.556.000	366.196.694.088	357.803 707.606
209	Kab. Brebes	1.261.293.035.000	1.241.906.073 000	433.709.064.000	429.882.648.779
210	Kab. Cilacap	1.295.279.562.000	1.281.940.170.000	435.211.446.615	425.331.404.682
211	Kab. Demak	875.987.653.000	860.873.465 000	284.229.427.000	280.687.280.390
212	Kab. Grobogan	1.054.010.287 000	1.038.763.632.000	369.670.765.175	365.411.577.219
213	Kab. Jepara	948.598.557.000	934.338 029.000	309.677.640.000	307.341.820.288
214	Kab. Karanganyar	924.285.617.000	917.524.339.000	300.508.962.455	293.835.826.487
215	Kab. Kebumen	1.206.245.637.000	1.197.504.293.000	406.551.004.615	396.996.788.590
216	Kab. Kendal	921.727.933.000	909.781.219.000	284.863.091.596	281.859.461.657
217	Kab. Klaten	1.175.695 180.000	1.167.212.792 000	324.928.517.679	316.097.410.933
218	Kab. Kudus	764.591.304.000	757 097 370.000	219.087.123.390	217.684.287.267
219	Kab. Magelang	997.304.689.000	987.675.947 000	332.843.046.128	319.601.196.107
220	Kab. Pati	1.131.935.623.000	1.115.340 333.000	359.770.710.000	352.059 738.201
221	Kab. Pekalongan	890.703.494.000	885.145.414.000	298.080.362.000	293.125.208.732
222	Kab. Pemalang	1.130.573.652.000	1.118.791.154.000	335.278.225.635	328.402.381.276
223	Kab. Purbalingga	847.952.218 000	841.051.988.000	285.544.978.094	278.795.718.070
224	Kab. Purworejo	934.828.751.000	930.205 439.000	272.870.114.679	269.928 984.153
225	Kab. Rembang	734.621.624.000	727.781.395.000	237.681.240.751	235.472.474.082
226	Kab. Semarang	917.605.364.000	909.555.622 000	304.463.652.193	294.647 690.712
227	Kab. Sragen	1.006.988.298.000	991 204.614.000	334.899.586.429	331.127.589 977
228	Kab. Sukoharjo	867.256.150.000	859.146.406.000	276.026.462.505	265.709.253.548
229	Kab. Tegal	1.097.564.744.000	1.086.704.382.000	366.286.856.835	358.827.068.463
230	Kab. Temanggung	770.269.689.000	762.027.309.000	245.220.908.668	234.910.025.225
231	Kab. Wonogiri	1.084.170 043.000	1.074.092.865.000	355.768.176.000	352.944 043.603
232	Kab. Wonosobo	810.365.559.000	799 113.605 000	295.691.023.278	288 971.503.007
233	Kota Magelang	418.992.998.000	416.722.396.000	84.018.278.540	82.037 843.646
234	Kota Pekalongan	436.146.579.000	433 354.907.000	114.688.870.909	106.158.516.627
235	Kota Salatiga	427.568.712.000	425.080.208.000	75.209.488.818	72.134.446.788
236	Kota Semarang	1.194.313.031.000	1.183.614.821.000	336.514.432.667	330.809.185.892
237	Kota Surakarta	798.696.465.000	794.665.771.000	194.560.878.403	193.530.837.141
238	Kota Tegal	462.030.024.000	458.758.336.000	141.374.763.763	136.070 680.950
239	**Provinsi Di Yogyakarta**	**1.234.516.326.000**	**1.227.647.676.000**	**1.050.551.378.488**	**1.029.450.030.199**
240	Kab. Bantul	931.998.005.000	923.213.607.000	323.438.990.885	315.430.452.101
241	Kab. Gunung kidul	887.858.891.000	882 566.083.000	334.308.215.000	332.276.514.355
242	Kab. Kulon Progo	663.335.010.000	658.082.730.000	272.720.657.001	268.499.660.301
243	Kab. Sleman	947.130.589.000	938.351.449.000	282.017.325.000	279.453.500.572
244	Kota Yogyakarta	631.639.948.000	627.247.170.000	155.092.678.772	146.530.612.784
245	**Provinsi Jawa Timur**	**3.679.167.411.000**	**3.662.910.027.000**	**8.182.500.762.173**	**7.950.598.326.851**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
246	Kab. Bangkalan	951.659.130.000	933.519.578.000	277.664.063.245	273.856.915.894
247	Kab. Banyuwangi	1.322.509.373.000	1.303.602.427.000	400.474.639.031	392.068.968.573
248	Kab. Blitar	1.067.772.656.000	1.056.024.896.000	331.030.194.000	327.003.217.465
249	Kab. Bojonegoro	890.015.652.000	875.289.898.000	347.922.353.761	337.984.852.264
250	Kab. Bondowoso	862.433.102.000	851.793.900.000	328.542.761.804	315 715.152 182
251	Kab. Gresik	890.343.102.000	871.987.860 000	294.039.901.896	280 626.383 877
252	Kab. Jember	1.644.233.797 000	1.611.693.896 000	517.533.308.000	456.719.704.525
253	Kab. Jombang	1.028.640.058 000	1.016.614.394 000	372.189.049.000	337.637.078.122
254	Kab. Kediri	1.176.199 423.000	1 166.589.629.000	388.487.314.000	382.419.476.247
255	Kab. Lamongan	1.111.233.893.000	1.099.971.379.000	336.546.501.926	332.441.073.508
256	Kab. Lumajang	920.012.364.000	908.166.706.000	288.793.905.650	279.247.541.526
257	Kab. Madiun	826.600.103.000	819 494.603.000	274.402.187.427	270.406.114.538
258	Kab. Magetan	856.858.765.000	848 821.655.000	283.990.850.000	271 406.356.538
259	Kab. Malang	1.592.832.074 000	1 570.043.946.000	477.209.662.000	470.865.577 224
260	Kab. Mojokerto	924.376.463.000	915.503.303 000	286.747.877.842	272 826.055.800
261	Kab. Nganjuk	1.005.432 269 000	998.778.363 000	359.122.919.536	355.159.215.256
262	Kab. Ngawi	988.487.546.000	980.835.712 000	321.743.302.517	320.698.526.895
263	Kab. Pacitan	748.480.938.000	739.879.366.000	286.168.813.448	286.835.981.805
264	Kab. Pamekasan	809.642.625.000	800.743.381.000	263.030.107.000	257.820.608.821
265	Kab. Pasuruan	1.120.144.784.000	1.103.294.454.000	403.109.618.000	384.580.085.229
266	Kab. Ponorogo	1.001.863.677.000	992.269 673.000	326.823.896.174	319.362.157.367
267	Kab. Probolinggo	945.721.138.000	938 173.518.000	317.749.342.060	311.112.650 112
268	Kab. Sampang	796.403.646.000	784 115.868.000	253.023.921.808	249.579.934.277
269	Kab. Sidoarjo	1.157.958 587 000	1.149.801.473 000	413.556.537.759	397.142.658.188
270	Kab. Situbondo	761.038.751.000	753.652.189.000	281.405.734.428	276.595.731.874
271	Kab. Sumenep	1.106.373.716.000	1.090.899.516.000	304.001.864.000	301.365.896.620
272	Kab. Trenggalek	842.342.631.000	834.599 215.000	305.596.418.272	289.727.864.446
273	Kab. Tuban	982.179.381.000	972.894.861.000	307.197.090.100	304 917.944.782
274	Kab. Tulungagung	1.087.050.427 000	1.079.847.029.000	404.999.623.000	385.689.178.884
275	Kota Blitar	402.974.374 000	400.918.516 000	82.878.896.350	79.076.520 515
276	Kota Kediri	582.747.476.000	579.131.566.000	141.054.374.805	137.935.984.088
277	Kota Madiun	476.135.673.000	473.852.439.000	74.214.694.343	73.265.684.511
278	Kota Malang	810.812.876.000	805.071.632.000	175.482.406.284	164.804.590.549
279	Kota Mojokerto	375.978.526.000	373 898.704.000	90.297.679.156	87 223.828.086
280	Kota Pasuruan	412.694.511 000	403.909.797 000	77.655.439.210	71 639.831.452
281	Kota Probolinggo	440.456.818.000	438.274.640.000	114.162.514.014	83.455.369.867
282	Kota Surabaya	1.209.488 472.000	1.203.461 956.000	496.560.437.022	441.472.361.070
283	Kota Batu	455.694.746.000	453.338.878.000	66.750.459.000	59.432.879 625
280	**Provinsi Kalimantan Barat**	**1.568.574.205.000**	**1.563.770.887.000**	**1.801.842.883.718**	**1.766.052.768.548**
281	Kab. Bengkayang	550.462.013.000	547.392.437.000	193.672.827.000	173.963.389.816
282	Kab. Landak	614.704.644.000	611.306.636.000	304.264.260.287	300.871.451.032
283	Kab. Kapuas Hulu	903.455.857.000	900 430.493.000	286.543.141.000	261.301.585.146
284	Kab. Ketapang	1.044.411.014 000	1.040 646.678.000	385.705.422.000	380 331 046.304
285	Kab. Mempawah	542.270.990.000	539.545.636.000	135.067.952.455	134.253.614.635
286	Kab. Sambas	816.348.874 000	813.946.622 000	345.946.013.597	338 179.643.149
287	Kab. Sanggau	750.488.162.000	747.178.578.000	223.240.595.526	221.657.560 858
288	Kab. Sintang	847.220.789.000	843.500.665.000	327.231.573.000	319.749.181.769
289	Kota Pontianak	661.544.956.000	658.270.110.000	167.658.345.362	162.461.857.504
300	Kota Singkawang	467.470.514.000	465.326 232.000	92.980.673.807	91.313 259 767

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
301	Kab. Kayong Utara	449.210.743.000	447.780.169.000	125.324.369.000	118.799.796.847
302	Kab. Kubu Raya	729.912.591.000	726.710.379.000	222.011.498.000	214.309.680.963
303	Kab. Sekadau	469.758.743.000	467.314.451.000	111.135.230.000	107.593.545.846
304	Kab. Melawi	559.720.948.000	557.377.712.000	145.172.406.000	135.919.757.836
305	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**1.442.656.367.000**	**1.439.305.729.000**	**1.103.304.925.724**	**1.078.647.800.511**
306	Kab. Barito Selatan	527.224.632.000	524.689.810.000	123.896.032.000	123.095.219.110
307	Kab. Barito Utara	512.512.783.000	510.002.173.000	170.389.741.232	169.218.213.689
308	Kab. Kapuas	795.355.088.000	791.344.428.000	313.243.057.000	310.043.487.471
309	Kab. Kotawaringin Barat	604.341.284.000	602.446.484.000	298.601.738.668	293.407.633.115
310	Kab. Kotawaringin Timur	772.439.994.000	770.071.494.000	189.502.266.743	181.829.778.062
311	Kota Palangkaraya	606.015.976.000	603.666.424.000	145.557.597.000	143.354.168.407
312	Kab. Barito Timur	445.962.799.000	443.711.145.000	121.688.780.000	120.340.229.181
313	Kab. Murung Raya	623.153.023.000	621.599.287.000	132.310.931.000	130.212.328.117
314	Kab. Pulang Pisau	524.333.082.000	521.961.404.000	140.375.015.000	136.495.156.046
315	Kab. Gunung Mas	520.224.021.000	518.013.421.000	151.312.274.000	145.606.550.883
316	Kab. Lamandau	427.114.478.000	425.762.854.000	114.695.814.000	109.885.087.448
317	Kab. Sukamara	389.882.723.000	388.663.735.000	56.795.541.000	56.263.166.689
318	Kab. Katingan	636.084.451.000	634.091.753.000	144.924.680.371	140.400.989.687
319	Kab. Seruyan	567.765.658.000	566.243.502.000	162.351.083.000	159.347.105.742
320	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**1.095.796.117.000**	**1.091.037.011.000**	**1.110.904.150.184**	**1.081.851.073.491**
321	Kab. Banjar	689.489.862.000	684.702.334.000	251.501.931.000	240.089.283.455
322	Kab. Barito Kuala	536.423.276.000	532.810.524.000	237.694.458.365	236.495.930.430
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	485.605.763.000	482.100.383.000	163.698.315.801	161.910.306.003
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	489.090.030.000	485.837.290.000	173.615.707.000	167.125.890.354
325	Kab. Hulu Sungai Utara	457.931.491.000	454.719.805.000	174.561.479.000	170.313.476.360
326	Kab. Kotabaru	591.870.214.000	590.032.258.000	174.111.179.000	170.710.181.092
327	Kab. Tabalong	461.740.456.000	457.489.788.000	162.362.834.477	156.802.040.347
328	Kab. Tanah Laut	505.605.530.000	502.182.258.000	185.073.141.000	183.222.175.126
329	Kab. Tapin	426.224.950.000	421.844.570.000	146.412.715.000	144.621.778.332
330	Kota Banjarbaru	421.090.093.000	419.144.765.000	139.439.566.820	132.285.871.484
331	Kota Banjarmasin	674.930.481.000	671.766.165.000	163.793.290.000	161.369.314.624
332	Kab. Balangan	354.448.216.000	352.411.306.000	130.714.692.000	126.925.483.455
333	Kab. Tanah Bumbu	438.026.626.000	435.828.658.000	210.476.495.909	208.789.757.537
334	**Provinsi Kalimantan Timur**	**834.938.558.000**	**831.404.756.000**	**1.239.941.619.299**	**1.217.556.243.555**
335	Kab. Berau	558.818.045.000	556.588.497.000	145.160.363.000	138.112.664.178
336	Kab. Kutai Kartanegara	452.961.957.000	440.463.493.000	401.092.873.000	384.055.914.728
337	Kab. Kutai Barat	557.072.217.000	555.082.677.000	140.634.786.339	136.020.019.397
338	Kab. Kutai Timur	571.773.275.000	570.247.961.000	249.208.106.569	241.799.913.212
339	Kab. Mahakam Ulu	453.136.962.000	451.971.660.000	62.319.950.000	60.282.914.194
340	Kab. Paser	384.896.323.000	382.202.548.000	175.656.889.000	166.236.986.822
341	Kota Balikpapan	437.726.788.000	429.199.860.000	186.820.316.814	184.394.262.058
342	Kota Bontang	231.143.244.000	229.778.998.000	64.446.921.000	62.310.272.926
343	Kota Samarinda	675.500.904.000	670.356.522.000	261.842.456.000	234.916.972.241
344	Kab. Penajam Paser Utara	277.611.967.000	275.868.751.000	109.738.161.599	106.308.930.211
284	**Provinsi Kalimantan Utara**	**1.083.715.769.000**	**1.082.389.409.000**	**380.071.144.821**	**374.389.806.790**
285	Kab. Bulungan	526.600.151.000	525.055.889.000	177.433.962.180	176.100.686.404
286	Kab. Malinau	785.670.183.000	784.353.307.000	146.469.795.614	145.143.087.736
287	Kab. Nunukan	499.443.580.000	497.918.246.000	224.176.199.333	219.912.957.973
288	Kab. Tana Tidung	413.508.814.000	412.379.208.000	89.751.331.000	77.862.241.125

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
289	Kota Tarakan	427.504.956.000	425.960.694.000	89.954.739.630	88.361.174.075
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**1.340.960.749.000**	**1.335.813.269.000**	**1.104.137.394.724**	**1.071.569.669.601**
346	Kab. Bolaang Mongondow	520.863.307.000	518.152.776.000	154.644.580.479	149.169.610.743
347	Kab. Minahasa	626.891.615.000	626.199.943.000	212.563.761.172	209.977.616.446
348	Kab. Sangihe	504.778.603.000	502.583.793.000	185.575.888.556	180.752.147.252
349	Kota Bitung	475.306.720.000	473.502.344.000	109.214.531.294	103.370.561.038
350	Kota Manado	718.105.042.000	715.060.730.000	168.077.629.452	165.112.810.086
351	Kab. Kepulauan Talaud	466.829.170.000	465.379.648.000	129.424.408.467	126.707.982.570
352	Kab. Minahasa Selatan	512.617.579.000	509.955.385.000	138.624.074.000	137.714.541.016
353	Kab. Minahasa Tenggara	388.590.506.000	387.103.088.000	115.846.857.000	112.933.113.150
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	368.894.458.000	367.501.780.000	92.050.440.000	89.193.228.273
355	Kota Kotamobagu	361.109.537.000	359.457.903.000	98.884.835.999	98.086.635.492
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	329.834.100.000	328.466.686.000	135.608.283.000	130.803.488.848
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	333.549.036.000	332.263.730.000	125.479.376.800	122.401.028.501
358	Kota Tomohon	402.379.553.000	400.737.383.000	113.965.338.625	112.462.024.703
359	Kab. Minahasa Utara	478.884.543.000	472.542.815.000	157.927.354.206	148.140.163.179
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	354.425.767.000	353.070.985.000	128.036.864.411	125.444.416.340
361	**Provinsi Gorontalo**	**946.452.624.000**	**944.270.446.000**	**452.494.883.461**	**444.897.109.770**
362	Kab. Boalemo	428.873.901.000	427.405.431.000	160.563.903.015	153.898.341.795
363	Kab. Gorontalo	622.762.737.000	618.060.475.000	267.440.825.000	266.441.978.231
364	Kota Gorontalo	492.892.141.000	490.394.163.000	139.447.007.886	124.752.695.966
365	Kab. Pohuwato	489.117.966.000	487.482.122.000	231.235.187.000	227.785.095.388
366	Kab. Gorontalo Utara	381.954.333.000	380.457.441.000	163.570.447.319	158.575.377.099
367	Kab. Bone Bolango	461.575.596.000	458.408.122.000	164.343.672.077	163.319.947.061
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**1.492.182.666.000**	**1.488.847.818.000**	**1.324.010.541.582**	**1.266.312.761.734**
369	Kab. Banggai	820.986.428.000	818.466.344.000	247.799.615.000	246.379.714.319
370	Kab. Banggai Laut	390.478.710.000	389.292.460.000	94.301.142.000	88.886.565.498
371	Kab. Banggai Kepulauan	446.343.684.000	444.960.480.000	148.685.974.000	144.936.735.341
372	Kab. Buol	485.229.562.000	483.685.300.000	179.618.664.000	178.213.696.616
373	Kab. Tolitoli	588.276.474.000	586.447.992.000	194.731.787.493	193.313.581.624
374	Kab. Donggala	627.024.200.000	624.939.920.000	276.107.475.000	272.032.285.775
375	Kab. Morowali	468.016.546.000	466.453.336.000	169.421.516.000	163.069.312.490
376	Kab. Morowali Utara	541.152.527.000	539.257.727.000	234.209.121.958	234.186.253.050
377	Kab. Poso	685.789.750.000	683.391.776.000	282.671.528.090	280.104.451.891
378	Kota Palu	650.829.309.000	648.403.965.000	187.567.056.098	182.888.272.163
379	Kab. Parigi Moutong	729.168.148.000	727.263.874.000	352.493.839.661	347.085.243.448
380	Kab. Sigi	589.752.115.000	587.639.413.000	208.608.212.360	202.126.998.382
381	Kab. Tojo Una Una	552.080.735.000	550.536.473.000	220.298.076.000	215.409.536.986
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**2.357.591.182.000**	**2.349.993.034.000**	**2.847.344.302.910**	**2.773.530.404.322**
383	Kab. Bantaeng	478.709.520.000	476.988.410.000	178.219.221.362	176.023.572.528
384	Kab. Barru	493.676.854.000	491.478.886.000	143.284.068.000	139.409.126.124
385	Kab. Bone	1.015.212.018.000	1.000.527.318.000	433.885.684.499	430.225.154.356
386	Kab. Bulukumba	672.997.972.000	665.224.246.000	304.393.667.000	298.713.977.419
387	Kab. Enrekang	506.950.764.000	505.093.860.000	206.938.737.264	204.607.421.036
388	Kab. Gowa	811.842.983.000	808.650.245.000	395.416.812.091	388.687.471.805
389	Kab. Jeneponto	616.181.444.000	613.992.950.000	252.582.127.445	248.740.858.802
390	Kab. Luwu	659.004.993.000	652.082.657.000	283.432.811.482	279.388.309.186
391	Kab. Luwu Utara	626.246.756.000	619.965.494.000	225.103.133.000	219.452.800.401
392	Kab. Maros	675.113.991.000	666.954.323.000	197.531.544.024	195.020.942.972

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	715.539.546.000	713.388.948.000	229.621.528.000	225.278.052.974
394	Kab. Pinrang	675.600.723.000	673.175.379.000	243.411.346.000	240.622.430.395
395	Kab. Kepulauan Selayar	568.560.531.000	565.134.101.000	176.375.836.723	172.722.177.817
396	Kab. Sidenreng Rappang	588.705.480.000	585.992.758.000	226.626.616.000	223.990.427.523
397	Kab. Sinjai	553.586.735.000	551.234.025.000	256.757.958.453	253.327 899.175
398	Kab. Soppeng	592.427.212.000	588.492.344.000	249.683.308.108	248.158 812 625
399	Kab. Takalar	576.931.979.000	574.658.219.000	172.832.069.000	172.153.517.733
400	Kab. Tana Toraja	549.165.995.000	544 504.797.000	202.834.102.713	199.034.987.123
401	Kab. Wajo	681.631.121.000	676 935.175.000	282.953.161.426	279 228.078 567
402	Kota Parepare	439.708.311.000	437.822.985.000	102.146.786.000	100 725.022.930
403	Kab. Toraja Utara	509.432.943.000	505.895.983.000	163.526.849.000	162.428.067.212
404	Kota Makassar	1.286.419 315 000	1 249.647.391.000	342.009.651.574	311.972.793.008
405	Kota Palopo	498.865.870.000	497.008.966.000	154.838.832.109	152.444.231.820
406	Kab. Luwu Timur	512.404.165.000	508.456 665.000	160.278.981.181	153.742.678.090
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**970.566.678.000**	**969.832.936.000**	**681.203.576.276**	**659.732.952.520**
408	Kab. Majene	496.316.515.000	492 454.281.000	214.568.224.000	212.721.852 287
409	Kab. Mamuju	600.303.844.000	598 579.576.000	179.468.738.360	177.002.751 209
410	Kab. Mamuju Tengah	337.153.809.000	335.931.663.000	151.767.821.000	150.480.853.021
411	Kab. Polewali Mandar	876.178.238.000	871.333.866.000	333.374.002.000	331.013.031.526
412	Kab. Mamasa	495.966.812.000	494.356.232 000	184.958.444.000	182.842.314.779
413	Kab. Pasangkayu	460.581.283.000	459.368 611.000	176.513.270.347	174.634.728.453
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**1.458.672.026.000**	**1.454.628.700.000**	**1.230.963.047.000**	**1.211.860.541.129**
415	Kab. Buton	401.791.686.000	400.048 470.000	142.352.858.558	138.828.487.869
416	Kab. Konawe	669.706.539.000	667 195.929.000	251.236.508.804	249.394.374.837
417	Kab. Konawe Kepulauan	306.193.542.000	304.961.922.000	78.527.672.000	75.847.689.878
418	Kab. Kolaka	555.034.971.000	550.288.497.000	208.326.504.372	207.281.202.630
419	Kab. Kolaka Timur	384.572.762.000	383.189.558.000	125.533.478.000	122.916.955.020
420	Kab. Muna	625.789.665.000	620.942.135.000	314.636.377.000	313.424.445.539
421	Kota Kendari	643.432 736.000	641.234 768.000	192.162.135.717	187.821.488.627
422	Kota Bau-bau	497.754.032.000	495 773 966.000	136.918.924.000	135.889.886.596
423	Kab. Konawe Selatan	675.526.307.000	673.726.247.000	243 800.216.000	241.474 137.788
424	Kab. Bombana	456.475.139.000	455.101.409.000	217.393.836.000	216.017.647.821
425	Kab. Konawe Utara	430.241.971.000	428.934.559.000	112.563.616.000	111.468.466.648
426	Kab. Buton Utara	392.967.034.000	391.697.518.000	96.703.012.000	95 054.193.322
427	Kab. Wakatobi	448.618.554.000	446.641.974 000	200.412.605.000	197.577.330.375
428	Kab. Kolaka Utara	461.923.459.000	460.597.099.000	137.691.174.000	136.242.811 049
429	Kab. Muna Barat	341.651.382.000	338.976 556.000	126.993.301.000	126.374 842.513
430	Kab. Buton Tengah	344.201.396.000	342.875.036.000	104.373.048.405	100.733.901.019
431	Kab. Buton Selatan	339.720.973.000	336 333.934.000	113.749.837.000	113 396 265.417
432	**Provinsi Bali**	**1.210.991.525.000**	**1.204.700.789.000**	**1.188.363.792.277**	**1.155.492.719.218**
433	Kab. Badung	335.170.598.000	330.780.978.000	156.810.381.472	149.693.311.953
434	Kab. Bangli	538.001.454.000	535.235.046 000	109.431.193.728	102.808.069.382
435	Kab. Buleleng	910.488.837.000	904.071.781.000	248.431.397.000	243.240.852 056
436	Kab. Gianyar	652.219.599.000	648.742 641.000	193.354.425.555	184.641.588.444
437	Kab. Jembrana	525.591.005.000	523.048.815.000	94.196.427.000	90.867.496 114
438	Kab. Karangasem	716.253.373.000	713 291.168.000	205.181.967.218	186.609.384.863
439	Kab. Klungkung	505.586.391.000	503.097.687.000	120.048.601.069	116.714.381.685
440	Kab. Tabanan	763.334.805.000	757.249.338.000	266.449.090.330	258.716.325.129
441	Kota Denpasar	623.672.157.000	619.582.547 000	129.586.538.198	126.305.094.166

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
442	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**1.484.527.774.000**	**1.475.540.106.000**	**1.632.294.946.373**	**1.602.255.569.207**
443	Kab. Bima	846.199.889.000	832.124.683.000	389.283.093.000	387.428.358.668
444	Kab. Dompu	545.996.418.000	543.072.110.000	165.584.628.500	165.244.896.085
445	Kab. Lombok Barat	730.289.354.000	724.706.010.000	341.895.971.406	322.429.416.268
446	Kab. Lombok Tengah	957.311.642.000	943.972.250.000	453.586.947.000	437.508.802.657
447	Kab. Lombok Timur	1.091.094.297.000	1.078.831.783.000	456.246.829.000	451.276.445.397
448	Kab. Sumbawa	792.884.648.000	782.261.134.000	281.547.636.387	274.552.242.547
449	Kota Mataram	582.765.685.000	579.228.725.000	153.744.316.829	151.387.504.567
450	Kab. Lombok Utara	378.529.590.000	376.031.612.000	156.433.236.920	148.426.697.293
451	Kota Bima	442.038.321.000	439.644.557.000	123.747.988.000	122.281.863.845
452	Kab. Sumbawa Barat	376.608.234.000	373.292.334.000	102.149.118.666	98.753.861.965
453	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**1.722.181.082.000**	**1.716.206.146.000**	**2.456.619.190.008**	**2.369.198.255.882**
454	Kab. Alor	572.919.255.000	570.797.079.000	212.657.450.904	210.602.708.109
455	Kab. Belu	476.169.938.000	472.964.568.000	194.197.867.000	189.903.042.031
456	Kab. Ende	599.004.483.000	592.619.007.000	220.981.127.000	218.075.261.826
457	Kab. Flores Timur	595.854.496.000	593.304.944.000	179.350.306.000	177.669.793.788
458	Kab. Kupang	635.495.332.000	633.088.936.000	214.549.930.000	211.121.805.068
459	Kab. Lembata	445.274.975.000	443.588.603.000	166.113.461.000	161.012.864.238
460	Kab. Malaka	430.115.889.000	427.260.857.000	128.127.716.000	122.868.117.861
461	Kab. Manggarai	561.139.653.000	553.067.333.000	236.709.858.000	228.091.060.619
462	Kab. Ngada	448.202.354.000	445.805.432.000	104.559.135.000	100.896.706.961
463	Kab. Sikka	590.110.914.000	586.220.258.000	175.277.579.459	171.346.808.006
464	Kab. Sumba Barat	379.392.302.000	377.323.812.000	124.381.453.000	122.459.544.327
465	Kab. Sumba Timur	605.609.005.000	602.646.901.000	206.131.320.000	186.907.889.058
466	Kab. Timor Tengah Selatan	716.929.578.000	704.510.671.000	275.488.270.000	267.320.330.267
467	Kab. Timor Tengah Utara	565.758.346.000	553.537.786.000	184.412.110.000	173.865.638.692
468	Kota Kupang	623.856.772.000	621.573.538.000	161.653.742.000	161.188.456.011
469	Kab. Rote Ndao	424.607.949.000	422.697.359.000	124.360.310.000	122.431.506.872
470	Kab. Nagekeo	414.631.577.000	412.477.821.000	159.785.691.000	152.262.450.165
471	Kab. Sumba Tengah	333.876.062.000	332.306.536.000	112.657.943.760	110.058.351.419
472	Kab. Sumba Barat Daya	462.481.864.000	459.832.302.000	182.971.779.000	180.097.123.823
473	Kab. Manggarai Timur	491.172.097.000	488.307.791.000	219.105.722.002	214.265.340.143
474	Kab. Sabu Raijua	341.460.888.000	339.973.471.000	135.755.446.000	134.176.320.766
475	Kab. Manggarai Barat	502.486.188.000	498.893.859.000	231.074.415.000	217.167.875.426
476	**Provinsi Maluku**	**1.528.230.557.000**	**1.524.466.221.000**	**936.802.477.611**	**898.898.261.252**
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	529.865.897.000	527.488.999.000	204.228.873.000	191.068.003.073
478	Kab. Maluku Tengah	892.490.766.000	889.449.612.000	356.221.444.444	348.432.210.249
479	Kab. Maluku Tenggara	461.412.381.000	459.754.431.000	213.830.559.000	208.332.253.990
480	Kab. Buru	482.604.098.000	481.129.312.000	240.864.699.000	238.231.302.087
481	Kota Ambon	635.403.609.000	632.334.033.000	187.479.190.000	186.170.758.581
482	Kab. Seram Bagian Barat	567.548.852.000	565.120.350.000	182.330.296.400	180.505.560.731
483	Kab. Seram Bagian Timur	506.174.564.000	504.379.471.000	140.585.580.600	139.109.637.964
484	Kab. Maluku Barat Daya	535.779.323.000	534.339.275.000	142.267.989.000	137.617.419.941
485	Kab. Buru Selatan	405.165.999.000	403.896.483.000	100.122.918.000	98.005.488.913
486	Kab. Kepulauan Aru	559.785.012.000	557.767.648.000	89.818.382.000	88.882.778.543
487	Kota Tual	370.628.836.000	369.245.632.000	84.959.816.000	81.615.827.586
488	**Provinsi Maluku Utara**	**1.223.169.329.000**	**1.221.012.415.000**	**735.660.784.000**	**723.037.932.806**
489	Kab. Halmahera Tengah	417.517.843.000	416.219.905.000	134.240.597.000	131.280.258.092
490	Kab. Halmahera Barat	465.217.012.000	463.663.276.000	188.518.287.000	187.136.536.236

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
491	Kota Ternate	602.070.200.000	599.701.700.000	113.035.670.000	111.187.268.198
492	Kab. Halmahera Timur	449.275.611.000	448.081.887.000	158.138.643.000	156.402.913.829
493	Kota Tidore Kepulauan	515.610.810.000	513.697.062.000	164.729.322.453	163.813.412.030
494	Kab. Kepulauan Sula	456.604.857.000	455.227.969.000	117.537.427.000	116.820.963.720
495	Kab. Pulau Morotai	365.535.460.000	364.322.788.000	198.108.380.819	197.602.807.108
496	Kab. Pulau Taliabu	332.146.239.000	331.028.307.000	118.993.587.000	118.971.178.027
497	Kab. Halmahera Selatan	702.340.036.000	700.871.566.000	330.381.930.000	328.968.198.701
498	Kab. Halmahera Utara	455.192.353.000	452.568.055.000	143.692.472.276	140.831.960.501
499	**Provinsi Papua**	**2.333.184.319.000**	**2.330.020.083.000**	**1.257.607.205.000**	**1.066.623.919.096**
500	Kab. Yalimo	574.824.986.000	573.707.054.000	176.256.430.000	174.087.446.740
501	Kab. Lanny Jaya	611.251.000.000	610.076.224.000	103.065.457.000	102.253.102.113
502	Kab. Biak Numfor	544.038.318.000	540.023.310.000	228.495.970.790	226.540.057.020
503	Kab. Jayapura	639.644.847.000	637.730.899.000	164.608.602.000	162.195.865.465
504	Kab. Jayawijaya	674.896.836.000	673.343.094.000	129.148.810.454	128.694.630.008
505	Kab. Merauke	1.138.620.943.000	1.136.915.623.000	244.046.244.000	228.875.230.808
506	Kab. Mimika	563.432.699.000	562.077.917.000	208.619.294.000	206.952.890.274
507	Kab. Nabire	673.300.440.000	669.919.698.000	175.504.713.685	174.105.002.720
508	Kab. Paniai	550.917.243.000	541.513.698.000	213.661.511.000	211.677.817.256
509	Kab. Puncak Jaya	704.292.072.000	701.990.787.000	106.587.925.000	71.191.606.995
510	Kab. Kepulauan Yapen	522.736.852.000	521.099.650.000	160.364.173.000	158.785.431.822
511	Kota Jayapura	593.754.625.000	592.096.675.000	179.676.374.998	162.675.683.349
512	Kab. Sarmi	645.243.003.000	643.304.599.000	144.346.893.000	138.272.059.637
513	Kab. Keerom	502.722.947.000	501.425.009.000	99.870.769.000	98.706.598.334
514	Kab. Yahukimo	706.692.026.000	687.756.966.000	133.011.876.000	131.866.490.400
515	Kab. Pegunungan Bintang	780.715.539.000	779.531.289.000	258.880.457.000	257.630.923.760
516	Kab. Tolikara	693.480.031.000	692.352.625.000	197.190.929.000	196.639.844.773
517	Kab. Boven Digoel	762.608.266.000	761.281.906.000	139.963.998.000	120.526.232.144
518	Kab. Mappi	708.296.586.000	706.979.710.000	155.348.065.000	153.764.370.267
519	Kab. Asmat	828.103.071.000	826.843.029.000	134.158.455.000	122.911.704.967
520	Kab. Waropen	533.813.787.000	532.582.167.000	111.241.835.000	110.588.692.450
521	Kab. Memberamo Raya	675.263.568.000	674.145.836.000	111.173.064.000	104.273.883.065
522	Kab. Mamberamo Tengah	606.244.984.000	605.098.630.000	90.823.547.000	90.565.152.881
523	Kab. Nduga	573.202.494.000	572.103.510.000	121.483.198.000	118.807.582.914
524	Kab. Dogiyai	462.199.879.000	461.024.103.000	181.125.512.000	178.272.161.542
525	Kab. Intan Jaya	642.463.149.000	641.345.217.000	67.482.984.000	66.059.571.775
526	Kab. Puncak	749.381.270.000	748.282.286.000	119.811.865.000	60.195.741.700
527	Kab. Deiyai	457.269.042.000	456.140.636.000	157.136.072.000	156.687.874.551
528	Kab. Supiori	417.661.447.000	416.488.671.000	79.433.292.000	74.714.031.808
529	**Provinsi Papua Barat**	**1.301.320.612.000**	**1.299.870.490.000**	**530.580.752.000**	**484.154.042.850**
530	Kab. Sorong	502.914.153.000	501.237.255.000	208.668.625.000	205.209.835.760
531	Kab. Manokwari	501.716.434.000	499.695.314.000	133.822.433.000	130.544.997.809
532	Kab. Manokwari Selatan	322.971.817.000	321.872.833.000	53.637.627.000	53.328.046.296
533	Kab. Fak fak	650.432.018.000	648.774.068.000	118.617.172.000	116.721.350.155
534	Kota Sorong	468.463.160.000	468.899.950.000	115.487.544.000	113.294.648.279
535	Kab. Pegunungan Arfak	349.305.628.000	348.206.644.000	144.489.200.000	133.739.434.660
536	Kab. Sorong Selatan	440.060.850.000	438.762.912.000	126.679.323.000	123.953.061.158
537	Kab. Raja Ampat	647.093.633.000	645.899.909.000	167.912.867.000	165.796.591.845
538	Kab. Teluk Bintuni	505.009.267.000	503.821.438.000	112.409.384.000	109.467.572.661
539	Kab. Teluk Wondama	426.228.683.000	424.672.088.000	124.611.791.589	123.499.873.738

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
540	Kab. Tambrauw	470.637.002.000	469.480.648.000	145.944.622.000	142.915.494.365
541	Kab. Maybrat	410.834.045.000	402.099.733.000	152.098.400.000	151.688.438.744
542	Kab. Kaimana	574.547.299.000	573.211.465.000	65.649.060.000	60.204.460.362
543	Sisa Dana Cadangan/ Dana Tambahan	-	-	1.261.839.787.624	-
	JUMLAH	384.381.524.227.000	381.612.451.495.551	182.871.717.766.000	176.578.831.927.772



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
1	Provinsi Aceh	7.565.278.345.000	10.389.635.000		-	7.565.668.863.000	7.565.278.345.000	10.389.635.000		-	7.565.668.983.000
2	Kab. Aceh Barat		38.820.701.000		250.632.328.000	289.453.029.000		38.820.701.000		249.925.770.000	288.746.471.000
3	Kab. Aceh Besar		67.449.350.000		437.555.848.000	505.005.198.000		67.449.350.000		436.934.690.034	504.383.950.034
4	Kab. Aceh Selatan		18.760.817.000		205.268.050.000	224.028.867.000		18.760.817.000		205.268.050.000	224.028.867.000
5	Kab. Aceh Singkil				108.080.283.000	108.080.283.000				108.080.283.000	108.080.283.000
6	Kab. Aceh Tengah		47.668.295.000		223.350.548.000	270.918.843.000		37.731.975.000		223.348.951.999	261.079.926.999
7	Kab. Aceh Tenggara		18.672.151.000		284.561.253.000	303.233.404.000		18.672.151.000		284.561.253.000	303.233.404.000
8	Kab. Aceh Timur		29.471.150.000		387.787.938.000	417.259.088.000		29.471.150.000		387.787.936.000	417.259.086.000
9	Kab. Aceh Utara		28.433.901.000		626.338.212.000	654.772.113.000		28.433.901.000		626.310.457.736	654.744.358.736
10	Kab. Bireuen		8.370.650.000		455.523.085.000	463.893.735.000		8.370.650.000		455.521.585.000	463.892.235.000
11	Kab. Pidie				524.715.756.000	524.715.756.000				524.530.630.400	524.530.630.400
12	Kab. Simeulue		17.315.084.000		119.684.330.000	136.999.414.000		17.315.084.000		119.684.330.000	136.999.414.000
13	Kota Banda Aceh		41.144.614.000		75.977.398.000	117.122.012.000		41.144.614.000		75.977.398.000	117.122.012.000
14	Kota Sabang		53.472.920.000		25.156.301.000	78.629.221.000		53.472.920.000		25.156.301.000	78.629.221.000
15	Kota Langsa				59.424.404.000	59.424.404.000				59.422.833.227	59.422.833.227
16	Kota Lhokseumawe		18.391.468.000		60.285.819.000	78.677.287.000		18.391.468.000		60.285.819.000	78.677.287.000
17	Kab. Nagan Raya		18.912.339.000		175.871.395.000	194.783.734.000		18.912.339.000		175.871.395.000	194.783.734.000
18	Kab. Aceh Jaya		34.028.199.000		135.065.795.000	169.094.994.000		34.028.199.000		135.065.795.000	169.094.994.000
19	Kab. Pidie Jaya		30.388.228.000		165.862.465.000	196.250.693.000		30.388.228.000		165.862.465.000	196.250.693.000
20	Kab. Aceh Barat Daya		21.005.554.000		119.823.288.000	140.828.842.000		21.005.554.000		119.823.288.000	140.828.842.000
21	Kab. Gayo Lues		9.952.510.000		114.193.844.000	124.146.254.000		9.952.510.000		114.193.844.000	124.146.254.000
22	Kab. Aceh Tamiang		41.072.184.000		171.872.967.000	212.945.151.000		41.072.184.000		170.939.356.000	212.011.540.000
23	Kab. Bener Meriah		9.474.092.000		182.834.539.000	192.308.631.000		9.474.092.000		182.736.016.066	192.210.108.066
24	Kota Subulussalam		9.678.789.000		70.422.534.000	80.101.323.000		9.678.789.000		70.422.534.000	80.101.323.000
25	Provinsi Sumatera Utara		9.872.679.000		-	9.872.679.000		36.954.952.000		-	36.954.952.000
26	Kab. Asahan		57.564.940.000		148.593.486.000	206.158.426.000		57.564.940.000		148.593.486.000	206.158.426.000
27	Kab. Deli Serdang		25.334.386.000		128.564.543.000	153.898.929.000		25.334.386.000		128.564.543.000	153.898.929.000
28	Kab. Labuhanbatu		57.246.737.000		308.170.669.000	365.417.406.000		57.246.737.000		308.170.669.000	365.417.406.000
29	Kab. Karo		14.905.745.000		198.406.272.000	213.315.018.000		14.905.745.000		198.067.780.758	212.973.505.758
30	Kab. Labuhanbatu				71.372.171.000	71.372.171.000				71.260.026.342	71.260.026.342
31	Kab. Langkat		12.506.807.000		208.819.585.000	221.126.192.000		28.558.527.000		208.619.585.000	237.179.112.000
32	Kab. Mandailing Natal				288.845.864.000	288.845.864.000				266.685.994.467	266.685.994.467
33	Kab. Nias		4.000.000.000		179.544.025.000	183.544.025.000		8.883.592.000		179.327.035.800	188.210.627.800
34	Kab. Nias Selatan				294.518.231.000	294.518.231.000		14.175.360.000		294.518.231.000	308.693.591.000
35	Kab. Tapanuli Selatan		52.025.950.000		169.754.513.000	221.780.463.000		52.025.950.000		169.393.617.000	221.419.567.000
36	Kab. Tapanuli Tengah		11.924.598.000		142.831.022.000	154.755.618.000		20.550.831.000		142.828.803.600	163.379.634.600
37	Kab. Tapanuli Utara		32.361.990.000		192.016.817.000	224.378.807.000		32.361.990.000		192.016.817.000	224.378.807.000
38	Kab. Toba Samosir		37.134.106.000		177.074.852.000	214.208.958.000		37.134.106.000		177.074.852.000	214.208.958.000
39	Kota Binjai		40.871.654.000			40.871.654.000		40.871.654.000			40.871.654.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
40	Kota Medan	-	8 538 533 000	-	-	8 538 533 000	-	8 538 533 000	-	-	8 538 533 000
41	Kota Pematang Siantar	-	14 919 829 000	-	-	14 919 829 000	-	14 919 829 000	-	-	14 919 829 000
42	Kota Sibolga	-	42 995 348 000	-	-	42 995 348 000	-	28 619 588 000	-	-	28 619 588 000
43	Kota Tanjung Balai	-	13 415 171 000	-	-	13 415 171 000	-	13 415 171 000	-	-	13 415 171 000
44	Kab Batu Bara	-	63 026 300 000	-	120 110 241 000	183 136 541 000	-	63 026 300 000	-	120 038 949 000	183 065 249 000
45	Kab Labuhanbatu Utara	-	13 415 171 000	-	82 689 984 000	96 105 155 000	-	23 409 849 000	-	82 689 984 000	106 189 833 000
46	Kab Labuhanbatu Selatan	-	10 079 243 000	-	84 514 260 000	74 593 503 000	-	10 078 243 000	-	64 438 176 012	74 517 419 012
47	Kab Padang Lawas Utara	-	6 845 138 000	-	289 345 427 000	296 190 565 000	-	6 845 136 000	-	289 052 939 092	295 898 077 092
48	Kab Padang Lawas	-	8 538 533 000	-	230 275 200 000	238 813 733 000	-	8 538 533 000	-	230 162 296 000	238 700 829 000
49	Kab Nias Utara	-	-	-	136 388 189 000	136 388 189 000	-	-	-	135 103 666 100	135 103 666 100
50	Kab Nias Barat	-	-	-	117 397 253 000	117 397 253 000	-	-	-	113 184 195 784	113 184 195 784
51	Kota Telung Tinggi	-	6 845 138 000	-	-	6 845 138 000	-	6 845 138 000	-	-	6 845 138 000
52	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	40 865 674 000	40 865 674 000	-	-	-	40 865 674 000	40 865 674 000
53	Kab Pakpak Bharat	-	-	-	49 862 156 000	49 862 156 000	-	-	-	49 710 963 300	49 710 963 300
54	Kab. Nias Selatan	-	-	-	351 138 751 000	351 138 751 000	-	-	-	350 786 871 344	350 786 871 344
55	Kab Humbang Hasundutan	-	19 688 111 000	-	124 374 983 000	144 064 094 000	-	19 688 111 000	-	124 374 983 000	144 064 094 000
56	Kab. Serdang Bedagai	-	29 079 769 000	-	185 273 335 000	214 353 104 000	-	29 079 769 000	-	185 272 830 692	214 352 599 692
57	Kab Samosir	-	31 289 175 000	-	107 829 748 000	139 226 923 000	-	31 298 175 000	-	107 929 748 000	139 228 923 000
58	Kota Gunungsitoli	-	14 065 588 000	-	89 308 308 000	103 373 696 000	-	42 413 590 000	-	89 138 776 600	131 552 276 600
59	Provinsi Sumatera Barat	-	44.421.312.000	-	-	44.421.312.000	-	44.421.312.000	-	-	44.421.312.000
60	Kab Lima Puluh Kota	-	250 000 000	-	77 575 698 000	77 825 698 000	-	250 000 000	-	77 575 698 000	77 825 698 000
61	Kab Agam	-	22 697 330 000	-	76 037 634 000	98 734 964 000	-	22 697 330 000	-	76 037 634 000	98 734 964 000
62	Kab Kepulauan Mentawai	-	35 561 158 000	-	57 284 785 000	92 845 943 000	-	35 561 158 000	-	57 229 421 106	92 790 579 106
63	Kab Padang Pariaman	-	14 163 265 000	-	96 749 416 000	110 912 681 000	-	22 816 960 000	-	95 726 483 771	118 543 343 771
64	Kab Pasaman	-	58 594 526 000	-	48 177 123 000	106 771 651 000	-	58 594 526 000	-	46 601 238 016	105 195 764 016
65	Kab. Pesisir Selatan	-	44 955 382 000	-	167 395 647 000	212 351 029 090	-	44 955 382 000	-	167 395 647 000	212 351 029 000
66	Kab Sijunjung	-	46 973 537 000	-	59 010 080 000	105 983 617 000	-	46 973 537 000	-	59 010 080 000	105 983 617 000
67	Kab Solok	-	20 979 390 000	-	77 319 619 000	98 299 009 000	-	20 979 390 000	-	77 319 619 000	98 298 009 000
68	Kab Tanah Datar	-	34 701 123 000	-	67 945 156 000	102 646 279 000	-	34 701 123 000	-	66 517 030 513	101 218 153 513
69	Kota Bukit Tinggi	-	58 127 080 000	-	-	58 127 080 000	-	58 127 080 000	-	-	58 127 080 000
70	Kota Padang Panjang	-	27 961 238 000	-	-	27 961 238 000	-	39 038 993 000	-	-	39 038 993 000
71	Kota Padang	-	44 449 435 000	-	-	44 449 435 000	-	44 449 435 000	-	-	44 449 435 000
72	Kota Payakumbuh	-	38 868 942 000	-	-	38 868 942 000	-	38 868 942 000	-	-	38 686 942 000
73	Kota Sawahlunto	-	-	-	28 631 236 000	28 631 236 000	-	7 919 514 000	-	28 631 236 000	36 550 750 000
74	Kota Solok	-	30 460 206 000	-	-	30 460 206 000	-	30 460 206 000	-	-	30 460 206 000
75	Kota Pariaman	-	26 795 066 000	-	48 864 423 000	75 659 489 000	-	26 795 066 000	-	48 819 423 000	75 614 489 000
76	Kab Pasaman Barat	-	9 246 384 000	-	48 319 821 000	56 566 205 000	-	9 246 384 000	-	46 637 839 913	54 884 223 913
77	Kab Dharmasraya	-	46 554 026 000	-	53 272 650 000	99 826 676 000	-	46 554 026 000	-	53 272 650 000	99 826 676 000
78	Kab Solok Selatan	-	24 095 009 000	-	44 523 218 000	68 618 227 000	-	24 095 009 000	-	44 523 218 000	68 618 227 000
79	Provinsi Riau	-	20.243.618.000	-	-	20.243.618.000	-	20.243.618.000	-	-	20.243.618.000

SK No 062639 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
80	Kab. Bengkalis		35 625 236 000		131 032 700 000	166 657 936 000		35 625 236 000		131 032 700 000	166 657 936 000
81	Kab. Indragiri Hilir		29 874 660 000		171 913 227 000	201 787 887 000		29 874 660 000		171 913 227 000	201 787 887 000
82	Kab. Indragiri Hulu		11 515 631 000		158 258 239 000	169 773 870 000		11 515 631 000		158 258 239 000	169 773 870 000
83	Kab. Kampar		15 839 028 000		212 934 016 000	228 773 044 000		26 511 839 000		212 605 072 800	239 116 911 800
84	Kab. Kuantan Singingi		45 339 940 000		175 259 296 000	220 595 236 000		37 978 615 000		175 256 296 000	213 234 911 000
85	Kab. Pelalawan		41 714 809 000		106 307 280 000	148 022 089 000		41 714 808 000		106 307 280 000	148 022 089 000
86	Kab. Rokan Hilir		19 956 722 000		144 465 232 000	164 421 954 000		19 956 722 000		144 465 232 000	164 421 954 000
87	Kab. Rokan Hulu		31 215 801 000		143 249 015 000	174 464 816 000		20 983 801 000		143 242 371 951	164 226 872 951
88	Kab. Siak		39 248 156 000		114 400 614 000	153 648 770 000		39 248 156 000		114 400 606 499	153 648 762 499
89	Kota Dumai		45 719 565 000			45 719 565 000		45 719 565 000			45 719 565 000
90	Kota Pekanbaru		53 718 433 000			53 718 433 000		53 718 433 000			53 718 433 000
91	Kab. Kepulauan Meranti		20 047 281 000		95 363 524 000	115 410 805 000		20 047 281 000		95 363 524 000	115 410 805 000
92	**Provinsi Kepulauan Riau**		**34 926 450 000**		-	**34 926 450 000**		**34 926 450 000**		-	**34 926 450 000**
93	Kab. Bintan		58 707 193 000		39 163 570 000	97 870 763 000		48 435 489 000		39 163 570 000	87 599 059 000
94	Kab. Natuna		29 129 235 000		64 932 954 000	93 062 189 000		28 129 235 000		64 932 954 000	93 062 189 000
95	Kab. Karimun		26 154 805 000		44 045 068 000	70 199 873 000		26 154 805 000		43 810 385 841	69 954 990 841
96	Kota Batam		47 396 132 000			47 396 132 000		47 396 132 000			47 396 132 000
97	Kab. Kepulauan Anambas		25 151 920 000		52 454 050 000	77 605 970 000		25 151 920 000		52 454 050 000	77 605 970 000
98	Kota Tanjung Pinang		26 265 414 000			26 265 414 000		26 265 414 000			26 265 414 000
99	Kab. Lingga		27 934 137 000		69 779 098 000	97 713 235 000		27 934 137 000		69 614 674 400	97 548 811 400
100	**Provinsi Jambi**		**13 767 184 000**		-	**13 767 184 000**		**8 393 592 000**		-	**8 393 592 000**
101	Kab. Batanghari		39 316 342 000		98 664 937 000	137 981 279 000		39 316 342 000		98 550 475 114	137 865 817 114
102	Kab. Bungo		23 063 320 000		116 859 962 000	139 923 282 000		23 063 320 000		116 645 836 566	139 709 156 566
103	Kab. Kerinci		28 237 717 000		214 220 995 000	243 458 712 000		29 237 717 000		212 330 850 731	241 568 567 731
104	Kab. Merangin		11 252 470 000		172 645 457 000	183 897 927 000		11 252 470 000		172 540 131 614	183 792 601 614
105	Kab. Muaro Jambi		74 034 263 000		125 480 997 000	199 515 260 000		74 034 263 000		125 480 997 000	199 515 260 000
106	Kab. Sarolangun		32 997 631 000		131 739 421 000	164 737 052 000		32 997 631 000		131 702 432 000	164 700 063 000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat		27 085 232 000		108 187 123 000	135 272 355 000		27 085 232 000		108 187 122 600	135 272 354 600
108	Kab. Tanjung Jabung Timur		7 607 227 000		74 332 549 000	81 939 776 000		7 607 227 000		74 332 549 000	81 939 776 000
109	Kab. Tebo		26 932 458 000		108 787 852 000	135 720 310 000		26 932 458 000		108 787 852 000	135 720 310 000
110	Kota Jambi		37 746 049 000			37 746 049 000		37 746 049 000			37 746 049 000
111	Kota Sungai Penuh		35 043 482 000		55 804 101 000	90 847 583 000		35 043 482 000		55 792 104 270	90 835 586 270
112	**Provinsi Sumatera Selatan**		**40 221 648 000**		-	**40 221 648 000**		**40 221 648 000**		-	**40 221 648 000**
113	Kab. Lahat		30 723 548 000		302 858 256 000	333 581 804 000		30 723 548 000		302 652 550 800	333 376 098 800
114	Kab. Muara Banyuasin		59 727 881 000		232 888 342 000	292 616 323 000		59 727 881 000		232 888 342 000	292 616 323 000
115	Kab. Musi Rawas		48 042 243 000		189 366 612 000	237 408 855 000		48 042 243 000		189 366 612 000	237 408 855 000
116	Kab. Musi Rawas Utara		29 379 057 000		100 855 998 000	130 235 023 000		29 379 057 000		100 810 382 322	130 189 439 322
117	Kab. Muara Enim		56 575 501 000		236 152 242 000	292 727 743 000		56 575 501 000		236 152 242 000	292 727 743 000
118	Kab. Ogan Komering Ilir		50 909 996 000		292 756 066 000	343 666 062 000		50 909 996 000		292 756 066 000	343 666 062 000
119	Kab. Ogan Komering Ulu		11 288 246 000		137 092 577 000	148 381 822 000		11 288 245 000		136 934 954 800	148 224 099 800

SK No 062638 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi			
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
120	Kota Palembang		38 443 326 000		-	38 443 326 000		38 443 326 000			38 443 326 000
121	Kota Pagar Alam		10 557 416 000			10 557 416 000		10 557 416 000			10 557 416 000
122	Kota Lubuk linggau		46 150 671 000		-	46 150 671 000		46 150 671 000		-	46 150 671 000
123	Kota Prabumulih		26 680 256 000		21 858 335 000	48 548 591 000		26 680 256 000		21 868 335 000	48 548 591 000
124	Kab. Empat Lawang		7 607 227 000		130 205 546 000	137 812 773 000		7 607 227 000		130 205 546 000	137 812 773 000
125	Kab. Banyuasin		34 033 249 000		297 112 087 000	331 145 316 000		34 033 249 000		296 569 512 200	330 602 761 200
126	Kab. Ogan Ilir		31 757 133 000		202 142 617 000	233 899 750 000		31 757 133 000		202 142 616 200	233 899 749 200
127	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		33 454 919 000		244 517 784 000	277 972 703 000		33 454 919 000		244 516 395 597	277 971 314 597
128	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		7 522 969 000		216 431 688 000	223 954 657 000		7 522 969 000		216 431 688 000	223 954 657 000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		24 892 224 000		77 726 446 000	102 618 670 000		24 892 224 000		77 726 446 000	102 618 670 000
130	Provinsi Bangka Belitung		52.820.045.000	-	-	52 820 045 000		52.820.045.000	-	-	52.820.045.000
131	Kab. Bangka		50 257 407 000		61 490 333 000	111 747 740 000		50 257 407 000		61 490 333 000	111 747 740 000
132	Kab. Belitung		24 542 041 000		47 580 353 000	72 122 394 000		33 509 164 000		47 580 353 000	81 089 517 000
133	Kota Pangkal Pinang		28 645 164 000	-	-	28 645 164 000		28 645 164 000		-	28 645 164 000
134	Kab. Bangka Selatan		-		51 610 695 000	51 610 695 000		-		51 610 695 000	51 610 695 000
135	Kab. Bangka Tengah		66 420 714 000		54 587 594 000	121 008 308 000		66 420 714 000		54 587 594 000	121 008 308 000
136	Kab. Bangka Barat		23 204 942 000		58 433 325 000	81 638 267 000		23 204 942 000		58 433 325 000	81 638 267 000
137	Kab. Belitung Timur		8 020 830 000		44 659 087 000	52 729 027 000		17 857 250 000		44 699 045 990	62 556 295 990
138	Provinsi Bengkulu		31 396 339 000	-	-	31,396 339 000		31.396.339.000	-	-	31.396.339.000
139	Kab. Bengkulu Selatan		8 797 149 000		110 975 195 000	119 772 344 000		8 797 149 000		110 975 195 000	119 772 344 000
140	Kab. Bengkulu Utara		27 396 226 000		170 927 459 000	198 323 685 000		27 396 226 000		170 927 459 000	198 323 685 000
141	Kab. Rejang Lebong		18 029 763 000		113 169 136 000	131 228 899 000		18 029 763 000		112 676 812 200	130 706 575 200
142	Kota Bengkulu		45 661 000 000		-	45 661 000 000		35 593 468 000		-	35 593 468 000
143	Kab. Kaur		12 659 029 000		147 024 967 000	159 683 996 000		12 659 029 000		147 024 967 000	159 683 996 000
144	Kab. Seluma		17 978 641 000		141 085 233 000	159 063 874 000		40 966 000 000		141 085 233 000	182 051 233 000
145	Kab. Mukomuko		21 367 402 000		122 876 536 000	144 243 938 000		21 367 402 000		122 876 536 000	144 243 938 000
146	Kab. Lebong		21 415 796 000		79 784 679 000	101 200 475 000		21 415 796 000		79 427 185 950	100 842 981 950
147	Kab. Bengkulu Tengah		13 446 531 000		112 456 380 000	125 902 911 000		13 446 531 000		112 456 380 000	125 902 911 000
148	Kab. Kepahiang		9 970 853 000		86 891 075 000	96 861 928 000		20 323 707 000		86 691 075 000	107 014 782 000
149	Provinsi Lampung		46.434.098.000	-	-	46.434.098.000		46.434.098.000	-	-	46.434.098.000
150	Kab. Lampung Barat		20 362 528 000		126 016 068 000	146 378 596 000		20 362 528 000		126 016 068 000	146 378 596 000
151	Kab. Lampung Selatan		26 505 944 000		260 924 395 000	287 430 939 000		26 505 944 000		260 973 870 850	287 479 814 850
152	Kab. Lampung Tengah		34 625 097 000		310 176 977 000	344 802 074 000		34 625 097 000		310 176 977 000	344 802 074 000
153	Kab. Lampung Utara		18 664 281 000		245 652 825 000	256 307 116 000		18 664 281 000		245 652 824 287	256 307 115 287
154	Kab. Lampung Timur		40 653 243 000		278 517 033 000	319 170 276 000		30 300 429 000		278 517 033 000	308 817 462 000
155	Kab. Tanggamus		23 204 074 000		290 451 321 000	313 655 395 000		23 204 074 000		289,994 771 250	313 198 845 250
156	Kab. Tulang Bawang		18 096 887 000		133 276 906 000	151 373 893 000		18 096 987 000		133 276 906 000	151 373 893 000
157	Kab. Way Kanan		7.607 227 000		185 295 274 000	192 902 501 000		7.607 227 000		185 295 274 000	192 902 501 000
158	Kab. Pesawaran		60 155 003 000		155 789 561 000	215 944 564 000		60 155 003 000		155 789 581 000	215 944 584 000
159	Kab. Pesisir Barat		14.446.531 000		119 755 097 000	134 201 628 000		14 446 531 000		119 755 097 000	134 201 628 000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
160	Kab Pangandaran		62 787 777 000		126 299 920 000	181 087 697 000		62 787 777 000		126 088 167 800	190 875 944 800
161	Kab Maoluy		8 120 650 000		102 687 170 000	110 807 820 000		30 304 702 000		102 687 170 000	132 991 872 000
162	Kab Tulang Bawang Barat		7 654 659 000		90 895 123 000	98 549 782 000		7 654 659 000		90 895 123 000	98 549 782 000
163	Kota Bandar Lampung		40 888 117 000		-	40 888 117 000		40 888 117 000		-	40 888 117 000
164	Kota Metro		49 532 667 000		-	49 532 667 000		49 532 667 000		-	49 532 667 000
165	Provinsi DKI Jakarta		65.178.975.000		-	65.178.975.000		65.178.975.000		-	65.178.975.000
166	Provinsi Jawa Barat		29.413.272.000		-	29.413.272.000		29.413.272.000		-	29.413.272.000
167	Kab Bandung		82 880 666 000		319 299 290 000	412 189 956 000		83 017 987 000		318 473 742 000	401 491 729 000
168	Kab Bekasi		56 265 598 000		255 641 111 000	311 106 709 000		46 839 571 000		255 841 171 000	302 680 682 000
169	Kab Bogor		67 197 129 000		507 398 217 000	574 595 346 000		67 197 129 000		508 923 429 252	574 120 558 252
170	Kab Cianjur		32 046 038 000		260 240 548 000	292 286 586 000		32 046 038 000		260 240 548 000	292 286 586 000
171	Kab Cianjur		-		423 935 085 000	423 935 085 000				423 935 085 000	423 935 085 000
172	Kab Cirebon		52 144 693 000		452 375 165 000	504 519 758 000		52 144 693 000		452 375 165 000	504 519 758 000
173	Kab Garut		50 082 095 000		504 941 320 000	555 023 415 000		50 082 095 000		504 941 320 000	595 023 415 000
174	Kab Indramayu		42 476 286 000		390 299 016 000	432 775 302 000		33 509 163 000		390 299 016 000	423 808 179 000
175	Kab Karawang		38 917 765 000		342 895 076 000	381 812 841 000		38 917 765 000		342 895 076 000	381 812 841 000
176	Kab Kuningan		47 800 962 000		303 168 088 000	350 969 050 000		47 800 962 000		303 168 088 000	350 969 050 000
177	Kab Majalengka		84 986 945 000		391 668 514 000	476 635 459 000		67 979 586 000		381 668 514 000	453 648 100 000
178	Kab Pangandaran		71 878 456 900		88 353 508 000	160 232 964 000		71 879 456 000		88 353 508 000	160 232 964 000
179	Kab Purwakarta		74 767 844 000		167 468 522 000	242 236 366 000		74 767 844 000		167 468 522 000	242 236 366 000
180	Kab Subang		32 371 964 000		212 605 496 000	244 977 460 000		32 371 964 000		212 605 496 000	244 977 460 000
181	Kab Sukabumi		59 634 740 000		366 011 004 000	425 645 744 000		59 634 740 000		368 011 004 000	425 645 744 000
182	Kab Sumedang		84 002 531 000		222 389 199 000	306 391 730 000		84 002 531 000		222 389 199 000	306 391 730 000
183	Kab Tasikmalaya		-		399 451 057 000	399 451 057 000		14 892 394 000		399 451 057 000	414 343 451 000
184	Kab Bandung Barat		9 072 182 000		251 204 676 000	260 276 858 000		19 938 841 000		251 204 318 549	271 143 159 589
185	Kota Bandung		97 308 562 000			97 308 562 000		97 308 562 000		-	97 308 562 000
186	Kota Bekasi		71 382 704 000			71 382 704 000		71 382 704 000		-	71 382 704 000
187	Kota Bogor		28 928 586 000			28 928 586 000		28 928 586 000		-	28 928 586 000
188	Kota Cirebon		31 470 454 000			31 470 454 000		23 068 859 000		-	23 068 859 000
189	Kota Depok		63 984 803 000			63 984 803 000		63 984 803 000		-	63 984 803 000
190	Kota Sukabumi		19 863 306 000			19 863 306 000		19 863 308 000		-	19 863 308 000
191	Kota Cimahi		97 730 028 000			97 730 028 000		97 730 028 000		-	97 730 028 000
192	Kota Tasikmalaya		7 970 882 000			7 970 882 000		7 970 882 000		-	7 970 882 000
193	Kota Banjar		77 520 637 000		23 265 229 000	100 785 866 000		62 805 932 000		23 265 228 000	86 071 161 000
194	Provinsi Banten		39.939.978.000		-	39.939.978.000		41.952.432.000		-	41.952.432.000
195	Kab Lebak		29 301 537 000		289 814 468 000	319 116 005 000		28 301 537 000		287 400 392 000	315 701 929 000
196	Kab Pandeglang		28 684 999 000		266 266 589 000	294 951 588 000		28 684 999 000		266 266 589 000	294 951 588 000
197	Kab Serang		43 205 030 000		261 898 051 000	305 103 081 000		43 205 030 000		261 898 051 000	305 103 081 000
198	Kab Tangerang		45 160 408 000		291 455 144 000	336 615 552 000		28 264 660 000		291 455 144 000	319 709 804 000
199	Kota Cilegon		33 584 527 000		-	33 584 527 000		54 000 299 000		-	54 000 299 000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi			
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
200	Kota Tangerang		78 196 496 000			78 196 496 000		78 196 496 000			78 196 496 000
201	Kota Serang		31 891 617 000			31 891 617 000		31 891 617 000			31 891 617 000
202	Kota Tangerang Selatan		70 765 756 000			70 765 756 000		42 417 844 000			42 417 844 000
203	Provinsi Jawa Tengah		68.212 455 000			68.212 455 000		68.212 455 000			68.212 455 000
204	Kab Banjarnegara		26 668 112 000		265 128 597 000	291 796 709 000		26 668 112 000		265 128 597 000	291 796 709 000
205	Kab Banyumas		39 577 682 000		378 545 183 000	418 122 865 000		39 577 682 000		378 545 183 000	418 122 865 000
206	Kab Batang		86 872 377 000		193 031 345 000	279 903 722 000		86 872 377 000		193 031 345 000	279 903 722 000
207	Kab Blora		47 710 729 000		267 071 340 000	314 782 069 000		47 710 729 000		267 071 340 000	314 782 069 000
208	Kab Boyolali		106 878 179 000		216 981 458 000	323 859 637 000		106 878 179 000		216 981 458 000	323 859 637 000
209	Kab Brebes				492 478 504 000	492 478 504 000		5 316 939 000		492 478 504 000	497 798 443 000
210	Kab Cilacap		71 923 322 000		293 993 896 000	365 917 218 000		71 923 322 000		293 993 896 000	365 917 218 000
211	Kab Demak		95 161 483 000		284 463 387 000	379 624 870 000		95 161 483 000		284 463 387 000	379 624 870 000
212	Kab Grobogan		65 057 786 000		302 039 754 000	367 097 540 000		65 057 786 000		302 016 828 500	367 074 612 500
213	Kab Jepara		53 953 320 000		247 118 045 000	301 071 365 000		53 953 320 000		247 118 045 000	301 071 365 000
214	Kab Karanganyar		83 272 665 000		166 140 458 000	249 413 111 000		83 272 665 000		166 130 458 001	249 403 111 001
215	Kab Kebumen		45 243 865 000		405 025 869 000	450 269 534 000		45 243 865 000		405 025 869 000	450 269 534 000
216	Kab Kendal		44 612 446 000		248 445 837 000	293 058 283 000		49 230 726 000		248 445 837 000	297 676 563 000
217	Kab Klaten		57 067 155 000		380 848 601 000	437 913 756 000		57 067 155 000		380 848 600 500	437 913 755 500
218	Kab Kudus		89 301 426 000		147 823 461 000	237 124 887 000		89 301 426 000		147 823 461 000	237 124 887 000
219	Kab Magelang		59 165 462 000		391 044 108 000	450 209 570 000		59 165 462 000		391 044 107 982	450 209 569 982
220	Kab Pati		39 355 326 000		426 380 834 000	465 736 159 000		39 355 326 000		426 380 834 000	465 736 160 000
221	Kab Pekalongan		40 927 086 000		263 397 106 000	304 324 192 000		40 927 086 000		263 397 108 000	304 324 192 000
222	Kab Pemalang		10 639 878 000		327 255 484 000	337 895 362 000		20 023 928 000		327 255 484 000	347 279 412 000
223	Kab Purbalingga		30 878 594 000		245 875 204 000	276 353 798 000		30 878 594 000		245 875 204 000	276 353 798 000
224	Kab Purworejo		62 978 472 000		363 993 225 000	426 971 847 000		62 978 422 000		363 993 225 000	426 971 647 000
225	Kab Rembang		85 746 665 000		260 523 814 000	356 270 479 000		84 001 845 000		260 523 814 000	344 525 659 000
226	Kab Semarang		56 446 874 000		184 666 676 000	241 113 550 000		56 446 874 000		184 886 676 000	241 113 550 000
227	Kab Sragen		45 170 016 000		171 103 129 000	216 273 145 000		45 170 016 000		171 103 129 000	216 273 145 000
228	Kab Sukoharjo		52 189 671 000		145 041 437 000	197 231 108 000		46 904 112 000		144 973 519 600	191 877 631 600
229	Kab Tegal		64 411 379 000		358 311 953 000	422 723 332 000		64 411 378 000		358 311 953 000	422 723 332 000
230	Kab Temanggung		56 311 496 000		247 881 825 000	304 193 321 000		56 311 496 000		247 881 825 000	304 193 321 000
231	Kab Wonogiri		38 503 148 000		224 681 357 000	263 184 505 000		38 503 148 000		224 649 959 500	263 153 107 500
232	Kab Wonosobo		45 074 667 000		217 226 851 000	262 301 518 000		45 074 667 000		217 226 851 000	262 301 518 000
233	Kota Magelang		57 423 984 000			57 423 984 000		57 423 984 000			57 423 984 000
234	Kota Pekalongan		58 355 913 000			58 355 913 000		58 355 913 000			58 355 913 000
235	Kota Salatiga		68 096 041 000			68 096 041 000		68 096 041 000			68 096 041 000
236	Kota Semarang		114 971 389 000			114 971 389 000		114 971 389 000			114 971 389 000
237	Kota Surakarta		61 860 673 000			61 860 673 000		61 860 673 000			61 860 673 000
238	Kota Tegal		24 817 556 000			24 817 556 000		24 567 556 000			24 567 556 000
239	Provinsi DI Yogyakarta		68 053 994 000	1.320.000.000 000		1.388 053 994 000		68.053.994 000	1.320.000.000.000		1 388.053 994.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi			
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
240	Kab. Bantul		86 583 558 000		105 405 470 000	191 989 028 000		86 583 558 000		105 405 470 000	191 989 028 000
241	Kab. Gunung Kidul		65 794 804 000		140 465 795 000	206 260 699 000		65 794 804 000		140 465 795 000	206 260 699 000
242	Kab. Kulon Progo		68 069 773 000		93 551 808 000	161 621 581 000		68 069 773 000		93 551 808 000	161 621 581 000
243	Kab. Sleman		73 459 068 000		105 030 876 000	178 489 974 000		73 459 068 000		105 026 595 300	178 485 693 300
244	Kota Yogyakarta		83 457 615 000			83 457 615 000		83 457 615 000			83 457 615 000
245	Provinsi Jawa Timur		95.683.168.968			95.683.168.030		76.818.048.060			76.818.048.060
246	Kab. Bangkalan		37 191 773 000		327 939 755 000	365 131 528 000		37 191 773 000		327 939 755 000	365 131 528 000
247	Kab. Banyuwangi		94 924 042 000		210 904 572 000	305 828 614 000		94 924 042 000		210 904 572 000	305 828 614 000
248	Kab. Blitar		47 672 741 000		189 098 858 000	236 771 599 000		47 672 741 000		189 098 858 000	236 771 599 000
249	Kab. Bojonegoro		63 247 800 000		362 673 177 000	425 920 977 000		63 247 800 000		362 198 052 000	425 445 852 000
250	Kab. Bondowoso		19 903 560 000		236 217 008 000	256 120 568 000		19 903 560 000		236 217 008 000	256 120 568 000
251	Kab. Gresik		83 381 963 000		284 325 494 000	367 707 457 000		83 381 963 000		284 325 494 000	367 707 457 000
252	Kab. Jember		24 279 611 000		302 669 947 000	326 949 558 000		14 940 590 000		302 669 947 000	317 610 537 000
253	Kab. Jombang		70 932 477 000		276 886 419 000	347 818 896 000		70 932 477 000		276 886 419 000	347 818 896 000
254	Kab. Kediri		53 688 648 000		319 175 844 000	372 864 492 000		53 688 648 000		319 175 844 000	372 864 492 000
255	Kab. Lamongan		122 352 374 000		366 764 832 000	489 117 206 000		122 352 374 000		366 764 832 000	489 117 206 000
256	Kab. Lumajang		34 236 645 000		193 127 732 000	227 364 377 000		34 236 645 000		193 127 732 000	227 364 377 000
257	Kab. Madiun		64 337 347 000		160 451 269 000	224 788 616 000		47 400 221 000		160 451 269 000	207 851 490 000
258	Kab. Magetan		58 519 414 000		169 140 615 000	227 660 029 000		58 518 414 000		169 140 615 000	227 660 029 000
259	Kab. Malang		85 076 215 000		379 399 630 000	464 472 845 000		85 076 215 000		379 398 822 412	464 472 637 412
260	Kab. Mojokerto		93 773 671 000		234 937 062 000	328 710 933 000		78 430 432 000		234 937 062 000	313 367 494 000
261	Kab. Ngawi		66 127 296 000		284 983 204 000	351 110 500 000		66 127 296 000		284 983 204 000	351 110 500 000
262	Kab. Nganjuk		64 708 053 000		194 961 707 000	259 669 760 000		64 708 053 000		194 961 707 000	259 669 760 000
263	Kab. Pacitan		53 487 161 000		148 882 788 000	202 369 929 000		53 487 161 000		148 882 788 000	202 369 929 000
264	Kab. Pamekasan		40 356 621 000		202 879 999 000	243 336 190 000		59 885 748 000		202 724 217 800	262 609 965 800
265	Kab. Pasuruan		16 772 412 000		365 057 770 000	381 830 182 000		16 772 412 000		364 839 287 200	381 611 699 200
266	Kab. Ponorogo		62 247 092 000		254 319 288 000	316 566 380 000		62 247 092 000		254 319 288 000	316 566 380 000
267	Kab. Probolinggo		28 807 762 000		429 195 412 000	458 003 164 000		19 389 322 000		429 195 412 000	448 584 734 000
268	Kab. Sampang		47 081 591 000		231 242 401 000	278 323 992 000		47 081 591 000		231 242 401 000	278 323 992 000
269	Kab. Sidoarjo		95 055 600 000		292 689 108 000	387 744 708 000		95 055 600 000		291 100 114 800	386 155 714 800
270	Kab. Situbondo		55 531 634 000		137 842 701 000	193 374 335 000		55 531 634 000		137 842 701 000	193 374 335 000
271	Kab. Sumenep		29 384 645 000		337 720 100 000	367 104 745 000		29 384 645 000		337 720 100 000	367 104 745 000
272	Kab. Trenggalek		49 573 436 000		153 239 974 000	202 813 410 000		49 573 436 000		153 239 973 867	202 813 409 867
273	Kab. Tuban		105 800 981 000		260 084 089 000	365 885 070 000		105 800 981 000		260 084 089 000	365 885 070 000
274	Kab. Tulungagung		33 668 885 000		234 888 567 000	268 556 552 000		37 589 988 000		234 886 568 299	272 476 554 299
275	Kota Blitar		56 837 217 000			56 837 217 000		45 970 568 000			45 970 568 000
276	Kota Kediri		40 907 528 000			40 907 528 000		41 061 133 000			41 061 133 000
277	Kota Madiun		73 313 029 000			73 313 029 000		73 313 029 000			73 313 029 000
278	Kota Malang		73 440 909 000			73 440 909 000		53 532 189 000			53 532 189 000
279	Kota Mojokerto		28 495 701 000			28 495 701 000		28 495 701 000			28 495 701 000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
280	Kota Pasuruan		8 271 704 000			8 271 704 000		16 725 769 000	-		16 725 769 000
281	Kota Probolinggo		39 702 663 000			39 702 663 000		39 702 663 000	-		39 702 663 000
282	Kota Surabaya		122 695 879 000			122 695 879 000		122 695 879 000	-		122 695 879 000
283	Kota Batu		35 365 261 000		28 987 722 000	64 352 983 000		35 365 261 000	-	28 987 722 000	64 352 983 000
284	Provinsi Kalimantan Barat		-		-			125 000 000	-	-	125 000 000
285	Kab. Bengkayang		8 504 549 000		108 863 514 000	117 368 063 000		8 504 549 000	-	108 856 985 738	117 360 534 738
286	Kab. Landak		30 813 655 000		184 407 675 000	215 221 330 000		30 813 655 000	-	184 032 636 588	214 846 291 588
287	Kab. Kapuas Hulu		18 732 633 000		271 331 546 000	290 064 179 000		13 485 707 000	-	271 331 546 000	284 817 253 000
288	Kab. Ketapang		38 658 250 000		260 918 092 000	299 574 342 000		38 658 250 000	-	260 918 090 985	299 576 340 985
289	Kab. Sampawah		30 036 915 000		66 584 359 000	96 621 274 000		30 036 915 000	-	66 584 359 000	96 621 274 000
290	Kab. Sambas		250 000 000		202 892 034 000	203 142 034 000		125 000 000	-	202 703 167 400	202 828 167 400
291	Kab. Sanggau		58 302 012 000		152 750 875 000	211 052 887 000		45 737 665 000	-	152 424 850 400	197 662 516 400
292	Kab. Sintang		49 887 973 000		348 604 262 000	398 492 235 000		49 887 973 000	-	348 604 262 000	398 492 235 000
293	Kota Pontianak		27 627 969 000			27 627 969 000		27 627 969 000	-	-	27 627 969 000
294	Kota Singkawang		7 404 659 000		-	7 404 659 000		7 404 659 000	-	-	7 404 659 000
295	Kab. Kayong Utara				50 970 713 000	50 970 713 000			-	50 921 890 639	50 921 890 639
296	Kab. Kubu Raya		60 483 410 000		133 188 213 000	193 671 623 000		41 727 780 000	-	133 188 213 000	174 915 993 000
297	Kab. Sekadau		73 548 398 000		83 765 630 000	157 314 028 000		73 548 398 000	-	83 765 630 000	157 314 028 000
298	Kab. Melawi				168 406 205 000	168 406 205 000		9 120 660 000	-	156 184 024 000	165 304 684 000
299	Provinsi Kalimantan Tengah		63.222.385.600		-	63.222.385.600	-	63.222.385.600	-	-	63.222.385.600
300	Kab. Barito Selatan		53 849 007 000		85 232 612 000	139 081 519 000		40 925 679 000	-	84 667 414 000	125 793 092 000
301	Kab. Barito Utara		46 352 395 000		92 744 604 000	139 096 999 000	-	46 352 395 000	-	92 744 604 000	139 096 999 000
302	Kab. Kapuas		39 562 979 000		187 949 758 000	227 512 737 000	-	39 562 979 000	-	187 286 785 650	226 849 744 650
303	Kab. Kotawaringin Barat		81 761 160 000		81 588 169 000	183 349 329 000	-	61 761 160 000	-	81 413 807 600	163 174 967 600
304	Kab. Kotawaringin Timur		28 297 831 000		157 999 385 000	186 297 216 000	-	33 842 715 000	-	157 931 917 387	191 774 632 387
305	Kota Palangkaraya		54 739 541 000			54 739 541 000	-	54 739 541 000	-		54 739 541 000
306	Kab. Barito Timur		35 466 481 000		86 215 622 000	121 682 103 000		35 466 481 000	-	85 820 196 200	121 286 677 200
307	Kab. Murung Raya		18 241 319 000		128 210 460 000	146 451 779 000		9 120 659 000	-	128 015 895 400	137 136 554 400
308	Kab. Pulang Pisau		27 597 284 000		93 915 684 000	121 512 968 000	-	27 597 284 000	-	93 915 684 000	121 512 968 000
309	Kab. Gunung Mas		39 387 800 000		104 021 540 000	143 409 140 000	-	27 510 429 000	-	102 539 535 400	130 049 964 400
310	Kab. Lamandau		53 613 870 000		78 880 571 000	132 494 441 000	-	53 613 870 000	-	78 680 571 000	132 494 441 000
311	Kab. Sukamara		37 445 607 000		37 450 156 000	74 895 763 000	-	37 445 607 000	-	37 440 324 217	74 885 931 217
312	Kab. Katingan		10 079 243 000		147 441 003 000	157 520 246 000	-	10 079 243 000	-	147 441 003 000	157 520 246 000
313	Kab. Seruyan				105 935 982 000	105 935 982 000		250 000 000	-	105 935 982 000	106 185 982 000
314	Provinsi Kalimantan Selatan		63.846.981.000		-	63.846.981.000	-	63.846.981.000	-	-	63.846.981.000
315	Kab. Banjar		43 693 822 000		215 477 025 000	259 170 847 000		43 693 822 000	-	215 477 025 000	259 170 847 000
316	Kab. Barito Kuala		60 367 577 000		153 420 269 000	213 787 846 000		60 367 577 000	-	153 420 269 000	213 787 846 000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan		74 722 684,000		117 434 196 000	192 156 880 000	-	74 722 684,000	-	117 434 196 000	192 156 880 000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah		9.634.370.000		128.420 199 000	138.304 569 000	-	9.634 370 000	-	128 420 199 000	138 054 569 000
319	Kab. Hulu Sungai Utara		44 477 282 000		172 389 277 000	216 866 559 000	-	44 477 282 000	-	172 389 277 000	216 866 559 000

SK No 062633 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
320	Kab Kotabaru		52 076 082 000		168 157 221 000	220 233 303 000		52 076 082 000		167 711 621 500	219 787 703 500
321	Kab Tabalong		60 518 563 000		107 396 298 000	167 914 861 000		37 456 710 000		107 396 298 000	144 852 008 000
322	Kab Tanah Laut		62 537 346 000		107 853 555 000	170 190 900 000		73 985 781 000		107 508 384 992	181 492 165 992
323	Kab Tapin		50 002 203 000		102 204 375 000	152 206 578 000		50 002 203 000		102 204 375 000	152 206 578 000
324	Kota Banjarbaru		70 296 638 000			70 296 638 000		70 296 638 000			70 296 638 000
325	Kota Banjarmasin		82 894 477 000			82 894 477 000		82 894 477 000			82 894 477 000
326	Kab Balangan		62 346 727 000		119 613 825 000	181 960 552 000		62 346 727 000		118 572 954 500	180 919 681 500
327	Kab Tanah Bumbu		85 525 226 000		120 771 786 000	206 297 012 000		85 525 226 000		120 771 786 000	206 297 012 000
328	Provinsi Kalimantan Timur		72.338.826.000			72.338.826.000		66.734.622.600			66.734.622.600
329	Kab Berau		43 821 883 000		115 138 296 000	158 960 179 000		43 821 883 000		114.600 667 800	158 422 550 800
330	Kab Kutai Kartanegara		25 394 156 000		185 547 777 000	210 881 933 000		16 880 091 000		185 547 777 000	202 427 868 000
331	Kab Kutai Barat		34 930 612 000		177 923 483 000	212 854 095 000		34 930 612 000		177 923 483 000	212 854 095 000
332	Kab Kutai Timur		33 027 245 000		181 943 313 000	214 970 558 000		33 027 245 000		181 716 899 854	214 744 144 854
333	Kab Mahakam Ulu		12 463 673 000		77 626 280 000	90 089 953 000		12 463 673 000		77 626 277 000	90 089 950 000
334	Kab Paser		52 135 240 000		126 217 974 000	177 353 214 000		43 329 877 000		125 182 386 258	168 512 263 258
335	Kota Balikpapan		71 303 699 000			71 303 699 000		51 181 537 000			51 181 537 000
336	Kota Bontang		85 731 300 000			85 731 300 000		58 649 027 000			58 649 027 000
337	Kota Samarinda		35 336 461 000			35 336 461 000		35 336 461 000			35 336 461 000
338	Kab Penajam Paser Utara		27 240 345 000		36 490 369 000	63 730 714 000		27 240 345 000		36 490 369 000	63 730 714 000
339	Provinsi Kalimantan Utara		47.482.275.000			47.482.275.000		47.482.275.000			47.482.275.000
340	Kab Bulungan		14 069 932 000		88 787 982 000	102 857 914 000		14 069 932 000		88 787 982 000	102 857 914 000
341	Kab Malinau		21 601 351 000		157 973 035 000	179 574 386 000		21 601 351 000		157 973 035 000	179 574 386 000
342	Kab Nunukan		38 854 741 000		193 752 469 000	232 607 210 000		38 854 741 000		193 752 469 000	232 607 210 000
343	Kab Tana Tidung		26 034 690 000		42 108 906 000	68 143 596 000		26 034 690 000		42 109 006 000	68 143 696 000
344	Kota Tarakan		14 163 285 000			14 163 285 000		37 226 118 000			37 226 118 000
345	Provinsi Sulawesi Utara		26.367.899.000			26.367.899.000		26.367.899.000			26.367.899.000
346	Kab Bolaang Mongondow		14 940 590 000		161 562 494 000	176 503 084 000		14 940 590 000		161 562 493 800	176 503 083 800
347	Kab Minahasa		41 394 136 000		170 710 121 000	212 104 256 000		41 394 136 000		170 672 568 926	212 066 704 926
348	Kab Sangihe		40 874 103 000		113 931 470 000	154 805 573 000		40 874 103 000		113 931 470 000	154 805 573 000
349	Kota Bitung		17 473 689 000			17 473 689 000		17 473 689 000			17 473 689 000
350	Kota Manado		56 604 015 000			56 604 015 000		56 604 015 000			56 604 015 000
351	Kab Kepulauan Talaud		29 257 632 000		113 984 531 000	143 242 163 000		29 257 632 000		112 907 470 228	142 165 102 228
352	Kab Minahasa Selatan		28 737 016 000		138 430 303 000	167 167 319 000		28 737 016 000		138 422 860 500	167 159 876 500
353	Kab Minahasa Tenggara		17 825 689 000		106 114 896 000	123 940 585 000		17 825 689 000		106 114 896 000	123 940 585 000
354	Kab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		51 728 725 000		69 328 272 000	121 056 997 000		51 728 725 000		69 328 272 000	121 056 997 000
355	Kota Kotamobagu		21 533 096 000		22 362 109 000	43 895 205 000		21 533 096 000		22 362 109 000	43 895 205 000
356	Kab Bolaang Mongondow Timur		16 117 034 000		68 495 332 000	84 612 366 000		16 117 034 000		68 495 332 000	84 612 366 000
357	Kab Bolaang Mongondow Selatan		28 717 447 000		70 782 060 000	99 499 507 000		28 717 447 000		70 782 060 000	99 499 507 000
358	Kota Tomohon		78 377 116 000			78 377 116 000		78 377 116 000			78 377 116 000
359	Kab Minahasa Utara		29 978 492 000		103 179 193 000	133 157 685 000		29 978 492 000		103 023 689 200	133 002 181 200

SK No 062632 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
360	Kab Bolaang Mongondow Utara		33 341 265 000		86 362 113 000	119 703 378 000		33 341 265 000		86 362 113 000	119 703 378 000
361	Provinsi Gorontalo		32.421.158.000	-	-	32.421.158.000		32.421.158.000		-	32.421.158.000
362	Kab Boalemo		18 584 784 000	-	91 444 009 000	110 028 793 000		18 584 784 000		91 444 009 000	110 028 793 000
363	Kab Gorontalo		30 466 918 000	-	211 803 144 000	242 270 062 000		30 466 918 000		211 803 126 000	242 270 044 000
364	Kota Gorontalo		29 484 275 000		-	29 484 275 000		20 704 435 000			20 704 435 000
365	Kab Pohuwato		31 836 384 000	-	88 483 317 000	120 319 701 000		31 836 384 000		88 333 820 412	120 170 204 412
366	Kab Gorontalo Utara		49 701 892 000		103 010 201 000	152 712 093 000		49 701 892 000		102 877 010 138	152 578 902 138
367	Kab Bone Bolango		52 128 432 000		142 176 740 000	194 305 172 000		52 128 432 000		142 176 740 000	194 305 172 000
368	Provinsi Sulawesi Tengah		24.928.624.000	-	-	24.928.624.000		15.841.457.000		-	15.841.457.000
369	Kab Banggai				234 192 435 000	234 192 435 000				234 192 435 000	234 192 435 000
370	Kab Banggai Laut		25 373 960 000		56 416 593 000	81 790 553 000		25 373 960 000		56 416 593 000	81 790 553 000
371	Kab Banggai Kepulauan				114 114 949 000	114 114 949 000				113 797 207 343	113 797 207 343
372	Kab Buol		47 735 883 000	-	93 537 508 000	141 273 391 000		47 735 883 000		93 537 508 000	141 273 391 000
373	Kab Tolitoli				90 151 991 000	90 151 991 000				90 151 991 000	90 151 991 000
374	Kab Donggala				142 080 824 000	142 080 824 000				141 919 150 400	141 919 150 400
375	Kab Morowali		82 372 515 000		104 495 355 000	186 867 870 000		82 372 515 000		104 494 829 000	186 867 344 000
376	Kab Morowali Utara				114 176 402 000	114 176 402 000				114 004 184 600	114 004 184 600
377	Kab Poso		62 560 647 000		132 876 034 000	195 436 681 000		62 560 647 000		132 876 034 000	195 436 681 000
378	Kota Palu		31 231 326 000		-	31 231 326 000		31 231 326 000		-	31 231 326 000
379	Kab Parigi Moutong		18 369 829 000		237 516 597 000	255 875 426 000		18.358 929 000		237 328 945 775	255 685 774 775
380	Kab Sigi		21 542 058 000		148 048 329 000	169 588 387 000		21.542 058 000		148 048 329 000	169.588 387 000
381	Kab Toja Una Una		28 578 741 000		122 693 203 000	151 271 944 000		28 578 741 000		122 693 203 000	151 271 944 000
382	Provinsi Sulawesi Selatan		4.500.000.000	-		4.500.000.000		4.500.000.000		-	4.500.000.000
383	Kab Bantaeng		34 345 463 000		45 142 373 000	79 487 836 000		34 345 463 000		45 142 373 000	79 487 836 000
384	Kab Barru		35 975 064 000		52 436 179 000	88 411 243 000		35 975 064 000		52 436 179 000	88 411 243 000
385	Kab Bone		41 710 557 000		333 787 856 000	375 498 413 000		41 710 557 000		333 787 856 000	375 498 413 000
386	Kab Bulukumba		49 163 543 000		109 589 109 000	158 752 652 000		49 163 543 000		109 589 109 000	158 752 652 000
387	Kab Enrekang		56 845 005 000		115 950 564 000	172 795 569 000		56 845 005 000		115 950 564 000	172 795 569 000
388	Kab Gowa		51 144 603 000		146 733 217 000	197 877 820 000		51 144 603 000		146 733 217 000	197 877 820 000
389	Kab Jeneponto		15 633 258 000		105 932 176 000	121 565 434 000		15.633 258 000		105 827 154 700	121.460 412 700
390	Kab Luwu		27 430 797 000		193 005 440 000	220 436 237 000		27 430 797 000		193 005 440 000	220 436 237 000
391	Kab Luwu Utara		52 625 487 000		172 962 367 000	225 587 854 000		52 625 487 000		172 832 597 787	225 458 084 787
392	Kab Maros		44 575 588 000		87 203 723 000	131 779 311 000		44 575 588 000		87 203 723 000	131 779 311 000
393	Kab Pangkajene Kepulauan				71 528 776 000	71 528 776 000		10 432 871 000		71 528 276 000	81 961 147 000
394	Kab Parepare		14 413 265 000		68 216 483 000	82 628 748 000		14.413 265 000		68 216 483 000	82 628 748 000
395	Kab Kepulauan Selayar		16 523 889 000		84 532 957 000	101 056 846 000		16 523 889 000		84 532 857 000	101 056 846 000
396	Kab Sidenreng Rappang		31 409 830 000		66 571 092 000	97 980 972 000		21.276 906 000		66 571 082 000	87 849 001 000
397	Kab Sinjai		22 779 311 000		72 163 881 000	94 942 192 000		42 687 051 000		71 469 177 591	114 156 228 591
398	Kab Soppeng		9 877 479 000		51 485 281 000	61 362 760 000		9 877 479 000		51 485 281 000	61 362 760 000
399	Kab Takalar		26 101 880 000		83 927 455 000	110 029 335 000		26 101 880 000		83 927 455 000	110 029 335 000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
400	Kab. Tana Toraja				124 549 994 000	124 549 994 000				123 485 529 000	123 485 529 000
401	Kab. Wajo		34 784 649 000		120.444 939 000	155 229 588 000		34 784 649 000		120 444 939 000	155 229 588 000
402	Kota Parepare		1.000 000 000			1 000 000 000		1 000 000 000			1 000 000 000
403	Kab. Toraja Utara		10 639 878 000		136 239 743 000	146 879 621 000		10 639 878 000		136 239 738 000	146 879 616 000
404	Kota Makassar		74 623 320 000			74 623 320 000		74 623 320 000			74 623 320 000
405	Kota Palopo		6 983 797 000			6 983 797 000		6 983 797 000			6 983 797 000
406	Kab. Luwu Timur				115 448 707 000	115 448 707 000				115 448 707 000	115 448 707 000
407	**Provinsi Sulawesi Barat**		**8.417.246 000**			**8.417 246.000**		**8.417.246.000**			**8 417.246 000**
408	Kab. Majene		11 288 245.000		85 187 974 000	76 477 219 000		11 288 245 000		85 187 974 000	76.477 219 000
409	Kab. Mamuju				80 981 051 000	80 981 051 000				80 981 051 000	80.981 051 000
410	Kab. Mamuju Tengah		30 812 878 000		54 854 084 000	85 668 962 000		30 812 878 000		54 854 084 000	85 668 962 000
411	Kab. Polewali Mandar		8 222 783 000		161 333 063 000	169 555 846 000		8 222 783 000		161 333 063 000	169 555 846 000
412	Kab. Mamasa		14 452 365 000		146 877 495 000	161 329 860 000		14 452 365 000		146 877 495 000	161 329 860 000
413	Kab. Pasangkayu		65 571 497 000		59 504 394 000	125 075 891 000		65 571 497 000		59 447 230 804	125 018 727 804
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**		**48.933 421.000**			**48 933.421.000**		**48.933.421.000**			**48.933 421.000**
415	Kab. Buton		61 073 328 000		73 417 992 000	134 491 320 000		61.073 328 000		73 417 992 000	134 491.320 000
416	Kab. Konawe		67 100 645 000		223 449 380 000	290 550 025 000		67 100 645 000		182 198 444 000	249 299 089 000
417	Kab. Konawe Kepulauan				75 258 167 000	75 258 167 000		125 000 000		75 258 167 000	75 383 167 000
418	Kab. Kolaka		54 890 072 000		86 774 186 000	141 664 258 000		54 890.072.000		86 092 838 600	140 982 910 600
419	Kab. Kolaka Timur		26 793 690 000		96 682 166 000	123 475 856 000		26 793 690.000		96 682 166 000	123 475 856 000
420	Kab. Muna		14 940 690 000		124 184 357 000	139 124 947 000		14 940 690 000		124 184 357 000	139 124 947 000
421	Kota Kendari		43 869 490 000			43 869 490 000		43 869 490 000			43 869 490 000
422	Kota Bau-bau		44 855 721 000			44 855 721 000		44 855 721 000			44 855 721 000
423	Kab. Konawe Selatan		43 714 974 000		251 853 568 000	295 568 540 000		43 714 974 000		251 836 088 380	295 551 062 380
424	Kab. Bombana		38.636.913.000		108 166 852 000	145 003 585 000		34 465 941.000		106 156 652 000	140 622 593 000
425	Kab. Konawe Utara		27 889 637 000		125 761 543 000	153 651 180 000		27 889.637.000		125 761 543 000	153 651 180 000
426	Kab. Buton Utara		250 000 000		69 990 946 000	70 240.946 000		7 511 901 000		69.990 946 000	77 502 847 000
427	Kab. Wakatobi		8.238.782 000		66.967 188.000	75 205 980 000		8.238 782 000		66 967 199 000	75.205 980 000
428	Kab. Kolaka Utara		23 334 038 000		127 189 139 000	150 523 177 000		23 334 038.000		127 188 968 096	150 523 006 096
429	Kab. Muna Barat		9 952 610 000		79 482 630 000	89 435.240 000		9 952 810 000		79 482 630 000	89 435.240 000
430	Kab. Buton Tengah		31 818 600 000		64 936 461 000	96 755 061 000		31 818 600 000		64 936 461 000	96 755 061.000
431	Kab. Buton Selatan		25 314 618 000		61.159 126 000	87 473 744 000		26 314 618 000		61 159 126 000	87.473 744 000
432	Provinsi Bali		78.802 282.000			78.802 282.000		78.802 282.000			78.802 282.000
433	Kab. Badung		96 352 731 000		56 719 888 000	152 072 619 000		96 352 731 000		56 719 888 000	152 072 619 000
434	Kab. Bangli		53 462 813.000		62 757 351 000	116 220 164 000		53 462 813 000		62 757 351 000	116 220 164 000
435	Kab. Buleleng		50 116 451 000		125.791 126 000	175 907 577 000		50.116 451 000		125 791 126 000	175 907 577 000
436	Kab. Gianyar		95 192 515 000		61 633 017 000	156 825 532 000		95 192 515 000		61 633 017 000	156 825 532 000
437	Kab. Jembrana		98 075 145.000		51 618 011 000	149 693 156 000		98 075 145 000		51 618 011 000	149 693 156 000
438	Kab. Karangasem		39 250 487 000		81 803 656 000	121 054 143 000		39.250 487 000		81 803 656 000	121 054 143 000
439	Kab. Klungkung		60 682 659 000		53 494 770 000	114 177 429 000		60 682 659 000		53 494 770 000	114 177 429 000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi			
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
440	Kab. Tabanan	-	87 490 382 000		121 485 539 000	208 975 901 000		87 490 382 000		121 485 539 000	208 975 901 000
441	Kota Denpasar		85 367 717 000		36 621 601 000	121 989 318 000		85 367 717 000		36 621 601 000	121 989 318 000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	39.135.054.000	-	-	39.135.054.000	-	39.135.054.000	-	-	39.135.054.000
443	Kab. Bima	-	46 915 708 000	-	187 393 169 000	234 308 877 000	-	46 915 708 000	-	187 393 169 000	234 308 877 000
444	Kab. Dompu	-	12 202 472 000	-	73 451 503 000	85 653 975 000	-	12 202 472 000	-	73 451 503 000	85 653 975 000
445	Kab. Lombok Barat	-	53 254 212 000	-	160 436 939 000	213 691 151 000	-	53 254 212 000	-	160 436 939 000	213 691 151 000
446	Kab. Lombok Tengah	-	24 928 093 000	-	207 840 370 000	232 768 463 000	-	17 541 192 000	-	207 840 370 000	225 381 562 000
447	Kab. Lombok Timur	-	30 910 888 000	-	313 801 225 000	344 712 113 000	-	30 910 888 000	-	313 801 225 000	344 712 113 000
448	Kab. Sumbawa	-	53 755 536 000	-	146 633 976 000	200 389 512 000	-	50 490 736 000	-	146 633 976 000	197 124 712 000
449	Kota Mataram	-	63 730 680 000	-	-	63 730 680 000	-	63 730 680 000	-	-	63 730 680 000
450	Kab. Lombok Utara	-	45 725 321 000	-	71 088 014 000	116 813 335 000	-	45 725 321 000	-	71 088 014 000	116 813 335 000
451	Kota Bima	-	19 485 769 000	-	-	19 485 769 000	-	19 485 769 000	-	-	19 485 769 000
452	Kab. Sumbawa Barat	-	66 766 062 000	-	61 955 960 000	128 722 022 000	-	66 766 062 000	-	61 955 960 000	128 722 022 000
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	19 323 388 000	-	-	19.323 388.000	-	15 956 467 000	-	-	15.956 467 000
454	Kab. Alor	-	-	-	164 822 155 000	164 822 155 000	-	-	-	-	-
455	Kab. Belu	-	39 171 332 000	-	87 504 939 000	126 676 271 000	-	39 171 332 000	-	87 476 016 502	126 647 348 502
456	Kab. Ende	-	14 940 588 000	-	199 730 668 000	214 671 256 000	-	21 272 877 000	-	199 730 688 000	221 003 545 000
457	Kab. Flores Timur	-	-	-	174 470 905 000	174 470 905 000	-	-	-	174 470 905 000	174 470 905 000
458	Kab. Kupang	-	-	-	185 402 239 000	185 402 239 000	-	-	-	185 402 239 000	185 402 239 000
459	Kab. Lembata	-	3 000 000 000	-	133 447 188 000	136 447 188 000	-	3 000 000 000	-	133 447 188 000	136 447 188 000
460	Kab. Malaka	-	-	-	112 868 518 000	112.868 518 000	-	-	-	112 868 518 000	112 868 518 000
461	Kab. Manggarai	-	34 457 484 000	-	147 565 938 000	182 023 433 000	-	34 457 484 000	-	147 565 939 000	182 023 433 000
462	Kab. Ngada	-	48 960 134 000	-	110 760 227 000	159 720 361 000	-	48 960 134 000	-	110 757 227 000	159 717 361 000
463	Kab. Sikka	-	-	-	152 764 232 000	152 764 232 000	-	-	-	152 759 960 718	152 759 960 718
464	Kab. Sumba Barat	-	3 000 000 000	-	87 786 467 000	90 786 467 000	-	3 000 000 000	-	87 786 467 000	90 786 467 000
465	Kab. Sumba Timur	-	48 046 781 000	-	129 358 568 000	177 403 349 000	-	36 668 000 000	-	129 358 568 000	166 025 594 000
466	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	289 840 128 000	289 840 128 000	-	-	-	289 840 128 000	289 840 128 000
467	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	163 541 992 000	163 541 992 000	-	-	-	163 348 864 045	163 348 864 045
468	Kota Kupang	-	11 924 596 000	-	-	11 924 596 000	-	11 924 596 000	-	-	11 924 596 000
469	Kab. Rote Ndao	-	2 000 000 000	-	106 362 083 000	108.362 083 000	-	17 954 589 000	-	106 362 093 000	124.316.782 000
470	Kab. Nagekeo	-	23 710 906 000	-	89 154 916 000	112 865 822 000	-	26 975 706 000	-	89 154 916 000	116 130 622 000
471	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	72 220 579 000	72 220 579 000	-	-	-	72 220 579 000	72 220 579 000
472	Kab. Sumba Barat Daya	-	6 000 000 000	-	239 592 238 000	245 592 238 000	-	6 000 000 000	-	239 592 238 000	245 592 238 000
473	Kab. Manggarai Timur	-	8 667 246 000	-	196 297 095 000	204 964 341 000	-	8 667 246 000	-	196 297 095 000	204 964 341 000
474	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	84 566 861 000	84 566 861 000	-	20 800 811 000	-	84 566 347 000	105.367 158 000
475	Kab. Manggarai Barat	-	50 885 991 000	-	148 502 115 000	200 488 106 000	-	30 185 160 000	-	149 502 115 000	179.687 295 000
476	Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	31 873 082 000	-	85 596 312 000	117 469 394 000	-	31 873 082 000	-	85 596 312 000	117 469 394 000
478	Kab. Maluku Tengah	-	9 733 797 000	-	179 858 090 000	189 591 887 000	-	8 733 797 000	-	175.686 687 912	182 420 484 912
479	Kab. Maluku Tenggara	-	8 378 602 000	-	147 028 186 000	155 404 788 000	-	8 378 602 000	-	147 026 166 000	155 404 768 000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
490	Kab. Seru		40 747 237 000		84 850 154 000	125 597 391 000		40 747 237 000		84 849 914 150	125 597 151 150
491	Kota Ambon		35 326 206 000		37 108 165 000	72 434 371 000		35 326 206 000		37 108 163 000	72 434 369 000
492	Kab. Seram Bagian Barat		27 905 745 000		107 966 173 000	135 871 918 000		27 905 745 000		106 798 557 545	134 704 302 545
493	Kab. Seram Bagian Timur				181 378 367 000	181 378 367 000				181 378 367 000	181 378 367 000
494	Kab. Maluku Barat Daya				107 626 341 000	107 626 341 000				107 626 340 800	107 626 340 800
495	Kab. Buru Selatan				88 351 815 000	88 351 815 000				88 349 380 421	88 349 380 421
496	Kab. Kepulauan Aru				111 108 207 000	111 108 207 000				110 365 622 600	110 365 622 600
497	Kota Tual		7 154 659 000		35 569 020 000	42 723 679 000		7 154 659 000		35 569 020 000	42 723 679 000
498	Provinsi Maluku Utara		15 633 258 000		-	15 633 258 000		15 633 258 000		-	15 633 258 000
499	Kab. Halmahera Tengah		53 122 572 000		60 800 962 000	113 923 534 000		53 122 572 000		60 800 962 000	113 923 534 000
500	Kab. Halmahera Barat		25 652 262 000		132 394 097 000	158 046 359 000		25 652 262 000		132 394 097 000	158 046 359 000
501	Kota Ternate		64 961 612 000			64 961 612 000		64 961 612 000		-	64 961 612 000
502	Kab. Halmahera Timur		30 716 831 000		99 242 798 000	129 959 629 000		30 716 831 000		99 242 708 824	129 959 539 824
503	Kota Tidore Kepulauan		37 417 188 000		48 018 749 000	85 435 947 000		37 417 188 000		48 018 749 000	85 435 947 000
504	Kab. Kepulauan Sula		14 446 531 000		76 220 109 000	90 666 640 000		14 446 531 000		76 219 458 939	90 665 989 939
505	Kab. Pulau Morotai		39 279 454 000		77 426 877 000	116 706 331 000		39 279 454 000		77 426 877 000	116 706 331 000
506	Kab. Pulau Taliabu				66 142 254 000	66 142 254 000				66 136 004 000	66 136 004 000
507	Kab. Halmahera Selatan		11 924 596 000		196 441 821 000	208 366 417 000		25 639 301 000		196 441 113 571	223 080 414 571
508	Kab. Halmahera Utara		17 305 630 000		153 707 412 000	171 014 042 000		17 306 630 000		153 707 412 000	171 014 042 000
509	Provinsi Papua	7 999 969 920 000	-			7 999 969 920 000	7 999 969 920 000	-		-	7 999 969 920 000
510	Kab. Yalimo		21 008 277 000		246 628 196 000	267 636 473 000		21 008 277 000		246 628 196 000	267 636 473 000
511	Kab. Lanny Jaya		-		346 062 585 000	346 062 585 000				346 062 585 000	346 062 585 000
512	Kab. Nduga				206 938 478 000	206 938 478 000				206 938 478 000	206 938 478 000
513	Kab. Jayapura		10 029 825 000		132 523 592 000	142 553 417 000		10 029 825 000		132 523 592 000	142 553 417 000
514	Kab. Jayawijaya		3 000 000 000		281 993 719 000	284 993 719 000		3 000 000 000		281 993 719 000	284 993 719 000
515	Kab. Merauke				226 138 406 000	226 138 406 000				226 138 406 000	226 138 406 000
516	Kab. Mimika		55 893 532 000		148 779 739 000	204 673 271 000		55 893 532 000		148 779 739 000	204 673 271 000
517	Kab. Nabire		11 348 913 000		94 326 314 000	105 675 227 000		11 348 913 000		94 326 314 000	105 675 227 000
518	Kab. Paniai				199 200 706 000	199 200 706 000				199 200 706 000	199 200 706 000
519	Kab. Puncak Jaya		12 589 569 000		290 823 709 000	303 413 278 000		12 589 569 000		290 823 709 000	303 413 278 000
520	Kab. Kepulauan Yapen		-		138 720 355 000	138 720 355 000		-		138 720 355 000	138 720 355 000
521	Kota Jayapura		23 941 890 000		26 399 826 000	50 341 716 000		22 941 890 000		26 367 013 072	50 308 903 072
522	Kab. Sarmi		12 589 569 000		105 982 367 000	118 571 936 000		12 589 569 000		105 982 367 000	118 571 936 000
523	Kab. Keerom		14 069 932 000		98 475 231 000	112 545 163 000		14 069 932 000		98 475 231 000	112 545 163 000
524	Kab. Yalukimo		10 197 575 000		409 146 088 000	419 343 663 000		35 923 841 000		409 146 088 000	445 070 029 000
525	Kab. Pegunungan Bintang				282 585 131 000	282 585 131 000				282 585 131 000	282 585 131 000
526	Kab. Tolikara				422 326 878 000	422 326 878 000				422 326 878 000	422 326 878 000
527	Kab. Boven Digoel				143 825 230 000	143 825 230 000				143 825 230 000	143 825 230 000
528	Kab. Mappi				188 375 681 000	188 375 681 000				188 375 681 000	188 375 681 000
529	Kab. Asmat				249 773 920 000	249 773 920 000				249 773 920 000	249 773 920 000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Insentif Daerah	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Desa	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Insentif Daerah	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	Jumlah Realisasi
520	Kab Waropen		12 859 029 000		104 244 371 000	116 903 400 000		12 859 029 000		104 244 371 000	116 903 400 000
521	Kab Memberamo Raya				107 542 592 000	107 542 592 000				107 542 592 000	107 542 592 000
522	Kab Memberamo Tengah				94 118 210 000	94 118 210 000				94 118 210 000	94 118 210 000
523	Kab Nduga				218 457 263 000	218 457 263 000				218 457 263 000	218 457 263 000
524	Kab Degiyai				116 055 432 000	116 055 432 000				116 055 432 000	116 055 432 000
525	Kab Intan Jaya				142 477 523 000	142 477 523 000				142 477 523 000	142 477 523 000
526	Kab Puncak				213 411 610 000	213 411 610 000				213 411 610 000	213 411 610 000
527	Kab Dogiyai				93 708 402 000	93 708 402 000				93 708 402 000	93 708 402 000
528	Kab Supiori				43 347 119 000	43 347 119 000				43 347 119 000	43 347 119 000
529	Provinsi Papua Barat	4 001 478 428 000	17 365 183 000			4 018 844 531 000	4 001 478 428 000	17 365 183 000			4 018 844 531 000
530	Kab Sorong		42 076 556 000		176 341 963 000	218 418 519 000		42 076 556 000		176 305 171 365	218 381 727 365
531	Kab Manokwari				143 530 587 000	143 530 587 000				142 701 462 000	142 701 462 000
532	Kab Manokwari Selatan				64 829 871 000	64 829 871 000				64 829 871 000	64 829 871 000
533	Kab Fak fak		29 337 770 000		136 985 235 000	166 323 005 000		29 337 770 000		136 985 235 000	166 323 005 000
534	Kota Sorong		27 412 352 000			27 412 352 000		40 476 698 000			40 476 698 000
535	Kab Pegunungan Arfak				142 947 613 000	142 947 613 000		8 695 773 000		142 947 613 000	151 643 386 000
536	Kab Sorong Selatan		7 522 959 000		108 566 057 000	116 089 016 000		7 522 959 000		108 566 057 000	116 089 016 000
537	Kab Raja Ampat		50 877 815 000		106 955 100 000	157 832 915 000		50 877 815 000		106 955 100 000	157 832 915 000
538	Kab Teluk Bintuni		27 645 837 000		117 815 333 000	145 461 170 000		18 850 064 000		117 815 330 298	136 665 394 298
539	Kab Teluk Wondama		21 144 403 000		73 545 687 000	94 690 090 000		21 144 403 000		73 545 687 000	94 690 090 000
540	Kab Tambrauw				176 221 606 000	176 221 606 000				176 221 606 000	176 221 606 000
541	Kab Maybrat				195 284 321 000	195 284 321 000				195 284 321 000	195 284 321 000
542	Kab Kaimana		43 306 045 000		98 961 340 000	142 267 385 000		43 306 045 000		98 961 340 000	142 267 385 000
	JUMLAH	19 556 727 696 000	18 580 000 000 000	1 320 000 000 000	71 190 000 000 000	110 546 727 696 000	19 556 727 696 000	18 455 285 298 000	1 320 000 000 000	71 100 518 593 056	110 432 531 485 056

LAMPIRAN 4
RINCIAN REALISASI PROGRAM PC-PEN TAHUN 2020

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
1	**Perlindungan Sosial**	**230.200.000.000.000**	**230.031.454.878.153**	**216.587.101.593.829**	
	- Program Keluarga Harapan (PKH)	41.970.000.000.000	**41.973.586.000.000**	**41.940.368.869.358**	
	a. PKH		36.713.986.000.000	36.683.018.869.358	Kemensos
	b. Bansos beras bagi penerima PKH		4.505.850.000.000	4.505.850.000.000	
	c. Biaya Distribusi Bansos beras bagi penerima PKH		753.750.000.000	751.500.000.000	
	- Sembako (BNPT)	46.200.000.000.000	**42.609.011.689.480**	**43.888.985.603.016**	
	a. Sembako (BPNT)		42.590.761.689.480	39.376.633.472.066	Kemensos
	b. Biaya kirim paket Sembako (BPNT) Papua-Papua Barat		18.250.000.000	12.462.850.950	
	c. Bansos Tunai (BST) bagi penerima sembako non PKH		4.499.889.280.000	4.499.889.280.000	
	- Paket Sembako Jabodetabek	7.000.000.000.000	**7.100.874.000.000**	**7.094.322.604.917**	
	a. Paket Sembako		6.732.786.600.000	6.726.251.483.944	Kemensos
	b. Biaya Kirim Paket Sembako		368.087.400.000	368.071.120.973	
	- Bansos Tunai (BST) Non Jabodetabek	33.610.000.000.000	**33.067.963.599.673**	**32.603.359.599.673**	
	a. Bansos Tunai (BST)		32.139.126.000.000	31.674.522.000.000	Kemensos
	b. Biaya Distribusi Bansos Tunai (BST)		928.837.599.673	928.837.599.673	

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	- Kartu Prakerja	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	**18.252.242.050.924**	BA 999.08
	- Diskon Listrik	11.540.000.000.000	11.618.579.841.000	**11.448.439.134.297**	BA 999.07
	- Bantuan LangsungTuna (BLT) Dana Desa	31.800.000.000.000	31.800.000.000.000	**23.737.018.473.021**	BA 999.05
	- Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29.780.000.000.000	29.848.063.743.000	**29.483.840.923.223**	
	a. Subsidi gaji/upah (Kemenakertrans)			29.483.021.896.500	Kemenakertrans
	b. Safeguarding (Kemenakertrans)			818.926.723	
	- Subsidi Kuota Internet/ Kemendikbud	3.820.000.000.000	6.725.354.020.000	**3.828.410.431.000**	Kemendikbud
	- Bantuan Internet dan Bantuan Tunai Guru Kemenag	390.000.000.000	1.185.875.985.000	**234.847.665.000**	Kemenag
	- Bantuan Gaji Guru Honorer Kemenag	1.150.000.000.000	1.159.448.400.000	**1.132.568.639.400**	Kemenag
	- Bantuan Gaji Guru Honorer Kemendikbud	2.940.000.000.000	2.942.697.600.000	**2.942.697.600.000**	Kemendikbud
2	**Kesehatan**	**99.500.000.000.000**	**62.748.728.065.221**	**62.674.747.638.246**	
	- Belanja Penanganan Covid Lainnya	43.410.000.000.000	43.590.960.832.221	**41.773.346.302.532**	
	a. Kemenkes		23.283.390.602.581	22.103.261.069.765	Kemenkes
	b. Kemnhan/TNI		9.500.006.685.640	9.499.989.382.650	Kemenhan
	c. Polri		3.145.407.026.000	3.141.616.239.091	POLRI

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	d. BNPB (Gabungan)		6.588.960.590.000	5.969.789.278.021	BNPB
	e. BIN		817.677.915.000	816.874.770.200	BIN
	f. Kominfo: Internet Puskesmas		161.008.840.000	161.005.987.685	Kominfo
	g. Kemenristek (BRIN)		94.509.173.000	80.809.575.120	Kemenristek/BRIN
	· Insentif Tenaga Medis	7.660.000.000.000	8.828.055.841.000	**8.826.352.577.424**	
	a. Insentif Nakes Pusat (Kemenkes)		4.654.725.841.000	4.653.033.999.048	Kemenkes
	b. Insentif Nakes Daerah (TKDD)		4.173.330.000.000	4.173.318.578.376	BA 999.05
	· Santunan Tenaga Medis	60.000.000.000	60.000.000.000	**58.800.000.000**	Kemenkes
	· Bantuan Iuran JKN	4.110.000.000.000	4.118.336.624.000	**4.118.240.745.500**	BA 999.08
	· Gugus Tugas Covid-19	3.220.000.000.000	3.503.411.784.000	**3.210.480.608.210**	BNPB
	· Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	4.600.000.000.000	2.014.116.984.000	**4.053.681.404.580**	
	a. DTP		2.014.116.984.000	1.936.218.632.936	BA 999.07 dan Non DIPA
	b. Non-DTP		Non DIPA	2.117.462.771.644	
	· Penanganan Vaksin Covid-19 Tahun 2020	36.440.000.000.000	633.846.000.000	**633.846.000.000**	Kemenkes
3	**Dukungan Sektoral K/L & Pemda**	**67.860.000.000.000**	**72.417.467.522.576**	**65.222.482.027.735**	

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	- Padat Karya K/L	20.960.000.000.000	**21.542.047.201.855**	**19.791.640.948.095**	
	a. Kementerian Pertanian		994.532.565.000	976.033.298.901	Kementan
	b. Kementerian Perhubungan		7.966.761.430.855	7.108.681.201.726	Kemenhub
	c. Kementerian Kelautan Perikanan		175.544.514.000	171.613.526.419	Kemen Kelautan & Perikanan
	d. Kementerian PUPR		12.405.208.692.000	11.535.312.921.049	Kemen PUPR
	- Insentif Perumahan	540.000.000.000	1.500.790.030.000	**482.785.765.525**	**BA 999.07**
	- Pariwisata	2.850.000.000.000	3.978.823.754.000	**2.897.280.569.198**	
	a. Dukungan kepada Pemda		3.300.000.000.000	2.264.647.247.182	BA 999.05
	b. Dukungan Pariwisata Kemenparekraf		372.642.830.000	329.476.999.521	Kemenparekraf
	c. Dukungan Kemenhub		306.180.924.000	303.156.322.495	Kemenhub
	- DID Pemulihan Ekonomi	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	**4.955.285.206.000**	**BA 999.05**
	- Cadangan DAK Fisik	7.290.000.000.000	8.715.745.783.000	**7.285.623.090.246**	**BA 999.05**
	- Fasilitas Pinjaman Daerah	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	**18.762.627.567.235**	**BA 999.03**
	- Cadangan perluasan	11.220.000.000.000	11.680.060.753.721	**11.047.238.881.436**	

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	a. Kemenag		2.646.511.473.000	2.653.932.732.310	Kemenag
	· Bantuan Ops. Pendidikan & Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren		2.603.315.000.000	2.613.814.929.000	
	· Sertifikasi Daí dan Bantuan Ormas Keagamaan		43.196.473.000	40.117.803.310	
	b. KemenPUPR		1.803.691.153.000	1.663.728.571.253	Kemen PUPR
	· Dukungan pembelian produk rakyat/UMKM		1.363.581.763.000	1.342.102.155.257	
	· Dukungan Prioritas Nasional		254.739.517.000	137.773.841.044	
	· Dukungan utk Food Estate dan Kawasan Industri		185.369.873.000	183.852.574.952	
	c. Kemenaker		533.048.515.000	531.784.194.630	Kemenaker
	· Dampak Covid Bidang Naker			531.784.194.630	
	d. BKPM		84.902.904.000	83.916.739.373	BKPM
	· Peta investasi Proyek Prioritas Strategis			83.916.739.373	
	e. Kementan		1.521.644.541.000	1.330.461.286.108	Kementan
	· Swasembada Gula		137.387.173.000	92.988.110.300	
	· Antisipasi kekurangan pangan akibat covid-19,		1.260.040.868.000	1.115.502.611.608	
	· Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT)		124.216.500.000	121.970.564.200	

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	f. KLHK		812.435.435.000	717.005.925.391	KLHK
	· Dukungan Ketahanan pangan terpadu (food Estate)		406.257.935.000	334.885.638.125	
	· Penanaman mangrove seluas 15.000 Hektar		406.177.500.000	382.120.287.266	
	g. KemenATR/BPN		69.835.072.000	61.196.147.877	Kemen ATR/ BPN
	· Food Estate			12.627.996.531	
	· Penyusunan RDTR dan PMO Penataan Ruang Jabodetabek			48.568.151.346	
	h. Kementerian Kelautan dan Perikanan		741.984.921.000	541.524.496.186	Kemen Kelautan & Perikanan
	· Restorasi terumbu karang		153.274.772.000	151.576.087.736	
	· Produktivitas perikanan		588.710.149.000	389.948.408.450	
	i. Kominfo		318.139.119.000	315.830.955.726	Kemenkominfo
	· Komunikasi Publik PEN		318.139.119.000	315.830.955.726	
	j. Tambahan Sertifikasi TKDN		10.648.629.721	10.648.629.721	Kemenperin
	k. Tambahan Subsidi Pupuk		3.137.218.991.000	3.137.209.202.861	BA 999.07
4	**Dukungan kepada UMKM**	**116.300.000.000.000**	**72.532.223.620.431**	**112.259.468.378.755**	
	· Subsidi Bunga UMKM	12.930.000.000.000	35.401.238.776.000	12.806.502.689.132	BA 999.07

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	- Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan	66.750.000.000.000	Non DIPA	66.750.000.000.000	BA 999.00
	- IJP UMKM	1.500.000.000.000	4.930.000.000.000	1.091.611.029.137	BA 999.07
	- Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	BA 999.03
	- PPh Final UMKM DTP	1.070.000.000.000	1.084.150.594.431	671.166.848.877	BA 999.07
	- Pembiayaan Investasi untuk LPDB KUKM	1.290.000.000.000	1.292.000.000.000	1.292.000.000.000	BA 999.03
	- Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	28.800.000.000.000	28.824.834.250.000	28.648.187.811.609	Kemen KUKM
	a. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)			28.639.162.198.755	
	b. Safeguarding Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro			9.025.612.854	
	Cadangan UMKM	2.960.000.000.000	Tidak di DIPA-kan		
5	**Pembiayaan Korporasi**	**60.730.000.000.000**	**65.523.764.200.000**	**60.729.869.488.357**	
	- PMN	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000	BA 999.03
	- Pemberian Pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000	BA 999.03
	- IJP Korporasi	10.000.000.000	4.803.000.000.000	9.105.288.357	BA 999.07
	- Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*		764.200.000	764.200.000	BA 999.99

LAMPIRAN 4.A

Rincian Alokasi, DIPA dan Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020
Per Klaster / Sub Klaster

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi (Rp)	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp) (CaLK LKPP)	KL/ BA BUN Terkait Pelaksana Program PEN
	- *Stop Loss* Penjaminan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	BA 999.03
	- Pembiayaan SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	BA 999.03
6	**Insentif Usaha**	**120.610.000.000.000**	**11.082.383.325.808**	**58.377.811.427.970**	
	- PPh 21 DTP	4.030.000.000.000	8.811.056.325.808	1.722.767.990.009	BA 999.07
	- Pengurangan Angsuran PPh 25	21.590.000.000.000	Non DIPA	20.625.776.797.644	Non Anggaran
	- Penurunan Tarif PPh Badan	18.780.000.000.000	Non DIPA	12.677.845.239.238	Non Anggaran
	- Pembebasan PPh 22 Impor	13.390.000.000.000	Non DIPA	14.001.829.078.329	Non Anggaran
	- Pengembalian Pendahuluan PPN	7.550.000.000.000	Non DIPA	7.570.475.576.080	Non Anggaran
	- BM DTP	580.000.000.000	583.287.000.000	91.076.746.670	BA 999.07
	- Pembebasan abonemen listrik	1.690.000.000.000	1.688.040.000.000	1.688.040.000.000	BA 999.08
	Bantalan DTP dan Pembebasan abodomen listrik	53.000.000.000.000	Tidak di DIPA-kan		
	TOTAL	**695.200.000.000.000**	**514.336.021.612.189**	**575.851.480.554.892**	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 4.B

Rincian Belanja Kementerian/Lembaga Pelaksana Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun Anggaran 2020

No	BA	Uraian BA	Pagu DIPA	Akun Khusus	Akun Reguler	Realisasi	Barang (52)			Modal (53)			Bansos (57)			Keterangan
							Akun Khusus	Akun Reguler	Total	Akun Khusus	Akun Reguler	Total	Akun Khusus	Akun Reguler	Total	
1	012	Kemenhan	9 500 008 685 640	9 499 989 382 650		9 499 989 382 650	4 655 054 184 010		4 655 054 184 010	4 844 935 198 640		4 844 935 198 640				
2	018	Kemenlu	2 518 177 106 000	1 261 421 626 808	1 045 072 959 201	2 306 494 586 009	1 138 751 870 608	1 161 929 940 001	2 300 681 810 609	699 191 000	5 113 593 400	5 812 774 400				
3	018	Kemenpenn	10 681 119 000	10 648 629 721		10 648 629 721	10 648 629 721		10 648 629 721							
4	022	Kemenhub	8 272 942 354 855	375 795 070 089	7 036 042 454 152	7 411 837 524 221	361 577 378 870	31 273 821 153	392 853 329 113	14 217 691 189	7 004 768 503 909	7 018 984 195 108				
5	023	Kemendikbud	8 668 051 620 000	6 771 108 031 000		6 771 108 031 000	6 771 108 031 000		6 771 108 031 000							
6	024	Kemenkes	28 631 962 443 581	27 446 941 088 813		27 446 941 088 813	18 923 994 709 727	10 832 948 016	24 646 761 658 791	2 800 574 411 022	1 605 001 000	2 802 179 412 022				
7	025	Kemeneg	5 002 315 787 000	4 021 349 036 710		4 021 349 036 710	4 021 349 036 710		4 021 349 036 710							
8	026	Kemenaker	30 381 112 258 000	30 005 489 671 113	10 135 446 740	30 015 625 117 853	30 005 489 671 113	10 135 446 740	30 015 625 117 853							
9	027	Kemensos	129 282 139 774 200	57 721 461 957 838	67 805 574 719 128	125 527 036 676 966	2 048 408 720 845	12 462 850 950	2 060 871 571 595				55 673 053 237 192	67 812 076 118 176	123 469 165 105 368	
10	029	Kemen LHK	812 435 435 000	4 735 068 454	712 270 856 937	717 005 925 391	328 035 964	691 431 864 896	691 759 700 620		25 246 224 771	25 246 224 771				
11	032	Kemen KKP	917 529 435 000	489 211 296 786	223 926 725 819	713 138 022 605	488 614 421 151	223 926 725 819	710 541 146 970	2 596 475 635		2 596 475 635				
12	033	Kemen PUPR	14 200 899 845 000		13 199 041 492 302	13 199 041 492 302		12 083 153 145 642	12 083 153 145 642		1 115 888 346 660	1 115 888 346 660				
13	040	Kemenpar	389 885 370 000,00	329 476 999 521		329 476 999 521	329 476 999 521		329 476 999 521							
14	042	Kemenristek/BRIN	94 509 173 000	80 809 575 120		80 809 575 120	30 186 167 120		30 186 167 120	50 623 408 000		50 623 408 000				
15	044	Kemenkop UKM	28 924 834 250 000	29 639 149 873 755	9 039 937 854	28 648 187 811 609	28 800 000 000 000	7 809 618 854	28 648 958 482 609		1 229 319 000	1 229 319 000				
16	050	BIN	817 677 915 000	816 874 770 200		816 874 770 200	816 874 770 200		816 874 770 200							
17	056	Kemen ATR/BPN	69 835 072 000	4 939 943 944	56 256 203 933	61 196 147 877	4 868 854 456	36 322 985 629	41 191 340 087	71 089 488	19 933 318 304	20 004 407 790				
18	059	Kemenkeuwfa	479 147 959 000	476 836 943 411		476 836 943 411	485 983 528 107		485 983 528 107	10 853 415 304		10 853 415 304				
19	067	Polri	3 145 407 026 000	3 141 616 239 091		3 141 616 239 091	1 024 444 210 650		1 024 444 210 650	2 117 172 028 441		2 117 172 028 441				
20	085	BKPM	84 902 904 000	80 811 884 576	3 105 044 797	83 916 739 373	77 971 494 576	3 105 044 797	81 076 539 373	2 840 200 000		2 840 200 000				
21	103	BNPB	10 082 372 374 000	9 180 269 886 231		9 180 269 886 231							9 227 468 860 755		9 180 269 886 231	
TOTAL			283.182.605.896.276	186.360 936.764.811	80.108.484.848.861	270 461.608 605.672	160.973 131.114.142	14.272.484.092.267	119.796.808.208 302	9 844.583.108 727	8.173.792.297 044	18 018.385.405.771	64 900.542.097.947	67 812.076 118.176	132.846.434 991.589	

Rincian Realisasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Per Klaster
Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Tahun Anggaran 2020

Klaster	BA BUN	PAGU DIPA	REALISASI
A. Kesehatan			**10.227.777.956.812**
1. Tenaga Medis Daerah (BOK Kesehatan)	999.05	4.173.330.000.000	4.173.318.578.376
2. Bantuan Iuran JKN	999.08	4.118.336.624.000	4.118.240.745.500
3. PPN dan PPh (PMK 28)	999.07	2.014.116.984.000	1.936.218.632.936
B. Perlindungan Sosial			**53.437.699.658.242**
1. Kartu Prakerja	999.08	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924
2. Diskon Listrik	999.07	11.618.579.841.000	11.448.439.134.297
3. BLT Dana Desa*	999.05	31.800.000.000.000	23.737.018.473.021
C. Sektoral dan Pemda			**36.888.178.079.049**
1. Tambahan Subsidi Pupuk	999.07	3.137.218.991.000	3.137.209.202.861
2. Subsidi Bunga Kredit Perumahan	999.07	788.790.030.000	115.747.765.525
3. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	999.07	712.000.000.000	367.038.000.000
4. Hibah kepada Pemda	999.02	3.300.000.000.000	2.264.647.247.182
5. Dana Insentif Daerah Pemulihan Ekonomi	999.05	5.000.000.000.000	4.955.285.206.000
6. Cadangan DAK Fisik	999.05	8.715.745.783.000	7.285.623.090.246
a. Reguler		2.875.771.283.000	2.529.490.258.283
b. Afirmasi		4.268.068.045.000	3.415.465.207.181
c. Penugasan		1.411.599.221.000	1.340.667.624.782
d. Dana Cadangan**		160.307.234.000	-
7. Fasilitas Pinjaman Daerah	999.03	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235
D. Insentif Usaha			**3.501.884.736.679**
1. PPh 21 DTP	999.07	8.811.056.325.808	1.722.767.990.009
2. Bantuan Pembayaran Listrik	999.08	1.688.040.000.000	1.688.040.000.000
3. Insentif BM DTP	999.07	583.287.000.000	91.076.746.670
E. UMKM			**83.611.280.567.146**
1. Subsidi Bunga KUR	999.07	5.081.357.176.000	4.984.218.342.076
2. Subsidi Bunga/Selisih Margin Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan	999.07	27.197.182.900.000	6.332.908.394.939
3. Subsidi Bunga/Selisih Margin Pegadaian dan PT PNM	999.07	2.371.000.000.000	1.457.106.553.933
4. Subsidi Bunga/Selisih Margin Koperasi	999.07	751.698.700.000	32.269.398.184
5. Penempatan Dana	999.00	-	66.750.000.000.000
6. Pembayaran IJP oleh Pemerintah	999.07	4.930.000.000.000	1.091.611.029.137
7. Dana cadangan penjaminan untuk stop-loss	999.03	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
8. PPh Final UMKM DTP	999.07	1.084.150.594.431	671.166.848.877
9. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM	999.03	1.292.000.000.000	1.292.000.000.000
F. Pembiayaan Korporasi			**60.729.869.488.357**
1. PMN	999.03	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000
a. Hutama Karya		7.500.000.000.000	7.500.000.000.000
b. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)		6.000.000.000.000	6.000.000.000.000
c. Permodalan Nasional Madani		1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
d. Indonesia Tourism Development Corp.		500.000.000.000	500.000.000.000

Rincian Realisasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Per Klaster
Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Tahun Anggaran 2020

Klaster	BA BUN	PAGU DIPA	REALISASI
e. LPEI		5.000.000.000.000	5.000.000.000.000
f. PT PII		1.570.000.000.000	1.570.000.000.000
g. Bio Farma		2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
2. Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	999.03	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000
a. Garuda		8.500.000.000.000	8.500.000.000.000
b. KAI		3.500.000.000.000	3.500.000.000.000
c. Perumnas		650.000.000.000	650.000.000.000
d. PTPN III		4.000.000.000.000	4.000.000.000.000
e. Krakatau Steel		3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
3. IJP Korporasi	999.07	4.803.000.000.000	9.105.288.357
4. Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit	999.99	764.200.000	764.200.000
5. Stop Loss Penjaminan	999.03	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
6. Pembiayaan SWF	999.03	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 4.D

PEMINDAHAN DANA BLU LMAN
PADA BLU RUMPUN LAYANAN KESEHATAN

No	BLU Penerima	BA	Jumlah pemindahan Dana	Jumlah Realisasi	Sisa Dana	Sumber data (tgl/no Surat laporan/LK)	Sisa Dana Yang disetorkan	Tgl setor	NTPN	SKTB
1	RSCM	024	329.661.558.405	306.743.801.840	22.917.756.565	KU.04.05/VII.3/1892/2021 tanggal 21 Januari 2021	22.917.756.565	10/05/2021	825E18N3DNNHDE9L	KET 35/WPB.12/KP.0705/2021
2	RSUP Fatmawati	024	150.282.749.919	150.147.834.210	134.915.709	KU.01.07/VIII.3/1072/2021 tanggal 4 Mei 2021	134.915.709	10/05/2021	7647A3CIED93SDPJ	KET-37/WPB.12/KP.0705/2021
3	RSUP Persahabatan	024	93.165.684.000	88.700.688.256	4.465.005.744	KU.02.01/3.2/ /2021 tanggal 8 Januari 2021	4.465.005.744	06/05/2021	556063CIED93NU1J	KET-30/WPB.12/KP.0705/2021
4	RSUP Wahidin Sudirohusodo	024	63.391.126.000	49.950.050.320	13.441.075.680	KU.03.01/VIII.3/8477/2021 tanggal 24 Mei 2021	13.441.075.680	06/05/2021	EF3097QLTT4VBV4U	SKTB-002/WPB.25/KP.0205/2021
5	RSUP M Hoesin	024	19.477.715.440	19.454.347.340	23.368.100	KU.01.02/XVII.3/040/2021 tanggal 1 Februari 2021	23.368.100	05/05/2021	1FBF648VUIRER0L8	KET-004/WPB.07/KP.0105/2021
6	RSPI Sulianti Saroso	024	41.372.096.000	40.577.016.185	795.079.815	KU.03.01/XXXVIII/5634/2020 tanggal 30 Desember 2020	795.079.815	07/05/2021	01FF561QU80934TK	KET 29/WPB.12/KP.0705/2021
7	BBLK Jakarta	024	4.591.303.885	4.025.660.037	565.643.848	PR.05.01/XI.1/0280/2021 tanggal 28 Januari 2021	565.643.848	04/05/2021	E4017264U7MJU65A	KET-28/WPB.12/KP.0705/2021
8	BBLK Surabaya	024	9.116.398.000	8.916.396.701	200.001.299	KU.04.01/XII.1/7191/2020 tanggal 30 Desember 2020	200.001.299	10/05/2021	9024DZG4UTMPGDCE	KET-7/WPB.16/KP.0205/2021
9	RSB R. Said Sukanto	060	35.241.496.500	35.241.496.500	-	Surat Kerumkit R Said Sukanto nomor B/26/I/2021/Rs.Bhay.Tk.I tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Pemindahan Dana Transfer Kas BLU				
10	RSB Brimob Kelapa Dua	060	14.534.804.000	13.420.553.117	1.114.250.883	Surat Kerumkit Binsyangkara Brimob nomor B/04/I/KEU.1/2021/Rumkit tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer Kas BLU bulan Desember 2020	1.114.250.883	6 Mei 2021	1AAE955DEDDR9C5P	KET-005/WPB.12/KP.03/2021
11	RSB Pontianak	060	4.457.066.500	4.457.066.500	-	Surat Kerumkit Pontianak nomor B/11/I/2021/Rsbhy tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Realisasi Belanja Transfer Masuk Kas BLU				
12	RSB Makassar	060	11.983.981.000	11.105.967.652	878.013.348	Laporan Penggunaan Pemindahan Dana RSB Makassar bulan Desember 2020	878.013.348	24 Mei 2021	7C949DN9V8IC1FU4	Proses pengajuan SKTB

SK No 062655 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

13	RSB Bandung	060	11.703.913.300	10.219.924.575	883.988.725	Surat Karumkit Bhayangkara Bandung nomor B/04/I/REN/2021/RSBSA tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Penggunaan Pemindahan Dana /Transfer Kas	883.988.725	7 Mei 2021	2A90048VUIRG9DCA	SKTB - 05/WPB.13/KP.0105/2021
14	RSB Surabaya	060	13.684.000.000	13 684.000 000		Surat Karumkit R.S. Samsoeri Mertojoso nomor B/6/KEU/2021/RUMKIT tanggal 11 Januari 2021 hal Laporan Penggunaan Pemindahan Dana Transfer Masuk Kas BLU				
15	RSB Semarang	060	5.599 852.388	5.599.698.972	153 416	Surat Karumkit Bhayangkara Semarang nomor B/20/I/KEU./2021/Rumkit tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan penggunaan pemindahan dana	153.416	18 Mei 2021	C88C048VUIRQA8SQ	KET-21/WPB 14/KP 026/2021
16	RSB Setukpa Sukabumi	060	4.200.000.000	4 200 000 000		Surat Karumkit Bhayangkara Setukpa nomor B/420/XII/OTL.2.3/2021/Rumkit tanggal Desember 30 2021 hal Laporan penggunaan pemindahan dana				
17	RSB Padang	060	1 933 353.600	1.933.353.600		Surat Karumkit Bhayangkara Padang nomor B/471/XII/2020/Rumkit tanggal 30 Desember 2021 hal Laporan penggunaan pemindahan dana				
18	RSB Hasta Brata Batu	060	3.477 532.290	3 477 529 915	2.375	Surat Karumkit Bhayangkara Hasta Brata Batu nomor B/ 13 /I/REN.4.1./2021/Rumkit tanggal 11 Januari hal Laporan Penggunaan Transfer Masuk Kas BLU sampai Bulan Desember 2020	2.375	5 Mei 2021	98BD61JNF349KI7L	
19	RSB Bengkulu	060	2.987 526.000	2.987.526.000		Surat Karumkit Bengkulu nomor B/48/I/KEU/2021/Rumkit tanggal 27 Januari 2021 hal Laporan Realisasi Penggunaan Pemindahan Dana Bulan Desember 2020				
20	RSB Pekanbaru	060	1 775 332.000	1.776.332.000		Surat Karumkit Bhayangkara Pekanbaru nomor B/12/I/ 2021/RS. BHY tanggal 8 Januari 2021 hal Laporan Penggunaan Transfer Masuk Kas BLU Bulan Desember Tahun 2020				
21	RSAD Putri Hijau	012	33.379.846.105	10.377 834.932	23.002.011.173	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/70/I/2021 tanggal 12 Januari 2021	23.002.011.173	19/05/2021	AAC84DN9V8I8NNIE	
22	RSPAL Ramelan	012	50.906.142.806	50 716 083 361	190.059.445	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/25/I/2021 tanggal 7 Januari 2021	190.059.445	06/05/2021	A79502G4UTMM1LLM	

23	RSAD Pelamonia	012	51.234.269.281	51.232.792.206	1.477.075	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/03/I/2021 tanggal 4 Januari 2021	1.477.075	07/05/2021	002D26U8E2ILG6UV	
24	RSAD Dustira	012	48.860.877.000	48.791.712.956	69.164.044	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/013/I/2021 tanggal 5 Januari 2021	69.164.044	11/05/2021	E57640N9V8I1N7R2	
25	RSPAU Hardjolukito	012	30.660.098.461	30.536.723.868	123.374.593	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/11/I/2021 tanggal 5 Januari 2021	dalam proses penyetoran	-	-	
26	RSAD Cirema	012	7.660.000.000	7.659.003.396	996.604	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021	996.604	24/05/2021	696D348VUISOJRJK	
27	RSAD Soepraoen	012	26.198.510.943	26.138.090.316	60.420.627	Laporan Penggunaan Dana TK Nomor B/45/I/2021 tanggal 8 Januari 2021	60.420.627	05/05/2021	AF36E0N9V8HT6UBC	
28	RSAD Soedjono	012	24.490.745.820	24.490.745.820	-	-	-	-	-	
29	RSAD Wijayakusuma	012	20.983.596.908	20.983.596.908	-	-	-	-	-	

Realisasi dan Setoran Sisa Dana Transfer Kas pada BLU Penerima (Per BA)

No	BLU Penerima Transfer Kas	BA	Jumlah Pemindahan Dana	Jumlah Realisasi	Sisa Dana	Sisa Dana Yang disetorkan	Sisa Dana Yang Belum Disetor
1	RS BLU Kemenkes	024	711.058.641.649	668.515.794.889	42.542.846.760	42.542.846.760	-
2	RS BLU Polri	060	110.979.857.578	108.103.448.831	2.876.408.747	2.876.408.747	-
3	RS BLU TNI	012	294.384.087.324	270.936.583.763	23.447.503.561	23.324.128.968	123.374.593
TOTAL REALISASI			**1.116.422.586.551**	**1.047.555.827.493**	**68.866.758.068**	**68.743.384.475**	**123.374.593**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 5
SALDO KAS DI REKENING KPPN

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	3.545.187.656.732	2.891.111.227.978
2	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	400.953	7.986.125
JUMLAH KAS DI KPPN			**3.545.188.057.685**	**2.891.119.214.103**

LAMPIRAN 6
KAS PADA KL DAN BUN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	330.259.934	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	3.011.929.438	152.903.312
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	-	-	-	1.362.172.730	5 898.219 611
4	005	MAHKAMAH AGUNG	71.747 044	331.818.397	10.282.500	22.228.000	3.892 320.160	3.031.426
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1.836.225.659	1.256.573.831	70.272.702.095	90.660.879.712	80.865.759.254	70.589.089.482
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3 159.950.338	9.086 376.908	-	-	42.074.491.700	58.563.511.865
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	48.500 000	32.852.895	4.383.550.000	4.716.981 000	182.578.532	1.159 231.725
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	196.479.515.140	177.159.041.478	8.281.799.850	14.480.375 170	22.576 800.681	19.585 248.865
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.889.330.992	77.391.000	41.771.394	27 884.662	108.239 627.234	320.544 677.910
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	437 017.887	1.937.351.678	1.000.000	-	44.953 188.625	52.788 944.267
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	421.755.120	2.210.908.064	3.831.484.423	5.041.393 083	417.435.317 207	454.064 488 257
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.216.248.020	266.681.076	47.725.202	14.061.000	16.573.529.510	192.184.589.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.153 789.857	1.221.986.058	-	89.842.259	3 713.425 505	528.198 431
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	85.601 054	-	-	1 831.809.783	2.262.493.816
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	841.409.136	1.366.397.215	222 797.627	16 015.058.606	44.298.001.071	31.552.751.711
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17 943.625.066	16.978.861.883	25.942.755.848	1.604.000	505.100.983.904	80.465.430.689
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	61.981.806	38 995.296	917 446.300	125.769.723	226.249.872.801	511.420.745.577
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2 265.839.155	888.226.527	12 778.881	828.552.276	179.431.816.302	42.848.058.768
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.580.897.441	278.559.381	-	82.500.000	3.167.787.101	82.690.942
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.100.000	67.666.000	-	-	2.058.132.172.068	2.011.950.360.632
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	201.694.134	2 161.926.711	30.200.000	192.341.000	9 968.699 857	59 800.803.661
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	179.952.437	16.124.586	4.584.677	2.337.500	321.150.977 100	323.118.323.395
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	191 710.589	74.664.285	-	-	98.243.428 746	1.804.456 796
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	149.980 723	-	-	78.359.727	93.422.527

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	6.424.000	87.591	-	-	28.839.130	180.462.613
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.196.156.127	-	2.050.000	2.050.000	926.287.054	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	-	667.972.836	-	27.159.742.703	5.408.323.854	471.433.500.118
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	100.000	-	-	4.063.594.668	4.294.107.374
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.443.250	177.838.780	-	-	69.716.582	171.322.254
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	-	5.851.237.358	23.771.608
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	7.653.824	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	23.811.826
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	9	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	31.310.000	60.431.458	4.476.420	-	1.888.196.843	1.211.682.100
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	77.254.593	38.136.194	-	-	638.208.958	5.967.367.257
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	341.644.568	89.560.967	-	-	1.180.080.290	2.429.202.388
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	214.654	-	-	70.000	31.124.387
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.714.000	225.009	3.050.000	-	72.523.073.254	2.448.615.012
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	326.877.826	156.344.184	8.345.562.200	2.090.260.500	376.411.646.206	178.573.565.699
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	254.767.530	18.910.010	-	-	28.807.150	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	73.708.353	-	-	-	1.447.191.717	1.202.743.681
45	068	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	39.053.944	159.405.201	8.120.000	-	158.444.681	1.510.737.282

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	500.000	-	-	219.087.387	1.178.000
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-	114.807.412	170.275.490
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	4.128.952.986	3.439.915.392
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	385.363.300	3.337.000	-	-	8.881.622	3.780.165
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	411.849.034	1.149.243.313	-	-	2.179.138.992.023	366.268.764.461
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	13.073.774	101.921.980
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	16.777.287	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	2.642.352	-	13.300.000	29.096.417.181	899.375.091
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	199.420.426	-	-	-	1.660.042.957	622.968.861
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	13.016.884	814.521.772	462.913.075	373.138.050	14.935.337.281	2.489.073.382
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	-	-	-	26.145.556.048	1.772.240
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	-	80.932.826	139.085.359
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	-	18.792.186
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	2.720.000	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.205.725	-	-	-	4.071.600	44.019.000
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	111.982.741	-	-	-	200.650
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.904.250.259	7.139.398.465	1.395.411.780	4.198.728.123	511.571.558	738.698.927
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134.909.200	7.611.000	2.082.163	1.844.000	303.808.686	2.873.893.828
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	302.117.588	-	0	393.051	9076707668	29.125.942.979
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	2.607.730.318	-	-	4.532.662.246	7.683.851.598
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	4.266.989
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	481.036.991.370	-	-	-	92.462.532.750	27.509.790.021
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	284.513.200	-	411.825	-		-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	45.000	-

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*	31 Desember 2020 *Audited*	31 Desember 2019 *Audited*
72	107	BADAN SAR NASIONAL	103.800.000	-	-	-	-	-
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	190.793.773	-	-		
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	3.512.000	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	42.000.924
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	77.641.223.705	94.215.715.907
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	104.059.700	6.433.319	-	-	-	993.915.575
79	114	SEKRETARIAT KABINET	1.793.096.739	3.272.809.348	-	-		1.035.224.316
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	523.877.328	1.765.985.583	-	-	551.216.623.989	139.688.221.070
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	468.380.700	8.292.002	7.792.000	4.750.000	12.805.747	44.452.120
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	238.770.428	41.776.624	-	23.996.500	145.502.372	34.860.215
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-		
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	1.031.795.805	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	122.551.396
	PENYESUAIAN		-	-	-	-	(3.862.816.464.099)	(1.632.840.904.986)
	JUMLAH KAS PADA K/L		731.061.274.902	234.188.766.627	124.232.758.260	166.170.010.918	3.793.142.080.512	3.956.448.849.872
	JUMLAH KAS PADA SATKER BUN		-	-	-	-	6.637.139.656.744	1.634.617.895.228
	JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN		731.061.274.902	234.188.766.627	248.465.516.520	166.170.010.917	10.430.281.717.256	5.591.063.945.100

LAMPIRAN 7
BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	14.160.686.078	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	169.600.126	365.650.226	-	-	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	15.525.154.445	10.730.282.768	-	-	-	-
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	20.074.471.764	18.823.430.028	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	899.400.000	1.350.000.000	-	-	37.201.493	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	88.990.351.778	91.616.963.772	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	45.933.581.700	1.086.250.000	22.317.263.212.916	22.143.189.884.406	-	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	29.254.137.917	9.853.310.665	2.394.380.000	5.558.458.273	31.297.367	51.754.279
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	3.654.521.589.193	2.511.562.702.712	3.008.407.881	3.556.618.919	604.284.760.548	528.706.457.547
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	873.029.755.166	544.750.050.814	-	-	7.030.925.752	1.240.370.197
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	165.184.677	630.838.321	-	-	2.503.945.072	1.314.847.300
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	161.323.361.517	609.681.944	-	-	172.039.068.737	16.859.426.427
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	17.002.142.841	17.396.021.069	-	-	1.832.206.924	917.568.894
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	940.708.341.404	771.004.826.422	-	-	221.527.391.845	1.929.044.625
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	800.311.602.714	6.781.000.944	44.602.514.806	63.429.896.254	1.248.410.346	1.120.943.972
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	109.329.613.479	138.064.742.375	-	1.682.122.214	75.048.518.680	73.053.399.031
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	653.853.108.692	-	-	-	44.351.750	-

SK No 062648 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	71.528.400	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100.458.892.744	11.186.221.915	-	-	6.007.500	6.007.500
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.164.858.980	3.889.438.586	-	-	3.821.649.871	4.262.423.003
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.167.000.000	4.392.000.000	578.597.833	-	2.888.292.858	2.418.384.698
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	35.646.813	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	409.578.500	502.280.600	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	8.694.504.866	8.583.486.818	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	2.782.486.208	601.380.961	-	-	32.017.185	379.285.240
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	-	291.032.815.892	-	2.518.238.998	-	49.477.919.354
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	55.545.207	352.191.621	-	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	-	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	92.711.831.043	154.413.458.451	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	5.881.096.260	-	3.790.666.623	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	26.189.689	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.882.867.312	3.790.809.575	-	-	77.092.431	9.623.499
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	41.221.576.013	43.207.682.176	-	-	502.342.500	2.287.530

SK No 062690 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	811.573.801	560.234.407	-	-	4.824.664	-
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.004.877.419	14.001.410.618	-	-	4.694.400	61.157.500
40	058	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	312.542.628	18.658.378.421	-	-	2.744.876.083.099	2.286.089.668.018
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	114.959.820.313	233.004.734.647	1.989.376.302.214	2.264.441.428.139	120.723.262	1.766.258.494
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	960.338.623	6.765.197.904	-	-	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	205.360.500	195.083.750
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.853.713.621	10.796.730.375	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	11.496.744.224	7.432.341.022	-	-	-	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	294.891.667	15.126.451	-	-	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	22.125.795	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.999.398	3.000.000	-	-	7.234.088.697	28.805.305.761
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.383.099.460	12.252.180.457	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	146.479.260	23.678.775	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3.395.512.025	2.195.433.272	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	12.031.604.501	5.567.090.500	-	-	-	245.350.843
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	252.560.000	171.545.000	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	159.324.000	-	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.508.500.000	35.750.000	-	-	-	-

SK No 062689 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.227.216.533	-	-	-	701.140	701.140
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	166.732.864	149.897.742	-	4.310.462.736	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.399.514	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	225.329.800	45.510.904	-	-	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	19.259.312	6.650.000	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	10.354.806.910	1.176.497.935	-	-	2.612.000	3.713.750
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	6.588.087.320	3.037.890.897	-	-	109.532.704	8.889.876
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.750.000.000	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	706.919.988	1.970.442.639	-	-	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	3.409.348.486	2.637.210.047	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	381.689.825	428.033.556	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.979.343.395.838	5.231.053.981.586	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	192.283.333	196.211.756	-	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	908.416.737	3.373.051.041	-	-	181.410.947	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	422.104.375	527.085.247	-	-	-	45.543.000
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	475.002.000	59.239.583	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	116.013.439	1.867.065.556	-	-	-	-

LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	27.736.730.919	30.206.210.977
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	216.682.354	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	6.801.089.845	144.827.210.119	1.139.100.000	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	-	79 311 444	-	-	-	-
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	151.350.000	-	-	-	-	-
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	107.083.006.978	95.123.449.077	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	5.226.680.846	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	18.386.663	3.333.746.667	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			10.046.042.502.451	10.459.108.928.880	24.358.362.515.650	24.512.477.796.562	3.873.433.233.292	3.028.979.606.205
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 7

BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	17.149.403.624	416.666.684	15.000.000	-	-	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	5.742.910.696	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BA BUN			17.149.403.624	416.666.684	15.000.000	-	5.742.910.696	-
TOTAL			10.063.191.906.075	10.459.525.595.574	24.358.377.515.650	24.512.477.796.562	3.879.176.143.888	3.028.979.606.205

LAMPIRAN 8
PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020

A. Direktorat Jenderal Pajak

(dalam Rupiah)

Akun	Nama Akun	Nilai	Penyisihan	Netto
115111	Piutang PPh Minyak Bumi	7.779.242,00	38.896,21	**7.740.346**
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.444.917.836.022,85	612.806.239.885,57	**832.111.596.137**
115122	Piutang PPh Pasal 22	603.738.345.732,16	449.453.276.827,20	**154.285.068.905**
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.121.870.765,00	10.609.353,83	**2.111.261.411**
115124	Piutang PPh Pasal 23	3.144.397.552.043,34	2.181.674.819.137,97	**962.722.732.905**
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.903.191.983.258,38	1.035.150.566.679,09	**868.041.416.579**
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	18.313.005.239.196,50	10.956.934.766.127,40	**7.356.070.473.069**
115127	Piutang PPh Pasal 26	1.443.919.359.473,57	749.554.789.103,33	**694.364.570.370**
115128	Piutang PPh Final	3.455.008.563.837,10	1.641.022.270.265,75	**1.813.986.293.571**
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	24.279.436.124.349,10	12.316.755.930.532,00	**11.962.680.193.817**
115132	Piutang PPN Impor	19.966.520.487,00	99.832.602,44	**19.866.687.885**
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	257.676.089.239,00	233.056.337.191,00	**24.619.752.048**
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.497.252.137.048,40	638.816.948.819,18	**858.435.188.229**
115154	Piutang PBB Kehutanan	829.381.698.675,00	410.905.448.401,57	**418.476.250.273**
115155	Piutang PBB Pertambangan	4.018.225.336.845,68	2.733.010.058.880,49	**1.285.215.277.965**
115159	Piutang PBB Lainnya	74.783.705.811,00	20.622.079.492,55	**54.161.626.318**
115165	Piutang Bea Materai	4.503.318.517,00	29.301.445,09	**4.474.017.072**
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	16.501.254.720,00	5.019.666.650,68	**11.481.588.069**
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	5.664.046.380.928,46	1.752.789.021.298,28	**3.911.257.359.630**
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	2.765.851.898.375,50	1.565.113.645.915,20	**1.200.738.252.460**
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	153.155.757.064,00	136.836.106.633,50	**16.318.650.431**
	Total (Berdasarkan TPA Modul RAS)	**69.891.088.751.631**	**37.439.661.754.138**	**32.451.426.997.493**

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kode Akun	Nama Akun	Nilai	Penyisihan	Netto
115123	PPh Pasal 22 Impor	71.762.115.163	11.756.169.060	**60.005.946.103**
115132	PPN Impor	199.765.862.092	35.038.130.688	**164.727.731.404**
115142	PPnBM Impor	59.553.447.581	7.237.840.586	**52.315.606.995**
115161	Cukai Hasil Tembakau	27.043.872.225.594	172.445.384.937	**26.871.426.840.657**
115163	Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.367.119.100	3.109.541.213	**2.257.577.888**
115164	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	26.602.811.990	25.387.052.813	**1.215.759.177**
115169	Pendapatan Cukai Lainnya	13.070.365.255	12.908.029.426	**162.335.829**
115174	Bunga Penagihan PPN	10.058.447.304	539.167.754	**9.519.279.550**
115181	Bea masuk	1.362.237.498.291	767.344.232.662	**594.893.265.629**
115183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	2.182.174.996.109	1.866.698.220.105	**315.476.776.004**
115184	Pendapatan Pabean Lainnya	379.421.596.874	370.155.130.971	**9.266.465.903**
115185	Pajak/Pungutan Ekspor (Bea Keluar)	163.752.913.762	153.509.557.914	**10.243.355.848**
115186	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	16.118.304.082	16.037.405.606	**80.898.476**
115187	Pendapatan Bunga Bea Keluar	787.291.683	778.661.053	**8.630.630**
115191	Bea Masuk Antidumping	24.384.785.599	22.977.154.124	**1.407.631.475**
115193	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	31.600.618.000	874.997.065	**30.725.620.935**
	Total	**31.590.530.398.479**	**3.466.796.675.977**	**28.123.733.722.502**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020

A. PIUTANG PAJAK

Kode Akun	Nama Akun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	JUMLAH
115111	Piutang PPh Minyak Bumi	7.779.242	-	-	-	7.779.242
115121	Piutang PPh Pasal 21	392.714.914.389	375.201.098.080	204.629.739.080	472.372.084.474	1.444.917.836.023
115122	Piutang PPh Pasal 22	57.844.937.369	83.585.019.954	42.647.040.829	419.661.347.580	603.738.345.732
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.121.870.765	-	-	-	2.121.870.765
115124	Piutang PPh Pasal 23	428.702.546.548	477.353.540.663	209.870.009.829	2.028.471.455.003	3.144.397.552.043
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	370.105.928.923	317.538.138.526	400.453.662.792	815.094.253.017	1.903.191.983.258
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	3.681.343.519.339	3.117.152.609.227	1.733.896.153.557	9.780.612.957.073	18.313.005.239.197
115127	Piutang PPh Pasal 26	404.231.228.285	246.956.022.645	129.546.164.821	663.185.943.712	1.443.919.359.474
115128	Piutang PPh Final	559.340.775.124	971.489.538.913	757.173.104.788	1.167.005.145.013	3.455.008.563.837
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	5.165.092.111.824	5.108.523.464.235	4.307.347.110.760	9.698.473.437.530	24.279.436.124.349
115132	Piutang PPN Impor	19.966.520.487	-	-	-	19.966.520.487
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	32.851.560	886.608.032	47.578.235.034	209.178.394.613	257.676.089.239
115153	Piutang PBB Perkebunan	158.096.282.736	577.570.694.250	362.631.524.164	398.953.635.899	1.497.252.137.048
115154	Piutang PBB Kehutanan	120.686.843.754	212.214.347.953	214.799.855.161	281.680.651.807	829.381.698.675
115155	Piutang PBB Pertambangan	400.868.795.222	425.955.048.767	1.005.982.565.658	2.185.418.927.199	4.018.225.336.846
115159	Piutang PBB Lainnya	36.337.929.189	6.181.346.021	24.884.350.713	7.380.079.888	74.783.705.811
115165	Piutang Bea Materai	4.431.899.017	71.419.500	-	-	4.503.318.517
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	8.073.760.220	8.427.494.500	-	16.501.254.720
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.139.142.355.712	715.452.752.833	285.573.270.757	1.523.878.001.627	5.664.046.380.928
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	860.427.225.920	212.032.463.202	292.505.118.533	1.400.887.090.721	2.765.851.898.376
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	-	18.194.759.481	134.960.997.583	153.155.757.064
Jumlah		**15.801.496.315.415**	**12.856.237.873.020**	**10.046.140.160.457**	**31.167.214.402.739**	**69.891.088.751.631**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020

B. PIUTANG BEA DAN CUKAI

Kode Akun	Nama Akun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	JUMLAH
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	38.193.417.512	23.926.432.153	940.432.000	8.701.833.498	71.762.115.163
115132	Piutang PPN Impor	139.560.228.650	28.427.974.040	559.236.000	31.218.423.401	199.765.862.091
115142	Piutang PPnBM Impor	5.047.941.000	52.547.673.000	-	1.957.833.581	59.553.447.581
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	27.006.459.136.340	-	-	37.413.089.255	27.043.872.225.595
115163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.268.922.500	-	-	3.098.196.600	5.367.119.100
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	1.139.468.520	70.000.000	37.976.000	25.355.367.470	26.602.811.990
115169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	73.084.250	20.000.000	143.234.000	12.834.047.005	13.070.365.255
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	9.566.690.000	-	846.000	490.911.304	10.058.447.304
115181	Piutang Bea Masuk	305.226.319.720	321.097.731.785	4.069.759.000	731.843.687.785	1.362.237.498.290
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	305.948.810.311	5.688.999.000	9.646.297.800	1.860.891.088.998	2.182.174.996.109
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	2.423.244.000	4.943.344.140	4.726.331.460	367.328.677.253	379.421.596.873
115185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	10.294.830.000	-	-	153.458.083.764	163.752.913.764
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	81.305.000	-	-	16.036.999.081	16.118.304.081
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	8.674.000	-	-	778.617.683	787.291.683
115191	Piutang Bea Masuk Antidumping	1.414.705.000	-	-	22.970.080.599	24.384.785.599
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	24.053.313.000	7.547.305.000	-	-	
	Jumlah	**27.851.759.889.803**	**444.269.459.118**	**20.124.112.280**	**3.274.376.937.278**	**31.590.530.398.479**

JUMLAH PIUTANG PAJAK, BEA DAN CUKAI (A+B)	**101.481.619.150.110**

LAMPIRAN 8.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020

1 Direktorat Jenderal Pajak

(dalam Rupiah)

Akun	Jenis Pajak	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
115111	Piutang PPh Minyak Bumi	38.896	-	-		38.896
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.963.574.572	37.467.615.197	102.048.484.604	471.326.565.602	612.806.239.886
115122	Piutang PPh Pasal 22	289.224.687	8.345.540.900	21.259.823.566	419.558.687.674	449.453.276.827
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	10.609.354	-			10.609.354
115124	Piutang PPh Pasal 23	2.143.512.733	47.703.649.519	104.766.371.608	2.027.061.285.278	2.181.674.819.138
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.850.529.645	31.706.967.750	198.638.124.619	802.952.944.685	1.035.150.566.679
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	18.406.717.597	311.195.125.183	861.374.706.088	9.765.958.217.279	10.956.934.766.127
115127	Piutang PPh Pasal 26	2.021.156.141	24.648.243.472	64.773.082.411	658.112.307.079	749.554.789.103
115128	Piutang PPh Final	2.796.703.876	96.980.243.795	378.282.313.841	1.162.963.008.754	1.641.022.270.266
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	25.825.460.559	509.790.364.741	2.139.095.215.893	9.842.044.889.339	12.316.755.930.532
115132	Piutang PPN Impor	99.832.602	-			99.832.602
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	184.258	88.660.803	23.788.117.517	209.178.394.613	233.056.337.191
115153	Piutang PBB Perkebunan	790.481.414	57.757.069.425	181.315.762.082	398.953.635.899	638.816.948.819
115154	Piutang PBB Kehutanan	803.434.219	21.221.434.795	107.399.927.581	281.680.651.807	410.905.448.402
115155	Piutang PBB Pertambangan	2.004.343.976	42.595.504.877	502.991.282.829	2.185.418.927.199	2.733.010.058.880
115159	Piutang PBB Lainnya	181.689.646	618.134.602	12.442.175.357	7.380.079.888	20.622.079.493
115165	Piutang Bea Materai	22.159.495	7.141.950			29.301.445
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	805.919.401	4.213.747.250	-	5.019.666.651
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	15.695.711.779	71.545.275.283	142.144.478.108	1.523.403.556.129	1.752.789.021.298
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.302.136.130	21.075.929.569	145.437.158.513	1.394.298.421.714	1.565.113.645.915
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM		-	9.097.379.741	127.738.726.893	136.836.106.634
	Total (Berdasarkan LP3 BA 015)	**79.007.481.577**	**1.283.554.821.143**	**4.999.069.151.606**	**31.078.030.299.812**	**37.439.661.754.138**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2020

2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Akun	Uraian	s.d 1 th	1-2 th	2-3 th	diatas 3 th	Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
116112	Piutang PPh Pasal 22 Impor	190.967.088	2.392.643.215	470.216.000	8.701.833.498	11.755.659.801
116113	Piutang PPN Impor	697.801.143	2.842.797.404	279.618.000	31.218.423.401	35.038.639.948
116114	Piutang PPnBM Impor	25.239.705	5.254.767.300	-	1.957.833.581	7.237.840.586
116116	Piutang Cukai Hasil Tembakau	135.032.295.682	-	-	37.413.089.255	172.445.384.937
116116	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	11.344.613	-	-	3.098.196.600	3.109.541.213
116116	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	5.697.343	7.000.000	18.988.000	25.355.367.470	25.387.052.813
116116	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	385.421	2.000.000	71.617.000	12.834.047.005	12.908.029.426
116117	Piutang Bunga Penagihan PPN	47.833.450	-	423.000	490.911.304	539.167.754
116118	Piutang Bea Masuk	1.526.131.599	32.109.773.179	2.034.879.500	731.673.448.385	767.344.232.662
116118	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.529.743.052	568.899.900	4.823.148.900	1.859.776.428.254	1.868.698.220.105
116118	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	12.116.220	494.334.414	2.363.165.740	367.285.514.598	370.155.130.972
116118	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	51.474.150	-	-	153.458.083.764	153.509.557.914
116118	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	406.525	-	-	16.036.999.081	16.037.405.606
116118	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	43.370	-	-	778.617.683	778.661.053
116118	Piutang Bea Masuk Antidumping	7.073.525	-	-	22.970.080.599	22.977.154.124
116118	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	120.266.565	754.730.500	-	-	874.997.065
		139.258.799.449	44.426.945.912	10.062.056.140	3.273.048.874.478	3.466.796.675.979

PIUTANG PAJAK DALUARSA
PER 31 DESEMBER 2020
(dalam ribuan rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	DALUWARSA
115121	Piutang PPh Pasal 21	107.924.125.958
115122	Piutang PPh Pasal 22	9.643.908.961
115124	Piutang PPh Pasal 23	321.636.904.458
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	209.393.701.067
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	2.244.085.667.956
115127	Piutang PPh Pasal 26	422.445.361.846
115128	Piutang PPh Final	164.384.198.075
115131	Piutang PPN	2.549.006.994.698
115141	Piutang PPnBM	41.148.473.148
115153	Piutang PBB Perkebunan	168.996.691.523
115154	Piutang PBB Kehutanan	90.746.574.353
115155	Piutang PBB Pertambangan	1.245.751.546.240
115159	Piutang PBB Lainnya	1.336.550.260
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.697.583.926.797
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.850.936.218.796
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	20.916.827.686
Jumlah		**13.145.937.671.821**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 9

PIUTANG BUKAN PAJAK

LAMPIRAN 9

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	137.884.000	(13.788.400)	124.095.600	10.000	(50)	9.950
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	289.420.257	(78.062.283)	211.357.974	1.683.822.832	(36.016.306)	1.647.806.526
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.598.331.720	(104.502.185)	5.493.829 535	917.662.114	(81.098.836)	836.563.278
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.728.170.613	(8.640 852)	1.719.529.761	642.611.134	(3.213.055)	639.398.079
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	20.075.661.473.176	(11.305.083.446.011)	8.770.578.027.165	18.032.394.466.770	(11.174.011.634.407)	6.858.382.832.363
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	341.437.918	(1.707.181)	339.730.725	22.419.702	(112.098)	22.307.604
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	25.191.052.174	(8.276.187.140)	16.914.865.034	21.571.905.607	(6.231.171.963)	15.340.733.644
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	48.425.486.636	(242.127.434)	48.183.359.202	49.671.000.228	(248.355 002)	49.422.645 226
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	193.257.127.073	(20.176.633.996)	173.080.493.077	495.738.554.707	(19.898.600.136)	475.839.954.571
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	271.664.242.306	(244.723.769.903)	26.940.472.403	322.805.448.526	(302.472.521.625)	20.332.926.901
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	53.580.982.218	(45.865.512.951)	7.715.469.267	76.080.391.177	(45.332.331.819)	30.748.059.358
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	36.821.194.851	(8.700.049.771)	28.121.145.080	112.842.918.084	(8.476.051.039)	104.366.867.045
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	23.214.704.488	(21.059.231.002)	2.155.473.486	52.967.327.256	(21.765.609.241)	31.201.718.015
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.369.570.560.904	(20.039.688.134.723)	1.329.882.426.181	13.955.051.667.234	(13.386.383.805.159)	568.667.862.075
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	778.407.152.165	(174.963.882.566)	603.443.269.599	1.101.976.973 940	(235.889.424.283)	866.087.549.657
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	631.606.367.573	(124.889.301.594)	506.717.065.979	4.756.763.770	(23.783.619)	4.732.979.951
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	43.296.792.810	(2.013.244.386)	41.283.548.424	35.693.557.113	(2.948.051.054)	32.745.506.059
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	73.281.217.982	(2.840.064.472)	70.441.153.510	4.685.410.154	(2.840.099.042)	1.845.311.112
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	40.039.817.051	(36.537.012)	40.003.280.039	7.798.020.668	(38.980.102)	7.757.040.566
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	368.789.028.861	(1.843.945.145)	366.945.083.716	360.334.178.898	(1.801.670 900)	358.532.507 998

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.998.679.633.980	(4.534.551.735.061)	464.127.898.919	4.372.368.215.572	(3.969.547.069.780)	402.821.145.792
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	47.683.146.128	(29.314.301.301)	18.368.844.827	42.815.898.311	(16.297.073.362)	26.518.824.949
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.290.785.565.446	(2.140.375.492.818)	150.410.072.628	2.467.263.638.513	(1.912.041.122.718)	555.222.515.795
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.928.000	-	2.928.000	16.274.468	-	16.274.468
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	558.674	(2.793)	555.881	138.642.677	(693.212)	137.949.465
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	253.815.612	(1.269.078)	252.546.534	14.356.730	(71.783)	14.284.947
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	3.156.132.121	(72.528.910)	3.083.603.211	13.600.207.017	(68.001.034)	13.532.205.983
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	344.307.437	(41.709.952)	302.597.485	366.556.424	(108.215.814)	258.340.610
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	-	-	-	105.349.562.172	(52.035.211.197)	53.314.350.975
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	101.057.937.896	(100.897.964.800)	159.973.096
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	126.920.264	(634.600)	126.285.664	120.593.953	(602.970)	119.990.983
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	5.006.471.688	(25.032.358)	4.981.439.330
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	15.177.969.801	(120.435.921)	15.057.533.880	9.237.728.594	(90.609.491)	9.147.119.103

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	542.701.763	(2.628.360)	540.073.403	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.951.725.197	(2.579.193.928)	372.531.269	3.008.494.175	(2.420.943.359)	587.550.816
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.660.011.687.564	(1.465.350.501.382)	194.661.186.182	1.479.311.233.181	(1.363.499.875.646)	115.811.357.535
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.366.229.950	(11.831.150)	2.354.398.800	2.400.982.331	(37.821.032)	2.363.161.299
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.832.806.942	(9.164.035)	1.823.642.907	14.299.682.033	(71.496.411)	14.228.183.622
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	10.583.334.368	-	10.583.334.368	15.304.508	-	15.304.508
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	122.189.407	(610.948)	121.578.459	535.787.205	(2.678.938)	533.108.267
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.381.596.736	(56.448.233)	1.325.148.503	551.036.448	(2.522.535)	548.513.913
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	473.800.369	(2.369.002)	471.431.367	1.169.106.175	(5.847.528)	1.163.258.647
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	5.725.000	-	5.725.000
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.017.709.463	(15.088.547)	3.002.620.916	4.355.611.591	(21.778.058)	4.333.833.533
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	248.330.625	(1.241.652)	247.088.973	51.472.962	(257.365)	51.215.597
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.768.081.825	(3.890.319.956)	2.877.761.869	5.099.650.895	(1.817.535.875)	3.282.115.020

SK No 062679 C

LAMPIRAN 9

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.849.451.625	(80.131.058)	1.769.320.567	3.359.984.703	(1.807.085.515)	1.552.899.188
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	75.843.689.292	(50.534.141.830)	25.309.547.462	36.791.887.026	(30.735.257.843)	6.056.609.183
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	475.018.933	(2.375.094)	472.643.839	5.673.118.370	(28.365.592)	5.644.752.778
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	28.192.973	(6.379.297)	21.813.676	1.735.077.436	(89.509.877)	1.645.567.559
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	622.499.086	(240.167.836)	382.331.250	1.081.085.944	(293.754.694)	787.331.250
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	12.269.760	(61.349)	12.208.411	51.677.374	(626.085)	51.051.289
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	61.689.402	(308.447)	61.380.955	256.473.838	(36.537.994)	219.935.844
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	56.119.260	(3.816.428)	52.302.852	638.672.617	(339.476.299)	299.196.318
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	260.427.796	-	260.427.796
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.598.350.134	(128.777.934)	1.469.572.200	3.141.375.084	(135.737.791)	3.005.637.293
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.734.716.395	(78.673.581)	15.656.042.814	22.500.000	(112.500)	22.387.500
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	868.048.019.601	(10.942.180.026)	857.105.839.575	695.695.615.952	(11.274.816.006)	684.420.799.946
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	133.586.149	(687.931)	132.918.218	172.603.982	(863.020)	171.740.962
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	125.076.119	(625.380)	124.450.739	26.195.023.392	(130.975.117)	26.064.048.275
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	16.034.200	(80.171)	15.954.029	-	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	177.742.924	(888.715)	176.854.209
72	107	BADAN SAR NASIONAL	30.005.138.000	(27.314.600.000)	2.690.538.000	29.416.028.000	(28.977.342.800)	438.685.200

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	419.961.782.396	(391.490.775.127)	28.471.007.269	335.340.958.705	(291.570.162.699)	43.770.796.006
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	80.704.123	(403.521)	80.300.602
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	29.626.948	(148.135)	29.478.813	89.025.650	(445.128)	88.580.522
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.613.847.101	-	1.613.847.101	1.625.251.924	-	1.625.251.924
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	27.600.000	-	27.600.000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	147.715.999	-	147.715.999	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4.655.585.332	(1.461.609.589)	3.193.975.743	2.015.161.662	(1.072.841.784)	942.319.878
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	98.026.790.564	(89.858.223.912)	8.168.566.652	110.564.190.526	(91.270.387.724)	19.293.802.802
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.702.912.323	(1.546.314.008)	156.598.315	1.649.577.340	(1.544.599.791)	104.977.549
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1.269.337.903	(6.346.690)	1.262.991.213	242.982.432	(1.214.912)	241.767.520
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	223.178.442	(1.115.893)	222.062.549
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	7.268.691.284	(36.344.456)	7.232.546.828
JUMLAH PADA K/L			**54.609.431.065.961**	**(40.750.702.680.467)**	**13.858.728.385.494**	**44.529.590.076.959**	**(33.086.823.822.958)**	**11.442.766.254.001**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	135.281.871.626.297	(100.687.013.994.261)	34.594.857.632.036	121.727.173.168.564	(88.787.782.708.214)	32.939.390.460.350
TOTAL			**189.891.302.692.258**	**(141.437.716.674.728)**	**48.453.586.017.530**	**166.256.763.245.523**	**(121.874.606.531.172)**	**44.382.156.714.351**

LAMPIRAN 10
RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
1	Provinsi Aceh	60.004.606.314	9.377.302.720	-	69.381.909.034	-
2	Kab. Aceh Barat	1.269.256.748	6.225.510.314	-	7.494.767.062	-
3	Kab. Aceh Besar	1.520.730.265	9.492.822.152	-	11.013.552.417	-
6	Kab. Aceh Tengah	2.675.167.437	14.533.459.442	-	17 208.626.879	44.258.555
7	Kab. Aceh Tenggara	992.511.736	2.700.569.546	-	3.693.081.282	-
8	Kab. Aceh Timur	7.753.815.679	11.197.695.867	-	18.951.511.546	-
9	Kab. Aceh Utara	6.453.910.665	29.826.683.898	-	36.280.594.563	-
10	Kab. Bireuen	338.232.522	11.300.993.747	-	11.639.226.269	312.057.900
11	Kab. Pidie	2.137.563.154	25.638.715.399	-	27.776.278.553	-
12	Kab. Simeulue	1.090 982.826	2.828.845.470	-	3.919.828.296	-
13	Kota Banda Aceh	2.161.147.561	7.548.469.288	-	9.709.616.849	-
14	Kota Sabang	996.161.302	1.658.903.622	-	2.655.064.924	-
15	Kota Langsa	2.557.879.032	1.058.399.898	-	3.616.278.930	-
16	Kota Lhokseumawe	15.016.320.450	2.541.490.071	-	17.557.810.521	141.678.062
17	Kab. Gayo Lues	931.001.286	5.072.835.215	-	6.003.836.501	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	1.107.090.078	4.875.188.096	-	5.982.278.174	-
19	Kab. Aceh Jaya	521.064.920	6.538.938.173	-	7.060.003.093	-
20	Kab. Nagan Raya	1.499.066.455	2.612.088.453	-	4.111.154.908	-
21	Kab. Aceh Tamiang	7.101.817 341	2.979.574.227	-	10.081.391.568	-
22	Kab. Bener Meriah	829.755.492	4.559.956.397	-	5.389.711.889	-
23	Kab. Pidie Jaya	394.509.995	6.214.270.299	-	6.608.780.294	-
24	Kota Subulussalam	415.856.495	1.670.704.800	-	2.086.561.295	-
25	Provinsi Sumatera Utara	7.670.299.630	4.765.429.932	-	12.435.729.562	-
26	Kab. Asahan	2.324.201.412	13.032.406.032	-	15.356.607.444	571.776.753
27	Kab. Dairi	1.259.884.703	8.270.129.481	-	9.530.014.184	-
28	Kab. Deli Serdang	74 972.880	14.585.070.034	-	14.660.042.914	-
29	Kab. Karo	854.172.246	12.816.409.018	-	13.670.581.264	-
30	Kab. Labuhanbatu	3.099.160.816	3.720.162.395	-	6.819.323.211	-
31	Kab. Langkat	2.887.397.959	13.516.565.708	-	16.403.963.667	483.583.771
32	Kab. Mandailing Natal	32.446.125.927	5.422.354.082	-	37.868.480.009	719.554.600
33	Kab. Nias	133.748.588	7.967.857.036	-	8.101.605.624	-
34	Kab. Simalungun	2.616.630.903	27.142.665.818	-	29.759.296.721	-
35	Kab. Tapanuli Selatan	18.059.714.470	11.079.692.283	-	29.139.406.753	-
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.250.784.185	4.699.214.722	-	5.949.998.907	-
37	Kab. Tapanuli Utara	1.788.055.462	7.757.189.686	-	9.545.245.148	-
38	Kab. Toba Samosir	864.083.632	11.347.070.532	-	12.211.154.164	-
39	Kota Binjai	64.726.971	3.862.707.285	-	3.927.434.256	-
40	Kota Medan	5.952.355.904	20.384.691.637	-	26.337.047.541	-
41	Kota Pematang Siantar	1.491.534.269	4.890.333.728	-	6.381.867.997	-
42	Kota Sibolga	393.847.844	2.454.884.981	-	2 848.732.825	-
43	Kota Tanjung Balai	5.795.027.691	819.977.237	-	6.615.004.928	-
44	Kota Tebing Tinggi	471.420.642	6.904.560.489	-	7.375.981.131	-
45	Kota Padang Sidempuan	842.720.946	2.583.348.945	-	3.426.069.891	-
46	Kab. Pakpak Bharat	1.050.567.955	8.700.501.066	-	9.751.069.021	-
47	Kab. Nias Selatan	7.419.910.521	14.511.979 993	-	21.931.890.514	-
48	Kab. Humbang Hasundutan	6.964.443.658	3.672.560.568	-	10.637.004 226	-
49	Kab. Serdang Bedagai	848.064.359	11.033.466.722	-	11.881.531.081	2.068.891.463
50	Kab. Samosir	127.644.964	7.429.080.991	-	7.556.725.955	-
51	Kab. Batu Bara	1.322.545.842	3.754.874.721	-	5.077.420.563	953.753.770
52	Kab. Padang Lawas	673.625.976	8.402.771.756	-	9.076.397.732	3.896.574.600

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.436.486.529	2.406.249.116	-	4.842.735.645	65.100
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.614.016.061	14.720.474.826	-	16 334.490.887	1.643.833
55	Kab. Labuhanbatu Utara	2.069.622.033	4.677.636.068	-	6.747.258.101	616.307.118
56	Kab. Nias Utara	64.726.971	10 466.683.495	-	10.531 410.466	-
57	Kab. Nias Barat	64.726.971	3.854.215.704	-	3.918.942.675	-
58	Kota Gunungsitoli	64.726.971	6.060.073.739	-	6.124.800.710	-
59	Provinsi Sumatera Barat	9.327.082.063	9.069.597.217	-	18.396.679.280	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	128.098.040	12.776.419.505	-	12.904.517.545	-
61	Kab. Agam	222.572.205	6.589.693.335	-	6.812.265.540	-
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.797.194.102	5.619.401.050	-	7.416.595.152	848.348.044
63	Kab. Padang Pariaman	1.108.114.524	4.957.879.517	-	6.065.994.041	-
64	Kab. Pasaman	742.450.209	6.090.325.963	-	6.832.776.172	-
65	Kab. Pesisir Selatan	1.497.177.118	12.510.693.831	-	14.007.870.949	-
66	Kab. Sijunjung	2.281.241.911	4.785.095.390	-	7.066.337.301	-
67	Kab. Solok	153.012.603	6.165.487.632	-	6.318.500.235	-
68	Kab. Tanah Datar	256.387.175	19.709.414.728	-	19.965.801.903	-
69	Kota Bukit Tinggi	713.325.255	3.441.092.049	-	4.154.417.304	-
70	Kota Padang Panjang	220.427.271	1.585.688.336	-	1.806.115.607	-
71	Kota Padang	646.597.393	15.690.636 708	-	16.337.234.101	-
72	Kota Payakumbuh	1.283.850.175	3.527.037.051	-	4.810.887.226	-
73	Kota Sawahlunto	4.311.099.931	2.821.226.921	-	7.132.326.852	-
74	Kota Solok	220.333.810	3.386.328.250	-	3.606.662.060	-
75	Kota Pariaman	465.710.406	2.460.730.252	-	2.926.440.658	-
76	Kab. Pasaman Barat	2.306.739.281	16.067.714.547	-	18.374.453.828	-
77	Kab. Dharmasraya	2.614.534.667	4.941.012.938	-	7.555.547.605	-
78	Kab. Solok Selatan	644.861.562	4.973.978.131	-	5.618.839.693	-
79	Provinsi Riau	12.466.452.695	5.443.318.114	-	17.909.770.809	-
80	Kab. Bengkalis	64.084.570.408	7.836 720.684	-	71.921.291.092	344.286.654
81	Kab. Indragiri Hilir	8.987.848.110	6.651.208.772	-	15.639.056.882	-
82	Kab. Indragiri Hulu	12.726.788.522	15.964.349.874	-	28.691.138.396	563.667.518
83	Kab. Kampar	13.146.940.320	14.745.172.245	-	27.892.112.565	-
84	Kab. Kuantan Singingi	18.645.491.839	5.207.618.911	-	23.853.110.750	-
85	Kab. Pelalawan	22.207.907.864	13.968.854.258	-	36.176.762.122	1.063.758.400
86	Kab. Rokan Hilir	12.286.721.221	13.497.997.514	-	25 784.718.735	264.774.526
87	Kab. Rokan Hulu	6.380.986 919	4.133.843.930	-	10.514 830.849	-
88	Kab. Siak	21.977.274.847	8.591.475.553	-	30.568.750.400	-
89	Kota Dumai	6.484.069.220	7.014.580.955	-	13.498.650.175	-
90	Kota Pekanbaru	7.430 113 375	11.180.498.523	-	18.610.611.898	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	12.795.867.516	8.201.105.364	-	20.996.972.880	-
92	Provinsi Jambi	4.699.006.154	6 313 066.411	-	11.012.072.565	-
93	Kab. Batanghari	1.856.727.647	8.041.018.566	-	9.897.746.213	-
94	Kab. Bungo	4.419.011.304	7.705.754.522	-	12.124.765.826	2.620.338.599
95	Kab. Kerinci	72.181.429	5.271.459.778	-	5.343.641.207	-
96	Kab. Merangin	1.118.819.947	10.274.191.144	-	11.393.011.091	-
97	Kab. Muaro Jambi	3.874.448.422	7.506.004.844	-	11.380.453.266	-
98	Kab. Sarolangun	5.217.504.154	9.499.164.549	-	14.716.668.703	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.806.274.997	5.129.176.704	-	7.935.451.701	-
100	Kab Tanjung Jabung Timur	707.468.353	2.737.866.728	-	3 445.335.081	-
101	Kab. Tebo	5.469.919.086	9.965.816.113	-	15.435.735.199	-
102	Kota Jambi	1.861.271.174	22.746.452.257	-	24.607.723.431	-

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
103	Kota Sungai Penuh	203.060.103	2.753.300.832	-	2.956.360.935	-
104	Provinsi Sumatera Selatan	33.945 908.171	6.759.230.808	-	40.705.138.979	-
105	Kab. Lahat	2.138.859.948	8.729.196.250	-	10.868.056.198	-
106	Kab. Musi Banyuasin	8.913.530.686	11.079.973.485	-	19.993.504.171	136.630.903
107	Kab. Musi Rawas	20.496.238.229	5.007.880.681	-	25.504.118.910	-
108	Kab. Muara Enim	74.999.217.236	13.016.501.956	-	88.015.719.192	-
109	Kab. Ogan Komering Ilir	3.143.426.737	4.379.785.602	-	7.523.212.339	-
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.866.301.669	5.173.973.373	-	7.040.275.042	461.210.875
111	Kota Palembang	2.681.273.928	12.010.604.981	-	14.691.878.909	-
112	Kota Prabumulih	4.210.715.140	2.631.783.112	-	6.842.498.252	-
113	Kota Pagar Alam	4.139.682.544	1.902.271 535	-	6.041.954.079	-
114	Kota Lubuk Linggau	2.987.144.683	3.522.688.441	-	6.509.833.124	-
115	Kab. Banyuasin	12.221.853.360	4.668 820.865	-	16.890.674.225	95.918.776
116	Kab. Ogan Ilir	11.140.730.444	2.528.012.513	-	13.668.742.957	279.338.800
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8.999.890.470	14.146.159.712	-	23.146.050.182	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5.877.571.996	5.132.447.000	-	11.010.018 996	-
119	Kab. Empat Lawang	4.401.279.308	3.074.863.938	-	7.476.143 246	-
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.881 630.535	5.280.389.513	-	9.162.020.048	-
121	Kab. Musi Rawas Utara	11.932.608.295	2.951 186.086	-	14.883.794.381	-
122	Provinsi Bengkulu	16.600.942.480	955.511.175	-	17.556.453.655	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	3.757.665.451	3.134.405.585	-	6.892.071.036	-
124	Kab. Bengkulu Utara	40.481.254.490	11.500.660.651	-	51.981.915.141	-
125	Kab. Rejang Lebong	3.147.186.925	6.243.724.502	-	9.390.911.427	1.804.228.229
126	Kota Bengkulu	1.721.951.047	11.495.020.867	-	13.216.971.914	-
127	Kab. Kaur	6.443.513.841	2.883.493.562	-	9.327.007.403	-
128	Kab. Seluma	4.156.949.554	4.155.886.124	-	8.312.835.678	-
129	Kab. Mukomuko	1.942.197.347	6.024.456.403	-	7.966.653.750	-
130	Kab. Lebong	5.328.598.722	5.652.141.034	-	10.980.739.756	1 154.716.200
131	Kab. Kepahiang	2.687.282.455	3.404.899.506	-	6.092.181.961	323.998.400
132	Kab. Bengkulu Tengah	14.363.851.820	4.545.228.575	-	18.909.080.395	-
133	Provinsi Lampung	5.836.728.421	5.577.863.691	-	11.414.592.112	-
134	Kab. Lampung Barat	919.944.626	2.982.880.117	-	3.902.824.743	-
135	Kab. Lampung Selatan	7.173.934.947	6.152.111.538	-	13.326.046.485	-
136	Kab. Lampung Tengah	2 672.164.255	34 045 974.870	-	36.718.139.125	-
137	Kab. Lampung Utara	1.199 141.036	28.234 737.935	-	29.433.878.971	-
138	Kab. Lampung Timur	895.570.996	12.463.944.821	-	13.359.515.817	1.411.494.400
139	Kab. Tanggamus	2.115.815.219	11.886.939.717	-	14.002.754.936	-
140	Kab. Tulang Bawang	1.601.157.775	5.151.873.477	-	6.753.031.252	-
141	Kab. Way Kanan	3.108.890.829	1.669.813.180	-	4.778.704.009	452
142	Kota Bandar Lampung	1 333.020.979	22 340.048.918	-	23.673.069.897	-
143	Kota Metro	872.897.719	2.260.692.541	-	3.133.590.260	-
144	Kab. Pesawaran	1.049.264.262	1.797.032.970	-	2.846.297.232	-
145	Kab. Pringsewu	812.433.055	2.485.284.735	-	3.297.717.790	43.010.000
146	Kab. Mesuji	1.402.372.698	5.295.175.825	-	6.697.548.523	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.482.987.613	1.561.636.878	-	3.044.624.491	-
148	Kab. Pesisir Barat	884.587.413	5.234.173.846	-	6.118.761.259	-
149	Provinsi DKI Jakarta	542.794 834.622	67 808.959.663	-	610.603.794.285	-
150	Provinsi Jawa Barat	4.948.760.861	13.109.241.270	-	18.058.002.131	-
151	Kab. Bandung	5.225 363.956	45.525.022.414	-	50.750.386.370	-
152	Kab. Bekasi	6.827.046.239	36.161.509 488	-	42.988.555.727	-

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
153	Kab. Bogor	971.179.069	28.469.709.619	-	29.440.888.688	-
154	Kab. Ciamis	288.920.400	7.217 950.688	-	7.506.871.088	-
155	Kab. Cianjur	2.867.146.514	6.994.260.548	-	9.861.407.062	-
156	Kab Cirebon	148.544.664	17.794.567 311	-	17.943.111.975	-
157	Kab. Garut	2.248.519.972	14.620.508.688	-	16.869.028.660	-
158	Kab. Indramayu	16.021.900.131	47.528.549.438	-	63.550 449.569	-
159	Kab. Karawang	14.384.769.869	38.851.746.876	-	53.236.516.745	-
160	Kab. Kuningan	304.846.560	9.810.230.425	-	10.115.076.985	-
161	Kab. Majalengka	1.321.913.626	9.134.200.564	-	10.456.114.190	-
162	Kab. Purwakarta	1.716.718.780	9.822.281.502	-	11.539.000.282	-
163	Kab. Subang	17.991.719.013	18.011.974.097	-	36.003.693.110	60
164	Kab. Sukabumi	4.386.739.357	22.479.412.847	-	26.866.152.204	-
165	Kab. Sumedang	400.570.924	3.954.100.598	-	4 354.671.522	658.829.000
166	Kab. Tasikmalaya	2.113.918.821	7.682.502.009	-	9.796.420.830	-
167	Kota Bandung	1.438.325.201	48.658.506.297	-	50.096.831.498	-
168	Kota Bekasi	654.851.209	25.966.489.195	-	26.621.340.404	-
169	Kota Bogor	76.696.344	11.287.395.995	-	11.364.092.339	-
170	Kota Cirebon	118.215.152	2.605.921.602	-	2.724.136.754	-
171	Kota Depok	115.044.516	22 135.786.729	-	22.250.831.245	-
172	Kota Sukabumi	89.479.068	3.122.485.800	-	3.211.964.868	-
173	Kota Tasikmalaya	39.666.595	2.377.071.532	-	2.416.738.127	-
174	Kota Cimahi	111.793.932	8.037.139.313	-	8.148.933.245	-
175	Kota Banjar	3.198.443.044	3.294.833.179	-	6.493.276 223	-
176	Kab. Bandung Barat	1.555.768.576	22.372.070.773	-	23.927.839.349	-
177	Kab. Pangandaran	2.807.018.698	2.592.912.385	-	5.399.931.083	-
178	Provinsi Jawa Tengah	15.797.356.658	8.173.943 778	-	23.971.300.436	-
179	Kab. Banjarnegara	1.650.299.010	13.335.432.539	-	14.985.731.549	-
180	Kab. Banyumas	3.385.014 788	32.856.778.689	-	36.241.793.477	-
181	Kab. Batang	1.067.093.806	8.955.480.430	-	10.022.574.236	319.484.765
182	Kab. Blora	13.353.781.948	6.082.566.399	-	19.436.348.347	-
183	Kab. Boyolali	1.887.264.625	13.726.466.957	-	15.613.731.582	-
184	Kab. Brebes	399.652.711	10.537.611.636	-	10.937.264.347	-
185	Kab. Cilacap	2.803.074.886	14.728 482.605	-	17.531.557.491	-
186	Kab. Demak	812.266.591	8.013.055.554	-	8.825.322.145	-
187	Kab. Grobogan	531.743.912	6.255.998.865	-	6.787.742.777	-
188	Kab. Jepara	66.389.849	8.003.350.766	-	8.069.740.615	-
189	Kab. Karanganyar	1.146.352.241	8.467.245.598	-	9.613.597.839	-
190	Kab. Kebumen	1.955.468.811	17.830.414 360	-	19.785.883.171	-
191	Kab. Kendal	2.456.300.903	8.782.664.815	-	11.238.965.718	-
192	Kab. Klaten	2.919.402.822	14.372.368.839	-	17 291.771.661	-
193	Kab. Kudus	16.656.882.923	12 969.762.701	-	29.626.645.624	1.664.001.600
194	Kab. Magelang	2.562.477.188	16.735.797.769	-	19.298.274.957	-
195	Kab. Pati	1.030.418.386	11.951.194.098	-	12.981.612.484	-
196	Kab. Pekalongan	1.021.279.425	10.621.905.505	-	11.643.184.930	426.915.809
197	Kab. Pemalang	745.883.545	8.205.798.043	-	8.951.681.588	-
198	Kab. Purbalingga	474.551.503	7.127.549.993	-	7.602.101.496	-
199	Kab. Purworejo	871.148.732	6.466.565.398	-	7.337 714.130	-
200	Kab. Rembang	3.458.807.757	5.409 204.542	-	8.868.012.299	-
201	Kab. Semarang	1.968.325.129	8.007.428.745	-	9.975.753.874	-
202	Kab. Sragen	597.200.497	10.338.835.000	-	10.936.035.497	-

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
203	Kab. Sukoharjo	1.149.177.376	10.542.306.707	-	11.691.484.083	-
204	Kab. Tegal	811.557.116	4.578.899.746	-	5.390.456.862	214.540.000
205	Kab. Temanggung	75.173.814	13.684.158.212	-	13.759 332 026	-
206	Kab. Wonogiri	1.366.755.086	8.436 470.055	-	9.803.225.141	-
207	Kab. Wonosobo	173.854.069	9.449.113.489	-	9.622.967.558	158.083.407
208	Kota Magelang	830.796.995	4.026.826.295	-	4.857.623.290	-
209	Kota Pekalongan	2.234.143.840	3.912.883.636	-	6.147.027.476	-
210	Kota Salatiga	635.423.747	3.288.072.358	-	3.923.496.105	-
211	Kota Semarang	13.675.480.175	7.872.916.561	-	21.548.396.736	-
212	Kota Surakarta	17.039.286.517	6.862.101.979	-	23.901.388.496	-
213	Kota Tegal	1.607.008.801	1.908.249.838	-	3 515.258.639	-
214	Provinsi DI Yogyakarta	2.321.127.551	1.509.286.597	40.427.344.921	44.257.759.069	-
215	Kab. Bantul	480.747.640	6.058 192.347	-	6.538.939.987	-
216	Kab. Gunung Kidul	117.028.584	12.009.367.871	-	12.126.396.455	-
217	Kab. Kulon Progo	40.116.557	4.796.368.052	-	4.836.484.609	-
218	Kab. Sleman	1.432.439.207	5.462.020.151	-	6.894.459.358	343.773.500
219	Kota Yogyakarta	7.165.704.787	12.254.513.189	-	19.420.217.976	-
220	Provinsi Jawa Timur	38.355.588.839	3.843.003.226	-	42.198.592.065	-
221	Kab. Bangkalan	2.864.553.045	13.278.265.398	-	16.142.818.443	-
222	Kab. Banyuwangi	3.482.478.003	40.674.001.806	-	44.156.479.809	-
223	Kab. Blitar	3.959.600.570	7.990.574.365	-	11.950.174.935	-
224	Kab. Bojonegoro	346.098.789.148	15.462.544.001	-	361.561.333.149	596.645.340
225	Kab. Bondowoso	4.929.628.813	16.874.392.522	-	21.804.021.335	-
226	Kab. Gresik	385.199.300	10.615.874.612	-	11.001.073.912	-
227	Kab. Jember	4.772.372.991	23.765.872.089	-	28.538.245.080	-
228	Kab. Jombang	1.857.679.759	17.424.836.415	-	19.282.516.174	-
229	Kab. Kediri	7.392.697.275	6 644.135.126	-	14.036.832.401	-
230	Kab. Lamongan	1.863.153.938	4.624.227.233	-	6.487.381.171	-
231	Kab. Lumajang	2.915.501.116	17.941.166.708	-	20.856.667.824	-
232	Kab. Madiun	3.617.313.696	17.254.364.088	-	20.871.677.784	-
233	Kab. Magetan	3.618.499.849	9.258.370.990	-	12.876.870.839	-
234	Kab. Malang	5.377.685.789	15.259.503.840	-	20.637.189.629	-
235	Kab. Mojokerto	1.143.096.639	5.531.133.282	-	6.674.229.921	970.836.000
236	Kab. Nganjuk	2.603.782.132	14 706.819.016	-	17.310.601.148	-
237	Kab. Ngawi	6.201.700.816	7.131.640.621	-	13.333.341 437	-
238	Kab. Pacitan	4.029.145.609	9.856.834.172	-	13.885.979.781	-
239	Kab. Pamekasan	3.294.429.360	10.340.128.255	-	13.634.557.615	-
240	Kab. Pasuruan	2.143.121.546	20.491.306.086	-	22.634.427.632	-
241	Kab. Ponorogo	6.110.981.595	5.645.335.259	-	11.756.316.854	-
242	Kab. Probolinggo	1.460.531.339	10.362.709 807	-	11.823.241 146	-
243	Kab. Sampang	6.482.581.408	17.594.674.191	-	24.077.255.599	-
244	Kab. Sidoarjo	1.458.368.817	47.547.891.047	-	49.006.259.864	-
245	Kab. Situbondo	4.840.846.144	6.075.716.949	-	10.916.563.093	-
246	Kab. Sumenep	2.650.397.143	13.856.675.462	-	16.507.072.605	-
247	Kab. Trenggalek	4.691.486.450	2.670.573.527	-	7.362.059.977	-
248	Kab. Tuban	9.895.807.170	5.740.658.277	-	15.636.465.447	-
249	Kab. Tulungagung	3.937.106.881	23.137.194.018	-	27.074.300 899	-
250	Kota Blitar	4.558.541.323	1.557.445.536	-	6.115.986.859	-
251	Kota Kediri	4.717.190.092	5.241.721.488	-	9.958.911.580	-
252	Kota Madiun	4.748.543.630	1.747.435.483	-	6.495.979.113	-

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
253	Kota Malang	2.509.537.242	5.458.556.070	-	7.968.093.312	-
254	Kota Mojokerto	3.152.056.737	2.853.976.589	-	6.006.033.326	-
255	Kota Pasuruan	3.143.964.785	5.948.212.079	-	9.092.176.864	-
256	Kota Probolinggo	4.279.317.643	4.442.374.582	-	8.721.692.225	-
257	Kota Surabaya	22.713.118 391	52 980.224.377	-	75.693.342.768	-
258	Kota Batu	2.417.230.890	2.112.087.155	-	4.529.318.045	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	26.106.217.549	8.739.166.465	-	34.845.384.014	-
260	Kab. Bengkayang	2.768.337.937	3.999.142.370	-	6.767.480.307	844.689.910
261	Kab. Landak	3.719.646.269	13.603.567.580	-	17.323.213.849	-
262	Kab. Kapuas Hulu	12.008.062.477	10.812.864.858	-	22.820.927.335	-
263	Kab. Ketapang	41.891.360.973	9.373 320.243	-	51.264 681.216	-
264	Kab. Mempawah	1.804.022.925	4.972.505.854	-	6.776.528.779	-
265	Kab. Sambas	6.271.473.684	5.901.083.252	-	12.172.556.936	578.100.026
266	Kab. Sanggau	12.939.543.514	15.820.577.064	-	28.760.120.578	-
267	Kab. Sintang	8.867.726.336	7.120.600.127	-	15.988.326.463	-
268	Kota Pontianak	233.789.858	7.963.989.130	-	8.197.778.988	-
269	Kota Singkawang	445.850.681	4.739.880.666	-	5.185.731.347	-
270	Kab. Sekadau	961.813.533	1.792.000.759	-	2.753 814.292	-
271	Kab. Melawi	16.479.976.288	5.991.087.602	-	22.471.063.890	797.548
272	Kab. Kayong Utara	3.849.182.443	2.618.535.902	-	6.467.718.345	-
273	Kab. Kubu Raya	11.427.905.816	11.528.878.147	-	22.956.783.963	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	61.674.391.197	5.223.404.452	-	66.897.795.649	-
275	Kab. Barito Selatan	10.685.830.777	1.904.717.684	-	12.590.548.461	128.916.000
276	Kab. Barito Utara	56.564.167.482	2.544.807.200	-	59.108.974.682	-
277	Kab. Kapuas	4.996.352.878	15.685.275.772	-	20.681.628.650	-
278	Kab. Kotawaringin Barat	11.217.542.704	7.482.023.751	-	18.699.566.455	765.299.492
279	Kab. Kotawaringin Timur	38.859.944.906	21.286.364.178	-	60.146.309.084	248.020.523
280	Kota Palangkaraya	504.968 950	4.197 154.531	-	4.702.123.481	-
281	Kab. Katingan	10.758.882.907	5.917.711.038	-	16.676.593.945	-
282	Kab. Seruyan	16.118.416.048	14.412.543.800	-	30.530.959.848	710.619.239
283	Kab. Sukamara	4.257.243.979	2.529.033.834	-	6.786.277.813	-
284	Kab. Lamandau	8.772.579.234	5.086.441.586	-	13.859.020.820	-
285	Kab. Gunung Mas	7.525.518.402	11.375.028.126	-	18.900.546 528	-
286	Kab. Pulang Pisau	2.583.934.834	2.308.447.407	-	4.892.382.241	-
287	Kab. Murung Raya	73.918.275.999	8.720.285.434	-	82.638.561.433	-
288	Kab. Barito Timur	14.239.461.520	4.220.442.260	-	18.459.903.780	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	224.342.552.488	6.709.710.426	-	231.052.262.914	-
290	Kab. Banjar	97.076.856.287	8.184.488.956	-	105.261.345.243	189.320.000
291	Kab. Barito Kuala	26.725.530.811	4.240.335.778	-	30.965.866.589	-
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	49.769.108.658	11.689.859.327	-	61.458.967.985	320 264.800
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	33.649.687.771	16.276 484.666	-	49.926.172.437	3
294	Kab. Hulu Sungai Utara	36 355.975.834	12.854.553.591	-	49.210.529.425	-
295	Kab. Kotabaru	179.717.093.534	14.572.321.600	-	194.289.415.134	-
296	Kab. Tabalong	128.767.897.235	13.949.764.673	-	142.717.661.908	-
297	Kab. Tanah Laut	74.986.673.320	20.689.772 171	-	95 676.445.491	108.452.000
298	Kab. Tapin	50.960.590.148	9.959.606.618	-	60.920.196.766	83.746.573
299	Kota Banjarbaru	42.916.309.006	2.884.913.087	-	45.801 222.093	-
300	Kota Banjarmasin	42.749.394.369	6.841.151.363	-	49.590.545.732	-
301	Kab. Balangan	160.285.049.752	10.062.708.821	-	170.347.758.573	-
302	Kab. Tanah Bumbu	58.574.405.527	8.191.756.409	-	66.766.161.936	-

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
303	Provinsi Kalimantan Timur	17.439.531.619	9.290.709 389	-	26.730.241.008	-
304	Kab. Berau	151.505.178.044	19.713.944.154	-	171.219.122.198	-
305	Kab. Kutai Kartanegara	222.129.002.156	53.132.378.720	-	275.261.380.876	-
306	Kab. Kutai Barat	117.012.621.448	8.211 637.171	-	125.224.258.619	-
307	Kab. Kutai Timur	431.334.851.997	6.325.255.081	-	437.660.107.078	244.722.140
308	Kab. Paser	97.894.673.155	8 205.956.374	-	106.100.629.529	-
309	Kota Balikpapan	75.335.762.994	18.552.425.121	-	93.888.188.115	-
310	Kota Bontang	66.864.023.064	2.721.496.132	-	69.585.519.196	
311	Kota Samarinda	111.765.120.880	9.071.021.869	-	120.836.142.749	-
312	Kab. Penajam Paser Utara	55.580.518.069	4.440.517.455	-	60.021.035.524	-
313	Kab. Mahakam Ulu	77.204.956 612	4 858.450.494	-	82.063.407.106	
314	Provinsi Sulawesi Utara	2.529.582.361	5.684.419.062	-	8.214.001.423	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	4.690.077.970	7.799.933.538	-	12.490.011.508	
316	Kab. Minahasa	9.677.800	11.849.517.963	-	11.859 195.763	-
317	Kab. Sangihe	33.148.495	8.271.546.580	-	8.304.695.075	-
318	Kota Bitung	1.014.498.837	4.012.005.953	-	5.026.504.790	-
319	Kota Manado	3.247.851.503	7 756.937.519	-	11.004.789.022	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	146.354.182	2.312 472.540	-	2.458.826.722	51.301.558
321	Kab. Minahasa Selatan	37.372.231	7.811.834.436	-	7.849.206.667	82.723.166
322	Kota Tomohon	134.735.430	1.388.448.166	-	1.523.183.596	
323	Kab. Minahasa Utara	22.400.551.777	3.586.876.299	-	25.987.428.076	
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	28.745.685	18.306.266.011	-	18.335.011.696	
325	Kota Kotamobagu	12.892.165	2.403.519.610	-	2.416.411.775	
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	427.298.113	4.129 979.344	-	4.557.277.457	
327	Kab. Minahasa Tenggara	91.939.390	11.202.753.078	-	11.294.692.468	
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3 656.768.250	3.109.721.586	-	6.766.489.836	
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.432.239.501	2.387.118.849	-	3.819.358.350	
330	Provinsi Sulawesi Tengah	63.844.806.404	3.895.437.559	-	67.740.243.963	
331	Kab. Banggai	114.821.374.792	563.679.849	-	115.385.054.641	
332	Kab. Banggai Kepulauan	7.249.544.053	5.863.370.403	-	13.112.914.456	232.517.371
333	Kab. Buol	8.283.579.230	5.147.565.785	-	13.431.145.015	
334	Kab. Tolitoli	10.869.341.898	8.167.028.036	-	19.036.369.934	
335	Kab. Donggala	14 619.420.752	13.522.310.220	-	28.141.730.972	258.256.964
336	Kab. Morowali	11.232.594.030	1.271.532.329	-	12.504.126.359	645.892.251
337	Kab. Poso	10.673 913.253	15.132.492.459	-	25.806.405.712	
338	Kota Palu	8.902.400.241	9.355.526.988	-	18.257.927.229	
339	Kab. Parigi Moutong	20.966.102.692	14.023.534.538	-	34.989.637.230	1.072.872.500
340	Kab. Tojo Una Una	17.742.038.236	4.406.007.947	-	22.148.046.183	
341	Kab. Sigi	8.776.603.946	7.871.835.591	-	16.648.439.537	31.803.855
342	Kab. Banggai Laut	7.218.159.730	2.050.793.619	-	9.268.953.349	
343	Kab. Morowali Utara	27.786.762.701	242.933.505	-	28.029.696.206	
344	Provinsi Sulawesi Selatan	10.650.353.056	3 439.415.467	-	14.089.768.523	
345	Kab. Bantaeng	700.749.575	1.829.873.100	-	2.530.622.675	
346	Kab. Barru	795.496.706	8.456.708.338	-	9.252.205.044	
347	Kab. Bone	6.823.178.419	7.194.788.587	-	14.017.967.006	
348	Kab. Bulukumba	12.189.403.625	831.491.700	-	13.020.895.325	
349	Kab. Enrekang	880.997.038	1.887.466 729	-	2.768.463.767	
350	Kab. Gowa	1.465.607.586	7.955 651.949	-	9.421.259.535	641.145.452
351	Kab. Jeneponto	706.528.812	2.678.844.836	-	3.385.373.648	137.886.010
352	Kab. Luwu	1.625.366.954	4.844.643.396	-	6.470.010.350	

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
353	Kab. Luwu Utara	2.494.037.753	3.662 308.658	-	6.156.346.411	400
354	Kab. Maros	4.973.898.276	7.988.257.172	-	12.962.155.448	
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	844.749.321	8.614.329.321	-	9.459.078.642	
356	Kota Palopo	1.155.401.212	2.582.978.155	-	3 738.379.367	
357	Kab. Luwu Timur	12.340.556.445	12.006.320.007	-	24.346.876.452	
358	Kab. Pinrang	695.053.678	4.649.064.538	-	5.344.118.216	
359	Kab. Sinjai	695.053.678	4.681.460.245	-	5.376.513.923	
360	Kab. Kepulauan Selayar	1.733.212.707	5.033.553.900	-	6.766.766.607	
361	Kab. Sidenreng Rappang	1.399.728.699	12.071.366.665	-	13.471.095.364	
362	Kab. Soppeng	825.364.229	13.444.476.979	-	14.269.841.208	
363	Kab. Takalar	705.982.066	1.372.479.782	-	2.078.461.848	137.731.600
364	Kab. Tana Toraja	1.275 760.397	18.706 833.403	-	19.982.593.800	
365	Kab. Wajo	26.981.185.659	8.381.296.679	-	35.362.482.338	
366	Kota Parepare	1.516.395.143	2.549.089.291	-	4.065.484.434	
367	Kota Makassar	1.947.500.915	5.534.549.516	-	7.482.050.431	
368	Kab. Toraja Utara	2.906.865.503	17.047.423.091	-	19.954.288.594	
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	7.344.916.646	4.909.626.028	-	12.254.542.674	
370	Kab. Buton	325.319.813	3.993.695.779	-	4.319.015.592	
371	Kab. Konawe	5.901.373.794	2.402.556.037	-	8.303.929.831	
372	Kab. Kolaka	13.409.082.916	4.838 957.120	-	18.248.040.036	22.024.900
373	Kab. Muna	296.879.440	1.161.181.884	-	1.458.061.324	
374	Kota Kendari	411.724	2.127.970.820	-	2.128.382.544	
375	Kota Bau-bau	308.977.818	4.789.087.536	-	5.098.065.354	
376	Kab. Konawe Selatan	328.783.759	6.804.868.378	-	7.133.652.137	
377	Kab. Bombana	5.866.771.933	7.295.065.814	-	13.161.837.747	
378	Kab. Wakatobi	9.205.968	3.986.471.610	-	3.995.677.578	
379	Kab. Kolaka Utara	4.756.554.468	2.249.120.130	-	7.005.674.598	
380	Kab. Konawe Utara	25.829.306.070	2.427 174.764	-	28.256.480.834	
381	Kab. Buton Utara	35.157.523	3.321.840.937	-	3.356.998.460	
382	Kab. Konawe Kepulauan	158.351.815	2.088.987.325	-	2.247.339.140	
383	Kab. Kolaka Timur	70.878.391	2.355.967.793	-	2.426.846.184	10.953.774
384	Kab. Muna Barat	35.967.195	1.160.045.767	-	1.196.012.962	
385	Kab. Buton Tengah	91.076.935	3.103.992.364	-	3.195.069 299	
386	Kab. Buton Selatan	9.504.601	1.213.857.317	-	1.223.361.918	
387	Provinsi Bali	378.448.338	5.105.118.034	-	5.483.566.372	
388	Kab. Badung	297.926.792	4.705.443.538	-	5.003.370.330	
389	Kab. Bangli	1.593.720	6.900.296.389	-	6.901.890.109	
390	Kab. Buleleng	65 589.184	15.052.398.172	-	15.117.987.356	
391	Kab. Gianyar	2 449.200	13.884.445.129	-	13.886.894.329	
392	Kab. Jembrana	401.211.104	6.552.485.529	-	6.953.696.633	
393	Kab. Karangasem	23.825.658	7.774.537.745	-	7.798.363.403	
394	Kab. Klungkung	-	3.694 667.179	-	3.694.667.179	
395	Kab. Tabanan	70.790.963	6.651.796.552	-	6.722.587.515	
396	Kota Denpasar	2.178.676.384	5.750.187.319	-	7.928.863.703	
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	23.926.845.827	2.878.822.787	-	26.805.668.614	
398	Kab. Bima	9.472.940.725	3.062.757.381	-	12.535.698.106	
399	Kab. Dompu	7.209.357.181	1.178.055.572	-	8.387.412.753	
400	Kab. Lombok Barat	4.885.361.305	6.812.196.042	-	11.697.557.347	67.948.006
401	Kab. Lombok Tengah	7.845.433.648	5.406.305.071	-	13.251.738.719	
402	Kab. Lombok Timur	4.122.500.614	9.346.222.965	-	13.468.723.579	

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
403	Kab. Sumbawa	12.445.110.552	12.320.336.627	-	24.765.447.179	
404	Kota Mataram	9.340.774.591	8.585.453.581	-	17.926.228.172	
405	Kota Bima	6.487.408.635	2.313.634.248	-	8 801.042.883	
406	Kab. Sumbawa Barat	66.398.464.409	3.794.664.552	-	70.193 128.961	
407	Kab. Lombok Utara	6.230.291.545	6.565.918.362	-	12.796.209.907	138.629.900
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.785.132.841	3.940.862.506	-	6.725.995.347	
409	Kab. Alor	195.330.178	7.424.546.509	-	7.619.876.687	
410	Kab. Belu	2.360.729.038	4.850.900.693	-	7.211.629.731	
411	Kab. Ende	211.459.002	19.493.299 663	-	19.704.758.665	1.389.295.956
412	Kab. Flores Timur	322.685.232	4.572.882.717	-	4.895.567.949	
413	Kab. Kupang	1.098.210.478	22.771.495.666	-	23.869.706.144	
414	Kab. Lembata	4.240.054	1.187.970.721	-	1.192.210.775	
415	Kab. Manggarai	175.773.510	6.817.625.827	-	6.993.399.337	
416	Kab. Ngada	249.794.240	1.504.376.591	-	1.754.170.831	
417	Kab. Sikka	194.996.185	8.332.137.297	-	8.527.133.482	
418	Kab. Sumba Barat	363.069.913	8.060.678.851	-	8.423.748.764	
419	Kab. Sumba Timur	1.371.064.200	776.773.133	-	2.147.837.333	20.135.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	845.344.574	23.476.794.030	-	24.322.138.604	
421	Kab. Timor Tengah Utara	2.154.492.677	9.219.117.527	-	11.373.610.204	1.088.250.755
422	Kota Kupang	352.065.852	1.397.408.594	-	1.749.474.446	
423	Kab. Rote Ndao	4.240.054	6.027.507.403	-	6.031.747.457	
424	Kab. Manggarai Barat	4.240.054	11.992.521.274	-	11.996.761.328	
425	Kab. Nagekeo	8.235.631	8.068.862.147	-	8.077.097.778	
426	Kab. Sumba Barat Daya	546.367.247	15.493.719.214	-	16.040.086.461	
427	Kab. Sumba Tengah	432.401.914	6.331.368.671	-	6.763.770.585	
428	Kab. Manggarai Timur	126.001.403	12 624.222.991	-	12.750.224.394	
429	Kab. Sabu Raijua	74.096.392	9.357.241.536	-	9.431.337.928	
430	Kab. Malaka	4.240.054	1.568.145.491	-	1.572.385.545	
431	Provinsi Maluku	3.892.641.758	7.312.810.974	-	11.205.452.732	
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.253.641.300	3.444.487.932	-	4.698.129.232	
433	Kab. Maluku Tengah	4.012.379.276	9.288.876.072	-	13.301.255.348	
434	Kab. Maluku Tenggara	230.429.111	2 370.658.459	-	2.601.087.570	
435	Kab. Buru	3.447.573.732	271.313 547	-	3 718.887.279	
436	Kota Ambon	707.032.821	15.511.675.475	-	16.218.708.296	
437	Kab. Seram Bagian Barat	6.897.366.330	14.574.801.795	-	21.472.168.125	
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	2.062.495.900	-	2.062.495.900	
439	Kab. Kepulauan Aru	1.828.482.338	6.200.944.034	-	8.029.426.372	
440	Kota Tual	-	3.278.214.874	-	3.278.214.874	
441	Kab. Maluku Barat Daya	616.458.361	11.982.026.310	-	12.598.484.671	
442	Kab. Buru Selatan	3.939.307.654	2.081.688.322	-	6.020.995.976	
443	Provinsi Papua	138.509.570.462	6.100.441.121	-	144.610.011.583	
444	Kab. Biak Numfor	14.269.193.970	6.076.329.349	-	20.345.523.319	
445	Kab. Jayapura	14.350.665.250	3.625.540.296	-	17.976.205.546	
446	Kab. Jayawijaya	13.498.192.874	10.283.403.651	-	23.781.596.525	
447	Kab. Merauke	17.056.592.591	9.468.003.476	-	26.524.596.067	
448	Kab. Mimika	249.050.151.381	7.188.150.047	-	256.238.301.428	
449	Kab. Nabire	7.003.061.329	3.926.385.366	-	10.929.446.695	
450	Kab. Paniai	17.094.043.272	5.447.040.887	-	22.541.084.159	
451	Kab. Puncak Jaya	18.296.448.373	23.061.196	-	18.319.509.569	
452	Kab. Kepulauan Yapen	6.943 796.015	2.578.428.933	-	9.522.224.948	

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
453	Kota Jayapura	6.614.775.524	1.186.829.898	-	7.801.605 422	
454	Kab. Sarmi	21.923.324.411	2.459.561.256	-	24.382.885.667	
455	Kab. Keerom	11.954.688.691	21.913.490.642	-	33.868.179.333	
456	Kab. Yahukimo	19.501.392.678	4.879 818.261	-	24 381.210.939	
457	Kab. Pegunungan Bintang	8.004.933.160	6.318.131.480	-	14.323.064.640	
458	Kab. Tolikara	7.856.957.200	12.255.396.816	-	20.112.354.016	
459	Kab. Boven Digoel	6.907.601.623	8.617.071.530	-	15.524.673.153	
460	Kab. Mappi	5.102.976.804	13.244.387.117	-	18.347.363.921	
461	Kab. Asmat	6.765.990.771	17.547.332 817	-	24.313.323.588	
462	Kab. Waropen	12.912.772.985	169.492.200	-	13.082.265.185	
463	Kab. Supiori	5.918.966.338	5.432.193.700	-	11.351.160.038	
464	Kab. Mamberamo Raya	47.009.543.215	1.373.198.000	-	48.382.741.215	
465	Kab. Mamberamo Tengah	5.750.596.031	10.643.997.900	-	16.394.593.931	
466	Kab. Yalimo	5.784.730.458	9.215.838.440	-	15.000.568.898	
467	Kab. Lanny Jaya	5.749.347.534	11.216.065.120	-	16.965.412.654	
468	Kab. Nduga	5.765.204.619	4.165.747.740	-	9.930.952.359	
469	Kab. Dogiyai	5.883.801.522	166.869.846	-	6.050.671.368	
470	Kab. Puncak	5.966.729.175	588.118.680	-	6.554.847.855	
471	Kab Intan Jaya	7.686 227.767	2.384.701.278	-	10.070.929.045	
472	Kab. Deiyai	5.706.607.625	81.675.700	-	5.788.283.325	
473	Provinsi Maluku Utara	27.442.946.553	1.236.134.529	-	28.679.081.082	
474	Kab. Halmahera Tengah	10.609.127.958	516.583.550	-	11.125.711.508	
475	Kota Ternate	1.884.916.965	3.607.695.297	-	5.492.612.262	
476	Kab. Halmahera Barat	2.896.078.751	6.752.509.500	-	9.648.588.251	50.000.000
477	Kab. Halmahera Timur	64.163.548.888	1.165.585.421	-	65.329.134.309	
478	Kab. Halmahera Selatan	3.504 155.506	3.386.755.299	-	6.890.910.805	
479	Kab. Halmahera Utara	49.469.120.190	6.548.029.768	-	56.017.149.958	1.322.825.987
480	Kab. Kepulauan Sula	28.326.047.801	6.270.476.486	-	34.596 524.287	1.082.149.600
481	Kota Tidore Kepulauan	3.550.134.642	811.318.129	-	4.361.452.771	184.073.482
482	Kab. Pulau Morotai	2.136.498.085	300.379.626	-	2.436.877.711	
483	Kab. Pulau Taliabu	2.742.356.736	1 858.028.200	-	4.600.384.936	
484	Provinsi Banten	558.326.394	5.988.176.381	-	6.546.502.775	
485	Kab. Lebak	5.559.279.979	29.900.821.538	-	35.460.101.517	
486	Kab. Pandeglang	1.439.801.950	38.982.129.164	-	40.421.931.114	
487	Kab. Serang	1.261 354.722	12.981.014.373	-	14.242.369.095	
488	Kab. Tangerang	1.995.325.682	28.116.250.117	-	30.111.575.799	
489	Kota Cilegon	209.858.254	3.408.587.216	-	3.618.445.470	
490	Kota Tangerang	2.662.765.922	2.446.385.126	-	5.109.151.048	
491	Kota Serang	70.728.584	2.834.895.367	-	2.905.623.951	
492	Kota Tangerang Selatan	72.733.673	16.091.292 597	-	16.164.026.270	
493	Provinsi Bangka Belitung	17.767.267.027	3.933 941.238	-	21.701.208.265	
494	Kab. Bangka	8.026.417 963	2.484.311.960	-	10.510.729.923	
495	Kab. Belitung	15.068.955.411	3.178.369.640	-	18.247.325.051	1.382.421.630
496	Kota Pangkal Pinang	3.048.438.650	2.485.802.339	-	5 534.240.989	
497	Kab. Bangka Selatan	26.594.972.749	8.520.600.481	-	35.115.573.230	
498	Kab. Bangka Tengah	10 316.249.277	2.846.857.558	-	13.163.106.835	
499	Kab. Bangka Barat	28.827.464.717	2.817.444.616	-	31.644.909.333	
500	Kab. Belitung Timur	9 342.691.251	4.158.916.474	-	13 501.607.725	
501	Provinsi Gorontalo	5.508.118.645	4.747.597 560	-	10.255.716.205	
502	Kab. Boalemo	800.658.989	3.010.015.273	-	3.810.674.262	

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
503	Kab. Gorontalo	1.457.610.125	9.130.834.617	-	10.588.444.742	
504	Kota Gorontalo	418.883.567	2.720.838.625	-	3.139.722.192	
505	Kab. Pohuwato	4.165.905.389	9 076.482.128	-	13.242.387.517	
506	Kab. Bone Bolango	2.521.547 047	9.444.983 533	-	11.966.530.580	
507	Kab. Gorontalo Utara	2.066 702.219	6.672.005.390	-	8.738.707.609	
508	Provinsi Kepulauan Riau	10.018.439.141	1.621.321.892	-	11.639.761.033	
509	Kab. Natuna	1.118.666.057	18.598.464.741	-	19.717.130.798	
510	Kab. Kepulauan Anambas	3.033.805.652	2.677.299.064	-	5.711.104.716	
511	Kab. Karimun	1.819.347.291	5.175.058.021	-	6.994.405.312	855.139.140
512	Kota Batam	4.968 068.119	17.009.863.101	-	21.977.931.220	
513	Kota Tanjung Pinang	747.187.122	5.078 276.021	-	5.825.463.143	
514	Kab. Lingga	2.266.861.138	3.021.597.871	-	5.288.459.009	473.036.975
515	Kab. Bintan	1.050.879.019	5.706.382.680	-	6.757.261.699	
516	Provinsi Papua Barat	171.788.205.011	9.469.944.856	-	181.258.149.867	
517	Kab. Fak Fak	7.289.883.917	6.699.881.836	-	13.989.765.753	
518	Kab. Manokwari	14.059.314.801	9.531.597.462	-	23.590.912.263	1.751.974.108
519	Kab. Sorong	12.352.798.592	3.621.390.205	-	15.974.188.797	
520	Kota Sorong	5.054.512.028	2.705.364.820	-	7.759.876.848	
521	Kab. Raja Ampat	12.450.385.894	484.790.300	-	12.935.176.194	
522	Kab. Sorong Selatan	7.031.343.892	500.212.400	-	7.531.556.292	
523	Kab. Teluk Bintuni	36.808.364.639	12.574.199.800	-	49.382.564.439	
524	Kab. Teluk Wondama	7.394.808.694	3.347.523.758	-	10.742.332.452	
525	Kab. Kaimana	7.498.247.129	5.296.203.058	-	12.794.450.187	
526	Kab. Maybrat	3.070 940.710	59.102.400	-	3.130.043.110	
527	Kab. Tambrauw	4.554.914.143	1.637.621.250	-	6.192.535 393	
528	Kab Manokwari Selatan	2.530.746.796	2.632.861.000	-	5.163 607.796	
529	Kab. Pegunungan Arfak	1.302.461.012	35.695.427.400	-	36.997.888.412	
530	Provinsi Sulawesi Barat	1.907.402.401	3.232.874.978	-	5.140.277.379	
531	Kab. Majene	79.621.672	1.501.963.644	-	1.581.585.316	
532	Kab. Mamuju	850.574.767	2.621.739.036	-	3.472.313.803	
533	Kab. Polewali Mandar	205.477.624	5.757.383.283	-	5.962.860.907	72.179.109
534	Kab. Mamasa	1.670.889.894	1.351.300.731	-	3.022.190.625	
535	Kab. Pasangkayu	1.514.671.184	6.470.587.686	-	7.985.258.870	
536	Kab. Mamuju Tengah	862.080.842	2.091.614.731	-	2.953.695 573	
537	Provinsi Kalimantan Utara	93.056.357.753	2.326.564.563	-	95.382.922.316	
538	Kab. Bulungan	53.542.629.109	4.153.777.106	-	57.696.406.215	
539	Kab. Malinau	19.043.259.691	5.497.757.055	-	24.541.016.746	
540	Kab. Nunukan	64.822.487.543	2.776.164.838	-	67.598.652.381	
541	Kota Tarakan	10.149.983.685	8.426 343.637	-	18.576.327.322	
542	Kab. Tana Tidung	13.307.672.846	3.270.228.460	-	16.577 901.306	329 566.688
	Jumlah	**7.652.864.361.849**	**4.602.812.676.254**	**40.427.344.921**	**12.296.104.383.024**	**44.334.660.173**

LAMPIRAN 11
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2020

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2020	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2020
				Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2019	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2020			
1	2		3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan								
1	PT. Bank Annco	07 Juni 2007	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	62.756.907.617,78	235.661.042,00	72.525.525.999,85	140.797.811.123,91	137.555.202.375,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	251 055.008 000,00	183.555.008.000,00	54 964.950.344,21	198.817.263,00	238.718.775.607,21	106.107.201 031,41	12.336.232.392,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	106.137.939.050,52	614 405.687,00	692.480.401.236,52	136.297 409.195,04	3.173.701.911 615,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	08 Maret 2007	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	8.985.293.214,00	41.689 430,00	34.125.171.481,19	172.736 782.621,00	167.676.995.454,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	08 Maret 2007	201.812 614.291,48	46 872.202.071,00	52.288.033.866,83	81.818.182,00	99 242.054.119,83	157.450.001.984,00	102.570.560.171,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	08 Maret 2007	338.763.209.866,98	31.186.000.000,00	10.008.577.476,80	-	41.194.577.476,00	6.760.484.884,70	295.568.632.390,98
7	PT. Bank Pasific	08 Maret 2007	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	286 668 571 230,96	26.866.753.564,00	645 558 401.062,76	1.638.279.007.000,00	1 487.808 033.776,87
8	PT Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	378.668.685.137,15	1.067.782.446,00	1.237.123.684.976,80	1 015.640 110.944,00	450.225.830.395,73
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	97.522.520.581,79	3.218.885.017,00	200.044.124.979,68	181.953.841.474,06	699.354.898 326,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	28.025.558.872,00	-	34.995.693.472,00	114.546.589 155,04	75.110.303.658,87
11	PT Astria Raya Bank	31 Maret 2009	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	85.643.609.406,42	4 375.454 608,00	221.968.667.614,42	56.733 811.676,21	356.949.593 084,35
12	PT. Bank Pinaesaan	05 Maret 2008	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	49 692.743.342,52	59.470.986,00	68.208.894.428,63	92.182.282.117,24	612.875 596.490,95
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	210.984.000.000,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,00	-	210.993.999.999,67	81.323.394.608**	0,00
14	PT Bank Industri	Sudah BAST	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	84.131.868.577,00	490.368 271,00	363.746.238.848,00	238.376.301.422,00	147.723.992 478,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Buber Sebelum BAST	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	-	2.500.000.000,00	0,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan		**11.888.938.781.558,30**	**2.730.645.774.151,38**	**1.395.529.328.655,18**	**37.251.106.486,00**	**4.163.426.209.302,56**	**4.857.861.644.628,61**	**7.725.512.572.255,38**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2020

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih Atas Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2020	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan Keuangan Cut Off)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2020
				Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2019	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2020			
1	2		3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan								
1	PT Bank Asiatic		886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	84.513.884.990,00	21.802.908,00	89.535.687.898,00		797.043.536.545,83
2	PT Bank Dagang Bali		1.331.516.911.477,24	-	498.850.579.608,00	2.114.792.497,00	498.965.372.105,00		832.551.539.372,24
3	PT Bank Global Internasional		804.234.270.395,51	-	329.791.455.812,00	914.850.000,00	330.706.305.812,00		473.527.964.583,51
4	PT Bank Ratu		71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00		0,00
5	PT Bank Prasidha Utama		227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	16.898.914.545,52	-	20.898.914.545,52		206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan		**3.321.282.950.812,58**	**9.000.000.000,00**	**898.872.820.307,52**	**3.051.445.405,00**	**1.011.924.265.712,52**		**2.309.358.685.100,06**
	TOTAL SALDO PIUTANG BDL		**15.210.221.732.370,90**	**TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI**		**40.302.551.901,00**	**5.175.350.475.816,88**		**10.034.871.257.355,40**

LAMPIRAN 12
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN DAN EKS PT PPA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)
JUMLAH	24 339 424 730 007	30.428 895 624 388	28 671 039 889 525	83.439.360.043.921	10.768 083.677.516	72.671.187 612.695

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *
   a. Aset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	828 533 217	11.686 465 168 451	272 918 386	3 952 860 630 067	555 614 831	7 723 604 538 384
Dollar Australia (AUD)	7 191	77 455 916	7 191	77 455 916	-	-
Dollar Hongkong (HKD)	12 807 644	23 301 458 707	12 807 644	23 301 458 707		
Dollar Selandia Baru (NZD)	1 785 135	18 058 845 160	1 785 135	18 058 845 160		
Dollar Singapura (SGD)	412 424	4 389 878 880	412 424	4 389 878 880	-	
Euro (EUR)	12 917 001	223 853 249 754	90 023	23 998 877 623	12 828 978	199 954 572 131
Gulden Belanda (NLG)	6 393	244 169 498	6 393	244 169 498		
Poundsterling (GBP)	349.627	6 672 794 816	83 503	1 818 049 116	266 124	4 856 745 702
Rupiah (IDR)	9 871 894 028 168	9 871 894 028.168	2 138 131 908 361	2 138 131 908 361	7 735 862 119 808	7 735 862 119 808
Yen Jepang (JPY)	5 659.395 894	772 345 983 717	43 454 035	53 692 978 242	5 615 941 859	718.652 885 475
Jumlah				6 224 471 851 569		16.382.930.961.499

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	28 356 585	399 969 771 374		5 784 743 313	28 356 585	394 185 028 061
Dollar Australia (AUD)						
Dollar Hongkong (HKD)						
Dollar Selandia Baru (NZD)						
Dollar Singapura (SGD)						
Euro (EUR)						
Gulden Belanda (NLG)						
Poundsterling (GBP)						
Rupiah (IDR)	1 331 963 391 763	1 331 963 391 763	101 035 535 581	101 035 535 581	1 230 927 856 182	1 230 927 856 182
Yen Jepang (JPY)						
Jumlah						1.625.112.884.243

'Aset kredit Non ATK telah memperhitungkan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	856 888 802	12 096 434 939 825	272 918 386	3 968 645 373 381	583 971 415	8 117 789 566 445
Dollar Australia (AUD)	7 191	77 455 916	7 191	77 455 916		
Dollar Hongkong (HKD)	12 807 644	23 301 458 707	12 807 644	23 301 458 707		
Dollar Selandia Baru (NZD)	1 785 135	18 058 645 160	1 785 135	18 058 645 160		
Dollar Singapura (SGD)	412 424	4 389 878 880	412 424	4 389 878 880		
Euro (EUR)	12 917 901	223 853 249 754	90 023	23 838 677 623	12 826 878	199 954 572 131
Gulden Belanda (NLG)	6 393	244 169 498	6 393	244 169 498		
Poundsterling (GBP)	349 627	6 672 794 818	83 503	1 816 049 116	266 124	4 856 745 702
Rupiah (IDR)	11 203 857 419 932	11 203 957 419 932	2 237 187 443 942	2 237 187 443 942	8 966 769 975 990	8 966 769 975 990
Yen Jepang (JPY)	5 859 395 894	772 345 953 717	43 454 035	53 692 878 242	5 815 941 859	718 652 985 475
Jumlah		24.339.424.738.807	2.237.488.688.676	6 331 380 884 265		18 009 843 845 742

SK No 062673 C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

2. **Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 30 Desember 2020 (Unaudited)	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	KPKNL
Dewanto Kurniawan	Bank Deka				KPKNL Jakarta I
Setiawan Harjono, Hendarawan Harjono	Bank Aspac (BBKU)	3 579 412 035 913	3 579 412 035 913		KPKNL Jakarta I
Hendarto Tantular/Antoni Tantular	Bank Central Dagang (BBKU)	1 470 120 709 878		1 470 120 709 878	KPKNL Jakarta I
Sjamsul Nursalim	Bank Dewa Ruty (BBKU)	470 659 063 577		470 659 063 577	KPKNL Jakarta I
Kaharudin Ongko	Bank Arya Panduartha (BBKU)	359 435 826 604		359 435 826 604	KPKNL Jakarta I
Sujanto Gondokusumo	Bank Dharmala (BBKU)	822 254 323 305		822 254 323 305	KPKNL Jakarta I
Kwan Benny Ahadi	Bank Orient (BBKU)	143 389 156 494	143 389 156 494		KPKNL Jakarta I
Barringin Marulam Hasholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Nusura	170 144 000 000		170 144 000 000	KPKNL Jakarta II
Tryono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4 893 525 874 669		4 893 525 874 669	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70 460 000 000	-	70 460 000 000	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Bukan	406 415 000 000		406 415 000 000	KPKNL Jakarta II
I M Sukarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509 986 363 636		509 986 363 636	KPKNL Jakarta II
Fadel Muhammad	Bank Intan	136 430 000 000	-	136 430 000 000	KPKNL Jakarta II
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596 794 000 000		596 794 000 000	KPKNL Jakarta II
David Nusa Wijaya/Tarunajaya Nusa	Bank Servitia	4 308 730 000 000		4 308 730 000 000	KPKNL Jakarta II
Agus Anwar	Bank Pelita Istimarat	577 812 000 000	-	577 812 000 000	KPKNL Jakarta V
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155 727 000 000		155 727 000 000	KPKNL Jakarta V
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790 557 000 000		790 557 000 000	KPKNL Jakarta V
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424 656 000 000	-	424 656 000 000	KPKNL Jakarta V
Lidia Mochtar	Bank Tamara	188 483 118 182		188 483 118 182	KPKNL Jakarta V
Samadikun Hartono	Bank Modern	2 525 651 574 703	-	2 525 651 574 703	KPKNL Jakarta V
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7 828 253 577 427	-	7 828 253 577 427	KPKNL Jakarta V
Jumlah		30.428.895.624.368	3.722.861.192.407	26 706.034 431.961	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

3 a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Rupiah (IDR)	10 978 101 991 459	10 978 101 991 459	(357 400 508 644)	11 335 502 500 103	11 335 502 500 103
Dollar Amerika (USD)	1 056 746 953	14 891 316 054 990	1 036 800 756 985	996 856 659	13 854 515 297 925
Dollar Australia (AUD)	1 351 561	14 559 056 776	1 578 069 836	1 332 783	12 980 046 940
Dollar Hongkong (HKD)	241 180	438 806 615	438 806 615		
Dollar Selandia Baru (NZD)	252 281	2 552 106 131	2 552 106 131		
Dollar Singapura (SGD)	6 486	69 036 364	69 036 364		
Euro (EUR)	795 074	13 778 731 804	6 976 071 598	436 387	6 802 660 206
Gulden Belanda (NLG)	136 842	5 218 449 582	5 218 449 582		
Poundsterling (GBP)	168 772	3 802 807 062	3 802 807 062		
Yen Jepang (JPY)	998 413 744	136 254 971 344	8 491 359 131	998 413 744	127 763 612 213
Krona Swedia (SEK)	43 357	74 782 893			
Krone Denmark (DKK)	86 826	202 263 626			
Jumlah		26.046.198.058.348	706 803 940 959		25.337.564.617.387

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271 003 330 923,94	271 003 330 923,94			271 003 330 923,94	271 003 330 923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1 980 529 395 026,31	1 980 529 395 026,31			1 980 529 395 026,31	1 980 529 395 026,31
	Dollar Amerika	26 403 988,65	377 629 845 672,30		10.587 967 428,71	26 403 988,65	367 041 878 243,59
Eraska Tirta	Rupiah	893 182 300,00	893 182 300,00			893 182 300,00	893 182 300,00
PT Tirtatai Mukkata	Rupiah	17 331 000,00	17 331 000,00			17 331 000,00	17 331 000,00
Total			2 630.073.684 923		10.587.967.429		2 619 495.217.494

LAMPIRAN 12.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2020

Catatan				Kurs BI per 31 Desember 2020	
Kurs Tengah BI		31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kurs Jual	Kurs Beli
1	Dollar Amerika (USD)	14 105,01	13 901,01	14 175,53	14 034,48
2	Dollar Australia (AUD)	10 771,28	9 739,06	10 825,85	10 716,73
3	Dollar Hongkong (HKD)	1 819,34		1 828,48	1 810,22
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	10 116,13		10 169,53	10 062,72
5	Dollar Singapura (SGD)	10 644,06	10 320,74	10 698,51	10 589,66
6	Euro (EUR)	17 330,13	15 588,80	17 418,89	17 241,36
7	Gulden Belanda (NLG)	38 190,57	-	38 386,18	37 994,96
8	Poundsterling (GBP)	19 085,50	18 249,84	19 183,74	18 987,25
9	Rupiah (IDR)			-	
10	Yen Jepang (JPY)	136,47	127,97	137,16	135,78
11	Deutschmark (DEM)	33 894,78	7 970,32	34 068,39	33 721,17

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total (31 Desember 2020)	Mutasi	Saldo Total 31 Desember 2019
TOTAL	3.960.224.870.627	4.944.271.560.052	8.904.496.430.679	(78.507.990.150)	8.983.004.420.829

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020 (*Audited*)	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.509	1.506 590 969.558		21.789.751 779	106 812.509	1 484.801.217.779
Dollar Singapore	79 397	845.113.207	-	25.672 768	79.397	819.440 438
Rupiah	2.407.807.114.403	2 407 807.114.403	(39.078.938.379)	(39 078 938.379)	2.446.886.052.782	2 446.886.052 782
Yen Jepang	141.216.723	19.272.050.884	-	1.201.252.989	141.216.723	18.070.797.895
Deutchmark	758.513	25.709 622 576	-	19 664 031.430	758 513	6.045.591.145
Jumlah		3.960.224.870.627		3.601.778.588		3.958.623.100.039

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

(dalam rupiah)

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Mutasi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299 150.000	-	1 299 150.000
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108 990 024	-	108.990 024
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34 584.020.410	-	34 584.020.410

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.820	-	69.168.040.820
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62 099 370.000	-	62 099.370.000
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30 938.810.689	-	30.938.810 689
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449 858	-	112.771 449.858
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425 983 823 549	-	425 983 823.549
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800	-	8 693.911 800
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249 097	-	91.489 249.097
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212 685.353.878	-	1 212 685.353.878
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.648	-	26.981.928 648
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	537 678 898 460	-	537 678 898 460
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000 000	-	45.000 000.000
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	645.087.207.200	(166.556.674 075)	811.643.881.275
Jumlah		**3.304.570.204.432**	**(166.556.674.075)**	**3.471.126.878.507**

*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2020 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750	151.367.074.750	-		151.367.074.750	151.367.074.750
		Dollar Amerika	38.822.432	547.590.597.472	-	7.919.776.128	38.822.432	539.670.821.344
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536	459.555.536	-	-	459.555.536	459.555.536
		Dollar Amerika	960.092	13.542.102.460	-	195.858.768	960.092	13.346.243.692
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613	365.572.613	-		365.572.613	365.572.613
		Dollar Amerika	2.435	34.345.687		496.740	2.435	33.848.947
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948	10.493.948	-	-	10.493.948	10.493.948
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486	470.399.713.486	-	-	470.399.713.486	470.399.713.486
		Dollar Amerika	25.540.008	360.241.940.540		5.210.161.632	25.540.008	355.031.778.908
Total				**1.544.011.396.493**		13.326.293.268		**1.530.685.103.225**

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo 31 Desember 2019 (Audited)
1	PT Cetra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875	24.561.586.875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933	4.911.933
3	Faridah	Rupiah	2.528.941	2.528.941
4	Haryanto	Rupiah	59.267	59.267
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041	252.041
Total			**24.569.339.058**	**24.569.339.058**

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Debitur Dikembalikan ke Kantor Pusat

NO	KODE DEBITUR	NAMA	BANK	SURAT PENYERAHAN	TANGGAL PENYERAHAN	NILAI PENYERAHAN RUPIAH	MATA UANG	NILAI KONVERSI
1	03.02.00.00002021	GHAZIE AGUSNAN	BUN BBO	S-1782/KN/2009	6 Mei 2009	11.813.746	RUPIAH	11.813.745,67
2	03.02.00.00002148	PT. ADHIKARA DHARMA	DANA ASIA BBKU	S-2666/KN/2009	03 Juli 2009	39.340.455.507	RUPIAH	39.340.455.506,58
3	03.02.00.00002225	BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	BUN BBO	S-1746/KN/2009	06 Mei 2009	250.000.000	RUPIAH	250.000.000,00
4	03.02.00.00002226	BPR NUSAMBA TEMON	BUN BBO	S-1769/KN/2009	06 Mei 2009	200.000.000	RUPIAH	200.000.000,00
5	03.02.00.00002264	PT. INDOKUNING FAJAR INDUSTRI	BAPINDO	S-1861/KN/2009	08 Mei 2009	9.037.798.096	RUPIAH	9.037.798.096,22
6	03.02.00.00002275	PT. SUPER DINAMIKA	BUN	S-1874/KN/2009	08 Mei 2009	5.811.023.048	RUPIAH	5.811.023.048,00
7	03.02.00.00002281	CV. ARROZAQ RIENJAYA qq. PT. ASRI SUMBER LANCAR	BUN	S-1857/KN/2009 & S-2281/KN/2009	08 Mei 2009 & 10 Juni 2009	1.167.637	DOLLAR AMERIKA	16.469.529.672,59
JUMLAH								**71.120.620.069,06**

LAMPIRAN 12.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2020

Catatan

Kurs BI per 31 Desember 2020

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kurs Jual	Kurs Beli
1	Dollar Amerika (USD)	14 105,01	13.901,01	14.175,53	14 034,48
2	Dollar Australia (AUD)	10 771,29	9.739,06	10.825,85	10.716,73
3	Dollar Hongkong (HKD)	1.819,34	-	1.828,46	1 810,22
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	10 116,13	-	10.169,53	10 062,72
5	Dollar Singapura (SGD)	10 644,09	10.320,74	10.698,51	10.589,66
6	Euro (EUR)	17 330,13	15 588,60	17.418,89	17.241,36
7	Gulden Belanda (NLG)	38.190,57	-	38.386,18	37.994,96
8	Poundsterling (GBP)	19 085,50	18.249,94	18.183,74	18.987,25
9	Rupiah (IDR)	-	-	-	-
10	Yen Jepang (JPY)	136,47	127,97	137,16	135,78
11	Deutschmark (DEM)	33.894,78	7.970,32	34.068,39	33.721,17

LAMPIRAN 13
BAGIAN LANCAR TP/TGR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT						
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT						
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	99 976 986	(13 887 801)	86 089 185	88 976 986	(13 837 802)	76 139 184
4	005	MAHKAMAH AGUNG	148 471 080	(52 235 820)	96 235 260	202 296 079	(49 519 945)	152 776 134
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	17 892 450	(89 462)	17 802 988	17 892 450	(89 462)	17 602 988
6	007	SEKRETARIAT NEGARA						
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18 348 479 574	(18 343 007 074)	5 472 500	18 365 978 574	(9 418 049 956)	8 947 929 618
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2 763 498 664	(606 731 948)	2 156 766 706	35 182 495 569	(32 940 270 573)	2 242 224 996
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	94 991 841 772	(902 572 505)	94 089 069 267	438 401 336	(429 806 303)	8 595 033
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	386 942 668	(1 934 714)	385 007 954	427 956 678	(2 139 784)	425 816 894
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	149 967 502	(749 837)	149 217 665	306 286 675	(1 541 434)	306 745 241
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	17 328 989 482	(10 595 010 625)	6 733 988 836	21 474 181 169	(17 810 177 092)	3 664 004 077
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				12 046 668	(9 492 833)	2 553 835
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	30 750 000	(153 750)	30 596 250	8 100 000	(40 500)	8 059 500
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	538 265 000	(2 691 325)	535 573 675	577 095 000	(2 885 475)	574 209 525
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	597 166 951	(4 125 834)	593 041 117	613 457 018	(26 109 867)	587 347 351
18	025	KEMENTERIAN AGAMA						
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	12 679 173 554	(5 472 952 719)	7 206 320 835	12 736 654 804	(5 470 155 124)	7 266 499 680
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2 033 634 771	(10 188 174)	2 023 466 597			
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10 768 509 535	(9 235 395 182)	1 533 114 353	10 734 095 274	(8 335 814 535)	1 398 280 739
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				12 223 544	(45 160)	12 178 384
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	160 382 404	(801 812)	159 580 592	135 819 210	(678 096)	134 941 114
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN						
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	46 000 000	(230 000)	45 770 000			
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN						
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1 017 439 000	(5 087 195)	1 012 351 805			
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3 500 000	(17 500)	3 482 500	3 500 004	(17 500)	3 482 504
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI				250 000	(1 250)	248 750
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	6 996 000	(478 060)	6 517 940	19 996 000	(99 980)	19 896 020
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI						
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA						
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA						
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL						
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	25 011 055 593	(18 034 352 948)	6 976 702 645	24 609 633 188	(18 122 541 878)	6 487 091 310
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS				51 805 080	(259 025)	51 546 055
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	81 550 030	(407 750)	81 142 280	189 094 326	(945 471)	188 148 855
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA				3 194 098	(15 970)	3 178 128
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 217 249 548	(756 733 498)	460 516 050	1 229 749 548	(757 983 498)	471 766 050
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	775 801 009	(3 879 005)	771 922 004	474 513 998	(2 372 570)	472 141 428
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4 840 024	(24 200)	4 815 824	4 839 984	(24 200)	4 815 784
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL						
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL						
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	25 890 625	(129 453)	25 761 172	8 395 000	(41 975)	8 353 025
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	160 767 100	(8 796 710)	151 970 390	88 468 100	(442 338)	88 025 762
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	39 433 680	(197 168)	39 236 512	39 433 680	(197 168)	39 236 512
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA						
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA						
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1 538 435 997	(9 923 898)	1 526 512 099	1 903 889 653	(12 869 113)	1 891 020 540
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	63 000 000	(63 000 000)		81 000 000	(81 000 000)	
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN						
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA						
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	2 375 000	(11 875)	2 363 125	2 375 000	(11 875)	2 363 125

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	292 450 000	(292 450 000)	-	198 741 111	(993 706)	197 747 405
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	588 667 512	(2 943 338)	585 724 174	1 688 093 229	(8 440 466)	1 679 652 763
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	16 442 640	(82 213)	16 360 427	20 555 530	(102 778)	20 452 752
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	088	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62 068 956	(310 344)	61 758 612	62 068 956	(310 344)	61 758 612
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	471 256 000	(2 356 280)	468 899 720	473 568 000	(2 367 840)	471 200 160
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	85 868 324	(429 332)	85 438 992	109 866 324	(549 332)	109 316 992
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	64 166 536	(320 833)	63 845 703	132 984 381	(664 927)	132 319 454
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	101 285 715	(506 429)	100 779 286	101 285 715	(506 429)	100 779 286
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-	246 498 400	(12 632 492)	233 865 908
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	3 480 000	(17 400)	3 462 600	3 480 000	(17 400)	3 462 600
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	681 519 770	(528 066 999)	153 452 771	735 616 452	(464 948 692)	270 667 760
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	502 654 082	(209 282 538)	293 371 544	553 672 152	(265 414 195)	288 257 957
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	129 431 428	(647 227)	128 784 201	245 260 578	(1 135 403)	244 144 175
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	1 106 041 198	(5 530 206)	1 100 510 992
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
TOTAL			184 035 354 842	(55.163.080.776)	128.872.264.166	135 727 647 729	(95.256.092.747)	40.471.554.982

LAMPIRAN 14
PERSEDIAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	18.462.762.955	20.555.125.996
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	29.545.044.646	26.808.990.001
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	16.181.445.206	15.122.730.192
4	005	MAHKAMAH AGUNG	25.956.660.542	21.655.458.707
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	608.842.479.055	461.669.749.675
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	762.508.331.050	653.664.943.349
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	399.784.694.037	92.299.467.705
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	85.842.557.843	68.130.933.519
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	65.201.218.177.534	60.768.547.047.754
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	597.192.271.954	539.879.870.427
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	450.519.498.103	357.732.469.934
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.289.316.145.813	3.379.388.077.960
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	109.693.254.238	220.913.541.087
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.844.631.824.965	1.898.748.247.837
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.522.086.670.412	8.076.615.771.648
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.416.523.764.827	366.768.189.689
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	13.774.985.123.705	8.351.013.323.371
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	109.520.680.387	99.843.951.234
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	757.262.309.578	783.296.342.562
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	480.185.394.440	455.884.848.039
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	654.288.243.019	1.199.736.345.919
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	198.813.534.281	98.769.644.733
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	47.472.973.277.367	18.673.764.818.693
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	30.844.885	46.235.386
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	588.388.582	439.174.124
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	3.034.930.511	1.519.072.537
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	27.013.634.122	20.941.321.841
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.175.459.227	1.731.275.125
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	78.313.027.070	2.949.226.892.025
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	34.289.267.689	88.240.415.725
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.030.752.374	5.831.258.497

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.415.814.897	1.361.041.177
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	147.750.671.037	13.050.016.603
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.040.326.308	815.092.601
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	36.530.500	754.000
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	63.221.270.900	78.536.117.950
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.322.466.604	88.524.541.338
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	92.833.552.750	113.094.198.603
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	19.093.413.836	12.630.909.647
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.080.289.589	6.585.979.022
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	7.123.186.845.458	6.150.975.026.091
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	159.015.367.395	158.059.162.101
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.131.481.797	261.879.434
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.493.807.677	2.910.569.434
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	36.179.187.356	26.909.822.005
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	50.165.326.511	406.694.677.561
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	425.044.910.595	572.820.250.095
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	878.329.314	309.804.498
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	148.076.388.492	128.439.482.685
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	76.231.369.547	84.739.247.412
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2.233.315.110	2.475.602.620
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2.278.726.134	2.059.387.646
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	8.867.361.894	26.008.324.171
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	77.182.244.253	79.010.653.331
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	34.899.655.695	20.045.027.316
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	58.885.651.059	58.138.811.220
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	28.541.317.633	128.296.169.856
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	461.418.615	170.039.539
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.959.219.556	2.818.379.154
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.050.982.738	2.412.869.884
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.450.555.292	1.804.956.408
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	11.732.536.375	9.231.603.900
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	14.232.759.987	9.220.571.216

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.680.172.207.185	3.361.324.664.214
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	151.300.962.893	321.446.283.566
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.095.863.428.381	1.222.364.380.882
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.101.043.265	675.040.151
68	100	KOMISI YUDISIAL	1.096.262.776	665.953.472
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.478.982.522.845	191.049.761.763
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.223.194.903	44.919.082.188
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	615.131.282	493.086.650
72	107	BADAN SAR NASIONAL	158.492.381.669	123.152.102.407
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	604.300.529	241.905.396
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	102.168.055.006	69.909.295.651
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.170.981.135	976.731.399
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	142.826.008.200	155.033.238.928
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	15.915.570.132	16.583.264.314
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	622.716.518	475.377.062
79	114	SEKRETARIAT KABINET	2.945.404.915	3.466.775.929
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	432.324.366	14.448.455.322
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.654.707.986	2.935.224.196
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.992.053.060	1.788.828.755
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	5.718.879.596	189.068.620
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	68.986.165.969	13.487.365.480
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	3.958.277.278	207.218.045
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	13.765.638.114
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	1.888.458.922	586.572.492
JUMLAH PADA K/L			**160.512.514.584.112**	**123.447.381.818.805**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	2.293.705.512	2.708.106.030
TOTAL			**160.514.808.289.624**	**123.450.089.924.835**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 15
IKHTISAR LK PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 15.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
1	Perum Bulog	Audited 2020	15.104.050	6.539.207	21.643.258	12.514.800	885.854	13.400.654	12.522.387	-	-	(156.156)	(4.019.257)	8.346.974	(104.370)	8.242.604	100,00	8.346.974
2	Perum Damri	Audited 2020	125.248	953.401	1.078.650	123.002	461.222	584.225	19.700	631.987	-	(131.437)	(25.825)	494.425	-	494.425	100,00	494.425
3	Perum Jasa Tirta I	Unaudited 2020	500.364	428.054	928.418	196.286	17.176	213.462	31.701	4.186	-	6.432	670.851	713.170	1.786	714.956	100,00	713.170
4	Perum Jasa Tirta II	Audited 2020	770.443	762.633	1.533.076	145.780	166.456	312.236	164.548	-	-	(118.577)	1.164.948	1.210.919	9.921	1.220.840	100,00	1.210.919
5	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Unaudited 2020	189.851	100.738	290.589	97.604	126.878	224.482	9.116	47.606	-	(55.659)	64.757	65.820	287	66.107	100,00	65.820
6	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2020	2.616.711	2.458.742	5.075.453	495.568	68.394	563.962	2.446.043	(516.195)	-	(26.067)	2.607.711	4.511.492	-	4.511.492	100,00	4.511.492
7	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Unaudited 2020	64.697	234.015	298.712	159.380	100.826	260.206	231.769	270.328	-	5.683	(469.274)	38.506	-	38.506	100,00	38.506
8	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Unaudited 2020	140.523	927.951	1.068.474	464.563	199.071	663.635	43.749	-	-	761.072	(399.982)	404.840	-	404.840	100,00	404.840
9	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2020	2.188.177	3.966.900	6.155.077	1.429.085	1.477.386	2.906.470	363.573	(64.059)	-	(152.327)	3.085.985	3.233.173	15.434	3.248.606	100,00	3.233.173
10	Perum Perhutani	Audited 2020	2.515.230	14.080.137	16.595.367	1.173.624	4.168.438	5.342.062	2.586.303	(1.334.148)	-	(1.440.907)	11.450.804	11.262.052	(8.747)	11.253.305	100,00	11.262.052
11	Perum Perikanan indonesia	Unaudited 2020	412.581	451.196	863.777	167.422	351.067	518.489	24.498	316.936	-	(12.915)	16.769	345.288	-	345.288	100,00	345.288
12	Perum Perumnas	Unaudited 2020	6.864.358	734.237	7.598.595	4.006.016	2.947.744	6.953.760	1.000	1.960.375	-	281.006	(1.606.173)	636.208	8.627	644.835	100,00	636.208
13	Perum Produksi Film Negara	TW III / 2020	10.364	30.059	40.423	11.893	5.388	17.281	56.783	-	-	-	(33.641)	23.142	-	23.142	100,00	23.142
	Total Perum		**31.502.598**	**31.667.270**	**63.169.869**	**20.985.023**	**10.975.900**	**31.960.923**	**18.501.170**	**1.317.016**	-	**(1.039.851)**	**12.507.672**	**31.286.007**	**(77.062)**	**31.208.946**		**31.286.007**
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	30.090.503	8.003.385	38.093.889	27.069.198	5.449.880	32.519.078	356.085	2.588.834	-	613.523	1.989.825	5.548.267	26.544	5.574.810	51,00	2.829.616
2	PT Amarta Karya (Persero)	Unaudited 2020	1.137.435	103.069	1.240.504	833.892	201.204	1.035.096	44.285	-	-	238.194	(77.071)	205.408	-	205.408	100,00	205.408
3	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2020	3.883.057	38.693.788	42.576.845	4.766.653	24.454.158	29.220.811	6.414.412	39.388	-	(33.979)	6.931.672	13.351.492	4.542	13.356.034	100,00	13.351.492
4	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2020	5.357.891	39.078.082	44.435.973	6.788.885	16.329.473	23.118.358	15.971.652	821.974	-	(881.885)	5.128.914	21.040.655	276.960	21.317.615	100,00	21.040.655
5	PT ASABRI (Persero)	Audited 2020			31.077.171			44.379.127	200.000	-	-	(1.972.956)	(11.529.000)	(13.301.956)	-	(13.301.956)	100,00	-
6	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2020	1.791.033	6.080.296	7.871.329	905.850	337.235	1.243.085	4.030.810	8.445	620.969	-	1.839.216	6.499.441	128.804	6.628.244	100,00	6.499.441
7	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Audited 2020			15.696.521			54.372.390	235.000	3.037	-	2.582.240	(41.502.448)	(38.682.171)	6.302	(38.675.869)	100,00	-
8	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Unaudited 2020			88.315.317			42.714.736	67.163.537	(25.366.877)	-	597.091	2.223.917	44.617.668	982.913	45.600.581	100,00	44.617.668
9	PT Balai Pustaka (Persero)	Unaudited 2020	119.671	176.146	295.817	128.057	38.341	166.398	14.400	-	-	122.614	(7.595)	129.419	-	129.419	100,00	129.419
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2020			1.429.334.484			1.235.538.401	11.666.667	17.165.297	-	35.654.937	124.656.051	189.142.952	4.653.131	193.796.083	60,05	113.571.924
11	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020			891.337.425			778.465.226	9.054.807	14.489.019	-	19.667.993	66.980.701	110.192.520	2.679.679	112.872.199	60,06	66.185.001
12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020			1.511.804.628			1.311.893.252	6.167.291	3.064.436	-	21.173.673	166.972.167	197.377.567	2.533.809	199.911.376	57,10	112.702.591
13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2020			361.208.406			341.220.561	5.295.000	2.054.454	-	3.875.097	8.763.294	19.987.845	-	19.987.845	60,00	11.992.707
14	PT Barata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	3.411.730	1.431.147	4.842.877	3.210.136	543.027	3.753.163	762.915	3.221	-	791.278	(467.700)	1.089.714	-	1.089.714	100,00	1.089.714
15	PT Berdikari (Persero)	Audited 2020	546.794	179.265	726.059	601.338	20.849	622.187	75.000	423	-	8.254	20.230	103.907	(35)	103.872	100,00	103.907



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
16	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2020	532.811	478.268	1.011.079	293.038	45.612	338.650	375.000	-	-	2.237	295.192	672.429	-	672.429	100,00	672.429
17	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2020	84.264	44.939	129.204	63.883	10.643	74.526	15.000	-	-	(5.104)	44.782	54.678	-	54.678	100,00	54.678
18	PT BioFarma (Persero)	Audited 2020	15.027.584	17.665.094	32.692.678	11.863.015	4.988.318	16.851.333	17.479.821	(6.370.720)	-	1.961.025	1.486.049	14.556.175	1.285.170	15.841.345	100,00	14.556.175
19	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2020	688.026	328.434	1.016.459	90.391	137.053	227.444	255.000	-	-	7.530	526.485	789.015	-	789.015	100,00	789.015
20	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Unaudited 2020	448.807	410.181	858.988	457.605	191.699	649.304	340.916	9.683	-	284.128	(424.992)	209.735	(51)	209.684	100,00	209.735
21	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2020	3.884.428	2.763.134	6.647.562	2.898.796	2.106.630	5.005.426	161.555	-	-	386.209	1.064.760	1.612.524	29.612	1.642.136	100,00	1.612.524
22	PT Dahana (Persero)	Audited 2020	1.179.098	764.271	1.943.369	654.502	144.094	798.596	250.000	2.013	-	28.835	791.873	1.072.721	72.052	1.144.773	100,00	1.072.721
23	PT Danareksa (Persero)	Audited 2020			2.625.584			1.860.697	701.480	240.655	-	446.843	(712.628)	676.351	88.536	764.887	100,00	676.351
24	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	7.375.263	3.654.821	11.030.083	4.162.240	3.491.543	7.653.783	20.618.143	1.042.334	-	47.802	(18.331.984)	3.376.295	5	3.376.300	100,00	3.376.295
25	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2020	361.955	811.302	1.173.257	298.923	360.360	659.283	1.984.729	1.427	-	63	(1.472.245)	513.974	-	513.974	78,88	405.423
26	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Unaudited 2020	671.774	1.674.927	2.346.701	3.382.789	349.325	3.732.114	976.600	635	-	-	(2.362.648)	(1.385.413)	-	(1.385.413)	99,95	-
27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	TW III / 2020	271.911	423.167	695.078	515.868	461.092	976.960	240.936	51	-	7.488	(538.598)	(290.123)	8.241	(281.882)	100,00	-
28	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	84.825	26.755	111.580	73.312	3.093	76.405	15.555	-	-	-	19.608	35.163	12	35.175	100,00	35.163
29	PT Garam (Persero)	Audited 2020	296.978	619.220	916.199	134.392	142.966	277.357	600.000	-	-	-	38.841	638.841	-	638.841	100,00	638.841
30	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2020	8.999.830	130.410.862	139.410.692	64.852.990	88.207.530	153.060.521	18.482.162	193.996	-	700.303	(32.849.980)	(13.473.519)	(176.310)	(13.649.829)	60,54	-
31	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2020	129.843	9.690.958	9.820.801	372.614	1.119.689	1.492.282	101.700	82	-	8.500.401	(273.420)	8.328.763	(244)	8.328.519	100,00	8.328.763
32	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2020	23.767.820	87.221.942	110.989.762	38.093.957	41.096.343	79.190.300	20.100.000	7.500.000	-	636.255	2.887.219	31.123.474	675.988	31.799.462	100,00	31.123.474
33	PT Iglas (Persero)	Unaudited 2020	16.092	160.091	176.183	1.369.245	-	1.369.245	47.007	94.583	-	-	(1.334.652)	(1.193.062)	-	(1.193.062)	63,82	-
34	PT Indah Karya (Persero)	Unaudited 2020	377.915	493.903	871.818	145.362	553.988	699.350	7.000	97.707	-	75	67.686	172.468	-	172.468	100,00	172.468
35	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2020	45.032.121	135.746.682	180.778.803	26.588.467	81.605.600	108.194.067	54.177.941	(19.001.920)	-	14.705.092	9.721.891	59.603.004	12.981.732	72.584.736	100,00	59.603.004
36	PT Indra Karya (Persero)	Unaudited 2020	175.856	94.727	270.583	137.657	43.353	181.010	2.000	-	-	57.308	30.265	89.573	-	89.573	100,00	89.573
37	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	213.561	602.006	815.567	142.525	233.159	375.684	456.694	3.656	-	2.772	(23.239)	439.883	-	439.883	100,00	439.883
38	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2020	2.946.902	2.116.562	5.063.464	4.061.837	441.723	4.503.560	1.251.843	-	-	754.376	(1.473.380)	532.839	27.066	559.905	100,00	532.839
39	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2020	20.065	18.916	38.981	23.456	27.518	50.974	27.200	-	-	586	(39.780)	(11.993)	-	(11.993)	100,00	-
40	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	TW III / 2020	143.056	446.005	589.061	313.908	113.556	427.464	198.870	650	-	188.074	(225.997)	161.597	-	161.597	100,00	161.597
41	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	364.486	931.279	1.295.765	643.298	1.072.846	1.716.144	350.000	1.229	-	731.796	(1.502.751)	(419.726)	(653)	(420.379)	100,00	-
42	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2020	10.705.995	93.380.651	104.086.646	14.928.687	64.382.344	79.311.031	3.628.936	3.997.085	-	(614.153)	12.062.621	19.074.489	5.701.126	24.775.615	70,00	13.352.142
43	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Unaudited 2020	519.226	1.636.656	2.155.882	746.468	515.984	1.262.452	363.945	111.968	-	(5.764)	423.161	893.310	120	893.430	73,15	653.456
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	TW III / 2020	153.161	113.916	267.077	12.120	38.317	50.437	40.000	-	-	(1.322)	177.962	216.640	-	216.640	60,00	129.984
45	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Unaudited 2020	347.963	252.287	600.250	111.926	1.850	113.776	150.000	-	-	-	336.474	486.474	-	486.474	60,00	291.884
46	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2020	117.652	271.910	389.562	47.368	51.073	98.441	25.863	-	-	(1.038)	265.695	290.521	600	291.121	51,09	148.427
47	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2020	9.164.500	44.042.569	53.207.069	9.281.616	26.885.473	36.167.090	12.268.743	-	-	(1.506.438)	6.085.705	16.848.010	191.969	17.039.980	100,00	16.848.010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
48	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	TW I / 2020	49.277	757.021	806.298	1.760.390	141.612	1.902.002	798.994	-	-	45.000	(1.939.698)	(1.095.704)	-	(1.095.704)	96,65	-
49	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	TW III / 2018	26.791	567.027	593.818	591.048	725.419	1.316.467	417.049	-	-	618.400	(1.758.098)	(722.649)	-	(722.649)	100,00	-
50	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2020	2.399.975	28.639	2.428.614	1.977.834	19.456	1.997.290	102.000	-	-	(1.954)	329.659	429.704	1.620	431.324	100,00	429.704
51	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Unaudited 2020	12.527.370	38.104.093	50.631.463	10.627.102	30.656.258	41.283.360	13.929.717	2.302.853	-	23.285.945	(29.544.601)	9.973.913	(625.811)	9.348.103	80,00	7.979.131
52	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2020	4.158.395	2.001.074	6.159.469	4.820.346	1.019.232	5.839.578	175.001	-	-	530.166	(492.336)	212.831	107.060	319.891	100,00	212.831
53	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	TW III / 2020	90.005	384.000	474.005	4.125.100	3.122.084	7.247.184	1.964.556	-	-	45.162	(6.783.029)	(6.773.311)	132	(6.773.179)	96,99	-
54	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2020	3.510.661	2.801.316	6.311.977	2.735.683	3.235.705	5.971.387	3.885.661	12.450	-	225.732	(3.783.217)	340.626	(36)	340.590	100,00	340.626
55	PT PANN (Persero)	TW III / 2020			1.106.433			4.404.484	45.997	192.065	-	-	(3.536.113)	(3.298.051)	-	(3.298.051)	93,04	-
56	PT PDI Pulau Batam (Persero)	TW III / 2020	36.516	50.493	87.009	6.311	31.670	37.981	19.000	-	-	(6)	30.034	49.028	-	49.028	100,00	49.028
57	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2020			71.468.960			46.865.344	6.250.000	-	-	6.755.360	11.595.111	24.600.471	3.145	24.603.616	100,00	24.600.471
58	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2020	2.046.355	13.919.787	15.966.142	2.193.720	7.511.890	9.705.610	1.700.000	527.133	-	(221.735)	3.442.536	5.447.935	812.598	6.260.533	100,00	5.447.935
59	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2020	19.163.488	32.521.163	51.684.651	5.040.477	29.557.209	34.597.686	1.444.029	(178.179)	-	(1.119.690)	15.928.506	16.074.667	1.012.298	17.086.965	100,00	16.074.667
60	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2020	5.532.616	26.662.589	32.195.205	3.292.217	17.861.332	21.153.548	1.018.953	-	-	86.159	9.421.822	10.526.934	514.722	11.041.657	100,00	10.526.934
61	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2020	1.217.364	10.563.879	11.781.242	856.903	4.790.600	5.647.503	3.112.085	1.466	-	-	2.983.986	6.097.537	36.203	6.133.740	100,00	6.097.537
62	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	3.989.384	3.414.900	7.404.284	812.613	210.762	1.023.375	7.629.900	143	-	(134.919)	(1.117.255)	6.377.869	3.040	6.380.909	100,00	6.377.869
63	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2020	33.924.939	19.547.512	53.472.451	27.986.827	11.478.634	39.465.461	619.990	4.687.612	-	2.167.379	3.149.260	10.624.241	3.382.749	14.006.990	51,12	5.431.112
64	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	917.692	2.067.735	2.985.427	228.700	711.576	940.276	880.000	797.808	-	(7.467)	375.407	2.045.748	(597)	2.045.151	100,00	2.045.748
65	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2020	154.729	452.685	607.413	167.084	293.312	460.396	350.537	-	-	1.629	(205.149)	147.017	-	147.017	100,00	147.017
66	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Audited 2020	16.981.809	114.701.457	131.683.265	38.194.413	39.613.468	77.807.881	40.216.132	-	-	25.145.928	(15.187.554)	50.174.506	3.700.878	53.875.384	100,00	50.174.506
67	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2020			31.664.889			26.077.979	2.300.000	1.500.000	-	339	1.772.694	5.573.033	13.877	5.586.910	100,00	5.573.033
68	PT Pertamina (Persero)	Proforma Audited	325.523.554	648.131.450	973.655.004	150.815.907	381.996.660	532.812.567	230.425.218	(13.305.583)	12.453	(526.920)	193.752.923	410.358.091	30.484.347	440.842.437	100,00	410.358.091
69	PT Pertani (Persero)	Audited 2020	456.564	1.138.244	1.594.808	268.634	596.036	864.669	1.021.315	39.722	-	744.939	(1.075.842)	730.133	5	730.139	100,00	730.133
70	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Proforma Audited	96.334.251	1.491.601.508	1.587.935.759	147.664.040	500.459.127	648.123.167	135.342.182	141.019	5.075.552	661.734.097	136.585.580	938.878.430	934.162	939.812.592	100,00	938.878.430
71	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2020	8.020.825	4.937.156	12.957.981	6.288.396	3.011.481	9.299.877	2.996.688	(308.059)	-	354.663	611.734	3.655.026	3.078	3.658.104	100,00	3.655.026
72	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2020	389.282	2.831.477	3.220.758	222.447	944.643	1.167.089	156.200	-	-	-	1.892.139	2.048.339	5.330	2.053.669	100,00	2.048.339
73	PT Pindad (Persero)	Audited 2020	6.571.948	1.168.995	7.740.943	5.747.748	576.486	6.324.234	1.367.542	-	-	(359.404)	408.551	1.416.690	19	1.416.708	100,00	1.416.690
74	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2020	3.399.627	5.728.335	9.127.961	3.137.814	1.341.449	4.479.263	455.023	-	-	2.171.543	2.024.400	4.650.966	(2.268)	4.648.698	100,00	4.650.966
75	PT Primissima (Persero)	TW III / 2020	32.084	126.801	158.885	110.043	10.417	120.460	13.000	2.276	-	104.888	(81.719)	38.425	-	38.425	53,00	20.365
76	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	43.041.157	84.243.716	127.284.873	23.063.301	31.604.765	54.668.066	25.000.000	-	-	32.033.193	15.377.883	72.411.076	205.731	72.616.807	100,00	72.411.076
77	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	4.983.891	9.440.000	14.423.891	5.101.332	2.933.626	8.034.959	1.051.567	996.231	-	3.148.698	1.114.242	6.310.739	78.194	6.388.933	100,00	6.310.739
78	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Unaudited 2020			10.660.941			7.173.272	878.358	270	-	1.174.960	1.434.063	3.487.651	18	3.487.669	100,00	3.487.651
79	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2020	154.801	4.937.471	5.092.272	561.802	1.429.226	1.991.028	534.000	1.008	-	4.718.969	(2.152.733)	3.101.244	-	3.101.244	100,00	3.101.244

LAMPIRAN 15.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
80	PT Sarinah (Persero)	Audited 2020	52.677	223.016	275.693	83.308	38.904	122.212	46.850	181	-	177.855	(71.461)	153.425	56	153.481	100,00	153.425
81	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2020	1.130.926	4.606.250	5.737.176	850.139	1.479.148	2.329.287	993.253	1.270.607	-	(59.326)	1.203.320	3.407.854	35	3.407.889	75,51	2.573.270
82	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	15.564.604	62.441.640	78.006.244	11.506.163	30.846.746	42.352.909	593.152	1.458.258	-	82.174	32.039.825	34.173.409	1.479.926	35.653.335	51,01	17.431.856
83	PT Semen Kupang (Persero)	Unaudited 2020	16.287	597.608	613.895	21.080	566.383	587.463	133.713	-	-	-	(107.281)	26.432	-	26.432	61,48	16.250
84	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2020	1.807.238	1.938.550	3.745.788	383.079	522.001	905.081	300.000	1.141	-	663.883	1.876.515	2.841.539	(832)	2.840.707	95,00	2.699.462
85	PT Survai Udara Penas (Persero)	Unaudited 2020	5.433	32.001	37.434	46.757	132.304	179.061	13.000	-	-	-	(154.627)	(141.627)	-	(141.627)	100,00	-
86	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2020	1.104.554	722.715	1.827.269	352.963	104.129	457.092	25.000	105	-	197.897	1.153.255	1.376.257	(6.080)	1.370.177	85,12	1.171.470
87	PT Taspen (Persero)	Unaudited 2020			289.239.176			274.431.523	500.000	-	-	(744.453)	14.939.587	14.695.134	112.519	14.807.653	100,00	14.695.134
88	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	46.503.000	200.440.000	246.943.000	69.093.000	56.961.000	126.054.000	4.953.000	2.711.000	-	374.000	94.489.000	102.527.000	18.362.000	120.889.000	52,09	53.406.314
89	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2020	143.657	557.221	700.878	33.664	30.236	63.900	250.000	106	-	(14.075)	400.947	636.977	1	636.978	100,00	636.977
90	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	TW III / 2020	130.066	242.109	372.175	118.549	27.254	145.803	11.000	-	-	225.058	(9.686)	226.372	-	226.372	100,00	226.372
91	PT Virama Karya (Persero)	Unaudited 2020	390.344	135.133	525.477	224.380	75.561	299.941	25.000	1.051	-	109.183	90.302	225.536	-	225.536	100,00	225.536
92	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	32.538.763	73.050.197	105.588.960	48.237.836	40.773.569	89.011.405	1.357.395	5.849.531	-	765.435	(440.120)	7.532.242	9.045.313	16.577.555	66,04	4.974.292
93	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	47.980.946	20.128.239	68.109.185	44.168.468	7.283.292	51.451.760	896.995	6.555.389	-	1.835.684	4.390.063	13.678.131	2.979.294	16.657.425	65,05	8.897.624
94	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2020	396.251	179.472	575.723	282.877	36.248	319.125	50.000	-	-	(6.148)	212.746	256.599	-	256.599	100,00	256.599
	Total Persero		**923.841.976**	**3.519.166.287**	**9.178.548.197**	**854.866.758**	**1.580.957.831**	**6.605.221.580**	**779.395.552**	**18.054.370**	**5.708.974**	**876.079.656**	**789.267.719**	**2.468.506.272**	**104.820.345**	**2.573.326.617**		**2.246.235.879**
	TOTAL		**955.344.574**	**3.550.833.557**	**9.241.718.066**	**875.851.780**	**1.591.933.731**	**6.637.182.503**	**797.896.722**	**19.371.387**	**5.708.974**	**875.039.805**	**801.775.391**	**2.499.792.280**	**104.743.283**	**2.604.535.563**		**2.277.521.887**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN LAIN	BEBAN LAIN LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1 2)	4	5	6 = (3+4 5)	7	8 = (6 7)	9	10 = (8 9)	11	12 = 10+11	13	14
1	Perum Bulog	Audited 2020	27 698 291	26 880 265	818 026	379 172	303 188	894 015	1 670 724	(776 710)	44 306	(821 015)	72 055	(748 961)	(822 852)	(750 684)
2	Perum Damri	Audited 2020	738 335	950 246	(211 911)	3 632	15 205	(223 484)	18 736	(242 220)	(22 143)	(220 077)	(84 339)	(304 416)	(220 077)	(304 416)
3	Perum Jasa Tirta I	Unaudited 2020	550 907	467 984	82 923	17 665	48 567	52 021		52 021	10 608	41 413	6 018	47 431	41 386	47 414
4	Perum Jasa Tirta II	Audited 2020	815 627	678 520	137 108	28 246	26 785	138 567		138 567	14 608	123 960	(27 989)	45 970	124 003	45 970
5	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Unaudited 2020	375 355	369 154	6 201	9 286	4 147	11 340		11 340	1 249	10 091		10 091	10 091	10 091
6	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2020	1 951 464	2 444 305	(892 841)	130 266	12 948	(775 524)		(775 524)	(195 083)	(580 441)	(9 879)	(590 320)	(580 441)	(590 320)
7	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Unaudited 2020	324 949	342 865	(17 916)	9 129	707	(8 494)	9 339	(18 833)		(18 833)		(18 833)	(18 833)	(18 833)
8	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Unaudited 2020	145 427	166 370	(20 943)	10 758	8 180	(18 365)	38 452	(56 817)		(56 817)		(56 817)	(56 817)	(56 817)
9	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2020	3 293 407	2 821 308	472 101	111 511	24 809	558 802	156 001	402 801	101 703	301 098	(45 059)	256 039	298 195	253 231
10	Perum Perhutani	Audited 2020	4 524 280	4 277 123	247 157	91 925		339 082	32 209	306 883	(441 589)	748 471	(426 568)	321 905	748 452	321 989
11	Perum Perikanan Indonesia	Unaudited 2020	389 603	404 642	(15 039)	7 309	30 180	(37 910)		(37 910)		(37 910)		(37 910)	(37 910)	(37 910)
12	Perum Perumnas	Unaudited 2020	687 609	777 186	(79 577)	71 740	438 240	(446 077)		(446 077)	12 541	(458 618)		(458 618)	(455 987)	(455 987)
13	Perum Produksi Film Negara	TW IV / 2020	7 459	8 959	(1 500)	2 203	601	102		102		102		102	102	102
	Total Perum		**41 812 722**	**46 588 925**	**(23 797**	**872.847**	**913 559**	**463.085**	**1.925.461**	**(1 442 376)**	**(473.799)**	**(968.577)**	**(565 760)**	**(1 534 338)**	**(876.678)**	**(1 536.190)**
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	10 877 682	9 819 650	1 008 033	156 794	330 573	834 254	794 519	39 735	16 033	23 703	41 206	64 909	23 977	65 122
2	PT Amarta Karya (Persero)	Unaudited 2020	526 039	519 151	6 888	150 133	118 750	38 271	20 178	18 093	14 143	3 950	2 990	6 940	3 950	6 940
3	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2020	3 619 109	5 276 060	(1 656 950)	306 075	218 521	(1 577 396)	1 250 606	(2 828 002)	(499 579)	(2 328 423)	(273 195)	(2 601 619)	(2 327 509)	(2 600 702)
4	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2020	5 843 728	7 209 797	(1 366 071)	170 214	190 392	(1 386 250)	1 136 912	(2 523 161)	(26 694)	(2 496 467)	(514 419)	(3 010 886)	(2 433 507)	(2 938 537)
5	PT ASABRI (Persero)	Audited 2020	2 763 930	8 384 535	(5 620 605)			(5 620 605)		(5 620 605)	18 100	(5 638 705)	838 184	(4 800 521)	(5 638 705)	(4 800 521)
6	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2020	3 042 520	2 990 671	51 850	221 312	31 838	241 323	36 196	205 127	23 980	181 147	(25 479)	155 668	162 397	138 918
7	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Audited 2020	53 107	419 282	(366 176)		3 671 508	(4 037 683)		(4 037 683)	10 168	(4 047 851)	(21 634)	(4 069 485)	(4 046 500)	(4 069 634)
8	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	20 743 536	18 599 810	2 143 726	739 087		2 881 813		2 881 813	648 787	2 233 026	44 902	2 277 928	2 223 917	2 274 563

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
9	PT Balai Pustaka (Persero)	Unaudited 2020	68 740	68 246	1 494	1 480	972	2 012	471	1 541	273	1 268		1 268	1 268	1 268
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2020	128 908 872	105 732 569	23 176 303	121 738		23 298 041		23 298 041	5 852 417	17 845 624	3 426 831	21 072 455	17 119 253	20 468 256
11	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	74 915 951	68 684 507	6 231 444		119 291	6 112 153		6 112 153	1 790 711	3 321 442	871 280	4 192 722	3 280 403	4 001 412
12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	148 143 711	125 814 483	22 329 228	4 461 039	65 421	26 724 846		26 724 846	8 064 453	18 660 393	3 097 386	21 757 779	16 654 753	21 727 515
13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2020	27 620 387	25 290 102	2 330 285	105	59 533	2 270 857		2 270 857	668 499	1 602 358	750 353	2 352 711	1 602 358	2 352 711
14	PT Barata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	1 247 785	1 583 658	(335 873)	17 776	64 125	(382 222)	90 498	(472 720)	14 654	(487 374)	313 680	(173 694)	(487 374)	(173 694)
15	PT Berdikari (Persero)	Audited 2020	1 747 856	1 633 881	114 074	49 041	68 385	93 730	1 048	92 684	30 961	61 723	766	62 489	61 735	62 501
16	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Audited 2020	1 107 460	999 455	108 005	6 970	208	114 769	13 428	101 341	25 580	75 761	1 103	76 864	75 761	76 864
17	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2020	105 408	103 362	3 046	7 368	1 295	9 119		9 119	4 607	4 512	(846)	3 665	4 512	3 665
18	PT BioFarma (Persero)	Audited 2020	14 327 864	13 493 075	828 889	303 687		1 132 576	725 285	407 291	118 106	289 185	(126 787)	162 398	284 631	169 765
19	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2020	791 835	645 874	145 961	17 476	30 413	133 024		133 024	32 525	100 499	(8 221)	92 278	100 499	92 278
20	PT Bursa Berjma India (Persero)	Unaudited 2020	305 853	293 950	11 903	5 187	2 767	14 323	8 427	5 896		5 896		5 896	5 896	5 896
21	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2020	2 434 915	2 453 390	(18 475)	245 089	72 001	154 613	117 079	37 534	3 877	33 657	13 266	46 923	31 305	44 567
22	PT Dahana (Persero)	Audited 2020	1 832 879	1 683 051	49 828	105 134		154 961	13 652	141 309	18 386	122 923	(8 452)	114 471	123 730	115 278
23	PT Danaraksa (Persero)	Audited 2020	415 563	430 333	(11 831)	196 042	59 143	125 069		125 069	24 939	100 130	(40 170)	59 960	83 417	43 473
24	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	2 321 082	2 130 545	190 537	52 436	29 166	213 807	280 136	(66 329)	39 874	(106 203)	(3 886)	(110 089)	(106 202)	(110 088)
25	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Unaudited 2020	611 520	580 338	31 182	14 707	4 268	41 621	26 995	14 626	6 811	7 815		7 815	7 815	7 815
26	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Unaudited 2020	526 118	793 003	(266 885)	110 946	83 746	(239 685)	27 206	(266 891)	1 579	(268 470)		(268 470)	(268 470)	(268 470)
27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	TW III 2020	129 111	121 572	7 539	3 674	680	9 533	14 376	(4 843)	1 214	(6 057)		(6 057)	(7 567)	(7 567)
28	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	92 230	86 827	5 403	2 661	1 315	6 749	3 998	2 751	210	2 541	(366)	2 175	2 541	2 175
29	PT Garam (Persero)	Audited 2020	111 323	222 636	(111 313)	37 683	72 010	(145 640)	8 201	(153 841)	118 923	(134 918)	(3 071)	(137 989)	(134 918)	(137 989)
30	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Unaudited 2020	22 252 580	43 769 490	(21 516 909)	778 852	1 342 294	(22 080 551)	6 202 086	(28 282 637)	(4 601 239)	(23 681 402)	134 544	(23 546 858)	(23 237 319)	(23 100 842)
31	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2020	233 864	422 955	(189 091)	59 738	25 830	(155 183)	25 548	(180 732)	695	(181 427)	(8 096)	(189 523)	(180 358)	(188 454)
32	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2020	21 642 841	20 960 760	682 081	751 911	790 816	643 376	2 554 192	(1 910 816)	149 977	(2 060 793)	245 183	(1 815 610)	(2 098 133)	(1 852 950)
33	PT Iglas (Persero)	Unaudited 2020	61	5 121	(5 060)	44 445	65 611	(26 226)	88 189	(194 415)	(119 084)	(75 331)		(75 331)	(75 331)	(75 331)
34	PT Indah Karya (Persero)	Unaudited 2020	52 174	51 424	750	2 336	324	2 762	2 308	454	114	340		340	340	340

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 15.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

ND	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
35	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2020	66 568 970	61 463 940	5 105 030	6 047 853	4 196	11 148 687	7 728 111	3 420 576	1 600 140	1 820 436	238 197	2 058 633	698 171	1 065 702
36	PT Indra Karya (Persero)	Unaudited 2020	170 633	163 478	7 157	4 207		11 364	401	10 963	3 569	7 394		7 394	7 394	7 394
37	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	158 741	142 708	16 033	569	38	16 564	4 769	11 795	2 949	8 846		8 846	8 846	8 846
38	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2020	2 319 481	2 339 165	(19 685)	30 476	144 288	(133 495)	322 200	(455 695)	(120 705)	(334 990)	339 668	4 678	(336 453)	2 795
39	PT Industri Nukir Indonesia (Persero)	Audited 2020	38 081	48 117	(10 036)	166	0	(9 871)	1 252	(11 122)	2 120	(13 242)	(207)	(13 449)	(13 242)	(13 449)
40	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	TW III / 2020	40 990	49 927	(8 937)	562	3 384	(11 759)	12 604	(24 363)	212	(24 575)		(24 575)	(24 575)	(24 575)
41	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	427 693	476 297	(48 604)	17 522	45 506	(76 588)	63 423	(140 011)	(8 115)	(131 896)	(19 847)	(151 743)	(130 650)	(150 497)
42	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2020	13 704 021	9 596 300	4 117 721	547 037	320 358	4 344 400	3 647 949	696 451	738 080	(41 629)	143 001	101 372	644 404	501 047
43	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Unaudited 2020	579 968	521 902	58 066	56 349	30 483	83 932	16 371	67 561	48 870	18 691		18 691	18 691	18 691
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	TW III / 2020	34 332	22 695	11 637	3 369		15 006	3 311	11 695	2 314	9 381		9 381	9 381	9 381
45	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Unaudited 2020	199 106	178 709	20 397	2 824		23 221	3 099	20 122	3 535	16 587		16 587	16 587	16 587
46	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2020	102 340	76 059	26 281	2 529	194	28 616		28 616	4 401	24 216	(898)	23 218	24 216	23 218
47	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2020	18 074 851	19 081 825	(1 007 074)	357 988	618 159	(1 267 235)	953 060	(2 220 295)	(484 057)	(1 736 238)	(1 111 724)	(2 847 962)	(1 691 730)	(2 803 524)
48	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	TW I / 2020	1 940	6 664	(4 724)	10		(4 714)	12 920	(17 634)		(17 634)		(17 634)	(17 633)	(17 633)
49	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)															
50	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2020	154 071	68 267	85 804	17 824	3 727	99 900		99 900	33 454	66 447	(541)	65 906	66 373	65 832
51	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Unaudited 2020	20 747 779	19 391 506	1 356 273	3 665 839	584 261	4 437 851	1 949 951	2 487 900	787 741	1 700 159	2 213 809	3 913 968	1 717 316	3 932 131
52	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2020	3 040 129	3 179 270	(139 140)	196 195	87 736	(30 681)	238 443	(269 124)	62 870	(331 994)	225 292	(106 701)	(350 385)	(125 232)
53	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	TW III / 2020	47 026	121 417	(74 391)	39 784	56 885	(71 492)	91 711	(163 203)		(163 203)		(163 203)	(163 198)	(163 198)
54	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2020	1 825 631	1 687 770	137 861	15 051	51 234	101 678	85 824	15 854	931	14 923	1 150	16 073	14 926	16 076
55	PT PANN (Persero)	TW III / 2020	18 622	30 138	(11 516)	19 330	1 598	6 216		6 216	5 880	336		336	336	336
56	PT PDI Pulau Batam (Persero)	TW III / 2020	42 769	48 120	(5 351)	1 844	1 100	(4 607)		(4 607)		(4 607)		(4 607)	(4 607)	(4 607)
57	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2020	21 964 403	19 173 144	2 791 259	84 844	6 679	2 869 424		2 869 424	846 977	2 022 447	(186 635)	1 835 812	2 021 988	1 835 353
58	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2020	3 841 910	3 165 922	675 988	65 699	2 870	738 816	526 995	211 823	28 702	183 120	(1 914)	181 207	309 298	307 369

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 15.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1 2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8 9)	11	12 = 10 + 11	13	14
59	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2020	11 410 839	9 314 763	2 096 075	508 516	87 538	2 507 053	1 122 842	1 384 212	227 424	1 156 787	(1 014 877)	141 910	1 184 857	170 176
60	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2020	10 271 712	7 958 186	2 313 526	180 714		2 494 261	747 497	1 746 768	507 778	1 238 990	(821 791)	417 198	1 205 584	383 372
61	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2020	3 891 717	3 410 957	480 760	79 483	22 666	537 578	145 461	392 117	108 355	283 762	(16 495)	267 267	279 871	263 162
62	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	4 146 084	4 131 558	14 526	519 012	118 341	414 197	158	414 039	87 173	326 866	9 810	336 676	326 655	336 365
63	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2020	15 831 388	14 241 639	1 589 749	819 407	1 225 006	1 184 150	894 583	289 567	23 297	266 270	(31 251)	235 019	128 753	95 778
64	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	241 307	217 407	23 900	89 789	51 278	42 410	36	42 374	24 456	17 918	(436)	17 482	18 224	17 788
65	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2020	179 604	231 970	(52 365)	8 816	12 207	(55 757)	34 922	(90 679)	(16 137)	(74 542)	334	(74 208)	(74 542)	(74 208)
66	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Audited 2020	39 390 437	35 966 436	3 424 001	273 188	5 833	3 691 356	3 525 680	165 676	1 302 279	(1 136 603)	(1 244 390)	(2 380 993)	(882 331)	(1 976 285)
67	PT Pemodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2020	5 776 257	5 560 090	216 167	183 113	145	399 135		399 135	40 541	358 595	(6 923)	351 672	358 180	351 419
68	PT Pertamina (Persero)	Proforma Audited	544 715 071	59 785 204	6 578 950	15 147 617	51 216 637	18 305 432	32 811 105	20 916 217	11 994 889	(2 230 618)	9 764 272	15 322 424	13 791 052	10 317 601
69	PT Pertani (Persero)	Audited 2020	1 268 990	1 415 574	(146 583)	8 920	7 550	(149 214)	54 641	(203 754)	(5 117)	(199 638)	(5 098)	(203 735)	(198 620)	(203 718)
70	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Proforma Audited	301 008 165	44 407 472	3 042 485	7 742 152	39 707 805	27 415 688	12 291 919	5 298 491	5 993 428	308 766	6 302 194	5 993 428	6 302 194	(5 869 812)
71	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2020	4 397 844	4 154 610	243 234	129 493	116 908	254 818	91 805	163 013	57 244	105 769	3 450	109 219	105 341	108 749
72	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2020	2 865 138	2 804 878	60 261	6 270	11 664	55 468	2 558	52 909	19 901	33 008	(14 233)	18 775	30 659	16 872
73	PT Pindad (Persero)	Audited 2020	3 503 473	3 117 376	386 098	125 370	151 422	360 046	355 756	4 290	(2 338)	6 628	(23 130)	(16 504)	6 622	(18 508)
74	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2020	5 455 531	5 395 105	60 426	739 781	213 137	587 070	211 923	375 146	33 119	342 029	268 402	610 431	345 655	614 002
75	PT Primissima (Persero)	TW III / 2020	52 898	62 880	(9 982)	14 116	13 952	(9 818)	2 342	(12 160)		(12 160)		(12 160)	(12 160)	(12 160)
76	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Unaudited 2020	72 301 318	65 514 941	6 786 377	530 126		6 316 503	3 059 299	3 257 204	1 105 376	2 151 828	(253 227)	1 898 601	2 210 940	1 856 195
77	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2020	6 974 084	6 569 409	404 675	162 131	100 846	466 160	377 856	88 304	51 059	37 245	(34 949)	2 296	57 609	20 902
78	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Unaudited 2020	4 771 204	4 492 133	279 071	19 326	67 039	231 358	76 500	154 858	5 337	149 521	94 151	243 672	149 521	243 672
79	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2020	225 094	266 318	(41 224)	10 023	50 586	(81 786)	6 829	(88 615)	1 607	(90 222)	(11 773)	(101 995)	(90 222)	(101 995)
80	PT Sarinah (Persero)	Audited 2020	844 329	875 616	(31 287)	2 627	50 368	(79 028)	1 494	(80 522)	(12 822)	(67 700)	(3 752)	(71 452)	(67 710)	(71 461)
81	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2020	1 721 907	1 505 770	216 137	5 110		220 247	183 780	36 468	25 486	10 982	(9 792)	1 190	10 985	1 192
82	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	35 171 668	29 519 014	5 652 654	214 077	57 300	5 809 431	2 320 781	3 488 650	814 307	2 674 343	(357 107)	2 317 236	2 792 321	2 423 372
83	PT Semen Kupang (Persero)	Unaudited 2020	14 175	4 534	9 641	153		9 794	1 674	8 120		8 120		8 120	8 120	8 120

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	BEBAN (MANFAAT) PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10+11	13	14
84	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2020	2 680 753	2 523 070	157 683	135 686	0	293 382	86	293 296	75 720	217 576	(121 622)	95 953	217 951	96 410
85	PT Survai Udara Penas (Persero)	Unaudited 2020	19 737	20 779	(1 042)	1 593	59	492	3 521	(3 029)		(3 029)		(3 029)	(3 029)	(3 029)
86	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2020	1 520 263	1 379 440	140 822	21 107	28 180	133 750		133 750	31 322	102 428	(2 365)	100 063	103 384	101 024
87	PT Taspen (Persero)	Unaudited 2020	18 318 845	18 440 382	(121 537)	1 218 490	211 982	884 971		884 971	198 651	686 320	1 680 952	2 367 272	685 177	2 366 129
88	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2020	136 462 000	93 274 000	43 188 000	1 202 000	1 095 000	43 295 060	4 520 000	38 775 000	9 212 000	29 563 000	(3 577 000)	25 986 000	20 204 000	17 595 000
89	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2020	100 397	202 704	(102 308)	21 675	749	(81 381)	166	(81 547)	(13 609)	(67 938)	192	(67 746)	(67 937)	(67 745)
90	PT Yaruna Tirta Prakasya (Persero)	TW III / 2020	240 486	234 175	6 311	132		6 443	3 254	3 189		3 189		3 189	3 189	3 189
91	PT Virama Karya (Persero)	Unaudited 2020	406 985	364 537	52 428	4 339	5 958	50 809	11 609	39 300	13 216	26 084	0	26 084	26 084	26 084
92	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	18 190 457	19 870 577	(3 680 121)	1 084 950	2 392 934	(4 988 205)	4 741 217	(9 729 422)	(233 698)	(9 495 726)	94 494	(9 401 232)	(7 378 534)	(7 264 059)
93	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2020	18 536 382	15 906 185	630 216	3 538 820	2 638 258	1 531 778	1 221 502	310 276	(12 067)	322 343	(20 775)	301 567	185 766	173 794
94	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2020	334 008	290 115	43 893	1 271	7 650	37 513		37 513	7 145	30 369	(264)	30 105	30 369	30 105
	Total Persero		**1.822 314 787**	**1.077.426 767**	**112 979 885**	**55.058.135**	**108.163.788**	**103.008.688**	**97.998.515**	**91.706.597**	**47.448.358**	**33.109.008**	**21.233.326**	**61.513.587**	**46.232.138**	**37.676.995**
	TOTAL		**1.983.427.509**	**1.110.814.652**	**113 603.683**	**56.930.583**	**110.077.348**	**103.491.784**	**99.923.976**	**90.264.221**	**46.976 551**	**32.140.429**	**20.667.565**	**59.979.230**	**47.261 459**	**36.340.805**

LAMPIRAN 16
IKHTISAR LK PERUSAHAAN NEGARA
DI BAWAH KEMENKEU

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain Lain	Beban Lain Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5-6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
	PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	5 784 185 472 626	3 388 495 691 645	2 395 690 780 981	25 516 334 287	19 571 448 799	2 401 635 666 369		2 401 635 666 369	494 894 974 880	1 906 740 693 489	(383 088 349 747)	1 523 651 344 742	1 906 740 693 489	1 523 651 344 742
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited	998 110 931 000	376 687 367 000	621 423 564 000			621 423 564 000		621 423 564 000	883 242 000	620 580 322 000	291 915 913 000	912 476 235 000	620 580 322 000	912 476 235 000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited	2 348 655 000 000	1 752 495 000 000	596 220 000 000			596 220 000 000		596 220 000 000	126 414 000 000	469 806 000 000	1 641 000 000	471 447 000 000	469 806 000 000	471 447 000 000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited	660 368 910 168	591 224 178 920	289 144 731 248	23 164 112 511	33 221 679 820	279 087 163 939		279 087 163 939	82 508 438 385	196 578 725 553	(8 075 914 190)	187 501 911 363	196 578 725 553	187 501 911 363
	Total Persero		10 011 321 313 894	6 108 842 237 565	3 902 479 076 129	48 680 446 798	52 793 128 619	3 898 366 394 308		3 898 366 394 308	704 660 656 268	3 193 685 741 042	(98 089 249 937)	3 095 876 491 105	3 193 685 741 042	3 095 876 491 105
	Badan Usaha Lainnya															
1	PT Teluk Petrochemical Industries	Audited	3 553 076 000 000	3 431 440 000 000	121 636 000 000	249 923 000 000	434 421 000 000	(62 862 000 000)		(62 862 000 000)	45 556 000 000	(108 418 000 000)	328 030 000 000	219 612 000 000	(103 137 000 000)	188 889 000 000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	5 429 101 000 000	5 373 531 000 000	55 570 000 000	5 162 000 000		61 722 000 000		61 722 000 000	(225 666 000 000)	289 388 000 000	108 837 000 000	398 225 000 000	288 388 000 000	398 225 000 000
	Total Badan Usaha Lainnya		8 982 177 000 000	8 804 971 000 000	177 206 000 000	255 075 000 000	434 421 000 000	(1 140 000 000)		(1 140 000 000)	(181 110 000 000)	179 970 000 000	437 867 000 000	617 837 000 000	185 251 000 000	587 114 000 000
			18 993 498 313 894	14 913 813 237 565	4 079 685 076 129	304 755 446 798	487 214 128 619	3 897 226 394 308		3 897 226 394 308	523 550 656 268	3 373 675 741 042	339 257 750 063	3 712 913 491 105	3 378 936 741 042	3 682 990 491 105



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 16.B

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7 = 5 + 6)*	*(8)*	*(9)*	*(10 = 8 + 9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15*	*(17)*	*(18 = 16 + 17)*	*(19)*	*(20 = 16 x 19)*
	PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan																	
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	-	-	100.740.244.241.489	-	-	83.216.800.934.460	30.516.600.000.000	-	-	16.698.919.212	8.990.144.387.817	37.523.443.307.029	-	37.523.443.307.029	100,00	37.523.443.307.029
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited	-	-	13.547.457.183.000	-	-	204.025.005.000	8.000.000.000.000	1.570.000.000.000	-	298.531.898.000	3.474.900.280.000	13.343.432.178.000	-	13.343.432.178.000	100,00	13.343.432.178.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited	-	-	32.508.786.000.000	-	-	21.077.814.000.000	6.800.000.000.000	1.750.000.000.000	-	7.168.000.000	2.871.804.000.000	11.428.972.000.000	-	11.428.972.000.000	100,00	11.428.972.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited	743.469.613.368	4.062.463.914.206	4.805.933.527.574	434.432.096.587	545.165.998.208	979.598.094.795	3.275.443.770.000	700.000.000.000	-	-	(149.108.337.221)	3.826.335.432.779	-	3.826.335.432.779	94,50	3.571.118.859.413
	Total Persero		**743.469.613.368**	**4.062.463.914.206**	**151.600.420.952.063**	**434.432.096.587**	**545.165.998.208**	**85.478.238.034.255**	**48.592.043.770.000**	**4.020.000.000.000**	-	**322.398.817.212**	**13.187.740.330.596**	**66.122.182.917.808**	-	**66.122.182.917.808**		**65.866.966.344.442**
	Badan Usaha Lainnya																	
5	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited	-	-	5.109.461.000.000	-	-	1.584.707.000.000	5.774.815.000.000	-	-	843.965.000.000	(3.249.369.000.000)	3.369.411.000.000	155.343.000.000	3.524.754.000.000	46,99	1.583.286.228.900
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	-	-	92.084.560.000.000	-	-	67.288.011.000.000	32.146.276.000.000	-	-	131.101.000.000	(7.480.828.000.000)	24.796.549.000.000	-	24.796.549.000.000	100,00	24.796.549.000.000
	Total Badan Usaha Lainnya		-	-	**97.194.021.000.000**	-	-	**68.872.718.000.000**	**37.921.091.000.000**	-	-	**975.066.000.000**	**(10.730.197.000.000)**	**28.165.960.000.000**	**155.343.000.000**	**28.321.303.000.000**		**26.379.835.228.900**
			743.469.613.368	**4.062.463.914.206**	**248.794.441.952.063**	**434.432.096.587**	**545.165.998.208**	**154.350.956.034.255**	**86.513.134.770.000**	**4.020.000.000.000**	-	**1.297.464.817.212**	**2.457.543.330.596**	**94.288.142.917.808**	**155.343.000.000**	**94.443.485.917.808**		**92.246.801.573.342**

SK No 062711 C

LAMPIRAN 17
LAPORAN PMN PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

LAMPIRAN 17

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL PER 31 DESEMBER 2020

Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang		
			USD	IDR	Utang dalam MUA		Utang dalam IDR
A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional							
Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.907.774.801.713			
World Bank Group							
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD		167.203.427,47	2.358.406.016.499			
International Development Association (IDA)	USD		53.013.471,00	747.755.538.590			5.237.901.545
International Finance Corporation (IFC)	USD		240.952.000,00	3.398.630.369.520			
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD		3.797.820,00	53.568.289.078	USD	1.135.018	16.009.440.240
Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	144.283.155,54		2.948.434.052.460			
International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD		2.060.000,00	29.056.320.600			

The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	SDR	246.693,17		5.041.188.839			
International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		74.959.000,00	1.057.297.444.590			
Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017)	EUR	223.450,38		18.385.076.443	EUR	223.450	3.872.424.134
	USD		15.588,60				
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD		22.242.552,28	313.730.928.660			
Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	177.723.126.000			
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD		672.100.000,00	9.479.977.221.000			
Jumlah		**433.853.299,09**	**1.248.943.859,35**	**26.495.780.373.991**			
PMN Lainnya							
ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.692.601.200.000			
International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	56.420.040.000			
Jumlah		-	**124.000.000,00**	**1.749.021.240.000**			
Jumlah		**433.853.299,09**	**1.372.943.859,35**	**28.244.801.613.991**			**25.119.765.919**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 17

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,44878
2. Kurs Euro to IDR 17.330,13
3. Kurs USD to IDR Rp 14.105
3. Kurs USD to SDR 0,690234

LAMPIRAN 18
IKHTISAR LK NON BUMN
(MINORITAS)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 18.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2020	383 079	278 249	104 830	18 760	8.393	115 197	30	115 166	23 583	91 583	(3 738)	87 845	91 618	87 880
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2020	181 888	144 760	37 128	20 529	7.059	50 598		50 598	20 216	30 383	(44)	30 338	30 383	30 338
3	PT Nindya Karya	Audited 2020	3 616 483	3 503 142	113 341	143 390	117 518	139 213	89 112	50 101	7 279	42 822	4 333	47 155	50 896	55 275
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2020	820.213	776 621	43.592	18 295		61 887	137.183	(75.296)		(75 296)		(75 296)	(75 261)	(75 261)
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2020	1 412 867	1 322.474	90.493	376 858	153 051	314 300	260.168	54 132		54.132		54 132	54 488	54 488
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2020	6 357 380	5 101 290	1 256 130	309 870	101 900	1 464 100	538 400	925 700	310 642	615 058	(519 762)	95 296	664 471	144 709
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2020	5 332 598	4 445 130	887.468	124 566	103 034	909 000	331 470	577 530	171 697	405 833		405 833	405 833	405 833
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2020	1 658 452	1 455 176	203.276	39 341		242 617	143 031	99 586	29 562	70 024	(117 024)	(47 000)	70 413	(46 612)
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2020	2 972 806	3 220 895	(248.089)	120 977	128 824	(755 936)	562 724	(818 660)		(818 660)		(818 419)	(818 419)	(818 419)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2020	1 186 610	1 421 863	(235.253)	180 532	29 527	(84 248)	197 204	(281 452)	619	(282 071)		(282 071)	(281 810)	(281 810)
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2020	791.074	1 196 637	(405.563)	138 107		(267 456)	186.934	(454 390)	11 358	(465 748)	(139 544)	(605 292)	(465 748)	(605 292)
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2020	2.488.400	2 454 763	33,637	317 838	73 390	278 085	193.416	84 669	37 974	46 695	281 896	328 591	41 230	324 419
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2020	3 532 670	3 485 927	46 743	124 314	242	170 815	179 212	(8 397)	26 458	(34 855)		(34 855)	(34 855)	(34 855)
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2020	1 434 139	1 471 756	(37 617)	128 671	131 813	(40 759)	392 448	(433 207)	15 864	(449 071)	6 850	(442 221)	(448 023)	(441 173)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2020	1 291 216	1 298 766	(7 550)	66 399	154 043	(95 194)	429 809	(525 003)	908	(525 911)	(34 506)	(560 417)	(527 802)	(562 308)
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2020	851 372	911 778	(60 406)	11 275	15 170	(64 301)	199 954	(263 255)		(263 255)		(263 255)	(263 255)	(263 255)
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2020	8 128 850	9 695 467	(1 566 617)	239 651	60 307	(1 387 273)	249 935	(1 637 208)	27 079	(1 664 287)	11 635	(1 652 652)	(1 693 136)	(1 681 501)
18	PT PANN Pembayaran Maritim	Unaudited 2020	14.717	20 141	(5 424)	28 038	327	20 287	6 416	13 871	6 462	7 409		7 409	7 409	7 409
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2020	27.925.661	26 503 919	1 421 742	1 168 841	145 116	2 445 467	3 045 068	(599.541)	30 619	(630 160)	(141 411)	(771 571)	(716 719)	(852 768)
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2020	4 187 913	6 280 546	(2 092 633)	804 592	7 759	(1 295 800)	82 862	(1 358 662)	(299 071)	(1 059 591)	186 455	(873 136)	(1 059 698)	(873 243)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 18.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10+11	13	14
21	PT Socfindo															
22	PT Asean Bintulu Fertilizer															
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri															
24	PT Kawasan Industri Lampung															
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2020	17 325 192	14.804.867	2.520.335	843 775		3 364 110	132.515	3 231,595	823.758	2 407.837	(158.397)	2 249 440	2 386 819	2.228.422
26	PT Timah Tbk	Audited 2020	15 215 980	14 998 526	217 454	183 098	67 138	333 414	807.370	(273 956)	66 646	(340 602)	(41 955)	(382 557)	(340 599)	(382.564)
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2020	27 372 461	25 340 158	2 032.303	308 736	134 409	2 206.630	585 452	1 641 178	491 824	1 149 354	(175 476)	973 878	1 149 353	973 677
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2020	42 062 460	37 311 851	4 750 609	1 834 924	6 644 546	(58 812)	2 497 346	(2 556 158)	589 090	(3.145 247)	65 318	(3.079 929)	(3 859 605)	(3 792 270)
29	PT Istaka Karya (Persero)	SMT II2020	23 172	30 133	(6 961)	1 321	0	(5 640)	6 055	(11 695)	251	(11 946)	0	(11 946)	(11 946)	(11 946)
30	PT Indofarma Tbk	Unaudited 2020	1 744 219	1 600 075	144 144	0	40.723	103 421	37 017	66 404	18 701	47 703	45 455	93 158	47 698	93 153
31	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2020	10.008 173	9 675 054	331 119	348.899	8.282	669.736	596 377	73 359	52.933	20 426	(85.780)	(65.354)	17,839	(65 189)
32	PT Asuransi Jasa Indonesia	Unaudited 2020	3 694 815	3 795.052	(100.237)	604.022	864.121	(360.336)	71 433	(431 769)	4.008	(435 775)	43.468	(392.307)	(438.599)	(393 121)
33	PT Jasa Raharja	Unaudited 2020	6 394 779	4 775 830	1 618 949	24 721	27 402	1 616 268		1 616 268	232 345	1 383 923	(125 870)	1 258 053	1 379 072	1 251 892
34	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2020	3 957 008	3 426 049	530 959	72 472		603 431		603 431	181 601	421 830	126 031	547 861	421 830	547 861
35	PT Asuransi Kredit Indonesia	Unaudited 2020	8 952 364	7 883 220	1 069 144	11 459	80 578	1 000 025		1 000 025	118 429	881 596	47 417	929 013	881 327	928 744
Total			211.317.112	198.629.865	12.687.246	8.610.273	9.104.673	12.192.846	11.717.881	474.965	3.000.834	(2.525.869)	(724.650)	(3.250.277)	(3.332.996)	(4.047.296)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2020	538.134	466.868	1.005.002	108.074	18.492	126.566	200.000	-	-	(9.512)	688.160	878.648	(213)	878.435	50,00%	439.324
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2020	527.373	272.895	800.268	114.974	453.923	568.897	200.000	-	-	(150)	31.522	231.372	0	231.372	50,00%	115.686
3	PT Nindya Karya	Audited 2020	4.221.245	1.265.572	5.486.818	3.203.168	765.575	3.968.743	559.497	-	-	336.686	610.943	1.507.126	10.949	1.518.075	1,00%	59.500
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2020	264.785	2.177.511	2.442.296	1.527.307	1.160.500	2.687.807	160.997	7.766	-	230.329	(644.786)	(245.694)	183	(245.511)	24,00%	38.641
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2020	480.447	7.658.494	8.138.941	3.086.425	2.596.358	5.682.783	327.606	-	-	3.726.780	(1.598.512)	2.455.874	284	2.456.158	10,00%	32.761
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2020	2.569.317	15.966.152	18.535.469	2.710.041	8.669.638	11.379.679	2.942.116	45.658	-	3.093.308	1.113.027	7.194.109	(38.319)	7.155.790	10,00%	294.212
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2020	1.633.442	8.091.313	9.724.755	1.595.195	5.737.923	7.333.118	1.313.322	5.902	-	1.108.450	(36.038)	2.391.636	1	2.391.637	10,00%	131.332
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2020	551.042	3.853.313	4.404.355	659.992	2.196.396	2.856.388	653.293	28.353	-	735.702	127.639	1.544.987	2.980	1.547.967	10,00%	65.329
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2020	1.194.596	10.848.315	12.042.911	5.201.802	6.837.672	12.039.474	1.401.223	51.018	-	4.143.533	(5.593.038)	2.736	701	3.437	10,00%	140.122
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2020	817.592	10.609.030	11.426.622	2.542.700	2.933.567	5.476.267	930.302	24.485	-	6.088.923	(1.095.309)	5.948.401	1.954	5.950.355	13,17%	122.528
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2020	1.037.831	4.059.566	5.097.397	2.546.735	1.472.329	4.019.064	1.627.830	-	-	1.887.895	(2.437.392)	1.078.333	0	1.078.333	10,00%	159.981
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2020	2.192.595	10.338.887	12.531.482	1.429.623	1.891.608	3.321.231	1.845.596	482.965	-	6.339.583	469.369	9.137.513	72.738	9.210.251	10,00%	184.560
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2020	959.743	7.918.114	8.877.857	2.062.712	2.075.785	4.138.497	1.168.481	-	-	3.645.165	(74.286)	4.739.360	0	4.739.360	10,00%	116.848
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2020	864.667	10.427.247	11.291.914	2.851.817	2.249.240	5.101.057	1.272.976	92.738	-	5.105.270	(281.597)	6.189.387	1.470	6.190.857	10,00%	127.298
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2020	365.721	3.552.610	3.918.331	3.592.591	3.710.125	7.302.716	1.029.738	-	-	1.257.474	(5.711.197)	(3.423.985)	39.600	(3.384.385)	10,00%	102.974
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2020	380.754	2.091.700	2.472.454	1.398.752	2.094.970	3.493.722	235.000	2.859	-	910.414	(2.169.541)	(1.021.268)	0	(1.021.268)	10,00%	23.500
17	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2020	7.762.569	2.192.796	9.955.365	8.516.671	2.134.745	10.651.416	450.000	-	-	(1.675.825)	450.535	(775.290)	79.239	(696.051)	4,97%	22.366
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudited 2020			933.255			252.652	1.315.061	87.690	-	0	(722.148)	680.603	0	680.603	0,00%	1
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2020	9.594.951	53.183.789	62.778.740	22.658.094	27.207.250	49.865.344	543.393	1.546.587	-	353.504	9.426.998	11.870.482	1.042.914	12.913.396	14,29%	77.662
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2020			80.321.845			69.963.671	1.376.437	6.871.385	-	1.689.249	398.532	10.335.603	22.571	10.358.174	11,44%	150.786
21	PT Socfindo	Audited 2019	357.477	1.499.783	1.857.260	332.191	637.022	969.213	42.250	3.671	-	0	842.126	888.047	0	888.047	10,00%	4.225
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2017	978.516	2.670.815	3.649.331	210.068	462.601	672.669	1.000.500	-	-	0	1.976.162	2.976.662	0	2.976.662	13,00%	136.188
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2019	1.071.191	646.386	1.717.577	113.828	156.247	270.075	50.888	(22.638)	-	408.714	1.010.537	1.447.502	0	1.447.502	5,00%	2.479
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	21.461	304	21.765	78	0	78	8.656	-	-	0	13.031	21.687	0	21.687	20,36%	1.762
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2020	8.364.356	15.692.399	24.056.755	3.872.457	3.245.102	7.117.559	1.152.066	(132.439)	-	223.202	15.520.575	16.763.404	175.792	16.939.196	0,00%	0
26	PT Timah Tbk	Audited 2020	6.557.264	7.960.436	14.517.700	5.865.165	3.712.399	9.577.564	372.388	64.383	-	(106.645)	4.609.863	4.939.989	147	4.940.136	0,00%	0
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2020	9.150.514	22.578.999	31.729.513	7.553.261	5.136.803	12.690.064	2.403.076	3.934.833	-	3.915.455	8.786.064	19.039.428	21	19.039.449	0,00%	0
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2020	28.291.609	77.975.270	106.266.878	16.688.406	47.892.007	64.580.413	4.852.386	(6.595.140)	-	(560.950)	33.802.098	31.498.393	10.188.072	41.686.465	0,00%	0
29	PT Istaka Karya (Persero)	SMT I/2020	333.629	270.783	604.412	408.278	64.500	472.778	652.898	-	-	147.662	(668.926)	131.634	0	131.634	7,66%	50.000
30	PT Indofarma Tbk	Unaudited 2020	1.339.714	632.604	1.972.318	947.196	451.449	1.398.645	309.927	81.120	-	212.949	(30.330)	573.666	7	573.673	0,00%	0
31	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2020	6.093.104	11.469.713	17.562.817	6.786.942	3.670.203	10.457.145	555.400	(885.401)	-	5.032.162	2.291.237	6.993.397	112.275	7.105.672	0,00%	0

LAMPIRAN 18.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16
32	PT Asuransi Jasa Indonesia	Unaudited 2020			14.055.335			11.232.650	425.000	-	-	115.827	2.272.965	2.813.792	8.893	2.822.685	0,00%	1
33	PT Jasa Raharja	Unaudited 2020			17.366.939			5.989.296	8.500.000	-	-	(527.140)	3.334.377	11.307.237	70.406	11.377.643	0,00%	1
34	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2020			19.380.636			8.824.082	7.638.733	-	-	268.385	2.649.422	10.556.540	14	10.556.554	0,00%	1
35	PT Asuransi Kredit Indonesia	Unaudited 2020			25.041.791			13.213.531	400.000	6.211.000	-	(103.770)	5.320.143	11.827.373	887	11.828.260	0,00%	1
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Ekuitas																	**555.010**
	Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																	**2.045.059**
	Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																	**2.600.069**

LAMPIRAN 19
IKHTISAR LK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)
AUDITED	4.000.000.000.000	19.355.871.786.000	(5.854.334.000)	119.829.633.684.000	139.179.651.136.000

LAMPIRAN 20
ASET TETAP

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	855.795.947.000	855.795.947.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.145.127.861.259	1.143.368.231.643
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.920.800.077.963	5.980.428.125.661
4	005	MAHKAMAH AGUNG	19.866.238.947.020	19.810.522.554.459
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	17.458.553.879.670	17.152.277.843.897
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	624.043.348.021.233	563.825.145.662.880
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	11.983.889.739.493	11.780.535.039.124
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	38.233.070.437.776	38.217.108.897.564
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.452 256.556.019.210	1.450.878.813.257.800
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	54.289.885.533.612	54.456.131.211.590
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	94.986.555.741.841	95.993.397.699.923
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	71.957.472.116.814	76.634.434.244.419
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	8.706.734.244.987	8.694.889.734.067
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.399.741.468.127	15.410.585.700.127
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	307.637.163.028.720	312.551.921.002.102
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	362.926.207.366.365	16.811.909.997.257
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	66.279.951.211.967	70.914.878.240.094
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	68.424.386.869.769	61.700.844.520.566
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	7.681.588.339.500	7.643.451.530.970
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	18.565.546.383.592	18.532.038.706.705
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.975.448.946.436	9.974.257.123.792
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.095.136.196.088	16.045.992.090.586
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	861.022.746.759.175	944.793.411.541.173
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	6.265.743.969.368	6.202.012.808.068
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.468.058.953.000	1.448.189.807.000
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	12.058.461.798.500	352.606.484.493.014
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.282.411.957.000	3.282.411.957.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.358.220.000	1.626.120.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	32.784.833.000	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.692.177.609.401	5.649.972.594.296
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.171.066.800.980	1.162.535.693.980
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.042.748.172.894	3.052.318.324.207
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.541.450.676.000	1.484.443.750.305
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	9.116.981.714.216	9.059.218.112.964
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.866.606.161.000	1.866.606.161.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.815.987.200.981	5.493.014.424.141
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	211.280.604.269.721	211.086.192.098.983
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.662.112.123.045	1.559.938.837.794
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.378.951.719.000	1.378.951.719.000

LAMPIRAN 20.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	621.749.806.223	592.366.444.327
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	677.750.355.000	677.750.355.000
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.082.892.458.616	2.068.090.785.806
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.426.546.945.512	3.387.359.220.617
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.060.182.468.203	1.012.520.186.736
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	506.815.456.000	506.815.456.000
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	235.129.558.040	233.761.358.040
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	29.471.771.617.855	29.454.769.398.491
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	13.034.026.829.000	13.034.026.829.000
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	4.697.895.152.000	4.697.895.152.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.562.543.166.209	1.612.229.053.490
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	195.151.853.800	185.634.271.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	112.976.306.000	112.976.306.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.037.206.223.100	3.037.206.399.100
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	805.323.718.068	802.586.806.600
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.302.109.905.449	2.551.874.317.382
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4.071.574.223.396	4.073.366.152.305
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.893.078.693.628	2.690.879.809.666
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	618.688.640.000	618.688.640.000
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.736.548.733.375	1.736.548.733.375
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	202.962.293.509	201.791.893.509
68	100	KOMISI YUDISIAL	272.460.683.000	272.460.683.000
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	279.632.984.000	279.632.984.000
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	238.470.921.000	237.659.879.100
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	369.821.075.000	369.821.075.000
72	107	BADAN SAR NASIONAL	974.033.303.053	954.743.527.882
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1.987.200.000	1.987.200.000
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	732.391.903.712	735.650.903.712
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	50.791.241.000	26.592.174.000
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	108.775.000	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	41.853.173.848.074	42.356.379.117.074
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	38.261.256.000	38.261.256.000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	94.220.358.803	9.942.054.967
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	12.649.246.747.578	12.615.286.988.073
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	11.377.229.505.514	11.356.325.846.639
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.753.656.459.824	1.769.726.523.620
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	18.987.160.495	18.556.963.495

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-
JUMLAH PADA K/L			**4.547.207.396.059.750**	**4.571.429.747.469.160**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	26.594.107.000	26.594.107.000
		Penyesuaian (Eliminasi) pada SPAN	(7.344.825.442.000)	(5.701.893.036.000)
TOTAL			**4.539.889.164.724.750**	**4.565.754.448.540.160**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	188.952.116.351	(151.473.023.704)	37.479.092.647	175.144.642.083	(139.768.822.185)	35.375.819.898
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.777.244.120.443	(1.217.806.110.072)	559.438.010.371	1.658.100.510.792	(1.099.476.810.539)	558.623.700.253
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.159.391.106.309	(1.817.029.175.629)	342.361.930.680	1.991.163.973.440	(1.696.950.217.916)	294.213.755.524
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.422.382.641.931	(2.796.013.714.015)	626.368.927.916	3.231.892.316.912	(2.539.050.676.958)	692.841.639.954
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.480.695.672.574	(2.727.625.171.551)	2.753.070.501.023	5.398.671.339.531	(2.630.682.436.133)	2.767.988.903.398
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.153.427.190.604	(2.685.329.181.173)	1.468.098.009.431	4.023.211.260.680	(2.432.680.109.813)	1.590.531.150.867
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.160.929.282.184	(2.837.946.953.472)	322.982.328.712	3.064.758.107.592	(2.763.830.269.568)	300.927.838.024
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.511.546.269.874	(1.810.814.531.422)	700.731.738.452	2.431.479.656.691	(1.640.859.082.753)	790.620.573.938
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	278.199.640.486.008	(150.498.488.572.102)	127.701.151.913.906	244.484.487.394.530	(127.567.544.790.539)	116.916.942.603.991
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7.783.913.088.592	(6.036.170.230.382)	1.747.742.858.210	7.398.289.284.727	(5.208.649.428.511)	2.189.639.856.216
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.021.576.411.944	(12.025.979.872.739)	2.995.596.539.205	14.299.282.360.083	(11.404.194.747.156)	2.895.087.612.927
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.126.417.852.450	(4.928.705.573.642)	1.197.712.288.808	6.548.535.528.157	(5.175.230.663.237)	1.373.304.864.920
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.322.683.523.812	(2.448.171.847.912)	874.511.675.900	3.276.684.437.117	(2.223.119.262.684)	1.053.565.174.433
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.570.536.193.580	(4.532.338.427.649)	1.038.197.765.931	5.304.868.050.573	(4.291.886.898.696)	1.012.981.151.877
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	51.721.317.786.356	(33.593.087.876.426)	18.128.229.909.930	51.191.308.641.024	(30.020.487.586.567)	21.170.821.054.457
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30.758.069.685.438	(23.553.117.939.353)	7.204.951.746.085	3.696.121.667.805	(2.690.762.980.117)	1.005.358.687.788
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	26.416.281.114.199	(18.576.068.827.449)	7.840.212.286.750	22.482.127.439.185	(16.525.172.470.439)	5.956.954.968.746
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	10.579.302.828.965	(8.230.267.284.345)	2.349.035.544.620	9.457.063.852.416	(7.349.431.382.176)	2.107.632.470.240
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.804.248.609.916	(1.991.254.811.328)	812.993.798.588	2.600.242.724.246	(1.766.789.368.841)	833.453.355.405
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.037.635.381.225	(1.683.001.669.125)	354.633.712.100	1.904.924.241.165	(1.552.647.621.419)	352.276.619.746
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.586.431.265.499	(2.702.205.537.793)	884.225.727.706	3.476.102.967.487	(2.533.887.876.342)	942.215.091.145
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.889.878.225.933	(4.482.356.387.990)	1.407.521.837.943	5.761.526.276.152	(4.095.790.164.800)	1.665.736.111.352
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	14.234.787.804.272	(10.003.511.029.073)	4.231.276.575.199	13.743.729.056.080	(9.014.768.306.551)	4.728.960.749.529

LAMPIRAN 20.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	122.313.208.080	(101.151.206.427)	21.162.001.653	126 310 524.363	(102.255.359.701)	24 055 164 662
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	78.465.371.778	(58.868.273.850)	19.597.097.928	73.866.781.172	(57.838.802.839)	16.027.978 333
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	83.811.500.009	(67.400.653.761)	16.410.846.248	76.925.679.584	(62.189.092.633)	14.736.586.931
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	796.838.828.277	(479.287.183.391)	317.551.644.886	636.501.767.984	(383.561.951.290)	252.939.816.694
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	107.900.878.431	(65.923.368.048)	41.977.510.383	125.125.261.746	(100.730.167.953)	24.395.093.793
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	870.084.053.256	(629.054 936 750)	241.029.116.506	25.526.249.736.793	(19.085.997.095.625)	6.440.252.641.168
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	408.554.665.064	(369.127 898 355)	39.426.766.709	408.983.616.837	(365.975.320.031)	43 008.296.806
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95.363.456.859	(84.769.412.108)	10.594.044.751	95.673 691.804	(79.552.158.307)	16.121.533.497
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	124.345.957.662	(88.708.701.869)	35.637.255.793	109.999.882.248	(78.398.689.409)	31.601.192.839
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	12.689.585 827.837	(8.997.297.530.592)	3.692.288.297.245	11.288.534.107.107	(7.167 749 760.905)	4.120.784.346.202
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	8.006.320 860.452	(6.760.206.785.656)	1.246.114 074 796	7 673.246 745.248	(6.082 680.059.497)	1.590.566.685.751
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	157 408.319.298	(140.823.036.855)	16.585.282 443	158.352.426.940	(123 825.120.127)	34.527.306.813
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.160.189.634.187	(1.744.721.681.418)	415.477 952 769	2.115.313.606.795	(1.607.683.274.699)	507.630.332.096
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	469 890.509.737	(285.218.172.126)	184.672.337.611	433.773 685.330	(236 258.194.736)	197.515.490.594
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.038.110.046.421	(2.348.194.342.134)	689.915.704.287	2.920.546.112.445	(2.079.068.939.052)	841.477.173.393
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	666.762.606.723	(429 672.140.419)	237.090.466.304	654.719.668.603	(333.143.799 859)	321 575 868.744
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.998.876.764.328	(1.557.985.215.827)	440.891.548.501	1.988.219.795.411	(1 508.459.452 959)	479 760 342.452
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	138.359.711.217.093	(89.900 799.721.185)	48.458.911.495.908	124 343.236.274.961	(71 530.000.351.896)	52.813.235.923.065
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.699.777.586.022	(1.849 314.403.097)	850.463.182.925	2.646.113.790.733	(1.674.074.319.017)	972.039.471 718
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	373.677.175.403	(318.665.235.186)	55.011.940.217	357.718.182.514	(292.114.819.449)	65.603.363.065

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	275.275.280.660	(231.305.700.347)	43.969.580.313	264.795.085.610	(220.420.635.531)	44.374.450.079
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.217.458.250.465	(1.584.824.629.915)	632.633.620.550	2.102.945.947.691	(1.367.542.102.556)	735.403.845.135
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	380.004 557.930	(296.358.156.625)	83.646.401 305	367.861.952.630	(264.548.073.679)	103 313.878.951
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	486.733.383.914	(406 606.406 360)	80.126.977 554	469.492 592.390	(384.270.395 574)	85 222.196.816
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	25.726.098.414	(21.608.085.081)	4.118.013.333	24.660.595.661	(21.830.343.217)	2.830.252.444
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	5.419.380.022.197	(3.997.899.699.402)	1.421.480.322.795	5.126.879.453.062	(3.565.055.208.347)	1.561.824.244.715
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.569.738.727.001	(1.053 299.520 742)	516.439.206.259	1.492.197.617.709	(872.000.067.350)	620.197.550.359
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	275.936.820.187	(247 097.073 436)	28.839.746.751	262.741 301 368	(235.483.388.941)	27.257.912.425
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	174.237.300.582	(114.175.260.665)	60.062.039.927	146.478.871.735	(101.997.535.400)	44.481.336.335
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.883.731.129.189	(1.220.720.686.929)	663.010.462.260	1.760.736.824.605	(1.085.070.327.481)	675.666.497.124
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.253.729.535.115	(784.535.021.663)	469.194.513.452	1.234.002.287.911	(695.310.225.668)	538.692.062.243
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.651.105.348.660	(2.281.247.835.028)	1.369.857.513.632	3.394.773.255.000	(2.079.022.628.748)	1.315.750.626.252
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.810.945.754.720	(1.000.450.919.489)	810.494.835.231	1.795.425.017.339	(877.956.697.722)	917.468.319.617
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.128.151.561.412	(929.532.831.292)	198.618.730.120	1.093.797.501.925	(850.297.929.114)	243.499.572.811
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	307.375 531.788	(214.441.865.825)	92.933.665.963	227 150.577.482	(198.275.718.536)	28 874.858 946
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	151.797.418.531	(107.645.136.733)	44.152.281.798	151.857.221.185	(94.546.315.879)	57.310.905.306
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	202.152.957.486	(167.608.946.053)	34.554.011.433	185.566.904.080	(158.502.097.020)	27.064.807.060
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	219.324.401.371	(189.861.456.321)	29.462.945.050	221.057.763.568	(182.723.430.638)	38.334.332.930
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	568.440.548.093	(487.381.520.102)	81.059.027.991	557.396.934.784	(451.523.348.089)	105.873.586.695
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511 789 415.675	(356 531 985 194)	145.257 450.481	425.017 008 495	(329.599.842.479)	95.417 166.016
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	909 965.571 123	(706.138.686.587)	203.826.884.536	844.845.772.199	(667.149.221.233)	177.696.550.966
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	516.839.454.549	(456.404.395.414)	60.435.059.135	598.627.791.420	(479.995.258.903)	118.632.532.517
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	612.886.808.743	(483.037.769.928)	129.849.038.815	619.926.156.543	(435.242.316.098)	184.683.840.445

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	146.684.438.280	(131.465.961.208)	15.218.457.072	140.247.104.900	(123.421.467.292)	16.825.637.608
68	100	KOMISI YUDISIAL	51.292.874.080	(47.721.818.883)	3.571.055.197	50.809.915.580	(45.497.519.146)	5.312.396.434
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.497.056.629.725	(1.217.357.541.178)	279.699.088.547	1.288.161.095.504	(1.124.216.549.809)	163.944.545.695
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	163.841.639.791	(149.271.159.573)	14.570.480.218	168.043.227.113	(145.675.590.473)	22.367.636.640
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	292.670.440.905	(253.397.891.301)	39.272.549.604	267.245.049.940	(195.913.778.048)	71.331.271.892
72	107	BADAN SAR NASIONAL	9.732.114.094.615	(6.301.293.860.840)	3.430.820.233.775	9.594.218.826.241	(5.548.286.687.463)	4.045.932.138.778
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	32.656.872.202	(24.251.024.211)	8.405.847.991	28.793.016.373	(21.688.809.712)	7.104.206.661
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	49.200.508.019	(27.069.490.223)	22.131.017.796	49.158.435.046	(22.808.707.827)	26.349.727.219
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	44.355.098.872	(37.277.391.719)	7.077.707.153	42.673.256.004	(33.911.399.058)	8.761.856.946
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	401.013.798.654	(179.208.024.666)	221.805.773.988	257.657.876.741	(85.189.696.935)	172.468.179.806
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.737.345.808.487	(1.117.114.639.328)	620.231.169.159	1.344.159.267.549	(964.437.508.753)	379.721.758.796
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	401.790.623.503	(320.244.738.726)	81.545.884.777	345.529.969.439	(233.545.280.149)	111.984.689.290
79	114	SEKRETARIAT KABINET	54.657.316.543	(42.919.219.727)	11.738.096.816	64.892.159.254	(45.993.304.559)	18.898.854.695
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	487.773.214.331	(273.277.891.964)	214.495.322.367	457.564.827.607	(201.168.448.544)	256.396.379.063
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.365.588.159.650	(1.160.424.475.411)	205.163.684.239	1.378.777.595.373	(1.160.905.509.366)	217.872.086.007
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.926.852.848.761	(1.854.578.532.089)	1.072.274.116.672	2.763.322.049.122	(1.627.298.828.607)	1.136.023.220.515
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	75.810.921.708	(49.816.089.422)	25.994.832.286	58.652.237.458	(44.774.852.436)	13.877.385.022
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2.109.105.445.237	(1.048.568.687.065)	1.060.536.758.172	2.022.269.725.417	(824.117.193.026)	1.198.152.532.391
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	114.220.921.381	(83.513.187.757)	30.707.733.624	111.353.395.238	(63.886.488.023)	47.466.907.215
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	31.551.646.060	(18.915.958.553)	12.635.687.507
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	42.783.062.620	(11.298.555.649)	-	32.378.088.100	(2.736.987.472)	-
JUMLAH PADA K/L			**706.494.617.328.555**	**(449.284.737.397.471)**	**257.178.595.424.113**	**643.224.820.285.815**	**(387.467.972.377.378)**	**255.727.206.787.609**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	471.432.057.006	(431.119.995.473)	40.312.061.533	459.546.351.995	(391.217.254.584)	68.329.097.411
TOTAL			706.866.249.385.561	(449.715.857.392.944)	257.218.907.485.848	643.684.366.617.610	(387.859.189.631.962)	255.795.535.885.020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	215.807.359.557	(26.661.058.819)	189 146.300.638	211.682.975.921	(18.868.682 085)	192.994.293.836
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	943.539.385.783	(118 768.689.696)	824.772 696.087	877.246.448.738	(78.229.247.507)	799.016.201.231
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2 544.150.887.350	(242.031.198.294)	2.302.119 689.056	2.508.643.269.633	(167.143.122.339)	2.341.500.147.294
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8 743.802 063.295	(1.138 286 798 010)	7.605.515.265.285	8.238.230 128.101	(841 889.652.971)	7.396.340.475.130
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5 541 511.439 767	(609.605 118 459)	4.931 906.321 308	5.194 376 730.278	(451.794 085.025)	4 742 582 645.253
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	6.936.050.315.852	(747.379.860.041)	6.188.670.455.611	6.634.905.572.103	(440.835.410 048)	6.194.070.162.055
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.757.603.421.959	(247.327.872 840)	2.510.275.549.119	2.756.244.855 806	(206 729.829.210)	2.549.515.026 596
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9.561.680 287.326	(1.309.304.369.458)	8 252.375.917.868	9.231.708.942 471	(804.216 035.834)	8.427.492.906 637
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	82.450.443.365.592	(11.515.265.701.777)	70 935 177.663.815	71.986.135.283.561	(12.158.195 476.298)	59.827.939 807.263
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.533.396.297.024	(1.440.526.959.909)	11 092 869.337.115	11 958.064.335.324	(1.010.882.340.912)	10.947.181.994.412
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	16.545.039.186.870	(1 938.028.618.908)	14.607.010.567.962	16.435.861.201.445	(1.389.990.400.427)	15.045.870.801.018
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6 176 730.735.778	(727 374.648 856)	5.449.356 086.922	5 968.056 274 799	(524 822.572.147)	5.443.233.702 852
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2 373.930.665.269	(326.980.468.420)	2.046.950 196.849	2.150.853 666.779	(219.681.354.373)	1.931.172.312.406
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2 653.005 120.546	(295.097.662 422)	2.357.907 458.124	2.559 745.423.102	(214.466.197.396)	2.345 279.225.706
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	27.501.018.488.532	(2.740 120 107.389)	24.760.898.381 143	26.101.194 186.746	(2 282 633.152.230)	23.818 561.034.516
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.682.540.415 084	(4.117 795.551.178)	40.564.744.863.906	6.679.857.570 435	(443.756.973.306)	6.236.100.597.129
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	17.440.281 915 979	(2.146.209.734.090)	15.294.072.181.889	16.309.053.886 131	(1.649 968 144.835)	14.659.085.741 296
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	37 113 610.592.228	(3.256.404.032.407)	33.857.206 559.821	32 880 351 406.690	(2.253 910 404 087)	30.626.441 005.603
19	028	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.278.388.163.707	(270.540.972.816)	2.007 847.190.891	1.919.956.354.488	(176.031.821 927)	1.743.924.532.571
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.136.028.516.570	(283.649.854.987)	1.852 378.661.583	1 798.628.848.287	(102.053.118.595)	1.816.575.729.672
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3 569 013 985.824	(360.291 406 061)	3.208.722.579.563	3.293.584 141 911	(255 913.152.553)	3.037.670.989.358
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.296.727.634.748	(514.339.205 491)	4.782.388.429.257	5.064.491 114.759	(368 205 780.239)	4.696.285.334.520
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	24.734.339.705.827	(1.785.455.560.071)	22.948.884.145.756	23.888.215.003.244	(1.328 727 943.854)	22.559.487 059.390
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	10.474.038.777	(774.545.115)	9.699.493.662	10.474.038.777	(537.689.242)	9.936.349.535

LAMPIRAN 20.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	29.541.154.075	(1 779.587.595)	27 761.566.480
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	(54.159.346.109	(11.711.534.298)	142.447.811.811	154.040.207.650	(8.360.129.765)	145.680.077.885
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1 657.699.259.382	(138.848.415.441)	1.518.850.843.941	1.624.135.755 412	(92.193.671.434)	1.531.942.083.978
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	400.689.725.717	(26.529.064.349)	374.160.661.368	396.488 627 387	(18.434.322.680)	378.054.304.727
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	889 017 816.331	(127.005.770 039)	762.012.046.292	35 027.351 350 963	(2.651 183.986.378)	32.376 167.364.585
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	839 813 703.110	(98.227.319.414)	741.586.383.696	837.639 845 313	(75.646.709.150)	761.993.136.163
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	173.068 613 000	(12.908.269.087)	160.160.343 913	173.088 813.000	(9 220.192.205)	163 848.420.795
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	77.217 968 092	(7.032.399.702)	70 185.569.390	72.771.504.892	(5 049.121.269)	67 722.483.623
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1 079 933.393.000	(133 430.830.541)	945 402.562.459	1.016.285.850.700	(80 908.180.505)	925 377.670.195
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1 309.229.831.141	(95.509.319.693)	1 213 720.511.448	1.219.355.500.423	(64 561.908.060)	1 154 793.592.363
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1 922.474 020 273	(209 081 465 711)	1 713 392 554 562	1 900.603 566.704	(152.084.221.131)	1 748 519.345.573
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	159.920.519.326	(26.635.326.428)	133.285.192.898	157.938.995.269	(18.822.558.857)	139.116.436.412
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.852.772.917.212	(297.211.727 095)	2.555.561.190.117	2.720.651 469.735	(206.192.205 538)	2.514.459.264.197
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	627.842.444.073	(45.212 084.513)	582.630.359 560	626.331.814.823	(28.535.167.799)	597.796.647.024
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	950.917.405.332	(123.037 756.950)	727.879.648.382	904.605.812.309	(94.701 801.577)	809.904 010 732
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	33.635.963.393.373	(3.984 698.895.288)	29.651.264 498.085	30.982 918 808.753	(3.100.557 941.250)	27.882.360 867 503
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	824 508 980.038	(75 252.660.536)	749.256.319.502	723 899.395.952	(62 711 739.251)	661.187 656 701
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	303 484 965.408	(22 789.631.920)	280.695.333.486	301.883.925.323	(16.150.150.905)	285.733.774.418
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	270 710.338.184	(39.865.687.698)	230.844.650.486	264.256.245.644	(28.396.929.423)	235.859.316.221
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	788.594.923.843	(59.432.981.094)	709.161.942.749	743.328.833.659	(41.678 916 556)	701.647.917 103
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	579.626.324.551	(50.096.198.866)	529.530.125.685	579.836.981.600	(36 904 129.929)	542.932 851 671
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	625.432.559.720	(91.899.403.250)	533.533.156.470	592 058.400.838	(65 238 706.743)	526.819.693 895
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.663.103.000	(1.028.405.623)	12.634.697.377	13.663.103.000	(734 575 445)	12.928.527.555

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.303.063.727.240	(137.025.563.507)	1.166.038.163.733	1.227.870.898.793	(105.095.786.833)	1.122.775.111.960
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	638.700.199.795	(51.332.790.785)	587.367.409.010	640.132.644.926	(39.227.528.459)	600.905.116.467
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	286.648.597.799	(21.827.233.688)	264.821.364.111	247.832.944.456	(14.085.867.338)	233.747.077.118
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	226.403.549.867	(18.664.385.012)	207.739.164.855	224.201.982.974	(13.977.770.616)	210.224.212.358
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.537.897.307.245	(139.308.657.300)	1.398.588.649.945	1.402.966.092.176	(86.461.467.491)	1.316.504.624.685
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.151.949.472.193	(242.201.879.269)	909.747.592.924	1.109.708.019.384	(177.238.170.890)	931.469.848.494
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.102.070.660.235	(146.139.162.007)	955.931.498.228	1.043.739.095.308	(139.842.550.634)	903.896.544.674
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	388.942.294.270	(54.646.017.600)	334.296.276.670	368.971.545.823	(35.772.184.531)	333.199.361.292
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	69.292.748.684	(9.476.269.818)	59.816.478.866	67.603.738.668	(6.598.292.484)	61.005.446.184
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	116.968.463.689	(1.204.189.461)	115.764.274.228	867.997.875	(24.329.275)	843.668.600
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.660.420.614	(1.316.991.768)	13.343.428.848	14.660.420.614	(938.546.699)	13.721.873.915
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	674.303.352.860	(64.504.497.431)	609.798.855.429	663.471.874.888	(45.704.851.479)	617.767.023.409
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	365.362.212.486	(44.859.747.200)	320.502.465.286	364.584.089.636	(30.986.612.256)	333.597.477.380
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	833.845.886.323	(86.233.191.460)	747.612.694.863	839.778.988.996	(64.910.006.719)	774.866.982.277
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.086.097.445.734	(126.901.554.196)	959.195.891.538	1.078.044.520.683	(93.594.994.753)	984.449.525.930
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	920.996.685.512	(146.573.391.807)	774.423.293.705	918.066.690.182	(104.191.053.761)	813.875.636.421
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	322.065.385.669	(25.382.742.750)	296.682.642.919	330.872.511.049	(20.853.563.909)	310.018.947.140
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	413.108.756.059	(49.002.467.604)	364.106.288.455	411.539.424.542	(36.385.275.648)	375.154.148.894
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	44.332.422.111	(3.145.040.732)	41.187.381.379	42.316.260.700	(2.250.628.280)	40.065.632.420
68	100	KOMISI YUDISIAL	95.343.911.358	(7.894.698.588)	87.449.212.770	95.038.057.478	(5.627.886.659)	89.408.170.819
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	406.800.511.244	(28.605.568.238)	378.194.943.006	406.800.511.244	(20.398.601.546)	386.401.909.698
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	84.718.470.278	(7.734.977.717)	76.983.492.561	83.267.294.308	(5.328.948.563)	77.938.345.745
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	218.489.915.841	(15.699.320.013)	202.790.595.828	217.763.289.441	(11.150.301.598)	206.612.987.843
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.122.391.980.507	(87.800.634.236)	1.034.591.346.271	1.086.380.524.878	(62.215.453.378)	1.024.165.071.500

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	173.700.000	(56.118.463)	117.581.537	173.700.000	(50.773.847)	122.926.153
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	118.330.488.121	(5.928.785.185)	112.401.702.956	119.284.397.671	(3.634.011.430)	115.650.386.241
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	730.174.500	(206.254.188)	523.920.312	1.357.048.000	(27.140.960)	1.329.907.040
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.417.545.926.849	(59.381.919.386)	1.358.164.007.463	648.121.641.004	(14.102.355.957)	634.019.285.047
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	3.466.158.075.042	(685.112.239.040)	2.781.045.836.002	3.776.851.791.730	(730.756.904.137)	3.046.094.887.593
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	219.731.557.081	(12.867.809.405)	206.863.747.676	220.393.658.418	(8.318.692.281)	212.074.966.137
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	41.539.064.481	(3.472.479.290)	38.066.585.191	28.561.033.507	(1.607.641.620)	26.953.391.887
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	932.054.315.352	(169.102.647.095)	762.951.668.257	792.103.284.438	(118.797.001.943)	673.306.282.495
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.195.225.567.574	(199.586.109.312)	995.639.458.262	1.097.034.809.193	(171.533.191.942)	925.501.617.251
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	191.512.341.190	(10.302.264.385)	181.210.076.805	119.963.194.270	(7.088.606.891)	112.874.587.379
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	26.994.766.144	(1.805.327.811)	25.189.438.333	30.903.574.928	(1.392.774.005)	29.510.800.923
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**395.789.205.883.984**	**(44.590.966.068.875)**	**351.288.238.825.109**	**365.440.618.077.924**	**(36.519.699.209.677)**	**328.920.918.868.247**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	19.148.539.300	(249.493.764)	18.899.045.536	2.410.401.454	(33.904.355)	2.376.497.099
TOTAL			**395.808.354.433.284**	**(44.591.215.562.639)**	**351.307.138.870.645**	**365.443.028.479.378**	**(36.519.733.114.032)**	**328.923.295.365.346**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.646.277.700	(4.258.140.092)	9.388.137.608	13.646.277.700	(3.905.724.336)	9.740.553.364
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	95.203.392.507	(41.334.679.142)	53.868.713.365	93.206.026.002	(35.057 521.497)	58.148.504.505
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	394.002.898.853	(240.618.361.372)	153.384.537.481	390.041.392 700	(222.238.000.000)	167.803.392 700
4	005	MAHKAMAH AGUNG	257.545.948 592	(93.598.982.265)	163.946.966.327	234.168 244.636	(85.731.398.417)	148.436 846.219
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	65.082.239.208	(18.817.788.124)	46.264.451.084	58.079.452.455	(28.721.288.321)	29.358.164.134
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	871.398.199.771	(319.988.512.240)	551.409.687.531	844.101.432.447	(226.043.000.000)	618.058.432.447
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	270.623.013.752	(97.919.544.493)	172.703.469.259	291.580.470.407	(88.524.573.088)	203.055.897.319
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	24.780.652.402	(17.103.750.453)	7.676.901.949	24.792.326.158	(12.316.101.705)	12.476.224.453
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	14.543.655.300.107	(5.704.019.262.148)	8.839 636.037.959	13.278.074.914.779	(4.239.050 000.000)	9 039.024.914.779
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	106.092 953.219	(56 687.777.914)	49.425.175.305	99.520.892.828	(48 137.670.513)	51.383.222.315
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	482.330.477.847	(148.197.567.569)	334.132.910.278	494.748 320.295	(122.657.000.000)	372.091.320.295
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	666.275.399.509	(215.363.430.576)	450.911.968.933	636.398.426.494	(176.927.000.000)	459.471.426.494
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	82.668.059.083	(49.312.570.730)	33.355.488.353	79.422.928.203	(45.526.487.033)	33.896.441.170
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.166.635.754.555	(807.380.812.852)	5.359.254.941.703	5.600.863.024.279	(847.324.000.000)	4.753.539.024.279
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	140.715.591.306.257	(55.864.383.322.102)	84.851.207.984.155	134.734.662.130.363	(43.825.400.000.000)	90.909.262.130.363
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 730.574.005.788	(681.698.367.422)	1.048.875.638.366	268.803.858.914	(102.990.000 000)	165.813.858 914
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	619.362.519.947	(254.050.567.942)	365.311.952.005	599.526.448.925	(227.725.000.000)	371.801 448.925
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	575.795.257.721	(199.228.181.188)	376.567.076.533	512.371.379.458	(151.890.000.000)	360.481.379.458
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	82.978.868.231	(47.666.282.023)	35.312.606.208	73.810.949.272	(42.537.737.414)	31.273.211.858
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	104.828.063.058	(40.489.837.198)	64.338.225.860	102.663.682.834	(37.267.884.326)	65.395.798.508
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	500.778.165.894	(199.811.760.236)	300.966.405.658	433.943.153.388	(136.685.000.000)	297.258.153.388
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.950.368.184.999	(1.435.738.279.619)	2.514.629.905.380	3.670.002.974.743	(983.172.000.000)	2.686.830.974.743
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	750.227.340.882.791	(250.030.181.487.153)	500.197.159.395.638	673.689.964.604.995	(177.777.246.268.989)	495.912.716.336.006
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.558.164.233	(676.440.623)	1.881 723.610	2.548.154.233	(609.021.773)	1.939.132 460
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	2.078.674.827	(642.647.801)	1.436 027.026	-	-	-

LAMPIRAN 20.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA KJL DAN BUM
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	144.386.000	(40.390.625)	103.995.375	144.386.000	(36.780.975)	107.605.025
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	59.761.635.198	(22.036.570.763)	37.725.064.435	42.185.538.195	(17.320.003.806)	24.865.534.389
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	7.706.388.680	(1.247.785.196)	6.458.603.484	3.201.056.420	(1.076.136.491)	2.124.919.929
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	82.556.352.084	(41.773.856.707)	40.782.495.377	1.360.957.011.452	(503.755.000.000)	857.202.011.452
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	38.461.026.984	(15.241.864.313)	23.219.162.671	38.211.323.571	(13.654.394.666)	24.556.928.905
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.152.456.725	(5.148.969.225)	3.487.500	5.152.456.725	(5.148.194.225)	4.262.500
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(693.319.470)	701.897.080	1.395.216.550	(648.589.182)	746.627.368
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	136.099.563.773	(61.516.349.328)	74.583.214.445	136.101.935.773	(50.304.991.747)	85.796.944.026
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	41.411.757.791	(14.410.039.196)	27.001.718.595	37.418.725.981	(12.570.188.377)	24.848.537.604
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	-	-	-	-	-
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.020.002.566	(3.302.790.802)	2.717.211.764	6.020.002.566	(3.121.445.789)	2.898.556.777
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	25.437.956.898	(10.545.157.818)	14.892.799.080	23.767.433.670	(9.242.558.657)	14.524.875.013
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	54.724.368.942	(2.819.708.692)	51.904.660.250	54.724.368.942	(991.775.508)	53.732.593.434
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.556.362.432	(10.626.325.575)	16.930.036.857	29.051.832.982	(9.662.478.863)	19.389.354.119
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	988.193.576.208	(443.891.151.132)	544.302.425.076	893.600.716.423	(376.521.000.000)	517.079.716.423
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	28.783.505.844	(8.005.978.424)	20.777.527.420	28.190.634.667	(6.496.978.035)	21.693.656.632
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	10.888.276.247	(2.882.857.408)	8.005.418.839	10.950.590.247	(1.951.095.501)	8.999.494.746
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	9.022.115.183	(3.939.015.450)	5.083.099.733	9.022.115.183	(3.727.809.678)	5.294.305.505
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	57.609.274.568	(18.970.510.920)	38.638.763.648	55.581.626.760	(15.518.092.301)	40.063.534.459

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	808.949.560.937	(244.955.910.528)	563.993.650.409	836.311.807.753	(225.366.000.000)	610.945.807.753
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	30.133.286.592	(16.080.967.620)	14.052.318.972	28.676.374.492	(13.827.988.794)	14.848.385.698
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	215.774.212.021	(88.864.048.347)	126.910.163.674	202.581.021.061	(70.454.651.892)	132.126.369.169
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.767.639.960	(597.107.762)	1.170.532.198	1.517.642.710	(502.267.526)	1.015.375.184
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45.415.834.050	(24.010.415.642)	21.405.418.408	45.418.869.050	(23.350.522.023)	22.068.147.027
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	235.602.000	(75.599.706)	160.002.294	235.602.000	(53.999.790)	181.602.210
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	330.334.787.610	(123.577.266.235)	206.757.501.375	275.087.358.726	(90.866.578.878)	184.220.779.848
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	413 196 647 893	(127.909.064.711)	285.287 583.182	413.078.126.893	(98.713.669.993)	314.364.456.900
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	121.860.778.878	(36.322.586.505)	85.538.192.373	122.430.873.378	(32.382.967.687)	90.047.905.691
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	60.534.021.649	(22.750.416.519)	37.783.605.130	58.610.857.849	(16.064.262.934)	42.546.594.915
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.940.202.750	(4.504.057.727)	6.436.145.023	9.216.788.655	(2.376.487.779)	6.840.300.876
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	500.500.000	(146.551.678)	353.948.322	500.500.000	(131.490.046)	369.009.954
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.356.628.189	(1.587.758.463)	768.869.726	2.356.628.189	(1.346.997.998)	1.009.630.191
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	10.784.903.511	(5.195.414.669)	5.589.488.842	10.903.259.475	(4.376.769.805)	6 526.489.670
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	62.881.974.526	(33.793.519 833)	29 088.454.693	62.881.974.526	(25.494.023.715)	37.387.950.811
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	22.986.611.820	(16.175.754.222)	6.810.857.598	21.187.821.770	(12.207.229.140)	8 980 592 630
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17.080.889.443	(8.282.870.748)	8.798.018.695	17.351.803.443	(7.017.429.349)	10.334.374.094
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26.502.013.121	(21.620.743.489)	4.881.269.632	26.399.268.021	(21.200.113.250)	5.199.154.771
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.422.702.736	(3.449.626.487)	2.973.076.249	6.234.395.736	(2.778.787.831)	3.455.607.905
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	129.488.001.499	(45.348.126.778)	84.139.874.721	129.488.001.498	(40.204.175.436)	89.283.826.063
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.316.491 000	(172.504.647)	2.143.986 353	2.316.491.000	(123.217.605)	2.193.273.395
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.588.869.626	(3.472.894.041)	115.975.587	3.588.869.628	(3.464.989.986)	123.879 642
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.190.429.000	(214.277.220)	976.151.780	1.190.429.000	(166.660.060)	1.023.768.940
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	5.650.807.800	(3.294.487.252)	2.356.320.548	7.469.703.800	(3.747.769.425)	3.721.934.375

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	54.820.623.213	(12.770.029.383)	42.050.593.830	50.177.807.433	(9.353.954.025)	40.823.853.408
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	134.138.042.892	(27.889.098.740)	106.248.944.152	134.063.722.892	(18.399.806.559)	115.664.116.333
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	28.551.000	(6.938.176)	21.612.824	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	428.307.268.190	(93.820.026.576)	334.487.242.614	179.303.478.217	(20.290.582.650)	159.012.885.567
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	11.262.645.199.993	(4.123.133.858.967)	7.139.511.341.026	8.332.905.283.962	(2.585.700.000.000)	5.747.205.283.962
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	78.380.837.756	(10.548.556.008)	67.832.281.748	77.270.141.359	(6.891.845.848)	70.378.295.511
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	867.391.000	(393.109.178)	474.281.822	1.115.711.700	(602.883.757)	512.827.943
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	26.035.028.365	(12.594.298.675)	13.440.729.690	22.740.493.037	(10.859.939.629)	11.880.653.408
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	62.477.832.524	(27.167.378.774)	35.310.453.750	45.879.655.104	(23.338.063.531)	22.541.591.573
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.546.416.349.593	(219.002.479.525)	1.327.413.870.068	1.446.365.989.648	(161.709.000.000)	1.284.656.989.648
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	13.432.024.000	(4.364.133.717)	9.067.890.283	13.432.024.000	(3.966.207.844)	9.465.816.156
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			**940.071.561.409.683**	**(322.600.232.852.888)**	**617.471.328.556.794**	**851.550.807.014.621**	**(234.036.761.235.998)**	**617.514.145.778.623**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	823.449.447.255	(149.005.824.893)	674.443.622.362	612.562.339.397	(78.267.167.400)	534.295.171.997
TOTAL			**940.895.010.856.918**	**(322.749.238.677.762)**	**618.145.772.179.156**	**852.163.469.354.018**	**(234.115.028.403.398)**	**618.048.440.950.620**

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	5.917.858.808	-	5.917.858.808	18.572.540.654	-	18.572.540.654
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	28.177.075.068	(647.551.533)	27.529.523.535	20.469.974.368	-	20.469.974.368
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	19.964.084.075	(762.695.664)	19.201.388.411	17.891.717.899	(599.270.781)	17.292.447.118
4	005	MAHKAMAH AGUNG	72.403.973.997	(1.312.239.413)	71.091.734.584	83.643.272.035	(1.009.494.413)	82.633.777.622
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	12.254.901.363	(375.561.857)	11.879.339.506	12.653.849.242	(518.100.073)	12.135.749.169
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.193.461.656.743	(4.615.135.195)	3.188.846.521.548	3.176.088.889.584	(4.658.134.973)	3.171.430.754.611
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	182.391.634.955	(138.115.878.628)	44.275.756.327	182.589.491.050	(137.938.093.876)	44.651.397.174
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	97.765.137.326	(7.021.867.788)	90.743.269.538	97.515.966.160	(6.404.732.124)	91.111.234.036
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	5.515.900.395.684	(1.304.023.236.070)	4.211.877.159.614	5.266.450.324.374	(1.183.930.828.333)	4.082.519.496.041
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	26.397.569.384	(5.516.331.154)	20.881.238.230	29.342.783.620	(5.467.887.245)	23.874.896.375
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	44.543.900.841	(721.959.766)	43.821.941.075	62.353.519.449	(996.180.731)	61.357.338.718
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	80.795.366.492	(2.731.746.076)	78.063.620.416	72.003.399.911	(1.792.072.767)	70.211.327.144
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	25.713.106.570	(1.022.599.100)	24.690.507.470	35.304.338.520	(1.022.649.100)	34.281.689.420
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	382.495.137.704	(1.872.680.761)	380.622.456.943	396.588.988.563	(1.743.854.011)	394.845.134.552
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.744.591.656.093	(115.186.335.705)	2.629.405.320.388	2.795.441.665.354	(94.161.247.078)	2.701.280.418.276
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.476.103.795.532	(69.599.586.769)	1.406.504.208.763	407.805.021.259	(5.023.630.737)	402.781.390.522
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	181.805.819.145	(3.600.063.311)	178.205.755.834	179.903.386.095	(3.470.398.347)	176.432.987.748
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.536.430.467.916	(78.392.392.907)	1.458.038.075.009	1.419.064.014.733	(75.360.145.420)	1.343.703.869.313
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15.283.210.972	(490.001.790)	14.793.209.182	10.541.848.852	(533.158.076)	10.008.690.776
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	22.818.085.114	(3.565.799.913)	19.252.285.201	21.990.010.062	(3.466.709.781)	18.523.300.281
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	67.993.719.870	(5.999.477.142)	61.994.242.728	72.979.895.525	(8 837.934.584)	64.141.960.941
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	84.078.416.076	(6.662.508.152)	77.415.907.924	83.814.510.994	(6.417.084.754)	77.397.426.240

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	36.227.381.061.615	(6.025.579.448.085)	30.201.801.613.530	31.663.073.245.824	(5.195.340.095.606)	26.467.733.150.218
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	30.286.918.444	(3.000.000)	30.283.918.444	27.153.226.550	(3.000.000)	27.150.226.550
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	842.598.787	-	842.598.787	464.570.712	0	464.570.712
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	969.395.742	(137.445.000)	831.950.742	969.168.592	(137.445.000)	831.723.592
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	34.555.285.553	(1.482.772.299)	33.072.513.254	16.352.787.812	(1.164.720.736)	15.188.067.076
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.066.410.162	-	1.066.410.162	1.066.410.162	0	1.066.410.162
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	35.667.832.662	(2.331.032.715)	33.336.799.947	1.076.998.825.638	(58.924.420.649)	1.018.074.404.989
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.480.898.885	(141.512.019)	3.339.386.866	3.416.599.885	(54.245.083)	3.362.354.802
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	315.310.076	(19.500.000)	295.810.076	315.310.076	(17.625.000)	297.685.076
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.869.655.712	-	1.869.655.712	1.066.687.595	0	1.066.687.595
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.519.354.367	(39.750.000)	3.479.604.367	3.327.369.145	(39.750.000)	3.287.619.145
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.488.984.404	(281.964.652)	7.207.019.752	7.080.408.071	(206.963.026)	6.873.445.045
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	568.097.704	-	568.097.704	568.097.704	0	568.097.704
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	55.028.713.007	(155.798.570)	54.872.914.437	54.000.004.095	(97.263.142)	53.902.740.953
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	111.114.920.719	-	111.114.920.719	101.395.867.321	0	101.395.867.321
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.738.722.790.707	(2.388.960.915)	1.736.333.829.792	1.644.008.610.213	(2.481.441.554)	1.641.527.168.659

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	224.244.432.837	(290.604.915)	223.953.827.922	211.408.483.218	(124.291.683)	211.284.191.535
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.367.654.280	(353.540.114)	20.014.114.166	30.478.468.553	(333.416.365)	30.145.052 188
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	69.594.500.305	(33.313.159.236)	36.281.341.069	76.204.526.855	(17.968.460.196)	58.236.066.659
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	19.135.872.279	(188.377.741)	18.947.494.538	18.800.129.290	(123.343.794)	18.676.785.496
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11.891.001.623	(886.617.168)	11.004.384.455	10.673.616.963	(886.617.168)	9.786.999.795
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	852.077.649	(444.976.050)	407.101.599	852.077.649	(444.976.050)	407.101.599
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	24.967.844.252	(2.354.335.008)	22.613.509.244	17.053.162.464	(2.278.044.784)	14.775.117.680
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	121.688.849.932	(8.852.125.742)	112.836.724.190	151.075.117.594	(12.064.395.864)	139.010.721.730
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.774.825.396	(95.079.813)	2.679.745.583	2.782.451.267	(77.344.001)	2.705.107.266
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.447.230.498	-	1.447.230.498	2.057.480.946	-	2.057.480.946
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	13.138.895.295	(843.340.450)	12.295.554.845	11.243.405.980	(827.522.950)	10.415.883.030
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.298.537.063	(906.130.543)	4.392.406.520	3.963.533.963	(804.531.892)	3.159.002.071
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	25.740.176.432	(1.094.243.335)	24.645.933.097	25.695.097.079	-650008804	25.045.088.275
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	463.185.968	(27.406.250)	435.779.718	382.506.987	(22.552.500)	359.954.487
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	358.861.312.274	(159.191.959)	358.702.120.315	353.555.931.035	(61.097.083)	353.494.833.952
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	27.750.055.481	(43.205.809)	27.706.849.672	29.660.425.411	(109.684.797)	29.550.740.614
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	40.673.917.442	(1.186.110.364)	39.487.807.078	41.752.819.597	(849.517.112)	40.903.302.485
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	18.246.137.680	(22 270.000)	18.223.867.680	13.396.253.680	(22.270.000)	13.373.983.680
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	9.946.910.402	(36.400.000)	9.910.510.402	9.808.356.342	(36.400.000)	9.771.956.342
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.213.240.578	-	1.213.240.578	1.213.240.578	0	1.213.240.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.285.450.732	(3.000.000)	1.282.450.732	5.370.705.973	(3.000.000)	5.367.705.973
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.787.442.144	(112.971.314)	6.674.470.830	6.387.966.086	(88.845.389)	6.299.120.697
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	26.865.394.160	(60.483.100)	26.804.911.060	26.865.394.160	(60.483.100)	26.804.911.060
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	13.625.162.893	(5.503.180.195)	8.121.982.698	13.878.382.893	(573.622.512)	13.304.760.381
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	6.149.701.413	(757.664.259)	5.392.037.154	5.189.208.959	(590.236.381)	4.598.972.578
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.399.393.688	(372.056.403)	8.027.337.285	8.486.947.253	(607.460.403)	7.879.486.850
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	40.051.809.406	(7.304.559.123)	32.747.250.283	38.971.004.037	(5.903.779.375)	33.067.224.662
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	5.667.143.874	-	5.667.143.874	5.673.302.198	0	5.673.302.198
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	16.661.605.546	(610.245.690)	16.051.359.856	44.344.441.857	-950178248	43.394.263.609
68	100	KOMISI YUDISIAL	2.225.816.257	-	2.225.816.257	2.225.816.257	0	2.225.816.257
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	14.202.140.840	-	14.202.140.840	14.183.138.780	0	14.183.138.780
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	16.354.507.673	(276.955.250)	16.077.552.423	16.014.510.408	(276.955.250)	15.737.555.158
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	696.058.235	(43.502.200)	652.556.035	695.197.035	(37.267.400)	657.929.635
72	107	BADAN SAR NASIONAL	30.253.877.462	(2.889.977.951)	27.363.899.511	29.727.542.422	-2209353317	27.518.189.105
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	2.977.950.406	(5.637.500)	2.972.312.906	3.171.148.246	(5.637.500)	3.165.510.746
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	5.592.717.893	-	5.592.717.893	5.592.717.893	0	5.592.717.893
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	4.225.119.385	(876.868.914)	3.348.250.471	4.225.119.385	(606.667.262)	3.618.452.123
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	14.217.438.382	(203.174.110)	14.014.264.272	220.452.865	(4.395.287)	216.057.578
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14.966.244.009	(567.715.750)	14.398.528.259	14.992.748.009	(547.039.500)	14.445.708.509
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	4.497.207.735	-	4.497.207.735	4.497.207.735	0	4.497.207.735

LAMPIRAN 20.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
79	114	SEKRETARIAT KABINET	742.783.023	-	742.783.023	11.207.596.930	0	11.207.596.930
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	25.289.228.432	(3.156.694.889)	22.132.533.543	20.250.002.748	(620.852.754)	19.629.149.994
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	14.930.331.228	(6.006.633.798)	8.923.697.430	15.595.955.504	(5.967.645.736)	9.628.309.768
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	4.792.591.743	(1.415.699.042)	3.376.892.701	18.488.830.957	(1.663.178.281)	16.825.652.676
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	37.179.027.949	(136.874.651)	37.042.153.298	38.013.827.949	(136.874.651)	37.876.953.298
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	6.400.061.645	-	6.400.061.645	22.897.683.772	0	22.897.683.772
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	9.575.417.031	(2.236.082.751)	7.339.334.280	77.391.654.834	(56.963.200,00)	77.334.691.634
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	13.751.130.817	0	13.751.130.817
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	4.380.022.550	(138.669.795)		3.150.808.300	0	
JUMLAH PADA K/L			55.407.453.501.674	(7.868.572.594.131)	47.534.639.554.788	50.547.784.127.411	(6.860.413.487.589)	43.684.219.831.522
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	86.210.919.219	(15.794.895.129)	70.416.024.090	83.346.134.691	(15.182.303.213)	68.163.831.478
TOTAL			55.493.664.420.893	(7.884.367.489.260)	47.605.055.578.878	50.631.130.262.102	(6.875.595.790.802)	43.752.383.683.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	68.417.931.422	17.201.344.575
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	148.295.000	48.800.000
4	005	MAHKAMAH AGUNG	400.567.668.371	335.957.047.294
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	38.343.017.539	211.168.435.402
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.712.579.850	9.347.165.666
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	32.921.865.346	24.016.934.779
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	234.797.666.363	94.605.435.790
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	12.244.338.664.394	4.814.616.095.988
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	174.381.031.855	217.154.025.040
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	287.102.517.576	130.966.788.109
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	85.628.889.418	109.794.054.699
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	103.728.888.414	142.441.255.953
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	367.626.147.524	305.146.699.950
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	52.097.911.080.290	42.749.102.979.012
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.387.520.151.209	563.946.376.700
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.943.703.629.795	2.112.015.308.839
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	3.482.888.346.523	2.594.268.254.238
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	142.811.381.638	66.232.461.701
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.194.436.815	281.836.313
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	115.623.422.606	42.995.053.578
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	187.703.770.549	176.053.544.514
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	71.648.472.943.207	70.152.213.383.529
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	637.664.080.626	395.964.080.975
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	68.862.035.362	1.647.770.000
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	198.657.800	6.668.088.167.077
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.522.511.000	2.522.511.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	74.916.600	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	4.287.139.500	60.491.450.298
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	949.091.298	1.109.199.298
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	7.431.790.551	11.819.517.817
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	337.624.000	8.399.308.095
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8.459.739.301.599	3.307.508.125.235
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	61.378.604.946	153.245.015.219
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.420.061.000	1.142.185.000
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	30.177.239.114	31.608.897.585
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.339.443.100	1.618.524.600
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	477.116.500	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	263.987.553.321	67.464.562.161
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	282.300.922.468	132.035.123.866
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	975.445.880	11.244.701.582
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	780.719.500	730.911.500
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	503.179.954.233	400.425.130.743
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	16.370.469.857	3.270.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	104.724.121.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	224.384.887	168.744.037
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	20.888.135.286	9.303.688.712
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	5.112.393.685	4.345.309.000
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.304.624.372	5.304.624.372
68	100	KOMISI YUDISIAL	120.234.730	120.234.730
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.943.351.573	2.534.331.148
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	295.054.071	325.937.404
72	107	BADAN SAR NASIONAL	200.120.529.005	593.716.510
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	761.550.555	221.669.000
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.840.394.050	1.840.394.050
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	593.771.435.699	393.987.073.321
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	72.000.000	72.000.000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	98.500.000	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	22.485.983.410	5.672.605.314

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)	31 DESEMBER 2019 (Audited)
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	771.611.831	463.125.675
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	102.876.824.151	276.979.017.829
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	439.107.488.237	344.032.060.237
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	2.552.740.000	191.700.000
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-
JUMLAH PADA K/L			**161.801.943.027.501**	**137.280.116.874.059**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	10.813.332.400	8.385.587.978
		Penyesuaian (Eliminasi pada SPAN)	-	-
TOTAL			**161.812.756.359.901**	**137.288.502.462.037**

LAMPIRAN 21
TAGIHAN TUNTUTAN TP/TGR

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	216.964.410	(210.034.822)	6.929.588	221.441.541	(210.057.208)	11.384.333
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.070.515.603	(2.626.452.252)	444.063.351	3.055.767.909	(2.588.888.511)	466.879.398
4	005	MAHKAMAH AGUNG	-	-	-	4.572.974	(22.865)	4.550.109
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	88.688.627	(443.443)	88.245.184	90.188.627	(438.943)	89.749.684
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.124.998	(20.625)	4.104.373	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	32.478.996.348	(32.478.996.348)	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	807.758.409	(788.237.441)	19.520.968	816.397.648	(788.195.265)	28.202.383
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.463.810.558	(100.434.093)	1.363.376.465	1.757.871.682	(84.433.721)	1.673.437.961
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.449.041.133	(12.083.560.521)	3.365.480.613	12.619.224.233	(12.003.781.456)	615.442.777
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	20.212.679.705	(7.605.399.528)	12.607.280.177	21.641.534.363	(179.946.428)	21.461.587.935
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.480.000	(9.480.000)	-	-	-	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.594.198.990	(376.840.802)	9.217.358.188	9.690.359.139	(376.524.103)	9.313.835.036
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.115.524.750	(5.391.319.352)	2.724.205.398	-	-	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.290.059.681	(1.646.937.938)	6.643.121.743	8.575.645.704	(1.616.104.466)	6.959.541.238
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	809.486.534	-	809.486.534	135.120.000	(5.000.000)	130.120.000
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	446.658.693	(2.233.293)	444.425.400	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.361.892.339	(1.265.216.776)	96.675.563	1.377.771.125	(1.265.291.170)	112.479.955
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	845.220.000	(229.755.000)	615.465.000	161.370.000	(161.370.000)	-
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	465.785.701	(208.597.955)	257.187.746	322.573.733	(214.665.986)	107.907.747
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	511.393.503	(169.781.448)	341.612.055	168.064.805	(168.064.805)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	28.240.748	(141.204)	28.099.544	28.964.410	(144.822)	28.819.588
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	29.196.350	(145.982)	29.050.368	7.067.607.565	(5.386.079.766)	1.681.527.799
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	2.332.000	(11.660)	2.320.340
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	783.139.873	(783.139.873)	-	783.412.600	(783.412.600)	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	108.492.500	(542.462)	107.950.038	837.351.144	(4.186.756)	833.164.388
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.596.965.086	(1.975.549.238)	621.415.848	2.650.541.830	(2.007.180.516)	643.361.314

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.104.641	(485.523)	96.619.118	97.869.573	(489.347)	97.380.226
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.906.096.428	(9.025.265.860)	1.880.830.568	10.467.992.809	(9.023.075.344)	1.444.917.465
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	433.372	(2.167)	431.205	5.273.396	(26.367)	5.247.029
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	756.321.114	(756.321.114)	-	752.121.114	(752.121.114)	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	32.714.287	-	32.714.287	31.644.572	-	31.644.572
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.223.198	(11.116)	2.212.082	37.139.058	(185.695)	36.953.363
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	189.863.000	(189.863.000)	-	189.863.000	(189.863.000)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.000.000	(10.000)	1.990.000	2.000.000	(10.000)	1.990.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.129.845.056	(60.101.904)	12.069.743.152	11.369.270.829	(56.578.859)	11.312.691.970
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	9.350.090.207	(9.350.090.207)	-	9.540.934.923	(9.540.934.923)	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	23.362.743.163	(19.763.460.029)	3.599.283.134	23.640.957.235	(19.970.718.831)	3 670.238.404
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	81.958.836.331	(81.958.836.331)	-	103.708.888	(29.251.294)	74.457.594
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	6.978.645.840	(6.252.654.514)	726.191.326	7.487.105.546	(6.609.246.203)	877.859.343
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.370.722.119	(10.348.039.599)	22.682.520	10.395.959.442	(10.379.644.705)	16.314.737

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	31.034.524	(155.174)	30.879.350	93.103.480	(465.518)	92.637.962
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	29.631.455.523	(29.464.444.773)	167.010.750	28.400.564.911	(28.193.580.036)	206.984.875
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.541.234.605	(1.264.042.972)	1.277.191.633	2.733.456.929	(729.693.146)	2.003.762.783
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-	-	41.025.372	(205.127)	40.820.245
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	550.074.355	(513.259.355)	36.815.000	338.719.555	(142.116.926)	196.602.629
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	-
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	188.258.179	-	188.258.179	640.508.179	-	640.508.179
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	6.670.000	(33.350)	6.636.650	9.687.500	(48.437)	9.639.063
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	296.539.585	(1.379.860)	295.159.725	283.242.844	(2.016.610)	281.226.234
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	513.719.500	(2.568.598)	511.150.902
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			297.191.420.066	(236.901.717.244)	60.289.702.823	179.183.980.687	(113.466.641.127)	65.717.339.560
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	-	-	-	-	-	-
TOTAL			297.191.420.066	(236.901.717.244)	60.289.702.823	179.183.980.687	(113.466.641.127)	65.717.339.560

LAMPIRAN 22
ASET TAK BERWUJUD

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	6.933.598.520	-	(3.090.894.741)	3.842.703.779	4.661.296.020	-	(1.574.714.895)	3.086.581.125
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	56.833.816.215	-	(29.716.836.078)	27.116.980.137	55.973.161.942	-	(24.242.583.477)	31.730.578.465
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	181.618.568.202	-	(124.009.905.595)	57.608.662.607	163.565.836.169	-	(110.015.543.468)	53.550.292.701
4	005	MAHKAMAH AGUNG	47.696.472.847	-	(37.710.300.885)	9.986.171.962	45.492.383.622	-	(34.359.868.623)	11.132.514.999
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	656.446.105.608	-	(420.109.183.526)	236.336.922.082	636.556.219.757	-	(365.101.104.895)	271.455.114.862
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	59.349.487.646	-	(43.421.232.704)	15.928.254.942	59.072.433.543	-	(38.515.789.965)	20.556.643.578
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	744.102.165.510	-	(697.087.151.741)	47.015.013.769	777.425.934.136	-	(729.256.428.168)	48.169.505.968
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	80.400.408.178	-	(55.996.773.782)	24.403.634.396	98.493.216.692	-	(69.866.615.671)	28.626.601.021
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.548.003.145.359	279.573.034.991	(1.668.392.488.202)	3.159.183.694.148	3.783.684.025.449	-	(1.400.835.680.346)	2.382.848.345.103
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	534.166.062.298	-	(432.954.291.804)	101.211.770.494	625.234.698.857	-	(442.517.380.284)	182.717.318.573
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.595.486.594.674	23.000.050.914	(1.138.392.978.241)	480.093.667.347	1.486.901.020.449	-	(1.035.960.188.625)	450.940.831.824
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	107.165.008.298	-	(26.840.991.338)	80.324.018.960	94.884.700.843	-	(21.894.137.302)	72.990.563.341
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	53.744.582.207	-	(28.433.095.318)	25.311.488.889	50.771.688.191	-	(21.963.363.486)	28.808.324.705

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	326 716.338.346	-	(209 197 528 826)	117 518 809.520	334 966 665 380	213.324 400	(200 710 553.809)	134 469.435 971
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2 681.878.163 989	71.034.174.887	(498.935.199 951)	2.253.977.138 925	2.703 315.877.279	-	(447.404.239.878)	2.255.911 437 401
15	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	953 868.871.508	1 642 368.000	(471.084.197.316)	484 427.042.192	259.992.096.164	-	(119.006.412.377)	140.985.683.787
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	288.163.095.465	-	(214.479.107 427)	73.683.988.038	288.877 983 543	-	(187.149.269 657)	101.728.713.886
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	214 484.509.521	-	(116 635 506 144)	97.849.003 377	207 847.630.425	-	(105 308.245 336)	102.539 385.089
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	49.549 068.283	-	(41 933.668.115)	7 615.400.168	53.770 946.007	-	(39.331.274.772)	14.439.671 235
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	109.418.769 236	-	(92.943 058.147)	16.475.711.089	98.538.827.706	-	(85.278 449.458)	13 260.378.248
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	145.902.739.686	-	(84 190.513.954)	61.712.225.732	125.131 514 980	-	(80.002.540.750)	45.128.974.230
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	218 310.049.120	894 437.500	(96.554.238.883)	122 650 247 737	215.816 602 225	-	(90.499.336 968)	125.317.265.257
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.095.253.956 766	59.153.807 200	(115 881 277 685)	7 038.526.486.281	7.203 074.520.673	-	(95.895.451 139)	7.107.179.069 534
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	8.896.300 640	-	(8.345.857.290)	550 443 350	13 430.621.425	-	(12 084.103.929)	1.346.517.496
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	17.050.923.442	-	(13 411.762.992)	3.639.160.450	15.106.143 042	-	(10.456.491.860)	4.649.651.182
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1 503.526 500	-	(780 706 188)	722 820.312	1.437.526 500	-	(749.370 063)	688 156.437

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	50 706 440.671	-	(25 840 379.667)	24 866.061 004	50 120.547.321	-	(19 383.854.316)	30.736 693.005
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	23.281.538.648	-	(18 769 356.763)	4 512.181.885	23.246.192.650	-	(18.200.326.459)	5 045.866.191
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	55.893.917.812	-	(47 590.113.424)	8.303.804.388	714.640.521 975	-	(362.364 839.998)	352.275 681.977
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	36.673.442.828	-	(29.241.581.960)	9.431.860.868	36.168.846.828	-	(19.450 495 595)	16.718 353.233
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.642.888.379	-	(15 135.326.397)	507 561 982	17.798 326 700	-	(15 290.490 864)	2.507.835 836
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	4.251.103.570	-	(2.876.201.835)	1.374 901.735	4.214.073.020	-	(2.874.389 394)	1.339.683 626
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.793 510.595.122	-	(1.280.428.900.485)	3 513.081.694 637	3.892.988 604.622	-	(936.791.549.756)	2.956.197.054.868
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.052.440.073 318	-	(554.117.055 948)	498 323.017.370	1 401.189.077 691	-	(644.530.648.098)	756 658.429.593
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	117.490.428 182	-	(98 417 223.220)	21 073.205.962	117.450 021 182	-	(77.782 773 712)	39.667 247 470
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	820.959.713.740	-	(603.987 204.067)	216.972 509.673	818.269.983.123	-	(512.227.609 935)	306.042.383.188
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	131.912.902.018	-	(43.687 324.117)	88.225.577 901	55 783 312.439	-	(35.825.335.474)	19.957.976.965
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	242 776.845.504	-	(173.609.871 312)	69.166.974.192	215.425.808 967	-	(157.417.431.486)	58.008.377.481
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	204 531.978.810	-	(36.910.379.476)	167 821 599.334	180 959 556.233	-	(25.378 110.318)	155 581 445 915



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	394.496.870.452	-	(317.710.757.717)	76.786.112.735	383.340.834.073	-	(298.012.674.181)	85.328.159.892
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.616.737.267.050	-	(3.033.337.534.813)	3.583.399.732.237	4.452.804.047.706	-	(1.835.851.571.656)	2.616.952.476.050
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	118.914.895.397	-	(55.327.374.438)	63.587.520.959	103.338.739.947	-	(45.031.586.155)	58.307.153.792
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	217.820.097.393	-	(207.082.880.562)	10.737.216.831	215.693.329.531	-	(195.424.664.377)	20.268.665.154
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	113.131.081.756	-	(79.325.168.019)	33.805.913.737	106.522.243.049	-	(69.086.243.488)	37.435.999.561
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	157.414.032.340	-	(118.868.376.890)	38.545.655.450	170.237.674.270	-	(106.561.863.597)	63.675.810.673
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	7.737.984.754	-	(5.277.788.179)	2.460.196.575	7.854.215.654	-	(6.173.813.529)	1.680.402.125
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	42.996.846.100	-	(35.240.520.314)	7.756.325.786	37.444.918.522	-	(31.543.455.740)	5.901.462.782
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	660.481.200	-	(479.903.075)	180.578.125	817.610.000	-	(596.972.500)	220.637.500
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	438.500.597.879	-	(414.233.320.257)	24.267.277.622	433.297.132.629	-	(405.552.342.610)	27.744.790.019
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	23.993.925.556	-	(13.983.846.457)	10.010.079.099	18.568.425.806	-	(9.831.282.800)	8.737.143.006
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	22.398.445.567	-	(15.802.714.325)	6.595.731.242	28.361.978.911	-	(16.032.714.847)	12.329.264.064
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	34.496.338.499	-	(20.240.518.854)	14.255.819.645	37.044.447.353	-	(20.942.776.917)	16.101.670.436

SK No 062753 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 22

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	192 276 501.175	-	(45 669.542 148)	146 606 959 026	160.833 905 655	-	(33.176.678.891)	127.657 226.764
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	47.169.515.624	-	(33 372.121.357)	13.796 394 267	46 363.881.524	-	(29 934.809.891)	17 429.071.633
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	173.385.970.805	-	(116.557 492 824)	56.808.477.981	157 174 213.686	-	(99.762.703.280)	57.411 510.606
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	556.802.077.105	61 649.980.810	(273.339 403.284)	344.112 634.631	514.319 186 407		(196.736 813 210)	317 582.373.197
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3 099.213.643 612	64.203.445 178	(2.182 235.741.724)	981 181.347 066	2,996.886.940.090	-	(1.854 052.239 115)	1 142 834 700 975
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	12.430.477.200	-	(9.377.722.635)	3.052.754.565	9.725 556.950	-	(8.154.343 858)	1.571 213 092
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11 995.406.393	-	(8.364.011.438)	3.631.394.955	11.949.866.393	-	(6.452.518.282)	5.497.348 111
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5 853.702.800	-	(4.908.938 440)	944.764.360	4.707.376.900	-	(3.487.828 277)	1.219 548 623
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	16.541 087.383	-	(11 883.626 778)	4 657 460.605	15 970.656.383	-	(10.150 466 033)	5 820.190 350
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	150.148 317.195	-	(142 686.489.940)	7.461 827 255	182.079.955.859	-	(172.722.774.340)	9.357.181.519
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	56.430.601.817	291.000.000	(38 011.699.030)	17.709 902.787	47.151.503 048	100 033.000	(27.802.744.973)	19.448.791.075
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	98.238.849.525	-	(56.432.647 385)	41.806.202.140	104.242 462 764	-	(64.404.381.263)	39.838 081.501
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	934.400 402 688	-	(13 950.247 070)	920 450 155.598	933.066.953 889	-	(11.048 831 413)	922 018.122.476

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	92 914.722 458	-	(58 991 042 589)	33 923 679.869	78 129 402.444	-	(50 168 672 327)	27 960.730.117
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.247.005.152	-	(4.755.282.217)	491 722.935	5.197.450.152	-	(4.431.180.867)	766 269.285
68	100	KOMISI YUDISIAL	2.955 703 940	-	(2.309.143.384)	646.560.556	3.326.595.940	-	(2.316.452 846)	1.010.143.094
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	196.880 994.815	-	(125.083 511 732)	71.797.482.883	192.362.676.115	-	(94.828.288.092)	97.534 388.023
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	9.217 467 608	-	(8 637 147 849)	580.319 759	15 280 255.238	-	(13.008 043 769)	2 272.211 469
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	49.978.596 054	1.520.500.277	(28.298.578.621)	23.200.517.710	45 123.049.668	-	(20.736.808.495)	24.386.243.173
72	107	BADAN SAR NASIONAL	220.883.467.749	-	(153.852.547.184)	67 030.920.565	215.077 349.629	-	(128.976.622.717)	86.100.726.912
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1 237.413 863	-	(878.751.255)	358 662.608	931 099 863	-	(732.537.038)	198.562.825
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	88 550.675.721	193 560 000	(2 778.322.758)	85.964 912 963	87 802 204 971	-	(2.493 227 561)	85 308.977.410
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	991.349.234	-	(728.640.484)	262 708.750	848 889 234	-	(600.971 109)	247.928.125
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	210.973.585.963	-	(10 735.480 473)	200.238 105.490	210.174.630.963	-	(10.229.032.883)	199.945.598.080
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	208.868.500 512	22.641.461.193	(44.128.482.273)	187 381.479.432	203 162 103 666	-	(23.092 157.616)	180.069.946.050
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	188.378.710.496	-	(87 048.579.470)	101 330 131 026	238.149 897 668	-	(34.809 635 080)	203 340.262.588

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)				31 DESEMBER 2019 (Audited)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	AMORTISASI	NETTO
79	114	SEKRETARIAT KABINET	3.700 317 683	-	(3.147.292.553)	553 026.130	3 671.760.383	-	(2.954 432.518)	717 327.865
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	14.813.033.769	-	(7.152.873.577)	7.660.160.192	18.244.862.448	-	(10.276.267.378)	7.968.595.068
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	9.397.052.974	-	(7.134.285 460)	2.262.787.514	8.541.645 118	-	(5.936.789.308)	2.604.855.810
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	10.475.154.007	-	(3.510.889.420)	6.964.264.587	5.774 406 516	-	(2.017.500.890)	3.756.905.626
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	390 209.000	-	(8.950.000)	380 259 000	310 609.000	-	-	310 609.000
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	68.887.723 834	-	(66 011 180.505)	2 876.543.329	66 766.427.848	-	(64.160.506.139)	2.605.921 709
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	5.230.191 790	-	(2 989 655.468)	2.240.536.322	5.607.161.289	-	(2 423 880 674)	3.183 300 615
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	9 239.838.720	-	(358.337.083)	8.881 501 637
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	1.751 467 700	-	(402 241 313)	1.349.226 387	752 977 000	-	(91 705.250)	661.271 750
JUMLAH PADA K/L			43.268.901.959.033	585.797.800.950	(17.471.424.930.083)	26.383.274.829.900	39.526.551.636.648	313.357.400	(14.629.669.137.469)	24.897.195.856.571
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	174.605.628.395	-	(100.207.974.358)	74.398.654.037	170.966.863.195	-	(84.005.895 941)	86.960.967.254
TOTAL			43.443.506.587.428	585.797.800.950	(17.571.632.904.441)	26.457.673.483.937	39.697.518.499.835	313.357.400	(14.713.675.033.410)	24.984.156.823.825

LAMPIRAN 23
ASET EKS BPPN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2019		Mutasi Tahun 2020		Saldo Per 31 Desember 2020	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	910	788.353.860.925,00	5	988.343.680.115,00	915	1.776.697.541.040,00
2	Temuan BPK	369	782.795.799.869,15			369	782.795.799.869,15
3	BJDA (Verifikasi 2009)	63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-	1	5.752.019.500,00	1	5.752.019.500,00
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-			-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000,00			2	295.000.000,00
7	*Covernote*	86	361.465.913.037,00			86	361.465.913.037,00
		1.472	**2.353.306.709.831,15**	**6**	**994.095.699.615**	**1.478**	**3.347.402.409.446,15**

LAMPIRAN 23.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET INVENTARIS EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2019		Mutasi Tahun 2020		Saldo 31 Desember 2020		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	18.620	8.476.788.157,35	-	-	18.620	8.476.788.157,35	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338	0	0	11.274	6.400.600.338	
	b. Tidak Digunakan (idle)	7.346	2.076.187.819	0	0	7.346	2.076.187.819	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2020
			Rekening Nostro tercatat dalam Neraca			
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp 5.841.796.415,00	(584.178.642,00)	Rp 5.257.616.773,00
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar	Bank luar negeri	Rp 3.592.554.880,69	Rp (3.592.554.880,69)	Rp -
3	Bank Bahari	Courtis Bank Hongkong Branch sebesar	Bank luar negeri	Rp -		Rp -
		Total		Rp 9.434.351.295,68	Rp (4.176.734.522,69)	Rp 5.257.616.773,00
			Rekening Nostro tercatat dalam CaLK			
1	Bank Central Dagang BBKU	Bank CIC, Jakarta		Rp 2.044.748,50		Rp 2.044.748,50
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp 83.311.328,35		Rp 83.311.328,35
4	BUN	Citibank	Bank dalam negeri	Rp 8.776.916.074,45		Rp 8.776.916.074,45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp 97.686.237,95		Rp 97.686.237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp 706.429.119,47		Rp 706.429.119,47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp 196.059.779,49		Rp 196.059.779,49
8	Bank Kharisma BBKU	Bank Aspac		Rp 287.761,43		Rp 287.761,43
9	Bank Budi Internasional BBKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp 6.601.373,85		Rp 6.601.373,85
10	Bank Akeo BBKU	Bank Central Dagang		Rp 625.069,88		Rp 625.069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp 2.994.990,16		Rp 2.994.990,16
14	HOKINDO	Bank Modern	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	Rp 6.207.877,95		Rp 6.207.877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp 122.088.331,08		Rp 122.088.331,08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp 4.887.591,05		Rp 4.887.591,05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp 1.020.060.447,69		Rp 1.020.060.447,69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp 6.017.122,84		Rp 6.017.122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp 11.739.033,84		Rp 11.739.033,84
20	Bank Kharisma BBKU	Indover Bank		Rp 141.402.439,43		Rp 141.402.439,43
21	Bank Hastin Internasional BBKU	Indover Bank		Rp 361.433.693,83		Rp 361.433.693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp 2.864.035,05		Rp 2.864.035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp 268.237.424,51		Rp 268.237.424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BBKU	Indover Bank		Rp 109.652.042,65		Rp 109.652.042,65
25	BUN	Indover Bank		Rp 925.492.300,93		Rp 925.492.300,93
26	BUN	Indover Bank		Rp 531.317.595,65		Rp 531.317.595,65
27	Bank BIRA BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.530.231,65		Rp 24.530.231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp 32.416.251,32		Rp 32.416.251,32
29	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 16.993.382,21		Rp 16.993.382,21
30	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 45.288.112,29		Rp 45.288.112,29
31	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24.849.497,60		Rp 24.849.497,60
32	Bank Mashill Utama BBKU	Indover Bank, Amsterdam	Bank Indover	Rp 354.542.691,02		Rp 354.542.691,02
33	Bank Central Dagang BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 92.060.251,91		Rp 92.060.251,91
34	Bank Ficorinvest BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 77.574.756,22		Rp 77.574.756,22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 1.139.267,42		Rp 1.139.267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 11.664.932,40		Rp 11.664.932,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 108.150.696,65		Rp 108.150.696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 120.045.719,99		Rp 120.045.719,99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp 341.740.942,42		Rp 341.740.942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp 195.403.134,60		Rp 195.403.134,60
41	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 956.004.466,45		Rp 956.004.466,45
42	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 2.996.775,68		Rp 2.996.775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp 254.274.894,54		Rp 254.274.894,54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp 27.358.123,38		Rp 27.358.123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp 122.424.186,80		Rp 122.424.186,80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp 406.733.525.331,33		Rp 406.733.525.331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp 2.359.921.197,78		Rp 2.359.921.197,78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore		Rp 2.257.377.867,88		Rp 2.257.377.867,88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Devden)		Rp 1.758.722.655,31		Rp 1.758.722.655,31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp 1.834.239.834,61		Rp 1.834.239.834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp 666.429.511,70		Rp 666.429.511,70
52	PESONA	Banca Canerciale		Rp 61.815.826,61		Rp 61.815.826,61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp 44.241.246,97		Rp 44.241.246,97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp 2.270.531,95		Rp 2.270.531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp 378.699.549,31		Rp 378.699.549,31
56	SURYA	Bank Credn Issue		Rp 234.342.412,12		Rp 234.342.412,12
57	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		Rp 58.834.913,90		Rp 58.834.913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp 65.028.723,58		Rp 65.028.723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp 41.766.481,92		Rp 41.766.481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp 6.616.463.903,03		Rp 6.616.463.903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp 266.632.028,06		Rp 266.632.028,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp 339.690.834,35		Rp 339.690.834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp 357.108.818,21		Rp 357.108.818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp 6.463.800,47		Rp 6.463.800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 208.766.445,27		Rp 208.766.445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 327.222.390,61		Rp 327.222.390,61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp 1.675.910,59		Rp 1.675.910,59
68	BUN	BCCI London		Rp 1.312.775.083,50		Rp 1.312.775.083,50
69	BUN	BNP Singapore		Rp 490.837.088,12		Rp 490.837.088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp 4.122.298,55		Rp 4.122.298,55
71	BUN	Chemical Bank		Rp 909.494.195,25		Rp 909.494.195,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp 980.037.418,44		Rp 980.037.418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp 103.609.247,09		Rp 103.609.247,09
74	BUN	National Westminster		Rp 1.708.457.513,38		Rp 1.708.457.513,38
75	Bank Ficonmest BBKU	National Westminster Bank, London		Rp 1.332.284.084,60		Rp 1.332.284.084,60
76	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		Rp 25.528.725,87		Rp 25.528.725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp 72.226.080,57		Rp 72.226.080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp 586.327.485,65		Rp 586.327.485,65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp 466.066.074,81		Rp 466.066.074,81

LAMPIRAN 23.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2020
80	BDNI	Sumitomo Bank Ltd, Tokyo		Rp 1.550.878.033,20		Rp 1.550.878.033,20
81	BUN	Summa Handelbank		Rp 219.893.772,84		Rp 219.893.772,84
82	BUN	Swiss Bank Corperation		Rp 457.663.217,47		Rp 457.663.217,47
83	BDNI	The Daiichi Kangyo Bank, NY		Rp 449.662.818,68		Rp 449.662.818,68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp 25.317.208,51		Rp 25.317.208,51
85	BUN	UMBC KualaLumpur		Rp 230.472.902,02		Rp 230.472.902,02
86	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		Rp 124.810.097,58		Rp 124.810.097,58
87	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		Rp 22.488.860,17		Rp 22.488.860,17
88	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp 93.484.495,37		Rp 93.484.495,37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swits, Switzerland		Rp 51.007.390,52		Rp 51.007.390,52
90	BDNI	United Pasific Bank, LA		Rp 1.926.555.302,27		Rp 1.926.555.302,27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp 7.752.795,93		Rp 7.752.795,93
92	Masih dalam penelusuran			Rp 508.554.149,20		Rp 508.554.149,20
	Total			Rp 454.445.361.290,83		Rp 454.445.361.290,83

* Pengkonversian nilai rekening BIRA di ClearStream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Coutts Bank menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

	Kurs Tengah BI per 31 Desember 2020			
Kurs tengah Bank Indonesia	Rp	14.105,01		
		13.438,00	Rp	13.548,00

** Mutasi nilai rekening eks. BIRA di Clearstream merupakan selisih kurs

*** Dana Nostro yang telah disetorkan ke RKUN

Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp	54.584.286,49
Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	1.187.712.120,85
Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp	8.840.515.509,00
Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (diseterkan tanggal 1 Februari 2018)	Rp	4.697.519.206,00
Rekening Eks Bank BIRA di Clearstream Banking SA, Singapore (disetorkan tanggal 18 Desember 2020)	Rp	3.655.871.021,00
Rekening Eks Bank Dewa Ruby di Bank Ganesha (Cicilan I disetorkan tanggal 30 November 2020)	Rp	584.179.842,00
Total	**Rp**	**19.020.381.785,34**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar/Lembar per 31 Desember 2020	Nilai Pasar per 31 Desember 2020	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2019	mutasi	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2020	Kustodian
a.	*Corporate Bonds*											
1	DGS International Finance Co.	*Scripless*	0,01	USD	1 000 000		-				-	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	*Scripless*	101,88	USD	4 500 000	1,02	4 584 686	31 Desember 2020	63.731 736.059	935 275 842	64 667.011 901	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co Bv	*Scripless*	1,00	USD	25 000 000	0,01	250 000	31 Desember 2020	3 475 251 250	51 000 000	3 526 251 250	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	*Coupon*	38 750 000,00	IDR		1,00	38 750 000	27 Juni 2008	38 750 000	-	38 750 000	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	*Coupon*	800.000.000,00	IDR		1,00	800 000 000	27 Juni 2008	800.000.000		800 000 000	JAKARTA
6	Muba Glass	*Coupon*	38 125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000	27 Juni 2008	38.125.000	-	38.125.000	JAKARTA
7	Muba Keramik	*Coupon*	38 125.000,00	IDR		1,00	38 125 000	27 Juni 2008	38.125.000	-	38 125 000	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	3 000 000	0,02	63 000	31 Desember 2020	875 763 315	12 852.000	888.615 315	BRUSSEL
9	TPE International Finance Co Bv	*Scripless*	1,00	USD	2 000 000	0,01	20 000	31 Desember 2020	278 020.100	4.080 000	282 100 100	BRUSSEL
10	Bank Papan	*Principal dan Coupon*	100,00	IDR	500 000 000	1,00	500 000 000	10 Juni 2015	500 000.000	-	500.000.000	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2,10	USD	4 000.000	0,02	84 000	31 Desember 2020	1 167 684 420	17 136 000	1.184 820 420	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	88,21	USD	182.000	0,88	160.547	31 Desember 2020	2 231 771 322	32 751.686	2.264 523 008	EUROCLEAR
	Total						-		73.175.226.466	1.053 095 528	74 228.321.994	
b.	*Medium Term Notes*											
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	93,92	USD	182 000	0,94	170 937	31 Desember 2020	2 376 202 903	34 871 248	2.411 074 151	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	20 000.000	0,90	18 000 000	29 Maret 2019	250 218 090.000	3.672 000 000	253 890 090 000	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	960 560	0,90	864.504	29 Maret 2019	12 017 474 427	176.358 816	12 193.833 243	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90,00	USD	965 840	0,90	869.256	29 Maret 2019	12.083 532 002	177 328 224	12 260.860 226	HONGKONG
5	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1 000 000	1,00	1.000 000	01 Oktober 2004	13.901 005 000	204.000 000	14 105 005 000	JAKARTA
6	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1 000.000	1,00	1.000,000	01 Oktober 2004	13.901.005.000	204.000 000	14 105 005.000	JAKARTA
7	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	1 000 000	1,00	1.000.000	01 Oktober 2004	13.901 005 000	204.000 000	14.105,005.000	JAKARTA
#	Hutama Karya	*Principal*	100,00	USD	5 000 000	1,00	5 000.000	01 Oktober 2004	69.505,025.000	1.020.000.000	70.525,025.000	JAKARTA
	Total								387 903 339 332	5.692 558 288	393 595 897 620	
c.	*Non-Convertible Debentures*											
1	Polysindo Eka Perkasa	*Principal*	100,00	IDR	5.000 000 000	1,00	5 000 000 000	31 Desember 2020	5 000 000.000		5 000 000.000	JAKARTA
	Total								5 000 000.000		5.000 000 000	
	Total (a+b+c)								466 078 565.798	6 745 653 816	472 824 219 614	
Total Nilai									19.178.854.337,95			

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

LAMPIRAN 23.D

Catatan		
Kurs Tengah BI		31 Desember 2020
1 Dollar Amerika		14.105,01

Keterangan

* Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berharga di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI

** Emiten surat berharga berstatus aktif karena masih tercatat di Bursa

*** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 23.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	*Core business Emiten*	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Biaya AWU	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Beban AWU
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32 137 300	144	4 627 771 200		4 627 771 200	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1353/KN 5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten			
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37 459 700	50	2 097 743 200	224 758 200	1 872 985 000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1352/KN 5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten			
3	PT Asser Dharma Ind		*Scripless*	40 000	850	34 000 000		34 000 000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 422/KN 5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Dirjen AHU			Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional		Sertifikat	46 250	75	3 468 750		3 468 750	BBO					
5	PT Bank Dagang Nasional		Sertifikat	363	75	27 225		27 225	BBO					
6	PT Bank Finconvest		Sertifikat	400	50	20 000		20 000	BDKU					
7	PT Bank POFCI		Sertifikat	250	350	87 500		87 500	BTO					
8	PT Bank Surya		Sertifikat	800	300	240 000		240 000	BBO					
9	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	*Scripless*	11 304 425	55	791 909 750	169 568 375	621 743 375	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1350/KN 5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan pengelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	034/CTTH/FIL/Legal/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	
10	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	*Scripless*	41 421 438	55	2 889 500 730	621 321 585	2 278 179 145	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1351/KN 5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan pengelasan tentang kepemilikan saham	034/CTTH/FIL/Legal/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	*Core Business Emiten*	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU
11	PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL)	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	655	117 000	14 000	131 000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1349/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten			
12	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB)	Manufaktur Semen	Sertifikat	13 893 500	1 440	16 400 230 000	3 613 640 000	20 013 840 000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1348/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	0396/LCA-BRN/VII/20 14 tanggal 14 Juli 2014	
13	PT Lenggang Makmur Industri, Tbk (LMPI)	Manufaktur Plastik	*Suspensi*	57 901 002	85	5 153 189 178	231 804 008	4 921 585.170	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Contain zeas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	102/VII/14-Jm sb tanggal 11 Juli 2014	
14	PT Star Pacific, Tbk (dh PT Lippo E Net) (LPLI)	Investasi dan bisnis media	Sertifikat	100	140	14 000		14 000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten			
15	PT Merck, Tbk (MERK)	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	40 000	4 000 000		4 000 000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan tidak diberikan nama Pemegang Saham	127/BM/ASMM/VII-14 tanggal 15 Juli 2014	
17	PT Multi Sarana R. Agung		Sertifikat	94 500	671	63 455 000		63 455 000	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU			Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama		Sertifikat	49 251 500	50	2 462 575 000		2 462 575 000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU			Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Otoritas AHU	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU
19	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS)	Manufaktur *strip* Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2 500	75	187 500		187 500	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1371/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten			
20	PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sewad Produce, Tbk (SIPD)	Peternakan	*Scripless*	1 919 695	1 500	1 031 035 250	1 247 262 250	2 878 297 500	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020. Perubahan nama perusahaan per 1 10 2020	Surat Nomor S 1372/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten			
21	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	790	10 500	6 422 500	927 500	7 350 000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1373/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak mencatat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham perseroan atas nama BPPN	293/XI.05 /FD/2014 tanggal 14 Agustus	
22	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	*Scripless*	348 000	10 500	3 182 900 000	461 100 000	3 654 000 000	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1374/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	293/XI.05 /FD/2014 tanggal 14 Agustus	
23	PT Trias Sentosa, Tbk (TRST)	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	418	38 000	3 800	41 800	Aktif	Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2020	Surat Nomor S 1375/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	34/JT/PTI S/2014 tanggal 15 Juli 2014	
24	PT Kanabha Bigdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana pemukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100,00%	10 000		Rp 253 240 240 586	Rp (253 240 240 586)	Rp	Aktif	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara berdasarkan surat Surat Pemindah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN 25 /KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengalihan Aset Saham Nomor BA 1/KN 2/2020 tanggal 23 Januari 2020	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO BOX 38, Depok 16953			
25	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0,0024%	312		Rp 312 000	Rp	Rp 312 000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perseroan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 building, 12th Floor Jalan H R Rasuna Said Blok X 5 No 13, Jakarta 12950			
26	PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM	Manufaktur Kabel	6,24%	68 982 400	216	Rp 47 100 737 600	Rp (32 006 139 200)	Rp 15 094 598 400	Aktif	Nilai per lembar saham per 30 Desember 2020 berdasarkan nilai saham tanggal 30 Desember 2020 pada Bursa Efek Indonesia	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl Rawagelang No 2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H R. Rasuna Said Blok X 5 No 13, Jakarta 12950			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2020

No	Nama Emiten	Cara Penilaian Saham	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2020	Nilai Per 31 Desember 2019	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2020	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Hasil RAU	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Dasar RAU
27	PT Pemadam Kleidastwa Nu	Pemotelan		1 218		Rp	Rp	Rp	Aktif					
28	PT Sarana Maluku Ventura		0,00%			Rp	Rp	Rp		Pada laporan TW 3 tercatat Nilai nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura No 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Setelah dilakukan, lembar saham merupakan saham yang berasal dari BOI. Saham SMV yang berasal dari eks BPPN hanya sejumlah 63.106, tercatat pada data saham eks PPA	Jalan Jend Sudirman, Gatwe Kecil, Kompleks Pondok Permai (Asier) RT 004,RW 05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128			
TOTAL					Rp 337 718 821 988	Rp (279 171 212 494)	Rp 58 539 709 565,00							

LAMPIRAN 23.F

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Neraca	Saldo Per 31 Desember 2019		Mutasi Tahun 2020		Saldo Per 31 Desember 2020	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	233	1.750.941.946.444	7	77.810.607.400	240	1.828.752.553.844
BS	973	1.434.919.274.361	(5)	(8.155.580.000)	968	1.426.763.694.361
BT	282	806.135.693.344	(1)	(223.800.000)	281	805.911.893.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	31	701.654.125.452	-	(15.496.488.000)	31	686.157.637.452
JUMLAH	**1.519**	**4.693.651.039.601**	**1**	**53.934.739.400**	**1.520**	**4.747.585.779.001**

LAMPIRAN 23.F

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang diungkap dalam CaLK						
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, *Copy* Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	592	1.921.938.517.404	(35)	(196.120.219.889)	557	1.725.818.297.515
JUMLAH	**592**	**1.921.938.517.404**	(35)	(196.120.219.889)	**557**	**1.725.818.297.515**
JUMLAH TOTAL	**2.111**	**6.615.589.557.005**	(34)	**(142.185.480.489)**	**2.077**	**6.473.404.076.516**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2019 (Audited)*	Nilai Aset Per 31 Desember 2020	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	310.310.110.000,00	Various	USD	22.000.000,00	Rp 310.310.110.000,00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	216.597.479.674,96	BII	USD	15.356.072,52	Rp 216.597.479.674,96	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (29030-4)	Obligasi	4.317.150.000,00	423.150.150.000,00	BALI	USD	30.000.000,00	Rp 423.150.150.000,00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	21.157.507.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00	Rp 21.157.507.500,00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	28.210.010.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 28.210.010.000,00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	28.210.010.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 28.210.010.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	14.105.005.000,00	Danamon	USD	1.000.000,00	Rp 14.105.005.000,00	
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
Total			16.657.242.209,00	1.041.750.141.600,96				Rp 1.041.750.141.600,96	

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs 8.465

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2019	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan		n/a	Rp 223.500	Rp 223.500	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14,29%	Rp 141.550.000	Rp 141.550.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melaluiSurat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500	15,00%	Rp 28.310.000	Rp 28.310.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20,00%	Rp 234.871	Rp 234.871	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750	99,00%	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400	n/a	Rp 125.015.692	Rp 125.015.692	Rp -	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5,43%	Rp 385.154.000	Rp 385.154.000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui,
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15,00%	Rp -	Rp -	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	208.179	2,31%	Rp 323.903.996	Rp 208.179.000	Rp (115.724.996)	Aktif	nilai per 31-12-20 berdasar surat no: 01/DIR/SJV/I/2020 tgl 4-1-21	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	535.270	3,67%	Rp 355.094.954	Rp 535.270.000	Rp 180.175.046	Aktif	Nilai saham per 31-12-20 berdasar surat No.005/SKV/01/2021 tgl 7-1-21	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193.066	1,04%	Rp 390.958.650	Rp 390.958.650	Rp -	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 015/SKV/07/I/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	-
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106	1,33%	Rp 31.286.000	Rp 63.106.000	Rp 31.820.000	Aktif	Nilai nominal berdasar surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura Nomor 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2019	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115	16,64%	Rp 4.038.531.684	Rp -	Rp (4.038.531.684)	Likuidasi	Nilai Buku saham per 31-12-2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited).	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	Telah dilikuidasi dengan nilai likuidasi sebesar Rp3.365.184.715 yang diterima oleh DJKN pada November 2020. Nilai mutasi dicatat sebesar Rp4.038.531.683,65 sehingga terdapat selisih Rp673.346.969 yang dicatat sebagai dampak kumulatif pengurang ekuitas
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,04%	Rp 4.341.276.000	Rp 4.500.000.000	Rp 158.724.000	Aktif	Nilai nominal saham per 30 Juni 2020 sesuai Surat Plt. Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri No:S2798/AJTM/DIR/0720 tanggal 13 Juli 2020	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11. Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	Rp 335.020.000	Rp 335.020.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/2007	-	-
17	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	Rp 61.553.000	Rp 61.553.000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 056/SSV/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
18	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	1.037.495	3,72%	Rp 970.886.000	Rp 1.037.495.000	Rp 66.609.000	Aktif	Nilai saham per 31-12-20 berdasar surat no 01/DIR/I/2021 tgl 4-1-21.	Gedung Rangkiang Ventura. Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
19	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	Rp 82.471.000	Rp 82.471.000	Rp -	Aktif	Nilai per 31-12-20 berdasar surat Dirut SPV No.19/DIR/SPV/I/2021 tgl 11-1-2021	Jl.Abe Tasangkapura No. 58, RT001/ RW.011, Kelurahan Ardipura, Japsel. Jayapura-Papua. Telp: 0967-5162490	-
20	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000	15,00%	Rp 3.750.000.000	Rp 3.750.000.000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	-
21	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	-	22.006.500	0,97%	Rp 1.100.325.000	Rp 1.100.325.000	Rp -	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2019		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di bursa telah di-*suspend* oleh BEI. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
22	PT Jembo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	-	654.500	0,43%	Rp 4.041.537.500	Rp 3.665.200.000	Rp (376.337.500)	Aktif	berdasarkan nilai saham pada data BEI per 30 September 2020		Pada tahun 2016, aset saham PT Jembo Cable tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
23	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13,87%	Rp 1.425.000.000	Rp 1.425.000.000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/OSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).
24	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-		100,00%	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Aktif			

SK No 062737 C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2020

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2019	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
25	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan	-	273.000	96,53%	Rp 22.470.000.000	Rp -	Rp (22.470.000.000)	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23
Total						**Rp 45.973.331.847**	**Rp 19.410.065.713**	**Rp (26.563.266.134)**				

SK No 062736 C

LAMPIRAN 24
ASET LAIN-LAIN

LAMPIRAN 24

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	18.262.582.182	(2.596.154.736)	15.666.427.446	17.496.296.270	(1.343.981.189)	16.152.315.081
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	64.020.089.973	(53.454.951.931)	10.565.138.042	20.173.827.251	(10.249.884.151)	9.923.943.100
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	8.561.600.761	(7.351.450.013)	1.210.150.748	10.117.675.753	(9.332.784.682)	784.891.071
4	005	MAHKAMAH AGUNG	129.734.443.660	(117.252.465.600)	12.481.978.060	134.270.790.419	(121.132.540.564)	13.138.249.855
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	87.470.710.579	(76.525.752.561)	10.944.958.018	78.105.303.293	(67.550.375.113)	10.554.928.180
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	233.824.540.001	(71.826.216.040)	161.998.323.961	264.537.455.528	(123.472.178.418)	141.065.277.110
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	195.507.375.570	(186.551.309.252)	8.956.066.318	466.402.451.690	(219.184.986.354)	247.217.465.336
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	437.590.120.643	(152.210.417.324)	285.379.703.319	395.869.847.716	(92.117.353.769)	303.752.493.947
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.291.218.701.775	(3.591.209.386.053)	2.700.009.315.722	6.632.504.630.582	(3.702.529.825.677)	2.929.974.804.905
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	426.406.705.940	(363.107.275.556)	63.299.430.384	326.651.278.466	(256.181.205.310)	70.470.073.156
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	891.638.853.844	(844.188.387.449)	47.450.466.395	1.280.812.642.589	(1.204.620.241.889)	76.192.400.700
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	748.646.368.953	(285.669.537.866)	462.976.831.087	772.510.080.456	(255.444.818.181)	517.065.262.275
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	914.305.978.521	(745.632.134.808)	168.673.843.713	1.091.275.271.237	(817.822.719.132)	273.452.552.105
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	326.261.563.168	(222.438.459.335)	103.823.103.833	930.953.945.445	(372.778.505.891)	558.175.439.554
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4.943.570.296.343	(1.913.879.355.578)	3.029.690.940.765	6.562.888.409.971	(1.877.503.973.199)	4.685.384.436.772
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.046.886.405.682	(822.927.984.640)	223.958.421.042	572.360.053.029	(533.697.385.376)	38.662.667.653
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	12.842.175.264.211	(9.998.150.616.335)	2.844.024.647.876	13.098.325.036.995	(9.180.365.484.936)	3.917.959.552.059
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	394.842.973.855	(245.146.355.716)	149.696.618.139	377.897.410.777	(232.400.665.470)	145.496.745.307

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	416.481.278.702	(373.586.606.308)	42.894.672.394	439.111.606.995	(378.418.760.358)	60.692.846.637
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	32.144.606.305	(28.642.422.752)	3.502.183.553	26.297.974.644	(23.497.248.286)	2.800.726.358
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.012.951.000.216	(546.948.521.349)	1.466.002.478.867	1.993.377.950.941	(520.048.478.151)	1.473.329.472.790
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	419.627.207.466	(328.836.523.400)	90.790.684.066	347.666.128.627	(295.012.299.155)	52.653.829.472
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	32.119.006.615.739	(9.143.239.421.955)	22.975.767.193.784	42.290.876.831.978	(10.838.067.676.213)	31.452.809.155.765
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	6.701.980.160	(6.643.134.755)	58.845.405	1.028.775.466	(131.472.623)	897.302.843
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9.646.100.004	(9.447.297.881)	198.802.123	513.326.510	(497.976.948)	15.349.562
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.789.027.900	(1.789.027.900)	-	250.365.400	(250.365.400)	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	78.172.284.187	(12.935.447.780)	65.236.836.407	64.592.895.321	(15.202.583.970)	49.390.311.351
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	50.942.645.557	(48.877.453.853)	2.065.191.704	151.433.500	(68.021.600)	83.411.900
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	49.063.126.905	(30.066.811.202)	18.996.315.703	511.933.872.514	(290.100.975.274)	221.832.897.240
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	19.539.728.532	(7.420.806.188)	12.118.922.344	38.140.973.294	(23.273.631.440)	14.867.341.854
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	356.500.000	(356.500.000)	-	618.114.185	(580.626.685)	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	3.303.405.671	(3.267.873.618)	35.532.053	2.572.608.800	(2.555.693.000)	16.915.800
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.707.768.851	(2.699.423.143)	8.345.708	4.767.753.563	(1.976.276.686)	2.791.476.877
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	659.905.422.246	(388.734.019.330)	271.171.402.916	14.789.826.926	(13.884.007.124)	905.819.802
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	4.938.578.745	(4.809.273.147)	129.305.598	3.910.803.103	(3.725.522.622)	185.280.481
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	142.661.398.037	(116.214.789.580)	26.446.608.457	119.939.596.185	(112.766.919.982)	7.172.676.203
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	66.639.026.947	(6.310.727.678)	60.328.299.269	68.180.544.422	(6.977.126.803)	61.203.417.619
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	140.530.815.031	(134.415.018.162)	6.115.796.869	122.459.665.056	(115.352.248.687)	7.107.416.369
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	97.969.907.624	(26.200.500.235)	71.769.407.389	97.969.907.624	(26.023.553.407)	71.946.354.217
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.453.594.812	(37.321.525.228)	1.132.069.584	27.903.683.354	(25.955.356.055)	1.948.327.299
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.385.908.294.484	(1.178.810.999.942)	207.097.294.542	1.075.050.005.534	(915.394.862.554)	159.655.142.980
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	52.715.534.885	(48.435.066.623)	4.280.468.262	21.341.215.127	(19.506.073.185)	1.835.141.942
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	5.959.713.781	(5.192.592.914)	767.120.867	6.502.014.047	(4.196.598.138)	2.305.415.909
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	6.261.921.106	-	6.261.921.106	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	129.906.051.318	(111.977.961.143)	17.928.090.175	48.378.820.356	(47.706.727.822)	672.092.534
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.550.857.892.252	(846.837.653.492)	704.020.238.760	1.851.342.537.306	(919.988.872.487)	931.353.664.819

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	9.553.121.878	(9.193.880.106)	359.241.772	8.848.862.345	(8.242.311.595)	606.550.750
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.940.016.042	(2.907.525.417)	32.490.625	2.558.222.192	(2.558.222.192)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	58.486.407.597	(50.724.962.628)	7.761.444.969	45.878.706.396	(41.097.161.901)	4.781.544.495
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	97.520.149.436	(90.903.303.793)	6.616.845.643	89.792.431.168	(81.954.852.341)	7.837.578.827
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	21.143.102.583	(18.474.612.854)	2.668.489.729	12.136.402.704	(12.045.803.072)	90.599.632
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	18.535.412.879	(17.173.422.671)	1.361.990.208	4.336.379.891	(3.012.957.003)	1.323.422.888
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	102.610.595.460	(49.089.259.922)	53.521.335.538	104.763.204.465	(54.610.534.943)	50.152.669.522
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	10.977.404.894	(10.810.751.314)	166.653.580	3.302.771.391	(3.126.001.825)	176.769.566
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	230.693.833.918	(222.545.169.809)	8.148.664.109	292.625.134.604	(163.648.194.189)	128.976.940.415
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	151.185.035.042	(10.615.154.219)	140.569.880.823	96.279.897.967	(6.467.469.895)	89.812.228.072
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.105.752.926	-	1.105.752.926	406.647.875	(406.152.875)	495.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.833.747.523	(8.484.183.549)	1.349.563.974	10.131.712.521	(8.736.971.132)	1.394.741.389
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	749.740.120	(749.740.120)	-	1.144.732.285	(1.123.388.900)	21.343.385
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4.546.977.873	(4.525.541.578)	21.436.295	1.651.189.878	(1.640.749.240)	10.440.638
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.678.350.353	(10.629.090.587)	49.259.766	5.719.311.911	(5.554.278.612)	165.033.299
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	45.898.772.635	(44.648.595.795)	1.250.176.840	9.691.419.774	(9.678.959.049)	12.460.725

SK No 062778 C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17.008.814.833	(13.420.156.884)	3.588.657.949	16.014.374.923	(15.584.380.145)	429.994.778
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	85.833.120.065	(74.986.423.069)	10.846.696.996	112.322.656.076	(71.685.849.294)	40.636.806.782
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134.763.086.898	(57.083.981.282)	77.679.105.616	155.963.830.881	(52.588.918.451)	103.374.912.430
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	44.129.215.236	(42.174.910.417)	1.954.304.819	14.731.134.942	(12.762.142.829)	1.968.992.113
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	8.663.242.280	(8.640.302.881)	22.939.399
68	100	KOMISI YUDISIAL	471.879.032	(412.729.153)	59.149.879	1.331.114.444	(1.321.548.986)	9.565.458
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	59.640.740.980	(58.906.719.810)	734.021.170	79.056.426.225	(76.642.324.207)	2.414.102.018
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	25.637.113.046	(25.216.636.183)	420.476.863	16.537.387.618	(16.001.819.318)	535.568.300
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	9.858.961.580	(9.581.437.065)	277.524.515	7.013.983.227	(6.748.910.397)	265.072.830
72	107	BADAN SAR NASIONAL	153.930.294.695	(99.746.884.475)	54.183.410.220	84.968.890.058	(29.827.749.756)	55.141.140.302
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	55.650.000	-	-	-	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	1.602.900.000	(1.602.900.000)	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	912.570.495	(812.177.648)	100.392.847	912.570.495	(806.453.836)	106.116.659
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	916.921.000	(813.309.358)	103.611.642	916.921.000	(744.234.928)	172.686.072

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2020 (Audited)			31 DESEMBER 2019 (Audited)		
			BRUTO	PENYUSUTAN/AMORTISASI	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	281.326.752.339	(185.353.872.826)	95.972.879.513	243.038.329.815	(149.799.540.762)	93.238.789.053
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-
79	114	SEKRETARIAT KABINET	305.900.000	-	305.900.000	6.922.173.376	(6.922.173.376)	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	20.025.235.393	(16.345.396.075)	3.679.839.318	10.435.239.541	(8.833.531.774)	1.601.707.767
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	104.847.340.257	(102.673.857.937)	2.173.482.320	42.371.373.191	(41.524.721.829)	846.651.362
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	198.787.260.364	(178.743.190.987)	20.044.069.377	210.006.379.664	(184.765.113.440)	25.241.266.224
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589.396	(3.295.501.853)	252.087.543	3.547.589.396	(2.791.326.766)	756.262.630
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	3.422.921.442	(3.376.561.236)	46.360.206	2.676.092.322	(2.483.053.473)	193.038.849
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1.065.184.499	(817.342.438)	247.842.061	-	-	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	1.290.322.969	(593.627.041)	696.695.928
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	602.000.000	(89.583.333)		-	-	
JUMLAH PADA K/L			**71.429.632.975.833**	**(34.575.461.476.742)**	**36.854.171.499.091**	**83.922.411.398.055**	**(34.775.463.496.209)**	**49.146.910.414.346**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	622.124.210.046.919	(280.741.881.826.004)	341.382.328.220.915	587.279.754.484.932	(245.910.488.788.748)	341.369.264.696.183
TOTAL			**693.553.843.022.752**	**(315.317.343.302.746)**	**378.236.499.720.006**	**671.202.165.882.987**	**(280.685.953.284.958)**	**390.516.175.110.529**

SK No 062776 C

LAMPIRAN 25
DAFTAR BMN IDLE

LAMPIRAN 25.A

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2020

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Jember	Kab Jember	Jl. Sumatera Iii/ 52-53 Jember	393	31/12/1978	117 900.000	-	117 900.000	PSP No.47/KM 6/KN.5/2019 PSP pada Kemenkeu BAST No. BAST-01/WKN.10/KNL.04/2019 tgl 5 Juli 2019
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Jember	Kab Jember	Jl Sumatra No 114, Jember	1951	01/01/2007	4.114.814 000	-	4.114.814.000	PSP No 47/KM 6/KN.5/2019 PSP pada Kemenkeu BAST No. BAST-01/WKN.10/KNL.04/2019 tgl 5 Juli 2019
TOTAL TANAH						**2.344**		**4.232.714.000**	-	**4.232.714.000**	
1	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl Sumatera Iii/53, Jember	126	31/12/1978	104.826 000	55.324.827	49.501.173	PSP No 47/KM.6/KN.5/2019 PSP pada Kemenkeu BAST No. BAST-01/WKN.10/KNL 04/2019 tgl 5 Juli 2019
2	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Sumatera Iii/53 Jember	70	31/12/1978	59.617.000	31.464.532	28.152.468	PSP No.47/KM.6/KN.5/2019 PSP pada Kemenkeu BAST No. BAST-01/WKN.10/KNL 04/2019 tgl 5 Juli 2019
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Sumatra No.114, Jember	140	01/01/2007	80.840.340	21.018.488	59.821.852	PSP No.47/KM.6/KN 5/2019 PSP pada Kemenkeu BAST No. BAST-01/WKN.10/KNL.04/2019 tgl 5 Juli 2019
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Jember	Kab. Jember	Jl. Sumatra No.114, Jember	1077	01/01/2007	522.725.700	135.908.682	386.817.018	PSP No.47/KM.6/KN.5/2019 PSP pada Kemenkeu BAST No. BAST-01/WKN.10/KNL.04/2019 tgl 5 Juli 2019
TOTAL BANGUNAN						**1.413**		**768.009.040**	**243.716.529**	**524.292.511**	
TOTAL						**3.757**		**5.000.723.040**	**243.716.529**	**4.757.006.511**	

LAPORAN BMN IDLE
PERIODE TAHUN 2020
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

Kode Barang	Uraian	Satuan	Saldo Awal per 1 Januari 2020		Mutasi Tahun Anggaran 2020				Saldo per 31 Desember 2020		Akumulasi Penyusutan per 31 Desember	Nilai Buku per 31 Desember 2020
					Mutasi Tambah		Mutasi Kurang					
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN												
	TANAH		**342.743**	**63.307.693.228**	**3.598**	**4.403.110.000**	**2.344**	**4.232.714.000**	**343.997**	**63.478.089.228**	-	**63.478.089.228**
2 01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	6.818	2.550.248.602					6.818	2.550.248.602	-	2 550 248.602
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	13.508	10.170.441.416			393	117.900.000	13.115	10.052.541.416	-	10.052.541.416
2.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	200	1.001.000.000					200	1.001.000.000	-	1.001.000.000
2 01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	15.686	14 314.237.500	3.598	4.403.110.000	1 951	4.114 814 000	17 333	14.602.533 500	-	14 602.533 500
2.01.01 04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	M2	1.015	1 380.400.000					1.015	1.380 400 000	-	1.380.400.000
2.01.01 04 018	Tanah Bangunan Pos Jaga	M2	6 508	71.980.550					6.508	71.980 550	-	71.980.550
2.01.01 99 999	Tanah Persil Lainnya	M2	889	7 477.138.000					889	7.477.138.000	-	7.477.138.000
2.01.02.01.001	Tanah Rawa	M2	4.939	1 840.735.160					4.939	1.840.735.160	-	1.840.735.160
2.01.02.02.002	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	M2	26.990	107.621.000					26.990	107.621.000	-	107.621.000
2.01.03.08.003	Tanah untuk Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	M2	266.190	24.393.891.000					266.190	24.393.891.000	-	24.393.891 000
	GEDUNG DAN BANGUNAN		**103**	**11.471.191.142**	**7**	**860.955.000**	**4**	**768.009.040**	**106**	**11.564.137.102**	**4.287.920.799**	**7.276.216.303**
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	13	6.380.249.212	5	798.289.000	2	603 566.040	16	6 574.972.172	2.164 008 704	4.410.963.468
4 01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	2	41.673.113					2	41 673.113	21.769 818	19 903 295
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	2	59.265.000					2	59 265.000	12.699 643	46.565.357
4.01.01.04.001	Gedung Instalasi Studio	Unit	1	7.562.000					1	7.562.000	2.887.309	4.674.691
4.01.01.04.002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	2	8.694.000					2	8.694.000	4.027.698	4.666.302
4.01.01.05 001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	2	295 543.000					2	295.543.000	78.266.318	217 276.682
4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	10 184.248					1	10.184.248	4.035.268	6.148.980
4 01.01.13.002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	8	260.634 347					8	260.634.347	131.184.123	129 450.224
4 01.01.24.001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	1	109.116.485					1	109.116.485	52.078.320	57.038.165
4.01.02.01 007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	118.927.000					2	118 927 000	38.586.043	80.340.957
4.01.02 01 010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	2	120.804.437					2	120.804 437	58.997.516	61.806.921
4.01.02.01.013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	4	173.936.000					4	173.936.000	46.681.350	127.254.650

LAMPIRAN 25.B

LAPORAN BMN IDLE
PERIODE TAHUN 2020
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

Kode Barang	Uraian	Satuan	Saldo Awal per 1 Januari 2020		Mutasi Tahun Anggaran 2020				Saldo per 31 Desember 2020		Akumulasi Penyusutan per 31 Desember	Nilai Buku per 31 Desember 2020
					Mutasi Tambah		Mutasi Kurang					
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN												
4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	338.711.692					1	338.711.692	338.711.692	
4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	6	745.200.591			2	164.443.000	4	580.757.591	234.801.342	345.956.249
4.01.02.02.008	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Unit	1	15.317.000					1	15.317.000	15.317.000	-
4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	43	1.461.328.029					43	1.461.328.029	784.016.420	677.311.609
4.01.02.02.013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	3	90.920.134	2	62.666.000			5	153.586.134	59.105.260	94.480.874
4.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Unit	2	398.222.854					2	398.222.854	96.997.121	301.225.733
4.01.02.99.999	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Unit	3	703.311.000					3	703.311.000	103.896.281	599.414.719
4.04.01.01.009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	3	91.660.000					3	91.660.000	27.874.273	63.785.727
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	1	39.931.000					1	39.931.000	11.979.300	27.951.700
Total Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN				**74.778.884.370**		**5.264.065.000**		**5.000.723.040**		**75.042.226.330**	**4.287.920.799**	**70.754.305.531**

LAMPIRAN 25.C

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TANGGAL PEMBAYARAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	PIC
1	PT Biofarma	EKS BPPN		Cikopomayak	S-89/MK.6/2015	14 April 2015	PRJ-5/MK.6/2015	06 Agustus 2015		Rp 20.281.344.000,00	36	Agustus 2015	Agustus 2018	
2	Srijati Pohan	EKS BPPN		Jl. Ahmad Yani No. 102A dan Jl. Pemuda No.18 Medan	S-389/MK.6/2016S-42/MK.6	06/12/2016 22/02/2017	PRJ-1/MK.6/2017 PRJ-2/MK.6/2017	22 Februari 2017		Rp 233.000.000,00	36 60	21 Februari 2017 21 Februari 2017	21 Februari 2020 21 Februari 2022	
3	Bank Nasional Parahyangan	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001746	Jalan Ciungwanara, Kelurahan Lebak, Kota Bandung	S-20/MK.6/2017	06 Februari 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2017	10 April 2017		Rp 1.350.000.000,00	36	10 April 2017	9 April 2020	
4	PT Telkomsel	EKS BPPN		Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan	S-2227/MK.6/2016	27 Desember 2016	-	-		Rp 249.433.000,00		HTBI, serah kelola ke LMAN Sudah dibayar tanggal 5 Juni 2017 Jangka waktu Sewa : 1 Maret 2010 s.d. 28 Februari 2015		
5	PT Indosat Tbk	EKS BPPN		Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan	S-128/MK.6/2017	24 Mei 2017	PRJ-1/MK.6/2019	18 Maret 2019	26 Februari 2019	Rp 546.360.000,00	60	17 Juli 2014	16 Juli 2019	
6	PT Telkomsel	EKS BPPN		Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan	S-129/MK.6/2017	24 Mei 2017	PRJ-2/MK.6/2019	18 Maret 2019	22 Maret 2018	Rp 459.570.000,00	60	1 Maret 2015	28 Februari 2020	
7	CV Jaya Agung	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001963, HTBI	Jln. Pasar 16 Ilir No.123 Kota Palembang	S-342/MK.6/2017	19 Desember 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.04/2018	02 Januari 2018		Rp 450.000.000,00	24	2 Januari 2018	1 Januari 2020	
8	Sdr. Sofyan	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001658	Jalan Imam Bonjol, Kompleks Batam Blok A No.10 dan No.11, Nagoya Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	S-328/MK.6/2017	07 Desember 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2018	29 Maret 2018	21 Februari 2018	Rp 190.000.000,00	24	29 Maret 2018	28 Maret 2020	
9	Sdr. Armin	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001749, HTBI	Jalan Nusantara No. 106 Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar	S-395/MK.6/2017	29 Desember 2017	PRJ-01/MK.6/WKN.15/2018	21 Februari 2018	27 Maret 2018	Rp 24.000.000,00	36	21 Februari 2018	20 Februari 2021	
10	Robby Mesa Nura	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000113	Jalan Bakti No.72, Kisaran Timur, Kab. Asahan	S-409/MK.6/2018	07 September 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2018	01 Oktober 2018	24 September 2018	Rp 55.000.000,00	60	1 Oktober 2018	20 September 2023	
11	Sukamto Yuwono, Yayasan Syalom Probolinggo	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0015810, HTBI	Jalan Kol. Sugiono No.5 (dh. Jl. Damarwulan) RT 06/05 Jkel. Tisnonegaran, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo	S-443/MK.6/2018	01 Oktober 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2018	11 Oktober 2018	09 Oktober 2018	Rp 54.700.000,00	12	11 Oktober 2018	10 Oktober 2019	
12	Syarif Chanafi	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001666	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,	S-460/MK.6/2018	05 Oktober 2018	PRJ-82/MK.6/WKN.09/2018	17 Desember 2018	12 Desember 2018	Rp 33.500.000,00	12	17 Desember 2018	16 Desember 2019	
13	Bambang Rukmono	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001984, PRK-B002936, PRK-B002937, PRK-B002938	Jalan Surya Kencana No. 157A, 157B, 157C dan 157, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-461/MK.6/2018	05 Oktober 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2018	05 November 2018	01 November 2018	Rp 123.000.000,00	36	5 November 2018	4 November 2021	
14	Bambang Rukmono	EKS BPPN		Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	S-458/MK.6/2018	05 Oktober 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.8/2018	05 November 2018	01 November 2018	Rp 138.000.000,00	36	5 November 2018	4 November 2021	
15	William Tanoto	EKS BPPN		Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Utara (SHM No.162/Tanjung Morawa)	S-515/MK.6/2018	19 November 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2018	10 Desember 2018	07 Desember 2018	Rp 88.500.000,00	60	10 Desember 2018	9 Desember 2023	
16	William Tanoto	EKS BPPN		Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara a. (SHGB No.13/Tanjung Morawa)	S-516/MK.6/2018	19 November 2018	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2018	10 Desember 2018	07 Desember 2018	Rp 241.500.000,00	60	10 Des 2018	9 Des 2023	
17	Sudi Muji Sutrisno	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000026 s.d PRK-C000030 dan PRK-C000036	Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	S-520/MK.6/2018	19 November 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.10/2018	19 Desember 2018	17 Desember 2018	Rp 145.000.000,00	12	19 Desember 2018	18 Desember 2019	
18	Junaedi,SH.M.Si.,LL.M	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002073	Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. 11 Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan	S-555/MK.6/2018	07 Desember 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.07/2019	10 Januari 2019	28 Desember 2018	Rp 88.300.000,00	12	10 Januari 2019	9 Januari 2020	

SK No 062772 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.C

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TANGGAL PEMBAYARAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	PIC
19	PT Graha Pariwisata Sukses	EKS BPPN		JalanLegian No.188 (Jl. Padma Utara), Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung	S-420/MK.6/2018	12 September 2018	PRJ-01/WKN.14/2019	04 Februari 2019	31 Januari 2019	Rp 3.375.000.000,00	60	12 Oktober 2018	11 Oktober 2023	
20	Sarim	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0014971	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	S-621/MK.6/2018	26 Desember 2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2019	18 Januari 2019	27 Februari 2019	Rp 8.650.000,00	12	18 Januari 2019	17 Januari 2020	
21	Dartim	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0014982	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	S-624/MK.6/2018	26 Desember 2018	PRJ-02/MK.6/WKN.08/2019	28 Januari 2019	27 Mei 2019	Rp 9.800.000,00	12	28 Januari 2019	27 Januari 2020	
22	Yusuf Khotib	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002921	Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	S-84/MK.6/2019	08 Februari 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.06/2019	14 Maret 2019	17 Januari 2019	Rp 180.000.000,00	36	14 Maret 2019	13 Maret 2022	
23	Sri Riry Hidayati, SH	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002921	Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	S-94/MK.6/2019	13 Februari 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.06/2019	11 Maret 2019	22 Januari 2019	Rp 51.000.000,00	12	11 Maret 2019	10 Maret 2020	
24	Musli	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001839, HTBI	Ruko Bintaro Jaya Sektor IX Blok E No. 1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	S-112/MK.6/2019	19 Februari 2019	PRJ-02/MK.6/WKN.06/2019	12 Maret 2019	26 Februari 2019	Rp 79.500.000,00	36	12 Maret 2019	11 Maret 2022	
25	Fitriansyah Pratama Putra	EKS BPPN		Jalan Sambu No.3 RT.03 RW.03, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-113/MK.6/2019	19 Februari 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.08/2019	01 Maret 2019	04 Maret 2019	Rp 13.000.000,00	60	01 Maret 2019	29 Februari 2024	
26	Milyardi Salim	EKS BPPN		Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	S-287/MK.6/2019	24 April 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2019	01 Juli 2019	11 Maret 2019	Rp 62.895.000,00	60	01 Juli 2019	30 Juni 2024	
27	KANK ISMETH	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002629 dan PRK-B002630	Desa Salamnunggal (dh. Desa Karangnunggal) Cibeber, Cianjur	S-345/MK.6/2019	15 Mei 2019	PRJ-04/MK.6/WKN.08/2019	22 Mei 2019	21 Mei 2019	Rp 4.800.000,00	24	22 Mei 2019	21 Mei 2021	
28	BASIR JAPIDUNG	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000214	Jl. Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung	S-343/MK.6/2019	15 Mei 2019	PRJ-05/MK.6/WKN.08/2019	13 Juni 2019	12 Juni 2019	Rp 5.000.000,00	12	13 Juni 2019	12 Juni 2020	
29	AGUS KUSNIADI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000215	Jl. Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung	S-353/MK.6/2019	20 Mei 2019	PRJ-06/MK.6/WKN.08/2019	13 Juni 2019	13 Juni 2019	Rp 14.100.000,00	36	13 Juni 2019	12 Juni 2022	
30	DAYAT SUDARYONO	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002412	Taman Permata Gadog Blok A6 No.3 Gadog, Cianjur	S-368/MK.6/2019	27 Mei 2019	PRJ-07/MK.6/WKN.08/2019	24 Juni 2019	20 Juni 2019	Rp 15.000.000,00	24	24 Juni 2019	23 Juni 2021	
31	SDR. ISTIANTO RAJNA PRAWIRA	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000212	Jl. Raya Gading Boulevard Blok F3A-3 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung	S-351/MK.6/2019	16 Mei 2019	PRJ-08/MK.6/WKN.08/2019	24 Juni 2019	20 Juni 2019	Rp 6.600.000,00	12	24 Juni 2019	23 Juni 2020	
32	MILYARDI SALIM	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000114	Jl. MT Haryono No. 218, Kelurahan Pusat Psar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	S-344/MK.6/2019	15 Mei 2019	PRJ-04/MK.6/WKN.02/2019	06 Agustus 2019	23 Juli 2019	Rp 182.345.000,00	60	08 Juni 2019	08 Mei 2024	
33	TB. MUHAMMAD SYAM'UN	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0013603	Jalan Ciburial No.15, RT.01 RW.05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogar, Provinsi Jawa Barat	S-499/MK.6/2019	22 Juli 2019	PRJ-10/MK.6/WKN.08/2019	06 Agustus 2019	02 Agustus 2019	Rp 102.500.000,00	60	06 Agustus 2019	05 Agustus 2024	
34	PT PANCANIAGA INDOPERKASA	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001738	Jl. Suryopranoto No. 22 & 24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	S-536/MK.6/2019	09 Agustus 2019				Rp -				
35	YANTI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001617	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-550/MK.6/2019	12 Agustus 2019	PRJ-11/MK.6/WKN.08/2019	30 Agustus 2019	28 Agustus 2019	Rp 52.000.000,00	60	30 Agustus 2019	29 Agustus 2024	

SK No 062771 C

LAMPIRAN 25.C

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TANGGAL PEMBAYARAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	PIC
36	HARI BUDIYANTO SARTONO	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002625	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-551/MK.6/2019	12 Agustus 2019	PRJ-12/MK.6/WKN.08/2019	30 Agustus 2019	28 Agustus 2019	Rp 57.000.000,00	60	30 Agustus 2019	29 Agustus 2024	
37	DEDE AJAT	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002750	Jalan Hanjawar Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	S-573/MK.6/2019	23 Agustus 2019	PRJ-14/MK.6/WKN.08/2019	10 September 2019	06 September 2019	Rp 4.000.000,00	24	10 September 2019	09 September 2021	
38	HARI BUDIYANTO SARTONO	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001616	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-545/MK.6/2019	12 Agustus 2019	PRJ-13/MK.6/WKN.08/2019	30 Agustus 2019	28 Agustus 2019	Rp 58.500.000,00	60	30 Agustus 2019	29 Agustus 2024	
39	NI WAYAN ALIT	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002011	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	S-644/MK.6/2019	13 September 2019	PRJ-4/MK.6/WKN.14/2019	11 November 2019	22 Oktober 2019	Rp 16.600.000,00	12	11 November 2019	10 November 2020	
40	DEWI SULASTRI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRI-0000261	Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jalan Graha Bogor Indah, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	KMK-233/MK.6/2019	09 September 2019	PRJ-1/MK.6/WKN.08/2020	05 Februari 2020	31 Oktober 2019	Rp 202.000.000,00	60	30 Oktober 2019	29 Oktober 2024	
41	KURNIAWAN	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001298	Gang Kuburan Cina, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat	S-630/MK.6/2019	04 September 2019	PRJ-3/MK.6/WKN.14/2019	10 Oktober 2019	01 Oktober 2019	Rp 17.500.000,00	60	10 Oktober 2019	09 Oktober 2024	
42	ITING SARWATY	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002174	Villa Permata Bogor, Jl. Bangbarung Ujung No. 9, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat	KMK-184/MK.6/2019	30 Juli 2019	PRJ-15/MK.6/WKN.08/2019	18 September 2019	10 September 2019	Rp 15.500.000,00	12	06 September 2019	05 September 2020	
43	TAUPIK RAHMAT	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002821	Komplek Villa Intan Permai Blok A No.1 Desa Cibadak, Kec. Sukaresmi (d.h Kec. Pacet), Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat	S-356/MK.6/2019	20 Mei 2019	PRJ-09/MK.6/WKN.08/2019	02 Juli 2019	02 Juli 2019	Rp 17.500.000,00	60	02 Juli 2019	01 Juli 2024	
44	MUHAMMAD HELMI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0019500	Jalan Pasar Glodok Selatan Nomor 4, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	S-564/MK.6/2019	19 Agustus 2019								
45	BAMBANG SUNGKONO	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001632	Jalan Ancol Barat III Blok A5 Nomor 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	S-651/MK.6/2019	18 September 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.07/2020	20 Januari 2020	20 Desember 2019	Rp 345.000.000,00	36	20 Januari 2020	19 Januari 2023	
46	PT. FITTRIA GHANIA SEJAHTERA	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002007	Jalan Warung Buncit Raya No.10 RT.01 RW.11, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	S-635/MK.6/2019	06 September 2019								
47	H. BUSTAN	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001736	Jl. Soekarjo Wirjopranoto Nomor 71, RT/RW 007/001, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat	S-696/MK.6/2019	01 Oktober 2019								
48	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK- B001666	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	S-747/MK.6/2019	14 Oktober 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2019	16 Desember 2019	11 Desember 2019	Rp 40.200.000,00	12	17 Desember 2019	16 Desember 2020	
49	SUKAMTO YOWONO, YAYASAN SYALOM PROBOLINGGO (Perpanjangan)	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0015810, HTBI	Jalan Kol. Sugiono No. 5 (dh. Jl. Damarwulan) RT/RW. 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	S-819/MK.6/2019	02 Desember 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2019	05 Desember 2019	05 Desember 2019	Rp 271.000.000,00	60	05 Desember 2019	04 Desember 2024	
50	MILYARDI SALIM	EKS BPPN		Jl. Medan - Binjai, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumut	S-927/MK.6/2019	23 Desember 2019	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2020	13 Maret 2020	11 Maret 2020	Rp 44.100.000,00	60	13 Maret 2020	12 Maret 2025	
51	MILYARDI SALIM	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-C000120	Jl. Irian Barat No. 35/37, Kel. Gang Buntu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumut	S-928/MK.6/2019	23 Desember 2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2020	13 Maret 2020	11 Maret 2020	Rp 36.000.000,00	60	13 Maret 2020	12 Maret 2025	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.C

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TANGGAL PEMBAYARAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	PIC
52	BADAN PENGURUS PUSAT GEREJA KEHILAT MESIANIK INDONESIA	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002033, HTBI	Komplek Plaza Pasifik Blok A-1 Kavling Nomor 1, 3, 5 dan 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	S-30/MK.6/2020	24 Januari 2020				Rp -	12			
	BADAN PENGURUS PUSAT GEREJA KEHILAT MESIANIK INDONESIA	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002033, HTBI	Komplek Plaza Pasifik Blok A-1 Kavling Nomor 1, 3, 5 dan 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	S-160/MK.6/2020 (Perubahan	06 April 2020								
53	WILLIAM TANOTO	EKS BPPN		Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (bagian dari SHGB No. 11/Tanjung Morawa B)	S-31/MK.6/2020	27 Januari 2020	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2020	13 Maret 2020	10 Februari 2020	Rp 186.000.000,00	60	13 Maret 2020	12 Maret 2025	
54	NG DENI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001730, HTBI	Jalan Roa Malaka Selatan Nomor 27, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	S-36/MK.6/2020	30 Januari 2020	PRJ-02/MK.6/WKN.07/2020	17 Februari 2020	10 Februari 2020	Rp 375.000.000,00	60	17 Februari 2020	16 Februari 2025	
55	CHARLES SITOMPUL	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK- B002261	Jalan Pisang Nomor 10 D, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara	S-44/MK.6/2020	03 Februari 2020				Rp -	48			
56	TB. MUHAMMAD SYAM'UN	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0004975	Jalan H. Muhammad Nur (sekarang Jalan Inpres) Nomor 98, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	S-53/MK.6/2020	05 Februari 2020				Rp -	60			
57	MUSA P. TAMPUBOLON	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001918	Jalan Gatot Subroto Nomor 285, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	S-73/MK.6/2020	17 Februari 2020				Rp -	60			
58	Dra. Hj. Srijati Pohan M.Psi (Perpanjangan)	EKS BPPN	HTBI	Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	S-84/MK.6/2020	18 Februari 2020	PRJ-04/MK.6/WKN.02/2020	13 Maret 2020	10 Maret 2020	Rp 350.000.000,00	60	23 Februari 2020	22 Februari 2025	
59	PINKY DEWI	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0015205	Jalan T. Amir Hamzah Nomor 484, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	S-87/MK.6/2020	18 Februari 2020				Rp -	24			
60	FAIDUL WAHAB	EKS BPPN		Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur	S-189/MK.6/2020	29 April 2020	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2020	30 Juni 2020	29 Juni 2020	Rp 222.000.000,00	60	30 Juni 2020	29 Juni 2025	Atik
61	Denny Sumantri	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0001989,HTBI	Jalan TGH Faisal Petak II, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	S-207/MK.6/2020	05 Mei 2020	PRJ-15/MK.6/WKN.14/2020	29 Mei 2020	18 Mei 2020	Rp 185.000.000,00	60	29 Mei 2020	28 Mei 2025	Atik
62	ALIP SUGITO	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0016124	Jalan Sentul Nyapah, Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang	S-224/MK.6/2020	27 Mei 2020	PRJ-01/MK.6/WKN.06/2020	08 Juni 2020	02 Juni 2020	Rp 10.600.000,00	24	08 Juni 2020	09 Juni 2022	Rini
63	Bath Ahmad	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0013364	Jl. Raya Pangalengan, Desa Margamukti, Kec. Pangalengan , Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	S-229/MK.6/2020	29 Mei 2020				Rp -	36			Fahmi
64	Dartim	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-0014982	Jalan Perintis Kemerdekaan No.94 RT 02 RW 09 Rengasdengklok, Kab.Karawang, Jawa Barat	S-234/MK.6/2020	03 Juni 2020	PRJ-02/MK.06/WKN.08/2020	28 Juli 2020	17 Juli 2020	Rp 17.315.000,00	12	28 Januari 2020	27 Januari 2021	Vicka
65	Razaque	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B001658	2 (DUA) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.202 DAN 203, LUAS SELURUHNYA 167M2 , BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. IMAM BONJOL BLOK A NO. 10-11, KEL. LUBUK BAJA KOTA, KEC. BATAM TIMUR, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU.	S-238/MK.6/2020	6 Juni 2020				Rp 267.966.000,00	24			Dela
66	Kuswinarti	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002057	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A.5, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-255/MK.6/2020	2 Juli 2020	PRJ-02/MK.06/WKN.06/2020	26 Agustus 2020	19 Agustus 2020	Rp 140.000.000,00	60	26 Agustus 2020	25 Agustus 2025	Rini

SK No 062769 C

LAMPIRAN 25.C

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TANGGAL PEMBAYARAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	PIC
67	Asri Suciati	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002912	Sebagian tanah dengan luas 200 m2, terletak di Jl. Raya Cinunuk RT.01 RW.02, Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, sesuai SHGB No. 2/Cinunuk (luas keseluruhan aset 30.236 m2).	S-264/MK.6/2020	8 Juli 2020				Rp 2.050.000,00	12			**Heru**
68	Ach Nurdin Sholihin	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK-B002086	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F.5, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-292/MK.6/2020	25 Agustus 2020				Rp 105.000.000,00	60			**Rini**
69	Mukhammad Ervan S	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-0013375	Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Singosari Ujung No.2A RT 01 RW 21, Kel.Melong, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat	S-287/MK.6/2020	18 Agustus 2020				Rp 14.000.000,00	60			**Arifah**
70	Firman	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002077	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B19, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-308/MK.6/2020	10 September 2020	PRJ-07/MK.06/WKN.06/2020	01 Oktober 2020	28 September 2020	Rp 108.000.000,00	60	01 Oktober 2020	02 Oktober 2025	**Rini**
71	Jonathan Wijaya	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002078-B	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C7, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-302/MK.6/2020	28 agustus 2020	PRJ-04/MK.06/WKN.06/2020	16 September 2020	14 September 2020	Rp 137.500.000,00	60	16 September 2020	17 September 2025	**Rini**
72	Gereja MAsehi Advent Hari ketujuh di Indonesia Jemaat Koinonia	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002074	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok E3, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-303/MK.6/2020	28 agustus 2020	PRJ-05/MK.06/WKN.06/2020	18 September 2020	16 September 2020	Rp 62.500.000,00	60	18 September 2020	19 September 2025	**Rini**
73	Robbie Irawan	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002110	Perumahan Taman Asri Blok F2No 8 RT. 01/08Kelurahan Larangan, Kec Clledug, Kota Tangerang Banten	S-309/MK.6/2020	10 September 2020	PRJ-03/MK.06/WKN.06/2020	18 September 2020	16 September 2020	Rp 4.800.000,00	12	18 September 2020	19 September 2021	**Rini**
74	PT Siap Kirim	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002090	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F9-10, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-316/MK.6/2020	17 September 2020	PRJ-06/MK.06/WKN.06/2020	24 September 2020	22 September 2020	Rp 150.000.000,00	60	24 September 2020	25 September 2025	**Rini**
75	Jonathan Wijaya	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002078-A	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C2 Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-348/MK.6/2020	25 September 2020	PRJ-08/MK.06/WKN.06/2020	16 Oktober 2020	14 Oktober 2020	Rp 120.000.000,00	60	16 Oktober 2020	17 Oktober 2025	**Rini**
76	Yayasan Indonesia Raya Perguruan Tinggi Haji Agus Salim	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B001631	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 79, Kampung Cina, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	S-285/MK.6/2020	14 Agustus 2020	PRJ-01/MK.06/WKN.03/2020	10 September 2020	07 September 2020	Rp 108.204.000,00	36	09 Oktober 2020	09 Oktober 2023	**Dela**
77	Rachman Taqdir	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002075 dan 2076	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B17-18 Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	S-358/MK.6/2020	09 Oktober 2020				Rp -	60			**Rini**
78	Syafrudin MR	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002110	Perumahan Taman Asri Blok F2 No 8 RT. 01/08 Kelurahan Larangan, Kec Clledug, Kota Tangerang, Banten	S-179/WKN.06/2020	27 Oktober 2020	PRJ-09/MK.06/WKN.03/2020	12 November 2020	10 November 2020	Rp 38.250.000,00	60	12 November 2020	11 November 2025	Rini/Kanwil Banten
79	Ni Wayan Alit	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002011	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	S-14/MK.6/WKN.14/2020	16 November 2020	PRJ-17/MK.06/WKN.14/2020	30 November 2020	21 November 2020	17,000,000.00	12	11 November 2020	10 November 2021	Atik/Kanwil Bali dan NT
80	PT Geotronix Pratama Indonesia	Eks Kelolaan PT PPA	PRK-B002073	Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. 11 Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan	S-2/MK.6/WKN.07/2020	22 November 2020			29 Nov 2020	345,000,000.00	36			Rini/Kanwil DKI Jakarta
81	Leo JP Siegers	Eks Kelolaan PT PPA	**PRK-B002130**	Villa Japos E-2 No.15, kel Jurangmangu Barat, Kec. Pondok Aren, Tangerang, Banten	S-9/MK.6/WKN.06/2020	13 November 2020	PRJ-10/MK.6/WKN.6/2020	07-Des-20	03 Desember 2020	14,100,000.00	12	07 Desember 2020	06 Desember 2021	Rini/Kanwil Banten
82	H.Mohammad Suman	Eks Kelolaan PT PPA		Blok Zein, Jalan Desa Wanantara, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	S-06/MK.6/WKN.08/2020	18 November 2020			17 Desember 2020	40,000,000.00	60			Kanwil Jawa Barat

SK No 062768 C

LAMPIRAN 25.C

DAFTAR SEWA ASET EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT. PPA (PERSERO)

NO	PEMOHON SEWA	JENIS ASET	NO. ASET	LOKASI	SURAT PERSETUJUAN	TANGGAL PERSETUJUAN	SURAT PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TANGGAL PEMBAYARAN	BESARAN	TOTAL PERIODE (BULAN)	AWAL PERIODE	AKHIR PERIODE	PIC
83	Ir. H. Adang Shalahuddin & Drh. Asep Rakhmat Khaerudin (KPBS Pengalengan)	Eks Kelolaan PT PPA		Jalan Raya Pengalengan, Desa Margamukti, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	S-09/MK.6/WKN.08/2020	14 Desember 2020	PRJ-03/MK.6/WKN.8/2020	21-Des-20	17 Desember 2020	25,000,000.00	24	21 Desember 2020	20 Desember 2020	Kanwil Jawa Barat
84	Sugiyanto selaku Ketua RW 11	Eks Kelolaan PT PPA	**PRK-B002258**	Jl Petogogan I Gg IV/13, Kec Kebayoran Baru, Jaksel	S-5/MK.6/WKN.07/2020	08 Desember 2020			14 December 2020	1,500,000.00	36	22 Desember 2020	21 Desember 2020	Kanwil DKI Jakarta
85	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK- B001666	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,	S-36/MK.6/WKN.9/2020	07 Desember 2020	PRJ-01/MK.6/W/kn.09/2020	16-Des-20	14-Des-20	45,716,000.00	12	17-Dec-2020	16-Dec-2021	Kanwil Jateng dan DIY
86	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	EKS KELOLAAN PT PPA	PRK- B001879	Jalan Depok No. 56, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	S-368/MK.6/2020	27 Oktober 2020	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2021	19-Jan-21	18-Jan-21	200,200,000.00	60	26 Januari 2021	25 Januari 2026	vira
87	Syahrul	EKS BPPN		Kp. Sirnagalih Rt. 03 / 01, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Tengah, (Villa Kwala Deli)	S-10/MK.6/WKN.08/2020	29 Desember 2020			06 January 2021	108,000,000.00	60			Kanwil Jawa Barat
88	William Wijaya	Eks PT PPA	PRK-B002604	Desa Bengkulu Induk, RT 01, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung	S-262/WKN.05/2020	30 Desember 2020					24			Kanwil Lampung dan Bengkulu
89	CV Jaya Agung	Eks PT PPA	PRK-B001963	Jalan Pasar 16 Ilir Nomor 123, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	S-352/MK.6/2020	01 Oktober 2020					24			Dela
90	Enca	Eks PT PPA		Jalan Perintis Kemerdekaan No.58, Kampung Kalimah, Kel. Rengasdengklok Utara, Kec. Rengasdengklok, Kab.Karawang, Jawa Barat	S-08/MK.6/WKN.08/2020	08 December 2020			22 December 2020	14,190,000.00	12			Kanwil Jawa Barat

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Sebelum Tahun 2015

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
1	PRK B001647	JL DIPONEGORO NO 7	875	318	SHGB	2488/PETISAH TENGAH	PSP Kwl Mdn - No KMK 73/KM 6/2009	11 Juni 2009	7 329 800 000
2	PRK B002336	KOMP PERMATA SEMERU BLOK B NO 12 A	270		AJB	22/GMK/XII/1997	PSP Kwl SMg - KMK	11 Juni 2009	1 256 451 000
3	PRK C000188	JALAN A H NASOTION NO 16 KEL YOSODADI METRO	620	100	SHM	166/Ys/YOSODADI	PSP KPKNL Metro No KMK 74/KM 6/2009	11 Juni 2009	66 063 000
4	PRK 0012344 B	Jl Boulevard Diponegoro, Perumahan Lippo Kawaracc, Tangerang	13 781				PSP Ditjen Pajak dan DJKN (KPKNL serpong) No KMK 184/KM 6/2009	12 November 2009	22 865 781 009
5	PRK B002810	Jalan Desa Kampung Puncak RT 001/ RW 01, Desa Cibloto, Kecamatan Pacet, Kab Cianjur, Jawa Barat	5 648		SHGB	215CILOTO	PSP PPATK	17 Maret 2010	1 281 000 000
6	PRK B002882	JL MT HARYONO, KEL CAWANG, KEC KRAMAT JATI	10 245		SHGB	95/CAWANG	PSP Kementerian Kesehatan KMK No KMK 151/KM 6/2010	27 Juli 2010	92 661 000 000
7	PRK B002883	JL MT HARYONO, KEL CAWANG, KEC KRAMAT JATI	1 710		SHGB	365/CAWANG	PSP Kementerian Kesehatan KMK No KMK 151/KM 6/2010	27 Juli 2010	
8	PRK B002426	Perum Villa Collibah, Blok IV Kav 209, Desa Cimacan, Kec Pacet, Kab Cianjur	4 450	514	SHM	298/DESA CIMACAN	PSP Wisma DJKN	08 September 2010	1 928 000 000

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
9	PRI 0000230	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 382/XVI/3/MAPHAR, LUAS 88 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16A-1601, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	88	88	SHMSRS	382/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	348 000 000
10	PRI 0000231	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 383/XVI/3/MAPHAR, LUAS 133 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16B 1602, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	133	133	SHMSRS	383/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	497 000 000
11	PRI 0000232	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 384/XVI/3/MAPHAR, LUAS 124 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16C 1603, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	124	124	SHMSRS	384/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	464 000 000

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No.	No PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
12	PRI 0000233	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 385/XVI/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16D 1605, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	72	SHMSRS	385/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	278 000 000
13	PRI 0000234	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 386/XVI/3/MAPHAR, LUAS 86 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16E 1606, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	86	86	SHMSRS	386/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	332 000 000
14	PRI-0000235	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 387/XVI/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16F 1607, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	72	SHMSRS	387/XVI/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	278 000 000

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
15	PRI 0000236	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 388/XVII/3/MAPHAR, LUAS 57 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16G-1608, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	57	57	SHMSRS	388/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 8/2012	14 November 2012	225 000 000
16	PRI 0000237	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 391/XVII/3/MAPHAR, LUAS 89 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 16 RUANG 16K 1611, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	89	89	SHMSRS	391/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 8/2012	14 November 2012	344 000 000
17	PRI 0000238	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 392/XVII/3/MAPHAR, LUAS 88 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17A 1701, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	88	88	SHMSRS	392/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	348 000 000

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
18	PRI 0000239	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 393/XVII/3/MAPHAR, LUAS 133 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17B 1702, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	133	133	SHMSRS	393/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	513 000 000
19	PRI 0000240	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 394/XVII/3/MAPHAR, LUAS 124 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17C 1703, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	124	124	SHMSRS	394/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	464 000 000
20	PRI 0000241	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 395/XVII/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17D 1705, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	72	SHMSRS	395/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	284 000 000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No	No. PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
21	PRI-0000242	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 396/XVII/3/MAPHAR, LUAS 86 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17E 1706 , KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	86	86	SHMSRS	396/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	340 000 000
22	PRI 0000243	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 397/XVII/3/MAPHAR, LUAS 72 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17F-1707, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	72	72	SHMSRS	397/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	284 000 000
23	PRI 0000244	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 398/XVII/3/MAPHAR, LUAS 57 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17G 1708, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	57	57	SHMSRS	398/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	225 000 000
24	PRI 0000245	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 399/XVII/3/MAPHAR, LUAS 67 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17H 1709, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	67	67	SHMSRS	399/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	265 000 000

SK No 003690 C

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No.	No PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
25	PRI 0000246	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 400/XVII/3/MAPHAR, LUAS 133 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17J 1710, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	133	133	SHMSRS	400/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	497 000 000
26	PRI 0000247	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 401/XVII/3/MAPHAR, LUAS 89 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 17 RUANG 17K-1711, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	89	89	SHMSRS	401/XVII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	344 000 000
27	PRI 0000248	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 403/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 71 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 18 RUANG 18F 1802, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	71	71	SHMSRS	403/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	280 000 000

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No	No PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
29	PRI 0000250	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 405/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 66 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 18 RUANG 18H 1805, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	66	66	SHMSRS	405/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	261 000 000
30	PRI 0000251	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 406/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 132 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 18 RUANG 18J 1806, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	132	132	SHMSRS	406/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	510 000 000
31	PRI 0000252	SEBUAH RUANG PERKANTORAN SERTIPIKAK SHMSRS NO 407/XVIII/3/MAPHAR, LUAS 89 M2, TERLETAK DI PERKANTORAN HAYAM WURUK PLAZA III, JL HAYAM WURUK NO 108, LANTAI 18 RUANG 18K 1807, KEL MAPHAR, KEC TAMAN SARI, JAKARTA BARAT	89	89	SHMSRS	407/XVIII/3/MAPHAR	PSP Komnas Ham (KMK No 315/KM 6/2012	14 November 2012	352 000 000

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No.	No. PRK	ALAMAT ASET	LT	LB	DOKUMEN		KETERANGAN		NILAI
32	PRK B001987	Sebidang tanah sertipikat SHGB No 6069/PONDOK PINANG, luas 143 m2, berikut bangunan ruko di atasnya terletak di JL TB SIMATUPANG, PONDOK INDAH PLAZA BLOK D NO 4, JAKARTA SELATAN	143	162	SHGB	6069/PONDOK PINANG	PSP Rumah Lelang DJKN	Tahun 2013	1 950 000 000
33	PRK C000047	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO 272/DUKUH PAKIS, LUAS 824M2, BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA, TERLETAK DI JALAN MAYJEN SUNGKONO NO 9A, KEL DUKUH PAKIS, KEC, KARANGPILANG, SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR	824	293	SHM	272/DUKUH PAKIS	PSP kepada MA untuk Pengadilan Agama	01 April 2013	8 298 480 000
TOTAL									145.369 575 009

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tahun 2015

NO	K/L	KODE ASET	LOKASI	LUAS		NILAI	DOKUMEN KEPEMILIKAN	KEPUTUSAN	
				TANAH	BANGUNAN			NOMOR	TANGGAL
1	KEMENKUMHAM	PRK B002215	Jalan Jenderal A Yani No 19 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor	14 042	2 015	42 138 000 000	SHGB Nomor 338/Desa Pabaton (Kelurahan Tanah Sereal) tanggal 2 Mei 1983 atas nama Bank Indonesia	KMK 28/KM 6/2015	10 Feb 15
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK B002387	Jalan Kijang Utara II Blok C 11, Kel Gayamsari, Kec Gayamsari, Kota Semarang	248	152	633 440 000	SHM No 1151/Gayamsari a n Santoso Rahardjo	KMK 119/KM 6/2015	11 Mar 15
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-0013057	Desa Solok Sipin, Kel Sungai Putri, Kec Telanaipura, Kota Jambi	1 093		2 738 100 000	SHM No 1370/Solok Sipin a n Tommy Tandri		
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK B002591	Jalan Bendulmerisi Tengah, Kota Surabaya	976		1 854 400 000	SHM No 197 dan 198/Bendulmerisi a n Bambang Wahyudi		
5	KPK	Eks BPPN	Jalan H R Rasuna Said Kav C 1, Kel Karet, Kec Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan	6 531	16 903,22	404 424 862 000	SHGB No 618 dan 541 a n Bank Papan Sejahtera Tbk	KMK 130/KM 6/2015	18 Mar 15
6	KEMENTERIAN KEUANGAN	Eks BPPN	Jl Diponegoro Nomor 64, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	1 016	3 078	68 920 431 000	SHGB No 402/Pegangsaan tanggal 1 Mei 1996 atas nama PT Bank Danahutama	KMK 241/KM 6/2015	08 Jun 15
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	2 PRK	2 unit Apartemen Puri Casablanca			3 594 112 000	SHMSRS Menteng Dalam a n Badan Penyehatan Perbankan Nasional	KMK 366/KM 6/2015	28 Jul 15
9	KEMENTERIAN KEUANGAN	96 PRK	90 unit Apartemen Puri Casablanca			133 454 880 000	SHMSRS Menteng Dalam a n Badan Penyehatan Perbankan Nasional	KMK-432/KM 6/2015	21 Agu-15
9	KEMENTERIAN KEUANGAN	4 PRK	4 unit Apartemen Puri Casablanca			7 020 928 000	SHMSRS Menteng Dalam a n Badan Penyehatan Perbankan Nasional	KMK 485/KM 6/2015	28 Sep 15
10	BPKS	PRK B001861	2 (Dua) Buah Ruang Perkantoran Terletak Di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower LII Lantai IV R4 A dan R4 B, Jl Hayam Wuruk No 108, Kel Maphar, Kec Taman Sari, Jakarta Barat	221	220	2 712 621 000	SHMSRS Nomor 279/V/3 dan 278/V/3	KMK 490/KM 6/2015	01 Okt 15
JUMLAH						667.491.774.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tahun 2016

NO.	K/L	NOMOR ASET	LOKASI	LUAS		NILAI		DOKUMEN KEPEMILIKAN	KEPUTUSAN	
				TANAH	BANGUNAN				NOMOR	TANGGAL
1	KPU	PRK B001624	Plaza Hayam Wuruk Tower III Lantai Ground, 1, 2, dan 3, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta Barat		1 862	Rp	20 757 576 000	SHMSRS Nomor 276/I II III IV/3 Kel Maphar tanggal 31 Januari 2000, luas 1 862 m2, atas nama PT Hayam Wuruk Saktı	KMK 66/KM 6/2016	14 Mar 16
2	BPOM	PRK B002329	Jalan Kelapa Dua Wetan No 99 RT/RW 02/03, Kel Kelapa Dua Wetan, Kec Ciracas, Jakarta Timur	9 988		Rp	29 964 000 000	SHM Nomor 35/Kelapa Dua Wetan tanggal 16 Mei 1983, luas 2 725 m2, atas nama Nurhadi Marto Sobroto, SHM Nomor 43/Kelapa Dua Wetan tanggal 29 Februari 1984, luas 3 725 m2, atas nama Doktorandus Meizal Zam SHM Nomor 76/Kelapa Dua Wetan tanggal 24 Juni 1988, luas 1 098 m2, atas nama Bambang Riadi Lelono Putro Nomor 124/Kelapa Dua Wetan tanggal 30 Desember 1989, luas 2 440 m2, atas nama Taufik Hidayat	KMK 102/KM 6/2016	20 Apr 16
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-B003025	Jalan Krypton Kav 10 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang	207		Rp	825 930 000	SHM No 1445/Purwantoro a n Doktorandus Agus Apriyono tanggal 8 April 1992	KMK 105/KM 6/2016	21 Apr 16
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-0013082	Perum Demang Hill, Jalan Demang Lebar Daun VI No 5155 Rt/Rw 45/13, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	1 800		Rp	1 687 600 000	SHM No 3292/Lorok Pakjo a n Siwen tanggal 24 Oktober 1985	KMK 106/KM 6/2016	21 Apr 16
		PRK-0013229	Jalan Lunjuk Jaya, Lorong Melati No 5558 B Rt/Rw 50/14, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	301	95	Rp	250 700 000	SHM No 5324/Lorok Pakjo a n Ir Marliza AR tanggal 29 Maret 1996		
		PRK-0013274	Jalan May Zen, Lorong Margoyoso No 106 Rt/Rw 08/03, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	559	98	Rp	252 300 000	SHGB No 226/2 Ilir a n Hendra AM tanggal 20 Juli 1987		
5	KEMENTERIAN AGAMA	PRK B002878	Jalan Matraman Raya Nomor 39 dan 41, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1 036		Rp	27 343 000 000	SHGB No 260/Palmeriam tanggal 5 Agustus 1992 seluas 300 M² dan SHGB No 309/Palmeriam tanggal 7 Maret 1995 seluas 763 M², keduanya a n Perseroan Terbatas PT BANK INDONESIA RAYA Tbk	KMK 146/KM 6/2016	25 Mei 16
6	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK 0016126	Jalan Cokonuri Nomor 77 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	4 532		Rp	11 538 472 000	SHM No 20016, No 20017, No 20018/Gunung Sari tanggal 6 Februari 1995 atas nama Suyud Subaktı	KMK 250/KM 6/2016	16 Agu 16
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK B003052	Jalan KH Muhtar Tabrani, Desa Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	2 261	906	Rp	2 381 460 000	SHM Nomor 173/Perwira a n Raymond Budiono Handoko tanggal 24 Februari 1987	KMK 333/KM 6/2016	10 Okt 2016

SK No 003682 C

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

8	KEMENTERIAN PUPR	PRK B002763, PRK 0019432, PRK B003010, PRK B003011, PRK B003012, PRK B003074	Tanah di Desa Sukaraja Nuban, Kec Sukadana, Kab Lampung Tengah, Provinsi Lampung Tanah dan bangunan di Jl S Parman, Desa Tg Piayu, Kec Sei Beduk (d h Kec Sungai Beduk), Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tanah di Kel Gunung Sarik, Kec Kuranji, Padang Tanah di Jl Penangkaran Buaya, Desa Paccelekang, Kec Bontomarannu, Kab Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	313 380	71 849	Rp	85 517 360 000		KMK 377/KM 6/2016	31 Okt 2016
JUMLAH				**317 912**	**74.617**	**Rp**	**180 518 398.000**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tahun 2017

NO.	K/L ATAU PIHAK LAIN	NOMOR ASET	LOKASI	LUAS		NILAI pada KMK	Nilai pada LKTK 2017	DOKUMEN KEPEMILIKAN	KEPUTUSAN	
				TANAH	BANGUNAN				NOMOR	TANGGAL
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK B002339	1) 2 Bidang tanah luas 500m2 dan 1 unit bangunan luas 400m2 terletak di Komplek Taman Setiabudi Indah, Jalan Cana Raya Blok D Nomor 3, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan	500	400	Rp 2 791 660 000	Rp 1 335 960 000	• SHGB No 1408/ Tanjung Rejo luas 329m2 an PT Umbank, berakhir pada 16 11 2006 • SHGB No 835/ Tanjung Rejo an PT Umbank, berakhir pada 20 02-2011	KMK 22/KM 6/2017	09 Feb 17
		PRK B002318	2) 1 Bidang tanah luas 157m2 dan 1 unit bangunan luas 150m2 terletak di Komplek Taman Setiabudi Indah Blok YY Nomor 12, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan	157	150	Rp 540 000 000	Rp 462 660 000	SHGB No 1159/ Tanjung Rejo an Syaifullah, Sarjana Ekonomi, berakhir pada 12 01 2011		
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK C000186	sebidang tanah dengan luas 925 m2 yang terletak di Jalan K H Hasim As'ari, Desa Gedung Pakuon, Kec Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	925		Rp 807 000 000	Rp 915 750 000	Sertipikat Hak Milik Nomor 1/TL (Sisa) a n Po Heng Tjong alias Lim Tjong Hay	KMK 273/KM 6/2017	06 Apr 17
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	Eks BPPN	1 Bidang tanah dan 1 unit bangunan terletak di Jalan Sunter Agung Tengah 4 Blok F1 Nomor 1 dan 20, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	857	735	Rp 16 557 900 000	Rp 1 600 409 549	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5603/Sunter a n PT Bank Mashill Utama Tbk tanggal 2 Agustus 1986	KMK 496/KM 6/2017	06 Jun 17
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK C000175	Jalan Asem Manis RT/RW 02/01, Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur	990	585	Rp 499 318 000	Rp 453 300 000	Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Murtajih a n Ganda Prayitno, tanggal 20 September 1993	KMK 775/KM 6/2017	08 Des 17
5	BNN	PRK-B002281	Jalan Sukomanunggal No 55, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	3 000	448	Rp 19 517 920 000,00	Rp 4 200 000 000,00	Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Sukomanunggal tanggal 15 April 1972 a n Chndra Hudaya Widarto	KMK 773/KM 6/2017	07 Des 17
6	KPPU	PRK B001990	Jl Adityawarman 85, Kel Kertajaya, Kec Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	216	97	Rp 2 160 900 000,00	Rp 1 687 000 000,00	• Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188 45/0890/402 5 12/97 tanggal 5 Februari 1997 • Ijin Mendirikan Bangunan No 188 45/593 91/402 5 09/1993 tanggal 12 April 1993	KMK 798/KM 6/2017	29 Des 17
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	PRK-C000154	Jalan Pemuda, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	399		Rp 428 700 000,00	Rp 428 700 000,00	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3358/Damai a n Kusni Salim, tanggal 10 November 2000	KMK 815/KM 6/2017	29 Des 17
JUMLAH				7.044	2 415	43.403.398.000	11.083.779 549			

SK No 003680 C

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tahun 2018

NO.	Pemohon	NILAI PENGELOLAAN BMN	PENETAPAN/PERSETUJUAN			Keterangan
			NOMOR	TANGGAL	TENTANG	
1	Kementerian Agama	Rp7 785 000 000	KMK 174/KM 6/2018	20 Agu 18	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Agama	PRK B001683 SHGB No 194/ Kebon Manggis a n PT Bank Intan SHGB No 114/ Kebon Manggis a n PT Bank Intan
2	Kementerian Keuang	Rp6 829 000 000	KMK 291/KM 6/2018	17 Des 18	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	Aset eks BPPN SHM No 3348/ Semanan a n Mardiyono dan aset eks PT PPA PRK B001825 SHM No 3365/ Semanan a n Nona Hartati Kusmaja di Kompleks Pergudangan Semanan Megah Blok A Nomor 11, Kel Semanan, Kec Kalideres, Jakarta Barat
JUMLAH		Rp14 614 000.000				

LAMPIRAN 25.D

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tahun 2019

NO.	PEMOHON	NILAI PENGELOLAAN BMN	NILAI UTILISASI BMN	PENETAPAN/PERSETUJUAN			Keterangan
				NOMOR	TANGGAL	TENTANG	
1	Bawaslu	Rp1 815 693 164		KMK 59/KM 6/2019	19 Feb 19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN kepada Bawaslu	Eks BPPN Jl Kopi No 10 Jakarta Barat
2	Kementerian Keuangan	Rp284 460 000		KMK 92/KM 6/2019	22 Mar 19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	PRK B002226 Perum Jaka Permai, Jalan Kediri Nomor 1, RT 05/RW 06B, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat SHGB No 1565/ Jakasampurna a n PT Bank Aken Aset
3	Polri	Rp14 849 689 000		KMK 116/KM 6/2019	07 Mei 19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kepolisian RI	PRK-B003057 8 bidang tanah seluas 37 452 m2 terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung, Provinsi Lampung
4	Kementerian Keuangan	Rp3 903 098 208	Rp 6 829 000 000,00	KMK 127/KM 6/2019	23 Mei 19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN kepada Kementerian Keuangan	Eks BPPN Gudang Aspac Jl Daan Mogot KM 19,8 Tangerang
5	Kementerian Keuangan	Rp1 790 000 000	Rp 6 829 000 000,00	KMK 181/KM 6/2019	25 Jul 19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	PRK 0019118 Sebidang tanah 18 580 m2 terletak di Jln Komplek Perumahan Universitas Tirtayasa, Kel Banjar Agung, Kec Serang, Kota Serang, Provinsi Banten
6	Kementerian Keuangan	Rp223 800 000		KMK 316/KM 6/2019	23 Des 19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	Eks PPA PRK-C000153 Jalan Mulawarman Bhakti, Kel Damai, Balikpapan
7	Kementerian Keuangan	Rp921 920 000		KMK 315/KM 6/2019	23 Des 19	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	Eks PPA PRK B001831 Kompleks Pergudangan Semanan Megah Blok B Nomor 9 Kalideres, Jakarta Barat
JUMLAH		Rp23 788 660.372	Rp 13 658 000 000				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ASET EKS BPPN/PT PPA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA SEBAGAI BMN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tahun 2020

NO	PEMOHON	NILAI PENGELOLAAN BMN	PENETAPAN/PERSETUJUAN			Keterangan
			NOMOR	TANGGAL	TENTANG	
1	BIN	Rp6 440 000 000,00	KMK 26/KM 6/2020	13 Feb-20	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) pada Badan Intelijen Negara	PRK-0005420 Sebidang tanah sebagian dari SHM No 30/Ujung Menteng a n Tono Supranoto seluas 2 500 m2 yang terletak di Jalan Raya Pulo Gebang RT/RW 03/04, Kampung Kandang, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur
2	BIN	Rp34 203 042 000,00	KMK 70/KM 6/2020	13 Apr 20	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) pada Badan Intelijen Negara	- Tercatat di Daftar NominatifAset Eks BPPN - Tanah seluas 842 m2 sesuai SHGB Nomor 665 a n BDNI beserta bangunan di atasnya seluas 647 m2, terletak di Jalan S Parman No 91, Kota Bambu, Jakarta Barat,
3	LPSK	Rp22 249 500 000	KMK 68/KM 6/2020	03 Apr 20	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) pada LPSK	sebagian aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) PRK B002762 berupa 45 (empat puluh lima) bidang tanah seluas 74 165 m yang terletak di Blok 4 Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi
4	KEMENKEU	Rp24 812 690 000	KMK 167/KM 6/2020	07 Agu 20	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN kepada Kementerian Keuangan	sebagian aset properti eks BPPN seluas 20 851 m2 dari total luas 84 368 m2, terletak di Jalan Industri No 71 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
5	KEMENKEU	Rp50 243 500 000	KMK 205/KM 6/2020	25 Sep 20	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada Kementerian Keuangan	aset properti eks PPA PRK B002738 (Blok H1 H10) sebagian aset properti PRK B002739 (Blok H11, H12) 1 (satu) bidang tanah seluas 64 800 m^2 yang terletak di Kawasan Industri Modern Cikande, Jalan Raya Serang Km 68 Blok H1 s d H12, Kelurahan Barengkok, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
6	KEMENKEU	Rp122 823 000	KMK 228/KM 6/2020	19 Okt-20	Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BPPN kepada Kementerian Keuangan	Aset properti eks BPPN di Jl Danau Sentarum Pontianak
JUMLAH		Rp138 071 555.000				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 23.E

DAFTAR ASET PROPERTI YANG DIUSULKAN UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016

No.	Jenis Aset	Alamat Objek	Kota/Kabupaten	Luas berdasarkan		Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
				LT (m2)	LB (m2)							
1	TANAH	TANAH DI WILAYAH KARET BELAKANG - SETIABUDI JAKARTA	Jakarta	25.132	-	Girik dan SPH	Girik No. 529/Krt/SDA/72529/Krt/SDA/726463PERSIL NO. 59 LO/48/V/PT/60360/Kr/nds/71(PERSIL NO. 59 M)PERSIL NO. 59 KO/489/KR/60 Girik Agg.237/kr/ads/71Reg I/hal.638Agenda13/kr/ads/71258/KR./ADS./69, Girik 8A - MOCHAMAD SOHAREG I HAL 254 (45E SISA) - MUHIDINREG I HAL 674301/kr/ads/7145 D - ROCHGAYA 60 C (JATIRAH)60REG I / HAL 635 REG III/U/HAL 33045 C - NANANG KARDJA95 - SUDIJAH	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002968, PRK-B002969, PRK-B002970	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
2	TANAH	JL. MUARA BARU, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA	JAKARTA UTARA	56.045	-	SHM 448 s.d. 456/Penjaringan, SHM 465 s.d. 469/Penjaringan	Sebagian aset pada kuadran IV hanya dilengkapi dokumen berupa AJB tanpa dok kepemilikan	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002884 s.d. PRK-B002893, PRK-B002974 s.d. PRK-B002977,	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
				8.400		Verponding 114/116 , 115/102	.	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003065, PRK-B003072	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
				30.280		-	Dok. Peralihan AJB No. 52-60	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003066 s.d. PRK-B003071, PRK-B003073	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
3	TANAH	TANAH DI JALAN DESA JAMPANG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR	BOGOR	578.548	-	-	-	-	Laku Lelang RL No : 1577/32/2018 tanggal 9 November 2018		-	
4	TANAH	TANAH DI DESA KATULAMPA, KEC. BOGOR TIMUR	BOGOR	214.305	-	-	Dokumen berupa Covernote NO. 142/Not/Jkt/XII/1998	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002635	III	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan
5	TANAH	Desa Pasir Ampu, Desa Koper & Desa Patra Sana, Kecamatan Kresek, Tangerang	TANGERANG	101.085	-	-	SPH No.1-74	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002760	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
6	TANAH	TANAH DI DESA KOPER, KAB. TANGERANG	TANGERANG	101.220	-	-	PPJB No. 11	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003181	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
7	TANAH	TANAH DI DESA PATRASANA, KAB. TANGERANG	TANGERANG	122.935	-	-	PPJB No. 13	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003186	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
8	TANAH	TANAH DI DESA PASIR AMPU, DESA KOP DAN PATRA SANA, KEC.KRESEK, TANGERANG	TANGERANG	200.885	-	-	PPJB No. 16	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003188	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
9	TANAH	DESA PS AMPO, KOPER, TANGERANG	TANGERANG	201.625	-	-	PPJB No. 15	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002686	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
10	Tanah	TANAH DI DESA KOTABUMI - KOTAJAYA	TANGERANG	174.461	-	SHGB No. 1/Sukabumi	Dok. Kepemilikan Copy, tanpa Dok Peralihan	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002664	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

LAMPIRAN 23.E

DAFTAR ASET PROPERTI YANG DIUSULKAN UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016

No.	Jenis Aset	Alamat Objek	Kota/Kabupaten	Luas berdasarkan		Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
				LT (m2)	LB (m2)							
11	TANAH	TANAH TERLETAK DI JALAN KH. NOER ALI (D/H KALIMALANG RAYA) DESA BINTARA JAYA DAN JAKA SAMPURNA, KECAMATAN BEKASI BARAT, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT	BEKASI	200.147	-	SHGB No. 1000, 999, 495, 492/BINTARA JAYA, 1748, 4713, 4709, 4711, 4710, 4712, 4708, 4898//JAKA SAMPURNA	SHGB (6 sertifikat telah berakhir masa berlakunya, dan 6 sertifikat akan berakhir pada tanggal 24 September 2024 Dokumen peralihan berupa AJB dari PT Albaraya kepada BPPN	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRI-0000263	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
12	TANAH	TANAH DI DUSUN ANJASMORO DESA JARAK KEC.WONOSALAM, JOMBANG, JAWA TIMUR	JOMBANG	187.825	-	SHM NO. 3, 9, 12, 180, 188, 189, 196-201, 215	Dok. Peralihan AJB	Kosong	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002626	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
13	TANAH	TANAH DI DESA KEDAMAIAN, DAN DESA CAMPANG RAYA, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG.	BANDAR LAMPUNG	126.471	-	SHM No. 8979, 9557, 9558, 9559, 9562, 9610/Kedamaian, 19, 20, 99, 111, 118, DAN 198/Campang Raya	Dok. Peralihan AJB	Kosong, sebagian ditanami warga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002771	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
14	TANAH	TANAH DI JL. RE. MARTADINATA KEL. SUKAMAJU KEC. TELUK BETUNG BARAT BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	124.283	-	-	AJB No. 7/XII/AJB/SBB/BB/1988	Kosong, sebagian ditanami warga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003055	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
15	TANAH	TANAH DI SUKA MAJU,TELUK BETUNG, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	360.126	-	SHGB No. 27/Sukamaju	Dok. Kepemilikan Copy, tanpa Dok Peralihan	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B003176	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
16	TANAH	TANAH DI DESA SUKARAJA NUBAN, KEC. SUKADANA, KAB. LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	136.770	-				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	
17	TANAH	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO.247, LUAS 154.090 M2, TERLETAK DI PERUMAHAN SASANA PATRA JL. TEGAL BINANGUN KEL. PLAJU DARAT KEC. SEBERANG ULU II, PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN.	PALEMBANG	154.090	-	SHGB NO. 247/PLAJU DARAT (LADANG PLAJU)	Dok. Peralihan AJB	Kosong	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002682	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
18	TANAH	PERUMAHAN TAMAN SASANA PATRA JL. TEGAL BINANGUN KEL. PLAJU DARAT SEBERANG ULU II	PALEMBANG	147.571	-	SHGB No. 372, 371/PLAJU DARAT	Tidak ada dok. Peralihan	Kosong	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002683	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
19	TANAH	TANAH DI KEL. GUNUNG SARIK KEC. KURANJI, PADANG	PADANG	138.750	-				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	
20	GEDUNG	TANAH BERIKUT BANGUNAN DI JL. S. PARMAN, DESA TG. PIAYU, KEC. SEI BEDUK (D.H. KEC. SUNGAI BEDUK), KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU.	BATAM	59.310	71.849				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	

SK No 062803 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 23.E

DAFTAR ASET PROPERTI YANG DIUSULKAN UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016

No.	Jenis Aset	Alamat Objek	Kota/Kabupaten	Luas berdasarkan		Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
				LT (m2)	LB (m2)							
21	TANAH	TANAH DI KEC. PANTAI CERMIN	DELI SERDANG	360.296	-	-	592.23/60/1988 (SURAT GANTI RUGI)	sebagian digunakan oleh TNI, sebagian oleh warga	Diusulkan PSP untuk TNI dan Polri	PRK-B003004	IV	Tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
22	Tanah	JL. SANRANGAN DAYA BIRINGKANAYA RT/RW 01/01, KEL DAYA, KEC. BIRINGKANAYA, KOTA MAKASAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.	Makassar	2.009	-	SHM 375/DAYA	Dok. Peralihan AJB	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-0016101	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
23	Tanah	JALAN DUSUN MANGEMPANG, DESA MONCONGLOE, KEC MANDAI, KAB MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN.	Maros	8.881	-	SHM 701/MONCONGLOE	Dok. Peralihan AJB	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-0016168	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
24	Tanah	DESA LEPO-LEPO, KEC. BARUGA, KENDARI	Kendari	4.648	-	SHM 876 / KEL. LEPO-LEPO	Dok. Peralihan AJB	lokasi tidak jelas	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002666	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
25	Tanah	JI. URIP SUMOHARJO, KEL. PANAIKANG, KEC. PANAKKUKANG, KOTA MAKASAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.	Makassar	4.263	-	SHM No. 53,808,809,811,2631, 3038 dan 3143/PANAIKANG	Dok. Peralihan AJB	sebagian dikuasai pihak ketiga	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-B002947,PRK-B002949 s.d. PRK-B002954	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
26	Tanah	JI Penangkaran Buaya, Desa Paccelekang, Kec Bontomarannu, Kab Gowa	Makassar	20.000	-				Telah dilakukan PSP sesuai KMK 377/KM.6/2016 tanggal 31 Oktober 2016		-	
27	Tanah	Jalan Kumala, Komplek Malombasang Country, Kel Jongaya, Kec. Tamalate	Makassar	1.127	-	SHM No. 2093, 2091/JONGAYA	Dok. Peralihan AJB	digunakan sebagai fasos/fasum perumahan	Diusulkan PSP untuk penyediaan program sejuta rumah	PRK-C000219	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.F

Penyediaan Rumah ASN/TNI/POLRI dan MBR

No.	Alamat	Kota/Kab.	Luas Tanah (m2)	Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
1	Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat	Kota Bogor	33.500	SHGB No. 36	SHGB 36/Empang berlaku hingga 24/09/2025 Dokumen peralihan berupa AJB ke BPPN Nomor 47/2004 tanggal 31 Maret 2004	Sebagian dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	Eks BPPN	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
2	Jl. Anjasmoro, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah	Kota Semarang	8.348	SHGB No. 546	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	Eks BPPN	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
3	Lingkungan III, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur	Kota Malang	5.680	SHM No. 1250	SHM Nomor 1250 Ada Surat Kuasa ke Bank BCA untuk menjual aset (1987), dan ada fotokopi SHM	-	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	Eks BPPN	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
4	12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 1000, 999, 495, 492/BINTARA JAYA, 1748, 4713, 4709, 4711, 4710, 4712, 4708, 4898//JAKA SAMPURNA, LUAS KESELURUHAN 200.147 m2, TERLETAK DI JALAN KH. NOER ALI (D/H KALIMALANG RAYA) DESA BINTARA JAYA DAN JAKA SAMPURNA, KECAMATAN BEKASI BARAT, KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT	Kota Bekasi	178.564	SHGB No. 1000, 999, 495, 492/BINTARA JAYA, 1748, 4713, 4709, 4711, 4710, 4712, 4708, 4898//JAKA SAMPURNA	SHGB (6 sertifikat telah berakhir masa berlakunya, dan 6 sertifikat akan berakhir pada tanggal 24 September 2024 Dokumen peralihan berupa AJB dari PT Albaraya kepada BPPN	Sebagian dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRI-0000263	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
5	4 (EMPAT) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.20, 21, 22, DAN 23, LUAS KESELURUHAN 10.130M2, TERLETAK DI JALAN H. SAIDIN, DESA BAMBU APUS, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG, PROVINSI BANTEN.	Kab. Tangerang	10.130	SHM No. 20, 21, 22, 23/BAMBU APUS	SHM No. 20, 21, 22, 23/BAMBU APUS a.n. pihak ketiga (debitur). Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual No 98,100,102,104 tanggal 28 September 1998.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-0011434	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
6	JL. DESA SUKATANI RT/RW 02/03, SUKATANI - KALIANDA	Kota Lampung	42.600	SHM No. 1/DESA SUMUR KUMBANG	SHM Nomor 1/Desa Sumur Kumbang, masih a.n. pihak ketiga (debitur) Dokumen peralihan berupa Akta Kuasa Menjual Nomor 38 tanggal 8 Maret 1994 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 8 Maret 1994	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-0013103	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
7	Jl. Simpang Dukuh / Genteng Bandar I dan II RT/RW IX Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya	Kota Surabaya	7.450	SHM No. 50/GENTENG	SHM 50/GENTENG a.n. pihak ketiga	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri dan terdapat permohonan PSP dari Kementerian Perhubungan	PRK-0014411	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
8	Jalan Raya Ciseeng-Parung, desa bojong sempu, Kec. Parung, Kab. Bogor	Kab. Bogor	7.015	SHM No. 67/DS.BOJONG SEMPU	Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM) dari debitur kepada bank	Dimanfaatkan pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-0017160	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
9	12 (DUA BELAS) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SERTIPIKAT SHM NO. 8979, 9557, 9558, 9559, 9562, 9610/KEDAMAIAN, 19, 20, 99, 111, 118, DAN 198/CAMPANG RAYA, LUAS KESELURUHAN 126.471M2, TERLETAK DI DESA KEDAMAIAN, DAN DESA CAMPANG RAYA, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	126.471	SHM No. 8979, 9557, 9558, 9559, 9562, 9610/Kedamaian, 19, 20, 99, 111, 118, DAN 198/Campang Raya	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk PMN ke BUMN	PRK-B002771	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
10	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 1222/DAMAI, LUAS 14.930M2, TERLETAK DI JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. DAMAI, KEC. BALIKPAPAN TIMUR, KODYA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Kota Balikpapan	14.930	SHM No. 1222/DAMAI	Dokumen peralihan berupa Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM) Nomor 69 tanggal 12 November 1993	Dikuasai pihak ketiga	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-B002838	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
11	7 (TUJUH) BIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO. 613, 614, 615, 616, 617, 618, DAN 619, LUAS KESELURUHAN 63.778 M2, TERLETAK DESA KOTO LUAR, KEC. PAUH PADANG, PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT.	Kota Padang	63.778	SHM No. 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619	AJB No. 19/7/PJB/1995, No. 17/7/PJB/95, 13/7/PJB/95, 14/7/PJB/95, 16/7/PJB/95, 15/7/PJB/95, 18/7/PJB/95 tanggal 17 Juli 1995 (Notaris Hajjah Deetjee Farida Sjanas SH). Surat Pernyataan dan Kuasa Deddy Djunarto pada bulan Juli 1999.	Kosong	Diusulkan untuk PMN ke BUMN	PRK-B002928	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

LAMPIRAN 25.F

Penyediaan Rumah ASN/TNI/POLRI dan MBR

No.	Alamat	Kota/Kab.	Luas Tanah (m2)	Dokumen Kepemilikan	Kelengkapan Dokumen	Penguasaan Fisik	Rencana Pemanfaatan	Nomor Aset	KUADRAN	
12	JL.IR.SUTAMI LB. 36 KT E,F, KT/5,6,7,8 CAMPANG RAYA BANDAR LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	22.360	SHM No. 85/CAMPANG RAYA	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Dimanfaatkan pihak ketiga	Diusulkan untuk PMN ke BUMN	PRK-B002964	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
13	Jl. Kalijudan IX Kel. Kalijudan, Kec. Sukolilo, Surabaya - Jawa Timur	Kota Surabaya	4.220	SHM No. 129, 126/KALIJUDAN	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-B003014	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
14	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHM NO.1181/KARANG JOANG, LUAS 19.978M2, TERLETAK DI JALAN SOEKARNO - HATTA KM 11, KEL KARANG JOANG, KEC BALIKPAPAN UTARA, KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.	Kota Balikpapan	19.978	SHM No. 1181/KARANG JOANG	Dokumen peralihan berupa Risalah Lelang Nomor 175/1997 - 1998	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-C000157	I	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
15	Jalan Raya Cilegon-Serang km. 3 RT 01/RW 002, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten	Kota Cilegon	31.800	SHGB No. 25/SUKMAJAYA	SHGB 25/SUKMAJAYA, masa berlaku berakhir pada 12/12/2015	Kosong	Terdapat permohonan pemanfaatan dalam bentuk sewa	PRK-0013790	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
16	Jalan Krukut-Grogol, Kel. Krukut, Kec. Sawangan, Kab. Bogor	Kab. Bogor	27.867	Girik .80 (LETTER C), 1770, 969, 975, 1089/1771, 676	Masih dilakukan inventarisasi dokumen.	Kosong	Diusulkan untuk penyediaan rumah ASN/TNI/Polri	PRK-B002621	II	Dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
Total			**604.691**							

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Eks HTBI		Jl Gereja Ayam No 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat	Gedung Kantor 5 lantai	SHGB No 2333/Pasar Baru	400	1 227	2 334 100 000	
2	Eks HTBI		Jl. Cikini Raya No 91 A B, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	Gedung Kantor 4 lantai	SHGB No 425/Cikini	140	936	4.245.400.000	
3	Eks HTBI		Jl. Cikini Raya No 91 C-D, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat		SHGB No 411/Cikini	195			
4	Eks HTBI		Komplek Majapahit Permai, Jl Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B/105, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	Ruko 4 lantai	SHGB No. 1515/Petojo Selatan	66	247	4.968.507.000	
5	Eks HTBI		Komplek Majapahit Permai, Jl. Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B No. 04, 05, 06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	3 unit Ruko (4 lantai)	SHGB No 1556/Petojo Selatan	307	1.118		
6	Eks HTBI		Jl. Kyai Caringin Blok A No. 6, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Jl. Tarakan)	Ruko 3 lantai	SHGB No 1149/Cideng	73	221		
7	Eks HTBI		Komplek Pertokoan Plaza Glodok Blok A-15 dan A-17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Mangga Besar, Jakarta Barat	Rukan 4 lantai	SHGB No 235/Mangga Besar	50	308	2 006.180.000	
8	Eks HTBI				SHGB No 237/Mangga Besar	50			
9	Eks HTBI		Komp Pertokoan Taman Kedoya Permai Blok A No. 3-A dan 3 B, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Ruko 3 lantai	SHGB No 5183/Kedoya	74	481	961 075.000	
10	Eks HTBI				SHGB No. 5184/Kedoya	90			
11	Eks HTBI		Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 1 Blok UA Persil No 01, Jl Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Rukan 2 lantai	SHGB No. 3079/Pondok Pinang	110	199	2.057 160.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m^2)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
12	Eks HTBI		Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 2 Blok BA Persil No. 11, Jl Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Rukan 2 lantai	SHGB No 5264/Pondok Pinang	110	196	442.800 000	
13	Eks HTBI		Jl. Panglima Polim Raya No. 20 Blok B. III persil No. 152, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Rukan 3 lantai	SHGB No. 873/Kramat Pela	491	656,25	4.333.010.000	
14	Eks HTBI		Komplek Pertokoan Bintaro Blok D-50, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang	Ruko	SHGB No 1839/Pondok Karya	75	150	448.531.000	
15	Eks HTBI		Komplek Ruko THD Blok A No. 16 dan No. 17, Jl Pekojan, Purwadinatan, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah	Ruko	SHGB No. 499/Purwodinatan	104	692	716.084 000	
16	Eks HTBI				SHGB No. 500/Purwodinatan	138			
17	Eks HTBI		Komplek Ruko THD Blok B-17 Jl H Agus Salim, Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah	Ruko	SHGB No 516/Purwodinatan	130	372	630.000.000	
18	Eks HTBI		Jl. Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara	Gedung Kantor	SHGB No 741/Aur, Medan	241	723	1 001.816 000	Ditarik kembali ke PKNSI sesuai Kepdirjen No 292/KN/2020 tanggal 10 September 2020
19	Eks HTBI		Jl. Kol. Sugiono, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara	Gedung Kantor	SHGB No. 293/Aur, Medan	87	787,50	1 962 550.000	
20	Eks HTBI				SHGB No. 294/Aur, Medan	87			
21	Eks HTBI				SHGB No 295/Aur, Medan	87			
22	Eks HTBI		Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara	Kantor Ruko	SHGB No. 2428/Petisah Tengah	81	230	465.750.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m^2)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
23	Eks HTBI		Jl. Slamet Riyadi I No. 7, RT 05/RW.04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur	Lahan parkir	SHGB No. 140/ Kbn. Manggis	574	-	8.295.000.000	- ditarik kembali ke PKNSI untuk di PSP ke LMAN sesuai Kepdirjen 452/KN/2020 - total nilai HT 3 sertifikat (SHGB 140, 114, 194/Kebon Manggis). SHGB 114 & 194 sudah PSP ke Kemenag
24	Eks HTBI		Jl H.R. Rasuna Said Kav C No. 19, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	Gedung Kantor	SHGB No 90/Karet	4.000	9.359	45 000.000 000	
25		PRI-0000009	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 17 NO. 17.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	649/XIV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
26		PRI-0000013	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 18 NO. 18.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	657/XV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
27		PRI-0000014	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 18 NO. 18.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	653/XV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
28		PRI-0000019	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 19 NO 19.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	665/XVI/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
29		PRI-0000020	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 19 NO. 19.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	661/XVI/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
30		PRI-0000023	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 20 NO. 20.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	673/XVII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626 500	
31		PRI-0000024	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 20 NO. 20.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	669/XVII/A/MENTENG DALAM	110	110	400 626 500	
32		PRI-0000027	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 21 NO. 21.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	681/XVIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
33		PRI-0000028	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 21 NO 21.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	677/XVIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	

SK No 003727 C

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
34		PRI-0000031	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 22 NO 22.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	689/XIX/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626 500	
35		PRI-0000032	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 22 NO. 22.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	685/XIX/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
36		PRI-0000035	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 23 NO. 23.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	697/XX/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
37		PRI-0000039	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 25 NO. 25 01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	701/XXI/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
38		PRI-0000043	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 26 NO. 26.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	713/XXII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
39		PRI-0000049	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 27 NO. 27 06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	721/XXIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
40		PRI-0000050	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 27 NO. 27 07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	722/XXIII/A/MENTENG DALAM	110	110	400 626.500	
41		PRI-0000054	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 28 NO. 28.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	729/XXIV/A/MENTENG DALAM	110	110	400 626 500	
42		PRI-0000056	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 28 NO. 28.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	730/XXIV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
43		PRI-0000061	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 29 NO. 29.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	737/XXV/A/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
44		PRI-0000073	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 11 NO 11 06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	867/X/B/MENTENG DALAM	110	110	400 626 500	
45		PRI-0000074	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 12 NO. 12 06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	875/XI/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
46		PRI-0000075	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 15 NO. 15.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	883/XII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
47		PRI-0000076	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 17 NO. 17.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	899/XIV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
48		PRI-0000077	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 18 NO. 18.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	907/XV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
49		PRI-0000078	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 19 NO 19 06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	915/XVI/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
50		PRI-0000079	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 20 NO. 20.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	923/XVII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
51		PRI-0000080	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 21 NO. 21 06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	931/XVIII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
52		PRI-0000081	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 6 NO. 06 03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	825/V/B/MENTENG DALAM	92	92	336 923.000	
53		PRI-0000093	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN- BLOK B LANTAI 17 NO. 17.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	898/XIV/B/MENTENG DALAM	93	93	340 543.500	
54		PRI-0000098	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 22 NO. 22.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	939/XIX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
55		PRI-0000099	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 23 NO. 23.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	947/XX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
56		PRI-0000100	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 25 NO 25 06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	955/XXI/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626 500	
57		PRI-0000101	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 2 NO. 02.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	801/II/B/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500	

SK No 003725 C

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
58		PRI-0000102	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 2 NO 02.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	802/II/B	88	88	323.712 500	
59		PRI-0000103	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 3 NO. 03.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	809/III/B/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500	
60		PRI-0000104	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 3 NO 03.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	810/III/B/MENTENG DALAM	88	88	323 712 500	
61		PRI-0000105	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 5 NO 05.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	821/IV/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
62		PRI-0000106	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 6 NO. 06.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	829/V/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
63		PRI-0000107	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 7 NO 07 05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	834/VI/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
64		PRI-0000108	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	842/VII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
65		PRI-0000109	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 9 NO. 09.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	850/VIII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
66		PRI-0000121	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 5 NO 05 06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	819/IV/B/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000	
67		PRI-0000122	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	843/VII/B	109	109	397 691 000	
68		PRI-0000123	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 9 NO. 09.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	851/VIII/B/MENTENG DALAM	109	109	397 691 000	
69		PRI-0000124	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 10 NO. 10.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	859/IX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
70		PRI-0000125	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 26 NO. 26.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	963/XXII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626 500	
71		PRI-0000126	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 27 NO. 27.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	971/XXIII/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
72		PRI-0000127	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 28 NO. 28.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	979/XXIV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626 500	
73		PRI-0000130	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 3 NO. 03.02 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	808/III/B/MENTENG DALAM	112	112	409.603.000	
74		PRI-0000143	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 3 NO. 03.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	557/III/A/MENTENG DALAM	112	112	410.218.000	
75		PRI-0000144	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 5 NO. 05.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1069/IV/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
76		PRI-0000145	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 9 NO. 09.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1101/VIII/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
77		PRI-0000146	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 10 NO. 10.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1109/IX/C/ MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
78		PRI-0000147	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 12 NO. 12.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1125/XI/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
79		PRI-0000148	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 15 NO 15 09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1133/XII/C/MENTENG DALAM	93	93	340 543 500	
80		PRI-0000149	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 16 NO 16 09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1141/XIII/C/MENTENG DALAM	93	93	340 543.500	
81		PRI-0000150	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 17 NO. 17.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1149/XIV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
82		PRI-0000151	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 20 NO 20 09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1173/XVII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
83		PRI-0000152	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 21 NO. 21.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1181/XVIII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
84		PRI-0000153	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 22 NO. 22.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1189/XIX/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
85		PRI-0000154	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 23 NO. 23.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1197/XX/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543 500	
86		PRI-0000155	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 27 NO. 27.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1221/XXIII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
87		PRI-0000156	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 28 NO. 28.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1229/XXIV/C/MENTENG DALAM	93	93	340 543.500	
88		PRI-0000157	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 29 NO. 29.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1237/XXV/C/MENTENG DALAM	93	93	340 543.500	
89		PRI-0000158	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 30 NO. 30.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1245/XXVI/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543 500	
90		PRI-0000159	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK A LANTAI 1 NO. 01.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	545/II/A/MENTENG DALAM	118	118	410.218.000	
91		PRI-0000161	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 5 NO. 05 02 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	816/IV/B/MENTENG DALAM	109	109	397.691 000	
92		PRI-0000162	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 7 NO. 07.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	833/VI/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923 000	
93		PRI-0000163	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.03 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	841/VII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m^2)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
94		PRI-0000164	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO. 08.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	844/VII/B/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000	
95		PRI-0000165	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 8 NO 08.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	845/VII/B/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
96		PRI-0000169	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 17 NO. 17.02 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	896/XIV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
97		PRI-0000170	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 18 NO. 18.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	908/XV/B/MENTENG DALAM	110	110	400 626 500	
98		PRI-0000175	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 22 NO. 22.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	940/XIX/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
99		PRI-0000187	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 29 NO. 29.07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	988/XXV/B/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
100		PRI-0000189	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK B LANTAI 30 NO 30 07 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	996//XXVI/B/MENTENG DALAM	110	110	400 626.500	
101		PRI-0000192	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 2 NO. 02.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1049/II/C/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500	
102		PRI-0000193	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 2 NO. 02.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1052/II/C/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500	
103		PRI-0000194	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 3 NO. 03.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1057/III/C/MENTENG DALAM	88	88	323.712.500	
104		PRI-0000195	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 3 NO. 03 08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1060/III/C/MENTENG DALAM	88	88	323 712 500	
105		PRI-0000196	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 5 NO. 05.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1066/IV/C/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000	

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
106		PRI-0000197	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 5 NO. 05.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1068/IV/C/MENTENG DALAM	92	92	336 923.000	
107		PRI-0000198	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 6 NO. 06.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1073/V/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
108		PRI-0000199	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 6 NO 06.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1076/V/C/MENTENG DALAM	92	92	336 923.000	
109		PRI-0000200	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 6 NO. 06.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1077/V/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923 000	
110		PRI-0000201	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO. 07.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1078/VI/C/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000	
111		PRI 0000202	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO 07 05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1081/VI/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923 000	
112		PRI-0000203	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO 07.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1084/VI/C/MENTENG DALAM	92	92	336 923 000	
113		PRI-0000204	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 7 NO 07.09 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1085/VI/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923 000	
114		PRI 0000205	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 8 NO. 08.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1089/VII/C/MENTENG DALAM	92	92	336.923.000	
115		PRI-0000206	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 9 NO 09 01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1094/VIII/C/MENTENG DALAM	109	109	397.691.000	
116		PRI-0000207	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 9 NO 09 05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1097/VIII/C/MENTENG DALAM	92	92	336 923 000	
117		PRI-0000208	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 10 NO 10.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1105/IX/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m^2)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
118		PRI-0000209	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 11 NO. 11.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1116/X/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
119		PRI-0000210	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 12 NO. 12.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1121/XI/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
120		PRI-0000211	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 12 NO. 12 08, MENTENG DALAM - TEBET, JAKARTA SELATAN	Apartemen	1124/XI/C/MENTENG DALAM	93	93	340 543.500	
121		PRI-0000212	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 15 NO. 15.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1132/XII/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543 500	
122		PRI-0000213	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 16 NO. 16.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1134/XIII/C/ MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
123		PRI-0000214	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 17 NO 17.08 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1148/XIV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
124		PRI-0000215	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 18 NO 18 01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1150/XV/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	
125		PRI-0000216	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 18 NO. 18.05 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1153/XV/C/MENTENG DALAM	93	93	340.543.500	
126		PRI-0000217	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 19 NO. 19.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1158/XVI/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626 500	
127		PRI-0000218	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 19 NO. 19.06 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1162/XVI/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626 500	
128		PRI-0000219	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 20 NO. 20.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1166/XVII/C	110	110	400.626.500	
129		PRI-0000220	APARTEMEN PURI CASABLANCA, JL. CASABLANCA KAV. 7, KUNINGAN - BLOK C LANTAI 21 NO 21.01 MENTENG DALAM, TEBET	Apartemen	1174/XVIII/C/MENTENG DALAM	110	110	400.626.500	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
130		PRI-D000001	APARTEMEN PURI CASABLANCA Blok B LT.9 NO 09.03, JL. CASABLANCA KAV 7, JAKARTA SELATAN	Apartemen	849 / VIII / B	92	92	328.710.000	
131		PRK-B001358	Apartemen Taman Anggrek, Jl. Letjen S Parman, Blok Laelia, Lantai 40, No 40J, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 361/XXXVIII/LAELIA	88,00	88,00	1 108.300.000	
132		PRK-B001359	Apartemen Taman Anggrek, Jl Letjen S. Parman, Blok Laelia Lantai 40 No. 40K, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 362/XXXVIII/LAELIA	88,00	88,00	1.108.300.000	
133		PRI 0000001	Apartemen Tropik, Jl S Parman Blok I No 2703 Lantai 27, Kel Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 160/XXIV-XXV/I	519	519	773 410.000	
134		PRK-B001360	Apartemen Tropik, Jl Let Jend S Parman Blok I No 2607, Lantai. 26, Kel Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Apartemen	SHMSRS 157/XXIII/I	147	147	1.108.300.000	
135		PRK-C000140	Kondominium Menara Kelapa Gading No 14 05, Blok B(2), Jl. Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 143/XIII/II	141	141	1 112 800.000	
136		PRK-C000141	Kondominium Menara Kelapa Gading No.10 02, Blok A(1), Jl Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara.	Apartemen	SHMSRS 50/X/I	141	141	1 112 800 000	
137		PRK-C000142	Kondominium Menara Kelapa Gading No 2 03, Blok C(3), Jl.Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 147/II/III	133	133	948 910.000	
138		PRK-C000143	Kondominium Menara Kelapa Gading No 3.01-B, Blok E(5), Jl.Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 286/III/V	77	77	548.036.000	
139		PRK-C000144	Kondominium Menara Kelapa Gading No 4.06-A, Blok E(5), Jl. Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 297/IV/V	77	77	545.680.000	
140		PRK-C000145	Kondominium Menara Kelapa Gading No. 7.01-B, Blok E(5), Jl.Terusan Gading Timur Boulevard No.88, Jakarta Utara	Apartemen	SHMSRS 314/VII/V	77	77	545 680.000	
141		PRK-B001972	Jl. Raya Gading Indah No. 8 Kav A2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko	SHM 396/Kelapa Gading Timur	64	254	1.920.000.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
142		PRK-B001973	Jl. Raya Gading Indah No. 8 Kav A3, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko	SHM 395/Kelapa Gading Timur	64	254	1.920.000.000	
143		PRK-B001669	Jl. Kali Besar Timur No. 27, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Gedung	SHGB 1904/PINANGSIA	1.835	2.044	3.098.000.000	
144		PRK-B001747	Jl.Kali Besar Timur No.23,24,Dan 25 – Pinangsia, Jakarta Barat	Gedung	PPJB (TGL.18/12/1997) DIDAFTARKAN NO 1093/W/1998 (DUPLO) TGL. 03/04/1998	3 475		11.235.141 871	
145		PRK-B001673	Jalan Kebayoran Lama No.174 A2, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	SHGB 236/CIPULIR	308	506	565.421.178	
146		PRK-B001696	Jalan Raya Kebayoran Lama No.47 A RT 002 RW 01, Kel. Cipulir, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	SHGB 226/CIPULIR	318	519	223 791 086	
147		PRK-B001697	Jalan Kebayoran Lama No.37, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	SHM 1052, 1051/GROGOL SELATAN	934	869	837.000 000	
148		PRK-B001856	Komplek Glodok Plaza Blok F No. 91, 92, 93, 136, 137 Dan 138, Jl. Pinangsia, Jakarta Barat	Ruko	PPJB 31	1 200		1.574.400.000	
149		PRK-B001932	Jl. K.H. Fachrudin Kav. 36 Blok F No. 1 2, Kel Kampung Bali, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 464, 465/KAMPUNG BALI	126	384	1.607.000 000	
150		PRK-B001961	Jalan Panglima Polim Raya No. 57, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Ruko	SHGB 806/MELAWAI	356	714	420.435.909	
151		PRI-0000254	Sebidang Tanah Sertipikat SHGB No. 5115/Kalideres, Luas 10.405 M2, Terletak Di Jl. Peta Selatan RT/RW 08/01, GANG DARUL SALAM (Jl. Benda Raya) - Kalideres, Jakarta Barat	Tanah	SHGB 5115/KALI DERES	10.405		1.504.440.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
152		PRK-B002860	Jl.Kebon Besar I No.27 RT 06/06, Kel Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	Tanah	SHGB 76, 80, 100/GANDARIA SELATAN	3.198		2.296 000 000	
153		PRK-B002990	Jl Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Tanah	SHM 129/RAWABUAYA	6 410		1.941.000.000	
154		PRK-B002991	Jl Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Tanah	SHM 130/RAWABUAYA	4 180		219.000 000	
155	Eks HTBI	PRK-B001752	Jl Panglima Polim Raya No. 55, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Gedung	SHGB 1155, 1154/MELAWAI	236	118	1 568 733.157	Nilai kompensasi ke BI sebesar Rp1.923.520.500,00
156		PRI-0000044	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 26 No. 26.01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 709/XXII/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	
157		PRI-0000055	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 28 No 28 01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 725/XXIV/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	
158		PRI-0000062	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 29 No. 29.01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 733/XXV/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	
159		PRI-0000069	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 30 No. 30.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 745/XXVI/A/Menteng Dalam	110	110	400.626 500	
160		PRI-0000070	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 30 No. 30.07 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 746/XXVI/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m^2)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
161		PRI-0000071	Jln Casablanca Kav 7, Kuningan - Blok A Lantai 31 No. 31.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 753/XXVII/A/Menteng Dalam	110	110	400 626 500	
162		PRI-0000072	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 31 No. 31.07 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 754/XXVII/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	
163		PRI-0000138	Jln Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35 06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 777/XXX/A/Menteng Dalam	109	109	400 626 500	
164		PRI-0000139	Jln Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35 07 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 778/XXX/A/Menteng Dalam	109	109	400.626.500	
165		PRI-0000140	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 19 No. 19.02 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 662/XVI/A/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	
166		PRI-0000160	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok A Lantai 35 No. 35.01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 773/XXX/A/Menteng Dalam	109	109	400.626.500	
167		PRI-0000120	Jln Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 35 No 35.05 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 1026/XXX/B/Menteng Dalam	93	93	340.543.500	
168		PRI-0000128	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 29 No. 29.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 987/XXV/B/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
169		PRI-0000129	Jln Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 30 No 30.06 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 995/XXVI/B/Menteng Dalam	110	110	400 626.500	
170		PRI-0000172	Jln Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 21 No. 21.02 Menteng Dalam, Te17bet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 928/XVIII/B/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	
171		PRI-0000173	Jln. C18asablanca Kav. 7, Kuninga19n - Blok B Lantai 22 No 22.02 20Menteng Dalam, Tebet, Jakart2a Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 936/XIX/B/Menteng Dalam	109	109	400.626.500	
172		PRI-0000177	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 23 No. 23.02 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 944/XX/B/Menteng Dalam	110	110	400.626.500	
173		PRI-0000191	Jln. Casablanca Kav. 7, Kuningan - Blok B Lantai 35 No. 35.03 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS No. 1025/XXX/B/Menteng Dalam	93	93	340.543 500	
174		PRK-B001529	Apartemen Hayam Wuruk Lantai 23 No. 2308, Jakarta Barat	Apartemen	PPJB 20	60	60	71.800.000	
175		PRK-B001600	Apartemen Hayam Wuruk LT. 11 B2-1107 & LT. 16 A4-1610, JL. Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat	Apartemen	NA (SURAT PENYERAHAN HAK)	-	-	1.639.000.000	
176		PRK-B002301	Apartemen Taman Anggrek Tower I 01 33B,34C,35D,36C,37D	Apartemen	NA (SURAT PERSETUJUAN TGL. 12/02/1999, LUAS 85.48 M2)	-	-	3.600.175 143	

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m^2)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
177		PRK-B001534	Apartemen Puri Kemayoran Tower I, Unit No. 25 I	Apartemen	NA (PPJB SATUAN RUMAH SUSUN PURI KEMAYORAN APARTEMEN)	-	66	508.200 000	
178		PRK-B001539	Apartemen Taman Rasuna Tower 14 lantai 14 no. H, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2682/XIII/14	74,00	74,00	197 000 000	
179		PRK B001547	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 19 no H, Kel Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2968/XVIII/15	74,00	74,00	195 885 572	
180		PRK-B001549	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 21 no. D, Kel. Menteng Atas, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2980/XX/15	74,00	74,00	211.885.572	
181		PRK-B001551	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 22 no. H, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2992/XXI/15	74,00	74,00	199.223 347	
182		PRK-B001557	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 26 no. D, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 3020/XXV/15	73,82	73,82	212.461 539	
183		PRK-B001566	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai dasar bawah no G, Kel Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 2837/B1/15	89,65	89,65	211 931 056	
184		PRK B001583	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 27 no. B, Kel. Menteng Atas, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 1832/XXVI/9	73,82	73,82	189.223.347	
185		PRK-B001586	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 28 no C, Kel. Menteng Atas, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 1841/XXVII/9/MENTENG ATAS	73,82	73,82	190.885 571	
186		PRK-B001590	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 29 no. B, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 1848/XXVIII/9/MENTEN G ATAS	73,82	73,82	190 315.587	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
187		PRK-B001530	Apartemen Taman Kemang Jaya, Tower A Lantai 8, Unit 1085, Kelurahan Bangka, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 64/VIII/A/BANGKA	94	94	325 407.466	
188		PRK-B001531	Apartemen Taman Kemang Jaya Tower A lt. 9 unit 1097, Jl. Kemang Selatan 8, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 74/IX/A/BANGKA	169,70	169,70	563.261.460	
189		PRK-B001532	Apartemen Taman Kemang Jaya Tower A lt. 10 unit 1101, Jl. Kemang Selatan 8, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Apartemen	SHMSRS 76/X/A/BANGKA	192,70	192,70	636 343 640	
190		PRK-B001314	Apartemen Mitra Sunter, Jl. Yos Sudarso no. 89 blok C lt. 4 no 4.05, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.	Apartemen	SHMSRS 64/IV/A/SUNTER JAYA	124	124	41.780.000	
191		PRK-B001319	Apartemen Kompleks Mitra Bahari, Jl Pakin no. 1, unit A lantai V no. 14, Kel. Ancol, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Apartemen	Covernote 214/SMR/LG/XII/98	-	69	82.300.000	
192		PRK-B001760	Jalan Kebayoran Lama No. 16B, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Gedung	Covernote N/190/VI/Jkt/2000	122		160 206 980	
193		PRK-B001944	Jl. Mangga Besar IX Blok D no. 74, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 568, 895/TANGKI	71	319	422 000 000	
194		PRK-B001945	Jl. Mangga Besar Raya no. 38CE, Kel. Taman Sari, Kec. Taman sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 654/TAMANSARI	67	180	308.000.000	
195		PRK-B001946	Jl. Mangga Besar Raya no 38CF, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 617/TAMANSARI	68	180	308.000.000	
196		PRK-B002019	Komplek Green Garden Blok I-9 No.49, Taman Kedoya Barat Indah, Kel Kedoya, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Ruko	AJB 70/Kebon Jeruk/1995	138	250	320 000.000	
197		PRK-0019500	Jl. Pasar Glodok Selatan no. 4, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1292/GLODOK	576	-	1 466 700 000	
198		PRK-B001674_A	Jl. Kedoya Raya/Tomang Tol Blok A2 no 16, RT 09/04, Kel Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1198/KEDOYA SELATAN	158	158	438.000 000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
199		PRK-B002152	Jl. Jelambar Baru no 3E, Kel. Jelambar Baru, Kec Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1240/JELAMBAR BARU	86	151	277.000 000	
200		PRK-B002967	Jl. Kali Besar Timur no.27 K, Kel Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat	Ruko	SHM 68/PINANGSIA	94	-	165.664.063	
201		PRK-C000200	Jl. Latumenten no. 19, Blok F no. 16-17, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 3823, 3824	142	494	246 200.000	
202		PRK-B001926	JL. Utama II No. 3 (dh.KAMAL RAYA NO. 25), Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 888/CENGKARENG BARAT	109	180	1.325 160.000	
203		PRK-B001967	Jl. Pinangsia Raya no.105, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1905/PINANGSIA	54	-	545.000.000	
204		PRK-B001998	Jl.K.H Mas Mansyur no. 71 A, Kec Tambora, Jakarta Barat	Ruko	AJB 375/Tambora/1990	106	228	227 292.111	
205		PRK-B002034	Komp. Daan Mogot Arcadia Blok E no. 16 (d/h. Komplek Daan Mogot Center Blok E), Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1163/BATUCEPER	64	-	130 000.000	
206		PRK-B001770	Komp. Ruko Jl. Kosambi Baru no. 1 E-F, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Ruko	SHGB 1059, 2863, 2862/DURI KOSAMBI	-		402.000.000	
207		PRK-B001854	GG CENGKARENG BLOK-D (pasar Cengkareng Blok D)	Ruko	PPJB 159	28		1.206 240.000	
208		PRK-B001855	GG CENGKARENG BLOK-E (pasar Cengkareng Blok E)	Ruko	PPJB 154	198		5 383 800 000	
209		PRK-B001860	GROGOL PERMAI A/17	Ruko	NA (TANDA TERIMA TGL 08/08/1995)	74		140.619.000	
210		PRK-B001948	Jl. Mangga Besar XIII no. 3 RT 019/05, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 1755, 1754/MANGGA DUA SELATAN	287	553	422.000.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
211		PRK-0018513	Jl Letjen Soeprapto no. 29 K RT/RW 07/02, Kel. Harapan Mulia, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 431/HARAPAN MULIA	61	244	89 500 000	
212		PRK-B001748	Jl. Lautze no. 44 A, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat	Ruko	SHGB 378/KARTINI	92	180	186.743 681	
213		PRK-B001922	Jl. K H. Hasyim Asharı Blok D1 no. 9, Kel. Cideng, Kec Gambir	Ruko	SHGB 1712/CIDENG	75	250	871.000.000	
214		PRK B001930	Jl Kebon Jatı no 18 Blok F no 115 , Kel Kampung Balı, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat	Ruko	PPJB 051/PPJB/MCPW/VI/94	68		172 073 250	
215		PRK-B002101	Ruko Tanah Abang Blok F No 111 A	Ruko	PPJB 012/L-MCPW/SPP/97	-		305 908 000	
216		PRK-B002102	Ruko Tanah Abang Blok F No.111 B	Ruko	Covernote 033/MCPW/SP/X/97	-		305 908.000	
217		PRK-0003038	Jl RC Veteran Kav 11 RT/RW 02/01, Bintaro – Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Ruko	SHM 4144//BINTARO	495	765	414 996 113	
218		PRK-B002007	Jl. Warung Buncit Raya no.10 C, Kel. Ragunan, Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Ruko	SHM 1483/RAGUNAN	81	-	1.355 014 000	
219		PRK B001792	Jalan Sultan Hasanuddin no. 70, RT 001 RW 01, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Ruko	SHGB 754/MELAWAI	395		1.583.000.000	
220		PRK-B001871	Rukan Bintaro Jaya Sektor I Blok E No.14, Jalan Bintaro Utama, Kel. Pondok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Ruko	SHGB 932/BINTARO	75	-	204 800 000	
221		PRK-B001732	Jl. RS Fatmawatı 26A, Jakarta Selatan	Ruko	Covernote 156/AD JP/7/95	69		172 690.000	
222		PRK-B001733	Jl. RS. Fatmawatı 26H, Jakarta Selatan	Ruko	Covernote 157/AD.JP/7/95	66		129.300 000	
223		PRK-B001884	Jl. Fatmawatı no 40X, Jakarta Selatan	Ruko	633/IPB/1987	229		413.276 567	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
224		PRK-B001636	JL BALI MESTER RT.015 RW 01 KP. MELAYU, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara (Fakta Jl. Basuki Rachmat RT 002/02 No.8G), Jakarta Timur	Ruko	APH 10 (JUAL BELI BANGUNAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH)	75	300	402.000 000	
225		PRK B001924	Jl Kali Malang Raya Kav. PTB (Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang Blok G 17/2), Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	Ruko	AJB 277/Jatinegara/1996	68	188	88 800 000	
226		PRK-B002052	Pertokoan Klender Blok B1 no. 7 8, Kel Klender, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur,	Ruko	11523/IMB (BLOK B1 NO 7)			200 000 000	
227		PRK-B001682	Jl. RE Martadinata Ancol no. 1 A, Kel. Ancol, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko	SHGB 455/MANGGA DUA UTARA	122	275	230.000.000	
228		PRK-B001857	Pertokoan Grand Boutique blok C no.52, Jl Mangga Dua Raya, Jakarta Utara	Ruko	PPJB 191	170		159.600 000	
229		PRK-B001952	Jl. Pluit Karang Timur Blok B VIII, Kav. 18 no.108, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko	194 (JUAL BELI DAN PENYERAHAN HAK)	150		95 294 385	
230	Eks HTBI	(PRK-B001738)	Jl. Suryopranoto No 24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	Gedung Kantor 4 lantai	SHGB No. 2260/Petojo Utara	472	1.032	7 739.616 150	
231	Eks HTBI	(PRK-B001738)	Jl. Suryopranoto No. 22, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	Gedung Kantor 4 lantai	SHGB No. 2486/Petojo Utara	635			
232	Eks HTBI	(PRK-B001921)	Komplek Pertokoan Tanah Abang Bukit Blok D-1 No 2, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jl. KH Fachrudin)	Ruko 4 lantai	SHGB No. 756/Kampung Bali	65	467	1 355 512 500	
233	Eks HTBI	(PRK-B001921)		Ruko 4 lantai	SHGB No 757/Kampung Bali	66			
234	Eks HTBI		Jl Raya Wahid Hasyim No 174 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	Gedung Kantor 4 lantai	SHGB No. 719/Kampung Bali	652	1.590	6.669.613 500	
235	Eks HTBI		Rumah Susun JITC Mangga Dua - Lantai 1 Blok IA No 4, Jl Raya Mangga Dua, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	Kios	SHMRS No. 277/I/A.4/Ancol		43	23.381 250	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
236	Eks HTBI		Jl. Kelapa Gading Boulevard Raya, Blok TB2 No. 23, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko 3 lantai	SHGB No. 5852/Kelapa Gading Timur	78	230	281 424 000	
237	Eks HTBI	(PRK-B001931)	Jl. Kelapa Gading Boulevard, Blok TN 2 Kav 26, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko 3 lantai	SHGB No. 6090/Kelapa Gading Timur (d/h No.1517)	78	460	1.286 400 000	
238	Eks HTBI	(PRK-B001931)	Jl. Kelapa Gading Boulevard, Blok TN 2 Kav. 25, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko 3 lantai	SHGB No.6089/Kelapa Gading Timur (d/h No.1518)	78			
239	Eks HTBI	(PRK-B002021)	Komplek Duta Harapan Indah Blok B No 6 dan No 7, Jl Kapuk Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko 4 lantai	SHGB No. 971/Kapuk Muara	71	564	496.750.050	
240	Eks HTBI	(PRK-B002022)		Ruko 4 lantai	SHGB No 972/Kapuk Muara	70			
241	Eks HTBI	(PRK-B002023)	Komplek Duta Harapan Indah Blok C No. 6 dan No. 7, Jl. Kapuk Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko 4 lantai	SHGB No 966/Kapuk Muara	60	484	428.712.300	
242	Eks HTBI	(PRK-B002024)		Ruko 4 lantai	SHGB No. 967/Kapuk Muara	62			
243	Eks HTBI	(PRK-B001953)	Jl. Muara Karang Blok CC 5 No. 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko 2 lantai	SHGB No. 3016/Pejagalan	100	160	432 375.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m^2)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
244	Eks HTBI	(PRK-B002107)	Jl. Kampung Gusti Blok N Kav. No. 59 dan No. 60, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	Ruko 2 lantai	SHGB No. 9786/Pejagalan (d/h No.2919)	150	200	854.535.000	
245	Eks HTBI	(PRK-B002107)		Ruko 2 lantai	SHGB No. 9787/Pejagalan (d/h No 2918)	150			
246	Eks HTBI	(PRK-B002033)	Komplek Perkantoran Plaza Pasific Blok A-1 Kav. No. 1, 3, 5 dan 7, Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	Ruko 4 lantai	SHGB No 4150/Kelapa Gading Barat	71	1.384	3.071.182.500	
247	Eks HTBI	(PRK-B002033)		Ruko 4 lantai	SHGB No. 4148/Kelapa Gading Barat	91			
248	Eks HTBI	(PRK-B002033)		Ruko 4 lantai	SHGB No 4149/Kelapa Gading Barat	113			
249	Eks HTBI	(PRK-B002033)		Ruko 4 lantai	SHGB No. 4151/Kelapa Gading Barat	71			
250	Eks HTBI		Jl Pintu Besar Selatan No. 82-E, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat	Ruko 3 lantai	SHGB No. 2858/Pinangsia (d/h SHGB No 1174)	81	234	414.540.450	
251	Eks HTBI		Jl. Pintu Besar Selatan No 32 dan 84, RT001/RW05, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat	Ruko 2 lantai	SHGB No. 2560/Pinangsia	370	665	1.760.296 500	

SK No 003811 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
252	Eks HTBI		Jl. Pintu Besar Selatan No. 86 dan 88, RT14/RW05, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat	Ruko 3 lantai	SHGB No 2860/Pinangsia	178	964	1.867.295.400	
253	Eks HTBI			Ruko 3 lantai	SHGB No. 2859/Pinangsia	105			
254	Eks HTBI			Ruko 3 lantai	SHGB No. 1637/Pinangsia	89			
255	Eks HTBI	(PRK-B001730)	Jl. Roa Malaka Selatan No 27, RT07/RW03, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat	Gedung Kantor 2 lantai	SHGB No 1806/Roa Malaka	410	420	1 471.732.500	
256	Eks HTBI	-	Jl. Gajah Mada No. 149, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat	Rukan 4 lantai	SHGB No. 285/Keagungan	158	611	1.454.302.500	
257	Eks HTBI		Jl. Cileduq Raya No. 100-101, RT04/RW01, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Ruko	SHGB No. 438/Cipulir	602	1.500	1.067.422.000	
258	Eks HTBI		Jl Sirna Galih No. 3 RT 2 RW 1, Desa Megamendung, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat	Villa	SHGB No 51/Megamendung	2.093	141	220.392.900	
259	Eks HTBI	(PRK-B002326)	Perum Duta Parigi Blok D No. 1 & 2, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, Jawa Barat	Rumah Tinggal	SHM No. 904/Kel.Nyomplong	443	175	433.550 000	
260	Eks HTBI	(PRK-B001839)	Komplek Pertokoan Bintaro Jaya Sektor 9, Blok E-1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang	Ruko	SHGB No. 1454/Pd. Pucung	120	240	91.710.000	
261	Eks HTBI	-	Blok Pematang Nangka, Jl. Cipeti, Desa Kertaraharja, Kec. Panimbang (Cigeulis), Pandeglang.	Kebun dan sawah	SHM No 128/Ciseureuheun (Pematang Nangka)	50.000	-	53.625 000	
262	Eks HTBI		Komplek Ruko Beteng Plaza Blok A No. 1, Jl. Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah	Kantor Ruko	SHGB No 466/Kedunglumbu	105	300	268.041.000	
263	Eks HTBI		Jl. Pemuda No. 46, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah	Gedung Kantor	SHGB No. 84/Bangunharjo	1.790	3.295	12.327.892.500	Ditarik kembali ke PKNSI sesuai Kepdirjen 452/KN/2020

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
264	Eks HTBI		Jl. Progo No 24, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kota Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah	Rumah Tinggal	SHGB No. 94/Dukuh	600	204	263.237.400	
265	Eks HTBI		Jalan Kolonel Sugiono No. 5, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Porobolinggo, Jawa Timur	Rumah Tinggal	SHGB No. 465/Tisnonegaran	2.680	246	410.594.100	
266	Eks HTBI		Jembatan Merah Plaza I, Lantai Ground Blok A No 4, 5, 24 - Jl.Taman Jayengrono No 2-4, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	1 Unit Stand Toko	SHM Atas Satuan Rumah Susun No 481/Grd/A Krembangan Selatan	132	132	360 459 000	
267	Eks HTBI		Jl. Raya Gubeng No 47, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur	Rumah Tinggal	SHM No. 63/Gubeng	316	216	182 655.000	
268	Eks HTBI	(PRK-B001657)	Jl. Ikan Bawal (Laks. Malahayati), Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung	Ruko	SHGB No. 226/Teluk Betung	381	462	291 212.400	Ditarik kembali ke PKNSI sesuai Kepdirjen 452/KN/2020
269	Eks HTBI	(PRK-B001657)		Ruko	SHGB No 345/Teluk Betung	101			
270	Eks HTBI	(PRK-B002933)	Jl. Soekarno Hatta, Keluaran Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Lampung	Tanah Pertanian	SHM No 576/Teluk Betung	1.260	-	169.400.000	
271	Eks HTBI	(PRK-B002933)		Tanah Pertanian	SHM No. 603/Teluk Betung	6.460	-		
272	Eks HTBI	(PRK-B002250)	Jl. Pagar Alam No 30, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung	Rumah Tinggal	SHM No. 1202/Langkapura	326	132	16 500 000	
273	Eks HTBI	(PRK-B002697)	Desa Serdang RT 01 RW 02, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung	Tanah Pertanian	SHM No. 125/Serdang	15.260	-	48 400 000	
274	Eks HTBI	(PRK-B001963)	Jl. Pasar 16 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Ruko	SHGB No 593/16 Ilir	213	748	362.437.500	
275	Eks HTBI	(PRK-B001963)		Ruko	SHGB No. 607/16 Ilir	37			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
276	Eks HTBI		Jl. Jend. Sudirman No. 264, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Binjai, Sumatera Utara	Ruko Kantor	SHGB No 573/Pekan Binjai	54	108	44.995.500	
277	Eks HTBI		Jl. Merdeka, Desa Merdeka, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara	3 unit Villa Gundaling	SHGB No. 9/Merdeka Brastagi	3.845	303	243.720.000	
278	Eks HTBI		Jl. Brig. Jend. Katamso, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara	Tanah Kosong	SHGB No. 555/Aur, Medan Baru	919		1.223.418.750	
279	Eks HTBI		Jl Pemuda No. 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara	Gedung Kantor	SHGB No. 373/Aur (Medan Baru)	556	2.205	1.625.431.500	
280	Eks HTBI			Gedung Kantor	SHGB No 234/Aur (Medan Baru)	226			
281	Eks HTBI		Jl. K.L. Yos Sudarso No. 105-107, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara	Gedung Kantor	SHGB No. 825 Pulau Brayan Kota	163	960	339.182 250	
282	Eks HTBI		Jl. Jend Gatot Subroto No 79, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara (Jalan dari Medan ke Binjai)	Ruko	SHGB No 79/Lalang	60	185	94 545 000	
283	Eks HTBI	(PRK-B002283)	Jl. Sultan A. Rahman No 142, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	Gedung Kantor	SHGB No. 928/Parit Tokaya	1.629	214	2.063.564.250	Ditarik kembali ke PKNSI sesuai Kepdirjen 452/KN/2020

SK No 003808 C

LAMPIRAN 25.G

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BPPN/EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA LMAN
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	NO. ASET		LOKASI	JENIS ASET	NO. DOK	LUAS (m²)		NILAI LK/KOMPENSASI (Rp)	KETERANGAN
						TANAH	BANGUNAN		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
284	Eks HTBI	(PRK-B001955)	Kompleks Pertokoan Ampenan, Jl. Yos Sudarso No. 71 dan No. 73, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Ruko	SHGB No. 255/Ampenan Tengah (Pabean)	162	462	172.273.500	
285	Eks HTBI			Ruko	SHGB No. 280/Ampenan Tengah (Pabean)	183			
286	Eks HTBI	(PRK-B001989)	Jl. T.G.H. Faizal Petak II No 16, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Toko	SHGB No. 18/Bertais	73	120	48 759.000	
287	Eks HTBI	(PRK-B002026)	Jl. Pangayoman No. 30, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan	Ruko	SHGB No. 2299/Panaikang	95	285	297.041.250	Ditarik kembali ke PKNSI sesuai Kepdirjen 452/KN/2020
288	Eks HTBI	(PRK-B001914)	Jl. Jend. A. Yani Blok B No. 23, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan	Ruko	SHGB No. 1707/Pattunuang	75	450	605.137.500	Ditarik kembali ke PKNSI sesuai Kepdirjen 452/KN/2020
289	Eks HTBI	(PRK-B001915)		Ruko	SHGB No. 1708/Pattunuang	75			
290	Eks HTBI	(PRK-B001749)	Jl. Nusantara No 106 - 108, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan	Ruko	SHGB No. 1535/Pattunuang	355	600	919.788.750	
Total								250.443.617.301	

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
1	385/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	PT Rodial Eron dianggap wan prestasi untuk membayar kewajibannya/hutang kepada PT SBU yang berasal dari fasilitas Kredit Rekening Koran dan SPBU yang sampai dengan per 30 September 2000 telah berjumlah	Proses PK Perkara ditangani di Tk PK Tk Pertama Kalah, Tk Banding dan Kasasi Menang	Putusan 385/Pdt G/2000/PN JKT BAR tanggal 12 April 2001. 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp199 000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Putusan 269/Pdt/2001/PT DKI tanggal 31 Agustus 2001 1 Menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 April 2001 Nomor 385/Pdt G/2000/PN JKT BAR yang dimohonkan banding, MENGADILI SENDIRI 1 Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan sebagai hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar hutang-hutang kepada Pembanding semula Peng Putusan 2170K/Pdt/2005 tanggal 11 Januari 2017 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1 PT Rodial Eron, 2 Efdjuno Tando tersebut; 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 269/Pdt/2001/PT DKI tanggal 31 Agustus 2001 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 385/Pdt G/2000/PN JKT BAR tanggal 12 April 2001; MENGADILI SENDIRI 1 Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian, 2
2	312/Pdt.G/2003/PN JKT BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Eksekusi lelang atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Cengkeh 16 Kav 12 Jakarta Lelang	Tk Kasasi Menang, Tk Pertama dan Banding Kalah	Putusan 312/Pdt G/2003/PN Jkt Bar tanggal 1 Juni 2004 Dalam Provisi. Menolak gugatan provisi tersebut; Dalam Eksepsi Menolak eksepsi turut terbantah I tersebut, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar Menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya, Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 019 000, Putusan 331/PDT/2009/PT DKI tanggal 2 November 2009 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah, 2 Menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 312/Pdt G/2003/PN Jkt Bar. tanggal 01 Juni 2004 yang dimohonkan banding tersebut; 3 Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Putusan 414 K/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 1 Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum tersebut, 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 331/PDT/2009/PT.DKI tanggal 02 Nopember 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 312/PDT.G/2003/PN JKT BAR tanggal 01 Juni 2004 Mengadili Sendiri 1 Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima, 2. Menghukum

SK No 062816 C

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
3	39/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Permohonan Penetapan keabsahan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PT SBU (DL) per posisi tanggal 24 Mei 2003 yang merupakan pertanggungjawaban Tim Likuidasi PT SBU	Sampai saat ini belum ada pengajuan PK Tk Pertama, Tk Banding, dan Tk Kasasi Menang	Putusan 39/PDT P/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Mei 2009 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Putusan 2255 K/PDT/2009 tanggal 23 Februari 2010 Menolak permohonan kasasi dari TL PT SBU
4	275/Pdt G/2009/PN JKT BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Penyerahan Barang Jaminan berupa Gedung Kantor yang terletak di Jl K H Wahid Hasyim No 65, Jakarta Pusat dan Jl.Tiang Bendera No 15, Jakarta Barat oleh TL PT SBU kepada DJKN yang kemudian dilelang oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara	Sampai saat ini tidak ada pengajuan Kasasi Tk Pertama dan Tk Banding, Menang	Putusan 275/Pdt G/2009/PN JKT BAR tanggal 20 Mei 2010 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya menyatakan sita jaminan PN Jakbar berdasarkan penertapan Nomor275/pdt g/2009/pn jkt bar tgl 31 juli 2009 tidak sah dan tidak berharga -memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan a quo
5	321/Pdt.G/2009/PN MDN	Pengadilan Negeri Medan	Tunggakan biaya maintenance, listrik dan biaya biaya lain oleh TL PT SBU(DL) terhadap PT Aksara Jaya Indah	Proses Kasasi Tk Pertama dan Tk Banding Kalah	Putusan 321/Pdt G/2009/PN MDN tanggal 12 Januari 2010 menghukum Tergugat membayar biaya maintenance, listrik dan lain-lain sesuai perjanjian sebesar Rp566.407 007 dan bunga 6% -menyatakan batal akta perjanjian penyerahan hak pemakaian ruangan/kios nomor 52 tanggal 24 April 1991 -menghukum Tergugat dan atau instansi yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dengan segera ruangan/kios tersebut kepada Penggugat menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp161 000 Putusan 330/PDT/2010/PT.MDN tanggal 20 Desember 2010 Menguatkan putusan PN Medan Nomor 321/Pdt G/2009/PN MDN
6	442/Pdt G/2009/PN.JKT BAR	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Proses Lelang yang akan dilaksanakan atas sebidang Tanah HGB seluas 269m2 yang terletak di Kec. Palmerah, Jakarta Barat yang menjadi jaminan atas pinjaman Albert Kongoasa pada PT SBU	Proses Kasasi Tk Pertama dan Tk Banding Menang	Putusan 442/Pdt G/2009/PN JKT BAR tanggal 23 Agustus 2010 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Putusan 377/PDT/2011/PT.DKI tanggal 16 Januari 2012 Menguatkan putusan PN Jakarta barat Nomor 442/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR
7	483/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1 (Satu) bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Jelambar Baru Blok A IX No 223 RT 006/RW. 09, Kelurahan Jelambar, Kec Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tk PK Kalah Baru ditangani di Tk PK	Putusan PK Nomor 565 PK/ Pdt/2016 Amar Putusan MENGADILI : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LAIN LAIN cq KANTOR WILAYAH VII JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V, tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Terlawan I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
8	530/Pdt G/2010/PN Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah Hak Milik No. 946, yang terletak di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela, seluas 384 M2, Gambar Situasi No 3/249/1982 tanggal 1 Februari 1982	Gugatan Dicabut	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
9	117/Pdt.G/2011/PN.Jkt Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHM No. 228/Kelapa Dua, seluas 251 M2, Gambar Situasi No. 5375/1990 tanggal 20 November 1990, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Pada Tingkat Banding gugatan Dicabut Sesuai Akta Pencabutan Banding No 01/Srt Pdt/2011/PN Jkt Bar tanggal 31 Mei 2011	SELESAI
10	443/Pdt.G/2010/PN.Bks	Pengadilan Negeri Bekasi	Terkait pending item dalam Program Penjualan Aset Properti 6 (PPAP 6) dengan Nomor Aset adalah B20044, tanah seluas 389.719 M2	Gugatan Dicabut	SELESAI
11	03/Pdt G/2011/PN LP	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	Ada 6 (enam) objek tanah di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara . •SHM No 9/Desa Tegal Sari seluas 2 394 M2, •SHM No 13/Desa Tegal Sari seluas 20.590 M2, •SHM No 8/Desa Tegal Sari seluas 3 195 M2, •SHM No 10/Desa Tegal Sari seluas 1 699 M2, •SHM No 11/Desa Tegal Sari seluas 6 259 M2, •SHM No 12/Desa Tegal Sari seluas 2 337 M2	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDI SUYONO tersebut
12	26/Pdt.G/2011/PN MDN	Pengadilan Negeri Medan	Tanah seluas 60 000M2 (eks. Jaminan piutang Negara PT SBU)	Proses PK Tk Pertama Menang, Tk Banding dan Tk Kasasi Kalah	Putusan 26/Pdt G/2011/PN.MDN tanggal 19 Oktober 2011 Dalam Provisi Menolak Tuntutan provisi dari Para Pwnggugat Tentang Eksepsi Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, dan dari Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP6 991 000, (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Putusan 83/PDT/2012/PT MDN 10 Juli 2012 Dalam Eksepsi - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011 Nom,or 26/Pdt.g/2011/PN Mdn Dalam Provisi - Menguatkan putusan Pengadilpan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 26/Pdt G/2011/PN Mdn Dalam Pokok Perkara - membatalkan Putusan Pegadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 26/Pdt g/2011/PN Mdn, dimohonkan Banding tersebut Putusan 1273K/Pdt/2013 tanggal 22 Agustus 2012 Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi Dalam Eksepsi Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 26/Pdt G/2011/PN.Mdn, dimohonkan Banding tersebut Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 26/Pdt.G/2011/PN MDN, dimohonkan Banding tersebut Dalam Pokok Perkara - Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
13	238/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aset eks BDL PT. Bank Kosagraha berupa sebidang tanah seluas 2205 M2 yang terletak di Desa Kunciran, Kecamatan Pinang (d/h kecamatan Cipondoh) Propinsi Banten (d/h Propinsi Jawa Barat) SHM No 1832 yang saat ini sudah berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan	Sampai saat ini belum ada pengajuan Kasasi Tk Pertama dan Tk Banding Menang	Putusan 238/Pdt G/2011/PN.JKT SEL tanggal 13 September 2012. MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA Putusan 134/PDT/2014/PT DKI tanggal 6 Mei 2014 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor · 238/Pdt G/2011/PN JKT SEL tanggal 13 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut
14	133/Pdt G/2013/PN JKT PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pelelangan atas SHGB No 2591/Pasar baru dan SHGB No 2590/Pasar Baru oleh PUPN	Putus Banding Menang (Sesuai SIPP, relaas belum diterima) Tk Pertama Menang	Putusan 133/Pdt G/2013/PN Jkt Pst tanggal 15 Januari 2014 DALAM EKSEPSI· Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak, DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, · Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 516 000. (lima ratus enam belas ribu rupiah), 426/PDT/2014/PT DKI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ,· Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 133/Pdt G/2013/PN Jkt Pst, tanggal 15 Januari 2014, yang dimohonkan banding , · · · Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150 000 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ,· · ·
15	64/Pdt G/2011/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	• Sertifikat Deposito No CB 05391 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2005 sejumlah Rp 500.000 000,- (lima ratus juta rupiah), • Sertifikat Deposito No CB 05392 tertanggal 22 November 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp 500 000.000,- (lima ratus juta rupiah) Total jumlah Sertifikat Deposito yang dimiliki Penggugat sebanyak 2 (dua) lembar Sertifikat Deposito sejumlah 1 000.000.000, (satu milyar rupiah).	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I BANK INDANESIA, II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDANESIA, Para Pemohon Kasasi III 1 PT GLOBAL INTERNASIONAL, Tbk , (Dalam Likuidasi) dan 2 SURYO tersebut

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
16	63/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	(*) Sertipikat Deposito No. SD BB 000198 tertanggal 25 Okt 2004 yg jatuh tempo pada tgl 25 Nov 2004 sejumlah Rp 100 000 000,- (seratus juta rupiah) (*) Sertipikat Deposito No. SD BB 000199 tertanggal 25 Okt 2004 yg jatuh tempo pada tgl 25 Nov 2004 sejumlah Rp 100 000 000,- (seratus juta rupiah)	Putusan Kasasi . No 2269 K/PDT/2014 tangal 11 November 2015 Amar Putusan MENGADILI 1. MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PARA PEMOHON KASASI 1 PT. BANK BLOBAL INTERNATIONAL, TBK. (DALAM LIKUIDASI),2 SURYO DAN 3 KEMENTERIAN KEUANGAN RI, TERSEBUT 2 MENGHUKUM PARA PEMOHON KASASI/TERGUGAT I, III DAN IV UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT KASASI INI SEBESAR Rp.500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH).	Putusan Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt G/ 2011/ PN Jkt Sel , tanggal 09 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut
17	146/Pdt G/2011/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	(*) SHGB No. 730/Pinangsia Jakarta Barat seluas 162 M2, SHGB No. 266/Mangga Dua Utara seluas 1 266 M2	Putusan PN	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)
18	344/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	(-) SHGB No 674/Desa Sunter Agung, Gambar Situasi No 1674/1987 tgl. 31 Agustus 1987 seluas 90 M2, (-) SHGB No 3578/Desa Sunter Agung Gambar Situasi No 330/1991 seluas 343 M2, (-) SHGB No 6709/Desa Sunter Agung Gambar Situasi No. 3972/1994 seluas 87 M2, (-) SHM No. 789/Desa Tegal Alur, Gambar Situasi No. 5393/1993, (-) SHM No 952/Desa Tegal Alur Gambar Situasi No. 8205/1994	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny Tjan Agnes Rumanauw, tersebut

SK No 062812 C

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
19	240/Pdt.G/2011/PN.Jkt Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aset berupa tanah seluas 6.788 059 M2 yg terletak di Prop. Jawa Barat,Kab Bogor, Kec Cimanggis, Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatiajar, Cimpaseum dan sukatani yg dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf dengan EMERALDA disebut Proyek Emeralda	Putusan Peninjauan Kembali	Putusan PN, tanggal 28 Mar. 2012 . Menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* . Putusan Banding No 140/PDT/2013/PT DKI tanggal 04 Jun. 2013, yang intı amar putusannya menyatakan 'Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Maret 2012 Nomor 240/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel, yang dimohonkan banding tersebut'; dan "Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian" Putusan Kasasi No 685 K/PDT/2014 tanggal 01 Okt 2015, yang intı amar putusannya menyatakan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi . 1. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk , 2. PT BANK CIMB NIAGA, Tbk DAHULU PT BANK LIPPO Tbk., 3 PT. KARABHA DIGDAYA , 4 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut" Putusan Peninjauan Kembali No 343 PK/PDT/2016 tanggal 28 September 2016, yang intı amar putusannya menyatakan "Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I 1. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA,Tbk , 2 PT BANK CIMB NIAGA dahulu PT PT BANK LIPPO,Tbk , Pemohon Peninjauan Kembali II . PT KARABHA DIGDAYA dan Pemohon Peninjuan Kembali III PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut- Membatalakn putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 685 K/PDT/2014 tanggal 17 Juli
20	72/Pdt.G/2011/PN Mks	Pengadilan Negeri Makassar	Sengketa kredit dengan 9 (sembilan) BPKB mobil dan 11 Sertifikat Hak Milik yang dijaminkan ke PT Bank Perniagaan Cabang Sungguminasa	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1 H SUDIRMAN BIN H NONGKO, dan 2 Hj. MURNI tersebut.
21	237/Pdt G/2011/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHGB No 136/Cipete Utara, Gambar Situasi No 478/3255/1975, luas 709 M2, tercata an Ny Evi Husna Lukman, sekarang HGB No 284/Cipete Utara, Gambar Situasi No 3607/1990, tgl 29 Januari 1990, terletak di Jl Taman Brawijaya III/136, Kebayoran Baru, Jak-Sel.	Putusan Kasasi	No 1413 K/Pdt/2017 tanggal 15 Agu. 2017 MENGADILI- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi EVIE HUSNA tersebut, - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
22	238/Pdt.G/2011/PN Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	5 Unit villa yg terletak di Jl. Saraswati III No 9, Kel Seminyak, Kec Kuta, Kab Badung, SHM No 7442/Kuta, seluas 1 520 M2, Surat Ukur Nomor 314/1999	Putusan Kasasi	Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi LAW TZE SENG (WILLIAM), tersebut
23	255/Pdt.G/2011/PN.Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	SHM No 2595/Desa Benoa dan SHM No. 2334/Desa Benoa terletak di Kel Benoa, Kab. Badung, Prop. Bali	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
24	236/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan yg terletak di Jl Kelapa Puan Timur VI Blok NB 7 No 22 Rt 006/Rw 012, Kel Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara SHGB No. 1913 dengan Surat Ukur No. 334 tahun 1987	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIGOR BARIGIN SIAHAAN.B AP Selaku suami dari HERMIEN B.BUDOYO,di lanjutkan oleh ahli warisnya RICHARD P H SIAHAAN tersebut

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
25	236/Pdt.G/2011/PN.Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	*. SHM No. 4841, terletak di Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Dati Tk. II Badung, Prop Dati I Bali, gambar situasi tertanggal 11 Juli 1995 No 1762/1995, Luas 2 400 m2 an Maeniar Benny Sutedja; * Sebidang tanah sewa seluas 1 966 m2, milik I Lantar, dkk sebidang tanah hak milik Pipil No 67, Persil Nomor 54a, Kelas III, Luas seluruhnya No. 118, Kel Kuta, Kec Kuta, Kab Dati Tk II Badung, Prop Dati Tk I Bali, berdasarkan Akta Sewa Menyewa Tanah No 206 tertanggal 31 Januari 1990	Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima	Oleh karena pihak Penggugat Tidak Banding atas putusan yang mengalahkannya, maka putusannya menjadi in kracht SELESAI
26	349/Pdt.G/2011/PN.Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana terurai dalam * SHM No 353, luas 930 m2, Gambar Situasi No 1896/1994 tgl 26 Mei 1994, * SHM No 354, luas 371 m2, Gambar Situasi No 2032/1994 tgl 13 Juni 1994 keduanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik, desa Tlogopatut setempat dikenal sebagai Jalan Dr Sutomo No 116 Gresik, selanjutnya disebut "Obyek sengketa"	Proses Tingkat Kasasi	
27	166//Pdt.G/2011/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHGB No. 1 HIPOTIK PERTAMA sebesar Rp 850 000 000, SHGB No 2 HIPOTIK PERTAMA . sebesar Rp 1 850.000 000 HIPOTIK KEDUA . sebesar Rp. 504 221 800, SHGB No. 4 HIPOTIK PERTAMA : sebesar Rp 5 321.052 000 (sehingga jumlah total keseluruhan hipotik yaitu Rp 8.750.000.000	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Penggugat
28	464/Pdt.G/2011/PN Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	Tanah seluas 5 500 M2 dengan No SHM 312 yg terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Tanah seluas 5.400 M2 dengan No SHM 2366 yg terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SURAHMAN tersebut

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
29	32/Pdt G/2011/PN Bgr	Pengadilan Negeri Bogor	SHM No 840/Cibuluh seluas 3 650 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab Bogor, Kec Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl 20 7 1994, No. 9680/1981, Sertifikat tgl 26 7 1994, SHM No. 847/Cibuluh seluas 1 000 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab Bogor, Kec Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl 18 4 1981, No 8/1978, Sertifikat tgl 13-10 1994, SHM No 850/Cibuluh seluas 2.015 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab Bogor, Kec. Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl. 11 8-1981, No. 10374/1981, Sertifikat tgl 13 10 1994, SHM No 694/Pabaton seluas 850 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab Bogor, Kec Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kel Pabaton, Surat Ukur tertanggal 3-12 1974 No 371/1974, Sertifikat tgl 4-12-1974, SHM No 740/Cibuluh seluas 6 710 M2 yg terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab Bogor, Kec Kedung Halang, Desa Cibuluh, gambar situasi tgl 9 2 1988, No 4224/1988, Sertifikat tgl 27-4 1998,	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari PEmohon Kasasi. CV. DELIMA JAYA diwakili oleh WIYANTA (Direktur) dan EVY (Persero Komanditer), tersebut
30	338/Pdt.G/2011/PN.Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Aset Negara berupa tanah seluas 384 m2 SHM No 946 yg terletak di Jalan Bangka IX No 62 Jakarta Selatan	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Drs. TAMSIL LUBIS tersebut
31	338/Pdt.G/2011/PN.Bdg	Pengadilan Negeri Bandung	*) SHM No. 3228 (dahulu No 2095)/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 53 m2 dan, SHM No 2841/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 362 m2 *) SHM No. 2774/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 68 m2, SHM No 2775/Kelurahan Kopo dengan luas tanah sebesar 1503 m2.	Gugatan Dicabut	**SELESAI**

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
32	108/Pdt.G/2011/PN.BB	Pengadilan Negeri Bale Bandung	1. SHM No 344/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 23-6 1994 No 6342/1994, luas 2 130 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Sukamaju 2 SHM No 345/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 23-6 1994 No 6369/1994, luas 3 500 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Sukamaju 3 SHM No. 346/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 23 6 1994 No 6373/1994, luas 4.770 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Sukamaju 4 SHM No 259/Sukamaju, Gambar Situasi tgl 11 2 1991 No 685/1991, luas 3 110 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,	Proses Kasasi	
33	403/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No 427 atas nama Anwirdi Mansur seluas 486 M2, Jalan Pejaten Raya Rt 003 Rw 002 No 48 Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	Putusan PN Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima	Penggugat tidak mengajukan banding SELESAI
34	56/Pdt G/2011/PN PTK	Pengadilan Negeri Pontianak	Sebidang tanah terletak di Gang Balsa Rt/Rw 04/X Kelurahan Darat Sekip Kec. Pontianak kota Pontianak seluas + 760 M2, Lebar + 17,5 M, Panjang + 44 M, dan batasannya adalah sebelah barat dengan tanah Samun, sebelah timur dengan tanah Sukir, sebelah utara dengan tanah Syarif Aman, sebelah selatan dengan tanah Said/Amat Dan terhadap tanah tersebut telah disertipikatkan dengan bukti SHM No 1009, Surat Ukur No. 7248 tahun 1983 tercatat atas nama SOEKEMI BIN SANMUKIMIN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pontianak/Turut Tergugat II	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
35	387/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Sebidang tanah dan bangunan yg terletak di Jalan Sunter Agung Utara Raya Blok A No. 33, 34 (Tampak Muka) dan Jalan Sunter Agung Utara Blok A 36 D No 15 (Tampak Belakang) Jakarta Utara	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny LORETTE V PELEALU tersebut
36	34/Pdt.G/2011/PN Kraksaan	Pengadilan Negeri Kraksaan	SHM No 1569 Gambar Situasi 896/1987, seluas 10.600 m2 (Sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yg terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Dati II Badung, Bali atau yg berasal dari Pipil No. 1881, Persil No 263, Kelas III, seluas 1,060 ha terletak di Desa Kerobokan No. 116, Kecamatan Kuta, Dati II Badung, Bali.	Gugatan Dicabut	**SELESAI**

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
37	473/Pdt.G/2011/PN.Bdg	Pengadilan Negeri Bandung	SHM No. 929/Turangga Gambar Situasi tertanggal 26 Desember 1992 Nomor 10362/1992 seluas 2 605 m2 tercatat atas nama Mochamad Basari setempat dikenal dengan Jalan Buah Batu Nomor 161 Bandung	Putusan PN. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian	Karena yg dihukum BPN Bandung untuk merubah membalik nama SHM SELESAI
38	451/Pdt G/2011/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	(*) SHM No 3228 (dahulu No 2095) Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 53 m2 dan, SHM No 2841/Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 362 m2 (*) SHM No. 2774/Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 68 m2 dan SHM No 2775/Kelurahan Kopo dg luas tanah sebesar 1503 m2	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
39	455/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah dengan luas 2970 m2 yg terletak di Kampung Babakan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik No 137/Jagakarsa atas nama Angelina Suyanto	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Penggugat
40	582/Pdt G/2011/PN Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah dg Hak Guna Bangunan Nomor 280 seluas + 1 250 M2, Gambar Situasi tanggal 12 Agustus 1993 Nomor 3008/1993 Desa Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (setempat di kenal jalan Genteng Hijau Nomor 80 Rt 001/07) pemegang hak terdaftar atas nama LIE TJUN NIO (LIE SOK TJIN) - OEY KOK TIONG - OEY KOK HOEN OEY KOK SENG dan OEY SIOE LIE, serta sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 281/Karet Kuningan seluas 0 - 828 M2, Gambar Situasi tanggal 12 Agustus 1993 Nomor 3009/1993 Desa Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (setempat dikenal jalan Genteng Hijau Nomor 80 Rt. 011/07) pemegang hak terdaftar atas nama LIE TJUN NIO (LIE SOK TJIN) - OEY KOK TIONG OEY KOK HOEN - OEY KOK SENG dan OEY SIOE LIE	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1 Oey Kok Seng, 2 Oey Kok Tiong, 3 Lie Tjun Nio al Lie Sok Tjn al Felicia Wirianata, 4 Oey Kok Hoen al Mukawan Wirianata, 5 Oey Soie Lie tersebut
41	759/Pdt G/2011/PN Jkt Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Sebidang tanah dan bangunan yg beralamat di Jalan Palm Raya No 440, Rt/Rw 006/007 Kel Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SHGB Nomor 1085	Putusan Banding	Menyatakan permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima
42	780/Pdt G/2011/PN Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Sebidang tanah dan bangunan yg beralamat di Jalan TB Simatupang No 8 Jakarta Selatan, SHM No 1132/Cilandak Barat seluas 2 210 M2 yg tercatat atas nama B. A Van Der Kolk	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
43	73/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan yang beralamat di Taman Giri Loka Sektor IV.5 Blok G No 7, Tangerang, Banten, yang berdiri di atas tanah dengan alas hak berupa SHGB No 1148 dan No 1487 an Jenny Irwan	Putusan Banding. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 73/ PDT G/2012/PN JKT PST tanggal 19 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN . Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
44	129/Pdt G/2012/PN Bks	Pengadilan Negeri Bekasi	Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di Kompleks Perumahan Taman Beverly 2 Lippo Cikarang setempat dikenal sebagai Jalan Palem Puteri 07 No. 011, RT/RW 001/010, Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas + 252 m2, berdasarkan SHGB Nomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat terbit tanggal 19-11 1996, Gambar Situasi No 1082/1996 27-05-1996 tercatat an Gunawan Susilo	Putusan Peninjauan Kembali	**Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. CINDELFIA GLORITY tersebut** **PERKARA SELESAI**
45	109/Pdt Plw/2012/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah seluas 37 300 m2 terletak di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, SHM No 2/Kel Tandes an Soedarsono Ongkowidjojo	Putusan Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2012 Nomor . 109/Pdt Plw/2012/PN Sby , yang dimohonkan banding tersebut diatas.	Putusan PN Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
46	165/Pdt G/2012/PN Bks	Pengadilan Negeri Bekasi	Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT ALBARAYA SEGARA UTAMA atau pemilik atas 14.250 helai saham sedangkan Tergugat III adalah Direktur sekaligus pemilik atas 750 helai saham PT ALBARAYA SEGARA UTAMA adalah pemilik sah atas tanah tanah seluas 200.147 m2	**Proses Kasasi Dicabut**	**Permohonan kasasi Telah Dicabut Pada Kamis, 04 Sep. 2014, oleh WONG TEDDY WIHARJO selaku Pemohon Kasasi (Penggugat).** **PERKARA SELESAI**

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
47	317/Pdt G/2012/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1.SHGB No. 1/Caringin seluas 175 783 m2 an PT. Kencana Sinar Semesta; 2 SHGB No 3/Caringin seluas 2 270 m2 an PT Kencana Sinar Semesta; 3 SHGB No 4/Caringin seluas 675 m2 an PT Kencana Sinar Semesta, 4.SHGB No 5/Caringin seluas 10 330 m2 an PT Kencana Sinar Semesta, 5 SHGB No 6/Caringin seluas 2 050 m2 an PT Kencana Sinar Semesta; 6 SHGB No 270/Adiwarna seluas 178 m2 an PT Inti Sumber Tatagraha;	Putusan PK 1 Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1 Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta, dan 2 Menkeu RI, tersebut; 2 Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 95 K/Pdt/2014 Tanggal 26 Juni 2014	INKRACT SELESAI
48	25/G/2012/PTUN-JKT	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/KM.6/2011 tertanggal 13 Desember 2011 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Eks Pemegang Saham Bank Putera Multikarsa Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara	Proses Kasasi	
49	385/Pdt.G/2012/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	1.SHM No. 1236/Desa Sidomulyo, luas 237 m2 setempat dikenal dengan tanah rumah an Nafik, 2 SHM No 92/Desa Semambung, luas 751 m2, Desa Semambung, Kec. Gedangan, Kab Sidoarjo an Soetikno; 3 SHM No 154/Desa Semambung, luas 799 m2, Desa Semambung, Kec Gedangan, Kab Sidoarjo an Soetikno 4 Tanah sewa kotamadya Surabaya, luas 169 m2, Desa Semambung, Kec. Gedangan, Kab Sidoarjo an Soetikno, 5 Tanah Eigendom Verponding No. 17640 dan 17515, luas 90 m2	Putusan PN	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
50	183/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah Adat Persil 55a, S.II, seluas kurang lebih 43.590 m2 Kelurahan Duri Kepa, sekarang bernama Kelurahan Duri Kepa	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT MASTRACO tersebut
51	593/Pdt G/2011/PN Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian tentang Modal Pinjaman tertanggal 4 September 1997 dan Penggugat telah memberikan modal pinjaman kepada Tergugat sesuai apa yang telah diperjanjikan	Proses Peninjauan Kembali	

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
52	141/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHGB No. 436/Meruya Udik in casu objek Eksekusi dalam perkara perdata No 163/Pdt G/2003/PN Jkt.Bar jo No 535/PDT/2004/PT DKI jo No 899 K/Pdt/2006 merupakan aset property yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI	Putusan Peninjauan Kembali	Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya. Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu RI (Pelawan), Pihak Kementerian Keuangan pada tingkat PK menang PERKARA SELESAI
53	106/Pdt.Bth/2012/PN Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah/Bangunan seluas 285 M2 SHGB No 56/Menteng a n Dr H Suardi, SE, dan Tanah/Bangunan seluas 813 M2 SHM No 232/Cilangkap a n Dr H Suardi, SE.	Menyatakan gugatan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima	
54	136/Pdt G/2012/PN.Mdn	Pengadilan Negeri Medan	1.Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dengan SHGB No. 714 yg dikeluarkan oleh BPN Kota Medan pada tgl 19 Juli 2004, tanah mana terletak di Jl Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu, Kec Medan Polonia, Kota Medan, Prop Sumatera Utara, 2 Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pengggugat dari Sdr Ngarijan Salim yg beralamat di Jl Imam Bonjol No 26A Medan sebagaimana tertuang dalam akta jual beli No 103 tertanggal 25 Mei 2005 yg dikeluarkan oleh Susan Widjaja, SH PPAT Kota Medan, Prop Sumatera Utara, 3.Penggugat juga adalah pemilik tanah dengan SHGB No 715 yg dikeluarkan oleh BPN Kota Medan pada tgl 19 Juli 2004, terletak di Jl Teuku Cik Ditiro Desa Madras Hulu, Kec Medan Polonia, Kota Medan, Prop Sumatera Utara , 4 Bahwa tanah tersebut juga dibeli oleh Penggugat masih dari Sdr. Ngarijan Salim yg beralamt di Jl Imam Bonjol No 26 A Medan sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 104 tertanggal 25 Mei 2005 yg dikeluarkan oleh Susan Widjaja, SH PPAT Kota Medan, 5.Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sebelum tanah tersebut dijual kepada Penggugat, ternyata kedua bidang tanah tersebut sedang dalam	Proses Kasasi	
55	169/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No. 427 an Anwirdi Mansur, seluas 486 M2 di Jalan Pejaten Raya Rt 003/002 No 48 Kel Jatipadang, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
56	265/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan nota kesepakatan No 10 (MRNIA) tgl 23 Mei 2001, yg dibuat dihadapan Olva Alfiaty SH , Notaris di Jakarta	Putusan Banding Membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2013 No 265/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
57	377/Pdt G/2011/PN.Bdg	Pengadilan Negeri Bandung	99 (sembilan puluh sembilan) bidang tanah HGB yang semuanya terletak di Kelurahan Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kotamadya, Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas tanah per kaveling 75 m2	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. BANK JAKARTA (DALAM PEMBERESAN), Tersebut
58	506/Pdt.G/2012/PN.Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Vervonding No. 4071, seluas 1 678 m2, Vervonding No 4086, seluas 1 698 m2, Vervonding No 4096, seluas 2 183 m2, Vervonding No 11682, seluas 1 307 m2, Kesemuanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasain, Jl Embong Wingu No 22, 24, 26, 28, 30, 41, 43, 47, 49, 51 dan 53 Surabaya	Gugatan Dicabut	**SELESAI**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
59	631/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	-Akta Jaminan Pribadi (borgtocht) Nomor 49 tanggal 23 April 1997 yg dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH , (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta, -Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 22 April 1997 yang dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH , (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta; -Akta Pengakuan Utang Nomor 38 tertanggal 22 April 1997 yang dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH , (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta, -Akta Pernyataan Kesanggupan Nomor 39 tanggal 22 April 1997 yang dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, SH., (in casu TERGUGAT IV), Notaris di Jakarta, -Perjanjian Kredit TERGUGAT II dengan TERGUGAT III, dengan jaminan pribadi TERGUGAT I, -Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tertanggal 15 April 1999 antara TERGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT I yang telah dilegalisasi oleh Ny Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor 786/Leg/1999 tertanggal 15 April 1999, -Perjanjian Jual Beli Piutang antara TURUT TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT II yg dibuat pada tanggal 28 Januari 2003, yg telah dilegalisasi oleh Sugito Tedjamulya, SH , Notaris di Jakarta dengan Nomor	Putusan PN	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
60	481/Pdt.Bth/2012/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Berupa tanah berikut bangunan luas 285 m2 yg terletak di Jalan Menteng Atas Selatan RT 012/012 No 31, Setiabudi, Jakarta Selatan, sesuai SHGB No. 56/Menteng Atas dan tanah berikut bangunan luas 813 m2 yg terletak di Jalan Cilangkap RT. 003/01 No. 4 Jakarta Timur sesuai SHM No 232/Cilangkap	Proses Kasasi	
61	654/Pdt G/2012/PN Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Akta Perjanjian Kredit No 37 tertanggal 7 Desember 1995 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ny Agustina Junaedi, S H antara Penggugat dengan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
62	405/Pdt.G/2012/PN Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	SHM No 02/1985 yg terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta (kini Kecamatan Kuta Selatan), Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 5.200 m2	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (1) Ni Made Sorji, (2) Sudiana, (6) I Wayan Riben tersebut

SK No 062848 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
63	147/Pdt.G/2012/PN.Bks.	Pengadilan Negeri Bekasi	Bahwa Penggugat pernah melakukan pinjaman kepada Bank Bumi Daya (BBD) periode 1993-1994 sebesar Rp 8 750 000.000, (delapan milyard tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jaminan berupa 1 SHGB No 1, SHGB No 2, SHGB No. 4 untuk wilayah Kec. Cibitung	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi . PT INDOCENTRAL MEGAH GARMEN Tersebut
64	227/Pdt.G/2012/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie), bahwa PENGGUGAT adalah nasabah pada PT. BANK Umum Nasional dengan kualifikasi kredit usaha kecil menengah (UKM), dimana Penggugat mendapat pinjaman sebesar Rp 70 000.000, dengan menjaminkan 2 buah SHM kepada PT Bank Umum Nasional, yaitu SHM No. 440/Curug an. Lipawati.	Proses Kasasi Dicabut	Permohonan kasasi Telah Dicabut Pada Senin, 03 Feb 2014 oleh Wuluh Hambali selaku Pemohon Kasasi (Penggugat) **PERKARA SELESAI**
65	580/Pdt.G/2012/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah SHM Nomor 103, 168, 169, 170, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222, 224, 449/Kesiman seluas 17.006 m2 yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kotamadya Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Kesiman Kertalangu, setempat dikenal sebagai Jalan WR Supratman No 256 Denpasar atau dahulu dikenal dengan nama Jalan Gianyar-Tohpati Denpasar (selanjutnya akan disebut "Tanah RSU Dharma Yadnya").	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
66	552/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pemegang hak atas tanah Bekas Hak Guna Bangunan seluas 73 620 m2 dengan SHGB No 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor 4807/1996, terletak dan setempat dikenal Kampung Gunung, Lingkungan Rt-001/Rw-10, Desa Tonjong, Kecamatan Bojong Gede (sekarang masuk wilayah Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Dicabut diganti dengan perkara 04/Pdt G/2012/PN Jkt Pst.	**SELESAI**
67	04/Pdt G/2013/PN Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	SHM No 2334 dan SHM No 2595 Desa Benoa, Denpasar	Putusan PN	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
68	04/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor 4807/1996, terletak dan setempat dikenal Kampung Gunung, Lingkungan Rt 001/Rw 10, Desa Tonjong, Kecamatan Bojong Gede (sekarang masuk wilayah Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat	Putusan Kasasi	Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1 MAMAT SOMANTRI, 2 SYARIEF HIDAYAT, 3 TUKIRAN, 4 AMBANG PURWADI SOEWONDO, 5. SARIYAH WIJAYA, 6. ROCHMUHAYATI, 7. SUNANDAR, 8. Ir. HIDAYAT, 9. SUNARSIH, 10. TOHIR, 11 EDI POERWANTO, 12 M. ABDURACHMAN, 13 Ir PRIATNA, 14 SOETONI, 15 Drs WASDJUD, 16. AS WIJAYA, 17 ISMANTORO, 18 T HADIGUNO S, 19. WARNO HARDJO tersebut,
69	149/Pdt G/2012/PN Bgr	Pengadilan Negeri Bogor	SHGB No 4757/Jelambar, GS No. 6177/1992 an AMIN ROILANDO (TJONG MIN TJOE) seluas 142 m2 setempat dikenal dengan Jalan Hemat No 7 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat	Gugatan Digugurkan Penetapan PN Bogor Tgl 26 Februari 2014	**SELESAI**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
70	12/Pdt Plw/2013/PN.KRS	Pengadilan Negeri Kraksaan	Pelelangan atas sebidang tanah pertanian dengan SHM No 226/Maron	Sampai saat ini belum ada pengajuan PK Tk Pertama, Tk Banding, dan Tk Kasasi Menang	Putusan 12/PDT.G/2013/PN.Krs tanggal 30 Desember 2013 Dalam Eksepsi Menyatakan menolak eksepsi Terlawan III , Dalam Pokok Perkara Menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3 351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah , Putusan 489/PDT/2014/PT SBY tanggal 24 November 2014 - Menerima permohonan banding dari Pelawan Pembanding, - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 30 Desember 2013 Nomor 12/Pdt Plw/2013/PN Kraks. yang dimohonkan banding tersebut, Menghukum Pelawan - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Putusan 2034 K/PDT/2015 tanggal 2 Mei 2017 Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi . NY INGGRID tersebut, Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan /Pembanding untuk membayar [illegible]
71	93/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHGB No 141/Pesanggrahan beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa/Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 200 m2, tertulis an CHANDRA HEMAWAN	Putusan Banding Menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2013, No 93/Pdt G/2013/PN.Jkt Sel , yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan PN Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima
72	43/Pdt.Bth/2013/PN Jkt Ut	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	SHGB No 1787/Kel Kapuk Muara beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kel Kel Kapuk Muara, Kec Penjaringan, Jakarta Utara seluas 70 m2, tertulis an. CHANDRA HEMAWAN, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No 3584/1993 tertanggal 23 Desember 1993. Setempat dikenal sebagai Komplek Duta Harapan Indah Blok KK No 28, sebagaimana tercantum dalam tanda terima yang diterbitkan oleh Bank Trifa Mayora Sentosa No 84/TTM/CM/VII/94 tertanggal 22 Juli 1994	Putusan Banding. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 43/Pdt.Bth/2013/PN Jkt Ut. tanggal 01 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut	Putusan PN Menyatakan bantahan tidak dapat diterima (niet on van kelijk vezklaard)
73	176/Pdt G/2013/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Dana dalam bentuk deposito dan rekening Koran. Total jumlah uang atau dana dalam bentuk deposito dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Koran adalah sebesar Rp 3 043.600 364,- (tiga milyar empat puluh tiga juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah)	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
74	84/Pdt G/2013/PN Tdo	Pengadilan Negeri Tondano	SHM No 49, an Engkom Singal, SHM No 50 an Mieke Manus yang kedua obyek tersebut terletak di Kelurahan Katinggolan Tondano, dan SHM No. 130 an Engkom Singal/Lintje Wangania yang terletak di Kelurahan Ranowangko Tondano	Putusan PN	1 Mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT-TERGUGAT ; 2 Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
75	22/Pdt G/2013/PN.Lmj	Pengadilan Negeri Lumajang	Surat Keterangan Lunas dan Surat Roya atas SHGB No. 715/Kel Tompokersan, seluas 255 m2, Surat Ukur No 83 tanggal 21 Desember 1991, pemegang hak tercatat a.n Johannes Soegiharto, yang terletak di Kel Tompokersan, Kec Lumajang, Kab. Lumajang, berikut bangunan dan semua yang berdiri diatasnya.	Putusan PN	• Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, • Menyatakan bahwa hutang Almarhum Tuan Johannes Soegiharto kepada PT Bank Umum Nasional atau disingkat PT BUN juga disebut Nasional Unversal Bank, berkedudukan di Jakarta dan/atau melalui kantor cabangnya di Probolinggo, telah lunas,
76	289/Pdt.Bth/2013/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	Jaminan 4 (empat) sertifikat milik Pembantah diantaranya sebidang tanah SHGB No 3247, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel Desa Pakulon Barat, Kec Tangerang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten) seluas 162 M2, tertulis atas nama Chandra Hemawan (Pembantah). Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No 21582/1995 tertanggal 13 Desember 1995.	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
77	487/Pdt.G/2013/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Bidang bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana •Vervonding No 4071, seluas 1 678 m2, •Vervonding No 4086, seluas 1 698 m2; •Vervonding No 4096, seluas 2 183 m2 dan; •Vervonding No 11682, seluas 1.307 m2 Kesemuanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kel. Embong Kaliasin, Jl Embong Wungu No 22, 24, 26, 28, 30, 41, 43, 47, 49, 51 dan 53 Surabaya	Proses Kasasi	
78	41/Pdt.G/2013/PN Gs	Pengadilan Negeri Gresik	SHM Nomor 21/Desa Dalegan, Gambar Situasi Nomor 1710/1989 Tanggal 9-9-1989, Luas 6.455 M2, terletak di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik	Digugurkan	**SELESAI**
79	336/Pdt.Plw/2013/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	Sebidang tanah seluas 16.501 m2 yang terletak di Jl AMD Manunggal X Rt 001/Rw 002 Kel Kedaung Wetan, Kec Neglasari, Kota Tangerang Banten dan SHM No. 145/Desa Kedaung Wetan, Gambar Situasi No. 1685 tanggal 03-05-1995 seluas 14.885 m2.	Putusan PN	Menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (NO)
80	296/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No 480 atas nama Riosdy Baharoedin dan SHGB No. 481 atas nama Riosdi Baharoedin dengan luas masing-masing 318 M2 dan 159 M2 yang kedua bidang tanah tersebut, terletak di desa Pangkalan Jati, Kec. Sawangan, Kab. Bogor	Putusan PN	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,
81	250/Pdt G/2013/PN.Jkt Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Jaminan utang PT. Timor Putra Nasional, diantaranya berupa· Rekening-rekening deposito a.n PT TPN di Bank Mandiri Cabang Jakarta	Putusan Banding	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
82	639/Pdt.G/2013/PN Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah tanah dan bangunan. -Verponding No 4071, seluas 1 678 M2, -Verponding No. 4086, seluas 1 698 M2, -Verponding No 4096, seluas 2 183 M2, -Verponding No 11682, seluas 1 307 M2, kesemuanya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin, Jl Embong Wungu No 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, dan 53 Surabaya	Proses Kasasi	
83	513/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 3 201 M2, yang terletak di RT 011/012, Kel Tanjung Duren Selatan, Kec Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat	Putusan Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 513/Pdt G/2013/Pn Jkt Bar Tanggal 12 Agustus 2014, Yang Dimohonkan Pemeriksaan Dalam Tingkat Banding Tersebut	Putusan PN. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
84	271/Pdt.G/2013/PN Mks	Pengadilan Negeri Makassar	Aset eks BPPN eks jaminan debitur PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (selanjutnya disebut PT. Bank Uppindo), yaitu PT Lawang Kencana Utama, PT Terracota Nusantara Perkasa dan PT Furin International & Trading Co. yang terdiri dari 6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) - PT PPA, tersebut,
85	515/Pdt.G/2013/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Obyek sengketa berupa SHM No 1227/Desa Simomulyo, luas 447 m2, Surat Ukur Sementara No 992/1981 tanggal 17 Desember 1981 tertulis a.n Soenarno, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tandes, Desa Simomulyo, setempat dikenal sebagai Jalan Simo Gunung Barat 3 A/10 Surabaya	Gugatan Dicabut	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Pantera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
86	209/Pdt.G/2013/PN.Mks	Pengadilan Negeri Makassar	6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (selanjutnya disebut objek sengketa perkara a quo), dengan alas hak berupa 1) SHM No 808/Panaikang, Gambar Situasi No 3905/1981 tanggal 27 November 1981, luas 2 190 m², a n Sdr Bambang Samijono dan Sdr Umar Santoso (Bukti PI-7), 2) SHM No 809/Panaikang, Gambar Situasi No. 3906/1981 tanggal 27 November 1981, luas 2 510 m², a n Sdr Bambang Samijono dan Sdr. Umar Santoso (Bukti PI-8), 3) SHM No. 811/Panaikang, Gambar Situasi No. 3907/1981 tanggal 27 November 1981, luas 3 341 m², a n Sdr Bambang Samijono dan Sdr Umar Santoso (Bukti PI-9), 4) SHM No 2631/Panaikang, Gambar Situasi No. 3135/1987 tanggal 7 Desember 1987, luas 817 m², a n Sdr Bambang Samijono dan Sdr Umar Santoso (Bukti PI-10), 5) SHM No. 3038/Panaikang, Gambar Situasi No. 135/1990 tanggal 8 Februari 1990, luas 791 m², a n Sdr Bambang Samijono dan Sdr. Umar Santoso (Bukti PI-11), 6) SHM No 3143/Panaikang, Gambar Situasi No 864/1991 tanggal 15 April 1991, luas 1 576 m², a.n Sdr Bambang Samijono (Bukti PI-11).	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
87	794/Pdt G/2013/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Menyatakan bahwa asset aset kayu olahan atas 115 container yang terletak di Komplek Pergudangan Wirulusan Blok G/2 Jalan Mayjend Sungkono Km 2,6 Gresik Jawa Timur	Putusan Banding	PN Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2014, Nomor 794/Pdt G/2013/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut.
88	45/Pdt G/2013/PN.Kds.	Pengadilan Negeri Kudus	Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1870 atas nama Watiah Binti Matsirat terletak di Jl. PUK di Desa Jepang Rt 02/02, Kec. Mejobo, Kab. Kudus	Putusan Kasasi	Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KATEMI tersebut.
89	25/Pdt G/2013/PN Dmk	Pengadilan Negeri Demak	SHM No 66 atas nama Sarwani Bin Mustaman alias Haji Sofwan, seluas + 1406 M2, yang terletak di Desa Donorejo, Kec Karangtengah, Kab Demak, Prop Jawa Tengah	Gugatan Dicabut	**SELESAI**

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
90	879/Pdt G/2013/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan SHM No. 300 Gambar Situasi No 1775/1986 tanggal 8 Januari 1986 seluas 363 M2, yang terletak di Jl Dukuh Menanggal VI/16 Kel Dukuh Menanggal, Kec Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur an Siti Mafrifah	Proses Kasasi	
91	648/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H Domang Jakarta Barat (Hak Milik No 1151, Hak Milik No 1123, Hak Milik No. 1124)	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
92	26/Pdt G/2013/PN/Lmg	Pengadilan Negeri Lamongan	Tanah dan bangunan SHM No 300 Gambar Situasi No 1775/1986 tanggal 8 Januari 1986 seluas 363 M2, yang terletak di Jl Dukuh Menanggal VI/16 Kel. Dukuh Menanggal, Kec Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur an. Siti Mafrifah	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
93	234/Pdt.G/2013/PN Ska	Pengadilan Negeri Surakarta	- Sebidang tanah dan bangunan berdasar SHM Kedua/Sertifikat Pengganti No 947 seluas + 645 m2, yg terletak di Kel Sriwedari, Kec Laweyan, Kota Surakarta, Prop Jawa Tengah, dan Sebidang tanah seluas + 548,1 m2, terletak di Komplek Perumahan Alam Sutera di Jalan Sutera Cemara IV No 8, Kel Pondok Jagung, Kec Serpong, Tangerang.	Putusan Peninjauan Kembali	1 Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali I INGO IM MING, 2 LAUW HWAN JONG, 3 JOSEPHINE LAETITIA dan II KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) SURAKARTA tersebut
94	655/Pdt.G/2013/PN.Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan H Domang Jakarta Barat (Hak Milik No 1151, Hak Milik No 1123, Hak Milik No 1124)	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
95	245/Pdt.G/2013/PN Smg	Pengadilan Negeri Semarang	SHM No 409 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bima I No 23 F, seluas kurang lebih 258 M2 di Kel Pindrikan Lor, Kec Semarang Tengah (dh Kec Semarang Barat) Kodya Semarang	Putusan Tingkat Banding	PN Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian Tk Banding Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat.
96	60/Pdt.G/2013/PN Tsm	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Aset Tanah Hak Milik SHM No 00455, seluas 168 m2 an Neni Mulyani terletak di Blok Palahan Kel Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya	Putusan PN	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
97	229/Pdt.G/2013/PN BB	Pengadilan Negeri Bandung	Sebidang tanah SHM No 2166 desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung, berikut bangunan yang berada di atasnya, setempat lebih dikenal sebagai Komplek Taman Kopo Indah I Blok E No 176	Putusan Banding Menguatkan putusan pengadilan negeri bale bandung tanggal 10 Juli 2014 Nomor 229/Pdt G/2013/PN BB yang dimohonkan banding tersebut	Putusan PN Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
98	25/Pdt.G/2013/PN Psr.	Pengadilan Negeri Pasuruan	1. Sebidang tanah hak milik/SHM No 283, seluas 206 m2, terletak di Kel Ngemplak Rejo, Kec Purworejo, Kota Pasuruan a n Damhudji, berikut turutannya yang berdiri melekat diatasnya 2 Sebidang tanah dan bangunan SHM No 287, seluas 101 m2, terletak di Kel Ngemplak Rejo, Kec Purworejo, Kota Pasuruan a n Damhudji 3 Sebidang tanah dan bangunan SHM No 285, seluas 50 m2, terletak di Kel Ngemplak Rejo, Kec Purworejo, Kota Pasuruan a n Damhudji 4. Sebidang tanah dan bangunan SHM No 132, seluas 135 m2, terletak di Kel. Ngemplak Rejo, Kec Purworejo, Kota Pasuruan a n Damhudji, Ubaidilah, Fatwah	Gugatan Digugurkan	SELESAI
99	724/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Tanah berikut bangunan seluas 352 m2, yang terletak di Jalan Adam No 101 Rt 002/010, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam SHGB No 289/Sukabumi Utara, atas nama Meri Ernahani	Putusan PN	
100	203/Pdt.G/2013/PN Pbr	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tanah objek perkara a quo seluas +/- 8 000, m2 dahulu berada di Km 6 Bencah Laweh Kedesaan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 02 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Gugatan Dicabut	SELESAI
101	62/Pdt G/2013/PN Sungg	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Tanah yang terletak di Jalan Malino, lingkungan Panggentungan, Kel Tamarunang, Kec Somba Opu, Kab Gowa atau yang lebih dikenal dalam SHM No 602/Tamarunang	Gugatan Digugurkan	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
102	709/Pdt.G/2013/PN.Mdn.	Pengadilan Negeri Medan	Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat berupa 1 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/75/1991 an M Jono, 2 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/76/1991 an Dasijem; 3 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/77/1991 an Muhammad Yusuf, 4 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/78/1991 an Rusman/Wagiman, 5. Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/79/1991 an Kanti Suandi, 6 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/80/1991 an Mat. Tali, 7 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/81/1991 an Ramdani Yusuf, 8 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/82/1991 an M Turnip, 9 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/83/1991 an Rais Sukarjo, 10. Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593.21/84/1991 an. Gito; 11. Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/85/1991 an Musiran Misnem, 12 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/86/1991 an Zakaria-Rusmi, 13 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593.21/87/1991 an Dasiyem, 14 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/88/1991 an Sadali, 15 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/89/1991 an Sabar Sembiring, 16 Surat Keterangan Menguasai Tanah No. 593.21/90/1991 an Parmono, 17 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/91/1991 an M Arifin, 18 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/92/1991 an Tadim Harahap, 19 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/93/1991 an Kasdi, 20 Surat Keterangan Menguasai Tanah No 593 21/94/1991 an Darmiati Rohena,	Gugatan Dicabut	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
103	176/Pdt.G/2013/PN Bwi	Pengadilan Negeri Banyuwangi	4 (empat) buah SHM, antara lain : 1 SHM No 3576 tahun 1994, seluas 6 150 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto), 2 SHM No 9534 tahun 1994, seluas 12 010 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto), 3 SHM No 464 tahun 1994, seluas 2 600 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto), 4. SHM No 465 tahun 1995, seluas 3.950 m2, atas nama Penggugat (Erman Hartanto)	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
104	04/Pdt.G/2014/PN Bgr	Pengadilan Negeri Bogor	Tanah berikut bangunan di atasnya SHGB No 153/Kel Babakan seluas 185 m2 yang terletak di Jalan Brawijaya No 48 Villa Indah Pajajaran (V I P), Kel Babakan, Kec Bogor Utara, Kota Bogor	Putusan Peninjauan Kembali	Nomor 883 PK/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 Amar Putusan M E N G A D I L I 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NENENG SARIANDEWI tersebut, 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
105	21/Pdt.G/2014/PN.Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHM No 2119 Desa Jelambar tertanggal 23 Juni 1997 berdasarkan Gambar Situasi No. 3252/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama Tjia Lie Hia, dengan batas-batas sebagai berikut • Sebelah Utara Tembok Bangunan, • Sebelah Timur Rumah No 45, • Sebelah Barat Rumah No 48, • Sebelah Selatan Jl. Prof. Dr. Latumenten II	Proses Tk Banding	Putusan Tk Pertama Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
106	662/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHM No 143/Duri Kosambi, luas + 798 m2	Putusan Tk. Pertama	Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima
107	68/Pdt G/2013/PN Gs	Pengadilan Negeri Gresik	Perjanjian Kontrak Kerja Pengamanan Pemeliharaan Aset kelolaan dan titipan PT PPA pada Kanwil X DJKN Surabaya atas objek berupa tanah milik Penggugat dengan SHM No 21	Tingkat PN menyatakan perkara perdata gugatan no 68/pdt G/2013/Pn gs tersebut telah habis panjar biaya perkara	**Perkara SELESAI**

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
108	133/Pdt G/2013/PN TK	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Lelang atas tanah dan bangunan SHM No. 1182/Pengajaran, Luas 529 m2 milik Penggugat	Tingkat PN Menyatakan perkara perdata Nomor 133/pdt G/2013/PN TK dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan.	**Perkara SELESAI**
109	61/Pdt.G/2014/PN Plg	Pengadilan Negeri Palembang	Lelang terhadap HGB No 245/Plaju Darat dan HGB No 247/Plaju Darat, terletak di Sumsel Kotamadya Palembang, Kec Seberang Ulu II, Kel Plaju Darat an. Pemegang Hak PT Kumala Berlian	Putusan PN	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard);
110	414/Pdt.G/2014/PN.Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No 95 Seb/Kel Tanah Tinggi di komplek perumahan Modernland Blok AG7 Nomor 47, Kel Cipete, Kec Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Pemeriksaan Tingkat Kasasi	
111	413/Pdt.G/2014/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No 110 Seb, Kel Tanah Tinggi di komplek perumahan Modernland Blok G1 Nomor 285, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Menang inkracht di pengadilan tingkat pertama	
112	453/Pdt.G/2014/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No B 110 Seb/Kel Sukasari di komplek perumahan Modernland Blok G1 Nomor 284, Kel Cipete, Kec Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
113	415/Pdt G/2014/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	SHGB No 95 Seb/Kel Tanah Tinggi di komplek perumahan Modernland Blok AG6 Nomor 19, Kel Cipete, Kec Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
114	249/Pdt G/2014/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah Jl Pulau Puteri VII, Komplek Perumahan Kota Modern Blok 03 Nomor 1 RT 01/RW 02, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Gugatan dinyatakan Gugur	**SELESAI**
115	354/Pdt G/2014/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Kota Modern Land Blok DG.2 No 77 Tanah terletak di perum kota modern land Blok G.4 No.216	Putusan Kasasi	Nomor 2890K/Pdt/2019 tanggal 15 Okt 2019 Amar Putusan . M E N G A D I L I 1.Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SHELVIANA LESMANASARI Tersebut, 2 Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500 000,00(lima ratus ribu rupiah),
116	375/Pdt.G/2014/ PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pengalihan Piutang PT Bank Dagang Nas Indonesia kepada T II (NISP Sekuritas)	Proses Peninjauan Kembali	
117	04/Pdt G/2014/PN Tbn	Pengadilan Negeri Tuban	SHM No 162 atas nama Listiyono luas 167 m2 terletak di Desa Beji, Kec Jenu, Kab Tuban, Prop Jawa Timur	Putusan Tk Kasasi	

SK No 062838 C

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
118	20/Pdt.G/2014/PN Pbr.	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tanah objek perkara a quo seluas +/- 8.000, m2 dahulu berada di Km.6 Bencah Laweh Kedesaan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 02 Kel Tangkerang Tengah Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Putusan Tk. Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Pbr tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut.	Putusan Tk PN Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
119	50/Pdt.Plw/2014/PN Mks	Pengadilan Negeri Makassar	Tanah Bangunan dengan alas hak berupa SHGB No. 20009 seluas 158 m2 a n Sukarsih yang terletak kompleks perumahan taman anggrek Blok B 3 Jln Angrek Masiro	Putusan Tk Pertama	Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima
120	60/Pdt.Plw/2014/PN Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	SHM No 1289/Luas 455 m2 a n Ali Djojonegoro Kromodihardjo, setempat dikenal jalan raya Tenggilis mejoyo No 18, F 14, Kotamadya Surabaya	Putusan Tingkat Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2014 Nomor 60/Pdt Plw/2014/PN Sby yang dimohonkan banding .	Putusan Tingkat PN Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya
121	06/Pdt.G/2014/PN Mgt	Pengadilan Negeri Magetan	SHM No 369/Desa Manjung luas 2010 m2 a.n Surat yang terletak di Desa Manjung Kec. Panekan Kab Magetan	Putusan Tk Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 06/Pdt G/2014/PN Mgt , yang dimohonkan banding tersebut ,	Putusan Tingkat PN Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
122	03/Pdt G/2014/PN Am	Pengadilan Negeri Arga Makmur	1 (satu) buah Gedung PT Bank Danamon Unit Pasar D1 Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan Tanah seluas 1 190 SHM No 1244 tanggal 30 Agustus 2005, beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
123	45/Pdt G/2014/PN Slmn	Pengadilan Negeri Sleman	a SHM No 1161/Ds Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan luas 284 m2 atas nama Istiq Maliyah (Penggugat I), b SHM No 1075/Ds Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan luas 1 155 m2 atas nama Tri Haryono (Penggugat II),	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formal

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
124	85/Pdt.Bth/2014/PN.Bdg.	Pengadilan Negeri Bandung	2 (dua) SHM yaitu SHM No. 2991/Kel. Sukaasih, Tanah Luas + 42 M2, Surat Ukur No 629/Sukaasih/2004 tanggal 19/08/2004 dan SHM No 2994/Kel. Sukaasih/2004 Tanah Luas + 48 M2, Surat Ukur No 628/Sukaasih/2004 tanggal 19/08/2014	Putusan Tingkat Pertama	Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya
125	97/Pdt.G/2014/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan diatasnya dalam SHM No 1425, Kel Dukuh Pakis, Kec Dukuh Pakis, Kota Surabaya, setempat dikenal Jalan Bukit Pakis Utara IV No TB 16 (Villa Bukit Mas Monaco TB 16) Surabaya	Putusan Tingkat Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 September 2014 Nomor 97/Pdt G/2014/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut,	Putusan Tingkat PN Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
126	59/Pdt.G/2014/PN Ska	Pengadilan Negeri Surakarta	Sertifikat tanah Hak Milik No 5467, Gentan atas tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya seluas + 175 M2, yang terletak di Desa Gentan, Kec Baki,, Kab Sukoharjo tercatat atas nama Dra Marfuah Hasyim Asharı Mulyo	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
127	60/Pdt G/2014/PN Plr	Pengadilan Negeri Palangkaraya	SHM No 15.01 01 01 1 05986 yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kotamadya Palangkaraya, Kec Pahandut, Kel Langkai dengan 313 M2 atas nama Ahram, SE	Putusan Tingkat Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 17 Desember 2014 Nomor 60/Pdt.G/2014/PN Plk, yang dimohonkan banding tersebut	Putusan Tingkat PN Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
128	04/Pdt G/2014/PN Kb Mn	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun	SHM No. 708/Bagi, Surat Ukur (Sementara) No 45 Tahun 1982 tanggal 12 Januari 1982, luas tanah 2654 m2, terletak di Desa Bagi Kec Madiun, Kab Madiun; SHM No 816/Bagi, Surat Ukur (Sementara) No 237/1982 15 Januari 1982, luas tanah 3584 m2, terletak di Desa Bagi Kec. Madiun, Kab. Madiun	Putusan Kasasi	Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi YAYUK WINARTI tersebut
129	55/Pdt G/2014/PN Dpk	Pengadilan Negeri Depok	Berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM No 15320/Tugu seluas 99 m2 yang terletak di Kel Tugu, Kec Cimanggis, Kota Depok – Jawa Barat	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
130	16/Pdt G/2014/PN Rap	Pengadilan Negeri Rantauparapat	Sebidang tanah berikut bangunan seluas 1.827 m2 dengan SHM No 280/Tanjung Medan, terletak di Jalan Beringin Desa Tanjung Medan, Kec Kampung Rakyat, Kab Labuhan Batu, atas nama Suharman	Putusan Banding	Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Pemtera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
131	07/Pdt.G/2014/PN Mgl	Pengadilan Negeri Magelang	SHM No 2046, seluas 203 m2 atas nama Dewi Anggraeni Hestungkari dan SHGB No 0774 seluas 121 m2 atas nama Agus Lasmono/Penggugat, yang kesemuanya terletak di Desa Banjarnegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang.	Gugatan Dicabut	SELESAI
132	286/Pdt G/2014/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah hak milik No 2 – Kel Romokalisari seluas 37 300 m2, lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 31 Oktober 1990 No 1419/U/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Soedarsono Ongkowidjojo, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Romokalisari (Eks PT BANK PERMATA, Tbk dahulu bernama PT BANK BALI SURABAYA TUNJUNGAN)	Proses Peninjauan Kembali	Putusan Kasasi Nomor 3206 K/Pdt/2015 Tanggal 24 Februari 2016 Amar Putusan M E N G A D I L I 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT BANK PERMATA, Tbk dahulu bernama PT BANK BALI SURABAYA TUNJUNGAN, dan Pemohon Kasasi II 1 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), 2 KEPALA KANTOR WILAYAH X DJKN SURABAYA, 3 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, tersebut, 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
133	168/Pdt G/2014/PN Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	• Tanah seluas 3.607 m2, SHM No 677/Kedoya, Gambar Situasi No 64/916/1984 tanggal 21 Februari 1984, terletak di Kedoya Rt 003/04, Kel Kedoya, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat, • Tanah seluas 1 590 m2, SHM No 682/Kedoya, Gambar Situasi No 65/917/1984 tanggal 21 Februari 1984, terletak di Kedoya Rt. 003/04, Kel Kedoya, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat; • Tanah seluas 3 448 m2, SHM No 910/Kedoya, Gambar Situasi No 1020/4427/1985 tanggal 30 Juli 1985, terletak di Kedoya Rt 003/04, Kel. Kedoya, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Gugatan Dicabut	SELESAI
134	17/Pdt G/2014/PN Krw	Pengadilan Negeri Karawang	26 bidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Dati II Karawang, Kecamatan Klari, Desa Lemahmulya, dengan keseluruhan 45 ha	Gugatan Gugur	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
135	177/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	jaminan berupa . • Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No 1660/Joglo yang terletak di Taman Alfa Indah F II No 1 Joglo, seluas 405 m2 tertulis atas nama Ir Bambang Sudarsono, • Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl Swadarma Raya Rt 010/03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan SHM No 818/Ulujami seluas 1.320 m2 tertulis atas nama Ir Bambang Sudarsono	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Ir BAMBANG SUDARSONO tersebut
136	158/Pdt G/2014/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah berikut segala bangunan dan tanaman yang berada diatasnya seluas 17.950 m2, yang terletak dahulu dikenal sebagai Girik Letter C Nomor 770, Persil Blok 25, Kelas D I, Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat atau sekarang dikenal sebagai Kel Cirendeu, Kec Cirendeu, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
137	156/Pdt G/2014/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHM No 103, 168, 169, 170, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222, 224, 449/Kesiman luas 17 006 m2, yang terletak di Jalan W R Supratman No 256 Denpasar	Gugatan Dicabut	**SELESAI**
138	199/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHM No 103, 168, 169, 170, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222, 224, 449/Kesiman luas 17 006 m2, yang terletak di Jalan W R Supratman No 256 Denpasar	Putusan Peninjauan Kembali	MENGADILI : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENTERI KEUANGAN RI) tersebut , Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 896 K/Pdt/2017, tanggal 29 Mei 2017 , MENGADILI KEMBALI Dalam Eksepsi . Mengabulkan eksepsi Tergugat &#39,. Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima , Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2 500 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , **PERKARA SELESAI**
139	03/Pdt Sus/2014/PN Niaga Jkt Pst .	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	tanah seluas 58 000 m2 sebagian dari luas tanah 113 408 m2 ex SHGB No 442/Meruya Udik (sekarang Meruya Selatan) yang diperoleh dengan Hibah No 583/Kembangan/1995 tanggal 22 Februari 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoedin yang terletak di Jalan Meruya Selatan No 1, Kel Meruya Selatan, Kec Kembangan, Jakarta Barat, setempat yang dikenal dengan Kampus Universitas Mercu Buana	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOEDESON TANDRA, S H , M.Hum., dan Drs JOKO PRABOWO, S.H., M.H., tersebut

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
140	197/Pdt G/2014/PN.Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	• Deposito Berjangka 1 (satu) bulan, No Seri SB 007061 dengan nilai nominal Rp. 250 000 000, , tercatat atas nama PT Wilhara Prima Realty, tertanggal 27 Oktober 1998, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 1998 hingga 27 November 1998, • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan, No Seri SB 008217 dengan nilai nominal Rp. 800.000 000, , tertanggal 1 Maret 1999, tercatat atas nama PT Wilhara Prima Realty, tertanggal 1 Maret 1999 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 hingga tanggal 1 April 1999 , • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan, No Seri SB 008263 dengan nilai nominal Rp 500 000 000, tercatat atas nama PT Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999 tertanggal 12 Maret 1999, terhitung mulai tanggal 12 Maret 1999 hingga tanggal 12 April 1999, • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan No Seri SB 008263 dengan nilai nominal Rp 500 000 000, tercatat atas nama PT Wilhara Prima Realty tertanggal 12 Maret 1999 tertanggal 12 Maret 1999 hingga tanggal 12 April 1999; • Deposito Berjangka 1 (satu) bulan No. Seri SB 008262 dengan nilai nominal Rp 500 000 000, , tercatat atas nama PT Wilhara Prima Realty tertanggal 12 Maret 1999 terhitung mulai 12 Maret 1999 hingga 12 April 1999, • Rekening Koran No Rek 100 007056 1-01-6 atas nama Penggugat dengan jumlah saldo sebesar Rp 143 600 364, yang tercatat pada periode tanggal 1 Maret 1999 sampai dengan 12 Maret 1999 yang dikeluarkan Bank	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)
141	53/Pdt.G/2014/PN.Tk	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Akta Risalah Lelang No. 36/1987 1986 tertanggal 11 Desember 1987	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Tuan AMAT ALI tersebut
142	202/Pdt.G/2014/PN Smg	Pengadilan Negeri Semarang	SHM No. 195 yang terletak di Jl. Puspowarno IX/2 Semarang	Gugatan Damai	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
143	10/Pdt.G/2014/PN.Trk.	Pengadilan Negeri Trenggalek	sebidang tanah sawah pertanian SHM No 265 Surat Ukur Tanggal 9 5 2001 No 94/2001 Luas 3005 m2, atas nama Sumiatin yang terletak di Desa Tawing, Kec Mujungan, Kab Trenggalek, Jawa Timur dan tanah pekarangan SHM No 1565, Surat Ukur Tanggal 21-02-2008 No. 467/Sambirejo/2008 Luas 657 m2, atas nama Mochamad Kosin Nurahman, yang terletak di Desa Sambirejo, Kec Trenggalek, Kab. Trenggalek Jawa Timur	Proses di Tingkat Kasasi	
144	319/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No 667/Kedoya, Gambar Situasi No 64/916/1984 tanggal 21 Februari 1984 atas nama Karyana Nusa, SHM No 682/Kedoya, Gambar Situasi No 65/917/1984 tanggal 21 Februari 1984 atas nama Tuty Ridwan Tjandra, dan SHM No 910/Kedoya, Gambar Situasi 1020/4427/1985 tanggal 30 Juli 1985 atas nama Tarunadjaya;	Putusan Tingkat Banding Membatalkan Putusan PN. Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 2015 No 319/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel , yang dimohonkan banding tersebut	Putusan Tingkat PN Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
145	96/Pdt.G/2014/PN Plg	Pengadilan Negeri Palembang	Tanah seluas 28 706 m2, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta RT. 06/09 Kel Suring Agung Palembang (dahulu Kel Lorok Pakjo Palembang) sebagaimana SHM No 3010, Gambar Situasi No 1024 Tahun 1984 an M Yusuf	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard)
146	33/Pdt G/2014/PN Mjk	Pengadilan Negeri Mojokerto	SHM No 184, luas 98 m2, yang terletak di Kel Kauman, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur	Putusan Tingkat Banding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 03 Februari 2015 Nomor 33/Pdt G/2014/PN Mjk, yang dimohonkan banding tersebut	Putusan Tingkat PN. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
147	322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW. 002, Menteng, Jakarta Pusat (SHM nO 162/Menteng an RG Doeriat), 2 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav 8, Blok BK No 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No 3261/Pondok Pinang an Ny F Siti Rabini), dan 3 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav 8, Blok BK No 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No. 3264/Pondok Pinang an Ny. F. Siti Rabini).	Putusan Tk Banding	Nomor 482/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 07 Nov 2017 Amar Putusan M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I , Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 322/Pdt.Plw/ 2014/PN Jkt Utr, tanggal 14 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut, MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan provisi Pelawan, DALAM EKSEPSI Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Turut Terlawan II, DALAM POKOK PERKARA Menyatakan Pelawan sekarang Terbanding bukan pelawan yang baik dan benar , Menolak Perlawanan Pelawan Nomor 322 / Pdt.Plw/ 2014/PN Jkt Utr, tanggal 14 September 2015, Menghukum Pelawan sekarang Terbanding I, untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
148	42/Pdt G/2014/PN Kwg	Pengadilan Negeri Karawang	Tanah dan bangunan SHGB 4 buah dengan luas tanah + 1 065 hektar SHGB No.1/Karanganyar, SHGB No. 2/Karanganyar, SHGB No 3/Karanganyar, SHGB No. 4/Karanganyar.	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima
149	101/Pdt G/2014/PN Tk	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Surat Keputusan (SK) PUPN Cabang Lampung Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara dengan No. PJP N002/PUPNC 07/2014 tanggal 20 Agustus 2014	Gugatan Gugur	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
150	30/Pdt.G/2014/PN.Sng.	Pengadilan Negeri Subang	Tanah bekas HGU No 1/Cihambulu seluas 10.860 500 m2, yg terletak di Desa Karangmukti, Kec Cipeundeuy, Desa Cihambulu Kadawung, Salamjaya, Kec Pabuaran, Kab Subang, Tanah bekas HGU No 1/Cipeundeuy seluas 7 853 080 m2, yg terletak di Desa Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang.	Proses Banding	
151	399/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Ut	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	SHGB No 250/selong, luas 750 m2, an FX Widyastanto	Putusan Tingkat Pertama	- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Terlawan, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VI, Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima
152	930/Pdt G/2014/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	-SHGB No 07, seluas 101 755 m2, terletak di Desa Sumput, Kec Driyorejo, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No 8, seluas 36 540 m2, terletak di Desa Klikiran, Kec Driyorejo, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur, SHGB No 10, seluas 4 100 m2, terletak di Desa Krikilan, Kec Driyorejo, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No 12, seluas 6 340 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec Driyorejo, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No 13, seluas 32 050 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, SHGB No 1356, seluas 33 500 m2, terletak di Desa Sumput, Kec Driyorejo, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur, -SHGB No 35, seluas 8 600 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec Driyorejo, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur; -SHGB No 36, seluas 51 700 m2, terletak di Desa Driyorejo, Kec Driyorejo, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur, -Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No C2-1115 HT.04.06.TH 2000/NSTD, tanggal 24 November 2000, yang diterbitkan oleh	Pencabutan Perkara Banding Permohonan Banding Telah Dicabut Pada Rabu, 18 Apr 2018	**PERKARA SELESAI**
153	132/Pdt.G/2014/PN LP	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	Sebidang tanah seluas 2 394 m2, sebagaimana SHM No 9/Desa Telaga Sari, an Tergugat III, terletak di Desa Telaga Sari, Kec Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dan Sebidang tanah seluas 6 259 m2, sebagaimana SHM No 11/Telaga Sari, an Tergugat V, terletak di Desa Telaga Sari, Kec Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.	Putusan Banding	Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ,

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
154	631/Pdt G/2014/PN.Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No 84, seluas 276 m2, di Desa Beberan, Blok KD Dadap Baberan, Palmanan, Cirebon, Jawa Barat, an Yusri Yusuf, SHM No 1296/Mekarsari, seluas 115 m2, alamat Perum Kompas Indah, Jl Trembesi Blok B5 No 1, Mekarsari, Tambun, Bekasi, an Yusri Yusuf, SHM No 1945/Mekarsari, seluas 135 m2, alamat Prum Kompas Indah, Jl Alamanda Blok C2 No 2, Mekarsari, Tambun, Bekasi, an Yusri Yusuf; SHM No 1456, seluas 135 m2, alamat Perum Sinar Kompas Utama, Jl Kenanga Blok B2 No. 22, Mekarsari, Tambun, Bekasi, an Susanti, dll	Gugatan Dicabut	SELESAI
155	517/Pdt G/2014/PN Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Tanah tanah yang beralamat di Jl H Domang, No 6, RT/RW 0013/02, Kel Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat SHM No 1123/Kebon Jeruk, tgl. 16 Juli 1991, Surat Ukur No 1372/1991 tgl 22 Februari 1991, seluas 1 656 m2, an Iwan Sutadi Sidarta, SHM No 1124/Kebon Jeruk, tgl 16 Juli 1991, Surat Ukur No 1373/1991 tgl 22 Februari 1991, seluas 462 m2, an Iwan Sutadi Sidarta, SHM No 1151/Kebon Jeruk, tgl 22 Oktober 1991, Surat Ukur No 1374/1991, tgl 22 Februari 1991, seluas 732 m2, an. Iwan Sutadi Sidarta	Putusan Tingkat Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 517/Pdt.G/2014/PN JKT BRT yang diajukan banding tersebut.	Putusan Tingkat PN Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak,
156	827/Pdt.G/2014/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No 36, Gambar Situasi 625/1977, luas 1770 m2, terletak di Desa Bojong Rawa Lumbu (sekarang Kelurahan Bojong Rawa Lumbu) Kec Tambung (sekarang Kecamatan Bekasi Timur) Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jl Raya Narogong KM 5,5 Bekasi.	Putusan Tingkat Pertama	1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, 2 Menyatakan Pengadilan negeri tidak berwenang untuk, mengadili perkara aquo ,
157	788/Pdt.G/2014/PN Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	Bidang tanah sesuai SHM No. 4841, seluas 2.400 m2, sesuai Gambar Situasi No 1762/1995 tanggal 11 Juli 1995, terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung, Propinsi Bali, Sebagian bidang tanah sewa Hak Milik Pipil No 67, seluas 1 966 m2, sesuai Akta Sewa-Menyewa Tanah No. 206 tanggal 31 Januari 1990, dibuat dihadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di denpasar	Gugatan Gugur	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
158	891/Pdt G/2014/PN.Sby.	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel Klampisngasem, Kec Sukolilo, Kota Surabaya, SHM No 1076, seluas 47 m2 dan tanah dan bangunan rumah berdiri di atas rumah sewa Kota Surabaya sesuai SIPT No 188 45/1324P/436 6 18/2013 tanggal 18 April 2013, seluas 588 m2, terletak di Kel Baratajaya, Kec Gubeng, Kota Surabaya Jalan Kalibokor Selatan No. 146.	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1 RENDY HERDIANTO HARSO, 2 RR. INDAH WARNIATI tersebut
159	173/Pdt.G/2015/PN JKT PST.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sertifikat Hak Guna Bangunan No 263/Cikini	Putusan PN Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian	Biro Advokasi tidak mengajukan banding karena amar putusan perkara tersebut hanya menghukum Tergugat untuk melakukan roya dan sesuai dengan data dimaksud tidak lagi terdapat kewajiban kepada Negara
160	282/Pdt.G/2015/PN Tnn	Pengadilan Negeri Tondano	SHM No 50/Katingolan, Tondano , SHM No 49/Katingolan dan SHM No 130/Ranowangko	Putusan Kasasi	Menang tingkat kasasi (berdasarkan informasi dari website Mahkamah Agung, namun relaas belum diterima KPKNL Manado)
161	728/Pdt G/2014/PN Jkt Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No 05162/Cilandak Barat, tgl 17 Januari 2000, atas nama H Djuanda seluas 1 984 m2, terletak di Rt 13 Rw 02 (dahulu Rt 04/02) Kel Cilandak Barat, Kec Cilandak Jakarta Selatan	Gugatan Dicabut	**SELESAI**

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
162	04/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	menuntut pembayaran atas 5 (lima) Sertifikat Deposito dan 1 (satu) Rekening Koran atas nama Penggugat, dengan perincian sebagai berikut a Deposito Berjangka, No Seri SB 007061, No 100/10196/10/98, Rp 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) a n PT Wilhara Prima Realty, tertanggal 27 Oktober 1998, b Deposito Berjangka, No Seri SB 008217, No 100/10246/03/99, Rp. 800 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) a n. PT Wilhara Prima Realty, tertanggal 1 Maret 1999, c. Deposito Berjangka, No Seri SB 008261, No. 100/13275/03/99, Rp. 850 000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) a n PT Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999, d Deposito Berjangka, No Seri SB 008263, No 100/10309/03/99, Rp 500 000.000,- (lima ratus juta rupiah) a n PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999; e Deposito Berjangka, No Seri SB 008262, No 100/10308/03/99, Rp 500 000 000,- (lima ratus juta rupiah) a n PT. Wilhara Prima Realty, tertanggal 12 Maret 1999, f Rekening Koran No Rek 100 007056 1-01 6 sebesar Rp 143 600 364, (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh empat	Putusan Kasasi	Menolak Permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT WILHARA PRIMA REALTY tersebut
163	03/Pdt G/2015/PN Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Meminta pembatalan Hak Tanggungan atas tanah seluas 38 029 m2 milik Penggugat yang terletak di Kel Meruya Selatan, Kec Kembangan, Kota Jakarta Barat yang telah dibangun jalan tol yaitu Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II yaitu . hak tanggungan atas SHGB No. 436/Meruya Udik dan SHGB No 442/Meruya Udik	Putusan PN	Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
164	18/Pdt.G/2015/PN Bks	Pengadilan Negeri Bekasi	SHGB No 1/Desa Telaga Murni, Kec Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat seluas 3 760 m2; SHGB No 2/Desa Telaga Murni, Kec Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat seluas 8 168 m2, SHGB No 4/Desa Telaga Murni, Kec Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat seluas 18.430 m2	Putusan Kasasi	Mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi I 1 MENTERI KEUANGAN R I Cq DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN KEKAYAAN LAIN-LAIN, 2 MENTERI KEUANGAN R I Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, Pemohon Kasasi II PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk , dahulu BANK BUMI DAYA tersebut

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
165	102/Pdt Bth//2015/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Sebidang tanah seluas 154 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya SHM No 2276 atas nama Ong David yang terletak di Jl Residen Sudirman No 56A, Kel Pacar Keling, Kec Tambaksari, Kota Surabaya	Gugatan Dicabut	SELESAI
166	152/Pdt Bth/2015/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan SHM No 1355, luas 26 m2, an Ny The Lanny Tedjakusuma, terletak di Jalan Kembang Jepun No 113, Kel Bongkaran, Kec Pabean Cantian, Kota Surabaya, Tanah dan bangunan SHM No. 1751, luas 375 m2, an Ny The Lanny Tedjakusuma, terletak di Jalan Satelit Indah 6/JN 12 Kel Tnjungsari, Kec Sukomanunggal, Kota Surabaya; Tanah dan bangunan SHM No. 1427, luas 39 m2, an Ny The Lanny Tedjakusuma, terletak di Ruko Kartika Ceria Jalan Kembang Jepun No 129 S, Kel Bongkaran, Kec Pabean Cantian, Kota Surabaya, Tanah dan bangunan SHM No 531 an Jo Iskandar terletak di Prop Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec Asemrowo, Kel Asemrowo, Persediaan Barang Dagangan terletak di Ruko Kartika Ceria Jalan Kembang Jepun No 129 S Kel Bongkaran, Kec Pabean Cantikan, Kota Surabaya	Gugatan Dicabut	SELESAI
167	153/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No 84, seluas 276 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya seluas 168 m2, Jalan Desa Beberan, Blok KD Dadap beberan, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, an Yusri Yusuf, SHM No 1296/Mekarsari, seluas 115 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya seluas 163 m2, Perum Kompas Indah, Jalan Trembesi Blok B.5 No 1 Mekarsari, Tambun, Bekasi, an Yusri Yusuf, Dll	Putusan Banding Menang	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard),
168	154/Pdt G/2015/PN Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah milik Adat C No. 286 seluas 2.305 m2, dari Rimin bin Pandjul berdasarkan Akta Jual Beli No 1062/1973 tanggal 28 Juli 1973 yang dibuat dihadapan Kusnadi, Camat/PPAT Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setempat dikenal dengan Cilandak Barat Rt. 004/Rw 002, Kel Cilandak, Kec Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi SHM No 582/Cilandak seluas 2 305 m2, sesuai Gambar Situasi No 1262/1914/1973 tgl 22 08-1973 an H Utas	Proses Peninjauan Kembali	"Putusan PN, tanggal 09 Feb 2016 Menolak gugatan Penggugat Putusan PT No 722/PDT/2017/PT DKI tanggal 15 Feb 2018, yang inti amar putusannya menyatakan ""Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 154/PDT G/2015/PN JKT.SEL , tanggal 9 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut " Putusan Kasasi No 2654 K/Pdt/2018 tanggal 13 Nov 2018, yang inti amar putusannya menyatakan ""Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H. DJUANDA tersebut "



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
169	191/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sertifikat Tanah No 46 GS No. 5940/1990 luas 720 m2, atas nama Ir Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas, Sertifikat Tanah No 47 GS No 5941/1990 luas 720 m2, atas nama Ir Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas, Sertifikat Tanah No 48 GS No 5942/1990 luas 720 m2, atas nama Ir Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas	Gugatan Dicabut	SELESAI
170	265/Pdt G/2015/PN Jkt Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHGB No 358/Meruya Selatan, Jakarta Barat, dengan luas tanah 144 m2 dan luas bangunan 152 m2	Putusan Banding	Nomor 702/PDT/2016/PT DKI tanggal 10 Jan 2017 Amar Putusan M E N G A D I L I Mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat , Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 265/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut, Menghukum para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ,
171	109/Pdt.G/2015/PN.Blb	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Sertifikat tanah No 46 GS No 5940/1990 luas 720 m2, atas nama Ir Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas, Sertifikat Tanah No 47 GS No 5941/1990 luas 4080 m2, atas nama Ir Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas, Sertifikat Tanah No 48 GS No 5942/1990 luas 2000 m2, atas nama Ir Asep Sufwana, di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Bojong Emas	Putusan PN	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
172	126/Pdt.G/2015/PN Cbi	Pengadilan Negeri Cibinong	Sertifikat No. 429/Tengah, luas 22 870 m2, terletak di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, An Grito Sewoyo	Putusan Peninjauan Kembali	Menolak Permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HARYO WIJAKSONO tersebut

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
173	83/Pdt G/2015/PN Tjk	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	a) SHM No. 19, an. Anwar Salim (dh Lim Tjay Goen), Desa Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, b) SHM No 9557, an Teddy Mustopo, Desa Kedamaian, Kec Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, c) SHM No 8979, an Anwar Salim (dh Lim Tjay Goen), Desa Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, d) SHM No. 20, an. Anwar Salim (dh Lim Tjay Goen), Desa Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung, e) SHM No 111, an Vivian Asalli, Desa Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung, f) SHM No 99, an Vivian Asalli, Desa Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung, g) SHM No 9559, an Rudi Mustopo, Desa Kedamaian, Kec Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung, h) SHM No. 9610, an Rudi Mustopo, Desa Kedamaian, Kec Tanjung Karang Timur, Provinsi Lampung, i) SHM No 9562, Desa Kedamaian, Kec Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, j) SHM No 198, Desa Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, k) SHM No 118, Desa Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, l) SHM No. 9558, Desa Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung,	Gugatan Dicabut	SELESAI
174	270/Pdt Bth/2015/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No 4988/Sunter, GS No 1876 Tahun 1985, dan surat surat Oper Pakai atas ruko milik Pembantah, yang terletak di Jl. Krekot Jaya Blok C-II/12 D, Kel Pasar Baru, Kec Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan surat-surat Tanah Bekas Hak Pakai yang terletak di Jl Karang Anyar A VII No.19A Rt 007/07, Kel Kartini, Kec Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Proses Peninjauan Kembali	"Putusan PN, tanggal 16 Feb 2016 Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya Putusan PT No 600/PDT/2016/PT DKI. tanggal 18 Jan 2017, yang inti amar putusannya menyatakan ""Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya"" Putusan Kasasi No 2572 K/PDT/2017 tanggal 16 Nov 2017, yang inti amar putusannya menyatakan ""MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/E RO TA TERSEBUT""

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
175	377/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H.O S Cokroaminoto No. 57 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SHGB No 1499/Gondangdia tgl. 07-12-2012, Surat Ukur No 00012/Gondangdia/2011 tgl 28-09 2011, seluas 930 m2, an Budi Prakoso	Putusan Tingkat Kasasi	Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, 2 PT SUNDAE P R, 3 Hj R AY MONIEK SRIWIDIYATNI, tersebut, - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 243/PDT/2017/PT DKI tanggal 16 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel tanggal 10 Maret 2016
176	680/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No 982/Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Surat Ukur No 00947/2004 tanggal 7 Juni 2004, dengan luas 111 m2, dengan lokasi lahan berada di Jalan Mampang Prapatan (d/h Jl Buncit Raya) RT 002 RW 01, Kel Duren Tiga, Kec Pancoran, Jakarta Selatan, dan SHM No 983/Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Surat Ukur No 00948/2004 tanggal 7 Juni 2004, dengan luas 115 m2, dengan lokasi lahan berada di Jalan Mampang Prapatan (d/h Jl Buncit Raya) RT 002 RW 01, Kel Duren Tiga, Kec Pancoran, Jakarta Selatan	Gugatan Damai	SELESAI
177	362/Pdt.G/2015/PN TNG	Pengadilan Negeri Tangerang	Surat No S 4806/KN/2007	Proses Kasasi Tk Pertama dan Tk Banding Menang	Putusan 362/PDT.G/2015/PN TNG tanggal 17 Mei 2016 DALAM KONPENSI DALAM PROVISI Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ; DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), DALAM REKONPENSI Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I,Tergugat II dalam Konpensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Penggugat dalam Konpensi /T Putusan 75/PDT/2017/PT BTN tanggal 6 September 2017- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 362/Pdt.G/2015/PN TNG tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut, Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
178	101/Pdt G/2015/PN JMR	Pengadilan Negeri Jember	Tanah seluas 691m2 berikut bangunan diatasnya tercatat dalam SHM No. 3265 atas nama Ny Nanik Widowati, terletak di Desa Jember Kidul, Kec Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur	Belum ada pengajuan PK Tk Pertama Kalah Tk Banding Menang TK. Kasasi Menang	101/PDT.G/2015/PN Jmr 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 03/63/Pdt P/2015.PA Jr tertanggal 02 Juli 2015 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Moediarto , 3 Menyatakan, tindakan Para Tergugat melakukan penyitaan atas obyek sengketa dan menerbitkan Pengumuman Lelang Pertama Nomor PENG 01/WKN 10/KNL 03/2015 tanggal 10 Agustus 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum , 4 Menyatakan, rencana pelaksanaan lelang tanggal 8 September 2015 atas obyek sengketa tanah seluas 691 m2 berikut bangunan diatasnya tercatat atas nama Nyonya NANIK WIDOWATI, terletak di Desa Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur oleh Tergugat I melalui Tergugat II adalah cacat proses dan tidak sah menurut hukum , 5 Menyatakan membatalkan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat , 6 Menghukum Para Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa tanah seluas 691 m2 berikut bangunan diatasnya tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 3265 atas nama Nyonya NANIK WIDOWATI terletak di Desa Jember Kidul, Kec Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap , 627/PDT/2016/PT SBY Menolak Gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding Untuk seluruhnya 2059 K /Pdt/2017
179	795/Pdt.G/2016/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	Sertifikat Hak Milik No 1438 tanggal 9 Mei 1986 atas nama Robert Leo terletak di Desa Sarua	Pemeriksaan tingkat banding Tingkat 1 memenangkan Kemenkeu	
180	108/Pdt.G/2016/PNJKT UTR	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Agung Tengah 4 Blok II F 1/1-20, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sesuai dengan SHGB No 5603/Sunter Tahun 1986 seluas 857m2 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Gambar Situasi No 1943/1986 tanggal 12 Juli 1986	Relaas Pemberitahuan Putusan Belum diterima sampai saat ini Biro Bantuan Hukum mendapat Informasi dari Kuasa Penggugat isi dari putusan adalah Pihak PKNSI Menang Tk Pertama Menang	M E N G A D I L I DALAM PROVISI Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima , DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
181	09/Pdt.G/2016/PN LSM	Pengadila Negeri Lhokseumawe		Putusan Kasasi kalah Tk Pertama dan Tk Banding Menang	9/Pdt.G/2016/PN LSM Menolak gugatan penggugat seluruhnya, 34/PDT/2017/PT BNA Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, --- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal.14 Desember 2016 Nomor 9 /Pdt G/2016/PN Lsm yang dimohonkan banding tersebut 609K/PDT/2018 Menagbulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi . ELSON tersebut, Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 34/PDT/2017/PT BNA , Tanggal 14 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksaumawe Nomor 9/Pdt G/2016/PN Lsm Tanggal 14 Desembner 2016, MENGADILI SENDIRI Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, Menyatakan tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum , Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 116/Keude Cunda, luas tanah 8275 m2 terdaftar atas nama Elson (Penggugat) tidak tercatat sebagai agunan yang diambil alih dan tidak sebagai agunan pada PT Sejahtera Bank Umum atau PT SBU (DL), Menghukum dan memerintahkan tergugat I segera dan sekatika menerbitkan sertifikat pengganti atas sertifikat hak milik Nomor 116/Keude Cunda, luas tanah 8275 m2 terdaftar atas nama Elson selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, Menghukum Para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
182	465/Pdt.G/2016/PN JKT SEL	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No, 1239/kebayoran Lama Utara seluas 305 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Prov. DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan kebayoran Lama, kelurahan Kebayoran Lama Utara	Proses PK Tk Pertama, Banding, Kasasi Kalah	Putusan 465/Pdt G/2016/PN JKT SEL tanggal 3 April 2017 DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi tergugat III untuk seluruhnya , II TENTANG POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian , Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menyatakan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No 309/Kebayoran Lama atas nama Idrus Syarif (TERGUGAT I) telah hapus demi hukum atau hak atas tanahnya telah gugur demi hukum, Menghukum TERGUGAT II untuk menghapus pencatatan dalam buku ta Putusan 557/PDT/2017/PT DKI tanggal 20 November 2017. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 April 2017 Nomor 465/Pdt G/2016/PN JKT SEL yang dimohonkan banding, Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Putusan 2708 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018 Menolak Permohonan Ksasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V tersebut;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
183	578/Pdt G/2016/PN JKT PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah SHGB No. 1762, seluas 756m2, terletak di Jl. Permata Hijau Blok EE Nomor 3	Putusan Banding Menang (Sesuai SIPP, relaas belum diterima) Tk Pertama Menang	578/Pdt.G/2016/PN Pn Jkt.Pst Kamis, 04 Mei 2017 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 128/PDT/2018/PT DKI Selasa, 22 Mei 2018 Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 578/Pdt G/2016/PN Jkt Pst , tanggal 04 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ,
184	363/Pdt.Bth/2016/PN MDN	Pengadilan Negeri Medan	Sebidang tanah seluas ± 5564m2 yang terletak di Jalan Dr Mansyur masuk ke Jalan SMK/IKadm/Gg. Merdeka, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 25010/A/II/24 tertanggal 15 Juni 1974	Putusan PN sampai saat ini belum ada pengajuan banding	Putusan 363/Pdt Bth/2016/PN MDN tanggal 1 November 2017 DALAM EKSEPSI . Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV seluruhnya , DALAM POKOK PERKARA Menyatakan pelawan adalah sebagai pelawan yang tidak benar, Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4 981 700,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)
185	1084/Pdt G/2015/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Menanggal Harapan I/18, RT 008/RW 004, Kel Rungkut Menanggal, Kec Gunung Anyar, Kota Surabaya, Prov Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam SHM No. 658 tanggal 21 Oktober 1986, GS No 1159/86 tanggal 21 Januari 1986, luas 197 m2, an. Agustinus Yosep Soegadmo, MS.	**Gugatan Dicabut**	**SELESAI**
186	94/Pdt.G/2015/PN Srg	Pengadilan Negeri Serang	Meminta Pembatalan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tanggal 21 Agustus 2015 No 445/2015.	Putusan Tingkat Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 94/Pdt.G/2015/PN.Srg. tanggal 21 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut	Putusan PN Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
187	210/Pdt G/2015/PN Blb	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Jaminan sebidang tanah dan rumah milik Penggugat yang terletak di Blok Sumur Bandung (setempat dikenal dengan Jl Raya Cilihn No 26 Kampung Sumur Bandung, RT 02 RW 02) Desa Cilihn, Kec Cilihn, Kab. Bandung, dengan luas kurang lebih 235 m2, berdasarkan SHM No 421/Cilihn, Kabupaten Bandung, an. Dayat.	Putusan Tingkat Pertama	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
188	389/Pdt.Bth/2015/PN.Mks	Pengadilan Negeri Makassar	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan, KM 8 No. 32 s/d 34, sebagaimana sesuai SHM No 20256 (Eks No 3201), GS No 10731, luas 200 m2, SHM No 20309 (Eks No 3200), GS No 10730, luas 67 m2, dan SHM No 20310 (Eks No 3208), GS No 10718, luas 33 m2, dengan batas batas keseluruhannya, Utara dengan tanah kosong, Timur dengan Ruko No 35, Selatan dengan Jalanan, Barat dengan Ruko No 31	Putusan Kasasi Menang	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROBERT HENDRIK tersebut
189	14/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Jaminan Kebendaan Sebidang tanah SHGB No 250/Selong, luas 750 m2, an FX Widyastanto Sebidang tanah SHGB No 3/Cikiwul, luas 13 955 m2, an Turut Tergugat I Tiga bidang tanah Tanah adat persil No 214 D Kohir 256, luas 700 m2, an PIIT Bin Iman, milik FX Widyastanto, berdasarkan AJB No 105/FS/594 4/II/1990 tgl 5 Februari 1990, Tanah Milik Adat Persil No. 214 D Kohir No 527, luas 910 m2, an Masir Bin Udi, milik FX Widyastanto berdasarkan AJB No 106/FS/594 4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990, Tanah Milik Adat Persil No 214 Kohir 401 luas 5 000 m2, an H Tajudin Bin Inong, milik FX Widyastanto berdasarkan AJB No. 107/FS/594 4/II/1990 tgl 5 Februari 1990 Sebidang tanah SHM No 162/Menteng, luas 769 m2, an R Gondholpus Doerjat, Jaminan Perusahaan Diberikan oleh Turut Tergugat II Jaminan Perorangan Diberikan oleh FX. Widyastanto	Putusan Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/ Pdt G/2016/PN Jkt Sel tanggal 30 Januari 2017 yang diajukan banding tersebut,	Putusan PN Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
190	21/Pdt G/2016/PN Jkt Bar	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Tanah seluas + 83 Ha, yang terletak di Desa Bojong dan Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, tercatat an PT Pentabinangun Sejahtera yang diperoleh/dimiliki melalui pelepasan hak (SPH) dari pemilik awal/masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No 593 82/SK/231 S/KWBPN/172 90, tertanggal 21 Februari 1990	Pencabutan Perkara Kasasi	SELESAI
191	30/Pdt G/2016/PN Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	Jaminan 22 Unit Ruko berlantai 3, terdiri dari 25 SHM, yang keseluruhannya terletak di Kel Kuta, Kec Kuta, Kab. Badung, Prop Bali atau sekarang dikenal dengan nama Kuta Square	Proses Peninjauan Kembali	Putusan PN, tanggal 19 Sep 2016 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian Putusan PT No 22/PDT/2017/PT DPS tanggal 26 Apr. 2017, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 30/Pdt G/2016/ PN Dps tanggal 19 September 2016, yang dimohonkan banding" Putusan Kasasi No. 2335 K/PDT/2018 tanggal 08 Okt 2018, yang inti amar putusannya menyatakan " Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I HARIJANTO KARJADI", dan "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, tersebut" "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 22/Pdt/2017/PT Dps tanggal 26 April 2017 yang mengutakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 30/Pdt G/2016/PN Dps tanggal 19 September 2016"
192	71/Pdt G/2016/PN Dps	Pengadilan Negeri Denpasar	Jaminan sebidang tanah seluas 5 500 m2, berikut segala turutannya, dengan SHM No 312, atas nama I Ngoha Ridja (Tergugat V) terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	Proses Peninjauan Kembali	Putusan PN, tanggal 26 Sep 2016 : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian Putusan PT No 8/PDT/2017/PT DPS tanggal 14 Mar 2017, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 September 2016 Nomor : 71/Pdt G/2016/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut" Putusan Kasasi : No 55 K/PDT/2018 tanggal 18 Jul 2018, yang inti amar putusannya menyatakan "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG DENPASAR tersebut"; dan "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 14 Maret 2017 yang mengutakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 71/Pdt G/2016/PN Dps tanggal 26 September 2016"
193	60/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Obyek harta warisan milik Penggugat yang berada di Jalan Pintu Air Raya No 15, RT 008, RW 001, Kec Sawah Besar, Jakarta Pusat, SHM No 253/Pasar Baru, seluas 980 m2	Putusan Tk Banding Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 60/Pdt G/2016/PN Jkt Pst tanggal 11 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut .	Putusan PN Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
194	45/G/2016/PTUN.JKT.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi No. S 10215/KN.5/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Tanggapan Atas Permohonan Penebusan Aset Terletak di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat Sesuai SHGB Nomor 1149/Kebon Kacang	Proses Tingkat Kasasi	Putusan PTUN, tanggal 28 Jun. 2016 Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima. Putusan Banding No 282/B/2016/PT TUN JKT tanggal 23 Nov 2016, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2016/PTUN JKT tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah melewati tenggang waktu 90 hari, Dalam Pokok Perkara. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima
195	17/Pdt G/2016/PN Cbi	Pengadilan Negeri Cibinong	Tanah dan bangunan seluas 2 450 m2, SHM No 432/Pabuaran, atas nama Yufrida Siahaan, Gambar Situasi No 5260/1983, tanggal 13 September 1983, terletak di Jl Raya Bogor KM 39 No 44, Kel Pabuaran, Kec Cibinong, Kab Bogor	Putusan Tingkat BandingMenguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 17/Pdt G/2016/PN Cbi yang dimohonkan banding	Nomor Putusan Banding 298/PDT/2017/PT BDG Tanggal Putusan Banding 11 Sep 2017 Amar Putusan Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 17/Pdt G/2016/PN Cbi yang dimohonkan banding, Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Nomor Putusan PN 17/PDT G/2016/PN Cbi Tanggal Putusan PN 03 Nov 2016 Amar Putusan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Pengambilalihan aset properti oleh BPPN/Kemenkeu telah sah dan Pelaksanaan Lelang terhadap aset properti eks BPPN dengan alas hak SHM No.
196	96/Pdt G/2018/PN.Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah dan bangunan rumah, seluas 314 m2, dengan SHM No 262 an Conny Martie Rawung, yang terletak di Kel Sario Utara	Putusan Kasasi Menang	M E N G A D I L I 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DIAN OSIANIA INDONESIA tersebut, 2 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
197	69/Pdt G/2016/PN Blb	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Tanah seluas 6 800 m2, Jl Papan KM 5 No 499, Desa Bojong Emas Majalaya, sebelumnya berdiri bangunan pabrik berkontruksi baja dengan luas + 1 200 m2	Gugatan Dicabut	SELESAI

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
198	03/G/2016/PTUN-PLG	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	SHM No 1845, Desa Talang Kelapa, Tanggal 8 April 1980, GS No 130/1980, tanggal 8 April 1980, luas 117 854 m2, an Dasuki Angkosubroto, terletak di Desa Talang Kelapa, Kec Alang Alang Lebar, Kota Palembang	Putusan Peninjauan Kembali	Putusan PTUN, tanggal 23 Jun. 2016 . Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Putusan Banding No 153/B/2016/PT TUN MDN tanggal 05 Okt 2016, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor , 03/G/2016/P TUN PIG, tangal 23 Juni 2016 Yang dimohonkan banding" Putusan Kasasi No 82 K/TUN/2017 tanggal 06 Mar 2017, yang inti amar putusannya menyatakan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut, Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tersebut tidak dapat diterima" Putusan Peninjauan Kembali No 113 PK/TUN/2018 tanggal 8 Agustus 2018, yang inti amar putusannya menyatakan "Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA"
199	301/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Niaga Hijau II/32, Kel Pondok Pinang, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seluas 200 m2, sebagaimana dimaksud di dalam SHM No 5228/Pondok Pinang, luas 200 m2, atas nama Ir Raden Soepangat Soemarto	Gugatan Dicabut	SELESAI
200	343/Pdt G/2016/PN.Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1. Sebidang tanah seluas 568 m, SHGB No 90/Rawa Bunga, an Alm Tn Darwinto, yang terletak di Jl. Bekasi III No 4, Jatinegara, Jakarta Timur, 2 Sebidang tanah seluas 249 m2, SHGB No 148/Rawa Bunga, an Ny Emmy Sutanto/Penggugat I, yang terletak di Jl. Bekasi III No 7, Jatinegara, Jakarta Timur, 3 Sebidang tanah seluas 912 m2, SHM No 981/Nanggewer, an Andrianto/Penggugat II, yang terletak di Jl Raya Cibinong KM 48 5 Bogor;	Putusan Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi . 1. Tuan ANDRIANTO, 2.Tuan ERWIN dan 3. ERSA NOVITA tersebut
201	381/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah seluas 468 m2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya sesuai SHM No 427/Jatipadang, yang terletak di Jl Pejaten Raya No 48, RT 013/02, Kel Jatipadang, Kec Pasar Minggu, jakarta Selatan	Proses Kasasi Tk Banding Menang Tk Pertama Kalah	
202	138/Pdt G/2016/PN Tjk	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Surat Keputusan (SK) Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Lampung Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas namaÂ Â Â Â PT Jupiter Indah dengan Nomor PJPN 002/PUPNC 07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
203	148/Pdt.G/2016/PN.Pdg.	Pengadilan Negeri Padang	Memberi izin kepada Kantor BPN Kota Padang untuk menghapuskan Hak Tanggungan/MEROYA di dalam SHM No 2125/Kel Flamboyan Surat Ukur No 395 tanggal 23 Desember 1971 an Zanzibar Gelar Datuk Mantari Basa	Putusan PN	Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
204	871/Pdt.G/2016/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Sertifikat Hak Milik (SHM) No 14/Sukomanunggal Gambar Situasi No 79/U/1972 tanggal 10 April 1972 an Chandra Hudaya Widarto	Putusan PN	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterim
205	605/Pdt Bth/2016/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1295, Surat Ukur tertanggal 05 Mei 1998 No 14/1998, seluas 1 192 M2 terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, setempat terkenal dengan Jalan Jeruk No. 01	Proses Kasasi	Putusan PN, tanggal 03 Okt. 2017 Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian Putusan PT No 786/PDT/2018/PT DKI tanggal 27 Mar 2019 yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 605/Pdt Bth/2016/PN Jkt Pst , tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut"
206	71/Pdt G/2016/PN Cbn	Pengadilan Negeri Cirebon	Berupa 23 bidang tanah dan bangunan SHM No 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/Paklipan total seluas 2 435 m2 an Susilawan Suryanatadiredja (d/h Kho Joe Keng) yang terletak di Kompleks Pusat Niaga Jl Pekalipan Kec Pekalipan Kota Cirebon	Putusan PN	Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
207	94/Pdt G/2016/PN Srg	Pengadilan Negeri Serang	Pembatalan Perjanjian Untuk Jual Beli sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Untuk Jual Beli (APJB) No 19 tanggal 18 Januari 1992, yang dibuat oleh Notaris Soetji Mardiyati Solihin, SH, antara Fadilah Muslim alias Fadilah Mus dengan Purnomo ex-Direktur PT Palwaaminatama Jaladri	Putusan PN	Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
208	276/Pdt.G/2017/PN JKT PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sertifikat sertifikat tanah milik penggugat yang terdiri atas. 1 SHGB No 1/Caringin seluas 175 783m2 a n PT Kencana Sinar Semesta 2 SHGB No 3/Caringin seluas 2 270m2 a n PT Kencana Sinar Semesta 3 SHGB No 4/Caringin seluas 675m2 a n PT Kencana Sinar Semesta 4 SHGB No. 5/Caringin seluas 10.330m2 a n PT Kencana Sinar Semesta 5. SHGB No 6/Caringin seluas 2 050m2 a n PT Kencana Sinar Semesta 6 SHGB No 270/Caringin seluas 178m2 a n PT Kencana Sinar Semesta	Putusan 276/Pdt G/2017/PN Jkt Pst tanggal 27 Maret 2018 DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, DALAM POKOK PERKARA, Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 916 000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);	Sudah Putus di Tk Pertama menang, tetapi belum ada upaya banding sampai saat ini sehingga perkara menjadi InkrachtSudah Putus di Tk Pertama menang, tetapi belum ada upaya banding sampai saat ini sehingga perkara menjadi Inkracht
209	256/Pdt G/2017/PN.JKT TIM	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Akta Perjanjian Kredit Nomor 82 tanggal 26 Februari 1998	**256/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim Rabu, 09 Mei 2018 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**	**SELESAI Sudah Putus di Tk. Pertama Menang (Inkracht)**
210	654/Pdt.G/2017/PN JKT PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Deposito Milik Penggugat berikut bunganya yang diperhitungkan sampai dengan tanggal di daftarkannya gugatan ini adalah sebesar Rp 1 713 160 384 139,	**Gugatan Dicabut**	**SELESAI**
211	695/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi No. 10821/1996 27 05-1996 tercatat ayas nama Gunawan Susilo	Proses Kasasi	Putusan PN, tanggal 25 Jan 2018 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankerlijke Verklaard) Putusan PT No 599/PDT/2019/PT DKI tanggal 20 Nov 2019, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut".

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
212	920/Pdt G/2016/PN.Dps.	Pengadilan Negeri Denpasar	Sebidang atas bangunan atas nama I Nyoman Ordi Sugita yang sertifikat an I Gusti Ngurah Oka Budiana, SHM No 1692, luas 3 980 m2, SHM No 1693 luas 1689 m2, SHM No 1694 luas 1069 m2, dan SHM No 1691 awalnya luasnya 2.800 m2, yang dipecah oleh Tergugat III I Gusti Oka Budiana menjadi SHM No 3486 luas 240 m2, dan oleh Tergugat III I Gusti Ngurah Oka Budiana dipecah menjadi SHM No 3487 luas 173 m2, dengan an Tergugat IV (Ersa Nur Arsiah) dari keseluruhannya terletak di Desa Kel. Sumerta Klod. Banjar Sebudi, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali	Gugatan Dicabut	SELESAI
213	132/Pdt.G/2017/PN Jkt Ut.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan seluas 325 m2 dan bangunan seluas 380 m2, SHGB No 6199 beralamat di Jl Pluit Utara VII, No 2, RT 005, RW 005, Kel Pluit, Kec Penjaringan, Kota Jakarta Utara, atas dasar pembelian dari Sdr. Cheong Njin Foe pada tahun 1994, dengan Akta Jual Beli PPAT Abdoellah Hamidy, SH tertanggal 26 8-1994, No. 346/Penjaringan/1994	Kalah Tingkat Pertama dan Banding, menunggu putusan Kasasi	Putusan PN 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2 Menyatakan Penggugat berhak untuk memperoleh salinan terkait dokumen yang hilang dari Tergugat I seperti bukti Surat Keterangan Pelunasan Kewajiban/Surat Keterangan Lunas dari Bank Umum Nasional, Berita Acara Serah Terima Dokumen, Sertifikat Hak Tanggungan dari Surat Roya dan apabila Tergugat I tidak dapat menerbitkan dokumen dimaksud, maka putusan ini berlaku sebagai pengganti dokumen yang hilang karena tidak dapat diterbitkan kembali oleh Tergugat I; 3 Menyatakan Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Tergugat II berdasarkan dokumen yang ada pada Penggugat Putusan Banding Menguatkan putusan PN Aset objek perkara tidak berada dalam penguasaan PKNSI Putusan hakim yang demikian akan sangat membahayakan karena akan menjadi preseden pengajuan gugatan dengan konstruksi yang serupa terhadap aset aset barang jaminan Eks Bank-Bank yang dilikuidasi dan tanggung jawabnya diambil
214	129/Pdt G/2017/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan KH Ashari No 69 B, Jakarta Pusat an Ang Rukiman	Putusan Kasasi Menang	Putusan PN, tanggal 07 Des 2017 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan PT No. 194/PDT/2018/PT DKI. tanggal 26 Jun. 2018, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt G/2017/PN Jkt Pst, tanggal 7 Desember 2017" Putusan Kasasi No 299 K/PDT/2019 tanggal 25 Jan 2019, yang inti amar putusannya menyatakan "Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUHERMAN HARTONO tersebut"

SK No 062858 C

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
215	03/Pdt.G/2017/PN Lsm	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Aset PT Genali Raya yang bergerak di bidang pembangunan perumahan pada tahun 1995 dengan jaminan SHM No 58 yang akan dipecahkan menjadi 149 kaving, yang terletak di Desa Padang Saksti, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, yang sekarang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe	Putusan Kasasi Menang	Putusan PN, tanggal 25 Okt. 2017 . Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian Putusan PT No 20/PDT/2018/PT BNA tanggal 10 Apr 2018, yang inti amar putusannya menyatakan "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 3/Pdt G/2017/PN Lsm Tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding" dan "Menyatakan Gugatan Para Terbanding /semula Para Penggugat Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)" Putusan Kasasi No 3088K/PDT/2018 tanggal 30 Nov 2018, yang inti amar putusannya menyatakan "Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1 AZHAR ZAKARIA, ST 2 ZAKARIA ISHAK, S.Pd. M. BASRI YUSUF tersebut"
216	886/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 223/Rawa Barat, seluas 340 m2, terletak di Jalan Suryo No 16 Blok Q/3 Persil No 19, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Putusan PN Menang	PERKARA LELANG HT
217	385/Pdt G/2017/PN Jkt Brt	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	SHGB No 6211 atas nama PT Karsindo Utama	Proses Banding Tk Pertama Menang	
218	436/Pdt.G/2017/PN Bks	Pengadilan Negeri Bekasi	Memerintahkan Kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat HAK GUNA BANGUAN No 1/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sertifikat HAK GUNA BANGUAN No. 2/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan sertifikat HAK GUNA BANGUAN No 4/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Proses Kasasi	Putusan PN, tanggal 04 Jul 2018 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard). Putusan PT No 601/PDT/2018/PT.BDG tanggal 28 Feb. 2019, yang inti amar putusan menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 04 Juli 2018, Nomor 436/Pdt G/2017/PN Bks , yang dimohonkan banding tersebut"
219	176/Pdt G/2017/PN Dpk	Pengadilan Negeri Depok	Tanah seluas + 6 778 059 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cimanggis, dengan Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru Lw Naggung, Jati Jajar, Cimpaeum dan Sukatani, yang dikelola untuk pembangunan perumahan dan Golf Course dengan nama EMERALDA.	Menang Tk. Kasasi	Putusan PN, tanggal 19 Apr 2018 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian Putusan PT No 407/PDT/2018/PT.BDG tanggal 30 Okt. 2018, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 April 2018, Nomor 176/Pdt/G/2017/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut" Putusan Kasasi Membatalkan Putusan tingkat Banding dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Aset tetap dapat diserahkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Penitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
220	498/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebuah tanah dan bangunan sesuai SHGB No.. 1712/Cideng, luas 75M2 (Gambar situasi No 971/1991, tanggal 31 08 1991), atas nama Penggugat, yang terletak di Jl KH Hasyim Asharı Blok D 1 No 9, Kel Cideng, Kec Gambir, Jakarta Pusat	Putusan Banding. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2018 Nomor 498/Pdt.G/2017/PN JKT PST, yang dimohonkan banding tersebut Putusan PN. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke	aset tetap dapat dipertahankan walaupun tanpa adanya penguasaan sertifikat objek sengketa
221	637/Pdt G/2017/PN Bks	Pengadilan Negeri Bekasi	Tanah seluas 25 644 m2, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Sultan Hasanudin, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tanah ex SHGB No 1/Mekarsari atas nama PT Jembatan Kencana Raya.	**Gugatan Dicabut**	**SELESAI**
222	637/Pdt G/2017/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement ("MSAA") 21 September 1998 dan perubahannya	Putusan Banding Menang Tk. Pertama Menang	
223	1006/Pdt G/2017/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Pemberian Hak Penebusan atas Penggugat terkait penyelesaian pengambilan kembali Obyek Jaminan atas luas tanah seluas + 3 000 M2 sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 /Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagaimana Gambar Situasi Tanggal 10 April 1972 Nomor . 79 /U/1972 yang dahulu pernah dijaminkan pada PT Bank Umum Servitia tbk sebagai bagian Bank yang terlikuidasi	Proses Kasasi Tk Banding Menang Tk Pertama Menang	
224	4/Pdt.G/2018/PN Plg	Pengadilan Negeri Palembang	SERTIPIKAT HAK MILIK No. . 5/Desa Gasing, dengan GAMBAR SITUASI No. . 296/Desa Gasing /1972, yang terletak di Jalan Pangeran Ayin No. . 28 RT. 06 RW 03, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Seko, Kota Palembang, dahulu di Jalan Kebun Sayur atau Jalan Suka Maju, Kenten Laut, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Putusan Tingkat Kasasi (Menang)	Putusan Tingkat Banding No. 99/PDT/2018/PT.PLG. tanggal 25 Okt 2018, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pdt G/ 2018/PN.Plg. tanggal 28 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut" Putusan Tingkat Kasasi No 1727 K/PDT/2019 tanggal 26 Agu 2019, yang inti amar putusannya menyatakan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JENDY GOZALI tersebut".

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
225	501/Pdt.G/2018/PA Bjr	Pengadilan Agama Banjar	SHM 566, SHM No 568, SHM No 576, SHM No 5 di Blok G Gembok, Dusun panantjung, Desa Mulyasari, Banjar, Ciamis	Putusan Banding	Putusan Tk Pertama, tanggal 20 Mei 2019 "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)" Putusan Banding No 171/Pdt G/2019/PTA Bdg. tanggal 15 Agu 2019, yang inti amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 501/Pdt G/ 2018/PA Bjr tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah"
226	17/pdt G/2018/PN JKT PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sebidang Tanah seluas 144 m2 beserta bangunan yang terletak di Perumahan Citra Indah Cluster Bukit Bougenvile Blok AI 10/03 Kelurahan Singaraja, Kecamatan jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai dengan SHGB No 7702/Singajaya	Tk Kasasi menang Tk Banding Menang Tk Pertama Menang	17/Pdt G/2018/PN Jkt Pst Selasa, 11 Des 2018 170/PDT/2019/PT DKI Rabu, 15 Mei 2019 Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 17/Pdt G/2018/PN.Jkt Pst , tanggal 11 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ; 729 K/PDT/2020 Jumat, 15 Mei 2020 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah)
227	287/Pdt.G/2018/PN JKT PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan Jl Kelapa Dua Wetan No 99, Ciracas, jakarta timur	Putus di Tk Pertama Menang (Inkracht)	**SELESAI**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
228	295/Pdt.G/2018/PN.CBI	Pengadilan Negeri Cibinong	SHGB No 182/Wanaherang	Proses Kasasi Tk Pertama dan Banding Menang	Putusan 295/Pdt.G/2018/PN CBI tanggal 10 Sep 2019 . Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3 601 000,- (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah), Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya Putusan 578/PDT/2019/PT.BDG tanggal 30 Jan 2020 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 September 2019 Nomor 295/Pdt G/2018/PN Cbi yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat III, Dalam Pokok Perkara - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, - Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 5 730.000 000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah); - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
229	422/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No 1762/Grogol SAPB (Sistem Aplikasi Pengganti Bunysus) atas nama PT Satria Tri Perkasa	Proses Tk Banding Pada Putusan Tk Pertama Status Menang	**Putusan Tk Pertama** Putusan PN, tanggal 30 Jul 2019, Amar Putusan MENGADILI: Menyatakan gugatan Para Penggugat TN ANTHONY SUMITRO RAHARDJO, dan NY GRACE LOEKMAN tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4 521 000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah),

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
230	185/Pdt G/2018/PN Cbi	Pengadilan Negeri Cibinong	SHGB No. 181/Wanaherang seluas 9933 m2 atas nama PT Permitra Andalan Semesta	Putusan Tk. Pertama (Putusan Sela, mengabulkan eksepsi kompetensi absolut)	Amar Putusan 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata No 185/Pdt G/2018/PN Cbi, 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp 1 936.000, (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
231	56/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Somasi permintaan pencabutan pemblokiran atas aset yang diklaim milik Penggugat, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 03639/Wijaya Kusuma, seluas ± 1 038 m², yang terletak di Jl Daan Mogot Km.2 No. 50B	Gugatan Dicabut	SELESAI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
232	861/Pdt.G/2018/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	Tanah dan Bangunan Seluas 180 M2 (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi), Yang Terletak di Perumahan Bumi Serpong Damai Blok BL/24, Desa Rawabuntu, Kec Serpong, Kab. Tangerang, Jawa Barat, atas nama Tan Joen Lie (Penggugat) Sebagaimana Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No 3187/Rawabuntu, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi No 5772/1994, tanggal 11 Mei 1994	Putusan Tk. Pertama Catatan Setelah diteliti lebih lanjut diketahui pokok pokok pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Tangerang sebagai berikut a Pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a quo (SHGB No 3187/Rawabuntu) Majelis Hakim berpendapat **pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang perundangan yang berlaku** sehingga Tergugat in casu Kementerian Keuangan c.q DJKN tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan demikian petitum Penggugat yang menyatakan meminta objek perkara a quo diserahkan kepadanya tidak dapat diterima, b Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo, **semua petitum Penggugat tidak dapat diterima** kecuali petitum nomor 9 yang dikabulkan yaitu yang menyatakan memerintahkan Turut Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang agar tunduk pada putusan a quo,	Amar Putusan . M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya, DALAM POKOK PERKARA · Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Memerintahkan agar Turut Tergugat tunduk pada putusan a quo, · Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima, · Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp 680 000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Status Kemenkeu menang dikarenakan kemenkeu dalam perkara a quo tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan kemenkeu tidak dihukum dalam perkara a quo, Sesuai informasi dari kepaniteraan PN Tangerang, terhadap putusan perkara dimaksud, diperoleh informasi bahwa Penggugat belum melakukan upaya hukum Banding Terhadap putusan perkara a quo, sudah dilaporkan kepada atasan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
233	277/G/2018/PTUN JKT	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Surat Nomor . S 806/KN.5/2017 tanggal 9 Juni 2017, tentang Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero)	Kontra Memori PK disampaikan 19 Agustus 2020, menunggu putusan PK Tk Pertama Kalah Tk Banding Menang Tk Kasasi Menang	Putusan PTUN, tanggal 16 Mei 2019 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Putusan Banding No 242/B/2019/PT TUN JKT tanggal 23 Sep 2019, yang inti amar putusannya menyatakan "Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 277/G/2018/PTUN JKT, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding" Putusan Kasasi : No 87 K/TUN/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang inti amar putusannya menyatakan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KARYA INTERTEK KENCANA (KIK)" Objek sengketa dan pengamanan terhadap SHGB Nomor 1431/Wijaya Kusuma tetap sah dan berlaku. Selain itu, sesuai pertimbangan hukum judex juris Mahkamah Agung pada pokoknya bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata in casu Penggugat, karena objek sengketa tidak menyatakan suatu hak baru atau menghilangkan suatu hak
234	24/Pdt Plw/2018/PN Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tanah dan bangunan milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 41 Gambar Situasi Nomor 642 Tahun 1992, yang terletak di Jalan Letjen suprapto No 160 Blok SA No 10, Cempaka Baru Jakarta Pusat, atas nama Treeswaty Lanny Susatya	Proses Tk. Banding Pada Putusan Tk Pertama Status Menang	**Putusan Tk. Pertama** Tanggal Putusan 30 Apr 2019 Amar Putusan : Menyatakan Para Terlawan tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dengan Verstek, Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.9 921.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
235	288/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	i Hak Guna Bangunan Nomor 204/Desa Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 19 November 1992 Nomor 8265/1992, seluas 4 750 m2; ii Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Desa Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 7 Juni 1991 nomor 3600/1991, seluas kurang lebih 9 800 m2; iii Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/Desa Kuta dan Gambar Situasi tertangal 15 April 1993 nomor 1253/1993, seluas kurang lebih 3 375 m2	Proses Tk Kasasi Pada Putusan Tk Pertama: Status Menang Pada Putusan Tk Banding Status Menang	**Putusan Tk. Banding** Nomor Putusan Tk Banding . 555/PDT/2019/PT DKI Tanggal 10 Okt. 2019 Amar Putusan M E N G A D I L I 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 288/Pdt G/ 2018/PN Jkt Sel, tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut, 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
236	266/Pdt G/2018/PN Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebagian tanah berikut bangunan di atasnya berupa 1 (satu) unit rumah pertokoan/perkantoran seluas 338 m2, yang terletak di Jalan Melawai IX No 10 C Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No 323/Melawai a n PT Bunga Setangkai	**Gugatan Dicabut** **Perkara Selesai** Status Menang	Gugatan Dicabut pada tanggal 24 Apr 2019 Amar Putusan MENETAPKAN Menyatakan gugatan Penggugat gugur , Mencoret perkara perdata No 266/Pdt G/2018/PN Jkt-Sel dari register ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.941.000 (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
237	484/Pdt G/2018/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah yang terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2940 ("Sertifikat") dengan luas 5 170 m2 (lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di desa Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten (dahulu Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat)	Putusan Tk Banding Status Menang	**Putusan Tk. Banding** Nomor Putusan Tk. Banding : 444/PDT/2019/PT.DKI. Tanggal 28 Agu. 2019 Amar Putusan Tk Banding Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat , Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/PDT G/2018/PN.Jkt Sel tanggal 27 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , **Putusan Tk. Pertama** Tanggal Putusan, 27 Feb. 2019 Amar Putusan MENGADILI: DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1 576 000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
238	372/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 938/Grogol Utara yang terletak di Jl Platina/Jl Uranium Blok B Nomor 23-26 Permata Hijau Kel Grogol Utara, Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Proses Tk Kasasi Pada Putusan Tk Pertama: Status Kalah Pada Putusan Tk Banding Status Kalah	<u>Putusan Tk. Banding</u> Nomor Putusan Tk Banding 604/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 03 Desember 2019 Amar Putusan MENGADILI • Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Tergugat II, • Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 372/Pdt G/2018/PN Jkt Brt , tanggal 18 Maret 2019, sekadar mengenai Amar Putusan Point 3, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut. DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, DALAM POKOK PERKARA • Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, • Menghukum kepada Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 266/Mangga Dua Utara kepada Penggugat, apabila ternyata Sertifikat HGB No. 266/Mangga Dua Utara berserta objek tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHGB No 266/Mangga Dua Utara tidak dapat dikembalikan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan atau Tergugat II), maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengganti harga tanah dan bangunan di atasnya yang tercatat dalam SHGB No 266/Mangga Dua Utara tersebut sebesar Rp 60 000 000 000, (enam puluh miliyar rupiah) dan ganti rugi akibat tidak dapat dimanfaatkannya bangunan Gedung untuk disewakan sejak tahun 2004 hingga bulan Mei 2018 sebesar Rp. 37 199 789 037, (tiga puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah), • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi bunyi amar Putusan ini terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap, • Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada amar Putusan ini, • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, • Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
239	525/Pdt.G/2018/PN.Jkt Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah hak guna bangunan seluas 2.333 m2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Permata Hijau Raya, Blok AA, Persil Nomor 8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tercatat atas nama William Supit (Tergugat II), sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 791/Grogol Utara yang diterbitkan Kantor Agraria Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 1980 dengan Gambar Situasi Nomor 146/2621/1980 tanggal 3 November 1980, berikut bangunan yang ada diatasnya,	**Gugatan Dicabut Perkara Selesai** Status Menang	Gugatan Dicabut pada tanggal 09 Januari 2019 M E N E T A P K A N Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas , Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 525/Pdt G/2018/PN Jkt Sel dicabut , Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu , Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 9 706 000, (sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
240	518/Pdt.G/2018/PN Tng	Pengadilan Negeri Tangerang	Tanah dan Bangunan Seluas 180 M2 (Seratus Delapan Puluh Meter Persegi), Yang Terletak di Perumahan Bumi Serpong Damai Blok BL/24, Desa Rawabuntu, Kec Serpong, Kab Tangerang, Jawa Barat, atas nama Tan Joen Lie (Penggugat) Sebagaimana Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No 3187/Rawabuntu, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi No 5772/1994, tanggal 11 Mei 1994	**Gugatan Dicabut Perkara Selesai** Status Menang	Gugatan Dicabut pada tanggal 24 Oktober 2018 Amar Putusan M E N E T A P K A N Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan perkara No 518/Pdt G/2018/PN TNG oleh Penggugat , Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara , Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.551.000 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
241	446/Pdt.G/2018/PN Bks	Pengadilan Negeri Bekasi	Sebidang tanah dan bangunan berupa Gudang yang terletak di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kecamatan Cibitung) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Proses Tk. Banding Pada Putusan Tk Pertama Status Menang	**Putusan Tk. Pertama** Tanggal Putusan 29 Juli 2019 Amar Putusan MENGADILI DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi para Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat II , DALAM KONPENSI Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima , Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2 475 000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
242	489/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB Nomor 1418/Tomang (an. Haji NISWAR)	Putusan Tk Banding Status Menang	**Putusan Tk. Banding** Nomor Putusan Tk Banding 678/PDT/2019/PT DKI Tanggal 09 Januari 2020 **Amar Putusan:** MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, DALAM EKSEPSI Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2019 Nomor 489/Pdt G/2018/ PN Jkt.Pst, yang dibanding tersebut , DALAM POKOK PERKARA Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2019 Nomor 489/Pdt G/2018/ PN Jkt Pst, yang dibanding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam peradilan tingkat banding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , **Putusan Tk. Pertama** Tanggal Putusan . 20 Jun. 2019 **Amar Putusan:** MENGADILI: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
243	559/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Tanah di perumahan Permata Hijau	Gugatan Dicabut **Perkara Selesai** Status Menang	Gugatan Dicabut pada tanggal 13 Nov 2018 Amar Putusan M E N E T A P K A N Menerima pencabutan perkara Nomor 559/Pdt G/2018/PN Jkt Sel. yang diajukan Penggugat secara lisan pada tanggal 13 Nopember 2018 , Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mencatat perihal pencabutan perkara Nomor 559/Pdt.G/2018/ PN Jkt Sel dan mencoretnya dari register perkara, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000, (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah),
244	470/Pdt G/2019/PN DPS	Pengadilan Negeri Denpasar	Sedang Tanah dengan SHM Nomor 507 dengan gambar situasi, No 8573/1991, tanggal 31 Desember 1991 seluas 56850m2, terletak di desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	Menang Tk Pertama, Proses banding	470/Pdt.G/2019/PN Dps Senin, 27 Jul 2020 Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
245	316/Pdt G/2019/PN Jkt Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB Nomor 1712/Cideng, luas 75 m2 di Jalan KH Hasyim Ashari Blok D 1 No 9 Kel Cideng Kec Gambir Jakarta Pusat	Proses Banding Tk Pertama Kalah	Telah diputus Tk Pertama 30 Juni 2020, gugatan dikabulkan. Telah dinyatakan banding pada tanggal 10 Agustus 2020 Sedang menunggu putusan banding Apabila dikalahkan dan berkekuatan hukum tetap makan terdapat potensi hilangnya aset negara senilai Rp5 308 571 429,00 sesuai Daftar Nominatif yang dimiliki oleh Dit PKNSI
246	604/Pdt G/2019/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	11 bidang tanah seluas 779 804 m2, SHGB 3/Desa pematang, SHGB 4, SHGB 5, SHGB 6, SHGB 7, SHGB 8, SHGB 9, SHGB 10SHGB 11, SHGB 12, SHGB 13 di desa pematang, kec kragilan, kab serang, banten	Saksi dari Penggugat	

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
247	196/Pdt G/2018/PN Bpp	Pengadilan Negeri Balikpapan	SHM No. 966 a n Drs. H. Andi Syarifuddin, MBA, SHM No 741 a n Drs H Andi Syarifuddin, MBA, SHM No 964 a n Drs H Andi Syarifuddin, MBA, SHM No 965 a n Drs H Andi Syarifuddin, MBA, SHM No 963 a n Drs H Andi Syarifuddin, MBA, SHM No 157 a n Arief Budiharyanto, SHM No 8 a n Drs H Andi Syarifuddin, MBA, SHM No. 63 a.n Arief Budi Haryanto, SHM No. 1526 a n Drs. H. Andi Syarifuddin, MBA, Surat Pelepasan Hak No 593.62 83/432/PH CBU/GSD/94 dengan luas 50 265 m2 tanggal 20 maret 1994, Surat Pelepasan Hak No 593.62 83/433/BH CBU/GSD/94 dengan luas	Menang Tk Pertama, Menang Tk Banding	Menang Tk. I (Putusan NO), Menang Tk. Banding Menguatkan Putusan Tk. I. Aset tetap dapat dipertahankan
248	79/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 314/Srengseng Sawah Jakarta Selatan Tahun 1991.	Menang Tk. I	Kompetensi Absolut dikabulkan (inkracht) Aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 314/Srengseng Sawah Jakarta Selatan berhasil dipertahankan
249	22/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 691 beralamat di Jalan Tanah Kusir II Blok H 6 (d/h Dharma Putra H6) Rt 010/09 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang tertulis atas nama Hengky Maulana	Gugatan Dicabut	SELESAI
250	349/Pdt G/2019/PN Jkt Pst	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	SHGB No 90/Rawa Bunga seluas 568 m2 atas nama Darwinto; SHGB No 149/Rawa Bunga seluas 249 m2 atas nama Ny Emmy Sutanto, SHM No 981/Nanggewer seluas 912 m2 atas nama Andrianto	Proses Kasasi Kalah Tk. I Kalah Tk Banding	Memori Kasasi diajukan 8 Juli 2020 Permohonan roya oleh debitur tidak dapat dikabulkan karena aset tidak dalam pengelolaan Kementerian Keuangan
251	621/Pdt.G/2019/PN Mdn	Pengadilan Negeri Medan	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 496 Tanggal 6 November 2001 (dahulu Sertifikat Hak Pakai Nomor 289)	Menang Tk. I	Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Aset berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 496 Tanggal 6 November 2001 (dahulu Sertifikat Hak Pakai Nomor 289) berhasil dipertahankan
252	647/Pdt.G/2019/PN Mdn	Pengadilan Negeri Medan	Tanah seluas 71 125 m2 yang terletak dalam kota medan, kecamatan medan labuhan, desa pekan labuhan deli	Putusan tanggal 7 Januari 2021	Belum ada Putusan Dampak bila kalah Beralihnya SHM 07 (yang merupakan Aset Eks BPPN) ke Penggugat
253	78/Pdt.G/2019/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah beserta bangunan, tercatat Sertifikat HGB Nomor 3 Luas 453 m2 a n Hadi Proyogo Wahyudi terletak di Kel Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya	Gugatan Penggugat tidak dapat diterima	inkracht

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
254	79/Pdt.G/2019/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	Tanah beserta bangunan, tercatat Sertifikat HGB Nomor 3 Luas 453 m2 a n. Hadi Proyogo Wahyudi terletak di Kel Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya	Gugatan Penggugat tidak dapat diterima	inkracht
255	147/Pdt G/2019/PN JKT SEL	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	SHM No 1762/Grogol Utara an Grace Loekman yang terletak di Jalan Permata Hijau Blok EE/9 RT/RW 001/004, Kelurahan Grogol Utara Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Menang Tk Pertama	Sampai saat ini belum ada upaya hukum banding Putusan 147/Pdt G/2019/PN JKT SEL tanggal 10 Februari 2020· DALAM EKSEPSI · Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel) ; DALAM POKOK PERKARA . Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) , Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 8.166 000 000, (delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah),, DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel) ; DALAM POKOK PERKARA . Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) , Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 8.166.000.000 - (delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
256	674/Pdt G/2019/PN DPS	Pengadilan Negeri Denpasar	SHM No 337 Gambar Situasi tanggal 28-2-1994, No 992/1994, Luas 5150m2	Gugatan dicabut	SELESAI
257	10/Pdt G/2019/PN BJR	Pengadilan Negeri Banjar	Sebidang Tanah darat tercatat dalam SHM No 566, 565, 576, 5 yang terletak di Blok G Gambok, Dusun Pananjung, Desa Mulyasari, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis	Tk Pertama dan Banding Menang	Putusan 10/Pdt G/2019/PN.BJR tanggal 11 Februari 2020 DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Dalam Pokok Perkara · 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum 3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, DALAM REKONVENSI ? Menyatakan Gugatan Tergugat VII / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ? Menghukum Tergugat I, Tergugat IV untuk membayar biaya segala yang timbul dalam perkara ini yang hingga diperhitungkan sejumlah Rp. 5 057 000, (lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah). Putusan 268/PDT/2020/PT.BDG tanggal 24 Juni 2020 menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 10/Pdt G/2019/PN BJR tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ·Putusan PT sudah diberitahukan pada tanggal 13 Juli 2020 kepada Para Pihak
258	462/Pdt.G/2019/PN JKT.PST	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	4 SHM No. 35, 43, 76, 124 Desa Kelapa Dua Wetan, Pasar Rebo, Jakarta Timur	Menang Tk Pertama	462/Pdt G/2019/PN Jkt Pst Selasa, 22 Sep 2020 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
259	2/Pdt G/2020/PN Kla	Pengadilan Negeri Kalianda	SHM No 1/Desa Sumur Kumbang seluas 42.600 m2, yang terletak di Jalan Desa Sukatani RT/RW 02/03, SUkatani, Kalianda a n CV Sono Keling	Kalah Tk I	Memori Banding Telah Diserahkan Ada kesempatan bagi Penggugat untuk mencairkan dana konsinyasi yang telah dititipkan oleh TTIII di PN Kalianda berdasarkan penetapan konsinyasi yang ada

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 25.H

DAFTAR ASET BERPERKARA EKS. BPPN/EKS. PPA/EKS. BDL YANG DITANGANI OLEH BIRO ADVOKASI (dh. BIRO BANTUAN HUKUM) SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Nomor Perkara	Panitera Pengadilan	Objek Perkara	Status Penanganan Perkara/ Posisi Kasus Terakhir	Keterangan
260	437/Pdt G/2020/PN.Jkt Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak SHM No. 691, yang terletak di Jalan Tanah Kusir II Blok H Nomor 6 RT 010/RW 09, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Mediasi	Mediasi 5 Januari 2020
261	154/Pdt G/2020/PN CBI	Pengadilan Negeri Cibinong	Objek yang terletak di Persil No 04, Blok 012, Kampung Gn Leutik, Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Seluas ± 62 000m2	Pemeriksaan Setempat	
262	540/Pdt.G/2020/PN Mdn	Pengadilan Negeri Medan	Sebidang tanah dengan luas ±4380m2 sebgaimana tertuang pada Surat Keterangan Tanah Nomor 591.1/9/SKT/M/1991 tanggal 6 September 1991 oleh Kelurahan Tanjung Rejo, terletak di Jalan Sei Belutu Lingkungan VII, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Pemanggilan Para Pihak	
263	181/Pdt G/2020/PN Dpk	Pengadilan Negeri Depok	SHGB No 257/Cipayung Jaya atas nama PT TJITAJAM dengan Pengesahan Akta Pendirian tertanggal 12 Agustus 1996	Pemanggilan dan Mediasi apabila para pihak lengkap	
264	171/G/2019/PTUN JKT	PTUN Jakarta	Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PJPN-09/PUPNC 10 01/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono tanggal 23 Mei 2019	Kalah Tk. I, Kalah Tk Banding, Proses Kasasi Telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 21 September 2020 dan menunggu putusan Kasasi	Dampak putusan apabila dikalahkan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka proses pengurusan piutang negara kepada para obligor PT Bank Asia Pacific tidak dapat ditagihkan dan PUPN tidak dapat menerbitkan PJPN sebagai proses penagihan kepada obligor PT Bank Asia Pacific yang ditaksirkan sebesar Rp3.579.412 035 913,11 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah dan sebelas sen)
265	52/Pdt G/2018/PN Lbp jo 140/PDT/2019/PT Mdn	Lubuk Pakam/Medan	SHM No 9 dan No 13 a n Budi Suyono, SHM No 8, No. 10, No 11, No 12 a n Bangun Siregar	Kalah Tingkat Pertama, Menang Tingkat Banding, Menunggu putusan Kasasi	Putusan PN Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan objek sengketa; Menyatakan Berita Acara Penyitaan PUPN tidak sah dan berkekuatan hukum, Menghukum T 1 untuk menyerahkan SHM dan tanah objek sengketa dalam keadaan baik; Putusan Banding Membatalkan putusan PN, Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya Apabila kalah, aset tidak dapat dieksekusikan

LAMPIRAN 26
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

LAMPIRAN 26

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	267.389.237	2.211.095.190	-	-	48.044.558	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.591.366.113	4.761.291.336	3.091.652.239	4.417.868.884	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.357.134.523	63.624.154.354	2.307.177.053	1.689.080.325	-	1.979.850
4	005	MAHKAMAH AGUNG	29.406.402.787	32.063.223.376	1.034.415.014	1.184.068.053	-	-
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	411.728.557.269	362.711.718.337	277.182.857	316.645.746	5.210.894	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	107.671.875.129	134.857.515.116	50.063.025.860	62.210.464.141	3.136.698.573	3.372.583.154
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	132.435.037.840	15.900.155.128	2.909.872.933	5.244.269.447	-	17.811.505
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	336.814.497.283	350.592.296.261	2.087.594.916	578.664.833	58.719.733	85.745.636
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	8.931.310.278.863	8.014.239.128.063	1.151.441.736.898	1.164.212.773.960	-	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	32.376.416.169	64.435.234.760	485.306.124.011	430.662.482.004	4.527.700	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	4.059.680.628.081	866.046.141.211	52.076.911.619	87.794.965.558	9.620.724.541	9.704.380.143
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	8.851.118.451	295.808.434.356	2.593.445.439	5.102.190.855	-	-
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	10.583.258.267	30.267.344.663	23.475.383.003	27.813.881.634	1.668.500	101.858.681
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.461.333.441	36.898.011.578	28.004.827.139	23.432.344.332	330.776.224	781.442.436
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	207.804.806.903	562.452.924.944	25.380.483.667	21.025.467.934	-	108.614.356
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	822.221.317.217	508.057.767.851	669.577.183.654	2.383.551.950	680.208.586	421.038.089
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.777.694.463.196	2.421.240.720.944	74.300.899.668	74.168.610.467	2.554.455	30.997.279
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	345.826.785.993	244.933.936.997	36.269.723.662	33.103.950.454	1.211.041.449	1.926.065.946

SK No 062880 C

LAMPIRAN 26

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	549.239.680.608	992.265.029	502.568.321.890	618.277.435.260	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	10.105.471.898	4.702.361.654	441.580.113	1.967.279.648	21.131.781	10.341.818
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.358.246.841	7.762.110.766	72.155.654.616	3.784.346.489	27.211.870	282.653.560
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.769.067.313	8.944.099.065	5.324.054.104	3.525.392.023	12.373.593	25.267.463
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	924.801.092.095	1.232.905.334.297	14.313.705.201	16.627.111.769	-	88.798.376
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	60.446.076	168.247.453	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	5.099.815.438	4.606.249.808	-	-	2.185.327	78.445.027
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	335.582.730	369.920.663	-	-	26.839.130	180.462.613
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	4.832.257.683	14.675.892.027	2.737.566.839	3.020.787.757	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	2.468.333.417	102.881.340	7.147.613.212	3.278.144.675	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	5.511.328.997	717.454.462.210	2.812.373.059	512.887.479.869	3.752.055	4.897.443.675
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	6.923.950.734	7.230.000.821	11.707.078.257	13.277.548.984	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	100.000.000	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	6.304.972.806	533.790.332	-	-	41.752.369	2.514.559
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	22.299.758.339	20.754.009.936	919.437.417	1.149.557.917	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.774.195.199	1.098.612.286	-	-	1.625.000.000	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	337.177.139	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	84.620.329.105	81.489.985.473	424.760.421	168.876.626	22.935.737	2.603.458
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	2.107.379.659	4.546.685.157	82.513.583	197.392.416	9.773.865	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	35.247.018.501	81.739.452.684	448.577.290.459	407.198.535.144	-	71.888.966
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	31.718.097	33.745.395	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	111.549.332.843	77.535.296.413	58.851.177.427	11.011.826.851.692	43.919.739	4.213.620
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	439.082.836.096	528.076.509.868	19.134.545.629	20.156.714.388	742.357.262	11.082.251.743
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.150.298.834	3.162.277.457	19.569.746.704	25.702.335.439	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	527.169.875	940.771.942	1.611.678.581	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.009.185.595	1.687.019.513	1.207.261.369	863.863.762	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.112.955.688	2.947.169.047	-	3.877.500	-	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	16.440.891.026	7.317.993.160	817.445.416	353.000.000	-	1.178.000
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	71.050.938.228	75.504.231.305	1.033.771.417	463.760.517	20.516.000	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	453.748.766	219.204.864	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.621.448.405	2.207.698.304	-	-	8.795.020	3.780.165
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	7.454.422.648	4.987.117.537	-	-	6.013.934.608	264.256.292
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	623.909.676	665.797.147	1.651.633.667	1.062.650.319	-	-

SK No 062878 C

LAMPIRAN 26

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	388.947.555	810.628.363	5.255.420	17.868.416	2.176.160	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.949.942.844	1.990.916.664	1.163.648.271	-	17.242.301.683	699.814.495
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	2.927.239.781	3.274.842.761	65.362.667	124.806.600	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	43.951.493.443	32.655.147.128	-	308.800.000	612.601.754	646.514.629
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	26.907.515.443	1.149.792.663	76.226.875	79.790.375	-	1.762.909
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.483.326.368	3.612.318.230	23.043.970	46.037.470	-	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	558.493.383	4.938.805.832	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	3.766.271	66.956.370	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	252.609.477	202.533.880	275.588.208	1.548.058.622	-	18.792.186
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	620.664.028	781.858.417	96.591.516	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.537.404.551	1.544.968.188	533.658.360	339.543.666	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.614.798.622	4.200.679.957	1.133.999.918	459.705.249	-	200.650
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.381.535.316	2.873.544.164	771.898.887	1.298.667.399	12.514.101	88.653.324
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	568.695.833	13.588.327.008	260.776.921	497.388.718	22.008.427	310.000
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	14.163.958.609	32.801.376.924	28.393.802	63.064.556	314.285.923.225	288.030.698.611
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.319.830.347	7.880.785.685	-	-	201.263.280	134.546.994
68	100	KOMISI YUDISIAL	171.071.065	146.394.569	14.021.667	81.052.667	-	4.266.989
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.450.990.883.443	13.508.814.110	684.351.000	65.985.000	2.225.390.510	13.990.712.750

SK No 062877 C

LAMPIRAN 26

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	596.222.978	4.645.309.793	51.984.750	83.590.261	-	-
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.221.599.884	3.030.510.271	87.081.404	182.561.046	45.000	-
72	107	BADAN SAR NASIONAL	2.329.261.782	3.925.414.663	1.180.628.437	2.020.205.377	-	-
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	115.812.409	14.238.864	2.822.968.996	2.642.968.996	-	-
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	184.566.667	246.835.467	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	170.667.825	116.917.314	-	-	-	-
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	231.526.000	126.421.174	-	-	-	-
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	86.284.723.457	107.908.038.238	2.908.981.313.878	2.243.559.020.186	1.958.027	9.757.909
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	364.784.554
79	114	SEKRETARIAT KABINET	5.835.511.728	6.690.194.255	-	-	-	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	5.155.940.950	3.550.491.610	-	-	2.944.413.479	317.542.167
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	3.192.927.191	1.960.847.927	11.213.881.926	12.333.528.963	-	-
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	81.993.178.725	158.942.829.763	11.820.871.990	20.298.480.773	1.871.093.612	1.826.519.105
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	398.519.425	531.239.740	-	-
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	523.090.521	287.256.465	-	-	780.633.355	-
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	3.370.044.995	2.144.583.467	-	-	-	-

LAMPIRAN 26

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited	31 DESEMBER 2020 Audited	31 DESEMBER 2019 Audited
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	438.808.399	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	1.776.457.367	3.107.471.409	-	-	-	122.551.396
JUMLAH PADA K/L			**28.322.112.422.294**	**17.329.403.887.015**	**6.724.490.577.329**	**16.879.575.100.899**	**363.924.976.182**	**339.806.045.078**
Jurnal Konsolidasi SPAN			**876.106.823.115**	**4.861.788.467.503**	-	-	**(904.655.562.921)**	**(4.909.642.639.937)**
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	20.321.721.303.915	108.551.211.694.382	75.251.376.584	83.861.957.996	876.106.823.115	4.861.788.467.503
TOTAL			**49.519.940.549.324**	**130.742.404.048.900**	**6.799.741.953.913**	**16.963.437.058.895**	**335.376.236.376**	**291.951.872.644**

LAMPIRAN 27
KEWAJIBAN TRANSFER KE DAERAH

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
1	Provinsi Aceh	15.364.924.430	20.987.772.160	36.352.696 590
2	Kab. Aceh Barat	7.415.645.144	1.633 792.148	9.049 437.292
3	Kab. Aceh Barat Daya	1.920 891.047	902.154.300	2.823.045.347
4	Kab. Aceh Besar	2.896.831.823	3.828.770.620	6.725 602.443
5	Kab. Aceh Jaya	1.701.311.447	987 450.387	2.688.761.834
6	Kab. Aceh Selatan	1.855.649.635	3.096 634.160	4 952.283 795
7	Kab. Aceh Singkil	4.163 471.603	1 135.175.100	5.298 646.703
8	Kab. Aceh Tamiang	14.322 436.718	1.960.359 476	16.282.796.194
9	Kab. Aceh Tengah	1 770.802 329	2.306.784.480	4.077.586.809
10	Kab Aceh Tenggara	2.577 213.854	1.329.729 090	3.906.942.944
11	Kab. Aceh Timur	9.421.468.783	2.633 317.140	12.054.785 923
12	Kab. Aceh Utara	27.686.527.640	4 814.623.800	32.501.151.440
13	Kab. Bener Meriah	1.774.059.853	1.437.611.589	3.211.671.442
14	Kab. Bireuen	2 965.257 203	2 300.563.939	5.265.821.142
15	Kab. Gayo Lues	2.016.325.483	448.393.020	2.464.718.503
16	Kab. Nagan Raya	5 196.563 489	1.044 141.053	6.240.704 542
17	Kab. Pidie	1.690.770.911	3.027.213 275	4.717.984.186
18	Kab. Pidie Jaya	1 658.506 020	1.966 566.840	3 625.072 860
19	Kab. Simeulue	1.655 144.156	490.334.840	2.145.478.996
20	Kota Banda Aceh	1.606.288.116	2.189.802.851	3 796.090 967
21	Kota Langsa	1 996.883.709	627 719.400	2.624 603.109
22	Kota Lhokseumawe	1.515.172.636	1.029.663.600	2 544.836 236
23	Kota Sabang	1.629.100.050	438.112.300	2.067.212.350
24	Kota Subulussalam	2.245.925.419	448.577.800	2.694.503.219
25	Provinsi Sumatera Utara	70.757.697.296	41 939.658.480	112.697.355.776
26	Kab. Asahan	29.107 924.301	2.652.677.430	31.760.601.731
27	Kab. Batu Bara	4.632.250.619	2.048.583.965	6.680 834.584
28	Kab Dairi	2.504 048.875	2 659.924.620	5.163.973.495
29	Kab. Deli Serdang	17.101.262.493	3.662 908.411	20.764.170 904
30	Kab. Humbang Hasundutan	2 254.730.409	2.219.977.926	4.474.708.335
31	Kab. Karo	1.959 700.352	2.587.312.520	4.547.012.872
32	Kab. Labuhanbatu	17 114.327 167	1.886.050.720	19.000.377.887
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	27.450.847.306	981.562.880	28.432.410.186
34	Kab. Labuhanbatu Utara	12 868.768 617	2.054.000.320	14.922.768.937
35	Kab. Langkat	45.342.866.668	5.001.153.872	50.344.020.540
36	Kab. Mandailing Natal	7.499.308.783	4 455.531.820	11.954.840.603
37	Kab. Nias	1.573.531.245	1.141.631 880	2.715.163.125
38	Kab. Nias Barat	1.568.357 522	-	1 568.357.522
39	Kab Nias Selatan	1.687.875.707	-	1.687 875.707
40	Kab. Nias Utara	1.628.597.830	564.305.600	2.192.903.430
41	Kab. Padang Lawas	16.872.829.839	1 074.325.200	17.947 155.039
42	Kab. Padang Lawas Utara	13.619.081.038	2.148.951.140	15.768.032.178
43	Kab. Pakpak Bharat	1 783.276.091	921.181.880	2.704.457.971
44	Kab. Samosir	2.358 155.318	1.819.964 830	4.178.120.148
45	Kab. Serdang Bedagai	16.078.237.618	3.432 705.900	19.510.943 518
46	Kab. Simalungun	18.144.792.544	-	18.144.792.544
47	Kab. Tapanuli Selatan	55 592.586.086	2.729.695 800	58.322.281.886
48	Kab. Tapanuli Tengah	3.224 218.107	2.732.219.985	5.956.438.092
49	Kab. Tapanuli Utara	33.945.490.470	3.687.500 020	37.632.990.490
50	Kab. Toba Samosir	1.921.775.414	2.511.086.917	4.432.862.331
51	Kota Binjai	3.361 843.449	2.044.253.035	5.406.096.484
52	Kota Gunungsitoli	1.566.795 499	1 011.845.900	2.578 641.399
53	Kota Medan	2.166 533.345	4.885.913.901	7.052.447.246
54	Kota Padang Sidempuan	1 736.872.120	1.077.295.700	2.814.167.820
55	Kota Pematang Siantar	1.747.384.680	1 117.174.100	2.864.558.780
56	Kota Sibolga	1 577.990 003	557.955.780	2.135.945 783
57	Kota Tanjung Balai	1.575 530.110	1.286.825.780	2.862.355.890
58	Kota Tebing Tinggi	1.577.824.831	1.165.236.060	2 743.060.891
59	Provinsi Sumatera Barat	8.931.750.232	16 680.175.614	25.611.925.846
60	Kab. Agam	3.773.325.289	2.630.821.721	6.404.147.010
61	Kab. Dharmasraya	6 614.850 628	1.079.528.820	7.694.379 448
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.457.220.399	832.111.560	3.289.331.959
63	Kab. Lima Puluh Kota	2 177.698.696	3.442 194.737	5 619.893 433
64	Kab. Padang Pariaman	1.631.967.995	4 329.856.185	5.961.824.180
65	Kab. Pasaman	1.634.749.612	2.468.983.530	4.103.733.142
66	Kab. Pasaman Barat	7.954.563.895	3.689.303.380	11.643.867.275
67	Kab. Pesisir Selatan	5.518 876.888	4 267.148.225	9.786 025.113
68	Kab Sijunjung	1.921.451.903	1.478.398 720	3.399.850.623

LAMPIRAN 27

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
69	Kab. Solok	1.819 174.640	2.867.028.670	4.686.203.310
70	Kab. Solok Selatan	8.210.006.750	1.664 750.680	9.874.757.430
71	Kab. Tanah Datar	1 644.272.640	2.266.754.195	3.911.026.835
72	Kota Bukit Tinggi	1.536.850.472	1.030.265.360	2.567.115.832
73	Kota Padang	3 338.443.881	4.032.212.378	7.370.656 259
74	Kota Padang Panjang	1.549.392 187	410.780 635	1.960.172.822
75	Kota Pariaman	1.581.504.498	334 277.035	1.915 781.533
76	Kota Payakumbuh	1.543.561.386	1.170.440.679	2.714.002.065
77	Kota Sawahlunto	5 089.914.041	847.772 047	5.937.686 088
78	Kota Solok	1.557.343.086	396 878.400	1.954.221.486
79	Provinsi Riau	271 539.362.006	8.682.080.660	280.221.442.666
80	Kab. Bengkalis	496.834.067.613	4.050.941.900	500.885.009.513
81	Kab. Indragiri Hilir	23.685.781.061	3.396.367.070	27.082.148.131
82	Kab. Indragiri Hulu	33.766.765.705	4.397 497.110	38.164.262.815
83	Kab Kampar	104.700.409.625	5.751 142.200	110.451.551.825
84	Kab. Kepulauan Meranti	20.535 896.478	932.351.819	21.468.248.297
85	Kab. Kuantan Singingi	11.658.924.171	2.690 304.860	14.349.229.031
86	Kab. Pelalawan	55 967.802 078	3.108 117.860	59.075.919.938
87	Kab. Rokan Hilir	129 469.346.755	4.250.565.020	133.719 911.775
88	Kab. Rokan Hulu	31.207.478.631	4.765 597.160	35.973.075.791
89	Kab Siak	175.730.543.822	-	175.730.543.822
90	Kota Dumai	11.365 682.215	1.802.214.330	13.167.896.545
91	Kota Pekanbaru	7.954.855.210	4.399.099.980	12.353.955.190
92	Provinsi Jambi	53.444.660.093	8.330.173.737	61.774 833.830
93	Kab. Batanghari	26.836 470 523	2.155.144 660	28.991.615.183
94	Kab. Bungo	6.281.600.594	1.799.443.211	8.081.043 805
95	Kab. Kerinci	3 157.201 638	3 452.626.900	6.609.828.538
96	Kab. Merangin	3.446 340.318	2.433.321 575	5.879.661.893
97	Kab. Muaro Jambi	26 661.257 933	3.322 987.692	29.984.245.625
98	Kab. Sarolangun	17.726.679.315	1 519.486.700	19.246.166.015
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	80.898.706.542	1.898.415 740	82.797.122.282
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	23 608.723 523	2.002 111.520	25.610.835.043
101	Kab. Tebo	16.457.945.720	1.844.586.220	18.302.531.940
102	Kota Jambi	10.404.653.998	3.402.210.160	13.806.864.158
103	Kota Sungai Penuh	2 614.039.504	1.179.906.095	3.793 945.599
104	Provinsi Sumatera Selatan	190 867.427.778	9.873.738.880	200.741.166.658
105	Kab. Banyuasin	24.635.387.967	4.259.975 115	28.895.363 082
106	Kab. Empat Lawang	3.194.078.666	1 235.336.555	4.429.415 221
107	Kab. Lahat	61.097.366.463	1.843.256 945	62.940.623.408
108	Kab. Muara Enim	177.069.569.538	3.429 321.880	180.498.891.418
109	Kab. Musi Banyuasin	242.657.292.592	3 136.274.045	245.793.566.637
110	Kab. Musi Rawas	59.982 535.110	2.289.990.630	62.272.525.740
111	Kab. Musi Rawas Utara	10.862.392.578	643.259.420	11.505.651.998
112	Kab. Ogan Ilir	13.234.142.866	4.336 784.485	17.570.927.351
113	Kab. Ogan Komering Ilir	19.054.580.148	4.918.833.079	23.973.413.227
114	Kab. Ogan Komering Ulu	29.869.694.096	2.128 216.055	31.997.910.151
115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3 181.044 571	1.911.616.500	5.092.661.071
116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4.020.041.863	2.976.598.956	6.996.640.819
117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	113.977.210.198	667.755.140	114.644.965.338
118	Kota Lubuk Linggau	2.220.868 946	1.416.184.310	3.637 053.256
119	Kota Pagar Alam	2.464.347.429	580.568.940	3.044.916.369
120	Kota Palembang	2.412 348.755	8.358 394.043	10.770.742.798
121	Kota Prabumulih	26 975.261.324	1.342.030.440	28.317 291.764
122	Provinsi Bengkulu	6.262.842.936	4.730.583.460	10.993.426.396
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.883 859.046	1.653.181.740	3.537.040.786
124	Kab. Bengkulu Tengah	6 534.624 076	992.114.780	7.526.738.856
125	Kab. Bengkulu Utara	8.486.198.196	2.265.212.075	10.751.410.271
126	Kab. Kaur	2.456.416 813	1.055.428.950	3.511.845.763
127	Kab. Kepahiang	2.043.405.068	933.010.010	2.976.415.078
128	Kab. Lebong	2.638 065.684	896 874.600	3.534.940.284
129	Kab. Mukomuko	5 893.516.840	1.429 283.920	7.322.800.760
130	Kab. Rejang Lebong	1.889.496.356	3.443.091.320	5.332.587.676
131	Kab. Seluma	4.147 156.812	1.805.819.520	5.952.976.332
132	Kota Bengkulu	1.643.143 925	2.721.924.689	4 365.068.614
133	Provinsi Lampung	17.499.753.949	12 693.177.184	30.192.931.133
134	Kab. Lampung Barat	2.326.768.165	2.543.970 120	4.870 738.285
135	Kab. Lampung Selatan	7 393.855.661	4.000.498.720	11.394.354.381
136	Kab. Lampung Tengah	12.327 513.616	6.987.955.982	19.315.469.598

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
137	Kab. Lampung Timur	12.909.283.860	5.436.797 520	18.346 081.380
138	Kab. Lampung Utara	3 357.061.214	3.096 641.780	6 453.702.994
139	Kab. Mesuji	6 148.955.687	669.808.840	6.818.764.527
140	Kab. Pesawaran	4.270.530.512	1.430.237 350	5.700.767.862
141	Kab. Pesisir Barat	2 278.345.981	887.300.220	3 165.646.201
142	Kab. Pringsewu	2.107.427.113	3 613.857.336	5.721 284.449
143	Kab. Tanggamus	19.414.107.570	3.859.913.200	23.274.020.770
144	Kab. Tulang Bawang	5.710.913 120	1.948.176.358	7 659.089.478
145	Kab. Tulang Bawang Barat	2.942 580.140	1.442.577.800	4.385.157.940
146	Kab. Way Kanan	5 479.192.140	3.097.639 281	8.576.831.421
147	Kota Bandar Lampung	2 256.833.557	4.524.100.025	6.780.933 582
148	Kota Metro	2.098 047.171	1.528.485.140	3.626.532.311
149	Provinsi DKI Jakarta	25.765.355.335	39.779.791.080	65.545.146.415
150	Provinsi Jawa Barat	248.036.940.243	33.477.683.259	281 514.623.502
151	Kab. Bandung	215.626.595.611	11.619.276.760	227.245.872.371
152	Kab. Bandung Barat	19.659.302.815	5.574.176.600	25.233.479 415
153	Kab. Bekasi	28.984 747.925	4.190.544.495	33.175.292.420
154	Kab. Bogor	108.253.556.305	9.027 958.834	117.281.515.139
155	Kab. Ciamis	17.859 137 635	9.786.097.335	27.645.234.970
156	Kab. Cianjur	19.912.291.154	7.959.600.305	27.871.891.459
157	Kab. Cirebon	20 405.298.871	10.394.213.100	30.799.511.971
158	Kab. Garut	114.957.388.718	9.422.370.205	124 379.758 923
159	Kab. Indramayu	43.101.300.730	5.234.416.883	48.335.717.613
160	Kab. Karawang	32.667.038.700	3.360.708.244	36.027.746 944
161	Kab. Kuningan	17.771 916 975	7.912.251.780	25.684.168.755
162	Kab. Majalengka	19.076.230.941	6.254.877 056	25.331.107.997
163	Kab. Pangandaran	17.802.078.247	2.161 419.460	19.963.497.707
164	Kab. Purwakarta	18.678.740.256	3.831.016 430	22.509 756.686
165	Kab. Subang	38.770.360.628	6.238 859.740	45.009.220.368
166	Kab. Sukabumi	98 212.862 226	11 970.442.240	110.183.304.466
167	Kab. Sumedang	18.179.147.588	9.595.563 546	27.774.711.134
168	Kab Tasikmalaya	20.137.856.613	10.795 664.120	30.933.520 733
169	Kota Bandung	17.703.875.037	4.854.525.648	22.558.400.685
170	Kota Banjar	17.577.974.754	1.064.087.665	18.642.062.419
171	Kota Bekasi	18.044.656 452	5.996.084.280	24.040.740.732
172	Kota Bogor	17.508.023.996	3.489.728 210	20.997.752.206
173	Kota Cimahi	17.423.522 795	2.572 421.380	19.995.944 175
174	Kota Cirebon	17.602.579.688	1.765.522 780	19.368 102.468
175	Kota Depok	17.473.751.240	3.670 532.550	21.144.283 790
176	Kota Sukabumi	17 391.555 101	1 085.944.290	18.477.499.391
177	Kota Tasikmalaya	17.485.483.729	2.953.795.200	20.439.278.929
178	Provinsi Jawa Tengah	22.109.459.760	-	22.109.459.760
179	Kab. Banjarnegara	5.870.239.897	5.979.579.798	11.849.819.695
180	Kab. Banyumas	3 709.964.786	7.000.594.860	10.710.559 646
181	Kab. Batang	2.388.199 003	1 854.240.431	4.242.439.434
182	Kab. Blora	19.672.489.145	5.170.658.260	24.843.147.405
183	Kab. Boyolali	2 547.540.825	9.657.348.630	12.204.889 455
184	Kab. Brebes	4.532 478.881	5 288.355.038	9.820.833.919
185	Kab. Cilacap	6.389.148.000	7.018.425.206	13.407.573.206
186	Kab. Demak	2 778.124.522	4 465.894.080	7 244.018 602
187	Kab. Grobogan	5.451 409.136	5.444.534.036	10.895.943.172
188	Kab. Jepara	4.515.237.325	4.366 647.174	8.881.884.499
189	Kab. Karanganyar	3.068 489.561	5.514.077.836	8.582 567.397
190	Kab. Kebumen	2.849.545.792	6.650.848.734	9.500.394.526
191	Kab. Kendal	2 797.384.586	5.465.234.080	8.262.618.666
192	Kab. Klaten	2.543 733.061	7.305.115.200	9.848 848.261
193	Kab Kudus	7.784.396.231	4.178.910 765	11.963.306.996
194	Kab. Magelang	2 658.543.995	5.567.779.140	8.226.323.135
195	Kab. Pati	3.038 971.922	6.287.760.000	9.326 731.922
196	Kab Pekalongan	3 101.919.232	3.878.574 212	6.980.493.444
197	Kab. Pemalang	4.222 830.534	6.813.199.999	11.036.030.533
198	Kab. Purbalingga	2.270.622.510	5.029.888.435	7.300.510.945
199	Kab. Purworejo	2 544.308 919	4.236.660 910	6.780.969.829
200	Kab. Rembang	4.560 127.218	5.289.994.340	9.850.121 558
201	Kab. Semarang	2.441.038.155	4.226.180 760	6.667.218.915
202	Kab. Sragen	2 697.267.296	5.034 347.580	7.731.614.876
203	Kab. Sukoharjo	2.107 442.944	6.661 733.260	8.769.176 204
204	Kab. Tegal	2.774.195.611	6.134.037 165	8.908 232.776

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
205	Kab. Temanggung	3.556.517.526	3.019.712.278	6 576.229.804
206	Kab. Wonogiri	2.669.076.062	5.891.370.635	8 560.446.697
207	Kab. Wonosobo	4 796.788 661	5.438 825.030	10.235.613.691
208	Kota Magelang	1.940.570.837	956 125.400	2 896.696.237
209	Kota Pekalongan	1 988.913.826	1.089.848 840	3.078.762.666
210	Kota Salatiga	1.998.587 797	1.185 577.580	3 184.165.377
211	Kota Semarang	2.801 751.113	4 079.174.334	6.880.925.447
212	Kota Surakarta	2.041.995.595	863.544.900	2.905.540.495
213	Kota Tegal	1 961.904.343	1.441.687.700	3.403.592 043
214	Provinsi DI Yogyakarta	573.254.561	6 439.521.666	7.012.776.227
215	Kab. Bantul	1.846.737.790	5.687.945 803	7.534.683.593
216	Kab. gunung kidul	1.841.748.732	7 088.955.803	8.930.704 535
217	Kab. Kulon Progo	1.692.644.772	3.718.785.410	5.411.430.182
218	Kab. Sleman	1.840.987.091	5.453 881 844	7.294.868.935
219	Kota Yogyakarta	1.664.227.384	1 627.116.180	3.291.343.564
220	Provinsi Jawa Timur	137.043.243.328	46.126.245 113	183.169.488 441
221	Kab. Bangkalan	7.285.473.451	3.060 784.460	10.346.257.911
222	Kab Banyuwangi	27 090.982.872	5.455.495.219	32.546 478.091
223	Kab. Blitar	4.320 979.809	4.910.562.300	9.231 542.109
224	Kab. Bojonegoro	397.040.750.107	3.701 640.940	400.742 391.047
225	Kab. Bondowoso	5 295 649.382	2.685.467.125	7.981 116 507
226	Kab. Gresik	14.123.164.781	4.269.266.685	18.392.431.466
227	Kab. Jember	13.386.514.773	8.518.359.290	21.904.874.063
228	Kab. Jombang	3 412.251 141	5.155.037.045	8.567 288.186
229	Kab. Kediri	7.212.370.091	5.891.666 400	13.104.036.491
230	Kab. Lamongan	3.105.514.926	8.271.785.865	11.377.300.791
231	Kab. Lumajang	5.079.591.813	3 419.490.060	8.499.081.873
232	Kab. Madiun	3.316.811.243	4.357.543.140	7.674.354.383
233	Kab. Magetan	2 300.737.119	5.280 254.700	7 580.991.819
234	Kab. Malang	10.956 091.601	8.652.879.660	19.608 971.261
235	Kab. Mojokerto	2.575.453.268	4.467.515 180	7.042.968.448
236	Kab. Nganjuk	2 620.187 941	4.829 966.480	7 450.154.421
237	Kab. Ngawi	3.316.743.712	4.863.463.480	8.180.207.192
238	Kab. Pacitan	2.387.092.425	4.662.460.140	7.049.552.565
239	Kab. Pamekasan	3.344.278 437	5.235.152.445	8.579.430 882
240	Kab. Pasuruan	9.376.706.902	4.233.763.108	13.610.470.010
241	Kab. Ponorogo	2.584.081.309	6.320.757.775	8.904.839.084
242	Kab Probolinggo	4 467.265.415	3.623.637.090	8.090.902.505
243	Kab. Sampang	2.351 185.942	3 436.863.560	5.788.049.502
244	Kab. Sidoarjo	4.026.305.532	7.790.918.257	11.817.223 789
245	Kab. Situbondo	3.738.691 699	3 493 310.065	7.232.001 764
246	Kab. Sumenep	5.950 399.728	-	5.950.399.728
247	Kab. Trenggalek	2.355.671.883	7.289.484.663	9.645.156.546
248	Kab. Tuban	9 055.779 186	5.250.344.995	14.306.124.181
249	Kab. Tulungagung	2.635 873.633	6.618.766 633	9.254.640.266
250	Kota Batu	2.189.725.298	1.730.269.308	3.919.994.606
251	Kota Blitar	2.602.064.864	851.693.099	3.453.757.963
252	Kota Kediri	3.904.912.985	548.832.525	4.453.745.510
253	Kota Madiun	2.169.012.621	1.392.202.280	3.561.214.901
254	Kota Malang	3.016.677.908	3.436.823.710	6.453.501.618
255	Kota Mojokerto	2.182.518.495	900.715.745	3.083.234.240
256	Kota Pasuruan	2 182.577.240	938.161.080	3 120.738 320
257	Kota Probolinggo	2.233.346.272	1.355.522 540	3.588 868.812
258	Kota Surabaya	2.882.445.401	4.558.426.660	7.440.872.061
259	Provinsi Kalimantan Barat	36 802.269.409	6.775.708.775	43.577.978.184
260	Kab. Bengkayang	7.263.352.571	1.346.544 835	8.609 897.406
261	Kab. Kapuas Hulu	10 464.046 564	1.737.189 105	12.201.235.669
262	Kab. Kayong Utara	3.750 731.386	1.581.951.920	5 332.683 306
263	Kab. Ketapang	55.740.969.397	1.097.278.500	56.838 247.897
264	Kab. Kubu Raya	14.817.452.698	2.483.141 800	17.300.594.498
265	Kab. Landak	9.856.097.784	938.141.385	10.794.239.169
266	Kab. Melawi	11.118.072.734	854.478.740	11.972.551.474
267	Kab. Mempawah	2.887.210.933	1.511.621 000	4.398.831.933
268	Kab. Sambas	7.667 135.894	3.584.311.880	11.251.447.774
269	Kab. Sanggau	22.117 365.775	2.069.246.800	24.186 612.575
270	Kab. Sekadau	8.244.893.545	729.269.726	8.974.163.271
271	Kab. Sintang	16.947 448.004	2 386.945.075	19.334.393.079
272	Kota Pontianak	1.693.881.750	2.133.979.050	3.827.860.800

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
273	Kota Singkawang	1.584.050.388	626.038.100	2.210.088.488
274	Provinsi Kalimantan Tengah	73.928.971.561	6.188 020 035	80.116.991.596
275	Kab. Barito Selatan	8.894.767.578	1.050 149.170	9 944.916.748
276	Kab. Barito Timur	36.645.513.522	1 612 199.650	38.257.713 172
277	Kab. Barito Utara	45.189 761.587	1 665.925.900	46.855.687.487
278	Kab. Gunung Mas	17.302.299.596	1.367.127 740	18.669.427.336
279	Kab. Kapuas	42.036.695.588	2.915.879.625	44.952.575.213
280	Kab. Katingan	16.486.050.341	2.000.373.040	18.486.423.381
281	Kab. Kotawaringin Barat	23.467.390.900	1.352 167.420	24.819.558.320
282	Kab. Kotawaringin Timur	44.854.676.347	1.627.091.500	46.481.767.847
283	Kab. Lamandau	13 349.673.883	812.078 200	14.161.752 083
284	Kab. Murung Raya	20 382.600 477	1.217.200.685	21.599.801.162
285	Kab. Pulang Pisau	7.155.625.931	1.274.994.040	8.430.619.971
286	Kab. Seruyan	28.014.411.971	1.149.733 355	29.164.145.326
287	Kab. Sukamara	6.532.965.328	281.631.140	6.814.596.468
288	Kota Palangkaraya	3.381.512.761	3.128 532.240	6 510.045.001
289	Provinsi Kalimantan Selatan	72 957.790 719	6.594.435.055	79.552.225.774
290	Kab. Balangan	29.174.611.892	739.376.640	29.913 988.532
291	Kab. Banjar	13.250.029.804	4.127.223.540	17.377 253.344
292	Kab. Barito Kuala	4.383 715.928	2.325.186.540	6.708 902.468
293	Kab. Hulu Sungai Selatan	35.669.674.993	1.218.382 840	36.888.057.833
294	Kab Hulu Sungai Tengah	1 768.278.587	1.924 311 435	3 692.590 022
295	Kab. Hulu Sungai Utara	2.109.945.715	3.226.305.800	5.336.251.515
296	Kab. Kotabaru	26.029.429.992	1 370.930.000	27.400.359.992
297	Kab. Tabalong	33.067 074.050	1.659.335.861	34.726.409.911
298	Kab. Tanah Bumbu	72.229.783.677	2.017.687.178	74.247.470.855
299	Kab. Tanah Laut	22.641.664.075	2.505.205 927	25.146.870.002
300	Kab Tapin	46 391.950.644	1.163 700.800	47.555.651.444
301	Kota Banjarbaru	1 719.682 019	1.539.068.945	3.258.750.964
302	Kota Banjarmasin	1.771.801 678	1.801.769.840	3.573.571.518
303	Provinsi Kalimantan Timur	184.245.176.370	11.514.881.432	195.760.057.802
304	Kab. Berau	57.614.749.614	1.758.335.060	59.373.084.674
305	Kab. Kutai Barat	60.846.829.479	394.429.550	61.241.259.029
306	Kab Kutai Kartanegara	347.655.391.862	5.652.673.575	353.308.065.437
307	Kab. Kutai Timur	193.554.326.641	2 181 185.040	195.735.511.681
308	Kab. Mahakam Ulu	5.801.703.095	31.369.876	5.833.072.971
309	Kab. Paser	26.084.492.176	1.119.003.810	27.203.495.986
310	Kab. Penajam Paser Utara	22.117 520.329	1.287.570.460	23.405.090.789
311	Kota Balikpapan	5.865.660.537	1.848.899.505	7 714.560.042
312	Kota Bontang	20 470.375 644	914.296.120	21.384.671.764
313	Kota Samarinda	27.796.700.360	2.550.986.663	30.347.687.023
314	Provinsi Sulawesi Utara	11.631.923.059	5 545.692.500	17.177.615.559
315	Kab. Bolaang Mongondow	5.466.436.335	1.553.581.220	7.020.017.555
316	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	5.423.944.341	230.485.740	5.654.430.081
317	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.936.569 822	808.609.820	2.745.179.642
318	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1 937.554.985	736.121.540	2.673.676.525
319	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1 890.366 969	1 239.429.800	3 129.796.769
320	Kab. Kepulauan Talaud	2.159.185.675	1.945.206.680	4.104.392.355
321	Kab. Minahasa	7.799.990.778	5.777.435.380	13.577.426.158
322	Kab. Minahasa Selatan	2.206.572.027	3.088.416 760	5.294.988.787
323	Kab. Minahasa Tenggara	1 913.152.610	1.157.897.980	3.071.050.590
324	Kab. Minahasa Utara	3.020.715 650	894.078 480	3 914.794.130
325	Kab. Sangihe	2.155 282.581	1 001.744.763	3.157 027.344
326	Kota Bitung	22.926.001.154	157.090.335	23.083 091.489
327	Kota Kotamobagu	1.875.193.691	750.721.710	2.625 915.401
328	Kota Manado	1.927.195.496	2.379.337 840	4.306.533.336
329	Kota Tomohon	6.888.784.258	578.861.600	7.467.645.858
330	Provinsi Sulawesi Tengah	17 305.135.666	6.218.523.395	23.523.659.061
331	Kab. Banggai	49.617 033.752	4.942.256.620	54.559.290 372
332	Kab. Banggai Kepulauan	1.675.753.015	1.053.723.370	2.729 476.385
333	Kab. Banggai Laut	1.642.138.126	702.988.700	2.345.126.826
334	Kab. Buol	3.266.030.735	903.281.760	4.169.312.495
335	Kab. Donggala	2.598.001.695	-	2.598.001 695
336	Kab. Morowali	5.099.473.580	-	5.099.473.580
337	Kab. Morowali Utara	4 908.172.300	926.212.700	5.834.385.000
338	Kab. Parigi Moutong	1.977 479 649	2 857.108.823	4.834.588.472
339	Kab. Poso	2.072 484.815	1.558.581.720	3.631 066.535
340	Kab. Sigi	1.676.725.346	1.935.932.240	3.612 657.586

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
341	Kab. Tojo Una Una	1.979.659.192	880.192.565	2 859.851.757
342	Kab Tolitoli	1.978.675 900	1.311 934.215	3 290.610 115
343	Kota Palu	2.127.675.205	3.620.719.195	5.748 394 400
344	Provinsi Sulawesi Selatan	9.009 888.794	14 717.138.820	23.727 027.614
345	Kab. Bantaeng	1.623.969.933	2.075.997.360	3.699.967.293
346	Kab. Barru	1.615.793.128	1.668.827.140	3.284.620.268
347	Kab. Bone	5 376.014.979	4.853 138.553	10.229.153.532
348	Kab. Bulukumba	2.545.441 486	4.065 004.280	6.610.445.766
349	Kab. Enrekang	1.891.453.360	2.391.848.396	4.283.301.756
350	Kab. Gowa	2.714.219.189	3.994.695 180	6.708.914.369
351	Kab. Jeneponto	1.657.031.365	1.902.421.726	3.559.453.091
352	Kab Kepulauan Selayar	1.660.500 768	2.569.191.460	4.229.692 228
353	Kab. Luwu	1.716.712.819	2.983.642.560	4.700.355.379
354	Kab. Luwu Timur	14.729 274 771	1.269.263.860	15.998 538.631
355	Kab. Luwu Utara	1.818.427.852	1.853.696 554	3.672.124.406
356	Kab. Maros	5.201.086.234	2.443.301.720	7.644.387.954
357	Kab Pangkajene Kepulauan	4.469.628.364	2.783 271 440	7 252.899.804
358	Kab. Pinrang	1.714.169.791	2.256.545.120	3.970.714.911
359	Kab. Sidenreng Rappang	1 687.439.579	2 306.568.120	3.994.007.699
360	Kab. Sinjai	1 676.647.587	2.792.976.400	4.469 623.987
361	Kab. Soppeng	1.994.768.602	3.789.176.420	5.783 945.022
362	Kab. Takalar	2.069.217.386	2.874.039.040	4.943.256.426
363	Kab. Tana Toraja	1.763.592.897	2.226.526.500	3.990.119.397
364	Kab Toraja Utara	1.677.408 372	1.580.384.090	3.257.792.462
365	Kab. Wajo	5.232.122.633	4.387 979.849	9.620.102.482
366	Kota Makassar	1.851 966.434	6 763.759.220	8.615.725.654
367	Kota Palopo	1.569.980.758	921.123.820	2.491.104.578
368	Kota Parepare	1.573.030.088	878.433.304	2.451.463.392
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	14 192.434 530	-	14.192.434.530
370	Kab. Bombana	6 442.150 000	1.346 388.980	7 788.538.980
371	Kab. Buton	1.648 684.319	1.035.880.000	2.684.564.319
372	Kab. Buton Selatan	1.693 654.101	430 923.600	2.124.577.701
373	Kab. Buton Tengah	1.697.586.118	648.698.200	2.346.284.318
374	Kab. Buton Utara	1 757.253.148	626.161.240	2.383.414 388
375	Kab Kolaka	16 550.852.606	1.167.283.040	17.718.135 646
376	Kab. Kolaka Timur	1 770.369 786	665.086 540	2.435.456.326
377	Kab. Kolaka Utara	1.675.688.580	789.556.175	2.465.244.755
378	Kab. Konawe	4.770.995.210	2.371.252 750	7.142.247.960
379	Kab Konawe Kepulauan	1 630.852.600	422.920.870	2.053.773.470
380	Kab. Konawe Selatan	6 211.243.947	2.505 733.720	8.716.977.667
381	Kab. Konawe Utara	18.703.246 469	580.810 740	19.284 057.209
382	Kab. Muna	1.794.358.883	2.338.179 320	4.132 538.203
383	Kab. Muna Barat	1.606.164.899	635.453.800	2.241.618.699
384	Kab Wakatobi	1.658.719.772	1.252.203 560	2.910.923.332
385	Kota Bau-bau	1 633.193.248	1.016.494.480	2.649.687 728
386	Kota Kendari	1.637.632 868	3.125.522.680	4.763 155.548
387	Provinsi Bali	637.167 443	6.420.527.850	7.057.695.293
388	Kab. Badung	1.594.292.021	3.921.905.140	5.516.197.161
389	Kab Bangli	1 593.185.154	1.650.069 800	3.243.254.954
390	Kab. Buleleng	1 848 279.884	5.643 973.900	7.492.253.784
391	Kab. Gianyar	1.646.030 877	2.927 724.740	4 573.755.617
392	Kab. Jembrana	1.592 732.294	1 562.736.119	3.155.468.413
393	Kab. Karangasem	1.700.375.386	4.324.757.540	6.025 132.926
394	Kab. Klungkung	1.563 251.942	2.178.603.600	3.741.855.542
395	Kab Tabanan	1.712 202.966	2.614.594 900	4.326.797.866
396	Kota Denpasar	1.610.164.766	2.035.904 060	3.646 068.826
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 270.836 146	7.188 532.067	17.459.368.213
398	Kab. Bima	2.266.494.406	3.338.889.886	5 605 384 292
399	Kab. Dompu	2.191.426.742	1.689.087.340	3.880 514.082
400	Kab. Lombok Barat	2.287.130.648	3.528.997.955	5.816.128.603
401	Kab. Lombok Tengah	3.603.926.558	5.089.722.190	8.693 648.748
402	Kab. Lombok Timur	3.941.183.596	5.419.318.720	9.360.502.316
403	Kab. Lombok Utara	1.999.865.542	929.281.760	2 929.147.302
404	Kab. Sumbawa	11 057.143.005	3 020.700.680	14.077.843 685
405	Kab. Sumbawa Barat	9.910.918.002	759 680.920	10.670.598.922
406	Kota Bima	1.715 261.875	1.788.777.990	3.504.039.865
407	Kota Mataram	3.494 497.474	1.679.522 480	5.174 019.954
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.253.139.938	11.705.826.825	13.958 966.763

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
409	Kab. Alor	1.924.005.091	1.034 144 320	2 958.149.411
410	Kab Belu	1.621.975 854	828.872.480	2 450.848 334
411	Kab. Ende	2.056.319.526	1.561.089.075	3.617.408 601
412	Kab. Flores Timur	1 931 711 149	-	1.931 711.149
413	Kab. Kupang	1.711.248.074	1 321.183.700	3.032.431.774
414	Kab. Lembata	2 009 619.809	1.025.611.060	3 035.230.869
415	Kab. Malaka	1.629.707.776	-	1.629.707.776
416	Kab. Manggarai	2 354.636.458	-	2 354.636.458
417	Kab. Manggarai Barat	1 689.186 351	-	1 689.186 351
418	Kab. Manggarai Timur	1.673.487.255	1 046.538.560	2.720.025.815
419	Kab. Nagekeo	1.650 139.893	1.240.481.520	2.890.621.413
420	Kab. Ngada	1.704.411.771	805.373.775	2.509.785.546
421	Kab. Rote Ndao	1.659.032.910	1.980.258.115	3.639.291.025
422	Kab. Sabu Raijua	1 599.736 792	401.250.000	2.000.986 792
423	Kab. Sikka	1 688.200.031	2 309.368.819	3.997.568.850
424	Kab. Sumba Barat	1.648 992.473	336.254 490	1.985 246.963
425	Kab. Sumba Barat Daya	1.785.207.089	-	1.785.207.089
426	Kab Sumba Tengah	1.642.203.949	965.628.470	2 607.832.419
427	Kab. Sumba Timur	2.349.683.066	734.708.305	3.084.391 371
428	Kab. Timor Tengah Selatan	1 720.589.780	-	1.720.589.780
429	Kab. Timor Tengah Utara	1.694 380.235	2.306.269.400	4.000 649.635
430	Kota Kupang	1.633.137.773	2.079.914.120	3.713.051.893
431	Provinsi Maluku	5.434.091.832	6.404.326.600	11.838.418.432
432	Kab Buru	1 779.546.012	1.489 282 340	3 268.828.352
433	Kab. Buru Selatan	6.741.154 012	224.477 057	6 965.631 069
434	Kab. Kepulauan Aru	2.113.636 319	403.369 600	2.517 005.919
435	Kab. Maluku Barat Daya	4.610.925.970	512.837 058	5.123 763.028
436	Kab. Maluku Tengah	5.047.655.798	3.739.709.920	8.787.365.718
437	Kab. Maluku Tenggara	1.883.032.592	1.006.064.320	2.889.096.912
438	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.954.407.704	1.498 844.400	3.453.252.104
439	Kab. Seram Bagian Barat	2 028.969 200	2.301 553.220	4.330.522.420
440	Kab. Seram Bagian Timur	10.435.660.479	-	10.435 660.479
441	Kota Ambon	1.857.445.396	557.500.000	2.414.945.396
442	Kota Tual	1.834.373.052	642.916.140	2.477.289.192
443	Provinsi Papua	147.335.495.258	432.218.174	147.767.713.432
444	Kab. Asmat	2.479.747.562	320.848.500	2.800.596 062
445	Kab. Biak Numfor	2.076.636.846	960.199.280	3.036.836.126
446	Kab. Boven Digoel	6.622 379.307	54 808.700	6.677.188.007
447	Kab. Deiyai	2.198.571.418	376.846.000	2.575.417.418
448	Kab. Dogiyai	2 108.701.055	-	2.108.701.055
449	Kab. Intan Jaya	2 112.790 911	-	2.112.790 911
450	Kab. Jayapura	6.890 815.426	24.000 000	6.914.815.426
451	Kab. Jayawijaya	2.109.294.006	386.644.600	2.495.938.606
452	Kab. Keerom	12.440.636.914	400 447.780	12.841.084.694
453	Kab. Kepulauan Yapen	2 112.213 988	564.974.600	2.677.188.588
454	Kab. Lanny Jaya	2 036.807 056	-	2.036.807 056
455	Kab. Mamberamo Raya	2.574 803.174	85 200.000	2.660.003.174
456	Kab. Mamberamo Tengah	2.080.901.847	6.750.000	2.087.651.847
457	Kab. Mappi	2.559.791.870	153.177.800	2.712.969.670
458	Kab Merauke	11.734.879.404	1.359 934.440	13.094.813.844
459	Kab. Mimika	531.077.529.648	-	531.077.529.648
460	Kab. Nabire	7 159.917 970	1 016.897.900	8.176.815.870
461	Kab. Nduga	2.055 911.519	14.755.400	2.070 666.919
462	Kab. Paniai	2.081.848.648	285 107.900	2.366.956.548
463	Kab. Pegunungan Bintang	2.283.762.755	804.707.600	3.088.470.355
464	Kab. Puncak	2.127.898 138	793.950.000	2.921.848.138
465	Kab. Puncak Jaya	2.139.436 804	-	2 139.436.804
466	Kab. Sarmi	10.701.677.943	154.110 980	10.855 788.923
467	Kab. Supiori	2.069.788.245	208.386.000	2.278 174.245
468	Kab. Tolikara	2.167 822.952	18.718.540	2.186.541.492
469	Kab. Waropen	2.345.123.110	475.733.140	2.820.856.250
470	Kab. Yahukimo	2.268.706.341	-	2.268.706.341
471	Kab. Yalimo	2.011.819.731	-	2 011.819 731
472	Kota Jayapura	2.014 160.070	1 760 977.720	3.775.137.790
473	Provinsi Maluku Utara	15.313.499.803	4.245.097.555	19.558.597 358
474	Kab. Halmahera Barat	1.716.202.167	1 310.353.980	3.026.556.147
475	Kab. Halmahera Selatan	25.241.183.063	946 552.475	26.187 735.538
476	Kab. Halmahera Tengah	1 946.711.326	467.855.460	2.414.566.786

LAMPIRAN 27

UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2020
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	DBH	DAK Nonfisik	Total Utang Transfer ke Daerah
477	Kab. Halmahera Timur	14.115 716.792	271.236.230	14.386.953.022
478	Kab. Halmahera Utara	14.766.618.645	942.944.100	15.709.562.745
479	Kab. Kepulauan Sula	4.371.298 879	866.278.900	5.237 577.779
480	Kab. Pulau Morotai	1.682.636.312	472 435.800	2.155 072.112
481	Kab. Pulau Taliabu	11 426.098.103	78.000.000	11.504.098 103
482	Kota Ternate	1 703.763.483	1.116.248.975	2.820.012.458
483	Kota Tidore Kepulauan	1.674 563.186	945.402.300	2.619.965.486
484	Provinsi Banten	2.765.904.454	7.582.579.674	10.348.484.128
485	Kab. Lebak	4 226 954.189	7.651.637.960	11.878.592.149
486	Kab. Pandeglang	5.466 827.631	7 552.212.500	13.019 040.131
487	Kab. Serang	3.197.834.001	4.353.395.300	7.551.229.301
488	Kab. Tangerang	2.085.906 961	3 773 083.700	5.858.990.661
489	Kota Cilegon	1.690.604.173	2.396.019.020	4.086.623.193
490	Kota Serang	2.302.797.766	3.231.375.580	5.534.173.346
491	Kota Tangerang	1 898.320 469	2 697 279.500	4 595.599.969
492	Kota Tangerang Selatan	1.795 717.191	3 011.390.260	4.807.107.451
493	Provinsi Bangka Belitung	12.943.731.651	3.277 488 580	16.221.220.231
494	Kab Bangka	14.527.400 687	1.085.389.060	15.612.789.747
495	Kab. Bangka Barat	16.945.550.660	1 648.311.505	18.593.862.165
496	Kab. Bangka Selatan	7.767.793.706	2.221.249 510	9.989.043.216
497	Kab. Bangka Tengah	5.481.793.200	1.396.317.400	6.878.110.600
498	Kab. Belitung	6.382 950.437	1.355.682.920	7.738.633.357
499	Kab. Belitung Timur	9.006.847.300	1.724.544.840	10.731.392.140
500	Kota Pangkal Pinang	1 678.256 569	1 408.135.480	3.086.392.049
501	Provinsi Gorontalo	746.511.641	2.746.152.600	3.492.664.241
502	Kab. Boalemo	1.969.750.948	1.180.547.280	3 150.298.228
503	Kab. Bone Bolango	1 617.635.089	965.652 080	2.583 287.169
504	Kab. Gorontalo	2.264 384.133	1 720.399 460	3.984.783.593
505	Kab. Gorontalo Utara	1.807.341 730	735.089.180	2 542.430 910
506	Kab. Pohuwato	1.899.005.560	1.165.145.160	3.064 150.720
507	Kota Gorontalo	1.547.650.630	847.941.415	2.395.592.045
508	Provinsi Kepulauan Riau	19.833.130.664	3.207.635.933	23.040.766 597
509	Kab. Bintan	2.660.597.664	1.095.486.020	3.756.083.684
510	Kab. Karimun	11.616.805.331	1.095.047 780	12.711.853.111
511	Kab. Kepulauan Anambas	19.108.366.866	315.729.620	19.424.096.486
512	Kab. Lingga	2.009 592.659	710.892 700	2.720 485.359
513	Kab. Natuna	49.667 546.720	-	49.667.546.720
514	Kota Batam	2.056.496 330	2.387.343.240	4.443.839.570
515	Kota Tanjung Pinang	1.715.662 054	822.833.160	2.538.495.214
516	Provinsi Papua Barat	67.677.413.934	-	67.677.413.934
517	Kab Fak Fak	23.107 062.825	-	23.107.062 825
518	Kab. Kaimana	12.016.558.626	247 886.865	12.264.445 491
519	Kab. Manokwari	5.174.616.407	879.840.300	6.054.456.707
520	Kab. Manokwari Selatan	3.789 785.637	-	3.789 785.637
521	Kab. Maybrat	3.825.359.795	236.507.100	4.061.866.895
522	Kab. Pegunungan Arfak	4.580 250.056	-	4.580 250.056
523	Kab. Raja Ampat	7.208.233.089	136.321.340	7 344.554.429
524	Kab. Sorong	40.913.849.044	542 236.568	41.456.085.612
525	Kab. Sorong Selatan	4.624 502.208	250.796.200	4.875.298.408
526	Kab. Tambrauw	3.749.499.230	293.905.460	4.043.404.690
527	Kab. Teluk Bintuni	128.985.842.480	-	128.985.842.480
528	Kab. Teluk Wondama	8.600.831.058	-	8.600.831.058
529	Kota Sorong	3.691 103 394	465.671 400	4.156.774.794
530	Provinsi Sulawesi Barat	1.738.105.499	4 485.087.470	6.223.192.969
531	Kab. Majene	1.679 848.156	2.235.365.180	3.915.213.336
532	Kab. Mamasa	1.692.216 890	2.025.860.545	3 718.077.435
533	Kab. Mamuju	2.722.437.699	1.829.230.580	4.551.668.279
534	Kab. Mamuju Tengah	1.907 931.642	-	1 907.931.642
535	Kab. Pasangkayu	4.800.175 831	623.833.548	5.424.009.379
536	Kab. Polewali Mandar	1.704 985.397	-	1.704.985.397
537	Provinsi Kalimantan Utara	24.627.159.397	1.407 664.930	26.034.824.327
538	Kab. Bulungan	34.214.077.404	1.055.606.012	35.269.683.416
539	Kab. Malinau	15.035 632.983	509 261.620	15.544.894.603
540	Kab. Nunukan	21 541.686.337	761.195.552	22.302 881.889
541	Kab. Tana Tidung	12.364.157 656	552.673.260	12.916.830.916
542	Kota Tarakan	23.754.207.330	593 826.100	24.348.033.430
Total		**9.566.131.404.935**	**1.593.797.338.058**	**11.159.928.742.993**

LAMPIRAN 28
RINCIAN UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI PERBANKAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2020

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	7	2.811.319.066	1.883.443.352.712	46.837.025.306.166	48.720.468.658.877
	JPY	8	369.933.333.333	1.688.522.123.134	48.796.797.783.487	50.485.319.906.621
	USD	33	1.919.078.090	5.038.009.057.026	22.030.587.397.064	27.068.596.454.090
AFD	EUR	9	1.048.692.857	275.080.098.980	17.898.882.471.817	18.173.962.570.797
	USD	3	290.000.000	1.128.400.000.000	2.962.050.000.000	4.090.450.000.000
AIIB	USD	2	962.500.000	-	13.576.062.500.000	13.576.062.500.000
AUSTRALIA	AUD	1	1.500.000.000	1.077.128.000.000	15.079.792.000.000	16.156.920.000.000
IBRD	JPY	2	142.770.600.000	-	19.484.103.660.840	19.484.103.660.840
	USD	38	12.772.313.993	12.689.300.398.854	167.464.188.467.616	180.153.488.866.469
IDA	SDR	1	18.948.000	76.985.761.937	307.943.047.747	384.928.809.683
JICA	JPY	34	349.635.693.000	6.401.846.499.293	41.313.426.014.388	47.715.272.513.680
KfW	EUR	8	2.126.472.000	1.529.052.935.410	35.322.940.736.510	36.851.993.671.920
	USD	5	663.242.647	1.462.363.255.344	7.892.674.281.720	9.355.037.537.063
TOTAL		**151**		**33.250.131.482.690**	**438.966.473.667.352**	**472.216.605.150.042**

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.105,-

SK No 062874 C

LAMPIRAN 28.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2020

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	1	4.362.497	18.900.636 419	56.701.909.187	75.602.545 606
ADB	ADB	5	15.551.972	129.261.834.265	90.098.725.717	219.360.559 982
	JPY	2	2.731.935 763	19.716.188.267	353.114 910.019	372.831.098.287
	SDR	36	222.515.626	1.135.163 734.113	3 385.243.426.834	4.520.407.160.947
	USD	81	1.684.916.385	2.744.531.264.373	21.021.214.343.936	23.765.745.608.309
AFD	EUR	1	27.234.212	62.929.585.042	409.042.302.775	471.971.887.817
	USD	4	73 408.579	140.853.121.225	894.574.887.361	1 035.428.008.586
AIIB	USD	4	224.861.451	-	3.171.670.763.111	3 171.670 763.111
AKA	USD	1	16.732.344	87 805.645.964	148.204 072.785	236.009.718.749
ATRADIUS DSB	EUR	1	5.369.829	93.059.727.078	-	93.059.727.078
	USD	1	1.471.815	20.759.955 230	-	20.759.955.230
AUSTRALIA	AUD	2	449.453.388	105.026.582.321	4.736.161.707 745	4.841.188.290.066
B A W A G	EUR	2	8.576.985	27.025.470.991	121.614.616.964	148.640.087.955
BANCO DE SABADELL	USD	1	19.168.052	135.182.690.397	135.182.689.833	270.365.380.230
BANK MANDIRI SIN	USD	15	318.212.607	955.966.410.220	3.532.422.410.527	4.488.388.820.748
BANQUE DE FRANCE	EUR	2	34.866.231	236 264.951.072	367.970 670.910	604.235.621.981
BBVA	EUR	2	2.109.855	17.859.815.730	18.704.208.703	36.564.024 433
	USD	2	22 678.571	127.952.499.895	191.928.749 843	319.881.249.738
BBVAIT	EUR	5	35.652.719	205.967 320.559	411.898.227 922	617.865.548.481
BELGIUM	EUR	9	8.317.568	48.327.082.493	95.817.279.988	144.144.362.480
BLG	EUR	1	17.570.000	43.498.576.100	260.991 456 600	304.490.032.700
BNI SEOUL	USD	2	18.394.460	54.907.979.263	204.545.879.038	259.453.858.300
BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	95.949.916	191.685.143.408	1.341.796.003.822	1.533.481.147.230
	EUR	6	20.705.290	175.260.255.938	183.564.701 677	358.824.957.614
	GBP	1	2.106.121	20.098.163.585	20 098.164.348	40.196.327.933
	USD	2	8.308.929	117.197 437.339	-	117 197.437.339
BOC CAYMAN ISLAND	USD	1	-	-	-	-
BRI SINGAPORE	USD	1	1.221.890	11.489.841.035	5.744.920.518	17.234.761.553
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	11.457.186	56 729.798.845	141.824 497.078	198.554.295 923
	USD	4	65.171.695	457.104.915.440	462 141.836.470	919 246.751.910
BRUNEI INVEST. BANK	USD	2	-	-	-	-
CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	79.333.332	279.749.176.070	839.247.470.662	1.118.996.646.732
CASA OF FRANCE	EUR	1	68.277.236	394.417.333.904	788.834 667.807	1 183 252.001.711
CASSA DEPOSITI	USD	1	408 978	5.768.632.574	-	5.768 632.574
CDC	GBP	1	349.129	6.663 303.708	-	6.663.303.708
CESCE, SPAIN	USD	1	2.514.115	35 461.587.434	-	35.461 587.434
CEXIM	USD	1	-	-	-	-
CIDA	CAD	23	58.225.357	93.843.069.124	547.747 965.390	641.591.034 514
CITIBANK LONDON	EUR	3	16.717.180	82.774.450.460	206.936.125.975	289.710.576.435
COFACE	EUR	1	9.423.117	163.303.660.392	-	163.303.660.392
	USD	1	5.658.348	79.810.997.412	-	79.810.997.412
COMMERZBANK GERMANY	EUR	1	35 934.380	-	622.746.758.182	622.746.758.182
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	7	199.104.264	835.819.141.464	2 614.679.659.111	3.450.498.800.575
	USD	1	141.869.978	363.832 008.478	1.637.244.038.123	2 001.076 046.601
CREDIT SUISSE	CHF	1	1.392.436	14 836.037 577	7.418.018.773	22.254 056.350
CZECH EXPORT BANK	USD	1	122.956.799	130 072.923.869	1.604.232.727 436	1.734.305.651.306
DENMARK	DKK	2	5.692.308	5.598.812.242	7.661.531 925	13.260.344.167
DEUTSCHE BANK LONDON	USD	2	13.344.890	59.773.423.297	128.456.250.012	188.229.673.309
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	2	4.917.577	11.362.952.316	73.859.190.055	85.222.142.372
DFAS	USD	1	339.394	4.787.154 627	-	4.787.154.627
DRESDNER SINGAPORE	EUR	1	-	-	-	-
	USD	1	-	-	-	-
DZ Bank AG Singapore	USD	3	3.203.839	40.117.435.358	5.072.711.057	45.190.146.415
E I B	USD	1	-	-	-	-
ECGD	GBP	1	14.038.878	267 938.717.447	-	267 938.717.447
	USD	1	2.678.707	37.783.167.172	-	37.783.167.172
EDC	USD	3	63.284.455	223.488.428.121	669.138.816.001	892.627.244.122
EFIC	EUR	2	4.078.793	70.685.933.004	-	70.685.933.004
	USD	13	14.066.316	154.028 069.558	44.377.318.060	198.405.387 617

LAMPIRAN 28.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2020

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
EKF	EUR	1	353.571	6.127.429.522	-	6.127.429.522
	USD	1	1.385.707	19.545.393.652	-	19.545.393.652
EKN	USD	1	802.465	11 318.762.055	-	11.318.762.055
EKSPORTFINANS ASA	USD	5	3.370 233	33.433.640.763	14 103.499.087	47.537.139.850
EKSPORTKREDITT AS	USD	1	101.660.000	143.391.430.000	1.290.522.870.000	1.433.914.300.000
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	4	68.947.696	109.167.505.080	1.085.703.651.540	1.194.871 156.620
EXIM BANK KOREA	KRW	16	353.927.577 340	167.075.881.768	4.423.364.796.332	4.590.440.678.100
	USD	18	798.330.394	2.611.335.252.492	8.649.114.960.196	11.260.450.212.688
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	697.537.566	335 048.994.032	1 172.671.479.393	1.507.720.473.425
	USD	17	1.683.797 508	2.200.510.277.870	21.549.453.570.946	23 749.963 848.817
EXIM BANK TAIPEI	USD	1	200.771	2.831.875.660	-	2.831.875.660
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	36.440.994	-	514.000.226.717	514.000.226 717
FINNVERA	EUR	3	176.182	1.644.829.387	1.408.432.493	3.053.261.880
	USD	1	132.273	1.865.716.448	-	1.865.716.448
GIEK	USD	1	786.074	11.087.567.846	-	11.087.567.846
GOSPODRSTWA	USD	2	1 433.963	11.588.806.229	8.637.235.962	20.226.042 191
HAPOALIM, ZURICH	USD	1	-	-	-	-
HSBC LONDON	GBP	3	128 255	2.447.807.856	-	2.447 807.856
IBRD	USD	68	4.299.086.495	3.102.074.218.417	57 536.540.791.146	60.638.615.009.563
ICO	EUR	9	77 433.160	7.668.031 936	1.334.257 140.713	1.341.925.172.649
	USD	15	81.503.280	251.589.207.774	898.014 561 985	1.149.603.769.760
IDA	SDR	31	511.648.348	2.495.682.359 440	7.898.458.943.352	10.394.141.302.792
	USD	43	68.658.006	436.818.985.253	531.602.195.725	968.421.180.977
IDB	ACU	38	94.693.824	385 957 448.066	1.537.748.543.305	1.923.705 991.371
	USD	31	1.189.213.830	1.926.434.378.933	14.847.426.687.731	16.773.861.066 663
IFAD	EUR	4	20.127.647	7.355.878.043	341.458.453.136	348 814.331.179
	SDR	8	107.412 815	128 532 982.784	2 053.559.428 475	2.182.092.411.259
	USD	2	16.255.000	-	229.276.775.000	229 276.775.000
ING BANK AMSTERDAM	EUR	3	317.646.568	969.383.804.700	4.535.466.162.462	5 504.849.967.162
JAICAF	JPY	2	4.051.650.000	69 116.793.476	483.817 554 334	552.934.347.810
JBIC	JPY	8	7.131.556.428	873.082.713.565	100.170.776.343	973.253.489.908
	USD	4	4.185.574	59.037.518.872	-	59.037.518.872
JICA	JPY	221	922.541.527.012	12.120.826.956.939	113.779.706 792 526	125.900 533.749.465
KFAED	KWD	1	-	-	-	-
KfW	EUR	54	498.061.524	1.152.502.790.366	7.478.958.207.841	8.631 460.998.208
	USD	1	7.790 842	109.889 831.770	-	109.889.831.770
KOMERCNI BANKA	USD	1	-	-	-	-
MAFF, JAPAN	JPY	2	1.866.955.327	110.306.210.715	144.479 796.499	254.786.007.213
METI, GOV. OF JAPAN	JPY	1	1.177.361.884	160.676.224.616	-	160.676.224.616
MIZUHO SINGAPORE	USD	1	8.444.159	47.641.947.899	71.462.921.425	119.104.869.324
MUFG SINGAPORE	USD	6	44.977.963	365.329.320.776	269.084.849.737	634.414.170.513
N I O	EUR	7	25.929.784	217 689.708.091	231.676 293.107	449.366.001.198
NATIXIS BANQUE	EUR	51	326.990.781	1.112.312.983.507	4.554.473.217.263	5 666.786.200.770
NIB	EUR	3	7.625.120	11 229.308.192	120.914.855.319	132.144.163.511
NORDEA FINLAND	USD	1	3.172.687	22 375.373 657	22 375.371.513	44.750.745.170
OEKB	EUR	1	10.420.276	180.584.532.083	-	180.584.532 083
ONDD	EUR	1	2.897.626	50.216.182.345	0	50.216.182 345
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	3	30.201.570	129.933.526.834	296.059.617.170	425.993.144.004
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	2	5.399.398	93.572.166.819	-	93.572.166.819
	USD	5	364.052.226	1.204.487 985 144	3 930.468.663.714	5.134.956 648.858
PT MANDIRI HONGKONG	USD	5	155.440 999	84.210.656.262	2 108.284.632.940	2.192.495 289.202
PT. BNI-HONG KONG	USD	4	65.685.073	193 857.485.372	732.630 466.896	926.487.952.267
PT. BNI-SINGAPORE	GBP	1	-	-	-	-
	USD	26	164.291.001	860 891 961.641	1 456.432.609 298	2.317.324.570.939
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3	9.787.072	42.402.760 317	127.208.281.992	169 611.042.310
RUSIA FED.	USD	7	151.924.933	405.346.111.853	1.737.555.064.586	2.142.901.176.439
SACE	EUR	1	80.219	1.390.205.654	-	1.390.205.654
	USD	1	375.685	5.299.039.605	-	5.299.039.605
SERV	CHF	5	10.378.154	150 770.479.810	15.094 208.265	165.864.688 075

LAMPIRAN 28.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2020

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
SFD	SAR	3	178.081.552	54.289.552.447	615.053.110.557	669 342.663.004
SOCIETE GENERALE	EUR	1	5.808.460	33.553.750 255	67.107 500.476	100 661.250.731
UBS, ZURICH	CHF	1	22.829.629	45.608.176.306	319.257.234.139	364.865.410 444
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	26	155.204.466	441.226.344.980	2.248.484.115.666	2.689 710 460.646
UNICREDIT MUNICH	EUR	1	1.854.136	21.421.581.909	10.710 790.781	32.132.372.690
US DEP TREASURY	USD	1	640 160	9.029.455.813	-	9.029.455.813
US EXIM	USD	7	46 633.973	334.480.257.983	323.291.935.414	657.772.193.397
USAID	USD	105	120.849.804	447 074.919.337	1 257.511 562.924	1.704.586.482.260
USDA	USD	7	60.156.369	223.563.695.645	624.941.886.702	848.505.582 347
Grand Total		**1188**	**1.310.382.053.573**	**47.627.590.019.073**	**325.139.929.335.404**	**372.767.519.354.477**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0035	15/06/2022	(2.844.128.000)	-
2	FR0037	15/09/2026	(44.973.507.000)	-
3	FR0039	15/08/2023	(9.074.201.000)	-
4	FR0040	15/09/2025	(8.212.757.000)	427.527.999.000
5	FR0042	15/07/2027	(82.903.106.000)	37.450.202.000
6	FR0043	15/07/2022	(28.055.346.000)	16.053.055.000
7	FR0044	15/09/2024	(399.182.552.000)	7.715.793.000
8	FR0045	15/05/2037	(35.007.667.000)	584.532.631.000
9	FR0046	15/07/2023	(444.153.584.000)	150.165.763.000
10	FR0047	15/02/2028	(665.979.133.000)	25.320.475.000
11	FR0050	15/07/2038	(421.926.427.000)	127.889.284.000
12	FR0052	15/08/2030	(246.430.071.000)	92.654.514.000
13	FR0054	15/07/2031	(322.321.667.000)	331.538.858.000
14	FR0056	15/09/2026	(590.465.763.000)	1.570.162.740.000
15	FR0057	15/05/2041	(26.025.129.000)	1.065.068.391.000
16	FR0058	15/06/2032	(37.142.966.000)	3.369.050.478.000
17	FR0059	15/05/2027	(839.180.760.000)	919.958.899.000
18	FR0061	15/05/2022	(102.700.580.000)	532.903.994.000
19	FR0062	15/04/2042	(342.505.291.000)	100.702.324.000
20	FR0063	15/05/2023	(1.928.698.006.000)	86.805.937.000
21	FR0064	15/05/2028	(3.869.936.757.000)	109.451.846.000
22	FR0065	15/05/2033	(3.561.306.585.000)	552.281.477.000
23	FR0067	15/02/2044	(361.148.477.000)	961.496.146.000
24	FR0068	15/03/2034	(1.939.163.409.000)	1.475.633.369.000
25	FR0070	15/03/2024	(281.646.040.000)	1.097.530.202.000
26	FR0071	15/03/2029	(155.893.748.000)	2.419.762.530.000
27	FR0072	15/05/2036	(588.026.947.000)	2.475.110.212.000
28	FR0073	15/05/2031	(164.817.344.000)	3.118.710.115.000
29	FR0074	15/08/2032	(382.988.844.000)	449.006.751.000
30	FR0075	15/05/2038	(1.763.471.819.000)	1.137.539.357.000
31	FR0076	15/05/2048	(2.783.301.032.000)	222.620.336.000
32	FR0077	15/05/2024	(143.425.063.000)	1.007.855.093.000
33	FR0078	15/05/2029	(220.441.483.000)	2.267.291.396.000
34	FR0079	15/04/2039	(195.591.890.000)	1.294.356.963.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
35	FR0080	15/06/2035	(852.711.389.000)	1.625.359.961.000
36	FR0081	15/06/2025	(1.604.808.724.000)	645.585.547.000
37	FR0082	15/09/2030	(3.368.640.291.000)	471.654.873.000
38	FR0083	15/04/2040	(715.607.850.000)	778.479.832.000
39	FR0084	15/02/2026	(192.249.407.000)	-
40	FR0085	15/04/2031	(160.146.009.000)	-
41	FR0086	15/04/2026	(146.669.419.000)	234.772.026.000
42	FR0087	15/02/2031	(774.544.734.000)	449.503.122.000
Grand Total			**(30.804.319.902.000,00)**	**32.239.502.491.000,00**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12/10/2035	-	562.118.653.000
2	RI0037	17/02/2037	(116.759.743.000)	-
3	RI0038	17/01/2038	(240.037.531.000)	-
4	RI0122	08/01/2022	(4.733.311.000)	-
5	RI0123	11/01/2023	(12.752.670.000)	-
6	RI0124	15/01/2024	(41.038.651.000)	-
7	RI0125	15/01/2025	(61.888.716.000)	-
8	RI0126	08/01/2026	(62.425.051.000)	-
9	RI0127	08/01/2027	(41.062.429.000)	-
10	RI0128	11/01/2028	(50.024.508.000)	-
11	RI0142	17/01/2042	(208.278.812.000)	150.798.142.000
12	RI0144	15/01/2044	(234.847.113.000)	-
13	RI0145	15/01/2045	(229.101.899.000)	-
14	RI0146	08/01/2046	(101.279.335.000)	-
15	RI0147	08/01/2047	(131.917.172.000)	-
16	RI0148	11/01/2048	(177.571.558.000)	-
17	RI0224	11/02/2024	(9.744.277.000)	-
18	RI0229	11/02/2029	(36.635.160.000)	-
19	RI0230	14/02/2030	(38.974.654.000)	-
20	RI0249	11/02/2049	(62.620.371.000)	-
21	RI0250	14/01/2050	(97.582.494.000)	-
22	RI0422	25/04/2022	(19.905.963.000)	-
23	RI0423	15/04/2023	(34.866.863.000)	-
24	RI0428	24/04/2028	(24.798.696.000)	-
25	RI0443	15/04/2043	(215.109.511.000)	-
26	RI0470	15/04/2070	(153.440.257.000)	-
27	RI0727	18/07/2027	(35.811.087.000)	-
28	RI0747	18/07/2047	(93.183.965.000)	-
29	RI0929	18/09/2029	(39.936.041.000)	-
30	RI1023	17/10/2023	(16.689.235.000)	-
31	RI1030	15/10/2030	(103.161.047.000)	-
32	RI1049	30/10/2049	(120.609.417.000)	-
33	RI1050	15/10/2050	(215.149.241.000)	-
34	RIEUR0227	14/02/2027	(47.564.545.000)	-
35	RIEUR0425	24/04/2025	(20.487.225.000)	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
36	RIEUR0623	14/06/2023	(72.758.079.000)	-
37	RIEUR0628	14/06/2028	(205.575.581.000)	-
38	RIEUR0724	18/07/2024	(13.995.472.000)	-
39	RIEUR0725	30/07/2025	(126.236.520.000)	-
40	RIEUR0926	18/09/2026	(24.354.862.000)	-
41	RIEUR1031	30/10/2031	(18.582.120.000)	-
Grand Total			**(3.561.491.182.000)**	**712.916.795.000**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi SBSN Rupiah
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15/03/2030	(4.444.737.000)	12.012.293.000
2	IFR0007	15/01/2025	(5.974.187.000)	7.332.820.000
3	IFR0010	15/02/2036	(14.070.564.000)	236.268.906.000
4	PBS002	15/01/2022	(412.739.730.000)	38.177.547.000
5	PBS003	15/01/2027	(1.284.674.001.000)	1.685.658.000
6	PBS004	15/02/2037	(2.730.260.222.000)	-
7	PBS005	15/04/2043	(4.453.725.796.000)	-
8	PBS007	15/09/2040	(13.061.490.000)	467.117.767.000
9	PBS011	15/08/2023	(2.577.647.000)	598.771.891.000
10	PBS012	15/11/2031	(53.691.168.000)	2.508.477.812.000
11	PBS015	15/07/2047	(858.732.133.000)	392.618.606.000
12	PBS017	15/10/2025	(1.947.152.458.000)	126.369.555.000
13	PBS018	15/05/2028	(51.932.090.000)	-
14	PBS019	15/09/2023	(31.891.627.000)	851.165.557.000
15	PBS020	15/10/2027	(18.301.092.000)	3.464.654.000
16	PBS021	15/11/2026	(3.246.327.000)	331.477.084.000
17	PBS022	15/04/2034	(21.535.030.000)	590.110.180.000
18	PBS023	15/05/2030	(4.583.674.000)	119.479.893.000
19	PBS024	15/05/2032	(17.904.551.000)	8.621.089.000
20	PBS025	15/05/2033	(24.118.147.000)	2.025.966.447.000
21	PBS026	15/10/2024	(172.601.470.000)	1.144.153.993.000
22	PBS027	15/05/2023	(6.103.672.000)	549.839.718.000
23	PBS028	15/10/2046	(113.528.824.000)	1.212.799.214.000
24	SW001	10/03/2025	(2.081.783.000)	-
Grand Total			**(12.248.932.420.000)**	**11.225.910.684.000**

LAMPIRAN 29
IKHTISAR LK UBL

LAMPIRAN 29.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	6 719 295		6 717 605			6 717.605	1.690		Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						0	0		Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	147 250 000		145 034 500			145 034 500	2 215 500		Bagian satker	018
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2 402 268		2 402 268			2 402.268	0		Bagian satker	050
5	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	152 509 806	6 310 999	124 136 663	17 650 658		148 098.320	4 411 486		Satker	026
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	12 000 000		12 000 000			12 000.000	-	3 485 733	Bagian satker	025
7	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM)	13 348 784	5 232 524	7 536 648	695 713		13 464.885	(116 101)		Satker	033
8	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	249.700.000	46.931.684	144.997.629	31 142 914		223 072.227	26 627 773		Satker	020
9	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	0				0			Bukan satker	025
10	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	19.204.129	7 811 887	9 452 486	834 478		18 098 851	1 105 278		Satker	090
11	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1 174 600		1 137 276			1 137 276	37 324		Bagian satker	088
12	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (BAPERTARUM-PNS)						0	0		Bukan satker	091
13	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0		tidak aktif	040
14	Badan Restorasi Gambut	157 814 015	6.651.167	144 129 010	3 685 681		154 465.858	3 348 157		Satker	029
15	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	8 000 000	3.960.839	1 688.830	2.350.323		7.999.992	8		Bukan satker	025
16	Dewan Energi Nasional (DEN)	49.050.204	14.526.956	29 094 399	3.211 198		46 832.553	2 217 651		Satker	020
17	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	19 423.063		17.452.579	887.106		18.339.685	1.083.378		Satker	036
18	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	250 558 768				212.910 688	212 910.688	37 648 080		Satker	999
19	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	917 025		842 486			842 486	74 539		Bagian satker	018
20	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	14 500 000				14.500 000	14 500 000			Bagian satker	044
21	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	16 349 456	1.757.969	14 255.852	50 971		16 064.792	284 664		Satker	035
22	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	811 731		809 482			809 482	2 249		Bagian satker	026
23	Dewan Pers	14 155 288	3.581.656	9 453 724	270 130		13 305 510	849 778		Satker	059
24	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	191.423.000		191 408 800			191 408 800	14 200		Bagian satker	010
25	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	29 103 107	3.246.149	24.498.212	517.834		28.262.195	840.912		Satker	007
26	Dewan Riset Nasional (DRN)	4 862 623		3 024 685			3.024 685	1 837 938		Bagian satker	042
27	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	15 644 878	307 619	13 476 259	995 606		14 779.484	865.394		Satker	033

LAMPIRAN 29.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
28	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	3 823 043		3.810.641			3.810 641	12.402		Bagian satker	055
29	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	39 614 155	11.158.267	18 141 180	6 758 965		36.058.412	3 555 743		Bagian satker	048
30	Komisi Banding Merek	1 003 698		1 002 866			1.002 866	832		Bagian satker	013
31	Komisi Banding Paten	723 689		696 153			696 153	27 536		Bagian satker	013
32	Komisi Informasi Pusat (KIP)	20 454 672	5.306 988	13 736 994	449 060		19 493 042	961 630		Satker	059
33	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	739 700 000		739 700 000			739 700 000	-		Bagian satker	043
34	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	12 935 613	2 860.682	8 526 454	1 053 938		12 441 074	494 539		Bagian satker	034
35	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	18 300 234	3.573.921	13 297 463	1 117 455		17 988 839	311 395		Bagian satker	034
36	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	22 553.474	6.962.506	12 236.977	934.678		20 134.161	2.419.313		Bagian satker	074
37	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	42.866 265	6.574.983	31.664.724	1 299 868		39.539.575	3 326.690		Satker	059
38	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	11 403 767	2.266.256	9.032.053	35 026		11 333.335	70.432		Satker	047
39	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	24 332 332		18 288 450	5 905 338		24 193.788	138 544		Satker	084
40	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	3 466 175		3 360 419		-	3.360.419	105 756		Bagian satker	012
41	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	935 242	-	934 105			934 105	1 137		Bagian satker	035
42	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	22 100 000		22 043 055	-	-	22 043 055	56 945		bagian satker	055
43	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	15 462 311		15 190 475			15 190.475	271 836		Bagian satker	035
44	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	217.400		185 414			185.414	31 986		Bagian satker	078
45	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	38.201 945	8.247.154	26 242.716	2.619 353		37.109.223	1 092 722		Satker	022
46	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	-				0	0		Bagian satker	092
47	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Olahraga									tidak aktif	92
48	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	2 413 329	-	2 282 661			2.282 661	130 668		Bagian satker	048
49	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)						0	0		Tidak aktif	041
50	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3 589 964		3 339 582	137 786		3 477 368	112 596		Satker	015
51	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-		Tidak aktif	084
52	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	27 178 942	-	24.064.114	1 089.208		25 153 322	2.025.620		Satker	024
53	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	727 245		720 245			720 245	7 000	181 156	Bagian satker	088

LAMPIRAN 29.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
54	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.046 560		1 898 910			1.898.910	147 650		Bagian satker	026
55	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	101 412 918	12.441.761	86 970 441	993 444		100 405 646	1 007 272		Satker	007
56	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	879 297		851 905			851 905	27 392		Bagian satker	026
57	Lembaga Sensor Film (LSF)	37 750 000	11 675.757	21 382 547	1 994 565		35 052 869	2 697 131		Satker	023
58	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						0	0		Tidak aktif	024
59	Otorita Asahan						0	0		Likuidasi	019
60	Sekretariat Pengadilan Pajak	102 182 547	33 036.400	7 738 483	678 713		41 453 596	60 728 951		Satker	015
61	SKK MIGAS (Satker)	1 684 843.355				1.421 496.063	1 421 496 063	263 347 292		satker	999
62	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.684.843 355				1.421.496.063	1.421.496.063	263 347 292		Bukan satker	999
63	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	4.767.972		3 970 291			3.970.291	797.681		Bagian satker	114
64	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)						0	0	5 992 017 791	Bukan Satker	999
65	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)						0	0		Satker	999
66	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						0	0		Bukan Satker	007
67	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						0	0		Bukan Satker	007
68	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPODT)	98 418 371	3 595.624	72 098 168	3 219 781		78 913 573	19 504 798		Satker	040
69	Otoritas Nasional Senjata Kimia						0	0		tidak aktif	019
70	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	76 145 141	3.042.219	26.035.914	34 859 040		63 937 173	12 207 968		satker	040
71	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia						0	0		Bagian satker	024
72	Komite Cipta Kerja	20 000 000				18 252 242	18 252 242	1 747 758		Bagian satker	999
73	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	29 798 585		28 995 721			28 995 721	802 864		Bagian satker	036
74	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19	37 221 007	2.368 350	34 989 383	8 245 121	0	45 602.854	-8 381 847	16 999.915	bagian satker	024
	JUMLAH	**6.309.234.643**	**213.430.317**	**2 156.977.897**	**133.683.951**	**3.088.655.056**	**5 592.747.221**	**716.487.422**	**6.012.684.595**		

LAMPIRAN 29.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	451 583 080	-	451 583 080	362 979 478	-	362 979.478	88 603 602	025	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	460 640	-	460.640	129.929 181	(599 971)	129 329.210	(128 868 570)	026	Satker
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM)	-	45.588	45.588	13.282.664		13.282.664	(13.237 076)	033	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	-	-	-		-	-		020	Satker
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	12 000 000	3.485 733	15.485 733	12.000.000	10 174.835	22.174.835	(6.689 102)	025	Satker
8	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	7 419 396 705	657.090 242	8 076.486 947	2 310.954 912		2 310 954 912	5 765 532.035	025	Bukan satker
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)		373 013	373.013	17 518 482	291.226	17 809.708	(17 436 695)	090	Satker
10	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)		-	-	-		-		091	Bukan satker
11	Badan Restorasi Gambut	21 218	521.411	542.629	306.003 834	22.224.517	328 228.351	(327 685.722)		
12	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	8.000 000	48.808	8.048.808	7 999.976	2 943	8.002.919	45.889	025	Bukan satker
13	Dewan Energi Nasional (DEN)	8 960	491 273	500.233	500.234	287.209	787 443	(287 210)	020	Satker
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)		20	20	18.975 762	165	18.975.927	(18 975 907)	036	Satker
15	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	7.091	2.043 193	2.050 284	43.240.021	9.418	43.249.439	(41 199 155)	999	Satker
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	300	18 574	18.874	16.092.434	1 531	16.093.965	(16.075.091)	035	Satker
17	Dewan Pers		538	538	12.878.955	817	12.879.772	(12.879.234)	059	Satker
18	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	47 345	47 345	27.735.223	11 233	27.746.456	(27 699 111)	007	Satker
19	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	157	157	14.156 223	-	14 156.223	(14 156 066)	033	Satker
20	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	-	19 194	19 194	35.768 513	20 765	35 789.278	(35 770 084)	048	
21	Komisi Informasi Pusat (KIP)	157	-	157	18.935.721	(9 783)	18.925.938	(18.925.781)	059	Satker
22	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	159 285	159 285	41.191.243	-	41.191.243	(41.031 958)	059	Satker
23	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	1.342	7.805	9 147	11.790.302	42 832	11.833.134	(11 823 987)	047	Satker
24	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	21.434	21.434	15.890 884	-	15.890.884	(15 869 450)	055	bagian Satker
25	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	56 410	56.410	38.051 044	13 959	38 065.003	(38 008 593)	022	Satker

LAMPIRAN 29.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14	11
26	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)		10.343	10.343	3 343.519	308	3.343 827	(3 333.484)	015	Satker
27	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	11 216 494	20.672	11 237 166	26.465 035	35 266	26.500 301	(15 263 135)	024	Satker
28	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	86	69.039	69.125	106.647.319	6 282	106 653 601	(106.584 476)	007	Satker
29	Lembaga Sensor Film (LSF)	2.011 053	311 379	2.322 432	35.774 377	113.372	35.887.749	(33.565.317)	023	Satker
30	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-					024	Tidak aktif
31	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)			-	17.988.839		17.988.839	(17.988 839)	34	Bagian Satker
32	Sekretariat Pengadilan Pajak	22 346	215 759	238.105	88.324 332	56 865	88.381 197	(88.143 092)	015	Satker
33	SKK MIGAS (Satker)	1.421.496 311		1 421 496 311	1 496.341.707	42 588.491	1.538 930 198	(117.433 887)	999	satker
34	SKK MIGAS (Bukan Satker)	86.391		86.391	1 422.205.644		1 422 205.644	(1 422.119.253)	999	Bukan satker
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.141.803.943	152.121	6 141.956 064	6 077.883.724	-	6.077 883 724	64.072 340	999	Bukan Satker
36	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	28.534	28.534	21.569.003		21.569.003	(21 540 469)	999	Satker
37	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	44 198 026	330 410	44 528 436	61 517 641	4.537 608	66.055 249	(21 526 813)	007	Bukan satker
38	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	6.718 209	-	6.718 209	6 311 979	-	6 311 979	406 230	007	Bukan satker
39	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	8 677	54 365	63 042	31.095 632	46 425	31.142.057	(31.079.023)	040	satker
40	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	153	6.268	6 421	29.439 418	123.456	29.562.874	(29.556.453)	040	satker
41	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)		-	-	185.413 601	-	185 413.601	(185 413 601)	078	satker
42	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)		1.493.439	1.493.439	1.052	3.004.946	3.005.998	(1 512.559)	-	satker
43	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)			-	-		-		0	
	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.046.560		2 046 560				2.046 560	0	
44	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)		-	-	2 282 661		2.282 661	(2.282 661)	-	satker

LAMPIRAN 29.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14	11
45	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan			-	145 034.500	-	145 034 500	(145.034 500)		satker
46	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	27.510.516		27.510 516	24.193.788		24 193 788	3.316.728		satker
47	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	4 471.424	4.490.661.942	4.495 133.366	53 676.290.156	47 110.252	53 723.400.408	(49.228.267 042)		satker
	J U M L A H	**15.553.069.682**	**5.157.784.294**	**20.710.853.976**	**66.913.999.013**	**130.094.967**	**67.044.093.980**	**(46.333.240.012)**		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	134 379 512	-	41 453 933	-	175 833 445	1 341 126		1 341 126	174 492 319	175 833 445	Bukan
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	2 651 969		39 864 476	186 229	42 702 674	23 590		23 590	42 679 084	42 702 674	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda									-		Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum											Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)											Satker
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	54 945 529 389	90 713 181 900	79 614 515	33 434 662	145 771 760 466	8 805 106 732	126 138 459 918	134 943 566 650	10 828 193 816	145 771 760 466	Bukan
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	144 525		973 688	251 568	1 369 781				1 369 781	1 369 781	Satker
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM				-	-					-	Bukan
10	Badan Restorasi Gambut	99 525 448		24 283 426	10 837 763	134 646 637	-	-		134 646 637	134 646 637	Satker
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	11 707 716		57 085 345		68 793 061	103 000	56 951 215	57 054 215	11 738 846	68 793 061	Bukan
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	178 294		3 718 123	14 000	3 910 417	-		-	3 910 417	3 910 417	Satker
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	295 642		1 142 892		1 438 534	26 839		26 839	1 411 695	1 438 534	Satker
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau		-	597.789.638	3.301.928	601.091 566				601.091.566	601.091.566	Satker
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	128 754		132 277	30 113	291 144	135 004		135 004	156 140	291 144	Satker
16	Dewan Pers	234 899		1 587 172	169 750	1 991 821	42 175		42 175	1 949 646	1.991 821	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	1 191 424		857 824	173 423	2 222 671	7.282		7 282	2 215 389	2 222 671	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	9 435	-	1 166 427		1 175 862				1 175 862	1 175 862	Satker
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	117 454		47 502.561	566 164	48 186 179	134 789		134 789	48 051 390	48 186 179	Satker
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	233		687 962	5 937	694 132				694 132	694 132	Satker
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	306 801		5 425 104	130 892	5 862 797				5 862 797	5.862 797	Satker
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	180 093		1 087 043	190 719	1.457.855				1 457 855	1.457 855	Satker
23	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	-			-				-	-	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	36 200	-	4 469 209	12 755 169	17 260 578				-	17 260 578	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	37 641		115 972		153 613				153 613	153 613	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	1 820 913		163 629 070	568 771	166 018 754	315 535		315 535	165 703 219	166 018 754	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)			179 699.882	387 474	180 087 356	102 460		102 460	179 984 896	180 087 356	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	1 731 808		8 232 749	497 109	10 461 666	501		501	10 461 165	10 461 666	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)									-		Tidak aktif

LAMPIRAN 29.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
30	Otorita Asahan	2 471 153		4 615 662		7 086 815	234 422		234 422	6 852 393	7 086 815	Bukan satker
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	985 988		17 125.454	-	18 111 442		-		18 111 442	18 111 442	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	18 102 820		59 337 619		77 440 439	87 086.389	1 184 327.682	1 271 414 071	(1 193 973 632)	77 440 439	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	19 208 019		57 584 615	52 463 840	129 256 474	2 951 484		2 951 484	126 304 990	129 256 474	Bukan
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6 608 322 173		1 793 806.010	953 078 743	9 355 206 926	374 160 212	2 661 712 963	3 035 873 175	6 319 333 751	9 355 206 926	Bukan
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	475 834		48 620 378	17 034 756	66 130 968				66 130 968	66 130 968	Satker
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	15 079 345	-	106 256 551	4 919 767	126 255 663	47 577.940	10 308 850	57 886 790	68 368 873	126 255 663	Bukan
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	2 887 878		3 241 101		6 128 979	18 748		18 748	6 110 231	6.128 979	Bukan
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	1 092 707		57 010 423	424 417	58 527 547	13 530		13 530	58 514 017	58 527 547	Satker
39	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)			4 700 481	25 845	4 726.326	-			4 726 326	4 726 326	Satker
40	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	387 156		35 860.446	8.000	36 255 602	26 600		26 600	36 229 002	36 255 602	Satker
	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS-TN)			2 046 560		2 046 560				2 046 560	2.046 560	Satker
41	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	2 411 156 918				2 411 156 918				2 411 156 918	2 411 156 918	Satker
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)			233 544 022		233 544 022				233 544 022	233 544 022	
43	DPN Korpri	4 368 620	-	181 156	37 500	4.587 276				4 587 276	4.587 276	
44	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)		-	1 117 455		1 117 455				1 117 455	1.117 455	Satker
45	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN					-				-		Satker
46	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan					-						Satker
47	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	594 225 795	-	104 444 745 662	67 100 000	105 106 071 457				105 106 071 457	105 106 071 457	Satker
48	Komite TPPU		-			-				-		Satker
	TOTAL	**61.868.834.067**	**90.713.181.900**	**108.130 312 883**	**1.158.594.539**	**264.881.061 877**	**9.319.408.358**	**130 051.760.628**	**139.371.168.986**	**125 509 892.892**	**264.881.061.877**	

LAMPIRAN 30
DANA KELOLAAN BLU
PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)	
1	BTN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	Rp	54.528.048.139,87
2	MANDIRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	126-00-0703519-8	Rp	7.288.234,36
3	BTN SYARIAH	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7011001717	Rp	1.256.981,00
4	BUKOPIN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1023938011	Rp	4.504.648.262,14
5	BANK RIAU KEPRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10-10-00010-6	Rp	1.062.312,77
6	BANK SUMUT	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	350.01.06.0000054	Rp	1.243.309,58
7	BANK SUMUT Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	610.01.06.000008-0	Rp	1.806.000,13
8	BANK Kaltim	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	11100252	Rp	1.643.651,98
9	BANK Sumsel Babel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1703000001	Rp	1.476.220,65
10	BANK NTT	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	016.01.01.000014-6	Rp	43.225.422,98
11	BANK DIY	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1111001471	Rp	1.709.671,27
12	BRI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	0193-01-002945-30-6	Rp	6.490.236,73
13	BNI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2226662828	Rp	320.143.249.046,00
14	BRI SYARIAH	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1030811328	Rp	5.565.928,66
15	BPD JATIM	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	11268862	Rp	89.547.551,99
16	BPD JATIM Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	6101003780	Rp	1.812.289,19
17	BPD JATENG	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1-034-02557-2	Rp	1.528.621,00
18	BPD Papua	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1500105000063	Rp	1.969.890,81
19	BPD Kalteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1000102003656	Rp	1.389.073,00
20	BPD Kalsel	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	003.00.04.00848.5	Rp	96.238.723,32
21	Bank Syariah Mandiri	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7122212216	Rp	13.583.008,30
22	BPD Nagari (Sumbar)	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2100.0101.01446-1	Rp	1.875.072,30
23	BPD Sulawesi Tenggara	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	001.01.05.500231-0	Rp	1.073.938,00
24	Bank Artha Graha	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1075015719	Rp	2.178.321,73
25	Bank NTB	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	001.21.07109.00-6	Rp	1.790.722,69
26	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	8000000000003	Rp	1.427.233,00
27	Bank Mayora	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	6000486815	Rp	1.167.624,21
28	Bank Sumsel Babel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	801-32-00002	Rp	1.024.714,41
29	Bank Jambi	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	3000947217	Rp	1.058.906,96
30	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	70102000901	Rp	1.787.853,78
31	Bank Sulselbar Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	510-052-000000004-7	Rp	1.183.746,24
32	Bank Sulut Go	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1601420000036	Rp	1.027.737,18
33	Bank Sulselbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	Rp	2.491.622,19
34	Bank Kalbar	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1000001909	Rp	1.614.032,42
35	Bank Sulteng	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	10101000353	Rp	1.911.171,24
36	Bank Bali	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	100121000548	Rp	26.363.258,11
37	Bank Kalsel Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	901.00.01.00303.8	Rp	2.047.119,87
38	Bank Aceh Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	610 01.01.000007-0	Rp	39.872.008,49
39	BTPN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5373000630	Rp	41.178.427,00
40	Bank Jambi Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7001170273	Rp	1.434.737,74
41	Bank Kaltimtara syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5100052101	Rp	3.111.343,05
42	Bank Jateng Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5031004003	Rp	1.087.478,00
43	Bank DKI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	40001208662	Rp	10.714.772,00
44	KEB Hana	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	110121800087211	Rp	1.100.936,60
45	BRI Agro	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1001000505407	Rp	1.870.806,45
46	Bank Nagari Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	7100010600084	Rp	1.730.460,00
47	Bank Riau Kepri Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	82-00-30000-1	Rp	1.105.847,96
48	Bank BNI Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	107-107-3773	Rp	1.659.021,00
49	Bank Kalbar Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	2012011001733	Rp	1.372.065,00
50	Bank BTN	Pengelolaan Kas	00001-01-40 028682-4	Rp	350.000.000.000,00
51	Bank Sulselbar	Pengelolaan Kas	5285.3/DEP/2020	Rp	100.000.000.000,00
52	Bank Jateng	Pengelolaan Kas	A319475	Rp	100.000.000.000,00
53	Bank Jateng	Pengelolaan Kas	A319474	Rp	180.000.000.000,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
1	BTN	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	Rp 54.528.048.139,87
54	Bank Jabar Banten (BJB)	Pengelolaan Kas	0136 DEP-2020IDR001084	Rp 280.000.000.000,00
55	Bank BTN	Pengelolaan Kas	00001-01-40-029007-7	Rp 70.000.000.000,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)				**Rp 1.459.611.043.553,35**
Selisih kas rekening Dana Kelolaan (2)				***(1.459.107.186.167,86)**
Total Saldo Dana Bergulir Sesuai Rekening Koran (3=1-2)				****503.857.385,49**
Total Aset Lainnya (4=3)				**503.857.385,49**

LAMPIRAN 31
TRANSFER KELUAR
TRANSFER MASUK

LAMPIRAN 31

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2020

No	Kode BA	Uraian	Neraca Percobaan		
			Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	29 032 632 758	1 340 646.350	27 691 986 408
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		18 149 258 420	(18 149 258 420)
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	59 705.276 491	59 705.276 491	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	247.462 647.483	243 742.676.931	3.719.970.552
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1 489 036 605 729	1.559 246.295 684	(70 209 689 955)
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	311.858 849 114	671 766 450 083	(359 907 600 969)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2 687 345 014 608	2.691 219 554 722	(3 874 540 114)
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	56.465 301 133	92 149 219 271	(35 683 918 138)
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	80 794.242 891 811	85.018 572 609 439	(4 224 329 717 628)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.142 175 253 264	1 113 665 288 102	28 509 965 162
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	4.334.511 315 051	3.407 698 322 704	926 812 992 347
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7 204 484 740 261	7.092 975 097 714	111 509 642 547
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	158.965 770.306	151 891.905.154	7 073.865 152
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	96.831 826 754	83.518 350.794	13.313 475.960
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	12.411 988 084 586	12 410 984 479 586	1 003 605 000
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	5 190.105 869 565	394.006 614 101 872	(388 816 508 232 307)
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.633 136 725 717	1 626 702 309 345	6 434 416 372
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	663.364 427 477	1 072 987 423 593	(409 622 996 116)
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	478 288.077 219	478 288 077 219	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	183.533 292 531	175 509 708 953	8 023 583.578
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6 357 022 957 826	6.372 941 465 267	(15 918 507 441)
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	382 054 676 699	384 008 176 896	(1 953 500 197)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	528.158.865.219.364	522.026.388.199 715	6 132.477 019 649
24	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	28.080.227.161	1 465.333.700	26 614.893 461
25	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	296 100 814	-	296 100 814
26	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	185 697 455 362	226 163 614 657	(40 466 159 295)
27	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	23 194 600 000	(23 194 600 000)
28	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	389 232 078 903 649	178 907 920 341	389 053 170.983 308
29	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	173 153 074 750	173 061 361 967	91 712 783
30	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51 345 967	143 058 750	(91.712 783)
31	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	188 787 665	36 743.387 000	(36 554 599 335)
32	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.237 049 485	45 107 764 970	(42.870 715 485)
33	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA		-	-
34	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	171 240 169 425	171 240 169.425	-
36	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	18.414 908 365	5 875 638 682	12 539 269 683
37	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	423 926 233 479	461 321 298 312	(37.395 064 833)
38	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3 987 000	49 198 000	(45 211 000)
39	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	410.973 027 121	240 883 882 550	170 089 144 571
40	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	27.440 130 070 189	27 499 232 001 840	(59 101 931 651)
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5.604 813 018	20 544 465 141	(14 939 652.123)
42	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL			
43	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	365.291 458.595	375 289.873 595	(9 998.415.000)
44	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	96.788.544 823	90.190.438.042	6 598 106 781
45	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	109.290.910.755	109.290 910 755	
46	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	665 930 048	-	665 930 048
47	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	157.714 435 056	157 353 013 453	361 421 603
48	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	32.085 449 357	32 085 449 357	-
49	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	71 349 632	28 080 227 161	(28 008 877 529)
50	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-
51	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	26 311 261 285 956	26.322 375 917 546	(11 114 631 590)
52	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	10.850 445 451	11 007 415 045	(156.969 594)
53	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	21.529 043 065	69 002.243 448	(47 473.200 383)
54	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.784 063.880	7.511 926.880	(4.727.863.000)
55	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	141 047.500	9 315.243 500	(9.174 196.000)
56	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	-	-	-
57	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	9.269 438 353	5 181 724 612	4 087 713 741
58	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	33.285 740	233 091 733	(199 805 993)
59	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	60.122 517 402	60 122 517 402	
60	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2 291 697 310	2 738 884 018	(447 186 708)
61	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	31 294 992 347	5 908 420 606	25 386 571 741
62	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	74.034 373 105	73 852 702 942	181 670 163
63	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	28.104 472.483	3 607.425.381	24 497.047 102
64	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	136.257 722.336	-	136.257 722.336
65	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	947.279.094	-	947.279 094
66	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	74.146 919 100	48 042 028 772	26 104 890 328
67	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	163 676 000	163 676 000	-
68	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)			

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2020

No	Kode BA	Uraian	Neraca Percobaan		
			Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
69	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		12 093 743 333	(12 093 743 333)
70	107	BADAN SAR NASIONAL	724.272 190 880	741 732 360 648	(17 460 169 768)
71	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	324 860.937	175.805.351	149 055 586
72	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	-	-	-
73	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA		24 803 620 584	(24 803 620 584)
74	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	1.100 736 543 801	(1 100 736 543 801)
75	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	4 108.034 302 987	4.121 844 582 012	(13 810 279 025)
76	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-		-
77	114	SEKRETARIAT KABINET	12.666 118 782	-	12 666 118 782
78	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	8 482 211 067	85 873 800 044	(77.391 588 977)
79	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	39.475 601 397	67 930 010 879	(28 454 409 482)
80	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	204 474 071 108	260 431 032 608	(55 956 961 500)
81	119	BADAN KEAMANAN LAUT	20.408 068.597		20 408.068.597
82	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	47 415.471.918	-	47 415.471.918
83	121	BADAN EKONOMI KREATIF	41.424 261 735		41 424 261 735
84	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA		2 576 451 385	(2 576 451 385)
TOTAL			1.104.894 671.105.990	1.103 673.549.670.530	1 221.121.435.460

LAMPIRAN 32
REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	131111	Tanah	0
2	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	0
3	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
4	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	131111	Tanah	1.759.629.616
5	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	14.526.793.706
6	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134111	Jalan dan Jembatan	0
7	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134112	Irigasi	0
8	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-164.758.744
9	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
10	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					16.121.664.578
11	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	131111	Tanah	0
12	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	200.922.594
13	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	0
14	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134112	Irigasi	53.604.278
15	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.959.704

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
16	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
17	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.352.888
					284.839.464
18	005	MAHKAMAH AGUNG	131111	Tanah	41.990.257.147
19	005	MAHKAMAH AGUNG	132111	Peralatan dan Mesin	0
20	005	MAHKAMAH AGUNG	133111	Gedung dan Bangunan	155.966.159.420
21	005	MAHKAMAH AGUNG	134111	Jalan dan Jembatan	159.250.332
22	005	MAHKAMAH AGUNG	134112	Irigasi	584.968.145
23	005	MAHKAMAH AGUNG	135121	Aset Tetap Lainnya	0
24	005	MAHKAMAH AGUNG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
25	005	MAHKAMAH AGUNG	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-771.897.935
26	005	MAHKAMAH AGUNG	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-4.112.572
27	005	MAHKAMAH AGUNG	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	294.078.173
					198.218.702.710
28	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	72.459.176.340
29	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	67.163.216.946
30	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	594.876.000

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
31	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	-931.341.000
32	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.207.653.246
33	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
34	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					140.493.581.532
35	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	131111	Tanah	0
36	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	0
37	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	0
38	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134112	Irigasi	0
39	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
40	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
41	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					0
42	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	211.185.000
43	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	57.150.418.375
44	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	66.026.000
45	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134112	Irigasi	6.519.805.900

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
46	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.003.475.692
47	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
48	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.329.982.135
					72.280.893.102
49	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	131111	Tanah	18.902.067.012
50	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	23.052.050.000
51	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	0
52	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.120.200.000
53	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
					51.074.317.012
54	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131111	Tanah	2.787.703.220.784
55	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	132111	Peralatan dan Mesin	0
56	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	133111	Gedung dan Bangunan	2.748.844.706.055
57	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134111	Jalan dan Jembatan	332.193.932.412
58	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134112	Irigasi	53.215.100.506
59	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
60	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	591.854.329.165

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
61	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	157.619.840.256
62	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	15.112.458.252
					6.686.543.587.430
63	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	131111	Tanah	42.919.139.402
64	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	133111	Gedung dan Bangunan	-5.307.173.579
65	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	134111	Jalan dan Jembatan	-2.224.410.000
66	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	134112	Irigasi	-293.730.012
67	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.307.226.772
68	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
69	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	20.479.551
					37.421.532.134
70	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	131111	Tanah	0
71	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	0
72	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	0
73	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134112	Irigasi	0
74	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
75	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
76	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
77	015	KEMENTERIAN KEUANGAN			-11.195.694.130
					-11.195.694.130
78	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	131111	Tanah	-30.133.150.050
79	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	133111	Gedung dan Bangunan	114.821.484.879
80	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134111	Jalan dan Jembatan	-6.682.681.279
81	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134112	Irigasi	27.984.885.024
82	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-15.895.543.346
83	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.414.391.471
84	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	292.901.118
					93.802.287.817
85	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	131111	Tanah	5.964.431.000
86	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	133111	Gedung dan Bangunan	109.392.395.050
87	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134111	Jalan dan Jembatan	1.727.971.000
88	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134112	Irigasi	-386.675.000
89	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-87.873.580
90	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
91	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-1.504.515
					113.152.801.955
92	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	131111	Tanah	-211.232.000
93	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	133111	Gedung dan Bangunan	17.608.628.900
94	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	134111	Jalan dan Jembatan	-1.823.736.097
95	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	134112	Irigasi	-4.616.680.000
96	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	235.628.453
97	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-347.644.903
98	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					10.373.707.447
99	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	131111	Tanah	29.003.917.128
100	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	133111	Gedung dan Bangunan	914.310.550.025
101	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134111	Jalan dan Jembatan	8.871.649.877.546
102	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134112	Irigasi	1.630.505.385.240
103	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
104	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.424.148.262
105	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-1.492.052.904.362

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
106	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-20.231.743.581
107	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	313221	Transfer Masuk	0
					9.975.609.230.258
108	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	131111	Tanah	40.035.903.427
109	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	133111	Gedung dan Bangunan	56.464.895.872
110	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	134111	Jalan dan Jembatan	23.678.286.312
111	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	134112	Irigasi	2.583.963.183
112	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	135121	Aset Tetap Lainnya	0
113	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.608.526.155
114	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-473.401 734
115	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	95.303.315
116	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0
117	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					126.993.476.530
118	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	131111	Tanah	4.331.177.200
119	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	133111	Gedung dan Bangunan	154.390.232.706
120	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134111	Jalan dan Jembatan	-1.995.416.500

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
121	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134112	Irigasi	2.850.902.287
122	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-6.816.964.077
123	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-88.122.140
124	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-835.393
					152.670.974.083
125	025	KEMENTERIAN AGAMA	131111	Tanah	6.234.166.027.061
126	025	KEMENTERIAN AGAMA	133111	Gedung dan Bangunan	732.838.380.177
127	025	KEMENTERIAN AGAMA	134111	Jalan dan Jembatan	12.059.936.062
128	025	KEMENTERIAN AGAMA	134112	Irigasi	-2.040.124.099
129	025	KEMENTERIAN AGAMA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
130	025	KEMENTERIAN AGAMA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.561.924.948
131	025	KEMENTERIAN AGAMA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-893.084.998
132	025	KEMENTERIAN AGAMA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-144.509.450
133	025	KEMENTERIAN AGAMA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					6.989.548.549.701
134	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	131111	Tanah	184.628.030
135	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	133111	Gedung dan Bangunan	35.293.813.884

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
136	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134111	Jalan dan Jembatan	2.245.295.000
137	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134112	Irigasi	1.228.055.222
138	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-633.626.563
139	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	327.775.800
140	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-96.371.920
					38.549.569.453
141	027	KEMENTERIAN SOSIAL	131111	Tanah	2.814.080.000
142	027	KEMENTERIAN SOSIAL	133111	Gedung dan Bangunan	277.271.206.308
143	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134111	Jalan dan Jembatan	-6.753.825 500
144	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134112	Irigasi	9.733.982.918
145	027	KEMENTERIAN SOSIAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-5.366.396.941
146	027	KEMENTERIAN SOSIAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-69.595.903
147	027	KEMENTERIAN SOSIAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	39.742.198
					277.669.193.080
148	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	131111	Tanah	5.211.449.464
149	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	133111	Gedung dan Bangunan	60.554.673.884
150	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	134111	Jalan dan Jembatan	7.747.162.531

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
151	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	134112	Irigasi	12.928.501.957
152	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.855.680.197
153	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	93.522.097
154	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-432.387.612
					87.958.602.518
155	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	131111	Tanah	7.051.258.107
156	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	208.911.031.056
157	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	23.827.492.502
158	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134112	Irigasi	255.282.030.911
159	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-4.820.282.653
160	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-7.832.160.463
161	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-18.035.512.121
162	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pem	0
163	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
164	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
165	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591312	Beban Penyusutan Irigasi	0
166	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	591312	Pengembalian Beban Penyusutan Irigasi	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
					464.383.857.339
167	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	131111	Tanah	1.395.084.925.772
168	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	132111	Peralatan dan Mesin	0
169	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	1.768.109.629.434
170	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134111	Jalan dan Jembatan	4.226.603.738.132
171	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134112	Irigasi	67.167.205.992.874
172	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
173	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-18.840.214.269
174	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-293.342.637.813
175	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.276.767.877.480
					76.521.589.311.610
176	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	133111	Gedung dan Bangunan	0
177	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
178	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	133111	Gedung dan Bangunan	0

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
179	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
180	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	133111	Gedung dan Bangunan	0
181	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
182	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	131111	Tanah	76.440.000
183	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	133111	Gedung dan Bangunan	641.589.000
184	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134111	Jalan dan Jembatan	157.121.000
185	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134112	Irigasi	-719.132.000
186	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	521.481
187	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.908.235.180
188	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					4.064.774.661
189	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131111	Tanah	0
190	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	0
191	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
					0
192	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	131111	Tanah	3.211.265.000
193	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	132111	Peralatan dan Mesin	0
194	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	133111	Gedung dan Bangunan	527.586.675.749
195	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	134111	Jalan dan Jembatan	-19.483.348.310
196	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	134112	Irigasi	20.082.939.742
197	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
198	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.207.321.503
199	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	21.447.560.571
200	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	395.659.040
					573.448.073.295
201	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	131111	Tanah	0
202	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	133111	Gedung dan Bangunan	1.757.359.000
203	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	134111	Jalan dan Jembatan	176.546.000
204	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	134112	Irigasi	-44.824.000
205	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
206	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
207	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					1.889.081.000
208	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	131111	Tanah	732.100.000
209	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	133111	Gedung dan Bangunan	0
210	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					732.100.000
211	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	133111	Gedung dan Bangunan	0
212	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
213	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI			276.303.000
					276.303.000
214	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	131111	Tanah	-51.419.000
215	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	-133.560.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
216	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	0
217	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134112	Irigasi	-2.372.000
218	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
219	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
220	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
221	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					-187.351.000
222	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	131111	Tanah	8.531.107.000
223	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	19.692.235.000
224	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	134112	Irigasi	2.328.224.000
225	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	369.474.809
226	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-153.825.000
					30.767.215.809
227	054	BADAN PUSAT STATISTIK	131111	Tanah	3.297.755.250
228	054	BADAN PUSAT STATISTIK	133111	Gedung dan Bangunan	4.685.137.171
229	054	BADAN PUSAT STATISTIK	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-462.079.347
					7.520.813.074

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
230	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	131111	Tanah	0
231	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	0
232	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	0
233	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	134112	Irigasi	0
234	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
235	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
236	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
237	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			57.006.925.695
					57.006.925.695
238	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	131111	Tanah	3.434.172.250
239	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	133111	Gedung dan Bangunan	33.468.632.454
240	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134111	Jalan dan Jembatan	1.647.000
241	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134112	Irigasi	-275.127.120
242	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	85.001.439
243	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
244	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	38.701.455
					36.749.733.478

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
245	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	0
246	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	-160.926.000
247	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	857.053.860
248	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					696.127.860
249	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	131111	Tanah	1.676.826.000
250	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	133111	Gedung dan Bangunan	5.122.244.080
251	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134111	Jalan dan Jembatan	700.734.000
252	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134112	Irigasi	-277.999.872
253	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-733.230.192
254	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-76.290.250
255	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	8.781.553
					6.421.065.319
256	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	245.581.256.088
257	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	452.748.503.236
258	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	39.835.073.851
259	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	-2.294.598.550

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
260	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.819.940.380
261	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	659.158.738
262	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-735.389.098
					779.613.944.645
263	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	131111	Tanah	214.573.000
264	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.587.599.764
265	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	-177.419.000
266	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134112	Irigasi	-708.401.816
267	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.653.112.814
268	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
269	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	35.183.387
					10.604.648.149
270	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	131111	Tanah	0
271	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	0
272	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	-54.000
273	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134112	Irigasi	-62.260.000
274	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
275	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
276	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					62 314 000
277	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	131111	Tanah	0
278	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	133111	Gedung dan Bangunan	0
279	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
280	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	131111	Tanah	336.816.000
281	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	-2 802.403 967
282	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	15.808.000
283	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134112	Irigasi	-267.070.519
284	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	66 076 641
285	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
286	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	117.463.656
					-2.697.079.471
287	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	131111	Tanah	-133.850 000

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
288	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	133111	Gedung dan Bangunan	-20.451.856
289	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	134111	Jalan dan Jembatan	3.917.316.829
290	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	134112	Irigasi	-2.249.861.237
291	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.609.013.481
292	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.470.828.904
293	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.303.738.479
					20.896.734.600
294	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	131111	Tanah	13.021.649.000
295	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	8.164.299.000
296	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	1.079.185.000
297	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	134112	Irigasi	451.909.000
298	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.432.178.428

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
299	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
300	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					26.149.220.428
301	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	0
302	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
303	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	131111	Tanah	9.265.069.900
304	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	133111	Gedung dan Bangunan	20.383.069.379
305	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	134111	Jalan dan Jembatan	-652.579 161
306	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	134112	Irigasi	10.647.370.433
307	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	996.062.099
308	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	53.184.250
309	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-72.525.347
					40.619.651.553
310	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	8.238.578.800
311	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	-8.898.155 799
312	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134111	Jalan dan Jembatan	13.713 000

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
313	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134112	Irigasi	22.260.000
314	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.166.064.213
315	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
316	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					515.034.214
317	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	131111	Tanah	0
318	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	133111	Gedung dan Bangunan	4.352.041.000
319	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	134111	Jalan dan Jembatan	34.035.000
320	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
321	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
322	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					4.318.006.000
323	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131111	Tanah	0
324	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	0
325	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	0
326	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
327	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
328	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN			0
					0
329	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	131111	Tanah	14.575.248.000
330	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	57.845.177.852
331	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	9.585.981.000
332	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134112	Irigasi	1.163.527.190
333	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-119 557 191
334	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
335	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					83.050.376.851
336	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	131111	Tanah	0
337	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	4.106.438.000
338	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	0
339	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134112	Irigasi	0
340	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
341	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
342	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
					4.106.438.000
343	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	131111	Tanah	0
344	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	133111	Gedung dan Bangunan	2.434.559.000
345	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	134111	Jalan dan Jembatan	0
346	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	134112	Irigasi	-7.408.000
347	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.194.240
348	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
349	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					2.459.345.240
350	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	131111	Tanah	-169.023.170
351	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	6.796.587.190
352	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	613.616.000
353	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	134112	Irigasi	1.495.087.000
354	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.180.635.738
355	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
356	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	23.510.000
					7.579.141.282

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
357	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131111	Tanah	0
358	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	133111	Gedung dan Bangunan	0
359	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134111	Jalan dan Jembatan	0
360	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134112	Irigasi	0
361	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
362	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
363	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					0
364	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	131111	Tanah	0
365	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	133111	Gedung dan Bangunan	0
366	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134111	Jalan dan Jembatan	0
367	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134112	Irigasi	0
368	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
369	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
370	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					0
371	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	131111	Tanah	-176.000

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
372	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	2.269.256.000
373	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	0
374	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134112	Irigasi	-1.617.070.964
375	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.913.250
376	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
377	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	581.801.089
					1.237.723.375
378	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	0
379	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	0
380	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	0
381	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	0
382	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
383	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
384	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					0
385	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	131111	Tanah	2.593.916.667
386	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	11.847.108.000

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
387	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	-78.824.950
388	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134112	Irigasi	197.247.000
389	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
390	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	17.579.087
391	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					14.577.025.804
392	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	131111	Tanah	17.589.189.000
393	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	133111	Gedung dan Bangunan	3.211.695.059
394	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	134111	Jalan dan Jembatan	-186.649.000
395	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	134112	Irigasi	-138.587.000
396	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-9.427.873
397	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
398	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					20.466.220.186
399	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	131111	Tanah	0
400	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	0
401	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	0

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
402	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134112	Irigasi	0
403	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
404	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
405	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					0
406	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	131111	Tanah	0
407	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	133111	Gedung dan Bangunan	-402.002.000
408	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134111	Jalan dan Jembatan	0
409	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134112	Irigasi	-50.183.000
410	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-56.244.676
411	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
412	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					-508.429.676
413	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	131111	Tanah	0
414	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	133111	Gedung dan Bangunan	0
415	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
416	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	131111	Tanah	0
417	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	133111	Gedung dan Bangunan	0
418	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
419	100	KOMISI YUDISIAL RI	131111	Tanah	0
420	100	KOMISI YUDISIAL RI	133111	Gedung dan Bangunan	0
421	100	KOMISI YUDISIAL RI	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
422	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	131111	Tanah	0
423	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	133111	Gedung dan Bangunan	0
424	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
					0
425	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	131111	Tanah	811.041.900
426	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	2.532.011.414

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
427	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	341.728.000
428	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	134112	Irigasi	-15.538.000
429	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-572.042.190
430	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
431	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	22.125.000
					3.119.326.124
432	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	131111	Tanah	0
433	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	133111	Gedung dan Bangunan	0
434	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	134111	Jalan dan Jembatan	0
435	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	134112	Irigasi	0
436	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
437	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
438	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					0
439	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	131111	Tanah	0
440	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	133111	Gedung dan Bangunan	0
441	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
442	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					0
443	107	BADAN SAR NASIONAL	131111	Tanah	10.097.144.804
444	107	BADAN SAR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	8.663.289.240
445	107	BADAN SAR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	4.209.178.000
446	107	BADAN SAR NASIONAL	134112	Irigasi	510 877.000
447	107	BADAN SAR NASIONAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.116.292
448	107	BADAN SAR NASIONAL	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
449	107	BADAN SAR NASIONAL	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
450	107	BADAN SAR NASIONAL	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					22.541.851.336
451	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	131111	Tanah	0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
452	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	133111	Gedung dan Bangunan	0
453	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134111	Jalan dan Jembatan	0
454	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134112	Irigasi	0
455	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
456	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
457	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					0
458	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	0
					0
459	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.282.546.099
460	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134111	Jalan dan Jembatan	0
461	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134112	Irigasi	918.854.500
462	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-322.294.538
463	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
464	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-3 052.181.925
465	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.179.426.756
466	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	38.423.108

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
					44.774.000
467	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	131111	Tanah	0
468	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	133111	Gedung dan Bangunan	117.042.717.332
469	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	134111	Jalan dan Jembatan	1.001.402.389.176
470	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	134112	Irigasi	30.757.380.380
471	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-193.911.119
472	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-206.953.073.067
473	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-5.799.110.908
474	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
475	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pem	0
476	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					936.256.391.794
477	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	133111	Gedung dan Bangunan	-772.667.000
478	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	134111	Jalan dan Jembatan	28.472.047
479	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	134112	Irigasi	894.916.350
480	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
481	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
482	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
483	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
					150.721.397
484	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	0
					0
485	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	6.136.980.000
486	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	110.645.005.614

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
487	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	1.985.421.000
488	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	342.391.000
489	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
490	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-2.886.464.962
491	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
492	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	40.875.660
					116.264.208.312
493	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	15.122.529.900
494	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	67.107.600.722
495	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	-3.733.532.000
496	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	18.282.536.000
497	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.267.892.187
498	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
499	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	168.350.053
					105.215.376.862
500	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	131111	Tanah	-16.436.473.600

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
501	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	133111	Gedung dan Bangunan	-2.112.751.064
502	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	134111	Jalan dan Jembatan	-16.154.830.000
503	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	134112	Irigasi	-628.768.000
504	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
505	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
506	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
					-35 332 822.664
507	119	BADAN KEAMANAN LAUT	131111	Tanah	430.197.000
508	119	BADAN KEAMANAN LAUT	133111	Gedung dan Bangunan	-4 524 199 928
509	119	BADAN KEAMANAN LAUT	134111	Jalan dan Jembatan	0
510	119	BADAN KEAMANAN LAUT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.074.245
511	119	BADAN KEAMANAN LAUT	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0

LAMPIRAN 32

REKAPITULASI REVALUASI ASET TETAP
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
31 Desember 2020

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2020
					-4.077 928.683
512	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	131111	Tanah	0
513	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	0
514					-146 761.971.000
					-146.761.971.000
TOTAL					**104.773.275.462.472**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 33
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
SBN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2020. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

a. Membiayai defisit APBN;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Instrumen Fiskal

Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan *(registry)* dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter*/ OTC). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

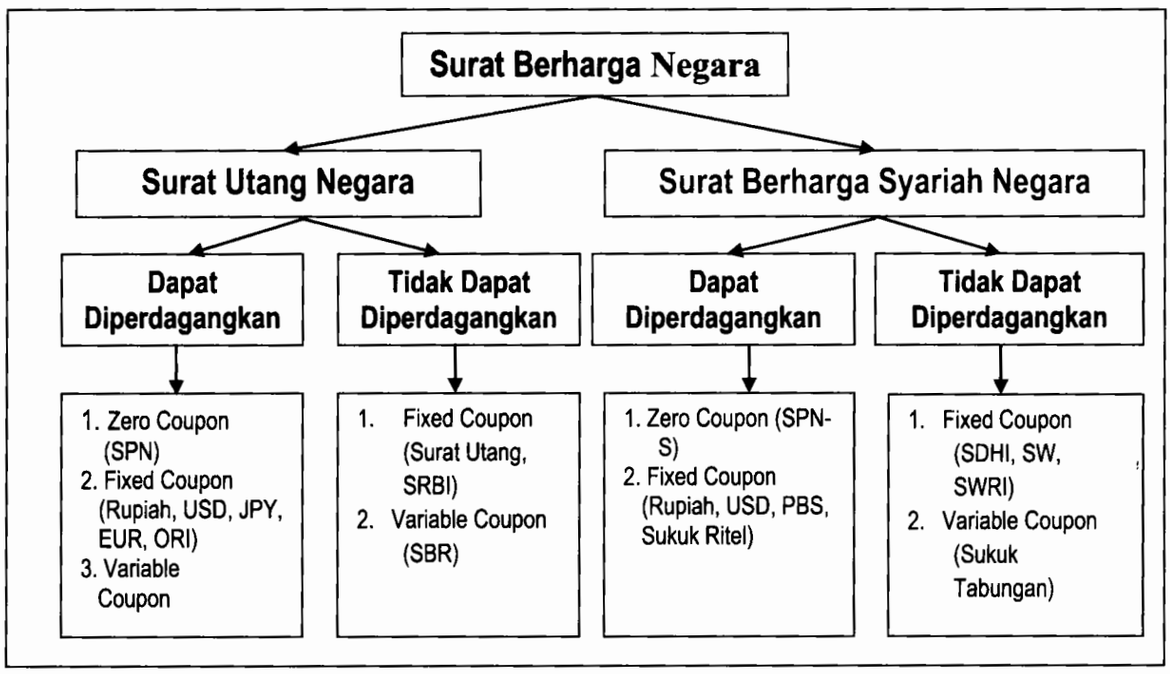
SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk

membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada Tahun 2020 dapat digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara



II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2020

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan sebagai berikut[1]:

1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang tahun 2020 dan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali;
2. Mendukung penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), menjaga stabilitas perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan, dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko serta kebutuhan pengembangan pasar SBN;
3. Mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; dan
4. Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemeritnahaan yang baik.

III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN Tahun 2020 sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2019, sesuai dengan strategi pembiayaan Tahun 2020, kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp1.220.461,6 miliar terdiri atas SBN neto sebesar Rp1.173.738,2 miliar dan Pinjaman neto sebesar Rp46.723,4 miliar. Dengan memperhatikan defisit APBN tahun anggaran 2020, pembiayaan non-utang, dan utang jatuh tempo, maka kebutuhan pembiayaan melalui utang ditetapkan sebesar Rp1.645.298,6 miliar yang terdiri dari pembiayaan melalui (a) penerbitan SBN sebesar Rp1.497.339,3 miliar, Pembiayaan melalui penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar Rp33.700,0 miliar sehingga penerbitan SBN bruto sebesar Rp1.531.039,3 miliar; (b) pembiayaan

---

[1] Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 48/PR/2020 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2020

melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp147.959,3 miliar. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang mengutamakan penerbitan melalui lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai yang bersumber dari mitra pembangunan (*development partners*) multilateral dan bilateral.

Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN TA 2020, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp318.586.221.000.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp296.546.017.746.418,-, atau sebesar 93,09%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Negara Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk Tahun 2020, sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, target SBN neto adalah sebesar Rp389.322.045.700.000,-, diubah dengan adanya Perpres 72 Tahun 2020 bahwa pada Tahun 2020 SBN Neto menjadi sebesar Rp1.173.738.188.593.000,00 dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020. Realisasi

SBN neto Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.777.152.327.902.790,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada Tabel 1.

Realisasi SBN neto Tahun 2020 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar Rp460.261.783.000,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp12.855.091.258.674,- dan pembayaran sebesar Rp12.394.829.475.674,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN Tahun 2020 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.541.252.304.258.670,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp1.382.099.584.258.670,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar USD8.800.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp159.152.720.000.000,-.

Atas penerbitan SBN di Akhir Tahun 2019, tidak terdapat penerbitan SBN yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2020 *(prefunding)*. Adapun selama Tahun 2020 tidak terdapat transaksi *Debt switching* SBN.

Pelunasan SBN Tahun 2020 adalah sebesar Rp364.099.976.355.881,- dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp317.304.724.605.881,- dan pelunasan SBN valas Rp46.795.251.750.000,-.

Tabel 1. SBN Neto Tahun 2020

NO	AKUN	URAIAN	JUMLAH (IDR)
Penerimaan Pembiayaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	44,700,000,000,000
2	711412	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN Non	12,710,000,000,000
3	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	418,307,456,000,000
4	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	8,651,350,806,018
5	711423	Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN Public Goods	397,560,000,000,000
6	711424	Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN Non Public Goods	164,320,000,000,000
7	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	287,312,041,951,158
8	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	4,203,740,452,656
9	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	26,150,000,000,000
10	711461	Penerimaan SBSN - pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	18,184,995,048,842
11	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	123,490,220,000,000
12	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	-
13	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	35,662,500,000,000
14	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total Penerimaan			**1,541,252,304,258,670**
Pengeluaran Pembiayaan			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	73,580,000,000,000.00
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	92,201,031,130,207.00
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Pembelian Kembali	-
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	8,114,851,323,018.00
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	105,818,864,000,000.00
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	4,279,978,152,656.00
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	33,310,000,000,000.00
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	46,795,251,750,000.00
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	-
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	-
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	-
Total Pengeluaran			**364,099,976,355,881**
SBN Netto			**1,177,152,327,902,790**

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2020

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, target SBN neto adalah sebesar Rp389.322.045.700.000,-, diubah dengan adanya Perpres 72 Tahun 2020 bahwa pada Tahun 2020 SBN Neto menjadi sebesar Rp1.173.738.188.593.000,00 dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto yaitu jumlah penerbitan SBN setelah dikurangi dengan jumlah SBN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo *(buyback)*.

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2020 dilakukan lelang sejak bulan Januari sampai Desember 2020. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di Tahun 2020, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk. Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp980.187.456.000.000,- dengan rincian:

a. ON dalam negeri sebesar Rp946.623.998.000.000,-; dan
b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan *Saving Bond Retail* (SBR) adalah sebesar Rp33.563.458.000.000,-.

Tabel 2. Seri ON yang diterbitkan Tahun 2020

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	9-Jan-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	6,400,000,000,000
2	9-Jan-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,100,000,000,000
3	9-Jan-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	750,000,000,000
4	9-Jan-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,100,000,000,000
5	9-Jan-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	5,650,000,000,000
6	23-Jan-20	15-May-48	FR0076	IDR	2,800,000,000,000
7	23-Jan-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,250,000,000,000
8	23-Jan-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	2,200,000,000,000
9	23-Jan-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	4,200,000,000,000
10	23-Jan-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	5,550,000,000,000
11	6-Feb-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,750,000,000,000
12	6-Feb-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	1,900,000,000,000
13	6-Feb-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,100,000,000,000
14	6-Feb-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	4,750,000,000,000
15	6-Feb-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	6,500,000,000,000
16	19-Feb-20	10-Feb-22	SBR009	IDR	2,255,246,000,000
17	20-Feb-20	15-May-48	FR0076	IDR	2,700,000,000,000
18	20-Feb-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	1,500,000,000,000
19	20-Feb-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	3,600,000,000,000
20	20-Feb-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	3,850,000,000,000
21	20-Feb-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,850,000,000,000
22	5-Mar-20	15-May-48	FR0076	IDR	700,000,000,000.00
23	5-Mar-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,250,000,000,000.00
24	5-Mar-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,200,000,000,000.00
25	5-Mar-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	3,800,000,000,000.00
26	5-Mar-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	4,550,000,000,000.00
27	6-Mar-20	15-May-28	FR0064	IDR	1,500,000,000,000.00
28	6-Mar-20	15-Aug-32	FR0074	IDR	500,000,000,000.00
29	19-Mar-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	2,600,000,000,000.00
30	19-Mar-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	3,500,000,000,000.00
31	19-Mar-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	600,000,000,000.00
32	19-Mar-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	850,000,000,000.00
33	30-Mar-20	15-May-23	FR0063	IDR	2,000,000,000,000.00
34	2-Apr-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	6,350,000,000,000.00
35	2-Apr-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	8,000,000,000,000.00
36	2-Apr-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	2,400,000,000,000.00
37	2-Apr-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	850,000,000,000.00
38	16-Apr-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	8,000,000,000,000.00
39	16-Apr-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	4,150,000,000,000.00
40	16-Apr-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	1,600,000,000,000.00
41	16-Apr-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	2,000,000,000,000.00
42	16-Apr-20	15-May-48	FR0076	IDR	450,000,000,000.00
43	30-Apr-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	11,889,400,000,000.00
44	30-Apr-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	6,121,800,000,000.00
45	30-Apr-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	3,991,500,000,000.00
46	30-Apr-20	15-May-48	FR0076	IDR	2,439,000,000,000.00
47	30-Apr-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,238,300,000,000.00
48	4-May-20	15-Feb-26	FR0084	IDR	37,877,372,000,000.00
49	4-May-20	15-Apr-31	FR0085	IDR	21,177,940,000,000.00
50	4-May-20	25-Apr-25	VR0033	IDR	3,568,686,000,000.00

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
51	12-May-20	15-Feb-44	FR0067	IDR	300,000,000,000.00
52	12-May-20	15-May-31	FR0073	IDR	500,000,000,000.00
53	14-May-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	7,300,000,000,000.00
54	14-May-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	9,300,000,000,000.00
55	14-May-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	1,300,000,000,000.00
56	14-May-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	750,000,000,000.00
57	14-May-20	15-May-48	FR0076	IDR	400,000,000,000.00
58	4-Jun-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	8,000,000,000,000.00
59	4-Jun-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,650,000,000,000.00
60	4-Jun-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	4,300,000,000,000.00
61	4-Jun-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,150,000,000,000.00
62	4-Jun-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	7,900,000,000,000.00
63	18-Jun-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,400,000,000,000.00
64	18-Jun-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	6,850,000,000,000.00
65	18-Jun-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	6,630,000,000,000.00
66	18-Jun-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,150,000,000,000.00
67	18-Jun-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,150,000,000,000.00
68	2-Jul-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,750,000,000,000.00
69	2-Jul-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,050,000,000,000.00
70	2-Jul-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	7,400,000,000,000.00
71	2-Jul-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	5,410,000,000,000.00
72	2-Jul-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,250,000,000,000.00
73	15-Jul-20	15-Jul-23	ORI017	IDR	18,336,042,000,000.00
74	16-Jul-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,450,000,000,000.00
75	16-Jul-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,700,000,000,000.00
76	16-Jul-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	8,050,000,000,000.00
77	16-Jul-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	6,750,000,000,000.00
78	16-Jul-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,050,000,000,000.00
79	30-Jul-20	15-May-48	FR0076	IDR	2,700,000,000,000.00
80	30-Jul-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	3,450,000,000,000.00
81	30-Jul-20	15-Jun-25	FR0081	IDR	7,220,000,000,000.00
82	30-Jul-20	15-Sep-30	FR0082	IDR	4,750,000,000,000.00
83	30-Jul-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,600,000,000,000.00
84	10-Aug-20	10-Aug-25	VR0034	IDR	20,525,000,000,000.00
85	10-Aug-20	10-Aug-26	VR0035	IDR	20,525,000,000,000.00
86	10-Aug-20	10-Aug-27	VR0036	IDR	20,525,000,000,000.00
87	10-Aug-20	10-Aug-28	VR0037	IDR	20,525,000,000,000.00
88	13-Aug-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,800,000,000,000.00
89	13-Aug-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	2,300,000,000,000.00
90	13-Aug-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,150,000,000,000.00
91	13-Aug-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	7,550,000,000,000.00
92	13-Aug-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	6,900,000,000,000.00
93	27-Aug-20	15-May-48	FR0076	IDR	3,900,000,000,000.00
94	27-Aug-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	850,000,000,000.00
95	27-Aug-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	1,800,000,000,000.00
96	27-Aug-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	8,200,000,000,000.00
97	27-Aug-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	5,250,000,000,000.00
98	28-Aug-20	28-Aug-25	VR0038	IDR	4,245,000,000,000.00
99	28-Aug-20	28-Aug-26	VR0039	IDR	4,245,000,000,000.00
100	28-Aug-20	28-Aug-27	VR0040	IDR	4,245,000,000,000.00

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
101	28-Aug-20	28-Aug-28	VR0041	IDR	4,245,000,000,000.00
102	10-Sep-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	2,550,000,000,000.00
103	10-Sep-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	1,500,000,000,000.00
104	10-Sep-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	7,600,000,000,000.00
105	10-Sep-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	7,350,000,000,000.00
106	24-Sep-20	15-May-48	FR0076	IDR	500,000,000,000.00
107	24-Sep-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	6,650,000,000,000.00
108	24-Sep-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,600,000,000,000.00
109	24-Sep-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	3,200,000,000,000.00
110	24-Sep-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	5,950,000,000,000.00
111	28-Sep-20	28-Sep-25	VR0042	IDR	21,100,000,000,000.00
112	28-Sep-20	28-Sep-26	VR0043	IDR	21,100,000,000,000.00
113	28-Sep-20	28-Sep-27	VR0044	IDR	21,100,000,000,000.00
114	28-Sep-20	28-Sep-28	VR0045	IDR	21,100,000,000,000.00
115	8-Oct-20	15-May-48	FR0076	IDR	1,250,000,000,000.00
116	8-Oct-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	5,300,000,000,000.00
117	8-Oct-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,300,000,000,000.00
118	8-Oct-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	2,200,000,000,000.00
119	8-Oct-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	10,100,000,000,000.00
120	12-Oct-20	12-Oct-25	VR0046	IDR	11,550,000,000,000.00
121	12-Oct-20	12-Oct-26	VR0047	IDR	11,550,000,000,000.00
122	12-Oct-20	12-Oct-27	VR0048	IDR	11,550,000,000,000.00
123	12-Oct-20	12-Oct-28	VR0049	IDR	11,550,000,000,000.00
124	22-Oct-20	15-May-48	FR0076	IDR	2,500,000,000,000.00
125	22-Oct-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	8,350,000,000,000.00
126	22-Oct-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	2,850,000,000,000.00
127	22-Oct-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	6,850,000,000,000.00
128	22-Oct-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	8,150,000,000,000.00
129	26-Oct-20	26-Oct-25	VR0050	IDR	5,717,500,000,000.00
130	26-Oct-20	26-Oct-26	VR0051	IDR	5,717,500,000,000.00
131	26-Oct-20	26-Oct-27	VR0052	IDR	5,717,500,000,000.00
132	26-Oct-20	26-Oct-28	VR0053	IDR	5,717,500,000,000.00
133	27-Oct-20	15-Oct-23	ORI018	IDR	12,972,170,000,000.00
134	3-Nov-20	15-May-23	FR0063	IDR	500,000,000,000.00
135	3-Nov-20	15-May-28	FR0064	IDR	1,500,000,000,000.00
136	5-Nov-20	15-May-48	FR0076	IDR	4,350,000,000,000.00
137	5-Nov-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	6,200,000,000,000.00
138	5-Nov-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	4,450,000,000,000.00
139	5-Nov-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	4,800,000,000,000.00
140	5-Nov-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	7,150,000,000,000.00
141	16-Nov-20	16-Nov-25	VR0054	IDR	4,370,000,000,000.00
142	16-Nov-20	16-Nov-26	VR0055	IDR	4,370,000,000,000.00
143	16-Nov-20	16-Nov-27	VR0056	IDR	4,370,000,000,000.00
144	16-Nov-20	16-Nov-28	VR0057	IDR	4,370,000,000,000.00
145	19-Nov-20	15-May-48	FR0076	IDR	950,000,000,000.00
146	19-Nov-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	5,750,000,000,000.00
147	19-Nov-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	1,450,000,000,000.00
148	19-Nov-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	6,000,000,000,000.00
149	19-Nov-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	8,450,000,000,000.00
150	23-Nov-20	23-Nov-25	VR0058	IDR	6,750,000,000,000.00

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
151	23-Nov-20	23-Nov-26	VR0059	IDR	6,750,000,000,000.00
152	23-Nov-20	23-Nov-27	VR0060	IDR	6,750,000,000,000.00
153	23-Nov-20	23-Nov-28	VR0061	IDR	6,750,000,000,000.00
154	3-Dec-20	15-May-48	FR0076	IDR	5,850,000,000,000.00
155	3-Dec-20	15-Jun-35	FR0080	IDR	1,600,000,000,000.00
156	3-Dec-20	15-Apr-40	FR0083	IDR	4,650,000,000,000.00
157	3-Dec-20	15-Apr-26	FR0086	IDR	4,750,000,000,000.00
158	3-Dec-20	15-Feb-31	FR0087	IDR	7,950,000,000,000.00
159	14-Dec-20	14-Dec-25	VR0062	IDR	25,742,500,000,000.00
160	14-Dec-20	14-Dec-26	VR0063	IDR	25,742,500,000,000.00
161	14-Dec-20	14-Dec-27	VR0064	IDR	25,742,500,000,000.00
162	14-Dec-20	14-Dec-28	VR0065	IDR	23,302,500,000,000.00
Total (IDR)					**980,187,456,000,000.00**

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak 3 kali penerbitan, yaitu seri SBR009, ORI017 dan ORI018, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan Obligasi Negara Rupiah yang jatuh tempo pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp92.315.279.584.376,- yang terdiri dari:

a. ON bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp48.774.350.584.376,-;
b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI dan SBR sebesar Rp18.218.575.000.000,-; dan
c. ON bunga variable (*Variable Rate*) sebesar Rp25.322.354.000.000,-.

Tabel 3. Pelunasan Seri ON Tahun 2020

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SU007	31-Jan-20	1,811,091,561,179.00
2	SRBI-01	3-Feb-20	377,951,324,677.00
3	SBR005	10-Feb-20	28,812,000,000.00
4	SU002	1-Apr-20	749,934,450,905.00
5	SBR006	11-May-20	23,207,000,000.00
6	SBR003	20-May-20	1,911,555,000,000.00
7	SU004	29-May-20	1,895,023,138,125.00
8	SRBI-01	17-Jun-20	21,481,610,487,737.00
9	VR0031	27-Jul-20	25,322,354,000,000.00
10	SU007	30-Jul-20	1,901,646,139,238.00
11	SRBI01	3-Aug-20	276,888,014,034.00
12	SBR007	10-Aug-20	25,807,000,000.00
13	SBR004	21-Sep-20	7,260,564,000,000.00
14	SU002	1-Oct-20	787,431,173,450.00
15	SBR008	12-Oct-20	19,970,000,000.00
16	ORI014	15-Oct-20	8,948,660,000,000.00
17	FR0031	16-Nov-20	17,503,000,000,000.00
18	SU004	1-Dec-20	1,989,774,295,031.00
Total (IDR)			**92,315,279,584,376.00**

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan seri SPN dengan total mencapai Rp57.410.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 4 .

Tabel 4. Seri SPN yang Diterbitkan Tahun 2020

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPN	Mata Uang	Jumlah
1	9-Jan-20	8-Jan-21	SPN12210108	IDR	1,500,000,000,000
2	9-Jan-20	10-Apr-20	SPN12200410	IDR	1,500,000,000,000
3	23-Jan-20	8-Jan-21	SPN12210108	IDR	1,500,000,000,000
4	23-Jan-20	22-Apr-20	SPN03200422	IDR	1,500,000,000,000
5	6-Feb-20	5-Feb-21	SPN12210205	IDR	1,500,000,000,000
6	6-Feb-20	8-May-20	SPN12200508	IDR	1,500,000,000,000
7	20-Feb-20	5-Feb-21	SPN12210205	IDR	1,500,000,000,000
8	20-Feb-20	19-May-20	SPN03200519	IDR	1,500,000,000,000
9	5-Mar-20	4-Mar-21	SPN12210304	IDR	1,500,000,000,000.00
10	5-Mar-20	4-Jun-20	SPN03200604	IDR	1,500,000,000,000.00
11	19-Mar-20	4-Mar-21	SPN12210304	IDR	6,400,000,000,000.00
12	19-Mar-20	19-Jun-20	SPN12200619	IDR	3,100,000,000,000.00
13	2-Apr-20	1-Apr-21	SPN12210401	IDR	4,300,000,000,000.00
14	2-Apr-20	3-Jul-20	SPN12200703	IDR	320,000,000,000.00
15	16-Apr-20	1-Apr-21	SPN12210401	IDR	300,000,000,000.00
16	16-Apr-20	15-Jul-20	SPN03200715	IDR	380,000,000,000.00
17	30-Apr-20	29-Apr-21	SPN12210429	IDR	120,000,000,000.00
18	30-Apr-20	29-Jul-20	SPN03200729	IDR	200,000,000,000.00
19	14-May-20	14-Aug-20	SPN12200814	IDR	800,000,000,000.00
20	14-May-20	29-Apr-21	SPN12210429	IDR	150,000,000,000.00
21	4-Jun-20	3-Jun-21	SPN12210603	IDR	200,000,000,000.00
22	4-Jun-20	3-Sep-20	SPN03200903	IDR	150,000,000,000.00
23	18-Jun-20	4-Mar-21	SPN12210304	IDR	320,000,000,000.00
24	2-Jul-20	1-Jul-21	SPN12210701	IDR	640,000,000,000
25	30-Jul-20	29-Oct-20	SPN03201029	IDR	280,000,000,000
26	30-Jul-20	29-Apr-21	SPN12210429	IDR	1,000,000,000,000
27	13-Aug-20	12-Nov-20	SPN03201112	IDR	300,000,000,000.00
28	13-Aug-20	12-Aug-21	SPN12210812	IDR	1,000,000,000,000.00
29	27-Aug-20	26-Nov-20	SPN03201126	IDR	1,000,000,000,000.00
30	27-Aug-20	3-Jun-21	SPN12210603	IDR	1,000,000,000,000.00
31	10-Sep-20	9-Dec-20	SPN03201209	IDR	1,000,000,000,000.00
32	10-Sep-20	9-Sep-21	SPN12210909	IDR	2,000,000,000,000.00
33	24-Sep-20	23-Dec-20	SPN03201223	IDR	1,000,000,000,000.00
34	24-Sep-20	1-Jul-21	SPN12210701	IDR	2,100,000,000,000.00
35	8-Oct-20	8-Jan-21	SPN12210108	IDR	2,050,000,000,000
36	8-Oct-20	7-Oct-21	SPN12211007	IDR	2,900,000,000,000
37	22-Oct-20	21-Jan-21	SPN03210121	IDR	2,250,000,000,000
38	22-Oct-20	1-Jul-21	SPN12210701	IDR	1,800,000,000,000
39	5-Nov-20	5-Feb-21	SPN12210205	IDR	1,500,000,000,000
40	5-Nov-20	4-Nov-21	SPN12211104	IDR	1,050,000,000,000
41	19-Nov-20	18-Feb-21	SPN03210218	IDR	1,000,000,000,000
42	19-Nov-20	12-Aug-21	SPN12210812	IDR	1,000,000,000,000
43	3-Dec-20	2-Dec-21	SPN12211202	IDR	800,000,000,000
Total (IDR)					**57,410,000,000,000.00**

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp73.580.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajkan dalam tabel 5.

Tabel 5. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2020

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPN12200106	6-Jan-20	3,000,000,000,000.00
2	SPN12200106	6-Jan-20	2,000,000,000,000.00
3	SPN12200106	6-Jan-20	2,000,000,000,000.00
4	SPN12200106	6-Jan-20	3,000,000,000,000.00
5	SPN03200123	23-Jan-20	2,000,000,000,000.00
6	SPN12200130	30-Jan-20	3,000,000,000,000.00
7	SPN03200206	6-Feb-20	2,000,000,000,000.00
8	SPN12200213	13-Feb-20	2,000,000,000,000.00
9	SPN12200213	13-Feb-20	3,000,000,000,000.00
10	SPN12200213	13-Feb-20	2,200,000,000,000.00
11	SPN03200220	20-Feb-20	1,850,000,000,000.00
12	SPN12200313	13-Mar-20	2,000,000,000,000.00
13	SPN12200313	13-Mar-20	2,000,000,000,000.00
14	SPN12200410	13-Apr-20	1,500,000,000,000.00
15	SPN12200410	13-Apr-20	1,050,000,000,000.00
16	SPN12200410	13-Apr-20	900,000,000,000.00
17	SPN12200410	13-Apr-20	2,000,000,000,000.00
18	SPN03200422	22-Apr-20	1,500,000,000,000.00
19	SPN12200508	8-May-20	1,500,000,000,000.00
20	SPN12200508	8-May-20	2,000,000,000,000.00
21	SPN12200508	8-May-20	3,300,000,000,000.00
22	SPN03200519	19-May-20	1,500,000,000,000.00
23	SPN03200604	4-Jun-20	1,500,000,000,000.00
24	SPN12200619	19-Jun-20	3,000,000,000,000.00
25	SPN12200619	19-Jun-20	1,100,000,000,000.00
26	SPN12200619	19-Jun-20	3,100,000,000,000.00
27	SPN12200703	3-Jul-20	2,000,000,000,000.00
28	SPN12200703	3-Jul-20	2,000,000,000,000.00
29	SPN12200703	3-Jul-20	320,000,000,000.00
30	SPN03200715	15-Jul-20	380,000,000,000.00
31	SPN03200729	29-Jul-20	200,000,000,000.00
32	SPN12200814	14-Aug-20	1,950,000,000,000.00
33	SPN12200814	14-Aug-20	800,000,000,000.00
34	SPN12200814	14-Aug-20	2,000,000,000,000.00
35	SPN03200903	3-Sep-20	150,000,000,000.00
36	SPN12200911	11-Sep-20	2,200,000,000,000.00
37	SPN12201009	9-Oct-20	2,000,000,000,000.00
38	SPN03201029	2-Nov-20	280,000,000,000.00
39	SPN12201106	6-Nov-20	2,000,000,000,000.00
40	SPN03201112	12-Nov-20	300,000,000,000.00
41	SPN03201126	26-Nov-20	1,000,000,000,000.00
42	SPN03201209	10-Dec-20	1,000,000,000,000.00
43	SPN03201223	23-Dec-20	1,000,000,000,000.00
Total (IDR)			**73,580,000,000,000.00**

C. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Valuta Asing

Total penerbitan Obligasi Negara (ON) Valas Tahun 2020 adalah sebesar USD6.300.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp123.490.220.000.000,- yang terdiri atas *International Bonds* sebesar USD6.300.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,-.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada Tahun 2020, disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.Realisasi Penerbitan Obligasi Negara Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	14-Jan-20	14-Feb-30	RI0230	USD	1,200,000,000.00
2	14-Jan-20	14-Jan-50	RI0250	USD	800,000,000.00
3	14-Jan-20	14-Feb-27	RIEUR0227	EUR	1,000,000,000.00
4	15-Apr-20	15-Oct-50	RI1050	USD	1,650,000,000.00
5	15-Apr-20	15-Apr-70	RI0470	USD	1,000,000,000.00
6	15-Apr-20	15-Oct-30	RI1030	USD	1,650,000,000.00
7	8-Jul-20	7-Jul-23	RIJPY0723	JPY	50,700,000,000.00
8	8-Jul-20	8-Jul-25	RIJPY0725	JPY	24,300,000,000.00
9	8-Jul-20	8-Jul-27	RIJPY0727	JPY	10,100,000,000.00
10	8-Jul-20	8-Jul-30	RIJPY0730	JPY	13,400,000,000.00
11	8-Jul-20	6-Jul-40	RIJPY0740	JPY	1,500,000,000.00

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Di samping *debtswitching*, Pemerintah juga dapat melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara

melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Namun demikian, pada Tahun 2020 tidak terdapat transaksi debtswitching/*buyback*.

V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2020

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).

d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir Tahun 2020 terdiri atas instrumen Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI), Sukuk Wakaf (SW) dan Sukuk Wakaf Ritel (SWR) dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 7, 9, 10 dan 11 berikut.

Tabel 7. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2020

No.	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPNS	Mata Uang	Jumlah
1	16-Jan-20	15-Jul-20	SPNS15072020	IDR	1,500,000,000,000
2	30-Jan-20	15-Jul-20	SPNS15072020	IDR	1,000,000,000,000
3	13-Feb-20	12-Aug-20	SPNS12082020	IDR	1,500,000,000,000
4	27-Feb-20	12-Aug-20	SPNS12082020	IDR	1,000,000,000,000
5	12-Mar-20	11-Sep-20	SPNS11092020	IDR	1,000,000,000,000.00
6	27-Mar-20	11-Sep-20	SPNS11092020	IDR	5,150,000,000,000.00
7	9-Apr-20	8-Jan-21	SPNS08012021	IDR	3,200,000,000,000.00
8	9-Apr-20	8-Oct-20	SPNS08102020	IDR	600,000,000,000.00
9	23-Apr-20	8-Jan-21	SPNS08012021	IDR	20,000,000,000.00
10	9-Jul-20	8-Jan-21	SPNS08012021	IDR	140,000,000,000
11	23-Jul-20	8-Jan-21	SPNS08012021	IDR	1,100,000,000,000
12	6-Aug-20	5-Feb-21	SPNS05022021	IDR	950,000,000,000.00
13	24-Aug-20	5-Feb-21	SPNS05022021	IDR	1,000,000,000,000.00
14	3-Sep-20	2-Mar-21	SPNS02032021	IDR	1,500,000,000,000.00
15	17-Sep-20	2-Mar-21	SPNS02032021	IDR	800,000,000,000.00
16	1-Oct-20	2-Mar-21	SPNS02032021	IDR	700,000,000,000
17	15-Oct-20	14-Apr-21	SPNS14042021	IDR	2,200,000,000,000
18	3-Nov-20	14-Apr-21	SPNS14042021	IDR	1,550,000,000,000
19	12-Nov-20	11-May-21	SPNS11052021	IDR	1,000,000,000,000
20	11-Dec-20	9-Jun-21	SPNS09062021	IDR	240,000,000,000
Total (IDR)					**26,150,000,000,000.00**

Tabel 8. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2020

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPNS10012020	10-Jan-20	1,500,000,000,000.00
2	SPNS10012020	10-Jan-20	1,050,000,000,000.00
3	SPNS23012020	23-Jan-20	3,460,000,000,000.00
4	SPNS07022020	7-Feb-20	1,650,000,000,000.00
5	SPNS07022020	7-Feb-20	2,600,000,000,000.00
6	SPNS04032020	4-Mar-20	1,000,000,000,000.00
7	SPNS04032020	4-Mar-20	1,050,000,000,000.00
8	SPNS02042020	2-Apr-20	1,000,000,000,000.00
9	SPNS02042020	2-Apr-20	1,000,000,000,000.00
10	SPNS02042020	2-Apr-20	1,000,000,000,000.00
11	SPNS15052020	15-May-20	1,000,000,000,000.00
12	SPNS15052020	15-May-20	1,050,000,000,000.00
13	SPNS15052020	15-May-20	4,200,000,000,000.00
14	SPNS15072020	15-Jul-20	1,500,000,000,000.00
15	SPNS15072020	15-Jul-20	1,000,000,000,000.00
16	SPNS12082020	12-Aug-20	1,500,000,000,000.00
17	SPNS12082020	12-Aug-20	1,000,000,000,000.00
18	SPNS11092020	11-Sep-20	1,000,000,000,000.00
19	SPNS11092020	11-Sep-20	5,150,000,000,000.00
20	SPNS08102020	8-Oct-20	600,000,000,000.00
TOTAL (IDR)			**33,310,000,000,000.00**

Tabel 9. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2020

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	16-Jan-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	1,500,000,000,000
2	16-Jan-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	1,550,000,000,000
3	16-Jan-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,450,000,000,000
4	30-Jan-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	1,000,000,000,000
5	30-Jan-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	1,370,000,000,000
6	30-Jan-20	15-Jul-47	PBS015	IDR	2,350,000,000,000
7	30-Jan-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,280,000,000,000
8	13-Feb-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	1,170,000,000,000
9	13-Feb-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	2,730,000,000,000
10	13-Feb-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,600,000,000,000
11	27-Feb-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	2,300,000,000,000
12	27-Feb-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	2,200,000,000,000
13	27-Feb-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,500,000,000,000
14	12-Mar-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	4,050,000,000,000.00
15	12-Mar-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	2,400,000,000,000.00
16	12-Mar-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	550,000,000,000.00
17	17-Mar-20	15-Jul-47	PBS015	IDR	2,000,000,000,000.00
18	27-Mar-20	15-Feb-37	PBS004	IDR	770,000,000,000.00
19	27-Mar-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	440,000,000,000.00
20	27-Mar-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	240,000,000,000.00
21	9-Apr-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	720,000,000,000.00
22	9-Apr-20	15-Feb-37	PBS004	IDR	650,000,000,000.00
23	9-Apr-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	650,000,000,000.00
24	9-Apr-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	470,000,000,000.00
25	23-Apr-20	15-Feb-37	PBS004	IDR	5,450,000,000,000.00
26	23-Apr-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	2,240,000,000,000.00
27	23-Apr-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,300,000,000,000.00
28	23-Apr-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	3,990,000,000,000.00
29	4-May-20	15-Oct-25	PBS017	IDR	30,332,580,000,000.00
30	4-May-20	15-Jan-27	PBS003	IDR	11,600,000,000,000.00
31	4-May-20	15-May-23	PBS027	IDR	5,638,896,000,000.00
32	8-May-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,325,000,000,000.00
33	8-May-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	2,650,000,000,000.00
34	8-May-20	15-Sep-40	PBS007	IDR	2,850,000,000,000.00
35	12-May-20	15-May-30	PBS023	IDR	3,675,000,000,000.00
36	12-May-20	15-Apr-34	PBS022	IDR	2,500,000,000,000.00
37	20-May-20	15-Feb-37	PBS004	IDR	600,000,000,000.00
38	20-May-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	550,000,000,000.00
39	20-May-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,700,000,000,000.00
40	20-May-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	3,400,000,000,000.00
41	20-May-20	15-May-30	PBS023	IDR	2,250,000,000,000.00
42	11-Jun-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	900,000,000,000.00
43	11-Jun-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	4,350,000,000,000.00
44	11-Jun-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,250,000,000,000.00
45	11-Jun-20	15-May-30	PBS023	IDR	550,000,000,000.00
46	11-Jun-20	15-Apr-34	PBS022	IDR	2,450,000,000,000.00
47	25-Jun-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	1,150,000,000,000.00
48	25-Jun-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	4,200,000,000,000.00
49	25-Jun-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,350,000,000,000.00
50	25-Jun-20	15-Apr-34	PBS022	IDR	400,000,000,000.00

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
51	25-Jun-20	15-May-30	PBS023	IDR	1,400,000,000,000.00
52	3-Jul-20	15-Oct-25	PBS017	IDR	250,000,000,000.00
53	3-Jul-20	15-May-23	PBS027	IDR	250,000,000,000.00
54	9-Jul-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	4,260,000,000,000.00
55	9-Jul-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	1,100,000,000,000.00
56	9-Jul-20	15-Apr-34	PBS022	IDR	700,000,000,000.00
57	9-Jul-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	3,300,000,000,000.00
58	23-Jul-20	15-Jan-22	PBS002	IDR	2,350,000,000,000.00
59	23-Jul-20	15-Apr-34	PBS022	IDR	1,100,000,000,000.00
60	23-Jul-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,200,000,000,000.00
61	23-Jul-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	5,250,000,000,000.00
62	6-Aug-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,400,000,000,000.00
63	6-Aug-20	15-May-23	PBS027	IDR	2,650,000,000,000.00
64	6-Aug-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	5,000,000,000,000.00
65	14-Aug-20	15-Apr-43	PBS005	IDR	2,000,000,000,000.00
66	24-Aug-20	15-May-33	PBS025	IDR	2,000,000,000,000.00
67	24-Aug-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,000,000,000,000.00
68	24-Aug-20	15-May-23	PBS027	IDR	1,100,000,000,000.00
69	24-Aug-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	4,400,000,000,000.00
70	27-Aug-20	27-Aug-30	PBSNTQ01	IDR	3,000,000,000,000.00
71	3-Sep-20	15-May-33	PBS025	IDR	1,650,000,000,000.00
72	3-Sep-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,850,000,000,000.00
73	3-Sep-20	15-May-23	PBS027	IDR	3,300,000,000,000.00
74	3-Sep-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	1,200,000,000,000.00
75	17-Sep-20	15-May-33	PBS025	IDR	4,350,000,000,000.00
76	17-Sep-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,250,000,000,000.00
77	17-Sep-20	15-May-23	PBS027	IDR	1,500,000,000,000.00
78	17-Sep-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	600,000,000,000.00
79	1-Oct-20	15-May-33	PBS025	IDR	2,785,000,000,000.00
80	1-Oct-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,600,000,000,000.00
81	1-Oct-20	15-May-23	PBS027	IDR	1,300,000,000,000.00
82	1-Oct-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	5,615,000,000,000.00
83	6-Oct-20	15-Jul-47	PBS015	IDR	1,500,000,000,000.00
84	15-Oct-20	15-May-33	PBS025	IDR	3,750,000,000,000.00
85	15-Oct-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,000,000,000,000.00
86	15-Oct-20	15-May-23	PBS027	IDR	1,600,000,000,000.00
87	15-Oct-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	2,350,000,000,000.00
88	3-Nov-20	15-May-33	PBS025	IDR	2,300,000,000,000.00
89	3-Nov-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,950,000,000,000.00
90	3-Nov-20	15-May-23	PBS027	IDR	800,000,000,000.00
91	3-Nov-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	4,750,000,000,000.00
92	12-Nov-20	15-May-33	PBS025	IDR	1,900,000,000,000.00
93	12-Nov-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,600,000,000,000.00
94	12-Nov-20	15-May-23	PBS027	IDR	1,150,000,000,000.00
95	12-Nov-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	4,350,000,000,000.00
96	17-Nov-20	15-Jul-47	PBS015	IDR	2,000,000,000,000.00
97	26-Nov-20	15-Oct-25	PBS017	IDR	2,850,000,000,000.00
98	26-Nov-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	2,800,000,000,000.00
99	26-Nov-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	4,350,000,000,000.00
100	11-Dec-20	15-Oct-25	PBS017	IDR	1,350,000,000,000.00
101	11-Dec-20	15-Oct-24	PBS026	IDR	1,650,000,000,000.00
102	11-Dec-20	15-Oct-46	PBS028	IDR	2,900,000,000,000.00
Total (IDR)					**262,201,476,000,000.00**

Tabel 10. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, Sukuk Wakaf dan Sukuk Wakaf Ritel Tahun 2020

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	10-Mar-20	10-Mar-25	SW001	IDR	50,849,000,000.00
2	26-Mar-20	10-Mar-23	SR-012	IDR	12,142,572,000,000.00
3	30-Sep-20	10-Sep-23	SR-013	IDR	25,665,971,000,000.00
4	26-Nov-20	10-Nov-22	SWR001	IDR	14,912,000,000
5	2-Dec-20	10-Nov-22	ST007	IDR	5,421,257,000,000
Total (IDR)					**43,295,561,000,000.00**

Tabel 11. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2020

NO	Tangal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Jumlah
1	23-Jun-20	23-Jun-25	SNI0625	USD	750,000,000.00
2	23-Jun-20	23-Jun-30	SNI0630	USD	1,000,000,000.00
3	23-Jun-20	23-Jun-50	SNI0650	USD	750,000,000.00
Total (USD)					**2,500,000,000.00**

Tabel 12. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2020

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SDHI 2020C	3-Jan-20	3,000,000,000,000.00
2	ST003	10-Feb-20	33,595,000,000.00
3	SR-009	10-Mar-20	14,037,310,000,000.00
4	IFR0008	16-Mar-20	252,000,000,000.00
5	PBS016	16-Mar-20	39,525,000,000,000.00
6	SDHI2020E	23-Mar-20	2,000,000,000,000.00
7	SDHI-2020A	27-Apr-20	1,500,000,000,000.00
8	ST004	11-May-20	30,981,000,000.00
9	SDHI-2020B	29-Jun-20	1,000,000,000,000.00
10	SDHI2020D	29-Jun-20	1,000,000,000,000.00
11	ST005	10-Aug-20	17,586,000,000.00
12	PBS006	15-Sep-20	38,508,000,000,000.00
13	ST002	10-Nov-20	4,907,011,000,000.00
14	ST006	10-Nov-20	7,381,000,000.00
Total (IDR)			**105,818,864,000,000.00**

Tabel 13. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2020

No.	Seri	Tangal Valuta	Jumlah (USD)	Jumlah (IDR)
1	-	-	-	-

Selama Tahun 2020, tidak terdapat transaksi atas pelunasan SBSN Valas.

VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2020

I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi Berbunga Tetap (*Fixed Rate Bonds* - FR)

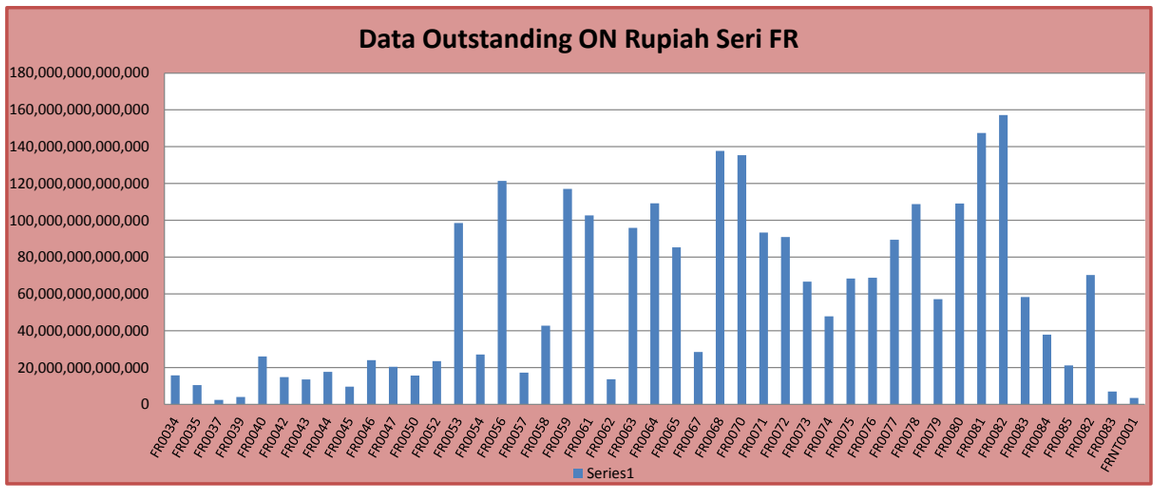
Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir Tahun 2020, terdapat 45 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,5% sampai dengan 12,9% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2048. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel 14 berikut.

Tabel 14. *Outstanding* SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2020

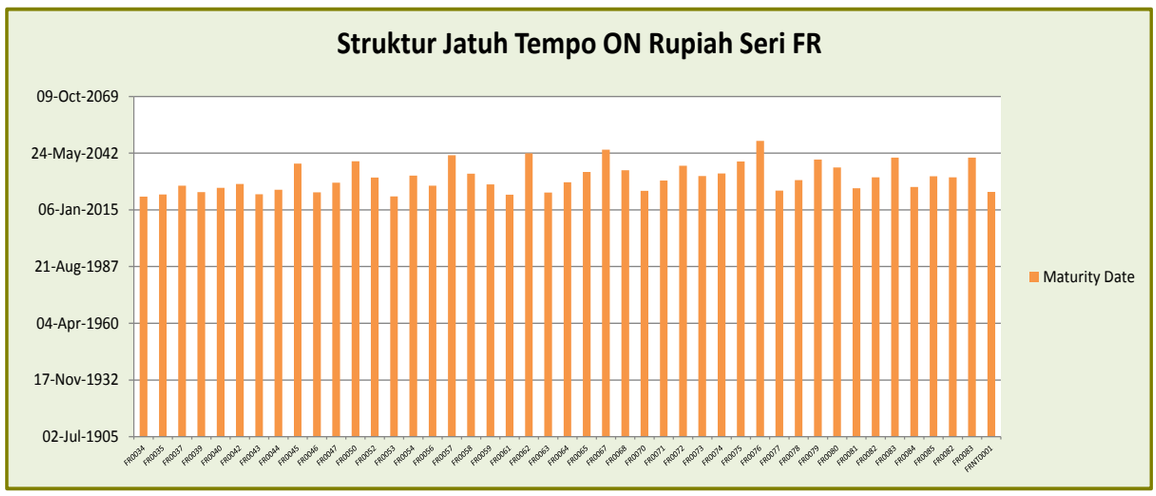
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	FR0034	26-Jan-2006	15-Jun-2021	12.80000%	IDR	15,729,400,000,000
2	FR0035	16-Feb-2006	15-Jun-2022	12.90000%	IDR	10,442,750,000,000
3	FR0037	18-May-2006	15-Sep-2026	12.00000%	IDR	2,450,000,000,000
4	FR0039	24-Aug-2006	15-Aug-2023	11.75000%	IDR	4,061,000,000,000
5	FR0040	21-Sep-2006	15-Sep-2025	11.00000%	IDR	26,002,090,000,000
6	FR0042	25-Jan-2007	15-Jul-2027	10.25000%	IDR	14,774,100,000,000
7	FR0043	22-Feb-2007	15-Jul-2022	10.25000%	IDR	13,542,000,000,000
8	FR0044	19-Apr-2007	15-Sep-2024	10.00000%	IDR	17,701,000,000,000
9	FR0045	24-May-2007	15-May-2037	9.75000%	IDR	9,624,304,000,000
10	FR0046	19-Jul-2007	15-Jul-2023	9.50000%	IDR	24,037,000,000,000
11	FR0047	30-Aug-2007	15-Feb-2028	10.00000%	IDR	20,385,000,000,000
12	FR0050	24-Jan-2008	15-Jul-2038	10.50000%	IDR	15,661,000,000,000
13	FR0052	20-Aug-2009	15-Aug-2030	10.50000%	IDR	23,500,000,000,000
14	FR0053	08-Jul-2010	15-Jul-2021	8.25000%	IDR	98,537,793,000,000
15	FR0054	22-Jul-2010	15-Jul-2031	9.50000%	IDR	27,096,000,000,000
16	FR0056	23-Sep-2010	15-Sep-2026	8.37500%	IDR	121,414,000,000,000
17	FR0057	21-Apr-2011	15-May-2041	9.50000%	IDR	17,236,573,000,000
18	FR0058	21-Jul-2011	15-Jun-2032	8.25000%	IDR	42,798,000,000,000
19	FR0059	15-Sep-2011	15-May-2027	7.00000%	IDR	117,080,000,000,000
20	FR0061	06-Oct-2011	15-May-2022	7.00000%	IDR	102,729,000,000,000
21	FR0062	09-Feb-2012	15-Apr-2042	6.37500%	IDR	13,692,000,000,000
22	FR0063	13-Aug-2012	15-May-2023	5.62500%	IDR	95,918,000,000,000
23	FR0064	13-Aug-2012	15-May-2028	6.12500%	IDR	109,295,000,000,000
24	FR0065	30-Aug-2012	15-May-2033	6.62500%	IDR	85,343,000,000,000
25	FR0067	18-Jul-2013	15-Feb-2044	8.75000%	IDR	28,488,284,000,000
26	FR0068	01-Aug-2013	15-Mar-2034	8.37500%	IDR	137,758,000,000,000
27	FR0070	29-Aug-2013	15-Mar-2024	8.37500%	IDR	135,439,421,000,000
28	FR0071	12-Sep-2013	15-Mar-2029	9.00000%	IDR	93,390,682,000,000
29	FR0072	09-Jul-2015	15-May-2036	8.25000%	IDR	90,910,000,000,000
30	FR0073	06-Aug-2015	15-May-2031	8.75000%	IDR	66,717,000,000,000
31	FR0074	10-Nov-2016	15-Aug-2032	7.50000%	IDR	47,831,140,000,000
32	FR0075	10-Aug-2017	15-May-2038	7.50000%	IDR	68,420,860,000,000
33	FR0076	22-Sep-2017	15-May-2048	7.37500%	IDR	68,789,000,000,000
34	FR0077	27-Sep-2018	15-May-2024	8.12500%	IDR	89,495,000,000,000
35	FR0078	27-Sep-2018	15-May-2029	8.25000%	IDR	108,775,000,000,000
36	FR0079	07-Jan-2019	15-Apr-2039	8.37500%	IDR	57,180,000,000,000
37	FR0080	04-Jul-2019	15-Jun-2035	7.50000%	IDR	109,138,300,000,000
38	FR0081	01-Aug-2019	15-Jun-2025	6.50000%	IDR	147,419,400,000,000
39	FR0082	01-Aug-2019	15-Sep-2030	7.00000%	IDR	157,188,800,000,000
40	FR0083	07-Nov-2019	15-Apr-2040	7.50000%	IDR	58,341,500,000,000
41	FR0084	04-May-2020	15-Feb-2026	7.25000%	IDR	37,877,372,000,000
42	FR0085	04-May-2020	15-Apr-2031	7.75000%	IDR	21,177,940,000,000
43	FR0086	13-Aug-2020	15-Apr-2026	5.50000%	IDR	51,150,000,000,000
44	FR0087	13-Aug-2020	15-Feb-2031	6.50000%	IDR	67,250,000,000,000
45	FRNT0001	29-Aug-2018	29-Aug-2023	8.00000%	IDR	3,500,000,000,000
Total					**IDR**	**2,675,286,709,000,000**

Grafik 1. Data *Outstanding* ON Rupiah seri FR tgl 31 Desember 2020



Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR



b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali

(*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2018 - 2021 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 884/KMK.08/2017. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

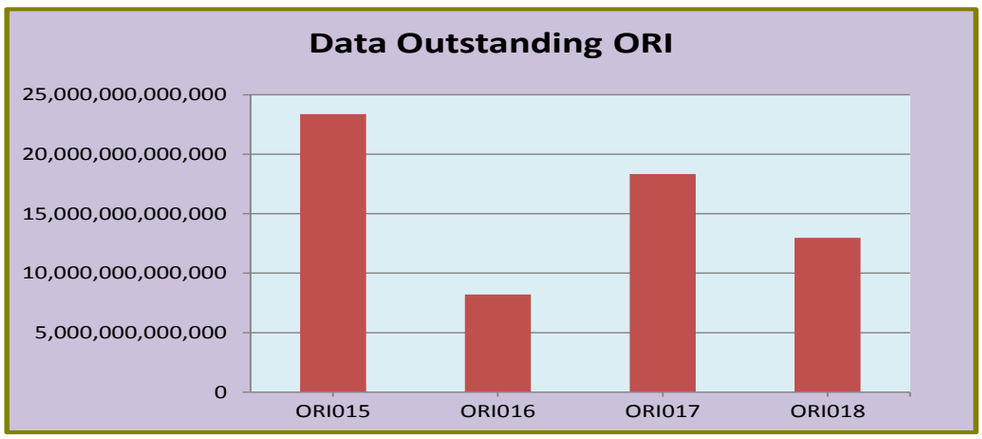
Selain itu. penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu. serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2020 pemerintah menerbitkan 2 (dua) seri ORI baru yaitu ORI017 dengan tingkat kupon 6.40% dan ORI018 dengan tingkat kupon 5.70% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp31.308.212.000.000.- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2020 menunjukkan ada 4 (empat) seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 15 berikut.

Tabel 15. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2020

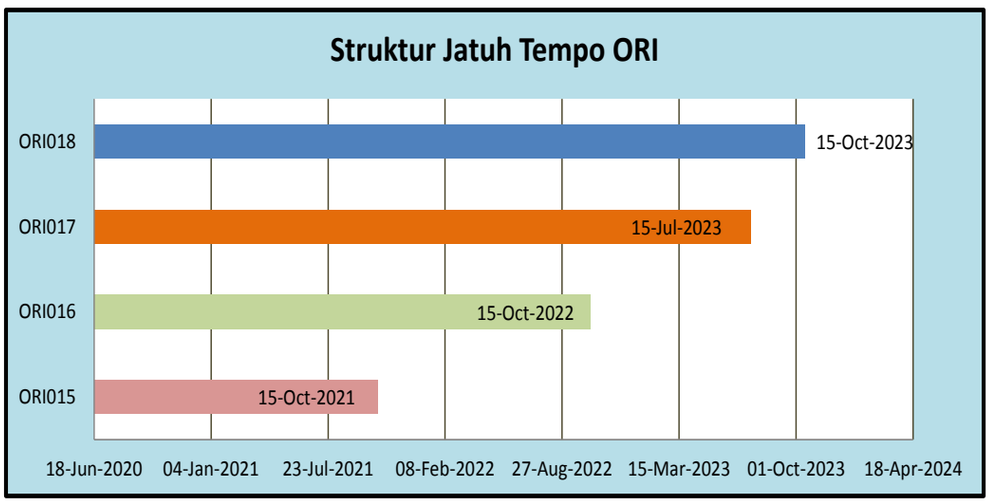
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	ORI015	31-Oct-2018	15-Oct-2021	8.25000%	IDR	23,378,269,000,000
2	ORI016	30-Oct-2019	15-Oct-2022	6.80000%	IDR	8,213,531,000,000
3	ORI017	15-Jul-2020	15-Jul-2023	6.40000%	IDR	18,336,042,000,000
4	ORI018	27-Oct-2020	15-Oct-2023	5.70000%	IDR	12,972,170,000,000
Total					**IDR**	**62,900,012,000,000**

Grafik 3. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2020



Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut.

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2020



c. Obligasi Tanpa Bunga (*Zero Coupon* - ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005 sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

d. Obligasi Berbunga Mengambang *(Variable Rate Bonds - VR)*

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

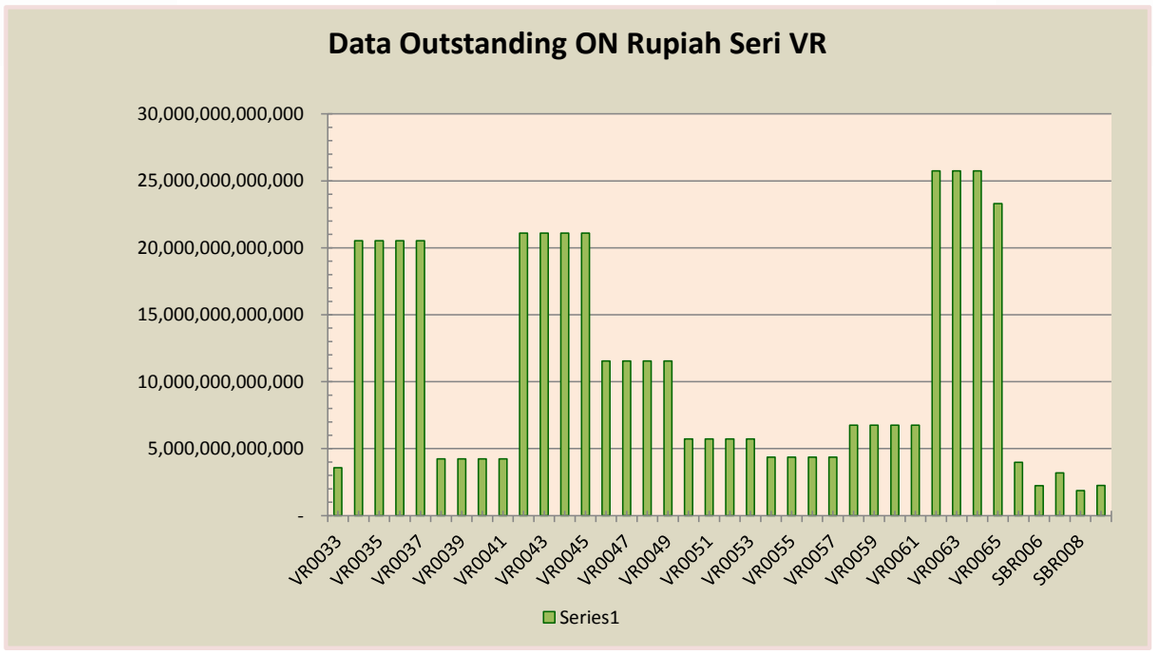
Sampai akhir Tahun 2020, terdapat 33 seri VR dan 5 seri SBR dengan *outstanding* berkisar dari 1.87 triliun sampai dengan 25,74 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2021 sampai dengan 2028.

Tabel 16. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR)

per 31 Desember 2020

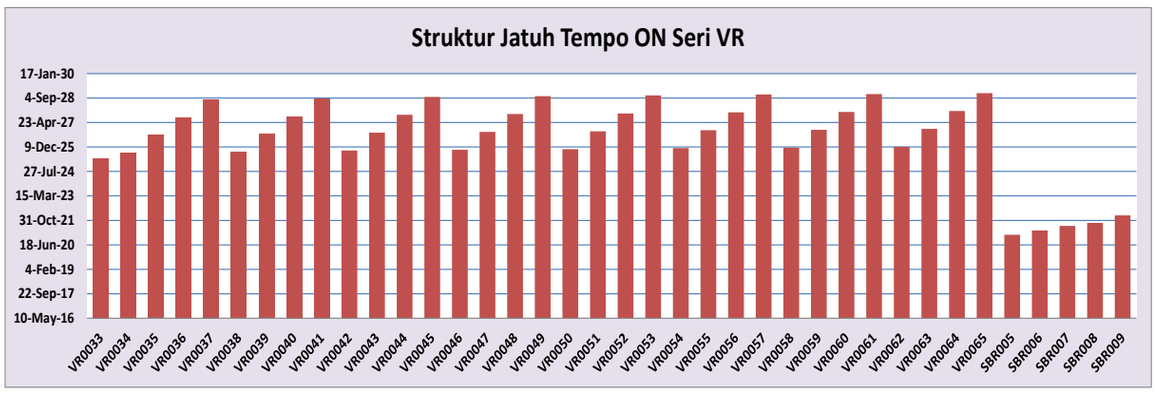
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	VR0033	04-May-2020	25-Apr-2025	7.10053%	IDR	3,568,686,000,000
2	VR0034	10-Aug-2020	10-Aug-2025	3.80000%	IDR	20,525,000,000,000
3	VR0035	10-Aug-2020	10-Aug-2026	3.80000%	IDR	20,525,000,000,000
4	VR0036	10-Aug-2020	10-Aug-2027	3.80000%	IDR	20,525,000,000,000
5	VR0037	10-Aug-2020	10-Aug-2028	3.80000%	IDR	20,525,000,000,000
6	VR0038	28-Aug-2020	28-Aug-2025	3.84028%	IDR	4,245,000,000,000
7	VR0039	28-Aug-2020	28-Aug-2026	3.84028%	IDR	4,245,000,000,000
8	VR0040	28-Aug-2020	28-Aug-2027	3.84028%	IDR	4,245,000,000,000
9	VR0041	28-Aug-2020	28-Aug-2028	3.84028%	IDR	4,245,000,000,000
10	VR0042	28-Sep-2020	28-Sep-2025	3.84002%	IDR	21,100,000,000,000
11	VR0043	28-Sep-2020	28-Sep-2026	3.84002%	IDR	21,100,000,000,000
12	VR0044	28-Sep-2020	28-Sep-2027	3.84002%	IDR	21,100,000,000,000
13	VR0045	28-Sep-2020	28-Sep-2028	3.84002%	IDR	21,100,000,000,000
14	VR0046	12-Oct-2020	12-Oct-2025	3.84000%	IDR	11,550,000,000,000
15	VR0047	12-Oct-2020	12-Oct-2026	3.84000%	IDR	11,550,000,000,000
16	VR0048	12-Oct-2020	12-Oct-2027	3.84000%	IDR	11,550,000,000,000
17	VR0049	12-Oct-2020	12-Oct-2028	3.84000%	IDR	11,550,000,000,000
18	VR0050	26-Oct-2020	26-Oct-2025	3.84000%	IDR	5,717,500,000,000
19	VR0051	26-Oct-2020	26-Oct-2026	3.84000%	IDR	5,717,500,000,000
20	VR0052	26-Oct-2020	26-Oct-2027	3.84000%	IDR	5,717,500,000,000
21	VR0053	26-Oct-2020	26-Oct-2028	3.84000%	IDR	5,717,500,000,000
22	VR0054	16-Nov-2020	16-Nov-2025	3.82067%	IDR	4,370,000,000,000
23	VR0055	16-Nov-2020	16-Nov-2026	3.82067%	IDR	4,370,000,000,000
24	VR0056	16-Nov-2020	16-Nov-2027	3.82067%	IDR	4,370,000,000,000
25	VR0057	16-Nov-2020	16-Nov-2028	3.82067%	IDR	4,370,000,000,000
26	VR0058	23-Nov-2020	23-Nov-2025	3.81729%	IDR	6,750,000,000,000
27	VR0059	23-Nov-2020	23-Nov-2026	3.81729%	IDR	6,750,000,000,000
28	VR0060	23-Nov-2020	23-Nov-2027	3.81729%	IDR	6,750,000,000,000
29	VR0061	23-Nov-2020	23-Nov-2028	3.81729%	IDR	6,750,000,000,000
30	VR0062	14-Dec-2020	14-Dec-2025	3.57326%	IDR	25,742,500,000,000
31	VR0063	14-Dec-2020	14-Dec-2026	3.57326%	IDR	25,742,500,000,000
32	VR0064	14-Dec-2020	14-Dec-2027	3.57326%	IDR	25,742,500,000,000
33	VR0065	14-Dec-2020	14-Dec-2028	3.57326%	IDR	23,302,500,000,000
34	SBR005	30-Jan-2019	10-Jan-2021	8.15000%	IDR	3,977,219,000,000
35	SBR006	24-Apr-2019	10-Apr-2021	7.95000%	IDR	2,236,018,000,000
36	SBR007	31-Jul-2019	10-Jul-2021	7.50000%	IDR	3,190,278,000,000
37	SBR008	25-Sep-2019	10-Sep-2021	7.20000%	IDR	1,875,481,000,000
38	SBR009	19-Feb-2020	10-Feb-2022	7.30000%	IDR	2,255,246,000,000
Total					IDR	414,662,928,000,000

Grafik 5. Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2020



Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 6 berikut.

Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2020



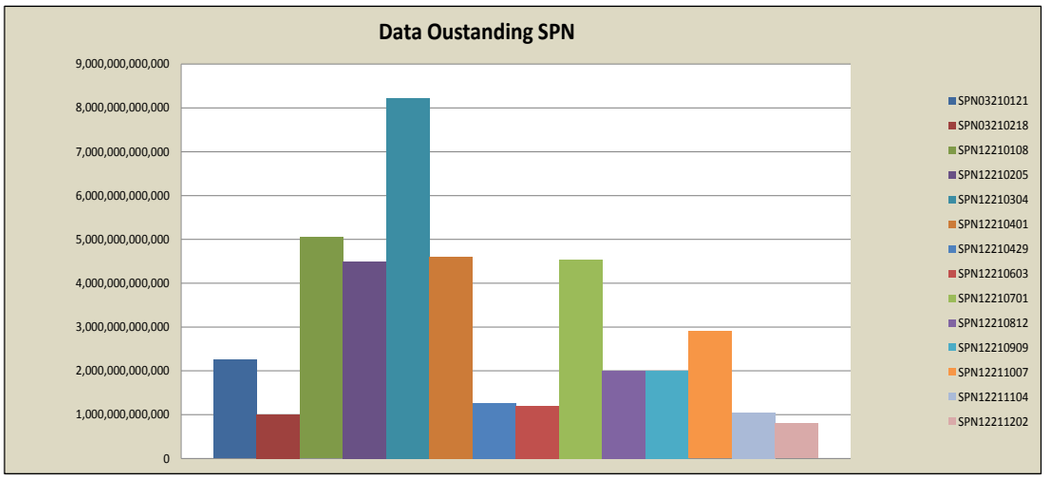
e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2020, terdapat 14 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar 800 milyar hingga 8,22 triliun yang akan jatuh tempo pada Tahun 2021.

Tabel 17. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2020

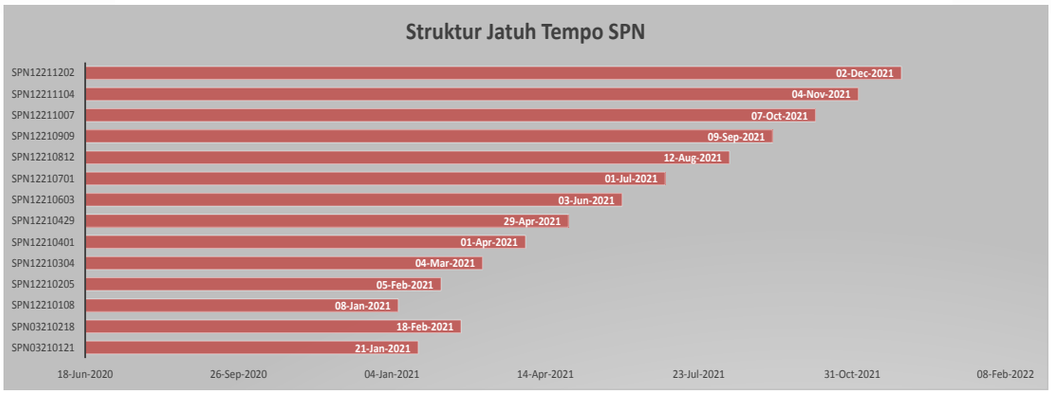
No	Series	Maturity Date	Outstanding	
1	SPN03210121	21-Jan-2021	IDR	2,250,000,000,000
2	SPN03210218	18-Feb-2021	IDR	1,000,000,000,000
3	SPN12210108	08-Jan-2021	IDR	5,050,000,000,000
4	SPN12210205	05-Feb-2021	IDR	4,500,000,000,000
5	SPN12210304	04-Mar-2021	IDR	8,220,000,000,000
6	SPN12210401	01-Apr-2021	IDR	4,600,000,000,000
7	SPN12210429	29-Apr-2021	IDR	1,270,000,000,000
8	SPN12210603	03-Jun-2021	IDR	1,200,000,000,000
9	SPN12210701	01-Jul-2021	IDR	4,540,000,000,000
10	SPN12210812	12-Aug-2021	IDR	2,000,000,000,000
11	SPN12210909	09-Sep-2021	IDR	2,000,000,000,000
12	SPN12211007	07-Oct-2021	IDR	2,900,000,000,000
13	SPN12211104	04-Nov-2021	IDR	1,050,000,000,000
14	SPN12211202	02-Dec-2021	IDR	800,000,000,000
Total			**IDR**	**41,380,000,000,000**

Grafik 7. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2020



Adapun struktur jatuh tempo ON seri SPN disajikan dalam Grafik 8 berikut.

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2020



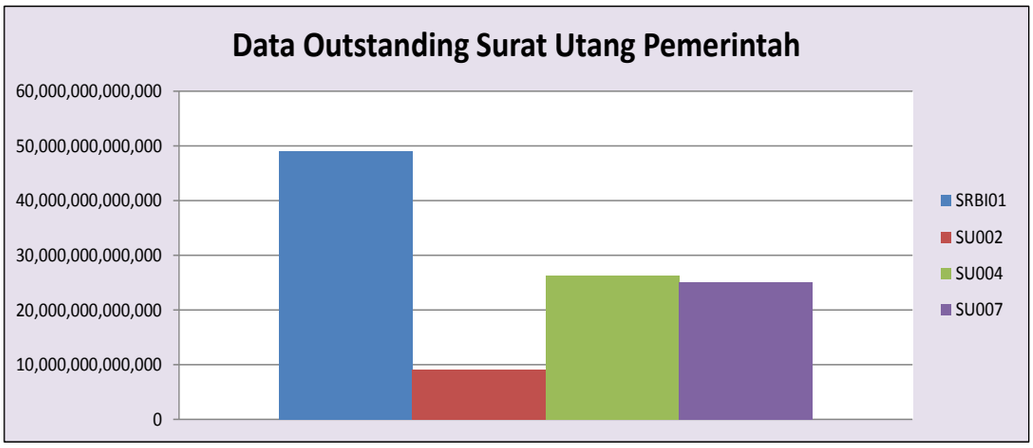
f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007 dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data *outstanding* SUP disajikan pada tabel 18 berikut.

Tabel 18. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2020

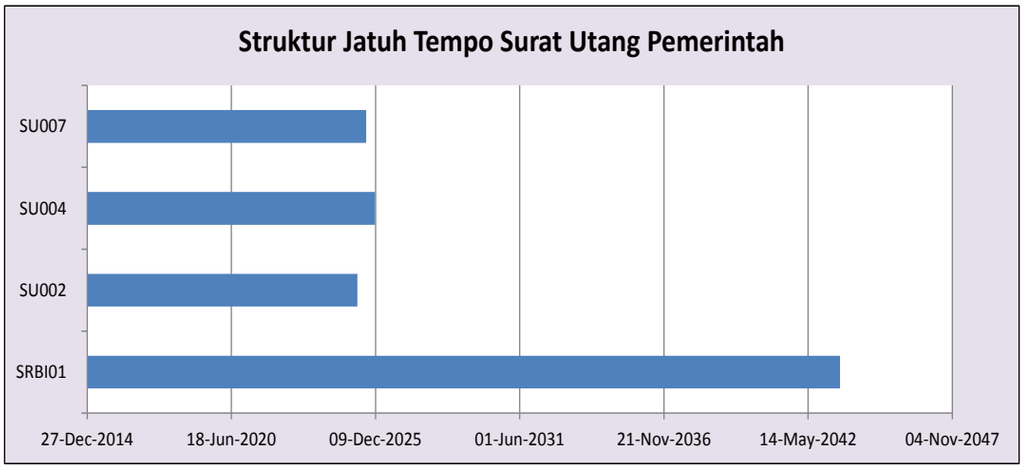
No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SRBI01	01-Aug-2043	0.10000%	IDR	49,042,244,961,845
2	SU002	01-Apr-2025	0.10000%	IDR	9,116,793,505,349
3	SU004	01-Dec-2025	0.10000%	IDR	26,278,525,615,548
4	SU007	01-Aug-2025	0.10000%	IDR	25,114,635,818,981
Total				**IDR**	**109,552,199,901,723**

Grafik 9. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah
per 31 Desember 2020



Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan dalam Grafik 10 berikut.

Grafik 10.Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah
per 31 Desember 2020



g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

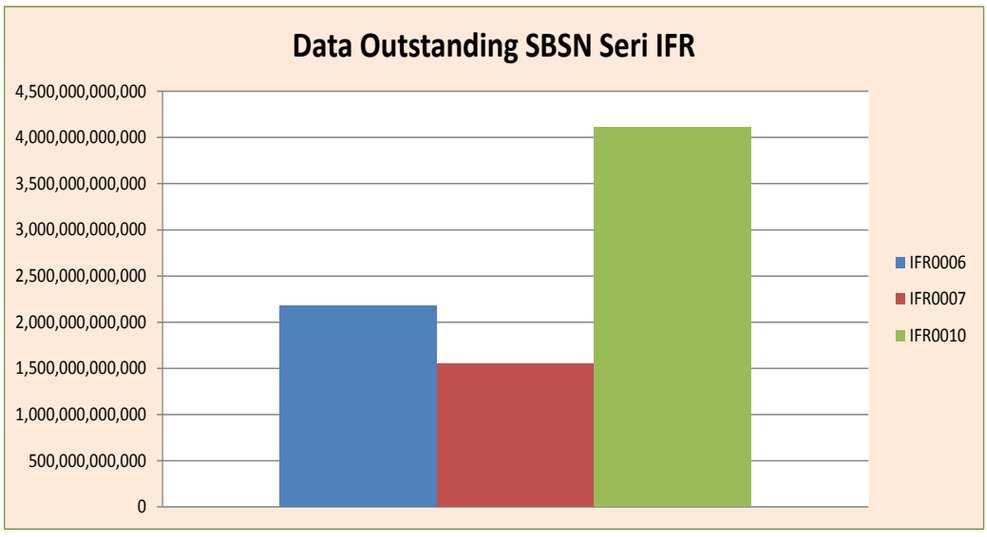
Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat imbalan yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbalan/rate seri FR *(Fixed Rate)* dibayarkan setiap enam bulan sekali *(semi-annually)*. SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Pada akhir Tahun 2020 terdapat 3 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2022 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 10% sampai dengan 10,25% yang disajikan dalam tabel 19 berikut.

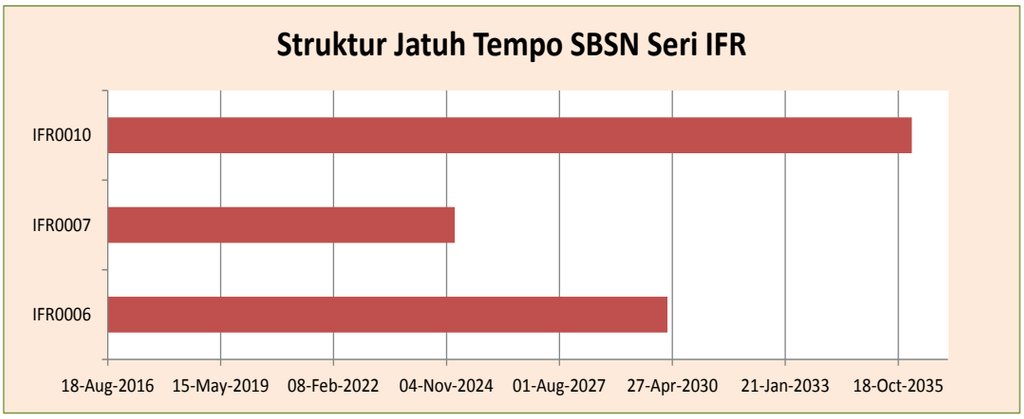
Tabel 19. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2020

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	IFR0006	15-Mar-2030	10.25000%	IDR	2,175,000,000,000
2	IFR0007	15-Jan-2025	10.25000%	IDR	1,547,000,000,000
3	IFR0010	15-Feb-2036	10.00000%	IDR	4,110,000,000,000
Total				**IDR**	**7,832,000,000,000**

Grafik 11. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2020



Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2020



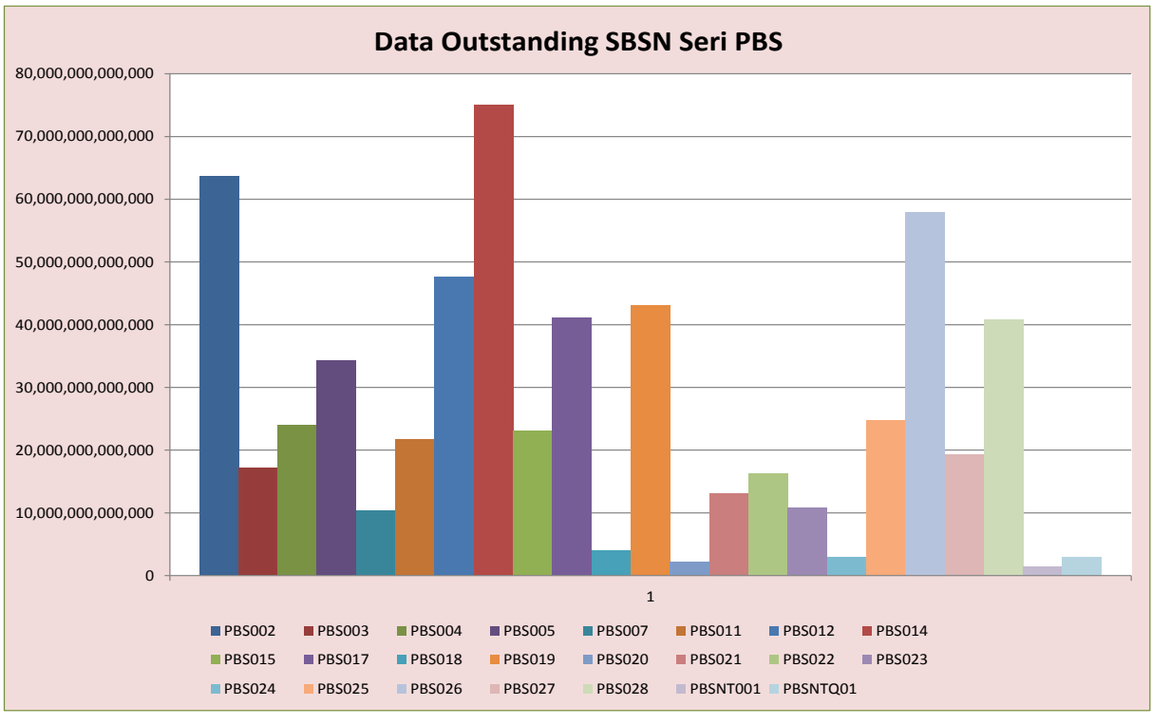
h. ***Project Based Sukuk (PBS)***

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang mengunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir Tahun 2020 terdapat 23 seri PBS yang ada sebagaimana disajikan dalam tabel 20 berikut.

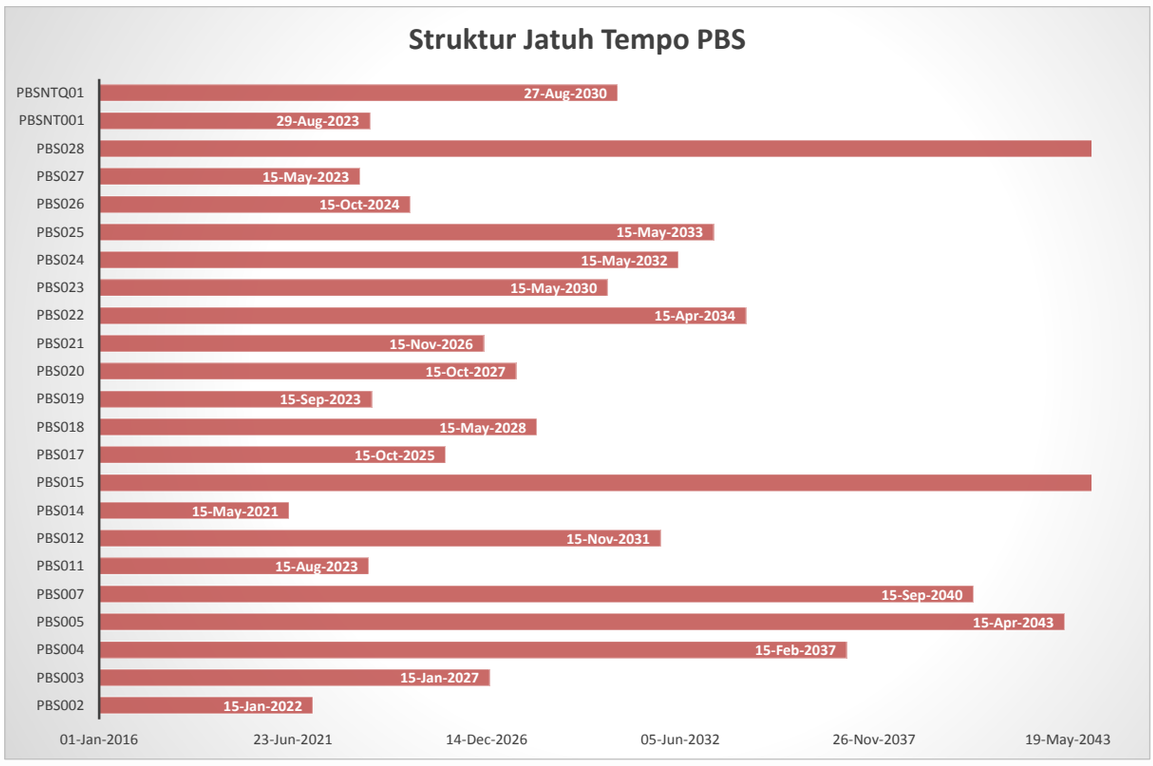
Tabel 20. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2020

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	PBS002	15-Jan-2022	5.45000%	IDR	63,660,857,000,000
2	PBS003	15-Jan-2027	6.00000%	IDR	17,136,000,000,000
3	PBS004	15-Feb-2037	6.10000%	IDR	23,967,857,000,000
4	PBS005	15-Apr-2043	6.75000%	IDR	34,324,000,000,000
5	PBS007	15-Sep-2040	9.00000%	IDR	10,375,000,000,000
6	PBS011	15-Aug-2023	8.75000%	IDR	21,750,000,000,000
7	PBS012	15-Nov-2031	8.87500%	IDR	47,680,694,000,000
8	PBS014	15-May-2021	6.50000%	IDR	75,007,857,000,000
9	PBS015	15-Jul-2047	8.00000%	IDR	23,043,000,000,000
10	PBS017	15-Oct-2025	6.12500%	IDR	41,157,580,000,000
11	PBS018	15-May-2028	7.62500%	IDR	4,000,000,000,000
12	PBS019	15-Sep-2023	8.25000%	IDR	43,040,000,000,000
13	PBS020	15-Oct-2027	9.00000%	IDR	2,250,000,000,000
14	PBS021	15-Nov-2026	8.50000%	IDR	13,185,000,000,000
15	PBS022	15-Apr-2034	8.62500%	IDR	16,330,000,000,000
16	PBS023	15-May-2030	8.12500%	IDR	10,875,000,000,000
17	PBS024	15-May-2032	8.37500%	IDR	3,000,000,000,000
18	PBS025	15-May-2033	8.37500%	IDR	24,735,000,000,000
19	PBS026	15-Oct-2024	6.62500%	IDR	57,895,000,000,000
20	PBS027	15-May-2023	6.50000%	IDR	19,288,896,000,000
21	PBS028	15-Oct-2046	7.75000%	IDR	40,765,000,000,000
22	PBSNT001	29-Aug-2023	8.00000%		1,500,000,000,000
23	PBSNTQ01	27-Aug-2030	6.37000%	IDR	3,000,000,000,000
Total				IDR	597,966,741,000,000

Grafik 13. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2020



Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2020



i. *Sukuk* Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN. diversifikasi investor dan instrumen. memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah. dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

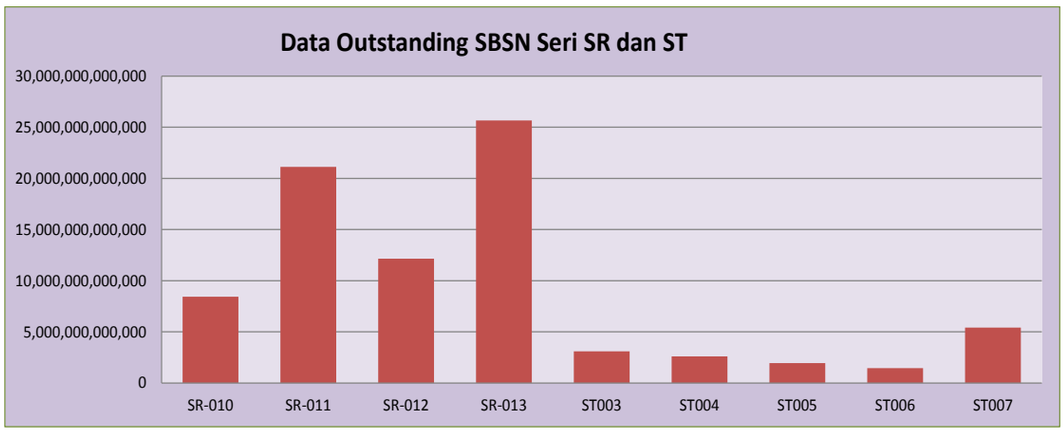
Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Tahun 2020, pemerintah menerbitkan 2 seri SR yakni SR012 dan SR013 serta 1 seri ST yakni ST007 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2020 menunjukkan ada 4 seri SR dan 5 seri ST dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2021 sampai dengan 2023 yang disajikan pada tabel 21.

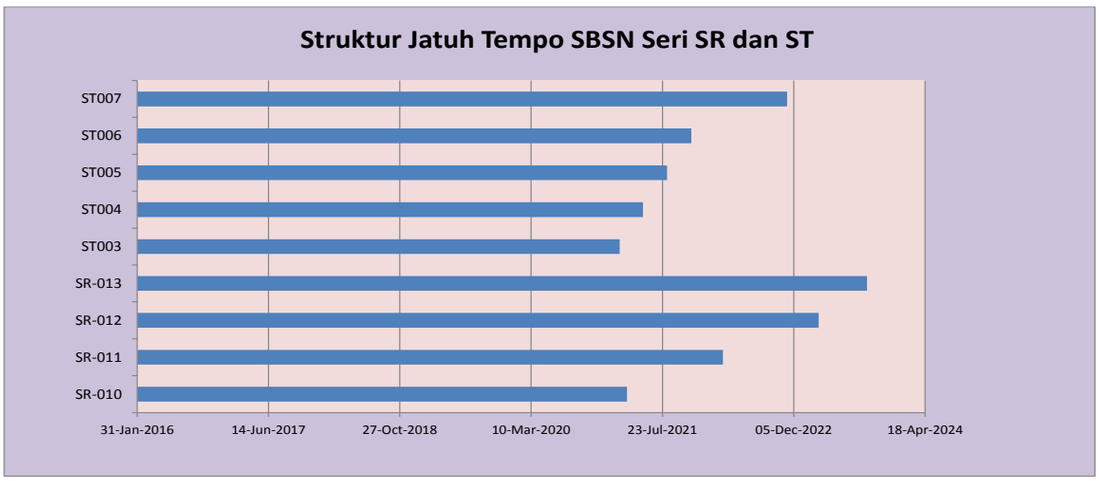
Tabel 21. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2020

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SR-010	10-Mar-2021	5.90000%	IDR	8,436,570,000,000
2	SR-011	10-Mar-2022	8.05000%	IDR	21,117,570,000,000
3	SR-012	10-Mar-2023	6.30000%	IDR	12,142,572,000,000
4	SR-013	10-Sep-2023	6.05000%	IDR	25,665,971,000,000
5	ST003	10-Feb-2021	8.15000%	IDR	3,093,698,000,000
6	ST004	10-May-2021	7.95000%	IDR	2,602,809,000,000
7	ST005	10-Aug-2021	7.65000%	IDR	1,945,098,000,000
8	ST006	10-Nov-2021	7.75000%	IDR	1,452,499,000,000
9	ST007	10-Nov-2022	1.50000%	IDR	5,421,257,000,000
Total				IDR	81,878,044,000,000

Grafik 15. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2020



Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2020



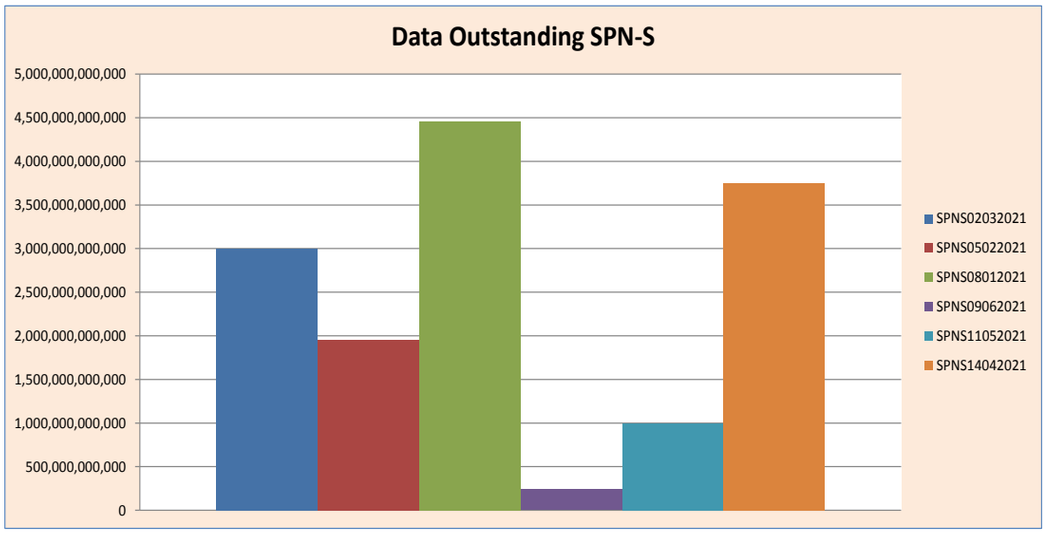
j. *Surat* Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2020, terdapat 6 seri SPN-S yang beredar dengan total *outstanding* sebesar Rp14.400.000.000.000,- yang akan jatuh tempo pada Tahun 2021.

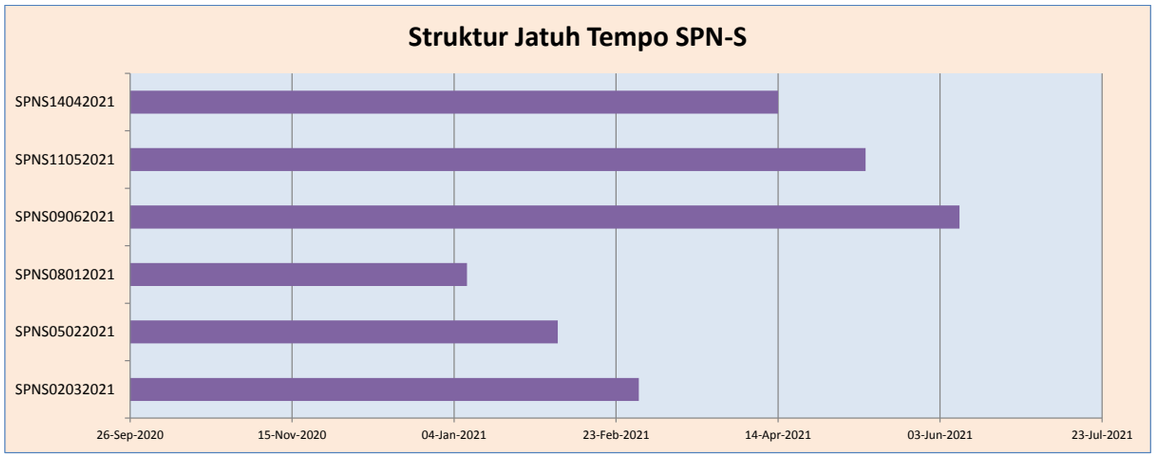
Tabel 22. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2020

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SPNS02032021	02-Mar-2021	-	IDR	3,000,000,000,000
2	SPNS05022021	05-Feb-2021	-	IDR	1,950,000,000,000
3	SPNS08012021	08-Jan-2021	-	IDR	4,460,000,000,000
4	SPNS09062021	09-Jun-2021	-	IDR	240,000,000,000
5	SPNS11052021	11-May-2021	-	IDR	1,000,000,000,000
6	SPNS14042021	14-Apr-2021	-	IDR	3,750,000,000,000
Total				**IDR**	**14,400,000,000,000**

Grafik 17. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2020



Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2020



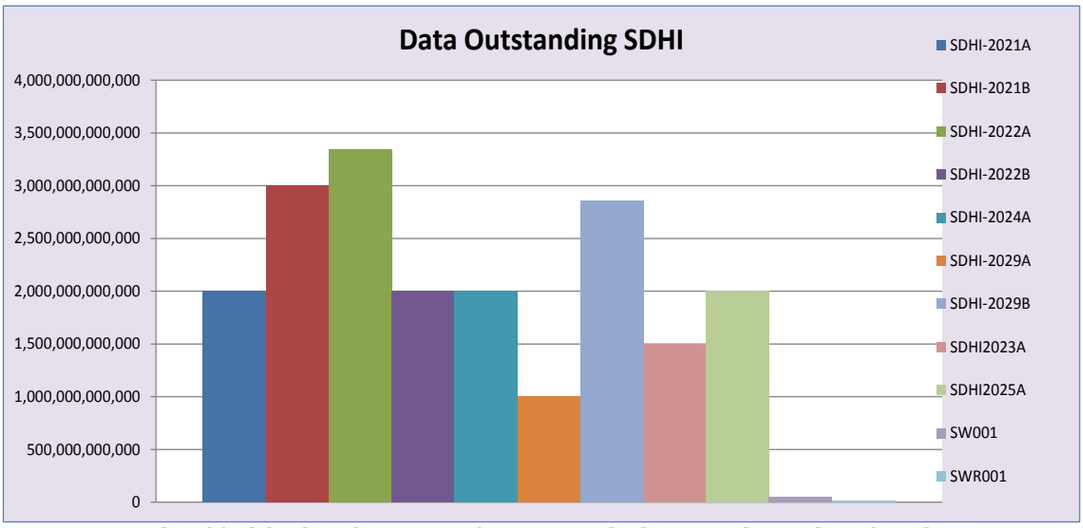
k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Wakaf (SW) dan Sukuk Wakaf Ritel (SWR)

SDHI dan SW merupakan intrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana pada SBSN dengan metode *private placement*, sedangkan SWR merupakan intrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana pada SBSN dengan metode *bookbuilding*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan. Pada akhir Tahun 2020, terdapat 9 seri SDHI, 1 seri SW dan 1 seri SWR dengan nilai *outstanding* Rp19.762.761.000.000,-.

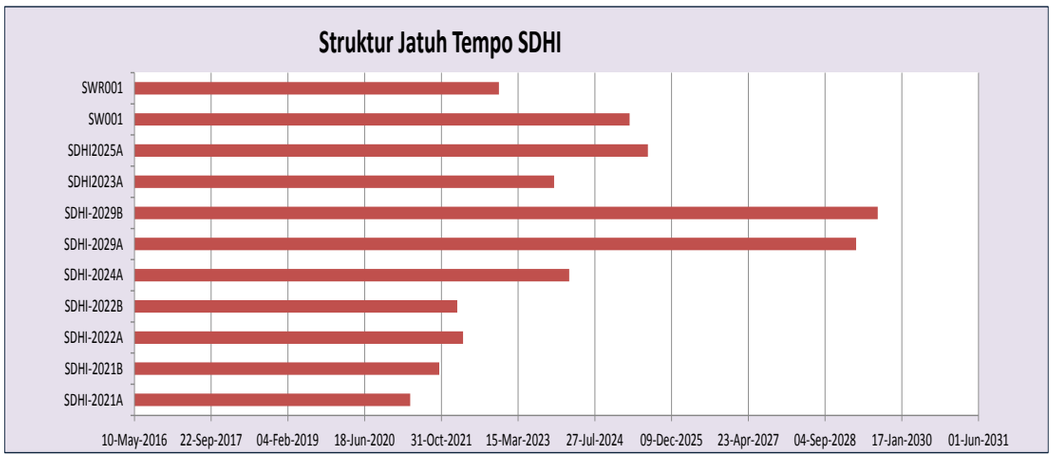
Tabel 23. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI, SW dan SWR
per 31 Desember 202

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SDHI-2021A	11-Apr-2021	8.00000%	IDR	2,000,000,000,000
2	SDHI-2021B	17-Oct-2021	7.16000%	IDR	3,000,000,000,000
3	SDHI-2022A	21-Mar-2022	5.91000%	IDR	3,342,000,000,000
4	SDHI-2022B	11-Feb-2022	8.75000%	IDR	2,000,000,000,000
5	SDHI-2024A	11-Feb-2024	9.04000%	IDR	2,000,000,000,000
6	SDHI-2029A	25-Mar-2029	8.43000%	IDR	1,000,000,000,000
7	SDHI-2029B	13-Aug-2029	8.62000%	IDR	2,855,000,000,000
8	SDHI2023A	04-Nov-2023	8.82000%	IDR	1,500,000,000,000
9	SDHI2025A	08-Jul-2025	8.30000%	IDR	2,000,000,000,000
10	SW001	10-Mar-2025	5.00000%	IDR	50,849,000,000
11	SWR001	10-Nov-2022	5.50000%	IDR	14,912,000,000
Total				**IDR**	**19,762,761,000,000**

Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI, SW dan SWR
per 31 Desember 2020



Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI,SW dan SWR
per 31 Desember 2020



II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan

kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir Tahun 2020, terdapat 80 seri SBN valas dengan 51 seri memiliki denominasi USD (termasuk SBN domestik yang berdenominasi valas), 20 seri dengan denominasi JP¥ dan 9 Seri berdenominasi EUR. Data *outstanding* SBN valas disajikan dalam tabel 24 berikut.

Tabel 24. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2020

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
A. GOVERNMENT DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
1	RI0035	12-Oct-2035	8.50000%	USD	1,600,000,000
2	RI0037	17-Feb-2037	6.62500%	USD	1,500,000,000
3	RI0038	17-Jan-2038	7.75000%	USD	2,000,000,000
4	RI0122	08-Jan-2022	3.70000%	USD	750,000,000
5	RI0123	11-Jan-2023	2.95000%	USD	1,000,000,000
6	RI0124	15-Jan-2024	5.87500%	USD	2,000,000,000
7	RI0125	15-Jan-2025	4.12500%	USD	2,000,000,000
8	RI0126	08-Jan-2026	4.75000%	USD	2,250,000,000
9	RI0127	08-Jan-2027	4.35000%	USD	1,250,000,000
10	RI0128	11-Jan-2028	3.50000%	USD	1,250,000,000
11	RI0142	17-Jan-2042	5.25000%	USD	2,250,000,000
12	RI0144	15-Jan-2044	6.75000%	USD	2,000,000,000
13	RI0145	15-Jan-2045	5.12500%	USD	2,000,000,000
14	RI0146	08-Jan-2046	5.95000%	USD	1,250,000,000
15	RI0147	08-Jan-2047	5.25000%	USD	1,500,000,000
16	RI0148	11-Jan-2048	4.35000%	USD	1,750,000,000
17	RI0224	11-Feb-2024	4.45000%	USD	750,000,000
18	RI0229	11-Feb-2029	4.75000%	USD	1,250,000,000
19	RI0230	14-Feb-2030	2.85000%	USD	1,200,000,000
20	RI0249	11-Feb-2049	5.35000%	USD	1,000,000,000
21	RI0250	14-Jan-2050	3.50000%	USD	800,000,000
22	RI0422	25-Apr-2022	3.75000%	USD	2,000,000,000
23	RI0423	15-Apr-2023	3.37500%	USD	1,500,000,000
24	RI0428	24-Apr-2028	4.10000%	USD	1,000,000,000
25	RI0443	15-Apr-2043	4.62500%	USD	1,500,000,000
26	RI0470	15-Apr-2070	4.45000%	USD	1,000,000,000
27	RI0521	05-May-2021	4.87500%	USD	2,500,000,000
28	RI0727	18-Jul-2027	3.85000%	USD	1,000,000,000
29	RI0747	18-Jul-2047	4.75000%	USD	1,000,000,000
30	RI0929	18-Sep-2029	3.40000%	USD	750,000,000
31	RI1023	17-Oct-2023	5.37500%	USD	1,000,000,000
32	RI1030	15-Oct-2030	3.85000%	USD	1,650,000,000
33	RI1049	30-Oct-2049	3.70000%	USD	1,000,000,000
34	RI1050	15-Oct-2050	4.20000%	USD	1,650,000,000
35	USDFR0002	24-Jun-2026	4.05000%	USD	200,000,000
	Total Fixed Coupon			USD	49,100,000,000
	*Total US Dollar Denominated *)*			IDR	692,555,500,000,000

Japan Yen Denominated					
Fixed Coupon					
36	RIJPY0521	31-May-2021	0.67000%	JPY	49,000,000,000
37	RIJPY0522	20-May-2022	0.54000%	JPY	75,700,000,000
38	RIJPY0523	31-May-2023	0.92000%	JPY	39,000,000,000
39	RIJPY0524	22-May-2024	0.83000%	JPY	80,200,000,000
40	RIJPY0525	30-May-2025	1.07000%	JPY	3,500,000,000
41	RIJPY0526	22-May-2026	0.96000%	JPY	4,500,000,000
42	RIJPY0528	31-May-2028	1.27000%	JPY	8,500,000,000
43	RIJPY0529	22-May-2029	1.17000%	JPY	7,600,000,000
44	RIJPY0534	22-May-2034	1.55000%	JPY	4,000,000,000
45	RIJPY0539	20-May-2039	1.79000%	JPY	5,000,000,000
46	RIJPY0621	21-Jun-2021	1.16000%	JPY	38,000,000,000
47	RIJPY0622	08-Jun-2022	0.89000%	JPY	50,000,000,000
48	RIJPY0624	07-Jun-2024	1.04000%	JPY	10,000,000,000
49	RIJPY0723	07-Jul-2023	1.13000%	JPY	50,700,000,000
50	RIJPY0725	08-Jul-2025	1.35000%	JPY	24,300,000,000
51	RIJPY0727	08-Jul-2027	1.48000%	JPY	10,100,000,000
52	RIJPY0730	08-Jul-2030	1.59000%	JPY	13,400,000,000
53	RIJPY0740	06-Jul-2040	1.80000%	JPY	1,500,000,000
54	RIJPY0825	13-Aug-2025	0.91000%	JPY	55,000,000,000
55	RIJPY1122	22-Nov-2022	1.13000%	JPY	60,000,000,000
	Total Fixed Coupon			**JPY**	**590,000,000,000**
	Total Japan Yen Denominated *)			**IDR**	**80,518,126,000,000**
Euro Denominated					
Fixed Coupon					
56	RIEUR0227	14-Feb-2027	0.90000%	EUR	1,000,000,000
57	RIEUR0425	24-Apr-2025	1.75000%	EUR	1,000,000,000
58	RIEUR0623	14-Jun-2023	2.62500%	EUR	1,500,000,000
59	RIEUR0628	14-Jun-2028	3.75000%	EUR	1,500,000,000
60	RIEUR0721	08-Jul-2021	2.87500%	EUR	1,000,000,000
61	RIEUR0724	18-Jul-2024	2.15000%	EUR	1,000,000,000
62	RIEUR0725	30-Jul-2025	3.37500%	EUR	1,250,000,000
63	RIEUR0926	18-Sep-2026	1.45000%	EUR	750,000,000
64	RIEUR1031	30-Oct-2031	1.40000%	EUR	1,000,000,000
	Total Fixed Coupon			**EUR**	**10,000,000,000**
	Total Euro Denominated *)			**IDR**	**173,301,100,000,000**
	TOTAL GOVERNMENT DEBT SECURITIES (A)			**IDR**	**946,374,726,000,000**
B. GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
65	SNI0229	20-Feb-2029	4.45000%	USD	1,250,000,000
66	SNI0322	29-Mar-2022	3.40000%	USD	1,000,000,000
67	SNI0323	01-Mar-2023	3.75000%	USD	1,250,000,000
68	SNI0327	29-Mar-2027	4.15000%	USD	2,000,000,000
69	SNI0328	01-Mar-2028	4.40000%	USD	1,750,000,000
70	SNI0625	23-Jun-2025	2.30000%	USD	750,000,000
71	SNI0630	23-Jun-2030	2.80000%	USD	1,000,000,000
72	SNI0650	23-Jun-2050	3.80000%	USD	750,000,000
73	SNI0824	20-Aug-2024	3.90000%	USD	750,000,000
74	SNI21	29-Mar-2021	3.40000%	USD	750,000,000
75	SNI22	21-Nov-2022	3.30000%	USD	1,000,000,000
76	SNI24	10-Sep-2024	4.35000%	USD	1,500,000,000
77	SNI25	28-May-2025	4.32500%	USD	2,000,000,000
78	SNI26	29-Mar-2026	4.55000%	USD	1,750,000,000
79	USDPBS001	15-Nov-2021	4.05000%	USD	100,000,000
80	USDPBS002	11-Jan-2022	4.00000%	USD	100,000,000
	Total Fixed Coupon			**USD**	**17,700,000,000**
	Total US Dollar Denominated *)			**IDR**	**249,658,500,000,000**
	TOTAL GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES (B)			**IDR**	**249,658,500,000,000**
	GRAND TOTAL (A + B)			**IDR**	**1,196,033,226,000,000**

Ket : Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2020 USD = 14,105.00 JPY = 136.4714 EUR = 17,330.11

III.Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2020

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN Tahun 2020 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 25.

Tabel 25. Mutasi Principle *Outstanding* SBN Tahun 2020

Saldo awal Th 2020 *(Original Currency)*	Mutasi 2020		Saldo Akhir tahun 2020 *(Original Currency)*	Saldo Akhir 2020(Rupiah)
	Penerimaan	Pembayaran		
a	b	c	d	e
IDR 2,961,286,797,031,930.00	IDR 1,369,244,493,000,000.00	IDR 304,909,895,130,207.00	IDR 4,025,621,394,901,730.00	4,025,621,394,901,730.00
USD 60,000,000,000.00	USD 8,800,000,000.00	USD 2,000,000,000.00	USD 66,800,000,000.00	942,214,000,000,000.00
JPY 612,500,000,000.00	JPY 100,000,000,000.00	JPY 122,500,000,000.00	JPY 590,000,000,000.00	80,518,126,000,000.00
EUR 9,050,000,000.00	EUR 1,000,000,000.00	50,000,000.00	EUR 10,000,000,000.00	173,301,100,000,000.00
Jumlah				**5,221,654,620,901,730.00**

Keterangan :

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2019 USD = 13.901,01 JPY = 127,97 EUR = 15.588,60

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2020 USD = 14,105.00 JPY = 136.4714 EUR = 17,330.11

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 34
REPRESENTASI MANAJEMEN DJP DAN DJBC TERKAIT INSENTIF PERPAJAKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA 13013
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILE (021) 4890871 LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-298 /BC/2021 24 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Representasi Manajemen atas Pemberian Insentif Fasilitas Kepabeanan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020

Yth.
Auditor Utama Keuangan Negara II
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI nomor 117/XV/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Tanggapan dan Surat Representasi atas Laporan Keuangan BA 015 Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut

1. Sebagai bentuk respon adanya kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemerintah telah melakukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa secara cepat dan signifikan dengan pengamanan di bidang kesehatan, upaya perlindungan dan pemulihan ekonomi serta sistem keuangan nasional.
2. Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Keuangan menindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan insentif dan/atau fasilitas dibidang kepabeanan dalam rangka penganaan dampak pandemi COVID-19 serta dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020; antara lain adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.04/2020, nomor 34/PMK.04/2020 dan perubahannya (nomor 83/PMK.04/2020 dan terakhir diubah dengan nomor 149/PMK.04/2020), Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.010/2020, serta nomor 188/PMK.04/2020.
4. Selain peraturan tersebut diatas, DJBC juga memberikan fasilitas kepabeanan dalam rangka penanganan pandemi COVID19 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang telah ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.04/2019 dan nomor 70/PMK.04/2012.
5. Fasilitas Kepabeanan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pada sektor kesehatan dan dunia usaha, dengan rincian selama periode April s.d. 31 Desember Tahun 2020 telah diberikan insentif kepabeanan dengan nilai realisasi fasilitas yang dimanfaatkan sebesar Rp 2.945.120.436.059 untuk penanganan di sektor kesehatan, dan sebesar Rp 91.076.746.670 untuk sektor dunia usaha.

SK No 095265 A

6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020.
7. Kami menyatakan bahwa laporan dan penyajian data yang kami berikan adalah berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami pada saat pemeriksaan. Penyusunan dan penyajian laporan tersebut disusun sebagai bentuk perumusan kebijakan yang memenuhi kaidah-kaidah yang baik dalam rangka pelaksanaan *good governance*.
8. Adapun pemberian fasilitas kepabeanan tersebut masih dapat dicabut/dibatalkan/ direvisi apabila berdasarkan hasil kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi, penelitian ulang ataupun audit menemukan bukti baru yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terlampir disampaikan Laporan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dalam rangka Penanggulangan COVID-19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR JENDERAL

Askolani

Tembusan :
1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191, SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 157 /PJ/2021 Jakarta, 20 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Surat Representasi Manajemen atas Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terdampak COVID-19 Tahun 2020

Kepada Yth.
Auditor Utama Keuangan Negara II
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
di- Jakarta

Bahwa pada Tahun 2020, sebagai bentuk respon adanya kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah perlu melakukan langkah *extraordinary* (luar biasa) secara cepat dan signifikan untuk menangani penyebaran COVID-19 dengan pengamanan di bidang kesehatan, upaya perlindungan dan pemulihan ekonomi serta sistem keuangan.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan insentif dan/atau fasilitas perpajakan terkait dampak pandemi COVID-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020. Kebijakan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaan di bawahnya antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-110/PMK.03/2020, PMK-28/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-143/PMK.03/2020, serta PMK-125/PMK.03/2020. Fasilitas yang diberikan yaitu insentif perpajakan pada sektor kesehatan dan dunia usaha. Selama periode April s.d. Desember Tahun 2020 telah diberikan insentif perpajakan dengan nilai realisasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp61,53 Triliun.

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terdampak COVID-19 Tahun 2020. Penyusunan dan penyajian laporan tersebut disusun sebagai bentuk perumusan kebijakan yang memenuhi kaidah-kaidah yang baik dalam rangka pelaksanaan *good governance*.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terdampak COVID-19, sebagai asersi final Direktorat Jenderal Pajak

Direktur Jenderal,

Suryo Utomo

Tembusan.
1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman